

## **PENGANTAR PROCEEDING**

Seminar Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mengambil Tema Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan, didasari kondisi objektif berbagai persoalan pendidikan yang semakin hari semakin kompleks dan menuntut pemecahan dan penyelenggaraan yang sistemik.

Beberapa isu pendidikan yang saling berkait dan strategik terutama menyangkut tenaga pendidik, pembiayaan, sarana dan infrastruktur, sistem evaluasi, dan yang tak kalah penting yang acapkali terlupakan adalah proses pendidikan itu sendiri.

Hal terakhir yang disebutkan menyangkut kompetensi tenaga pendidik yang harus dikembangkan secara berlanjutan mulai dari rekrutmen sampai pensiun. Ini terkait dengan bagaimana guru dididik dan dikembangkan profesionalnya.

Semua hal yang disebutkan perlu diorganisasikan ke dalam sistem manajemen nasional pendidikan yang efektif.

Seminar ini diharapkan dapat mengorganisasikan pemikiran secara utuh yang melahirkan alternatif solusi dalam sebuah Re-Desain.

Jakarta, 20 Januari 2012

Ketua Umum PP ISPI

Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd

Proseding

## PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka proseding ini dapat diselesaikan dengan baik. Proseding ini berisi kumpulan makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) tanggal 21-22 Januari 2012 di Yogyakarta..

Seminar nasional ini diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Tema yang diangkat dalam seminar adalah Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan.

Tema pokok tersebut kemudian dijabarkan ke dalam subtema, yaitu (1) Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (2) Redesain Sistem Pendidikan Guru dan Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (3) Redesain Sistem Kurikulum (SKL, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian), (4) Sistem Pendanaan Pendidikan (5) Sarana dan Prasarana Pendidikan, (6) Evaluasi Sistem Pendidikan.

Tema tersebut bertolak dari isu-isu penting yang muncul dalam dunia pendidikan. Renstra Depdiknas, misalnya, mengemukakan tiga hal yang menjadi pilar pendidikan, yaitu (1) Pemerataan dan perluasan akses, (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, (3) Penguatan tata kelola (*governance*), akuntabilitas dan pencitraan publik. Idealnya keseluruhan upaya dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu dilaksanakan dalam konteks NKRI dengan menerapkan konsep desentralisasi pendidikan.

Sementara itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai imperatif yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum, seperti yang menyangkut badan hukum pendidikan, dan gaji guru yang masuk dalam perhitungan 20% biaya pendidikan. Dalam konteks seperti itu muncul pendapat tentang perlunya melakukan redesign terhadap sistem dan desentralisasi pendidikan.

Dalam realitasnya dampak-dampak politis sangat deras merambah dunia pendidikan. Kebijakan dinilai sebagian orang bersifat sporadis, koordinasi kurang efektif, dan terjadi ketakkonsistenan dan ketakkoherenan sistem dan desentralisasi pendidikan. Semua itu berdampak luas terhadap perwujudan sistem pendidikan sebagai bagian integral dari keseluruhan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembicara kunci dalam seminar ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Prof. Dr. Mohammad Nuh. Pembicara-pembicara lain adalah para pakar tingkat nasional bidang pendidikan yang sudah banyak makan garam. Pada umumnya mereka adalah pejabat atau mantan pejabat dalam lembaga kependidikan. Pemikiran dan pengalaman mereka dituangkan dalam bentuk makalah sebagai sumbangsih dalam rangka redesign sistem pendidikan di negara kita.

Akhinrya, panitia menyampaikan terima kasih kepada nara sumber yang telah memberikan kontribusinya berupa pemikiran dan pengalaman dalam bentuk makalah. Semoga pemikiran-pemikiran itu dapat dibaca dan direnungkan untuk kemudian digunakan sebagai acuan untuk membuat desain sistem pendidikan yang lebih baik. Selamat membaca.

## DAFTAR ISI

Halaman

1 KATA PENGANTAR KETUA ISPI

2 PENDAHULUAN

3 DAFTAR ISI

I

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
*Oleh: Prof. Soedijarto, MA*

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
*Oleh: Prof. Dr. Fakry Gafar, M.Ed*

Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
*Oleh: Prof. Dr. Agus Dwiyanto*

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 di Sekolah sebagai Sarana Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan. *Oleh: Mulyono, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*

Optimalisasi Desentralisasi Pendidikan (Model *Integrative RegMap-Regulatory Impact Assesment* (IRR) Pembentukan Perda Pendidikan yang Berbasis Pendidikan Berkarakter Kearifan Nilai Lokal). *Oleh: Rodyah, UNNES Semarang*

Redesain Pendidikan Kejuruan di Indonesia sebagai suatu Wacana Ke Depan. *Oleh: Badraningsih Lestari, FT UNY*

Redesain Sistem Pendidikan Kewirausahaan Di Sekolah Menengah Kejuruan: Alternatif Pengentasan Pengangguran Di Indonesia. *Oleh: Nuryadin Eko Raharjo, FT UNY*

Rekonstruksi Pendidikan dan Penguatan Modal Sosial. *Oleh: Siti Irene Astuti D, FIP UNY*

Isu-Isu Strategis Desentralisasi Pendidikan Kejuruan Indonesia. *Oleh: Dr. Putu Sudira, M.P. FT UNY*

II

Redesain Sistem Pendidikan dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *Oleh: Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd, Rektor UPI Bandung*

Redesain Sistem Pendidikan dan Manajemen Pendidik dan Tenaga

Kependidikan. *Oleh: Prof. Dr. Muchlas Samani, Rektor UNESA Surabaya*  
Redesain Sistem Pendidikan Guru dan Sistem Manajemen Pendidikan. *Oleh: Prof. Dr. Noeng Muhadjir*

Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor. *Oleh: Dr. Muh Farozin, FIP UNY*

Masa Depan Profesi Guru dalam Bingkai Sentralisasi Pendidikan (Kajian terhadap Praktik Pengembangan Profesi Guru di Daerah Pasca berlakunya UU No. 14 tentang Guru dan Dosen Tahun 2005). *Oleh: Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd, UPI Bandung*

Studi Orientasi Tugas Pengawas dan Kepala Sekolah (Suatu Gagasan Melakukan Revitalisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan Kepengawasan Pendidikan di Era Desentralisasi Pendidikan). *Oleh: Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M. Pd Universitas Negeri Gorontalo*

Kontra-Profesional dalam Pengadaan dan Pemberdayaan Guru. *Oleh: Udik Budi Wibowo, FIP UNY*

Memulihkan Kesemrawutan dalam Praktik Pendidikan di Sekolah. *Oleh: Abdullah Pandang, FIP UNM*

Redesign Pendidikan Calon Guru untuk Mendukung Implementasi Pendidikan Inklusif. *Oleh: Pujaningsih M.Pd, FIP UNY*

Penguatan Fungsi Pengawas Sekolah dalam Kerangka Perbaikan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Oleh: Rahmania Utari, M.Pd, FIP UNY*

Model Hipotetik Jalur Karier Lulusan Program Studi S1 Administrasi/ Manajemen Pendidikan Sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Berbagai Jenis Lembaga Pendidikan. *Oleh: Priadi Surya, M.Pd, FIP UNY*

Redesain Sistem Pendidikan Guru Di LPTK Perguruan Tinggi Muhammadiyah. *Oleh: M. Joko Susilo, M.Pd; Nani Aprilia, M.Pd; dan Nur Hidayah, M.Pd, UAD Yogyakarta*

Peran Guru dan Pendidikan Guru Masa Depan. *Oleh: Bambang Setiyo Hari Purwoko, FT UNY*

Guru Profesional Dan Relevansi Pendidikan. *Oleh: Taty Fauzi dan Mardiana*

Penambahan Program Wajib Kokurikuler Sebagai Redesain Sistem Pendidikan Guru. *Oleh: Hermanto, FIP UNY*

Model Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Melalui Pembelajaran Berbasis Kerja (*Work-Based Learning*). *Oleh: Budi Tri Siswanto, FT UNY*

### III

*Entrepreneurship Hidden Curriculum (EHC): Model Kurikulum Bernuansa Kewirausahaan di Perguruan Tinggi. Oleh: Bayu Dwi Nurwicaksono, UNESA Surabaya*

Redesain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Era Kemanusiaan Universal. *Oleh: Anik Ghufron, FIP UNY*

Kaji Ulang Standar Kompetensi Lulusan dalam Konteks Redesain Sistem Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Oleh: Dr. Mukminan, FIS UNY*

Analisis Pelaksanaan Proses Pendidikan di Indonesia. *Oleh: Makmuri, FMIPA UNJ Jakarta*

Redesain Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar (SK Dan KD) IPA Terpadu SMP/MTs. *Oleh: Ayu Rahayu, Ulfiana Prisdiansari, Elsa Yulianingsih, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta*

Redesain Kurikulum Pendidikan Kejuruan. *Oleh: Prof. Dr. H. Mukhidin, M.Pd. dkk*

Pengembangan Kerangka Evaluasi Implementasi Kurikulum Berbasis Standar Dalam Pendidikan Kejuruan. *Oleh: Dedy Suryadi, M.Pd. dan Drs. Sukadi, M.Pd.,MT. FPTK UPI Bandung*

Analysis Situasi Pendidikan Bahasa Inggris Kejuruan Di SMK. *Oleh: Estu Widodo*

Redesain Sistem Pembelajaran Pada Sekolah Berstandar Internasional. *Oleh: Triwati Rahayu, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*

Evaluasi Integrasi Soft Skills Dalam Kurikulum Pendidikan Kejuruan: Ukuran Hasil Belajar Sebagai Indikator Keberhasilan Pengembangan Profesional. *Oleh: Sri Wening, FT UNY*

Pembangunan Karakter dalam Pembelajaran. *Oleh: Prof. Dr. Belferik Manullang*

Redesain sistem Kurikulum Pembelajaran Bahasa Inggris Calon Guru SD/AUD Berbasis Communicative Competence. *Oleh: Dr. Ali Mustadi, M.Pd. FBS UNY*

Redesain Kurikulum S<sub>1</sub> Pendidikan IPA Menuju Standards For Secondary Science Teacher Preparation. *Oleh: Insih Wilujeng, FMIPA UNY*

Urgensi Integrasi Standar Kompetensi Lulusan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Oleh: Anas Arfandi, FT UNM*

Rekonstruksi Pembelajaran Berbasis Metode Socratic (Strategi untuk Mengoptimalkan Hasil Belajar Siswa dan Meningkatkan Kemampuan Belajar Guru. **Oleh: Nandang Rusmana**

Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pembelajaran Melalui Peran Teknologi Pendidikan Dalam Pembelajaran Berbasis Kompetensi–SCL. **Oleh: Dr. R. Mursid, M.Pd. UNIMED Medan**

Teknik Latihan Keterampilan Dasar Konseling Individual (Studi Eksperimen untuk Menguji Efektivitas Teknik *Microcounseling*, *Interpersonal Process Recall* (IPR) dan *Didactic Experiential* (DE) dalam Melatihkan Keterampilan Dasar Konseling Individual terhadap Mahasiswa Jurusan PPB Angkatan 2007). **Oleh: Anne Hafina A, FIP UPI Bandung**

Redesain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Telaah terhadap Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian). **Oleh: Syukri Fathudin Achmad Widodo, FT UNY**

#### IV

Sistem Pendanaan Pendidikan. **Oleh: Dr. Abbas Gozali, MA**

Sistem Pendanaan Pendidikan. **Oleh: Prof. Dr. Aris Munandar**

Formula Sistem Pendanaan Sekolah yang Berkeadilan. **Oleh: Prof. Muljani A Nurhadi. M.Ed., M.S., P.hD, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta**

Meningkatkan partisipasi Orang Tua dalam pembiayaan pendidikan pada jenjang SMP (Studi di kawasan pedesaan di Kota Semarang). **Oleh: Imam Tadjri. FIP UNNES Semarang.**

#### V

Sarana dan Prasarana Pendidikan. **Oleh: Prof. Dr. Bedjo Sujanto, Rektor UNJ Jakarta**

Sarana dan Prasarana Pendidikan. **Oleh: Dr. Gatot Hary Priowiryanto**

Strategi Penyebaran Konten Pendidikan Berbasis *Digital Video Broadcasting via Satellite* untuk Wilayah Tak terjangkau Internet. **Oleh: Drs. Jaslin Ikhsan, M.App.Sc., Ph.D. FMIPA UNY dan Hafid Setyo Hadi, ST, Manajer IT-Network SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC), Jakarta**

Profil Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bali. **Oleh: Made Agus Dharmadi, S.Pd., M.Pd. FOK Undhiksa Singaraja Bali**

Stadion Maguwoharjo Sebagai Sarana Prasarana Olahraga, Rekreasi, dan Bisnis Di Kabupaten Sleman. **Oleh: Sulistiyono, FIK UNY**

VI

Evaluasi Sistem Pendidikan. **Oleh: Prof. Furqon, M.Pd., M.A., P.hD**

Sistem Penilaian Hasil Belajar ABK dalam Implementasi Pendidikan Setting Inklusi. **Oleh: Sukinah FIP UNY**

Perkembangan Kualitas Pendidikan di Indonesia: Analisis The Global Competitiveness Report. **Oleh: Florentinus Nugroho Hardianto, Harapan Bangsa Business School, Bandung**

Uji Kompetensi Seleksi Guru Berbasis Bidang Studi sebagai Instrumen Danda dalam Pengembangan Profesionalitas Guru. **Oleh: Udi Utomo, UNNES Semarang**

Penilaian Kinerja Guru dan Uji Konsistensi Antar Penilai. **Oleh: Faridl Musyadad, Mahasiswa PPs UNY**

Model Butir Bersama pada Ujian Akhir Daerah untuk Memantau Kualitas Pendidikan di Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi. **Oleh: Dr. Heri Retnawati, FMIPA UNY**

Pengembangan Model Asesmen (Evaluasi) Berorientasi Karir Di Sekolah Menengah Kejuruan. **Oleh: Wahid Munawar, UPI Bandung**

Kedudukan bimbingan dan konseling dalam redesain sistem pendidikan guru. **Oleh : Eka Wahyuni, S. Pd., MAAPD,**

Implementasi kompetensi komputer grafis dan surveying pada tugas jalan raya I Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa jpts. **Oleh : Iskandar Muda Purwaamijaya, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung**

Membumikan ayat-ayat manajemen Menuju kemandirian satuan pendidikan. **Oleh : Nur Aedi, Dr, M.PD**

Pengembangan evaluasi lahan menggunakan autodeskmap untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa jpts fptk upi pada teknik penyehatan. **Oleh : Rina Marina Masri**

# **DESAIN MANAJEMEN MENGUSAHAKAN DAN MENYELENGGARAKAN SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SESUAI DENGAN UUD 1945**<sup>1</sup>

Oleh,

Prof. Dr. H. Soedijarto, MA

## **I. Pendahuluan**

Sengaja penulis mengubah judul yang diminta panitia yaitu “Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan”, karena para pendiri republik merancang diselenggarakannya “satu sistem pengajaran nasional” (setelah amandemen ke-4 UUD 1945 menjadi “sistem pendidikan nasional”) jadi yang nasional itu sistem pendidikannya, tidak lain karena pendiri republik sadar bahwa Negara bangsa Indonesia yang dirancang dan diwujudkan setelah proklamasi adalah wujud sistem kenegaraan yang belum pernah ada di bumi nusantara dan belum pernah dialami bahkan oleh para perumusny sendiri

UUD 1945 yang menggariskan sistem kenegaraan yaitu Negara kebangsaan, bukan Negara suku seperti Negara Balkan atau Negara Agama seperti Iran dan bukan Negara Ras (seperti Israel), yang berbentuk republik yang demokratis yang berkeadilan sosial dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, atau Negara Pancasila, adalah suatu sistem kenegaraan yang belum pernah ada di bumi nusantara. Hakekatnya para pendiri republik tidak kalah imajinatifnya dengan para pendiri Negara Amerika Serikat yang merancang Negara Republik, yang sejak Republik Athena belum ada dalam sejarah peradaban dunia, apa lagi yang memiliki UUD, tetapi berkat dukungan sistem pendidikannya akhirnya Amerika Serikat menjadi Negara bangsa yang maju dan bermartabat.

Atas dasar itu nampaknya para pendiri republik sadar bahwa agar Negara Pancasila itu dapat terwujud di bumi nusantara, di tetapkanlah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu misi penyelenggaraan Pemerintah Negara, dan menetapkan diusahakan dan diselenggarakannya “satu sistem pengajaran nasional” (sistem persekolahan) serta memajukan kebudayaan nasional sebagai kewajiban pemerintah merupakan bukti betapa

---

<sup>1</sup> Disajikan dalam Seminar Nasional dengan tema Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan. Diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta, 21 Januari 2012



para pendiri republik seperti Thomas Jefferson (A.S), Otto Von Bismarck (Jerman), dan Meiji (Jepang), menganut paradigma “Build Nation Build School”.

Pertanyaannya “bagaimana sistem pendidikan nasional yang dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional di manaj (dirancang, diorganisasikan, dimonitor, dan dipimpin?)

Sebelum menjawab pertanyaan utama ini tulisan ini akan mengulas “wujud Negara Pancasila yang dirancang pendiri republik”, selanjutnya makna mencerdaskan kehidupan bangsa, serta landasan konstitusional penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional.

## **II. Wujud Negara Pancasila yang Dirancang oleh Pendiri Republik**

Menurut kesaksian Bung Hatta, panitia Sembilan merumuskan Pembukaan UUD 1945 sebagai deklarasi kemerdekaan yang secara garis besar merumuskan wujud Negara Pancasila, acuannya adalah Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Karena itu dalam memberikan makna Pancasila, penulis tidak berangkat dari rumusan P4 tetapi dari pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 yang terkenal dengan “Lahirnya Pancasila”.

Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945<sup>2</sup>, menurut hemat saya, bukan hanya memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, melainkan sebagai ideologi negara mengandung konsepsi wujud bangunan negara Indonesia yang hendak dikembangkan di atas landasan Pancasila. Atau dengan kata lain, Pancasila yang digariskan Bung Karno dalam Pidato 1 Juni 1945 bukan semata-mata rumusan lima sila yang oleh sementara orang sering dianggap terlalu abstrak, melainkan juga suatu gambaran wujud negara Indonesia merdeka. Atas dasar pemahaman penulis ini, penulis berpendapat bahwa agar kita dapat memahami Pancasila sebagai ideologi negara, kita perlu terlebih dulu memahami wujud bangunan negara yang dicita-citakan Bung Karno tersebut.

Dari Pidato Lahirnya Pancasila, struktur wujud bangunan negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan Bung Karno pada hakekatnya bercirikan lima karakteristik sebagai berikut:

*Pertama*, Negara Indonesia yang merdeka adalah negara kebangsaan (*Nation State*) – suatu negara yang mengatasi batas-batas ras dan agama yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Wujud negara kebangsaan yang digariskan oleh Bung

---

<sup>2</sup> Bung Karno. Lahirnya Pancasila (1947). Jakarta Departemen Penerangan RI

Karno memang pernah ada pada jaman Sriwijaya dan Majapahit, tetapi wujud negara kebangsaan modern yang dicita-citakan Bung Karno belum pernah ada sebelum Indonesia merdeka. Negara kebangsaan modern yang dicita-citakan Bung Karno adalah negara yang didukung oleh seluruh rakyat yang memiliki satu tujuan yang sama, pengalaman kolektif sejarah yang sama dan yang berada dalam satuan gugusan wilayah yang secara geopolitik sangat strategis. Terancamnya integrasi nasional, baik secara sosial, politik dan teritorial yang kita hadapi pada saat ini, tidak lain karena banyak pemimpin melupakan hakekat negara Republik Indonesia sebagai negara kebangsaan yang masih perlu diwujudkan dan dipertahankan sebagai cita-cita, serta dibangun dan dikembangkan untuk menjadi negara kebangsaan modern yang kokoh, stabil, cerdas, dan bermartabat. Untuk itulah perlu dipertahankan bentuk negara kesatuan, untuk itu pulalah perlu dilaksanakan dan diselenggarakannya satu sistem pendidikan nasional dan perlu terus dimajukannya kebudayaan nasional.

*Kedua,* Negara kebangsaan yang dicita-citakan Bung Karno adalah negara kebangsaan yang demokratis. Tetapi demokrasi yang dibangun bukanlah demokrasi gaya Yunani Kuno, melainkan demokrasi perwakilan yang mengutamakan permusyawaratan perwakilan untuk mencari konsensus. Bukan demokrasi liberal yang berdasarkan filosofi *free-fight liberalism* yang semangatnya adalah untuk mengalahkan lawan politik dan merebut kekuasaan, dan melainkan semangat menemukan konsensus nasional untuk keutuhan bangsa, dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam Pidato Lahirnya Pancasila Bung Karno menyatakan:

*"Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terufama yang Islam, setujuilah prinsip nomor tiga ini, yaitu prinsip permusyawaratan perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah candradimuka, katau tidak ada perjuangan paham di dalamnya."*

Jelaslah kiranya bahwa Bung Karno mencita-citakan negara kebangsaan yang demokratis. Tetapi, demokrasi yang diusulkan adalah demokrasi perwakilan. Bahkan beliau memandang bahwa sebagai pengejawantahan adanya demokrasi dalam badan perwakilan itu akan selalu terjadi perjuangan yang hebat, tetapi perjuangan itu untuk mencapai yang terbaik

untuk kepentingan rakyat seluruhnya, untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Bila kita kaitkan ajaran ini dengan situasi sekarang, tampak jelas betapa perdebatan yang sengit yang terjadi di DPR adalah sesuatu yang wajar sepanjang semangatnya bukan semata-mata untuk mengalahkan dan mengambil alih kekuasaan demi kepentingan golongan. Dan karena kita menganut demokrasi perwakilan seyogyanya rakyat pemilih mempercayakan sepenuhnya kepada para wakil rakyat yang telah terpilih untuk memperjuangkan cita-cita rakyat secara bijaksana, dan tidak perlu memberi tekanan terlalu berat sehingga hasil yang dicapai bukan demi hikmah kebijaksanaan melainkan dapat hanya memenuhi tekanan yang mengancam yang menakutkan, yang belum tentu memiliki arti strategis jangka panjang bagi kepentingan nasional.

Ketiga, Negara kebangsaan yang demokratis yang dicita-citakan Bung Karno juga bukan negara yang menganut *free-fight liberalism* dalam sistem ekonominya, melainkan negara kebangsaan yang demokratis dan bercita-cita terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sosio demokrasi. Karakteristik yang ketiga ini yaitu yang hakekatnya adalah negara kesejahteraan seperti yang dijanjikan dalam kalimat akhir Pembukaan UUD1945, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pasal-pasal 27 dan 33 UUD 1945, nampaknya selama ini tidak sepenuhnya dijadikan landasan untuk membangun satu sistem ekonomi nasional. Disadari sikap anti kapitalisme yang dianut kaum sosialis yang berakar kepada pengalaman praktek kapitalisme abad ke-18 dan 19 yang merupakan induk imperialisme tidak dapat serta merta dipertahankan. Perkembangan kapitalisme global yang telah menguasai sepenuhnya kehidupan dan tata hubungan ekonomi dan politik dunia tidak dapat dilawan dengan sikap anti kapitalisme gaya kaum sosialis dan komunis pada era Pra-Perang Dunia II, melainkan perlu dihadapi dengan mengembangkan sistem ekonomi nasional yang benar-benar kokoh dan kenyal yang dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, dikembangkannya satu sistem ekonomi nasional sebagai jalan ketiga yaitu dengan memajukan semua kegiatan ekonomi, baik ekonomi dengan kapital besar, menengah dan kecil, industri besar dengan teknologi mutakhir dan industri kecil serta industri rumah tangga, secara sinergis saling bergantung satu sama lain. Bukan suatu kondisi ekonomi majemuk, yaitu suatu keadaan dimana kaum kapital besar dan industri besar, menengah, kecil dan kerakyatan masing-masing tidak saling bergantung, dimana yang menjadi korban adalah kegiatan ekonomi

rakyat yang selalu menjadi konsumen ekonomi kapital besar tetapi produksinya tidak menyentuh dan tidak tersalur ke dimensi ekonomi berkapital besar. Tanpa menata suatu sistem ekonomi yang demikian sukar diharapkan bahwa cita-cita Bung Karno untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan dapat tercapai.

*Empat*, Sejak dini, bahkan sebelum menyajikan Pidato lahirnya Pancasila, Bung Karno telah berulang kali mengemukakan pentingnya hubungan internasional yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi. Pandangan ini dipertegas dalam Pidato Lahirnya Pancasila dengan menyatakan "Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme", karena karakter keempat dari wujud negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan Bung Karno adalah negara yang mencintai perdamaian, yang ikut serta dalam membangun ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Bukan suatu tatanan dunia yang aturannya didikte negara-negara maju, seperti yang kita alami sekarang ini.

*Lima*, Bung Karno sadar bahwa keberhasilan kita membangun negara kebangsaan yang demokratis, yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mampu secara aktif ikut serta menciptakan ketertiban dunia akan ditentukan oleh ridho Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, ciri khas kelima dari negara kebangsaan Indonesia yang modern adalah bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentang wujud dari negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Bung Karno menyatakan:

*"Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Almasih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita ber-Tuhan, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan-Nya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berbudaya, yakni yang tidak ada egoisme agama".*

Selanjutnya, Bung Karno secara lebih tersurat menyatakan:

*"Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad SAW telah memberikan bukti yang cukup tentang*

*verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan : bahwa prinsip kelima dari negara kita ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang menghormati satu sama lain".*

Saya berpandangan bahwa Pancasila yang tertuang dalam Pidato Lahirnya Pancasila bukan hanya rumusan dasar negara, melainkan sekaligus menggambarkan kerangka dari wujud karakteristik dari kerangka bangunan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Dewasa ini nampaknya ajaran yang telah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 ini kurang dipahami bahkan sering hanya dijadikan bumbu retorika politik atau dalam kalimat Prof Kunto Wibisono (23 Mei 2001), "sebagai rangkaian terminologi dan phraseologi yang bobot dan tekanannya lebih diarahkan sebagai media politik," tanpa benar-benar didalami untuk dapat menterjemahkannya dalam hukum dasar, dan berbagai ketentuan penyelenggaraan negara bangsa di segala bidang kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia. Hal ini benar-benar saya rasakan dalam Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang membahas Amandemen UUD 1945.

Kerangka bangunan negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan Bung Karno, menurut pandangan saya, hakekatnya adalah negara kebangsaan modern yang demokratis, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan berkeadilan sosial, yang menjunjung tinggi HAM dan perdamaian dunia serta yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Kerangka dasar bangunan negara ini pada tahun 1945 barulah merupakan cita-cita yang harus diisi dengan kelembagaan dan infrastruktur serta manusianya. Untuk itu perlu ditempuh suatu perubahan radikal (revolusioner) dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia, dari masyarakat yang berbhinneka ketunggal ika, dan masyarakat tradisional dan feodal menuju masyarakat yang modern dan demokratis. Untuk itu Bung Karno secara sadar mengajarkan kepada kita bahwa kita menghadapi "*a summing-up of many revolutions in one generation.*" Ini bermakna bahwa perubahan dan pembaharuan yang perlu kita lakukan meliputi hampir semua dimensi kehidupan masyarakat negara bangsa, sosial, budaya, ekonomi, politik dan iptek. Dalam kaitan inilah kita memandang berbagai kelembagaan politik, sosial, budaya, ekonomi dan manusianya perlu secara sinergik dan sistemik ditata dan dikembangkan untuk mengisi kerangka bangunan negara Indonesia merdeka yang dirancang oleh Bung Karno seperti

digariskan dalam Pidato 1 Juni 1945 yang hari ini kita peringati.

Kalau kita amati perjalanan Indonesia sejak proklamasi sampai sekarang kita menyaksikan betapa kita di bidang politik telah mencoba-coba menganut sistem dan struktur politik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kerangka bangunan negara bangsa yang dicita-citakan Bung Karno. Sejak November 1945 sampai dengan 5 Juli 1959 kita menganut sistem multi partai dan sistem parlementer yang hakekatnya menjiplak sistem politik negeri Belanda. Dalam bahasanya Verba (*Civic culture*), suatu sistem politik yang tidak "congruent" dengan budaya politik masyarakat. Sejak 5 Juli 1959 sampai 1966, kita menganut sistem demokrasi terpimpin, dan dari tahun 1966 sampai tahun 1998 kita menganut sistem politik yang sangat terpimpin dengan pembatasan jumlah organisasi sosial politik. Sejak 1998 semua pemimpin berjanji untuk mempertahankan Pembukaan UUD 1945 yang hakekatnya merupakan intisari ajaran Bung Karno yang tertuang dalam Pidato Lahirnya Pancasila, tentang kerangka wujud negara Indonesia merdeka. Namun, kalau kita ikuti secara cermat para elit dan pemikir politik yang menguasai media massa dan wacana politik nampak tidak memahami hakekat ajaran yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Tidak konsistennya pola pikir sementara pemimpin politik dan pakar Ilmu politik dan hukum dengan cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini, menurut hemat saya, merupakan akar dari kemelut politik dan sukarnya membangun sistem politik yang stabil. Untuk itu, adalah tanggung jawab kita semua, terutama yang bertanggung jawab bagi terselenggaranya pendidikan nasional untuk secara sistematis merancang dan menyelenggarakan pendidikan nasional sebagai wahana proses transformasi budaya menuju berkembangnya budaya politik yang berakar kepada cita-cita negara Pancasila yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Tidak diterjemahkannya secara sungguh-sungguh cita-cita negara Pancasila yang diajarkan Bung Karno juga dapat diperhatikan dalam pengembangan sistem ekonomi. Dengan dalih globalisasi, pembangunan sistem ekonomi kita nampak tidak memperhatikan kaidah dasar bagi terwujudnya negara kesejahteraan sebagai yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945. Trilogi Pembangunan yang ditempuh selama Orde Baru, dimensi pemerataannya tidak lebih dari upaya pemberian bagian dari hasil pembangunan, tetapi bukan upaya memberdayakan ekonomi rakyat untuk menjadi bagian dari satu kesatuan sistem ekonomi nasional. Nampaknya semangat ini belum

berubah sampai sekarang. Dengan diadopsinya sistem ekonomi pasar bebas, nasib Indonesia sama dengan nasib rakyat marhaen (petani kecil, pedagang kecil, pengusaha kecil, dan pekerja / karyawan yang berpenghasilan tetap), yaitu tetap sebagai kaum pinggiran yang selalu terkena dampak gejolak ekonomi. Upaya untuk secara sungguh-sungguh meningkatkan kemampuan manusia Indonesia dalam proses pembangunan ekonomi modern, seperti kemampuan mengolah dan mengelola sumber daya alam, kemampuan mengembangkan teknologi, kemampuan menghasilkan produk yang bermutu (pertanian, manufaktur atau kerajinan), kemampuan mengelola modal secara efisien, dan kemampuan berdagang secara kompetitif sebagai basis bagi pembangunan ekonomi nasional yang kenyal terhadap goncangan dan yang terintegrasi sebagai suatu sistem ekonomi sama sekali tidak dilaksanakan.

Salah satu faktor penyebab terpuruknya kehidupan politik dan ekonomi, yang bertolak belakang dengan cita-cita negara yang digariskan Bung Karno adalah diabaikannya upaya menjadikan pendidikan nasional sebagai wahana untuk menunjang terjadinya transformasi budaya menuju tegaknya negara kebangsaan yang ber peradaban tinggi.

### **III. Makna Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Sebagai Sasaran Penyelenggaraan Satu Sistem Pendidikan Nasional**

Sering orang memaknai amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa” sama dengan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan apapun mutu pendidikannya. Karena itu kesempatan memperoleh pendidikan diperluas. Tetapi kenyataannya walaupun kesempatan memperoleh pendidikan pada tingkatan SD sudah berada diatas 96 % dan SMP di atas 70 %, serta Perguruan Tinggi diatas 10 %, tetapi kehidupan bangsa yang cerdas belum atau masih jauh dari terwujud. Hal ini disebabkan karena lembaga pendidikan kita dari SD sampai Perguruan Tinggi hanyalah berupa gedung sekolah, tanpa peralatan, tanpa buku, tanpa lapangan olah raga dengan guru yang kurang terjamin kesejahteraannya. Penelitian UNESCO pada tahun 1996 menemukan bahwa mutu pendidikan semacam ini, yang pada umumnya terdapat dinegara berkembang bukan hanya tidak bermakna bagi pencerdasan kehidupan bangsa tetapi sebaliknya akan melahirkan masalah baru bagi bangsa tersebut.

Penulis berpandangan bahwa tanpa memahami latar belakang sejarah Indonesia dan perkembangan sejarah peradaban dunia yang sejak “Renaissance” melalui industrialisasi terus melaju menjadi peradaban moderen, kita akan sukar memahami pesan yang terkandung

dalam kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pada saat dunia Barat sejak abad ke-17 melalui Renaissance dan industrialisasi mendorong lahirnya negara-negara kebangsaan, dan pada pertengahan abad ke-20 setelah melalui dua perang dunia peradaban dunia didominasi oleh nilai-nilai budaya Barat baik politik, ekonomi, dan IPTEK, yang kemudian menjadi nilai-nilai peradaban moderen. Indonesia sebaliknya sejak abad ke-17 mulai secara bertahap berada dibawah kekuasaan penjajah dan mulai permulaan abad ke-20 sepenuhnya dibawah kekuasaan penjajah. Secara kultural penghuni Nusantara tetap berada dalam kehidupan tradisional dan tidak tersentuh oleh peradaban moderen yang rasional, demokratik, dan berorientasi IPTEK. Dalam perspektif ini pada tahun 1945 Indonesia tertinggal sekitar 400 tahun. Karena itu makna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pandangan penulis hakekatnya adalah gerakan mentransformasi budaya Indonesia dari tradisional dan feodalistik menjadi budaya moderen, rasional, demokratis, dan berorientasi IPTEK.

Semangat “Ada Hari Ada Nasi”, “Kalau takut dilembur pasang jangan berumah ditepi pantai” dan “Ana Bapang den Simpangi (kalau ada hambatan/masalah dihindari)”, harus berubah menjadi “Rawe-rawe rantas, malang-malang putung” atau dalam bahasa Toynbee “*A problem is a challenge, and a challenge is chance for progress*”. Mengubah sikap hidup dari tradisional, irrasional, feodalistik, dan menerima nasib, menjadi manusia yang percaya diri dalam menghadapi tantangan memerlukan proses transformasi budaya atau dalam bahasa Bung Karno “our revolution is a summing up of many revolution in one generation”, suatu perubahan yang meliputi berbagai dimensi kehidupan baik politik, ekonomi, social budaya, dan IPTEK.

Dalam kaitan ini, semua Negara yang kemudian menjadi Negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, kemudian disusul oleh Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan China adalah Negara-negara yang memulai pembangunannya dengan mendudukkan sector pendidikan sebagai prioritas utamanya. Karena itu para pendiri Republik yang adalah cendekiawan terpelajar menetapkan kewajiban Pemerintah untuk “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional” atau sistem persekolahan, dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia (pasal 31 dan pasal 32 UUD 1945 sebelum diamandemen). Disayangkan bahwa lebih dari enam puluh tahun setelah UUD 1945 disyahkan oleh para pendiri Republik, amanat yang mewajibkan Pemerintah menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pengajaran nasional dan memajukan



kebudayaan nasional, terutama setelah lengsernya para pendiri Republik dari gelanggang penyelenggaraan pemerintahan Negara, diabaikan. Padahal melalui perubahan keempat UUD 1945 10 Agustus 2002, amanat tersebut dipertegas dan diperluas yaitu dengan menekankan : (1) kewajiban Pemerintah membiayai penyelenggaraan wajib belajar; (2) kewajiban Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % APBN dan APBD; dan (3) kewajiban Pemerintah untuk memajukan IPTEK<sup>3</sup>.

Para pendiri Republik yakin bahwa hanya melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui terselenggaranya satu sistem persekolahan nasional yang merata relevan dan bermutu upaya memajukan kesejahteraan umum melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia akan dapat terlaksana. Karena ketiga misi lainnya keterlaksanaannya akan tergantung pada kualitas sumber daya manusia, seperti kesimpulan Harbison dan Myers.

“Indeed, if a country is unable to develop it’s human resources, it can not build anything else, whether it be a modern political sistem a sense of national unity or prosperous economy”.<sup>4</sup>

Dan juga Bappenas.

“Indonesia needs to invest more in human development – not just to fulfil it’s people basic rights but also to lay the foundations for economic growth and to ersure the long term survival of it’s democrazy. This investment is substancial but clearly affordable”.<sup>5</sup>

Selanjutnya akan dianalisis pasal 31 UUD 1945 sebagai landasan strategis pengembangan sumber daya manusia.

#### **IV. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Pendidikan Nasional**

Berbagai Negara yang kini menjadi Negara maju, terutama yang memiliki filosofi kenegaraan yang tertuang dalam UUD-nya, yang mantap kehidupan politiknya adalah Negara yang sejak kemerdekaannya telah menempatkan pendidikan sebagai landasan bagi

---

<sup>3</sup> Sebagai perbandingan : komitmen pendidikan Malaysia 4 persen dari PDB, Thailand 4 persen dari PDB, Negara-negara Eropa rata-rata 5 persen dari PDB, AS hanya untuk perguruan tinggi saja 2,5 persen dari PDB, sementara anggaran pendidikan Indonesia dari SD sampai perguruan tinggi dan pendidikan luar sekolah hanya 1,3 persen dari PDB.

<sup>4</sup> Harbison, F & Myers, CA. Manpower and Education : Country Studies EC. Development. (1965). NY. Mcgraw Hiff Book Co.

<sup>5</sup> Bappenas, BPS, UNDP. The Economic of Democrazy : Financial Human Development in Indonesia. Indonesia Human Development Report 2004 (2004) Jakarta.

pembangunan Negara. Karena itu pula para pendiri Republik seperti yang telah disinggung yang menganut paradigm *“To build nation build schools”* menetapkan kewajiban *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional”* (pasal 31 ayat (2) sebelum amandemen; yang menjadi pasal 31 ayat (3) setelah amandemen).

Walaupun UUD 1945 yang dirumuskan oleh para Pendiri Republik telah menetapkan pemerintah bertanggung jawab *“mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”*, tetapi pada era Orde Baru pada saat pada Pendiri Republik tidak terlibat lagi dalam penyelenggara pemerintah Negara paradigm baru yang hakekatnya bertentangan dengan ideology Negara Pancasila yang adalah Negara kesejahteraan, yaitu menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Sejak saat itu mengikuti pendidikan dari SD sampai Pendidikan Tinggi harus membayar (SPP).

Kenyataan seperti ini yang telah mendorong MPR RI (1999-2004) melakukan amandemen terhadap pasal 31 agar lebih jelas makna yang tersirat, dari dua ayat menjadi lima ayat, seperti tertulis di bawah ini :

Sebelum Amandemen Pasal 31	Sesudah Amandemen Pasal 31
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.</li> <li>2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.</li> <li>2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.</li> <li>3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.</li> </ol>

	<p>4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.</p> <p>5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.</p>
--	---

Ketentuan yang tertulis pada ayat (2) yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar, pada ayat (4) yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan ketentuan ayat (5) yang mewajibkan pemerintah memajukan IPTEK, hakekatnya dirumuskan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara kesejahteraan. Karena di Negara kesejahteraan pendapatan Negara hanyalah unyuk membiayai: (1) Pendidikan; (2)Kesehatan; (3) Pertahanan Negara; (4) Administerasi Negara; (5) Infrastruktur dasar sektor lainnya adalah sumber berpendapatan Negara.<sup>6</sup> Karena itu di Eropa, terutama Jerman, Swedia, dan Finlandia, pendidikan dari SD sampai program Doktor tidak dipungut biaya.

Yang memprihatinkan adalah bahwa walaupun ketentuan pasal 31 diperjelas tetapi penyelenggara pemerintah Negara di Era Reformasi telah meneruskan paradig Orde Baru seperti tertulis dalam pasal :

- 1) Pasal 46 ayat (1)

---

<sup>6</sup> Dari Menteri Pendidikan Belanda pada saat penulis dan Prof. DR. Harsya Bachtiar (Alm) pada TA 1996 berkunjung ke Negeri Belanda. Pada saat itu anggaran pendidikan Belanda 37% APBN.

- “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat”
- 2) Pasal 6 ayat (2)  
“Setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”
  - 3) Pasal 7 ayat (2)  
“Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”
  - 4) Pasal 12 ayat (2)  
“Setiap peserta didik berkewajiban : ikut menanggung biaya biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan
  - 5) Pasal 49 ayat (3)  
“Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan yang dikutip diatas menunjukkan betapa UU No. 20 Tahun 2003 dalam pembiayaan pendidikan bertentangan dengan ketentuan pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Ketentuan yang tertulis dalam UU No. 20 Tahun 2003 tersebut yang nampaknya melatarbelakangi betapa penyelenggaraan pendidikan dasar tidak dibiayai sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (2) UUD 1945, dan hanya diberi bantuan (BOS). Dalam pandangan penulis ketentuan-ketentuan tersebut dan praktek tidak dibiayainya penyelenggaraan pendidikan dasar sepenuhnya tidak hanya bertentangan dengan pasal 31 ayat (2) UUD 1945, tetapi bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila. Di samping masalah yang terkait dengan wajib belajar penyelenggara pemerintah Negara melalui UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi juga wujud upaya pemerintah untuk secara syah tidak perlu membiayai perguruan tinggi negeri, padahal pasal 31 ayat (3) secara tegas menetapkan kewajiban pemerintah “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”, yang dalam priode pra-Orde Baru melalui UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ditegaskan

pemerintah membiayai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan memberi subsidi kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) <sup>7</sup>.

Dari serangkaian ulasan ini jelaslah bahwa sebagai Negara Pancasila, Negara kesejahteraan, dan pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) pemerintah berkewajiban membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional.

Seperti telah diulas pada bagian terdahulu bahwa Indonesia sebagai Negara Pancasila, di samping Negara kesejahteraan, adalah Negara kebangsaan, karena menganut sistem Negara kebangsaan. Para pendiri republik dalam UUD 1945 menegaskan perlunya “mencerdaskan kehidupan bangsa”, “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”, dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Namun disayangkan berbeda dengan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, UU No. 20 Tahun 2003 tidak memuat ketentuan tentang upaya membangun bangsa baik pada tujuan maupun isi pada rumusan tujuan pendidikan yang tertuang pada pasal 3, tujuan pendidikan yang lengkapnya tertulis :

“Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pertanyaannya bertanggung jawan kepada siapa tidak jelas, sedangkan UU No. 2 Tahun 1989 dalam rumusan tujuan tertulis pada pasal 4 pada ujung kalimat tertulis :

“.....Serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Konsekuensi dari rumusan tujuan yang tertulis dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, dalam pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 tentang kurikulum tidak ada kurikulum Bahasa Indonesia, adanya bahasa tidak ada kurikulum sejarah Indonesia. Disamping itu tidak ada kurikulum pendidikan Pancasila jadi berbeda dengan kurikulum yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 1989 yang dalam pasal 34 terdapat kurikulum : (1) Pendidikan Pancasila; (2) Bahasa Indonesia; (3) Sejarah Indonesia dan sejarah umum.

Disamping itu dalam UU No. 20 Tahun 2003 ada ketentuan yang mewajibkan Pemerintah dan/Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan sekolah bertaraf nasional pasal 50 ayat (3) suatu ketentuan yang secara

---

<sup>7</sup> Di Negeri Belanda sejak Tahun 1920 PTN dan PTS dibiayai pemerintah.

tersirat memandang bahwa yang nasional itu di bawah internasional, suatu sikap “inlander”. Penulis tidak menentang upaya agar mutu pendidikan nasional tidak kalah dengan mutu sekolah dimanapun juga, tidak lain karena kita sedang membangun Negara kebangsaan. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya ketentuan yang secara tidak langsung mengizinkan anak Indonesia di tanah airnya sendiri sekolah di sekolah asing, seperti tertulis dalam pasal 65 ayat (2) yang tertulis :

“Lembaga pendidikan asing pada tingkat dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga Negara Indonesia”.

Perlu diketahui semua Negara kebangsaan, berupaya agar warga negaranya di manapun juga memperoleh pendidikan, terutama pendidikan tingkat wajib belajar, nasional, dalam suasana Negara bangsanya. Karena itu kita mengenal American School, British School, dan Deutche Schule, dan Indonesia sejak era pendiri republik mengenal sekolah Indonesia di Negeri Belanda, di Mesir, di Jeddah, di Jepang, di Thailand, di Singapore, di Malaysia, di Cheko, dan di Rusia. Tidak lain karena setiap Negara kebangsaan menghendaki generasi mudanya menjadi warga bangsa yang patriotik dan berkualitas.

Setelah membahas implikasi Pancasila sebagai ideologi Negara terhadap penyelenggaraan pendidikan pada taraf makro, yaitu pembiayaan dan materi pendidikan. Selanjutnya akan dicoba diulas proses pendidikan sebagai upaya membangun bangsa.

Penulis berpandangan bahwa pendidikan nasional hakekatnya adalah pendidikan kewarganegaraan agar dilahirkan warga negara Indonesia yang berkualitas baik dalam disiplin, baik disiplin sosial maupun disiplin nasional, dalam etos kerja, dalam produktivitas kerja, dalam kemampuan intelektual, kemampuan profesional/atau vokasional, dalam rasa tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan dan kemanusiaan, serta dalam moral, karakter dan kepribadian. Manusia berkualitas seperti inilah yang diharapkan dihasilkan oleh proses pendidikan di sekolah.

Atas dasar persepsi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan manusia yang berkualitas seperti inilah, mengapa Senator John F Kennedy (1957) dan para Gubernur di Amerika Serikat memandang bahwa keberhasilan Amerika Serikat dalam persaingan global ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran di sekolah. Secara empirik dan teoretik,

sejak industrialisasi, sekolah adalah pendidikan nasional<sup>8</sup> difungsikan untuk mendukung dan membangun negara peradaban lewat sekolah.<sup>9</sup>

Pertanyaannya adalah “Sistem Pendidikan Nasional seperti apa yang dapat berfungsi menunjang Pembangunan Bangsa ?” Tulisan ini tidak bermaksud mengulas secara lengkap jawaban atas pertanyaan tersebut karena untuk itu ada artikel tersendiri yang telah ditulis<sup>6</sup>). Dalam pandangan penulis, yang menentukan kemampuan sistem pendidikan nasional suatu negara menghasilkan manusia berpendidikan yang mampu mendukung lahirnya negara bangsa yang kuat, disamping mutu proses pembelajarannya yang bermakna sebagai proses pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, dan sikap, adalah manajemen dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dari segi pembiayaan inilah saya akan menyoroti dampaknya kepada pembangunan loyalitas dan kebanggaan warga bangsa kepada negara bangsa.

Dalam hemat saya,tingginya loyalitas warga bangsa terhadap negara bangsanya antara lain ditentukan oleh kepedulian Pemerintah suatu negara kepada warga negaranya. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional hampir seluruh negara Eropa (Jerman, Perancis, Belanda, seluruh negara Skandinavia), pendidikan dari SD sampai Universitas dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah (Pusat dan Negara Bagian). Karena itu sudah sepatutnya setiap warga negaranya dapat merasakan bahwa mereka dapat menjadi tenaga ahli (profesional), teknisi andal dan lainnya karena dibiayai negara. Karena itu kita tidak heran bahwa kaum pekerja Jerman bersedia diperpanjang jam kerja dan dikurangi penghasilannya demi perbaikan ekonomi Jerman<sup>10</sup>. Dan tidak heran pula kalau seorang Presiden Jerman Von Weisaker (1980-an) atas himbauannya dalam satu hari dapat menghimpun dana untuk membantu kelaparan di Ethiopia sebanyak 150 juta US dolar.

Di Amerika Serikat walaupun mulai pertengahan tahun 1980-an untuk memasuki Universitas Negeri sudah mulai membayar, wajib belajar 12 tahun tetap dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah (Federal dan Negara Bagian), dan Pemerintah Federal tetap menyediakan dana 100 milyar US dollar untuk memberi beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga

---

<sup>8</sup> John Dewey, “Democracy and Education, (1964) New York, The Mac Millan Co.

<sup>9</sup> Yehudi Cohen : “Schools and Civilizational State” dalam buku J Fischer, “The Social Sciences and The Comparative Study of Educational Sistem” (1969)

<sup>10</sup> Germany’s Surprising Economy” dalam majalah The Economist, August 20, 2005, page 9.

berpenghasilan rendah<sup>11</sup>. Model pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nasional seperti inilah dalam pemahaman saya, merupakan salah satu faktor yang menentukan rasa kebangsaan, kebanggaan sebagai warga suatu bangsa, dan loyalitas terhadap negara bangsa. Karena itu kita menyaksikan betapa bersatunya rakyat Amerika Serikat pada saat menghadapi krisis, baik Perang Dunia II, September 11, dan Hurricane Katrina.

Dipandang dari sisi ini UUD 1945 sesungguhnya berkehendak menyelenggarakan pendidikan nasional seperti yang dilaksanakan negara bangsa yang lain. Tetapi akhir-akhir ini walaupun pasal-pasal UUD 1945 telah mempertegas tanggung jawab Pemerintah untuk membiayai pendidikan tetapi praktek penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi semakin jauh dari semangat dan aksara yang digariskan dalam UUD 1945. Karena itu kita tidak usah heran kalau para sarjana yang selama sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi dibiayai oleh orang tua tidak merasakan jasa Pemerintah.

Mereka menggunakan paradigma “*rate of return*”. Jadi investasi yang telah ditanam oleh orang tua selama sekolah harus kembali, akibatnya generasi muda menjadi tipis patriotisme, mudah-mudahan tidak hilang patriotisme. Yang berbahaya adalah kalau selama sekolah ada generasi muda yang dibiayai oleh pihak yang berencana untuk mengubah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mudah-mudahan pandangan spekulatif ini tidak benar.

Disamping dimensi pembiayaan yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen penyelenggaraan, untuk itu bagian berikut akan mengulas “manajemen penyelenggaraan pendidikan nasional”.

## **V. Manajemen Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Mampu Menunjang Pembangunan Negara Pancasila Yang Cerdas Kehidupannya dan Maju Kebudayaan Nasionalnya**

Dari bagian pendahuluan sampai bagian IV kiranya jelas bahwa pembangunan Negara bangsa Indonesia yang pada saat Proklamasi Kemerdekaan belum terwujud dan tingkat perkembangannya, diukur dari peradaban dunia sejak pertengahannya abad ke-20, tertinggal hampir 400 tahun, keberhasilannya diletakkan pada kemampuan kita menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ditetapkannya misi mencerdaskan

---

<sup>11</sup> “The Brains Business”, a Survey of Higher Education, dalam majalah The Economist, Sept., 10<sup>th</sup> – 16<sup>th</sup> 2005



kehidupan bangsa, dan memajukan kebudayaan nasional, dan ditetapkannya kewajiban pemerintah menyelenggarakan satu “sistem pengajaran nasional”, adalah indikasi betapa para pendiri republic melalui UUD 1945 menganut paradigma “Build Nation Build School”. Namun setelah hampir 67 tahun kita merdeka menyelenggarakan pendidikan nasional, kondisi kehidupan bangsa dalam segala aspeknya masih belum mantap bahkan tertinggal dari Negara tetangga yang kemerdekaannya lebih kemudian dari Indonesia. Atas dasar ini kita patut mempertanyakan “apa yang salah dengan penyelenggaraan pendidikan nasional?” bagian terakhir tulisan ini dengan topik “manajemen penyelenggaraan pendidikan nasional antara lain bertujuan menjawab pertanyaan pokok tersebut”.

Manajemen dalam tulisan sesuai dengan pandangan Richard L. Daft<sup>12</sup> meliputi kegiatan : merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan memonitor. Pertanyaan yang akan diulas dalam tulisan ini adalah seberapa jauh terdapat kesinambungan antara perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan monitoring dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dari tingkat nasional, daerah, lokal, sampai satuan pendidikan?

1. Dalam kaitan ini dengan tahap perencanaan rumusan (goal) yang meliputi juga tujuan yang hendak dicapai sesungguhnya UU No. 20 Tahun 2003 telah memberikan landasan yang kokoh. Dalam pandangan penulis ketentuan yang tertulis dalam pasal 1 ayat (1), pasal 3, pasal 4 ayat (3), dan pasal 5 ayat (1), sesungguhnya merupakan ketentuan yang relevan dengan misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu berikut penulis kutip sebagai berikut :

1) Pasal 1 ayat (1)

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

2) Pasal 3

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

---

<sup>12</sup> Daft. Richard L. “New Era of Manajemen (Era Baru Manajemen) (2010)”. Jakarta, Penerbit

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

3) Pasal 4 ayat (3)

“ Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat”.

4) Pasal 5 ayat (1)

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Bila ketentuan-ketentuan tersebut dijadikan sebagai landasan untuk merancang sistem persekolahan dari pra-sekolah sampai perguruan tinggi dengan dukungan biaya yang memadai, dalam pandangan penulis dalam waktu 15 tahun Negara bangsa ini pasti akan cerdas kehidupannya. Marilah kita telaah satu persatu.

- 1) Konsepsi dasar tentang pendidikan yang kita anut sesuai dengan pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 yaitu “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”, adalah konsepsi pendidikan yang sesuai dengan rekomendasi “Komisi Internasional UNESCO untuk pendidikan memasuki abad ke-21”,<sup>13</sup> yang menuntut diterapkan empat pilar belajar (learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be). Pertanyaannya adalah “sudahkah kita rancang penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan konsepsi dasar pendidikan secara yuridis kita anut?” Dalam pandangan penulis nampaknya belum terjadi, yang terjadi bahkan yang dalam dirinya bertentangan konsep tersebut. Yaitu diselenggarakannya ujian nasional sebagai penentu kelulusan berdasarkan “tes obyektif” suatu kebijakan yang dalam dirinya bukan hanya bertentangan dengan konsepsi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan, tetapi bertentangan dengan pasal 61 ayat (2) UU No, 20 Tahun 2003 yang tertulis sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Delors J. “Learning: The Treasure Within”

“Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”.

- 2) Fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, dalam pandangan penulis merupakan terjemahan yang relevan dengan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pendidikan nasional seperti yang telah dikutip terdahulu adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”. Pertanyaannya pernahkah fungsi pendidikan nasional itu dianalisis makna dan indikatornya sebagai landasan perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek? Yang menarik adalah bahwa walaupun sejak tahun 1950 dengan UU No.4 Tahun 1950 sampai UU No. 20 Tahun 2003 tekanan dari tujuan pendidikan adalah membentuk karakter namun baru mulai tahun 2009 dipersoalkan masalah pendidikan karakter padahal menurut para pemikir pendidikan seperti Martin Buber <sup>14</sup> dan Kihajar Dewantara hakekat pendidikan adalah pendidikan karakter. Apalagi dengan fungsi mengembangkan peradaban bangsa yang bermartabat. Apa makna peradaban bangsa? Cohen dalam artikelnya “civilization represents a distinct level of socialculture integration and thus a unique cultural-historical entity; it is more than the some of the cultures or nations within it. Although civilization tend to share several formal features in common, they do differ from each other in many ways in their values, institutional configuration, rates of change, military and religious policies, and the like.”<sup>15</sup>

Dengan pengertian peradaban sebagai yang dimaksud oleh Cohen, berarti bahwa peradaban bangsa yang bermartabat meliputi segala dimensi kehidupan bangsa, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk IPTEK. Seberapa jauh manajer pendidikan nasional dalam tahap perencanaannya memiliki visi tentang wujud peradaban yang bermartabat kehidupan demokrasi yang masih dalam taraf prosedural dan tradisional, kehidupan ekonomi yang pada tingkatan ekonomi pinggiran di era global dengan daya saing di bawah Malaysia dan Thailand, program

---

<sup>14</sup> Baca Martin Buber “Between Man and Man”

<sup>15</sup> Cohen Y. “Schools and Civilizational States” dalam buku “The Social and The Comparative Study of Educational System (Jo fischer edit) Scraton, Pensiylvania, International Text Book Co (1970)

perkembangan IPTEK yang diabaikan. Sebagai ilustrasi di abad ke-21 pada saat dunia terutama Negara maju mendudukan “university” sebagai mesin pembangunan ekonomi (university as the engine of economic growth), sehingga rata-rata Negara di dunia mengalokasikan dana 1% PDB, Amerika Serikat 2.5% PDB, China 3% PDB, Malaysia 2.3% PDB, Indonesia 0.23% PDB. Dari data ini menunjukkan betapa penyelenggara Negara tidak memahami makna mengembangkan peradaban bangsa yang bermartabat. Dan tidak ada usaha sungguh untuk menjadikan pendidikan nasional mampu menunjang pembangunan peradaban bangsa yang bermartabat. Adanya upaya untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah membiayai penyelenggaraan universitas negeri untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) seperti di tetapkan UU No. 9 Tahun 2009 yang di anulir oleh Mahkamah Konstitusi dan dirancangnya RUU tentang perguruan tinggi yang merupakan upaya menghidupkan kembali BHMN adalah bukti tidak dipahaminya makna “membangun peradaban bangsa yang bermartabat”.

- 3) Tujuan pendidikan nasional yang sarasanya adalah “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”, yang selaras dengan konsepsi dasar serta fungsi pendidikan nasional, nampak tidak secara konsisten dijadikan landasan untuk perencanaan pendidikan nasional. Dilaksanakan ujian nasional sebagai penentu lulusan, dan tidak dijadikannya 8 standar pendidikan nasional untuk merancang pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional merupakan bukti diabaikannya upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- 4) Ketentuan yang tertulis dalam pasal 4 ayat (3) tentang “pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan, nampak tidak secara sungguh-sungguh dijadikan landasan bagi perencanaan satuan pendidikan sebagai lingkungan belajar yang bermakna pembudayaan kemampuan, nilai dan sikap.
- 5) Tentang hak warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan yang tertulis dalam pasal 12 ayat (1) tentang hak peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, namun tidak dijadikan

landasan dalam perencanaan pendidikan. Bagaimana dengan tahap pengorganisasian?

## 2. Pengorganisasian penyelenggaraan sistem pendidikan nasional

PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan perencanaan pendidikan meliputi delapan bab dan dua ratus dua puluh satu pasal, memberikan ketentuan tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi, namun yang menarik adalah tidak adanya ketentuan bagaimana berbagai kegiatan seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituntut demikian tinggi itu dibiayai? Seperti dapat dikutip pasal 93 tentang penelitian yang isinya tertulis sebagai berikut :

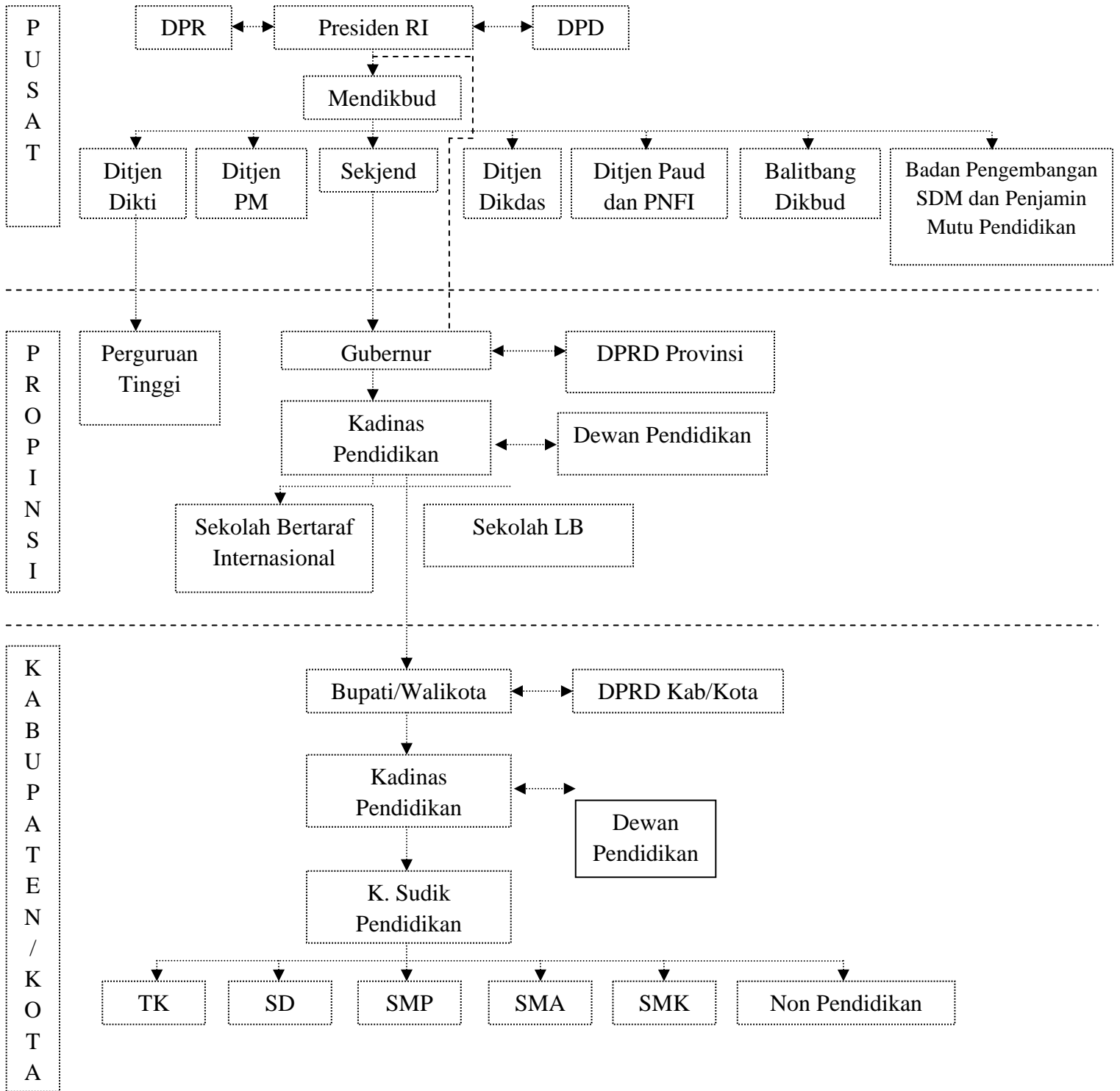
- 1) Universitas, institut dan sekolah tinggi wajib melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
- 2) Akademi dan politeknik wajib melaksanakan penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
- 3) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk :
  - a. Mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga; dan/atau
  - b. Menguji ulang teori, konsep, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- 4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah, norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- 5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian.

- 6) Hasil penelitian dilakukan oleh dosen untuk memenuhi dharma penelitian wajib diseminarkan dan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah terakreditasi atau yang diakui Kementerian.
- 7) Hasil penelitian perguruan tinggi diakui sebagai penemuan baru setelah dimuat dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi yang diakui Kementerian dan/atau mendapatkan hak kekayaan intelektual.
- 8) Hasil penelitian perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan.

Sengaja penulis merujuk PP 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan untuk menunjukkan betapa berbagai ketentuan yang tertuang dalam PP yang sudah diterbitkan dua tahun yang lalu itu belum nampak pelaksanaannya. Pertanyaannya bagaimana pengorganisasian penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional ditata sehingga segala fungsi tujuan pendidikan nasional yang secara konseptual ideal dapat terwujud.

Secara diagramatik organisasi penyelenggaraan pendidikan nasional dapat digambarkan sebagai berikut :

## Diagram Organisasi Penyelenggaraa Sistem Pendidikan Nasional



Bagaimana hubungan manajemen antara Pusat, Propinsi, dan Kabupaten? Mengingat sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 yang merupakan penjabaran UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang menetapkan penyelenggaraan pendidikan bukan urusan wajib pemerintah pusat melainkan urusan wajib pemerintah daerah (pasal 7 ayat (2) PP 30 Tahun 2007), secara manajemen tidak ada hubungan hierarki dan komando antara pemerintah pusat dan pemerintah propinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan dalam kutipan berikut.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
<b>1. Kebijakan</b>	1. Kebijakan dan Standar	1. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan kebijakan nasional pendidikan .</li> <li>b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar propinsi.</li> <li>c. Perencanaan strategis pendidikan nasional.</li> </ul> 2. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan dan penetapan standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga</li> </ul>	1. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di propinsi sesuai dengan kebijakan nasional</li> <li>b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar propinsi</li> <li>c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.</li> </ul> 2. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. _</li> </ul>	1. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar propinsi.</li> <li>b. _</li> <li>c. Perencanaan operasioanl program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat propinsi dan nasional</li> </ul> 2. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. _</li> </ul>



		<p>kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan).</p> <p>b. Sosialisasi standar nasional pendidikan dan pelaksanaannya pada jenjang pendidikan tinggi.</p> <p>3. Penetapan pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal.</p>	<p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat propinsi</p> <p>3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.</p>	<p>b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p>
<b>2. Pembiayaan</b>		<p>1.</p> <p>a. Penetapan pedoman pembiayaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal</p> <p>b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai kewenangannya.</p>	<p>1.</p> <p>a. _</p> <p>b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.</p>	<p>1.</p> <p>a. _</p> <p>b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p>

		c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.	c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.	c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
<b>3. Kurikulum</b>		<p>1.</p> <p>a. Penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah.</p> <p>c. Penetapan standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, dan sosialisasinya.</p> <p>2.</p> <p>a. Pengembangan model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan.</p>	<p>1.</p> <p>a. Koordinasi dan supervise pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah.</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.</p> <p>2.</p> <p>a. _</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.</p>	<p>1.</p> <p>a. Koordinasi dan supervise pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</p> <p>2.</p> <p>a. _</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak</p>

		3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah	usia dini dan pendidikan dasar. 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
--	--	--	--	---

Dari gambaran tentang pembagian urusan antara pusat dan daerah, kiranya patut dipertanyakan seberapa jauh fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang konsep filosofinya begitu ideal dapat dilaksanakan, apalagi kalau dalam hal pembiayaan, dalam segala tingkatan tidak ada yang bertanggung jawab seperti yang dikehendaki oleh pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Pemerintah dari pusat, provinsi sampai kabupaten hanya bertanggung membantu. Padahal pasal 31 ayat (2) UUD 1945 tentang wajib belajar SD dan SMP ditetapkan pemerintah wajib membiayainya.

Disamping itu dalam ilmu manajemen dinyatakan bahwa agar pelaksanaan manajemen suatu program seperti sistem pendidikan nasional dapat terlaksana secara efisien dan efektif, para manajer dari yang teratas dari Menteri (bahkan Presiden RI karena Presidenlah yang bertanggung jawab melaksanakan segala ketentuan yang tertulis dalam pasal 31 UUD 1945, sedangkan Menteri hanyalah pembantunya) sampai manajer satuan pendidikan harus memiliki kemampuan interpersonal, dan teknis. Makin tinggi posisi hierarkis seorang manajer makin diperlukan penguasaan konseptual yang tinggi dan makin rendah kedudukan hierarkis seseorang manajer makin diperlukan pembelajaran teknisnya. Yang jelas pada tingkatan apapun seorang manajer harus menguasai ketiganya (konseptual, interpersonal, dan teknis).

Pertanyaannya adalah bagaimana penguasaan para manajer pendidikan kita dari yang tertinggi sampai terendah? Penulis tidak menilainya, tetapi pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah apakah organisasi penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sudah memadai diukur dari efektifitasnya sehingga menjadikan

pendidikan nasional mampu melaksanakan misi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional? Ini yang perlu di evaluasi.

Tiadaanya hubungan hierarki dan garis komando antara manajer nasional, propinsi sampai kabupaten untuk pendidikan dasar sampai pendidikan menengah menjadikan masalah kesinambungan dan konsistensi antara rancangan pada tingkat nasional dengan pelaksanaannya pada tingkat satuan pendidikan, padahal dalam manajemen dimensi ketiga adalah kepemimpinan

### 3. Kepemimpinan sebagai salah satu unsur dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan nasional

Kepemimpinan dari seorang manajer puncak akan menumbuhkan motivasi dan komitmen para manajer di daerah (propinsi dan kabupaten/kota) untuk dengan sungguh-sungguh menerjemahkan dan melaksanakan rancangan dan program pendidikan nasional yang telah menjadi kebijakan nasional. Pertanyaannya adalah mekanisme seperti apa yang dapat menjamin pemimpin nasional dapat dirasakan oleh manajer dan para pelaksana pendidikan? Dengan membaca diagram organisasi PP No. 38 Tahun 2007 dan PP No. 17 Tahun 2010, penulis sukar merasakan manajer tingkat nasional akan dapat dengan mudah melaksanakan fungsi kepemimpinannya. Untuk mengetahui seberapa jauh segala rencana dan kebijakan nasional dilaksanakan sesuai konsep dan filosofi yang diamanatkan oleh UUD 1945 maupun UU No. 20 Tahun 2003 dilakukan monitoring.

### 4. Monitoring sebagai salah satu unsur dari manajer pendidikan nasional

Secara keilmuan disamping perencanaan, perorganisasian dan kepemimpinan, kegiatan manajer suatu sistem pendidikan meliputi juga monitoring agar suatu perencanaan dapat diketahui efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya. Dalam mencapai sasaran diperlukan umpan balik (feedback), untuk itu monitoring yang dilakukan terus menerus dapat digunakan untuk memperoleh informasi sebagai *feedback*. Sebagai ilustrasi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 di perjelas dengan UU No. 19 Tahun 2005 penyelenggaraan pendidikan nasional mengacu 8 standar (isi, proses, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, kompetensi lulusan, system evaluasi, keuangan dan manajemen). Pertanyaannya adalah monitoring atau evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh 8 standar tersebut dilaksanakan dan dipenuhi. Melihat dari tiadanya hubungan hierarki

dalam pengorganisasian nampaknya kita sukar memperoleh informasi yang sah dan dapat dipercaya. Sesungguhnya manajer Pusat memiliki aparat di daerah yaitu Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), tetapi seberapa jauh LPMP memiliki fasilitas, tenaga dan dukungan untuk melakukan fungsi monitoring? perlu dikaji lebih lanjut. Tetapi pertanyaan lebih lanjut adalah seberapa jauh informasi yang masuk sebagai bagian dari *feedback* benar-benar dijadikan bahan untuk menyempurnakan/ mengubah suatu kebijakan atau problem? Tetap dilaksanakannya ujian nasional yang secara konseptual bertentangan dengan konsepsi, fungsi, dan tujuan pendidikan yang dianut UU No. 20 Tahun 2003 dan dalam praktek banyak eksekusi negatifnya menunjukkan dimensi pentingnya *feedback*/ monitoring untuk terus menyempurnakan kebijakan pada program diabaikan.

Dari serangkaian ulasan dan analisis yang terkait dengan manajemen penyelenggaraan pendidikan nasional dapatlah ditarik beberapa kesimpulan :

1. Tiadanya hubungan hierarki dan garis komando antara manajer tingkat pusat sampai tingkat satuan pendidikan melalui manajer tingkat propinsi dan kabupaten/kota sukar dapat diharapkan terwujud dan terlaksananya tujuan dan fungsi pendidikan nasional.
2. Tidak adanya peraturan pemerintah yang secara tegas menetapkan tanggung jawab pemerintah, dalam pembiayaan pendidikan baik pusat, propinsi, maupun kabupaten yang dalam hakekatnya bertentangan dengan pasal 31 UUD 1945 tidak memungkinkan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sesuai dengan konsepsi dan filosofi pendidikan nasional dan standarnya dapat terlaksana secara relevan, efisien, dan efektif.
3. Tidak adanya upaya yang secara sistematis dan sistematis untuk menterjemahkan makna yang terkandung dalam konsepsi, fungsi, tujuan dan prinsip yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 menjadi rencana dan program untuk diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional sampai ke-tingkatan satuan pendidikan menjadikan penyelenggaraan pendidikan tidak akan mampu melaksanakan fungsi konstitusionalnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional.

4. Berbagai kenyataan yang diungkapkan dari butir (1) sampai (3) menunjukkan bahwa desentralisasi penyelenggaraan pendidikan nasional sebagai model manajemen pendidikan nasional yang dalam dirinya bertentangan dengan pasal 31 ayat (3) UUD 1945, telah gagal dan perlu ditinjau kembali.
5. Belum berhasilnya Negara bangsa Indonesia yang telah merdeka hampir 67 tahun dalam membangun masyarakat Negara yang secara politik, stabil, kokoh, dan utuh, secara ekonomi makmur dan berdaya saing tinggi, yang secara social penuh kedamaian dan toleransi, dan secara budaya maju dalam segala dimensinya, tidak lain karena amanatnya UUD 1945 yang mewajibkan (1) pemerintah (pemerintah pusat) “mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional”; (2) menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (3) dan kewajiban pemerintah membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib, tidak dilaksanakan.

Demikian beberapa pokok pikitan untuk kita bahas.

Jakarta, Januari 2010

Penulis

Prof. DR. H. Soedijarto, MA

Guru Besar UNJ

Ketua Dewan Direktur CINAPS

Ketua Dewan Pembina ISPI

Anggauta Dewan Pembina PB PGRI

Anggauta Forum Konstitusi

Wakil Ketua Yayasan Indonesia – Jerman

Ketua Dewan Pakar PPA GMNI

# REDISAIN SISTEM PENGELOLAAN NASIONAL PENDIDIKAN INDONESIA

Oleh

Prof. Dr. Fakry Gafar

## PENDAHULUAN

Tema Seminar ISPI-UNY yang dilaksanakan ini sungguh amat penting dan amat besar, sehingga bila seminar ini diharapkan menghasilkan proudk yang tuntas, akan sulit terwujud apalagi dalam waktu yang terbatas.

Namun demikian, seminar ini dapat berfungsi sebagai forum curah pendapat untuk menghidupkan stimulasi berfikir yang lebih mendalam kearah masa depan yang panjang yang dihadapi oleh bangsa secara nasional. Pendidikan begitu strategik dalam membawa bangsa kearah masa depan yang diharapkan. Karena itu pendidikan untuk membangun bangsa yang besar di negara yang kaya raya ini harus dikelola secara tepat dan profesional sehingga berbagai kesalahan dan kekelirun yang terjadi selama ini harus segera diluruskan dan dicarikan solusinya yang tepat.

### A . TREND PERKEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

Untuk memahami trend perkembangan pendidikan nasional secara menyeluruh, diperlukan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang hal-hal mendasar yang secara kontekstual berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia. Tabel 1 berikut ini memberikan informasi dasar tentang kewilayahan dan kependudukan Indonesia berdasarkan data statistik tahun 2008-2009.

Tabel 1 : Kewilayahan dan Kependudukan

---

1. Kewilayahan :	
a. Propinsi	33
b. Kabupaten/kota	483
c. Kecamatan	6.520
d. Desa	75.666
e. Luas ( dalam km2)	1.910.931,22 km2
2. Penduduk	228.523.300
a. 0-6 tahun	29.847.830
b. 4-6 tahun	11.437.008
c. 7-12 tahun	26.516.463
d. 13-15 tahun	13.036.554
e. 16-18 tahun	12.984.338

f. 19-24 tahun	26.998.000
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	781.354.000 ( juta rph)
4. Anggaran Pendidikan	49.701.004 ( juta rph)

Data ini menunjukkan betapa besarnya wilayah NKRI dan betapa besarnya jumlah penduduk yang harus menerima pendidikan yang tersebar luas diseluruh pelosok Indonesia. Dengan data ini pula dapat difahami mengapa pengelolaan pendidikan akhirnya berubah dari sistem sentralisasi kepada sistem desentralisasi. Selanjutnya, Tabel 2 berikut ini menunjukkan trend perkembangan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Data ini juga memberikan gambaran besarnya jumlah intitusi pendidikan dari TK/RA hingga perguruan tinggi, dengan berbagai jenis dan jenjang yang harus dikelola secara nasional.

Tabel 2: Jumlah Lembaga Pendidikan berdasarkan Jenis, jenjang dan Status

Satuan Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
<b>Kemendikbud</b>			
1. Taman Kanak-kanak	804	62,820	63,624
2. Sekolah Luar Biasa (SLB)	412	1,274	1,686
3. Sekolah Dasar (SD )	131490	12,378	144,228
4. Sekolah Menengah Pertama	16,898	11,879	28,777
5. Sekolah Menengah Atas	4,797	5,965	10,762
6. Sekolah Menengah Kejuruan	2,003	5,589	7,592
7. Pergruruan Tinggi	83	2,892	2,975
a. Universitas	48	393	441
b. Institut	6	49	55
c. Sekolah Tinggi	2	1,391	1,393
d. Akademi	-	955	955
e. Politeknik	27	107	131
<b>Kemenag</b>			
1. Bustanul Athfal	-	19,762	19.762
2. Madrasah Ibtidaiyah	1,662	19,867	21,529
3. Madrasah Tsanawiyah	1,384	11,908	13,292
4. Madrasah Aliyah	735	4,913	5,648
5. Pergruan Tinggi Agama Islam	52	505	557



Data ini juga memberikan gambaran menyeluruh tidak hanya tentang jumlahnya yang besar tetapi juga variasi jenis, jenjang, status satuan pendidikan yang merupakan cakupan yang amat luas dan kompleks untuk dikelola baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah.

Dengan menggunakan data ini sebagai reference, pengelolaan pendidikan berdasarkan otonomi daerah ternyata dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang dihadapi pusat dan daerah yang memerlukan kesungguhan dan kecermatan untuk memahami dan untuk mencari solusi yang tepat sehingga fungsi pendidikan dalam membangun kualitas bangsa dapat diwujudkan.

## **B. MAKNA DAN IMPLIKASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERBASIS OTONOMI DAERAH**

Setelah puluhan tahun, sejak Kemerdekaan RI menjadi realita politik yang diakui oleh dunia dan diselenggarakan dengan sistem sentralisasi, maka dengan lahirnya UU No.22/1999, terjadilah perubahan yang amat mendasar dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. NKRI diselenggarakan secara desentralisasi dengan meletakkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Keputusan ini bersifat politik dan pertimbangannya pun juga didasarkan atas pertimbangan politik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah yang amat luas, kaya, dan strategis, harus didukung oleh kemampuan setiap kabupaten/kota untuk meperkokoh keberadaan NKRI ini. Dengan otonomi daerah pada tingkat kabupaten/ kota, kepentingan rakyat akan lebih difahami, aspirasi rakyat untuk hidup sejahtera, aman, dan damai akan dapat diwujudkan secara adil dan merata. Dengan demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia akan kokoh dari berbagai aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan

Pendidikan dalam pembangunan bangsa, berperan amat strategis untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan untuk membangun diri, keluarga dan masyarakatnya. Hanya penduduk yang cerdas dan berpendidikan, yang mampu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Karena itu Pendidikan sudah saatnya untuk juga dikelola secara desentralistik dengan meletakkan kewenangan penuh pada tingkat kabupaten/ kota. Pertanyaan mendasar adalah: bagaimanakah konsep dan fikiran yang ideal ini dapat diwujudkan dengan optimal? Pengalaman selama 10 tahun terakhir membuktikan begitu banyak permasalahan dan kesulitan yang muncul sebagai akibat adanya berbagai benturan kepentingan politik. Kekeliruan dan salah urus terjadi dimana-mana yang berakibat kepada kekacauan dalam pengelolaan pendidikan. Kepentingan politik pada kenyataannya berada diatas kepentingan rakyat dan karena itu kekacauan terjadi pada hampir setiap daerah. Atas dasar pengalaman 10 tahun pengelolaan pendidikan secara desentralistik inilah diperlukan internalisasi, review dan penelaahan ulang. Pendidikan yang merupakan harapan bangsa perlu diluruskan dan dikelola secara benar untuk kepentingan rakyat bukan untuk melayani kepentingan politik tertentu.

## **C. KONDISI OBJEKTIF PENGELOLAAN PENDIDIKAN NASIONAL**

### **1. Tidak Utuhnya Sistem Pengelolaan Nasional Pendidikan Indonesia**

Dengan diberlakukannya UU NO 22/ 1999 tentang otonomi daerah berimplikasi terhadap pengelolaan pendidikan di seluruh wilayah NKRI secara desentralistik dengan otonomi diberikan penuh kepada

Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mengelola pendidikan diwilayah kewenangannya. Dalam pengelolaan yang disentralistik itu, sistem pengelolaan ternyata terputus menjadi tiga potongan sistem, yaitu: sistem ditingkat pusat, sistem ditingkat propinsi dan sistem ditingkat kabupaten/kota. Ketiga potongan sistem ini tidak memiliki hubungan hirarkis . Karena itu proses pengelolaan pendidikan tidak mengalir mulus dari tingkat pusat ketingkat propinsi dan dari tingkat propinsi ketingkat kabupaten /kota. Disdik propinsi bertanggung jawab kepada Gubernur, Disdik kabupaten dan Disdik kota masing-masing bertanggung jawab kepada Bupati dan Walikota. Dengan demikian yang disebut dengan menteri pendidikan sebagai top eksekutiv secara hirarkis organisatoris bukan atasan Disdik Propinsi dan Kepala Disdik propinsi bukanlah atasan Disdik kabupaten kota. Sistem pengelolaan nasional pendidikan seperti yang diamanatkan oleh konstitusi 1945 secara utuh tidak ada. Kalau sistem pengelolaan nasional tidak terbentuk secara utuh, maka pengelolaan pendidikan secara nasional tidak dapat dilakukan. Yang terjadi adalah pengelolaan pendidikan didaerah oleh pemernitah daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah pada tingkat propinsi secara praktis tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk mengelola pendidikan ditingkat propinsi. Kewenangan untuk mengelola pendidikan ditingkat propinsi itu didistribusikan seluruhnya kepada kabupaten/kota yang ada di setiap propinsi.

Pendidikan non formal yang jumlah dan jenisnya tidak terhitung banyaknya diletakkan dibawah tanggung jawab Kemendikbud, dan seharusnya dikelola secara disentralistik. Kenyataannya secara praktis Pemerintah daerah lebih memfokuskan kepada pengelolaan sekolah-sekolah yang ada diwilayahnya.

Madrasah dari jenjang RA hingga MA yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dikelola oleh Kementrian Agama secara sentralistik. Memang terdapat koordinasi dalam hal tertentu seperti penerapan kurikulum nasional, pelaksanaan akreditasi yang diletakkan dalam tanggung jawab dan kewenangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun secara praktis pengelolaan madrasah ini berada sepenuhnya dibawah tanggung jawab dan nkewenangan Kementrian Agama yang dikelola secara sentralistik. Karena pengelolaan yang terpisah ini pula, pemernitah kabupaten /kota tidak memiliki kewenangan untuk mengelola madrasah yang ada diwilayah kekuasaannya. Dengan demikian, amatlah sulit bagi madrasah ini untuk memperoleh bantuan pendanaan melalui APBD, karena secara legal bukan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Kondisi seperti ini menciptakan dilema dikalangan masyarakat daerah dan juga secara nasional dalam pembangunan bangsa.

Berbagai Kementrian lain seperti Kementrian Pertahanan, Kementrian Pertanian, dan Kementrian Kesehatan, menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kementrian. Penyelenggaraan pendidikan ini terlepas dari koordinasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, walaupun berdasarkan UU Sisdiknas seluruh pendidikan berada dibawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Secara praktris Kemendikbud hanya mengelola satuan pendidikan yang secara terbatas dan praktis berada didalam tanggung jawab dan kewenangannya.

## 2. Tidak Terwujudnya Satu Kesatuan Leadership

Secara konseptual, didalam sebuah sistem harus selalu terdapat satu kesatuan leadership walaupun secara sistemik leadership ini berjenjang dan bercabang secara hirarkis, namun terdapat top leadership yang memiliki kewenangan untuk memimpin sistem secara keseluruhan. Didalam pengelolaan

pendidikan nasional yang disentralisitkan saat ini, tidak terwujud satu kesatuan leadership. Setiap potongan atau sub sistem memiliki leadership yang terpisah dari sistem besarnya. Hubungan antar subsistem juga tidak terwujud sehingga masing-masing subsistem berjalan sendiri-sendiri secara otonom. Kesatuan leadership hanya terdapat pada masing-masing subsistem itu saja. Kesatuan leadership hanya terdapat pada tingkat Kabupaten/Kota saja. Kesatuan leadership pada tingkat propinsi sulit diwujudkan karena secara hirarkis tidak terdapat hubungan vertikal antara propinsi dan Kabupaten/Kota. Komunikasi antar Kabupaten /Kota secara organisasi juga tidak mudah dilakukan. Kesatuan leadership antara Kemendikbud dengan berbagai kementerian lain yang menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan juga sulit terwujud karena tidak berada didalam satu sistem hirarki. Kesatuan leadership hanya terwujud secara internal pada masing-masing kementerian tersebut. Pengelolaan pendidikan yang cakupannya begitu besar dan kompleks dengan sistem yang tidak terintegrasi secara nasional, menyulitkan dalam pembangunan kualitas bangsa secara nasional.

### 3. Undang- Undang BHP: Suatu upaya mewujudkan sebuah Sistem Pengelolaan Nasional Pendidikan

Undang-undang BHP yang telah lahir namun belum berpeluang untuk dilaksanakan, telah dihapuskan terlebih dahulu oleh MK dengan alasan sangat sederhana yaitu bertentangan atau melanggar Konstitusi 1945. Namun bila dikaji secara cermat dan sungguh-sungguh dan ditinjau dari kacamata penyelenggaraan pendidikan nasional, Undang-Undang BHP inilah yang secara rinci telah mampu melahirkan sebuah sistem pengelolaan nasional secara rinci mencakup seluruh satuan pendidikan, semua jenis dan jenjang pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi secara nasional. Dan undang-undang BHP inilah yang sesungguhnya telah mampu menjawab amanat konstitusi 1945 untuk mewujudkan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan nasional untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penghentian atau penghapusan Undang-Undang BHP ini bertumpu pada alasan-alasan hukum dan tidak samasekali dikaji dari kacamata pendidikan bangsa khususnya kacamata penyelenggaraan pendidikan nasional dengan satu sistem pengelolaan nasional yang diamanatkan oleh Konstitusi 1945. Akibat dari keputusan MK ini 7 perguruan tinggi besar di Indonesia mengalami setback yang amat serius karena harus menata ulang sistem organisasi dan manajemen kelebagaannya, kembali kepada sistem perguruan tinggi negeri biasa.

### 4. Distribusi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Berbagai Aspek Strategik Pendidikan Nasional

Dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan secara disentralisitkan ini memang terdapat distribusi kewenangan dan tanggung jawab secara parsial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun tidak secara spesifik menyangkut substansi strategiknya. Aspek-aspek strategik yang menyangkut pembangunan bangsa secara nasional adalah : guru, dosen, kurikulum dan pendanaan. Berikut ini uraian rinci tentang berbagai aspek strategik pendidikan nasional yang memiliki fungsi nasional yang seharusnya dikelola secara nasional dan tidak diletakkan dalam tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah.

#### a. Guru

Guru memiliki fungsi strategis secara nasional untuk membangun warganegara yang cinta tanah air, cinta bangsa, cinta bahasa dan budaya nasional, cinta persatuan dan kesatuan dan cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena fungsi yang strategis inilah guru perlu dikelola secara nasional dalam hal rekrutmen, penetapan penerimaan, penggajian dan distribusi kepada setiap Kabupaten. Pemerintah daerah berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan, mengatur penempatan di wilayahnya dan pemanfaatannya. Hal-hal yang berkaitan dengan penggajian dan berbagai tunjangan fungsional dan profesi harus dikelola secara nasional sehingga guru dapat dengan leluasa bertugas dimana saja dinegara ini. Mobilitas untuk bertugas tanpa hambatan birokrasi ini amat strategis sehingga distribusi guru dapat diseimbangkan antar berbagai kabupaten/kota didalam maupun antar propinsi sehingga fungsi strategis secara nasional dalam membangun bangsa dapat diwujudkan.

#### b. Dosen

Dosen perguruan tinggi juga memiliki fungsi nasional dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk cinta bangsa, persatuan dan kesatuan cinta tanah air dan cinta kebudayaan nasional. Mobilitas untuk membantu perguruan tinggi lain yang tersebar melalui berbagai program bantuan dosen harus dimungkinkan tanpa mengalami persoalan penggajian. Dosen seperti halnya guru, dapat bertugas di perguruan tinggi manapun dan dapat menerima gajinya dengan normal ditempat ia bertugas.

#### c. Kurikulum

Kurikulum yang bersifat nasional untuk setiap satuan pendidikan seperti yang berkaitan dengan standard, struktur, mata pelajaran inti, sistem pengembangan dan evaluasi secara nasional perlu diletakkan dalam kewenangan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan implementasi teknis dan pengembangan strategi pembelajaran merupakan kewenangan satuan pendidikan.

#### d. Pendanaan

Pendanaan Pendidikan yang menyangkut distribusi dana yang bersumber dari APBN seperti penetapan pagu alokasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku perlu diletakkan dalam kewenangan nasional untuk menghindarkan penyalahgunaan dana yang telah ditetapkan. Hambatan yang sangat besar, adalah yang berkaitan dengan proses politik yang terjadi pada setiap pemerintah Kabupaten / Kota terutama yang berkaitan dengan proses politik dalam penetapan anggaran untuk pendidikan dalam APBD. Proses politik di DPRD inilah yang menyebabkan keterlambatan dalam implementasi anggaran dan merupakan permasalahan yang amat serius bagi penyelenggaraan pendidikan, sebab pendidikan tidak bisa ditunda dan harus berjalan terus, walaupun tanpa anggaran pendidikan.

### 5. Kendali yang Ketat Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi

Sistem pengelolaan perguruan tinggi yang berlaku saat ini amat sentralistik. Otonomi perguruan tinggi sulit berkembang. Kemajuan perguruan tinggi terhambat sebagai akibat kendali yang ketat dalam berbagai hal yang dialami perguruan tinggi. Pengembangan mutu mengalami banyak kendala karena alokasi dana yang diperlukan untuk mendorong inovasi dan kreativitas amat terbatas. Pendanaan untuk

biaya operasional saja bila dibandingkan dengan perguruan tinggi di berbagai negara tetangga, amat terbatas karena itu kemajuan yang pesat sulit diwujudkan. Dalam proses pemilihan Rektor umpamanya, suara menteri 35% dari jumlah suara dalam pemilihan tersebut. Ini menunjukkan kuatnya kendali pemerintah untuk perguruan tinggi. Dengan dikendalikannya Rektor sedemikian rupa, maka kreativitas dan prakarsa sulit muncul karena khawatir akan tidak disetujui rektor. Aspek-aspek strategis pengembangan mutu perguruan tinggi seperti dosen, research, peralatan laboratorium dan teknologi yang mendukung kemajuan perguruan tinggi masih terbatas. Kecenderungan perguruan tinggi pada setiap daerah untuk mengkerut dengan memunculkan “putera asli daerah” dalam setiap pergantian pimpinan menyulitkan perkembangan perguruan tinggi secara nasional.

#### 6. Pengelolaan Madrasah

Madrasah dari RA hingga MA dengan berbagai jenisnya dikelola secara sentralistik oleh Kementerian Agama RI. Struktur organisasi dari pusat hingga tingkat propinsi, Kabupaten/Kota dan bahkan satuan pendidikan disusun secara sentralistik. Lebih dari 90% madrasah ini berstatus swasta. Dengan keterbatasan sumber daya, terutama pendanaan yang terbatas, maka kondisi umum madrasah ini dari segala sisi amat memprihatinkan. Dengan alasan bahwa madrasah ini dibawah tanggung jawab Kementerian Agama dan dikelola secara sentralistik, dukungan pemerintah daerah, baik tingkat propinsi maupun daerah melalui APBD, tidak diberikan. Karena itu perkembangan madrasah ini amat lambat dan amat tergantung pada dukungan masyarakat yang secara umum kemampuan ekonomi masyarakat lemah. Gerakan untuk mendorong kemajuan madrasah melalui bantuan dari sumber dana luar negeri, pada sepuluh tahun terakhir, memang gencar dilakukan namun hanya dapat mencakup jumlah madrasah secara terbatas.

#### 7. Pengawasan dan Pengendalian

Didalam sistem manajemen, kegiatan pengawasan dan pengendalian merupakan instrumen pimpinan untuk meyakinkan bahwa seluruh unsur strategik sistem berfungsi dengan efisien dan efektif. Apabila terjadi kesulitan, kesalahan, penyimpangan, maka tindakan yang bersifat pembinaan, pelurusan, dan koreksi dapat dilakukan sehingga sistem berfungsi normal kembali. Didalam pengelolaan Pendidikan nasional Indonesia, kegiatan pengawasan dan pengendalian berada pada pemerintah daerah terutama pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah tingkat propinsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. demikian pula Pemerintah Pusat. Dengan demikian gambaran perkembangan dan kemajuan pengelolaan pendidikan baik pada tingkat propinsi maupun secara nasional sulit diperoleh karena pengelola pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan kepada pemerintah tingkat propinsi dan pemerintah pusat. Dengan demikian kemajuan, perkembangan, permasalahan aktual secara nasional sulit diperoleh kecuali dengan cara sendiri melalui program dan kegiatan tersendiri pemerintah pusat melakukan survey, penelitian, dan berbagai kegiatan lain yang langsung dikendalikan secara nasional untuk memperoleh gambaran umum perkembangan pendidikan nasional.

#### 8. Kebijakan Nasional VS Kebijakan Daerah

Berbagai kebijakan yang secara nasional ditetapkan dalam rangka pembangunan pendidikan nasional Indonesia merupakan tanggung jawab dan kewenangan pusat. Kebijakan tentang penuntasan wajar dikdas 9 tahun, BOS, sertifikasi guru dan dosen, penjaminan mutu, bantuan terhadap orang tua yang ekonominya lemah, bergantung kepada kemauan politik, dan kesungguhan daerah untuk melaksanakannya. Kecuali bila dijabarkan kedalam program pusat yang dikelola secara sentralistik. Namun karena menyangkut kewenangan daerah, maka kerjasama dengan daerah diperlukan. Program seperti ini dapat terlaksana, namun dalam skala terbatas karena terbatasnya dukungan daerah. Kebijakan daerah acapkali tidak sesuai bahkan bertentangan dengan kebijakan pusat contohnya dalam rekrutmen ketenagaan, dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun, dan banyak lagi yang menyebabkan mandegnya pengelolaan pendidikan di daerah. Daerah memiliki prioritas sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Prioritas ini dituangkan dalam kebijakan. Kebijakan inilah yang acapkali tidak konsisten bahkan bertentangan dengan kebijakan nasional.

#### 9. Proses Politik dalam Pengelolaan Pendidikan

Proses politik dalam pengelolaan pendidikan di pusat dan di daerah harus terjadi dan tidak bisa dihindarkan karena menyangkut penetapan kebijakan baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Proses politik ini melahirkan keputusan legal yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Aspek penting dalam kaitannya dengan pengelolaan pendidikan adalah yang berkaitan dengan pendanaan dalam APBN untuk mereliasasikan amanat konstitusi 20% APBN pada tingkat pusat dan APBD pada tingkat daerah. Proses politik juga melahirkan berbagai keputusan yang menetapkan prioritas program. Dalam proses politik inilah berbagai kepentingan muncul dan acapkali merupakan batu sandung dalam pembangunan pendidikan. Walaupun amanat konstitusi menetapkan 20% dari APBN seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, namun proses politik di daerah belum tentu menghasilkan 20% dari APBD, dialokasikan untuk pembangunan pendidikan di daerahnya. Hasil pemantauan secara nasional menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari Kabupaten/Kota yang memprioritaskan pembangunan pendidikan sesuai amanat konstitusi. Proses politik di daerah yang berlarut-larut acapkali memperlambat pelaksanaan kegiatan pendidikan di daerah. Hasil pemantauan menunjukkan hampir semua daerah mengalami keterlambatan dalam pencairan alokasi dana untuk pendidikan.

#### **D. STRATEGI DALAM REDISAIN SISTEM PENGELOLAAN NASIONAL PENDIDIKAN INDONESIA**

Pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah: apa yang harus didisain itu? Tujuan dan sasaran apa yang harus dicapai? Strategi apa yang perlu dan harus dibangun dalam proses redisain tersebut sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat terwujud?

##### 1. Tuntutan Perlunya Redisain

Pengelolaan Pendidikan secara desentralistik telah dilaksanakan selama 10 tahun. Dalam kurun waktu yang cukup lama itu ditemukan berbagai permasalahan yang secara rinci telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Permasalahan yang berkaitan dengan keorganisasian, kepemimpinan, proses pengelolaan,

aspek strtagik pendidikan nasional yang memiliki fungsi strtegik , membuktikan diperlukannya kaji ulang dan evaluasi menyeluruh tentang sistem pengelolaan pendidikan secara nasional dalam era otonomi daerah. Persoalan mendasar yang ditemukan menentukan masa depan pendidikan nasional Indonesia yang mengandung implikasi penentuan terhadap- masa depan bangsa dan negara.Tanpa adanya peninjauan ulang terhadap proses dan hasil penerapan pengelolaan pendidikan secara nasional ini mengharuskan kita untuk menata ulang sistem pengelalolaan yang diberlakukan hingga saat ini. The needs for redesigning national system of managing Indonesian Education” itu benar-benar real atau nyata. Bila perubahan kearah penyempurnaan tidak diberlakukan maka kerugian yang tiada ternilai akan dihadapi oleh kita. Perubahan dalam arti redesigning the total system in managing Indonesian Education tidak dapat dihindarkan dan ditunggu lagi karena resiko yang amat tinggi yang pada waktu yang akan datang menimpa bangsa Indonesia,

## 2. Tujuan dan Sasaran Redisain

Tujuan redisain adalah untuk mewujudkan sebuah sistem pengelolaan nasional pendidikan yang terintegrasi dan membentuk satu keutuhan sistem dari pusat hingga daerah yang dapat bertfungsi efisien dan efektif dalam mewujudkan tujuan nasional pendidikan sesuai dengan UU Sisdiknas NO. 20/2003 pasal 3 sebagai berikut: “Pendidikan nsional befungsi....., bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Sasaran redisain ini adalah:

- a. Undang-undang otonomi daerah N0.32/2007
- b. Peraturan –peraturan yang merupakan turunannya
- c. Substansi sususnan organisasi Sisdiknas dari pusat hingga daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan
- d. Distribusi tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas antar pusat , propinsi dan kabupaten/kota yang berada dalam koridor satu kesatuan sistem yang utuh dan tidak terpotong-potong
- e. Sistem kepemimpinan yang menyatu dalam satu kesatuan hirarkis yang fleksibel dan membentuk satu entity sistem pengelolaan nasional pendidikan

## 3. Reposisi Aspek-Aspek Strategik Pendidikan Nasional

Aspek strategik pendidikan yang mempunyai makna dan fungsi nasional harus diletakkan didalam kewenangan dan tanggung jawab Pusat. Adapun aspek strategik ini adalah : guru, dosen, kurikulum, standard mutu, pendanaan dan akreditasi.

- a. Guru

Pembangunan karakter dan jati diri bangsa, penanaman sikap cinta bangsa, cinta negara kesatuan, cinta bahasa dan budaya nasional, merupakan tugas yang diemban guru dimanapun guru sebagai pendidik bangsa bertugas. Fungsi Strategik nasional ini harus dikelola secara nasional, yang tidak perlu terikat kepada Propinsi dan Kabupaten/Kota. Rekrutmen, penerimaan, pengangkatan, distribusi dan penempatan, mutasi dari satu daerah ke daerah lain sesuai kebutuhan, penggajian, perlu diletakkan dalam tanggung jawab dan kewenangan nasional. Peran daerah memberikan bantuan dalam hal mengidentifikasi kebutuhan daerah, dan penempatan ditempat yang diperlukan di daerah tersebut.

#### b. Dosen

Dosen perguruan tinggi juga sama halnya dengan guru sekolah, memiliki tugas dan fungsi nasional dalam membangun kualitas SDM bangsa dimanapun mereka bertugas. Dosen perguruan tinggi memiliki fleksibilitas untuk bertugas di perguruan tinggi manapun di wilayah negara republik Indonesia. Mobilitas seperti ini sangat diperlukan untuk membantu pertumbuhan perguruan tinggi yang tersebar diseluruh propinsi di Indonesia. Pengelolaan dosen perguruan tinggi ini termasuk penggajiannya perlu diletakkan dalam tanggung jawab dan kewenangan nasional.

#### c. Kurikulum

Kurikulum nasional yang diterapkan diseluruh satuan pendidikan di Indonesia merupakan content pendidikan nasional. Karena itu sistem pengembangan termasuk strategi yang diterapkan dan penetapan jenis matapelajaran untuk setiap satuan pendidikan berada didalam tanggung jawab dan kewenangan nasional. Daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sosial budaya setiap daerah untuk memperkaya kurikulum sekolah.

#### d. Standard Nasional Pendidikan

Standard Nasional Pendidikan ( SNP ) yang diberlakukan untuk setiap satuan pendidikan dan setiap jenis dan jenjang sebagai patokan untuk mengembangkan mutu pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Pengembangan SNP ini berada pada kewenangan dan tanggung jawab nasional, sedangkan implementasi perwujudannya menjadi tugas dan tanggung jawab daerah dan satuan pendidikan.

#### e. Pendanaan

Pendanaan pendidikan sesuai dengan PP NO 48/2009, disertai dengan berbagai peraturan perundangan lainnya berada dalam kendali kementerian keuangan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan distribusi dan alokasi serta penetapan prioritas program sehingga alokasi yang diberikan kepada sektor pendidikan dipergunakan secara tepat tanpa adanya kebocoran dalam penggunaannya. Pengelolaan dana pendidikan ini harus berada dalam kendali Kemendikbud secara nasional.

#### f. Akreditasi



Akreditasi yang berfungsi untuk menilai kelayakan dan kemampuan setiap satuan pendidikan dalam memenuhi standard dan kreteria mutu yang telah ditetapkan, menjadi tanggung njawab Badan Akreditasi Nasional. Terdapat tiga badan akreditasi nasional di Indonesia yaitu: BAN PT, BAN S/M dan BAN PNF. Keseluruhan badan akreditasi nasional ini dikelola secara nasional. Khusus untuk BAN S/M, karena besarnya dan luasnya cakupan dan tanggung jawab pelaksanaan akreditasi sekolah /madrasah, maka pada setiap propinsi dibentuk BAP S/M yang bertugas melaksanakan akreditasi di propinsi tersebut dengan berpedoman kepada perangkat akreditasi dan mekanisme akreditasi yang ditetapkan BAN S/M. Dalam implementasi proses akreditasi S/M, pengawasan dan pengendalian berada dalam tanggung jawab dan kewenangan BAN S/M. Sistem manajemen BAN S/M merupakan perpaduan antara sentralisasi dan otonomi yang diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga rentang kendali dan line of command jelas tidak terputus dari pusat hingga daerah. Terdapat kerjasama yang efisien dan efektif antara BAN S/M pada tingkat pusat dengan BAP S/M pada tingkat propinsi dan menjangkau tingkat kabupaten dan kota dalam pelaksanaan akreditasi. Penggunaan ICT dalam proses manajemen BAN S/M merupakan faktor yang menjaga dan memelihara kesatuan komando dan leadership dari pusat hingga daerah.

#### 4. Strategi Dasar

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rediasin sistem pengelolaan nasional pendidikan Indonesia diperlukan strategi Dasar yang mengarahkan keseluruhan kegiatan redisain dengan tepat dan dalam koridor pengelolaan pendidikan nasional Indonesia berbasis otonomi daerah sebagai satu sistem pengelalolaan nasional yang andal dan profesional. Strategi dasar ini mencakup beberapa langkah sebagaimana berikut ini.

- a. Melakukan Need assessment untuk mengetahui lebih detail ketidak berfungsi sistem secara total dan ketidak berfungsi subsistem, mengkaji ulang fungsi-fungsi, distribusi kewenangan dan tanggung jawab serta requirements yang diperlukan, melalui proses diagnostic system secara total dan rinci.
- b. Mendesain sebuah kerangka sistem atas dasar hasil need assessment secara total dari pusat hingga daerah dan satuan pendidikan tanpa ada potongan-potongan sistem dengan berpegang kepada sistem pengelolaan yang disentralistik terpadu.
- c. Menyusun struktur organisasi yang ramping, lentur dan memiliki daya respond tinggi dan kapasitas besar secara proporsional dari pusat hingga daerah dan satuan pendidikan
- d. Menetapkan kewenangan, tanggung jawab dan fungsi-fungsi yang tepat antara berbagai subsistem tersebut dalam kerangka keutuhan sistem,keutuhan leadership dan keutuhan proses sistem
- e. Merevisi perundangan yang ada sebagai dasar legal yang menjadi pegangan secara nasional dari pusat hingga daerah termasuk merevisi undang-undang otonomi daerah dengan segala peraturan yang merupakan turunannya.

- f. Memepersipakan SDM yang profesional untuk melaksanakan sistem pengelolaan nasional pendidikan Indonesia dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- g. Menyiapkan berbagai sumberdaya untuk mendukung implementasi sistem secara penuh baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.

## 5. Bentuk Kerangka Sistem Pengelolaan Nasional Pendidikan Berbasis Otonomi Daerah

Sistem Pengelolaan Nasional Pendidikan ini terdiri dari tingkat Pusat, Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota.

### a. Tingkat Pusat

Pada tingkat pusat unsur-unsur sistem terdiri dari Menteri, Sesjen dan sejumlah Unit utama dengan unit-unit sesuai kebutuhan untuk setiap unit utama, yang ramping, lentur dan memiliki daya respond managerial tinggi.

Pada tingkat pusat ini juga dibentuk line of coordination and consultation dengan berbagai kementerian lain yang menyelenggarakan pendidikan sesuai UU Sisdiknas

### b. Tingkat Propinsi

Susunan Organisasi tingkat propinsi merupakan perpanjangan susunan organisasi tingkat pusat. Pada tingkat Propinsi terdapat seorang kepala yang dibantu oleh seorang wakil kepala dan sekretaris, dengan berbagai unit sesuai kebutuhan masing-masing unsur. Menteri Pendidikan memiliki line of command yang jelas dengan Disdik Propinsi dan Disdik Propinsi bertanggung jawab kepada Menteri dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin pengelolaan pendidikan tingkat propinsi disamping secara organisatoris juga bertanggung jawab kepada Gubernur. Kepala Disdik Propinsi secara fungsional merupakan atasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, sehingga pada tingkat propinsi terdapat satu kesatuan leadership dalam pengelolaan pendidikan ditingkat propinsi.

### c. Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tingkat Kabupaten/Kota terdapat seorang Kepala Disdik dibantu oleh seorang wakil kepala dan seorang sekretaris. Setiap unit terdiri dari sejumlah sub unit sesuai kebutuhan, sehingga membentuk satu organisasi yang ramping, lentur dan memiliki kemampuan management tinggi dalam melaksanakan tugas dalam pengelolaan pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota.

Kepala Disdik Kabupaten /Kota secara fungsional merupakan bawahan dari Disdik tingkat Propinsi. Secara organisatoris Kepala Disdik Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota, sehingga semua kabupaten dan kota didalam setiap propinsi memiliki jalur vertikal dan horizontal dalam pengelolaan pendidikan di tingkat propinsi. Pada tingkat Kabupaten/Kota inilah terdapat banyak sekali satuan pendidikan dengan berbagai jenis dan jenjang yang menjadi tanggung jawab Dinas Kabupaten dan Kota untuk mengelola secara profesional.

Pengendalian dan Pengawasan dilakukan secara hirakis. Pada tingkat propinsi pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh propinsi terhadap seluruh pengelolaan pendidikan di Kabuapten/Kota di propinsi itu. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan tingkat propinsi menjadi tanggung jawab tingkat pusat. Dengan demikian line of control terbina dan berfungsi secara terus menerus. Kerangka Sistem Pengelolaan Nasional Pendidikan Indonesia secara visual disajikan terpisah.

## **KESIMPULAN**

1. Sistem pengelolaan pendidikan Indonesia yang berbasis otonomi daerah seperti yang berlaku saat ini memunculkan begitu banyak permasalahan yang berakibat kepada melemahnya kemampuan pendidikan nasional dalam membangun kualitas bangsa dan dalam mewujudkan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh.
2. Karena permasalahan yang mengemuka begitu serius dan mendasar dan menghambat penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia, maka diperlukan adanya perancangan ulang dalam upaya menata ulang sistem pengelolaan pendidikan secara nasional yang andal, profesional dan terpercaya serta memiliki kemampuan untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara optimal, adil dan merata.
3. Didalam perancangan dan penataan ulang tersebut perlu dibangun sebuah sistem pengelolaan nasional pendidikan yang memiliki line of command jelas dari pusat hingga daerah tanpa terputus dan tanpa dihambat oleh birokrasi pemerintahan daerah, sehingga terciptalah satu kesatuan manajemen nasional dari pusat hingga daerah yang utuh dan kokoh.
4. Dengan terbentuknya satu sistem dan satu kesatuan manajemen yang utuh, maka harus diwujudkan satu kesatuan leadership dari pusat hingga daerah yang didukung oleh SDM profesional dengan kemampuan leadership yang andal dan dapat dipercaya.
5. Dengan kerangka sistem pengelolaan nasional pendidikan Indonesia seperti diuraikan diatas, maka pengelolaan pendidikan nasional Indonesia untuk masa mendatang diharapkan akan berfungsi lebih andal, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa yaitu terwujudnya kesempatan pendidikan yang berkualitas, adil dan merata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# Penataan Kembali Manajemen Tenaga Guru Di Daerah: Desentralisasi atau Sentralisasi?

Agus Dwiyanto<sup>1</sup>

## Catatan Kritis Terhadap Desentralisasi Kepegawaian Guru

Pasca pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi kepegawaian guru menjadi salah satu perdebatan yang menarik di kalangan para pemerhati pendidikan dan otonomi daerah. Kontroversi muncul karena pengalaman melakukan desentralisasi pendidikan, termasuk dalam manajemen kepegawaian guru telah menimbulkan banyak pengalaman buruk di banyak daerah. Pengalaman buruk tersebut diantaranya adalah meningkatnya keterlibatan guru dalam politik praktis, ketimpangan distribusi kuantitas dan kualitas guru antar daerah, dan migrasi guru ke dalam jabatan birokrasi pemerintah. Pengalaman seperti ini tentu tidak menjadi monopoli guru, tetapi juga terjadi pada tenaga kesehatan dan aparatur sipil di daerah pada umumnya.

Ketika desentralisasi pendidikan dan pengelolaan tenaga guru dilakukan, maka terjadi pergeseran akuntabilitas guru. Akuntabilitas guru yang sebelumnya kepada Menteri Pendidikan bergeser kepada Kepala Daerah. Guru tidak lagi bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pendidikan kabupaten/kotasebagai wakil menteri di daerah tetapi bertanggungjawab kepada kepala daerah. Sebagian besar dari urusan manajemen kepegawaian guru dan tenaga kependidikan yang dulunya ada di kantor wilayah/ kantor departemen, dialihkan menjadi urusan pemerintahan daerah. Manajemen kepegawaian guru menjadi bagian tak terpisahkan dari manajemen kepegawaian daerah.

Menguatnya politisasi dalam pengelolaan kepegawaian daerah tidak dapat dihindari berimbas pada politisasi tenaga guru. Pemilihan kepada daerah (pilkada) secara langsung telah mendorong terjadinya politisasi birokrasi di daerah. Kegagalan pemerintah dalam melembagakan profesi aparatur sipil dan profesi guru membuat birokrasi dan sekolah gagal menjadi institusi yang bebas dari politik praktis. Kegagalan tersebut memberi peluang bagi petahana dan calon kepala daerah untuk menjadikan birokrasi menjadi mesin politik dan mesin pengumpul suara. Guru dan aparatur sipil yang memiliki kedudukan social yang tinggi di dalam masyarakat dapat menjadi mesin pengumpul suara dalam pilkada. Tidak mengherankan jika petahana dan calon kepala daerah menjadikan aparatur sipil dan guru menjadi bagian dari mesin politik mereka dalam kemenangan pilkada.

Kecenderungan petahana dan calon kepala daerah menjadikan guru sebagai bagian dari mesin politik untuk kemenangan pilkada memiliki dampak negative yang cukup besar bagi profesi guru. Hal itu dapat merusak independensi profesi guru dan institusi sekolah dalam politik praktis. Fragmentasi guru dan sekolah menurut pilihan calon kepala daerah sering terjadi di banyak daerah. Keterlibatan dalam memenangkan calon kepala daerah menjadikan guru

---

<sup>1</sup> Guru besar ilmu Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM

sebagai actor politik praktis untuk kepentingan yang sempit dan jangka pendek. Situasi seperti ini tentu tidak menguntungkan dalam pengembangan profesi guru, yang mestinya bersifat non-partisan.

Namun, pada sisi lain politisasi guru bagi sebagian guru dilihat sebagai peluang untuk menduduki jabatan dalam birokrasi di daerah. Terlibat dalam tim sukses calon kepala daerah sering menjadi salah satu cara untuk dapat menduduki jabatan dalam birokrasi secara cepat dan mudah. Ketika penempatan dalam jabatan birokrasi tidak dilakukan secara merit, terbuka, dan kompetitif maka promosi jabatan dapat dilakukan secara subyektif berdasarkan selera dan kedekatan dengan kepala daerah. Karena itu, pergantian kepala daerah sering diikuti dengan pergantian secara massal kepala satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dan pejabat struktural lainnya secara massal. Guru yang ingin menduduki jabatan dalam birokrasi melihat politisasi guru sebagai berkah. Mereka secara sadar melibatkan diri agar mereka dapat memiliki akses terhadap kekuasaan dan akses tersebut dapat digunakan untuk memperoleh jabatan dalam birokrasi.

Akses guru terhadap kekuasaan dan politik lokal menjadi pintu masuk guru dalam jabatan birokrasi. Dalam lima tahun terakhir, migrasi guru ke dalam jabatan birokrasi di pemerintahan daerah terjadi di banyak daerah, terutama di daerah otonom baru hasil pemekaran. Disamping karena meningkatnya akses guru terhadap kekuasaan, juga disebabkan oleh sistem promosi yang mengandalkan pada daftar urutan kepangkatan. Ketika daftar urutan kepangkatan menjadi salah satu syarat penting untuk dapat menduduki jabatan struktural tertentu maka guru yang pada umumnya memiliki pangkat yang tinggi menjadi diuntungkan. Peluang mereka untuk menduduki jabatan struktural lebih besar daripada PNS non-guru karena pangkat guru umumnya lebih tinggi dari PNS non-guru.

Migrasi guru kepada jabatan non-guru termasuk dalam jabatan struktural di berbagai SKPD diluar dinas pendidikan tentu memiliki efek negatif bagi kepentingan pendidikan dan pengembangan birokrasi yang profesional. Bagi pembangunan pendidikan di daerah, migrasi guru ke dalam jabatan birokrasi dapat memperburuk kualitas pendidikan, karena daerah umumnya masih amat kekurangan guru. Tenaga guru yang jumlahnya masih terbatas malah sebagian disedot untuk menduduki jabatan birokrasi. Lagi pula masuknya guru ke dalam jabatan birokrasi dapat memiliki implikasi negatif terhadap pengembangan profesi guru. Guru yang dialih tugaskan untuk menduduki jabatan birokrasi tidak akan menjadi lebih matang kapasitas profesionalnya ketika menjadi pejabat birokrasi. Yang sering terjadi justru mereka seringkali tertular penyakit KKN yang sudah endemic dalam kehidupan birokrasi di Indonesia. Ketika guru yang sudah terkontaminasi dengan penyakit KKN tersebut kembali ke sekolah mereka dikawatirkan membawa penyakit tersebut dalam lingkungan sekolah.

Bagi masyarakat luas yang menginginkan adanya pelayanan publik yang baik dan pemerintahan yang efektif, masuknya guru ke dalam jabatan birokrasi juga menjadi problematika tersendiri. Semakin besarnya jumlah guru yang masuk ke dalam jabatan birokrasi membuat angka mismatch dalam jabatan birokrasi di daerah semakin tinggi. Guru tidak pernah disiapkan untuk menduduki jabatan

di berbagai SKPD, karenanya mereka tidak memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk mengelola kegiatan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan daerah. Akibatnya tentu dapat dibayangkan. Kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah cenderung menjadi tidak optimal karena tidak dikelola oleh mereka yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk itu. Migrasi guru ke dalam jabatan birokrasi yang tidak terkait dengan pendidikan mestinya harus dicegah dan ditekan seminimal mungkin agar tidak merugikan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelayanan publik secara keseluruhan.

Disamping itu, desentralisasi pendidikan juga cenderung menghasilkan ketimpangan kualitas dan kuantitas antar daerah. Ketika desentralisasi dilakukan pada pemerintahan kabupaten/ kota maka ketimpangan kualitas dan kuantitas guru antar daerah menjadi keniscayaan. Apalagi ketika pemerintah (Kemdikbud) gagal melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada daerah untuk mematuhi standar kualitas dan kuantitas guru sebagaimana diatur dalam standard nasional pendidikan dan atau SPM bidang pendidikan, maka ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah menjadi takterhindarkan. Warga dan atau anak didik, dimanapun mereka bertempat tinggal, yang mestinya memiliki hak untuk mengakses pendidikan dengan kualitas yang minimal sama dengan yang diatur dalam SPM, dalam kenyataannya mereka seringkali mengalami ketimpangan akses dan ketimpangan kualitas pendidikan.

Daerah yang memiliki KDH yang peduli pada pendidikan dan memiliki kapasitas fiskal yang memadai warganya dapat menikmati akses dan kualitas pelayanan yang baik. Sebaliknya, daerah yang memiliki KDH yang kurang peduli pada dunia pendidikan warganya cenderung memiliki akses dan kualitas pendidikan yang rendah. Ketimpangan seperti ini sebenarnya dapat dihindari atau setidaknya dapat ditekan seminimal mungkin jika Kemdiknas, baik secara langsung ataupun melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan Binwas secara efektif. Pemerintah juga dapat menggunakan instrument DAK dan sumber-sumber lain yang tersedia untuk mengurangi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar daerah.

Kondisi seperti ini sering menjadi salah satu pemicu dari munculnya berbagai pemikiran di kalangan para pemerhati dan aktivis pendidikan dan otonomi daerah untuk meninjau kembali berbagai kebijakan yang selama ini dilakukan dalam rangka desentralisasi pendidikan, termasuk dalam pengelolaan manajemen kepegawaian guru. Akhir-akhir ini mulai muncul banyak pertanyaan tentang manfaat desentralisasi kepegawaian yang selama ini dilakukan. Apakah desentralisasi manajemen kepegawaian guru adalah pilihan yang tepat untuk mempercepat pembangunan pendidikan di daerah? Apa yang sebaiknya dilakukan untuk membangun profesi guru agar guru dapat berperan secara positif dalam pembangunan pendidikan di daerah?

#### Desentralisasi Vs Sentralisasi: Bukan Dikotomis Tetapi Kontinum

Melihat besarnya efek negative dari desentralisasi kepegawaian guru, banyak pihak mulai memikirkan kembali perlunya melakukan sentralisasi pendidikan

dan manajemen kepegawaian guru. Argumentasi yang dibangun untuk mendorong resentralisasi manajemen kepegawaian guru adalah agar kepegawaian guru dapat dipisahkan dari hiruk pikuk politik local, utamanya pemilihan kepala daerah. Ketika manajemen kepegawaian dilakukan oleh pemerintah pusat maka sampah politik dari pilkada dapat dicegah untuk masuk dalam lingkungan sekolah dan guru. Guru dan kepala sekolah diharapkan menjadi lebih independen dalam menghadapi pilkada dan kegiatan-kegiatan politik local lainnya. Migrasi guru ke dalam jabatan birokrasi di berbagai SKPD juga dapat dihindari sehingga pengendalian kebutuhan guru relative lebih mudah dilakukan oleh pemerintah.

Sementara mereka yang menolak sentralisasi berargumentasi bahwa penarikan kembali urusan kepegawaian guru akan menimbulkan masalah baru ketika pengelolaan sekolah masih menjadi urusan daerah. Ketika pengelolaan guru dikeluarkan dari pengelolaan sekolah maka akan muncul masalah koordinasi dan harmonisasi kegiatan sekolah, karena sekolah dan atau komponen-komponennya dikendalikan oleh rezim yang berbeda. Pengelolaan kepegawaian guru oleh pemerintah pusat juga tidak menjamin bahwa guru akan bebas dari politisasi kepentingan praktis dan sempit. Sebagaimana diketahui politisasi juga terjadi dalam birokrasi di kementerian, walaupun tidak semasif seperti yang terjadi di daerah.<sup>2</sup>

Sentralisasi juga dikawatirkan akan mendorong terjadi penyeragaman dalam tindakan pemerintah untuk merespon berbagai masalah pendidikan yang amat beragam antar daerah.<sup>3</sup> Pengalaman buruk dalam alokasi DAK pendidikan tahun 2010 untuk buku dan perpustakaan, sementara sebagian besar daerah masih membutuhkan tambahan dan rehabilitasi ruang sekolah, mengingatkan kembali tentang risiko dari sentralisasi pendidikan. Variabilitas daerah yang amat tinggi dalam berbagai hal membuat sentralisasi pendidikan dalam banyak hal tidak realistis. Namun, bukan berarti bahwa sentralisasi tidak memiliki tempat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sentralisasi dapat dan penting dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan yang bersifat strategis dan mendasar yang terlalu riskan jika penentuannya diserahkan kepada diskresi pimpinan daerah.

Pilihan sentralisasi atau desentralisasi pendidikan sebenarnya tidak bersifat dikotomis, karena keduanya ada pada satu kontinum. Di banyak Negara pilihan derajat desentralisasi vs resentralisasi ditentukan oleh banyak factor seperti variabilitas daerah, kapasitas daerah dan aparatur, dan sifat dan dinamika dari urusan atau pelayanan pendidikan. Urusan pendidikan yang penyelenggaraannya amat dipengaruhi oleh kondisi local, memiliki dinamika

---

<sup>2</sup>Politisasi guru di daerah menjadi masif dan sulit dikendalikan karena pelaku sangat banyak dan melibatkan actor politik yang berbeda-beda. Sementara di Kementerian actor politiknya terbatas jumlahnya sehingga relative lebih mudah dikendalikan.

<sup>3</sup>Pengalaman pemerintahan Orde Baru yang amat sentralistis dan melakukan penyeragaman dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masih amat traumatic bagi para pemangku kepentingan di daerah. Sentralisasi menghasilkan penyeragaman kelembagaan, manajemen pelayanan, dan proses pelayanan berbasis pada ukuran-ukuran berlaku di Jawa.

yang tinggi, bersifat kebutuhan dasar, dan risiko terjadi kesalahan relative kecil, maka urusan pendidikan tersebut sebaiknya diserahkan kepada daerah. Urusan pendidikan yang sifatnya homogen antar daerah, risiko jika menjadi diskresi daerah amat besar dan berdampak luas, dinamika perubahannya relative rendah sebaiknya dikelola oleh pemerintah pusat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan dapat membangun pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel kalau dapat mengambil keputusan yang tepat dan cerdas dalam menentukan mana yang seharusnya dilakukannya sendiri dan mana yang seharusnya diserahkan kepada daerah.

Gambar 1.2  
Derajat Sentralisasi dan Desentralisasi



Ketepatan dalam mengambil pilihan sentralisasi vs desentralisasi harus juga diikuti oleh perbaikan kualitas implementasi. Kegagalan pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia, sebagaimana dalam bidang lainnya, juga amat dipengaruhi oleh ketidakmampuan pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola implementasi desentralisasi pendidikan secara efektif. Keputusan untuk mendesentralisasikan sebagian urusan pendidikan kepada provinsi dan kabupaten/ kota harus diikuti dengan NSPK yang jelas dan diikuti dengan Binwas yang efektif. Desentralisasi membutuhkan adanya pemerintah pusat yang kuat dan solid, yaitu pemerintah yang dapat membuat standar dan pedoman yang jelas bagi daerah yang akan melaksanakan urusan yang telah diserahkan dan mampu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada daerah. Jika tidak diikuti dengan NSPK dan Binwas yang efektif maka desentralisasi dapat menghasilkan kesemrawutan dan kekacauan penyelenggaraan pendidikan.

#### Penataan kembali manajemen kepegawaian guru

Dengan menggunakan asumsi bahwa pilihan desentralisasi vs sentralisasi dalam bidang pendidikan dan manajemen tenaga guru bersifat kontinum, maka pertanyaan yang perlu dijawab khususnya dalam manajemen tenaga guru adalah kegiatan mana yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah pusat dan mana sebaiknya dilakukan pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan oleh UU N0.32/2004 adalah efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas. Namun, kriteria tersebut jarang sekali dipergunakan karena maknanya tidak jelas dan arahnya bertentangan satu dengan lainnya.<sup>4</sup> Untuk membantu memahami kompleksitas

<sup>4</sup>Kriteria akuntabilitas dalam UU 32/ 2004 diartikan secara salah dan tidak sesuai dengan praktik internasional. Akuntabilitas didalam UU tersebut mendorong pada



dalam mengambil pilihan desentralisasi manajemen tenaga guru maka beberapa kriteria seperti variabilitas, risiko jika terjadi kesalahan, dan efektivitas perlu juga dipertimbangkan dalam mengambil pilihan dalam mereformasi manajemen tenaga guru.

Pengelolaan tenaga guru secara sederhana dapat dirinci kedalam beberapa fungsi atau urusan antara lain: perencanaan dan sistim informasi, rekrutasi, pengembangan kapasitas, distribusi, penilaian kinerja, pengembangan profesi, dan penggajian.<sup>5</sup>Pilihan sentralisasi dan desentralisasi dapat dilakukan pada tingkat urusan ataupun pada tingkat kegiatan.Misalnya, dalam urusan rekrutasi guru, pemerintah pusat dapat mengambil alih semua kegiatan rekrutasi dan melaksanakan sendiri semuanya (sentralisasi penuh).Namun, pemerintah pusat dapat juga menggunakan asas penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam mengelola berbagai kegiatan rekrutasi. Jika pemerintah hanya menganggap perlu untuk melakukan standardisasi kriteria dan proses rekrutasi, pemerintah dapat membuat standar dan pedoman rekrutasi dan mendekonsentrasikan pelaksanaannya kepada wakil pemerintah di daerah (dekonsentrasi), menugaskan kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusannya (tugas pebantuan) sesuai dengan standar, kriteria, dan cara yang dikehendaknya atau menyerahkan sebagian dari urusan rekrutasi pada pemerintah daerah (desentralisasi).

Pertanyaanya adalah untuk membangun profesi guru yang independen dan peduli kepada kepentingan dan tujuan pendidikan, apa pilihan sebaiknya diambil oleh pemerintah dalam menatakembali kepegawaian guru? Kapan dan untuk urusan yang mana sebaiknya pemerintah melakukan sentralisasi, dekonsentrasi, tugas pebantuan, dan desentralisasi?Untuk membantu menjawab pertanyaan ini berbagai kriteria seperti yang dijelaskan diatas penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan.

Penggunaan kriteria tersebut penting untuk menjamin agar pengambilan keputusan tentang pilihan sentralisasi atau desentralisasi benar-benar didasarkan pada pertimbangan kepentingan publik.Hiruk-pikuk perdebatan tentang pilihan kebijakan sentralisasi vs desentralisasi sering didominasi oleh kepentingan actor dan pemangku kepentingan yang sempit. Actor-aktor di kabupaten/ kota, provinsi, dan kementrian sering melihat manfaat dan kerugian dari pilihan tersebut dari kacamata yang sempit, yaitu dilihat dari kepentingan mereka untuk mengakses kekuasaan dan anggaran. Karena agar perdebatan tentang pilihan kombinasi optimal antara sentralisasi dan desentralisasi dapat

---

penyerahan urusan pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Sedangkan kriteria efisiensi dan eksternalitas sering mengarahkan pada pilihan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat pemerintahan yang mengelola satu urusan pemerintahan tertentu maka semakin tinggi efisiensinya dan semakin rendah kemungkinan terjadinya eksternalitas.

<sup>5</sup>Diskusi tentang pilihan untuk mengambil titik keseimbangan dalam garis kontinum desentralisasi- sentralisasi dalam bidang kepegawaian dapat dibaca dalam Agus Dwiyanto, 2011.*Mengembalikan Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

dilakukan secara terbuka dan memperhatikan kepentingan publik, maka kriteria seleksi dan penilaiannya harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan inklusif.

Pengelolaan tenaga guru tentu juga sangat tergantung pada kebijakan pemerintah secara keseluruhan untuk menata kembali kebijakan desentralisasi pendidikan. Karena berbagai aspek dari pengelolaan tenaga guru dipengaruhi oleh pengelolaan sekolah maka penataan kembali pengelolaan tenaga guru akan sedikit-banyak sangat terpengaruh oleh distribusi urusan pendidikannya. Untuk itu sebelum membicarakan pengelolaan tenaga guru maka paper ini secara ringkas akan mendiskusikan tentang distribusi urusan pendidikan menurut jenis tingkat pendidikan.

Tabel berikut memberi satu contoh pemikiran untuk menatakembali desentralisasi pendidikan di Indonesia dengan mempertimbangkan kriteria efisiensi, eksternalitas, dan efektivitas. Tabel ini memberikan menu kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemerintah sesuai dengan amanat UU 32/ 2004 dapat mendistribusikan urusan pemerintahan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam UU tersebut kepada berbagai tingkat pemerintahan. SMA dan SMK yang selama ini dikelola oleh kabupaten/ kota karena pertimbangan efisiensi, eksternalitas, dan kapasitas sebaiknya diserahkan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi yang memiliki kapasitas dan kebutuhan untuk mengembangkan program diploma dapat mengembangkan program diploma yang melayani kebutuhan warga di provinsinya. Pemerintah provinsi yang tidak memiliki kebutuhan dan kapasitas mereka tidak harus mengembangkan program diploma. Dengan model menu terbuka seperti ini maka pembagian urusan dapat bersifat asimetrik.

Tabel 1  
Pembagian Peran Dalam Urusan Pelayanan Pendidikan  
Berdasarkan Jenis Pendidikan<sup>6</sup>

Fungsi Pelayanan	Fungsi Manajemen Pemerintahan			
	Kebijakan	Provisi	Produksi	Binwas

<sup>6</sup> Pembagian peran di sini tidak dilakukan berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007, tetapi berdasarkan pertimbangan penulis. Dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 pembagian peran tidak dilakukan berdasar jenis pendidikan, tetapi berdasarkan atas jenis kegiatan yang dalam banyak hal dilakukan dengan menggunakan kriteria yang tidak jelas. Pembagian peran dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 lebih banyak mengakomodasi kepentingan sempit dari kementerian sektoral, tidak didasarkan atas pertimbangan konsepsional yang memadai. Akibatnya, pembagian peran antar tingkat pemerintahan dalam PP tersebut seringkali sangat rancu. Dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 SMK menjadi urusan kabupaten/ kota sedangkan diploma menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam Tabel ini SMA, SMK, dan diploma berdasarkan pertimbangan eksternalitas dan efisiensi diusulkan menjadi urusan pemerintah provinsi. Diskusi lebih lanjut tentang hal ini dapat dibaca di Dwiyanto, 2012. Ibid.

	(NSPK)			
Pendidikan dasar 9 tahun	Pem	KK	KK/ S/ M	Pem
Pendidikan Menengah/ Kejuruan	Pem	Prov	Prov/ S/ M	Pem
Pendidikan Politeknik	Pem	Prov	Prov/ S/ M	Pem
Universitas	Pem	Pem	Pem/ S/ M	Pem
Pendidikan luar sekolah	Pem	KK	KK/ S/ M	Pem

Sumber: Dwiyanto, Agus, 2012, edisi kedua. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal 55.

Pemikiran ini berusaha memperkuat peran pemerintah provinsi dalam desentralisasi pendidikan. Dengan asumsi bahwa kebijakan desentralisasi fiskal tidak mengalami perubahan maka pengalihan sebagian urusan kabupaten/ kota dan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan perlu dilakukan. Pemerintah provinsi dengan kapasitas fiskal yang cukup besar selama ini memiliki urusan pendidikan yang minimal. Sebaliknya, pemerintah kabupaten/ kota dengan kapasitas fiskal terbatas menerima begitu banyak urusan pemerintahan. Pemikiran ini mengusulkan agar pemerintah kabupaten/ kota konsentrasi pada pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah. Penataan kembali urusan pendidikan perlu dilakukan untuk mengalihkan sebagian urusan pendidikan yang ada di kabupaten/ kota yang dinilai dari kriteria efisiensi, efektivitas, dan kapasitas lebih baik dikelola pemerintah provinsi. Salah satu urusan yang sebaiknya diserahkan kepada provinsi adalah pengelolaan SMK. Cakupan pelayanan SMK yang umumnya mencakup lebih dari satu kabupaten/ kota dan kebutuhan pembeayaan yang cukup besar untuk mengelola SMK membuat pengelolaan SMK oleh pemerintah provinsi menjadi lebih efisien dan efektif.

Beberapa provinsi juga memiliki kebutuhan dan kapasitas untuk mengelola sekolah vokasi dan program diploma. Banyak pemerintah provinsi yang selama ini telah terlibat dalam memfasilitasi pengembangan perguruan tinggi di wilayahnya. Pengalihan kewenangan untuk mengelola program diploma dan politeknik kepada pemerintah provinsi diharapkan juga dapat membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi, yang sekarang ini relative masih rendah dibandingkan dengan Negara-negara Asia lainnya. Dengan menata kembali desentralisasi dalam pengelolaan satuan pendidikan maka diharapkan desentralisasi pendidikan di Indonesia menjadi lebih mampu mempercepat upaya pembangunan pendidikan.

Dengan pemikiran desentralisasi pendidikan seperti itu, bagaimana kemudian pengelolaan tenaga guru seharusnya dilakukan? Mana urusan yang sebaiknya dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota? Uraian berikut akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut.

### *NSPK dan Binwas*

Penentuan NSPK dan Binwas selalu menjadi urusan eksklusif pemerintah pusat. Kedua fungsi ini menjadi instrument dari NKRI untuk menjamin kesamaan akses, kualitas, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pemerintah perlu melindungi hak semua warga Negara, dimanapun mereka tinggal, agar mereka memiliki akses yang sama terhadap pelayanan pendidikan yang dijamin keberadaannya oleh Negara atau Pemerintah. Salah satu bentuk dari instrument NSPK ini adalah standar pelayanan minimum (SPM). Melalui NSPK, pemerintah wajib memberi standar dan pendoman kepada daerah tentang bagaimana daerah mengelola urusan yang diserahkan kepadanya. Sedangkan BINwas dapat digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa daerah melaksanakan urusan sesuai dengan NSPK. Binwas juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan memberi penghargaan dan sanksi kepada daerah berdasarkan kinerja yang dimiliki dalam mengelola urusannya. Dalam melaksanakan Binwas pemerintah (kementrian) dapat melaksanakan secara sendiri atau melakukan dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

### *Perencanaan dan sistim informasi*

Dalam Negara kesatuan umumnya pemerintah memiliki otoritas untuk membuat sistim pendidikan nasional dan kebijakan pendidikan yang bersifat nasional. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mengatur tentang standar kompetensi guru, rekrutmen, pengembangan dan distribusi guru. Karena itu keberadaan sistim informasi guru menjadi sangat penting dalam proses kebijakan pengelolaan guru. Sistim informasi tersebut juga amat penting bagi pemerintah dalam perencanaan pendidikan dan pengembangan guru. Pertanyaannya adalah pemerintah yang mana yang seharusnya mengelola pengembangan sistim informasi dan pengaturannya untuk perencanaan pendidikan?

Mengingat kebutuhan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pendidikan dan pengelolaan tenaga guru secara nasional, maka sistim informasi dan perencanaan tenaga guru sebaiknya dikelola oleh pemerintah pusat. Dengan dikelola oleh pemerintah pusat maka standardisasi data dan informasi, pengelolaan, dan pemutakhiran dapat dilakukan secara seragam sehingga lebih mudah mengintegrasikannya kepada sistim informasi nasional. Untuk memudahkan pemerintah dalam mengelola sistim informasi pemerintah dapat memberikan tugas pebantuan (TP) kepada daerah untuk mengelola sistim informasi guru di daerah, sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh pemerintah. Dengan melakukan TP untuk pengelolaan sistim informasi guru di daerah, pemerintah dengan mudah mengintegrasikan sistim informasi guru menjadi sistim informasi guru nasional dan menggunakannya untuk perumusan kebijakan nasional.

### **Tabel 2**

#### **Pembagian Urusan Dalam Pengelolaan Tenaga Guru**

Jenis Urusan	Distribusi Urusan		
	Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota
NSPK dan Binwas	V		
Sistim Informasi dan Perencanaan	V		
Rekrutasi	V		
Penggajian	V		
Distribusi*	V	V	V
Pengembangan Kapasitas**	V	V	V
Penilaian Kinerja*	V	V	V
Pengembangan profesi	V		

\* Tergantung pada penugasan guru pada satuan pendidikan. Misal guru yang ditempatkan di SD dan SMP maka distribusi tenaga guru antar satuan pendidikan dalam wilayah kabupaten/ kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/ kota, antar wilayah kabupaten/ kota menjadi urusan provinsi, dan antar provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

\*\* Pengembangan kapasitas guru sebaiknya menjadi urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, tergantung pada jenis kapasitas dan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk pengembangan kapasitas guru yang generik, seperti kemampuan mengajar sebaiknya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan kemampuan guru yang sifatnya spesifik dan bersifat local dibutuhkan untuk mengajar pada muatan local sebaiknya menjadi urusan daerah.

### *Rekrutasi*

Rekrutasi tenaga guru selama ini dilakukan oleh pemerintah, namun sebagian besar dari kegiatan rekrutasi ditugaskanbantuankan kepada daerah.Daerah melaksanakan sebagian besar dari kegiatan rekrutasi, seperti pendaftaran, pembuatan soal, pelaksanaan tes seleksi, dan pengusulan calon yang diterima kepada pemerintah.Jumlah guru dan komposisinya ditentukan oleh pemerintah berdasarkan pada formasi yang tersedia.Rekrutasi guru dan aparat sipil lainnya selama ini diketahui menjadi arena korupsi baru yang amat sulit dikendalikan. Permainan antara actor yang ada di pemerintah dan daerah untuk melakukan komodifikasi rekrutasi PNS menjadikan pengendalian terhadap proses rekrutasi agar jauh dari KKN amat sulit dilakukan.

Persoalan dari rekrutasi sebenarnya bukan persoalan siapa yang melakukan rekrutasi. Praktik KKN dalam proses rekrutasi akan selalu muncul, siapapun pelakunya, sejauh sistim seleksi tidak dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi dan kecakapan. Pembagian urusan dalam rekrutasi sekarang ini sebenarnya sudah cukup proporsional.Yang menjadi masalah adalah bagaimana mendorong pemerintah mengubah rekrutasi dari berbasis formasi menjadi berbasis posisi sehingga seleksi dapat dilakukan berdasarkan kecakapan dan kompetensi calon. Yang lebih penting keseluruhan proses rekrutasi harus dilakukan secara transparan dan memungkinkan adanya cross-check seandainya ada kecurigaan dari para pihak terhadap pelaksanaan proses seleksi guru dan PNS lainnya.

### *Penggajian*

Penggajian guru dilakukan oleh pemerintah, walaupun daerah memiliki mengembangkan sistim insentif bagi aparat daerah. Penerimaan guru antar daerah berbeda sesuai dengan sistim insentif yang dikembangkan oleh masing-masing daerah. Yang menjadi perdebatan sekarang ini adalah apakah gaji guru dan PNS lainnya yang sekarang ini menjadi bagian dari alokasi dasar dalam DAU akan tetap dipertahankan? Ataukah gaji guru dan PNS sebaiknya dibayarkan melalui APBN sehingga upaya pemerintah untuk menjadikan PNS sebagai bagian dari aparatur sipil nasional menjadi lebih mudah? Pengalokasian gaji guru dan PNS dalam APBN akan mempermudah pelaksanaan redistribusi dan mobilitas PNS, guru, dan tenaga fungsional lainnya.

Persoalan muncul ketika gaji PNS menjadi tanggungan pemerintah pusat dan dibayarkan melalui APBN maka DAU akan habis karena 60-80 persen DAU sekarang ini umumnya sudah digunakan untuk membayar gaji pegawai. Bahkan beberapa DAU dari sebagian daerah sekarang ini mengalami deficit untuk membayar gaji pegawai dan biaya operasional dari birokrasi. Oleh karena itu pilihan ini secara politik tidak feasible karena menghilangkan esensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan pilihan dapat membuka mata para pemangku kepentingan bahwa daerah selama ini sebenarnya tidak memiliki diskresi yang memadai untuk membelanjakan anggarannya karena anggaran sudah habis untuk membayar biaya tetap kebutuhan pegawai.

Ketika penggajian PNS dan guru masih menjadi tanggungan daerah, maka daerah mesti harus memiliki diskresi dalam pengelolaan kepegawaian guru. Walaupun guru adalah bagian dari aparatur sipil nasional dan menjadi milik dari pemerintah nasional, namun guru menjadi bagian dari kepegawaian daerah sehingga gaji pokoknya dapat dibayar oleh APBD. Yang penting untuk diperhatikan adalah pemberian diskresi dalam pengelolaan kepegawaian oleh daerah tidak merusak pengembangan profesi guru.

### *Distribusi guru*

Persoalan distribusi guru dan PNS menjadi perdebatan karena menguatnya ketimpangan distribusi guru dan PNS. Otonomi daerah ikut memberi kontribusi terhadap menguatnya ketimpangan distribusi tenaga guru dan kesehatan. Migrasi keluar tenaga guru dan kesehatan menuju daerah yang mampu memberi penghargaan dan kesempatan berkembang pada guru dan tenaga fungsional lainnya cenderung menguat. Sentralisasi sering dijadikan sebagai wacana untuk mempermudah upaya mengatasi ketimpangan ketersediaan guru antar daerah.

Kecenderungan guru dan PNS untuk bekerja di daerah yang mampu memberi penghargaan yang lebih baik dan memberi kesempatan untuk berkembang adalah keniscayaan. Karena itu, tidak mengherankan kalau pasca otonomi daerah daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi mampu merekrut dan mempertahankan guru dan aparatur sipil yang berkualitas. Sementara daerah yang miskin cenderung mengalami deficit tenaga guru. Untuk mengatasi masalah ketimpangan distribusi pemerintah dapat mengembangkan insentif kepada guru yang bertugas di daerah yang tertinggal. Pemerintah dapat menggunakan

instrumen DAK untuk meningkatkan kemampuan daerah tertinggal mempertahankan dan menarik lebih banyak guru untuk bekerja disana.

Yang penting ditatakembali dalam distribusi guru adalah memperjelas kewenangan pemerintah, provinsi, dan daerah dalam mobilisasi guru. Pemerintah memiliki kewenangan memindahkan guru antar provinsi, provinsi memiliki kewenangan memindahkan guru antar kabupaten/ kota, sedangkan kabupaten memiliki kewenangan untuk memindahkan guru pada satuan pendidikan yang menjadi urusannya dalam wilayah kabupaten/ kota. Dengan memperjelas kewenangan dan mekanisme perpindahannya maka mobilitas tenaga guru menjadi lebih mudah dan transparan sehingga dapat menghindari upaya politisasi dan perilaku KKN.

### *Pengembangan Kapasitas*

Pengembangan kapasitas guru menjadi isu penting dalam rangka meningkatkan kesamaan akses terhadap kualitas pendidikan antar daerah. Karena itu pengaturan tentang urusan pengembangan kapasitas guru perlu diperjelas agar pemerintah dan daerah dapat mengelola kegiatan pendidikan dengan baik. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sebaiknya sentralisasi dilakukan untuk pengelolaan kegiatan yang sifatnya generic dan berlaku umum, sementara desentralisasi lebih cocok untuk dilakukan pada kegiatan yang spesifik dan bermuatan local. Pemikiran ini dapat diterapkan dalam membagi urusan pemerintah dan daerah dalam pengembangan kapasitas guru.

Untuk menjamin kesamaan akses terhadap kualitas sekolah antar daerah maka pemerintah perlu mengelola fungsi peningkatan kapasitas guru untuk muatan umum dari kurikulum nasional, sedangkan menjalankan fungsi peningkatan kapasitas guru untuk mengelola muatan local. Dengan cara ini maka desentralisasi dalam pengembangan kapasitas guru akan dapat dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kompetensi masing-masing tingkat pemerintahan. Karena itu urusan pengembangan kapasitas seharusnya menjadi urusan bersama antar susunan pemerintahan.

### *Penilaian Kinerja*

Penilaian kinerja guru seharusnya juga menjadi urusan bersama antara pemerintah dengan daerah. Semua susunan pemerintahan memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kinerja guru sesuai fungsi masing-masing. Pemerintah kabupaten/ kota yang memiliki fungsi untuk mengelola pendidikan dasar seharusnya memiliki otoritas untuk menilai kinerja guru yang mengajar pada SD dan SMP. Sementara provinsi memiliki otoritas untuk menilai kinerja guru pada sekolah dan satuan pendidikan yang menjadi urusan provinsi. Pemerintah pusat memiliki otoritas untuk menilai kinerja guru/ dosen yang mengajar pada satuan pendidikan yang menjadi fungsi dari pemerintah pusat.

Pemberian sanksi dan penghargaan kepada guru/ staf pengajar sesuai dengan kinerjanya juga seharusnya menjadi kewenangan dari masing-masing susunan

pemerintahan, sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Upaya untuk mensentralisasikan semua urusan penilaian kinerja di tangan pemerintah pusat tentu tidak tepat dan bertentangan dengan prinsip pembagian urusan yang baik. Yang penting secara jelas untuk diatur oleh pemerintah pusat adalah bentuk sanksi, kriteria, cara pelaksanaan, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan berbagai jenis sanksi yang ada.

### *Pengembangan profesi guru*

Kegiatan pengembangan profesi bersifat generic dan berlaku secara nasional. Guru dimanapun mereka mengajar memiliki hak untuk mengembangkan kapasitas profesionalnya. Pelembagaan nilai-nilai dasar profesi guru, code of conduct, dan etika profesi guru harus dilakukan secara berkelanjutan, menyeluruh pada semua guru yang bekerja di semua satuan pendidikan, dan bersifat nasional. Atas dasar pertimbangan ini maka sebaiknya urusan pengembangan profesi guru menjadi urusan pemerintah, bukan urusan daerah.

Walaupun pengembangan profesi guru menjadi urusan pemerintah, dalam pelaksanaannya pemerintah dapat melakukan dekonsentrasi pada gubernur sebagai wakil pemerintah atau melakukan tugas pebantuan kepada daerah provinsi dan atau kabupaten/ kota. Jika pemerintah melakukan dekonsentrasi dan atau tugas pebantuan maka pemerintah harus membuat standar, pedoman, dan pengaturan yang jelas agar gubernur dan daerah ketika melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melakukannya dengan baik dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemerintah.

Dari uraian diatas tampak bahwa sebenarnya solusi terhadap perbaikan efektivitas pengembangan profesi guru tidak sesederhana seperti yang dipikirkan banyak pihak selama ini sebagai persoalan mengambil pilihan desentralisasi dan desentralisasi dalam pendidikan, dan khususnya dalam manajemen kepegawaian guru. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan profesi guru dan pembangunan pendidikan amat kompleks. Masalah tersebut tidak terbatas pada pengambilan pilihan yang tepat dalam garis kontinum desentralisasi dan sentralisasi. Tetapi juga bagaimana pemerintah dapat melakukan pembenahan dalam aspek lain dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah menjadi lebih kondusif bagi pengembangan profesi guru yang solid, non-partisan, dan peduli pada kepentingan pendidikan dan anak didik.

### Catatan penutup

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah telah disadari menimbulkan banyak efek negative terhadap profesi guru dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Politisasi guru, pelibatan guru dalam kegiatan politik praktis, dan migrasi guru kedalam jabatan birokrasi menjadi efek negative dari desentralisasi manajemen kepegawaian guru kepada pemerintah daerah. Efek negative muncul karena pemerintah belum mampu mengembangkan sistim rekrutmen dan promosi aparatur sipil (termasuk guru) yang berbasis pada



kompetensi, terbuka, dan kompetitif. Akibatnya, desentralisasi kepegawaian kepada daerah memberi ruang kepada kepala daerah atau calon kepala daerah untuk menjadikan aparatur sipil dan guru menjadi mesin politik dan pengumpul suara dengan kompensasi jabatan dalam birokrasi. Situasi seperti ini tentu tidak sehat dan harus segera dicarikan solusi yang tepat.

Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut pemerintah perlu mengatur kembali manajemen kepegawaian guru agar pelaksanaannya dapat menjamin independensi guru dari politik local dan memperkuat orientasi pengembangan profesi guru. Solusi yang tepat sebagaimana diuraikan diatas bukan hanya sekedar melakukan sentralisasi dengan menarik kembali urusan kepegawaian yang selama ini diserahkan kepada daerah. Pemerintah perlu memilih dengan cerdas urusan kepegawaian mana yang perlu diambilnya dan mana yang perlu diserahkan kepada daerah. Pemerintah juga perlu secara cerdas menentukan cara melaksanakan urusannya, apakah melaksanakan sendiri, melakukan dekonsentrasi kepada gubernur, dan menugaskan kepada daerah untuk melaksanakan urusannya sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Lebih dari itu, penataan kembali urusan pengelolaan tenaga guru tidak akan efektif tanpa diikuti dengan reformasi pengaturan aparatur sipil (*civil service reform*). Pengaturan baru tersebut seharusnya mampu mengembangkan sistim rekrutmen, penempatan, dan promosi aparatur sipil yang transparan, kompetitif, dan berbasis pada kompetensi.

Bacaan:

Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Dwiyanto, Agus, 2012, edisi kedua. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal 55.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 di Sekolah sebagai  
Sarana Redesain Sistem dan Desentralisasi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Oleh : Mulyono, S.Pd., M.Pd.

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

## **A. Pendahuluan**

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kualitas pendidikan nasional dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut menyatakan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pemerintah berupaya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik menuju peradaban yang bermartabat. Selain itu pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di lain pihak muncul isu terkait dengan dunia pendidikan. Salah satu isu sentral dalam dunia pendidikan di Indonesia menurut Amich Alhumami (2007:1) adalah peningkatan mutu. Isu peningkatan mutu ini memberikan pengertian bahwa pemerintah mulai memperhatikan tentang kualitas mutu pendidikan. Pemerintah berusaha meningkatkan mutu pendidikan, salah satu program peningkatan mutu pendidikan yaitu terbentuknya Sekolah Berstandar

Internasional (SBI). Sekolah yang akan mengajukan SBI harus menerapkan standar sistem manajemen mutu. Persyaratan ini tampak pada salah satu butir dalam janji kinerja SBI yaitu sekolah yang mendapatkan predikat sekolah internasional harus menerapkan standar sistem manajemen mutu (Dit. Pembinaan SMK, 2006).

Penerapan standar sistem manajemen mutu salah satunya ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan seluruh komponen pendidikan di sekolah. Hal ini dikarenakan penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistematis dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan (Permendiknas, 63 Tahun 2003).

Penerapan sistem manajemen mutu ini difokuskan pada pembentukan struktur organisasi yang harus dikembangkan sekolah. Tujuannya agar menghasilkan produk yang bermutu dan berdaya saing. Produk dengan mutu yang jelek tentunya akan membuat pelanggan tidak puas. Kualitas produk yang bermutu ini merupakan salah satu kebijakan penting yang harus dilakukan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan daya saing produk.

Penjaminan mutu di sekolah merupakan sebuah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan. Sehingga harapannya dengan penerapan penjaminan mutu ini pelanggan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan akan memperoleh kepuasan. Tingkat kepuasan pelanggan sesungguhnya sangat tergantung pada mutu suatu produk yang dihasilkan. Menurut Montgomery (1985) *Quality is the extent to which products meet the requirements of people who use them*. Jadi suatu produk dikatakan bermutu bagi seseorang kalau produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Mutu merupakan inti kelangsungan hidup organisasi yang paling besar. Mutu ditentukan oleh para pelanggan. Kebutuhan pelanggan adalah hal utama yang harus dipenuhi. Setelah itu baru menentukan produk yang tepat sesuai dengan keinginan pelanggan (Munro-Faure, 2002:1).

Penerapan desentralisasi yang telah berjalan sepuluh tahun dinilai perlu dikaji ulang. Khusus pada bidang pendidikan perlu ada evaluasi terkait dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sejak reformasi, desentralisasi diberlakukan hampir di semua bidang, kecuali pada lima hal, yaitu keuangan, agama, hukum, dan pertahanan. Sebelum akhirnya ada penambahan bidang, yaitu sektor pendidikan. Namun dampak dari desentralisasi ini belum tampak (Kompas, 8 November 2011).

## **B. Pembahasan**

Persoalan desentralisasi di Indonesia sesungguhnya sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU Nomor. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun 1995. Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Penerapan SMM ISO 9001:2008 bertujuan untuk memberikan manfaat yang besar bagi organisasi yang menerapkannya. Hal ini dikarenakan dengan adanya ISO di setiap bidang dalam pendidikan mempunyai sasaran mutu sendiri-sendiri. Harapannya di setiap bagian tersebut mampu berdiri sendiri sesuai dengan yang ditargetkan. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah. Pada sistem pendidikan yang ada saat ini tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang dimasukkan kedalam sistem pendidikan.

Makalah dengan judul “Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 di Sekolah sebagai Sarana Redesain Sistem dan Desentralisasi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan ini, bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2008 di sekolah

sebagai salah satu alternatif perumusan sistem redesain desentralisasi pendidikan.

Untuk mencapai redesain desentralisasi pendidikan organisasi pendidikan (sekolah atau lembaga terkait) dapat menerapkan delapan prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Kedelapan prinsip tersebut yaitu: (1) fokus pada pelanggan; (2) kepemimpinan; (3) keterlibatan personal; (4) pendekatan proses; (5) pendekatan sistem terhadap manajemen; (6) peningkatan berkesinambungan; (7) pendekatan faktual untuk mengambil keputusan; (8) hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Dengan menggunakan delapan prinsip tersebut diharapkan fokus utama dari Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dapat tercapai.

Analisis data yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan penerapan SMM ISO 9001:2008 pada desentralisasi pendidikan dapat menggunakan model pendekatan kualitatif yang merupakan proses penyederhaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk menyajikan data agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka dalam dalam makalah ini dapat menggunakan Analisis Interactive Model dari Miles & Huberman (1984: 23). *“We consider that analysis consists of three concurrent flows of activity: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification”*. Berdasarkan pernyataan ini maka ada tiga kegiatan utama yang saling berkaitan yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

Berdasarkan uraian di atas dapat disarankan bahwa penerapan SMM ISO sebagai bentuk redesain desentralisasi pendidikan yang dilakukan di sekolah dapat melalui tahapan sebagai berikut.

### **1. Perencanaan (*Planning*)**

Tahap perencanaan meliputi hal-hal yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang, dikonkritkan dan diefektifkan serta dikoordinasikan dengan keadaan pada saat ini. Dengan demikian penyusunan perencanaan dari suatu program membutuhkan ketelitian

dengan mempertimbangkan semua kemungkinan yang akan terjadi dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki.

Perencanaan SMM ISO merupakan penjabaran dari kesimpulan teori perencanaan. Perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen sekolah untuk menanamkan komitmen pada budaya mutu melalui penerapan SMM ISO ditempuh dengan empat program. Program yang dilaksanakan tersebut adalah: 1) penyadaran akan arti penting mutu melalui penerapan SMM ISO; 2) pembentukan tim ISO; 3) penganjuran komitmen pada mutu melalui penerapan SMM ISO; dan (4) pelatihan penyusunan dokumen ISO.

Penyadaran akan arti penting mutu melalui penerapan SMM ISO dimaksudkan untuk membuka wawasan warga sekolah sebagai landasan dalam menciptakan budaya mutu. Penyadaran akan arti penting mutu ini sebagai landasan dalam menciptakan budaya mutu. Ketika warga sekolah sudah sadar akan arti penting mutu ini, penerapan SMM ISO akan mudah diterapkan. SMM ISO merupakan hal baru bagi sekolah, oleh karena itu perlu kesadaran dari dalam diri warga sekolah untuk menerima dan melaksanakan sistem manajemen mutu ini.

Langkah kedua pada tahap perencanaan yaitu pembentukan tim ISO. Tim ISO sebagai pelopor penerapan SMM. Tim ISO di sekolah terdiri atas guru-guru senior yang mempunyai pengaruh. Hal ini dimaksudkan agar guru-guru dan karyawan yang lain mendapatkan contoh dari senior mereka. Tim ini menjamin pemahaman sistem manajemen mutu bagi warga sekolah. Langkah yang ditempuh adalah mengadakan sosialisasi dan *workshop* mengenai SMM ISO yang diterapkan di sekolah.

Langkah ketiga pada tahap perencanaan penerapan SMM ISO yaitu penganjuran komitmen pada budaya mutu. Penganjuran komitmen terhadap budaya mutu memerlukan sebuah sarana. Sarana yang digunakan dalam komitmen pada budaya mutu dengan menerapkan SMM ISO. SMM

ISO yang digunakan mulai dari 9001:2000, yang kemudian diup *grade* menjadi 9001:2008.

Penggunaan SMM ISO sebagai sarana membangun budaya mutu bertujuan untuk perbaikan ke arah sistem manajemen menjadi lebih baik. ISO dipilih sebagai sarana penjaminan mutu dengan alasan ISO 9001:2008 adalah standar internasional yang diakui untuk sertifikasi SMM. SMM menyediakan kerangka kerja bagi sekolah dan seperangkat prinsip-prinsip dasar dengan pendekatan manajemen secara nyata dalam aktivitas rutin sekolah untuk menciptakan konsistensi mencapai kepuasan pelanggan.

Langkah yang terakhir pada tahap perencanaan penerapan SMM ISO adalah pelatihan penyusunan dokumen ISO. Pelatihan penyusunan dokumen mutu ISO supaya mempermudah pimpinan kegiatan di masing-masing unit untuk memahami dokumen yang harus disiapkan dalam menerapkan SMM ISO. Dokumen minimal yang harus ada dalam sistem penjaminan mutu sering disebutkan sebagai delapan prinsip manajemen mutu. Delapan prinsip manajemen mutu ini terdiri dari: organisasi yang berfokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan terhadap proses pendekatan yang sistematis pada manajemen, pembuatan keputusan berdasarkan pendekatan nyata, hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan dan peningkatan berkesinambungan.

## **2. Pengorganisasian**

Pengorganisasian adalah suatu pengaturan atau pembagian pekerjaan yang dialokasikan kepada sekelompok orang atau karyawan yang dalam pelaksanaannya diberikan tanggung jawab dan wewenang sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengorganisasian SMM ISO merupakan penjabaran dari kesimpulan teori pengorganisasian di atas. Fungsi pengorganisasian meliputi penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melaporkan kepada siapa, serta di mana keputusan harus diambil. Dengan

pengorganisasian yang jelas maka akan tersusun *job discription* bagi tiap personil yang tergabung dalam suatu program.

Pengkoordinasian dalam penerapan SMM ISO dilakukan oleh Kepala Sekolah. Kepala Sekolah membagikan tugas pengorganisasian sistem manajemen mutu kepada guru dengan memperhatikan *background* kemampuan dan pendidikannya. Tujuannya adalah agar guru tersebut mampu menyusun materi sistem manajemen mutu sehingga dapat dijalankan pada bidang kerjanya. Selanjutnya pembagian tugas tersebut di tuangkan dalam surat keputusan kepala sekolah.

### **3. Penggerakan**

Tahap penggerakan menggambarkan bagaimana pemimpin mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial. Penggerakan adalah proses mendapatkan semua keinginan dan pencapaian anggota dalam kelompok dan berjuang untuk kualitas pencapaian tujuan-tujuan itu karena mereka menginginkan pencapaian tersebut.

Penggerakan penerapan SMM ISO dimulai dari tahap penyusunan dokumen SMM ISO. Penyusunan dokumen SMM ISO bertujuan mengupayakan terus-menerus suatu sistem dalam rangka mewujudkan mutu produk. Selain itu penyusunan dokumen SMM ISO berlandaskan pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, melaksanakan komitmen, perbaikan sistem manajemen, dan pengendalian sistem untuk memberikan arah pelaksanaan dan perbaikan kebijakan manajemen yang akan dicapai.

Tahap yang *kedua*, penggerakan penerapan SMM ISO yaitu *upgrade* dokumen SMM ISO 9001:2000 menjadi SMM ISO 9001:2008. Alasan diadakannya *upgrade* SMM ISO 9001:2000 menjadi ISO 9001:2008 yaitu untuk memastikan kesesuaian standar dengan perubahan dan perkembangan industri dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan di bidang manajemen sistem.



Tujuan dilaksanakan *upgrade* yaitu : 1) Untuk meningkatkan persyaratan standar yang ada. 2) Untuk meningkatkan pemahaman dan interpretasi standar dan memudahkan penerapannya. 3) Untuk meningkatkan komparabilitas dengan persyaratan sistem manajemen yang lain seperti ISO 14001.

Tahap *ketiga*, yaitu Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai pelaksanaan RTM dapat diketahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun. Pada umumnya dilaksanakan setelah pelaksanaan audit internal. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan audit internal. Akan tetapi apabila ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepentingan sekolah dan juga pelanggan dapat dilaksanakan secara insidental. Pelaksanaan RTM ini hendaknya dihadiri oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah beserta kelompok kerjanya, QMR beserta staf QMS, Ketua Program Keahlian dan Lead Auditor beserta auditor internal, serta Kepala Tata Usaha. RTM dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah selaku *Top Management*.

Agenda yang dibahas dalam RTM meliputi: 1) Perubahan-perubahan atau usul untuk perbaikan sistem manajemen. 2) Umpan balik pelanggan. 3) Penetapan kebijakan mutu sekolah, sasaran mutu dan meningkatkan produktifitas/efisiensi kerja. 4) Perubahan-perubahan atau usul untuk perbaikan pengelolaan sistem manajemen dan perbaikan hasil proses pendidikan. 5) Hasil audit internal berupa KTS. 6) Tindakan koreksi dan tindakan pencegahan.

Tahap *keempat*, pada penggerakan penerapan SMM ISO adalah pelatihan auditor internal. Materi pelatihan auditor berupa hal-hal yang bersifat prinsip. Materi tersebut antara lain pembuatan *checklist* dan prinsip-prinsip komunikasi dengan auditee. *Checklists* ini berupa panduan pelaksanaan audit. Panduan ini perlu didukung dengan komunikasi dengan

*auditee*, sehingga dalam pelaksanaan audit ini *auditee* tidak merasa diadili, tetapi sama-sama membangun sistem yang ada.

Tahap *kelima*, yaitu pengingatan kembali atau *awarness*. Materi yang disampaikan dalam *awarness* adalah komitmen pada budaya mutu melalui penerapan SMM ISO. Pihak manajemen menyadari bahwa materi ini memang kurang ideal, akan tetapi untuk mengingatkan kembali pada komitmen budaya mutu sudah cukup.

#### **4. Evaluasi**

Evaluasi atau pengawasan (*controlling*) merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk menilai, mengoreksi terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengawasan SMM ISO merupakan penjabaran dari kesimpulan teori pengawasan di atas. Pengawasan pada penerapan SMM ISO dilakukan dengan dua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah audit internal. Audit internal dilaksanakan terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk dari dalam organisasi sendiri. Audit dilaksanakan oleh pihak/orang dari dalam organisasi sendiri yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun. Audit internal sebagai bagian dari SMM ISO bertujuan untuk memperbaiki sistem. Audit internal tidak fungsi untuk memfonis benar atau salah.

Kegiatan kedua yang dilaksanakan pada evaluasi penerapan SMM ISO adalah audit eksternal. Audit eksternal bertujuan, untuk memastikan sistem manajemen yang diterapkan menjadi efektif dan sesuai dengan persyaratan standard ISO 9001:2008. Audit eksternal adalah pelaksanaan

audit dokumen mutu yang dilakukan oleh lembaga audit independen yang berasal dari luar sekolah. Audit eksternal dilaksanakan oleh lembaga audit yang bernama *Bureau Veritas Certification*.

## **C. Kesimpulan**

### **1. Perencanaan**

Perencanaan dilakukan kepala sekolah dengan memastikan rencana sistem manajemen mutu dijalankan dalam rangka memenuhi persyaratan pelanggan. Tahap perencanaan meliputi: 1) penyadaran akan arti penting mutu sekolah melalui penerapan SMM ISO; 2) Pembentukan tim ISO; 3) Pencanangan komitmen pada mutu sekolah melalui penerapan SMM ISO; 4) Pelatihan penyusunan dokumen ISO.

### **2. Pengorganisasian**

Pengorganisasian SMM ISO meliputi penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melaporkan kepada siapa, serta di mana keputusan harus diambil. Pengorganisasian pada SMM ISO meliputi: 1) pembagian tugas pada masing-masing bagian manajemen sekolah; 2) Struktur organisasi sekolah dan uraian tugas; 3) Proses pengambilan keputusan.

### **3. Penggerakan**

Penggerakan SMM ISO meliputi: 1) penyusunan dokumen SMM ISO; 2) *upgrade* SMM ISO 9001:2000 menjadi ISO 9001:2008; 3) rapat tinjauan manajemen; 4) pelatihan auditor internal dan pembentukan tim audit internal; 5) *awarness* SMM ISO.

### **4. Pengawasan**

Pengawasan pelaksanaan SMM ISO meliputi: 1) audit internal; 2) audit eksternal; 3) penerimaan sertifikat ISO dari lembaga audit.

## **5. Evaluasi**

Prinsip mendasar pada pelaksanaan SMM adalah kepuasan pelanggan. Oleh karena itu evaluasi pelaksanaan SMM ISO didasarkan pada kepuasan pelanggan internal sesuai dengan tujuan penelitian. Evaluasi pelaksanaan SMM ISO terdiri dari dua hasil. Kedua hasil tersebut 1) hasil audit internal SMM ISO; 2) Hasil audit eksternal SMM ISO.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Sujak. 2006. *Standar mutu sekolah, kepala sekolah dan pengawas sekolah*. Jurnal Tenaga Kependidikan Depdiknas Vol 1 April diunduh 20 Juli 2010 dari <http://re-searchengines.com/0506abi.html>
- Arcaro, Jerome S. 2007. *Pendidikan berbasis mutu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Baush & Coleman. 2000. *Leadership and Strategic Management in Education*. London: Paul Chapman Publishing Ltd
- Carroll, Brian J. Lean. 2008. *Lean performance ERP project management : implementing the virtual lean enterprise*. New York: Auerbach Production
- Cipta Darma. 2007. *Analisis pengaruh penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 terhadap peningkatan kinerja pada PT Jasa Raharja (Pesero) Cabang Sumatera Utara*. Tesis. Medan : Universitas Sumatera Utara
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi peneliti kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Deibler, William J., Robert Bamford 2003. *ISO 9001:2000 for Software and Systems Providers*. CRC Press, Washington DC
- Depnaker. 1986. *Peningkatan mutu terpadu*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja
- Dikmenjur.com. Diunduh pada tanggal 28 Agustus 2010
- Depdiknas. (2003). *Kurikulum SMK 2004*. Jakarta: Depdiknas
- Eka Wulandari, 2007. *Analisis kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan perusahaan daerah air minum*. Semarang: Universitas Negeri
- Fandy Ciptono. 2005. *Prinsip-prinsip total quality service*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Fandy Ciptono & Anastasia Diana. 2003. *Total quality management*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Faure, Lesley Munro dan Malcolm Munro. 2002. *Implementing total quality management*. Jakarta: Elex Media Komputondo
- Gaspersz, Vincent. 2005. *ISO 9001:2000 and continual quality improvement*. Jakarta: Gramedia

- Gullik, Luther., L Urwick. 2003. *The early sociology of management and organization*. London: EC4P 4EE  
Handbook for TQM and QCC vol 1, 2003 Inter-American Development Bank (IDB)
- Hani Handoko, 1997. *Manajemen*. Yogyakarta. BPFE
- Hasmi, Khurram. *Introductions and implementation of total quality management*.  
http <file://D:/Bahan tesis/jurnal internasional/c031008a.asp.htm>
- Husaini Usman. 2009. *Dasar-dasar manajemen pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Husein Umar. 1999. *Metodologi penelitian aplikasi dalam pemasaran*. Jakarta: Gramedia
- Iskandar Indranata. 2007. *ISO 9001:2000*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Manullang, 1982. *Dasar-dasar manajemen* . Jakarta:Ghalia Indonesia
- Margaretha Shakuntala. 2010. *Kepuasan pelanggan, faktor apakah yang jadi acuan*. [www.jurnalmanagement.com](http://www.jurnalmanagement.com). diunduh pada 10 Desember 2010
- Miles, M.B & Humberman, A.M. 1984. *Qualitative data analysis. a source book of new methods sage*. London: Beverly Hills
- Mohammad Nazir. 2003. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metodologi enelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Morell. 1969. *Management: ends and means*, San Francisco:Chandler Publishing Company
- Moyles, Janet. 2006. *Effective leadership and management in the early years*. New York: Open University Press
- Nasution. 2005. *Manajemen mutu terpadu*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ngalim Purwanto. 1979. *Administrasi pendidikan*. Jakarta: Penerbit Mutiara
- Ni Nyoman Yuliarmi dan Putu Riyasa. 2007. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PDAM Kota Denpasar*. Buletin Studi Ekonomi Universitas Udayana Bali Volume 12 Nomor 1 Tahun 2007

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2008
- Robbins, Stephen P. 2001. *Organization behaviour*. New Jersey: Prentice-Hall Inc
- Standardisasi dan jaminan mutu Badan Tenaga Nuklir Nasional. 2007. [http://www.batan.go.id/ppin/admin/UserFiles/upload/terjemahan\\_ISO\\_2005.pdf](http://www.batan.go.id/ppin/admin/UserFiles/upload/terjemahan_ISO_2005.pdf) diunduh 10 Desember 2010
- Stoner, James AF., R. Edward Freeman. 1992. *Manajemen*. Jakarta: Intermedia
- Sudjana.S. 2000. *Manajemen program pendidikan*. Bandung: Falah Production
- Sufyarma. 2004. *Kapita selekta manajemen pendidikan* Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana. 2008. *Manajemen pendidikan* , Yogyakarta:Aditya Media
- Sukardi. 2006. *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Supranto. 2006. *Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Taylor, Frederick Winslow.2003. *The early sociology of management and organization*. New York: Roudlegde
- Terry, GR. 1996. *Principles of management*. Homewood: Richard D. Irwin, Inc
- The TQM Journal, Volume 20 Number 4 2008
- Tilaar, H.A.R., Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Triatmojo. 2006. *Mengukur kepuasan pelanggan*.  
<http://triatmojo.wordpress.com/2006/09/24/mengukur-kepuasan-pelanggan/diunduh> pada 29 November 2010
- Trisno Musanto, 2004. *Faktor-faktor kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan: studi kasus pada CV sarana media advertising Surabaya*.Surabaya: Jurnal Ekonomi Manajemen Univeritas Kristen Petra
- Willy Susilo, 2003. *Audit mutu internal: panduan praktis para praktisi manajemen mutu dan auditor mutu internal*. Jakarta: PT Vorqistatama Binamega

## OPTIMALISASI DESENTRALISASI PENDIDIKAN

### ( Model *Integrative RegMap-Regulatory Impact Assesment* ( IRR) Pembentukan Perda Pendidikan yang Berbasis Pendidikan Berkarakter Kearifan Nilai Lokal)<sup>1</sup>

Rodiyah<sup>2</sup>

*Jaminan pelaksanaan demokrasi sesungguhnya adalah hadirnya hukum yang menjadi dasar pijakan pengembangan demokrasi. Antara hukum, demokrasi dan HAM memiliki hubungan yang bersifat piramidal yang berbasis pada salah satu pilar pelaksanaan demokrasi yaitu desentralisasi pendidikan. Ironisnya regulasi yang terjadi secara empirik bersifat sporadis, koordinasi yang tidak efektif dan ketidakkonsistenan dan ketidakkoherenan sistem dan desentralisasi pendidikan yang tergambar dari Perda Pendidikan dan implementasinya.*

*Model Integrative RegMap-Regulatory Impact Assesment (IRR) Pembentukan Perda Pendidikan yang Berbasis Pendidikan Berkarakter Kearifan Nilai Lokal diharapkan menjadi solusi efektif mengatasi hal tersebut. Model ini akan menghasilkan regulasi (Perda) pendidikan yang mampu mengefektifkan pencapaian kecerdasan bangsa yang menyejahterakan berkeadilan substantif.*

#### A. Latar Belakang

Jaminan pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya adalah hadirnya hukum yang dijadikan dasar pijakan pengembangan demokrasi. Seringkali dinyatakan bahwa antara hukum, demokrasi dan HAM memiliki hubungan yang bersifat piramidal.<sup>3</sup> Hukum menjadi dasar pelaksanaan demokrasi dan demokrasi menjadi alas utama bagi perwujudan dan penghormatan terhadap HAM. Artinya, tidak mungkin terbentuk pemerintahan yang demokratis tanpa adanya hukum, dan tidak mungkin terwujud penghargaan HAM (salah satunya adalah memperoleh pendidikan) tanpa pemerintahan negara yang demokratis.

Indonesia adalah negara hukum, artinya negara Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pembangunan. Negara harus dibangun dari dua konsep, yaitu hukum dan demokrasi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan. Salah satu fungsi penting dan strategis dalam mewujudkan aspirasi

---

<sup>1</sup> Seminar Nasional Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Tema: Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan.

<sup>2</sup> Dr. SPd., SH., MSi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>3</sup> Suteki, Biarkan Hak Kebebasan Berpendapat itu Mengalir, Makalah pada Diskusi Publik di FH UII-Yogyakarta, tanggal 26 Juli 2011. hlm 3.



berbasis kebutuhan rakyat adalah fungsi legislasi. Salah satu pilar negara demokrasi adalah pelaksanaan pendidikan bagi rakyatnya. Maka perlunya regulasi yang jelas dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan.

Argumen yang dijadikan dasar makalah adalah: *Pertama*, pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai peran penting dan strategis dalam masyarakat suatu negara. Pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah mempunyai peran strategis secara konkrit dalam peningkatan demokrasi daerah. Terutama dalam pembentukan Peraturan Daerah. Ironisnya pembentukan Perda di daerah lebih hanya untuk memenuhi syarat formal belum sampai pada substansi demokrasi.

*Kedua*, Jika dicermati lebih dalam, masih ada indikasi keengganan pemerintah mendorong desentralisasi pendidikan, indikator tersebut antara lain: (1) proyek fasilitas pembentukan dewan pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta komite sekolah, hampir tidak ada program signifikan dalam pemberdayaan kedua institusi baru yang didanai APBN/APBD; (2) sejak UU Sisdiknas diberlakukan pada 8 Juli 2003 hingga sekarang tahun 2012, pemerintah baru menerbitkan peraturan pelaksanaannya, antara lain PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen; Permendiknas No.18 Tahun 2007 dan PP Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.<sup>4</sup>, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PP No. 66 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Padahal jika dicermati lebih detail banyak hal yang harus dijabarkan terutama aspek formal dan aspek material dalam pembentukan Perda Pendidikan yang secara nyata menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan di daerah (pelaksana desentralisasi pendidikan).

*Ketiga*, minimal ada tujuh permasalahan pendidikan yang secara empiris ditemukan dalam survey pendahuluan. (a) mahal biaya pendidikan, terutama untuk sekolah negeri setingkat SMP dan SMA. Sebagian masyarakat berkelakar, sekolah negeri dan swasta kini sama mahal. (b) kesejahteraan guru masih belum seimbang dengan beban tanggung jawab, terutama untuk guru honorer. (c) pelayanan birokrasi pendidikan belum optimal masih banyak dirasakan sistem birokrasi paternalistik yang menyimpang dan merugikan masyarakat. (d) pemerataan fasilitas

---

<sup>4</sup> Dimuat dalam Harian Kompas, 18/7/2003.

pendidikan yang belum merata antara kota dan desa bahkan perbedaan yang sangat mencolok. (e) peningkatan kualitas dan profesionalisme guru belum difasilitasi secara optimal oleh daerah dengan regulasi yang pasti. (f) adanya regulasi yang tidak jelas dalam pemungutan sumbangan maupun bantuan. Hal ini sering terjadi pada waktu pendaftaran. Sehingga diperlukan regulasi yang jelas dan transparan. (g) desentralisasi kurang pemberdayaan satuan pendidikan dalam otda.

*Keempat*, banyaknya kendala implementasi otonomi daerah yang berimbas pada pelaksanaan Peraturan Daerah termasuk Perda Pendidikan. Imbas itu dapat dipaparkan sebagai berikut: (a) Kapasitas administrasi Pemerintah Daerah (b) Kesenjangan antardaerah, akibat dari kebijaksanaan yang seragam itu maka kesenjangan antardaerah yang alami itu, tidak pernah berkurang. (c) Kesenjangan politik, otonomi daerah yang luas tidak saja memberikan wewenang yang lebih besar kepada daerah, tetapi juga kekuasaan yang jauh lebih besar kepada politisi lokal. (d) Perilaku birokrasi, yang sebagian besar belum memiliki perilaku administrasi negara yang benar.

## **B. Pemasalahan**

Bagaimana model pembentukan Perda pendidikan yang berbasis karakter kearifan nilai lokal mampu mampu mencerdaskan masyarakat yang berkeadilan dan menyejahterakan secara substantif?

## **C. Pembahasan**

### **1. Fakta Desentralisasi Pendidikan yang Mendorong Perlunya Pembentukan Perda Pendidikan Berbasis Pada Karakteristik Kearifan Nilai Lokal.**

Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui melalui UU NO. 32 Tahun 2004 tentang otonomi pemerintahan daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu :

- 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki;
- 2) Efisiensi

Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; 3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Desentralisasi pendidikan dapat terjadi dalam tiga tingkatan, yaitu Dekonstrasi, Delegasi dan Devolusi. Dekonstrasi adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintahan atau lembaga yang lebih rendah dengan supervisi dan pusat. Sementara Delegasi mengandung makna terjadinya penyerahan kekuasaan yang penuh sehingga tidak lagi memerlukan supervisi dan pemerintah pusat. Pada Tingkat Devolusi di bidang pendidikan terjadi apabila memenuhi 4 ciri, yaitu (1) terpisahnya peraturan perundangan yang mengatur pendidikan di daerah dan di pusat; 2) kebebasan lembaga daerah dalam mengelola pendidikan; 3) lepas dari supervisi hirarkhis dan pusat dan 4) kewenangan lembaga daerah diatur dengan peraturan perundangan.

Namun sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana diharapkan, justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu mahalnnya biaya pendidikan dan kualitas pendidikan ayng terus dipertanyakan. Permasalahan yang muncul antara lain disebabkan oleh karena kekurangsiapan pranata sosial, politik dan ekonomi dan hukum. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya. Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum jalan, yaitu : 1) Belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan kota. 2) Pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksankana secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak memadai. 3) Dana pendidikan dan APBD belum memadai. 4) Kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. 5) Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama. (6) kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang dimiliki. Hal ini

mengakibatkan akan terjadinya kesenjangan antar daerah, sehingga pemerintah perlu membuat aturan dalam penentuan standar mutu pendidikan nasional dengan memperhatikan kondisi perkembangan kemandirian masing-masing daerah. Sekaligus perlunya Perda yang mampu mengadopsi dan melaksanakan secara tepat efektif efisien perintah perundang-undangan di atasnya.

Ironisnya Kebijakan Otonomi Daerah yang lahir pada masa reformasi melalui UU nomor 32 tahun 2004 menjadikan dunia pendidikan tidak makin cerah. Otonomi Daerah hanya memindahkan permasalahan pendidikan dari pusat ke daerah. Kualitas pendidikan semakin sulit berkembang, karena pendidikan ikut dijadikan objek politik para elit daerah. “Faktanya kita masih melihat masih tingginya disparitas pendidikan antar kelompok masyarakat, baik antara perkotaan dan pedesaan, kaya dan miskin, serta antar daerah,”<sup>5</sup> Seringkali penetapan Kepala Dinas Pendidikan oleh Kepala Daerah yang seringkali tanpa didasarkan pada kapabilitas seseorang, melainkan hanya karena kedekatan secara politik. Akibatnya pendidikan dikelola secara serampangan karena orang yang berada di pucuk pimpinan pendidikan di daerah bukan orang yang memahami tugasnya. Kualitas guru di daerah rata-rata juga kurang baik, karena rekrutmen dilakukan secara tidak profesional. Penerimaan calon guru dengan kolusi sudah dianggap umum dan belum jelas akreditasinya.

Fakta inilah yang mendorong perlu pembentukan Peraturan Daerah Bidang pendidikan yang berbasis pada karakteristik kearifan nilai lokal.<sup>6</sup> Sehingga penyelenggaraan pendidikan bukan beban lokal tetapi menjadi kenyamanan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya karena sangat akrab dengan semangat daerah yang menjadi pondasi bersama untuk mencerdaskan bangsa.

---

<sup>5</sup> kata Ketua DPR RI Marzuki Alie saat bicara dalam Seminar Nasional dengan tema ‘Mampukah Otonomi Pendidikan Mendorong Peningkatan Daya Saing Bangsa Pada Era Globalisasi’ di Auditorium Gedung Pusat IKIP PGRI Semarang di Semarang, Selasa (12/7/2011).

<sup>6</sup> Kearifan lokal yaitu *spirit local genius* yang disepadankan maknanya dengan pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, keberilmuan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan berkenaan dengan penyelesaian masalah yang relatif pelik dan rumit dalam suatu lokal (daerah) untuk menjadikan kehidupannya yang selaras, serasi dan seimbang (harmonis). Kehidupan yang penuh kedamaian dan suka cita. Kehidupan yang dipimpin oleh pimpinan yang dihormati bawahannya. Kehidupan yang teratur dan terarah yang dipimpin oleh pimpinan yang mampu menciptakan suasana kondusif.

## 2. Model IRR Pembentukan Perda Pendidikan Yang Berbasis Karakter Kearifan Nilai Lokal Mampu Mampu Mencerdaskan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Menyejahterakan Secara Substantif<sup>7</sup>.

### a. Model Integratif RegMap-Regulatory Impact Assesment (RIA)- ( IRR)

Model Integratif Reg Map-RIA adalah model yang dikonstruksi dengan menggunakan pemaknaan substansi RegMap (pemetaan peraturan perundangan yang sudah ada melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan yang ada secara vertikal dan horisontal sehingga menghasilkan prioritas regulasi yang dimuat dalam prolegnas dan atau prolegda) selanjutnya prioritas regulasi harus segera di-RIA-kan. Artinya setelah melalui RegMAP maka pelaksanaan RIA akan lebih efektif dengan menggunakan enam tahapan, yaitu perumusan masalah, identifikasi tujuan, alternatif tindakan, analisis biaya dan manfaat, pemilihan tindakan dan strategi implementasi. Keenam langkah tersebut harus ada dalam koridor konsultasi publik yang diwadahi dalam pembentukan Naskah Akademik. Masing-masing tahapan harus berdasarkan pada aspek formal dan aspek material demokrasi.

### 1). Asas Aspek Formal dan Asas Aspek Material Dasar Penyusunan Model IRR (Integratif RegMap-RIA).

Aspek formal demokrasi dengan menggunakan asas Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagai peraturan daerah yang baik, yaitu meliputi:

- a). Kejelasan tujuan;
- b).Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c). Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d). Dapat dilaksanakan;
- e). Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f).Kejelasan rumusan;
- g). Keterbukaan.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (peraturan daerah) mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Keadilan substantif dapat didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencarian keadilan substantif bukan lagi aspek formal (*state law*) dan materiil (*living law*) hukum melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan *moral, ethic dan religion*. Werner Menski dalam **Comparative Law in Global Context** (2006) menyebut keadilan substantif sebagai "*perfect justice*", Pencarian keadilan substantif hanya dapat dicapai dengan penggunaan pendekatan *legal pluralism*.

<sup>8</sup> Pasal 5 UU No 10 Tahun 2004 dan Penjelasan; Pasal 137 UU No 32 Tahun 2004.

Pembentukan Peraturan Daerah Pendidikan adalah proses pembuatan peraturan daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Aspek material demokrasi dengan menggunakan asas membentuk Peraturan Perundang-undangan (peraturan daerah) harus berdasarkan pada asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, yaitu meliputi : 1). Pengayoman; 2). Kemanusiaan; 3). Kebangsaan ; 4). Kekeluargaan; 5). Kenusantaraan; 6). Bhineka Tunggal Ika; 7). Keadilan; 8). Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan; 9). Ketertiban dan Kepastian hukum; 10). Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan<sup>9</sup>.

Dalam muatan materi yang dibahas dengan menggunakan tahapan tersebut diatas harus berdasarkan pada aspek primer perencanaan pendidikan. Bahwa perencanaan pendidikan merupakan langkah yang paling utama dan pertama karena perencanaan senantiasa mendahului sekaligus menjadi pegangan bagi langkah-langkah manajemen yang lain. Perencanaan pendidikan akan menentukan cara-cara penyusunan struktur organisasi pendidikan; penentuan kualifikasi sumber daya manusia untuk mengisi struktu organisasi tersebut; pengelolaan sumberdaya pendidikan; dan penentuan standar-satndar untuk kepentingan pengendalian. Maka konstruksi model ideal pembentukan peraturan daerah bidang pendidikan yang ideal secara formal dan material dalam muatan materinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Bidang Pendidikan<sup>10</sup>

No	Konstruksi pembentukan peraturan daerah bidang pendidikan
1	Dasar: Pasal 31 UUD 1945 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No. 10 Tahun 2004 <sup>11</sup> tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>9</sup> Pasal 6 UU NO 10 Tahun 2004; Pasal 138 UU NO 32 Tahun 2004.

<sup>10</sup> Rodiyah, 2011. Aspek Demokrasi Dalam Pembentukan Perda (Studi Kasus Pembentukan Perda Bidang Pendidikan Dalam Perspektif Socio-Legal). Disertasi-PDIH Undip-Semarang. hlm. 506-507

<sup>11</sup> Direvisi dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang disahkan pada 12 Agustus 2011. Dalam disertasi ini tidak dianalisis karena Dasar Hukum Pembentukan Perda Pendidikan di lokasi penelitian berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004. Alasan revisi UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

- a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
- d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

2	Subjek: Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemerintah dan Rakyat). Partisipasi rakyat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Perda Pendidikan sekaligus partisipasinya dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
3	<p>Tujuan: Tercapainya pendidikan untuk semua yang berkeadilan dan mensejahterakan.</p> <p>Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memperluas akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;</li> <li>Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan</li> <li>Mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.</li> </ol> <p>Pentingnya pendidikan untuk mengetaskan kemiskinan, peningkatan keadilan, kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.</p>
4	<p>Substansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap <b>warganegara berhak</b> mendapatkan pendidikan</li> <li>Setiap warganegara <b>wajib</b> mengikuti pendidikan dasar dan <b>pemerintah wajib membiayainya</b>.</li> <li>Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu <b>sistem pendidikan nasional yang</b> meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang</li> <li>Negara memprioritaskan <b>anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%</b> dari APBN-APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.</li> <li>Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan <b>persatuan bangsa</b> untuk kemajuan peradaban serta <b>kesejahteraan</b> umat manusia.</li> <li>Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;</li> <li>Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka, multimakna, maksud dari pendidikan terbuka pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelenggaraan</li> </ol>

e. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:

- 1) penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis
- 2) Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- 4) pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan
- 5) Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 7) penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini

	<p>program lintas satuan dan jalur pendidikan (<i>multi entry-multi exit sistem</i>). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup;</p> <p>h. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;</p> <p>i. Pendidikan dilaksanakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;</p> <p>j. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan</p> <p>k. Pendidikan dilaksanakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pengendalian mutu layanan pendidikan.</p>
5	<p>Konsekuensi: Negara (Pemerintah melalui Pemerintah Daerah-Pemerintah Kota) membentuk perundang-undangan (Peraturan Daerah bidang Pendidikan) yang secara nyata memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bahwa setiap warganya berkesempatan memperoleh pendidikan sehingga Pemda harus mampu membiaya semua proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.</p>

### **b.Kondisi Penggunaan IRR (Integratif RegMap-RIA)**

IRR (Integratif RegMap-RIA) adalah mengintegrasikan atau memadukan secara sinergis konstruktif penggunaan RegMAP yang dilanjutkan dengan melaksanakan RIA. Model IRR merupakan kondisi ideal dalam pembentukan Perda karena melalui RegMAP inilah akan terpetakan secara vertikal dan horisontal peraturan perundangan yang mengatur hal (sejenis), sehingga akan terhindar tumpang tindih pengaturan (regulasi) sejenis. Proses selanjutnya setelah RegMAP adalah di-RIA-kan, dengan menggunakan tahapan perumusan masalah, identifikasi tujuan, alternatif tindakan, analisis biaya dan manfaat, pemilihan tindakan dan strategi implementasi. Namun demikian ada suatu kondisi tertentu memungkinkan perlu di RegMAP, RIA atau keduanya dalam suatu integratif.

#### **1). Penggunaan RegMap**

RegMAP digunakan ketika belum terpetakan regulasi dengan pasti. Oleh karena itu RegMAP dapat digunakan baik terhadap regulasi yang sudah ada (*mapping dan reviewing*) maupun rancangan regulasi baru (*review*). *Tool RegMAP* dilembagakan (berlanjut) oleh Instansi Pemerintah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi. Beberapa alasan penggunaan *RegMap*, antara lain sebagai berikut.

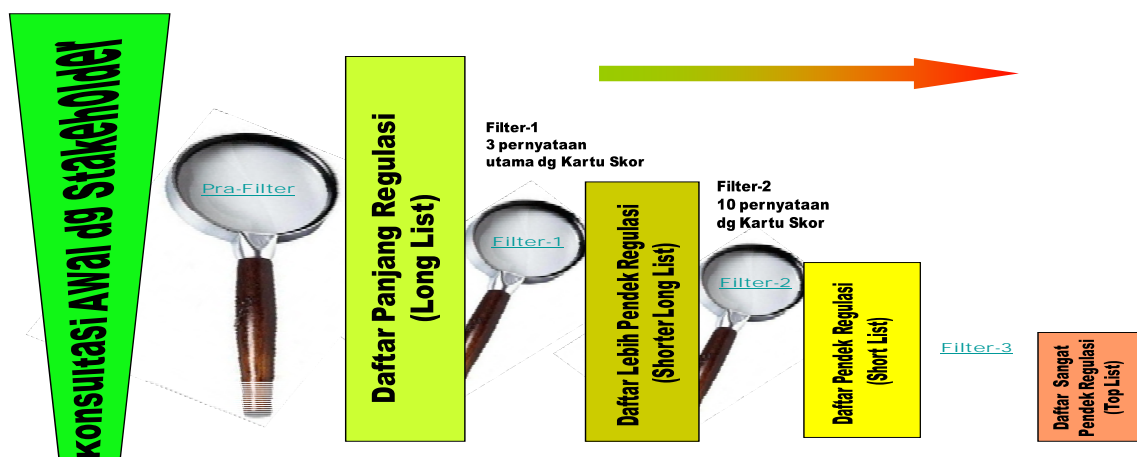


- a) Jumlah regulasi sangat banyak (*unknown*) dan sering ditemukan yang tumpang tindih, tidak perlu, bertentangan satu dan lainnya, dll,
- b) Penggunaan pendekatan RIA untuk jumlah regulasi yang besar (yang terkumpul) butuh waktu yang relatif lama.
- c) Alat bantu RegMAP dapat dilakukan baik oleh individu atau tim.
- d) RegMAP sebenarnya dapat dipertimbangkan menjadi proses sebelum penggunaan RIA (*Complimentary to RIA*) karena RegMAP dapat menghasilkan daftar prioritas regulasi yang akan di-RIA-kan (dari sejumlah besar dan dalam waktu relatif pendek).

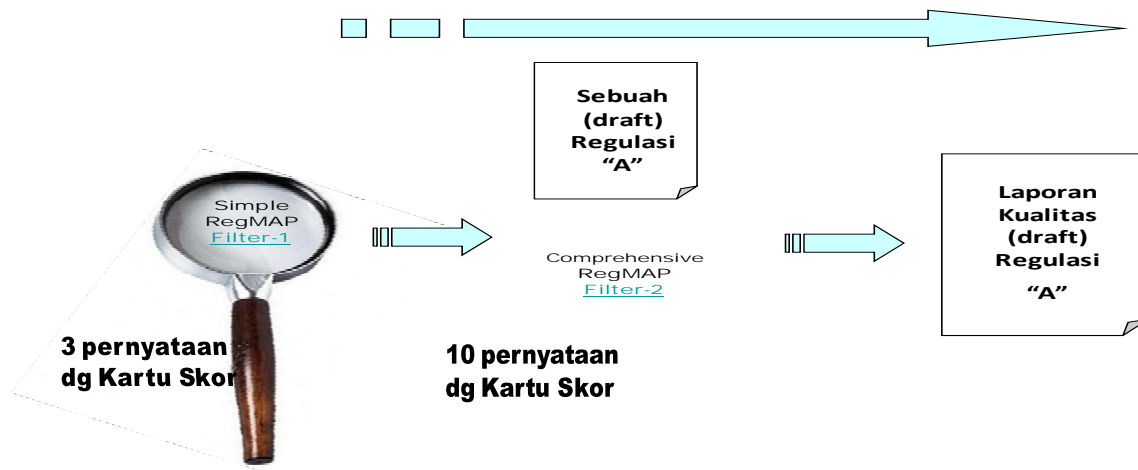
Tahapan yang dilakukan secara utuh meliputi hal-hal berikut.

- a). Perencanaan (*Planning*), metodologi awal, plotting, metodologi final dan training
- b). Pemetaan (*Mapping*), kegiatannya meliputi: inisiasi *stakeholder consultation*; identifikasi dan mengumpulkan regulasi yang relevan; membangun *data base*.
- c). Pengkajian (*Review*), mengkaji regulasi dengan penyaringan bertingkat.
- d). Pelaporan dan Desiminasi (*Reporting dan Dissemination*), menyiapkan laporan pendukung regulasi , membuat regulasi dan menindaklanjuti
- e). Institusionalisasi (*Institutionalization*), melembagakan RegMAP ini melalui mitra (kerjasama) baik dengan unsur Pemerintah, Dunia usaha dan Perguruan Tinggi.

### *Proses Regulatory Mapping (mapping dan reviewing)*



## Proses *Regulatory Mapping* Review



### 2). Penggunaan RIA

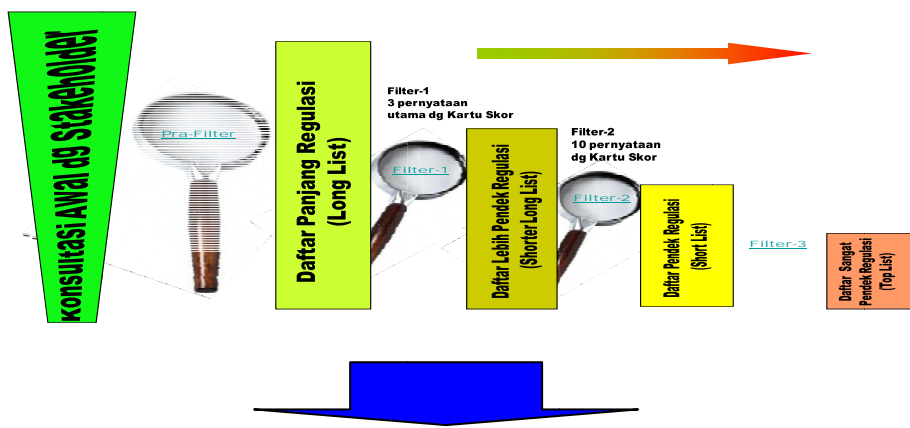
Penggunaan RIA adalah ketika sudah terpetakan regulasi yang ada maka langkah efektif berikutnya adalah di RIA-kan. *Regulatory Impact Assessment* (RIA) merupakan suatu metoda yang dipergunakan untuk menciptakan sistem regulasi yang berimbang sehingga dapat tercapai pertumbuhan ekonomi daerah yang optimal yang didalamnya adalah kesejahteraan yang berkeadilan.

Proses RIA diperlukan baik pada rencana regulasi maupun regulasi yang masih diberlakukan. Tahapannya berikut ini.

- a) Perumusan masalah atau issue yang menimbulkan kebutuhan untuk menerbitkan suatu kebijakan (melakukan tindakan);
- b) Identifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan penilaian risiko (*risk assessment*);
- c) Identifikasi berbagai alternatif tindakan (opsi) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut;
- d) *Assessment* atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, konsumen, dan ekonomi secara keseluruhan;
- e) Penentuan opsi terbaik (yang dipilih);
- f) Perumusan strategi untuk menerapkan dan merevisi kebijakan.

### 3). Penggunaan Integratif RegMap-RIA (IRR)

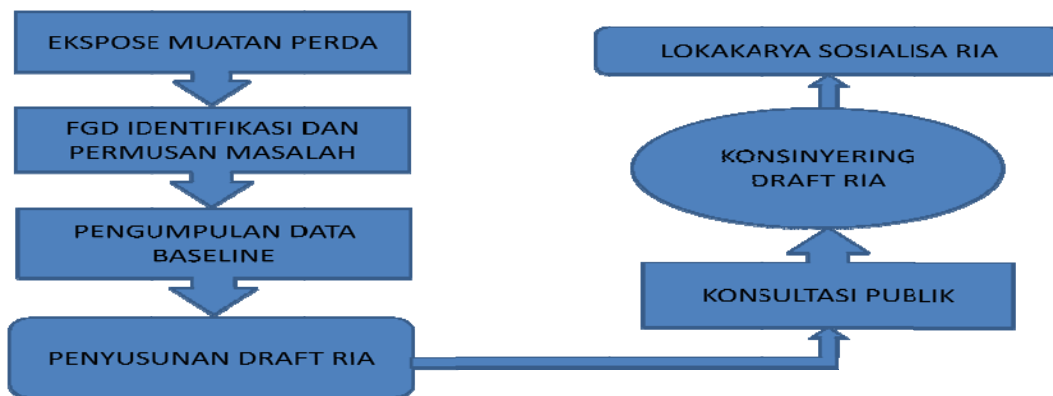
Penggunaan Integratif RegMap-RIA (IRR) adalah kondisi yang paling ideal dengan sistematis mulai dari pemetaan regulasi (RegMAP) sehingga muncul prioritas, selanjutnya untuk mengefektifkan ke substansi tujuan regulasi maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan proses dan tahapan RIA. RIA ini harus dilakukan secara sistematis berbasis pada partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik yang efektif. Kondisi ini dapat dilihat dari ragaan berikut ini:



**Analisis Dampak Regulasi - Regulatory Impact Analysis (RIA)**



**TAHAPAN TEKNIS PENKKAJIAN PERDA**



Penggunaan IRR ini harus berlandaskan pada aspek formal demokrasi (UU No. 10 Tahun 2004, UU.No.32 Tahun 2004, Permendagri No.16 Tahun 2006) secara baik. Dan berdasarkan aspek material demokrasi (muatan materi sesuai substansi kebutuhan dasar, riil masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan yang berkeadilan dan mensejahterakan, bahwa pendidikan untuk semua adalah pilar demokrasi. Secara rinci IRR harus dijalankan berdasarkan pada konstruksi model berikut.

Tabel 2.

Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Bidang Pendidikan berdasarkan IRR<sup>12</sup>

No	Konstruksi pembentukan peraturan daerah bidang pendidikan
1	Landasan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 18 UUD 1945.</li> <li>b. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>c. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.</li> <li>d. Permendagri No.16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Peraturan. Perundang-undangan di Daerah.</li> </ol>
2	Karakteristik: : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi dua aspek demokrasi yaitu aspek material dan aspek formal.</li> <li>b. Mengoptimalkan fungsi Baleg (pembentukan berdasarkan UU No.10 Tahun. 2004) untuk melakukan RegMap secara tepat, dilanjutkan dengan tahapan RIA yang di modifikasi.</li> <li>c. Membutuhkan Badan Pengawas Legislasi Daerah (BPLD).</li> <li>d. Muatan materi Perda yang dibentuk dengan model IRR lebih menunjukkan karakteristik daerah dan kearifan nilai lokal di masyarakat.</li> </ol>
3	Kelebihan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perda yang dihasilkan tidak tumpang tindih, karena Perda dibuat berdasarkan analisis RegMap terlebih dahulu yang menghasilkan prioritas pembentukan Perda yang urgen.</li> <li>b. Pembentukannya berdasarkan tahapan RIA yang berbasis pada konsultasi publik (memfasilitasi partisipasi rakyat dalam pembentukan Perda), inilah aspek formal demokrasi yang benar berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004, UU.32 Tahun 2004. Selanjutnya dituangkan dalam Naskah Akademik.</li> <li>c. Naskah akademik memuat argumen filosofis, yuridis dan sosiologis perlunya Perda, inilah aspek material demokrasi. Naskah akademik dibuat berdasarkan berdasarkan pada kebutuhan riil masyarakat.</li> </ol>
4	Kelemahan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara umum kelemahan belum muncul dalam penggunaan IRR.</li> <li>b. Relatif kelemahan pada penggunaan waktu yang agak lama jika Baleg tidak bekerja efektif dalam melakukan RegMap Peraturan Perundang-undangan di daerah.</li> </ol>
5	Syarat Kondisi Penggunaan IRR: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. IRR bisa dijalankan jika Baleg berjalan efektif melakukan RegMap. SDM pembentuk Perda yaitu DPRD (Baleg, Pansus, BPLD) dn Pemda yang berkualitas, baik secara akademik, moral, berkarakter Pancasila Indonesia, Bertanggungjawab</li> </ol>

<sup>12</sup> Rodiyah, 2011. Aspek Demokrasi Dalam Pembentukan Perda (Studi Kasus Pembentukan Perda Bidang Pendidikan Dalam Perspektif Socio-Legal). Disertasi-PDIH Undip-Semarang. hlm. 516-517

	<p>kepada rakyat.</p> <p>b. IRR bisa dijalankan efektif harus ditopang dengan dukungan APBD yang memadai.</p> <p>c. Kesadaran masyarakat dalam pembentukan Perda berjalan efektif melalui organisasi masyarakat, organisasi keagamaan yang ada di daerah, maupun berdasarkan organisasi profesi daerah.</p>
6	<p>Tahapan IRR:</p> <p>a. RegMap untuk memetakan prioritas kebutuhan pembentukan Perda.</p> <p>b. Pembentukan Pansus Perda.</p> <p>c. Pelaksanaan Pembentukan Perda melalui Metode (alat) RIA dengan tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perumusan masalah atau issue yang menimbulkan kebutuhan untuk menerbitkan suatu kebijakan (melakukan tindakan);</li> <li>2) Identifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan penilaian risiko (<i>risk assessment</i>)</li> <li>3) Identifikasi berbagai alternatif tindakan (opsi) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut;</li> <li>4) <i>Assessment</i> atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, konsumen, dan ekonomi secara keseluruhan;</li> <li>5) Penentuan opsi terbaik (yang dipilih);</li> <li>6) Perumusan strategi untuk menerapkan dan merevisi kebijakan.</li> </ol> <p>d. Tuangkan dalam Naskah Akademik (unsur DPRD, Pemkab/kot, stakeholders, Perguruan Tinggi).</p> <p>e. Pembahasan berdasarkan pentahapan pembentukkan peraturan perundang-undangan (UU No.10 Tahun 2004). Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh kesepakatan dilaporkan kepada Walikota oleh Sekretaris Daerah disertai dengan Nota penyampaian walikota kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan dengan menegaskan hal-hal yang dianggap perlu antara lain latar belakang dan tujuan penyusunan penyusunan Peraturan Daerah serta sifat penyelesaian Raperda yang dikehendaki. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD, sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh Panitia Musyawarah DPRD (Panmus). Proses pembahasan diawali dengan Rapat Paripurna DPRD dengan acara Penjelasan Walikota. Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD. Proses berikutnya pembahasan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (Pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki Perda yang sama dengan substansi Raperda yang sedang dibahas.</p> <p>f. <i>Public hearing</i> yang substansi mampu mengakomodasi kebutuhan, aspirasi rakyat (melalui pihak-pihak pemangku kepentingan Perda).</p> <p>g. Pengesahan.</p> <p>h. Pengundangan.</p> <p>i. Penyebarluasan.</p>
7	<p>Cara Penggunaan:</p> <p>a. Harus Sistematis melalui RegMap dilanjutkan menggunakan mekanisme RIA</p> <p>b. Konstruktif melalui Pembahasan RIA yang berdasarkan pada analisis kebutuhan riil masyarakat berbasis pada partisipasi publik.</p>

8	Konsekuensi: Pembentukan Badan Pengawas Legislasi Daerah (BPLD), beranggotakan Perguruan Tinggi dan LSM, Pemerintah, DPRD, bekerjasama secara sinergis dengan Badan Legislatif (Baleg) dan Pansus Perda.
---	--

## D. Penutup

### 1. Simpulan

- a. Perubahan paradigma sistem pendidikan membutuhkan masa transisi. Reformasi pendidikan merupakan realitas yang harus dilaksanakan, sehingga diharapkan para pelaku maupun penyelenggara pendidikan harus proaktif, kritis dan mau berubah. Maka mekanisme payung hukum penyelenggaraan pendidikan harus benar. Fakta pelaksanaan desentralisasi pendidikan memberikan masalah krusial yang harus segera diatasi.
- b. Konstruksi model ideal pembentukan peraturan daerah bidang pendidikan adalah dengan menggunakan metode analisis RegMAP dan *Regulatory Impact Assesment* (RIA). Konstruksi ideal ini disebut model **integrative RegMAP-RIA (IRR)**. Model IRR di konstruksi dengan menggunakan delapan (8) indikator yaitu (1) Landasan, (2) Karakteristik, (3) Kelebihan, (4) Kelemahan, (5) Syarat kondisi penggunaan IRR, (6) Tahapan, (7) Cara penggunaan dan (8) Konsekuensi.

### 2. Rekomendasi.

- a. Fakta masalah krusial desentralisasi pendidikan harus diantisipasi dengan regulasi sebagai payung hukum penyelenggaraan pendidikan di daerah dalam bentuk Perda Pendidikan yang mampu mengakomodasi semua kebutuhan pendidikan secara berkeadilan.
- b. Penggunaan konstruksi model ideal **Integrative RegMAP-RIA(IRR)** dalam pembentukan Peraturan Daerah Bidang Pendidikan sangat dianjurkan. Konstruksi ini dapat dilakukan dengan memodifikasi keunikan, karakteristik, dan kearifan nilai lokal kebutuhan pendidikan pada masyarakat tempat peraturan daerah dibentuk dengan tetap bertumpu pada legislasi UU No.10 Tahun 2004 (UU No.12 Tahun 2011), UU No.32 Tahun 2004, dan Permendagri No.16 Tahun 2006 yang berbasis pada UU Sistem Pendidikan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahmuller, C.E. 1996. *The Future of Democracy and Education for Democracy*, Calabasas: Center for Civic Education (CCE).
- Darmodiharjo, Darji. 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Djojonegoro, W. 1996. *Limapuluh Tahun Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, A. Mansyur. 2004. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Friedman, Lawrence M. 1997. *The Legal System. A Sosial Science Perspective*, New York : Russel Sage Fundation.
- Ibrahim, Anis, 2008. *Legislasi dan Demokrasi (Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Daerah*, Jakarta; In-TRANS Publishing.
- Indarti, Erlyn, *Legal Konstruktivisme: Paradigma Baru Pendidikan dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani*, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, Vol XXX No. 3 Tahun 2001.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriyadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Mahfud MD, Moh, 1999. "*Tinjauan Substansi Reformasi Hukum* ", makalah pada Semiloka *Refleksi Kritis Terhadap Proses Reformasi*, UGM Yogyakarta, 27-28 Januari 1999.
- Makmun, Abin Syamsudin.1996. *Analisis Posisi Pendidikan*. Jakarta: Biro Perencanaan Depdikbud.
- Menski, Werner , 2006, *Comparative Law in A Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*, Second Edition, Cambridge University Press: United Kingdom.
- Muljadi, Arief. 2005. *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Nonet, Philip. dan Philip Selznick, 2003. *Hukum Responsif, Pilihan Masa Depan..* Buku ini judul aslinya adalah "*Law & Society in Transition : Toward Reponsive Law*. Jakarta:
- Rodiyah, 2011. *Aspek Demokrasi Dalam Pembentukan Perda (Studi Kasus Pembentukan Perda Bidang Pendidikan Dalam Perspektif Socio-Legal)*. Disertasi-PDIH Undip-Semarang.
- Sadiman, Arif S.,2001, *Paradigma Baru Pengemasan Pendidikan yang Demokratis Ditinjau dari Segi Aspek Kebijakan*, Makalah Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran di Malang.
- Sutan Zanti Arbi.1988. *Pengantar kepada Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sudana Degeng, I Nyoman, 2001, *Paradigma Baru Pendidikan Memasuki Era Demokratisasi Belajar*, Makalah Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran di Malang,
- Suteki, 2010. *Rekonsruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat..* Surya Pena Gemilang Publishing: Malang.
- Syaukani, Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid.2004. *Otonomi Daerah: dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifin, Pipin. 2006.*Teknik dan Praktek Pembentukan Praturan Daerah*. Gema Multi Ilmu: Jakarta.
- Zamroni, 1992. *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Yogyakarta : Tiara Yoga.
- ,2001. *Pendidikan untuk Demokratisasi, Tantangan Menuju Civil Society*, Jogjakarta: Bigraf Publishing.

## CURRICULUM VITAE

- a. Nama dan gelar : Dr. Rodiyah , SPd. SH., M.Si.  
 b. Tempat, tanggal lahir : Tegal, 19 Juni 1972  
 c. Jenis Kelamin : Perempuan  
 d. Gol/Pangkat /NIP : IIIId/Penata /197206192000032001  
 e. Jabatan fungsional : Lektor  
 f. Jurusan /Fakultas : Fakultas Hukum-UNNES  
 g. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang  
 h. Pendidikan

No	Jenjang	Prodi	Perguruan Tinggi	Tahun Pendidikan - Lulus
1	S1 (SPd)	Pendidikan Moral Pancasila	IKIP Semarang	1990-1995
2	S2 (MSi)	Ketahanan Nasional	UGM Yogyakarta	1996-1998
3	S1 (SH)	Ilmu Hukum	UNTAG Semarang	2005-2007
4	S3 (Dr)	Program Doktor Ilmu Hukum	UNDIP	2008-2011
5		<i>Law School (literature Study)</i>	<i>The University of Wisconsin-USA</i>	Sandwich Like Programs Okt-2009- Jan-2010

- i. Alamat kantor : FH Unnes Gd. C4. Lt. 1 Kampus Sekaran-Gunungpati, Semarang. 50221 Telp. Fax. (024) 8507891  
 j. Alamat Rumah : Jl. Sejahtera Selatan B-23 Perum Trangkil Sejahtera Gunungpati Semarang. 50221. HP. 08156556364  
 k. Alamat e-mail : [rodiyahtangwun@yahoo.com](mailto:rodiyahtangwun@yahoo.com)



## REDESAIN PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA SEBAGAI SUATU WACANA KE DEPAN

**Badraningsih Lastariwati<sup>1</sup>**

### Intisari

Tujuan dari penulisan ini untuk memberikan suatu wacana kedepan mengenai redesain dalam pendidikan kejuruan/vokasi di Indonesia dalam rangka penyiapan lulusannya yang diharapkan dapat berperan dalam era global. Pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pendidikan di mana orang di lengkapi dengan keterampilan praktis yang akan memungkinkan mereka untuk terlibat dalam karir yang melibatkan manual atau kemampuan praktis. *School-to-Work opportunity* merupakan pengembangan kebijakan yang sangat berarti dalam bidang persiapan tenaga kerja . Pengembangan pendidikan bidang teknologi dan kejuruan perlu mempertim-bangkan keterkaitan antara beberapa faktor yang bersifat technocultural. Keempat faktor tersebut adalah : (1) hubungan industri (*industrial relationships*); (2) perubahan teknologi (*innovation*); (3) organisasi pekerjaan (*work organization*); dan (4) formasi kompetensi (*skills*). Perubahan yang sangat cepat pada aspek ekonomi, sosial dan teknologi mengharuskan seluruh masyarakat perlu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat hidup dan bekerja dengan baik dalam masyarakat berpengetahuan. Pendidikan dan pelatihan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pribadi seseorang, meningkatkan produktivitas dan pendapatannya di tempat kerja, dan memfasilitasi partisipasi setiap orang dalam kehidupan ekonomi dan social. Sekolah menengah kejuruan / vokasi di Indonesia merupakan bagian integral dari sector ekonomi yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perlu dikembangkan kuantitas dan kualitasnya. Kualitas sekolah menengah kejuruan / vokasi akan mereflesikan kualitas tenaga kerja Indonesia yang perlu dibangun untuk meningkatkan keunggulan kompetitif sumber daya manusia Indonesia. Menanggapi permintaan keterampilan umum dan keterampilan tingkat tinggi, akan lebih efektif mengintegrasikan pendidikan umum dan kejuruan. Dengan cara memberikan pengayaan pengetahuan dasar di pendidikan kejuruan / vokasi untuk lebih menguatkan daya pikir bagi para lulusan pendidikan vokasi di Indonesia. Untuk gambaran system yang ada kita dapat persiapkan suatu wacana yaitu, pelaksanaan pendidikan kejuruan/vokasi khususnya SMK dilaksanakan dalam delapan semester. Empat semester untuk penanaman pengetahuan dasar dan keterampilan dasar. Semester 5-6 penjurusan dan pelaksanaan UAS dan UNAS. Semester 7-8 untuk pengayaan keterampilan di industry/lapangan dan OJT, serta uji kompetensi. Dalam aplikasi keterlaksanaan rekontruksi tersebut harus dengan cara mempersiapkan lulusan pendidikan kejuruan / vokasi di Indonesia melalui

---

<sup>1</sup> PTBB FT UNY, [iik.ruhan@gmail.com](mailto:iik.ruhan@gmail.com).

pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, pendidik, evaluasi, dan kerjasama dunia kerja.

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan Kejuruan adalah suatu bentuk pendidikan di mana orang dilengkapi dengan keterampilan praktis yang akan memungkinkan mereka untuk terlibat dalam karir yang melibatkan manual atau kemampuan praktis. Pendidikan kejuruan juga dikenal sebagai pendidikan kejuruan dan pelatihan (VET = *vocational education and training*), *vocational education*, atau “sekolah teknik” (Wiseeek, 2011). *School-to-Work opportunity* merupakan pengembangan kebijakan yang sangat berarti dalam persiapan tenaga kerja (Green, 2005). Elemen kunci kebijakan ini adalah integrasi program pendidikan vokasi dan akademik untuk semua siswa. Program *school to work* mencakup program yang luas di sekolah menengah, khususnya sekolah vokasi. Program yang populer adalah pendidikan kerjasama (pemagangan dan perusahaan berbasis sekolah). Inovasi VET harus fokus pada inklusi pendidikan berorientasi kerja, dengan menentukan kriteria kualitas untuk tempat pendidikan berorientasi kerja dan mendesain kurikulum yang berintegrasi dengan dunia kerja.

Pengembangan pendidikan teknologi dan kejuruan mempertimbangkan keterkaitan antara beberapa faktor yang bersifat technocultural. Keempat faktor tersebut adalah : hubungan industri (*industrial relationships*); perubahan teknologi (*innovation*); organisasi pekerjaan (*work organization*); dan formasi kompetensi (*skills*). Perubahan teknologi akan mempengaruhi secara timbal balik dengan organisasi pekerjaan, artinya setiap perubahan teknologi akan berdampak terhadap struktur pekerjaan yang ada di dunia kerja. Di sisi lain, perubahan teknologi juga akan merubah formasi kompetensi dan skill yang dibutuhkan dunia industri. Perubahan kompetensi dan organisasi pekerjaan jelas perlu diantisipasi oleh lembaga pendidikan untuk meng-upgrade setiap program sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan perubahan teknologi. Semua proses inovasi dan perubahan akan terakomodasi bila hubungan antar institusi terjalin dengan baik (hubungan industri dan lembaga pendidikan). Pada dasarnya sumber perubahan

dapat terjadi di setiap faktor dan akan membias pada faktor lainnya. Pesan penting dari gambaran hubungan berbagai faktor ini adalah bahwa kurikulum pendidikan teknologi atau pendidikan vokasi, pada umumnya, sangat dinamis dan mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus memiliki keterkaitan seperti medan magnet dengan dunia industry. Kesadaran akan peran penting pendidikan teknik dan kejuruan dalam perekonomian di Asia Tenggara telah berkembang (Fredriksen, 2008). Demikian pula, saat kedalaman makna dari pemikiran baru telah muncul dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Negara-negara (OECD) dan Amerika Latin tentang peran pendidikan menengah teknik dan yang lebih tinggi untuk dukungan ekonomi dan pengetahuan. Indikasi kebangkitan kepentingan dalam TVSD adalah penekanan pada tujuan dalam Pendidikan untuk Semua Monitoring (PUS) Laporan Global (GMR) 2010. Bila dicermati, selalu ada keterkaitan antara perkembangan industri dan ekonomi di satu sisi dan tenaga kerja di sisi lain; sedangkan di dalamnya selalu terkait dengan pendidikan dan pelatihan.

## **PEMBAHASAN**

### ***Reorganisasi dunia kerja***

Penggunaan peralatan teknologi tinggi di industri dan perkantoran mengubah pola pekerjaan dan kualifikasi tenaga kerja, dari penggunaan *hand-tools* ke penggunaan *head-tools*. Naiknya kebutuhan tenaga kerja/teknisi untuk peralatan berteknologi tinggi, menurunnya kebutuhan tenaga administrasi, tenaga industri manufaktur.

### ***Perubahan dan pengembangan pendidikan vokasi***

#### **1. Perubahan mendasar secara global dalam teknologi, ekonomi, dan dunia kerja**

Perkembangan dunia ke arah global akan menimbulkan situasi paradoks. Di satu sisi peluang terbuka sangat lebar; di sisi lain persaingan makin tajam. Dalam konteks daya saing tersebut terkandung kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensi dirinya dalam percaturan global. Oleh

karenanya dalam konteks global suatu bangsa dituntut mempunyai daya saing sekaligus daya tahan untuk berkiprah dan berjaya.

Pertumbuhan penduduk di setiap negara berbeda satu sama lain. Hal ini mengakibatkan perubahan kebutuhan teknologi, ekonomi, dan dunia kerja karena kondisi negara itu sendiri maupun karena kondisi negara lain karena adanya saling keterkaitan. Teknologi yang bersifat keras kemungkinan akan mengarah pada teknologi yang bersifat lunak pada abad 21. Teknologi keras sampai pada tingkat pengelolaan yang paling kompleks dapat dikendalikan oleh manusia menggunakan teknologi lunak. Jin (2010) mengedepankan pemahaman pada aspek manusia sebagai hal yang sangat dibutuhkan dalam mengimbangi percepatan laju teknologi. Perubahan yang sangat cepat pada aspek ekonomi, sosial, dan teknologi mengharuskan seluruh masyarakat perlu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan, sehingga dapat hidup dan bekerja dengan baik dalam masyarakat berpengetahuan. Pendidikan dan pelatihan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pribadi seseorang, meningkatkan produktivitas dan pendapatannya di tempat kerja, serta memfasilitasi partisipasi setiap orang dalam kehidupan ekonomi dan sosial (King & Palmer, 2010)

## 2. Tantangan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia

Kualitas SDM akan berpengaruh terhadap perekonomian. Pengetahuan yang didasarkan pada ekonomi memerlukan manajemen pengetahuan yang direncanakan dan karenanya hubungan antara dunia kerja dan pendidikan vokasi perlu ditingkatkan

Fokus peningkatan keterampilan generic digantikan oleh keterampilan inti yang dapat diterapkan di konteks organisasi dan kerja beragam (Payne, 2004). Negara-negara OECD telah mencoba untuk mendefinisikan kompetensi inti dan keterampilan yang sering disebut "keterampilan abad 21" atau "keterampilan orde tinggi" (Grubb, 2006). Selain karakterisasi keterampilan generik versus spesifik, terdapat peningkatan fokus hard skill dan soft. Pengusaha berkeinginan bahwa pekerja yang memiliki kemampuan lain selain soft skill atau hard skill. Keterampilan Hard mengacu pada kompetensi teknis

dan analitis dan tahu-bagaimana yang memungkinkan pekerja untuk melakukan aspek mekanik pekerjaan. Sebaliknya, keterampilan soft skill mereka adalah "kemampuan untuk perilaku adaptif dan positif yang memungkinkan individu untuk menangani secara efektif dengan tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari.

Author, Levy, & Murnane (2001) lebih lanjut menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi dapat mempengaruhi jenis ketrampilan yang dituntut pasar tenaga kerja. Mereka menunjukkan bagaimana komputerisasi dikaitkan dengan penurunan permintaan tenaga kerja manual relatif rutin, tugas kognitif dan peningkatan permintaan relatif untuk tugas kognitif non-rutin. Selain itu, kerangka kerja kompetensi kunci DeSeCo OECD (CERI, 2010), memberikan metode lain identifikasi dan klasifikasi kompetensi kunci, dibedakan dalam tiga kategori : (a) menggunakan alat bentuk interaktif, (b) berinteraksi dalam kelompok heterogen; dan (c) bertindak secara independen. Pertama, menggunakan alat interaktif mengacu pada kemampuan penggunaan berbagai alat fisik dan kegiatan social budaya (teknologi dan bahasa), untuk berinteraksi dengan lingkungan. Kedua dan ketiga pentingnya hidup atau soft skill. Seseorang harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja efektif dengan kelompok-kelompok heterogen lainnya, tetapi juga dapat mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri dan bertindak independen (Leney, 2008; OECD, 2005). Pencapaian pendidikan menengah atas dianggap sebagai persyaratan minimum untuk mendapatkan posisi yang memuaskan dalam pasar tenaga kerja untuk negara-negara OECD. Rata-rata, pencapaian pendidikan menengah atas dikaitkan dengan pengurangan pengangguran (pengangguran di kalangan mahasiswa bukan sebagai persentase dari kelompok usia) antara 20-24 tahun sebesar 7,3% dan 25-29 tahun sebesar 7,1% (OECD, 2007). Kompetensi global dapat diartikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang membantu orang memahami dunia tempat mereka tinggal, keterampilan dalam mengintegrasikan kajian lintas disiplin untuk memahami kegiatan dan percaturan global dan menciptakan kemungkinan berinteraksi dengan dunia global. Kompetensi global merupakan

penyesuaian sikap dan etika yang dapat memungkinkan kita berinteraksi secara nyaman, hormat-menghormati, dan produktif dengan berbagai manusia dari berbagai tempat geografis yang berbeda.

### ***Redesain pendidikan bidang vokasi di Indonesia***

Meskipun ada berbagai pandangan tentang apa yang dimaksud dengan "keahlian global" menjadi terkait erat dengan bahasa dan penyediaan ICT untuk keterampilan dasar untuk bekerja dalam ekonomi global, ada bukti lain yang mengakui bahwa ini membutuhkan promosi belajar tentang globalisasi, pembangunan berkelanjutan, pemahaman budaya dan sosial, ekonomi dan komitmen. SMK/vokasi di Indonesia merupakan bagian integral dari sektor ekonomi yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perlu dikembangkan kuantitas dan kualitasnya. Kualitas SMK akan merefleksikan kualitas tenaga kerja Indonesia yang perlu dibangun untuk meningkatkan keunggulan kompetitif sumber daya manusia Indonesia. Dengan demikian, SMK memegang peran penting dalam menekan angka pengangguran Indonesia. Untuk itu, perlu diaktualisasikan *didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu*. Lebih jauh dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), tujuan penyelenggaraan SMK adalah *pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta sikap profesional*. SMK menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai berikut : *pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan sumber SDM dan peralatannya agar selaras dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia* (Restra Direktorat PSMK tahun 2010-2014). Teknologi canggih telah membawa perubahan revolusioner di semua bidang kehidupan. Pengaruhnya pada industri dan ekonomi telah dianggap sebagai proporsi krisis. Penekanan telah bergeser nilai dari 'bahan' untuk 'informasi' dan 'waktu'. Kekuatan otot dan tenaga mesin diganti 'kekuatan otak' oleh dan 'kemampuan berpikir'. Pengetahuan pekerja-intensif dan multi-terampil semakin dibutuhkan. Untuk menyikapi adanya perkembangan yang pesat dalam tata kehidupan saat ini, maka diperlukan suatu

langkah pengembangan untuk bidang vokasi sesuai perkembangan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat kita buat suatu wacana redesain di bidang vokasi yang diharapkan dapat mempersempit jarak antara pendidikan vokasi di Indonesia saat ini dengan dunia kerja yang ada, yang perkembangannya sangat dinamis saat ini dan mendatang. Dinamika ekonomi pengetahuan, disertai dengan perkembangan pasar, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan globalisasi meningkatkan dan internasionalisasi, panggilan untuk wajah baru keterampilan dan kompetensi. Keterampilan dan kemampuan tidak hanya sangat diinginkan, tetapi sering diperlukan untuk memenuhi tuntutan perubahan realitas pasar ekonomi dan tenaga kerja. Menanggapi permintaan keterampilan umum dan keterampilan tingkat tinggi, akan lebih efektif mengintegrasikan pendidikan umum dan kejuruan. Dengan cara memberikan pengayaan pengetahuan dasar di pendidikan kejuruan/vokasi untuk lebih menguatkan daya pikir bagi para lulusan pendidikan vokasi di Indonesia. Untuk gambaran system yang ada kita dapat menyiapkan suatu wacana sebagai berikut :

Pendidikan kejuruan saat ini	Redesain
Pelaksanaan selama 3 tahun (5 semester di sekolah dan 1 semester di lapangan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 semester pertama penanaman kemampuan dasar</li> <li>• Semester 5-6 sebagai semester penjurusan terkait dengan minat kejuruan (dengan system blok) dalam pelaksanaan pembelajarannya.</li> <li>• Ujian sekolah dan UAN dilaksanakan</li> <li>• Satu semester untuk pkl sesuai bidang / minat</li> <li>• Semester akhir ojt di industri</li> <li>• Ujian sekolah / uji kompetensi dilaksanakan</li> </ul>

Dengan adanya penguatan pada pengetahuan dasar diharapkan kemampuan pikir dan kemampuan dalam pengambilan keputusan serta tingkat kemandirian lulusan akan lebih kuat. Dengan demikian, mempermudah penguasaan kompetensi produkti yang diminati; selain itu kemampuan berkomunikasi lebih baik. Berikut suatu cara mempersiapkan lulusan pendidikan kejuruan/vokasi di Indonesia

melalui pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, pendidik, evaluasi, dan kerjasama dunia kerja.

#### 1. Pengembangan kurikulum

Retrainability adalah kemampuan yang ditekankan. Hal ini perlu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan pesatnya pertumbuhan inovasi dari waktu ke waktu. Menyediakan program pendidikan berbasis luas untuk pengembangan karir yang juga tidak boleh diabaikan. Prioritas dalam perencanaan kurikulum antara lain : (a) menyiapkan siswa agar memiliki multi-skill: *kognitif skill order tinggi, skill praktis, skill pemrograman, skill membuat keputusan, komunikasi dan interpersonal skill*; (b) fleksibel: entri, durasi, urutan konten, tempat belajar, mode penyelenggaraan, berpusat pada siswa lulusan memiliki kemampuan untuk dilatih kembali; (c) memberi muatan kewirausahaan; (d) kredit yang dapat ditransfer: karena skill dan pengetahuan dapat diperoleh tidak hanya disekolah tetapi juga bisa didapatkan di tempat kerja atau melalui internet; serta (e) pendidikan berkelanjutan. Sementara itu, empat elemen kurikulum dan strategi instruksional, meliputi : (a) berbasis akademik yang luas untuk menaikkan standar sains; (b) pelatihan dasar dan pelatihan spesialis; (c) peningkatan skill industry; serta (d) modul pelatihan berisi gabungan antara teori dan praktik perlu dipersiapkan untuk menunjang keterlaksanaannya.

#### 2. Proses belajar mengajar (PBM)

PBM mengharuskan adanya kurikulum fleksibel dan instruksional interaktif. Di mana pengembangan yang terkait dengan PBM di antaranya : (a) tugas yang memfasilitasi belajar siswa, belajar berbasis sumberdaya, eksperimen yang berorientasi penemuan; (b) belajar yang terintegrasi, tes yang berorientasi kinerja; (c) CAI (Computer-Aided Instruction); (d) pelatihan yang menggunakan video berbasis computer; (e) sistem belajar terbuka; dan (f) CMI (Computer-Managed instruction). Sehingga akan terjadi perubahan di lingkungan sekolah yang meliputi : teacher centered menjadi student-centered; berorientasi konten menjadi orientasi goals; basis grup menjadi individual;



kurikulum yang kaku menjadi kurikulum yang fleksibel; dan instruksional dari guru menjadi interaktif.

3. Pendidik atau guru

Beberapa upaya dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan kesempatan berkembang. Peran guru dan fungsi guru yang saat ini diharapkan adalah : (a) guru sebagai spesialis pengetahuan; (b) guru sebagai praktisioner vokasional; (c) guru sebagai perancang program; (d) guru sebagai pengembang kurikulum; (e) guru sebagai sumber material; (f) evaluator kinerja; (g) guru sebagai konselor; (h) guru sebagai fasilitator; serta (i) guru sebagai manajer.

4. Evaluasi

Evaluasi hendaknya dilakukan oleh badan independen untuk melihat penguasaan kompetensi (lembaga sertifikasi, BAN-PT, BNSP, industri, dan BSNP).

5. Kerjasama dengan dunia kerja

kolaborasi yang kuat antara pendidikan dan industri untuk pelatihan *on the-jobbertujuan* mempersiapkan angkatan kerja terampil. *Tren Kolaborasi Industri-Lembaga Pendidikan* (UNESCO, 1992) dapat dikerjakan melalui empat tahapan: (1) belajar akademik; (2) Pelatihan dasar; (3) pelatihan khusus (spesialis); dan (4) peningkatan skills. Tahap 1-3 dilaksanakan di sekolah; pelaksanaan tahap 4 di industri, tetapi pada akhir tahun siswa dikontrak (diperlakukan) sebagai karyawan.

## **KESIMPULAN**

Pengembangan pendidikan bidang teknologi dan kejuruan perlu mempertimbangkan keterkaitan antara beberapa faktor yang bersifat technocultural. Keempat faktor tersebut adalah : hubungan industri (*industrial relationships*); perubahan teknologi (*innovation*); organisasi pekerjaan (*work organization*); dan formasi kompetensi (skills).

SMK/Vokasi di Indonesia merupakan bagian integral dari sector ekonomi yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perlu

dikembangkan kuantitas dan kualitasnya. Kualitas SMK akan merefleksikan kualitas tenaga kerja Indonesia yang perlu dibangun untuk meningkatkan keunggulan kompetitif SDM Indonesia. Menanggapi permintaan keterampilan umum dan keterampilan tingkat tinggi, akan lebih efektif mengintegrasikan pendidikan umum dan kejuruan. Dengan cara memberikan pengayaan pengetahuan dasar di pendidikan kejuruan/vokasi untuk lebih menguatkan daya pikir bagi para lulusan pendidikan vokasi di Indonesia. Untuk gambaran system yang ada kita dapat menyiapkan suatu wacana yaitu : *pelaksanaan pendidikan kejuruan/vokasi khususnya SMK dilaksanakan dalam delapan semester*. Empat semester untuk penanaman pengetahuan dasar dan keterampilan dasar. Semester 5-6 penjurusan, pelaksanaan UAS dan UNAS. Semester 7-8 untuk pengayaan keterampilan di industri/lapangan dan OJT, serta uji kompetensi.

Dalam aplikasi keterlaksanaan redesain tersebut harus dengan cara mempersiapkan lulusan pendidikan kejuruan/vokasi di Indonesia melalui pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, pendidik, evaluasi, dan kerjasama dunia kerja, antara lain :

1. Pengembangan kurikulum, yaitu *retrainability* adalah kemampuan yang ditekankan. Hal ini menjadi perlu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang sering berasal dari pesatnya pertumbuhan inovasi dari waktu ke waktu. Menyediakan program pendidikan berbasis luas untuk pengembangan karir yang juga tidak boleh diabaikan.
2. Proses belajar mengajar, yaitu : kurikulum fleksibel dan intruksional interaktif
3. Para guru harus melakukan peran ganda dan fungsi dalam konteks mereka berada jauh dari distributor informasi sederhana untuk menjadi fasilitator pembelajaran.
4. Evaluasi. Evaluasi hendaknya dilakukan oleh badan independen untuk melihat penguasaan kompetensi.
5. Kerjasama dalam dunia kerja. Hal ini diwujudkan di mana ada kolaborasi yang kuat antara pendidikan dan industri .

## DAFTAR PUSTAKA

- Autor, D., F. Levy, and R. Murnane. 2001. *The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration*. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 8337. Cambridge: NBER.
- Brundiers, K., Wiek A., and Redman, C.L. 2010. *Real-World Learning Opportunities In Sustainability: From Classroom Into The Real World*. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, Vol. 11 : 4 pp. 308-324.
- Centre for Educational Research and Innovation (CERI). 2010. *Trends Shaping Education 2010*. France: OECD.
- Fredriksen, Birger. 2008. *Rationale, Issues, and Conditions for Sustaining Abolition of School Fees*. In forthcoming *Abolishing School Fees in Africa: Lessons from Ethiopia, Ghana, Kenya, Malawi, and Mozambique*, (Washington, DC and New York: World Bank and UNICEF) 1-42.
- Grubb, N. 2006. *Vocational Education and Training: Issues for a Thematic Review*. Issue Paper Prepared for the OECD Meeting of Experts, Paris, February 5, 2007.
- Hadi Soesastro. 2004. *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu*. Di akses pada tanggal 24 Januari 2011 melalui [http://www.csis.or.id/working\\_paper\\_file/42/wpe082.pdf](http://www.csis.or.id/working_paper_file/42/wpe082.pdf)
- Jin, Z. 2010. *Global Technological Change From Hard Technology to Soft Technology (2nd ed)*. Beijing: Intellect.
- King, K. and Palmer, R. 2010. *Planning For Technical And Vocational Skills Development*. Paris: UNESCO-IIEP.
- Kurzweil, R. 2001. *The Law Of Accelerating Returns*. Di akses pada tanggal 2 November 2010 melalui <http://www.kurzweilai.net/the-law-of-acceleratingreturns>.
- Leney, T. 2008. *Developing Core Competencies and Skills*. Powerpoint Presentation at the World Bank, Washington DC, April 2008.
- Maclean, R., Wilson, D., & Chinien, C. (eds). 2009. *International Handbook of Education for the Changing World of Work: Bridging Academic and Vocational Learning*. Germany : Springer-UNEVOC.
- Organization for Economic Cooperation and Development. 2005. *The Definition and Selection of Key Competencies: Executive Summary*. Paris: OECD.
- Organization for Economic Cooperation and Development. 2007. *Education at a Glance*. Paris: OECD.
- Payne, J. 2004. *The Changing Meaning of Skill*. SKOPE Issues Paper Series No. 1. Oxford and Warwick: Oxford and Warwick Universities
- Pierce, A.J. & Karwatka, D. 2010. *Introduction to Technology*. California: Mc Graw Hill Glencoe.
- WisegEEK. 2011. *What is vocational education?* Diakses pada tanggal 5 Januari 2011 melalui <http://www.wisegEEK.com/what-is-vocational-education.htm>

# REDESAIN SISTEM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN: ALTERNATIF PENGENTASAN PENGANGGURAN DI INDONESIA

Oleh  
Nuryadin Eko Raharjo  
Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang pada tahun 2011 mencapai 8,12 juta orang mengindikasikan bahwa pencari kerja sampai saat ini masih kesulitan dalam mencari lapangan kerja. Dari komposisi tenaga kerja diketahui sebesar 23,44% berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun SLTA. Prosentase tersebut memberi arti bahwa posisi SMK sebenarnya sangat strategis untuk menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Hal itu sesuai dengan tujuan SMK yaitu menghasilkan lulusan yang siap kerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih lanjut. Namun demikian pendidikan kewirausahaan di SMK terutama bidang Teknologi dan Industri di Propinsi DIY pada umumnya masih mengandalkan pembelajaran teoritis secara klasikal di kelas sehingga lulusannya belum siap untuk berwirausaha. Oleh karena itu perlu didesain ulang sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu di SMK.

Sistem pendidikan kewirausahaan terpadu di SMK harus didesain dengan melibatkan semua unsur-unsur pendidikan di sekolah seperti PBM di kelas, ekstra kulikuler, pengembangan diri maupun kultur sekolah. Selain itu harus pula memperhatikan proses pembentukan wirausaha yang menurut Bygrave (2003) dimulai dari *innovation, triggering, implementation* dan *growth*. Pada umumnya SMK kelompok teknologi dan industri mengalami kendala dalam praktik kewirausahaan di sekolah. Dengan desain pembelajaran terpadu ini diharapkan model pembelajaran kewirausahaan tidak hanya mengarah ke bisnis semata, tetapi juga mengarah kepada pendidikan karakter wirausaha sehingga *sustainability*-nya dapat terjaga.

*Framework* pendidikan kewirausahaan terpadu di SMK yang melibatkan pendidikan karakter kewirausahaan dapat dilakukan melalui: (1) implementasi pendidikan karakter kewirausahaan ke semua mata pelajaran, (2) pembelajaran kelas wirausaha, (3) kegiatan kewirausahaan ekstra kulikuler, (4) kegiatan kewirausahaan melalui pengembangan diri, dan (5) pengembangan kultur sekolah sebagai media untuk internalisasi karakter kewirausahaan ke warga sekolah (Puskur, 2010). Namun demikian implementasi pendidikan karakter kewirausahaan di SMK terutama pada bidang teknologi dan industri biasanya tidak semudah bidang pariwisata. Oleh karena itu proses pendidikan kewirausahaannya apabila memang tidak memungkinkan untuk implementasi sampai pada praktik bisnis (*implementation* dan *growth*), dapat dilakukan sampai tahap *innovation* dan *triggering*. Untuk pelaksanaan kewirausahaan pada tahap *implementation* dan *growth* dapat dilakukan setelah lulus dengan berbekal pengetahuan dan hasil internalisasi karakter wirausaha yang telah dilakukan di SMK.

Kata Kunci: pendidikan kewirausahaan, pengentasan pengangguran

# Rekonstruksi Pendidikan dan Penguatan Modal Sosial

Oleh Siti Irene Astuti D

[ireneast@yahoo.com](mailto:ireneast@yahoo.com)

Hp 08156876626

## Abstrak

Desentralisasi pendidikan mengubah struktur kewenangan dalam tatanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pada satuan pendidikan dalam melakukan proses interaksi sosial sebagai dasar bagi semua bentuk kegiatan manusia. Desentralisasi pendidikan juga telah mengubah berbagai peran-peran penting dalam proses pengelolaan pendidikan. Dialektika terjadi dalam proses perubahan kebijakan, proses desentralisasi pendidikan tidaklah berjalan semata-mata secara otomatis tetapi meminta hal-hal yang berbeda dengan cara-cara pengelolaan sebelumnya. Desentralisasi pendidikan memerlukan persiapan yang matang karena akan mengubah sikap partisipatif rakyat dalam pengelolaan pendidikan, tetapi di sisi lain terjadi fenomena melemahnya modal sosial dalam masyarakat.

Rekonstruksi pendidikan dalam kebijakan pendidikan yang desentralistik masih berproses yang membutuhkan dukungan sosial. Modal sosial diperlukan untuk mempercepat tujuan desentralisasi pendidikan. Dengan modal sosial dapat mengubah sumberdaya individu yang dimiliki oleh setiap sekolah atau masyarakat menjadi sumber daya sosial yang mampu menggerakkan dinamika dalam perbaikan kualitas pendidikan. Penguatan modal sosial perlu dilakukan secara komprehensif dalam sekolah dan masyarakat dengan dibangun kesadaran bersama bahwa modal sosial diperlukan dan dapat dikembangkan dengan progresif oleh semua peran yang ada dalam proses pengelolaan pendidikan. Cara yang dilakukan oleh sekolah dalam penguatan modal sosial dengan mengembangkan fungsi pendidikan pada unsur-unsur yang diperlukan oleh modal sosial antara lain adalah -unsur (a) partisipasi dalam jaringan sosial (*participation and social net work*), (b) saling tukar kebaikan (*resiprocity*), (c) norma sosial (*social norm*), (d) nilai-nilai sosial, dan (e) tindakan yang proaktif.

Kata kunci : desentralisasi pendidikan, modal sosial

## PENDAHULUAN

Permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedikitnya ada tiga faktor utama yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan yang merata. *Faktor pertama*, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini mengartikan lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua *input* yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga menghasilkan *output* yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila *input* pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan dipenuhi, maka mutu pendidikan (*output*)

secara otomatis akan terjadi. Pendekatan ini gagal karena kurang memperhatikan proses pendidikan. *Faktor kedua*, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokratis yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadangkala kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. *Faktor ketiga*, peran serta masyarakat, khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Partisipasi masyarakat lebih banyak bersifat dukungan *input* (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, *monitoring*, evaluasi, dan akuntabilitas) (Diknas, 2001:1). Oleh karena itu, permasalahan pendidikan perlu dikaji dalam perspektif sosiologis mengingat bahwa pendidikan tidak semata-mata sebagai "produk" tetapi sebagai "proses" yang menyangkut hasil interaksi sosial antar berbagai elemen-elemen dalam masyarakat.

Hal-hal yang menguatkan bahwa pendidikan adalah sebuah "proses" sebagaimana yang dipaparkan H.A.R. Tilaar bahwa dalam perspektif mikro yang dijadikan pusat perhatian adalah peserta didik dalam proses belajar mengajar. Peserta didik dalam proses belajar berkaitan dengan tujuan pendidikan, metodologi, dan evaluasi hasil belajar. Semua masalah tersebut termasuk dalam sistem pendidikan di sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh sistem internal, yaitu: 1) pembuat kebijakan, 2) manajemen, dan 3) *service*. Selanjutnya, keseluruhan sistem tersebut didukung oleh sistem eksternal, yaitu: 1) budaya, 2) kekuatan politik, dan 3) kondisi ekonomi. Kekuatan pandangan mikro ialah menempatkan peserta didik sebagai obyek utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Titik tolak adalah proses belajar mengajar yang kondusif agar tujuan dan visi pendidikan dapat diwujudkan sebagaimana yang diinginkan. Kelemahan pandangan mikro ialah seakan-akan proses pendidikan peserta didik akan menentukan segala-galanya atas suksesnya sistem pendidikan nasional. Dalam perspektif ini sistem pendidikan sebagai pelaksana dari kekuasaan negara. (Tilaar, 2003:151).

Pendidikan sebagai "proses" dalam analisis makro dapat dipahami dalam perspektif studi kultural. Dalam konteks ini sistem pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi sebagai suatu keseluruhan. Dalam kaitan antar negara, pendidikan merupakan sistem yang terintegrasi dalam sistem kekuasaan. Kekuatan dari perspektif ini adalah sistem pendidikan dapat mengubah gaya hidup suatu masyarakat

karena dapat mengubah tingkah laku seseorang dalam berpikir yang lebih terbuka dan reflektif. Pedagogik kritis merupakan pelopor dari pandangan yang menggunakan pandangan studi kultural. Peran negara dalam perspektif ini dapat bersifat positif apabila lembaga-lembaga pendidikan mempunyai kontrol terhadap kekuasaan negara (Tilaar, 2003:151)

Perubahan kebijakan sentralistik dan desentralistik sebagai proses yang tak terelakkan, karena kegagalan dalam sentralisasi pendidikan yang dinilai kurang memberikan wacana bagi pengembangan dimensi demokrasi sebagai aspek penting dalam proses pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh John Dewey dalam *School and Society*, yang menekankan pada inti pendidikan merupakan arena tumbuh dan berkembangnya gaya hidup demokrasi. Artinya, penyelenggaraan, manajemen, proses belajar-mengajar semuanya didasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi. Hal inilah yang meminta persiapan-persiapan yang matang dan kerja keras.

Dalam konteks pemikiran Dewey, gagasan akan perubahan kebijakan sentralistik ke desentralistik menggambarkan bahwa perubahan dari suatu sistem yang sentralistik dan otoriter menjadi suatu sistem demokratis yang terbuka tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, sumber daya manusia yang memadai, organisasi yang demokratis, dan manajemen yang terbuka. Dalam masyarakat demokrasi, pendidikan adalah milik rakyat, dari, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, pendidikan bukanlah semata-mata milik pemerintah (pusat), tetapi merupakan milik rakyat yang mempunyai pendidikan tersebut. Pada akhirnya, pendidikan merupakan suatu sarana untuk menumbuhkan sikap demokratis, kesatuan bangsa atau nasionalisme, rasa persatuan yang merupakan kapital sosial dari suatu masyarakat. Artinya, pembangunan suatu masyarakat hanya terjadi apabila masyarakat mempunyai kapital sosial yang besar dan bukan sekedar mempunyai dana yang cukup atau lembaga-lembaga yang teratur dengan manajemennya yang terbuka. Semakin besar kapital sosial suatu masyarakat dalam menanggulangi kehidupan bersama, maka akan mempermudah upaya peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut ( Jenniefer dalam Tilaar, 200:1501-151).

Perubahan kebijakan pendidikan desentralistik sarat dengan harapan perbaikan pembangunan pendidikan. Sentralisasi pendidikan belum berhasil dalam mengoptimalkan peran pendidikan sebagai kekuatan moral bangsa ini, bahkan slogan *knowlegde is power* masih jauh dari realitas. Di samping itu, slogan dunia tentang hak pendidikan bahwa *education for all* masih ada dalam tatanan konsep. Pendekatan sentralistik cenderung mematikan asas demokrasi (Tilaar,1998). Lebih jauh lagi, sentralisasi pendidikan melemahkan partisipasi masyarakat dan menyempitkan ruang gerak bagi masyarakat

pendidik. Proses seperti ini telah menghilangkan potensi masyarakat untuk melahirkan massa yang kritis terhadap situasi pendidikan. Sebagai akibatnya, lembaga pendidikan kurang berperan sebagai ruang publik, bagi tumbuhnya demokrasi. Dampak yang lebih mendalam dari hegemoni pendidikan adalah terjadinya pengikisan pendidikan lokal dan pengikisan budaya-budaya lokal. Tak heran jika kemudian, masyarakat lokal mengalami anomie, alienasi, dan kehilangan identitasnya, serta kehilangan kebhinekaannya (Makmuri,2003:5). Fenomena tersebut menjadi satu indikasi melemahnya modal sosial.

“ Kegagalan pendidikan sentralistik diwarnai oleh kebijakan politik daripada kebijakan akademik. Pendidikan yang sentralistik menjadikan kinerja pendidikan cenderung memperlakukan peserta didik dan guru sebagai robot, *inhuman*, dan *impersonal*. Sebagai hasil akhirnya, beberapa lulusan tidak kreatif dan lemah kemandiriannya setelah terjun di masyarakat dan di dunia kerja. Di samping itu praktek manajemen Sisdiknas membuat kuatnya jiwa birokrasi penyelenggara pendidikan yang dirasakan mulai dari pusat hingga ke tingkat mikro, yakni proses pembelajaran di kelas. Sedangkan pada tingkat makro kinerja sekolah cenderung korporatis, di mana standar guru, kurikulum, fasilitas, dan prosedur proses pembelajaran ditentukan oleh kantor pusat ( Danim, Sudarmawan. 2003:14)”

Modal sosial dibutuhkan dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan sebagaimana dijelaskan yang oleh Ackerman dan Alscott pentingnya *the stakeholder society* yang diformulasikan secara sederhana, yakni sebagai masyarakat yang para anggotanya mempunyai kepentingan bersama untuk membangun masyarakatnya sendiri. Terdapat lima pemain dalam *the stakeholder society*, yaitu: 1) masyarakat lokal; 2) orangtua; 3) peserta didik; 4) negara; 5) pengelola profesional pendidikan (Dwiyanto, 2003). Dinamika kerja dari *stakeholder* adalah bagian dari modal sosial yang akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program. Realitas sosial menunjukkan kecenderungan bahwa dunia pendidikan yang memiliki modal sosial belum dikembangkan secara optimal bagi perbaikan kualitas pendidikan. Bahkan ada kecenderungan bahwa modal sosial justru semakin melemah, tidak dianggap penting oleh orangtua dan para pengelola pendidik. Fenomena ini membuktikan bahwa ada paradok yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat pendidik tentang peran modal sosial, sebagai modal penting bagi perbaikan mutu pendidikan dan di pihak lain tidak dinilai sebagai modal penting bagi perbaikan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, fungsi negara bukan lagi sebagai penguasa juga bukan sebagai pemegang kekuasaan tunggal yang bertujuan melestarikan kekuasaan negara, tetapi sebagai *partner* yang memfasilitasi proses pendidikan yang disepakati bersama. Tugas negara antara lain membantu adanya standar nasional bahkan internasional dari lembaga-lembaga pendidikan dan membantu daerah-daerah lain yang kekurangan sumber daya manusia dan sumber pembiayaan.



Untuk membangun wacana pemikiran makalah ini mencoba untuk mendiskusikan tentang bagaimana peran modal sosial dalam mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, khususnya penguatan modal sosial pada tingkat satuan pendidikan ?

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Desentralisasi Pendidikan**

Desentralisasi bukanlah konsep yang mudah untuk didefinisikan, karena konsep ini memiliki berbagai bentuk dan dimensi. Rondineli (1986) sebagaimana dikutip Teguh Yuwono mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen, dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agen-agensya kepada unit kementerian pusat, unit yang berada di bawah level pemerintah, otoritas atau korporasi publik semi otonomi, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirlaba. Sementara itu, Shahid Javed Burki, sebagaimana dikutip Teguh Yuwono, menggunakan istilah desentralisasi untuk menunjukkan adanya proses perpindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif kepada unit pemerintah subnasional. (Teguh Yuwono, 2003:27-28)

Dukungan utama perlunya desentralisasi berasal dari teori politik demokrasi liberal klasik, seperti John Stuart Mill bahwa keuntungan secara nasional dan daerah akan semakin meningkat dengan devolusi dan partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Smith, Turner dan Hulme, dikutip oleh Teguh Yowono (37-38) , meliputi: pendidikan politik, *training* kepemimpinan politik, stabilitas politik, ekualitas politik, akuntabilitas, respon pemerintah. Sementara Turner menjelaskan lebih detail tentang manfaat desentralisasi:

1. Perencanaan khusus secara lokal akan mudah dilakukan dengan menggunakan informasi terkini dan detail yang hanya di tingkat lokal (*locally spesific plans*);
2. Koordinasi antara organisasi dapat dilakukan pada level daerah (*inter-organizational coordination*);
3. Eksperimentasi dan inovasi yang didorong oleh desentralisasi akan meningkatkan peluang strategi pembangunan lebih efektif (*experimentation and innovation*);
4. Motivasi personal di daerah akan meningkat seiring dengan tanggungjawab yang akan dimiliki untuk mengembangkan program yang akan dikelola (*motivation of field-level personnel*);
5. Pengurangan beban pekerjaan pada agen atau kantor cabang pemerintah pusat di daerah akan melepaskan mereka dari rutinitas pengambilan keputusan dan memberi mereka waktu yang lebih untuk menentukan isu-isu strategis sehingga akan memperbaiki kualitas kebijakan (*workload reduction*)

Berbagai alasan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Alasan tersebut antara lain dari segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk kepentingan daerah maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah. Dari segi manajemen, desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Dari segi kultural, desentralisasi dimaksudkan untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan. Segi pembangunan desentralisasi dapat melancarkan formulasi dan implementasi program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari kepentingan pusat, desentralisasi dapat mengatasi kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi program-programnya.(Dwiyanto, 2005:49-50) . Berdasarkan alasan-alasan tersebut, desentralisasi diperlukan untuk mengefektifkan kebijakan yang luas dari berbagai kehidupan masyarakat.

Desentralisasi pendidikan diterapkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Tim Bank Dunia bahwa desentralisasi pendidikan menyangkut masalah pembiayaan pendidikan, peningkatan efisiensi, dan efektivitas usaha pendidikan; pembagian kekuasaan politik; peningkatan kualitas pendidikan; dan peningkatan inovasi dalam pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dampak positif atas kebijakan desentralisasi pendidikan, diharapkan terjadi : a) peningkatan mutu, b) efisien keuangan, c) efisien administrasi, dan d) perluasan/pemerataan. (Alhuman Amich 2000).Meskipun demikian, desentralisasi pendidikan tidak sendirinya meningkatkan mutu pendidikan dalam arti peningkatan mutu belajar-mengajar

Desentralisasi pendidikan diharapkan memperkuat pemerintah daerah dalam membangun modal sosial. Karena penerapan desentralisasi pendidikan di Indonesia diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang menekankan bahwa wewenang paling besar untuk sektor pendidikan sejak pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan menengah atas adalah urusan pemerintah kabupaten atau kota. Undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan munculnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai kewajiban bagi orangtua untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya (pasal 7 ayat 2). Selanjutnya, kewajiban bagi masyarakat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (pasal 9). Demikian juga, tentang pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Dalam konteks inilah pendidikan di daerah benar-benar memberikan dasar yang

cukup bagi daerah untuk lebih diberdayakan dalam arti lebih fungsional, memiliki fleksibilitas yang tinggi, dan tidak hanya sekedar menjadi retorika . Oleh karena itu, komitmen bupati atau walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota terhadap bidang pendidikan akan memberi warna dan corak pendidikan di daerahnya.

Kebijakan desentralisasi pendidikan membawa konsekuensi besar perubahan pendidikan di Indonesia. Sejumlah kaidah, ketentuan, peraturan, dan aneka panduan menunjukkan bahwa berbagai unit antara pusat dan sekolah tak hanya sebagai perantara, penyampai (transmisi) tetapi perlu menjabarkan membuat kebijakan operasional dan membuat kebijakan sekolah. Dalam kaitannya dengan perubahan ini, unit-unit di kabupaten dan kota perlu mengembangkan kapasitas dalam merumuskan kebijakan operasional maupun kebijakan yang menjadi wewenangnya. Di banyak kasus, kebijakan semacam ini tidak eksplisit, dirumuskan secara jelas. Sebagai akibatnya desentralisasi pendidikan belum dapat menghasilkan bahwa (Soeyanto,2001):

1. Setiap unit dan personil semakin menyadari dan memahami proses kebijakan yang menjadi urusannya.
2. Pendidikan dasar dapat memainkan peranan sentral dalam melaksanakan desentralisasi kehidupan masyarakat.
3. Pentingnya kemitraan, dialog, dan membangun belajar organisasi dalam mencapai tujuan pendidikan dasar.
4. Pentingnya menyusun panduan dan pengembangan kapasitas unit-unit dan personil di jajaran pendidikan kabupaten dan kota.
5. Pentingnya mengenali *stakeholder* pendidikan dan sedia serta mampu melibatkan mereka dalam kegiatan dan manajemen pendidikan.
6. Perlunya meningkatkan kesadaran pentingnya membangun masyarakat belajar dengan kemampuan dialog secara aktif

Kegagalan kebijakan pendidikan desentralistik dapat diantisipasi dengan pemahaman terhadap berbagai sumber masalah. Sebagaimana dijelaskan oleh Chapman dan Mahlck bahwa kegagalan kebijakan pendidikan dari pusat yang gagal masuk dan dilaksanakan di sekolah-sekolah karena berbagai faktor yang menjadi sumber masalahnya, antara lain:

1. Kebijakan pusat tak dikomunikasikan ke sekolah; para kepala sekolah dan guru tak mengerti bahwa mereka harus mengerjakan hal yang berbeda dengan sebelumnya.
2. Kebijakan yang telah dikomunikasikan ke sekolah tetapi dalam ungkapan-ungkapan yang tak jelas sehingga tak tahu apa yang harus mereka lakukan.
3. Tak jarang kepala sekolah dan guru beranggapan bahwa kebijakan dan program-program itu tak cocok dengan realitas sekolah dan kelas.
4. Para guru dan personal tak siap mengerjakan kebijakan dan prakteknya.

5. Cara-cara dan dukungan untuk menerapkan kebijakan tak mencukupi.
6. Informasi sekolah yang tersedia di departemen tak mencantumkan informasi praktek pedagogis di tingkat kelas.
7. Seringkali terjadi interaksi praktek yang positif dan negatif

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, bahwa kegagalan kebijakan pendidikan disebabkan kurang menekankan pada analisis proses. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kebijakan bukan lagi bersifat linear, tetapi dilihat sebagai proses yang dinamik dan interaktif, diartikan bahwa di setiap langkah, kegiatan proses dapat kembali ke langkah-langkah sebelumnya, proses mengkaji ulang sebuah kebijakan dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dialektika terjadi dalam proses perubahan kebijakan. Dalam hal ini, proses desentralisasi dan otonomi pendidikan tidaklah berjalan semata-mata secara otomatis tetapi meminta hal-hal yang berbeda dengan cara-cara pengelolaan sebelumnya. Desentralisasi pendidikan memerlukan persiapan yang matang karena akan mengubah sikap rakyat dalam pengelolaan pendidikan. Di sisi lain, kegagalan tersebut juga disebabkan melemahnya modal sosial dalam masyarakat.

Rekonstruksi pendidikan dalam rangka otonomi diperlukan agar perubahan kebijakan berhasil secara optimal, sebagaimana dijelaskan oleh Sidi meliputi (Mulyasa, 2006:6-7):

1. Upaya untuk peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan memantapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi mungkin akan berbeda antar sekolah, antar daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkatan standar minimal normal dan unggulan.
2. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.
3. Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. Peningkatan peran serta orangtua pada level pengambilan (pengambilan keputusan) dan level operasional melalui komite (dewan) sekolah. Komite ini terdiri atas kepala sekolah, guru, senior, wakil orangtua, tokoh masyarakat, dan perwakilan siswa. Peran komite meliputi perencanaan, implementasi, *monitoring*, serta evaluasi program kerja sekolah.
4. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal, serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas bahwa salah satu aspek penting yang diperlukan dalam proses rekonstruksi pendidikan yakni penguatan kembali peran modal sosial bagi

keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan yang desentralistik, karena sampai saat ini desentralisasi pendidikan belum memberikan sumbangan yang signifikan bagi perbaikan mutu pendidikan.

### **Konsep Modal Sosial Dalam Kebijakan Pendidikan**

Secara akademik, apa sebenarnya yang dimaksud dengan “modal sosial”? Istilah “modal sosial” sebenarnya sudah lama dikenalkan oleh sosiolog kenamaan Emile Durkheim pada abad ke-19. Durkheim menyebut istilah “modal sosial” untuk menyatakan ikatan sosial antarmanusia di dalam sebuah masyarakat sangat penting untuk membentuk kohesivitas sosial dalam mencapai tujuan bermasyarakat. Ia merupakan sebuah kekuatan untuk mencapai tujuan hidup bersama yang tidak mungkin dicapai secara personal. Sebagai contoh, misalnya, kegiatan pendidikan. Pendidikan merupakan aktivitas kolektif antara pendidik, siswa, masyarakat, dan pemerintah. Sebagai sebuah aktivitas kolektif, pendidikan memerlukan kerjasama banyak pihak, mulai dari pemimpin sekolah, para guru, tenaga administrasi, murid, orangtua siswa, komite sekolah, dan tentu pemerintah. Jika semuanya fungsional sesuai tugas dan peran masing-masing, maka pendidikan akan berjalan baik dengan hasil yang baik pula. Ketika mengenalkan istilah “modal sosial” (Mudjia Rahardjo, 2010)

Emile Durkheim membayangkan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis hanya bisa dicapai manakala antarwarga masyarakat itu saling berhubungan dengan baik melalui jaringan dan kesamaan nilai yang tumbuh di masyarakat itu dengan lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan yang ada. Nilai-nilai itu terus dijaga sebagai kekuatan yang mengikat, sehingga menjadi kekuatan tersendiri yang bermanfaat tidak saja untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, tetapi juga untuk menangkis berbagai upaya yang mengancam kohesivitas mereka. Apa yang dimaksudkan sebagai masyarakat oleh Durkheim tentu masyarakat dalam arti luas, termasuk masyarakat pendidikan. Emile Durkheim sadar sepenuhnya bahwa di setiap masyarakat selalu ada perbedaan di antara anggotanya, tetapi pada saat yang sama juga ada kesamaannya. Dalam konteks modal sosial ini, kesamaan lebih ditonjolkan daripada perbedaan. Ini tidak mudah, karena itu, diperlukan upaya penyadaran dari tokoh atau pemimpin masyarakat bahwa tatkala masyarakat ingin mencapai tujuan bersama maka ego dan kepentingan pribadi selayaknya ditanggalkan dulu. Masyarakat harus disadarkan bahwa ada tujuan bersama yang hanya bisa dilakukan jika warga merasa dalam sebuah ikatan kuat untuk menjalankan peran secara bersama-sama. Ada “*others*” dan “*otherness*” yang bisa diperankan kelebihan-kelebihannya dan selanjutnya dihargai ( Mudjia Rahardjo: 2010) .

Dasar pemikiran Emile Durkheim tersebut yang membuktikan bahwa secara sosiologis bahwa konsep modal sosial telah melekat dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangannya konsep modal sosial terus menjadi kajian yang terus didiskusikan dari James Coleman, didiskusikan lebih lanjut oleh Pierre Bourdieu dan dipopulerkan Robert Putnam dan beberapa pemikir lainnya. Persoalan yang akan dipaparkan dalam makalah ini lebih menekankan pada pemahaman tentang konsep dasar modal sosial dan bagaimana penguatan yang dapat dilakukan oleh sekolah jika modal sosial dinilai sebagai modal penting bagi perbaikan kualitas pendidikan.

Konsep modal sosial dikembangkan oleh James Coleman, didiskusikan lebih lanjut Pierre Bourdieu dan dipopulerkan Robert Putnam. Menurut James Coleman (1990), atas hasil studinya tentang pemuda dan pendidikan (*youth and schooling*) mendefinisikan konsep modal sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya, apakah dalam bentuk personal atau korporasi dalam suatu struktur sosial. Modal sosial menurutnya inheren dalam struktur relasi antarindividu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya (Hauberer, 2011:249).

Pierre Bourdieu menekankan pada aspek yang berbeda bahwa modal hubungan sosial yang jika diperlukan akan memberikan dukungan-dukungan bermanfaat: modal harga diri dan kehormatan seringkali diperlukan jika orang ingin menarik para klien ke dalam posisi-posisi yang penting secara sosial, dan yang bisa menjadi alat tukar, misalnya karier politik. Modal sosial adalah sejumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbali balik perkenalan dan pengakuan yang seikit banyak terinstitusionalisasikan. Erat dan tahannya ikatan sama vitalnya: Modal sosial mempresentasikan 'agregat sumber daya yang potensial yang dikaitkan dengan kepemilikan jaringan yang bertahan lama'. Nilai ikatan yang dijalin seseorang individu tergantung pada jumlah koneksi yang dapat dimobilisasi dan volume modal yang dimiliki oleh masing-masing koneksi. Ikatan antara koneksi sosial dan modal budaya atau modal finansial dengan mencontohkan profesi, seperti pengacara dan dokter yang memanfaatkan "koneksi sosial". Koneksi sosial memerlukan kerja. (dalam John Field, 2010:23). Coleman dan Bourdieu memiliki kesamaan dalam fokus kajian yaitu individual, terutama yang berkaitan dengan peran dan hubungan dengan sesama sebagai unit analisis modal sosial (Hauberer, 2011:250).

Dalam bukunya "Toward a Methodological Foundation" beberapa point yang ditulis oleh Julia Haubrer menjelaskan bahwa konsep dasar modal sosial Bourdieu (1983) dan Coleman (1988) menjelaskan definisi umum dari modal sosial. Modal sosial adalah properti hubungan antara individu-individu yang merupakan aktor sumber daya yang dapat menggunakan dan manfaat dari hubungan sosial tersebut. Modal sosial diproduksi dalam struktur terbuka dan tertutup serta hubungan lembaga dan non lembaga adalah sama. Coleman melihatnya sebagai suatu aspek dari struktur sosial. Dia membedakan jenis kepercayaan modal sosial dan hubungan kewenangan, norma dan sanksi yang efektif, informasi organisasi sosial potensial dan sepadan. Putnam (2000) berkaitan dengan penguatan demokrasi dan output ekonomi masyarakat melalui jaringan sipil yang memfasilitasi penciptaan kepercayaan dan norma timbal balik (Hauberer, 2011:250).

Modal sosial muncul dalam struktur hubungan atau jaringan antar individu atau kolektif. Ini menyediakan akses ke sumber daya sosial. Beberapa sumber daya yang lebih berguna untuk memfasilitasi tindakan ekspresif dan yang lain lebih berguna untuk memfasilitasi tindakan instrumental. Struktur atau jaringan dapat terbuka (*bridging*) atau tertutup (ikatan). Yang pertama lebih bermanfaat untuk tindakan instrumental dan tindakan dengan karakter kompetitif dan yang terakhir lebih berguna untuk tindakan ekspresif dan tindakan dengan karakter koperasi. Struktur bervariasi lanjut terkait dengan ukuran dan jangkauan / keragaman mana ukuran kecil dan berkisar lebih mungkin untuk menyediakan akses ke sumber daya untuk tindakan ekspresif dan ukuran besar dan rentang yang lebih mungkin untuk memberikan akses ke sumber daya untuk tindakan instrumental (Hauberer, 2011:251).

Francis Fukuyama (2003) menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Situasi tersebutlah yang akan menjadi resep kunci bagi keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan, dan terutama bagi kestabilan pembangunan ekonomi dan demokrasi. Pada masyarakat yang secara tradisional telah terbiasa dengan bergotong royong serta bekerjasama dalam kelompok atau organisasi yang besar cenderung akan meraskan kemajuan dan akan mampu, secara efisien dan efektif, memberikan kontribusi penting bagi kemajuan negara dan masyarakat. Prasyarat modal sosial adalah aspek sosial budaya seperti norma-norma timbal balik dan kepercayaan umum dan aset kolektif (misalnya ekonomi, teknologi dan latar belakang sejarah) serta karakteristik individu dari responden tertentu

(misalnya jenis kelamin, etnis). Selain itu, aspek sosial budaya merupakan produk dari modal sosial.

Modal sosial memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas kehidupan dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus. Dalam proses perubahan dan upaya untuk mencapai tujuan, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan ruh modal sosial antara lain sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai, dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peran penting adalah kemauan masyarakat atau kelompok tersebut untuk secara terus menerus proaktif, baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan-jaringan kerjasa, maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru.

Modal sosial berisi sumber daya (misalnya, kekayaan kekuasaan, dan reputasi, serta jaringan sosial) aktor individu lain dengan siapa aktor individu dapat mendapatkan akses melalui hubungan sosial yang langsung atau tidak langsung. Mereka adalah sumber daya tertanam dalam hubungan jaringan seseorang. Seperti sumber daya pribadi, sumber daya sosial dapat meliputi barang-barang material seperti tanah, rumah, mobil uang, dan dan barang-barang simbolik seperti pendidikan, keanggotaan di klub, gelar kehormatan, bangsawan atau judul organisasi, nama keluarga, reputasi, atau popularitas (Nan Lin, 2004: 41-55), Dalam konteks di sekolah, maka setiap siswa pada dasarnya memiliki sumber daya pribadi yang berbeda karena latarbelakang sosial-budaya, tetapi di sisi lain kemampuan untuk membangun koneksi sosial secara langsung maupun tidak langsung dapat memperkuat sumber daya pribadi yang sudah dimiliki sebelum. Sekolah mempunyai peran penting dalam memperkuat modal sosial yang melekat pada setiap siswa.

Modal sosial adalah sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumberdaya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Sumberdaya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal Sosial berbeda dengan istilah populer lainnya, yaitu Modal Manusia (*human capital*). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada



modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antarindividu dalam suatu kelompok dan antarkelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antarsesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Selain unsur pembentuk utama tersebut juga ada unsur pembentuk lain dari modal sosial yang juga tidak kalah penting peranannya. Unsur-unsur ini dapat dikatakan sebagai syarat kecukupan (*sufficiency condition*) dari terbentuk atau terbangunnya kekuatan modal sosial di suatu masyarakat. Adapun unsur-unsur yang dimaksudkan adalah (Hasbullah, 2006): (a) partisipasi dalam jaringan sosial (*participation and social net work*), (b) saling tukar kebaikan (*reciprocity*), (c) norma sosial (*social norm*), (d) nilai-nilai sosial, dan (e) tindakan yang proaktif.

Sekolah dengan kekuatan modal sosialnya dapat berperan dan bergerak sebagai media bagi siswa untuk termotivasi dalam mengembangkan sumber daya pribadinya lebih optimal, ketika siswa memiliki kemampuan dalam berinteraksi dalam jaringan yang lebih kuat sehingga secara hirarkhis mampu bergerak pada strata yang lebih tinggi. Namun demikian, sekolah sebagai tempat belajar siswa justru melemahkan sumber daya pribadi sehingga siswa merasa inferior dalam menilai kapasitas dirinya terhadap kebutuhan sosial yang lebih tinggi.

Kesadaran sekolah untuk mengembangkan organisasi sosial melalui berbagai kegiatan sebagai cara mempertahankan eksistensinya. Hal ini akan semakin kuat jika siswa dan guru sebagai aktor dapat mengembangkan potensi sumber pribadi secara optimal. Optimalisasi dalam pengembangan potensi diri seluruh komponen sekolah sebagai aktor individu secara akumulatif akan menjadi kekuatan modal sosial dalam memperbaiki dan mengembangkan mutu sekolah.

### **Penguatan Modal Sosial Sekolah**

Sekolah perlu untuk membangun motivasi yang kuat pada dimensi perbedaan individual siswa dengan melakukan asosiasi yang lebih menghargai perbedaan individu dengan membangun kohesivitas sosial yang dibangun atas kerjasama dan kepercayaan yang kuat untuk berbagi antar siswa dalam menjaga perbaikan tujuan bersama. Modal sosial yang mendasari bagi perbaikan kualitas sekolah bergerak dari proses interaksi sosial yang mengembangkan aktivitas belajar yang mampu memotivasi semua dasar kebutuhan keilmuan siswa sesuai dengan kebutuhannya, dengan mengembangkan asosiasi yang kuat untuk menyatukan semangat kebersamaan dalam memperbaiki prestasi belajar sebagai bagian untuk

dapat dijadikan siswa sebagai media untuk membangun kekuatan bersama dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Penguatan modal sosial dapat dilakukan oleh semua komponen warga sekolah yang memiliki kesepakatan bersama bahwa modal sosial adalah aspek yang sangat penting dan dibutuhkan untuk perbaikan mutu pendidikan. Kesepakatan yang dibangun didasarkan pada kesadaran bersama bahwa fungsi modal sosial a) sebagai sumber kontrol sosial, b) sebagai sumber dukungan keluarga dan c) sebagai sumber keuntungan melalui jaringan ekstra-keluarga (Portes, 1998). Apa yang disampaikan oleh Portes membuktikan bahwa bagi sekolah modal sosial sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang dapat membangun budaya sekolah yang efektif bagi pengembangan sumber daya pribadi siswa. Dalam hal inilah sekolah memiliki peran penting dalam pengembangan pribadi dan sosial siswa serta kognitif intelektual. Program sekolah yang didesain atas dasar kurikulum tertentu, program ekstrakurikuler membutuhkan modal sosial dalam prosesnya, karena siswa pada umumnya belum memahami efek dari proses belajar maupun keberadaannya dalam sebuah komunitas atau group akan berdampak pada kemampuan siswa dalam membangun suatu hubungan dan jaringan sosial di kemudian hari.

Dari segi lain, modal sosial diperlukan dalam perkembangan emosional siswa, khususnya untuk membangun rasa memiliki, kesejahteraan, rasa percaya diri. Persoalan yang dialami oleh sekolah adalah untuk mengatasi kecenderungan eksklusivisme yang dinilai melemahkan kekuatan modal sosial. Hal lain yang dihadapi oleh sekolah dalam membangun modal sosial adalah keputusan pihak sekolah yang memberikan sanksi pada siswa yang terlambat ke sekolah, absen dan kurang dapat mengikuti aktivitas belajar secara normal karena kurangnya kesadaran akan pentingnya menjadi hubungan sosial dalam berbagai kesempatan.

Bagi sekolah penguatan modal sosial dapat dilakukan berdasarkan langkah penting yang dimulai dari penguatan unsur-unsur modal sosial yang dimiliki oleh sekolah, *pertama* lebih berpartisipasi dalam berbagai jaringan sosial yang menguatkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengembangkan potensi siswa sebagai sumber daya pribadi yang mampu untuk berbagi dalam komunitas sekolah maupun masyarakat (*participation and social net work*), *kedua*, mengkondisikan interaksi yang *heterophilous* untuk saling tukar kebaikan agar siswa dapat mengembangkan sumber daya sosial (*reciprocity*), *ketiga*, membangun budaya sekolah untuk mempertahankan ketertiban

dan disiplin sosial (*social norm*), *keempat*, menanamkan kepercayaan dan rasa percaya diri dan tanggung jawab serta kerjasama sebagai modal penting untuk memperkuat modal sosial, *kelima* . mengembangkan kemampuan pada semua stakeholder untuk melakukan tindakan yang proaktif dalam merespon perubahan yang terus terjadi.

## **KESIMPULAN**

Perubahan paradigma sentralistik ke desentralistik membutuhkan transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Saat ini partisipasi sebagai aset penting bagi pemberdayaan masyarakat tidak bisa berjalan secara optimal karena melemahnya fungsi modal sosial. Artinya, kebijakan desentralisasi pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan dan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan cenderung gagal jika tidak didukung oleh kekuatan modal sosial.

Penguatan modal sosial dapat dilakukan oleh semua komponen warga sekolah yang memiliki kesepakatan bersama bahwa modal sosial adalah aspek yang sangat penting dan dibutuhkan untuk perbaikan mutu pendidikan. Bagi sekolah modal sosial sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang dapat membangun budaya sekolah yang efektif bagi pengembangan sumber daya pribadi siswa. Bagi sekolah penguatan modal sosial dapat dilakukan berdasarkan langkah penting yang dimulai dari penguatan unsur-unsur modal sosial yang dimiliki oleh sekolah dengan lebih berpartisipasi dalam berbagai jaringan sosial yang menguatkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengembangkan potensi siswa sebagai sumber daya pribadi yang mampu untuk berbagi dalam komunitas sekolah maupun masyarakat dan mengkondisikan interaksi yang *heterophilious* untuk saling tukar kebaikan agar siswa dapat mengembangkan sumber daya sosial; membangun budaya sekolah untuk mempertahankan ketertiban dan disiplin sosial; menanamkan kepercayaan dan rasa percaya diri dan tanggung jawab serta kerjasama sebagai modal penting untuk memperkuat modal sosial serta mengembangkan kemampuan pada semua stakeholder untuk melakukan tindakan yang proaktif dalam merespon perubahan yang terus terjadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alhuman, Amich. "Pembangunan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi". *Kompas*, 11 September 2000.

Hauberer, Julia ( 2011), *Social capital Theory*, VS Reseach.

Baron, Setephen dkk ( 2000), *Social Capital ; Critical Perspective* , New York: Oxford University.

Danim, Sudarmawan. (2003). *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan I*. Yogyakarta: Pustaka Jaya

Depdikdasmen. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. *Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Pertama.

Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance: Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.

Lin, Nan (2004), *Social Capital*, Australia : Cambrigde University.

Makmuri, dkk. (2003). *Demokratisasi Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI

Mulyasa. (2006). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA

*Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep dan Pelaksanaan*, Diknas, 2001

Rahardjo, Mudjia (2010), *Mengenal Modal Sosial*, Friday, 14 May 2010 07:21  
<http://www.mudjiarahardjo.com/artikel/204-mengenal-modal-sosial>.

Rasiyo. 2005. *Kebijakan Desentralisasi Manajemen Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah*. Surabaya: Program Doktor Ilmu Administrasi, Universitas 17 Agustus 1945.

Suyanto, Bagong. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Gentengkali*, Vol. 6 tahun 2004, hal. 11-13.

Suyanto, Bagong. 2005. Pendidikan Berbasis Masyarakat: Prasyarat Yang Dibutuhkan.. *Edukasi*, Vol. I/No. 1, hal. 9-10.

Suyata. 2004. *Decentralized Basic Education Project, District Capacity Building*. Departemen Pendidikan Nasional Pendidikan Lanjutan Pertama.

Schuller, Tom dkk (2004). *The benefits of Learning : The impact of education on health, family life and soscial capital*, London : Routledge Falmer.

Teguh Yuwono (2003). *Manajemen Otonomi Daerah*. Semarang: Clogapps Diponegoro University

Tilaar, H.A.R. (1998). *Beberapa Agenda Pendidikan Nasional*. Magelang: Tera Indonesia.

Tilaar, H.A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera

**ISU-ISU STRATEGIS DESENTRALISASI  
PENDIDIKAN KEJURUAN  
INDONESIA**

Dr. Putu Sudira, M.P.  
putupanji@uny.ac.id

(Sekretaris dan Dosen Prodi PTK PPs UNY)  
(Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik UNY)

**ABSTRAK**

Desentralisasi pendidikan kejuruan dihadapkan pada permasalahan isu-isu strategis relevansi, efektifitas, efisiensi, persaingan global, kearifan lokal, industri berbasis pengetahuan, industri kreatif, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas sumberdaya, kapasitas kemitraan, pendidikan karakter, *soft skill*, *link and match*. Sebagai pendidikan yang berbasis dunia kerja, desentralisasi pendidikan kejuruan seharusnya semakin menguatkan fungsi pendidikan kejuruan dalam memberi solusi atas permasalahan-permasalahan pemerintah daerah kabupaten/kota. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota pendidikan kejuruan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan *stakeholders*, dapat mengatasi permasalahan-permasalahan: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); (2) pengentasan pengangguran bagi pemuda; (3) penyediaan lapangan pekerjaan bagi warganegaranya; (4) pengurangan beban bagi sistem pendidikan akademik; (5) penarikan investasi luar negeri; (6) penjaminan peningkatan penghasilan dan pekerjaan; (7) pengurangan kesenjangan penghasilan antara kelompok kaya dan kaum miskin; (8) wahana pengembangan karya-karya teknologi bermutu; (9) konservasi budaya dan tradisi. Untuk mewujudkan fungsi pendidikan kejuruan tersebut diatas pemerintah daerah perlu menguatkan kerjasama dan fungsi pembinaan secara maksimal.

Kata kunci: Isu strategis, pendidikan kejuruan, desentralisasi.

**PENDAHULUAN**

Hampir semua pemerintah negara-negara besar di dunia seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, Australia, Jepang, Kanada, Korea, India dan China, menaruh harapan besar pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi (*VET system*). VET ditempatkan sebagai panglima dalam hal pengentasan masalah-masalah: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); (2) pengentasan pengangguran bagi pemuda; (3) penyediaan lapangan pekerjaan bagi warganegaranya; (4) pengurangan beban bagi sistem pendidikan akademik; (5) penarikan investasi luar negeri; (6) penjaminan peningkatan penghasilan dan pekerjaan; (7) pengurangan kesenjangan penghasilan antara kelompok kaya dan

kaum miskin; (8) wahana pengembangan karya-karya teknologi bermutu; (Gill, Dar, & Fluitman: 2000:1); dan (9) konservasi budaya dan tradisi lokal.

Indonesia menempatkan pendidikan kejuruan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk menyiapkan lulusan bekerja atau melanjutkan kejenjang lebih tinggi atau bekerja mandiri berwirausaha. Sasaran dan tujuan pendidikan kejuruan di Indonesia diatur dalam PP 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat 3 sebagai pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang kejuruannya. Tujuan ini mengandung tiga aspek pokok, yaitu dimilikinya kompetensi kerja, karakter (kepribadian dan ahklak mulia) untuk hidup mandiri (*life skills*), dan berkembangnya karir melalui pendidikan kejuruan. Pernyataan ini tegas sekali bahwa kompetensi kerja dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan tidak cukup bagi seorang pribadi pendidikan kejuruan. Kompetensi kerja harus didukung dengan karakter kejuruan yang baik berupa kepribadian kerja dan ahklak hidup seimbang harmonis antar sesama, lingkungan, dan berke-Tuhan-an. Jelas sekali PP 19 mengamatkan dilaksanakannya pendidikan karakter dalam pendidikan kejuruan.

Sebagai pendidikan untuk dunia kerja, VET yang ditempatkan sebagai panglima dalam pengentasan sembilan permasalahan-permasalahan sebagaimana disebutkan di atas jelas sekali bahwa VET akan efektif dan efisien jika dikelola secara desentralistik (Daun, 2007). Sesungguhnya VET di Indonesia adalah solusi atas permasalahan-permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Fenomena mobil Kiat Esemka sebagai salah satu kasus dapat menguatkan peran dan fungsi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sejak diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, secara hukum pendidikan kejuruan di Indonesia diselenggarakan secara desentralistik. Menurut Slamet PH (2008) implikasi klasik dari desentralisasi pendidikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan kejuruan adalah tuntutan penguatan kemandirian

dalam peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan kejuruan. Kemandirian mengembangkan kekuatan budaya lokal yang berdampak global. Esensi desentralisasi sangat jelas, yaitu daerah otonom (pemerintah daerah) memiliki tugas dan fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan (Slamet PH, 2008). Pemerintah daerah diharapkan lebih peduli, mandiri dalam mengatur dan mengurus pembenahan mutu pendidikan kejuruan.

Dalam kerangka pengembangan pendidikan kejuruan terdesentralisasi bermutu tinggi maka isu-isu strategis relevansi, efektifitas, efisiensi, persaingan global (Atchoarena, 2009), kearifan lokal, industri berbasis pengetahuan, industri kreatif, kapasitas kelembagaan, kapasitas sumberdaya, kapasitas kemitraan, pendidikan karakter, *soft skill*, *link and match* merupakan permasalahan pokok yang sangat perlu dikaji dan disikapi oleh pemerintah daerah bersama-sama SMK, Perguruan Tinggi (LPTK Kejuruan, Politeknik), dunia usaha-industri (DU-DI), dan masyarakat pengguna pendidikan kejuruan dan vokasi. Dalam paper ini berikut dibahas permasalahan mutu, relevansi, efektifitas, efisiensi, persaingan global dan kearifan lokal, industri kreatif, pendidikan karakter kejuruan dan vokasi di era desentralisasi.

## **MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KEJURUAN**

Relevansi masih merupakan isu pokok dari mutu pendidikan kejuruan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sebagai pendidikan untuk dunia kerja, pendidikan kejuruan dihadapkan pada isu utama yaitu relevansinya dengan kebutuhan *stakeholders*. Relevansi pendidikan kejuruan sangat erat kaitannya dengan kecocokan/*matching* diantara program-program yang diselenggarakan di sekolah, kebutuhan kompetensi kerja di DU-DI (Boutin, Chinien, Moratis, Baalen; 2009), kebutuhan pengembangan diri masyarakat pengguna pendidikan kejuruan (orang tua peserta didik dan peserta didik), kebutuhan pengembangan ekonomi daerah atau kawasan, termasuk kebutuhan sosial, budaya, dan politik. Pelaksanaan program kompetensi keahlian di SMK di seluruh Indonesia relevansinya terhadap kebutuhan DU-DI cenderung masih rendah. Banyak lulusan

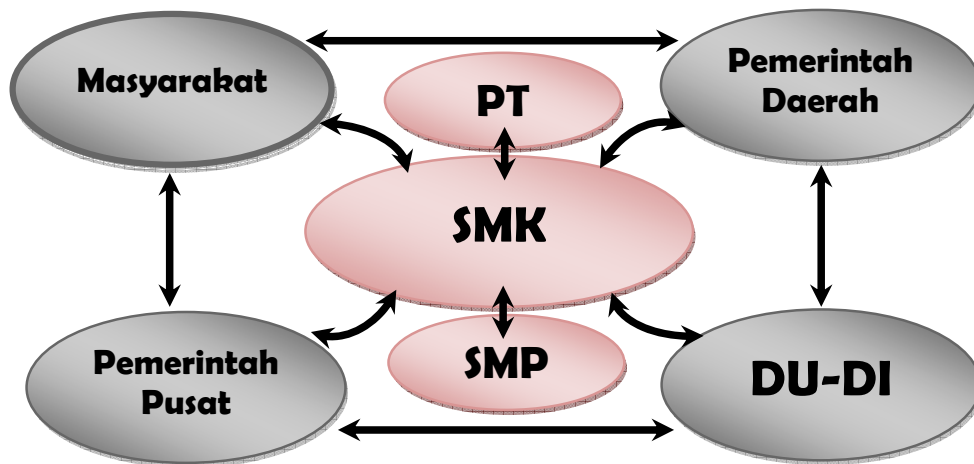
SMK di beberapa daerah di Indonesia masih belum terserap karena kualifikasi kompetensi lulusan SMK masih banyak yang belum sesuai dengan jenis dan kualifikasi kebutuhan lapangan kerja. Akibatnya SMK yang seharusnya mengentaskan masalah pengangguran malah menjadi penyumbang pengangguran. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Penyelenggaraan kompetensi keahlian di SMK belum sepenuhnya didasarkan atas analisis kebutuhan pemenuhan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia juga menghadapkan SMK sebagai solusi permasalahan perluasan akses dan pemerataan pendidikan. SMK diharapkan bisa menampung anak-anak dari keluarga miskin. Untuk itu pemerintah daerah Bupati/Walikota dan Gubernur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Ketenaga Kerjaan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bersama DU-DI perlu melakukan pembinaan pengembangan pendidikan kejuruan di SMK. Pihak SMK terus melakukan pemetaan kebutuhan penyelenggaraan bidang dan program keahlian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan kawasan dan SDM daerah.

Perubahan paradigma dari *supply drivent* ke *demand drivent* belum terlaksana secara baik dan benar karena pertumbuhan jumlah dan jenis lapangan kerja tidak mencukupi pertumbuhan pencari kerja. Disisi lain masyarakat pengguna pendidikan kejuruan tidak memiliki informasi yang cukup terhadap arah dan muatan dari program-program kompetensi keahlian yang dikembangkan di SMK. Masyarakat pengguna pendidikan kejuruan memilih program kompetensi keahlian belum didasarkan atas analisis bakat dan minat serta analisis peluang pekerjaan. Masyarakat pengguna pendidikan kejuruan cenderung memilih program kompetensi keahlian yang baru favorit di masyarakat. Akibatnya terjadi fluktuasi perkembangan peminatan kompetensi keahlian di SMK. Ada kompetensi keahlian yang diperlukan di masyarakat dan diselenggarakan di SMK tetapi tidak diminati oleh masyarakat. Ada kompetensi keahlian yang sedikit diperlukan di DU-DI kebanjiran peminat. Lemahnya relevansi pendidikan kejuruan di SMK juga disebabkan oleh lemahnya kapasitas penyelenggara pendidikan kejuruan di tingkat kabupaten/kota. Perubahan kelembagaan pendidikan kejuruan dari khusus (dulu bernama STM, SMEA, SMKK, SMTK, SMSR, SMIK, dll) menjadi lebih



umum dengan nama SMK dimaksudkan untuk memberi ruang kepada SMK agar lebih fleksibel dalam mengembangkan program kompetensi keahlian. Relevansi pendidikan kejuruan secara struktur dapat digambarkan seperti Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Tata Hubungan Pengembangan Relevansi Pendidikan Kejuruan

Untuk menghasilkan pendidikan kejuruan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan *stakeholder*, pengelolaan SMK harus betul-betul memperhatikan kebutuhan DU-DI, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Disamping itu artikulasi secara vertikal ke perguruan tinggi dan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih sangat membutuhkan kajian dan penataan. Pendidikan kejuruan di SMK menjadi kurang bermakna jika salah satu dari enam komponen ini tidak terpenuhi kebutuhan dan artikulasinya. Pemerintah daerah sebagai pembina SMK di era otonomi sebaiknya memanfaatkan SMK sebagai basis pengelolaan dan penanganan permasalahan-permasalahan pengembangan SDM, pengembangan ekonomi kawasan, konservasi keunggulan dan kearifan budaya lokal.

Berkaitan dengan mutu pendidikan kejuruan dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu: (1) mutu produk; (2) mutu proses; dan (3) mutu layanan. Mutu produk pendidikan kejuruan di SMK dapat diukur dari tingkat kepuasan *stakeholders* terhadap kualitas dan kualifikasi kompetensi lulusan, barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan mutu proses pendidikan kejuruan dapat diukur dari tingkat

efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan proses diklat. Hal ini berkaitan dengan mutu penyelenggaraan diklat, mutu isi kurikulum, mutu sarana prasarana, mutu tenaga pendidik/pelatih dan mutu tenaga teknisi/laboran. Mutu layanan pendidikan kejuruan dan vokasi dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat pengguna pendidikan kejuruan dan tingkat kepuasan DU-DI terhadap kualitas hasil atau lulusan SMK.

### **EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENDIDIKAN KEJURUAN**

Konsep efektifitas pendidikan kejuruan menurut Cheng (2005) dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (1) efektivitas dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan melalui peningkatan lingkungan internal dan proses belajar mengajar; (2) efektifitas layanan proses dan hasil pendidikan yang memuaskan para *stakeholders* sebagai pertanggungjawaban pendidikan terhadap publik; (3) efektifitas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan individu, masyarakat di masa depan melalui penguatan relevansi tujuan, isi, praksis pendidikan kejuruan bagi generasi baru. Efektifitas internal sebagai jaminan atas tercapainya tujuan pendidikan kejuruan ditempuh melalui peningkatan lingkungan internal dan proses belajar dan mengajar baik pembelajaran teori di sekolah, pembelajaran praktik di sekolah, maupun pembelajaran praktik di DU-DI. Pertanyaannya adalah bagaimana sebaiknya pembelajaran, pengajaran, dan persekolahan diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan? Seberapa baik penyampaian pengetahuan dapat dipastikan membangun peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan? Seberapa baik kemampuan mengajar bagi guru dapat ditingkatkan dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu? Seberapa baik siswa dapat mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program kurikulum dan pengujian?

Pendidikan dan pelatihan kejuruan adalah pendidikan yang sarat dengan biaya tinggi. Kebutuhan peralatan dan bahan praktikum di SMK relatif mahal dibandingkan pendidikan umum. Untuk itu penyelenggaraan pelatihan kejuruan di SMK harus betul-betul disiapkan sebagai proses yang minim akan kegagalan termasuk bahaya keselamatan kerja. Walaupun pengulangan praktikum sebagai

proses pembentukan keterampilan dan pembiasaan kerja di SMK memang diperlukan. Dalam hal ini efisiensi pemanfaatan bahan praktikum, energi listrik, energi gas perlu dikelola dengan baik.

Dalam era industri berbasis pengetahuan dan industri kreatif, SMK juga dihadapkan pada proses memastikan relevansi tujuan, konten, praktik, dan hasil pendidikan SMK untuk masa depan generasi baru di era baru globalisasi, teknologi informasi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Seberapa baik proses belajar mengajar, dan pengembangan aktivitas sekolah menumbuhkan potensi individualisasi, lokalisasi, dan globalisasi? Seberapa baik kesempatan belajar siswa termaksimalkan melalui lingkungan IT, networking, guru cerdas terampil mandiri bernurani? Seberapa baik siswa belajar mandiri difasilitasi dan dikembangkan sebagai potensi seumur hidup? Seberapa baik kemampuan siswa untuk belajar mandiri tripilasi mereka dikembangkan? Seberapa baik kecerdasan ganda siswa terus dikembangkan oleh diri mereka sendiri?

### **PERSAINGAN GOBAL DAN KEARIFAN LOKAL**

Pengembangan pendidikan kejuruan di SMK diharapkan menghasilkan output pendidikan manusia berbudaya kerja dan berbudaya belajar yang kompeten, beretoskerja, produktif, mandiri, dan bertanggungjawab. Maka SMK perlu menginternalisasikan konteks nilai-nilai dan kearifan yang telah berkembang di dalam keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, lembaga diklat, masyarakat DU-DI. Otonomi pendidikan meletakkan tantangan kepada pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat 5). Pemerintah kabupaten/kota melakukan peningkatan secara berencana dan berkala untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia (penjelasan Pasal 35 ayat 1). Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal (penjelasan PP 19 Pasal 91 ayat 1).

Pembudayaan kompetensi di SMK diharapkan dapat memenuhi kebutuhan untuk: (1) mengembangkan keterampilan kognitif dan psikomotorik individu siswa (Emmerik, Bekker, & Euwema, 2009; Kellet, Humphrey, & Sleeth, 2009); (2) mengembangkan *attitude* (Stumpf, 2009), nilai-nilai luhur budaya; (3) mengembangkan apresiasi positif terhadap pekerjaan dan membangun budaya kerja (Heinz, 2009), membangun budaya belajar, budaya kreatif dan budaya produktif (Thompson, 1973; Gill, Dar, & Fluitman, 2000), melestarikan dan mengembangkan alam dan budaya daerah; (4) mempersiapkan siswa untuk bekerja, berwirausaha, atau meneruskan ke perguruan tinggi (Wardiman, 1998); (5) memberdayakan siswa untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak (Gill, Dar, & Fluitman, 2000); (6) mengembangkan karier sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih (Kellet, Humphrey, Sleeth, 2009); (7) melibatkan masyarakat pemangku kepentingan secara luas, utuh, benar, dan bertanggungjawab (McGrath, S., 2009, Pavlova, 2009); (8) penarikan investasi luar negeri khususnya di bidang industri jasa pariwisata; dan (9) perluasan akses pendidikan (Rojewski, 2009). Artinya pengembangan SMK memerlukan pola pembudayaan kompetensi yaitu sebuah pola yang dapat membangun budaya belajar dan budaya bekerja yang bermakna baik secara mikro pada diri siswa, pendidik, tenaga kependidikan dan secara makro antar manusia, antara manusia dengan lingkungan, dan antara manusia dengan pencipta Tuhan Yang Mahaesa.

Pengembangan kualitas SMK disamping memperhatikan trend dan tantangan globalisasi juga sangat perlu memperhatikan kearifan-kearifan lokal daerah. Sehingga SMK dapat berkembang secara berkelanjutan untuk kemajuan sosial bersama, memberi kontribusi pada pelestarian lingkungan dan budaya, bijak dalam menggunakan sumber daya alam, dan melakukan perbaikan tenaga kerja terdidik dan terlatih (Chinien and Singh, 2009). *Outcome* dari SMK diharapkan bisa *act locally and develop globally* sebagai sosok seorang pribadi lokal yang kuat mempertahankan nilai-nilai tradisi serta berpandangan internasional (Cheng, 2005). Keuntungan yang diperoleh yaitu masyarakat dapat memelihara nilai-nilai tradisi dan identitas budaya, mengakumulasikan pengetahuan-pengetahuan lokali

dalam menumbuhkan pengetahuan baru yang memberi kontribusi pada pertumbuhan masyarakat dan pengetahuan global.

Taiwan terbuksi sukses melakukan transformasi pendidikan kejuruan produktif berkaitan dengan produk-produk komputer. Strategi yang diambil pemerintah Taiwan adalah: (a) memperkuat dan mengadakan program-program retraining untuk pekerja; (b) menyediakan transfer pekerjaan dan training keahlian kedua (*second-expertise training*); (c) memperkuat training pada bidang komputerisasi, otomasi industri, CNC, mekatronika, dsb; (d) melakukan uji keterampilan dan mengembangkan sistem sertifikasi; (e) menyediakan training untuk tenaga kerja dalam rangka layanan industri; (f) mendorong industri untuk melakukan program-program training; (g) meningkatkan manajemen skill untuk administrasi dan personil manajer. Untuk mendorong minat anak muda belajar keterampilan kejuruan/vokasi dan juga membentuk perhatian masyarakat pada perkembangan skill, dilakukan *National Skill Competition* sejak tahun 1968. Disamping juga berpartisipasi dalam *International Vocational Training Competition (International Youth Skill Olympics)* sejak tahun 1970.

### **INDUSTRI KREATIF DAN PENDIDIKAN KARAKTER**

Pendidikan berkarakter kejuruan yang kreatif produktif sangat mendukung penumbuhan industri kreatif. Dalam Wikipedia.org dinyatakan industri kreatif dalam bidang periklanan meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan. Industri kreatif berkaitan dengan jasa desain bangunan meliputi perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro (*town planning, urban design, landscape architecture*) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya: arsitektur taman, desain interior). Dalam bidang pasar barang seni: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, percetakan, kerajinan, automobile, film, seni rupa dan lukisan (wikipedia.org). Industri kreatif dalam bidang

kerajinan yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal). Dalam bidang desain kegiatan kreatif terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.

Dalam bidang fesyen, kegiatan kreatif terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen. Dalam bidang video, film dan fotografi kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film. Permainan interaktif: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Dalam bidang musik: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Seni pertunjukan: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal: pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan. Penerbitan dan percetakan: kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, passport, tiket pesawat terbang, dan

terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir (engraving) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film. Layanan komputer dan piranti lunak: kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. Televisi dan Radio: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti games, kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi. Dalam memberikan dukungan layanan pengembangan industri kreatif, lulusan SMK dapat bekerja sebagai pembantu desainer, fotografer, ilustrator, pelaksana pencetakan, pengusaha sablon, fotografer *freelance*, pelaksana pekerjaan periklanan, pembuat video dokumentasi, pembantu kameramen, pembantu editor, pembantu penata suara, pembantu penata cahaya. Disamping itu lulusan SMK juga dapat bekerja sebagai perancang interior hunian, animator interior hunian, drafter interior hunian, perancang interior transportasi, animator interior hunian, drafter interior hunian, perancang dan produksi kria tekstil, perancang dan produksi kria kulit, perancang dan produksi kria keramik, perancang dan produksi kria logam, perancang dan produksi kria kayu, pemusik trumpet, gitaris, operator midi, penari, pengrawit, pelatih seni, pengelola seni pertunjukan, penata kerawitan sunda, dalang, pekerja seni teater, staff ticketing, staff reservasi, staff perjalanan wisata, pramuwisata muda, staf reservation, reception, operator telepon, porter, *business center attendant*, *room boy/maid/attendant*, *houseman/housemaid*, *order taker*, *linen* dan *laundry*, *waiter/waitress*, penata kecantikan kulit, penata kecantikan rambut, pelaksana pembuatan busana butik, *handling*, *steward*, *waiter*, *cook helper*, pengolah pastry bakery

## KESIMPULAN

Desentralisasi pendidikan dalam kerangka peningkatan mutu, relevansi, efektifitas, efisiensi pendidikan kejuruan berkarakter produktif menghadapi persaingan global dan pengembangan kearifan lokal membutuhkan dukungan dan kerjasama baik diantara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, DU-DI, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan dasar. Pendidikan kejuruan di SMK yang bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah dapat mengentaskan masalah-masalah: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); (2) pengentasan pengangguran bagi pemuda; (3) penyediaan lapangan pekerjaan bagi warganegaranya; (4) pengurangan beban bagi sistem pendidikan akademik; (5) penarikan investasi luar negeri; (6) penjaminan peningkatan penghasilan dan pekerjaan; (7) pengurangan kesenjangan penghasilan antara kelompok kaya dan kaum miskin; (8) wahana pengembangan karya-karya teknologi bermutu; dan (9) konservasi budaya dan tradisi lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atchoarena, D. (2009). Overview: Issues and Options in Financing Technical and Vocational Education and Training. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp.129-1036). Germany: Springer.
- Boutin, F., Chinien, C., Moratis, L., Baalen, P.V. (2009). Overview: Changing Economic Environment and Workplace Requirements: Implications for Re-Engineering TVET for Prosperity. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 81-96). Germany: Springer.
- Cheng, Y.C. (2005). *New Paradigm for Re-engineering Education, Globalization, Localization and Individualization*. Netherland: Springer
- Chinien, C. and Singh, M. (2009). Overview: Adult Education for the Sustainability of Human Kind. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 2521-2536). Germany: Springer.
- Chinien, C. Boutin, F., Plane, K. (2009). The Challenge for ESD in TVET: Developing Core Sustainable Development Competencies and Collaborative Social Partnerships for Practice (2553-2570). In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 2553-2570). Germany: Springer.



- Daun, H. (2007). *School Decentralization in The Context of Globalizing Governance International Comparison of Grassroots Responses*. Netherland: Springer.
- Emmerik, I.J. H. V., Bakker A.B, Euwema M.C.. (2009). *Explaining employees' evaluations of organizational change with the job-demands resources model*; Career Development International Journal Vol. 14 No. 6, 2009 pp. 594-613
- Gill, I.S., Fluitman, F.,& Dar, A. (2000). *Vocational Education and Training Reform, Matching Skills to Markets and Budgets*. Washington: Oxford University Press.
- Heinz .W.R (2009). Redefining the Status of Occupations. In J. A. Athanasou , R. V. Esbroeck. *International Handbook of Career Guidance*. Springer Science Business Media B.V.
- Hiniker, L.A. and Putnam, R.A. (2009). Partnering to Meet the Needs of a Changing Workplace (203-208). In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 203-208). Germany: Springer.
- McGrath, S. (2009) *Reforming Skills Development, Transforming the Nation: South African Vocational Education and Training Reforms, 1994–2005*: Rupert Maclean, David Wilson, Chris Chinien; *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning*: Germany: Springer Science+Business Media
- Pavlova M. (2009). *The Vocationalization of Secondary Education: The Relationships between Vocational and Technology Education*. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 1805-1822). Germany: Springer.
- Pavlova, M. & Munjanganja,L.E. (2009) *Changing Workplace Requirements: Implications for Education*. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 180581-96). Germany: Springer.
- Rojewski. J.W (2009). A Conceptual Framework for Technical and Vocational Education and Training. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 19-40). Germany: Springer.
- Singh M. (2009). Social and Cultural Aspects of Informal Sector Learning: Meeting the Goals of EFA. In R. Maclean, D. Wilson, & C. Chinien (Eds.), *International Handbook of Education for the Changing World of Work, Bridging Academic and Vocational Learning* (pp. 349-364). Germany: Springer.
- Slamet, P.H. (2008). *Desentralisasi Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Stumpf. S.A (2009). *Promotion to partner The importance of relationship competencies and interpersonal style*. Career Development International Vol. 14 No. 5, 2009 pp. 428-440 q Emerald Group Publishing Limited 1362-0436
- Thompson, John F, (1973). *Foundation of Vocational Education Social and Philosophical Concepts*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Wardiman Djojonegoro. (1998). *Pengembangan Sumberdaya Manusia melalui SMK*. Jakarta : PT. Jayakarta Agung Offset.

# RE-DESAIN SISTEM PENDIDIKAN DAN MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN<sup>1</sup>

Sunaryo Kartadinata<sup>2</sup>

## Mengapa Redesain?

Re-desain pendidikan guru penting dilakukan karena dua alasan. Pertama, memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan guru sebagai sebuah profesi dengan sejumlah kompetensi yang dipersyaratkannya beserta hak yang melekat kepada para penyandanginya. Kedua, memenuhi tuntutan tentang perlunya peningkatan kualitas guru melalui pengokohan *content knowledge* yang dilakukan secara seimbang dengan penguatan *pedagogical knowledge* serta pemberian pengalaman praktik mengajar dalam setingotentik. Ketiga, ada kesenjangan antara kerangka pikir aspek yuridis dengan kerangka pikir filosofis dan kelaziman universal tentang pendidikan bagi sebuah profesi, dan perlu dicari sinergi akademik-yuridis. Keempat, konteks pendidikan guru yang tidak lepas dari konfigurasi kultural dalam keragaman.

## Redesain Format: Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi Guru

Pembaharuan Pendidikan Guru di Indonesia terkait dengan kelahiran UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, yang jiwa utamanya adalah profesionalisasi pendidik dan perbaikan mutu pendidikan, telah mengundang perdebatan panjang di seputar format pendidikan guru. Ragam pandangan dan pemahaman muncul, kebermutuan pendidikan guru dipertanyakan, sinergi akademik- yuridis harus dilakukan untuk mencari format pendidikan guru yang optimal. Pemikiran tentang Pendidikan Profesional Guru diangkat sebagai alternatif solusi untuk menggambarkan keutuhan pendidikan guru yang mencakup pendidikan akademik dan pendidikan profesi, tanpa memperdebatkan lagi model konkuren atau konsekutif. Revitalisasi kelembagaan pendidikan guru, yang mengemban mandat ganda, harus dilakukan untuk memberikan kepastian akan ketersediaan sumber daya manusia yang mampu menjamin kebermutuan pendidikan guru.

Merujuk kepada kelaziman universal dalam setiap profesi yang mengenal adanya pendidikan profesi, seperti dokter, psikolog, dan akuntan, ada dua tahap pendidikan yang harus ditempuh ialah Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang mengembangkan kompetensi akademik, untuk menguasai landasan keilmuan bagi praktik profesi. Pendidikan akademik bermuara pada pencapaian kualifikasi akademik yang dinyatakan dalam penganugerahan gelar Sarjana (S-1), sedangkan Pendidikan Profesi adalah pembentukan dan penajaman kiat profesional melalui latihan dan penerapan kompetensi akademik di dalam praktik nyata yang berlangsung dalam seting otentik.

---

<sup>1</sup> Diangkat dari pemikiran UPI tentang Re-Desain Pendidikan Profesional Guru, 2010

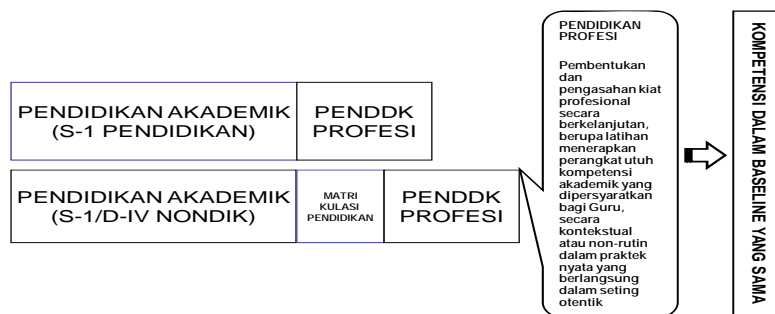
<sup>2</sup> Ketua Umum PP ISPI; Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Pendidikan Profesi Guru, sebagai ruh profesionalisasi pendidik, dalam kerangka pikir kelaziman dimaksud, mesti ditandai dengan (a) adanya bidang layanan ahli yang unik, yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah, (b) diperlukan pendidikan yang relatif lama dan sungguh-sungguh untuk menguasai *the scientific basis of the arts* dari layanan unik itu, (c) latihan yang sistematis dan terawasi dalam proses latihan untuk menerapkan *arts* secara non-rutin dan kontekstual di bawah supervisi profesional, (d) imbalan yang layak, diikuti dengan tanggung jawab peningkatan profesionalitas secara berkelanjutan.

Dilihat dari esensi profesionalisasi yang disebutkan, maka makna pendidikan profesi, dalam pendidikan guru, adalah pembentukan dan pengasahan kiat profesional secara berkelanjutan, berupa latihan menerapkan perangkat utuh kompetensi akademik yang dipersyaratkan bagi guru, dalam praktik nyata yang berlangsung dalam setting otentik. Dengan demikian keutuhan pendidikan guru terdiri atas Pendidikan Akademik Guru dan Pendidikan Profesi Guru, baik melalui Pendidikan Guru Konkuren maupun Pendidikan Guru Konsektif. Pendidikan Profesional Guru mencakup Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi Guru sebagai suatu keutuhan.

Dilihat dari kerangka pikir ini maka para calon guru yang berlatar belakang kependidikan maupun non kependidikan harus (a) memiliki kompetensi akademik kependidikan yang "sama" atau ekuivalen sebelum memasuki pendidikan profesi, dan (b) memiliki *base line* kompetensi yang sama sebagai guru profesional setelah menyelesaikan pendidikan profesi.

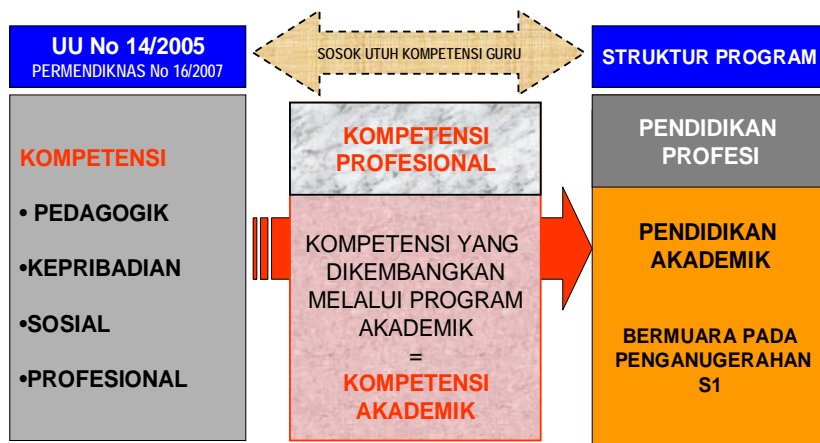
Keutuhan pendidikan guru dalam konteks pendidikan akademik dan profesi dapat digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pikir utuh pendidikan guru

## Redesain (Struktur) Kompetensi dan Program

Bertolak dari sinergi pemikiran pendidikan akademik dan profesi, dalam payung pendidikan profesional guru, dan esensi pendidikan profesi sebagaimana disebutkan, menyiratkan adanya kompetensi guru yang dibangun melalui pendidikan akademik dan kompetensi yang dibangun melalui pendidikan profesi. Kedua gugus kompetensi yang dibangun itu sebagai satu keutuhan yang mencakup kompetensi akademik dan profesional. Dengan pemaknaan yang lebih kontekstual, rumusan kompetensi yang terkandung dalam UU No. 14/2005 yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial dipetakan dan dilumatkan ke dalam rumusan kompetensi yang harus dikembangkan melalui pendidikan akademik dan kompetensi yang dikembangkan melalui pendidikan profesi. Pemaknaan dan kerangka pikir pemetaan dimaksud sebagaimana tertuang dalam gambar 2.



Gambar 2. Alur Pikir Hubungan Sosok Utuh Kompetensi dan Struktur Program

Terkait dengan hal yang dibicarakan di atas, rekomendasi butir 1 dari Hasil Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VI di Denpasar, Bali yang diselenggarakan pada tanggal 17-19 November 2008 menegaskan hal berikut.

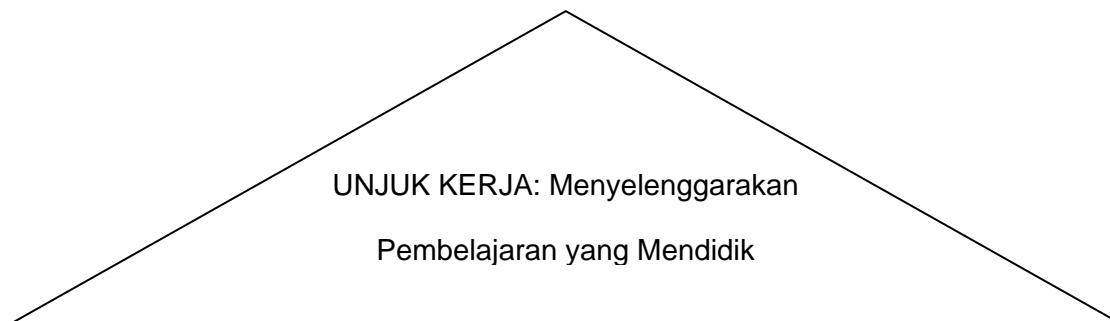
*"Penyelenggaraan Pendidikan Guru yang bermutu harus dilandasi kerangka utuh standar kompetensi dan pendidikan guru. Pencapaian keutuhan kompetensi dimaksud diperoleh melalui pendidikan akademik dan pendidikan profesi."*

Untuk merumuskan sosok utuh kompetensi guru, dalam konteks pengembangan program pendidikan akademik dan pendidikan profesi, empat kompetensi yang tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 yang telah diterjemahkan ke dalam

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 perlu direviu dipertajam ke dalam rumpun kompetensi yang harus dikembangkan melalui pendidikan akademik dan yang dikembangkan melalui pendidikan profesi, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 2. Melalui alur pikir sebagaimana dimaksud, sosok utuh kompetensi guru meliputi kemampuan:

1. menunjukkan karakteristik kepribadian guru dan mengembangkan sikap profesional secara berkelanjutan.
2. menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik yang akan dilayani, meliputi ragam perkembangan dan perbedaan individual peserta didik,
3. menguasai bidang studi yang diampu, baik secara keilmuan maupun secara kependidikan untuk dapat membantu siswa mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, dan
4. melaksanakan pembelajaran yang mendidik yang meliputi merancang, melaksanakan, menilai proses dan hasil pembelajaran sampai dengan melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan informasi proses dan hasil pembelajaran.

Secara skematik sosok utuh kompetensi guru profesional yang tergambar ketika menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dapat digambarkan pada gambar 3



<p>Menguasai pengetahuan tentang peserta didik dari segi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perkembangan psiko-sosio-fisiologis</li> <li>b. Perbedaan individual (keunikan)</li> </ul>	<p>Menguasai Pembelajaran yang Mendidik yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merancang RPP</li> <li>b. Implementasi pembelajaran</li> <li>c. Evaluasi</li> <li>d. Perbaikan berkelanjutan proses dan hasil pembelajaran</li> </ul>	<p>Menguasai bidang studi secara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keilmuan</li> <li>b. Pedagogik</li> </ul>
--	--	---

**Pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan**

Gambar 3. Sosok Utuh Kompetensi Guru Profesional

### Redesain Penyelenggaraan

Re-desain pendidikan guru bertolak pada asumsi bahwa menjadi guru profesional adalah sebuah proses berkesinambungan yang mengacu kepada standar yang baku dengan penilaian kinerja secara terus-menerus. Proses menjadi guru profesional ditempuh melalui pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Proses tersebut bermuara pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar melalui tiga hal berikut: (1) transfer pengalaman mengajar dalam setting otentik, (2) pemaduan teori dan praktik *learning to teach* dalam konteks *practice in practice*, dan (3) berlangsung secara kolaboratif di dalam komunitas profesional.

Desain ini tidak lagi memperdebatkan apakah model konkuren atau konsekutif dalam menyiapkan guru profesional. Pokok pikiran utama yang melandasi re-desain pendidikan guru adalah pemaduan pengetahuan isi dan pengetahuan pedagogik secara utuh. Pendidikan profesi merupakan penerapan kiat-kiat kompetensi akademik dan kependidikan dalam praktik nyata yang berlangsung dalam setting otentik.

Penyelenggaraan pendidikan guru harus dipandang sebagai sebuah life cycle, dimulai dari sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa pendidikan guru sampai kepada guru tu pensiun.

### **Redesain Kelembagaan**

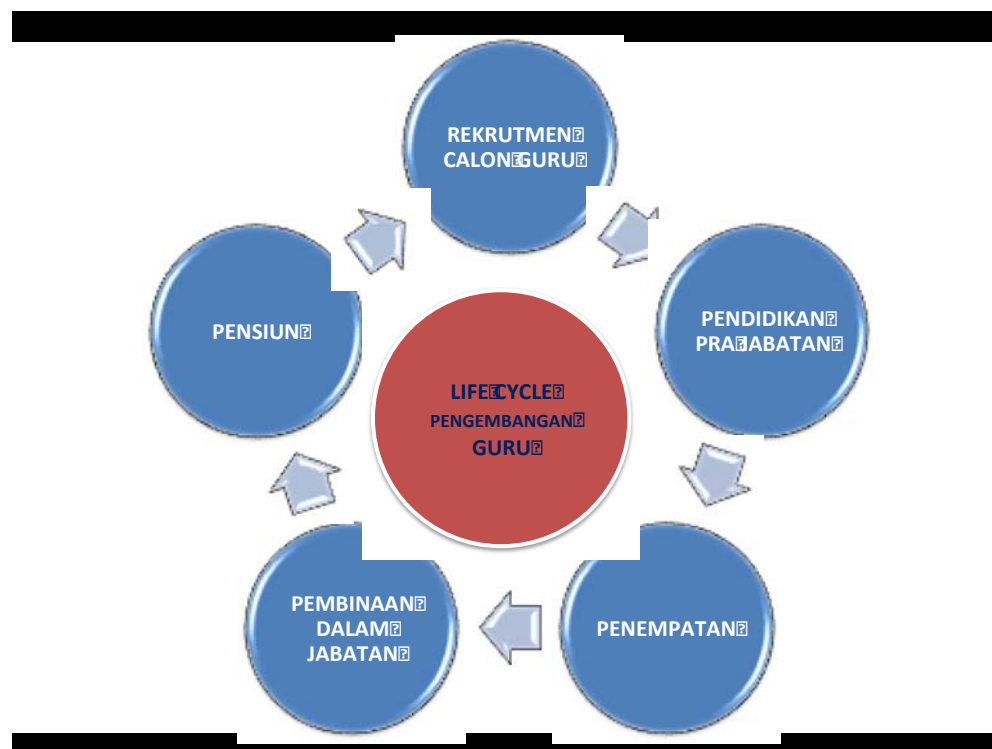
Perluasan mandat bagi LPTK berimplikasi pada pengokohan struktur kelembagaan yang didukung oleh alokasi sumber daya untuk memperkuat unit-unit akademik dasar. Keberadaan unit akademik dasar nonkependidikan tidak boleh mengurangi daya dukung sumber daya unit akademik dasar kependidikan. Pengalihan sumber daya akan membuat LPTK dalam kondisi "*discharge mode*", tanpa mekanisme dan kemampuan untuk mengembalikan daya hidupnya dan bisa menjadikan mandat terabaikan. Kekerdilan unit akademik dasar kependidikan dan pengalihan sumber daya kependidikan ke unit dasar nonkependidikan harus dihindari, jika tidak maka organisasi lembaga ini akan menjadi tidak sehat karena unit-unit akademik dasar tidak lagi mendukung mandat kelembagaan.

Untuk mencegah terjadinya pengurasan/erosi sumber daya kependidikan dalam jangka panjang, namun hal ini akan juga bergantung kepada komitmen dan konfidensi diri sumber daya kependidikan, penyelenggaraan program pascasarjana (S2) kependidikan harus membangun kompetensi para lulusannya yang mampu memelihara mutu S1 kependidikan, baik untuk PGSD, PAUD, maupun PGBS yang artinya mampu memelihara prodi S1 kependidikan. Memelihara mutu berarti mampu menyelenggarakan layanan pendidikan akademik, untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi akademik bermutu, dan pendidikan profesi sebagai satu keutuhan. Lulusan S2 kependidikan, sebagai kualifikasi yang dipersyaratkan untuk dosen S1 menurut UU, harus dapat dinyatakan sebagai pendidik bersertifikat. Perlu peninjauan kembali kurikulum S2 kependidikan sehingga menjadi lebih relevan dengan tuntutan dan kebutuhan pendidikan guru secara utuh. Pengintegrasian sistem administrasi S2 ke S1 harus sejalan dengan alokasi sumber daya, yang harus didukung oleh landasan pikir bahwa aspek kependidikan harus menjadi perekat profesi dan penyelenggaraanya tetap dalam koordinasi SPs. Pendidikan S3 seyogyanya lebih difokuskan kepada penyiapan ahli dalam keilmuan dan dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan mutu S1.

Dosen Supervisor Pendidikan Profesi perlu disiapkan melalui program penyetalaan (*fine tuning*). Keilmuan pendidikan guru (sebagai ilmu atau disiplin) perlu dikembangkan sebagai salah satu kajian atau program studi khusus di LPTK yang didukung oleh riset tentang pendidikan guru. Standarisasi LPTK mesti ditegaskan dan dirumuskan dalam regulasi nasional, Sistem Akreditasi Pendidikan Guru dikembangkan secara khusus dengan segala keunikannya, yang berbeda dari perguruan tinggi lain, dan diselenggarakan oleh asosiasi profesi atau Majelis khusus untuk itu.

### Redesain Manajemen Ketenagaan

Manajemen ketenagaan guru berbasis pendekatan *life cycle* dan dalam kendali tingkat nasional. Desentralisasi ketenagaan selama ini telah menimbulkan ketidak efektifan dan politisasi guru. Pembinaan berkelanjutan harus diterapkan dan pembinaan guru di lapangan tidak dilakukan oleh sembarang pihak yang mungkin berkedok CSR atau stempel "Peduli" melainkan harus dalam berkoordinasi Dinas Pendidikan dan LPTK.



Gambar 4. Life Cycle Manajemen Ketenagaan

### Support System

Terkait dengan standarisasi LPTK, maka sistem pendukung yang terdiri atas, antara lain asrama dan teaching shool harus menjadi bagian dari standarisasi yang disebutkan. Pengalaman mengajar bagi dosen Supervisor Pendidikan Profesi harus menjadi salah



satu kompetensi supervisor yang bisa dikembangkan di dalam teaching school dan merupakan bagian dari Beban Kerja Dosen.

### **Majelis Pendidik Nasional**

Deklarasi dari hasil Teacher Education Summit di Jakarta telah merekomendasikan dibentuknya (dalam sebutan tentatif nama) Dewan Guru Nasional. Organ ini bersifat independen dan berfungsi mengawal mutu penyelenggaraan pendidikan guru.

### **Kebijakan Internal Kelembagaan: Rencana Aksi**

Implementasi re-desain pendidikan guru yang dirancang didukung oleh kebijakan dan rencana aksi (*action plan*) kelembagaan sehingga model pendidikan guru dapat diimplemetasikan secara utuh. Kebijakana dan rencana aksi dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan visi masa depan pendidikan guru yang jelas dan koheren dengan fokus peningkatan kualitas belajar siswa (*student learning*) dan kualitas kerja dosen (*quality of faculty work*), yang meliputi:
  - a. penguatan koherensi struktur dan isi kurikulum setiap program studi;
  - b. peningkatan mutu belajar dan mengajar;
  - c. menata ulang beban kerja dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
  - d. menata ulang sistem penyampaian (*delivery system*) dalam pelaksanaan pengajaran.
2. Pengembangan *teaching and learning* berbasis penelitian, yang mencakup:
  - a. menata ulang peta penelitian pendidikan yang lebih relevan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan guru;
  - b. memperkuat sistem manajemen penelitian perguruan tinggi;
  - c. mendorong riset multidisplin dan penjelajahan wilayah baru sekaligus melindungi *intellectual property rights*;
  - d. memperluas diseminasi hasil riset dan meningkatkan fasilitas pendukung riset;
  - e. memperbaiki sistem insentif bagi peneliti, termasuk membentuk gugus-gugus peneliti untuk melahirkan terobosan baru dalam bidang pendidikan profesional guru.
3. Meningkatkan reputasi akademik, akreditasi, dan kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan profesional guru, yang mencakup aspek-aspek:
  - a. mempertahankan sinkronisasi dan relevansi kurikulum;
  - b. mengembangkan kemampuan sumber daya manusia secara berkelanjutan;
  - c. mengembangkan sistem layanan bagi alumni secara berkala;
  - d. mengembangkan budaya tertib administrasi yang dilandasi profesionalisme dengan memberlakukan standar kinerja;

- e. memelihara dan mengembangkan jejaring kerja sama bagi peningkatan profesionalisme guru.
4. Penguatan kelembagaan sekaligus kapabilitas manajemen untuk mengembangkan dan mengelola model-model pendidikan guru, berikut perangkat keras dan lunak, yang dibutuhkan dalam peningkatan mutu penyelenggaraan praktik mengajar yang mencakup:
  - a. menata ulang struktur administrasi akademik dan kemahasiswaan bagi penguatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. meluncurkan program pembinaan kemampuan profesional dalam mengajar bidang studi secara berkelanjutan;
  - c. mengembangkan laboratorium kurikulum di setiap unit untuk mendukung praktik mengajar yang bermutu;
  - d. mengembangkan pusat pembinaan profesi guru dalam jabatan.

## RUJUKAN

Universitas Pendidikan Indonesia, (2010). *Re-Desain Pendidikan Profesional Guru*. UPI Press

*Dengan rujukan utama:*

Brady, L. 1990. *Curriculum Development*. Sydney: Prentice Hall of Australian Limited.

Burden, Paul R and Byrd, David.. 1999. *Method for Effective Teaching*. Second Edition. Boston: Allyn and Bacon/

Doll, R.C. 1974. *Curriculum Improvement: Decision Making and Process*. Third Edition. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Harris, A and Lawn, M and Prescott , W. 1978. *Curriculum Innovation*. London: Croom Helm Ltd.

Longstreet, W.S. and Shane Harold, G. 1993. *Curriculum for a New Millenium*. Boston: Allyn and Bacon.

Miller, JP and Seller Wayne. 1985. *Curriculum: Perspectives and Practices*. New York: Longman Inc.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PT dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa peserta didik.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti PT.

Kemendiknas. 2010. Rambu Rambu Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan. Jakarta: Dikti, Kemendiknas.

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VI di Denpasar, Bali. 17-19 November 2008.

Linda Darling-Harmond. 2006. *Powerful Teacher Education, Lesson from exemplary programs*, Jossey-Bass, San Rancisco

Linda Darling-Harmond, Bransford, John. 2005. *Preparing Teachers for a Changing World. What Teachers Should Learn and be Able to Do*. Jossey-Bass. San Francisco.

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2009. *Pemikiran tentang Pendidikan Karakter dalam Bingkai Utuh Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kepndidikan Indonesia (ALPTKI).

Oliva, Peter. F. 1992. *Developing Curriculum*. New York: Harper Collins Publisher.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Permendikan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar dan Kualifikasi Akademis dan Komptensi Guru. Jakarta: Depdiknas.

Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Jakarta: Depdiknas.

Ramsden, Paul. 1992. *Learning to Teach in Higher Education*. London: Routledge Chapman and Hill Inc.

Schon, Donald A. 1991. *The Reflective Turn; Case Studies in and on Educational Practice*, New York: Teachers Press Columbia University

Stufflebeam, *et al.* 1974. *Educational Evaluation and Decision Making in Education*. Itasca, IL: Peacock

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

## PENDIDIKAN PROFESI GURU UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (SISTEM DAN MANAJEMEN)

Oleh Muchlas Samani  
Universitas Negeri Surabaya

01. Bahwa guru merupakan salah pilar terpenting dalam proses pendidikan kiranya tidak perlu diragukan. Sudah banyak argumentasi teoritik dan bukti empirik tentang itu. Studi Bank Dunia terhadap sekolah-sekolah di Honkong dan Syanghai, dua kota yang dianggap memiliki sekolah-sekolah bermutu baik, menguatkan pemikiran tersebut. Studi Bank Dunia menyimpulkan sekolah di Hongkong dan Syanghai bermutu bagus, karena gurunya dipersiapkan dengan baik dan setelah menjadi guru dibina dengan baik.

Tentu yang dimaksud dengan guru dalam uraian di atas bukan hanya "guru yang berdiri mengajar di depan kelas", tetapi juga konselor, instruktur di lab/workshop/studio, pamong belajar dan sebagainya. Digunakan istilah guru, sangat mungkin karena istilah itu yang banyak dikenal dan biasa digunakan di masyarakat. Mirip istilah rehat kopi (coffee break) yang biasa digunakan, walaupun ketika istirahat yang tersedia tidak hanya kopi. Yang dicakup oleh beberapa organisasi seperti PGRI, IGI, FGII dan PGTTI ternyata tidak hanya "guru yang berdiri di depan kelas", tetapi juga termasuk konselor, pamong belajar, instruktur di lab/workshop dsb. Digunakannya kata "guru" dalam Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD), sangat mungkin juga karena alasan seperti itu. Oleh karena itu, walaupun pada naskah ini digunakan kata "guru", tetapi yang dimaksud juga mencakup konselor, pamong belajar dan instruktur di lab/workshop/studio. Singkatnya yang ditulis "guru" dalam naskah pendek ini adalah pendidik.

02. Bertolak dari argumen di atas, pemahaman kata guru dalam terhadap UUGD rasanya perlu dikaji kembali. Kita punya pengalaman "menggurukan pengawas" agar pengawas mendapatkan tunjangan profesi. Konselor bernasib lebih baik, karena di masyarakat konselor juga sering disebut dengan guru BK, sehingga otomatis tercakup dalam UUGD. Bagaimana dengan pamong di PAUD? Sebagian besar TK, khususnya di kota besar, saat ini juga punya Kelompok Belajar (KB). Jadi di TK semacam itu akan ada guru TK dan pamong belajar PAUD. Agar pamong belajar di KB juga mendapat tunjangan profesi, kemudian dilakukan sebagai guru TK. Dengan pikiran "sama-sama tahu", pola itu kita setuju, paling tidak kita toleransi. Mirip pengguruan pengawas.

Tentu pengguruan pengawas dan menoleransi pengguruan pamong belajar KB bermaksud baik. Namun sayangnya kita lakukan dengan "membengkokkan aturan", sehingga terkesan "berpenafsiran ganda". Di satu sisi mengatakan profesi itu berbeda dengan guru sehingga tidak termasuk dalam pengertian guru, tetapi ketika dikaitkan dengan tunjangan profesi kita upayakan untuk memperolehnya. Akan lebih elegan, jika kata "guru" di UU Guru dan

**Dosen itu dimaknai dengan pendidik**, sehingga tidak perlu “merekayasa” ini dan itu. Toh, sertifikat yang diberikan kepada guru yang lulus sertifikasi disebut sertifikat pendidik.

03. Guru adalah tenaga profesional yang bekerja di lingkungan Kemdikbud. Pendidikan calon guru juga dilakukan oleh perguruan tinggi di lingkungan Kemdikbud. Sebagai pengguna, sewajarnya Kemdikbud mengetahui berapa jumlah tenaga guru yang diperlukan dan seperti apa kualifikasi/kompetensinya. Sebagai penghasil, Kemdikbud sewajarnya mengetahui dimana dan bagaimana tenaga tersebut dididik dan dihasilkan. Dengan kondisi seperti itu rasanya **pendidikan guru layak dikategorikan pendidikan kedinasan**.

Pasal 29 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan bahwa “pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non departemen”. Memang pada pasal 29 ayat (2) tersebut pendidikan kedinasan seakan dibatasi hanya untuk **pegawai negeri dan calon pegawai negeri**. Namun diduga kuat istilah tersebut untuk memisahkan dengan perusahaan swasta yang berorientasi kepada bisnis. Sekolah swasta yang membantu pemerintah melayani pendidikan, kini disejajarkan fungsinya dengan sekolah negeri. Dan **persyaratan bagi guru sekolah negeri dan sekolah swasta juga sama**, sebagaimana diatur dalam UU No. 14/2005. Dengan pola pikir tersebut, maka asumsi bahwa pendidikan pendidik adalah pendidikan kedinasan atau paling tidak “semi kedinasan” dapat diterima nalar.

04. Suatu profesi memerlukan penyiapan dan pembinaan yang berkelanjutan. Ketika iptek berkembang dengan cepat maka pembinaan sebuah profesi semakin penting. Oleh karena itu, **Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebaiknya merupakan suatu alur sinambung** dari pra jabatan dan dalam jabatan, mulai calon guru sampai pembinaan ketika yang bersangkutan sudah bekerja sebagai guru. Sinambung dalam arti sistemnya, sedangkan pelaksanaannya dapat saja dilakukan oleh beberapa lembaga. Dengan pola seperti itu, rangkaian PPG sebagai upaya pembekalan dan penguatan profesionalisme guru dapat dirangkai secara utuh. Wujud PPG dalam berupa pendidikan formal atau pendidikan non formal (pelatihan), tetapi yang penting dalam satu sistem yang sinambung. Dengan pola seperti itu, dapat dirancang  **kapan waktu dan pada level mana pendidik perlu menempuh pendidikan/pelatihan, apa kompetensi yang ingin diperoleh dalam pendidikan/pelatihan tersebut dan untuk jenjang apa kompetensi itu diperlukan**.

05. Jika dicermati pendidikan (termasuk pelatihan) profesional guru dilakukan oleh LPTK, P4TK dan LPMP. Karena PPG diharapkan dalam merupakan kesinambungan, sementara pelaksanaannya banyak, maka koordinasi antara instansi pelaksana PPG sangat penting. Dengan koordinasi yang baik, akan dapat dilakukan “pembagian tugas” siapa mengerjakan apa dan sebagainya.

Pengalaman selama ini menunjukkan tidak mudah melakukan koordinasi antara lembaga-lembaga pendidikan dan latihan progesi guru. LPTK, P4TK dan LPMP, walaupun ketiganya berada dibawah Kemdikbud, dan bahkan lokasinya berada di “satu lingkungan kampus” sulit

sekali melakukan koordinasi. Instruktur pelatihan di P4TK dan LPMP sebagian juga para dosen dari LPTK. Oleh karena itu, perlu dicari pola koordinasi yang lebih mudah. Perlu juga dicari kemungkinan **“satu komando”** antara berbagai lembaga PPG dan bahkan jika mungkin diintegrasikan. Pendidikan/pelatihan penjenjangan di TNI dapat dijadikan bahan kajian untuk mengembangkan PPG di Kemdikbud.

06. Sebagai pendidikan kedinasan maka PPG harus berorientasi kepada user, yaitu sekolah dan lembaga pendidikan yang menggunakan lulusannya. Jenis dan jumlah mahasiswa seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Dengan prinsip ini, kesesuaian antara *supply* dan *demand* guru dapat dijaga. Untuk menjaga kondisi itu kerjasama antara penghasil dan pengguna harus dijaga dengan baik. Perlu dirancang suatu **pola rekrutmen calon, need assessment kompetensi dan penjaminan kualitas lulusan**. **Kerjasama tiga pihak, yaitu pihak penghasil, pihak pengguna dan asosiasi profesi/keilmuan** akan sangat tepat untuk tujuan tersebut. Pengalaman Singapura dan Korea Selatan dalam menangani pendidikan vokasional, dengan membentuk Vocational Education and Training Board (VETB) dapat jadi bahan kajian. Di kedua negara tersebut, VETB yang menentukan apa saja jenis tenaga vokasi yang diperlukan, berapa jumlahnya dan apa kompetensinya. Juga tim VETB yang melakukan penjaminan mutu lulusannya.

Penjaminan kualitas lulusan perlu mendapat perhatian. Selama ini penjaminan kualitas lulusan LPTK dilakukan oleh LPTK sebagai penghasil. Untuk pendidikan akademik hal seperti dapat dimengerti, tetapi untuk pendidikan profesi penjaminan kualitas harus melibatkan pengguna dan asosiasi profesi. Pada contoh pendidikan vokasi di Singapura dan Korea Selatan, pihak VETB yang melakukan ujian akhir dan menyatakan lulus atau tidak lulus.

07. Pengalaman menunjukkan tingkat kekerasan guru yang bekerja di daerah “non kota besar” dan bukan daerah asalnya tidak tinggi. Walaupun pada saat awal pengangkatan, mereka mau ditempatkan di daerah “pinggiran”, tetapi setelah bekerja beberapa tahun banyak yang minta pindah ke kota besar atau ke daerah asal. Oleh karena itu, **rekrutmen calon mahasiswa yang disesuaikan dengan calon penempatan perlu dilakukan**. Guru yang berasal dari daerah setempat juga memahami budaya setempat, sehingga memudahkan yang bersangkutan ketika membimbing siswanya. China adalah negara yang sukses melakukan pola ini.

Tentu tetap harus diberi peluang dan bahkan diberi porsi tertentu adanya guru yang berasal dari daerah lain. Guru semacam itu akan dapat menjadi “jembatan” membangun rasa kebangsaan, sekaligus menjadi jendela bagi siswa setempat karena biasanya guru seperti itu memiliki pengalaman yang berbeda dengan guru setempat. Perpaduan guru asal daerah lain dengan guru asal setempat akan saling melengkapi.

08. Guru seharusnya mampu menjadi teladan dan bahkan menjadi inspirator bagi siswanya. Jika guru mampu menjadi idola bagi siswa, maka 50% tugas guru terselesaikan, karena guru seperti akan sangat mudah untuk melakukan bimbingan dan memotivasi siswanya untuk

belajar. Merujuk hasil studi Bank Dunia di Honkong dan Syanghai, menunjukkan pentingnya penyiapan (pendidikan) calon guru.

Pengalaman menunjukkan yang menjadikan guru diteladani oleh siswa adalah yang: (1) bekal ilmunya yang bagus, dan (2) perilakunya yang terpuji. Namun, hasil tes terhadap guru menunjukkan penguasaan materi bidang studi masih jauh dari ideal. Bahkan ada yang menyatakan para guru yang diminta mengerjakan soal-soal UN hasilnya tidak berbeda dengan siswanya. Pengalaman melaksanakan PLPG menguatkan hasil tes tersebut. Untuk perilaku guru memang belum ada studi yang memadai, namun dari pengamatan sepiantas tidak banyak guru yang diidolakan siswanya.

Kondisi di atas sangat berbeda dengan guru di masa lalu, dimana guru seakan menjadi idola siswanya. Memang kondisi masyarakat sekarang jauh berbeda dengan era itu. Namun ada baiknya menengok kembali pola pendidikan guru di masa lalu, ketika **pendidikan guru berikatan dinas dan berasrama**. Dengan pola ikatan dinas akan memungkinkan mendapatkan calon guru yang bagus dan sekaligus memudahkan pengaturan penempatannya. Dengan pola asrama pembinaan perilaku calon guru dapat dilakukan 24 jam.

Pasal 23 ayat (1) UUGD secara jelas menyebutkan "**pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru berikatan dinas berasrama di LPTK untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan**". Keinginan untuk menghasilkan calon guru yang bagus telah memiliki landasan hukum yang kuat. Tinggal bagaimana melaksanakan amanat UUGD tersebut. Jika memang anggaran untuk melaksanakan amanat tersebut sejak S1 belum mampu, dapat dirintis pada tahap PPG yang hanya satu semester sampai satu tahun. Jika sebutkan **ikatan dinas dianggap "menakutkan" karena ada konsekuensi untuk penempatan setelah lulus, istilahnya dapat diganti beasiswa**. Untuk ini pola yang diterapkan di China dapat dijadikan bahan kajian. China berhasi menyiapkan guru yang baik, dengan pola berbeasiswa dan berasrama.

09. Pengembangan PPG sewajarnya juga terbuka terhadap inovasi. Pola pikir induktif perlu dikembangkan untuk disinergikan dengan pola pikir deduktif yang selama ini banyak digunakan dalam mengembangkan PPP. Fenomena *new route on teacher education* yang beberapa tahun terakhir muncul di Amerika, pengalaman Indonesia Mengajar dan fenomena guru-guru di Sekolah Plus, perlu dikaji dengan pikiran jernih.

*Inovasi new route on teacher education* memberi pintu kepada orang-orang setengah baya yang telah berpengalaman bekerja di berbagai bidang untuk kembali ke kampus untuk belajar menjadi guru. Ternyata pengalaman kerja di berbagai instansi tersebut sangat baik bagi guru. Dengan pengalaman tersebut, guru dapat membuat pembelajaran lebih kontekstual. Dengan usia yang cukup saat masuk ke profesi guru, mereka telah matang secara psikologis dan menjadi guru benar-benar karena panggilan.

Sekolah-Sekolah Plus, khususnya sekolahswasta banyak yang ketika menyeleksi guru lebih mementingkan bekal keilmuan, sehingga banyak lulusan non LPTK yang diterima. Dengan bekal penguasaan bidang studi yang lebih kuat, tampaknya guru seperti juga memiliki nilai plus, walaupun tentu juga punya minus karena belum memiliki bekal bidang kependidikan yang cukup. Program Indonesia Mengajar tampaknya mengadopsi pola sekolah plus, sehingga walaupun mereka akan dikirim menjadi guru di daerah terpencil, pesertanya terbuka untuk lulusan LPTK maupun non LPTK. Dan yang banyak justru lulusan non LPTK. Perlu studi mendalam dan jernih terhadap fenomena tersebut untuk memetik pengalaman positifnya.

10. Perluasan mandat yang akhirnya berujung kepada konversi LPTK menjadi universitas (walaupun tetap mengemban tugas utama di bidang pendidikan), salah satunya untuk memperkuat pembekalan bidang studi murni. Program studi kependidikan dalam satu rumah dengan program studi murni, misalnya prodi Pendidikan Matematika dalam satu jurusan dengan prodi Matematika (murni), agar mahasiswa prodi Pendidikan Matematika mendapatkan bekal yang sama dengan mahasiswa prodi Matematika (untuk matakuliah yang sama) dan terjadi interaksi yang baik antara dosen maupun mahasiswa di kedua prodi tersebut.

Asumsi pada saat itu, dengan memiliki prodi bidang murni diharapkan lebih mudah memperoleh dukungan peralatan laboratorium bidang studi. Anggapan bahwa calon guru tidak perlu belajar di lab seperti calon sarjana murni dapat dihindari, karena peralatan yang diperlukan bukan hanya untuk mahasiswa calon guru tetapi juga mahasiswa bidang murni. Sayangnya, asumsi itu belum sepenuhnya terbukti. Peralatan lab di LPTK masih jauh dibanding lab di perguruan tinggi "murni", walaupun LPTK saat ini sudah memiliki prodi murni. Sementara itu, peralatan lab di SMA/SMK telah berkembang bagus. Akibatnya seringkali, lulusan LPTK kikuk mengajar di lab/workshop dan akhirnya dianggap tidak kompeten oleh lapangan. Oleh karena itu seiring dengan program pendidikan guru berbeasiswa dan berasrama, maka kelengkapan peralatan lab/workshop perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh.



**REDESAIN SISTEM PENDIDIKAN GURU  
DAN SISTEM MANAGEMEN GURU  
Oleh : Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir**

**Abstrak**

Politik desentralisasi yang terlalu deras atau mengaksentuasikan Bhinneka secara berlebihan memberi dampak negatif pada pendidikan. Membahayakan Tunggal Ika. Menjadi sulit perpindahan guru dari daerah *over-employed* ke daerah *underemployed* guru. Dampak desentralisasi dengan kondisi pendanaan yang sangat beragam, dari yang sangat mampu sampai yang sangat tidak mampu mendanai, menumbuhkan dampak-dampak negatif membuat stagnan sebaran guru antar daerah, dan membatasi mobilitas siswa dari daerah satu ke daerah lain.

Gaji guru, karier guru, termasuk Kepala Sekolah banyak menjadi korban keterbatasan dana pada banyak daerah, dan menjadi korban pergulatan politik di daerah.

Dalam konteks NKRI Pendidikan Guru perlu tetap dalam desain pendidikan nasional, dan perlu mengembangkan *resource sharing* disiplin ilmu yang dikembangkan Universitas. Guru masa depan adalah guru yang dapat membekalkan pengetahuan sesuai percepatan perkembangan ilmu di Universitas, bukan sebatas kisi-kisi kurikulum sekolah.

Untuk menjaga kualitas guru, sebaiknya guru adalah pegawai pemerintah pusat, bukan pegawai daerah. LPTK terpilih dikembangkan untuk menjaga kualitas pendidikan guru, dengan tersedia ikatan dinas untuk menjamin penyebaran kualitas guru secara nasional.

**A. Latar Belakang**

Sistem Pendidikan Guru organisatoris sudah tepat menjadi bagian dari universitas. Yang kami masih risaukan apakah berkembang *resource sharing* studi pendidikan guru dengan beragam ilmu murni di universitas ?

Keragaman kemampuan sumber dana daerah untuk menampung kebijakan desentralisasi, lebih banyak memberi dampak negatif. Dampak yang paling menonjol

adalah stagnannya mobilitas guru dari daerah kelebihan guru ke daerah kekurangan guru. Juga tersekatnya atau setidaknyanya, sulitnya mobilitas siswa dari daerah satu ke daerah lain.

## **B. Mengfungsikan Bhinneka Tunggal Ika**

Bhinneka mengakui keragaman daerah; tunggal Ika menyatukan Indonesia dalam kesatuan politik. Tunggal Ika dalam pendidikan perlu dijamin oleh Sistem Pendidikan Guru dan Sistem penggajian guru dan Sistem Karier Guru. Upaya tersebut guna menjamin kesatuan politik dalam NKRI. Bhinneka dalam pendidikan disajikan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan keragaman daerah dalam banyak makna.

## **C. Pendidikan Guru Masa Depan**

Guru masa depan adalah guru yang dapat membekalkan pengetahuan sesuai percepatan perkembangan ilmu di Perguruan Tinggi, bukan membekalkan pengetahuan sebatas kisi-kisi kurikulum sekolah.

### **1. Mengapa IKIP Muhammadiyah menjadi Universitas Ahmad Dahlan ?**

Setelah membuat banyak komparasi saat *around the world* tahun 1978, dilanjutkan studi banding tahun 1987 dan 1988, kami sebagai Rektor IKIP Muhammadiyah mulai mengembangkan konteks keilmuan dalam wadah universitas.

#### **a. Mengembangkan *resource sharing***

Meskipun guru di negara maju mencakup 20 sampai 25% dari semua lulusan Pendidikan Tinggi, tidak berarti Pendidikan Guru perlu eksklusif dari pembauran keilmuan banyak disiplin ilmu. Dosen fisika (termasuk dosen pendidikan fisika) misalnya, perlu memiliki visi perkembangan ilmu fisika di Perguruan Tinggi. *Resource sharing* keilmuan perlu dikembangkan dalam satu wadah yaitu : universitas.

Fakultas Psikologi akan dapat memberi *resource sharing* bagi pengembangan PGSD dan PAUD. Fakultas Ilmu Pendidikan dapat memberi *resource sharing* pengembangan banyak program pendidikan guru SLP & SLA. ISI dapat memberi *resource sharing* bagi pengembangan banyak pendidikan seni. Fakultas Teknik dapat memberi *resource sharing* untuk Pendidikan Ketrampilan dan Teknik. Akan *exhausted* dana bila di Pendidikan Tinggi Guru perlu ada dosen pendidikan seni, dosen pendidikan ketrampilan dan dosen teknik. Sebaliknya dosen tersebut akan efisien bila sekaligus menjadi dosen seni dan dosen teknik.

#### **b. Menyiapkan *resource sharing***

IKIP Muhammadiyah Yogyakarta menjadi Universitas Ahmad Dahlan tahun 1994 dengan idee dasar mengembangkan *resource sharing* bagi pengembangan ilmu. Diikuti IKIP Muhammadiyah Jakarta tahun 1998 menjadi UHAMKA; dan diikuti sejumlah IKIP Negeri pada tahun 1999 menjadi UNY, UNJ, UMalang, UNMakasar, dan UPI. Dilanjutkan IKIP lain baik negeri maupun swasta. Apakah idee kami berjalan mulus ? Tidak, baik di UAD, dan juga universitas lain. Resistensi untuk eksklusif masih saja berlangsung.

#### **2. *Concurrent & Consecutive Model***

Di Indonesia Pendidikan Guru dikenal dengan dua model pemikiran, yaitu *concurrent model*, yaitu yang sejak tahun pertama menggunakan kurikulum pendidikan guru; dan *consecutive model*, yaitu yang menyelesaikan program disiplin ilmu tertentu, dilanjutkan dengan mengambil akta mengajar. Kedua model tersebut belum menyentuh pemikiran dasar kami : *resource sharing*.

#### **3. *Resource sharing*, bukan membatasi berdasar kurikulum sekolah**

Guru masa depan adalah guru yang dapat membekalkan pengetahuan sesuai percepatan perkembangan ilmu di Perguruan Tinggi, bukan membekalkan

pengetahuan sebatas kisi-kisi kurikulum sekolah.

#### **a. Prioritas program, bukan tersedianya dosen**

Dari studi banding tahun 1978, dilanjutkan dengan studi-studi selanjutnya di tahun-tahun 1987 dan 1988 kami memiliki pengayaan filosofik dan teoretik serta operasional Pendidikan Tinggi, sehingga saat kami menjadi Rektor IKIP Muhammadiyah tahun 1990 mempunyai gagasan untuk mengembangkan IKIP menjadi Universitas. Mengembangkan fungsi dari pendidikan guru menjadi fungsi mendidik akademisi berbagai disiplin ilmu dan profesi dari sebatas pendidikan guru ke semua disiplin dan profesi, dengan prioritas mendahulukan yang lebih urgen dan memberi *rate of return* lebih tinggi. Kecuali program missi.

#### **b. Mendahulukan ekstensi program ilmu universiter**

Karena semula adalah IKIP maka semua dosen kami adalah lulusan S1 program studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Bahasa, Bimbingan Konseling, PPKn, dan program pendidikan guru lainnya.

Karena kami adalah dosen Studi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), maka mulai tahun 1991 kami hanya menawarkan studi lanjut dengan beasiswa dalam 28 program studi yang kami diprioritaskan. Mereka yang punya S1 Pendidikan Matematika dan Pendidikan Fisika kami beri peluang meraih studi lanjut dalam ilmu murni matematika, fisika, atau teknik. Yang punya S1 Bimbingan Konseling kami beri peluang mengambil studi psikologi. Dan seterusnya.

#### **c. Siap menjadi UAD tahun 1994**

Saat 1994 disetujui menjadi UAD maka mereka yang sudah menempuh S2 ilmu murni dari S1 Pendidikan Matematika dan Pendidikan Fisika dapat menjadi Dekan Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, dan lain-lain.

### **4. Pengorganisasian Universiter dan Fakulter**

Dua alternatif pengembangan keahlian dosen agar prospektif bagi *resource sharing*, dan satu faktor *resistensi* perlu jadi dasar pengorganisasian Universitas dengan semangat *resource sharing*.

**a. Prospek ke depan**

Agar *resource sharing* dapat berkembang prospektif bagi semua program akademik dan profesional, maka dirancang alternatif studi lanjut para dosen. Pertama, program linier akademik, dan kedua program zig-zag akademik dan profesional.

**b. Menghadapi resistensi**

Menghadapi resistensi mempertahankan IKIP (berkumpul dalam FKIP) kami reorganisasikan : mereka yang serumpun yaitu matematika dengan pendidikan matematika, sastra dengan pendidikan bahasa, sebagai contoh, lokasi kerjanya disatukan agar dapat lebih terjadi *resource sharing*. Sehingga Dekan FKIP di UAD akan punya Pembantu Dekan yang tersebar di berbagai lokasi kerja.

**c. Organisasi UNY lebih tepat**

Di UNY Fakultas MIPA, memiliki program matematika, fisika, biologi, sekaligus ada program pendidikan guru matematika, fisika, biologi, dan lainnya. Organisasi itu lebih tepat. Organisasi tersebut lebih tepat daripada semua program pendidikan guru di fakultas keguruan.

**d. Pengembangan disiplin ilmu di UAD lebih cepat**

Sejak 1994 UAD langsung dapat mengembangkan Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Sastra, Program Studi Teknik Informatika, Prodi Teknik Industri, dan lainnya.

**5. Universitas terpilih sebagai andalan kesatuan nasional**

Menjadi penting diperhatikan bahwa 20 sampai 25% tamatan pendidikan tinggi di negara maju terserap untuk jabatan guru. Bila ketentuan bahwa semua guru di Indonesia harus tamat S1, maka angka 20% tersebut akan segera tercapai. Agar

guru secara nasional berkualitas tinggi dan merata maka perlu ditetapkan universitas terpilih menjadi andalan kesatuan NKRI. Salah satu cara : tersedia ikatan dinas bagi mahasiswa, dan dirancang mahasiswa lulusan dengan ikatan dinas disebar ke seluruh propinsi.

#### **D. Fungsi menjaga kualitas**

Dari latar belakang masalah telah dikemukakan bahwa pendanaan penggajian dan pengelolaan sekolah yang lebih menekankan pada dana daerah membuat stagnan perpindahan guru dari daerah yang *overemployed* ke yang *underemployed*; ketimpangan pendapatan guru dari gaji dan kompensasi daerah, mengkondisikan tingkat keseriusan guru dengan akibat kualitas menjadi tidak merata; dan terjadi keseretan mobilitas atau pemilihan sekolah lanjutannya.

##### **a. Tersedia ikatan dinas guna penyebaran lulusan**

Pendidikan Guru Nasional mengandung makna bahwa sejumlah Pendidikan Guru terpilih mempunyai fungsi untuk menjaga kualitas guru-guru dan sekolah-sekolah seluruh nusantara dengan cara disediakan ikatan dinas bagi mahasiswa dengan tujuan setelah lulus disebar ke seluruh Indonesia, guna menjamin meratanya kualitas guru dan nantinya meratanya kualitas sekolah-sekolah di seluruh nusantara.

##### **b. Manajemen Guru dalam NKRI**

Konsep Sistem Manajemen Guru berlaku pula politik Tunggal Ika, menjaga kesatuan pembinaan kesejahteraan dan karier secara nasional.

###### **1) Seleksi calon guru**

Seleksi calon guru berlaku nasional dengan kriteria seleksi bersifat nasional pula, dan diangkat dan digaji sebagai pegawai pusat. Pelaksanaan seleksi dapat diserahkan ke daerah.

###### **2) Sebaran nasional mahasiswa ikatan dinas**

Guna menjamin meratanya kualitas sekolah di seluruh Indonesia, maka

sebaran nasional mahasiswa ikatan dinas, penting dilakukan.

### **c. Guru pegawai pusat**

Guna menjamin pemerataan kualitas dan kemungkinan mobilitas guru secara nasional maka sebaiknya guru menjadi bagian formasi nasional.

#### **1) Nyaman di manapun**

Perlu diciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua guru dari manapun asalnya, dan di manapun bertugas, baik dalam keseharian maupun dalam karier.

#### **2) *Talented personnel* penting**

Amerika Serikat memiliki potensi jauh sekali dari rata-rata negara maju, karena pada Pasca PD II mengejar *talented people* dari manapun untuk masuk AS. *Talented people* sampai sekarang mudah untuk menjadi *permanent residence* di AS. Dalam kuliah-kuliah di Pasca kami selalu mendorong putra-putra daerah membujuk agar kolega belajarnya yang nampak *talented* mau ke daerahnya.

### **E. Otonomi yang gagal**

Sejumlah negara di Amerika Latin dan Spanyol gagal dalam pengembangan otonomi karena menyerahkan segalanya ke daerah. Ada semacam lepas tangan pusat atas alasan memenuhi tuntutan desentralisasi.

Perlu penataan pajak kembali mana yang masuk kas Pemerintah Pusat dan yang masuk kas Pemerintah Daerah, kesemuanya disinkronkan dengan kebijakan pemerintah, mana yang menjadi tanggung-jawab pusat dan mana yang menjadi tanggung-jawab daerah.

#### **1. Pemecahan Tingkat I dan Tingkat II**

Meski dipersyaratkan, pemecahan tersebut ada indikasi mampu mandiri, ternyata lebih banyak yang menjadi tertatih-tatih untuk mandiri. Dampaknya banyak sekali.

#### **2. Daerah kaya sumber alam**

Perlu lebih bijak dalam alokasi daerah dan pemerataan kesejahteraan nasional atas sumber alam. UUD 45 perlu ditelaah lebih cermat dan bijak.

## **F. Memberdayakan Bhinneka**

Di dunia, pluralisme mengalami perkembangan yang beragam. Pluralisme budaya dan pluralisme agama telah dibangun oleh para *founding fathers* Indonesia pada tahun 1945 dan 1946. Pluralisme budaya mulai diakui dunia akhir tahun 1970an; dan pluralisme agama mulai diakui dunia pada awal 1980an.

### **1. Pluralisme yang belum signifikan**

Kami amati pluralisme budaya di Afrika menjadi saling memusnahkan etnik satu terhadap etnik lain, atau bentuk paling biadab dan primitif dari pluralisme. Zaman Nazi, dilanjutkan di Asia Tengah (Kosovo, Herzegovina, Chessnya, Bosnia, dan lain-lain) dengan model *ethnic cleansing*.

#### **a. Ethnic cleansing**

*Ethnic cleansing* merupakan bentuk paling biadab dari pluralisme dalam peradaban modern. Pluralisme Eropa menghasilkan migran yang marginal; tinggal di daerah terisolir dan kumuh; mendapat peluang kerja dengan pendapatan rendah.

#### **b. Pluralisme Amerika Serikat**

Minoritas di AS tetap dikenal. Pemerintah secara formal memang melindungi minoritas. Memang minoritas pada umumnya akan tetap terhambat untuk maju. Hanya mereka yang **Think Big**, maknanya tidak acuh apakah dia dihambat, apakah dia disepelekan, dia tetap ingin *survive* dan sukses ada peluang dan kemungkinan untuk sukses.

#### **c. Signifikansi Bhinneka dalam konteks 1978 di AS**

Keragaman budaya dalam iklim damai terjadi di Indonesia. Pada waktu penulis di Harvard University tahun 1978 kami perkenalkan Bhinneka Tunggal Ika atau *Diversity in Unity*, kami bandingkan dengan motto AS : *E Pluribus Unum* atau



*From Diversity to Unity*, serta kami bandingkan dengan situasi di Amerika Serikat tahun 1978 yang menjadi lebih signifikan dengan *Diversity in Unity*. Atas bukti bahwa yang mayoritas berperang di Korea Selatan dan Vietnam adalah golongan minoritas warga negara AS keturunan Negro, Asia, dan Amerika Latin. Banyak veteran perang yang diterima di universitas di AS. Program pendidikan bahasa Spanyol, Jepang, dan lain-lain pada waktu itu laku keras, berarti AS mulai mengakui keragaman bahasa dan budaya.

#### **d. Signifikansi Politik Pendidikan Agama dalam Pluralisme**

Saat kami di University of Iowa tahun 1994, kami undang ke Indonesia, mereka-mereka yang ingin mencontoh pluralisme agama. Di Indonesia, pemerintah memfasilitasi pendidikan agama diberikan sesuai agamanya masing-masing oleh guru yang seagama pula.

## **2. Teori budaya**

Banyak teori budaya. Dari sekian banyak teori budaya kami hanya akan mengekspose teori budaya yang signifikan untuk masa depan pluralisme, yaitu teori budaya yang mengakui bahwa setiap budaya memiliki keunggulan.

#### **a. Diseminasi dan Adopsi**

Teori ini mengakui bahwa setiap budaya memiliki keunggulannya. Seni patung Asmat merupakan keunggulan budaya Asmat. Budaya lain dapat mengadopsi keunggulan Asmat. Satuan budaya yang memiliki keunggulan yang signifikan dapat menawarkan diseminasi budayanya pada satuan sosial. lain, dan membuka adopsi oleh budaya lain.

#### **b. Pluralisme dan Assimilasi**

Penelitian oleh promovendus kami, tentang integrasi sosial Tionghoa-Jawa di Yogya dan Solo, menyajikan kesimpulan yang berbeda. Cina Solo lebih arogan atas budayanya sendiri, dan menciptakan lingkungan eksklusif; sehingga berkembang

konflik latent yang sering meletus. Di Yogyakarta di daerah pemukiman Cina seperti Ketandan dan Pajeksan, sering bahasa Jawa mereka lebih halus bahasa dari orang Jawa biasa. Lebih berkembang asimilasi. Lingkungan sosial Yogya damai-damai saja.

**c. Pluralisme preferensi**

Kami sepakat dengan kesimpulan promovendus kami, perlu dan dapat dikembangkan budaya hibrid atau menurut istilah kami dalam buku-buku kami pluralisme dalam preferensi; yang tidak lain adalah mengintegrasikan pluralisme dan asimilasi. Orang silahkan berpreferensi untuk tinggal dan menggunakan budaya yang dia suka dan cocok.

# Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor dalam Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan

Oleh : Muh Farozin , Dosen FIP UNY, [farozin2311@yahoo.com](mailto:farozin2311@yahoo.com)

## ABSTRAK

Dalam UU Sisdiknas 20 Tahun 2008 dinyatakan bahwa konselor merupakan salah tenaga pendidik yang sejajar dengan tenaga pendidik yang lain antara lain guru, dosen, dan widyaiswara. Konselor dihasilkan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang dirancang untuk menghasilkan konselor profesional. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) telah merumuskan Standar Kompetensi Konselor Indonesia dan juga telah terbit Permendiknas No. 27 Tahun 2008 yang mengatur tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Seting kinerja konselor berada dalam bidang pendidikan formal dan non formal. Saat ini, terdapat perguruan tinggi non LPTK yang juga menyelenggarakan program studi bimbingan dan konseling (BK) dengan penuh harapan juga dapat diakui sebagai tenaga profesional bidang BK. Proses pendidikan di perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cerdas dan berwawasan luas serta terampil dalam melaksanakan tugas profesi. Sistem rekrutmen input yang mendukung proses dan lulusan yang unggul, tenaga pendidik/dosen sesuai bidang keahlian, kewajaran rasio dosen : mahasiswa dalam pelaksanaan tugas pada setiap jenjang pendidikan profesional konselor, kurikulum yang disusun berdasarkan kompetensi konselor, proses pendidikan yang dilakukan secara utuh, laboratorium dan perpustakaan yang mendukung proses pendidikan. Keberhasilan kinerja konselor dipengaruhi oleh mutu diri konselor, karakteristik konseli dan kondisi lingkungan kehidupan konseli. Keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan profesional konselor diperlukan penguatan/ peningkatan peran asosiasi profesi dan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan monitoring proses dan hasil pendidikan serta kinerja profesi konselor. Mekanisme pemberian masukan konstruktif untuk pemeliharaan mutu proses pendidikan dan kinerja profesi.

Kata kunci : Penyelenggaraan Pendidikan professional konselor

# **MASA DEPAN PROFESI GURU DALAM BINGKAI SENTRALISASI PENDIDIKAN**

(Kajian Terhadap Praktik Pengembangan Profesi Guru di Daerah  
Pasca Berlakunya Undang-Undang No 14 tentang Guru dan Dosen Tahun 2005)

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.  
(Universitas Pendidikan Indonesia)

Guru merupakan profesi yang banyak disorot dan diperbincangkan masyarakat umum. Sorotan yang sangat tajam itu terjadi karena peran guru dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia sangat besar. Seseorang berhasil atau sukses dalam kehidupannya karena peran guru dan sebaliknya kegagalan dan ketidakmampuan seseorang dalam mengarungi kehidupannya sering dikaitkan pula dengan ketidakberhasilan guru dalam mendidik mereka.

Diberlakukannya Undang-Undang Guru dan Dosen berikut Peraturan Pemerintah dan beberapa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan lainnya merupakan upaya pemerintah dan keinginan terbesar bangsa ini agar para guru lebih berkualitas, sejahtera dan memiliki martabat sehingga profesi guru tetap menjadi kebanggaan bagi penyandanginya dan pendorong kemajuan pembangunan nasional.

Di sisi lain, sejak keluarnya kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah, keberadaan guru sering diarahkan pada kepentingan politik segelintir orang yang haus kekuasaan. Penempatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan akademik tidak lagi didasarkan atas kapasitas dan standar profesi yang telah digariskan tetapi lebih kepada kepentingan pemimpin daerahnya. Celakanya, para guru yang tidak paham akan peran dalam pendidikan yang disandangnya tidak jarang terbawa arus politik sehingga mengabaikan tugas utamanya sebagai pendidik. Akibatnya, sudah dapat dipastikan dan dirasakan bahwa kualitas pendidikan nasional yang diharapkan meningkat, minimal sejajar dengan negara lain lambat laun semakin menurun, bahkan kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah semakin tajam.

Upaya pemerintah pusat menyelenggarakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan, dalam praktiknya di daerah tidak dipandang sebagai upaya peningkatan kualitas, tetapi lebih kepada kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar, sehingga para guru berlomba untuk memperoleh kesempatan ikut sertifikasi bahkan tidak sedikit yang "*difasilitasi*" oleh pengelola pendidikan di daerahnya. Akhirnya keikutsertaan peserta sertifikasi tidak lagi didasarkan atas pemenuhan standar akademik-profesi tetapi memanfaatkan kuota yang tersedia.

Beberapa permasalahan di atas, sangat mendesak untuk dikaji lebih dalam dan cermat agar pengembangan profesi guru dalam kiprahnya tetap menjadi garda utama untuk memajukan sumber daya bangsa. Ini berarti, peran perangkat pengelola pendidikan di daerah dan pusat harus semakin jelas dan sinkron. Dalam hal apa pengembangan profesi guru harus dikelola secara sentralistik dan bagaimana daerah menterjemahkan perangkat aturan dan kebijakan secara nasional itu agar mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya serta secara nasional tidak hanya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada umumnya tetapi juga keilmuan, identitas dan prospek profesi guru masa depannya.

# **STUDI ORIENTASI TUGAS PENGAWAS DAN KEPALA SEKOLAH (Suatu Gagasan Melakukan Revitalisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan Kepengawasan Pendidikan di Era Desentralisasi Pendidikan)<sup>1</sup>**

Oleh:  
Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M. Pd.<sup>2</sup>

## **Abstrak**

Pendidikan di Indonesia kini telah berada pada tataran perubahan paradigma yang dulunya sentralisasi, sekarang bersifat desentralisasi. Perubahan paradigma pendidikan ini, perlu diikuti kebijakan perubahan fungsi, peran dan jika perlu perubahan kelembagaan kepengawasan pendidikan.

Tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni: (1) Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah, (2) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya, (3) Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.

Masalahnya apakah pengawas ini dapat melakukan kepengawasannya secara independent? Ternyata pengawas tidak bisa berbuat banyak jika berhadapan dengan kebijakan tertentu yang dilakukan diknas, apalagi kebijakan diknas itu juga merupakan kebijakan kepala daerah. Disinyalir bahwa jabatan pengawas sekedar untuk mengalihkan tugas yang dulunya sebagai kepala sekolah, bahkan yang lebih ekstrim adalah bahwa guru atau kepala sekolah yang bermasalah dialihkan menjadi pengawas. Belum ada model perekrutan pengawas seperti perekrutan guru, pada hal tugas pengawas lebih berat dibandingkan dengan tugas guru. Seperti apa model perekrutan pengawas yang baik? Dan bagaimana disain kelembagaan pengawas agar efektif menjadi lembaga yang menjaga kualitas penyelenggaraan dan hasil pendidikan? Uraian dalam tulisan ini akan memberikan arah dan bisa saja akan menjadi bahan masukan dalam perekrutan pengawas pendidikan.

Dalam spektrum ini ternyata perlu direvitalisasi kelembagaan kepengawasan pendidikan menuju pengawas yang mandiri dan bisa jadi akan lahir suatu badan atau dinas di daerah yang diberi nama “BADAN PENGAWAS PENDIDIKAN PROVINSI” atau “BADAN PENGAWAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA” semoga model perekrutan pengawas dan kelembagaan kepengawasan pendidikan sebagaimana yang ditawarkan pada artikel ini dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Abstrak Makalah yang ditawarkan untuk menjadi bahan sajian pada Seminar Nasional IPSI di Yogyakarta

<sup>2</sup> Guru Besar dan Asdir-I Bidang Akademik pada PPs Universitas Negeri Gorontalo

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah aspek universal yang selalu dan harus ada dalam kehidupan manusia. Tanpa ada pendidikan, kehidupan manusia tentu akan mengarah kepada kehidupan statis, tanpa ada kemajuan, bahkan bisa jadi akan mengalami kemunduran dan kepunahan. Karena itu menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang niscaya dalam kehidupan manusia.

Pendidikan di Indonesia yang kita kehendaki adalah pendidikan yang dapat melahirkan warga negaranya berkualitas, memiliki keahlian, keterampilan yang dapat digunakan untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia. Pendidikan di Indonesia seharusnya mampu melahirkan sumber daya manusia yang “siap hidup” kapan dan dimanapun dia berada. Dengan kemampuan dan keahlian serta keterampilan yang dimiliki manusia Indonesia mengelola sumber daya alam, bisa jadi sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing secara global yang pada akhirnya menjadikan bangsa Indonesia memiliki daya saing yang kompetitif.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sector pendidikan harus dikelola dengan baik. Banyak hal yang telah dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu dari kebijakan itu adalah peningkatan kualitas pengawasan pendidikan dengan tujuan agar: (a) apa yang telah dirumuskan dalam pelaksanaan pendidikan bisa berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, (b) terjadi pengontrolan dalam penyelenggaraan pendidikan, (c) pelaksana pendidikan di sekolah baik kepala sekolah dan guru bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Perubahan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan dari sentralisasi menuju ke desentralisasi merupakan kebijakan yang turut mendorong perlunya perubahan pengawasan dalam pendidikan. Perubahan ini didasarkan

pada tuntutan (a) transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan, (b) lahirnya undang-undang guru dan dosen yang menghendaki guru dan dosen harus profesional, (c) jaminan pendidikan harus berkualitas, (d) kepala sekolah merupakan tugas tambahan, (e) penugasan kepala sekolah selama ini belum di pilih tetapi cenderung di tunjuk oleh kepala dinas pendidikan, (f) pekerjaan pengawas terkesan mengalihkan tugas guru yang telah akan memasuki masa purna tugas atau mantan kepala sekolah yang sudah seloesai masa tugasnya, dan (g) belum ada pendidikan khusus untuk menjadi pengawas pendidikan.

Hal lain yang juga banyak mewarnai pekerjaan pengawas di era desentralisasi sekarang ini adalah, pengawas dan guru sulit melakukan tugas secara profesional, sebab umumnya guru banyak dilibatkan dalam tugas-tugas yang bernuansa politik, guru harus berperan dalam kegiatan pemilukada guna memenangkan pasangan tertentu apalagi pasangan yang sedang berkuasa. Jika kemudian pasangan yang sedang berkuasa tidak terpilih kembali, maka sanksi yang harus diterima guru dan kepala sekolah adalah mutasi jabatan dan rotasi tugas. Hal ini merupakan bagian dari pelemahan system kerja guru dan berpotensi pada menurunnya kualitas pendidikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam arikel ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perekrutan pengawas pendidikan agar diperoleh pengawas yang profesional?
2. Bagaimana kelembagaan pengawas pendidikan agar pengawas menjadi lembaga atau badan yang independent dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas**

Secara umum tugas pokok pengawas (Kepala sekolah dan pengawas) dalam satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas, menurut Sujana (2006) minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni: (1) Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah, (2) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya, dan (3) Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.

Dalam petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas (2008) dikemukakan tentang tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah yang meliputi: (1) Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA, (2) Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Tugas pokok yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.

Sedangkan wewenang yang diberikan kepada pengawas sekolah meliputi: (1) memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal



dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi, (2) menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, (3) menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Wewenang tersebut menyiratkan adanya otonomi pengawas untuk menentukan langkah dan strategi dalam menentukan prosedur kerja kepengawasan. Namun demikian pengawas perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru agar dalam melaksanakan tugasnya sejalan dengan arah pengembangan sekolah yang telah ditetapkan kepala sekolah.

Berdasarkan kedua tugas pokok di atas maka kegiatan yang dilakukan oleh pengawas antara lain: (1) Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya, (2) Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru, (3) Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa, (4) Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah, (5) Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/bimbingan siswa, (6) Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan di sekolah binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian ijazah, (7) Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan stakeholder lainnya, (8) Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya, (9) Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah, dan (10) Memberikan saran dan

pertimbangan kepada pihak sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

## **B. Mekanisme Perekrutan Pengawas**

### ***1. Perekrutan Kepala Sekolah sebagai Pangawas***

Selama ini perekrutan pengawas (Kepala sekolah dan Pengawas) dilakukan dengan cara (1) bagi kepala sekolah rekrutmen diambil dari guru mata pelajaran) sedangkan (2) bagi pengawasan pendidikan dilakukan dengan (a) merekrut mantan kepala sekolah yang mendekati purna tugas dengan pertimbangan pengalaman selama menjadi kepala sekolah sudah cukup untuk melakukan kepengawasan pendidikan, (b) merekrut kepala sekolah yang sering bermasalah sehingga perekrutan ini cenderung untuk mengamankan masalahnya, (c) merekrut guru yang berprestasi.

Mekanisme perekrutan sebagaimana disebutkan di atas, bukan tidak bisa dilakukan, tetapi dalam tuntutan profesionalisme tugas, etos kerja yang diharapkan dari seorang mantan kepala sekolah yang menghampiri purna tugas cenderung kurang optimal. Demikian pula kepala sekolah yang sedang bermasalah lalu diangkat jadi pengawas, cenderung sulit menyelesaikan masalah pendidikan yang dihadapi. Oleh karena itu beberapa pertimbangan dalam merekrut pengawas pendidikan dan perlu disikapi adalah: (1) bagi kepala sekolah perlu mempertimbangkan: (a) Pendidikan Khusus tentang kepala sekolah, (b) Tingkat Pendidikan kepala sekolah, (c) Golongan dan pangkat, (d) Lama Dinas, (e) Kepemimpinan dan administrator, (f) Kepekaan social, (g) Inovasi dan pemahaman IPTEK, (h) Wawasan keilmuan kependidikan, dan (i) Moral dan Pemahaman ttg KKN.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka perekrutan kepala sekolah sebagai pengawas dapat dilakukan melalui: (1) Melakukan pengamatan lebih awal guru dalam rangka menyalurkan mereka dalam 2 model pembinaan, (2) Jalur

pembinaan model akademik dan jalur model calon-calon pemimpin, (3) semua guru yang masa tugasnya di bawah 15 tahun, diberikan pembinaan atau pelatihan akademik, (4) Guru yang masa tugasnya telah mencapai 15 atau di atas 15 tahun dibina dan diberikan pelatihan kepemimpinan sebagai calon kepala sekolah, (5) Atur ketentuan guru bisa mutasi minimal 4 tahun bertugas di sekolah, (6) Guru yg sudah 5 tahun bertugas di sekolah wajib di mutasi agar memperoleh berbagai pengalaman dalam pengelolaan sekolah, (7) Mutasi di arahkan untuk peningkatan kualifikasi sekolah, (8) Kepala sekolah direkrut jika sudah pengalaman di 3 sekolah sebagai guru, (9) Perekrutan dipilih oleh guru dari sekolah yang bersangkutan dan diajukan ke dinas pendidikan setempat dengan mengajukan 2 calon terpilih untuk dipertimbangkan menjadi kepala sekolah, (10) Seleksi dilakukan melalui tes (TPA), tes Kemampuan Kepemimpinan, tes wawasan keilmuan, tes penguasaan Iptek, (11) Hasil seleksi merekomendasikan untuk ikut pendidikan 1 tahun, (12) Pendidikan dapat dikerjasamakan dengan PTN LPTK, (13) Kurikulum disusun bersama antara Dinas pendidikan dan PTN LPTK.

## ***2. Perekrutan Pengawas Sekolah***

Perekrutan pengawas sekolah harus dilakukan sama seperti merekrut guru. Artinya pengawas sekolah bukan mengalih fungsikan guru atau kepala sekolah menjadi pengawas, melainkan pengawas diseleksi dari CPNS untuk fungsional pengawas. Perekrutan pengawas mengacu pada 4 komponen standar kompetensi pengawas sekolah adalah: (1) komponen pengawasan sekolah, (2) komponen pengembangan profesi, (3) komponen teknis profesi, dan (4) komponen penguasaan wawasan kependidikan.

Komponen pertama adalah kompetensi kepengawasan sekolah menuntut kemampuan yang harus dimiliki pengawas adalah: (a) kemampuan menyusun program pengawasan, (b) kemampuan membimbing guru dan siswa, (c) kemampuan menilai guru dan siswa, (d) kemampuan mengumpulkan data sumber

daya pendidikan, (e) kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan, (f) membina guru dan tenaga kependidikan, dan (g) kemampuan mengevaluasi hasil pengawasannya.

Komponen kedua adalah kompetensi pengembangan profesi yang meliputi: (a) Meneliti Masalah Kependidikan, (b) Memberikan Ulasan Masalah Kependidikan, (c) Membuat Karangan Ilmiah Populer Tentang Pendidikan, (d) Membuat Makalah Untuk Dipresentasikan, (e) Menulis Buku, Modul Pembelajaran, (f) Membuat Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, (g) Membuat Petunjuk Teknis Pengawasan, dan (h) Membuat Teknologi Tepat Guna

Komponen ketiga adalah kompetensi pada bidang Teknis profesional yang meliputi: (a) Membuat Desain Pembelajaran, (b) Membuat Garis-Garis Besar Pembelajaran, (c) Membuat Satuan Pembelajaran, (d) Menguasai Materi Pelajaran Yg Diajarkan Guru , (e) Merencanakan, Menyusun Tes, Dan Melaksanakan Evaluasi Formatif Dan Sumatif Serta Mengolahnya, (g) Menetapkan Bobot, Dan Standar Hasil Capaian Belajar, dan (h) Membuat Laporan Hasil Kegiatan Pembelajaran

Komponen keempat adalah kompetensi dalam bidang penguasaan wawasan bidang kependidikan yang meliputi: (a) Menguasai Filosofi Pendidikan, (b) Kebijakan Dan Arah Pendidikan Dasar Dan Menengah, (c) Aturan Normatif Pendidikan (UU, Perpu, Kepres Dan Aturan Lain Hingga Di Daerah), (d) Memahami Program Strategis Pendidikan, (e) Penguasaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi , (f) Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan (g) Mengetahui SDA Dan Budaya Lokal.

Semua kompetensi pengawas sebagaimana diuraikan di atas, harus menjadi bagian dari instrumen untuk digunakan melakukan rekrutmen pengawas. Dalam praktek penerapan tes empat kompetensi yang diharapkan dari calon pengawas, diharapkan terekrut pengawas yang memiliki kualifikasi yang sesuai guna peningkatan kualitas pendidikan kita.

## **C. REVITALISASI KELEMBAGAAN KEPENGAWASAN PENDIDIKAN**

### ***1. Asumsi Dasar Melakukan Revitalisasi Kelembagaan Pengawas***

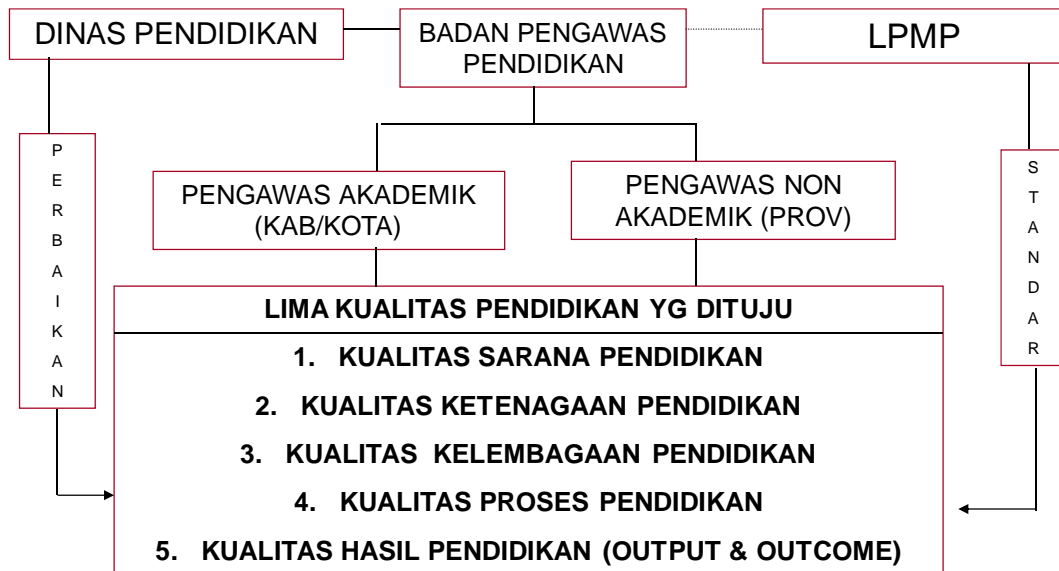
- a. Kelembagaan pengawas pendidikan perlu direvitalisasi
- b. Pengawas saatnya independent
- c. Pengawas menjadi badan otonom di daerah
- d. LPMP berfungsi melakukan standar pendidikan dan pembelajaran
- e. Dinas pendidikan pelaksana operasional
- f. Pengawas berfungsi memantau dan memonitor pelaksanaan pendidikan yang mengacu pada standar pendidikan yang dikembangkan LPMP
- g. Perlu ada sistem khusus tentang pengembangan kelembagaan, fungsi dan peran pengawas.
- h. Pemberian pendidikan khusus bagi pengawas

### ***2. Struktur Kelembagaan Pengawas***

Struktur kelembagaan pengawas pendidikan dapat dibuat di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota. Kelembagaan di tingkat Provinsi disebut "Badan Pengawas Pendidikan Tingkat I", dan di Kabupaten/Kota disebut: Badan Pengawas Pendidikan Tingkat II. Di tingkat Provinsi mengawasi hal-hal yang sifatnya non akademik, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota mengawasi hal-hal yang bersifat akademik. Badang ini kedudukannya setingkat dengan Dinas pendidikan Provinsi untuk badan pengawas tingkat I, dan setingkat Dinas pendidikan Kabupaten/Kota untuk badan pengawas tingkat II. Struktur kelembagaan pengawas tersebut sebagaimana di bawah ini.

LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) merupakan lembaga yang berfungsi menyalurkan standar yang dilaksanakan Dinas pendidikan. Dengan demikian Badan Pengawas bekerja berdasarkan standar yang ditetapkan di samping Badan Standar Nasional Pendidikan dan yang ditetapkan LPMP.

## STRUKTUR KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PENDIDIKAN



### 3. Alternatif Penentu Kebijakan Terbentuknya Badan Pengawas Pendidikan

1. APSI (Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia) melakukan regulasi kajian secara berkala
2. Pembahasan konsep otonomisasi kepengawasan dengan Dikbud pusat dan Daerah
3. Dukungan pihak legislatif
4. Kebijakan eksekutif (perda)
5. Komitmen peningkatan mutu
6. Memasukkan program dalam APBN/APBD
7. Pembentukan kelompok pakar dan konsultan
8. Transparansi dan akuntabilitas kinerja

### **III. Simpulan**

1. Mekanisme perekrutan pengawas pendidikan agar diperoleh pengawas yang profesional, sebaiknya dilakukan bersamaan dengan perekrutan guru baru. Mereka yang direkrut diberikan tes kompetensi pengawas yang hasilnya dapat merekomendasikan tiga kelompok pengawas yakni (1) pengawas yang direkrut langsung bekerja, (2) pengawas yang direkrut perlu pendidikan 3 bulan, dan (3) pengawas yang terekrut perlu pendidikan 1 bulan.
2. Perekrutan pengawas dengan mengalihfungsikan kepala sekola atau guru jadi pengawas dipandang kurang efektif
3. Kelembagaan pengawas pendidikan yang dianggap menjadi lembaga atau badan yang independent dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dapat dilakukan melalui pembentukan badan pengawas pendidikan tingkat provinsi dan badan pengawas pendidikan di tingkat kabupaten/kota, yang kedudukannya setingkat kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kepala dinas tingkat kabupaten/kota.

## SUMBER BACAAN

- Amatembun, 1999, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Jakarta: Bina Aksara
- Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Basis of Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Techniques*, (London: Sage Publications, 1990), p.7
- Depdikbud. *Panduan manajemen Sekolah*, Jakarta: Dirjen Dikdas, 1999.
- Depdiknas. *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, 2003.
- DPR RI. *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003, p. 5
- Gay, L.R. *Educational Research : Competencies for Analysis and Applications*. Toronto : Merril Publishing Company, 1987.
- Getteng, Abd. Rahman. *Menuju Guru Profesional dan Beretika*. Yogyakarta: Graha Guru, 2009
- Gibson, James L. John M. Ivancevich, James H. Donnelly, *Organiversies*, Texas, Business Publication, Inc, 1985.
- Harold Koontz & Heinz Weihrich, *Management Ninth Edition*, New York: McGrawHill Book Company, 1997.
- Ivancevich, Gibson, Donnelly. *Organization and Management*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1984.
- Jalal, Fasli, Dr.2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung, Tarsito, 2006.
- Oteng, Sutisna. *Administrasi Pendidikan Dasar, Teoritis Praktis Profesional*, Bandung: Angkasa, 2000.
- Soedijarto. *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.
- Umaedi, 1999, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen
- Uno, Hamza B. *Profesi Kependidikan , Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Wahjosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grasindo Persada, 1999.



## *Tentang Penulis*



**Prof. Dr. H. Hamzah B. Uno, M. Pd.** Guru Besar dalam bidang Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, terlahir di Limboto Kabupaten Gorontalo pada tanggal 1 Juni 1963. Menyelesaikan pendidikan SD 1977 di Ombulo, SLTP tahun 1980 di Limboto, SMA Tridharma tahun 1984 di Kota Gorontalo. Kemudian menyelesaikan pendidikan sarjana S1 pada FKIP Universitas Sam Ratulangi Manado Jurusan Pendidikan Matematika tahun 1989. Pada tahun 1995 menyelesaikan pendidikan S2 pada Jurusan Teknologi Pembelajaran PPS IKIP Malang. Memperoleh gelar doktor dalam bidang Teknologi Pendidikan di PPS Universitas Negeri Jakarta tahun 2003.

Sebagai orang yang konsen dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, dia banyak menulis buku yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran, hingga kini 29 naskah buku telah diselesaikannya yang mungkin dapat ditemukan di toko-toko buku di seluruh Indonesia.

Selain sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi di Gorontalo, penulis juga biasa menjadi dosen tamu di perguruan tinggi lain terutama di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Penulis juga aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah yang bertaraf Nasional maupun internasional baik sebagai peserta maupun sebagai pemakalah terutama yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan pembelajaran yang sering dilakukan oleh IPTPI (Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia), dan AECT (Association of Educational Communications and Technology). Dia juga menjadi pelatih dosen dan guru melalui program ALFHE (Active Learning For Higher Education) dan ALIS (Active Learning In School) yang di bina oleh USAID sebuah program yang dikembangkan dari masyarakat Amerika dalam rangka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.

# Kontra-Profesional dalam Pengadaan dan Pemberdayaan Guru



**Dr. Udik Budi Wibowo**  
Universitas Negeri Yogyakarta

Makalah disajikan pada Seminar Nasional  
“Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan”  
yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana  
Pendidikan Indonesia (ISPI) bekerjasama dengan  
Universitas Negeri Yogyakarta.  
Yogyakarta, 21-22 Januari 2012.

# **KONTRA-PROFESIONAL DALAM PENGADAAN DAN PEMBERDAYAAN GURU**

Oleh:  
Udik Budi Wibowo<sup>1</sup>

## **ABSTRAK**

Guru telah ditetapkan secara legal formal sebagai tenaga profesional. Namun pada kenyataannya berbagai kebijakan teknis operasional dan praktek manajemen guru di lapangan, khususnya yang terkait dengan pengadaan dan pemberdayaan guru mengindikasikan kecenderungan gejala kontra-profesional. Sementara itu para guru sendiri ditengarai melihat profesi lebih sebagai kesempatan untuk menambah penghasilan, bukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran kepada siswa. Pembiaran kontra-profesional itu menjadikan guru tetap sebagai profesi semu, bahkan menjadi langkah mundur yang menggerogoti kewibawaan dan kebanggaan profesi. Oleh karena itu, berbagai standar profesional harus ditegakkan secara konsisten agar profesi guru ini dapat bertumbuh semakin kuat dan bermartabat.

Kata kunci: pengadaan guru, pemberdayaan guru, kontra-profesional, standar profesi, dan kinerja profesional.

## **PENDAHULUAN**

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Demikian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 1 Butir 1), dan ditegaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Pasal 1 Butir 1). Selanjutnya ditegaskan pula bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggungjawab.

---

<sup>1</sup> Udik Budi Wibowo adalah tenaga pendidik pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta.

Profesionalitas guru, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, ditunjukkan dengan kepemilikan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 38) ditetapkan bahwa kualifikasi akademik guru adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan; dalam hal ini minimum lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). Adapun kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi sebagai agen pembelajaran yang mencakup: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dengan pemenuhan berbagai persyaratan di atas, akhirnya kinerja guru sebagai pendidik dihargai dengan tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan bahwa guru telah mendapatkan status sebagai profesi secara legal formal. Pengakuan sebagai profesi tersebut tampak berbeda dari pertumbuhan profesi lain seperti dokter, pengacara, atau akuntan. Pengakuan dan pertumbuhan profesi guru itu jelas tidak bersifat mandiri sebagaimana profesi yang sudah mapan tadi; namun lebih banyak disokong oleh Pemerintah. Kondisi semacam itu sungguh menyulitkan bagi profesi guru untuk tumbuh menjadi profesi yang berwibawa dan bermartabat, karena seringkali harus lebih memprioritaskan kepentingan birokrasi yang dimungkinkan justru kontra-profesional atau bertentangan dengan prinsip-prinsip profesionalitas. Sehubungan dengan itu, tulisan ini berusaha melacak berbagai tindakan kontra-profesional dalam pengembangan profesi guru, dan mencoba mengajukan solusinya untuk membangun profesi guru yang berwibawa dan bermartabat, serta berdayaguna.

## **PEMBAHASAN**

### **Kesulitan dalam memenuhi persyaratan profesi**

Menurut deMarrais dan LeCompte (1995: 131), karakteristik “tipe ideal” dari suatu profesi sebagaimana pertama kali digagas oleh Weber (1947) antara lain: merupakan penyedia layanan yang berbasis kerja mandiri, memiliki komitmen

yang kuat, kualifikasi berdasarkan kepemilikan pengetahuan dan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan yang panjang dan ketat, layanan yang diberikan bersifat serius (bahkan seringkali menyangkut hidup-mati), mendapat pembayaran dari klien, untuk memasuki profesi dikendalikan oleh kelompok sejawat (yang menetapkan seperangkat persyaratan untuk memasuki profesi yang bersangkutan, pelatihan, dan sertifikasi). Dengan demikian tidak setiap orang atau sembarang orang dapat memasuki profesi yang sudah mapan seperti dokter, pengacara, atau kependetaan.

Profesi guru di tanah air tampak tidak sepenuhnya dapat memenuhi karakteristik profesi seperti di atas. Pengelolaan guru sebagai sumberdaya manusia pendidikan, mulai dari penyiapan atau pendidikan, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, serta pemberdayaan dan pembinaannya hingga saat ini ditengarai belum dapat menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas secara komprehensif, sistemik, dan konsisten. Kondisi manajemen guru tersebut ditengarai sudah berlangsung lama sebelum ada pengakuan legal formal terhadap profesi guru, sebagaimana diungkapkan oleh Mohamad Surya (2003: 278) sebagai berikut.

“Dari sudut pandang manajemen SDM guru, guru masih berada dalam pengelolaan yang lebih bersifat birokratis-administratif yang kurang berlandaskan paradigma pendidikan (antara lain manajemen pemerintahan, kekuasaan, politik, dsb.). Dari aspek unsur dan prosesnya, masih dirasakan terdapat kekurangterpaduan antara sistem pendidikan, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, supervisi, dan pembinaan guru”.

Suatu profesi memerlukan pengetahuan dan keahlian yang bersifat khas, yang diperoleh melalui pendidikan yang relatif panjang dan ketat. Kriteria ini semakin tegas dengan menerapkan linieritas bidang keilmuan, seperti dokter harus berasal dari sarjana kedokteran, pengacara dari sarjana hukum, dan akuntan memiliki basis pendidikan sarjana bidang ekonomi. Bagaimana dengan profesi guru? Pada kenyataannya siapapun dapat menjadi guru. Setiap orang yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah, dan pernah mengalami diajar oleh guru, maka orang tersebut dapat diangkat menjadi guru. Jadi latar belakang pendidikan bidang ilmu apapun dapat menjadi guru, apabila diperlukan dengan tambahan mengambil akta mengajar atau mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) selama satu sampai dua semester. Atau dengan program kewenangan tambahan, seseorang dapat

diangkat menjadi guru untuk mengajar bidang ilmu yang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan tambahan yang singkat tersebut.

Rasionalitas semu, bernuansa politis dan ekonomis tampak seringkali menjadi dasar dalam penyiapan dan pengadaan guru. Lebih-lebih dalam suasana otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, daerah-daerah dengan kewenangan yang dimiliki seringkali mengambil kebijakan dan/atau melakukan praktek-praktek rekrutmen guru yang tidak hirau pada berbagai kriteria profesional. Seperti sudah menjadi rahasia umum bahwa pengangkatan guru dihargai dengan rupiah. Melalui praktek “percaloan”, calon guru yang berani membayar tunai langsung (*cash*) dengan nilai tertinggi menjadi prioritas untuk diangkat sebagai guru. Mekanisme pengadaan guru semacam itu jelas kontra-profesional, atau bahkan anti-profesional.

Layanan profesional diberikan berdasarkan keahlian khusus untuk kemaslahatan klien. Oleh karena itu karakteristik profesi selanjutnya adalah pemberian layanan ahli yang bersifat *knowledge-based* dan *client-oriented* (Darling-Hammond, 1997: 298; dan Darling-Hammond, Wise, dan Klein, 1999: 16). Hal demikian berarti bahwa para pemegang profesi ini harus berkomitmen untuk menjamin bahwa layanan ahli yang diberikan menempatkan kepentingan klien sebagai prioritas utama, dan layanan tersebut dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan yang terbaik, sehingga benar-benar bermanfaat secara optimal bagi klien yang dilayani.

Dalam bidang kependidikan-keguruan, meskipun sebagian pihak tetap meragukan, namun dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya pengutamaan klien telah menjadi misi utama dari profesi guru. Hal ini dapat diidentifikasi dari berbagai proses pembelajaran yang berorientasi kepada murid (*student oriented*) atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student centered*). Dengan demikian tolok ukur kinerja profesi guru adalah keberhasilan dalam menumbuh-kembangkan peserta didik secara optimal. Para pemegang profesi guru harus mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia seutuhnya.

Pelaksanaan tugas tersebut memerlukan kesadaran dan komitmen diri yang tinggi, kemauan dan keuletan untuk meningkatkan kemampuan profesional secara

berkelanjutan, dan kesediaan untuk memberikan layanan terbaik kepada peserta didik. Persyaratan mental seperti itu tampak sungguh sulit dipenuhi oleh para penyandang profesi guru karena pada umumnya profesi ini merupakan pilihan pekerjaan kedua atau ketiga dan seterusnya. Profesi guru, tak dapat dipungkiri, seringkali bukan merupakan pilihan utama, atau bukan panggilan jiwa. Pilihan menjadi guru didasarkan lebih kepada adanya keterbatasan intelektual, atau pertimbangan keterbatasan kemampuan ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh deMarrais dan LeCompte (1995: 141) sebagai berikut.

*“Whether male or female, teachers are likely to have selected teaching as second choice. The decision to teach is often made relatively late in college as students find that they lack the ability or financial and familial support to pursue more desirable career”.*

Keterbatasan intelektual dan finansial semacam itu pada dasarnya juga mewarnai pilihan menjadi guru di tanah air. Keterbatasan intelektual dan ekonomi seringkali memaksa seseorang untuk memilih kuliah di bidang pendidikan dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang jelas sebagai guru segera setelah lulus. Dengan latar belakang kemampuan intelektual dan motif dasar para pemegang profesi guru semacam itu, jelas menjadikan profesi ini tidak dapat diandalkan karena ujung-ujungnya justru dapat mengarah kepada situasi kontra-profesional.

Karakteristik lain dari profesi ideal adalah layanan ahli yang diberikan berimplikasi pada perolehan pembayaran langsung dari penerima layanan tersebut. Bagi guru di tanah air, karakteristik ini diwujudkan dalam pemberian tunjangan profesi sebesar gaji pokok per bulan setelah yang bersangkutan mendapatkan sertifikat pendidik. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa tunjangan profesi tersebut tidak dapat diterimakan secara rutin per bulan. Lebih dari itu, pemberian tunjangan profesi tersebut memerlukan persyaratan tertentu di luar kemampuan guru, atau tidak selalu terkait dengan kemampuan profesional guru, seperti: beban kerja mengajar, dan rasio minimal jumlah peserta didik. Dengan kata lain, mekanisme pemberian tunjangan profesi guru sebenarnya bersifat kontra-profesional karena persyaratan yang ditentukan di luar jangkauan atau tidak ada hubungannya dengan kemampuan profesional guru.

### **Akar masalah: akuntabilitas ganda kerja guru**

Lembaga pendidikan atau persekolahan merupakan bagian dari sistem politik lokal dan nasional (negara) yang menuntut akuntabilitas terhadap “apa yang diajarkan” dan “apa yang dipelajari” (Johnson, 1990: 145). Sementara itu deMarrais dan LeCompte (1995: 166) mengemukakan bahwa “*How teaching is carried out and who is permitted to teach is more a function of external political, ideological, and economic pressures than of concerns over expertise and technical skill*”. Adapun Mohamad Surya (2003: 355) mengemukakan bahwa “Secara profesional, guru sesungguhnya memiliki otonomi pedagogis dalam pelaksanaan pendidikan di tingkat instruksional (meskipun hal ini belum terwujud secara nyata, karena masih kuatnya dominasi birokrasi dan administratif)”. Ungkapan senada juga dikemukakan oleh Hoy dan Miskel (2008: 126) yang mendeskripsikan situasi konflik pada lingkungan tugas guru sebagai berikut:

*“Given bureaucratization of schools and the growing professionalization of teachers, continued conflict seem likely. In teaching, the immediate issues of conflict revolve around the amount of control teachers should have over the selection of textbooks, teaching procedures and methods, and curriculum reform and development; however, the underlying issue is peculiar neither to teaching nor to school organizations. The conflict is between professional expertise and autonomy and bureaucratic discipline and control”.*

Berbagai paparan pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya para guru bekerja dalam situasi tekanan disiplin birokrasi dan tuntutan profesional yang tidak selalu sejalan. Dalam kondisi semacam itu, sekolah seringkali lebih memprioritaskan tuntutan birokrasi daripada kebutuhan akademis guru dan kepentingan pembelajaran peserta didik. Misal guru seringkali tunduk terhadap perintah untuk mengupayakan jumlah siswa yang lulus sebanyak mungkin, atau bahkan seratus persen, agar dinas pendidikan setempat dinilai berhasil, tanpa memperhatikan bahwa cara-cara yang dilakukan sesungguhnya bertentangan dengan prinsip akademik dan etika profesi; yang berarti pula kontra atau anti-profesional.

Akuntabilitas birokrasi selalu bersifat preskriptif imperatif, yakni mendasarkan kinerja guru kepada ketaatan kaku dalam melaksanakan perintah sesuai dengan prosedur operasional standar atau *standard operating procedure* (SOP). Sementara itu akuntabilitas profesional menuntut proses pembelajaran yang



efektif. Proses pembelajaran yang efektif tersebut memerlukan fleksibilitas, strategi yang beragam, dan penggunaan pertimbangan yang kompleks dalam situasi non-rutin dimana berbagai tujuan harus dicapai (Darling-Hammond, 1997: 66). Dengan demikian kondisi tersebut menempatkan guru pada struktur tugas yang kontradiktif antara tuntutan jabatan birokrasi dengan implementasi otonomi profesi. Konsekuensinya di satu pihak, para guru harus bekerja dengan berbagai target eksternal dengan mengikuti aturan-aturan administratif yang bersifat restriktif; dan di pihak lain, guru tersebut dituntut kemandirian dan kreativitasnya untuk melayani beragam kebutuhan peserta didik.

### **Membangun profesi yang bermartabat dan berwibawa**

Johnson (1990: 144) mengemukakan bahwa *“Teachers in all schools clearly believed that highly bureaucratic schools, whether in the public or private sector, made poor use of them as professionals”*, artinya para guru di seluruh sekolah jelas percaya bahwa sekolah dengan sifat birokrasi tinggi, baik negeri maupun swasta, membuat lemah posisinya sebagai profesional. Sementara itu Darling-Hammond (1997: 65) berpendapat bahwa *“Ironically, the major consequence of bureaucratic efforts to improve schools has been a set of accountability practices that often impede student learning”*. Jadi sungguh ironis, konsekuensi pokok dari berbagai upaya birokratis untuk mengembangkan sekolah telah melahirkan seperangkat pelaksanaan akuntabilitas yang seringkali menghalangi belajar siswa. Adapun Mohamad Surya (2003: 18) mengungkapkan bahwa: *“Selama ini penyelenggaraan pendidikan lebih banyak didominasi dengan paradigma birokrasi yang berakibat lembaga pendidikan dan lingkungannya kurang memiliki keberdayaan dalam mewujudkan kinerjanya”*.

Berbagai ungkapan tersebut, dan juga paparan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan praktek manajemen guru dengan menggunakan paradigma birokratis yang menjadikan profesi guru tidak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal sebagaimana terjadi pada profesi yang sudah mapan seperti dokter, pengacara, dan akuntan. Sehubungan dengan itu untuk membangun profesi guru menjadi profesi yang berwibawa dan bermartabat, berbagai standar profesi yang ketat sudah selayaknya untuk diterapkan atau

ditegaskan dalam manajemen guru, sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Darling-Hammond, Wise, dan Klein (1999: 6) bahwa "... *the establishment of rigorous professional standards for entry into the teaching profession will both improve the quality of teaching and help establish teaching as a respected and responsible profession*". Jadi penerapan standar profesional yang ketat untuk memasuki profesi guru, selain dapat meningkatkan martabat dan kewibawaan profesi guru tersebut, juga sekaligus dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai *core business* dari profesi guru. Artinya juga bahwa profesi ini menempatkan kepentingan dan kemaslahatan peserta didik dalam memberikan layanan ahli proses pembelajaran.

Pengembangan profesi guru harus dilakukan secara sinergis pada tataran sistem manajemen guru dan pada tataran individu, dengan misi utama peningkatan layanan pembelajaran untuk mengembangkan keseluruhan potensi peserta didik secara optimal. Pada tataran sistem, penerapan standar profesional perlu dilakukan dari mulai pendidikan untuk menyiapkan calon guru, pengangkatan dan penempatan, pembinaan dan pengembangan, sampai pemberhentian penugasan guru. Standarisasi sistem manajemen guru ini sangat penting, sebab sebagaimana pernyataan Darling-Hammond et al. (2006: 313) bahwa "... *governmental management or mismanagement of labor markets for teaching has strong effect on who can be recruited and how programs can be structured*". Jadi manajemen guru sangat menentukan siapa yang layak direkrut sebagai guru, dan bagaimana mempersiapkan calon guru. Dengan kata lain manajemen guru harus mampu menyeleksi guru yang memiliki kompetensi profesional, dan oleh karena itu dapat dijadikan rujukan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penyiapan calon guru yang memenuhi syarat kompetensi tersebut.

Sehubungan dengan sistem manajemen guru tersebut, Darling-Hammond dan Sykes (1999: 382) mengemukakan beberapa persoalan kunci yang perlu dikembangkan menjadi kebijakan dalam pengelolaan guru sebagai profesi, yaitu:

- (1) menarik, merekrut, dan mempertahankan orang-orang yang memiliki kemampuan dan minat kuat untuk mengajar dengan baik;
- (2) membantu para guru mengembangkan norma-norma, pengetahuan, dan keterampilan profesional; dan

(3) menciptakan insentif dan kondisi organisasi yang mendukung guru dan pembelajaran peserta didik di sekolah.

Misi utama sekolah adalah membantu perkembangan belajar peserta didik. Untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan guru-guru yang memiliki kompetensi profesional tingkat tinggi. Oleh karena itu profesionalisasi berkelanjutan bagi guru menjadi strategi kunci untuk mencapai keberhasilan sekolah, dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan tersebut harus dibangun sebagai rutinitas sekolah. Namun demikian, guru tidak boleh bergantung sepenuhnya pada upaya kelembagaan sekolah atau dinas pendidikan. Pada tataran individual, para guru harus mampu melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dengan atau tanpa fasilitasi dari lembaga tempat pengabdian tugasnya.

PerDalin, Rolff, dan Kleekamp (1993: 5) mengemukakan bahwa masyarakat berubah, demikian pula kita, peserta didik, para guru, dan para manager sekolah. Ekspektasi kita terhadap tempat kerja, peran, proses pembelajaran juga mengalami perubahan. Tantangan-tantangan perubahan eksternal dan internal tersebut menuntut lebih banyak sumberdaya, lebih banyak kompetensi, kepemimpinan, dan metode-metode pemecahan masalah yang sangat berbeda.

Demikian pula yang dinyatakan oleh Hughes (1991: 13-15), pengaruh perubahan terhadap guru, antara lain: *pertama*, perubahan struktur interelasi kelompok (seperti akibat perubahan teknologi, hubungan ekonomi dengan negara lain, perubahan hubungan sosial). Perubahan ini menuntut sekolah dan para guru untuk memberikan prinsip-prinsip fundamental agar siswa mampu menjalani kehidupan dalam situasi yang selalu berubah. *Kedua*, negara dan bangsa juga mempunyai ekspektasi baru terhadap sekolah, misal untuk pelaksanaan wajib belajar, peningkatan kualitas sumberdaya manusia atau terkait dengan upaya peningkatan daya saing bangsa. *Ketiga*, perubahan-perubahan penting dalam ilmu pengetahuan yang mendasari kehidupan profesional guru, seperti pendekatan belajar mengajar, dan pengakuan terhadap keutuhan potensi peserta didik. *Keempat*, tuntutan kepada para guru dan kepala sekolah, terkait dengan keterlibatan orang tua murid dan masyarakat di dalam pengambilan keputusan di sekolah. Pada akhirnya “*all these pressures on schools require a new political*

*wisdom from teachers*”. Jadi berbagai perubahan dan tantangan tersebut menuntut kemampuan lebih dari para guru, dan secara individual memerlukan kearifan politis guru.

## **KESIMPULAN**

Profesi guru telah mendapatkan pengakuan legal formal yang berbeda dari perkembangan profesi lain yang sudah mapan seperti dokter, pengacara, dan akuntan. Pengakuan keprofesionalan tersebut tampaknya lebih bersifat politis dan ekonomis, sehingga banyak terjadi tindakan-tindakan manajemen guru yang justru bersifat kontra-profesional atau bahkan anti-profesional, seperti pendidikan dan/atau pelatihan penyiapan calon guru yang berjalan sesaat dan tanpa menjaga linieritas bidang keilmuan yang dimiliki calon guru, rekrutmen guru berdasarkan kesediaan membayar, dan pemberlakuan persyaratan pemberian tunjangan profesi di luar kompetensi profesional guru. Fenomena kontra-profesional atau anti-profesional semacam itu jelas menjadi penghambat profesi guru untuk tumbuh-kembang menjadi profesi yang berwibawa dan bermartabat.

Sementara terdapat berbagai tindakan kontra/anti-profesional, profesi guru berlangsung dalam kawasan tugas yang memiliki akuntabilitas ganda; yakni antara kewajiban untuk memenuhi target-target administratif birokrasi yang restriktif dan tuntutan kemandirian dan kreativitas yang fleksibel dalam menyelenggarakan layanan ahli proses pembelajaran untuk mengembangkan keseluruhan potensi peserta didik secara optimal. Sehubungan dengan itu diperlukan upaya sinergis pada tataran sistem manajemen guru dan pada tataran individual guru untuk secara konsisten menerapkan standar profesional mulai dari pendidikan penyiapan calon guru, pengangkatan dan penempatan, pembinaan dan pengembangan, sampai pada tahap pemberhentian guru. Selain itu pada tataran individual, para guru perlu membangun kesadaran dan komitmen yang kuat untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan, sesuai dengan perubahan, perkembangan dan kemajuan lingkungan (termasuk IPTEKS) demi peningkatan kualitas layanan ahli proses pembelajaran kepada para peserta didik. Dengan demikian sinergitas dan komprehensivitas dalam penerapan standar profesional pada setiap tahap manajemen guru pada

dasarnya dapat menjadi jaminan untuk menjadikan profesi guru sebagai profesi yang berwibawa dan bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darling-Hammond, L. (1997). *The Right to Learn: A Blueprint for Creating Schools That Work*. San Francisco: Jossey-Bass John Wiley & Son, Inc.
- Darling-Hammond, L. et al. (2006). *Powerful Teacher Education: Lessons from Exemplary Programs*. San Francisco: Jossey-Bass John Wiley & Son, Inc.
- Darling-Hammond, L. and Bransford, J. (Eds) (2005). *Preparing Teachers for A Changing World*. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
- Darling-Hammond, L. and Sykes, G. (Eds) (1999). *Teaching as Learning Profession: Handbook of Policy and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
- Darling-Hammond, L., Wise, Arthur E. and Klein, Stephen P. (1999). *A Licence to Teach: Rising Standards for Teaching*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- deMarrais, Kathleen B, and LeCompte, Margaret D. (1995). *The Way Schools Work: A Sociological Analysis of Education*. 2<sup>nd</sup> Ed. New Yersey: Longman Publishers USA.
- Hoy, Wayne K. dan Cecil G. Miskel. (2008). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. New York: McGraw-Hill Higher Education.
- Hughes, Phillip. (Ed.). (1991). *Teacher's Professional Development*. Victoria Australia: The Australian Council for Education Research Ltd.
- Johnson, Susan M. (1990). *Teachers at Work: Achieving Success in Our Schools*. USA: BasicBooks A Division of HarperCollins Publishers.
- Mohamad Surya. (2003). *Percikan Perjuangan Guru*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Per Dalin, Hans-Günter Rolff, and Bab Kleekamp. (1993). *Changing The School Culture*. London: Cassel – The IMTEC Foundation.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Depdiknas.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*. Jakarta: Depdiknas.

**BIODATA:**

*Udik Budi Wibowo* adalah staf akademik pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Yogyakarta. Selain mengajar, yang bersangkutan pernah menjadi Pemimpin Proyek Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud (1994-2000), konsultan pada Madrasah Education Sub-sector Assesment (MESA) Departemen Agama (2003), konsultan Perpustakaan Nasional (2004), konsultan Bank Dunia untuk pelaksanaan Pilot dan penyiapan Program BERMUTU pada Ditjen PMPTK Depdiknas (2005-2006), asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mulai tahun 2000 sampai sekarang, dan beberapa tim adhoc terkait dengan pengembangan PGSD pada Ditjen Dikti (2001 sampai sekarang).

# **Memulihkan Kesemrawutan dalam Praktik Pendidikan di Sekolah**

Oleh  
**Abdullah Pandang**

Makalah pada Seminar Nasional Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia  
(ISPI) dan Universitas Negeri Yogyakarta dengan tema  
“Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan”.  
Yogyakarta, 21-22 Januari 2012

## Memulihkan Kesemrawutan dalam Praktik Pendidikan di Sekolah

Abdullah Pandang<sup>1</sup>

**Abstrak.** Hasil berbagai survey internasional berkaitan kinerja dan kualitas sumberdaya manusia hampir selalu yang menempatkan Indonesia pada peringkat bawah. Buruknya kualitas sumberdaya manusia Indonesia tersebut diduga kuat berhubungan dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan kita. Karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk membedah perosoalan pendidikan guna mengenali penyakit yang membelenggu penyelenggaraan pendidikan kita. Makalah ini mencoba menunjukkan beberapa bentuk kesemrawutan yang menjadi “penyakit kronis” dalam praktik pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Ada empat kesemrawutan yang menjadi fokus pembahasan, yaitu diskontinu tujuan pendidikan nasional dalam tujuan pembelajaran di sekolah; diskontinu tujuan pendidikan dalam praktik pembelajaran di sekolah; disharmoni berbagai aktivitas dalam proses pendidikan dan pembelajaran; dan inkonsistensi tujuan pendidikan dengan fokus dalam evaluasi. Berbagai distorsi dalam penyelenggaraan pendidikan ini perlu dicermati dan dibenahi guna memulihkan pendidikan agar dapat berfungsi normal kembali dalam memproses dan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

**Kata-kata kunci:** kualitas SDM, mutu pendidikan, kesemrawutan pendidikan.

### PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya. Dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, suatu bangsa akan dapat menghadapi, mengelola, dan menuntaskan permasalahan dan tantangan yang dihadapinya. Itu sebabnya, setiap bangsa selalu berupaya membangun dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya.

Pendidikan merupakan wahana utama untuk meningkatkan kualitas hidup sumberdaya manusia. Pendidikanlah yang diharapkan menjadi tumpuan dalam melahirkan sumberdaya manusia yang mampu mengatasi problem kehidupan yang makin kompleks, baik yang dihadapi oleh masing-masing individu, maupun yang

---

<sup>1</sup> Abdullah Pandang adalah dosen pada Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FIP UNM, sedang menempuh studi S3 pada program studi Ilmu Pendidikan di PPS UNM



dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan komunitas global. Sebaliknya, pendidikan juga yang dijadikan kambing hitam bagi kegagalan suatu bangsa dalam memajukan sumberdaya manusianya.

Dalam kenyataan, berbagai data hasil survey internasional terkait dengan kinerja pembangunan dan kualitas sumberdaya manusia hampir selalu menempatkan Indonesia pada posisi peringkat terakhir. Data tentang peringkat **Indeks Pengembangan Manusia** (*Human Development Index*), misalnya menunjukkan, Indonesia masuk kelompok *Medium Human Development*, yaitu menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), ke-109 (1999) dan ke-111 (2007) dari 182 negara. Laporan *United Nation Development Program* (UNDP) tahun 2011 menunjukkan peringkat Indonesia ini adalah 0,617 atau sedikit naik dari IPM 2010 yaitu 0,6. Namun dari segi peringkat, kualitas hidup manusia Indonesia kini berada di posisi ke-124 dari 187 negara, melorot jauh dari urutan ke-108 pada tahun lalu. IPM Indonesia tersebut masih di bawah IPM negara-negara Asia Timur dan Pasifik yang berada di angka 0,671. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia hanya unggul dari negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Sekadar perbandingan, Malaysia memiliki IPM 0,761 dan membuat negeri jiran itu bertengger di peringkat ke-61 dunia dan peringkat kedua di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Indonesia bahkan masih kalah dari Filipina dengan IPM 0,644 atau peringkat ke-112 global.

Peringkat IPM tersebut sejalan pula dengan hasil penilaian terhadap kinerja di bidang pendidikan. Menurut hasil survei *World Competitiveness Year Book* dari tahun 1997 sampai tahun 2007 pendidikan Indonesia juga selalu berada dalam urutan-urutan terakhir. Pada tahun 1997, Indonesia berada di urutan 39 dari 49 negara yang diteliti, tahun 1999 di urutan 46 dari 47 negara, tahun 2002 di urutan 49 negara, dan tahun 2007 menempati urutan ke 53 dari 55 negara yang disurvei. Sementara itu, Pendidikan Balitbang Kemdiknas (2011) merilis hasil studi internasional tentang literasi membaca untuk siswa sekolah dasar (*Progress in International Reading Literacy Study*, PIRLS), tahun 2006 yang menunjukkan bahwa rata-rata skor prestasi literasi membaca siswa kelas IV Indonesia (405) berada signifikan di bawah rata-rata internasional (500). Indonesia berada pada posisi 41 dari 45 negara peserta.

Di bidang politik dan ekonomi, Indonesia juga menunjukkan kinerja yang amat buruk. Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), yang dirilis pada bulan Maret 2010, masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik. Jajak pendapat yang melibatkan 2.147 eksekutif bisnis internasional dari 16 negara itu memberikan skor 9,27 (angka paling buruk 10 ) untuk Indonesia. Di bidang ekonomi, data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia* (2000), juga menunjukkan Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.

Berbagai data tersebut, langsung atau tidak langsung, akan berkaitan dengan kualitas pendidikan. Semua kinerja yang rendah tersebut diduga kuat dikontribusi oleh kualitas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Karena itu, menarik untuk membedah system dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia guna mengenai “penyakit kronis” yang mungkin menjangkiti praktik pendidikan kita. Makalah ini mencoas menyoroiti beberapa persoalan dalam praktik pendidikan dan pembelajaran di Indonesia, dan beberapa tawaran upaya restorasi dan reorientasi yang dibutuhkan.

## **PEMBAHASAN**

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia bila dikomparasi dengan capaian bangsa-bangsa lain, seperti diindikasikan oleh sejumlah hasil survey sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan, adalah cerminan kualitas pendidikan kita. Bila pendekatan sistem digunakan dalam meneropong praktik pendidikan dan pembelajaran di sekolah, yang terlihat dalam teropong tersebut adalah rangkaian komponen pendidikan yang tidak beraturan, terpilah, dan cenderung bekerja secara parsial. Kesemrawutan dan ketidakteraturan dalam praktik pendidikan dan pembelajaran, antara lain terlihat pada kasus-kasus berikut:

### **1. Diskontinu tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembelajaran di sekolah**

Dalam Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Ditegaskan pula bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jika dicermati, tampak bahwa dalam rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut, tercakup semua dimensi kecerdasan yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang unggul, baik spritual, emosional, sosial, maupun intelektual.

Secara konseptual, rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut menjadi acuan dan arah dalam menjabarkan tujuan institusional (standar kompetensi lulusan) setiap satuan pendidikan. Selanjutnya, tujuan institusional ini menjadi acuan dan arah penjabaran tujuan kurikuler (standar kompetensi mata pelajaran), dan seterusnya dijabarkan lagi menjadi lebih spesifik sebagai tujuan instruksional (kompetensi dasar). Jika rangkaian penjabaran ini berjalan lurus dan konsisten, maka kompetensi-kompetensi perilaku yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional akan juga terefleksikan dalam rumusan tujuan instruksional dalam pembelajaran di sekolah.

Dalam praktik penyelenggaraan pendidikan, pola penjabaran rumusan tujuan pendidikan seperti yang disebutkan di atas ternyata “jauh panggang dari api”. Sejumlah kompetensi perilaku dan dimensi kecerdasan yang termaktub dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, khususnya yang terkait dengan kecerdasan emosional, sosial, dan spritual, seperti “memiliki kekuatan spritual keagamaan”, “pengendalian diri”, “kepribadian”, atau “akhlak mulia”, penjabarannya ke bawah, makin lama makin kabur dan kehilangan jejak. Kompetensi-kompetensi ini meskipun masih disebutkan kembali pada rumusan tujuan institusional, namun mulai kabur dalam rumusan tujuan kurikuler (standar kompetensi), dan hilang pada tataran tujuan instruksional (kompetensi dasar) pada berbagai mata pelajaran. Kondisi ini menjadi persoalan karena dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru umumnya hanya mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Akibatnya, kompetensi-kompetensi yang terkait dengan kecerdasan emosional, sosial, dan spritual tidak lagi menjadi target yang perlu dicapai dalam perumusan tujuan pembelajaran di sekolah.

Kompetensi-kompetensi semacam itu, tampaknya hanya dibebankan pada beberapa mata pelajaran, seperti pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Ini tentu tidak cukup. Ini terutama setelah melihat dalam praktik, proses pembelajaran mata-mata pelajaran tersebut juga cenderung hanya mengembangkan aspek kognitif dari perilaku moral dan keberagamaan. Oleh karena itu, setiap mata pelajaran di sekolah perlu bertanggung jawab untuk ikut merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan yang terkait dengan kecerdasan non-intelektual itu.

## **2. Diskontinu tujuan pendidikan ke dalam praktik pendidikan**

Fokus utama pendidikan adalah terselenggaranya proses pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. Selanjutnya, esensi proses belajar adalah terjadinya perubahan (kognitif, afektif, dan psikomotorik) pada diri peserta didik. Jika tujuan pendidikan di arahkan kepada pencapaian perilaku X, misalnya, maka seharusnya, semua upaya dan daya hendaknya difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian perilaku X tersebut.

Apakah penyelenggaraan pendidikan kita telah berjalan seperti skema tersebut? Tampaknya, tidak selalu demikian, bahkan mungkin kebanyakan tidak demikian. Banyak aktivitas utama yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah tidak berfokus langsung pada implementasi hakikat pendidikan dan pembelajaran seperti ini. Aktivitas dalam penyelenggaraan dan proses pendidikan, ternyata hanya berkutat pada sisi *peripheral* (tidak esensial, sekunder) dari pendidikan dan pembelajaran. Kesibukan kerja, pengadaan barang dan peralatan, pelaksanaan program atau proyek, dalam rangkaian kegiatan atas nama pendidikan, dilaksanakan sekedar ada kegiatan dan kesibukan, terkadang bahkan sekedar menjadi alasan untuk memperoleh keuntungan ekonomis.

Pada tingkat sekolah, terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan bagaimana energi guru terkuras untuk merampungkan tugas-tugas sekunder ketimbang mencurahkan perhatian pada tugas primernya, yaitu mengajar di kelas. Namun demikian, dalam berbagai diskusi penulis dengan sejumlah guru pada berbagai kesempatan, khususnya pada jenjang SD, terungkap bagaimana energi mereka terkuras untuk melaksanakan sejumlah tugas administratif sekaitan dengan tugas

pembelajaran mereka. Sebagai guru kelas, mereka harus menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada setidaknya lima mata pelajaran pokok. Di beberapa tempat di Sulawesi Selatan, penyusunan silabus dan RPP ini ternyata masih mengharuskan guru menuliskannya dengan tulisan tangan. Dan seperti yang diakui oleh sejumlah guru yang diteliti (Pandang, dkk, 2003), pekerjaan semacam ini sungguh menguras energi. Kesempatan guru untuk menyiapkan diri dengan informasi dan menguasai bahan terkait dengan mata pelajaran yang akan diajarkan menjadi semakin sempit. Pada hal, menurut mereka, silabus dan RPP yang dibuat itu umumnya tidak sungguh-sungguh menjadi acuan pelaksanaan pembelajaran di kelas. RPP dibuat sekedar sebagai bahan yang dipersiapkan untuk menghadapi supervisi dan pengawasan dari kepala sekolah dan pengawas.

Fokus dan alokasi pembiayaan dan penganggaran pendidikan, pada berbagai level pembangunan, juga seringkali menunjukkan fenomena yang timpang. Idealnya sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang bermutu di kelas. Tapi kenyataannya, seringkali terlalu banyak anggaran yang dihabiskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat sampingan, seperti perjalanan dinas, perlatan dan fasilitas kantor, dan memorduakan pengalokasian dana pada kegiatan yang primer dan esensial bagi peningkatan pembelajaran. Di beberapa sekolah, misalnya, seringkali kita melihat pemandangan yang paradox. Di satu sisi, tampak kantor kepala sekolah yang dipenuhi sejumlah fasilitas yang relatif mewah, seperti AC, TV, ataupun perangkat lain yang dapat memberi rasa nyaman. Tetapi di sisi lain, terlihat ruang dan fasilitas untuk membelajarkan peserta didik justru kondisinya kurang kondusif, karena banyaknya fasilitas pembelajaran (bangku, meja, papan tulis, dsb) yang rusak, ruang dan peralatan laboratorium yang tidak tersedia, ataupun media dan sumber pembelajaran yang minim.

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah juga tampaknya telah bergerak ke arah yang tidak menuju pada pencapaian tujuan esensial pendidikan. Peserta didik mengikuti pelajaran agar bisa memperoleh nilai tinggi, mengikuti ujian agar bisa lulus dan mendapatkan ijazah, meskipun tanpa harus mengerti dan menguasai betul apa yang dipelajari. Sejumlah sekolah pun menghabiskan sebagian besar energi untuk membantu peserta didik untuk sukses dan lulus ujian nasional demi

memperbaiki citra sekolah, bukan agar peserta didik mampu menguasai standar kompetensi lulusan yang seharusnya mereka kuasai. Kegiatan ekstrakurikuler dirancang, bukan terutama sebagai kesempatan belajar mewujudkan potensi diri, melainkan sebagai upaya memperoleh gelar dan penghargaan dalam lomba-lomba antar sekolah. Masyarakat juga lebih cenderung memandang sekolah hanya sebagai batu loncatan untuk mendapatkan ijazah dan untuk memasuki dunia kerja.

Proses pendidikan di sekolah kini terjerumus ke proses simbolisasi, yaitu proses penyimbolan atau pemberian label kepada individu atas kehadirannya di sekolah. Anak mengikuti rangkaian kegiatan persekolahan hanya agar mendapatkan selembar ijazah, bukan untuk memiliki kompetensi yang diperlukan. Itu sebabnya, semakin banyak orang mencari ijazah pada berbagai jenjang pendidikan, tanpa harus belajar secara sungguh-sungguh. Semakin sulit kita memastikan apakah masih ada korelasi positif antara nilai yang diperoleh dan ditertuang pada buku rapor atau kartu tanda tamat belajar dengan takaran kompetensi yang sungguh-sungguh dimiliki oleh peserta didik. Juga semakin sulit kita menjamin, bahwa pemilik ijazah dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat penguasaan kompetensi yang lebih baik daripada para pemilik ijazah pada jenjang di bawahnya.

### **3. Disharmoni aktivitas dalam rangkaian proses pendidikan dan pembelajaran**

Problem lain yang teramati terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, adalah ketidakserasian di antara sejumlah program dan kegiatan pendidikan. Dalam pendekatan sistem, selain semua aktivitas dan kinerja komponen harus mengacu kepada pencapaian tujuan, juga semua aktivitas dan komponen yang terlibat harus dapat bekerja serasi dan bersinergi. Namun kenyataannya, sejumlah aktivitas dan komponen program yang tercakup dalam penyelenggaraan pendidikan, seringkali berjalan sendiri-sendiri secara parsial. Banyak contoh kasus yang bisa menunjukkan bentuk ketidakserasian seperti ini. Ini terjadi, baik pada level nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun pada level sekolah.

Dalam lingkup penyelenggaraan pendidikan di sekolah, misalnya, ada tiga komponen penting yang seharusnya berjalan dan bekerja secara terintegrasi, yaitu komponen administrasi dan manajemen, komponen pembelajaran, serta komponen

pembinaan dan pengembangan diri peserta didik. Proses pendidikan di sekolah hanya dapat berjalan efektif jika ketiga komponen tersebut dapat berjalan serasi. Namun dalam praktik, ketiga komponen itu, ternyata tidak selalu berjalan dalam arah dan irama gerak yang sama. Proses manajemen dan administrasi yang dilakukan tidak selalu diarahkan untuk mengefektifkan fungsi pembelajaran dan pembimbingan. Proses administrasi tidak memberi dukungan dan fasilitasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pembelajaran dan pembimbingan. Sebaliknya, proses pembelajaran juga seringkali berjalan sendiri menurut desain guru, tanpa memperhatikan tata administrasi sekolah ataupun pemenuhan keperluan peserta didik berkaitan dengan kebutuhan pengembangan diri. Bergitu pula, pelaksanaan bimbingan dan kegiatan pengembangan diri peserta didik terkadang berjalan terseok-seok dan tidak dalam arah yang focus ke pencapaian tujuan pendidikan di sekolah.

Pelaksanaan pembelajaran antar berbagai mata pelajaran juga seringkali tidak berjalan serasi dan bersinergi. Setiap guru sibuk merampungkan target kurikulumnya masing-masing. Yang satu bisa berjalan lebih cepat atau lebih maju dari yang lainnya. Padahal, banyak pengalaman belajar dalam rangka pencapaian kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu terkait erat dengan pemberian pengalaman belajar pada mata pelajaran lainnya. Guru mata pelajaran IPA di SMA, misalnya, seringkali mengeluh karena ketidaktuntasan pemahaman peserta didik dalam kompetensi dasar tertentu dalam mata pelajaran matematika yang menjadi prasyarat dalam memahami suatu kompetensi dasar dalam mata pelajaran IPA.

#### **4. Inkonsistensi antara tujuan pendidikan dengan focus evaluasi pembelajaran**

Salah satu masalah paling krusial dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah persoalan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Sejatinya, evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengukur dan menilai ketercapaian tujuan pendidikan. Melalui evaluasi, diharapkan dapat diketahui seberapa jauh peserta didik telah mampu menguasai semua kompetensi yang menjadi target pendidikan. Dan evaluasi yang baik dan valid adalah evaluasi yang mampu memberi gambaran nyata dan objektif mengenai tingkat kemajuan belajar dan penguasai peserta didik akan suatu kompetensi yang seharusnya mereka kuasai setelah mengikuti suatu unit

kegiatan pembelajaran dan/atau suatu jenjang pendidikan. Kenyataannya, praktik evaluasi banyak yang tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah evaluasi seperti itu.

Banyak fakta yang menunjukkan buruknya proses evaluasi pendidikan di Indonesia. Angka-angka yang diperoleh peserta didik dan tercatat di rapor mereka terkadang tidak mewakili nilai kompetensi yang sesungguhnya dia miliki. Pada suatu FGD (Pandang, dkk, 2003), seorang guru SD, mengakui bahwa dirinya terkadang harus menambahkan angka pada penilaian rapor peserta didik agar peserta didik itu bisa naik kelas. Seorang guru SMP lainnya mengungkapkan bahwa di sekolahnya terkadang menerima peserta didik tamatan SD tertentu yang ternyata belum mampu membaca dengan lancar sehingga menyulitkan dalam pembelajaran.

Kesemrawutan evaluasi pendidikan juga terlihat dalam penyelenggaraan ujian nasional. Hampir setiap tahun kita terheran-heran melihat sekolah yang unggul dalam fasilitas dan kualitas ketenagaan ternyata harus menerima kenyataan buruk lebih banyak persentasi siswanya yang tidak lulus daripada sekolah dengan kualitas fasilitas dan kenegaan yang lebih rendah. Kesemrautan dalam pelaksanaan UN agaknya dipicu dan diperparah oleh perilaku tidak objektif dan tidak profesional dari sejumlah oknum pendidik. Pada berbagai kesempatan, penulis mendengar beberapa guru mengakui diperintahkan oleh kepala sekolah untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan soal ujian nasional agar bisa lulus.

Proses evaluasi di sekolah kini dapat diibaratkan dengan usaha pengukuran dan penimbangan dengan menggunakan timbangan rusak. Kita menggunakan 'timbangan rusak' dalam mengukur capaian belajar peserta didik ataupun dalam menilai kompetensi lulusan. Akibatnya, kita tidak dapat mengetahui ukuran sebenarnya dari penguasaan kompetensi lulusan pendidikan kita. Parahnya, proses evaluasi dengan 'timbangan rusak' ini pelan-pelan telah menjadi bagian kebiasaan yang berterima dalam praktik pendidikan kita dan mendapat dukungan sejumlah pihak yang diuntungkan oleh praktik itu. Sejumlah siswa mulai menarik diri dari keseriusan belajar dan lebih suka menunggu dievaluasi dengan 'timbangan rusak' ini. Sebagian orangtua pun kasak-kusuk mencari peluang bahkan mencoba menggoda guru dan kepala sekolah untuk bersedia menggunakan 'timbangan rusak' dalam pengukuran hasil belajar anaknya: dalam seleksi masuk, dalam ujian semester dan kenaikan kelas, hingga ketika mengikuti ujian akhir sekolah dan ujian nasional.



Inkonsistensi dan diskontinu dalam evaluasi pencapaian tujuan pendidikan, menurut Kartadinata (2009), merupakan bentuk simplifikasi arah dan tujuan pendidikan yang menimbulkan ketimpangan pencapaian tujuan individual dengan tujuan kolektif dan eksistensial. Simplifikasi berupa pemusatan tujuan pada tujuan individual yang bersifat intelektual yang diukur melalui ujian. Simplifikasi seperti ini bisa membuat proses pendidikan kering dari proses memanusiakan manusia. Dalam jangka panjang, ketimpangan pencapaian tujuan utuh pendidikan seperti ini amat berbahaya karena bisa menghasilkan manusia pintar tetapi egoistis, tidak peduli terhadap nilai-nilai kehidupan bangsa, dan bisa menimbulkan kerawanan nasional.

### **UPAYA RESTORASI**

Kesemrawutan dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah-sekolah kita, harus segera diakhiri. Berbagai distorsi dalam praktik pendidikan dan pembelajaran yang telah dikemukakan, harus diluruskan dan digiring kembali ke khittah, berjalan di rel yang benar untuk menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas. Menurut Kartadinata (2009), terapi dan pemulihan pendidikan harus diawali dari terapi dan pemulihan *mindset* utuh pendidikan bagi semua kalangan, baik legislatif, birokrat, pimpinan pendidikan, pendidik, maupun orang tua. Dengan perubahan *mindset* semua kalangan, maka praktik pendidikan dapat dikembalikan ke pusran intinya, yaitu proses yang sungguh-sungguh memberdayakan peserta didik.

Langkah penting lainnya yang perlu segera dilakukan adalah mereorientasi praktik dan pendidikan di sekolah agar fokus ke tujuan esensial pendidikan. Salah satu persoalan pokok yang harus diatasi adalah praktik simplifikasi dalam pendidikan, di mana praktik pendidikan hanya memusat pencapaian pada tujuan intelektual, yang ini juga hanya diukur berdasarkan hasil ujian tertulis (Kartadinata, 2009). Tujuan esensial pendidikan berkaitan dengan pemberdayaan dan pemampuan peserta didik agar bisa mandiri dan cakap mengatasi problem dan tantangan hidupnya. Ini akan mencakup pengembangan semua elemen kecerdasan, baik intelektual, sosial, emosional, maupun spiritual. Karena itu, semua usaha dan praktik pendidikan di sekolah harusnya dirancang untuk membantu setiap peserta menuju penguasaan tujuan esensial pendidikan seperti itu.

Dalam kaitan dengan pembenahan proses pembelajaran dan pendidikan, Suparlan Suhartono (2011) menawarkan gagasan tentang konsep pembelajaran mendidik dan pendidikan yang membelajarkan. Menurut beliau, pembelajaran haruslah mendidik, dan pendidikan haruslah membelajarkan. Dengan konsep ini, maka guru dan segenap tenaga pendidik di sekolah harus ‘berhijrah’ dari praktik pembelajaran yang ‘hanya mengajar’ menuju praktik pembelajaran yang mendidik, dari praktik pendidikan yang ‘hanya mendidik’ menuju pendidikan yang membelajarkan. Pembelajaran mendidik adalah pembelajaran yang membangun *hard-skills* dan *soft-skills* sebagai keutuhan. Pembelajaran mendidik mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan yang sekaligus diiringi pengembangan karakter, kerja keras, kejujuran, dan peduli mutu disertai dengan sistem evaluasi yang membangun objektivitas dan kejujuran (Kartadinata, 2009).

Pembenahan berikutnya adalah “menggiring” semua energi (kebijakan, kegiatan, fasilitas, instrument, anggaran) agar fokus ke “dapur” pendidikan, yaitu proses pembelajaran peserta didik. Selama ini energi kita hanya habis di kegiatan *peripheral* (perjalanan dinas, akomodasi, rapat, administrasi, monitoring, ataupun untuk memenuhi hasrat selebrasi penyelenggara pendidikan). Energi yang dimiliki mestinya dikontribusi sebesar-besarnya untuk mewujudkan proses pembelajaran peserta didik yang memenuhi standar pembelajaran mendidik. Sebagian besar energi guru habis di kelas, energi kepala sekolah habis dalam mensupport dan mendorong terlaksananya proses pembelajaran, energi dinas pendidikan dan kementerian pendidikan habis untuk menyediakan support terbaik bagi terselenggaranya proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

## **PENUTUP**

Pendidikan memegang peran penting dalam pembangunan sumberdaya manusia berkualitas. Karena itu, berbagai distorsi dan kesemrawutan yang menyelimuti penyelenggaraan pendidikan di Indonesia perlu segera dibenahi dan dipulihkan. Pemulihan mencakup usaha reorientasi *mindset* para penyelenggara pendidikan, reorientasi praktik pendidikan untuk lebih fokus ke tujuan esensialnya, implementasi pembelajaran mendidik, dan pengalihan energi dan sumberdaya dari aktivitas *peripheral* ke domain inti pendidikan, yaitu proses pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- BeritaDaerah.com (2011). *Indonesia di Belenggu Korupsi*. Online Beritadaerah.com  
Senin, 6 Juni 2011. Diunduh dari <http://beritadaerah.com/article/national/40186>, tanggal 2 Januari 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas
- Departemen Pendidikan Nasional (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas
- Dreamindonesia (2012). *Singkat Tentang Kualitas Pendidikan Kita*. Online  
<http://dreamindonesia.wordpress.com/tag/kualitas-pendidikan-indonesia>  
(diunduh tanggal 2 Januari 2012)
- Kartadinata, Sunaryo (2009). "Terapi dan Pemulihan Pendidikan". *Harian Pikiran Rakyat*, Senin 27 Juli 2009.
- Pandang, Abdullah (2008). "Mengefektifkan Pembelajaran di Sekolah". Dalam *Universitas Negeri Makassar Menggagas Pendidikan di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Pandang, A, Arimunandar, & Sunarty, K (2003). "Pengembangan Model Desain Pembelajaran Peka Gender". *Laporan Penelitian Tahun Pertama*. Dibiayai oleh Kementerian Ristek RI melalui Program Riset Unggulan Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (RUKK) 2003-2005.
- Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang (2011). *Survei Internasional PIRLS*. Online.  
<http://padepokanguru.org/2011/12/11/survei-internasional-pirls/#more-872>.  
Diunduh tanggal 2 Januari 2012.
- Shiddieqy, M. Ikhsan (2011). *Kualitas Manusia Indonesia Melorot*. Online.  
<http://harapan-umat.blogspot.com/2011/11/kualitas-manusia-indonesia-melorot.html> (diunduh tgl 2 Januari 2012).
- Suhartono, Suparlan (2011). *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

# **REDESAIN PENDIDIKAN GURU UNTUK MENDUKUNG PENDIDIKAN INKLUSIF**

## **Abstrak**

**Oleh: Pujaningsih M.Pd**

Tantangan dunia pendidikan terus berubah seiring kebijakan pemerintah serta tantangan di lapangan. Saat ini Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa semua orang maupun anak mempunyai hak yang sama seperti orang pada umumnya untuk mendapat akses fasilitas umum termasuk pendidikan. Setiap sekolah diharapkan inklusif tidak terbatas sekolah yang saat ini tercatat sebagai sekolah inklusif. Tantangan di lapangan juga menunjukkan: a) keberadaan anak dengan kebutuhan khusus usia sekolah masih banyak ditemui belum bersekolah, b) jumlah SLB terbatas, c) pelaksanaan pendidikan inklusif terkendala sikap dan kompetensi guru dan d) keberadaan anak dengan kebutuhan khusus tersebut hampir dapat ditemui di setiap sekolah reguler. Kesiapan kompetensi guru untuk menjawab hal tersebut menjadi pekerjaan besar bagi LPTK.

Kompetensi guru yang ada untuk saat ini perlu dievaluasi terkait dengan tantangan peserta didik dan kebijakan pemerintah. Kompetensi profesional memerlukan banyak penyesuaian terkait dengan keragaman peserta didik (salah satunya anak dengan kebutuhan khusus yang memerlukan layanan khusus).

Tiga alternatif yang dikemukakan untuk redesain pendidikan calon guru yang dikemukakan dalam makalah ini yaitu: a) Pengayaan materi perkuliahan keguruan yang menunjang kompetensi pedagogi, b) Pengambilan matakuliah dan atau PPL (praktik pengalaman lapangan) secara bersama antara calon guru umum/reguler dengan calon guru khusus untuk memberikan peluang membangun kolaborasi dan c) penambahan matakuliah baru (pengelolaan perilaku).

Kata kunci: pendidikan guru, pendidikan inklusif

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pendidikan guru menjadi ujung tombak kualitas pendidikan di suatu negara. Guru-guru yang berkualitas akan mampu menghadirkan proses belajar mengajar yang bermutu dan akan dihasilkan generasi penerus bangsa yang handal. Berbagai kebijakan perubahan kurikulum maupun kebijakan lainnya tidak akan menunjukkan hasil yang optimal apabila tidak didukung kualitas guru. Target standar minimal kelulusan UNAS yang telah dicanangkan juga memerlukan kepiawaian guru yang mampu menyeimbangkan antara fokus pendidikan yang tidak hanya mengejar prestasi semata. Tentu saja hal ini tidak semudah mengejar prestasi peserta didik yang ditentukan oleh mutu guru yang dikemukakan Rivkin, Hanushek, dan Kain (1998 dalam Rice JK. 2003) bahwa prestasi peserta didik ditentukan oleh kualitas guru.

Tantangan lain muncul ketika pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas pada akhir tahun 2011 setelah pada tahun 2007 menandatangani konvensi tersebut. Bersama Laos dan Filipina, Indonesia merupakan negara ke-3 yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka anak-anak dengan kebutuhan khusus berhak mendapat layanan fasilitas umum termasuk pendidikan tanpa diskriminasi. Persiapan kompetensi guru yang sesuai untuk menyambut langkah besar tersebut menjadi agenda panjang untuk dimulai dari LPTK sebagai pencetak guru dan mengawal kebijakan pemerintah.

Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2008 telah mengungkapkan 4 kompetensi guru beserta rinciannya secara jelas. Ke-empat kompetensi tersebut (kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional) saat ini dirancang diperoleh melalui pendidikan jenjang S-1 dan pendidikan profesi. Namun, ada satu hal yang belum menjadi perhatian dalam

proses pendidikan guru yaitu mempersiapkan guru untuk mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik yang beragam, termasuk anak dengan kebutuhan khusus.

Keberagaman profil peserta didik dapat ditemukan di setiap kelas. Penelitian Pujaningsih dkk., pada tahun 2002 di kecamatan Berbah menemukan anak dengan kesulitan belajar sebesar 36% dengan rincian 12% diantaranya *slow learner*, 16% berkesulitan belajar spesifik (*LD/learning disability*) dan 17% tunagrahita (*mentally retarded*). Hal tersebut mencirikan keberagaman potensi dan kebutuhan belajar yang perlu dipenuhi oleh guru. Untuk saat ini layanan tersebut dapat dijumpai di sekolah inklusif meskipun keberagaman tersebut dapat dijumpai di setiap sekolah. Situasi ini menjadi kurang menguntungkan bagi peserta didik yang mempunyai kesulitan belajar namun belum ditangani karena sekolah tidak inklusif.

Seiring bergulir isu pendidikan inklusif sejak awal tahun 2000 di Indonesia maka telah dijumpai matakuliah bermuatan ke-PLB an untuk jenjang pendidikan guru SD di beberapa LPTK negeri maupun swasta guna membekali pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Namun, ternyata hal tersebut belum memadai karena beberapa hal berikut: a) keberadaan anak berkebutuhan khusus tidak hanya dijumpai di jenjang SD, b) penanganan mereka memerlukan kolaborasi antara guru khusus dengan guru reguler dan ketrampilan kerjasama antar profesi ini belum dikembangkan di perguruan tinggi, c) pengalaman belajar yang membekali tentang pengetahuan penanganan anak berkebutuhan khusus masih difokuskan pada matakuliah tersendiri secara terpisah dan terintegrasi dengan matakuliah lain yang terkait. Berdasarkan ketiga hal tersebut maka kajian lanjut tentang redesign pendidikan calon guru untuk mendukung pendidikan inklusif dikemukakan.

## **2. Permasalahan**

- a. Keberagaman peserta didik di kelas dan jumlah ABK usia sekolah belum mendapat akses layanan pendidikan menjadi tantangan sekolah dan guru untuk mampu menangani peserta didik yang beragam.
- b. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan perluasan akses pendidikan untuk penyandang disabilitas juga turut mendorong penyesuaian proses pendidikan

guru untuk membekali ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman tentang pemberian layanan pendidikan untuk keberagaman anak (termasuk diantaranya anak dengan kebutuhan khusus atau dengan disabilitas).

- c. Proses pendidikan calon guru di jenjang S-1 maupun program profesi yang saat ini sudah maupun belum memperhatikan isu layanan untuk keberagaman anak memerlukan redesain dalam rangka menanggapi kebijakan pemerintah saat ini.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tantangan Pemenuhan Kebutuhan Peserta Didik dengan kebutuhan khusus**

Tantangan pemenuhan kebutuhan peserta didik yang beragam untuk saat ini antarlain sebagai berikut:

- a. Keberadaan peserta didik yang beragam di sekolah reguler maupun sekolah inklusi memerlukan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Keberagaman anak dengan kebutuhan khusus ditemukan di sekolah inklusi. Jumlah anak dengan kebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusi pada tahun 2007/2008 berdasarkan data Direktorat PK dan PLK sebanyak 15.144 anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Tunanetra sebanyak 385 anak
2. Tunarungu-wicara sebanyak 291 anak
3. Tuna grahita sebanyak 2219 anak
4. Tuna daksa sebanyak 267 anak
5. Tunalaras sebanyak 291 anak
6. Autis 230 anak
7. Tunaganda 45 anak
8. Kesulitan dan lamban belajar sebanyak 11.420 anak
9. Indigo sebanyak 32 anak (Sutji Harijanto, 2011).

Data di atas menunjukkan keberadaan anak dengan kebutuhan khusus di sekolah inklusi cukup beragam dan untuk penanganan mereka memerlukan kolaborasi

antara guru khusus dengan guru kelas. Hal ini masih menjadi kendala sampai saat ini.

Keberadaan anak dengan kebutuhan khusus selain di sekolah inklusi juga banyak ditemukan di sekolah reguler. Berdasarkan hasil penelitian Unik Ambarwati dkk (2011) menemukan bahwa di 10 SD di kota Yogyakarta selalu ditemukan anak dengan kesulitan membaca dengan persentase yang bervariasi. Hasil penelitian Pujaningsih dkk., pada tahun 2002 di kecamatan Berbah juga menemukan anak dengan kesulitan belajar sebesar 36% dengan rincian 12% diantaranya *slow learner*, 16% berkesulitan belajar spesifik (*LD/learning disability*) dan 17% tunagrahita (*mentally retarded*). Keberadaan anak-anak dengan kebutuhan khusus tersebut masih belum mendapatkan pelayanan yang memadai karena tidak ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Hasil penelitian tentang penerimaan guru terhadap anak dengan kesulitan belajar yang masih jarang dijumpai (Bryan, 1997; Sale & Carey, 1995 dalam Pavri & Luftig, 2000). Labeling 'bodoh' untuk anak-anak tersebut masih kerap ditemui saat interviu dengan guru. Situasi ini sering dijumpai dan penuturan guru-guru yang mengarah pada pemahaman yang kurang mengenai keberagaman peserta didik menjadi kendala dalam pemberian layanan kepada mereka.

- b. Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi masih mengalami banyak kendala.

Isyu pendidikan inklusif yang bergulir sejak tahun 2000 di Indonesia membawa pro dan kontra. Berbagai permasalahan yang timbul saat ini setelah lebih dari 10 tahun diimplementasikan dalam praktik pendidikan inklusif menunjukkan hambatan yang nyata pada sisi penerimaan. Hal ini terungkap dalam paparan laporan situasi pendidikan inklusif di Indonesia dan Malaysia pada seminar tanggal 3 November 2009 (Kompas, 4 November 2009) yang menemukan banyak orangtua enggan mengirim anak dengan berkebutuhan khusus ke sekolah biasa karena khawatir akan mendapat penolakan atau diskriminasi. Hambatan serupa juga ditemukan dalam seminar Agra bahwa hambatan sikap jauh lebih besar daripada kesulitan ekonomi (Stubbs, 2002).



Hasil monitoring sekolah inklusi oleh Direktorat PSLB menemukan bahwa sebagian besar **sekolah inklusi mengalami kesulitan dalam modifikasi kurikulum dan melakukan asesmen akademik dan non akademik** (Sutji Harijanto, 2011). Situasi tersebut menjadi berdampak negatif terhadap anak dengan kebutuhan khusus di sekolah inklusif ketika jumlah guru khusus terbatas sehingga fokus layanan berada pada guru reguler/kelas dengan penerimaan dan penguasaan ketrampilan mengajar peserta didik yang beragam masih bervariasi.

- c. Jumlah anak dengan kebutuhan khusus yang belum mendapat akses pendidikan Sutji Harijanto (2011) menuturkan bahwa jumlah anak dengan kebutuhan khusus di Indonesia yang belum mengenyam pendidikan sebanyak 231.371 (73,85%). Secara detil jumlah anak dengan kebutuhan khusus yang belum bersekolah di DIY berdasarkan jenis kekhususan adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Data anak dengan kebutuhan khusus berdasarkan jenis kekhususan di DIY

No	Jenis Kekhususan	jumlah ABK	bersekolah	tidak bersekolah	persentase tidak bersekolah
1	Tuna Netra	292	168	124	42%
2	Tuna Rungu	1136	824	312	27%
3	Tuna Grahita	4393	3458	935	21%
4	Tuna Daksa	951	224	727	76%
5	Tuna Laras	95	93	2	2%
6	ADHD	26	24	2	8%
7	Autis	279	275	4	1%
8	Ganda	754	433	321	43%
9	Lamban Belajar	614	614	0	0%
10	Kesulitan belajar	12	12	0	0%
11	Gangguan Komunikasi	12	6	6	50%
12	Kecerdasan diatas rata2	0	0	0	0%
Jumlah		8564	6131	2433	28%

Berdasarkan tabel 1 di atas anak tunadaksa paling banyak ditemukan belum mendapat akses pendidikan. Di sisi lain, apabila mereka dapat mengakses

sekolah reguler terdekat, maka mereka mempunyai peluang berhasil lebih besar dibandingkan anak dengan kebutuhan khusus lainnya meskipun di sekolah reguler yang belum menerapkan modifikasi kurikulum.

- d. Kesiapan sekolah maupun tenaga pengajar untuk mendukung implementasi sekolah inklusif belum ditunjang dengan bekal yang memadai sejak proses pendidikan guru.

Penelitian-penelitian terdahulu membuktikan bahwa guru mengajarkan apa yang mereka pikirkan (Edwards *et al.* 2006). Sikap menolak dari guru dan dukungan yang lemah terhadap kehadiran anak dengan kebutuhan khusus disebabkan oleh minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang anak dengan kebutuhan khusus. Latar belakang pendidikan yang tidak memberi bekal kepada guru tentang anak berkebutuhan khusus menyebabkan hampir semua guru reguler di sekolah dasar menghadapi permasalahan dalam menangani mereka. Disamping pengetahuan yang terbatas, penerimaan guru juga mempengaruhi perlakuan guru. Hal tersebut (penerimaan) juga masih jarang dijumpai (Bryan, 1997; Sale & Carey, 1995 dalam Pavri & Luftig; Cook, 2000) sehingga tidak heran bila pandangan negatif masih banyak tertuju pada anak dengan kebutuhan khusus. Pujian yang jarang dilakukan, harapan yang rendah, penolakan secara aktif, sering ditujukan kepada anak dengan kesulitan belajar dibandingkan dengan anak tanpa kesulitan belajar (Heron & Harris, 1993; Sitt *et al.* 1998 dalam Pavri & Luftig, 2000). Lopes *et al.* (2004) juga mengemukakan hal serupa bahwa guru reguler merasakan banyak beban ketika menghadapi anak dengan kesulitan belajar yang membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih banyak daripada teman-teman yang lain dan tidak menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Pengabaian terhadap kebutuhan anak tersebut dapat berdampak buruk pada anak-anak yang lain karena mereka belajar untuk tidak peduli pada teman yang 'lemah'. Rasa empati yang tidak berkembang pada anak-anak tersebut dapat berlanjut sampai mereka dewasa. Bagi anak dengan kebutuhan khusus, perlakuan lingkungan yang menolak dapat menyebabkan rendahnya penghargaan diri. Hal ini bertolak belakang dengan pendidikan inklusif seperti

yang dikemukakan oleh Johnsen & Skjorten (2004) bahwa pendidikan inklusif harus memberikan pendidikan yang akan mencegah anak-anak mengembangkan harga diri yang buruk serta konsekuensi yang dapat ditimbulkannya.

Kurikulum pendidikan guru di beberapa LPTK sudah membekali tentang pengetahuan anak dengan kebutuhan khusus dengan proporsi yang berbeda, sebagian diantaranya hanya memberikan khusus pada program studi PGSD. Selama ini pemberian matakuliah dilakukan terpisah dan belum terintegrasi dengan matakuliah lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan tantangan di lapangan yang menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan layanan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran di kelas. Modifikasi kurikulum dan perangkat pembelajaran yang mencakup modifikasi materi, media, metode serta evaluasi belajar selama ini masih menjadi tantangan di hampir semua sekolah inklusi.
- 2) Pemberian layanan untuk anak berkebutuhan khusus dilakukan secara kolaborasi antara guru khusus dan guru reguler/kelas. Kemampuan kolaborasi ini belum menjadi perhatian dalam proses pendidikan calon guru.

Urgensi penambahan sekolah yang mampu melayani anak berkebutuhan khusus (sekolah inklusif) seiring jumlah data anak berkebutuhan khusus yang belum mengenyam pendidikan menuntut kesiapan dari guru (reguler dan khusus). Penguasaan kompetensi guru (reguler dan khusus) yang mampu menangani berbagai ragam peserta didik (salah satu diantaranya anak dengan kebutuhan khusus) menjadi tanggungjawab LPTK untuk turut serta mendukung kebijakan pemerintah saat ini.

## **2. Pemuktakhiran Kompetensi Guru**

Perubahan tantangan yang ada saat ini seiring penandatanganan konvensi penyandang disabilitas pada tahun 2011 maka dapat dipastikan semua anak dengan kebutuhan khusus berhak mengakses pendidikan di mana saja seiring bergulirnya

kebijakan mengenai sekolah inklusif. Hal tersebut tentu saja turut mewarnai kompetensi guru yang perlu dikembangkan oleh LPTK.

Saat ini kompetensi guru yang dikembangkan berdasarkan PP no 74 tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2008 bab II pasal 2 mendeskripsikan kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Profesionalisme guru terkait erat dengan kualitas pembelajaran yang dimunculkan di kelas dan hal tersebut dipengaruhi oleh keragaman peserta didik yang ada di kelas. Senada dengan pernyataan ini, Barbara Macgilchrist, Kate Myers, dan Jane Reed (2004 dalam Suyanto, 2007: 11) mengidentifikasi guru yang baik dengan beberapa karakteristik berikut: a) *explain things more deeply*, b) *are not quick and not too slow*, c) *do not ignore (pupils)*, d) *give (the pupils) choices*, dan d) *give you (pupils) ways of remembering things*. Ciri-ciri tersebut banyak menyiratkan bahwa guru perlu menyesuaikan dan memberikan alternatif pilihan sesuai dengan kemampuan anak tanpa menolak mereka. Fisher et al (2003 dalam Laarhoven et al, 2007) juga mengemukakan beberapa kompetensi tambahan untuk dikuasai oleh guru (khusus maupun reguler/umum) agar mampu menangani anak berkebutuhan khusus di kelas, antaralain:

- a. membuat akomodasi pembelajaran dan modifikasi kurikulum
- b. penguasaan teknologi pendukung
- c. pengelolaan perilaku
- d. supervisi pembelajaran

Saat ini, kompetensi pengelolaan perilaku masih jarang menjadi perhatian di LPTK. Sementara itu anak dengan gangguan perilaku merupakan tantangan nyata bagi guru reguler/umum. Schumm, et al (1995 dalam Dagle, et al. 2004) juga menuturkan bahwa peserta didik dengan perilaku menentang merupakan hambatan terbesar bagi guru reguler untuk memberikan adaptasi yang sesuai. Penambahan matakuliah yang memberikan ketrampilan pengelolaan perilaku menjadi kebutuhan bagi guru reguler/umum maupun khusus. Peterson & Beloin (1998 dalam Dagle, et al. 2004) menambahkan bahwa kemampuan tentang kriteria diagnostik dan karakteristik khusus

dari anak dengan kebutuhan khusus juga diperlukan oleh guru reguler/umum. Kemampuan tersebut sudah banyak diberikan dalam matakuliah ke PLB-an yang diperuntukkan kepada mahasiswa keguruan di LPTK untuk saat ini.

Berdasarkan tantangan mengenai keragaman peserta didik yang menuntut kompetensi guru maka ada beberapa analisis penulis terhadap empat kompetensi yang dicanangkan oleh pemerintah berdasarkan PP no 74 tahun 2008. Dari ke-empat kompetensi tersebut, terdapat beberapa hal spesifik yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan guru-guru agar mampu menangani peserta didik yang beragam. Keempat kompetensi tersebut antarlain:

- a. kompetensi pedagogik,
- b. kompetensi kepribadian,
- c. kompetensi sosial, dan
- d. kompetensi profesional

Beberapa hal khusus yang menjadi usulan pemuktahiran kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3: Pemuktahiran kompetensi pedagogik

No	Kompetensi pedagogik	Catatan khusus
a.	pemahaman wawasan atau landasan kependidikan	--
b.	pemahaman terhadap peserta didik	Keberagaman peserta didik, modalitas belajar dari anak dengan kebutuhan khusus yang dapat dioptimalkan
c.	pengembangan kurikulum atau silabus	Penguasaan ketrampilan membuat modifikasi kurikulum dan pemberian akomodasi pembelajaran
d.	perancangan pembelajaran	
e.	pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis	Memberikan partisipasi yang sama kepada semua peserta didik Ketrampilan melakukan co-teaching dengan guru khusus
f.	pemanfaatan teknologi pembelajaran	Penguasaan teknologi pembelajaran yang membantu anak dengan kebutuhan khusus
g.	evaluasi hasil belajar	Fleksibilitas metode dan proses evaluasi pembelajaran
h.	pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya	Kemampuan pengelolaan perilaku bagi peserta didik yang mempunyai masalah perilaku

Tiga kompetensi lainnya sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan sehingga beberapa catatan khusus di atas menjadi usulan kepada LPTK untuk mempertimbangkan muatan materi dalam proses pendidikan calon guru maupun program sertifikasi guru. Diharapkan nantinya guru-guru yang dihasilkan mampu menjawab tantangan yang ada di sekolah dan siap untuk menyambut kebijakan pemerintah yang bergulir ke arah layanan pendidikan untuk peserta didik yang beragam.

### **3. Model Pendidikan Guru untuk Mendukung Pendidikan Inklusif**

Berdasarkan telaah pada kompetensi pedagogi guru maka penulis menggarisbawahi perlunya pengayaan materi yang saat ini ada pada matakuliah yang terkait. Hal ini juga menjadi saran Strawderman & Lindsey (1995 dalam Laarhoven, 2007) menyatakan bahwa perubahan (redesain) pendidikan guru yang ada saat ini dapat dilakukan dengan:

1. Menambah matakuliah baru atau pengalaman lapangan baru atau dengan
2. Merevisi materi yang telah ada selama ini.

Strategi lain yang dapat ditempuh yaitu penentuan matakuliah yang diikuti oleh mahasiswa calon guru khusus dan calon guru reguler secara bersama-sama. Dampak dari strategi ini diteliti oleh O'Shea, Lee & Satter (1999 dalam Dianne M Gut, et al. 2003) pada matakuliah yang diikuti oleh calon guru (reguler maupun khusus) melalui berbagai aktivitas kolaboratif antar mahasiswa menemukan bahwa mahasiswa merasa lebih siap untuk membuat perencanaan pembelajaran, menggunakan berbagai strategi pembelajaran dan melakukan berbagai modifikasi. M Gut, et al. (2003) menegaskan bahwa dalam matakuliah di atas mengarahkan suasana pembelajaran yang membuka peluang berbagi pendapat untuk menentukan keputusan, komunikasi terbuka dan kolaborasi, calon guru (reguler dan khusus) diarahkan untuk membangun ketrampilan dan pemahaman profesi secara bersama-sama. Hal serupa juga menjadi kebijakan dalam rangka mempersiapkan guru (yang mengajar anak dengan atau tanpa kebutuhan khusus di sekolah reguler) yang dilakukan dengan memadukan antara pengetahuan pendidikan luar biasa dengan pendidikan secara umum meskipun kompetensi dari keduanya memiliki perbedaan (American Association of College for Teacher Education, 2002 dalam Digle, et al. 2004).

Selain kompetensi yang harus dicapai dalam pendidikan calon guru, terdapat beberapa sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan mengajar di sekolah inklusif, yaitu: pandangan positif Olson, Chalmers dan Hoover (1997 dalam Dagle, et al. 2004) menggarisbawahi satu hal utama dalam program pendidikan guru adalah pandangan positif kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus harus dimiliki oleh calon guru. Selain pandangan yang positif, diperlukan ketrampilan berkolaborasi dengan guru lain untuk menangani anak dengan keragaman kemampuan. Monahan, Marino & Miller (2000; Olson, Chalmers dan Hoover. 2007 dalam Dagle, et al. 2004) melakukan penelitian dengan hasil, bahwa 84 % responden dari 342 guru yang berpartisipasi menyatakan bahwa mereka harus mempunyai ketrampilan berkolaborasi dengan guru khusus.

### **C. PENUTUP**

Pendidikan calon guru perlu menyesuaikan dengan perkembangan tantangan di dunia pendidikan dan kebijakan pemerintah saat ini. Keberadaan peserta didik yang beragam dan kebutuhan pemenuhan layanan pendidikan untuk mereka menuntut kompetensi yang perlu diperbarui. Hal tersebut berdampak pada pendidikan calon guru yang memerlukan redesain. Redesain pendidikan calon guru yang dikemukakan dalam makalah ini terdiri dari 3 alternatif, yaitu:

- a. Pengayaan materi perkuliahan keguruan yang menunjang kompetensi pedagogi
- b. Matakuliah dan atau PPL (praktik pengalaman lapangan) yang ditempuh secara bersama antara calon guru umum/reguler dengan calon guru khusus untuk memberikan peluang membangun kolaborasi
- c. Penambahan matakuliah baru (pengelolaan perilaku).

## Daftar Pustaka

- Cook B.G, *et al.* (2000) "Teacher's Attitudes Toward their Included Students with Disabilities". *Exceptional Children*. Fall 2000;67, 1; ProQuest Education Journals pg. 115
- Dingle, Mary & Falvey, Mary A. Givner, Christine C & Haager, Diane (2004) *Essential Special and General Education For Preparing Teachers for Inclusive Settings*. *Issues in Teacher Education*, Spring. 2004. Volume 13, Number 1
- Edwards. C J. *et al.* (2006). "Influences of Experiences and Training on Effective Teaching Practices to Meet the Needs of Diverse Learners in School". *Education*; Spring 2006 126, 3; *ProQuest Education Journals* pg. 580
- Johnsen, B & Skjorten, M. D. (2004) *Menuju Inklusi: Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar*. Bandung: Unipub Forlag
- Kompas. 4 November 2009 pendidikan inklusi masih banyak kendala. Sumber: <http://edukasi.kompas.com/read/2009/11/04/0856498/Pendidikan.Inklusi.Masih.Banyak.Kendala>. Diakses tanggal: 12 Januari 2012
- Lopes, J.A., *et al.* (2004). "Teachers' Perception About Teaching Problem Students in Regular Classrooms". *Education & Treatment of Children*; Nov 2004; 27, 4; *ProQuest Education Journals* pg. 394
- M Gut, Dianne., Oswald, Karen., Leal, J Dorothy., Frederiksen, Laura., Gustafson, Janet M (2003) *Building the Foundation of Inclusive Education Through Collaborative Teacher Preparation: A University-School Partnership*. *College Student Journal*; Mar 2003,1; ProQuest Education Journals pg. 111
- Pavri, S & Luftig, R. (2000). "The Social Face of Inclusive Education; Are students with Learning disability Really Included in the Classroom?". *Preventing School Failure*; Fall 2000; 45,1; *ProQuest Education Journals*. Pg 8.
- Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2008 tentang guru
- Rice, Jenifer King (2003) *Teacher Quality : Understanding the effectiveness of teacher attributes*. Sumber: [http://www.epi.org/publication/books\\_teacher\\_quality\\_execsum\\_intro/](http://www.epi.org/publication/books_teacher_quality_execsum_intro/) Diakses pada tanggal 16 Januari 2012
- Suyanto. (2007). "Tantangan Profesional guru di Era Global". Pidato Dies Natalis ke-43 Universitas Negeri Yogyakarta pada 21 Mei 2007



Sutji Harijanto (2011) The Indonesian Government Policy on Special Education in Global Perspective. Makalah disampaikan dalam International seminar on Special Education pada 19 Maret 2011.

Van Laarhoven, Toni R., Munk, Dennis D., Lynch, Kathleen., Bosma, Julie and Rouse, Joanne (2007) A model for preparing special and general Education Preservice Teachers for Inclusive Education. *Journal of Teacher Education* 2007: 58; 440. Tersedia dalam <http://jte.sagepub.com/cgi/content/abstract/58/5/440> [22 Juli 2009]

## Biodata Penulis

### A. Identitas

1. Nama : Pujaningsih, M.Pd
2. Tempat/Tgl.Lahir : Sleman, 06 Desember 1981
3. Pangkat/Gol : Penata Muda tk I/ IIIb
4. Jabatan : Lektor
5. Jurusan/Fak : Pendidikan Luar Biasa/FIP
6. Alamat Rumah : Madeyan subersari moyudan sleman Yogyakarta.
7. Alamat Kantor : PLB FIP Universitas Negeri Yogyakarta  
Kampus Karang Malang, Yogyakarta.  
  
Telp. (0274)-586168 psw 317
8. No HP : 08156883287
9. Email : [pujaningsih@gmail.com](mailto:pujaningsih@gmail.com), [puja@uny.ac.id](mailto:puja@uny.ac.id),

### B. Riwayat Pendidikan

PLB FIP UNY	1999 - 2003
PKKh UPI Bandung	2005-2007

## **PENGUATAN FUNGSI PENGAWAS SEKOLAH DALAM KERANGKA PERBAIKAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA**

**\*Rahmania Utari, M.Pd.**

Pengawasan pendidikan menduduki peran penting dalam upaya penjaminan mutu pendidikan khususnya dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan. Sayangnya hal tersebut lebih banyak baru sebagai retorika dan urung diimplementasikan secara intensif dalam pengelolaan pendidikan khususnya di tingkat daerah. Tantangan kepengawasan sekolah juga muncul dengan hadirnya internasionalisasi pendidikan yang menuntut pengawas sekolah untuk cepat tanggap dalam merespon perubahan untuk menularkannya kepada para pengelola sekolah. Penguatan fungsi pengawas sekolah dapat dipandang sebagai langkah politis sekaligus profesional karena pemberdayaan pengawas sekolah dapat dijadikan sebagai pelaku penjamin mutu di lapis kedua setelah sekolah itu sendiri. Tentu saja penguatan fungsi tersebut memerlukan beberapa syarat, antara lain pengembangan kapasitas dan kapabilitas pengawas sekolah, dan kebijakan pemerintah akan rasio jumlah pengawas terhadap satuan pendidikan yang dibina.

Kata kunci: supervisi pendidikan, manajemen tenaga kependidikan

### **PENDAHULUAN**

Situasi kinerja pengawas sekolah di Indonesia telah cukup banyak dipotret melalui penelitian dan pemberitaan di media massa. Sayangnya keadaan yang tergambar masih banyak mengungkapkan kontribusi dan kinerja pengawas yang boleh dikata belum cukup memuaskan. Pada salah satu penelitian di Kabupaten Jember (Arifiatun, 2009) ditemukan bahwa supervisi yang dilakukan pengawas sekolah tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap kinerja profesional guru. Implikasi dari hasil penelitian tersebut adalah perlunya pengawas memperhatikan pedoman-pedoman kerja yang ada agar kinerjanya lebih baik. Studi lain tentang pengawas sekolah dilakukan di Malang (Suliadi, 2009), yang mengungkapkan bahwa supervisi yang dilaksanakan pengawas sekolah termasuk dalam kategori rendah. Penelitian oleh Arifiatun yang berlokasi di Kabupaten Jember, menggambarkan adanya

hubungan yang signifikan antara intensitas kegiatan pengawas dengan profesionalisme guru, dan juga terhadap intensitas kegiatan MGMP yang erat terkait pengembangan profesi guru. Temuan di Kabupaten Jember tersebut secara implisit menggambarkan kinerja pengawas sekolah yang masih perlu ditingkatkan, adapun penelitian oleh Suliadi Rahmat (2009) yang latarnya berada di Malang menghasilkan temuan bahwa pendampingan pengawas terhadap guru membuahkan hasil yang cukup baik meskipun masih dengan catatan tentang kinerja pengawas yang masih harus ditingkatkan.

Keadaan-keadaan tersebut tentu bukan tanpa sebab, dan bukan semata berpangkal dari pihak internal pengawas sekolah. Minimnya jumlah personel per kota/kabupaten adalah salah satu penyebab yang diakui menjadi kendala kinerja pengawas sekolah. Sebagai contoh di Kota Solo hingga awal 2012 ini masih ditemukan rasio pengawas:sekolah = 1:18. Penelitian dari UGM menemukan rata-rata pengawas di Kota Yogyakarta memiliki 40 sekolah binaan. Angka-angka tersebut masih cukup jauh dari angka ideal, apalagi bila lokasi geografis, bidang studi dan jumlah guru per satuan pendidikan turut diperhatikan. Pada salah satu penelitian terungkap bahwa model pembinaan pengawas sekolah sementara ini masih belum intensif (Mucith, 2011) yang mengacu pada karakteristik pengangkatan, diklat, dan penilaian kinerja.

Upaya pemerintah secara umum dalam penetapan standarisasi pengawas sekolah dapat dilihat pada Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang pengawas sekolah. Terdapat poin penting yakni adanya enam kompetensi pengawas sekolah yang terdiri atas kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, serta kompetensi sosial. Harapan pemerintah yang tertuang pada aturan-aturan tersebut tentu akan sekedar menjadi harapan bilamana tidak ada upaya nyata untuk mewujudkan pembinaan pengawas secara optimal, mulai dari perekrutan sampai dengan pemberhentian. Pengawas sekolah sebagai personil yang diberi tanggungjawab dan wewenang penuh untuk melaksanakan pengawasan akademik dan

manajerial pada satuan pendidikan adalah kepanjangan tangan Dinas Pendidikan Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersentuhan langsung dengan sekolah. Pemberdayaan pengawas sekolah dalam monitoring dan evaluasi tentang sejauhmana ketercapaian kedelapan elemen dalam standar nasional pendidikan serta pembinaannya dapat mengefisiensikan manajemen pendidikan nasional.

Di pihak pengawas sekolah sendiri kini semakin dihadapkan dengan tantangan tuntutan kualitas pendidikan yang didambakan masyarakat. Pesatnya tuntutan peningkatan kompetensi dan pengembangan profesional secara umum seharusnya direspon pengawas sekolah dengan baik. Terlebih bila dihubungkan dengan era perdagangan bebas yang menuntut dunia pendidikan di Indonesia peka terhadap tuntutan kualitas berstandar internasional.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Pembinaan Pengawas Sekolah**

Peran pengawas sekolah di Indonesia kini tidak hanya berkutat di seputar ranah akademik namun juga manajerial. Hasil penelitian gelombang kedua tentang Kepengawasan pendidikan di era 1980-an (Glickman, 2004) mengungkapkan bahwa sekolah yang efektif ditandai dengan hal-hal diantaranya 1) manajemen tingkat sekolah, 2) kepemimpinan, 3) stabilitas staf, 4) pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran, 5) pengembangan staf, 6) optimalisasi jam belajar, 7) prestasi akademik yang diakui secara luas, 8) keterlibatan orangtua, 9) perencanaan kolaboratif dan hubungan rekan sejawat, 10) keberadaan sense kebersamaan, 11) kejelasan tujuan dan harapan yang secara umum sama, serta 12) aturan dan kedisiplinan. Dari hasil penelitian tersebut nampak bahwa manajemen sekolah menempati posisi yang tidak dapat dipandang remeh dalam pembentukan sekolah yang efektif. Dengan demikian kebutuhan proses pembelajaran yang baik kini diakui sangat perlu didukung oleh proses manajemen yang serupa baiknya. Dengan demikian, kriteria kompetensi manajerial yang harus dikuasai pengawas sekolah tersebut wajar menjadi tuntutan.

Di masa silam persepsi masyarakat tentang pengawasan sekolah boleh jadi hanya berkuat pada kunjungan penilik/pengawas ke kelas-kelas guna melakukan penilaian tentang ketepatan strategi pembelajaran oleh guru. Hingga sekarang (mungkin) masih banyak yang menganggap profesi pengawas sekolah sebagai profesi penyiapan diri sebelum seseorang yang pernah menjadi kepala sekolah atau guru menjalani pensiun. Gurauan bahwa jabatan pengawas sekolah merupakan profesi “pendinginan” sebelum memasuki pensiun bahkan dengan sendirinya beredar di kalangan pengawas sekolah itu sendiri. Selagi pemerintah pusat dan daerah belum memberdayakan pengawas sekolah sebagaimana mestinya, maka dengan sendirinya jabatan pengawas sekolah tetap berada di posisi marginal dalam proses pencapaian cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mustahil untuk memberdayakan pengawas sekolah tanpa adanya kompetensi yang cukup. Tidak menutup mata bahwa dari sisi rekrutmen pemerintah telah menyelenggarakan diklat calon pengawas sekolah yang mata diklatnya mengacu pada keenam ranah kompetensi pengawas sekolah. Namun demikian, kebutuhan pembinaan dari eksternal (baca: pemerintah) tentu bukan hanya pada saat rekrutmen, tetapi juga dalam masa jabatan. Keenam ranah kompetensi yang menjadi mata diklat tersebut tidak akan dipraktekkan sebagaimana mestinya bila tidak ada dukungan yang cukup terhadap peningkatan keterampilan pengawas, dan pemberian motivasi serta kepuasan kerja yang cukup.

Untuk memperjelas hal-hal apa saja terkait keenam kompetensi pengawas sekolah, berikut ini merupakan dimensi kompetensi yang dirujuk dari lampiran Permendiknas No 12 tahun 2007. Dimensi-dimensi ini perlu diposisikan terlebih dahulu karena dapat dijadikan acuan pembinaan pengawas sekolah baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

RANAH DIMENSI	URAIAN KOMPETENSI
Kompetensi Kepribadian	1. kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya 2. Memiliki rasa ingin tahun akan hal-hal baru tentang pendidikan dan

	<p>ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya</p> <p>3. Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada <i>stakeholder</i> pendidikan</p>
<p>Kompetensi Supervisi Menejerial</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah</li> <li>2. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi – misi – tujuan dan program pendidikan sekolah/madrasah</li> <li>3. Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah/madrasah</li> <li>4. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah/madrasah</li> <li>5. Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah</li> <li>6. Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah/madrasah</li> <li>7. Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah/madrasah</li> <li>8. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah</li> </ol>
<p>Kompetensi Supervisi Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI</li> <li>2. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap pengembangan TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI</li> <li>3. Membimbing guru menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI berlandaskan standar isi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP</li> <li>4. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/ teknik pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI</li> <li>5. Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA atau tiap mata pelajaran di SD/MI</li> <li>6. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran /bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI</li> <li>7. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI</li> </ol>

	8. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI
Kompetensi Evaluasi Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan di sekolah</li> <li>2. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI</li> <li>3. Menilai kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI</li> <li>4. Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI</li> <li>5. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI</li> <li>6. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan staf sekolah lainnya</li> </ol>
Kompetensi Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan</li> <li>2. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas</li> <li>3. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif</li> <li>4. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya</li> <li>5. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif</li> <li>6. Menulis karya tulis ilmiah(KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan</li> <li>7. Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah/madrasah</li> <li>8. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah</li> </ol>
Kompetensi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya</li> <li>2. Aktif dalam asosiasi pengawas satuan pendidikan.</li> </ol>

**Tabel 1. Dimensi Kompetensi Pengawas Sekolah**



Sebuah disertasi di bidang Kepengawasan Pendidikan oleh Muchith (2011) menyajikan tentang contoh realitas model pembinaan pengawas di daerah. Meskipun lokasi penelitian umumnya bertempat di Kemenag, tetapi hasil penelitian ini tetap mengandung relevansi dengan apa yang terjadi pada pembinaan pengawas di bawah payung Kemendikbud. Dikatakan bahwa realitas model pengangkatan pengawas masih berciri *topdown*, berciri formal birokratis (hanya melalui rapat-rapat koordinasi) dan diklat yang masih bersifat insidental, artinya belum rutin dan pasti. Belum lagi belum diimplementasikannya kebijakan pendidikan nasional pada umumnya oleh pemerintah daerah dengan alibi otonomi daerah dan juga perbedaan kebijakan daerah masing-masing. Kebijakan pemerintah daerah yang belum memperhatikan tentang penjaminan mutu tenaga kependidikan khususnya pengawas sekolah menjadi jurang antara harapan/standar nasional pendidikan dengan kenyataan yang terjadi.

Dengan model pembinaan yang sudah berjalan tersebut maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruhnya terhadap pengembangan keenam kompetensi yang harus dimiliki pengawas sekolah. Tuntutan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas tidak akan mampu dijawab dengan tenaga kependidikan yang keterampilan dan pengetahuannya stagnan. Langkah pemerintah perlu banyak diapresiasi melalui terbitnya panduan-panduan kerja bagi pengawas sekolah khususnya pasca berlakunya permendiknas no 12 tahun 2007. Pekerjaan rumah pemerintah yang cukup besar khususnya di kawasan terpencil adalah agar pedoman-pedoman tersebut juga sampai pada para pengawas sekolah. Pemanfaatan IT dapat memudahkan hal tersebut terjadi, namun tentu dengan syarat bahwa infrastruktur IT telah tersedia. Untuk hal yang satu ini khususnya pada daerah terpencil sudah pasti intervensi pemerintah diperlukan.

Rancangan peraturan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya juga tidak lama lagi akan terbit karena kabar terakhir nampaknya rancangan sudah final. Di sisi lain hal tersebut menyisakan pekerjaan rumah agar kualitas pengawas sekolah di

Indonesia dapat merata. Sebagai contoh pada rancangan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka kreditnya diatur bahwa rasio pengawas sekolah TK/RA dan SD/MI paling sedikit 10 satuan pendidikan atau sekitar 60 guru. Adapun pengawas mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran di tingkat SMP/MTs, SMA/MA, dan SMKA/MAK adalah paling sedikit tujuh satuan pendidikan atau 40 guru mata pelajaran. Untuk Pengawas SLB paling sedikit membawahi 5 satuan pendidikan atau 40 guru, adapun Pengawas BK paling sedikit 7 satuan pendidikan, atau 40 guru BK. Pada daerah khusus yakni daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain, jumlah pengawas sekolah/madrasah paling sedikit membawahi 5 satuan pendidikan secara lintas jenis dan jenjang satuan pendidikan. Selama belum ada revisi terhadap undang-undang otonomi daerah maka implementasi kebijakan tersebut akansangat bergantung kepada kebijakan pemerintah daerah setempat. Terlepas dari hal tersebut, nampaknya rasio dalam rancangan petunjuk teknis tersebut sengaja dibuat secara longgar, (karena bukan dengan istilah pembatasan “maksimal” melainkan “minimal”) sehingga kasus pengawas dengan jumlah sekolah/guru binaan yang sangat banyak tetap akan sangat mungkin terjadi. Dalam sebuah Disertasi mengenai model pembinaan pengawas sekolah (Mucith, 2011) menyatakan bahwa rasio ideal jumlah pengawas dengan sekolah binaan adalah berkisar antara 1: 12 dan 1: 15.

## **B. Pengembangan Profesional Pengawas Sekolah**

Pengembangan profesi pengawas sekolah adalah kegiatan yang dilakukan pengawas sekolah/Madrasah dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk peningkatan mutu profesionalisme sebagai pengawas sekolah/Madrasahmaupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan, khususnya dalam kegiatan menilai dan membina

penyelenggaraan pendidikan. Perlu disadari sebelumnya bahwa pembinaan profesional yang distimulasi atau dilakukan oleh pihak eksternal terhadap pegawai tidak akan berbuah manis bila tidak diikuti dengan kesadaran pribadi. Menurut Whitaker (dalam Kydd dkk, 1994), dimensi pribadi pada pengembangan profesional sama dengan membicarakan tentang motivasi, inteligensi, potensi, konsep diri dan pengendalian diri.

Pengembangan profesional menjadi sedemikian penting karena esensi keberhasilan sekolah bersumber dari pemikiran dan tindakan para pelakon pengelola pendidikan. Sekitar 70% anggaran pendidikan di Indonesia didanai untuk membayar gaji tenaga pendidik dan kependidikan, bahkan Amerika menghabiskan sekitar 80% dari anggaran pendidikannya untuk alokasi yang sama. Setiap tahunnya di Amerika terdapat peningkatan minat penelitian mengenai pengembangan profesi (Glickman, 2004: 371). Hal ini sejalan dengan kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan profesi yang dipandang sebagai proses “recharging” SDM.

Pengembangan profesi adalah satu dari empat unsur kinerja pengawas sekolah. Unsur lainnya adalah pendidikan, pengawasan akademik dan manajerial, serta penunjang. Dalam rancangan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, pengembangan profesi dimaknai sebagai unsur yang terdiri atas penulisan karya ilmiah di bidang pendidikan formal/pengawasan, penerjemahan/penyaduran buku dan membuat karya inovatif di bidang yang sama.

Penguatan fungsi pengawas sekolah khususnya melalui pengembangan profesi dapat memanfaatkan budaya kekerabatan di Indonesia. Budaya kolektif semacam ini merupakan modal sosial, yaitu jejaring sosial yang memiliki nilai-nilai kebersamaan yang tumbuh dari suatu masyarakat yang berupa norma timbal baik satu dengan lainnya (Bourdieu, 1990 dalam Hermawanti & Rinandari, 2003). Tingkatan modal sosial terdiri atas tiga, pertama adalah nilai, kedua yaitu institusi, dan ketiga ialah mekanisme. Pada tingkat nilai, sebuah jaringan bisa terbentuk

karena latar belakang kepercayaan terhadap nilai yang sama. Pada level kedua, yakni institusi, jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusi. Mekanisme sebagai tingkat ketiga adalah ketika modal sosial pada tingkat pertama dan kedua mulai membuahkan bentuk kerjasama. Ikatan profesi, kelompok kerja pengawas adalah salah satu bentuk modal sosial yang sangat potensial dalam pengembangan profesi, termasuk diantaranya pengawas sekolah.

Diadopsi dari Glickman (2004: 375-376) beberapa format pengembangan profesi selain melalui ikatan profesi, juga terdapat kelompok kolejial (bisa diterjemahkan dengan kerjasama antar pengawas untuk membahas persoalan yang sama, untuk menghadirkan inovasi kepengawasan. Terdapat juga format pengembangan profesi melalui jaringan (*networks*), yang turut memanfaatkan media seperti jaringan internet, Koran, mesin fax, dan seminar serta konferensi. Selain itu, semangat kemitraan yang kini banyak diusung adalah *partnership* antara ikatan profesi atau lembaga dinas pendidikan dengan universitas atau LPTK. Tentu dengan catatan diantara keduanya diposisikan setara, saling memberi keuntungan dan berkontribusi satu sama lain. Namun demikian, selain bersifat kolektif, pengembangan profesi juga tetap menuntut perencanaan pribadi dari masing-masing individu.

Dari sisi kerjasama pengawas sekolah dengan “klien” utamanya yakni kepala sekolah dan guru, fungsi pengawas dapat dipersepsikan secara lebih positif dengan menambah intensitas pertemuan musyawarah guru atau kepala sekolah, sehingga monitoring dan perbaikan bisa berjalan dengan lebih rutin. Penelitian tindakan kelas dapat menjadi jembatan pengawas sekolah dalam memperbaiki mutu sekolah. Guru-guru dapat diinisiasi atau distimulasi untuk memperbaiki kelasnya masing-masing melalui penelitian tindakan kelas, dengan catatan bahwa pengawas sekolah itu sendiri harus memiliki pengetahuan luas tentang penelitian tindakan kelas, dan *atau lesson study*.

Perkembangan di dunia pendidikan yang tidak kalah seru kini adalah kemunculan tren internasionalisasi pendidikan, yang merupakan buah dari

carapendidikan kontemporer berhadapan dengan globalisasi. Pertukaran pelajar, perancangan program pengajaran dengan negara lain, benchmarking adalah sebagian upaya mengakomodir kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan di dalam negeri agar dapat sejajar atau diakui di level mancanegara. Kehadiran tren ini sudah sepatutnya disikapi pengawas sekolah dalam pengembangan profesional, agar rantai kompetensi pengawas sekolah tidak terputus dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan.

## **KESIMPULAN**

Kuat atau lemahnya fungsi kepengawasan pendidikan (baca: sekolah) tidak hanya tergantung dari penguasaan kompetensi pengawas, namun juga berkaitan dengan pihak eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang masih terkendalabenturan kewenangan pengelolaan pendidikan oleh daerah, dan model-model pembinaan pengawas sekolah yang belum intensif. Pemberdayaan pengawas sekolah sebagai penjamin mutu belum banyak dilakukan terkait dengan kebijakan pemerintah daerah. Koordinasi antara pusat dan daerah mengenai pengawasan pendidikan diperlukan agar monitoring dan evaluasi serta pembinaan satuan pendidikan terkait dengan standar nasional pendidikan dapat berjalan secara efisien.

Di sisi lain pengembangan profesional pengawas masih memerlukan perhatian, dan memerlukan kesadaran individual dan kolektif pengawas untuk menggiatkan diri dalam aktivitas pengembangan profesi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengintesifkan kelompok-kelompok, karena sekaligus juga akan memudahkan masing-masing individu untuk mengembangkan ide dan berbagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.(2010). “Minim, jumlah pengawas sekolah di Solo”:<http://www.solopos.com/2010/pendidikan/minim-jumlah-pengawas-sekolah-di-solo-11739>.
- Arifiatun.(2009). *Kontribusi Supervisi Pengawas Sekolah, Kinerja Profesional Kepala Sekolah dan Pengembangan Profesionalisme Guru terhadap Kinerja Profesional Guru di SMA Negeri Kabupaten Jember*. (Tesis). Malang: Universitas Negeri Malang: <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=jiptunair-gdl-s1-2006-amaliafauz-2069>.
- Hermawanti, Mefi & Hesti Rinandari. (2003). ”Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat” : [http://www.ireyogya.org/adat/modul\\_modalsosial.htm](http://www.ireyogya.org/adat/modul_modalsosial.htm).
- Glickman, Carl D., & Gordon, Stephen P., & Ross-Gordon, Jovita M. (2004).*Supervision; and Instructional Leadership, A Developmental Approach*. Boston: Allyn and Bacon.
- Kydd, L., Crawford, M., & Riches, C (ed). (1997). *Professional Development for Educational Management*. (Terjemahan Ursula Gyani). Jakarta: Grasindo.
- Muchthith, Saekan. 2011. *Pengembangan Model Manajemen Pembinaan Pengawas Sekolah/Madrasah di Kantor Kemenag Kudus*. (Disertasi). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Permendiknas No 12 Tahun 2007 tentang Standarisasi Pengawas Sekolah.
- Rancangan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.(2011).
- Unjianto, Bambang. (2011). “Yogyakarta Kekurangan Tenaga Pengawas Sekolah” :<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/12/106583/Yogyakarta-Kekurangan-Tenaga-Pengawas-Sekolah>.
- Suliadi, Rachmat. (2009). *Hubungan Antara Supervisi Pengawas Sekolah, Intensitas Kegiatan MGMP dan Motivasi Berprestasi Guru dengan Profesionalisme Guru SMA Negeri di Kota Malang*. (Tesis). Malang: Universitas Negeri Malang:<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/search/advancedResults>.

### **BIODATA PENULIS**

Nama : Rahmania Utari, M.Pd  
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 18 September 1982  
Unit kerja : Jurusan Administrasi Pendidikan, Prodi Manajemen  
Pendidikan FIP UNY  
Telepon : 081 754 697 18  
Email : tari\_dewanto@gmail.com  
oetari\_ap@yahoo.com

**MODEL HIPOTETIK JALUR KARIER LULUSAN PROGRAM STUDI S1  
ADMINISTRASI/MANAJEMEN PENDIDIKAN SEBAGAI TENAGA  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI BERBAGAI JENIS  
LEMBAGA PENDIDIKAN**

**Priadi Surya, M.Pd.<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

Relevansi lulusan perguruan tinggi dengan lapangan kerja selalu menjadi bahan pembahasan para ahli. Setiap program studi di perguruan tinggi diharuskan memperhatikan relevansi lulusannya dengan bidang keilmuan yang dikembangkannya. Program Studi S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan sejatinya menyiapkan mahasiswanya sebagai calon tenaga kependidikan sebagai pengelola pendidikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan sarjana Administrasi/Manajemen Pendidikan tersebar di berbagai bidang pekerjaan. Pekerjaan yang dapat ditekuninya masih sangat beragam, belum terfokus pada jenis profesi utama tertentu, dan peluang kerja yang tersedia masih belum jelas. Pembagian secara umum bidang pekerjaan yang ditekuni lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan adalah bidang kependidikan (sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) dan bidang nonkependidikan. Makalah ini membahas model hipotetik jalur karier lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan di bidang kependidikan. Corak program pendidikan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia masih bervariasi. Beberapa masih memberikan program pengalaman lapangan berupa praktik mengajar, beberapa yang lain sudah berupa praktik administrasi. Fakta sosial menunjukkan bahwa lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan tidak sedikit yang akhirnya menjadi guru (tenaga pendidik), bukan sebagai tenaga kependidikan. Ilmu administrasi/manajemen pendidikan dipraktikkan wakil kepala sekolah dan kepala sekolah (yang sesungguhnya adalah guru), namun justru lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan diragukan kemampuannya ketika bekerja sebagai guru. Mereka bergelar Sarjana Pendidikan, masih dekat dengan dunia pengajaran jika dibandingkan dengan sarjana ilmu murni yang kemudian menjadi guru tanpa bekal ilmu pendidikan. Guru sebagai jabatan awal bagi lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan, selanjutnya menempati jabatan pengelola pendidikan yang sangat relevan dengan keilmuan mereka, yaitu menjadi wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan.

Kata kunci: jalur karier, administrasi pendidikan, manajemen pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta



## **A. Pendahuluan**

Setiap alumni yang lulus dari perguruan tinggi tentu saja bercita-cita untuk dapat mendapatkan pekerjaan yang dapat memberikan nafkah baginya. Pekerjaan itu dipandang sebagai karier yang akan menjadi sandaran hidup. Karier seseorang yang ditempuh itu dapat berstatus sebagai pegawai yang bekerja terhadap lembaga atau pihak lain, wirausaha sendiri tanpa mempekerjakan orang lain, atau wirausaha dengan membuka lapangan kerja bagi orang lain.

Setiap tahunnya perguruan tinggi menghasilkan lulusan hingga ribuan orang. Namun belum tentu semua sarjana terserap oleh dunia kerja. Banyak lulusan yang akhirnya bekerja tidak sesuai latar belakang pendidikan. Saat ini ada 9 juta pengangguran di Indonesia dengan 50% merupakan generasi muda lulusan SMA. Sekitar 6- 7% adalah lulusan perguruan tinggi. Ganjar Kurnia (2012) mengatakan “Perguruan tinggi jadi gamang, mau dikemanakan arahnya, apakah mempersiapkan mahasiswa siap pakai alias jadi tenaga kerja terampil atau sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini masih terus kita pikirkan. Perguruan tinggi ada yang sebagai wadah pengembangan ilmu. Sedangkan, yang mempersiapkan tenaga kerja hanya ada di tingkat diploma. Namun kenyataannya mahasiswa yang masuk perguruan tinggi dengan jenjang S-1, mereka masuk ke perguruan tinggi karena ingin mendapatkan pekerjaan.”<sup>2</sup>

Pembangunan bangsa di bidang pendidikan mayoritas dijalankan oleh pemerintah. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang menjalankan fungsi ini lebih banyak jumlahnya berstatus PNS. Program Studi S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan (AP/MP) sebagai salah satu program studi di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan, masih dalam proses penyempurnaan relevansi keilmuan dengan lapangan kerja, termasuk jalur karier yang dapat ditempuh oleh lulusannya. Harapannya mereka dapat diserap ke dalam berbagai jenis lembaga pendidikan untuk mengaktualisasikan keilmuannya mengelola pendidikan pada ruang lingkup makro dan mikro.

---

<sup>2</sup> Menyiapkan Sarjana Siap Pakai. <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/456543/>. Diakses 5 Januari 2012.

Lulusan Program Studi S1 AP/MP memiliki kompetensi dalam kepemimpinan, supervisi, dan mengelola kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat, mengelola persuratan dan pengarsipan, mengelola kesiswaan, mengelola kurikulum dan mengelola organisasi atau lembaga pendidikan.

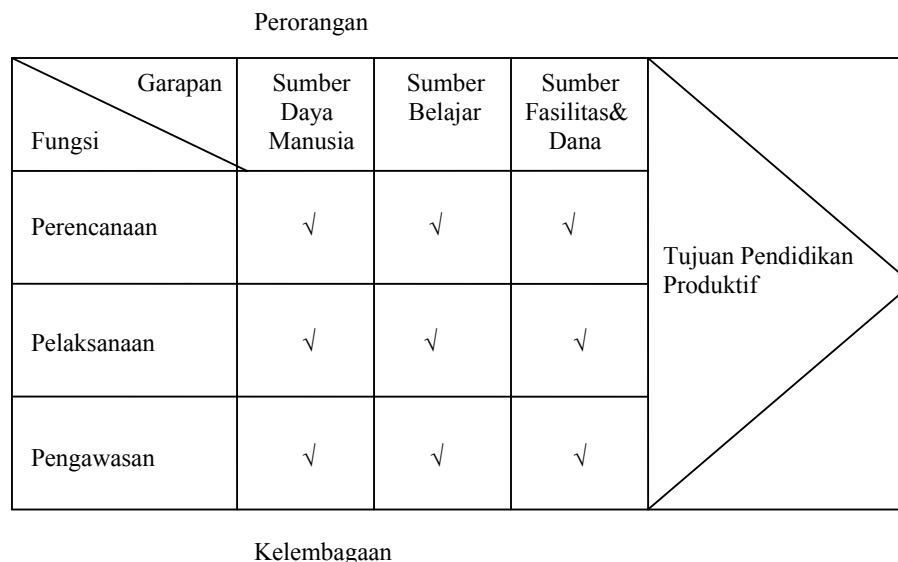
Jabatan pengelola pendidikan seperti kepala sekolah, pengawas, dan atau pejabat dinas pendidikan secara tradisi ditempati oleh guru senior yang memilih karier manajerial. Kondisi tersebut terutama sekali terjadi bagi guru PNS yang bekerja di sekolah negeri, dan sebagian kecil terjadi di sekolah swasta. Jikapun lulusan S1 AP/MP ingin menjadi kepala sekolah dan pengawas untuk mempraktikkan ilmunya sebagai pengelola pendidikan, mereka harus menjadi guru terlebih dahulu. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah ilmu Administrasi/Manajemen Pendidikan tidak dijadikan bidang studi yang terdapat di sekolah-sekolah. Mereka harus memilih bidang studi yang tersedia di sekolah, dan mengajar bidang studi itu dengan kemampuan yang terbatas.

Daya serap lapangan kerja yang relevan terhadap sarjana AP/MP masih terbatas. Bahkan perlu diteliti secara serius sehingga dapat ditemukan suatu upaya penyaluran lulusan S1 AP/MP yang bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya. Jabatan ideal bagi mereka adalah sebagai tenaga kependidikan pengelola pendidikan. Sedikit bergeser dari jabatan ideal tersebut, mereka masih diharapkan dapat menjadi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan lainnya dalam ruang lingkup kerja bidang kependidikan. Penulis memaparkan suatu gagasan model hipotetik jalur karier mahasiswa dan lulusan Program Studi S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di berbagai jenis lembaga pendidikan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Wilayah Kerja Administrasi/Manajemen Pendidikan**

Bidang urusan administrasi/manajemen pendidikan secara mendasar dijelaskan oleh Engkoswara (2001: 2) sebagai keterpaduan antara fungsi dan wilayah kerja manajemen pendidikan.



Bagan 1: Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan (Engkoswara, 2001: 2)

Fungsi utama perilaku berorganisasi dalam bidang pendidikan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan yang menyangkut ketiga bidang garapan utama, yaitu 1) sumber daya manusia (SDM) yang terdiri atas peserta didik, tenaga kependidikan dan masyarakat pemakai jasa pendidikan; 2) sumber belajar, ialah alat atau rencana kegiatan yang akan dipergunakan sebagai media, di antaranya kurikulum; 3) sumber fasilitas dan dana adalah faktor pendukung yang memungkinkan pendidikan sesuai dengan harapan. Fungsi dan garapan manajemen pendidikan itu merupakan media atau perilaku berorganisasi yang diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan secara produktif baik untuk kepentingan perorangan maupun untuk kelembagaan. Ini mempunyai arti bahwa kriteria keberhasilan suatu manajemen pendidikan ialah produktivitas pendidikan.

**2. Jalur Karier Lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah: Guru → Kepala Sekolah → Pengawas Pendidikan**

Pengelola pendidikan berasal dari guru adalah hal yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Mengutip Kate Bullock, et al. (1995) bahwa manajer pendidikan berasal dari guru. Rangkuman yang dipaparkannya didasarkan atas penelitian Hoyle dan McMahon (1986); Saran dan Trafford (1990); Eraut (1993)

dan Southworth (1993) yang memerinci keterampilan dan kualitas yang dibutuhkan oleh guru senior untuk bekerja secara efektif sebagai manajer pendidikan. Praktik pengelolaan satuan pendidikan di Indonesia secara tradisi juga tetap mendasarkan kepala sekolah sebagai karier lanjutan dari seorang guru. Pengertian kepala sekolah pun masih tetap memandang dirinya sebagai guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah. Pembatasan periode jabatan kepala sekolah mulai diterapkan dalam dasawarsa terakhir ini. Guru yang sudah tidak lagi menjadi kepala sekolah, dapat kembali menjadi guru biasa atau pula menjadi pengawas ataupun staf dinas pendidikan.

Pada masa lalu, lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan (AP/MP) dapat berkarier sebagai guru bidang studi Administrasi Sekolah di Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Namun sejak tahun 1990 SPG dihapus. Selain mengajar di SPG, mereka juga dapat menjadi guru SD, SMP, SMA, ataupun SMEA. Kondisi demikian dapat dimaklumi bahwa di masa lalu pengangkatan guru menjadi Guru PNS diawali dari pengabdian sebagai guru honorer. Penerimaan mereka sebagai guru belum berbasiskan kompetensi seperti sekarang ini.

Pada era reformasi, penerimaan PNS mulai ditata berbasiskan kompetensi. Sarjana AP/MP tidak lagi leluasa dapat mendaftar sebagai guru. Jika melihat kompetensinya, maka mereka disiapkan untuk menjadi tenaga pengelola pendidikan. Jika sarjana AP/MP mengincar jabatan pengelola pendidikan seperti wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan, sudah dipastikan bahwa jalur kariernya harus dimulai dari guru. Fakta nyata ditemui ada sarjana AP/MP yang ketika lulus, menjadi guru honorer sekolah. Untuk menjadi guru PNS tidak dimungkinkan karena tidak ada kebijakan yang mendukung pengangkatan otomatis dari honorer.

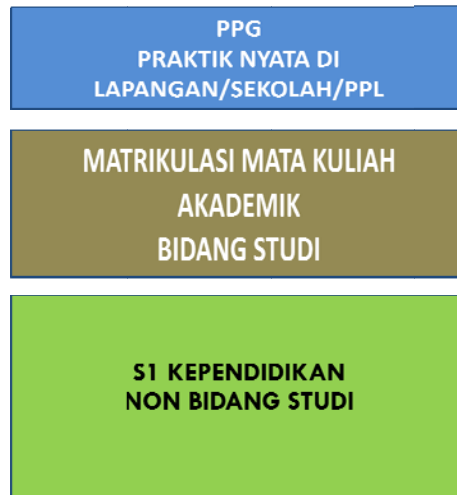
Pada program pendidikan S1 AP/MP, khususnya pada mata kuliah Program Pengalaman Lapangan (PPL) atau Program Latihan Profesi (PLP) masih beragam bentuknya. Ada Program Studi S1 AP/MP di suatu perguruan tinggi yang menerapkan bentuk PPL atau PLP-nya adalah praktik mengajar di sekolah. Sedangkan di perguruan tinggi lain bukan praktik mengajar di sekolah, tetapi praktik manajerial sebagai tenaga administrasi di dinas pendidikan. Artinya masih

terdapat variasi yang mencolok bagi orientasi pekerjaan dan karier calon sarjana dan sarjana AP/MP.

Sarjana AP/MP secara akademik memiliki kompetensi untuk menempati jabatan wakil kepala sekolah, kepala sekolah dan pengawas pendidikan. Dalam keilmuannya pengelolaan pendidikan ini menjadi bahan kajian utama para sarjana AP/MP. Jalur karier ini dapat ditempuh dengan membekali sarjana AP/MP dengan kompetensi tambahan mengajar bidang studi yang menunjang kewenangan tambahannya. Misalnya, sarjana AP/MP yang akan mengajar di SMP dapat mengambil kredit tambahan/mata kuliah minor IPS, sehingga mereka dapat mengajar bidang studi IPS. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menggagas kembali penambahan kompetensi sarjana pendidikan dengan kewenangan tambahan melalui program S1 KKT (S1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan).

Para guru harus memiliki kompetensi alternatif yang merupakan kompetensi tambahan selain kompetensi utama. Pemilikan kompetensi tambahan dapat dilakukan melalui penambahan pendidikan akademik baik bagi mereka yang masih menempuh atau sudah lulus S1 kependidikan maupun guru dalam jabatan yang telah bersertifikat pendidik. Hal ini dapat dilakukan melalui Program S1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (Panduan Program S1 KKT, 2011: 3). Penulis berpikir bahwa calon sarjana atau sarjana AP/MP dapat mengikuti program ini untuk membekali mereka sebelum menjadi guru di sekolah.

Tim PPG Dikti (2011) juga mengagas suatu model Pendidikan Profesi Guru bagi sarjana AP/MP dengan beban 36-40 sks, yakni program pendidikan calon guru profesional yang masukannya berasal dari S1 kependidikan yang bersifat tidak linear/tidak sesuai dan bukan bidang studi. Sebagai contoh peserta Program Pendidikan Profesi Guru SD/MI berasal dari S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, S1 Administrasi Pendidikan, dan sebagainya.



Bagan 2: Model Pendidikan Profesi Guru bagi S1 Kependidikan yang Bersifat Tidak Linear/Tidak Sesuai dan Bukan Bidang Studi. (Tim PPG Dikti, 2011: 3)

Pada sektor pendidikan swasta, jalur karier ini lebih fleksibel untuk ditempuh. Kebijakan sekolah swasta lebih leluasa untuk mengatur personil di masing-masing lembaga. Bahkan bukan tidak mungkin sarjana AP/MP yang baru lulus langsung menempati jabatan pengelola seperti wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dan pengawas operasional di suatu yayasan pendidikan.

### **3. Jalur Karier Lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan sebagai Tenaga Administrasi di Sekolah: Pelaksana Urusan Administrasi → Kepala Tenaga Administrasi Sekolah**

Tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. (Pemendiknas No. 24 Tahun 2008). Dalam keseharian mereka sering dikenal dengan sebutan bagian Tata Usaha sekolah. Secara akademik, ilmu administrasi/manajemen pendidikan merupakan program studi yang relevan dengan tuntutan pekerjaan administrasi sekolah.

Jalur karier lulusan S1 AP/MP sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah dapat dimulai dari jabatan Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian, Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan, Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana, Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan

Pengarsipan, Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan, Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum, dan Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD/MI/SDLB. Kesemua urusan yang dikerjakan oleh pelaksana urusan administrasi itu sejatinya merupakan bidang garapan dalam ilmu administrasi/manajemen pendidikan.

Mengacu kepada Permendiknas No. 24 Tahun 2008, pelaksana urusan administrasi disyaratkan berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK. Lulusan S1 AP/MP tentu saja jauh memenuhi kriteria tersebut. Permasalahan selanjutnya adalah, ketika kebijakan pemerintah meminta minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK namun di sisi lain keilmuan urusan administrasi/manajemen pendidikan secara khusus berada pada jenjang S1. Sarjana AP/MP akan bersaing dengan lulusan SMA/MA/SMK/MAK untuk menempati jabatan pelaksana urusan administrasi sekolah/madrasah. Pendidikan sarjana AP/MP tentu saja memuat landasan keilmuan sekaligus kompetensi teknis administrasi/manajemen pendidikan. Oleh karenanya secara akademik lulusan S1 AP/MP sangat kompeten untuk menempati jabatan pelaksana urusan administrasi sekolah/madrasah.

Jabatan selanjutnya dari seorang pelaksana urusan administrasi sekolah/madrasah adalah kepala tenaga administrasi sekolah. Permendiknas No. 24 Tahun 2008 menjelaskan:

1. Kepala Tenaga Administrasi SD/MI/SDLB  
Kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar. Kualifikasi kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB adalah sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.
  - b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB  
Kepala tenaga administrasi SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/ madrasah minimal 4 (empat) tahun.

- b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 3. Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB  
Kepala tenaga administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB berkualifikasi sebagai berikut:
  - a. Berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun.
  - b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Melihat kualifikasi pendidikan yang disyaratkan di atas, nampak bahwa lulusan S1 AP/MP dapat menempati jabatan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah setelah menempuh masa kerja minimal empat tahun sebagai tenaga administrasi.

**4. Jalur Karier Lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan sebagai Tenaga Struktural di Lembaga/Kantor Pendidikan: Pembantu Pimpinan → Pimpinan**

Sarjana AP/MP yang bekerja pada jalur struktural ditempatkan pada Golongan III pada jabatan pembantu pimpinan. Mereka dapat mengurus bidang-bidang yang pada umumnya terdapat pada lembaga/kantor/dinas pendidikan seperti misalnya bagian tata usaha, bidang pendidikan TK, SD dan pendidikan luar biasa, bidang pendidikan menengah, bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya.

Sebagai PNS daerah, lulusan S1 AP/MP yang bertugas di lingkungan dinas pendidikan setempat terkait dengan aturan mengenai kepegawaian daerah. Miftah Thoha (2007: 83) menjelaskan bahwa dengan berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antardaerah, dan kompetensi.

Jabatan pekerjaan dalam birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis individu dan memungkinkan pegawai untuk melihat pekerjaan mereka sebagai karier. Oleh karenanya dikenal pula istilah jabatan karier. Promosi dalam birokrasi



mungkin didasarkan pada prestasi kerja, masa kerja, atau keduanya. Kebutuhan akan keahlian teknis jelas dalam bidang pendidikan, dan sertifikasi diperlukan untuk posisi di lembaga/kantor pendidikan. Jalur karier struktural mempromosikan pegawai berdasarkan pada masa kerja dan kriteria prestasi. Promosi umumnya direkomendasikan oleh atasan langsung dan memerlukan persetujuan pada tingkat yang lebih tinggi dari birokrasi. (Anita Pankake dan Brenda R. Kallio, 2006 : 91).

### **C. Kesimpulan**

Lulusan S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan sejatinya diarahkan untuk menjadi pengelola pendidikan. Jabatan pengelola satuan pendidikan di sekolah adalah kepala sekolah yang berasal dari guru. Lulusan S1 AP/MP yang ingin menjadi kepala sekolah, harus memulai karier sebagai guru. Mereka memerlukan kompetensi dan kewenangan tambahan mengenai bidang studi yang diampunya. Jenjang karier selanjutnya dari kepala sekolah adalah pengawas pendidikan. Jabatan kepala sekolah dan pengawas pendidikan sangat relevan dengan ilmu administrasi/manajemen pendidikan.

Pada jalur karier struktural, lulusan S1 AP/MP dapat dengan konsisten memulai karier sebagai pelaksana, pembantu pimpinan, dan pimpinan pada unit kerjanya. Bidang urusan administrasi yang diurusinya pada dasarnya merupakan bidang garapan administrasi/manajemen pendidikan.

Model-model jalur karier dalam makalah ini masih terbatas pada jalur linier. Pada praktiknya dimungkinkan untuk berpindah-pindah jalur karier sesuai dengan minat jabatan, formasi, dan kebijakan yang mendukung pengembangan karier lulusan S1 AP/MP.

### **Daftar Pustaka**

Bullock, K. et al. (1995). *Proses Belajar Manajemen Pendidikan*. dalam Kydd, L. et al (eds). (2004). *Professional Development for Educational Management. Pengembangan Profesional untuk Manajemen Pendidikan*. Terjemahan oleh Ursula Gyani B. Jakarta: Grasindo.

- Engkoswara. (2001). *Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah*. Bandung: Yayasan Amal Keluarga.
- Eraut, M. (1993). "The Characterisation and Development of Professional Expertise in School Management and Teaching." *Educational Management and Administration*, 21, 4.
- Hoyle, E. & A. McMahon. (1986). *The Management of Schools*. London: Kogan Page.
- Kurnia, Ganjar. (2012). Wawancara dalam *Menyiapkan Sarjana Siap Pakai*. <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/456543/>. Diakses 5 Januari 2012.
- Pankake, A. and Kallio, B.R. (2006). *Bureaucracy*. In English, Fenwick W. (ed). (2006). *Encyclopedia of Educational Leadership and Administration*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.
- Saran, R. & V. Trafford. (eds). (1990). *Research in Education Management and Policy*. Lewes: Falmer.
- Southworth, G. (1993). "School Leadership and School Development: Reflections from Research." *School Organisation*, 13, 1.
- Tim PPG Dikti. (2011). *Rekonstruksi Kurikulum LPTK Untuk Penyiapan Guru Profesional*. Disampaikan pada Teacher Education Summit. 14 Desember 2011 di Hotel Sahid Jakarta.
- Thoha, M. (2007). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

### BIODATA PENULIS

Nama	Priadi Surya, M.Pd.
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	Bandung, 11 November 1981
Alamat Rumah	Giwang Pratama Estate No. 17 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta
No. Telepon Genggam	0818619490
Pekerjaan/Jabatan Akademik	Dosen/Tenaga Pengajar
Pangkat/Golongan	Penata Muda Tk. I/ III/b
Alamat Instansi /Kantor	Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 No. Telp: (0274) 550842   Fax: (0274) 540611
Alamat Email	<a href="mailto:priadisurya@uny.ac.id">priadisurya@uny.ac.id</a>
Bidang Keahlian	Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan (SDM Pendidikan)
Riwayat Pendidikan	1. S2 Administrasi Pendidikan SPs UPI (2007) 2. S1 Administrasi Pendidikan FIP UPI (2005)

Yogyakarta, 5 Januari 2012

Priadi Surya, M.Pd.

## **REDESAIN SISTEM PENDIDIKAN GURU DI LPTK PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH**

M. Joko Susilo, M.Pd.<sup>1</sup>, Nani Aprilia, M.Pd.<sup>2</sup>., Nur Hidayah, M.Pd.<sup>3</sup>

(<sup>1</sup> Dosen di Prodi Pendidikan Biologi, email: [ah54ni@yahoo.com](mailto:ah54ni@yahoo.com) Hp. 08122586080)

(<sup>2</sup> Dosen di Prodi Pendidikan Biologi, email: [nani\\_aprilia@yahoo.com](mailto:nani_aprilia@yahoo.com) Hp.085868415542)

(<sup>3</sup> Dosen di Prodi Pendidikan Guru SD, email: [hzam\\_09@yahoo.co.id](mailto:hzam_09@yahoo.co.id) Hp.085729184200)

### **ABSTRAK**

Banyaknya sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah berimplikasi pada banyaknya kebutuhan akan tenaga pendidik untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah.. Untuk itu, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sangat memegang peranan untuk menghasilkan guru-guru yang akan melanjutkan estafet dalam membangun peradaban bangsa melalui jalur pendidikan

Realitas dilapangan LPTK di PTM dalam proses pendidikan guru sangat jauh dari harapan untuk mencetak guru yang profesional. Implementasi proses pendidikan guru dengan pendekatan sistem kredit semester (SKS) lebih kepada pengguguran matakuliah sehingga terkesan digarap asal-asalan. Hal itu, sangat kentara di LPTK di PTM, sehingga banyak keluhan dan complain yang ditujukan pada LPTK di PTM dari pihak sekolah-sekolah mitra yang digunakan untuk pelaksanaan latihan praktik keguruan. Jika dianalisis lebih mendalam, maka proses penyiapan calon guru secara inti keilmuan ada di program studi masing-masing, dan tentunya perlu dilakukan cek and ricek siapa yang memproses mahasiswa calon guru tersebut, termasuk didalamnya kualifikasi dan kompetensi dosen yang memproses mahasiswa calon guru tersebut.

Proses redesain pendidikan guru di LPTK di PTM dapat dilakukan dengan:1) mengembalikan pada Filosofis Pendidikan Muhammadiyah, yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. 2) menata ulang visi, misi, dan tujuan LPTK-PTM yang disesuaikan dengan kultur/budaya, sosiologis, karakter, dan potensi PTM masing-masing. 3) Pengembangan Renstra (rencana strategis) untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan suatu LPTK Muhammadiyah yang dapat dijadikan sebagai arah pengembangan lembaga untuk mewujudkan tatanan moral yang menjadi landasan kuat dalam pendidikan di Muhammadiyah. 4) Komitmen bersama, yang diawali dari komitmen pimpinan PTM untuk mendukung berjalannya kegiatan *fastabiqul khoirot* dilingkungan PTM.

Kata-kata kunci: Redesain, Pendidikan Guru, LPTK-PTM

---

## **PENDAHULUAN**

Jauh sebelum negara dan pemerintah Indonesia lahir, sejak 18 November 1912 Muhammadiyah telah berjuang untuk bangsa. Ribuan amal usaha dibidang pendidikan yang mencakup pondok pesantren (82), sekolah luar biasa (71), PAUD (6723), TK ABA (7623), Sekolah Dasar / MI (2604), SMP/MTs (1772), SMA/SMK/MA (1143), dan Perguruan Tinggi (172). (Anonim, 2011:22). Peran amal usaha Muhammadiyah tidak hanya dibidang pendidikan saja melainkan juga di bidang kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, dan program-program kemasyarakatan yang sepenuhnya dikhidmatkan untuk kemajuan bangsa. Dengan banyaknya sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah, maka kebutuhan akan pendidik (guru) di sekolah-sekolah Muhammadiyah juga relatif banyak. Karena ini menyangkut estafet dalam membangun peradaban masa depan, tentunya proses pendidikan guru di Muhammadiyah tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Untuk itu, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sangat memegang peranan dalam menghasilkan guru-guru yang berkualitas, sehingga mampu melanjutkan estafet membangun peradaban bangsa melalui jalur pendidikan. Amanat yang tertulis dalam UU No 14 Tahun 2005 Pasal 6 disebutkan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Guru merupakan orang yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didik dengan berbagai metode mengajar yang dikuasainya tentu tidak lepas dari pedoman pengajaran guru yang sesuai dengan standar kompetensi. selain itu pula guru harus bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di kelas, bahkan sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah.

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 mengamanatkan bahwa Guru adalah bidang pekerjaan profesi; karena itu, untuk menjadi guru harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain: (1) Memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-IV; dan (2) Memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial,

dan kepribadian yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik. Disamping itu pula, guru sebagai pelaksana pendidikan nasional merupakan faktor kunci sebagai pencerdas dan penerap ilmu pengetahuannya kepada anak bangsa, sehingga guru mempunyai peranan yang amat penting yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan trampil untuk mengembangkan anak didiknya, dengan berbagai kompetensi yang bervariasi. guru yang profesional paling tidak harus memiliki kepribadian matang, mampu mengembangkan diri, memiliki penguasaan ilmu yang kuat, memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu dan teknologi, serta dapat mengembangkan profesi secara berkesinambung.

Banyaknya harapan-harapan positif tentang kualitas guru, menuntut LPTK untuk berusaha dalam memfasilitasi kemajuan pencapaian kompetensi guru melalui pelaksanaan program percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru. Hal itu, perlu segera dilakukan dengan berasumsi besarnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan dan juga didasarkan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, di mana meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Ditambah lagi dengan tuntutan guru harus memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan memiliki kompetensi sebagai tenaga dan agen pembelajaran. Oleh karena itu, visi dan misi LPTK harus diarahkan untuk benar-benar menyiapkan pendidik-pendidik dan tenaga kependidikan lain yang memiliki kualifikasi sebagaimana yang telah digariskan dalam kebijakan pemerintah.

Begitu pentingnya peran LPTK dalam mendidik dan menyiapkan kader guru masa depan menjadi tugas yang tidak ringan. Selama ini proses pendidikan guru yang ada di lembaga pendidikan guru terbagi dalam lima tahapan yaitu: 1) proses pendidikan dalam kelas, 2) proses pendidikan ekstrakurikuler, 3) proses pendidikan praktik keguruan, 4) proses pendidikan luar sekolah, dan 5). Proses

akhir pendidikan (Oemar Hamalik, 2002: 14-15). Realitas dilapangan dalam implementasi ke lima tahapan proses pendidikan guru tersebut dengan pendekatan sistem kredit semester (SKS) yang pelaksanaannya lebih kepada pengguguran matakuliah sehingga terkesan digarap asal-asalan. Hal itu, sangat kentara di LPTK swasta, sehingga banyak keluhan dan complain yang ditujukan pada LPTK swasta khususnya PTM dari pihak sekolah-sekolah mitra yang digunakan untuk pelaksanaan latihan praktik keguruan atau program pengalaman lapangan (PPL). Jika dianalisis lebih mendalam, maka proses penyiapan calon guru secara inti keilmuan ada di program studi masing-masing, dan tentunya perlu dilakukan cek and ricek siapa yang memproses mahasiswa calon guru tersebut, termasuk didalamnya kualifikasi dan kompetensi dosen yang memproses mahasiswa calon guru tersebut.

Muhammad Suyanto (2009:53-54) menyebutkan bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan proses yang kompleks, sedikitnya ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 1) aspek komponen pembelajaran yang mencakup tujuan, dosen, dan mahasiswa; kurikulum, metoda dan fungsi sosial institusi, 2) aspek filosofis yang mencakup konsep tentang realitas (Tuhan, manusia, alam), tentang pengetahuan (epistemologi) dan tentang etika kerja dan nilai-nilai hidup (aksiologi) yang mempengaruhi tujuan pendidikan; 3) aspek eksternal termasuk peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung pendidikan.

Oleh karena itu, dalam paper ini dipaparkan tentang pentingnya meredesign sistem pendidikan guru di LPTK-PTM yang sudah tidak sesuai dengan ruh dalam pendidikan guru yang sebenarnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sutaryo (2009:44) bahwa keselamatan negara dibentuk oleh pendidikan dan salah satu cara yang ditempuh dalam mendidik untuk melindungi negara adalah dengan pendidikan guru yang baik, karena peran guru sebagai kader bangsa yang meneruskan pemikirannya ke murid-muridnya.

## PEMBAHASAN

Profesi guru merupakan profesi yang mulia dan termasuk dalam kategori profesi yang meneruskan risalah kenabian (warrisatul al anbiya) dengan berbagai tugas mulianya. Oleh karena itu, jika memilih guru harus diambilkan dari sosok pribadi yang baik. Sebagaimana yang tercantum dalam Serat Wulangreh Dhandanggulo oleh Pakubuwono IV yang menyebutkan,

*“....lamun siro anggeguru kaki, amiliho manungso kang nyoto, ingkang becik martabate, sarto ingkang wruh ing ukum, kang ibadah lan wirangi, sukur oleh wong topo, ingkang wus amungkul, tan mikir pawehing liyan, iku pantes guronono kaki, sartane kawruhono.* (kurang lebihnya diterjemahkan secara kasar sebagai berikut: “Jika engkau memilih guru, pilihlah orang yang baik, yaitu yang bermartabat, ahli hukum, ahli ibadah dan tahu malu, ahli berpuasa, orang yang tidak mengedepankan kepentingan dunia, tidak berharap pemberian orang lain, itulah orang yang pantas dijadikan guru, dan ketahuilah”(Harsono & Muh. Joko Susilo, 2011:8)

Begitu jelasnya gambaran seorang guru, maka proses pendidikan guru di LPTK khususnya di PTM, seharusnya dikembalikan pada Filosofis Pendidikan Muhammadiyah, yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

### 1. Aspek ontologis

Manusia memiliki fitrah yang senantiasa mengadakan hubungan vertikal dengan sang Khaliq (Pencipta) sebagai manifestasi dari sikap teosentris manusia yang mengakui ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia yang diciptakan adalah manusia yang mampu mengemban tugas-tugasnya di muka bumi (hubungan horizontal), baik sebagai hamba Allah s.w.t. maupun khalifah-Nya. Untuk dapat mewujudkan fungsi kekhalifahannya, maka seseorang harus: a) memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan; b) bisa melaksanakan tugas/ pekerjaan sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki; c) bisa menemukan jati dirinya sebagai apa atau siapa dirinya itu; dan d) bisa bekerja sama dan berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain.

Di sisi lain, seorang khalifah tentunya memiliki pandangan hidup yang setidak-tidaknya dapat diketahui dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan, apa yang harus diperbuat untuk dirinya?; apa yang harus diperbuat untuk alam sekitarnya ?; apa arti lingkungan sosial bagi dirinya ? dan apa



yang diperbuat untuk lingkungan social ? serta apa yang harus diperbuat terhadap keturunan atau generasi penerusnya ?. Maka perlunya melakukan penyusunan kurikulum pendidikan Muhammadiyah adalah untuk: a) mengembangkan potensi peserta didik secara optimal serta interaksinya dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungannya tanpa mengabaikan nilai-nilai dan tradisi yang sudah mengakar di masyarakat dan masih relevan untuk dilestarikan; b) menumbuh-kembangkan nilai-nilai moral (akhlaq) dalam konteks perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada; c) menumbuhkembangkan kreatifitas peserta didik; d) memperkaya khazanah budaya manusia, dan e) menyiapkan peserta didik untuk memiliki kecakapan hidup serta mampu dan berani menghadapi tantangan hidup sesuai dengan zamannya yang dijiwai oleh spirit Islam.

## 2. Secara epistemologis

Pengembangan Pendidikan Muhammadiyah harus memiliki dasar rasional tertentu, yaitu Apa kompetensi lulusan dari proses pendidikan yang dilakukan ? output pendidikan akan berperan sebagai apa? Siapa yang akan membutuhkan para lulusan ? dan Bagaimana proses pembelajarannya agar tujuan yang diinginkan terwujud ?. Agar proses pendidikan lebih bermakna, maka dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Lulusan yang kompeten dalam hal apa yang akan dibentuk melalui program pendidikan?
- b. Kemampuan dasar apa dan bagaimana yang harus ditempuh lulusan lembaga pendidikan?
- c. Apa indikator-indikator atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa peserta didik sukses dalam mencapai kemampuan dasar dan hasil belajar yang telah ditetapkan?
- d. Agar peserta didik dapat mencapai indikator-indikator tersebut di atas, maka hal-hal, masalah-masalah, latihan-latihan dan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dikerjakan oleh mereka dalam proses pembelajaran ?
- e. Apa saja sarana dan sumber belajar yang dibutuhkan ?, tenaga kependidikan yang seperti apa dan bagaimana yang perlu diadakan?,

berapa biaya yang diperlukan ?, dan apa peran dan tanggung jawab pimpinan, unit-unit dan lain-lain untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan?

f. Berapa jam/ sks yang diperlukan untuk dapat mencapai hasil belajar atau mewujudkan indikator-indikator hasil belajar tersebut?

### 3. Secara aksiologis

Pendidikan Muhammadiyah mengarahkan peserta didik pada pengembangan kemampuan menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan tertentu. Tugas/ pekerjaan itu bisa berbasis pada:

- a. Kebutuhan pemerintah / kebutuhan *user* / para pengguna jasa hasil didik.
- b. Kebutuhan pengembangan akademik atau keilmuan.
- c. Kebutuhan lembaga pendidikan (sekolah-sekolah muhammadiyah) itu sendiri, dan
- d. Kebutuhan peserta didik itu sendiri.

Langkah selanjutnya proses penataan adalah diawali dari menata ulang kembali visi, misi, dan tujuan LPTK-PTM yang disesuaikan dengan kultur/budaya, sosiologis, karakter, dan potensi PTM masing-masing. Sebagai salah satu contoh LPTK di PTK harus mendesain visi, misalkan merubah visi dalam kalimat: *Terwujud universitas utama yang unggul dalam kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sesuai dengan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah* (visinya PTM-UHAMKA). Visi tersebut terinspirasi pada Persyarikatan Muhammadiyah dalam pengelolaan perguruan tinggi di lingkungannya yang mempunyai visi “Terbangunnya tata kelola Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang baik (*good governance*) menuju peringkat mutu berkelanjutan”. Kemudian menata ulang misi yang dikembangkan adalah sebagai berikut: (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan prinsip belajar sepanjang hayat, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan nilai-nilai hidup islami dalam rangka pembentukan insan cendekia; (2) Mengembangkan kebebasan berpikir ilmiah yang dijiwai oleh semangat ketauhidan; (3) Mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam berbagai bidang ilmu, teknologi dan seni; dan (4) Mewujudkan semua kegiatan LPTK-PTM

sebagai sarana dakwah. Tujuannya adalah (1) Mengantarkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, percaya pada diri sendiri, memiliki kemampuan akademik/profesional serta dapat menerapkan, mengem-bangkan/menciptakan teori-teori baru di berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta beramal secara ikhlas menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang di ridlai oleh Allah SWT; (2) Mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai ilmu pengetahuan serta pemanfaatannya untuk memajukan Islam, dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, memperkaya kebudayaan nasional dan mengupayakan kesejahteraan umat manusia; (3) Menyiapkan tenaga peneliti muslim dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan konsepsi pemikiran baru yang Islami dalam rangka menunjang sistem pendidikan Muhammadiyah dan sistem pendidikan nasional; dan (4) Menyiapkan kader-kader Muhammadiyah yang siap berkiprah di tengah masyarakat dalam rangka menuju cita-cita Muhammadiyah yaitu menjalankan syariat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah. (diambilkan dari visi, misi, dan tujuan PTM-UHAMKA).

Visi, misi, dan tujuan tersebut di atas dapat dijadikan acuan untuk mewakili LPTK Muhammadiyah yang sudah sesuai dengan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan suatu LPTK Muhammadiyah seyogyanya dituangkan dalam **rencana strategis** yang akan dijadikan sebagai arah pengembangan lembaga untuk mewujudkan tatanan moral yang menjadi landasan kuat dalam pendidikan di Muhammadiyah. Sebagai contoh strategi pengembangan yang dituangkan di LPTK UAD Yogyakarta dalam SK Rektor Nomor 79 Tahun 2004, sebagai berikut:

- a. Strategi pengembangan akademik yang berlandaskan pada program kualitas mahasiswa baru, kualitas proses belajar mengajar, kualitas lulusan dan kualitas lingkungan yang membentuk suasana akademik dan lingkungan yang kondusif secara umum.
- b. Strategi pengembangan keilmuan dan penelitian yang didasarkan kompetitif, konsistensi kualitas, menjadi bagian dari kerjasama dan pengembangan ilmu lintas bidang serta memiliki dampak positif terhadap masyarakat.
- c. Strategi pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas layanan pada masyarakat, peningkatan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Strategi pengembangan kerjasama, kerjasama dilakukan dalam aspek akademis dan non akademis didasarkan pada empati, sinergi, dan simbolis yang saling menguntungkan.
- e. Strategi pengembangan kemahasiswaan dan alumni; strategi pengembangan kemahasiswaan merupakan komplemen kegiatan selama belajar mengajar untuk memperkuat landasan agar hasil didik sukses dalam menjalani karir.
- f. Strategi pengembangan organisasi dan manajemen; strategi pengembangan manajemen dikembangkan manajemen dengan konsep SADA (Sentralisasi, Administrasi, dan Desentralisasi Akademik) dengan cara: a) menata kembali organisasi dan tata kerja universitas, b) melengkapi unit kerja yang diperlukan untuk menjalankan program universitas.
- g. Strategi pengembangan sarana dan prasarana; strategi ini diarahkan bagi dua sasaran penting, yaitu a) penopangan terhadap kegiatan akademik, b) pengenalan, penguasaan, dan pengembangan teknologi mutakhir.

Dalam rangka mendukung visi misi, tujuan untuk mewujudkan karakteristik pendidikan, ada 4 pilar dasar atau *general competences* yang merupakan basis persaingan pendidikan global yang wajib diketahui dan harus segera disiapkan oleh LPTK-PTM. Empat pilar pokok sebagai pendukung pencapaian visi misi, yaitu: *sistem manajemen mutu, teknologi informasi dan komunikasi, sistem pengendalian sumberdaya internal, dan manajemen sumberdaya insani berbasis kompetensi.*

Terakhir, hal yang tidak kalah penting adalah **komitmen**. Pimpinan PTM seyogyanya memiliki komitmen yang besar untuk mendukung berjalannya kegiatan *fastabiqul khoirot* dilingkungan PTM. Berbagai penelitian yang mengupas tentang leadership sudah sangat banyak dan mampu membuktikan bahwa aspek kepemimpinan dengan segala kebijakannya menjadi menentu awal dalam keberhasilan sebuah proses. Oleh karena itu, komitmen pimpinan merupakan tauladan yang sangat berharga untuk melancarkan segala kebijakan yang dikeluarkan, khususnya dalam proses penyiapan guru dari LPTK-PTM.

Dengan menggunakan skenario yang telah dipaparkan di atas, strategic pengembangan pendidikan guru di LPTK-PTM dalam suatu institusi akan dapat terwujud, sehingga akan menjadi salah satu icon keunggulan yang bisa ditonjolkan dalam pendidikan di lingkungan Muhammadiyah khususnya dan pendidikan dalam level nasional maupun internasional.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu melakukan penataan ulang (redesain) tentang proses pendidikan guru di LPTK-PTM. Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dalam kegiatan redesain pendidikan guru di LPTK-PTM, antara lain:

1. Proses pendidikan guru di LPTK khususnya di PTM, seharusnya dikembalikan pada Filosofis Pendidikan Muhammadiyah, yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
2. Proses penataan diawali dari menata ulang visi, misi, dan tujuan LPTK-PTM yang disesuaikan dengan kultur/budaya, sosiologis, karakter, dan potensi PTM masing-masing.
3. Pengembangan Renstra (rencana strategis) untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan suatu LPTK Muhammadiyah yang dapat dijadikan sebagai arah pengembangan lembaga untuk mewujudkan tatanan moral yang menjadi landasan kuat dalam pendidikan di Muhammadiyah.
4. Komitmen bersama. Diawali dari komitmen pimpinan PTM untuk mendukung berjalannya kegiatan *fastabiqul khoirot* dilingkungan PTM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2011). *Muhammadiyah Berkiprah Untuk Bangsa*. Suara Muhammadiyah No.24/TH.Ke-96, 16 – 31 Desember 2011
- Arief Furchan, dkk. (2005). *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Djohar, (2003). *Pendidikan Strategik Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta : LESFI
- Gunawan, dkk. (2009). *Menuju Jati Diri Pendidikan yang Mengindonesia*. Yogyakarta: Komite Rekonstruksi Pendidikan DIY bekerjasama dengan Gadjah Mada University Press.
- Harsono, (2008). *Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggi Perspektif Sosiopolitik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Harsono dan Muhammad Joko Susilo. (2011). *Pemberontakan Guru Menuju Peningkatan Kualitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Khoiruddin Bashori. (2010). *Menata Ulang Pendidikan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Proceedings Seminar Pendidikan Nasional, 30.Januari 2010
- Muhammad Joko Susilo. (2010). *Strategik Membangun Pendidikan Berkarakter di LPTK Muhammadiyah*. Yoyakarta : Proceedings Seminar Pendidikan Nasional, 30 Januari 2010
- Muhammad Suyanto. (2009). *Pendidikan Berlandaskan Keimanan di Tengah Pendidikan Sekuler di Indonesia*. Kumpulan tulisan dalam Menuju Jati Diri Pendidikan yang Mengindonesia. Yogyakarta: Komite Rekonstruksi Pendidikan DIY bekerjasama dengan Gadjah Mada University Press.
- Oemar Hamalik. (2002). *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Pedoman Akademik Uhamka tahun 2008
- Proposal hibah LPTK Swasta UAD tahun 2007
- Sutaryo. (2009). *Pendidikan yang Melindungi Segenap Bangsa Indonesia*. Kumpulan tulisan dalam Menuju Jati Diri Pendidikan yang Mengindonesia. Yogyakarta: Komite Rekonstruksi Pendidikan DIY bekerjasama dengan Gadjah Mada University Press.

## PERAN GURU DAN PENDIDIKAN GURU MASA DEPAN

Oleh:

**Bambang Setiyo Hari Purwoko**  
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY  
e-mail: [bambang\\_shp@yahoo.co.id](mailto:bambang_shp@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Indonesia, pada saat ini tengah mendidik banyak sekali guru dan calon guru untuk berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Mereka dididik di berbagai LPTK, baik negeri maupun swasta yang berada di ibu kota propinsi, kabupaten/kota, dan juga di Universitas Terbuka (UT). Di tangan mereka nantinya praksis dan masa depan pendidikan Indonesia akan ditentukan.

Di setiap zaman yang berbeda, tuntutan terhadap pendidikan dan peran guru juga berbeda. Pada zaman agrikultur, orang dituntut kerja keras, dan mencari nafkah melalui kerja fisik. Peran guru dalam masyarakat agrikultur adalah mengajarkan pengetahuan sederhana bercocok tanam dan budi pekerti. Zaman industry, menuntut orang untuk dapat bekerja dengan standarisasi. Peran guru adalah mengajarkan berbagai macam standar yang diperlukan untuk dapat bekerja di industry. Pada zaman *cybernetic* menuntut orang untuk mengembangkan spesialisasi dan talenta individual lainnya.

Peran guru di zaman *cybernetic* tidak lagi sebagai pengajar yang bertanggung-jawab menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Peran ini dapat diambil alih oleh computer, guru tinggal menambahkan muatan pelengkap, membantu siswa yang menghadapi masalah spesifik dan membutuhkan bimbingan secara individual. Jika pendidikan sekolah mengarah ke titik demikian, maka diperlukan penyesuaian dalam pendidikan guru dan calon guru. Pendidikan guru harus mengembangkan guru yang kreatif, menguasai kompetensi inti, dan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

Kata kunci: guru, pendidikan, cybernetic

### Pendahuluan

Pendidikan salah satu fungsinya adalah mempersiapkan agar generasi muda mampu mengembangkan kehidupannya sesuai dengan tantangan yang dihadapi di lingkungannya baik lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Tantangan kehidupan terus berubah sejalan dengan perubahan lingkungan, dan perubahan itu terjadi dalam periode yang semakin cepat, terutama karena dipicu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perubahan tantangan kehidupan membawa implikasi, di antaranya perubahan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan. Masyarakat pada zaman agrikultur, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka dituntut untuk kerja keras, dan mencari nafkah melalui kerja fisik. Tantangan dunia pendidikan dan peran yang dapat dilakukan para guru dalam masyarakat agrikultur adalah mengajarkan pengetahuan sederhana bercocok tanam dan menanamkan budi pekerti.

Pada zaman industri, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan adalah mempersiapkan generasi muda agar mampu mengembangkan kehidupannya dalam lingkungan budaya dan ekonomi industri. Budaya industri menuntut orang untuk dapat bekerja dengan standarisasi, oleh karena itu untuk memenuhi akan kebutuhan standarisasi orang harus bersekolah. Tantangan dunia pendidikan sekolah dan peran para guru adalah mengajarkan dan melatih generasi muda untuk menguasai suatu keterampilan yang diperlukan sebagai persiapan bekerja di industri. Dalam pelaksanaan pekerjaan, industri menerapkan standarisasi sehingga tidak lagi menekankan kualitas dan talenta individual pekerjanya.

Budaya industri tidak menekankan atau tidak memberi penghargaan terhadap keterampilan dan kualitas spesifik individu. Sebagai contoh, jika seseorang yang telah mempelajari dan memiliki keterampilan kemudian bekerja pada suatu industri atau perusahaan yang seharusnya menggunakan keterampilan yang dipelajari dan dimiliki pekerja, dalam kenyataannya sistem organisasi perusahaan hanya akan memanfaatkan keterampilan tertentu yang berguna bagi perusahaan. Sementara keterampilan-keterampilan lain yang mungkin dimiliki pekerja tetapi tidak relevan dengan fungsi organisasi perusahaan akan dibiarkan begitu saja, tidak akan diakui dan dihargai.

Kini kita memasuki abad 21, zaman industri berubah menjadi *cybernetic* atau zaman internet. Zaman *cybernetic* berbeda dengan zaman industri yang lebih menitikberatkan pada standarisasi. Pada zaman *cybernetic* orang dapat belajar di rumah maupun di sekolah, dapat bekerja di rumah atau di tempat kerja. Pilihan untuk sekolah dan bekerja pun menjadi lebih banyak, oleh karena itu sifat dan peran pendidikan pun menjadi berbeda. Zaman *cybernetic* menuntut orang untuk mengembangkan spesialisasi dan talenta individual lainnya, yang selama zaman



industri tidak dapat dikembangkan karena lebih menekankan standarisasi dan keseragaman. Kini orang dapat mengandalkan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya untuk bekerja memperoleh penghasilan besar, untuk melayani kebutuhan masyarakat sekaligus mengembangkan potensinya melalui internet.

Internet telah memungkinkan terjadinya perubahan besar di dalam cara kita memperoleh informasi, sehingga membawa perubahan besar pula (revolusi) di dalam cara-cara kita belajar atau memproses informasi. Mau tidak mau, dunia pendidikan harus menyesuaikan diri dengan keberadaan internet ini. Peran guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dengan adanya internet akan berubah. Dengan internet dan teknologi computer tugas guru tidak lagi hanya menyediakan materi (*content*) pembelajaran, atau mengajarkan, membimbing, dan melatih suatu keterampilan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut di sekolah, sebagian besar diserahkan pada computer dan internet, guru hanya tinggal memberikan muatan-muatan pelengkap, membantu siswa tertentu yang secara spesifik mengalami kesulitan memahami pembelajaran, dan memberikan penguatan-penguatan (*reinforcement*) yang diperlukan.

Perubahan besar peran pendidikan sekolah dan peran guru dalam pendidikan di sekolah tersebut kini tengah terjadi, dan itu harus diantisipasi khususnya oleh lembaga pendidikan guru, baik pendidikan dalam jabatan maupun pra jabatan. Permasalahan yang pertama harus diidentifikasi adalah, pada zaman *cybernetic* ini peran apa sajakah yang akan dominan dilakukan oleh guru, dan bagaimanakah membekali para guru dan calon guru agar dapat menjalankan peran tersebut dengan baik?

### **Peran Pendidikan di Era *Cybernetic***

Di setiap era, tuntutan akan bakat dan keterampilan yang dimiliki individu dalam masyarakat akan berbeda-beda, oleh karena itu tuntutan terhadap peran pendidikan yang mempersiapkan generasi muda agar mampu mengembangkan kehidupan di setiap zamanya juga berbeda-beda. Era agrikultur, saat kehidupan masyarakat bertumpu pada pertanian, menuntut orang untuk kerja keras dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diperlukan kerja fisik. peran pendidikan adalah mengajarkan bagaimana bercocok tanam. Pada era industri, pendidikan berperan

mempersiapkan generasi muda untuk dididik dengan keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan untuk dapat bekerja di industri. Jenis pekerjaannya sudah terstandarisasi, sehingga kemampuan khusus dan bakat yang dimiliki individu tidak dapat dihargai.

Pada era *cybernetic* atau era internet yang sedang kita jalani sekarang ini, terjadi revolusi dalam cara orang memperoleh informasi dan juga dalam cara belajar atau mengolah informasi. Sistem pendidikan dalam era *cybernetic* agar tetap dapat berperan dalam masyarakat harus juga mengalami perubahan. Menurut Wen (2003:63-85) perubahan peran yang harus dilakukan dunia pendidikan itu mencakup empat hal, (1) dari pendidikan yang berorientasi pada pengetahuan menjadi pengembangan ke segala arah secara seimbang, (2) dari pembelajaran bersama menjadi pembelajaran individual yang didesentralisasikan, (3) dari pembelajaran yang terbatas pada tahapan pendidikan menjadi pembelajaran seumur hidup, dan (4) dari pengakuan diploma menjadi pengakuan kemampuan-kemampuan nyata.

Konsep dasar perubahan dari pendidikan yang berorientasi pada pengetahuan menjadi pengembangan ke segala arah secara seimbang, adalah menggabungkan dua aliran pendidikan yang selama ini selalu dipertentangkan. Bahwa apa pun yang dipelajari seseorang di sekolahnya nantinya harus dapat bermanfaat bagi masyarakat, jadi pendidikan harus praktis, yang telah dipelajari harus diterapkan dengan baik. Pada sisi lain pendidikan sekolah juga harus berperan di dalam mengembangkan potensi individu. Sekolah bukan sekedar tempat pelatihan demi pekerjaan dan karir, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan umum atau kapasitas belajar para siswanya, seperti kemampuan berpikirnya, kemampuan mentalnya, dan kemampuan reflektifnya. Dengan teknologi computer kita dapat mempersingkat waktu pembelajaran untuk memperoleh dan membangun landasan pengetahuan. Para siswa dapat mempelajari apa yang bermanfaat praktis sambil juga melakukan kegiatan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kapasitas belajarnya.

Pengertian dari pembelajaran bersama (klasikal) menjadi pembelajaran individual yang didesentralisasikan adalah, bahwa ketika pemakaian teknologi

computer telah mencapai tingkatan tertentu, para siswa tidak perlu lagi berkumpul di suatu tempat belajar, hadir di ruang kelas selama waktu tertentu. Para siswa dapat mempelajari apa yang harus dipelajari menurut kecepatannya masing-masing. Dengan cara ini guru akan menjadi lebih punya banyak waktu untuk mengembangkan muatan pembelajarannya.

Pengertian dari pembelajaran yang terbatas pada tahapan pendidikan menjadi pembelajaran seumur hidup adalah dipicu oleh kenyataan bahwa segala sesuatu berubah dengan cepat karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita pelajari sebelumnya untuk mencari nafkah, maka itu sudah tidak memadai lagi. Pabrik computer harus memproduksi model baru tiap tiga bulan, banyak ahli computer tidak lagi menjadi ahli apabila mereka tidak mengikuti perkembangan dalam teknologi computer. Semua yang telah dipelajari di sekolah, dapat menjadi benar-benar tidak berguna akibat perkembangan social, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. siapa yang tidak siap belajar tiada henti akan ketinggalan, karena apa yang kita pelajari akan cepat menjadi usang. Di sinilah permasalahan dalam pendidikan kita termasuk pendidikan para guru. Sistem pendidikan harus berani mengadakan perubahan secara radikal agar tercipta pembelajaran seumur hidup karena hanya dengan demikianlah pendidikan dapat dirasakan benar-benar efektif bagi individu maupun masyarakat.

Pengertian dari pengakuan diploma menjadi pengakuan atas kemampuan-kemampuan nyata menekankan bahwa kini banyak individu yang sukses di dalam suatu bidang tidak menyelesaikan kuliah dan tidak memiliki gelar. Dapat terjadi seseorang yang tidak bergelar memiliki kemampuan nyata yang lebih baik dari yang bergelar. Menjadi penting saat ini adalah bagaimana mengenali seseorang dari kemampuan nyata yang dimilikinya dari pada sekedar gelarnya.

### **Peran Guru dan Pendidikan Guru dalam Era *Cybernetic***

Kalau pendidikan sekolah dapat ditingkatkan dengan lebih mengintensifkan pembelajaran dengan bantuan teknologi computer, akan terjadi perubahan peran guru dalam suatu proses pendidikan dan pembelajaran. Guru tidak lagi terbatas menyediakan *content* pembelajaran dan mengajarkan atau melatih keterampilan.

Sebagian tugas guru demikian sebagiannya dapat diserahkan kepada computer, tugas guru kemudian mengembangkan muatan-muatan pelengkapny agar tujuan pembelajaran dapat tercapai oleh seluruh siswa meskipun mereka mempunyai kecepatan belajar yang berbeda-beda.

Peran-peran apakah yang seharusnya dilakukan guru dalam era *cybernetic* ini, secara sederhana Wen (2003:103) mengidentifikasi, di antaranya (1) memberi bimbingan kurikulum, (2) melakukan evaluasi kemajuan pembelajaran, (3) memberi bimbingan dalam menjalani kehidupan, (4) member konseling dalam perencanaan kehidupan, dan (5) pengembangan kreativitas serta potensi siswa.

Tugas memberi bimbingan kurikulum tetap harus dilakukan guru kepada para siswa, karena walaupun teknologi computer dapat memberdayakan siswa untuk mendapatkan pengetahuan dasar sendiri, guru tetap harus membimbing, agar tidak terjadi miskonsepsi, atau hasil belajar yang keliru. Guru harus berupaya memperhatikan kebutuhan unik siswa dan membimbingnya untuk mencapai kemajuan belajar sebagaimana tuntutan kurikulum sesuai dengan kecepatan belajarnya sendiri.

Tugas mengevaluasi kemajuan pembelajaran harus dilakukan oleh guru sendiri terhadap semua siswa agar hasilnya lebih akurat, bermanfaat bagi kedua belah pihak, dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan terkait dengan tindak lanjut apa yang perlu dilakukan atas hasil evaluasi yang dicapai setiap siswa. Computer dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengukur pencapaian hasil, ketepatan, dan kecepatan pembelajaran dengan akurat, konsisten, dan sangat obyektif. Akan tetapi computer tidak dapat mempertimbangkan banyak factor seperti fisik, mental, emosional dan sebagainya yang mungkin mempengaruhi seorang siswa dalam proses pembelajaran. Belajar merupakan proses yang bersifat sangat pribadi, oleh karena itu dalam hal-hal yang lebih kompleks seperti factor-faktor pribadi, peran guru dalam melakukan evaluasi tidak tergantikan. Guru dibutuhkan untuk mengevaluasi kondisi pribadi siswa, keefektivan gaya belajarnya, dan guru harus mampu menemukan solusi jika ditemukan seorang siswa kurang efektif dalam belajarnya, sampai yang bersangkutan menemukan bidang dan metode yang cocok serta efektif baginya sendiri.

Apabila pendidikan sekolah berkembang ke tingkat pemakaian computer secara intensif dan menjangkau semua bidang sebagai media pembelajaran, maka akan terjadi perubahan radikal peran guru dalam dunia pendidikan termasuk dalam pendidikan gurunya. Mungkin peran guru akan sedikit tereduksi khususnya dalam kegiatan belajar mengajar, karena sebagian tugasnya di kelas tergantikan oleh computer. Akan tetapi pada saat yang sama akan muncul peran lain dalam pembelajaran yang sama pentingnya. Peran guru akan berubah dari pelaksana, instruktur, dan penanggungjawab, menjadi perencana, pembimbing, pendamping, dan penasehat.

Dalam aspek pendidikan guru, yang diharapkan adalah mengembangkan sistem pendidikan guru yang mampu memberikan pengalaman belajar sehingga menghasilkan; (1) guru yang kreatif yang mampu memenuhi kebutuhan orang lain (siswa dan kolega), (2) guru yang mempunyai kompetensi ini yaitu merencanakan content pembelajaran, membimbing proses pencarian dan pengolahan informasi oleh siswa, mengevaluasi hasil, dan (3) guru yang mempunyai kemampuan-kemampuan khusus sebagai pembimbing dan penasehat siswa yang memiliki permasalahan spesifik dalam belajar.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat diambil beberapa hal penting sebagai kesimpulan, di antaranya:

1. Peran guru dalam era *cybernetic* atau internet mengalami perubahan yang cukup radikal, akibat dari pelaksanaan pembelajaran yang bergeser dari semula hanya mengutamakan pengetahuan menjadi pengembangan semua kapasitas belajar ke segala arah, dari pembelajaran bersama atau klasikal menjadi pembelajaran individual yang didesentralisasikan
2. Pendidikan guru, baik dalam jabatan maupun pra jabatan dituntut mampu mengembangkan perangkat pengalaman belajar yang mampu menghasilkan guru yang sesuai dengan tuntutan peran guru di era *cybernetic*, yaitu guru kreatif yang mampu memenuhi kebutuhan orang lain, mempunyai kompetensi inti, dan kemampuan-kemampuan khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fasli Jalal, Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Nurul Zuriah. 2007. Pendidikan moral dan budi pekerti dalam perspektif perubahan. Jakarta: Bumi Aksara
- Reni Akbar Hawadi. 2002. *Identifikasi kecerdasan intelektual melalui metode non-tes, dengan pendekatan konsep kecerdasan renzulli*. Jakarta: Grasindo Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wen, Sayling. 2003. *Future of education (masa depan pendidikan)*. Batam Centre: Lucky Publishers.

## **GURU PROFESIONAL DAN RELEVANSI PENDIDIKAN**

**Abstrak**

**oleh**

**Taty Fauzi  
Mardiana**

Berbicara tentang guru selalu terkait dengan pekerjaan mengajar, dan mendidik yang orientasinya membawa peserta didik mencapai kematangan berpikir dan mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Persyaratan-persyaratan mutlak dalam penyelenggaraan pendidikan selain persyaratan fisik kompetensi profesional yang ditandai dengan “*informed responsive*”, memiliki kapasitas kecerdasan serta sifat-sifat edukasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan laju pertumbuhan dan perkembangan dunia pendidikan kualifikasi akademik guru perlu diarahkan dan ditingkatkan agar prinsip linearitas pendidikan dapat dipenuhi, dengan demikian proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Peran guru tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu berubah ke arah “*the word is my class*” karena seluruh informasi digunakan dalam proses komunikatif pembelajaran sehingga peran guru tidak lagi sebagai “*informeddiary*”

**Kata Kunci : Profesional Pendidikan, Relevansi, *the word is my class***

### **A. Pendahuluan**

Laju perkembangan teknologi dan informasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berimbas positif pada kehidupan dan kesejahteraan guru di Indonesia. Perhatian pemerintah dengan program remonerasi dan sertifikasi guru dan dosen menunjukkan betapa pemerintah mengupayakan perbaikan nasib guru khususnya. Namun upaya menuntut adanya perimbangan dengan peningkatan kompetensi agar proses pembelajaran

menghasilkan luaran yang bermutu. Arus teknologi yang mewarnai proses belajar mengajar membawa peserta didik pada berpikir kritis, dan belajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Fenomena ini tidak dapat dibendung, oleh karena itu pula siswa membutuhkan seorang guru yang benar-benar mampu memfasilitasi mereka dalam proses pembelajaran. Tuntutan ini seyogyanya mampu menghadirkan sosok guru ideal yang siap mendampingi peserta didik menembus laju teknologi . Tantangan ini merupakan PR (pekerjaan rumah) guru yang harus cepat dan benar-benar dikerjakan dengan tanggung jawab Sesuatu yang tidak baik, jika di era globalisasi ini guru tidak akrab dengan teknologi, sekurang-kurangnya ia mampu melakukan komunikasi ilmiah dengan bantuan perangkat lunak. Namun pada kenyataannya kemampuan yang dimiliki siswa lebih baik. Bagaimana seseorang guru dapat tampil prima dalam proses pembelajaran jika gurunya sendiri tidak mengikuti perkembangan dunia pendidikan.

Dalam laju proses pembelajaran disekolah siswa seringkali mengidolakan gurunya sebagai sosok yang serba bisa. Tuntutan tersebut esensinya merupakan sanjungan untuk para guru merebut perhatian siswa dengan menampilkan sosok yang memiliki karakter ideal, cerdas, sabar, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekolah,, dan dimasyarakat. Seirama dengan terjadinya perubahan kurikulum pendidikan nasional (BSNP, ) ber dampak pula pada tanggungjawab dan kinerja guru. Guru dituntut untuk cepat merespon dan melakukan upaya pembaharuan dengan melakukan inovasi dan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan ilmu serta teknologi.

Salah satu yang dapat dilakukan guru agar dalam proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan maka guru harus meningkatkan kemampuan akademiknya serta selalu merespon perkembangan ilmu pengetahuan. Cara mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang konvensional sudah seharusnya diubah dengan melakukan pendekatan atau strategi pembelajaran yang memadukan berbagai metode sesuai dengan pokok materi, yang intinya melibatkan siswa untuk berpikir kritis.



## **B. Permasalahan**

Menghadapi persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan yang beragam mulai dari pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, efisiensi pendidikan dan relevansi pendidikan, profil guru professional seperti apakah yang diharapkan di era global ini?

## **C. Pembahasan**

Menurut Djalal (2010) dalam Kompas menjelaskan tentang kondisi guru di Indonesia saat ini, bahwa lebih kurang 2,6 juta guru tidak layak mengajar, karena kualifikasi/kompetensi akademik tidak memenuhi kriteria. Selanjutnya ditegaskannya bahwa lebih jauh dijelaskannya bahwa saat ini guru yang tidak layak mengajar berjumlah lebih kurang 912.505 orang meliputi; 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 63.961 guru SMK. Sebuah berita yang mengesankan. Melihat kondisi ini bagaimana mungkin kita dapat mencerdaskan dan memandirikan peserta didik, karena pada kenyataannya gurunya tidak berkualitas. Kondisi ini menyiratkan bahaya, karena mutu pendidikan tercermin dari *output* yang dapat bersinergi dengan kebutuhan masyarakat.

Kondisi tersebut direspon oleh pemerintah, terbukti keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Pendidikan Nasional menetapkan pula Peraturan Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan untuk mengatur pelaksanaan uji kompetensi guru. Uji kompetensi tersebut dilakukan melalui penilaian portofolio. Guru yang lulus akan mendapat sertifikat pendidik sebagai guru professional. Pemerintah akan melakukan tinjauan ulang terhadap kinerja guru dan dosen setiap tahunnya.

Pemerintah menjanjikan dan memenuhi kesejahteraan, kesehatan, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak guru. Gambaran guru yang miskin jauh dari informasi setidaknya mulai terkikis. Kualitas hidup guru dan dosen (*Human Development Index*) mulai membaik.

Esensinya banyak permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan khususnya dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan yang sangat kompleks, khususnya pendidikan. Dari banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena pengaruhnya pada kehidupan manusia tidak dapat diabaikan. Pendidikan sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Untuk memperoleh luaran yang bermutu gurulah yang seharusnya menyadari bahwa mereka perlu melakukan sebuah upaya *self actualization*.

BSNP (2011) menjelaskan bahwa sejalan dengan perkembangan IPTEK, berbagai tantangan pendidikan baik secara global, nasional, dan lokal. Tantangan-tantangan itu harus dihadapi dengan sebaik-baiknya mulai dari tatanan konstitusional, kebijakan, manajerial, dan operasional dalam berbagai aspek dan dimensi. Di era globalisasi terjadi perkembangan yang amat pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menantang dunia pendidikan melalui proses pembelajaran. Kecepatan arus teknologi menjadi tantangan bukan hambatan, namun seringkali ini dijadikan alasan bagi guru yang kurang respon terhadap IPTEK dengan mengkambinghitamkan pemerintah terlalu banyak aturan dan alasan yang ia buat sendiri. Era globalisasi dan pasar bebas, dalam proses pembelajaran harus menyesuaikan dengan trend, manakala guru sebagai tenaga pendidik tidak menyesuaikan dan mengikuti perkembangan maka kualitas pembelajaran dipertanyakan.

Menyikapi uraian di atas Surya dalam Tucker (2001) yang disampaikan pada Seminar dan Workshop Bimbingan dan Konseling di Bandung mengidentifikasi bahwa ada 10 tantangan memasuki abad 21 yaitu: 1) kecepatan, 2) kenyamanan, 3) gelombang generasi, 4) pilihan, 5) ragam gaya hidup, 6) kompetisi harga, 7) pertambahan nilai, 8) pelayananan pelanggan, 9) teknologi

sebagai andalan, 10) jaminan mutu dalam konteks global. Merujuk dari 10 tantangan yang dikemukakan di atas dalam perkembangannya banyak mengalami perubahan, pembaharuan dalam berbagai aspek dan dimensi sebagai reaksi dan adaptasi terhadap tuntutan global. Globalisasi itu sendiri ditandai dengan perubahan yang cepat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyempitnya ruang, waktu, dan hilangnya batas komunikasi, menjadikan interaksi antar individu lebih terbuka. Gambaran ini mendorong lajunya perkembangan pendidikan dengan trend tertentu dalam tataran konsep, implementasi keprofesian.

Perubahan besar yang terjadi dalam dunia kerja mensyaratkan pula bahwa mutu lulusan harus mampu bersaing dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Persyaratan dan karakteristik ketenagakerjaan yang selalu berubah menuntut professional guru untuk selalu mentransfer ilmu pengetahuan yang selalu *up to date*. Hal ini sejalan dengan pendapat Rojewski (2009), Moratis, & Baalen, (2009) bahwa transformasi global terhadap ekonomi berbasis pengetahuan, industri kreatif, merupakan tuntutan yang kuat untuk pengembangan kualitas masyarakat, dalam ajang kompetisi internasional dan regional yang mendorong adanya perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi peningkatan keterbukaan, fleksibilitas, kompleksitas, dan ketidakpastian dalam masyarakat

Sejalan dengan uraian tersebut Tessaring (2009), menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum membutuhkan keterampilan dalam mencari kualifikasi kompetensi (guru) yang sesuai dengan tuntutan masa depan, dan pada akhirnya akan berimbas bagaimana peserta didik sebagai indeks relevansi pendidikan dapat mengimplementasikan isi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia kerja.

Menyongsong abad 21 guru dihadapkan pada tantangan. Sebagai seorang yang profesional Guru perlu melihat jauh kedepan gambaran pendidikan masyarakat era globalisasi Sebagaimana dijelaskan Tilaar (2005), bahwa tiga masyarakat abad 21 memiliki karakteristik sebagai berikut; 1) masyarakat

teknologi, 2) masyarakat terbuka, 3) masyarakat madani. Masyarakat teknologi adalah masyarakat yang telah meleak teknologi dan menggunakan berbagai aplikasi teknologi, sehingga dapat mengubah cara berpikir dan bertindak bahkan mengubah bentuk dan pola hidup manusia yang sama sekali berlainan dengan kehidupan sebelumnya. Kemajuan teknologi komunikasi telah membuat jarak dan waktu semakin pendek dan cepat, sehingga seolah-olah dunia menjadi satu tanpa ada sekat yang membatasi komunikasi antar negara. Guru harus mampu mengantisipasi tuntutan masa depan dengan membaca peluang yang ada. Membangun pendidikan menja sesuatu yang harus diketahui dan mampu diakses oleh semua peserta didik dan menjadi sebuah keharusan, baik sebagai perspektif internal dan kaitannya dengan perspektif eksternal. Sehingga masyarakat Indonesia mampu bersaing dengan Negara lain dalam semua aspek kehidup.

Wibowo (2011) dalam tulisannya mengemukakan bahwa *performance* guru yang professional harus menunjukkan kemampuan seperti berikut : 1) memiliki kemampuan berpikir kritis, khususnya dalam konteks pemecahan masalah, 2) memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama, 3) memiliki kemampuan mencipta dan memperbaharui, 4) memiliki literasi teknologi informasi (mampu memanfaatkan teknologi) dan 5) memiliki kemampuan belajar kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi

Berdasarkan pada tuntutan tersebut artinya selain tenaga guru yang professional isi kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi harus menyesuaikan dengan perubahan yang diinginkan dunia kerja Isi kurikulum harus dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat.

#### **D. Implikasi dan kesimpulan**

Tantangan bagi sebuah profesi khususnya guru menyiratkan kerja keras yang harus dikerjakan dengan segera. Tuntutan akan kemampuan akademik, implementasi kurikulum dalam proses pembelajar menuntut kesediaan dan ketersediaan sarana – prasarana bagi terjadinya peningkatan kualitas pendidikan. Kompetensi profesi, perubahan kurikulum , menuntut perhatian pemerintah untuk

memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran di kelas dan diluar kelas. Semua komponen berproses mulai dari *outcomes* yang memenuhi kriteria sampai pada sasaran akhir terpenuhinya *output* (luaran) yang bermutu. Sebagaimana dikemukakan para pendidik yang bijak akan mampu mencetak *outcomes* (peserta didik) yang berkarakter cerdas memperoleh pengalaman dan pembelajaran dari suasana akademik yang kondusif, menyenangkan yang lekat dengan *performance* guru sebagai pendidik professional. Bukanlah sesuatu yang berlebihan apabila Drijarkara dalam Tilaar (2005) menyatakan bahwa esensinya manusia tersebut adalah makhluk yang senantiasa "meng-ada" yang tidak pernah puas dan selalu melakukan upaya pembaharuan untuk mencari sesuatu yang lebih baik, konsep ini pula menurut penulis yang menjadi salah satu keinginan manusia untuk "*self actualitazion*".

Upaya untuk menjawab tantangan dan memperbaiki mutu pendidikan nasional di Indonesia akan berhasil jika guru dan dosen berkomitmen untuk melakukan semua ketentuan, peraturan pemerintah melalui pendidikan di semua jenjang sebagai upaya menjawab tantangan bahwa kualifikasi akademik guru pada tahun 2012 ini minimal berpendidikan S1, untuk dosen minimal S2 dengan jalur pendidikan yang linear dengan pendidikan sebelumnya. Jika ini terpenuhi kita mengharapkan dalam implementasinya guru dan dosen dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, kreatif dan inovatif. Dan mampu memproduksi luaran (*Outcomes*) yang bermutu.

Secara universal guru harus mampu mengantisipasi tuntutan masa depan dengan membaca peluang yang ada. Membangun pendidikan menjasesuatu yang harus diketahui dan mampu diakses oleh semua peserta didik adalah sebuah keharusan, baik dalam tataran perspektif internal dan kaitannya dengan perspektif eksternal. Sehingga masyarakat Indonesia mampu bersaing dengan Negara lain dalam semua aspek kehidupan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, HM. Idochi dan YH Amir (2001). **Administrasi Pendidikan, Teori, Konsep, dan Isu**. Bandung : Program Pascasarjana UPI
- Jalal, Fasli. (2007). **Tantangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di Indonesia** (makalah). Seminar Peningkatan Pendidikan Mutu Melalui Sertifikasi& Kualifikasi tanggal 16 Januari 2007 Palembang
- Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Th 2005. **Standar Nasional Pendidikan**.
- Sardiman, AM. (2005). **Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar**. Jakarta : PT. Rajawali Grasindo
- Sudira Putu , M.P (2011) Pengembangan Kurikulum Politeknik Negeri Bali (Makalah). [Http : //www.](http://www.) diakses 28 Desember 2011
- Surya. (2010). **Tatangan Era Globalisasi Menuju Abad 21**. Bandung. (makalah)
- Tirtarahardja, Umar, S.L. Lasulo (2005). **Pengantar Pendidikan**. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Wibowo, Mungin Eddy. (2011). **Tantangan Guru Masa Depan**. Semarang : Unes. [Http: //www.](http://www.) (diakses tanggal 13 Desember 2011)

**Biodata Penulis :**

Nama Lengkap : Dr. Taty Fauzi  
Nip : 19620216 198703 2 002  
Jabatan Struktural :  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Alamat Kantor : Universitas PGRI Palembang  
Alamat Surat : Jl. Dempo Raya Gg. Kemiling No. 8C RT.31/11  
Kelurahan Silaberanti 30252  
Telpon/Faks : 0711-513546 / 0811781815  
E-mail : [taty.fauzy@yahoo.co.id](mailto:taty.fauzy@yahoo.co.id)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

<b>Tahun Lulus</b>	<b>Perguruan Tinggi</b>	<b>Bidang Spesialisasi</b>
S-1 (1986)	Universitas Sriwijaya Palembang	Pendidikan Umum
S-2 (2003)	Universitas Negeri Padang	Bimbingan dan Konseling
S-3 (2010)	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Bimbingan dan Konseling

**PENGALAMAN MENELITI 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR**

<b>Tahun</b>	<b>Topik/ Judul Penelitian</b>	<b>Sumber Dana</b>
2006	Persepsi Mahasiswa Terhadap Peran Pembimbing Akademik di Universitas PGRI Palembang	Kopertis Wilayah II Palembang
2009	Kontribusi Perpustakaan sebagai Sumber Belajar Dalam Pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif Belajar Mahasiswa Universitas Palembang	Universitas PGRI Palembang
2010	Model Konseling Behavioristik Untuk	Hibah Doktor SPS

	Membantu Siswa Mengatasi Kecemasan Belajar di SU II Palembang	UPI Bandung
2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Peran Guru Pembimbing Dalam Pelaksanaan Proses Belajar Siswa dan pembentukan perilaku positif untuk menghindari kecenderungan terjadinya <i>bullying</i></li> <li>✚ Pengaruh Kelompok Sebaya Terhadap Interaksi Sosial Remaja (Tinjauan Terhadap Perilaku Siswa SMA) di Palembang</li> <li>✚ Evaluasi Kurikulum</li> </ul>	<p>Universitas PGRI Palembang</p> <p>Universitas PGRI Palembang</p> <p>Tim Peneliti LPMP Universitas PGRI Palembang</p>

#### PENGALAMAN MENULIS 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Tahun	Topik/ Judul	Dimuat Dalam
2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bulying</li> <li>○ Pendidikan Karier</li> </ul>	Wahana Didaktika
2009	Terapi Behavioristik Sebagai Upaya Membantu Siswa Mengatasi Kecemasan Belajar	Buletin ABKIN, Surabaya
2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Model Konseling Behavioristik Untuk Membantu Siswa Mengatasi Kecemasan Belajar di SU II Palembang</li> <li>○ Layanan Bimbingan dan Konseling sebagai Sebuah Seni Dalam Membantu Konseli</li> </ul>	Buletin UPI (Fak Seni Rupa)



2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Membangun Karakter Peserta Didik Dengan Budaya Jujur</li> <li>○ Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Sebuah Upaya Perbaikan Pembelajaran Bagi Guru</li> <li>○ Behavior Teraphy Versi Learning Anxiety</li> <li>○ “Strengthening Character Education In Early Childhood Education And Primary School”</li> <li>○ Terapi Musik Bagi ODHA</li> </ul>	<p>UPI Bandung</p> <p>Buletin PGRI Wahana Didaktika</p> <p>Bandung</p> <p>Bandung</p> <p>Pekan Baru</p>
------	---	---

**Anggota:**

No.	Nama dan Gelar Akademik	Jabatan	Instansi
1	.Mardiana, S.Pd	Guru SMP	Kementrian Pendidikan diknas kota Palembang

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang Spesialisasi
S-1 (2011)	Uni-PGRI Palembang	Bimbingan dan Konseling

# PENAMBAHAN PROGRAM WAJIB KOKURIKULER SEBAGAI REDESAIN SISTEM PENDIDIKAN GURU

Oleh: Hermanto SP

Staff Pengajar Jurs. PLB FIP UNY

## Abstrak

Upaya peningkatan kualitas sistem pendidikan guru di Indonesia terus diupayakan guna mencapai sistem pendidikan guru yang lebih efektif dan efisien namun tetap berkualitas tinggi. Redesain sistem pendidikan tentunya akan berbicara input, proses, output, dan outcomes. Diantara komponen sistem tersebut, proses menjadi bagian menarik untuk dikaji. Proses pendidikan guru adalah komponen kinerja yang relatif lebih mudah dimodifikasi atau diredesain dan dipantau oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Dalam redesain proses pendidikan guru ini, ada beberapa pemikiran untuk perbaikan sistem pendidikan guru. Sebagaimana tuntutan dan isu-isu yang berkembang selama ini seperti tuntutan kompetensi dan program profesi guru (PPG), tidak akan berdampak positif bila proses pendidikannya tidak mendapatkan penyiapan dan pengawalan yang ketat. Agar sistem pendidikan guru semakin baik dan sesuai dengan harapan, maka dalam proses pendidikan harus ada perubahan dan beberapa tambahan. Perubahan dan tambahan tersebut berupa program wajib kokurikuler. Perubahan ini terkait dengan perhitungan dan persyaratan sistem kredit bagi seorang mahasiswa calon guru, sedangkan penambahan terkait dengan program wajib kokurikuler yang ditawarkan dan adanya kewajiban seorang mahasiswa calon guru untuk mengambil program kokurikuler tersebut. Bagaimana sistem kredit dan pengaturannya, serta program wajib kokurikuler apa saja yang ditawarkan agar menjadi salah satu solusi, menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji.

*Kata Kunci: program wajib kokurikuler, redesain proses, pendidikan guru*

## Pendahuluan

Pendidik adalah orang yang sangat berperan dalam upaya dan proses peningkatan kualitas pendidikan. Posisi pendidik tentu tidak akan dapat digantikan secara mudah dan total oleh apapun walau sistem dan teknologi sudah begitu maju. Kalau sekedar untuk transfer ilmu, peran guru barangkali dapat digantikan. Namun harus disadari bahwa proses pendidikan bukan hanya transfer ilmu semata. Dalam proses pendidikan harus ada keteladanan, keteladanan itu adalah dari guru atau pendidik. Mengapa demikian, karena keteladanan pendidik adalah contoh perilaku langsung yang bersinggungan dengan peserta didik. Tanpa kehadiran pendidik di kelas atau sekolah, yang dapat ditransfer hanyalah sebatas pengetahuan atau *knowledge* saja. Untuk itu tentu harus disadari bahwa untuk menjadi pendidik

tidaklah mudah, tidak cukup berbekal cerdasnya otak, namun juga adanya keteladanan dalam banyak hal dari yang bersangkutan.

Begitu besar peran pendidik di sekolah, yang tidak saja sekedar mentranfer pengetahuan, namun juga keteladanan dari pendidik. Sekolah tentunya tidak saja menekankan pada kecerdasan otak, namun juga kecerdasan hati secara seimbang. Bila sekolah hanya mengejar dan mengajarkan kecerdasan otak, sangat mungkin kasus-kasus kenekanan siswa karena kegagalan akademik seperti dipaparkan Daniel Goleman dalam bukunya kecerdasan spiritual itu akan dengan mudah ditemui di sekolah. Untuk itu sudah sepantasnya bila sekolah juga harus mengajarkan keseimbangan kecerdasan pada siswa atau peserta didiknya yang meliputi: olah pikir, olah rasa, olah raga dan olah hati seperti yang diharapkan dan dianjurkan oleh diknas. Begitu juga kalau kita mengikuti pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka dalam proses pendidikan harus ditanamkan kemampuan cipta, rasa, dan karsa secara seimbang kepada peserta didik.

Begitu besar peran pendidik dalam proses mencerdaskan anak bangsa dalam kehidupan ini. Pendidik begitu penting kehadirannya termasuk dalam *homeschooling* sekalipun, karena melalui pendidiklah kita bisa membaca dan menulis. Kita tahu bahwa membaca, menulis, dan berhitung adalah modal untuk proses pengembangan pendidikan selanjutnya. Untuk itu tidak heran kalau di Jepang setelah selesainya perang dunia kedua, begitu khawatir dengan guru. Hingga munculah pertanyaan berapa jumlah yang masih hidup. Begitulah pentingnya guru atau pendidik, di Indonesia pun dulu sampai ada slogan, guru pahlawan tanpa tanda jasa, atau akronim guru adalah digugu dan ditiru. Memang begitulah semestinya guru-guru atau pendidik yang diharapkan dapat membawa amanah, keteladanan disamping keluasan ilmu dan kemampuan menularkan atau transfer ilmunya kepada peserta didiknya.

Paparan di atas hanyalah bagian kecil dari cerita tentang peran pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Begitu banyak cerita lain tentang peran pendidik baik di Indonesia ataupun di manca negara dengan berbagai kondisi dan latar belakangnya. Agar dapat menghasilkan pendidik yang berkualitas, tentu harus diawali dengan proses pendidikan guru yang berkualitas pula. Agar sistem pendidikan guru semakin baik dan sesuai dengan harapan, maka dalam proses pendidikan harus ada perubahan dan pembenahan. Perubahan dan pembenahan tersebut tentunya dalam banyak hal seperti sistem rekrutmen dan seleksi calon

mahasiswa, proses pendidikan, proses evaluasi atau penilaian, bahkan proses penempatan. Dengan proses seleksi dan rekrutmen yang baik, tentu dimungkinkan untuk mendapatkan input mahasiswa yang baik dan berkualitas. Dalam proses seleksi harus memperhatikan standar dan yang memenuhi standar yang diterima.

Berbicara proses rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa pendidikan guru, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut antara lain bagaimana dapat mempengaruhi dan menjaring orang-orang yang potensial “cerdas akademik sekaligus memiliki potensi keteladanan” untuk ikut seleksi. Faktor lain adalah prosedur seleksi, teknik seleksi, dan alat ukur seleksi, serta siapa yang menyeleksi. Belum lagi kalau nanti jadi bahwa hasil ujian nasional akan sekaligus menjadi alat seleksi masuk ke perguruan tinggi tentu harus ada formulasi baru. Begitu pula, bila berbicara redesign calon mahasiswa pendidikan guru yang mengikuti program profesi guru tentu akan berbeda pula bentuknya. Dengan demikian begitu sulit dan kompleks berbicara redesign sistem pendidikan guru dari tahap seleksi calon mahasiswa. Untuk redesign sistem seleksi calon mahasiswa pendidikan guru maka diperlukan banyak kerjasama dan perhatian dari banyak pihak.

Redesain sistem pendidikan guru tahap seleksi calon mahasiswa pendidikan guru begitu kompleks, maka implementasinya pun tentu sangat kompleks. Redesain sistem pendidikan guru yang relatif mudah dan dapat segera dilakukan serta tidak banyak bersinggungan dengan pihak lain adalah redesign pada tahap proses pendidikan calon guru. Dengan melakukan modifikasi pada tahap proses pendidikan calon guru, bila dilakukan secara sungguh-sungguh mulai dari perencanaan proses, pelaksanaan proses, dan evaluasi proses maka dimungkinkan hasilnya akan maksimal. Redesain sistem pendidikan guru pada tahap proses adalah dengan penambahan program wajib kokurikuler bagi mahasiswa calon guru. Mengapa program wajib kokurikuler menjadi salah satu bentuk redesign sistem pendidikan guru, bukankah sebelumnya sudah ada. Apakah bedanya antara kokurikuler yang sudah ada dengan yang ditawarkan dalam redesign sistem pendidikan guru, inilah yang akan dikupas dalam tulisan ini.

### **Sistem Pendidikan Guru di Indonesia Saat ini**

Sistem pendidikan guru tentu selalu berubah dan berkembang mengikuti tuntutan jaman. Seperti sebelum tahun sembilan puluhan misalnya, kita masih mengenal Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang menghasilkan calon guru sekolah

taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Untuk menghasilkan calon guru di sekolah menengah maka dikelola oleh perguruan tinggi khususnya IKIP atau FKIP. Namun sekarang ini lembaga pendidikan yang menghasilkan calon tenaga kependidikan semuanya dilakukan di perguruan tinggi. Dengan demikian sekarang tidak dikenal lagi adanya SPG, SGO, ataupun SGPLB. Bahkan dengan dikeluarkannya undang-undang guru dan dosen, untuk menjadi guru sekarang ini serendah-rendahnya harus berpendidikan sarjana (S1 atau D4). Semua ini tentunya demi memperbaiki dan membenahi profesi guru.

Membenahi profesi guru bukanlah pekerjaan mudah. Meningkatkan citra guru, meningkatkan mutu guru bukanlah pekerjaan yang sederhana. Pembedahannya bukan hanya meliputi masalah teknis pendidikan, tetapi juga berkenaan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menghargai pendidikan. (Tilaar, 2002) Kalau kita baca dan cermati tulisan Tilaar (2002) dalam paragraf sebelumnya tentang guru dalam bab pedagogik transformatif dalam praksis pendidikan, dalam bukunya perubahan sosial dan pendidikan. Disana telah dipaparkan bahwa gejala menurunnya citra profesi guru bukan hanya di Indonesia, namun juga menjadi gejala internasional. Permasalahan yang dikemukakan adalah manakala dunia cenderung kearah materialistis dan konsumerisme, maka profesi guru yang merupakan suatu kebutuhan dan menjadi komoditas rakyat banyak semakin lama semakin terpuruk. Guru telah menjadi komoditi yang diperlukan tetapi tidak dihargai.

Sistem pendidikan guru di Indonesia saat ini terus berkembang dan berupaya menuju keperbaikan. Selain adanya peningkatan jenjang pendidikan dari tingkat SMA atau diploma menjadi sarjana, akreditasi dan kualitas lembaga pengelola pendidikan guru juga semakin diperketat. Setelah adanya perubahan dari sisi jenjang dan pengelola yang berdampak pada waktu penyelesaian studi untuk seorang calon guru, maka sekarang ini muncul tuntutan baru yaitu pendidikan profesi guru atau PPG. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki guru profesional. Dengan demikian program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D-IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru, agar mereka dapat menjadi guru yang profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik.

Sebagai suatu sistem pendidikan guru di Indonesia saat ini, PPG bertujuan untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan,

melaksanakan, menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Penetapan lembaga penyelenggara PPG pun ditentukan dengan keputusan menteri pendidikan nasional nomor 126/P/2010. Program PPG memang masih baru bahkan beberapa program studi yang ditunjuk dalam keputusan tersebut masih banyak yang belum melaksanakan atau baru melakukan proses seleksi. Dengan adanya program ini mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas calon pendidik yang benar-benar profesional seperti yang diharapkan dan didambakan masyarakat.

### **Proses Pendidikan Guru yang Minim Praktik**

Pendidik adalah orang yang paling banyak berhubungan dengan anak atau siswa di sekolah. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila pendidik kadang disebut sebagai orang tua kedua setelah bapak ibunya di rumah. Berkaitan dengan tugas pendidik yang utama dan pertama adalah mendidik para peserta didik melalui proses pembelajaran di sekolah. Maka sudah semestinya apabila pendidik berusaha untuk dapat mentransfer ilmu kepada para siswanya dengan sebanyak-banyaknya dan dapat mengarahkan serta membimbing agar para peserta didik menjadi orang yang berbudaya dan mencapai kedewasaan berfikir dan berkarya. Sehingga anak didiknya kelak menjadi orang yang bermanfaat dalam hidup dan kehidupannya kelak. Untuk itu harus disadari oleh guru bahwa profesi guru bukanlah profesi yang sudah jadi. Menurut Tilaar (2002) menjadi guru berarti terus menerus mengubah diri karena pengalaman mendidik bukanlah pengalaman rutin.

Untuk membekali, meningkatkan kemampuan, dan keterampilan seorang calon guru, maka pemberian banyak teori dan praktik tentang belajar dan pembelajaran menjadi sangat penting. Margaret E. Gredler (2001) *learning is important to the individual. It begins in infancy with the baby's acquisition of a few simple skills, such as holding its own bottle and recognizing its mother.* Dengan demikian untuk menjadi guru maka belajar dan belajar adalah menjadi sesuatu yang sangat penting dan diperlukan. Belajar disini tentunya meliputi dua hal, yang pertama belajar tentang teori-teori dan yang kedua adalah belajar praktikmengajar atau mendidik. Tanpa adanya keseimbangan antara kemampuan teori dan kemampuan praktik menjadi guru maka nanti dalam aplikasinya di lapangan akan mengalami banyak

permasalahan dan kendala. Untuk itulah setelah mendapatkan teori, maka mahasiswa calon guru perlu mencermati dan mengkritisi fakta yang ada di sekolah.

Dengan dimilikinya bekal kemampuan menjadi pendidik, mereka akan lebih siap menghadapi tuntutan dinamisasi yang ada di kelas. Walaupun mereka tidak berarti berhenti belajar, namun setidaknya mereka yang sudah punya bekal akan lebih siap dengan tuntutan sekolah dan masyarakat. Untuk itu secara sadar mestinya belajar untuk mendapatkan pengalaman menjadi pendidik perlu terus diupayakan. Untuk itu, harus dikaji ulang dan dicermati kurikulum pendidikan guru selama ini. Berapa banyak praktik-praktik mengajar yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa calon guru, rasanya ini masih sangat kurang. Dari sejumlah 144 SKS yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa calon guru masih begitu minimnya tuntutan untuk praktik mengajar di sekolah. Kalaupun mereka praktik saat praktik pengalaman lapangan (PPL), mereka hanya mengajar tidak lebih dari 16 kali dan itupun peran keteladanannya sebagai pendidik belum nampak.

Permasalahan pendidikan guru yang minim praktik inipun sesungguhnya secara tidak langsung pernah dikemukakan oleh A. Suhaenah Suparno (2002) ketika membahas perubahan IKIP menjadi universitas, bahwa: ..., pendidikan tenaga kependidikan yang diselenggarakan secara konsekutif atau secara *concurrent*, tidak pernah menghasilkan kesimpulan yang jelas. Di Australia, misalnya, kedua sistem tersebut dipraktekkan dan tidak dipermasalahkan. Di Inggris, mahasiswa calon guru ditugaskan ke lapangan dalam semester yang tersebar, misalnya dua minggu pada semester pertama, tiga minggu pada semester kedua, dan seterusnya. ...mereka mempelajari alat, model, dan kasus yang realistis. Namun bagaimana proses pendidikan guru di Indonesia, umumnya tugas-tugas perkuliahan ke lapangan belum dilakukan koordinasi secara baik antar dosen pengampu matakuliah. Mereka terjun ke sekolah setelah semester enam dengan sistem block dan hanya dua bulan.

Untuk mendapatkan dan meningkatkan pengalaman yang cukup, agar kelak dapat menjadi guru profesional tentunya harus cukup praktik dan terjun ke sekolah. Untuk meningkatkan pengalaman calon guru, kita bisa mengadopsi model yang dulu pernah dilakukan di sekolah pendidikan guru (SPG). Dalam model pendidikan di SPG, maka seorang calon guru waktu itu wajib menjadi pembina pramuka disuatu sekolah. Mereka (calon guru) minimal harus menjadi pembina pramuka pada satu sekolah di sore hari setelah pulang sekolah. Namun pada hari yang lain mereka juga harus mengikuti kegiatan kepramukaan di sekolah sendiri (SPG). Dengan demikian

mereka mendapatkan pengalaman langsung dari sekolah praktik dan mendapat bahan baru dari SPG. Model ini bila diterapkan tentunya sangat mudah dan tinggal merumuskan formulasinya bila akan diterapkan dalam model pendidikan guru sekarang ini.

Agar calon guru mendapatkan pengalaman yang cukup, dan tidak minim praktik, maka untuk mengadopsi model di atas harus ada kebijakan lembaga. Mengapa perlu ada kebijakan lembaga, tentu dengan adanya kebijakan maka tugas praktik menjadi suatu kewajiban mahasiswa calon guru. Bila tugas wajib itu menjadi syarat kelulusan dalam suatu matakuliah atau persyaratan untuk mengambil matakuliah disemester selanjutnya, tentu mahasiswa akan melakukan. Namun bila tugas ini tidak wajib dan tidak ada konsekuensinya maka akan menjadi keputusan yang sia-sia. Walaupun secara waktu luang antara mahasiswa calon guru dengan siswa calon guru (SPG) waktu itu lebih banyak mahasiswa calon guru. Berhubung dalam diri manusia itu memiliki rasa malas sebagaimana disinggung oleh Douglas McGregor tentang teori X dan Y. Dalam teori X (negatif), bahwa rata-rata orang tidak menyenangi pekerjaan & sedapat mungkin akan menghindarinya.

### **Program Wajib Kokurikuler Sebagai Redesain Sistem Pendidikan Guru**

Sistem pendidikan yang berlaku dalam pendidikan tinggi termasuk dalam pendidikan calon guru adalah program sistem kredit semester (SKS). Dalam konsekuensinya bila sistem SKS ini diterapkan sesungguhnya memberikan konsekuensi yang cukup berat bagi mahasiswa. Namun, dalam kenyataannya sistem tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik dan mulus. Banyak sekali mahasiswa calon guru yang memaknai SKS, hanyalah program tatap muka biasa. Walaupun mahasiswa sudah diberikan tugas untuk membaca atau sejenisnya sebagai tugas mandiri atau terstruktur, namun tidak sedikit mahasiswa yang pasif atau melakukan sejadinya. Banyak sekali mahasiswa yang sering tidak siap dengan proses perkuliahan ataupun kadang tidak bisa menyambung dengan materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa kesiapan dan semangat mahasiswa untuk belajar termasuk rendah.

Dalam sistem pendidikan kita, telah mengenal istilah kurikuler, kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2002) kurikuler adalah bersangkutan dengan kurikulum, istilah kokurikuler adalah rangkaian kegiatan kesiswaan yang berlangsung di sekolah, intrakurikuler adalah



kegiatan siswa di sekolah atau mahasiswa di kampus yang sesuai atau sejalan dengan komponen kurikulum, dan ekstrakurikuler adalah berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum, seperti latihan kepemimpinan, dan pembinaan siswa. Dari berbagai istilah tersebut di atas yang telah dipahami, mengapa yang menarik untuk dikaji sebagai redesain sistem pendidikan guru melalui penambahan program wajib kokurikuler. Kokurikuler adalah rangkaian kegiatan kesiswaan yang berlangsung di sekolah dipilih karena dalam teknis pelaksanaan perbaikan sistem pendidikan guru relatif mudah dan tidak terlalu bersinggungan dengan pihak lain.

Untuk melaksanakan rangkaian kegiatan kesiswaan yang berlangsung di sekolah yang disebut kokurikuler, sesungguhnya sangatlah mudah tergantung dari kebijakan lembaga LPTK itu sendiri. LPTK mulai mengatur dan mengelola sebaran kurikulum dan penjadwalan perkuliahan. Memberikan tugas kokurikuler yang baik perlu dipersiapkan terprogram. Sebagai salah satu contoh program kokurikuler yang dikembangkan oleh bagian kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta (2011) meliputi: *success skill* (ESQ *training*, ospek), tutorial pendidikan agama, *creativity training*, *leadership training*, dan *entrepreneurship training*. Namun kegiatan kokurikuler ini dalam aplikasinya, belum menjangkau keseluruhan mahasiswa. Pantauan, tagihan, dan konsekuensi/sanksi bagi yang belum kuat tidak ikuti. Untuk kuatnya program kokurikuler seperti yang dikembangkan ini perlu kerjasama dengan bidang akademik sebagai proses membentuk *student body* mahasiswa.

Uraian di atas adalah contoh program kokurikuler yang dikembangkan bagian kemahasiswaan untuk membentuk *student body* mahasiswa pada umumnya. Bagaimana program kokurikuler yang dapat dikembangkan bagi mahasiswa calon guru. Untuk mengembangkan program wajib kurikuler bagi mahasiswa calon guru tentunya harus dirumuskan secara bersama-sama oleh lembaga, apa tujuan dan tuntutan yang akan dibentuk, dan persyaratan apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang calon pendidik. Dari situlah program kokurikuler tersebut dirumuskan dan dikembangkan. Langkah merumuskan program kokurikuler seharusnya dilakukan bersamaan pada saat penyusunan kurikulum yang akan ditempuh mahasiswa calon guru tersebut. Dengan demikian akan terprogram dalam kurikulum, kompetensinya, syarat minimal, waktu, cara pencapaian (kurikuler, dan pengembangan kokurikuler) bagi mahasiswa calon guru.

## **Pengelolaan Wajib Kokurikuler Sebagai Redesain Sistem Pendidikan Guru**

Pemilihan dan pengelolaan program wajib kokurikuler sebagai redesain sistem pendidikan guru perlu diformulasikan secara jelas dan tepat, sehingga benar-benar dapat mencapai dan mendukung pengembangan pengalaman mahasiswa calon guru. Walaupun program kokurikuler tersebut tujuannya baik, namun bila tidak dikelola dengan baik maka hasilnya belum tentu baik. Program wajib kokurikuler dapat diakui sebagai SKS kegiatan kokurikuler yang terpisah dari SKS akademik atau menjadi bagian yang dipersyaratkan dari SKS akademik dengan bobot nol (0) SKS. Semua itu tergantung ketentuan lembaga yang telah disepakati. Dengan adanya pembobotan dan kejelasan SKS, maka mahasiswa akan mengambil pilihan wajib kokurikuler yang ditawarkan. Begitu pula untuk memantau pelaksanaan program kokurikuler bagi mahasiswa, diperlukan lembar monitoring baik secara manual atau melalui program yang telah disiapkan dalam jaringan komputer.

Untuk melaksanakan program wajib kokurikuler bagi seorang mahasiswa calon guru, waktunya tentu dapat diatur sendiri namun dalam satu semester yang berjalan. Dengan demikian setiap satu semester akan ada laporan dan rekap pelaksanaan program wajib kokurikuler oleh mahasiswa. Adapun untuk program wajib kokurikuler sebagai redesain sistem pendidikan guru, tentunya dipilih yang sesuai tuntutan kompetensi dan kebutuhan calon guru. Beberapa program wajib yang kokurikuler yang dapat ditawarkan kepada mahasiswa calon guru misalnya: berkaitan dengan karya tulis dan jurnalistik, penelitian, asesmen peserta didik, latihan mengajar, kepemimpinan, kreativitas, atau yang lebih spesifik berdekatan dengan keahlian khusus di program studinya, dan sebagainya. Berbagai program yang ditawarkan tersebut perlu dibuatkan rambu-rambu secara jelas sehingga mahasiswa dapat memilih dan melakukan secara tepat pula.

Menjadi guru sesungguhnya bukanlah hal yang mudah karena mereka harus siap secara keilmuan menyampaikan kepada peserta didik dan secara keteladanan, harus sadar bila dirinya menjadi contoh bagi orang lain. Teladan dalam hal kejujuran keilmuan, kewibawaan yang tidak menakutkan, tegaknya kedalaman dan keluasan keilmuan yang dimiliki, termasuk keteladanan dalam penampilan. Untuk itu dalam program wajib kokurikuler bagi seorang mahasiswa calon guru, berbagai tawaran kokurikuler tersebut di atas perlu dilakukan dan ditumbuhkembangkan. Salah satu kokurikuler yang penting untuk diberikan penekanan dalam tulisan ini adalah kemampuan calon guru dalam melakukan asesmen peserta didik. Kemampuan ini

dipandang penting karena kemampuan ini selama ini belum banyak dikembangkan. Asesmen sangat penting dilakukan guru, agar dapat memberikan program layanan yang tepat kepada peserta didik.

### **Asesmen Sebagai Kokurikuler Wajib untuk Menyiapkan Pendidikan Inklusi**

Asesmen adalah proses penilaian suatu keadaan yang meliputi asesmen fungsional, klinis, dan akademik. Menurut Ronald L. Taylor, (1984) asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi/data tentang penampilan individu yang relevan untuk pembuatan keputusan. Begitu pula pengertian asesmen menurut R.J. Dietel, J.L. Herman, and R.A. Knuth NCREL, Oak Brook, (1991):

*assessment may be defined as "any method used to better understand the current knowledge that a student possesses." This implies that assessment can be as simple as a teacher's subjective judgment based on a single observation of student performance, or as complex as a five-hour standardized test. The idea of current knowledge implies that what a student knows is always changing and that we can make judgments about student achievement through comparisons over a period of time. Assessment may affect decisions about grades, advancement, placement, instructional needs, and curriculum.*

Asesmen sebagai proses pengumpulan informasi dan data yang terkait dengan calon peserta didik. Melalui kegiatan asesmen yang tepat, program penanganan dan layanan kepada peserta didik akan lebih baik. Melalui program asesmen inilah, guru dapat mengetahui dan mengembangkan potensi setiap peserta didiknya secara tepat pula. Kemampuan asesmen tersebut dapat ditekankan sebagai salah satu kokurikuler wajib yang harus dilakukan oleh mahasiswa calon guru. Lalu apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa calon guru dalam kegiatan tersebut, paling tidak adalah pemahaman tentang asesmen dan memahami instrumen baku bila ada, menyusun instrumen nonbaku bila belum ada yang baku, melakukan pemaparan atau desiminasi kepada teman atau adik tingkat, dan yang terakhir adalah praktik melakukan asesmen dan membuat laporannya.

Dengan adanya tugas atau kegiatan asesmen yang terus menerus dan berulang tentang kemampuan ini, maka seorang mahasiswa calon guru akan memiliki keterampilan yang diperlukan bila kelak menjadi guru seperti dalam tuntutan kompetensi. Namun demikian agar mahasiswa tidak jenuh dan merasa bosan dengan tugas tersebut, maka kegiatan ini dapat dibuat secara berkelompok dan individu. Melalui kemampuan kokurikuler melakukan asesmen, mahasiswa akan

tertuntun dan mulai terbiasa dengan tugas-tugas pokok seorang guru, sebagaimana profesi dokter mengenalkan mahasiswa kedokteran tentang kegiatan di rumah sakit dan melakukan tindakan. Tentu saja kegiatan asesmen ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat semester dan dikaitkan dengan salah satu matakuliah yang ditempuh.

Apabila mahasiswa calon guru telah terbiasa dengan kegiatan asesmen sebelum menyusun program pembelajaran, maka mereka kelak semakin mudah mengenali potensi calon siswanya. Dengan memahami potensi dan kepeminatan siswa inilah, maka guru akan lebih mudah mengarahkan potensi siswa menjadi prestasi. Guru yang terbiasa melakukan asesmen akan memiliki pemahaman tentang kemampuan peserta didik dan sebarannya. Dengan demikian guru akan mengetahui ada tidaknya siswa yang memerlukan pendidikan khusus atau inklusi. Sebagaimana diketahui, pendidikan inklusi dilaksanakan karena adanya siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum. Apabila guru-guru telah memahami potensi siswa dan ternyata di kelasnya ditemukan siswa yang memerlukan layanan khusus, maka pendidikan inklusif di kelas itu akan jauh berhasil dibandingkan bila siswa tersebut diserahkan kepada guru pembimbing khusus.

Berbicara tentang pendidikan inklusi, sesungguhnya bukan hal yang baru. Merealisasikan pendidikan inklusi memerlukan kosekuensi yang tidak ringan, maka banyak pihak yang tidak mau peduli atau seakan-akan tidak tahu. Padahal sering didapati di sekolah atau di kelas reguler ditemukan adanya siswa berkebutuhan khusus karena kecerdasannya tinggi, gangguan emosi perilaku, dan kelainan yang disebabkan faktor lainnya. Sebagaimana dikemukakan Jack L. Nelson, dkk. dalam *Critical Issues in Education Dialog and Dialectics* (2004) terkait dengan *inclusion and mainstreaming: special or common education. ...Full inclusion of all children into school life is a fundamental principle in a free, democratic society. Full inclusion means that students classified "special" or "exceptional" because of individual physical or mental characteristics would not be isolated into separate schools, separate classes, or pull-out sessions.*

Konsep inklusi seperti di atas tentu akan terus berkembang seiring dengan kesadaran manusia dan hasil analisis aplikasinya di sekolah. Di lapangan ada sekolah yang melaksanakan program inklusi penuh, sebagian atau moderat. Terlepas program inklusi mana yang diterapkan, namun yang penting adalah timbulnya kesadaran dari semua warga sekolah terutama guru dan kepala sekolah.

Mengapa pihak siswa dan orang tua sebagai bagian dari sekolah tidak terlalu perlu dirisaukan. Bila semua sekolah telah menerima keberadaan siswa berkebutuhan khusus dan memberikan layanan yang terbaik, maka tidak ada pilihan bagi orangtua siswa yang “normal” untuk menyekolahkan putra putrinya. Untuk itu melalui redesain sistem pendidikan guru, perlu adanya penambahan program wajib kokurikuler asesmen dan lainnya guna mendukung kemampuan kompetensi profesi calon guru di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Redesain sistem pendidikan guru adalah salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan guru itu sendiri. Dampak positif dari redesain sistem pendidikan guru, akan menguntungkan banyak pihak khususnya calon guru. Namun demikian redesain sistem pendidikan guru yang baik akan berimbang pada kualitas pendidikan pada umumnya. Redesain sistem pendidikan guru dalam proses pendidikan guru dapat dilakukan dengan cara penambahan program wajib kokurikuler bagi calon guru. Dengan adanya penambahan program kokurikuler yang terprogram tentu akan mendukung kemampuan seorang calon guru. Program kurikuler sebagai program wajib bagi seorang mahasiswa harus diformulasikan sejalan dengan penyusunan kurikulum, sehingga program wajib kokurikuler ini lebih tertata dan akan diakui sebagai SKS kokurikuler yang berbobot nol atau tidak.

Program wajib kokurikuler yang disiapkan dengan baik akan memberikan bekal keterampilan bagi calon guru. Salah satu program wajib kokurikuler yang perlu diberikan kepada mahasiswa calon guru adalah program asesmen. Program asesmen akan membekali calon guru mengenali dan memahami kondisi siswa. Dengan memahami kemampuan calon siswa maka guru akan dapat memberikan layanan secara purna kepada siswa. Dengan melakukan asesmen guru akan tahu perlu tidaknya memberikan layanan khusus kepada siswa. Memberikan layanan khusus kepada siswa yang memiliki kemampuan berbeda, walaupun guru tidak menyebut demikian namun guru telah melaksanakan pendidikan inklusi. Pelaksanaan pendidikan inklusi yang demikian akan lebih bagus, karena semua guru memberikan layanan yang terbaik dan sesuai dengan kondisi siswa. Itulah salah satu manfaat bila asesmen ditegakan dan mulai dibiasakan kepada para mahasiswa calon guru melalui program kokurikuler.

## Daftar Pustaka

- A. Suhaenah Suparno, dkk. 2002. *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru* (dalam Bunga Rampai H.A.R. Tilaar). Jakarta: Grasindo.
- Baker, E. L. 1991. *Alternative Assessment and National Education Policy*. Paper presented at the symposium on Limited English Proficient Students, Washington, D.C.
- Cecil R. Reynolds, Ronald B. Livingston, Victor Willson. 2010. *Measurement and Assessment in Education 2nd*. New Jersey: Pearson International Edition.
- H.A.R. Tilaar. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Jack L. Nelson. Stuart B. Palonsky, Mary Rose McCarthy. 2004. *Critical Issues In Education Dialogues and Dialectics*. New York: McGraw Hill.
- Margaret E. Gredler. 2001. *Learning and Instructional: Theory into Practice*. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- M. David Miller, Robert L. Linn, Norman E. Gronlund. 2009. *Measurement and Assessment in Teaching*. New Jersey: Pearson International Edition.
- Robert Drummond, Karyn D. Jones. 2010. *Assessment Procedures for Counselors and Helping Professionals*. New Jersey: Pearson International Edition.

**MODEL PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN VOKASI MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS KERJA  
(*WORK-BASED LEARNING*)**

Budi Tri Siswanto  
(Dosen FT-UNY)  
budi\_ts@uny.ac.id

**ABSTRAK**

Desentralisasi pendidikan telah berjalan satu dekade, namun permasalahan menyangkut efisiensi dan efektivitas implementasinya pada pendidikan vokasi muncul di berbagai daerah, jenjang, dan satuan pendidikan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 misal mengenai badan hukum pendidikan, payung hukum pendidikan vokasi, kedudukan penyelenggaraan pendidikan vokasi antara institusi pendidikan vokasi dan mitra kerjasama industri masih belum ada kejelasan. Redesain sistem dan desentralisasi pendidikan pada pendidikan vokasi diniscayakan untuk dilakukan. Urgensinya menyangkut pembangunan masyarakat demokrasi, pengembangan *social capital*, dan peningkatan daya saing bangsa.

Pembelajaran berbasis kerja (WBL) adalah pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan tempat kerja (di industri) untuk menstrukturkan pengalaman-pengalaman yang didapat di tempat kerja berkontribusi pada sosial, akademik, dan pengembangan karir pembelajar dan menjadi suplemen dalam kegiatan pembelajaran. Pengalaman belajar di tempat kerja diaplikasikan, diperhalus, diperluas dalam pembelajaran baik di kampus maupun di tempat kerja. Dengan WBL, pembelajar mengembangkan sikap (*attitude*), pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), pencerahan (*insight*), perilaku (*behavior*), kebiasaan (*habits*), dan pergaulan (*associations*) dari pengalaman-pengalaman kedua tempat dan memungkinkan terjadi pembelajaran yang terkait dengan aktivitas bekerja nyata. Model penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan pendekatan WBL dapat dikembangkan di era otonomi dan desentralisasi dengan payung hukum yang memadai.

Pendidikan vokasi sebagai subsistem pendidikan nasional memerlukan redesign dalam pengelolaan dan penyelenggaraan diklatnya. Perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang bersifat *technocultural*: hubungan industri, perubahan teknologi, organisasi pekerjaan, dan formasi kompetensi. Kerjasama lembaga pendidikan vokasi dengan industri menjadi keniscayaan. Maraknya kebijakan peningkatan proporsi siswa SMK dan munculnya sekolah vokasi di berbagai universitas, menimbulkan kekosongan aturan tata kelola. Ketiadaan payung hukum formal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan vokasi menjadi kendala struktural selama ini. Diperlukan kreativitas pemerintah dan para operator pendidikan vokasi untuk menetapkan payung hukum yang mengakomodasi kejelasan hak dan kewajiban pengelola pendidikan vokasi dan mitra kerjasama industri, restitusi pajak bagi industri yang berkontribusi pada pendidikan vokasi, dan program tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Key word: Model pengelolaan dan penyelenggaraan, *Work-based learning*, pendidikan vokasi.

## PENDAHULUAN

Kualitas hasil pendidikan vokasi baik dari segi proses maupun produk sangat dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi. Penyelenggaraan pendidikan vokasi tidak bisa tanpa kerjasama antara institusi pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Teori-teori *experiential learning*, *context teaching and learning*, dan *work-based learning* menjadi sangat relevan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Pengembangan model pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan berbagai teori tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hasil belajar dan kualitas lulusan.

Strategi pengembangan pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi harus terus dilakukan agar kualitas lulusannya sesuai tuntutan pasar kerja. Pembelajaran berbagai mata pelajaran/kuliah pada pendidikan vokasi sejatinya dilakukan dengan pendekatan pembelajaran berbasis kerja atau *Work-Based Learning* (WBL) dan perlu terus disempurnakan. Seiring kemajuan teknologi dan dinamika tempat kerja, tantangan dunia kerja dengan kompetensi kerja yang makin tinggi menuntut institusi pendidikan vokasi mampu mengantisipasi dan menghadapi perubahan yang terjadi dengan memanfaatkan berbagai kapabilitas dan kapasitas lembaga mitra kerjasama.

Penyelenggaraan pembelajaran pendidikan vokasi banyak dilaksanakan dalam konteks kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra kerjasama industri dengan *outsourcing* sumber daya di kedua pihak. Perkembangan industri yang pesat dan tidak mengenal krisis amat potensial sebagai mitra kerjasama dalam konteks pembelajaran berbasis kerja. Secara empirik, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan vokasi cukup banyak variasi dan model. Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Surakarta di bidang teknik mesin/manufaktur menerapkan metode atau model yang disebut *Production Based Education and Training* yang dilakukan di dunia industri yang nyata dengan tekanan pada produk-produk yang berorientasi pasar. Mahasiswa belajar dan ikut bekerja langsung di unit produksi (Triatmoko, 2001: 1).

Untuk mendanai biaya pendidikan vokasi yang tinggi dan untuk menciptakan situasi industri yang nyata, ATMI mengembangkan sebuah unit produksi yang mempunyai NPWP sendiri. *Core competency* dari unit produksi adalah pada *job-orders* atau pada produk-produk dengan nilai tambah tinggi. Fleksibilitas tinggi



diterapkan baik di sisi praktik maupun teori. Strategi penting yang dijalankan, ialah : (1) fokus pada kompetensi yang harus diraih pada tiap tingkat; (2) *one man one machine*; (3) mempertahankan praktik bisnis yang sehat dan bersih; (4) sertifikasi ISP 9001/2000 (Triatmoko, 2001).

Model lain diterapkan oleh Agen Pemegang Merek (APM) Mercedes-Benz (PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia) pada diklat otomotif yang disebut *3-year Automotive Mechatronic vocational training*. Meski bersifat pemenuhan kebutuhan internal mekanik berkualifikasi Mercedes-Benz regional dan internasional sendiri dan tidak terbuka dalam pendidikan formal, model ini sangat berkarakter pendidikan vokasi yang komprehensif. Para *trainee* yang disponsori oleh *dealer*, *fleet owner*, atau *internal department* dididik selama tiga tahun dan diasramakan di MBDI *Central Training Departement* yang memadai di Ciputat, Jakarta Selatan. Mereka mengikuti diklat secara terintegrasi mencakup *metal basic*, *basic automotive* maupun *advance technology* menyangkut kendaraan penumpang maupun kendaraan komersial yang dipadukan dengan program *On-the-Job Training* di pabrik mobil (Mercedes-Benz) Bogor, *workshop* Central Training MBDI, dan *dealer-dealer* mobil seluruh Indonesia (Mercedes-Benz, 2009).

Model sejenis dilaksanakan Politeknik Manufaktur Astra Jakarta untuk prodi D III Teknik Mesin maupun Teknik Otomotif. Mahasiswa selama 3 tahun pendidikan, selain mendapatkan diklat teori dan praktik di kampus, juga ditempatkan pada bengkel-bengkel mitra kerja untuk melaksanakan *on-the-job training* secara berkala baik ditingkat I, II, III dengan durasi tertentu dengan total akumulasi durasi OJT mencapai sampai 9 – 12 bulan. Dengan OJT ini mahasiswa akan memperoleh kompetensi sebagai ahli madya bidang jasa perawatan otomotif yang utuh pada realitas lapangan bisnis jasa perawatan dan perbaikan otomotif. Model yang kurang lebih sama diterapkan pada *trainee* di Pusdiklat United Tractors Tbk yang bergerak dalam bisnis jasa perawatan dan perbaikan alat berat.

Program studi D III Otomotif FT UNY sejak 2003 menerapkan program Kelas Industri, dimana satu kelas khusus dari hasil seleksi mahasiswa nonreguler ditempatkan pada industri mitra kerja (di pabrik PT Timor Putra Nasional/PT Autocar Industri Komponen) selama 1 (satu) semester penuh untuk melaksanakan program Praktik Industri (*industrial attachment/praktik pengalaman industri*) dan juga kuliah dengan instruktur dari profesional industri. Perencanaan kurikulum, proses pembelajaran, pembimbingan, mentoring, penyediaan instruktur lapangan,

metodologi diklat, evaluasi pembelajaran disusun secara bersama antar dua pihak. Pembimbing/instruktur lapangan juga sudah ditatar tentang proses pembelajaran, metode dan evaluasi diklat, pengalaman industri dan metode evaluasinya.

## **PEMBAHASAN**

Berbagai penerapan model dan praktik baik pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan pendekatan *Work-Based Learning (WBL)* belum memuaskan secara keseluruhan. Selain sangat bersifat kasuistik, berbagai model itu tidak dapat serta merta dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan vokasi lain. Keterbatasan akses ke industri, sumber daya manusia, sumber pendanaan, fasilitas, kualitas pembimbing industri, lokasi dan sebagainya. Jika keterbatasan itu teratasi dan penyelenggaraan program pengalaman industri dapat dilakukan secara bersama dan terpadu dengan memanfaatkan kapabilitas yang dimiliki kedua pihak, maka kualitas pengalaman industri mahasiswa menjadi lebih baik dan selanjutnya kualitas lulusan pendidikan/sekolah vokasi dapat meningkat. Kelebihan dan kekurangan dari berbagai model penyelenggaraan pembelajaran berbasis tempat kerja telah distudi oleh Budi Tri Siswanto (2011: 15-16).

### ***Work-Based Learning pada pendidikan vokasi.***

Kurikulum semua program pendidikan dan latihan vokasi dimulai dengan memberikan dasar-dasar kejuruan pada pembelajar. Selanjutnya mereka akan menempuh program gabungan antara “*work-based learning*” dan “*school-based learning*”. Program-program diklat yang mengandung proporsi kerja industri yang lebih besar akan memberikan pengalaman kerja yang lebih intensif dan penguasaan tingkat kompetensi yang lebih tinggi (Dikmenjur, 2002 : 59). Alternatif yang efektif untuk melatih penguasaan kompetensi adalah program pemagangan (*apprenticeship*) sebagaimana berlaku di banyak negara. Bisa pula kegiatan diklat yang dilakukan di luar lingkungan dan jam kerja (*off-the-job training*) maupun kegiatan diklat pada tempat kerja dan jam kerja (*on-the-job training*) (Smith, 2002). Dengan demikian dapat disimpulkan, pendidikan vokasi dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran berbasis kerja (WBL) menjadi keniscayaan.

Berbagai penelitian mutakhir menyimpulkan bahwa pemanfaatan Pendekatan Pembelajaran Berbasis Kerja atau *Work-Based Learning (WBL)* dalam pendidikan memiliki pengaruh positif dalam prestasi (*achievement*), motivasi (*motivation*), dan

kelanjutan pendidikan (*continuing education*) (Bailey & Merrit, 1997). Riset dan studi evaluasi pada WBL menunjukkan adanya korelasi antara luaran (*outputs* hasil belajar) dan dampak (*outcomes*) lulusan dengan struktur pembelajaran yang sekolah dan industri berikan dalam pengalaman di tempat kerja. Ketika tujuan program, kurikulum dan pengalaman berbasis tempat kerja dirancang dan diaplikasikan disertai dukungan staf yang memadai dan dievaluasi dengan benar, maka program itu akan berdampak positif (Lynch & Harnish, 1998; Fallow & Weller, 2000; Braham & Pickering, 2007; Garnett, 2008).

WBL merupakan pembelajaran yang menggambarkan suatu program di perguruan tinggi di mana antara perguruan tinggi dan organisasi atau perusahaan secara bersama-sama merancang pembelajaran di tempat kerja, sehingga program ini memenuhi kebutuhan peserta didik dan berkontribusi dalam pengembangan perusahaan. WBL merupakan program yang diselenggarakan secara formal di pendidikan tinggi. Tujuannya adalah untuk mendekatkan kegiatan pembelajaran dengan pekerjaan. Manfaatnya selain sebagai wahana transisi pembelajar dari sekolah/kampus ke tempat kerja (Raelin, 2008) juga untuk pengembangan pengetahuan melalui tempat kerja dengan melibatkan pengusaha (*employer*).

Penyelenggaraan WBL yang efektif mempersiapkan para pembelajar dalam dunia pekerjaan. Betapapun tidak ada metode instruksional yang dapat disimulasikan secara sempurna dalam lingkungan pekerjaan yang nyata. Kombinasi pembelajaran yang paling baik dalam pekerjaan ialah penyelenggaraan di kelas, lab/bengkel, dan tempat kerja agar dapat diambil manfaat bagi semuanya (lihat WBL Guidline, 2002).

Karakteristik WBL menurut Boud & Solomon (2006), ada enam : *pertama*, hubungan antara mitra/DUDI dengan institusi pendidikan secara khusus untuk membangun dan membantu pembelajaran. DUDI ini bisa milik pemerintah, swasta atau komunitas sektor ekonomi lainnya. Hubungan ini diperlukan untuk memungkinkan membangun infrastruktur dalam membantu pengembangan pembelajaran. WBL dapat terjadi jika pembelajaran dilakukan di tempat kerja dan pembelajaran dilaksanakan dalam kondisi yang cukup kondusif. Di samping itu proyek pelaksanaan pembelajaran dijalankan dalam bentuk kerjasama sesuai dengan apa yang dibutuhkan di tempat kerja.

Mengapa demikian? karena WBL memerlukan rancangan pembelajaran secara individual yang dirancang dalam beberapa tahun dan pembelajaran diorientasikan agar pembelajar menjadi siap untuk memiliki pengalaman belajar keterampilan dan

siap untuk bekerja. Oleh karena itu melalui WBL inilah hubungan itu dibentuk dengan merancang MOU antara perguruan tinggi dan perusahaan. Perjanjian itu antara lain berkaitan dengan berapa pembelajar yang akan dilibatkan, berapa lama program itu akan dijalankan, bagaimana WBL dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan perusahaan, dan lain-lain,

Karakter *kedua*, pembelajar dilibatkan sebagai pekerja. Kebutuhan setiap pembelajar berbeda-beda dan berubah setiap waktu. Oleh karena itu rencana pembelajaran WBL dirancang untuk setiap pembelajar. Dengan tujuan bahwa program pembelajaran itu menjamin bahwa dapat didukung dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dan disepakati oleh pihak-pihak terkait.

Selanjutnya, karakter *ketiga*, program dalam WBL mengikuti apa yang dibutuhkan di tempat kerja dan apa yang dibutuhkan oleh pembelajar. Karena asumsi pembelajaran berbasis kerja, penyelenggaraannya berbeda dengan apa yang diselenggarakan di perguruan tinggi. Pengetahuan itu diperoleh dalam bentuk yang berbeda dalam bisnis dan industri, baik berbeda tujuan, maksud serta *outcomenya*.

*Keempat*, level pendidikan dalam program dibangun setelah pembelajar memiliki kompetensi yang diakui. Kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pembelajar bukan apa yang dapat diperlihatkan dengan kecakapan sebelumnya. Namun apa yang dapat dikerjakan oleh pembelajar setelah mengikuti program. *Prior learning* dan *assessment experiential learning* sering digunakan dalam program ini.

*Kelima*, dalam WBL *learning project* yang dilakukan di tempat kerja, memberikan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pembelajar di masa yang akan datang, dan perusahaan itu sendiri. Pembelajaran tidak dirancang untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan pembelajar saja tetapi dapat memberikan sesuatu yang berbeda bagi perusahaan. Proyek itu tidak hanya untuk memberikan kontribusi pada perusahaan, namun untuk membuat satu langkah nyata dalam mengerjakan proyek itu dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kemampuan individu dan proses manajemen sangat terkait. Proyek ini tidak hanya memungkinkan manajer atau supervisor melihat keikutsertaan aktivitas pembelajar namun proyek ini memberikan kontribusi nyata pada perusahaan.

*Keenam*, institusi pendidikan memiliki keluaran berdasarkan kesepakatan dalam program ini dengan menghargai standar dan level yang telah ditetapkan, berbeda dengan kursus konvensional, dalam WBL tidak ada silabus, inti materi dll. Dalam WBL hanya mungkin disiapkan modul untuk memperkenalkan strategi dan teknik untuk belajar

bagaimana belajar dan belajar pada situasi kerja yang ada. Mungkin dilengkapi portofolio dan proposal untuk memperkuat unit dan sebagai acuan menyiapkan dokumentasi untuk pengalaman belajar.

Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya institusi penyelenggara pendidikan vokasi tidak memiliki unit produksi sendiri atau mitra kerjasama. Juga sulitnya menjalin kemitraan dengan industri untuk membantu transisi para pembelajar dari dunia sekolah ke dunia kerja untuk menerapkan pendekatan *work-based learning* secara terpadu. Tak banyak institusi pendidikan vokasi yang memiliki MOU untuk pelaksanaan transisi itu. Ditambah belum adanya perangkat perundangan tentang kewajiban industri/dunia usaha melaksanakan WBL secara bersama dengan institusi pendidikan vokasi.

### ***Model WBL Rolling-Terpadu pada pendidikan vokasi Diploma III Otomotif.***

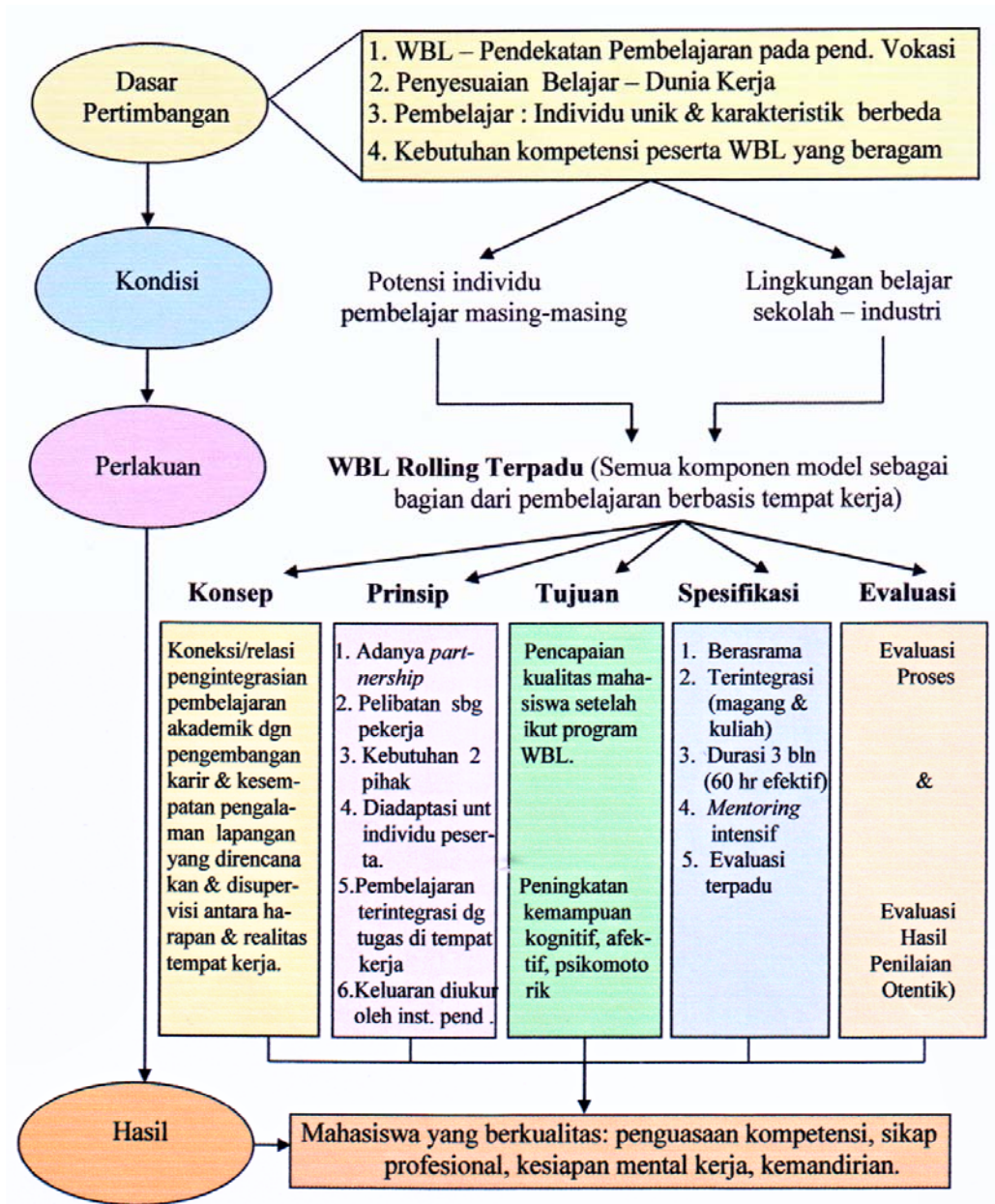
Pelaksanaan praktik industri, praktik lapangan, atau praktik kerja lapangan pada program Diploma III Otomotif sebagai salah satu model penyelenggaraan WBL saat ini lebih banyak dibebaskan dan diserahkan pada mahasiswa untuk melakukannya dengan industri (FT UNY, 2006; FT UNS, 2007; FT UM, 2008). Dari kajian studi pendahuluan di lapangan, pelaksanaan praktik pengalaman industri dapat dirangkum terdapat empat model yang dilaksanakan pada pendidikan vokasi (Budi Tri Siswanto, 2011).

Dari kajian lapangan, penyelenggaraan pengalaman industri tidak dapat dilepaskan dari peran industri sebagai tempat kerja maupun pembelajaran berbasis tempat kerja termasuk pengembangan model penyelenggaraannya. Industri dengan program *corporate social responsibility* (CSR) dapat berperan dalam pendidikan atau pengembangan sumber daya manusia. Wujud CSR tidak hanya berupa dana, namun juga termasuk pemanfaatan fasilitas pengembangan sumber daya yang dimiliki seperti: tempat magang/lingkungan kerja, pusdiklat/*training center*, instruktur, mentor, asrama, fasilitas praktik dan sebagainya. Dengan pendekatan manajemen strategik, penyelenggaraan pengalaman industri bagi para mahasiswa pendidikan vokasi diploma III otomotif dapat dimulai dengan memilih strategi, disusul menetapkan taktik serta menentukan metodenya. Variasi strategi-taktik-metode sangat beragam. Peran industri (dalam hal ini Pusdiklat/Training Center) pada berbagai Agen Pemegang Merek (APM) industri otomotif dalam pengembangan model penyelenggaraan pengalaman industri sangat besar. Fungsi dan kapabilitas

Pusdiklat/TC dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi di perguruan tinggi melalui mekanisme CSR dengan membangun jejaring melalui MOU.

Variasi berbagai model WBL yang ada belum seperti yang diharapkan konsep WBL sebagaimana diidentifikasi oleh School-to-Work Administrative Team (STWA Team, 1997) yang menyatakan bahwa *work-based learning* merupakan hubungan (*connection*) dari pengalaman-pengalaman belajar yang direncanakan dan disupervisi dengan harapan dan realitas dunia kerja. Pengalaman WBL memberikan pada para pembelajar kesempatan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap-sikap dan perilaku kemampuan bekerja (*employability*) yang membawa ke pilihan-pilihan karir yang lebih baik (*better informed career choices*) dan pelibatan dalam bekerja yang produktif (*productive employment*). Aplikasi dari WBL dapat diimplementasikan secara kontinum pada semua tingkat pembelajar, dari sekolah dasar, menengah sampai mahasiswa dan meliputi kontinum yang makin meningkat keterlibatan dalam okupasi dan atau pada tempat kerja. Dimulai dari ceramah guru kelas tentang pekerjaan/vokasi, harapan tentang dunia kerja sampai kontinum berupa penerimaan pekerjaan kompetitif.

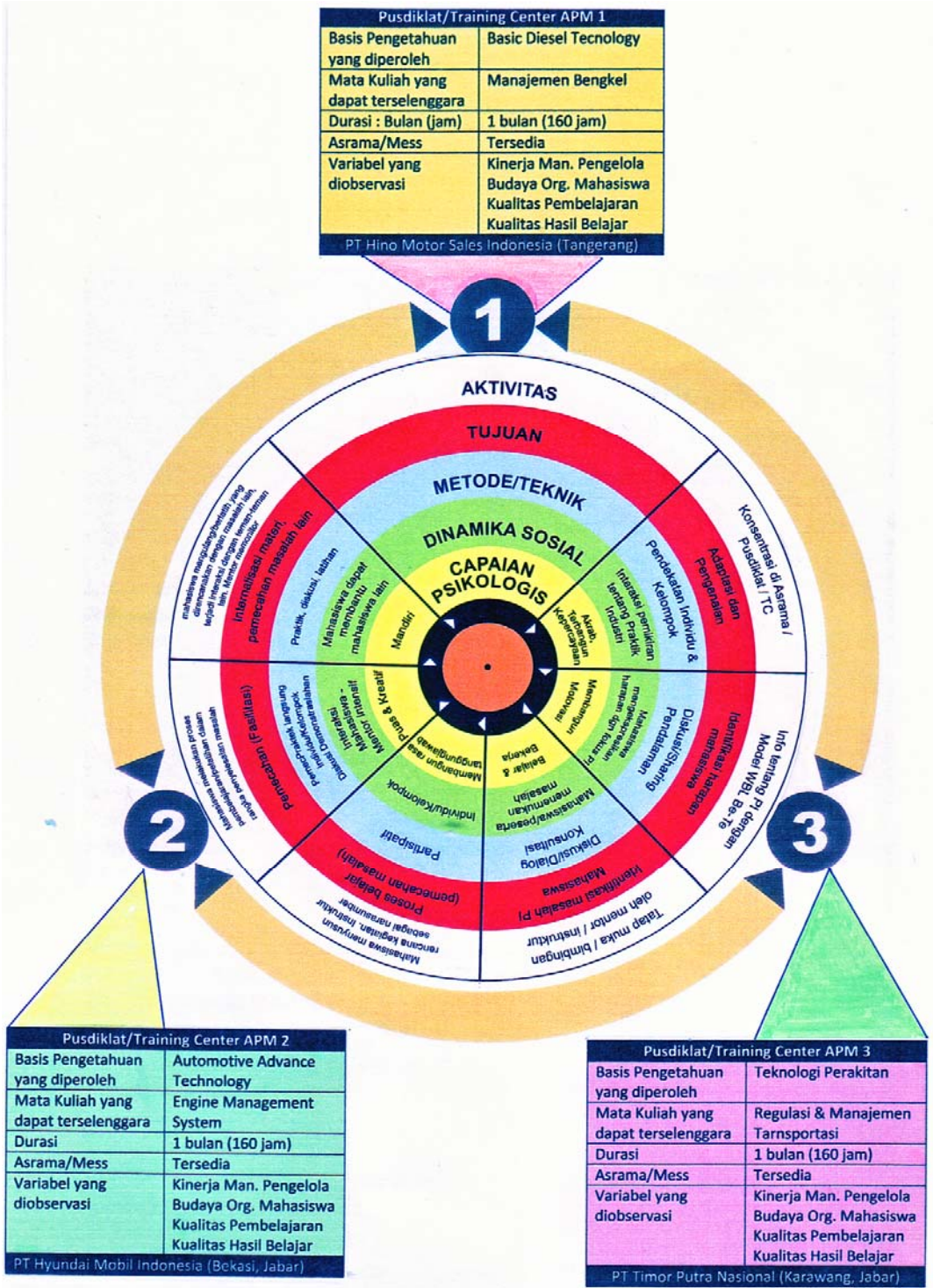
Contoh pengembangan model penyelenggaraan WBL dilakukan pada program DIII Otomotif di DIY-Jateng yang melibatkan 3 PTN (UNY, UNS, UNNES) dan 3 PTS (Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta, UMM Magelang, dan Politama Surakarta) dan melibatkan 6 APM (Agen Pemegang Merek: Hyundai, Timor, Hino, Suzuki, Nissan, dan United Tractors Tbk.) di Jakatabek (Budi Tri Siswanto, 2011). Eksperimen dengan memberi perlakuan dengan Model WBL Rolling Terpadu pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol. Model WBL Rolling Terpadu mengoperasikan program pengalaman lapangan secara bersama-sama antara institusi pendidikan vokasi dengan industri. Tujuannya memberikan pengalaman lapangan/industri (*industrial attachment*) pada para mahasiswa di dunia industri/dunia kerja. Spektrum keahlian meliputi teknik kendaraan ringan, sepeda motor, perbaikan bodi otomotif, alat berat, dan ototronik. Kerangka pengembangan model dan proses pembimbingan/mentoring WBL Rolling Terpadu dapat dikemukakan pada Gambar 1:



Gambar 1. Kerangka Pengembangan WBL Rolling Terpadu

Inti dari kegiatan WBL Rolling Terpadu yaitu adanya pengalaman industri yang didalamnya ada proses-proses: komunikasi, informasi, dan pembelajaran/pelatihan; fasilitasi; pembimbingan/pendampingan; mentoring; monitoring/supervisi; dan evaluasi. Dari eksperimen itu diperoleh fakta bahwa pembelajaran berbasis kerja dapat dilakukan pada pendidikan vokasi dengan mitra kerjasama industri dengan dukungan CSR mereka. Kapabilitas dan fasilitas training center yang mereka miliki amat mendukung. Tinggal payung hukum kerjasama itu dapat dikembangkan sebagaimana pelaksanaan program PSG (pendidikan sistem

ganda) di SMK dengan kebijakan *link and match*. Contoh Model WBL Rolling Terpadu pada program DIII Otomotif dapat dilihat pada gambar 2:



Gambar 2. Model WBL Rolling Terpadu DIII Otomotif



## KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil uji coba dan pengembangan, model penyelenggaraan *work-based learning* Rolling-Terpadu (RoTer) pada pendidikan vokasi Diploma III Otomotif terbukti meningkatkan kualitas hasil belajar pada program atau mata kuliah pengalaman industri yang merupakan mata kuliah lapangan pada program D III Otomotif. Model penyelenggaraan WBL Rolling Terpadu efektif meningkatkan kualitas hasil belajar yang meliputi 4 (empat) aspek: pengetahuan mekanik otomotif, sikap profesional, kesiapan mental kerja, dan kemandirian mahasiswa.
2. Luaran (*output*) dari model WBL Rolling Terpadu yaitu: pengetahuan mekanik otomotif, sikap profesional, kesiapan mental kerja, dan kemandirian mahasiswa pada kelas model lebih tinggi secara signifikan dibanding kelas konvensional.
3. Diperlukan payung hukum berupa kebijakan Dikti yang mengakomodasi adanya kewajiban perusahaan/industri melaksanakan program WBL bagi para mahasiswa pendidikan vokasi, CSR perusahaan/industri yang diarahkan pada pendidikan vokasi, dan adanya pengurangan pajak bagi perusahaan/industri yang bermitra dengan pendidikan vokasi sebagaimana dulu pernah dilakukan Direktorat PSMK dengan kebijakan *link and match*.

## Daftar Pustaka

- Bailey, T. & Meritt, D. (1997). Youth apprenticeship : lesson from the U.S. experience. *CenterFocus*, 1. Diakses 8 Agustus 2008, National Center for Research in Vocational Education dari : <http://ncrve.berkeley.edu/CenterFocus/cf1.html>.
- Boud, D., & Solomon, N. (2001). *Work-based learning a new higher education?* London : SRHE and Open University Press.
- Braham, J. & Pickering, J. (2007). Widening participation and improving economic competitiveness; the dual role of work-based learning within foundation degrees. *Proceedings of The Work-based Learning Futures Conference*, UK, Buxton, April 2007, 45-52.
- Budi Tri Siswanto, (2011). *Pengembangan model penyelenggaraan work-based learning pada pendidikan vokasi diploma III otomotif*. Disertasi doktor, tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

- Direktorat Dikmenjur. (2002). Pokok-pokok pikiran pengembangan pendidikan kejuruan menjelang 2020. Dalam Dedi Supriadi (Ed.), *Sejarah pendidikan teknik dan kejuruan di Indonesia* (pp. 585-602). Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Fallow, S., & Weller, G. (2000). Transition from student to employee : a work-based program for “graduate apprentices” in small to medium enterprises. *Journal of Vocational and Education Training*, 52(4), 665-685.
- FT UNY. (2006). Buku Pedoman Praktik Industri.
- Garnett, J. (2008). Recognising and enhancing the quality of university work-based learning programmes. *Proceedings of the work-based learning futures II conference*, UK, Middlesex, May 2008, 32-38.
- Lynch, R.L. & Harnish, D. (1998). Preparing pre-service teachers education students to used work-based strategies to improve instruction. In *Contextual teaching and learning : Preparing teachers to enhance student success in the workplace and beyond* (pp. 127-158). Columbus : OH : ERIC Dearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education.
- Mercedes-Benz. (2009). *After-Sales Job Profiles Training & Certification Program*. Jakarta : Mercedes-Benz Distribution Indonesia.
- Raelin, J. A. (2008). *Work-based learning. Bridging knowledge an action ini the workplace*. New and revised Edition. San Francisco : John Wiley and Sons.
- Smith, E. (2002). Theory and practice : the contribution of off-the-job training to the development of apprenticeship and trainee. *Journal of Vocational and Education Training*, 54(3), 431-456.
- Stern, D., Bailey, T. & Merrit, D. (1996). School-to-work policy insights from recent international developments. Berkeley, NCRVE, 7 Diakses 8 Agustus 2008 dari <http://vocserve.berkeley.edu/allinone/mds-950.html>
- Triatmoko, B. B. (2001). Pendidikan kejuruan berorientasi pasar di ATMI Solo. Dalam PPKP (Ed.). *Pengembangan pendidikan diploma untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri era global dalam rangka optimalisasi potensi daerah*. Yogyakarta : Politeknik PPKP.
- Work-based learning guide 2002. Diakses pada tanggal 2 Pebruari 2009, dari <http://www.iowaworkforce.org/files/wlg02.pdf>

**Budi Tri Siswanto**, dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta pada Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Lulus S3 PTK UNY 2011 dengan disertasi **Pengembangan Model Penyelenggaraan Work-Based Learning pada Pendidikan Vokasi Diploma III Otomotif**. Pernah menjabat Ketua Jurusan PT Otomotif FT UNY 1999-2007 dan pengelola D3 Otomotif UNY-Timor/Kelas Industri 2000-2007, sekarang menjabat Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

## ABSTRAK

### ***Entrepreneurship Hidden Curriculum (EHC): Model Kurikulum Bernuansa Kewirausahaan di Perguruan Tinggi***

oleh

Bayu Dwi Nurwicaksono<sup>1</sup>

(ponsel: 085654063484, surel: byupbsi\_unesa@yahoo.co.id)

Pengangguran di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah sarjana (S-1) pada Februari 2007 sebanyak 409.900 orang. Setahun kemudian jumlah pengangguran terdidik bertambah menjadi 626.200 orang. Jika setiap tahun jumlah kenaikan rata-rata 216.300, pada Februari 2012 terdapat lebih dari 1 juta pengangguran terdidik. Dalam rentang waktu 2007-2010 tercatat peningkatan sebanyak 519.900 orang atau naik sekitar 57%. Pada perkembangan berikutnya, BPS menilai jumlah persentase pengangguran terdidik (sarjana) yang menganggur sedikit berkurang, Februari 2011 turun menjadi 9,95%, dibanding Februari 2010 sebesar 14,24%. Turunnya tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi itu terkait penerimaan PNS.

Fenomena itu terjadi karena tidak terlepas dari kontribusi perguruan tinggi yang umumnya lebih mempersiapkan lulusannya menjadi pencari kerja (*job seeker*) daripada pencipta lapangan kerja (*job creator*). Salah satu alternatif solusi untuk mengurangi pengangguran lulusan perguruan tinggi ini adalah dengan menerapkan kurikulum kewirausahaan melalui konsep *Entrepreneurship Hidden Curriculum (EHC)*, yakni membekali mahasiswa keterampilan *soft skill* dan *hard skill* berwirausaha dengan cara memasukkan muatan kewirausahaan baik secara substansi nilai-nilai kewirausahaan maupun aplikasinya pada setiap proses pembelajaran secara tersembunyi sehingga *outputnya* akan memiliki *life skill* bidang yang ditekuninya dan diterapkan dalam kehidupan nyata.

Proses pembelajaran di perguruan tinggi hendaknya mampu menjembatani antara perkembangan iptek dengan kebutuhan masyarakat di dunia nyata. Ditjen Dikti dapat mengadaptasi konsep *Entrepreneurship Hidden Curriculum (EHC)*. Selanjutnya Ditjen Dikti memberi kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menyusun dan menerapkan garis-garis besar rencana pembelajaran (GBRP) yang disesuaikan dengan peluang, kondisi masyarakat lokal perguruan tinggi berada, dan kemampuan perguruan tinggi tersebut. Dalam penerapan konsep EHC ini perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan atau kota. *Entrepreneurship Hidden Curriculum (EHC)* diterapkan melalui pengintegrasian *Life Skill* dalam pengembangan pendidikan tinggi yang terdiri atas *soft skill* dan *hard skill* kewirausahaan.

Konkretisasi kurikulum tersebut dijalankan oleh dua komponen, yakni perguruan tinggi sebagai institusi dan dosen sebagai pelaku di lapangan. Perguruan tinggi sebagai institusi berperan dalam koordinasi program, pembentukan komite kurikulum tersembunyi, dan pelayanan administrasi. Dosen sebagai pelaku di lapangan berperan dalam menyusun rancangan kompetensi, indikator, materi kuliah, perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran dan evaluasi.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa konsep *Entrepreneurship Hidden Curriculum (EHC)* di perguruan tinggi sebagai

---

<sup>1</sup> Dosen Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

alternatif solusi mengurangi pengangguran ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni (1) upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara institusional, meliputi: perancangan koordinasi Program Usaha Mandiri Mahasiswa (PUMM), pembentukan komite EHC, pembentukan biro pelayanan administrasi pendirian usaha baru bagi mahasiswa; dan (2) upaya yang dilakukan oleh dosen secara profesional, meliputi: perancangan kompetensi, indikator, materi, perencanaan, strategi, dan evaluasi pembelajaran yang bermuatan nilai-nilai *soft skill* dan *hard skill* kewirausahaan dengan tetap mengacu karakteristik bidang keilmuannya.

**Kata kunci:** EHC, Kurikulum, Wirausaha, Perguruan Tinggi

## **Pendahuluan**

Pengangguran di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah sarjana (S-1) pada Februari 2007 sebanyak 409.900 orang. Setahun kemudian, tepatnya Februari 2008 jumlah pengangguran terdidik bertambah 216.300 orang atau sekitar 626.200 orang. Jika setiap tahun jumlah kenaikan rata-rata 216.300, pada Februari 2012 terdapat lebih dari 1 juta pengangguran terdidik. Belum ditambah pengangguran lulusan diploma (D-1, D-2, D-3) terus meningkat. Dalam rentang waktu 2007-2010 saja tercatat peningkatan sebanyak 519.900 orang atau naik sekitar 57%.

Pada perkembangan berikutnya, BPS menilai jumlah persentase pengangguran terdidik, alias lulusan sarjana perguruan tinggi yang menganggur sedikit berkurang. Dalam catatan BPS, pada Februari 2011 turun drastis menjadi 9,95%, dibanding Februari 2010 sebesar 14,24%. Turunnya tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi kemungkinan terkait penerimaan PNS.

Data BPS juga menyebutkan Februari 2011, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Diploma menempati posisi tertinggi, yaitu masing-masing sebesar 12,17% dan 11,59%. TPT dengan tingkat pendidikan universitas mengalami penurunan yang signifikan dari 14,24% pada Februari 2010 menjadi 9,95% pada Februari 2011. Namun dalam data tersebut, ternyata jumlah pekerja di Indonesia yang merupakan lulusan universitas tidak mengalami peningkatan signifikan, hanya 5,54 juta di Februari 2011 dari 4,94 juta di Februari 2010 lalu.

Jumlah pengangguran pada Februari 2011 mencapai 8,1 juta orang atau 6,8% dari total angkatan kerja. Secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, di mana TPT Februari 2011 sebesar 6,8% turun dari TPT Agustus 2010 sebesar 7,14% dan TPT Februari 2010 sebesar 7,41%.

Berdasarkan data-data di atas, diketahui bahwa lulusan sarjana saat ini cukup banyak menciptakan pengangguran daripada menciptakan lapangan pekerjaan. Padahal selama ini oleh masyarakat sarjana diyakini sebagai orang yang mampu berpikir analitis dan mampu menciptakan perubahan di masyarakat, akan tetapi ternyata mereka belum mampu membantu dirinya sendiri. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian ketenagakerjaan di Indonesia, yakni jumlah tamatan perguruan tinggi yang berwirausaha sebesar 6,14% dan sedangkan jumlah tamatan sekolah dasar yang berwirausaha sebesar 20.07%.

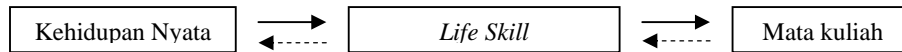
No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2008 (Agst)	2009 (Feb)	2009 (Agst)	2010 (Feb)	2010 (Agst)
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD	547 038	476,302	637 901	606 230	757 807
2	Sekolah Dasar	2 099 968	2,143,747	1 531 671	1 522 465	1,402,858
3	SLTP	1 973 986	2,054,682	1 770 823	1 657 452	1,661,449
4	SMTA (Umum dan Kejuruan)	3 812 522	3,471,213	3 879 471	3 448 137	3,344,315
5	Diploma I/II/Akademi	362 683	486,399	441 100	538 186	443,222
6	Universitas	598 318	626,621	701 651	820 020	710,128
	<b>Total</b>	<b>9 394 515</b>	<b>9,258,964</b>	<b>8 962 617</b>	<b>8 592 490</b>	<b>8,319,779</b>

Gambar 1. Ketenagakerjaan di Indonesia Berdasarkan Tingkatan Pendidikan  
sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Fenomena ini terjadi karena tidak terlepas dari seberapa besar kontribusi perguruan tinggi pencetak lulusan sarjana yang umumnya lebih mempersiapkan lulusan perguruan tinggi menjadi pencari kerja (*job seeker*) daripada pencipta lapangan kerja (*job creator*). Salah satu alternatif solusi untuk mengurangi pengangguran lulusan perguruan tinggi ini adalah dengan menambahkan kurikulum kewirausahaan melalui konsep *Entrepreneurship Hidden Curriculum* (EHC), yakni membekali mahasiswa keterampilan *soft skill* dan *hard skill* berwirausaha dengan cara memasukkan muatan kewirausahaan baik secara substansi nilai-nilai kewirausahaan maupun aplikasinya pada setiap proses pembelajaran.

## Pembahasan

Mahasiswa dipandang memiliki ilmu yang tinggi dan diharapkan oleh masyarakat dapat menjadi *problem solver* yang ada di masyarakat melalui penerapan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Oleh karena itu, proses pembelajaran di perguruan tinggi hendaknya mampu menjembatani antara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan masyarakat di dunia nyata. Hal ini dapat digambarkan dalam alur bagan berikut, yang diadaptasi dari tim *Broad Based Education*, Depdiknas (2002: 16).

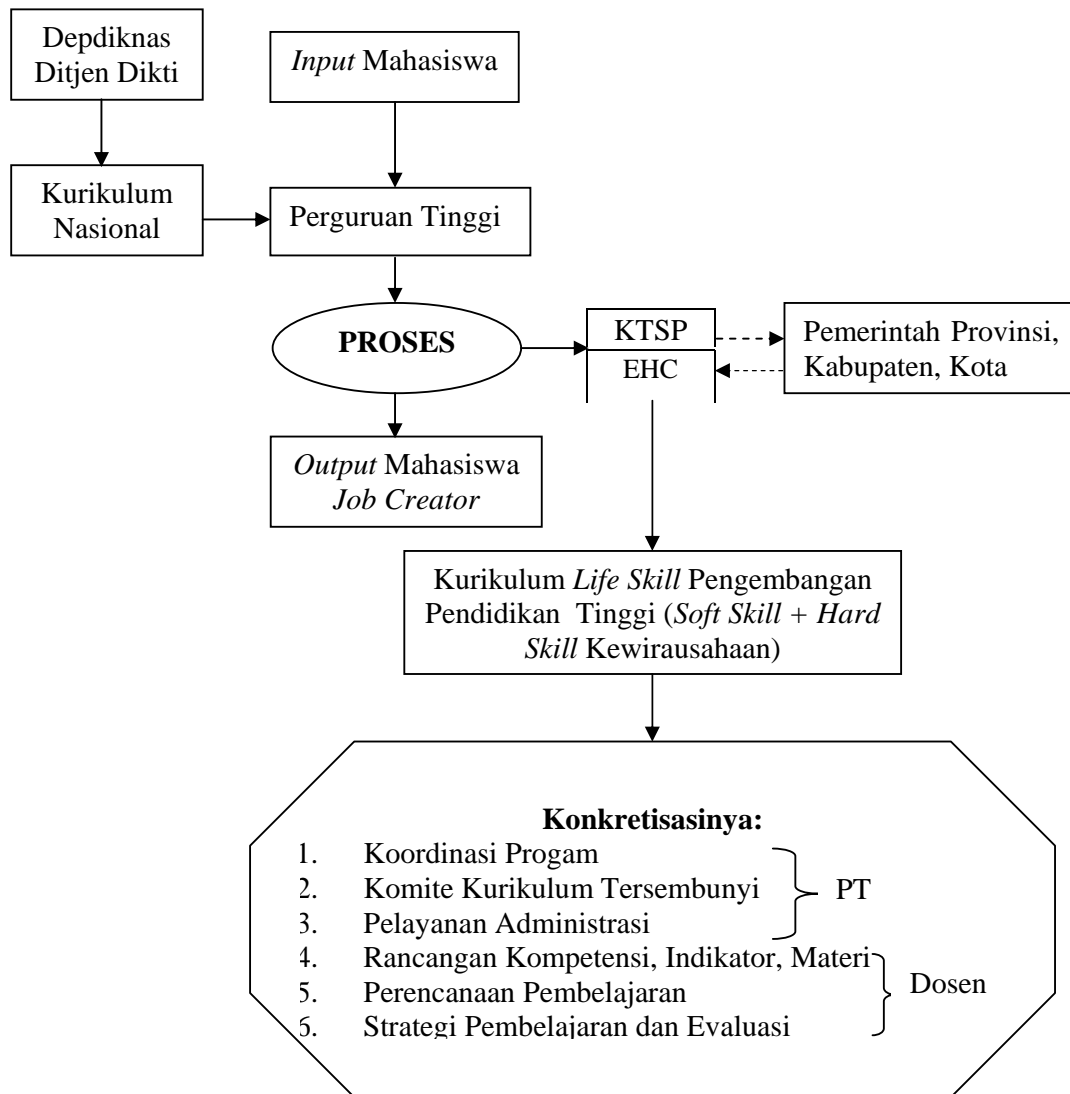


Gambar 2.1. Alur Bagan Pembelajaran di Perguruan Tinggi yang Bermakna

Keterangan :     $\longrightarrow$     Menunjukkan arah dalam pengembangan kurikulum  
                           $\longleftarrow$     Menunjukkan arah kontribusi hasil pembelajaran

Proses pembelajaran di perguruan tinggi yang bermakna adalah proses pembelajaran yang terdapat hubungan timbal balik antara mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa dengan kondisi nyata, sehingga ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi oleh mahasiswa dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan pada akhirnya dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Perguruan tinggi hendaknya peka terhadap permasalahan kemasyarakatan dan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan termutakhir hendaknya perguruan tinggi dapat memberikan solusi alternatif permasalahan yang ada di masyarakat.

Jadi pendalaman keilmuan mahasiswa tidak seperti menara gading yang melangit namun tidak menjangkau permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat. Perguruan tinggi dalam mengembangkan keilmuannya harus beracuan pada permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat agar keberadaan perguruan tinggi benar-benar menjadi pusat solusi, karena itu sistem perkuliahan dan program di perguruan tinggi harus mengacu pada karakteristik daerah.



Gambar 2.2. Konsep *Entrepreneurship Hidden Curriculum* (EHC) di Perguruan Tinggi

Keterangan :  $\longrightarrow$  Menunjukkan garis intruksi

$\longleftarrow$  Menunjukkan garis koordinasi

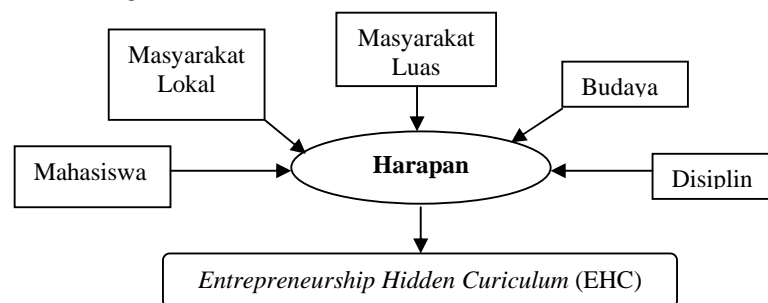
Sesuai konsep yang ditawarkan di atas, lapisan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyusun kurikulum pendidikan nasional adalah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Ditjen Dikti dapat memasukkan EHC di perguruan tinggi. Selanjutnya Ditjen Dikti memberi kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menyusun dan menerapkan garis-garis besar rencana pembelajaran (GBRP) yang disesuaikan dengan peluang, kondisi masyarakat lokal perguruan tinggi berada, dan kemampuan perguruan tinggi tersebut. Dalam

penerapan konsep EHC ini perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan atau kota.

EHC diterapkan melalui pengintegrasian *Life Skill* dalam pengembangan pendidikan tinggi yang terdiri atas *soft skill* dan *hard skill* kewirausahaan. Konkretisasi kurikulum tersebut dijalankan oleh dua komponen, yakni perguruan tinggi sebagai institusi dan dosen sebagai pelaku di lapangan. Perguruan tinggi sebagai institusi berperan dalam koordinasi program, pembentukan komite kurikulum tersembunyi, dan pelayanan administrasi. Dosen sebagai pelaku di lapangan berperan dalam menyusun rancangan kompetensi, indikator, materi kuliah, perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran dan evaluasi. Dalam mengembangkan kurikulum terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Tujuan perguruan tinggi,
2. Pengalaman yang akan disiapkan untuk mahasiswa,
3. Bagaimana pengalaman itu bisa efektif diorganisasikan dan diberikan kepada mahasiswa,
4. Apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai.

Ketika merumuskan keempat hal di atas, perguruan tinggi perlu memahami kondisi di sekitar perguruan tinggi, peluang lapangan kerja, dan kemampuan mahasiswa. Peta aspek-aspek yang perlu dianalisis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 2.3. Aspek-aspek yang perlu dianalisis dalam pengembangan *Entrepreneurship Hidden Curriculum (EHC)*  
Adaptasi dari Westmeyer dalam Rosyada (Rosyada, 2007:87)

EHC merupakan kristalisasi model pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Agar EHC dapat diterapkembangkan dengan efektif, maka perguruan tinggi penerap EHC harus membuka ruang *share* kepada mahasiswa, masyarakat lokal, dan masyarakat luas untuk menyampaikan harapannya, sehingga hasil penerapan EHC nantinya dapat benar-benar menjawab permasalahan dan harapan



masyarakat. Selain itu, perguruan tinggi penerap EHC juga harus memperhatikan budaya lokal dan faktor kedisiplinan sumber daya manusia penerap EHC. Pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan lebih detail mengenai konkretisasi EHC.

### **Konkretisasi EHC di Perguruan Tinggi**

Untuk mengkonkretkan EHC terdapat enam hal yang harus dirancang dengan baik agar kurikulum tersembunyi ini dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Enam hal tersebut terbagi ke dalam dua upaya yang harus dilakukan, yakni upaya perguruan tinggi secara institusional dan upaya dosen secara profesional.

Upaya perguruan tinggi secara insitusional dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni

#### **1. Koordinasi Program**

Koordinasi program ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu program tertentu yang dibuat untuk mewadahi kreativitas berwirausaha kelompok mahasiswa dari berbagai jurusan yang ada di perguruan tinggi. Program tersebut dapat disebut dengan Program Usaha Mandiri Mahasiswa (PUMM). PUMM ini diadakan oleh bidang kemahasiswaan perguruan tinggi pada setiap tahun yang dapat diikuti oleh kelompok mahasiswa dari berbagai jurusan dan fakultas dengan cara menyusun rencana usaha. Proposal PUMM yang dianggap baik oleh tim PUMM berhak mendapatkan dana insentif pembukaan usaha tersebut.

Pertanggungjawaban kelompok mahasiswa pengusul PUMM tersebut dapat diamati dengan cara memonitoring usaha mandiri mahasiswa tersebut selama tiga bulan sejak usaha mandiri tersebut dibuka. Setiap akhir bulan diadakan *Entrepreneur Share Forum* (ESF) sebagai wadah komunikasi terbuka dalam hal perkembangan usaha mandiri masing-masing kelompok mahasiswa. Jadi pada ESF tersebut antarmahasiswa dapat saling bertukar pengalaman dan kiat dalam pengembangan usaha mandiri tersebut. Pada akhir bulan ketiga, tim penilai PUMM menentukan peringkat kelompok mahasiswa pengusul PUMM terbaik. Tiga peringkat terbaik mendapatkan insentif lebih dari perguruan tinggi. Insentif tersebut sebagai apresiasi perguruan tinggi terhadap kinerja kelompok mahasiswa tersebut dalam pengembangan usaha mandiri.

## 2. Komite *Entrepreneurship Hidden Curriculum* (EHC)

Komite EHC merupakan komunitas tim perumus kurikulum tersembunyi kewirausahaan mahasiswa. Tim perumus EHC ini terdiri atas dua orang dosen dari masing-masing jurusan yang ada di perguruan tinggi. Komite EHC ini bertugas menyusun kurikulum EHC yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan masyarakat lokal dan kebutuhan masyarakat luas yang tetap menghargai dan menyesuaikan dengan kultur atau budaya masyarakatnya serta menerapkan nilai-nilai kedisiplinan guna membentuk wirausahawan sukses. Komite EHC ini dapat dibentuk di tingkatan universitas, fakultas, dan jurusan. Hubungan antara komite EHC universitas, fakultas, dan jurusan ini bersifat intruksional koordinatif.

## 3. Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi ini dimaksudkan untuk mempermudah dan melegimitasi usaha mandiri yang akan *dilaunching* oleh kelompok mahasiswa pengusul PUMM yang telah dan atau akan didanai. Pelayanan administrasi ini merupakan kewenangan biro administrasi PUMM yang ada di tingkat universitas. Pelayanan administrasi ini hanya dapat diperoleh kelompok mahasiswa pengusul PUMM yang telah dinyatakan lolos oleh komite PUMM universitas.

Upaya yang dilakukan dosen secara professional dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni

### 1. Rancangan Kompetensi, Indikator, Materi

Rancangan Kompetensi, Indikator, dan Materi ini merupakan komponen konkretisasi EHC yang diterapkembangkan oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah. Setiap dosen berhak membuat rancangan kompetensi, indikator, dan materi yang akan diberi dan diberlakukan pada mahasiswanya. Rancangan kompetensi, indikator, dan materi ini harus tetap disesuaikan dengan mata kuliah spesifikasi jurusan masing-masing mahasiswa. Jadi perancangan kompetensi, indikator, dan materinya tidak *ansich* tentang kewirausahaan, namun spesifikasi keilmuan jurusan masing-masing mahasiswa yang diberi muatan nilai-nilai dan pola aplikasi kewirausahaan. Hal ini termuat dalam garis besar rencana pembelajaran (GBRP). Lebih jelasnya dapat dilihat contoh usulan GBRP pada lampiran.

## 2. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh dosen harus berdasarkan perancangan kompetensi, indikator, dan materi yang telah disusun. Perencanaan pembelajaran ini harus dirancang dengan baik disesuaikan dengan analisis kebutuhan mahasiswa, masyarakat lokal, masyarakat luas, budaya, dan kedisiplinan tinggi.

## 3. Strategi Pembelajaran dan Evaluasi

Strategi pembelajaran dan evaluasi yang disiapkan pun mengacu pada rancangan kompetensi, indikator, dan materi yang diberikan kepada mahasiswa. Penyusunan strategi dan hasil ini akan menentukan efektivitas proses dan hasil pembelajaran. Apabila strategi dan alat evaluasi yang digunakan oleh dosen tepat, maka mahasiswa akan memperoleh proses pembelajaran yang bermakna dan hasil pembelajaran yang maksimal.

## Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa konsep *Entrepreneurship Hidden Curriculum* (EHC) di perguruan tinggi sebagai alternatif solusi mengurangi penganguran ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni (1) upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara institusional, meliputi: perancangan koordinasi Program Usaha Mandiri Mahasiswa (PUMM), pembentukan komite EHC, pembentukan biro pelayanan administrasi pendirian usaha baru bagi mahasiswa; dan (2) upaya yang dilakukan oleh dosen secara profesional, meliputi: perancangan kompetensi, indikator, materi, perencanaan, strategi, dan evaluasi pembelajaran yang bermuatan nilai-nilai *soft skill* dan *hard skill* kewirausahaan dengan tetap mengacu karakteristik bidang keilmuannya.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi di Indonesia menerapkan EHC yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, masyarakat lokal, masyarakat luas, budaya, dan kedisiplinan tinggi.
2. Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan khusus tentang penerapan EHC pada perguruan tinggi yang ada di Indonesia.
3. Pemerintah daerah membangun kerjasama yang erat dalam hal pengembangan EHC ini, khususnya terkait dengan pengembangan karakteristik daerah dan keunggulan lokal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Wibowo, Agus. 2010. Mengatasi Pengangguran Bergelar. Media Indonesia. 22/03/2010. [http: www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id). [06 Januari 2012]
- Basir, Udjang Pr.M. 2005. Ancangan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi: Integrasi *Life Skill* dalam Kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Unesa. Jurnal Lidah Volume 3 Nomor 2. Surabaya Oktober 2005.
- Ditjen Dikti Depdiknas. 2008. Evaluasi Program dan Capaian Kinerja Pembangunan Pendidikan Tahun 2005-2006 dan Beban Target 2008 dan 2009. Disajikan dalam Rembuk Nasional Pendidikan 2008; Jakarta, 4-6 Februari 2008.
- Harian Ekonomi Neraca. 21 Mei 2011. Pengangguran Terdidik Turun Drastis. [http: www.bataviase.com](http://www.bataviase.com) [06 Januari 2012]
- Rosyada, Dede. 2007. Paradigma Pendidikan Demokratis (Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim *Broad Based Education* Depdiknas. 2002. *Life Skill* Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Luas. Surabaya: SIC bekerjasama dengan LPM Unesa dan Swa Bina Qualita Indonesia.
- Zimmerer, Thomas W. 1996. RPP Sesuai Penilaian Sertifikasi Guru Berorientasi Kewirausahaan. Di dalam: Martadi, Editor. Lokakarya Nasional Penyusunan RPP: Bojonegoro, 15 Februari 2009.

Lampiran: Contoh GBRP Bernuansa Kewirausahaan

**Program Studi** : Teknologi Pendidikan

**Nama Mata Kuliah** : Pengembangan Media Komputer Pembelajaran/ Multimedia

**Jumlah SKS** : 2 (dua)

**Deskripsi Mata Kuliah** : Mata kuliah ini mengkaji dan memberi pengalaman praktis pengetahuan dasar tentang komputer pembelajaran CAI (pengertian dan prinsip), internet, pengembangan CAI (desain, produksi prototipe, uji coba, revisi), dan pemanfaatan prototipe.

**Standar Kompetensi** :Mengkaji dan memberi pengalaman praktis pengetahuan dasar tentang komputer pembelajaran CAI (pengertian dan prinsip), internet, pengembangan CAI (desain, produksi prototipe, uji coba, revisi), dan pemanfaatan prototipe.

Perte- muan ke-	Kompetensi Dasar	Indikator	Pengalaman Pembelajaran	Materi ajar	Waktu	Alat/Bahan/ Sumber Belajar	Strategi Pembelajaran	Penilai- an
1—4	Mengkaji dan memberi pengalaman praktis pengetahuan dasar tentang komputer pembelajaran CAI dan internet	Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengetahuan dasar tentang komputer pembelajaran CAI dan internet</li> <li>2. Mempraktikkan pengetahuan dasar tentang komputer pembelajaran CAI dan internet</li> </ol>	Mengkaji dan mempraktikkan pengetahuan dasar tentang komputer pembelajaran CAI dan internet	Uraian penjelasan langkah-langkah dasar pembuatan komputer pembelajaran CAI	100'	OHP, LCD, Laptop  Sumber Belajar: Scheiwer dan Missanchuk. 1993. <i>Interactive Multimedia Instruction</i> . London: Kogan Page.	Diskusi kelompok (presentasi untuk pemancangan wawasan dan pengetahuan) dan proyek penugasan nyata.	Obser- vasi dan portofoli o
5—12	Pengembangan CAI (desain, produksi prototipe, uji coba, revisi)	Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang desain pengembangan CAI</li> <li>2. Merakit produksi prototipe pengembangan CAI</li> <li>3. Menguji hasil pengembangan CAI</li> <li>4. Menilai hasil uji coba pengembangan CAI</li> </ol>	Merancang pengembangan CAI	Uraian model pengembang-an CAI	100'	Margaret Mehring. 1999. <i>Screenplay</i> . New York: McMilan Publishing.	Diskusi kelompok (presentasi) dan Proyek penugasan nyata (pembuatan/ pengembangan CAI yang akan diperjualbelikan oleh mahasiswa: MUATAN EHC DALAM PEMBELAJARAN)	Obser- vasi dan portofolio
13—16	Pemanfaatan prototipe	Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasarkan media CAI melalui pendemonstrasiaan pembelajaran tertentu dengan menggunakan prototipe pengembangan CAI</li> <li>2. Menghargai pemanfaatan protipe pengembangan CAI</li> </ol>	Memanfaatkan prototipe pengembangan CAI	Pemanfaatan prototipe pengembang-an CAI	100'			Obser- vasi dan portofolio

# REDESAIN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI ERA KEMANUSIAAN UNIVERSAL<sup>1</sup>

Oleh: Anik Ghufron<sup>2</sup>

## Abstrak

Kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan perlu dimutakhirkan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik, dan kemajuan ilmu dan teknologi. Apabila pada saat ini, ada kecenderungan dan tuntutan di kalangan sebagian warga masyarakat untuk memposisikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai *core values* dalam penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang dan satuan pendidikan maka sudah semestinya jika kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan dimutakhirkan berdasarkan nilai-nilai tersebut.

Pemutakhiran terhadap kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai tuntutan masyarakat tersebut dapat berwujud redesign terhadap rumusan kompetensi, isi materi pembelajaran, bentuk pengalaman belajar, dan sistem penilaiannya. Dengan melakukan redesign terhadap aspek-aspek utamanya dimungkinkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dapat mengantarkan lulusan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masyarakat, yang tak sebatas kompetensi akademik saja. Lulusan satuan pendidikan diharapkan memiliki nilai-nilai; kedamaian (*peace*), menghargai (*respect*), kerjasama (*cooperation*), kebebasan (*freedom*), kebahagiaan (*happinnes*), kejujuran (*honesty*), kerendahan hati (*humility*), kasih sayang (*love*), tanggung jawab (*responsibility*), kesederhanaan (*simplicity*), toleransi (*tolerance*), dan persatuan (*unity*).

Kata kunci; kurikulum tingkat satuan pendidikan, nilai-nilai kemanusiaan.

## Pendahuluan

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum resmi yang berlaku di lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian dalam kurun waktu tertentu, KTSP ini dimungkinkan mengalami krisis kepercayaan yang disebabkan oleh adanya berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Bahkan ada kemungkinan KTSP tak digunakan lagi. Adanya kondisi tersebut,

---

<sup>1</sup> Makalah terseleksi disajikan pada Seminar Nasional Ikatan Sarjana Pendidikan (ISPI) bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), tanggal 21 – 22 Januari 2012.

<sup>2</sup> Guru Besar FIP Universitas Negeri Yogyakarta.

para ahli dan praktisi pendidikan terdorong untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan bahkan mencari bentuk kurikulum baru untuk mengganti KTSP. Proses ini senantiasa berlangsung secara siklis mengikuti arah dan kompleksitas perubahan yang terjadi di masyarakat.

Penyempurnaan, perbaikan, dan bahkan perubahan KTSP bukan merupakan kegiatan rutinitas yang mungkin terjadi pada lima atau sepuluh tahunan, tetapi merupakan tuntutan manakala kondisinya menghendaki perubahan. Misalnya, adanya perubahan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani sekolah, termasuk di dalamnya terjadi krisis ketidakpercayaan terhadap mutu lulusan sekolah.

Bagaimana cara menyesuaikan KTSP terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan semakin menguatnya tuntutan pengakuan kemanusiaan manusia? Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan redesain KTSP. Redesain KTSP di sini bukan dimaksudkan melakukan perubahan total terhadap semua aspek utama KTSP, tetapi lebih menekankan pada kegiatan penyesuaian-penyesuaian terhadap isi dari aspek-aspek utama KTSP, yang meliputi; reformulasi rumusan kompetensi, isi materi pembelajaran, bentuk pengalaman belajar, dan sistem penilaiannya.

Tulisan ini akan membahas tiga hal. *Pertama*, makna era kemanusiaan universal. *Kedua*, model kurikulum berbasis budaya untuk era kemanusiaan universal. *Ketiga*, redesain KTSP dalam berbagai aspek utamanya.

### **Era Kemanusiaan Universal**

Pada saat ini, kita memasuki era yang lebih mengedepankan dimensi kemanusiaan manusia. Era tersebut, menurut para penegak HAM disebut sebagai era kemanusiaan universal. Dalam pandangan M. Amin Abdullah (2011) di era itu manusia harus diposisikan sebagai manusia. Penghormatan terhadap sesama bukan didasarkan atas jabatan, pangkat, atau golongan, akan tetapi manusia diposisikan sesuai harkat dan martabatnya.

Era kemanusiaan universal dapat berarti era yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan sejati. Kemanusiaan yang dimaksud adalah *umanitarianisma* (perikemanusiaan) yang meliputi; solidaritas sesama manusia, menghormati hakekat dan martabat manusia, kesetaraan dan tolong menolong antar manusia, menghormati perbedaan dalam berbagai dimensi antar manusia, menciptakan kedamaian. Budi pekerti sebagai nilai luhur adalah pilihan perilaku yang dibangun berdasarkan atas nilai-nilai yang diyakini sehingga sering

diposisikan sebagai nilai instrumental atau cara mencapai sesuatu atau sikap terhadap sesuatu. Dengan budi pekerti, kita akan berbakti, mengabdikan dengan sepenuh jiwa raga kepada bangsa dan kita bukan bangsa pencaci ataupun penghujat.

Nilai-nilai yang mencerminkan suatu karakter seseorang telah dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat atau negara. Nilai-nilai tersebut, menurut Endang Ekowarni (2010) tak lain adalah nilai-nilai luhur (*supreme values*) yang merupakan pedoman hidup (*guiding principles*) yang digunakan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, kedamaian dan kebahagiaan.

Era kemanusiaan universal disebut juga sebagai era pluralisme (buka saya, tetapi kita). Nilai-nilai pluralisme telah menjadi acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Manusia tidak lagi mengedepankan aspek egosentris diri. Dimensi “keragaman” karakter manusia lebih ditonjolkan. Manusia akan tampak kemanusiaannya tatkala berada dalam keragaman atau kebersamaan di antara manusia.

Dalam terminologi agama, era kemanusiaan universal disebut “*hablum minannâs*”. Dalam era itu, manusia saling mengakui, menyayangi, dan menghargai dengan sesama. Tak ada sedikitpun di antara mereka saling merasa lebih dari yang lainnya. Di antara mereka saling menghormati, saling peduli dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya tanpa embel-embel apapun.

### **Masyarakat yang beradab dan bermartabat**

Era kemanusiaan universal ditandai adanya kecenderungan semakin menguatnya tata kehidupan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Perilaku beradab dan bermartabat bukan sekedar slogan, tetapi benar-benar ada dan terealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai beradab dan bermartabat bukan sekedar diwacanakan, namun sudah terimplementasi dan mendarah daging di setiap warga masyarakat.

Apa sesungguhnya masyarakat beradab dan bermartabat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu perlu menjelaskan istilah beradab dan bermartabat. Hal ini perlu dilakukan karena perbedaan makna dari kedua kata tersebut berpengaruh terhadap pengembangan masyarakat beradab dan bermartabat, sebagaimana yang dicita-citakan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Kata beradab dan bermartabat seringkali digunakan secara terpisah-pisah, namun ada kalanya disatupadukan. Beradab dan bermartabat yang memiliki kata dasar “*adab*” dan



“*martabat*” merupakan dua kata yang saling berkaitan. Orang beradab biasanya menjunjung tinggi martabat kemanusiaan sesamanya.

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (2001) dinyatakan bahwa “adab” menunjuk pada kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, atau akhlak. Beradab berarti mempunyai adab, mempunyai budi bahasa yang baik, berlaku sopan, atau telah maju tingkat kehidupan lahir batinnya. Sedangkan “*martabat*” menunjuk pada tingkat harkat kemanusiaan, harga diri. Bermartabat berarti mempunyai martabat.

Berdasarkan kedua makna kata di atas maka masyarakat beradab dan bermartabat adalah suatu bentuk kehidupan masyarakat maju yang menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Dengan demikian, ciri-ciri masyarakat beradab dan bermartabat, antara lain; adanya penghargaan martabat manusia, berbudi bahasa yang baik, berlaku sopan, dan menekankan harga diri.

### **Desain Kurikulum Berbasis Budaya untuk Era Kemanusiaan Universal**

Apa yang dimaksud desain kurikulum berbasis budaya? Desain kurikulum berbasis budaya merupakan sebuah desain kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan berbudaya. Berbudaya berarti setiap individu mampu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku dan diakui masyarakat dijadikan acuan untuk menentukan materi, proses, dan sistem penilaiannya. Alaska Native Knowledge Network (2004) menyatakan;

*..... scope and sequence of the curriculum will be extended to include the interaction between content, process and context, and thus go beyond the usual culture-bound determinations that are associated with an emphasis on content alone.*

Ciri-ciri kurikulum berbasis budaya: *pertama*, berorientasi pada pembentukan manusia berwatak, beradab, dan bermartabat; *kedua*, materi pembelajarannya dikembangkan dari berbagai sumber; *ketiga*, menekankan pada pembudayaan segenap potensi peserta didik; *keempat*, sistem penilaiannya menekankan dimensi proses dan hasil.

Kurikulum berbasis budaya dapat juga dipahami sebagai suatu bentuk inovasi kurikulum yang ingin mengedepankan pengembangan segenap potensi peserta didik atas dasar watak, peradaban, dan martabat. Kurikulum perlu dikaitkan dengan tatanan nilai-nilai

kemanusiaan yang berlaku di masyarakat. Banyaknya materi pelajaran bukan lagi merupakan prioritas utama pengembangannya, namun, yang lebih penting adalah “bagaimana mengembangkan dimensi-dimensi kurikulum yang mampu membuka pengekan-pengekan yang menghalangi perkembangan potensi peserta didik” (Tilaar, 1999).

Berdasarkan uraian di atas, sesungguhnya, kurikulum berbasis budaya dipandang relevan diterapkan dalam sisdiknas kita. Ditinjau dari sisi filosofi, kurikulum berbasis budaya sesuai dengan hakekat proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan peserta didik. Proses pendidikan merupakan proses pembudayaan peserta didik. Dari sisi sosiologi, kurikulum berbasis budaya, sesungguhnya, merupakan suatu desain kurikulum yang menyiapkan warga masyarakat yang menghargai nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Lulusan suatu jenjang pendidikan diharapkan tidak terasing dengan lingkungannya. Sedangkan ditinjau dari sisi psikologis, kurikulum berbasis budaya mengutamakan pengembangan potensi peserta didik yang manusiawi.

### **Redesain KTSP dalam Berbagai Aspeknya**

Kita telah memiliki KTSP sebagai kurikulum resmi yang berlaku di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Legalitas KTSP sebagai kurikulum resmi ditegaskan dan dikuatkan di dalam Permendiknas nomer 22, 23, dan 24 tahun 2006. Dengan adanya kekuatan yuridis tersebut maka kita tak mudah mengubah atau mengganti KTSP dengan seenaknya.

Bagaimana meredesain KTSP dalam rangka optimalisasi KTSP di era kemanusiaan universal? Redesain KTSP dapat dilakukan dengan cara menata ulang terhadap aspek-aspek KTSP, yang meliputi; reformulasi rumusan kompetensi, materi kurikulum, pengalaman belajar, dan sistem penilaian. Penataan ulang tersebut dilakukan terhadap aspek-aspek KTSP yang dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat dan disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang di era kemanusiaan universal.

#### **1. Reformulasi rumusan kompetensi**

Kompetensi merupakan salah satu aspek utama KTSP yang esensial. Rumusan KTSP menjadi payung dan rujukan dalam pengembangan aspek-aspek; materi, pengalaman belajar, dan sistem penilaian. Selanjutnya, kinerja aspek-aspek KTSP lainnya harus dapat dipertanggungjawabkan ke rumusan kompetensi.

Di dalam KTSP, dikenal ada rumusan standar kompetensi lulusan, dan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan merupakan rumusan kompetensi yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Sementara itu, kompetensi dasar merupakan kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Kedua rumusan kompetensi tersebut harus senantiasa dimutakhirkan karena kedua rumusan kompetensi tersebut menjadi acuan dan referensi dalam mengembangkan aspek-aspek lainnya. Bahkan menjadi pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Pemutakhirkan rumusan kompetensi dapat dilakukan melalui reformulasi rumusan kompetensi. Reformulasi terhadap rumusan kompetensi diwujudkan dalam bentuk melakukan kajian dan merumuskan kembali substansi isi kompetensi dan perbaikan redaksional rumusan sesuai kondisi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, apabila rumusan kompetensi ingin ditata kembali sesuai tuntutan era kemanusiaan universal maka nilai-nilai kemanusiaan universal perlu dijadikan jiwa dan terintegrasi dalam rumusan kompetensi. Demikian pula, nilai-nilai kemanusiaan universal yang diintegrasikan dalam rumusan kompetensi harus jelas kriteria keberhasilannya.

Selanjutnya, apabila kita ingin melakukan reformulasi rumusan kompetensi, sebaiknya hasil reformulasi kompetensi tidak menambah beban belajar yang berlaku, memperhatikan aspek perkembangan anak, dan mempertimbangkan keterlaksanaannya di satuan pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan. Dengan memperhatikan rambu-rambu ini diharapkan para pengembang kurikulum dalam menyusun kembali rumusan kompetensi yang ada di KTSP dapat bekerja secara profesional.

## **2. Kontekstualisasi materi kurikulum**

Materi setiap mata pelajaran yang disediakan dalam KTSP dikembangkan dari standar isi sebagaimana yang tertera dalam Permendiknas nomer 23 tahun 2006. Para guru ketika menyusun silabus mata pelajaran tentu saja menggunakan standar isi sebagai acuannya. Implikasinya, para guru perlu menyesuaikan dan mengembangkan materi sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah masing-masing.

Bagaimana cara melakukan penataan ulang terhadap materi setiap mata pelajaran untuk era kemanusiaan universal? Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan kontekstualisasi materi mata pelajaran. Dengan kontekstualisasi materi diharapkan materi menjadi semakin berarti dan relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, sekolah, dan peserta didik.

Kontekstualisasi materi mata pelajaran dilakukan dengan cara mengembangkan dan memasukkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang berkembang di masyarakat ke dalam materi pokok sebagaimana yang tertera dalam standar isi. Di sini, perlu ditegaskan bahwa kontekstualisasi materi terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal yang berlaku di masyarakat bukan dimaksudkan menambah kajian nilai-nilai kemanusiaan universal ke dalam materi pokok. Dengan demikian, ada kemungkinan materi mata pelajaran yang berlaku di satu sekolah berbeda dengan yang berlaku di sekolah lainnya.

### **3. Pengembangan model pembelajaran yang mendidik**

Kegiatan pembelajaran yang terjadi di sekolah tak bisa dilepaskan dari standar proses sebagaimana yang diatur dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Di dalam standar proses dikemukakan bahwa setiap kegiatan pembelajaran wajib memuat tiga tahap kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Adapun variasi aktivitas ketiga tahap tersebut menyesuaikan dengan model, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru.

Apa model pembelajaran yang relevan untuk era kemanusiaan universal? Model pembelajaran yang relevan adalah model pembelajaran yang mendidik. Model pembelajaran yang mendidik perlu digunakan untuk kepentingan aplikasi nilai-nilai kemanusiaan universal ke dalam kegiatan pembelajaran karena model pembelajaran ini diasumsikan mampu memfasilitasi peserta didik belajar dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

### **4. Pengembangan sistem penilaian berbasis performan**

Desain kurikulum yang berlaku di suatu lembaga pendidikan sangat mempengaruhi terhadap sistem penilaiannya. Hal ini sangat beralasan karena penilaian merupakan salah satu komponen pokok kurikulum (Tyler, 1949). Dengan demikian, jika pihak sekolah menerapkan KTSP sebagai desain kurikulum yang resmi berlaku maka sistem penilaiannya pun akan menyesuaikan dengan desain kurikulumnya.

Apabila disepakati alur pikir di atas maka dalam kesempatan ini penulis akan mengajak diskusi tentang evaluasi performansi yang diasumsikan dapat dipakai untuk menilai efektivitas KTSP di era kemanusiaan universal. Hal ini disebabkan bahwa era kemanusiaan universal sangat menekankan peserta didik mampu mendemonstrasikan aplikasi nilai-nilai kemanusiaan universal yang terkandung dalam pengalaman belajar pada rumusan kompetensi setiap mata pelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari.

Apa yang dimaksud dengan penilaian performansi itu? Blank (1982) mengatakan, “*Essentially, a performance test does just what the term implies-it is an instrumen to help the instructor judge whether or not the student can actually perform the task in a job-like setting to some minimum level of acceptability*”. Secara khusus, Mehrens W.A dan Lehmann. I.J (Sudarsono, 2000) mengatakan “*a performance assessment is a procedure in which you use work assignments or tasks to obtain information about how well student has learned*”. Penilaian performansi merupakan bentuk evaluasi yang bermaksud memberi pertimbangan mengenai nilai dan arti dari apa-apa yang telah dipelajari peserta didik.

Penilaian performansi didasarkan atas keyakinan bahwa peserta didik mampu mendemonstrasikan terhadap apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya (*know and able to do*) dalam berbagai cara. Penilaian performansi bertujuan menilai efektivitas penerapan pengetahuan dan ketrampilan pada setting lapangan. Benner (Sudarsono, 2000) mengatakan penilaian performansi berorientasi pada *skill outcome*. Artinya, ketrampilan menggunakan proses dan prosedur yang merupakan hasil pembelajaran yang diharapkan dalam berbagai bidang akademik. Misalnya, sains menaruh perhatian terhadap ketrampilan laborator, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya berkepentingan dengan ketrampilan berkomunikasi, matematika berkaitan dengan ketrampilan pemecahan masalah, dan lain-lain.

Meskipun demikian, penilaian performansi seringkali diabaikan dalam penilaian hasil pembelajaran (*outcomes instructional*) karena dua alasan. *Pertama*, penilaian performansi lebih sulit dalam implementasinya daripada penilaian hasil belajar pengetahuan, terutama dalam persiapan, administrasi, dan skoring. *Kedua*, penggunaan pendekatan penilaian acuan patokan (PAP) untuk mengetahui taraf pencapaian tujuan pembelajaran seringkali diyakini mampu menilai performansi pengalaman belajar peserta didik, sehingga tanpa menggunakan evaluasi performansipun seperangkat kompetensi yang dikuasai peserta didik dapat diketahui.

Bagaimana cara pengembangan alat penilaian performansi peserta didik ?

Gronlund (1982) mengajukan empat langkah pengembangan, yaitu menentukan perolehan

performansi (*performance outcomes*) yang akan dinilai, menentukan standar pencapaian performansi, membuat petunjuk pelaksanaan evaluasi, dan membuat pedoman observasi untuk mengevaluasi performansi. Blank (1982) mengajukan tujuh langkah, yaitu menetapkan terhadap aspek-aspek apa saja yang akan dievaluasi, menetapkan apakah proses dan hasil pembelajaran yang merupakan prioritas evaluasi, mengembangkan butir-butir soal, menetapkan butir-butir soal secara khusus yang menjadi *kata kunci* dari aspek-aspek yang dinilai, menetapkan standar minimal tingkat penguasaan kompetensi, menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi, dan membuat naskah evaluasi dan mengujicobakannya.

## **Penutup**

Redesain KTSP dapat dipandang sebagai langkah yang strategis untuk optimalisasi KTSP di era kemanusiaan universal, yang mengutamakan pembangunan watak, peradaban, dan martabat bangsa. Dengan melakukan redesign KTSP diharapkan lulusan memiliki wawasan pengetahuan luas, tetapi tetap berwatak, bermartabat dan beradab sesuai nilai-nilai kemanusiaan universal yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, redesign KTSP dilakukan dengan cara mereformasi rumusan kompetensi, isi materi pembelajaran, bentuk pengalaman belajar, dan sistem penilaiannya.

Desain kurikulum berbasis budaya merupakan sebuah desain kurikulum yang relevan untuk era kemanusiaan universal dalam rangka menyiapkan bangsa yang berwatak, beradab, dan bermartabat. Di sini, desain kurikulum berbasis budaya dapat dikatakan sebagai sebuah tuntutan yang harus direalisasikan oleh pihak penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai suatu bentuk kegagalan perubahan.

## **Referensi**

- Assembly of Alaska Native Educators. 2003. "Guidelines for cross-cultural Orientation programs". Diambil dari [www.ankn.uaf.edu/standards/xcop.html](http://www.ankn.uaf.edu/standards/xcop.html) tanggal 2 Agustus 2004.
- Blank, W.E. (1982). *Handbook for developing competency-based training programs*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Endang Ekowarni. 2010. "Pengembangan nilai-nilai luhur budi pekerti sebagai karakter bangsa". Diambil dari <http://belanegarari.wordpress.com/2009/08/25/pengembangan->

[nilai-nilai-luhur-budi-pekerti-sebagai-karakter-bangsa, Pada tanggal tanggal](#) 26 Maret 2010.

Gronlund, NE. (1982). *Constructing achievement test: third edition*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Longstreet, Wilma S & Shane, Harold G., (1993). *Curriculum for a New Millennium*. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

M. Amin Abdullah. (2011). “Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Dalam Perspektif Kemanusiaan Universal, Agama-Agama dan Keindonesiaan”. Makalah Disampaikan dalam forum Pelatihan Lanjut Hak Asasi Manusia bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusi Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo Norway, Jogjakarta Plaza Hotel, tanggal 10 Juni 2011.

Oliva. (1992). *Developing the curriculum. (Third Edition)*. United States: HarperCollins Publishers.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sudarsono. (2000). “Penyusunan soal tes kinerja (performance-test) sebagai langkah awal pembentukan bank soal”. Makalah workshop tentang performance-based evaluation dan bank soal program Meas-lab Due-Like Universitas Negeri Yogyakarta, 28-29 Juli 2000.

Tilaar. 1999. *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tyler. (1949). *Basic principles of curriculum*. Chicago: The University of Chicago Press.

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**KAJI ULANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
DALAM KONTEKS REDESAIN SISTEM KURIKULUM  
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DAN UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN  
DI INDONESIA**

Makalah disajikan dan dibahas pada Seminar Nasional diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), 21-22 Januari 2012

Oleh  
**Dr. MUKMINAN**  
Fakultas Ilmu Sosial - UNY  
*Email: mukminan@yahoo.co.id*  
HP: 08157956800

---

**IKATAN SARJANA PENDIDIKAN INDONESIA (ISPI)  
BEKERJASAMA DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)  
2012**



**KAJI ULANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
DALAM KONTEKS REDESAIN SISTEM KURIKULUM  
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DAN UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN  
DI INDONESIA\*)**

Oleh: **Dr. Mukminan**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

HP: 08157956800. Email: [mukminan@yahoo.co.id](mailto:mukminan@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Upaya peningkatan mutu pendidikan senantiasa dilakukan dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan era yang ada dan terjadi, khususnya terkait dengan upaya mewujudkan delapan standar nasional pendidikan (SNP) serta mencapai tujuan pendidikan nasional. SNP sendiri harus disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Permendiknas no.23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah secara efektif sudah berlaku selama 5 tahun, sehingga sudah saatnya dilakukan kaji ulang untuk disempurnakan agar sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan masa kini. Makalah ini akan membahas hal-hal penting terkait dengan penyempurnaan SKL, rambu-rambu penyempurnaan, serta perlunya sejumlah kompetensi yang harus ditambahkan sebagai dampak munculnya isu-isu baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang belum terakomodasi dalam Permendiknas no.23/2006 seperti peran Indonesia dalam hubungan internasional, pendidikan karakter, empat pilar kebangsaan, perubahan iklim dan kebencanaan, dan lain-lain, serta kaitannya dengan redesain sistem kurikulum dan upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia?

**Kata kunci:** standar kompetensi lulusan, redesain sistem kurikulum, dan peningkatan mutu pendidikan

---

\*) Makalah disajikan dan dibahas pada Seminar Nasional, diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), 21-22 Januari 2012

## **I. LATAR BELAKANG DAN MASALAH**

Berbagai upaya dalam rangka peningkatam mutu pendidikan senantiasa dilakukan, meliputi: kewenangan pengembangan serta redesain kurikulum, pendekatan pembelajaran, penataan isi/konten, serta penentuan kompetensi, senantiasa disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi, serta era yang terjadi. Upaya peningkatam mutu pendidikan bertitik tolak dan mengarah pada terwujudnya 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diamanatkan oleh PP no.19/2005 tentang SNP. Sementara itu Permendiknas no.23/2006 tentang SKL (Standar Kompetensi Lulusan) sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah sudah mulai dilaksanakan (*launching*) sejak tahun 2006. Itu artinya SKL untuk satuan pendidikan dasar dan menengah secara efektif sudah berjalan lebih dari 5 tahun atau saat ini sudah memasuki tahun ke enam.

Upaya peningkatan mutu pendidikan memerlukan kerja keras dari kita semua, kemauan yang tinggi serta komitmen terhadap tugas, mengingat upaya peningkatam mutu pendidikan, banyak inovasi harus diciptakan, kreativitas harus ditumbuhkembangkan, dengan segala konsekuensi dan keuntungan-keuntungannya. Namun sejumlah masalah besar dalam upaya perbaikan mutu pendidikan masih kita jumpai. Salah satu di antara masalah besar dalam bidang pendidikan di Indonesia yang selalu menjadi perbincangan adalah rendahnya mutu pendidikan yang tercermin pada rendahnya rata-rata prestasi hasil belajar siswa. Realitas yang ada dan terjadi di lapangan, banyak guru yang mengeluh disebabkan lingkup materi yang sangat luas serta kurang fokus, laju/akselerasi perubahan (*change*) di bidang ilmu, teknologi dan seni yang berjalan begitu cepat, sementara para pelaksana pendidikan banyak yang belum merasa bahwa perubahan (termasuk redesain kurikulum) adalah sebuah keniscayaan (keharusan). Mereka umumnya masih beranggapan bahwa keberadaan, khususnya terkait dengan kurikulum adalah konsekuensi dari adanya pergantian menteri.

Memperhatikan fenomena di atas, penulis bermaksud untuk membahas masalah “Kaji ulang standar kompetensi lulusan dalam konteks redesain sistem kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah dan upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia”. Makalah ini mengemukakan hal-hal penting terkait dengan pelaksanaan kaji ulang SKL, rambu-rambu pelaksanaan, serta perlunya sejumlah kompetensi yang harus ditambahkan sebagai dampak munculnya isu-isu baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang belum terakomodasi dalam Permendiknas no.23/2006 tentang SKL untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, seperti peran Indonesia dalam hubungan internasional, pendidikan karakter, empat pilar kebangsaan, perubahan iklim dan kebencanaan, dan lain-lain, serta kaitannya dengan redesain sistem kurikulum dan upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Selanjutnya makalah ini membahas redesain kurikulum sebagai konsekuensi hasil kaji ulang SKL, dan pada bagian berikutnya mengemukakan keterkaitan antara redesain kurikulum dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Kaji Ulang SKL Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah**

Kegiatan kaji ulang SKL 2011 yang dilakukan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) adalah untuk menghasilkan rumusan SKL yang lebih disesuaikan dengan tuntutan era masa kini serta perubahan-perubahan menyangkut kehidupan baik lokal, nasional, regional, maupun global.

1. Rambu-rambu Pelaksanaan Kaji Ulang Terhadap Tingkatan Kompetensi Antar Jenjang Pendidikan.

Sejumlah rambu-rambu penting dalam melakukan kaji ulang SKL yang diberikan oleh BSNP di antaranya adalah: (1) tidak menambah beban belajar yang berlaku; (2) memperhatikan aspek perkembangan anak; (3) mempertimbangkan keterlaksanaannya di satuan pendidikan sesuai dengan

jenis dan jenjang pendidikan. Kaji ulang oleh Tim *ad hoc* SKL, BSNP 2011 terhadap SKL sebagaimana tertuang dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dilakukan terhadap hal-hal antara lain: (1) kaji ulang terhadap tingkatan kompetensi antar jenjang pendidikan; (2) penambahan kompetensi yang berkaitan dengan berbagai isu mutakhir terkait dengan pendidikan; (3) penggabungan, penguraian, pengurangan, atau pemindahan sejumlah butir kompetensi; serta (4) perbaikan redaksional, terutama mencermati kembali kata kerja yang digunakan dalam rumusan kompetensi. (Tim *ad hoc* SKL BSNP, 2011)

Kaji ulang terhadap kompetensi-kompetensi sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, khususnya terkait dengan tingkatan kompetensi antar jenjang pendidikan dilakukan dengan cara melakukan kajian secara mendalam terhadap tingkat kompetensi pada:

- a. SKL-SP (Standar Kompetensi Lulusan - Satuan Pendidikan), yang meliputi SD, SMP, SMA dan SMK, beserta kesetaraannya).
- b. SK-KMP (Standar Kompetensi - Kelompok Mata Pelajaran) yang menurut PP no.19/2006 meliputi kelompok-kelompok mata pelajaran: (1) Agama dan akhlak mulia; (2) Kewarganegaraan dan kepribadian; (3) Ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) Estetika; (5) Jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Hasil kaji ulang, rumusan kompetensi dipertegas disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikan.

2. Penambahan kompetensi yang berkaitan dengan berbagai isu mutakhir terkait dengan pendidikan.

Beberapa kompetensi baru ditambahkan, di antaranya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. sikap ilmiah dan kemampuan inkuiri.
- b. peran Indonesia dalam hubungan internasional.
- c. ketahanan diri, adaptasi sosial, sehat mental, dan sehat social.
- d. pendidikan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila termasuk di dalamnya pendidikan anti korupsi, pendidikan budi pekerti, dan pencegahan penyalahgunaan napza.
- e. empat pilar kebangsaan yang terdiri atas Dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika;
- f. HAM dan kesetaraan jender.
- g. Kerukunan intern umat dan antarumat beragama.
- h. pencegahan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).
- i. perubahan iklim dan kebencanaan.

(Tim *ad hoc* SKL BSNP, 2011)

3. Penggabungan, penguraian, pengurangan, atau pemindahan sejumlah butir kompetensi.

Butir-butir rumusan Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) hasil kaji ulang lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada dalam Permendiknas no.23/2006. Hal ini dikarenakan sebagian besar SKL-SP pada Permendiknas no.23/2006 diakomodasi menjadi Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) hasil kaji ulang. Selain itu, pada Permendiknas no.23/2006 terdapat beberapa SKL-SP yang juga menjadi SK-KMP.

4. Perbaikan Redaksional

Perbaikan redaksional ini terutama dilakukan dengan mencermati kembali kata kerja yang digunakan dalam rumusan kompetensi. Alasan lain dari perbaikan redaksional ini dilakukan, mengingat perlunya SKL

memperhatikan aspek perkembangan peserta didik, serta kemungkinan keterlaksanaannya di tingkat satuan pendidikan sesuai dengan tingkat kompetensi untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan.

## **B. Redesain Kurikulum Sebagai Konsekuensi Hasil Kaji Ulang SKL**

### **1. Redesain Kurikulum**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 20/2003 ps.1.19 dan PP no.19/2005 ps.1.13). Sedangkan sistem kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini dikenal dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yakni kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (PP no.19 ps.1:15). KTSP dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) dan disesuaikan dengan satuan pendidikannya, potensi /karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, serta peserta didik.

Selanjutnya dari hasil kaji ulang SKL ini, yang terpenting adalah pada dimensi implementasinya. Beauchamp (1975: 164) mengartikan implementasi kurikulum sebagai *"a process of putting the curriculum to work"*. Fullan (Miller dan Seller, 1985: 246) mengartikan implementasi kurikulum sebagai *"the putting into practice of an idea, program or set of activities which is new to the individual or organization using it"*. Berdasarkan atas dua pendapat tersebut, sesungguhnya, implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum ke dalam bentuk nyata di kelas, yaitu terjadinya proses *transmisi* dan *transformasi* segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Dengan pengertian yang demikian, implementasi KTSP memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan KTSP sebagai rencana tertulis. Hasan (2000: 1) mengatakan "...

jika kurikulum dalam bentuk rencana tertulis dilaksanakan maka kurikulum dalam bentuk proses adalah realisasi atau implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis".

Agar implementasi kurikulum dapat terwujud sesuai dengan kurikulum sebagai rencana tertulis, disarankan Hasan (2000: 1) agar terlebih dahulu memahami secara tepat tentang filsafat dan teori yang digunakan. Selanjutnya Hasan (1993: 100) memilah adanya dua persoalan pokok dalam implementasi kurikulum, yaitu persoalan yang berhubungan dengan kenyataan kurikulum yang ada dan berlaku di sekolah, dan persoalan yang berhubungan dengan kemampuan guru untuk melaksanakannya. Khusus yang berkaitan dengan persoalan kedua ditegaskan oleh Sukmadinata (1988: 218) dengan mengatakan bahwa implementasi kurikulum hampir seluruhnya tergantung pada kreativitas, kecakapan, kesungguhan, dan ketekunan guru.

## 2. Redesain Silabus dan RPP

Mencermati PP no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 20, yang menyebutkan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Redesain silabus sebagai bagian integral dari pengembangan kurikulum, dan RPP sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan silabus harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Proses penyusunan silabus sampai pada pengembangan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), perlu bahkan menjadi keharusan untuk memperhatikan rambu-rambu, langkah, serta komponen silabus maupun RPP yang juga akan ditetapkan secara nasional, namun dalam implementasinya harus mempertimbangkan perkembangan global dengan kondisi local (*think globally but act locally*).

## 3. Redesain Model Pembelajaran

Redesain model-model pembelajaran untuk menunjang ketuntasan belajar (*mastery learning*) juga menjadi sangat penting peranannya. Saylor, dkk. (1981: 279) mengajukan rambu-rambu model-model pembelajaran yang relevan untuk implementasi KTSP, yaitu; desain sistem instruksional, pembelajaran berprograma, dan model pembelajaran latihan dan dril (*practice and drill*). Jika dikaitkan dengan klasifikasi model pembelajaran dari Joyce dan Weils (1992) maka rumpun model pembelajaran “*sistem perilaku*” dipandang relevan untuk implementasi KTSP, yang meliputi; *belajar tuntas, pembelajaran langsung, belajar kontrol diri, latihan pengembangan konsep dan ketrampilan, dan latihan asersif.*

Dengan banyaknya model pembelajaran yang diasumsikan relevan untuk implementasi KTSP, maka yang terpenting adalah “sejauh mana model pembelajaran tersebut mampu memfasilitasi peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang mencerminkan penguasaan kompetensi yang dituntut. Model pembelajaran aktif (PAKEM/PAIKEM/PAIKEM Gembrot) dan berpusat pada siswa (*student centered*), yang merupakan ciri pembelajaran saat ini, mutlak harus diaplikasikan dengan sungguh-sungguh, demi mencapai ketuntasan kompetensi SKL yang ditetapkan.

### **C. Upaya Peningkatam Mutu Pendidikan Sebagai Konsekuensi Hasil Kaji Ulang SKL**

Konteks pendidikan di era sekarang ini selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan kadang sangat cepat. Untuk belajar sesuatu, orang tidak lagi menggantungkan semata-mata pada dunia kelas/sekolah/kampus dalam arti fisik. Sumber yang bersifat *virtual* (maya) merupakan alternatif sumber informasi dan sumber belajar (*learning resource*) bagi siapa saja yang menghendaknya. Dengan demikian, jika mutu pendidikan dan atau pembelajaran ingin memiliki legitimasi akademik yang tinggi dan memiliki relevansi dalam proses



pembelajaran dengan tuntutan masyarakat dan juga *stake holders*–nya, maka pendidikan harus selalu melakukan inovasi agar tidak ketinggalan jaman. Konsekuensinya, perubahan-perubahan kebijakan pendidikan /pembelajaran harus dilakukan secara tersistem dan berkelanjutan.

### **1. Sasaran**

Upaya untuk peningkatam mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini, maka penentuan sasaran perlu mempertimbangkan tuntutan perubahan yang ada dan terjadi saat ini yang biasa dikenal dengan era global, namun harus dilakukan secara kontekstual (*thinks globally, but act locally*):

- a. Secara bertahap melakukan redesain kurikulum, silabus, dan strategi pembelajaran yang berbasis keunggulan dan *life skills*
- b. Pengembangan bahan pembelajaran berbasis aktivitas siswa
- c. Pengembangan lab pembelajaran bidang studi berbasis TIK/*e-learning*
- d. Pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi/ *e-learning*.

### **2. Hasil yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari pengembangan berbasis pendidikan yang bermutu, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan belajar masyarakat adalah berupa:

- a. Kurikulum, silabus dan RPP yang diredesain
- b. Bahan pembelajaran yang berbasis keaktifan siswa
- c. Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- d. Model-model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar.
- e. Munculnya berbagai inovasi secara kreatif dan inovatif
- f. Proses pendidikan menjadi lebih terbuka dan adaptif terhadap perubahan
- g. Penilaian hasil pembelajaran menjadi semakin valid, reliabel, fokus, komprehensif, objektif, dan mendidik

### III. KESIMPULAN

Kaji ulang SKL dalam konteks redesain sistem kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan, membawa konsekuensi bahwa pada tataran implementasinya harus mampu memfasilitasi pembelajaran dalam berbagai kondisi dan latar belakang siswa. Untuk itulah berbagai upaya yang secara sengaja dan kreatif dirancang untuk kaji ulang standar kompetensi lulusan dalam konteks redesain sistem kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah serta upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, dengan memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan masyarakat pembelajar. Pembelajar (*learner*) memerlukan model-model maupun media pembelajaran yang berbasis aneka sumber dan mengaktifkan siswa, serta memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan secara fleksibel.

Kaji ulang standar kompetensi lulusan dalam konteks redesain sistem kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah dan upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, memerlukan sejumlah prasyarat di mana guru dan semua pihak terkait memiliki komitmen, tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai, serta mampu & mau memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Semoga para guru dan tenaga kependidikan di sekolah dapat menunjukkan perannya secara optimal dalam setiap kegiatan. Upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan segera terwujud sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, sehingga mampu mengantarkan anak-anak bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat di mata bangsanya maupun di mata internasional.

Sudah barang tentu banyak masalah serta PR (pekerjaan rumah) yang harus dikerjakan, terkait dengan upaya optimalisasi peran guru dalam peningkatan mutu pendidikan sebagai konsekuensi hasil kaji ulang SKL. Diperlukan semangat dan sikap intelektual dan ilmiah, kemauan dan kemampuan untuk mencapai kesempurnaan (*excellence*), usaha keras dan sungguh-sungguh dari seluruh sivitas akademika (kepala sekolah, pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, serta siswa), keterlibatan kelompok masyarakat pemrakarsa (*stakeholders*) dan masyarakat

pengguna lulusan (*user*), di samping pertukaran (*sharing*) ide dan gagasan (*vision*) serta komitmen bersama (*mutual commitment*) yang tinggi dari semua pihak/komponen terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beauchamp, G. (1975). *Curriculum theory*. Willmette, Illionis: The Kagg Press.
- BSNP. (2006). Panduan penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan
- BSNP. (2011). Proses dan hasil penyempurnaan Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah. Jakarta: BSNP-Kemdiknas
- Hasan, Said Hamid. (2000). “Pengembangan kurikulum berbasis masyarakat”. Makalah seminar nasional pengembangan program pendidikan berbasis kewilayahan menyongsong diterapkannya otonomi daerah, 31 Agustus 2000 di UPI Bandung.
- Joyce, B., dan Weil, Marsha. (1992). *Models of teaching, 5<sup>th</sup> edition*. Boston: Allyn Bacon.
- Peraturan Pemerintah (2005) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidika*. Jakarta: Depdiknas.
- Permendiknas. (2006). *Permendiknas no. 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah*. Jakarta: Depdiknas.
- Saylor J.G. dan kawan-kawan. 1981. *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning*. Fourth Edition. Japan: Holt, Rinehart and Winston.
- Seller dan Miller. 1985. *Curriculum; perspectives and practice*. New York: Longman.
- Sukmadinata, N. S. 1988. *Prinsip dan landasan pengembangan kurikulum*. Jakarta: P2LPTK Ditjen Dikti Depdikbud.
- Undang-Undang. (2003). Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jakarta: Depdiknas Republik Indonesia.

## **Biodata Penulis**

**Mukminan**, Lahir di Purworejo, 6 September 1953. Lulusan Sarjana Pendidikan Geografi tahun 1977 dari IKIP Yogyakarta dan Doktor Pendidikan dengan konsentrasi Teknologi Pendidikan tahun 1995 dari FPS-IKIP Jakarta. Menjadi staf pengajar pada jurusan Pendidikan Geografi FKIS IKIP Yogyakarta (sekarang FIS UNY) sejak tahun 1978 sampai sekarang. Beberapa karya penelitian terakhirnya antara lain; (1) Peta Guru SD dan SMP di Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta (2009), (2) Peta Guru SLTA di Kabupaten bantul D.I Yogyakarta (2010), (3) Kinerja Kepala Sekolah di Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta (2010). Saat ini sedang menyelesaikan penelitian tentang Evaluasi kompetensi Guru SMA di Kota Yogyakarta (2011/2012).

# **Analisis Pelaksanaan Proses Pendidikan di Indonesia<sup>\*)</sup>**

Makmuri, Universitas Negeri Jakarta  
makmuri1495@gmail.com



JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2012

<sup>\*)</sup> Dipresentasikan pada Seminar Nasional Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), 21 – 22 Januari 2012

## **Abstrak**

Penataan sistem pendidikan di Indonesia sudah menjadi perhatian pemerintah baik eksekutif maupun yudikatif, ini terlihat dari telah diberlakukannya UU Sistem Pendidikan Nasional dan ditetapkannya anggaran minimal 20% untuk bidang pendidikan baik pada APBN maupun APBD. Patut disayangkan dalam pelaksanaan ada beberapa proses pendidikan yang bermasalah, mulai pada pelaksanaan delapan standar pendidikan sampai pada pengalokasian anggaran pendidikan yang mengindikasikan adanya diskriminasi. Analisis proses pendidikan perlu dilakukan agar berbagai masalah yang timbul bisa diluruskan dan pada akhirnya pelaksanaan pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Kata kunci: pelaksanaan pendidikan, standar pendidikan, diskriminasi pendidikan

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia telah menetapkan sistem pendidikan nasional yang berlandaskan delapan standar pendidikan, delapan standar pendidikan tersebut adalah: standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.<sup>1</sup> Ini berarti pemerintah berkewajiban mengupayakan seluruh pendidikan nasional untuk mempunyai delapan standar tersebut. Standar minimal dari delapan standar tersebut harus ditetapkan dan dievaluasi secara terus-menerus secara berencana dan berkala.

Menurut pendapat penulis delapan standar tersebut merupakan suatu kesatuan yang konsekutif, artinya standar proses belum bisa dilaksanakan bila standar isi belum terpenuhi, standar kompetensi lulusan belum bisa dibuat sebelum standar proses ditentukan dan dilaksanakan, demikian seterusnya sehingga standar evaluasi belum dapat dijadikan pedoman bila seluruh tujuh standar yang lain belum dilaksanakan dengan baik.

Pada kenyataannya banyak terjadi penerapan multi standar tentang delapan standar pendidikan tersebut. Suatu sekolah mendapatkan standar yang baik (Sekolah Bertaraf Internasional, perguruan tinggi BHMN, BHP dan lain-lain)

---

<sup>1</sup> UU No 20 Tahun 2003 Pasal 35

tetapi banyak sekolah tidak memenuhi standar apapun. Inilah isu kritis pendidikan di Indonesia, yaitu terjadinya diskriminasi dalam mewujudkan delapan standar pendidikan.

## B. Permasalahan

Isu kritis mengenai diskriminasi pendidikan di Indonesia ini terkait dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun dengan standar seadanya, pemerintah tidak peduli banyak standar tidak dipenuhi, satu-satunya standar yang menjadi kepedulian pemerintah hanyalah ‘standar evaluasi pendidikan’. Untuk membahas isu-isu tersebut makalah ini pada Bab 2 akan mngkaji permasalahan sebagai berikut.

1. Diskriminasi standar kompetensi lulusan dan standar isi.
2. Diskriminasi standar proses dan standar tenaga kependidikan.
3. Diskriminasi sarana prasarana dan pengelolaan.
4. Diskriminasi biaya dan evaluasi pendidikan.



Gambar 1. Sekolah di Jakarta dengan uang masuk Rp. 35.000.000,00.<sup>2</sup>



Gambar 2. Sekolah di Papua dengan guru tidak profesional.

## PEMBAHASAN

Delapan standar pendidikan disusun mengacu pada cita-cita luhur para pendiri bangsa dan pada tujuan pendidikan nasional. Cita-cita luhur para pendiri bangsa termuat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu

“Meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <http://realita-online.blogspot.com/2010/07/uang-masuk-smu-68-mencapai-rp-35-juta.html>. Kamis, 15 Juli 2010.

Tujuan pendidikan menurut Tilaar:

“Pendidikan tidak mempunyai tujuan di dalam dirinya sendiri, juga tidak mempunyai tujuan dari luar. Sebagai makhluk yang bebas tujuan pendidikan ditentukan dan dipilih oleh manusia yang bebas namun terikat kepada ikatan-ikatan kehidupan yang dipilihnya sendiri dari kehidupan manusiawi”.<sup>4</sup>

Sehingga pada dasarnya setiap manusia berhak menentukan pendidikan apa yang akan diikutinya. Indonesia sebagai Negara Bangsa (nation state) mempunyai kepentingan agar warga negaranya mewarisi nilai-nilai kebangsaan seperti cita-cita luhur para pendiri bangsa, oleh karena itu negara merumuskan suatu tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Menurut Tilaar:

“Tujuan pendidikan yang ditentukan oleh negara merupakan kesepakatan bersama yang patut dihormati. Sebagai suatu kesepakatan, tujuan pendidikan bukanlah suatu dogma yang tidak berubah bahkan merupakan **patokan** yang terus bergerak ke depan untuk lebih menyempurnakannya”.<sup>5</sup>

Dari tujuan pendidikan nasional inilah delapan standar pendidikan dirumuskan, dievaluasi dan disempurnakan secara berkala dan terus-menerus.

### **A. Diskriminasi Standar Isi dan Proses Pendidikan**

Perbedaan isi dan proses pendidikan di Indonesia terjadi secara tajam, sepertinya pemerintah tidak berdaya untuk menciptakan standar isi dan proses minimal yang harus dilaksanakan oleh semua sekolah di Indonesia. Di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan lain-lain tumbuh sekolah-sekolah internasional yang menggunakan standar isi dan proses negara lain, bukan Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia menyadari sebagai negara multi kultur dan multi etnis wajib menyatukan diri dalam suatu negara bangsa, sehingga nilai-nilai kebangsaan harus diciptakan dalam setiap sekolah yang berada di bumi Indonesia. Celaknya justru pemerintah mentolerir berdirinya sekolah-sekolah asing, yang mengembangkan budaya-budaya bangsa lain di Indonesia. Hal ini menyalahi Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan:

---

<sup>3</sup> UUD 1945 Alinea ke 4.

<sup>4</sup> Tilaar H. A. R., *Manifesto Pendidikan Nasional* (2005), Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Hal. 110.

<sup>5</sup> Ibid, hal 112.



“Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat”.<sup>6</sup>

Sampai saat ini belum dirumuskan standar isi dan standar proses pendidikan Indonesia, yang seharusnya bisa menghilangkan diskriminasi isi dan proses pendidikan Indonesia. Sebenarnya Unesco telah menetapkan standar proses pendidikan dalam *The Four Pillars of Education: learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be*.<sup>7</sup>

Standar isi dan proses perlu ditetapkan untuk mencegah negara yang menguasai seluruh bumi, air dan kekayaan alam yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat memberlakukan diskriminasi isi dan proses pendidikan, yaitu dengan memberlakukan sekolah standar internasional, sekolah standar nasional, dan sekolah yang tidak memenuhi standar nasional. Mestinya sekolah yang tidak memenuhi standar nasional ini tidak ada di Indonesia.

#### **B. Diskriminasi Standar Kompetensi Lulusan dan Tenaga Kependidikan**

Tujuan pendidikan yang sudah dituangkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yaitu: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk **berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.**

Dari poin-poin inilah sebenarnya standar kompetensi lulusan dan standar tenaga kependidikan ditetapkan. Kenyataannya standar kompetensi lulusan yang ada dalam ujian nasional hanya mencakup standar kognitif saja, sehingga mengabaikan siswa yang kurang dalam kemampuan kognitif tetapi mempunyai kompetensi ahlak mulia, kreatif, demokratis dan bertanggung jawab yang baik. Lulusan sekolah yang tidak memenuhi tujuan tersebut mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan jatidiri sebagai antara lain, bangsa yang ramah menjadi

---

<sup>6</sup> UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 3.

<sup>7</sup> Delors Jacques, *Learning: The Treasure Within*, Report to UNESCO of the International Commission on the Education for Twenty-first Century.

bangsa yang pemaarah, bangsa yang menghormati perbedaan menjadi bangsa yang tidak menghormati perbedaan yang akhirnya akan bermuara menjadi bangsa yang tidak bertanggung jawab, *what wrong with Indonesian classroom?*

Diskriminasi kompetensi lulusan juga bisa terjadi saat mereka ingin memasuki perguruan tinggi. Biaya tinggi yang ditetapkan untuk bisa masuk pendidikan tinggi para lulusan terbaik yang tidak mampu menanggung biaya tidak bisa masuk ke perguruan tinggi. Try Haryono dalam situs internet <http://edukasi.kompas.com> menulis :

“Jika di jenjang pendidikan dasar dan menengah diskriminasi terjadi dalam bentuk RSBI, di jenjang pendidikan tinggi, diskriminasi itu juga kini terjadi. Kuota kursi yang diperebutkan secara adil dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN ), misalnya, hanya 10-20 persen dari kapasitas yang ada. Sebagian besar kursi itu justru ”dilelang” dengan beragam nama yang sasaran utamanya mengeruk uang sebanyak-banyaknya dari calon mahasiswa. Membayar uang masuk resmi Rp 200 juta-Rp 600 juta per mahasiswa ke perguruan tinggi negeri (PTN) sudah lazim sekarang ini”<sup>8</sup>.

Tenaga kependidikan sudah ditetapkan standarnya oleh pemerintah melalui sertifikasi guru sebagai tenaga pendidik. Standarisasi tenaga kependidikan ini perlu kita hargai, walaupun disana-sini masih perlu banyak perbaikan. Terjadinya diskriminasi proses sertifikasi guru sudah seperti rahasia umum, mulai dari kuota guru yang disertifikasi sampai pemberian hak sebagai guru professional perlu evaluasi yang terus-menerus.

Diskriminasi bisa terjadi pada guru-guru di daerah-daeah yang tidak memiliki kualifikasi guru professional (S1 dan D4) tetapi mereka diperlukan keberadaanya oleh sekolah. Karena kalau tidak ada mereka maka sekolah tidak mempunyai guru. Dalam situs internet <http://edukasi.kompas.com> Try Haryono menyebutkan:

“Dari sekitar 2,7 juta guru di berbagai jenjang pendidikan, hanya sekitar 900.000 guru yang bependidikan D-4 atau S-1. Sisanya lulusan D-3, bahkan banyak yang lulusan SMA”<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup>Haryono Tri,  
<http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/11/10441829/Diskriminasi.Pendidikan.Semakin.Lebar...-3>, diupload Rabu, 11 Agustus 2010 | 10:44 WIB.

<sup>9</sup>Op Cit.

Ini berarti ada diskriminasi tenaga kependidikan di daerah-daerah di Indonesia. Bahwa standar tenaga kependidikan yang sudah ditetapkan tetapi banyak daerah yang tidak terpenuhi standar tenaga kependidikannya. Bila standar tenaga kependidikan ini belum dipenuhi, maka proses pembelajaran tidak akan bisa berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga lulusan lembaga pendidikan seperti ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan lulusan lembaga pendidikan lain yang sudah memenuhi standar baik proses maupun tenaga kependidikan. Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 3:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, ini mewajibkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai standar nasional”.<sup>10</sup>

Baik standar proses maupun standar tenaga kependidikan. Jadi bila ada lembaga pendidikan yang dibawah standar maka kewajiban pemerintah untuk menjadikan lembaga tersebut memenuhi standar nasional.

### **C. Diskriminasi Standar Sarana Prasarana dan Pengelolaan Pendidikan**

Mungkin kita semua sepakat untuk memenuhi standar proses pendidikan diperlukan standar sarana prasarana dan pengelolaan, tidak mungkin proses berjalan sesuai standar yang memadai tanpa adanya gedung yang layak, berbagai laboratorium mata pelajaran, lapangan olah raga, media dan alat peraga pendidikan sistem pengelolaan yang baik. Celakanya sampai saat ini penulis belum melihat ditetapkannya standar sarana dan prasarana pendidikan nasional yang baik. Tidak sedikit sekolah di Jakarta yang tidak memiliki laboratorium, media dan alat peraga, sarana olah raga bahkan gedung yang masih menempel di ruko-ruko yang sangat tidak layak untuk proses pendidikan.

Diskriminasi sarana secara tidak langsung dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan memberikan batuan sarana prasarana yang berbeda-beda. Antara sekolah negeri di Jakarta dan sekolah negeri di Ketapang Kalimantan Barat ada diskriminasi yang mencolok dari sarana dan prasarana, otonomi daerah dijadikan salah satu alasan untuk melegitimasi standar sarana dan prasarana yang berbeda-beda.

---

<sup>10</sup> UUD 1945, Amandemen I, II, III dan IV, Pasal 31.

Dari standar pengelolaan, dalam satu sekolah saja ada yang menggunakan dua standar pengelolaan yang berbeda. Sekolah-sekolah yang berlabel standar internasional seperti SMP Negeri 115 Jakarta memiliki kelas dengan standar SBI dan memiliki kelas tidak berstandar SBI. Di kelas berstandar SBI dipakai sarana kelas yang ber AC, dilengkapi media LCD projector, meja kursi dan loker yang lebih baik dan diisi siswa dengan jumlah paling banyak 28 anak, guru mengajar dengan bilingual dan seringkali mengadakan studi banding ke luar negeri. Di lain pihak yang tidak berstandar SBI tidak mendapatkan sarana seperti yang disebutkan di atas. Diskriminasi ini dilihat oleh siswa setiap hari, yang bisa memunculkan anggapan kami warga yang 'sangat penting' (VIP) dan kalian warga yang 'sangat tidak penting' (not VIP).

Demikian pula sekolah di daerah-daerah yang menerapkan sekolah standar nasional (SSN). Sekolah ini juga melakukan diskriminasi sarana prasarana dan pengelolaan pada siswa siswi mereka. Salah satunya terjadi di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Di sini kelas yang berlabel SSN membatasi jumlah siswa di kelas, tetapi di kelas lain jumlah siswa mencapai 50 lebih yang mengakibatkan sekolah yang tidak berlabel SSN mengalami penurunan mutu pendidikan dan pengajarannya.

Berbagai protes muncul dari beberapa lembaga peduli pendidikan, seperti yang dilakukan oleh APPI (Aliansi orang tua Peduli Pendidikan Indonesia) memprihatinkan terjadinya diskriminasi di dunia pendidikan.

Mereka mendeklarasikan 6 tuntutan berikut:<sup>11</sup>

1. Mewujudkan pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
2. Mewujudkan pendidikan sebagai tanggung jawab negara.
3. Mewujudkan pendidikan bebas korupsi.
4. Mewujudkan pendidikan **bebas diskriminasi**.
5. Mewujudkan pendidikan bebas intimidasi.
6. Mewujudkan pendidikan transparan, akuntabel, dan bermutu.

---

<sup>11</sup> <http://www.detiknews.com/read/2011/02/22/122727/1575905/10/banyak-sekolah-mahal-orangtua-murid-desak-pendidikan-bebas-diskriminasi>. Diupload Selasa, 22/02/2011 12:27 WIB.

Akibat psikologis karena setiap hari mengalami diskriminasi bisa muncul menjadi suatu karakter bangsa. Dengan adanya diskriminasi yang dialami para siswa di sekolah berlabel SBI dan SSN maupun sekolah tidak memenuhi standar internasional dan nasional, bisa berujung pada rasa prustasi para peserta didik dan memunculkan watak ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan isntitusi sekolah atau perguruan tinggi, demo-demo anarkis para mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang banyak terjadi saat ini bukan tidak mungkin disebabkan oleh adanya diskriminasi yang mereka alami sejak di sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi.

#### **D. Diskriminasi Standar Pembiayaan dan Penilaian Pendidikan**

Standar ke tujuh dan ke delapan dalam standar pendidikan adalah pembiayaan dan evaluasi pendidikan. Diskriminasi standar pembiayaan jelas terlihat kasat mata baik di tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Tidak heran bila Komisi E DPRD DKI Jakarta menyebutkan bahwa:

“Keberadaan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di DKI Jakarta terbukti telah mendiskreditkan warga miskin. Untuk satu RSBI, **anggaran yang dikucurkan dari APBD mencapai tiga kali lipat dibanding untuk sekolah negeri biasa.**”<sup>12</sup>

Dari keterangan Komisi E DPRD DKI Jakarta tersebut, terjadi legalitas diskriminasi pembiayaan oleh pemerintah DKI Jakarta dan disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Lebih lanjut lagi sekolah RSBI lebih banyak disisi oleh masyarakat dari kalangan menengah atas, masyarakat kelas bawah yang harusnya mendapatkan subsidi justru tidak mendapatkan apa-apa.

Untuk menjadikan sekolah dengan mutu yang tinggi, memang membutuhkan biaya yang besar, pemerintah perlu merumuskan standar pembiayaan yang jelas agar tidak terjadi diskriminasi pembiayaan dimana sekolah-sekolah bermutu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat menengah atas. Hal ini akan bertentangan dengan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yang mengatakan:

---

<sup>12</sup> <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=52962>, Senin 24 Mei 2010.

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.<sup>13</sup>

Di negara manapun perbedaan mutu tiap sekolah pasti terjadi, tetapi terjadi bukan karena adanya diskriminasi pembiayaan, sehingga menjadikan warga negara miskin tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan bermutu yang menuntut peran orang tua dalam pembiayaan yang sangat besar.

Terkait dengan sempitnya kesempatan belajar warga kurang mampu banyak disebabkan karena sistem seleksi untuk masuk sekolah-sekolah bermutu didasarkan atas sistem evaluasi yang juga ada diskriminasi. Standar evaluasi pendidikan seharusnya dilandasi oleh standarisasi ketujuh komponen yang lain. Sehingga terhindar dari praktik diskriminasi evaluasi pendidikan, apabila suatu sekolah mempunyai standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya yang berbeda tentu kompetensi lulusan juga akan berbeda, sehingga hasil evaluasi dengan standar nasional yang sama akan menghasilkan perbedaan yang signifikan. Bila ini dijadikan patokan untuk seleksi di ‘sekolah bermutu’ seperti SBI, SSN dan lain-lain maka masyarakat miskin tidak akan punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan bermutu tersebut.

Untuk menghindari diskriminasi pendidikan penulis mencoba menganalisis kedudukan delapan standar pendidikan tersebut sebagai berikut.



Gambar 4. Landasan Standar Nasional Pendidikan

<sup>13</sup> UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1.

Standar kompetensi digunakan untuk menentukan standar isi, standar isi dipakai untuk menentukan standar proses pendidikan, standar proses pendidikan dipakai untuk menentukan standar tenaga kependidikan, keempat standar tersebut dipakai untuk menentukan standar sarana dan prasarana, yang kemudian dipakai untuk menentukan standar pengelolaan, pembiayaan dan evaluasi pendidikan. Ini berarti sebelum menerapkan standar evaluasi, pemerintah wajib mengevaluasi ketujuh standar pendidikan yang lain, sehingga tidak terjadi diskriminasi evaluasi pendidikan.

Pada kenyataannya sekarang pemerintah melakukan jalan pintas, memaksakan evaluasi pendidikan dengan standar nilai yang terus ditingkatkan tanpa melihat apakah ketujuh standar lain sudah memenuhi kriteria atau tidak. Salah satu yang kasat mata terjadinya diskriminasi adalah pada standar sarana dan prasarana. Banyak sekolah (sekolah negeri) dengan standar gedung ber AC, jumlah siswa perkelas maksimal 30, sarana olah raga dan laboratorium yang memadai, seperti SMP Negeri 115 Jakarta, SMA Negeri 8 Jakarta dan banyak sekolah yang lain di kota-kota besar seluruh Indonesia, dilain pihak banyak sekolah dengan sarana gedung yang tidak memadai seperti di SMP Negeri di Ketapang Kalimantan Barat (penulis pernah memeriksa penggunaan dana BOM di SMP di Ketapang Kalimantan Barat dan menyaksikan gedung sekolah yang tidak layak), jumlah siswa satu kelas melebihi 50 siswa (SMA Negeri di Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi).

Bila sekolah-sekolah yang kontras tersebut diterapkan standar evaluasi yang sama, tentu hasilnya akan berbeda secara signifikan. Dilain pihak juga terjadi diskriminasi di Perguruan Tinggi, ITB, UI dan beberapa perguruan tinggi dengan label BHMN menjadi perguruan tinggi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dilain pihak UNJ dengan sarana gedung tua, lahan sempit, buku-buku perpustakaan yang terbitan lama dan waktu pelayanan perpustakaan yang sempit untuk melayani jumlah mahasiswa yang sangat banyak (contoh kasus perpustakaan pascasarjana UNJ), dan banyak perguruan tinggi dengan gedung serupa ruko (rumah toko) yang tersebar di kota-kota di Indonesia. Tentu akan berbeda bila dievaluasi dengan standar akreditasi yang sama.

BSNP sebagai lembaga yang mengurus standar nasional pendidikan, seharusnya lebih dulu mengevaluasi ketujuh standar pendidikan sebelum menerapkan standar evaluasi pendidikan. Lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi wajib dievaluasi, apakah sudah memenuhi standar proses pendidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar tenaga kependidikan, bila standar-standar pendidikan tersebut belum dipenuhi maka pemerintah punya kewajiban menganggarkan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk keperluan pendidikan. Bila tidak maka pemerintah gagal dalam melaksanakan UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agamadan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan serta kesejahteraan umat manusia.

Pada pembahasan sebelumnya sudah penulis paparkan bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu memang membutuhkan standar yang tinggi dari kedelapan standar tersebut. Dilain pihak standar yang tinggi pastilah membutuhkan dana, daya dan upaya yang besar.

Pemerintah Indonesia memang belum mencapai kesejahteraan sebagaimana negara-negara maju, rakyat Indonesia sebagian besar masih belum sejahtera, tetapi sebagian kecil keluarga bisa mengecap kesejahteraan layaknya keluarga-keluarga di negara maju bahkan berlebih. Yang sebaian kecil ini menguasai dana yang mayoritas, dibandingkan sebagian rakyat Indonesia yang hanya memnguasai dana yang minoritas. Bila di dalam negeri tidak diupayakan dan diselenggarakan pendidikan bermutu, bisa mengakibatkan masyarakat

---

<sup>14</sup> UUD 1945 Amandemen I, II, III dan IV Pasal 31.



kalangan atas ini akan berlomba-lomba menyekolahkan anak-anak mereka ke luar negeri, hal ini bisa mengakibatkan mayoritas dana akan mengalir ke luar negeri, yang pada akhirnya bisa mempersulit perekonomian Indonesia. Sehingga sekolah bermutu semacam 'sekolah bertaraf internasional' memang diperlukan di Indonesia. Alternatif yang bisa dilakukan menurut pendapat penulis adalah pemerintah menyelenggarakan sekolah seperti ini dengan dana murni berasal dari masyarakat, seperti diamanatkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan:

“Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.<sup>15</sup>

Kemudian bagi warga golongan menengah kebawah, pemerintah menyediakan beasiswa penuh agar bisa masuk ke sekolah-sekolah seperti ini. Salah satu contoh sekolah seperti ini sekolah SMA Presiden yang dananya murni berasal dari masyarakat, bahkan sekolah ini bisa mengusahakan beasiswa penuh bagi sebagian siswanya, yang berarti tidak menutup kemungkinan masyarakat golongan menengah bawah untuk mengikuti pendidikan di sekolah ini. Apabila pemerintah menyediakan beasiswa untuk masuk ke sekolah-sekolah bermutu, maka bisa meminimalisir bentuk-bentuk diskriminasi yang sekarang terjadi.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian yang sudah disampaikan baik pada bab pendahuluan maupun pada bab pembahasan maka beberapa catatan penutup pada makalah ini penulis mencoba menyampaikannya sebagai berikut.

Diskriminasi pendidikan yang terjadi pada saat ini disebabkan oleh berbagai hal, yang berdasar pada hak-hak warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan bermutu. Agar semua warga masyarakat bisa mendapatkan pendidikan bermutu, maka semua lembaga pendidikan di Indonesia harus memenuhi standar mutu dari delapan standar pendidikan. Pemerintah tidak boleh menuntut lulusan sekolah memenuhi standar evaluasi mutu tertentu tetapi tidak mengusahakan dan mengupayakan agar sekolah

---

<sup>15</sup> UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Pasal 9.

memeiliki standar kompetensi, standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, standar tenaga kependidikan dan standar biaya yang memenuhi kriteria mutu tertentu. Bila hal ini terjadi berarti pemerintah telah membuat diskriminasi pendidikan.

Diskriminasi pendidikan bisa terjadi karena membeda-bedakan standar kompetensi lulusan pada sekolah-sekolah, sehingga sekolah-sekolah di daerah tidak memungkinkan mempunyai kompetensi lulusan yang maksimal. Bisa juga terjadi diskriminasi proses dan tenaga kependidikan, sekolah tertentu diusahakan dan didorong pemerintah untuk melaksanakan proses KBM yang baik dan didukung tenaga kependidikan yang professional dan memadai, tetapi sekolah lain dibiarkan dengan proses dan tenaga kependidikan seadanya. Diskriminasi pembiayaan dari dana pemerintah, sekolah SBI diberi dana tiga kali lipat disbanding sekolah biasa, padahal sekolah SBI dihuni oleh siswa-siswi dari kalangan menengah atas. Diskriminasi seperti ini sebaiknya segera dikurangi sehingga semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu tinggi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Delors Jacques, *Learning: The Treasure Within*, Report to UNESCO of the International Commission on the Education for Twenty-first Century.
- Kerr Clark, *The Uses of The University* (1960), Harper Torchbook, The Academy Library Harper & Row, Publishers, New York.
- Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (2008), Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Tilaar H. A. R., *Manifesto Pendidikan Nasional* (2005), Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.
- UUD 1945 Amandemen I, II, III dan IV.
- <http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/11/10441829/Diskriminasi.Pendidikan.Semakin.Lebar...-3>, Rabu, 11 Agustus 2010 | 10:44 WIB.
- <http://www.detiknews.com/read/2011/02/22/122727/1575905/10/banyak-sekolah-mahal-orangtua-murid-desak-pendidikan-bebas-diskriminasi>. Selasa, 22 Februari 2011, 12:27 WIB.
- <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=52962>, Senin, 24 Mei 2010.
- <http://realita-online.blogspot.com/2010/07/uang-masuk-smu-68-mencapai-rp-35-juta.html>, Kamis, 15 Juli 2010.

## **BIO DATA PENULIS**

Nama	: Drs. Makmuri, M.Si
Tempat/Tgl Lahir	: Pekalongan, 15 Juli 1964
Pekerjaan	: Dosen Jurusan Matematika FMIPA UNJ
Alamat	: Perum Cikarang Baru, JL Beruang 5 No 11 Bekasi
Telp	: 021 89834862, 08561628196
Riwayat Pendidikan	:
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tamat SD s/d SMA di Kota Pekalongan.</li><li>2. Tamat S1 di IKIP Jakarta Tahun 1988.</li><li>3. Tamat S2 di ITB Tahun 1993.</li><li>4. S3 TP PPs UNJ.</li></ol>

## **REDESAIN STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR (SK DAN KD) IPA TERPADU SMP/MTs**

*Ayu Rahayu, Ulfiana Prisdiansari, Elsa Yulianingsih  
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta  
Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281  
email: [ayurahayufisikauny@gmail.com](mailto:ayurahayufisikauny@gmail.com)*

### **Abstrak**

Pembelajaran IPA Terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum pada tingkat SMP/MTs. Pembelajaran IPA Terpadu saat ini masih mengalami berbagai kendala. Pada tingkat satuan pendidikan, guru memiliki tugas untuk mengembangkan kurikulum. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih kesulitan dalam mengembangkan kurikulum IPA Terpadu. Kesulitan guru disebabkan oleh faktor kompetensi profesional, faktor beban mengajar, dan faktor belum terpadunya kurikulum IPA. Oleh karena itu, diperlukan suatu kurikulum IPA Terpadu yang lebih operasional. Keterpaduan kurikulum yang paling mendasar adalah keterpaduan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK dan KD).

Model pemaduan SK dan KD yang digunakan adalah model *integrated, shared, webbed, dan connected*. Model tersebut merupakan model yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang didasarkan dari model pemaduan Forgy. Prosedur pemaduan yang digunakan yaitu: (1) menabulasi SK dan KD dalam Standar Isi, (2) mengidentifikasi SK dan KD yang dapat dipadukan, (3) menentukan jenis model pemaduan SK dan KD dalam bidang kajian IPA, (4) mengurutkan sesuai dengan tingkat kesulitan dari SK dan KD yang sudah teridentifikasi, (5) menyusun kembali SK dan KD yang sudah terpadu dalam bentuk SK dan KD yang baru, dan (6) memasukkan berbagai keterangan pendukung dalam tabel pemaduan.

Hasil pemaduan merupakan redesain SK dan KD IPA Terpadu untuk SMP/MTs pada tingkat kelas VII, VIII, dan IX. SK dan KD IPA Terpadu tersebut diharapkan dapat digunakan guru sebagai dasar pengembangan kurikulum. SK dan KD tersebut juga dapat digunakan oleh penentu kebijakan kurikulum sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan kurikulum IPA Terpadu.

Kata Kunci: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK dan KD), IPA Terpadu

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara yuridis formal, pembelajaran IPA terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang diharapkan dapat diaplikasikan di SMP/MTs. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Mata Pelajaran IPA di tingkat SMP/MTs diharapkan ada penekanan pembelajaran salingtemas (sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat) secara terpadu. Selanjutnya, dalam Permendiknas No 24 Tahun 2006 pada pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan demikian, dimungkinkan merancang pembelajaran dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD) yang baru untuk memperkaya SK/KD yang ada. Oleh karena itu, pada usulan ini menyajikan struktur standar kompetensi dan kompetensi dasar IPA terpadu SMP/MTs yang baru.

Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini merupakan landasan yuridis tentang tugas

sekolah untuk mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada menjadi kurikulum yang utuh. Tugas pengembangan ini biasanya diampu oleh guru. Oleh karena itu, pada saat ini guru memiliki tanggung jawab mengembangkan kurikulum disamping tugas utama guru yaitu mendidik.

Guru mata pelajaran sebagai pengembang kurikulum sebaiknya merupakan seseorang yang berkompentensi dalam mata pelajaran yang dikembangkan. Pengembang kurikulum IPA untuk SMP/MTs sebaiknya merupakan ahli dalam IPA Terpadu karena pembelajaran IPA saat ini merupakan pembelajaran IPA Terpadu. Pada kenyataannya, implementasi pembelajaran IPA Terpadu di lapangan masih mengalami kendala. Kendala yang dialami antara lain kurangnya guru IPA Terpadu, ketidaksiapan guru untuk mengembangkan dan membelajarkan IPA Terpadu, sebagian besar guru masih berasal dari masing-masing cabang IPA seperti fisika, biologi, dan kimia serta buku pelajaran IPA belum berisi materi IPA Terpadu.

Sebuah penelitian tentang jumlah guru yang ada di Samarinda mengungkapkan mengenai fakta bahwa guru IPA Terpadu yang ada di lapangan masih kurang. Dari sejumlah 161 guru IPA yang terdapat di kota Samarinda, jumlah guru IPA terbanyak merupakan guru IPA-Biologi yaitu 61 orang. Jumlah guru IPA-Fisika yaitu 54 orang dan guru IPA sebanyak 46 orang. Sebagian besar usia guru IPA tersebut terdapat pada rentang 47 sampai dengan 57 tahun. Penelitian tersebut merupakan salah satu bukti bahwa banyak guru IPA Terpadu yang berlatar belakang bukan IPA Terpadu serta ketersediaan guru IPA masih kurang di lapangan (sumber: [www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6962/](http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6962/)).

Implikasi inovasi pembelajaran IPA Terpadu terkendala pula pada kesulitan guru mengembangkan pembelajaran IPA Terpadu. Pusat kurikulum telah memberikan model pedoman pengembangan kurikulum IPA Terpadu tetapi guru masih kesulitan dalam

mengembangkan kurikulum IPA Terpadu. Selain faktor kompetensi profesional guru yang tidak lengkap (hanya menguasai salah satu cabang IPA) dan beban mengajar, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA yang belum terpadu juga menjadi bagi guru dalam mengembangkan kurikulum IPA Terpadu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan acuan kurikulum khususnya untuk Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sudah terpadu dan operasional sehingga dapat dikembangkan secara langsung oleh guru.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan makalah yang berisi contoh SK dan KD yang sudah terpadu yang dapat digunakan oleh guru yang merupakan hasil redesain Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang ada menjadi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar baru.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam makalah ini adalah:

1. Implementasi pembelajaran IPA Terpadu mengalami kendala di lapangan.
2. Ketersediaan guru IPA yang benar-benar berlatar belakang pendidikan IPA masih kurang di lapangan.
3. Guru masih kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran IPA Terpadu karena faktor kompetensi profesional, dan beban mengajar.
4. Belum tersedia acuan kurikulum IPA dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang telah terpadu yang dapat digunakan oleh guru secara operasional.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari makalah ini adalah bagaimana struktur Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA Terpadu untuk SMP/MTs yang dapat digunakan guru secara operasional?

## II. PEMBAHASAN

Dalam Lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006, penjabaran SK dan KD masih terpisah dalam masing-masing bidang kajian. Oleh karena itu, dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran IPA Terpadu perlu dilakukan pemaduan SK dan KD terlebih dahulu. Tujuan dari pemaduan SK dan KD ini adalah: (1) mengidentifikasi SD dan KD yang dapat dipadukan, dan (2) menghasilkan SK dan KD baru, yaitu SK dan KD IPA Terpadu untuk SMP/MTs.

Beberapa hal yang menjadi dasar pemaduan SK dan KD dalam makalah ini adalah: (1) Pemaduan SK dan KD dilakukan dalam satu tahun (dua semester). (2) Pemaduan SK dan KD tidak mengurangi SK dan KD sebelumnya. (3) Pemaduan dilakukan dengan menggunakan model *integrated, shared, webbed* dan atau *connected*. (4) Referensi utama: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah dan Panduan Pengembangan Pembelajaran IPA Secara Terpadu (Kemendiknas, 2011). (5) Referensi tambahan: Buku *Conceptual Integrated Science* (Paul G Hewwit, 2006).

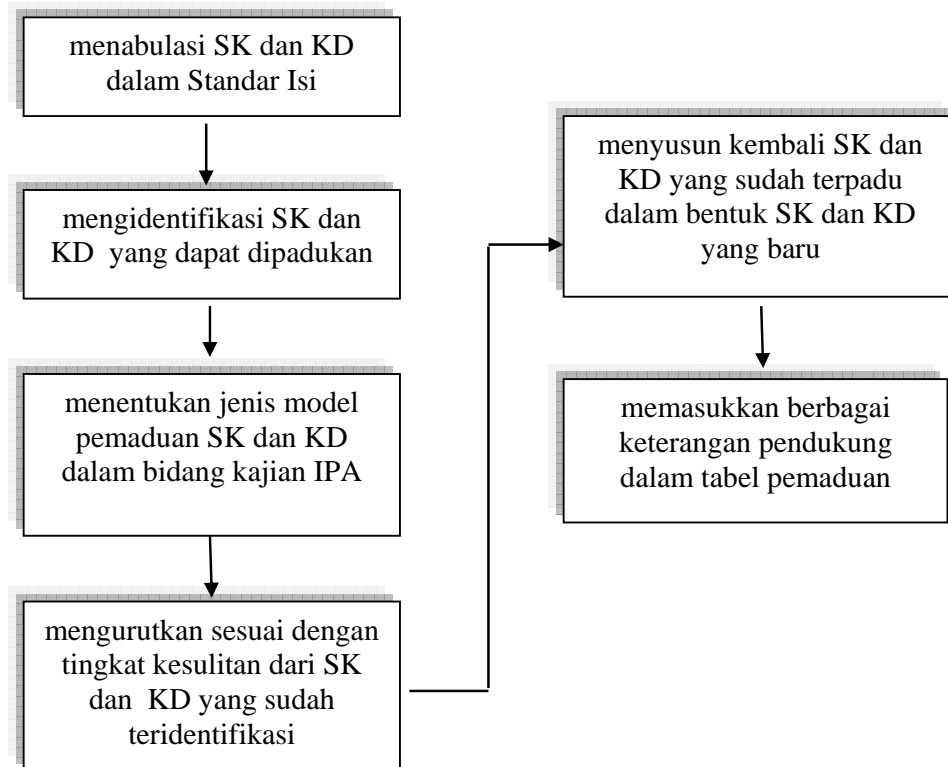
Prosedur yang dilakukan dalam pemaduan ini adalah: (1) menabulasi SK dan KD dalam Standar Isi, (2) mengidentifikasi SK dan KD yang dapat dipadukan, (3) menentukan jenis model pemaduan SK dan KD dalam bidang kajian IPA, (4) mengurutkan sesuai dengan tingkat kesulitan dari SK dan KD yang sudah teridentifikasi, (5) menyusun kembali SK dan KD yang sudah terpadu dalam bentuk SK dan KD yang baru, (6) memasukkan berbagai keterangan pendukung dalam tabel pemaduan. Bentuk tabel yang digunakan dalam prosedur pemaduan yaitu seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel pemaduan SK-KD IPA Terpadu

SK dan KD dalam Standar Isi	SK dan KD yang dipadukan	SK dan KD baru	Materi	Keterangan



Prosedur pemaduan yang dilakukan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Prosedur pemaduan SK dan KD

Hasil pemaduan SK dan KD berupa SK dan KD yang baru yaitu sebagai berikut:

**A. SK dan KD IPA Terpadu Kelas VII**

<b>Standar Kompetensi</b>	<b>Kompetensi Dasar</b>
1. Memahami prosedur ilmiah untuk mempelajari benda-benda alam dengan menggunakan peralatan	1.1 Mendeskripsikan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya 1.2 Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari 1.3 Menggunakan mikroskop dan peralatan pendukung lainnya untuk mengamati gejala-gejala kehidupan

<b>Standar Kompetensi</b>	<b>Kompetensi Dasar</b>
	<p>1.4 Menganalisis data percobaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>1.5 Menerapkan keselamatan kerja dalam melakukan pengamatan gejala-gejala alam</p>
2. Memahami klasifikasi zat	<p>2.1 Mengelompokkan sifat larutan asam, larutan basa, dan larutan garam melalui alat dan indikator yang tepat</p> <p>2.2 Melakukan percobaan sederhana dengan bahan-bahan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>2.3 Menjelaskan nama unsur dan rumus kimia sederhana</p> <p>2.4 Membandingkan sifat unsur, senyawa, dan campuran</p>
3. Memahami wujud zat dan perubahannya	<p>3.1 Menyelidiki berbagai sifat fisika dan kimia zat berdasarkan wujudnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>3.2 Mendeskripsikan pengertian suhu</p> <p>3.3 Mendeskripsikan peran kalor dalam perubahan wujud dan suhu benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>3.4 Melakukan pemisahan campuran dengan berbagai cara berdasarkan sifat fisika benda dan mengidentifikasi peran kalor dalam proses pemisahan campuran</p> <p>3.5 Melakukan pemisahan campuran dengan berbagai cara berdasarkan sifat kimia benda dan mengidentifikasi reaksi kimia yang terjadi dalam proses pemisahan campuran</p>
4. Memahami keanekaragaman makhluk hidup	<p>4.1 Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup</p> <p>4.2 Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki</p> <p>4.3 Mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme</p>
5. Memahami gejala-gejala alam dalam ekosistem melalui pengamatan	<p>5.1 Melaksanakan pengamatan objek secara terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi gejala alam biotik dan abiotik</p> <p>5.2 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem</p>

<b>Standar Kompetensi</b>	<b>Kompetensi Dasar</b>
	5.3 Mengidentifikasi pentingnya keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem 5.4 Memprediksi pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap lingkungan dan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan

**B. SK dan KD IPA Terpadu Kelas VIII**

<b>Standar Kompetensi</b>	<b>Kompetensi Dasar</b>
1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia termasuk kegunaan bahan kimia dalam kehidupan manusia	1.1 Menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup 1.2 Mendeskripsikan tahapan perkembangan manusia 1.3 Mendeskripsikan sistem gerak pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan 1.4 Mendeskripsikan bahan kimia alami dan bahan kimia buatan serta sistem pencernaan, pernafasan dan peredaran darah dalam tubuh manusia 1.5 Mendeskripsikan sifat/pengaruh bahan kimia terhadap sistem dalam tubuh manusia 1.6 Menjelaskan upaya pencegahan terhadap efek negatif zat adiktif dan psicotropika bagi kesehatan tubuh manusia
2. Menjelaskan konsep partikel materi	2.1 Menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul 2.2 Menghubungkan konsep atom, ion, dan molekul dengan produk kimia sehari-hari 2.3 Membandingkan molekul unsur dan molekul senyawa
3. Memahami sistem kehidupan tumbuhan dan peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari	3.1 Mengidentifikasi jenis-jenis gaya, penjumlahan gaya, pengaruhnya pada suatu benda yang dikenai gaya dan macam-macam gerak pada benda terutama gerak yang berkaitan dengan tumbuhan 3.2 Menerapkan hukum Newton untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari

<b>Standar Kompetensi</b>	<b>Kompetensi Dasar</b>
	<p>3.3 Mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta hubungannya terhadap penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>3.4 Mendeskripsikan bentuk energi dalam proses perolehan nutrisi dan proses transformasi energi berdasarkan prinsip usaha dan energi.</p> <p>3.5 Mendeskripsikan prinsip kerja pesawat sederhana dalam hubungannya terhadap pembasmian hama dan penyakit pada organ tumbuhan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.</p>
4. Menjelaskan konsep partikel materi	<p>4.1 Menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul</p> <p>4.2 Menghubungkan konsep atom, ion, dan molekul dengan produk kimia sehari-hari</p> <p>4.3 Membandingkan molekul unsur dan molekul senyawa</p>

**C. SK dan KD IPA Terpadu Kelas IX**

<b>Standar Kompetensi</b>	<b>Kompetensi Dasar</b>
1. Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya	<p>1.1 Mendeskripsikan konsep muatan listrik pada sistem koordinasi</p> <p>1.2 Mendeskripsikan pemanfaatan kemagnetan dalam produk bioteknologi</p> <p>1.3 Mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan</p> <p>1.4 Mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia</p> <p>1.5 Menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>1.6 Mendeskripsikan prinsip kerja elemen dan arus listrik yang ditimbulkannya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>1.7 Mendeskripsikan hubungan energi dan daya listrik serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari</p>

<b>Standar Kompetensi</b>	<b>Kompetensi Dasar</b>
	1.8 Menyelidiki gejala kemagnetan dan cara membuat magnet 1.9 Menerapkan konsep induksi elektromagnetik untuk menjelaskan prinsip kerja beberapa alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik.
2. Memahami sistem tata surya dan proses kehidupan yang terjadi di dalamnya serta pengaruhnya terhadap kehidupan	2.1 Menjelaskan proses yang terjadi di lapisan lithosfer dan atmosfer dengan kesehatan dan permasalahan lingkungan serta pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup 2.2 Mendeskripsikan konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup 2.3 Mendeskripsikan proses pewarisan dan hasil pewarisan sifat dan penerapannya. 2.4 Mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan 2.5 Mendeskripsikan karakteristik sistem tata surya 2.6 Mendeskripsikan matahari sebagai bintang dan bumi sebagai salah satu planet 2.7 Mendeskripsikan gerak edar bumi, bulan, dan satelit buatan serta pengaruh interaksinya

Pemaduan SK dan KD tersebut dilakukan dalam satu tahun. Harapannya pemaduan SK dan KD tidak hanya dapat dilakukan dalam tingkatan tahun namun lintas tahun (kelas VII, VIII, IX). Hal tersebut perlu pengkajian lebih mendalam mengenai hakikat IPA dan materi IPA Terpadu yang sesuai bagi peserta didik tingkat SMP/MTs.

### **III. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan makalah ini adalah struktur Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPA Terpadu untuk SMP/MTs yang dapat digunakan guru secara operasional berdasarkan tingkatan kelasnya yaitu:

1. Kelas VII terdiri dari lima standar kompetensi. Kelima standar kompetensi tersebut yaitu: (a) memahami prosedur ilmiah untuk mempelajari benda-benda alam dengan menggunakan peralatan, (b) memahami klasifikasi zat, (c) memahami wujud zat dan perubahannya, (d) memahami keanekaragaman makhluk hidup, dan (e) memahami gejala-gejala alam dalam ekosistem melalui pengamatan.
2. Kelas VIII terdiri dari empat standar kompetensi. Keempat standar kompetensi tersebut yaitu: (a) memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia termasuk kegunaan bahan kimia dalam kehidupan manusia, (b) menjelaskan konsep partikel materi, (c) memahami sistem kehidupan tumbuhan dan peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari, dan (d) menjelaskan konsep partikel materi.
3. Kelas IX terdiri dari dua standar kompetensi. Dua standar kompetensi tersebut yaitu: (a) memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya, dan (b) memahami sistem tata surya dan proses kehidupan yang terjadi di dalamnya serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Masing-masing standar kompetensi tersebut dijabarkan dalam kompetensi dasar-kompetensi dasar yang bersesuaian.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Collete, Alfred T. dan Chiappetta Eugene L. (1994). *Science Instruction in the Middle and Secondary Schools*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Fogarty, R. (1991). *How to Integrate The Curricula*. Palatine: IRI/Skylight Publishing, Inc.
- Kementrian Pendidikan Nasional. (2011). *Panduan Pengembangan Pembelajaran IPA Secara Terpadu*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. (2005). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah*.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah.*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah.*

Pendidikan Pembinaan Generasi Muda dan Kebudayaan Nasional. Diambil pada tanggal 11 Januari 2011 dari [www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6962/](http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6962/).

## LAMPIRAN

### BIODATA PENULIS

1. Nama : Ayu Rahayu, S.Pd  
Pekerjaan : mahasiswa  
Program Studi : Pendidikan Sains Pascasarjana UNY  
Nomor Telepon : 085227483335  
Alamat email : [ayurahayufisikauny@gmail.com](mailto:ayurahayufisikauny@gmail.com)  
Alamat Rumah : Jalan Gejayan no. 15 A Yogyakarta
  
2. Nama : Ulfiana Prisdiansari, S.Pd  
Pekerjaan : mahasiswa  
Program Studi : Pendidikan Sains Pascasarjana UNY  
Nomor Telepon : 085643507696  
Alamat email : [ulfiana.prisdiansari@gmail.com](mailto:ulfiana.prisdiansari@gmail.com)  
Alamat Rumah : Magelang, Jawa Tengah
  
3. Nama : Elsa Yulianingsih, S.Si  
Pekerjaan : mahasiswa  
Program Studi : Pendidikan Sains Pascasarjana UNY  
Nomor Telepon : 081350182235  
Alamat email : [elsastitba5@gmail.com](mailto:elsastitba5@gmail.com)  
Alamat Rumah : Prambanan, Jawa Tengah



## REDESAIN KURIKULUM PENDIDIKAN KEJURUAN

**Mukhidin<sup>\*)</sup>**  
**Bachtiar Hasan<sup>\*)</sup>**  
**Nur Rahma Yenita<sup>\*)</sup>**

Kurikulum *vocational* yang berkembang saat ini untuk menyiapkan tenaga guru SMK mengalami tantangan setelah adanya UU Pendidikan yang baru. Hal ini kurikulum program sarjana pendidikan harus ditata ulang untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Pendidikan profesional guru yang sekarang berkembang merupakan *feedback* untuk perubahan kurikulum pendidikan kejuruan (sarjana pendidikan kejuruan).

Perubahan ini dimulai dari perubahan struktur kurikulum yang harus berubah sesuai kebutuhan pasar. Pasar dalam arti perubahan kurikulum SMK yang berorientasi pada kompetensi dan praktis. Dengan demikian kurikulum pendidikan kejuruan haruslah berbanding dengan lebih mengutamakan aspek produktif yang lebih besar dari pada aspek adaptif dan aspek normatif. Hal ini sebenarnya terjadi dilema karena masalah karakteristik bangsa yang merupakan aspek normatif yang perlu diwadahi. Oleh karena itu, kurikulum yang bersifat *concurrent* merupakan alternatif jawaban yang paling tepat untuk redesign pendidikan guru kejuruan. Pendidikan *concurrent* yakni menampilkan struktur kurikulum yang bergerak bersama antara ketiga aspek tersebut.

Sistem pembelajaran pada *concurrent* memerlukan model pembelajaran yang mempunyai paradigma baru yakni pembelajaran yang memperhatikan semua aspek secara bersama-sama untuk dikemas dalam sistem pendidikan kejuruan. Demikian pula di dalam penyelenggaraan pendidikan menginginkan keterlibatan antara lembaga kependidikan dengan dunia usaha dan industri. Ini akan berjalan dengan baik bilamana dinaungi oleh payung hukum mulai dari pengaturan perencanaan, pelaksanaan, implementasi dan evaluasi.

Kata kunci : redesign kurikulum pendidikan kejuruan, kompetensi, kerjasama.

<sup>\*)</sup> Dosen FPTK UPI

## **A. PENDIDIKAN KEJURUAN**

Menurut Rupert Evans (1978) pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu berkerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Sedangkan menurut Undang – Undang No.2 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat berkerja dalam bidang tertentu. Atau yang lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yaitu: Pendidikan Menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk pelaksanaan jenis pekerjaan tertentu. Dari definisi di atas dapat disimpulkan Pendidikan Kejuruan adalah *Pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki lapangan kerja.*

Menurut Miller (1986) filosofi pendidikan kejuruan mempunyai tiga elemen pokok, yaitu : *natureof reality, truth, and value.* Sehingga filosofi pendidikan kejuruan merupakan artikulasi sebagai dasar asumsi yang meliputi kenyataan, kebenaran dan tata nilai. Pertama, landasan falsafah memandang adanya ketentuan-ketentuan yang diperlukan oleh peserta didik dan strategi apa yang sesuai dengan kebutuhan anak didik. Kedua, asumsi tentang perwujudan atau kenyataan tentang kebenaran untuk memberikan tuntutan dalam membentuk kurikulum pendidikan kejuruan. Ketiga, materi yang telah diyakini kebenaran sesuai dengan falsafahnya, lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengajaran dengan benar.

## **B. LATAR BELAKANG**

Pendidikan saat ini tidak lebih berkembang dibandingkan perkembangan teknologi, namun perlu diadakan upaya untuk mengembangkan pendidikan setara dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian perkembangan pendidikan tidak jauh tertinggal, dan pendidikan kejuruan pun mampu menghasilkan lulusan yang terampil dan inovatif dibidang teknologi ketika para lulusan masuk ke dunia kerja.

Perkembangan teknologi jauh lebih cepat jika dibandingkan perkembangan pendidikan. Seperti perkembangan teknologi dibidang elektronika, mesin, telekomunikasi, dan industri sangat pesat pertumbuhannya. Sedangkan pendidikan cenderung lamban berkembang. Padahal idealnya pendidikan harus lebih maju dan berkembang dibandingkan perkembangan teknologi itu sendiri, karena dalam pendidikan terutama pendidikan kejuruan harus menghasilkan lulusan-lulusan yang mempunyai keterampilan dalam bidang tertentu, misalkan keterampilan dalam bidang teknologi untuk pendidikan kejuruan dibidang teknologi. Untuk menghasilkan lulusan-lulusan SMK yang terampil, maka LPTK harus mempersiapkan guru-guru profesional yang terampil.

Kurikulum *vocational* yang berkembang saat ini untuk menyiapkan tenaga guru SMK mengalami tantangan setelah adanya UU Pendidikan yang baru. Kurikulum program sarjana pendidikan harus ditata ulang untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Pendidikan profesional guru yang sekarang berkembang merupakan *feedback* untuk perubahan kurikulum pendidikan kejuruan (sarjana pendidikan kejuruan).

### **C. PERMASALAHAN**

Perkembangan teknologi yang lebih berkembang pesat dibandingkan dengan perkembangan pendidikan menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan bersama. Pertumbuhan pendidikan yang cenderung lambat dibandingkan pertumbuhan teknologi, terutama pertumbuhan pendidikan kejuruan menjadikan pendidikan tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Pasar dalam arti perubahan kurikulum SMK yang berorientasi pada kompetensi dan praktis. Dengan demikian kurikulum pendidikan kejuruan haruslah berbanding dengan lebih mengutamakan aspek produktif yang lebih besar dari pada aspek adaptif dan aspek normatif.

Isi dari UU nomor 14 tahun 2005 menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan guru dan dosen kaitannya dalam kependidikan di Indonesia. Dalam UU ini dijelaskan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional

bertujuan untuk melaksanakan sistem dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Profesi guru dan dosen harus memenuhi prinsip profesionalitas dalam menjalankan profesi tersebut.

Perubahan struktur kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pasar dalam arti perubahan kurikulum SMK yang berorientasi pada kompetensi dan pasar kerja. Permasalahannya adalah bagaimana meredesain pendidikan guru kejuruan sehingga sesuai harapan masyarakat khususnya adalah menengah kejuruan.

#### **D. LANDASAN YURIDIS**

Isi dari UU nomor 14 tahun 2005 menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan guru dan dosen kaitannya dalam kependidikan di Indonesia. Dalam UU ini dijelaskan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Profesi guru dan dosen harus memenuhi prinsip profesionalitas dalam menjalankan profesi tersebut. Salah satu dari prinsip tersebut adalah memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kaitannya dengan prinsip ini, termasuk kualitas dan sertifikasi. Mengenai hal ini, pemerintah telah mengadakan program-program pemberdayaan untuk meningkatkan aspek-aspek tersebut, diantaranya adalah pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya, seorang guru mempunyai kewajiban diantaranya adalah:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional dan memperoleh maslahat tambahan paling lama sepuluh tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik. Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya UU ini. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada UU ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama sepuluh tahun sejak berlakunya UU ini.

Pada dasarnya pemerintah mengadakan program pemberdayaan guru melalui jalur sertifikasi guru, dimana tujuannya adalah:

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
3. Meningkatkan martabat guru
4. Meningkatkan profesionalitas guru

Dari tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan. Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas.

Tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu meningkatnya kualitas guru.

Dari statement diatas, ironisnya adalah setelah dikaji dan dievaluasi secara simultan tujuan tersebut belum tercapai maksimal. Banyak guru yang mengikuti program sertifikasi guru hanya bertujuan untuk mendapatkan tunjangan profesi ataupun tambahan gaji. Sehingga tujuan awal dari program sertifikasi guru belum bisa diaplikasikan secara tanggungjawab.

Permendiknas nomor 16 tahun 2007 menjelaskan tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Kualifikasi akademik guru diantaranya yaitu:

- a. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal
  - b. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan
- Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Sedangkan kompetensi guru mata pelajaran matematika adalah:

1. Menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan, berbagai system bilangan dan teori bilangan.
2. Menggunakan pengukuran dan penaksiran.
3. Menggunakan logika matematika.
4. Menggunakan konsep-konsep geometri.
5. Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang.
6. Menggunakan pola dan fungsi. Menggunakan konsep-konsep aljabar
7. Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik.
8. Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit.
9. Menggunakan trigonometri
10. Menggunakan vektor dan matriks.
11. Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika.
12. Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, model matematika, dan model statistika.

Implementasi Permendiknas nomor 22, 23, 24 tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan. Permendiknas nomor 22 berkaitan dengan standar isi “Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.” Permendiknas tentang standar isi ini diimplementasikan sebagai tolok ukur minimal dalam semua satuan pendidikan di Indonesia. Dalam penjelasannya disebutkan mengenai kriteria yang mencakup standar lingkup materi dan tingkat kompetensi yang harus dipenuhi pada setiap satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan minimal. Kompetensi lulusan yang dimaksud dalam peraturan menteri ini dijelaskan secara rinci pada Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Permendiknas nomor 23 tahun 2006 berisi tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. SKL secara umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar Kompetensi Lulusan tersebut menitik beratkan pada pendalaman materi, penerapan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari sekolah dalam kehidupan bermasyarakat, penguasaan kompetensi, dan juga pengamalan nilai-nilai pendidikan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, moral-moral Pancasila dan estetika pergaulan. Penerapan Standar Isi dan SKL di tingkat satuan pendidikan dirumuskan pada Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang system penentuan kurikulum tingkat satuan pendidikan di semua sekolah di Indonesia.

Permendiknas no. 24 dimaksudkan untuk merumuskan Standar Isi dan SKL dalam bentuk pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum ini dibuat, dikembangkan, dan dipakai oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan SI dan SKL. Pengembangan kurikulum berdasarkan tingkat satuan pendidikan ini dirasa bisa lebih relevan bagi masing-masing sekolah. Karena secara sistematisnya, kurikulum tersebut menyerahkan

sepenuhnya hak pengembangan pada masing-masing sekolah namun harus tetap sesuai dengan standar isi dan SKL.

## **E. REDESAIN KURIKULUM**

Redesain kurikulum dilakukan untuk merubah struktur kurikulum yang telah ada sebelumnya. Perubahan ini dimulai dari perubahan struktur kurikulum yang harus berubah sesuai kebutuhan pasar. Pasar dalam arti perubahan kurikulum SMK yang berorientasi pada kompetensi dan praktis. Dengan demikian kurikulum pendidikan kejuruan haruslah berbanding dengan lebih mengutamakan aspek produktif yang lebih besar dari pada aspek adaptif dan aspek normatif. Hal ini sebenarnya terjadi dilema karena masalah karakteristik bangsa yang merupakan aspek normatif yang perlu diwadahi. Oleh karena itu, kurikulum yang bersifat *concurrent* merupakan alternatif jawaban yang paling tepat untuk redesign pendidikan guru kejuruan. Pendidikan *concurrent* yakni menampilkan struktur kurikulum yang bergerak bersama antara ketiga aspek tersebut.

Sistem pembelajaran pada *concurrent* memerlukan model pembelajaran yang mempunyai paradigma baru yakni pembelajaran yang memperhatikan semua aspek secara bersama-sama untuk dikemas dalam sistem pendidikan kejuruan. Demikian pula di dalam penyelenggaraan pendidikan menginginkan keterlibatan antara lembaga kependidikan dengan dunia usaha dan industri. Ini akan berjalan dengan baik bilamana dinaungi oleh payung hukum mulai dari pengaturan perencanaan, pelaksanaan, implementasi dan evaluasi.

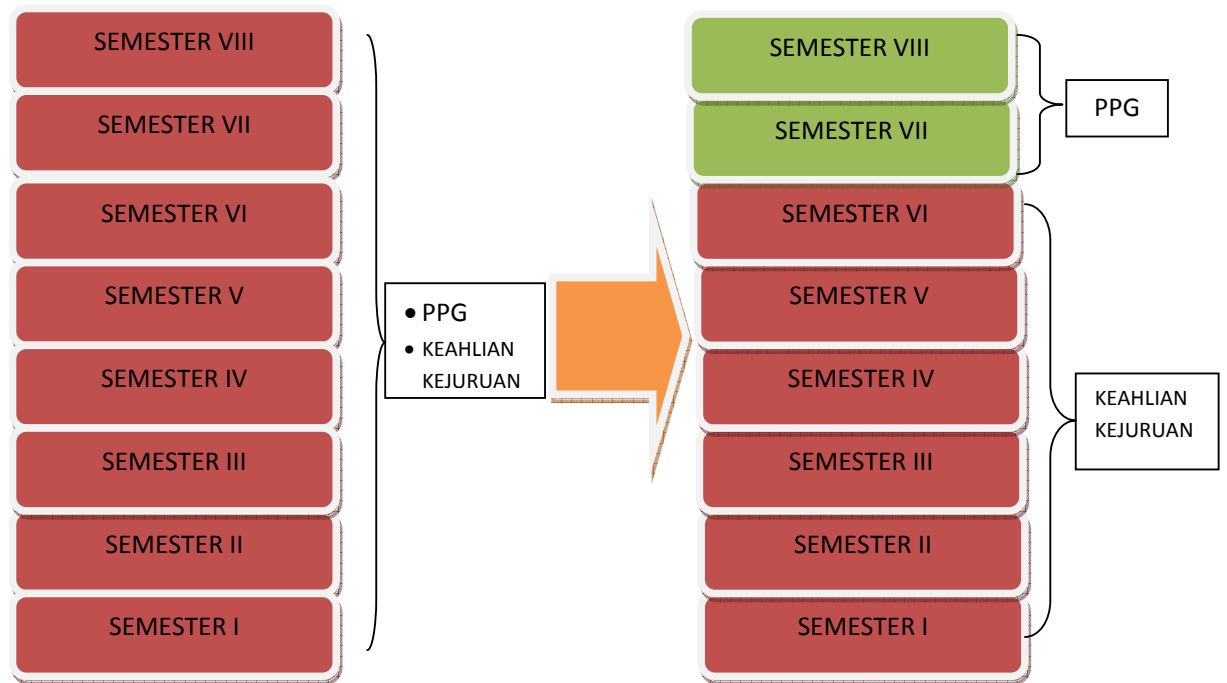
Desain kurikulum untuk LPTK kejuruan saat ini adalah delapan semester perkuliahan yang didalamnya terdapat mata kuliah keahlian dalam bidang kejuruan dan mata kuliah bidang keguruan. Antara mata kuliah bidang kejuruan dan bidang keguruan pada tiap semesternya dicampur, sehingga mahasiswa tidak fokus ke dalam satu bidang saja. Untuk hasil yang optimal penulis meredesain kurikulum tersebut, enam semester pertama khusus untuk mata kuliah keahlian kejuruan dan dua semester terakhir untuk mata kuliah profesi guru (PPG). Dengan desain kurikulum tersebut mahasiswa menjadi fokus dalam bidangnya.



## F. PARADIGMA BARU PENDIDIKAN KEJURUAN

Paradigma baru pendidikan kejuruan yaitu berpegang pada kekokohan ilmu yang harus di kuasai calon guru dengan memahami konsep dan kompetensi yang harus dikuasai, setelah itu dia menguasai ilmu kependidikan.

Perubahan struktur kurikulum dari delapan semester antara mata kuliah bidang keahlian dan profesi keguruan dicampur pada setiap semesternya menjadi enam semester pertama khusus untuk mata kuliah keahlian kejuruan dan dua semester terakhir untuk mata kuliah profesi guru (PPG). Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Perubahan Struktur Kurikulum LPTK

Perubahan struktur kurikulum tersebut akan menjadikan dampak positif bagi mahasiswa, karena pada enam semester diawal mahasiswa harus mampu fokus pada bidang keahlian kejuruannya dan dua semester terakhir fokus dalam bidang keahlian profesinya sebagai guru. Untuk calon guru yang berasal dari non-LPTK harus mengikuti PPG selama satu tahun.

Dampak yang ditimbulkan pada model pembelajaran *concurrent* adalah menampilkan model pembelajaran yang bergerak bersama antara aspek produktif,

adaptif dan normatif. Hal ini akan menjawab permintaan pasar terhadap lulusan SMK. Tentunya memerlukan model pembelajaran yang mempunyai paradigma baru yakni pembelajaran yang memperhatikan semua aspek secara bersama-sama untuk dikemas dalam sistem pendidikan kejuruan. Demikian pula di dalam penyelenggaraan pendidikan menginginkan keterlibatan antara lembaga kependidikan dengan dunia usaha dan industri. Ini akan berjalan dengan baik bilamana dinaungi oleh payung hukum mulai dari pengaturan perencanaan, pelaksanaan, implementasi dan evaluasi. Kerjasama yang kuat antara SMK dan Industri akan menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Karena pada dasarnya SMK tidak lepas dari Dunia Industri (DUDI) dan Dunia Industri (DUDI) tidak lepas dari SMK.

### **STRUKTUR KURIKULUM**

Kurikulum untuk lulusan program studi pendidikan bergelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) yaitu dibebankan 148- 150 SKS dalam jangka waktu 8 semester. Untuk kurikulum Program Studi di lingkungan Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI berorientasi pada kebutuhan pasar dunia kerja dan jiwa kewirausahaan. Kurikulum dirancang untuk mempersiapkan lulusan profesional di bidang pendidikan, yaitu menjadi guru-guru SMK yang profesional.

Kurikulum dirancang melalui kerja sama dengan asosiasi profesi, perusahaan swasta, BUMN, lembaga pendidikan bertaraf nasional maupun internasional (melalui program Asialink : Indonesia-Malaysia, Jerman-Spanyol).

### **G. KESIMPULAN**

Redesain kurikulum jika dijalankan dan didukung dari berbagai pihak akan terlaksana sistem pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan permintaan pasar. Hal ini sangat tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan subsidi pada LPTK untuk pengembangan fasilitas penunjang dalam proses pembelajaran pada LPTK. Peran pemerintah dan dunia industri untuk bekerjasama dengan LPTK sangat dibutuhkan dalam mendukung perubahan kurikulum yang akan dijalankan. Selain itu juga dosen-dosen yang

profesional dan kompeten dalam bidang kejuruan dan bidang profesi keguruan akan sangat dibutuhkan untuk membentuk lulusan yang berkualitas untuk menjadi guru profesional di SMK-SMK teknologi.

# **PENGEMBANGAN KERANGKA MODEL EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS STANDAR DALAM PENDIDIKAN KEJURUAN**

(Oleh : Dedy Suryadi, MPd. dan Drs. Sukadi,MPd.,MT.  
Dosen Prodi Pendidikan Teknik Bangunan JPTS FPTK UPI)

## **ABSTRAK**

Kebijakan pemerintah berkenaan dengan pemberlakuan KTSP semenjak tahun 2006 dan pemberlakuan standarisasi nasional pendidikan oleh pemerintah, membawa perubahan signifikan dalam bangun penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pemberian kewenangan bagi satuan pendidikan untuk membuat kurikulum sendiri yang mengacu pada standar-standar (SI dan SKL), memunculkan tugas-tugas baru yang diemban oleh sekolah dan guru-guru, yakni sebagai perencana, pelaksana dan evaluator kurikulum.

Dalam konteks pendidikan kejuruan, fenomena perubahan yang diakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi pada semakin tingginya tuntutan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan sekolah kejuruan. Untuk melihat efektivitas keberhasilan pembelajaran sebagai inti implementasi kurikulum, sekolah dan guru dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Di sini penting dilakukan suatu perencanaan dalam pengembangan kerangka model evaluasi terhadap implementasi kurikulum yang digunakan oleh sekolah kejuruan.

Banyak alternatif model evaluasi implementasi kurikulum yang dikembangkan para ahli kurikulum yang bisa digunakan baik secara parsial, menyeluruh dan irisan antar model. Alternatif model (kelompok kuantitatif maupun kualitatif) yang dikembangkan dalam pendidikan kejuruan mengacu pada standar-standar yang dikembangkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) maupun oleh kementerian teknis terkait dan pihak BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kerangka model evaluasi implementasi kurikulum berbasis standar ini dikembangkan pada domain perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar dan pengawasan terhadap proses pembelajaran.

Kata Kunci: evaluasi, implementasi kurikulum, pendidikan kejuruan

## **A. PENDAHULUAN**

Pemberlakuan Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No. 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, merupakan suatu sinyal bahwa orientasi tujuan

kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) senantiasa mengalami penyesuaian yang signifikan. Penyesuaian dimaksud adalah dengan meningkatnya tuntutan kompetensi yang disyaratkan dunia industri pada lulusan SMK sebagai dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penetapan *benchmark* kompetensi keahlian dan kompetensi kerja. Hal ini mengacu pada penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kementerian teknis terkait (PU dan Perindustrian) serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kaitannya dengan pemberlakuan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dan PP No. 19 Tahun 2005, dimana dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan. Pada penjelasan PP tersebut, kurikulum yang dimaksud adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kebijakan dalam penyusunan dan pengembangan KTSP ini berdampak pada tuntutan bagi tiap satuan pendidikan (sekolah dan guru-guru) untuk memiliki kemampuan dalam mengembangkan kurikulum. Posisi guru sekarang ini bukan hanya pelaksana kurikulum saja, tetapi juga sebagai perencana dan pengembang kurikulum. Posisi pemerintah dalam hal ini Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) hanya memberi panduan standarisasi, dimana untuk pembuatan KTSP ini, tiap satuan pendidikan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selain itu juga mengacu pada standarisasi komponen bidang pendidikan lainnya.

Berdasarkan kajian terhadap pemberlakuan KTSP yang dimulai tahun 2006 hingga tahun sekarang ini, banyak persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh tiap satuan pendidikan. Pada satuan pendidikan teknologi dan kejuruan (SMK), permasalahan utama yang sering muncul di permukaan adalah pada tahapan implementasi kurikulum dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di sekolah maupun di industri. Pembelajaran teknologi dan kejuruan pada prinsipnya mampu mengakomodir dan mensinergikan pola pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dan di industri. Upaya ini untuk menyelaraskan dan menyesuaikan rancangan kurikulum dan implementasinya agar lulusan SMK

memiliki kompetensi dan kemampuan beradaptasi dengan sistem dan iklim kerja di industri.

Dalam konteks pengembangan kurikulum, maka posisi sekolah dan guru-guru kejuruan amat penting dalam mengimplementasikan kurikulum yang digunakan. Untuk melihat efektivitas dan efisiensinya, maka diperlukan tindakan evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Hal ini sangat signifikan agar bisa dilihat dan dinilai tingkat keberhasilan kurikulum (KTSP) berdasarkan rancangan dan implementasinya. Pada bahasan selanjutnya akan dipaparkan mengenai urgensi dan signifikansi evaluasi kurikulum dan model-model evaluasi implementasi kurikulum yang bisa digunakan pada pendidikan teknologi dan kejuruan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kurikulum Pendidikan Kejuruan**

Definisi dan konsep tentang kurikulum banyak dikembangkan para ahli kurikulum. Sukmadinata (2004:81), membagi empat model secara garis besar, yakni kurikulum subjek akademik, kurikulum humanistik, kurikulum teknologis dan kurikulum rekonstruksi sosial. Sedangkan Soekamto (1988) memberikan gambaran tentang beberapa model kurikulum yang sering digunakan, yakni:

- *Subject-centered Curriculum* (Kurikulum Berpusat Pada Subjek)
- *Core Curriculum* (Kurikulum Inti)
- *Cluster-Based Curriculum* (Kurikulum Berdasar Kelompok)
- *Competency Based Curriculum* (Kurikulum Berdasar Kompetensi)
- *Open-Access Curriculum* (Kurikulum Terbuka)

Model kurikulum dalam pendidikan kejuruan yang digunakan adalah model kurikulum teknologis atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum model ini esensinya ditunjukkan pada inventarisasi kompetensi untuk suatu pekerjaan, jabatan atau karir tertentu. Kriteria pencapaian kompetensi ditentukan secara eksplisit dan proses pembelajarannya dilakukan untuk membantu peserta didik mencapai kriteria sebagai indikasi penguasaan kompetensi bidang kejuruan tertentu.

Berdasarkan telaah kurikulum yang digunakan di SMK, pada kurikulum 1994, edisi 199, 2004 maupun KTSP 2006, terdapat irisan yang sama tentang prinsip-prinsip yang dijadikan pegangan sebagai berikut:

- Kurikulum berbasis luas, kuat dan mendasar (*broad based curriculum*)
- Kurikulum berbasis kompetensi (*competency based curriculum*)
- Pembelajaran tuntas (*mastery learning*)
- Pembelajaran berbasis ganda (*dual based program*) yang dilaksanakan di sekolah dan di industri
- Pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (*competency-based training*)
- Pendekatan pembelajaran berbasis produksi (*production-based training*)
- Penguatan kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi

## **2. Definisi dan Fungsi Evaluasi Kurikulum**

Evaluasi kurikulum diarahkan untuk memperoleh suatu keberhasilan dan nilai dari kurikulum berkaitan dengan desain, materi yang direncanakan, dan implementasi. Oleh karena itu evaluasi kurikulum melibatkan semua komponen yang kompleks mulai dari tujuan, perencanaan, isi, implementasi, proses pembelajaran dan alat pendukung lainnya.

Perumusan suatu definisi kurikulum erat kaitannya dengan landasan filosofi, teori yang digunakan (termasuk di dalamnya definisi dan karakteristik suatu kurikulum) serta tujuan evaluasi yang akan dilakukan. Beberapa pendapat tentang definisi evaluasi kurikulum diantaranya dikemukakan oleh Tyler (1949:69) memberi pengertian bahwa evaluasi sebagai: “*the process for determining the degree to which these change in behavior are actually taking process*”. Guba dan Lincoln (1985:35) mendefinisikan evaluasi sebagai: “*a process for describing an evaluand and judging its merit and worth*”. Wright (Sukmadinata, 2001:173) berpendapat bahwa: “*curriculum evaluation may be defined as the estimation of the growth and progress of students toward objectives or values of the curriculum*”. Sedangkan Hasan (1988:13) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti dari sesuatu yang dipertimbangkan.

Pendapat lain dikemukakan Sukmadinata (2001:172), bahwa definisi evaluasi kurikulum sukar dirumuskan secara tegas karena beberapa faktor:

1. Evaluasi kurikulum berkenaan dengan fenomena-fenomena yang terus berubah;
2. Objek evaluasi kurikulum adalah sesuatu yang berubah-ubah sesuai dengan konsep kurikulum yang digunakan;
3. Evaluasi kurikulum merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya juga berubah.

Dilihat dari maksud dilakukannya tindakan evaluasi terhadap kurikulum, yakni untuk menggambarkan, mendapatkan dan menyediakan informasi yang berdaya guna untuk membuat keputusan dan penilaian berkenaan dengan kurikulum. Sedangkan pada tataran fungsi, evaluasi kurikulum diarahkan untuk tujuan sebagai berikut, yakni untuk mendiagnosis, merevisi kurikulum, membandingkan dengan kriteria standar, mengantisipasi kebutuhan pendidikan, menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari evaluasi kurikulum adalah menentukan apakah *goals and objectives* dari kurikulum tercapai atau tidak

### **3. Model-model Evaluasi Kurikulum**

Beberapa model evaluasi kurikulum yang sering digunakan dalam lingkup pendidikan dan pelatihan. Sukmadinata (2004) mengemukakan beberapa model evaluasi kurikulum, yakni model *discrepancy* (kesenjangan), *contingency-congruence model*, CIPP model, dan EPIC model. Kemudian berdasarkan teori dan paradigma yang digunakan, dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni model evaluasi kuantitatif dan kualitatif (Hasan, 1988:83).

#### **Model Evaluasi Kuantitatif**

Model ini didasarkan atas paradigma positifisme yang masuk ke ilmu pendidikan dengan tradisi psikometrik yang menekankan peran pengukuran (*measurement*). Model penelitian evaluasi kuantitatif biasanya lebih menekankan pada hasil dan nampak mengabaikan penilaian proses.

Terdapat beberapa model yang termasuk pada evaluasi kuantitatif diantaranya model *Black Box* yang dikembangkan Tyler, model teoritik dari Taylor dan Maguire, model pendekatan sistem Alkin, *Countenance* dari Stake, CIPP dari Stufflebeam, model 3P (program-proses-produk) yang dikembangkan



Joni, dan model ekonomi mikro yang menekankan pada pertimbangan nilai ekonomis dari kurikulum yang digunakan.

### **Model Evaluasi Kualitatif**

Berikut ini adalah model-model evaluasi kurikulum yang tergolong kualitatif diantaranya: (1) model *Studi Kasus* yang memusatkan perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan kurikulum disatu unit kegiatan pendidikan, bisa berupa suatu sekolah, kelas, bahkan seorang guru atau kepala sekolah, (2) model *Illuminatif* menggunakan paradigma antropologi sosial yang memberikan perhatian terhadap lingkungan dimana suatu inovasi kurikulum, dan (3) model *Responsive* dari Stake yang memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pelaksanaan kurikulum di lapangan sehingga pelaksanaan model ini memerlukan interaksi antara evaluator dengan para pelaksana kurikulum di lapangan.

### **4. Kerangka Model Evaluasi Implementasi Kurikulum**

Model-model evaluasi kurikulum yang dipaparkan di atas mencerminkan beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi kurikulum. Dalam penggunaan yang lebih operasional, maka model-model ini juga dilakukan dalam konteks evaluasi terhadap salah satu bagian dari komponen kurikulum, yakni komponen implementasi kurikulum. Pada lingkup persekolahan, aspek implementasi kurikulum menjadi lebih penting, terutama pendidikan kejuruan yang harus mengembangkan pembelajaran dalam lingkup teori dan praktik kejuruan di sekolah dan industri.

Dalam operasional evaluasi implementasi kurikulum, evaluator kurikulum (sekolah dan guru-guru) harus merancang suatu standar pelaksanaan evaluasi sebagai panduan untuk memberi pertimbangan dan penilaian dari proses implementasi kurikulum. Hasan (2008: 245) mengemukakan bahwa dalam evaluasi kurikulum dikenal empat standar yang digunakan, yakni:

- *Utility*, yakni meningkatkan informasi praktis yang dibutuhkan users.
- *Feasibility*, meningkatkan evaluasi lebih realistik, bijak, pandai, dan cermat
- *Propriety*, meningkatkan agar evaluasi diarahkan secara legal, etis dan peduli terhadap evaluator dan yang dievaluasi.

- *Accuracy*, meningkatkan evaluasi yang dinyatakan dan disampaikan secara teknis informasi yang memadai tentang bentuk objek yang diteliti

### **Penentuan Pendekatan Kriteria Evaluasi Implementasi Kurikulum**

Dalam konteks evaluasi implementasi kurikulum, langkah awal yang perlu dilakukan adalah pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan kriteria terhadap nilai kurikulum yang akan dievaluasi. Menurut Hasan (2008:73) menyebutkan ada empat kelompok pengembangan kriteria evaluasi, yakni *pre-ordinate*, *fidelity*, *mutual-adaptif*, dan *process*.

Pertama, kriteria *pre-ordinate* memiliki dua karakteristik, dimana yang pertama ditetapkan pada waktu evaluasi belum dilaksanakan. Evaluator menentukan kriteria sebelum pelaksanaan evaluasi. Keadaan ini bersifat mengikat, dan tidak akan berubah. Karakteristik kedua adalah kriteria yang ditetapkan sejak awal (*predetermined*) yang ditetapkan dari suatu standar tertentu. Kedua, kriteria *Fidelity* yang menggunakan kriteria yang dikembangkan sebelum evaluator turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Pendekatan ini ada kesamaan dengan pendekatan *pre-ordinate* yaitu adanya alat evaluasi yang sudah dipersiapkan sebelum turun ke lapangan.

Ketiga, kriteria pendekatan *mutually adaptive*, yang merupakan gabungan dari pendekatan *pre-ordinate*, *fidelity* dan pendekatan proses. Penggunaan kriteria evaluasi bisa berasal dari kurikulum tersebut atau dari luar. Pengembangan kriteria berdasarkan suatu teori tertentu merupakan pendekatan *pre-ordinate*. Kriteria bisa berasal dari lapangan, terutama dari pelaksana dan pemakai kurikulum yang akan dipergunakan dalam pendekatan proses.

Keempat, kriteria pendekatan proses, dikembangkan dari *naturalistic inquiry* atau kualitatif, atau disebut pula dengan nama fenomenologi. Pendekatan ini diterapkan pada evaluasi kurikulum yang baru. Pendekatan ini sebagai reaksi terhadap hasil penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik yang berakibat kurang bermaknanya bagi guru. Kriteria dikembangkan selama evaluator berada

di lapangan dan sangat peduli dengan masalah yang dihadapi oleh para pelaksana kurikulum di lapangan.

### **Penentuan Lingkup dan Tahapan Evaluasi Implementasi Kurikulum**

Lingkup evaluasi kurikulum sangat luas yang menyangkut keseluruhan aspek pendidikan yang terangkum dalam kurikulum baik dalam dimensi kualitas maupun kuantitas. Dalam konteks implementasi kurikulum, maka lingkup evaluasi meliputi:

- evaluasi terhadap perencanaan proses pembelajaran
- evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran
- evaluasi terhadap penilaian hasil pembelajaran
- evaluasi terhadap pengawasan proses pembelajaran

Sedangkan dalam pelaksanaan evaluasi implementasi kurikulum, evaluator (sekolah dan guru-guru) perlu merancang tahapan evaluasi yang dikelompokkan menjadi beberapa tahapan berikut:

- a. Pemahaman terhadap konteks evaluasi implementasi kurikulum
- b. Spesifikasi tugas yang menggambarkan lingkup evaluasi implementasi
- c. Membuat desain evaluasi untuk mengarahkan evaluasi
- d. Pengumpulan data untuk menghasilkan data dari sumber yang ada dan menggunakan teknik yang dirancang dalam tahapan desain evaluasi
- e. Analisis data dengan melakukan analisis, sintesis, dan interpretasi data yang diorganisasi dalam tahapan desain evaluasi
- f. Menyiapkan simpulan didasarkan atas hasil evaluasi
- g. Menyajikan simpulan dan rekomendasi tentang hasil evaluasi implementasi

### **Penentuan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan**

Evaluasi yang dilakukan pada implementasi kurikulum pada pendidikan kejuruan difokuskan pada domain proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah maupun di dunia industri. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa model evaluasi kurikulum dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni kelompok dengan tradisi kuantitatif, kualitatif dan yang mengkombinasikan

pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Kelompok ketiga ini dalam menganalisis data dengan mengkaitkan pada kriteria lainnya seperti keekonomisan dari kurikulum dilihat dari pendekatan *cost-benefit* dan *cost effectiveness*-nya (Hasan, 2008:180).

Mengingat bahwa fokus evaluasi implementasi adalah pada proses, maka evaluasi meliputi evaluasi terhadap dokumen pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. Bila mencermati secara lebih mendalam, maka pendekatan yang digunakan mengacu pada pendekatan proses dimana tampilannya adalah dalam bentuk kualitatif. Dengan demikian maka model evaluasi implementasi yang dipilih adalah kelompok model kualitatif.

Sebaliknya bila mendalami karakteristik dari kurikulum itu sendiri, dimana KTSP SMK mengacu pada model kurikulum berbasis kompetensi, maka rujukannya adalah pada keterandalan implementasi yang terukur. Kemudian menilik pada pemberlakuan standar proses oleh BSNP yang juga harus dipenuhi oleh kurikulum. Pada posisi ini pendekatan kriteria yang digunakan adalah menggunakan pendekatan *pre-ordinate* dan *fidelity*.

Mengingat bahwa orientasi evaluasi implementasi kurikulum dalam pendidikan kejuruan ini mengacu pada perbandingan kurikulum yang direncanakan (*intended*) dengan kurikulum yang dilaksanakan (*observed*), maka bisa ditentukan model evaluasi yang akan digunakan. Setidaknya ada tiga model yang bisa digunakan dalam evaluasi implementasi kurikulum di SMK, yakni model *Countenance* dari Stake, model CIPP, model 3P, dan model *Discrepancy* dari Provus. Pemilihan model ini juga harus mempertimbangkan standar-standar yang dikembangkan BSNP, sehingga model evaluasi implementasi kurikulum yang dipilih senantiasa berbasis standar.

### **Penentuan Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Teknik pengumpulan data dalam model evaluasi implementasi kurikulum ini dilakukan dengan berbagai teknik, yakni dengan teknik angket/kuesioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi, skala sikap dan tes. Sedangkan alat pengumpul data yang dikembangkan yakni melalui angket terstruktur, pedoman

wawancara, pedoman observasi, pedoman studi dokumentasi, dan dokumen tes (kelompok kuantitatif). Pada kelompok kualitatif rujukannya adalah pada kemampuan evaluator sebagai instrumen evaluasi kurikulum.

Sedangkan untuk analisis data merupakan metode yang dipakai dalam mengolah data baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif secara tepat sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan tentang data yang akurat. Analisis data dalam rancangan evaluasi kurikulum semisal model *countenance* menggunakan studi komparasi (*congruence*) antara kondisi ideal (*logical contingency*) dan hasil evaluasi nyata (*empirical contingency*) dengan prinsip kesesuaian (*congruence*).

Pengujian konsistensi alat pengumpulan data diantara data-data intent, rasional dan empirik pada setiap level perlu ditekankan, sehingga diperlukan instrumen yang memiliki ketepatan, validitas dan reliabilitas. Kemudian hasilnya dihubungkan dengan standar-standar yang absolut dan relatif, untuk membuat pertimbangan (*judgement*) secara keseluruhan dari perbandingan implementasi kurikulum yang diobservasi dengan kriteria standar-standar untuk setiap level (*criteria of technical adequacy*).

### **C. KESIMPULAN**

Posisi implementasi kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan teknologi dan kejuruan amat signifikan dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi secara teoritik, praktik dan sikap kerja sesuai standar kompetensi yang berlaku di dunia industri. Untuk melihat efektivitas dan nilai keberhasilan dari implementasi kurikulum yang digunakan, maka sekolah mutlak melakukan tindakan evaluasi sebagai tuntutan yang disyaratkan dalam pemberlakuan KTSP. Terdapat bermacam alternatif model evaluasi implementasi yang bisa digunakan baik dalam kelompok model kuantitatif, kualitatif maupun gabungan dari kelompok model tersebut.

Berkenaan dengan evaluasi terhadap implementasi, maka penekanan model adalah pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah dan guru. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan kriteria sebagai kerangka awal pertimbangan

pemilihan model. Terdapat empat kriteria yang biasa digunakan, yakni *pre-ordinate*, *fidelity*, *mutually adaptive* dan *process*. Langkah selanjutnya adalah penentuan lingkup dan tahapan evaluasi implementasi kurikulum, yang dilanjutkan dengan penentuan alternatif model yang dipilih. Dalam pelaksanaannya, model evaluasi ini mengacu pada standar-standar pendidikan yang digunakan (berbasis standar). Dalam pengumpulan data evaluasi, banyak teknik yang digunakan, semisal angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, tes maupun pedoman dokumentasi yang hasilnya bisa diolah menggunakan statistik. Untuk data kualitatif, maka instrumen yang utama adalah evaluator sendiri yang kemudian bisa memberi analisis dan pertimbangan tentang implementasi kurikulum. Langkah akhir adalah memberi simpulan dan rekomendasi terkait hasil evaluasi implementasi kurikulum yang digunakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Guba, EG., Lincoln, YS (1981). *Effective evaluation*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Hasan, Said H. (2008). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sukmadinata, N.S. (2004). *Kurikulum dan pembelajaran kompetensi*. Bandung: Kesuma Karya.
- Sukanto. (1988). *Perencanaan dan pengembangan kurikulum PTK*. Jakarta: P2LPTK Depdikbud.
- Tyler, R.W. (1949). *Basic principles of curriculum and instruction*. Chicago: University of Chicago Press
- UU Nomor 20 tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: BSNP.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: BSNP.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: BSNP.

## BIO DATA

Penulis 1

### Identitas Pribadi

1	Nama lengkap	Dedy Suryadi, M.Pd.
2	Tempat, tanggal lahir	Sukabumi, 26 Juli 1967
3	NIP	19670726 199703 1 001
4	Pangkat/Golongan/Jabatan	Penata/III-d/Lektor
5	Unit Kerja	Jurusan Pendidikan Teknik Sipil FPTK Universitas Pendidikan Indonesia
6	Alamat rumah	Jl. Pacuan Kuda Arcamanik I No. 12 B Bandung
7	Nomor telepon	Kantor: 2013163, Rumah: 7211365, HP: 0817208776
8	E-mail	<a href="mailto:dedyasmi@yahoo.co.id">dedyasmi@yahoo.co.id</a>

Penulis 2

### Identitas Pribadi

1	Nama lengkap	Drs. Sukadi, M.Pd., MT.
2	Tempat, tanggal lahir	Indramayu, 10 September 1964
3	NIP	19640910 199101 1002
4	Pangkat/Golongan/Jabatan	Penata/III-d/Lektor
5	Unit Kerja	Jurusan Pendidikan Teknik Sipil FPTK Universitas Pendidikan Indonesia
6	Alamat rumah	Komplek Perumahan Sariwangi Cihanjuang Kab. Bandung Barat
7	Nomor telepon	Kantor: 2013163, HP: 082120037918
8	E-mail	<a href="mailto:tologia@yahoo.co.id">tologia@yahoo.co.id</a>

**ANALISIS KEBUTUHAN  
PENGAJARAN BAHASA INGGRIS DI SMK**

**Oleh: Estu Widodo**

**ABSTRAK**

Keefektifan pendidikan telah menjadi kata kunci dalam berbagai kebijakan dan merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai oleh seluruh jenjang pendidikan. Peneliti melihat pentingnya meningkatkan keefektifan pengajaran bahasa Inggris di SMK untuk membuat alumni SMK mampu bersaing. Peneliti melakukan analisis kebutuhan terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris di 9 SMK yang ada di tiga kota dan kabupaten di Jawa Timur dengan mewawancari 10 guru, melakukan observasi, melakukan analisis buku teks, dan analisis dokumen. Dari penelitian diperoleh informasi mengenai perspektif berbagai pihak mengenai bahasa Inggris kejuruan, kompetensi berbahasa Inggris siswa dan lulusan SMK dari perspektif dunia industry, serta kemungkinan dilakukannya kolaborasi antara sekolah dan dunia industri/bisnis. Disajikan pula hasil analisis isi terhadap buku teks bahasa Inggris yang digunakan di SMK.

Kata-kata kunci: keefektifan, analisis kebutuhan, bahasa Inggris kejuruan, kolaborasi

**PENDAHULUAN**

Keefektifan pendidikan telah menjadi kata kunci dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan proses belajar. Bahkan bisa dikatakan bahwa pada hakekatnya keefektifan merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai oleh seluruh jenjang pendidikan. Terlebih lagi pada era desentralisasi dan deregulasi, keefektifan pendidikan merupakan salah satu aspek dari kualitas pendidikan sebagai tema sentral dari berbagai kebijakan. Oleh karena itulah pihak pemangku kepentingan atau *stakeholders* diharapkan untuk secara terus menerus menilai efisiensi, keefektifan, dan akuntabilitas.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, peneliti melihat pentingnya meningkatkan keefektifan pengajaran bahasa Inggris di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tuntutan terhadap alumni SMK yang terampil dari perusahaan



multinasional, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan alumni SMK dalam kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Dalam sebuah wawancara dengan peneliti, manajer produksi untuk wilayah Asia Tenggara dari General Electric (GE) pernah mengatakan bahwa kemampuan bahasa Inggris mutlak diperlukan sehingga perusahaannya merekrut minimal alumni Diploma 3. Audry Hutapea seorang sekretaris perusahaan multinasional di Surabaya yang bergerak di bidang konstruksi menyatakan bahwa sebagian besar karyawannya adalah lulusan SMK. Kemampuan untuk bisa berbahasa Inggris sangat dibutuhkan, meskipun terbatas secara pasif, karena buku manual kerja yang ada semuanya ditulis dalam bahasa Inggris.

Apa yang pernah diungkapkan oleh beberapa guru SMK jurusan Perhotelan juga mengejutkan dan menunjukkan betapa pentingnya kemampuan berbahasa Inggris bagi siswa SMK. Dikatakan bahwa di lapangan banyak siswa yang tidak diperkenankan untuk praktek di ruang *front office* hotel dengan alasan yang mereka katakana, “Jangankan dengan bahasa Inggris, dengan bahasa mereka sendiri para siswa itu masih belum mampu berkomunikasi dengan baik.”

Perhatian terhadap pendidikan kejuruan di Indonesia bukanlah barang baru, terlebih lagi di beberapa negara maju. Bahkan selama beberapa dasa warsa terakhir, harapan untuk meningkatkan keefektifan pendidikan kejuruan telah muncul di Eropa dan Amerika Serikat karena melihat persaingan global yang semakin ketat yang mereka pun berfikir untuk menghasilkan tenaga kerja yang cakap. Ekspektasi dan tuntutan mereka yang sangat besar, yang dikenal dengan istilah *vocational imperative* telah direspon dengan penuh antusias oleh mereka yang berada di dunia industri dan di lembaga-lembaga pendidikan. Di negara-negara maju, terdapat cukup banyak lembaga pendidikan yang membangun kolaborasi dan kerja sama yang sangat intensif dengan dunia industri, lembaga riset, dan masyarakat secara umum.

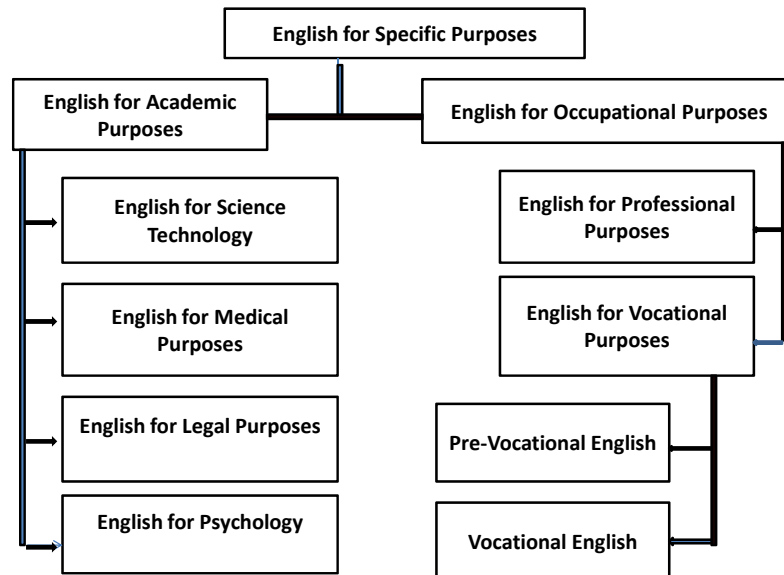
Oleh karena itulah peneliti melihat pentingnya meningkatkan keefektifan pengajaran bahasa Inggris di SMK untuk membuat alumni SMK mampu bersaing. Peneliti melakukan analisis kebutuhan terkait dengan pembelajaran bahasa

Inggris di 9 SMK yang ada di tiga kota dan kabupaten di Jawa Timur dengan mewawancari 10 guru, melakukan observasi, melakukan analisis buku teks, dan analisis dokumen.

## PEMBAHASAN

### ***English for Specific Purposes dan Vocational English***

Ciri utama bahasa Inggris kejuruan atau *Vocational English* (VE) atau *English for Specific Purposes* (ESP) adalah pengajaran dan materi yang diberikan kepada siswa. Oleh karena itu semua yang berkaitan dengan VE harus berdasarkan pada analisis kebutuhan (*needs analysis*) (Evan, 2001). Bahkan untuk menjawab 'apa yang dibutuhkan oleh siswa?', "keterampilan apa yang perlu mereka kuasai dan seberapa bagus?" dan "bahasa yang seperti apakah yang perlu mereka kuasai agar mereka bisa memahami sesuatu dan menghasilkan?" harus muncul sedini mungkin.



Gambar 1: English for Specific Purposes

Terkait dengan praktik dan penelitian ESP, penting sekali untuk memahami empat definisi yang ada dalam literatur dan digunakan oleh sebagian besar peneliti ESP. Hutchinson and Waters (1987) dan Streven (1988) sepakat bahwa ada empat karakteristik ESP yang harus dipahami oleh mereka yang terlibat dalam pembelajaran dan penelitian ESP. Pertama: 1). ESP dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus dari pembelajar, 2). ESP berhubungan dengan *content* dari disiplin ilmu, pekerjaan, kegiatan tertentu, 3). ESP adalah bahasa yang sesuai dari sisi sintaks, *lexis*, *discourse*, simantik, dst., dan 4). ESP berbeda dengan *General English* (GE).

Sementara itu Robinson (1991) membuat dua criteria ESP: 1). Biasanya mengarah pada tujuan. Siswa mempelajarinya bukan karena minat mereka terhadap bahasa tersebut maupun budayanya, tapi untuk keperluan mereka dalam studi maupun bekerja, dan 2). Pelajaran ESP didasarkan pada analisis kebutuhan. Robinson juga menyatakan pentingnya kolaborasi dan negosiasi di antara para pengelola, guru, sponsor, dan siswa.

Bacha dan Bahous (2008) melaporkan penelitiannya mengenai kerja sama antara mahasiswa jurusan bisnis dan pihak lembaga pendidikan untuk mengetahui jenis *writing skill* seperti apa yang dibutuhkan agar pengajaran menulis mereka menjadi efektif. Selanjutnya diketahui bahwa siswa memperoleh manfaat dari kerja sama antara dunia bisnis dengan pihak lembaga dalam pengajaran bahasa Inggris.

### **Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para guru bahasa Inggris di SMK dan staf/pegawai di hotel dan industri, ada beberapa hal yang terungkap:

Pertama, semua guru bahasa Inggris mengakui bahwa pengajaran bahasa Inggris yang sesuai dengan jurusan siswa adalah sangat penting. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa pengajaran bahasa Inggris kejuruan (VE/ESP) sangat terbatas bahkan di beberapa sekolah bisa dikatakan tidak berlangsung.

Dari wawancara terhadap para guru dan staf di dunia industry sebagai sampel dalam rangka mengidentifikasi pengajaran bahasa Inggris kejuruan, kebutuhan

bahasa Inggris di dunia industri/bisnis, dan aspek-aspek yang seharusnya ada di antara dunia sekolah dan industri/bisnis, dibuat tabulasi sebagai berikut.

KOMPONEN	GURU BAHASA INGGRIS	
	%Penting /Tidak	% Terjadi/Tidak
Bahasa Inggris khusus sekolah kejuruan	100/0	12.5/87.5
Bahasa Inggris khusus untuk beberapa program yang berbeda	62.5/37.5	12.5/87.5
Bahasa Inggris yang sesuai untuk tempat kerja kelak	60.0/40.0	25.0/75.0
Kompetensi siswa dalam berbahasa Inggris	87.5/12.5	25.0/75.0
Buku-buku yang sesuai dengan jurusan siswa	25.0/75	12.5/87.5
Istilah-istilah yang sesuai dengan dunia kerja yang sesuai dengan jurusan siswa	100/0	12.5/87.5
Jenis-jenis percakapan yang digunakan di tempat kerja	50.0/50.0	12.5/87.5
Kolaborasi antara guru bahasa Inggris dengan <i>Subject Specialists</i>	25.0/75.0	0/100
Kolaborasi antara guru Bahasa Inggris dengan pihak-pihak di dunia industry/bisnis	63.5/37.5	0/100

Di sisi lain, dari sudut pandang pihak-pihak di dunia industry/bisnis, pentingnya bahasa Inggris untuk SMK juga terungkap sebagai berikut.

Komponen	Staf dari Industri/Bisnis	
	%Penting/Tidak	% Terjadi/Tidak
Pentingnya kecakapan berbahasa Inggris bagi alumni SMK	87.5/12.5	37.5/62.5

Tenaga kerja yang berasal dari alumni SMK	62.5/37.5	62.5/37.5
Kolaborasi antara sekolah dan industry/bisnis	87.5/12.5	50.0/50.0

Informasi yang bisa disarikan dari pihak-pihak yang berada di dunia industri/bisnis bisa dikategorikan menjadi beberapa aspek:

- (1). Pentingnya GE dan VE/ESP
- (2). Kompetensi lulusan SMK dari perspektif dunia industri
- (3). Kolaborasi antara sekolah dan industri/bisnis.

Analisis isi terhadap Buku Teks bahasa Inggris yang banyak digunakan dan 3 penebit yang berbeda dilihat dari aspek VE/ESP:

Komponen	Buku 1 (19 bab)		Buku 2 (7 bab)		Buku 3 (8 bab)	
	Umum	Khusus	Umum	Khusus	Umum	Khusus
Reading Text	69%	31%	86%	14%	100%	-
Vocabulary	76%	24%	86%	14%	85%	15%
Speaking Skill	79%	21%	90%	10%	85%	15%

Terkait dengan buku yang pertama, bahasa Inggris yang disajikan sebagian besar bersifat sangat umum. Harus diakui memang bahwa GE pun diperlukan para siswa dan alumni untuk bisa berkomunikasi. Terdapat beberapa bab yang secara langsung berkaitan dengan dunia teknologi seperti “How to Make Phone Calls without a telephone”, “Traffic Control”, “How Cell Phones work”, dan “W’s Peppermint Expectorant”.

Berhubungan dengan *speaking skill*, ciri-ciri dialog pada prinsipnya sudah bisa meningkatkan kemampuan berbicara siswa namun jelas sekali bahwa buku

tersebut belum menyajikan dialog-dialog khusus yang sesuai dengan konteks, khususnya dunia kerja.

Buku kedua bahkan bersifat jauh lebih umum dibandingkan dengan buku yang pertama. Namun demikian, yang membuat buku ini berbeda dengan buku GE adalah fokusnya terhadap materi menulis surat (*business letter*) yang cukup mendominasi isi buku khususnya berhubungan dengan *writing skill*.

Buku ketiga, seperti halnya buku kedua, sebagian besar bersifat umum. Lebih khusus lagi, *reading text* yang ada tidak ada hubungannya dengan jurusan yang dipilih siswa meskipun kata-kata *vocational* beberapa kali muncul di dalam teks. Seperti halnya pada komponen kosa kata (*vocabulary*), komponen *speaking skill* bersifat sangat umum.

Setelah dicermati secara seksama, terdapat kesamaan pada buku-buku tersebut, yaitu memberikan ketrampilan untuk memahami dan menulis *business letters* dan *memorandum*. Bahkan harus diakui kedua hal itulah satu-satunya aspek *vocational* yang disajikan pada buku 3, itupun hanya dibahas sekali pada satu unit.

Dari temuan di atas dan analisis dokumen lainnya, ditemukan bahwa:

*Pertama*, baik guru maupun siswa menyadari bahwa bahasa Inggris sangatlah penting untuk masa depan mereka jika melihat persaingan di dunia kerja, terlebih khusus lagi dengan adanya perdagangan bebas.

*Kedua*, kebijakan pemerintah untuk mengembangkan SMK secara kualitatif dan kuantitatif niscaya membuat pihak sekolah lebih jernih dan sungguh-sungguh dalam melihat tingkat kebutuhan bahasa Inggris bagi alumni SMK. Kebijakan pemerintah mengenai program dwi bahasa atau *bilingual* dan RSBI di SMK juga menuntut kemampuan untuk berbahasa Inggris SMK baik di pihak guru maupun siswa.

*Ketiga*, ironisnya, kesadaran mengenai pentingnya untuk memiliki kecakapan berbahasa Inggris yang sesuai dengan dunia kerja atau jurusan tersebut tidak dengan diikuti dengan bahasa Inggris kejuruan atau ESP. Sebaliknya, para siswa SMK memperoleh GE dengan porsi yang cukup besar sebagaimana yang diperoleh siswa SMA. Bahkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dari

Kementerian Pendidikan bisa dikatakan tidak berfungsi. Terdapat tiga alasan untuk hal tersebut: a). buku bahasa Inggris yang sesuai dengan jurusan siswa tidak tersedia, b). Sebagian besar guru bahasa Inggris tidak memahami pelajaran *content* yang memuat istilah-istilah atau kosa kata khusus, dan c). Bahasa Inggris yang diujikan pada ujian nasional adalah GE.

*Keempat*, selama program pemagangan beberapa siswa menemukan bahwa VE, bahkan GE, tidaklah diperlukan. Namun demikian, tidak sedikit pula yang mendapati bahwa bahasa Inggris mutlak diperlukan, bahkan pada saat wawancara di hari pertama. Siswa yang mempunyai kemampuan berbahasa Inggris dengan baik juga bisa belajar banyak selama masa pemagangan karena memperoleh posisi yang penting. Pada pemagangan di hotel berbintang, misalnya, siswa dengan kemampuan bahasa Inggris bagus diperkenankan untuk berada di *front office* yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan untuk berinteraksi dengan tamu-tamu penting, termasuk orang asing.

*Kelima*, kemampuan berbahasa Inggris dengan baik semakin diperlukan untuk alumni SMK karena pasar kerja yang semakin luas di Indonesia dan negara-negara lain yang bisa mereka masuki. Dengan kata lain, akan jauh lebih mudah bagi alumni SMK yang mempunyai kecakapan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris untuk memperoleh pekerjaan.

*Keenam*, hingga saat ini sebagian besar guru bahasa Inggris belum pernah berfikir untuk berkolaborasi dengan guru-guru non bahasa Inggris atau guru yang mengajar *content* sesuai dengan jurusan siswa untuk memperoleh informasi penting tentang istilah-istilah khusus yang akan membantu mereka memperoleh materi pengajaran yang penting bagi siswa mereka.

*Ketujuh*, sebagian besar guru bahasa Inggris juga belum pernah berfikir untuk berkolaborasi dengan dunia industri/bisnis untuk saling berbagai informasi mengenai bahasa Inggris yang digunakan di dunia kerja, meskipun mereka menyadari bahwa para siswa dengan kemampuan bahasa Inggris terbatas menemui kesulitan di beberapa jenis industri.

*Kedelapan*, beberapa sekolah telah berencana untuk menulis buku bahasa Inggris khusus (ESP) bagi siswa mereka sehingga para siswa memperoleh bahasa Inggris yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Akhirnya dari dunia industri, khususnya dari dunia perhotelan yang peneliti ambil sebagai sampel, terdapat sangat banyak bahasa Inggris yang secara khusus digunakan di dunia kerja yang perlu diajarkan di SMK. Oleh karena itu kolaborasi antara dunia industry/bisnis dengan SMK sudah sangat mendesak untuk dilakukan demi pengajaran bahasa Inggris yang efektif di SMK. Dengan kata lain, para guru bahasa Inggris dituntut untuk duduk bersama dan bekerja sama dengan orang yang tahu banyak atau *subject specialist* tentang bidang yang dipelajari siswa, serta orang-orang yang ada di dunia industri/bisnis.

Kolaborasi bisa dimulai sejak proses merancang materi, proses belajar mengajar, hingga praktik di tempat pemagangan. Mereka juga perlu bekerja sama merancang sistem evaluasi hingga pelaksanaannya.

## **KESIMPULAN**

Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengajaran bahasa Inggris agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kolaborasi antara guru, *subject specialist*, dan dunia industri/bisnis sudah saatnya dilakukan dengan lebih terencana dan menyeluruh. Perlu keterbukaan dari semua pihak agar terjadi interaksi yang produktif.

---

Penulis: Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Kopertis Wilayah VII, dipekerjakan di Univ. Muhammadiyah Malang. Alumni Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Jember tahun 1991 dengan Ikatan Dinas. S2 Pengkajian Amerika UGM dengan tesis mengenai Perkembangan Industri Mobil di Amerika Serikat tahun 1900-1960an beserta dampak sosialnya. Pernah mengikuti Konferensi Internasional Guru Bahasa Inggris di California tahun 2004. Kunjungan di beberapa lembaga pendidikan kejuruan, lembaga riset, dan industry di Victoria, Australia, tahun 2008-2009. Sejak tahun 2010 sampai sekarang aktif melakukan penelitian, khususnya terkait dengan pengajaran bahasa Inggris di SMK

Telp.: 081 555 02323/ 08121 6711178



Email: estu\_wid@yahoo.com

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bacha, N. Nola & Bahous, R. 2008. *Contrasting views of business Students' Writing Needs in an EFL environment*. English for Specific Purposes 27 pp. 121-128. Science Direct.
- Evans, Dudley T. 2001. *English for Specific Purposes* in Ronald Carter & David Nunan (Ed.). 2001. The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages. Cambridge University Press.
- Hutchinson, T., & Waters, A. 1987. *English for Specific Purposes: A learningcentered approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Robinson, P. 1991. *ESP Today: a Practitioner's Guide*. Hemel Hempstead: Prentice Hall International.
- Strevens, P. 1988. *ESP after twenty years: a re-appraisal*. In M Tickoo (Eds), *ESP: State of the Art*. Singapore: SEAMEO Regional Language Centre.

Lampiran: Instrumen untuk wawancara semi terstruktur bagi guru bahasa Inggris

Pertanyaan:

1. How is the role of English at SMK?
2. Does the development of SMKs in this country affect the English teaching at SMKs?
3. Is the English given to the students relevant to the content subjects they study?
4. Do students use English for Specific Purposes?
5. Do SMK students needs good English skills when they carry out internship program?

6. Is English skill really required upon completion of study?
7. Is there any collaboration between English teachers and content or subject specific teachers?
8. How important is the collaboration between English teachers and content or subject specific teachers?
9. Is there any collaboration between English teachers and the industry where the students perform internship activities to know English needed in the workplace?
10. How important is the collaboration between English teachers and the industries?

**Pertanyaan untuk Industry/Bisnis (Semi terstruktur)**

1. Seberapa penting bahasa Inggris di tempat (industry) Bapak/Ibu?
2. Bahasa-bahasa Inggris seperti apakah yang digunakan di tempat Bapak/Ibu?
3. Apakah ada istilah-istilah atau kosa kata khusus di industry/bisnis ini?

# REDESAIN SISTEM PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL

TRIWATI RAHAYU

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

triwতিরাহয়ু@ymail.com

## ABSTRAK

Pada hakikatnya sekolah berstandar internasional (SBI) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia setaraf dengan sekolah yang ada di negara maju lainnya. Upaya ini memang baik, namun dengan kebijakan dalam pemakaian bahasa pengantar yang bercirikan bahasa Inggris akan menyebabkan bahasa Indonesia terpinggirkan. Padahal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 bab III bagian kesatu pasal 25 ayat 3 dikatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Berdasarkan fungsi tersebut, bahasa Indonesia dapat untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, redesain pembelajaran pada sekolah berstandar Internasional harus dilakukan agar siswa tetap berpegang teguh pada kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. SBI tidak ditekankan pada penguasaan bahasa Inggris saja tetapi harus dilihat pada kurikulum dan kualitas pembelajarannya.

Kata kunci: redesain, bahasa, internasional

## 1. Pendahuluan

Pada hakikatnya sekolah berstandar internasional (SBI) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia setaraf dengan sekolah yang ada di negara maju lainnya. Upaya ini memang baik dan kalau berhasil akan menempatkan mutu pendidikan di Indonesia sejajar dengan negara –negara yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), yaitu sebuah organisasi kerjasama antarnegara dalam bidang ekonomi dan pengembangan.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas dikatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dilihat perkembangan pembentukan sekolah berstandar internasional yang cukup pesat. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan negara Indonesia, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga dikemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Hal inilah permasalahan muncul dengan adanya kebijakan dalam pemakaian bahasa pengantar di sekolah berstandar internasional yang bercirikan bahasa Inggris. Di satu sisi tujuan SBI sangat baik, tetapi di sisi lain cukup banyak dampak negatifnya. Padahal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 bab III bagian kesatu pasal 25 ayat 3 dikatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Hal ini diperkuat pada Pasal 29 ayat 1 bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Walaupun pada ayat 2 dikatakan bahwa bahasa pengantar dapat menggunakan bahasa asing untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik, namun dampak yang diperoleh akan lebih banyak negatifnya.

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Berdasarkan fungsi tersebut, bahasa Indonesia dapat untuk membentuk karakter bangsa

Indonesia. Oleh karena itu, redesain pembelajaran pada sekolah berstandar Internasional harus dilakukan agar siswa tetap berpegang teguh pada kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Apabila SBI mengharapkan agar peserta didiknya mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik, pembedaan pembelajaran bahasa Inggrislah yang dilakukan. Bahasa Indonesia jangan sampai di kesampingkan dengan akibat memudarnya rasa bangga dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. hal ini merupakan ancaman bagi identitas bangsa.

## **2. Pembahasan**

### **a. Pembelajaran pada Sekolah Berstandar Internasional**

Pembelajaran pada sekolah berstandar Internasional adalah sekolah yang menggunakan kurikulum nasional yang dikombinasikan dengan kurikulum dari negara lain yang lebih maju, sedangkan sekolah internasional adalah sekolah yang ada di Indonesia namun kurikulumnya berdasarkan kurikulum standar negara tertentu. Selain itu, kelas internasional adalah beberapa kelas di dalam sekolah standar nasional yang dikelola dengan kurikulum nasional dan modifikasi kurikulum asing(Sutama,2008:209). Pada dasarnya SBI bertujuan untuk mengembangkan pebelajar semaksimal mungkin melalui fasilitas yang dilaksanakan dalam proses pendidikan yang bermartabat, kreatif, inovatif, dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan pebelajar. Kalau melihat tujuan di atas, proses pembelajaran lebih ditekankan pada penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang harus memiliki daya saing dalam forum internasional.

SBI melaksanakan kurikulum nasional ditambah dengan salah satu unsur dari salah satu anggota OECD yang belum ada dalam kurikulum nasional. Unsur yang diadopsi dari luar tidak distandarkan sehingga antara sekolah yang satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya redesain dalam kurikulum, khususnya tambahan dari sekolah internasional. Ini sangat penting dikaji lebih mendalam agar konsep-konsep standar internasional tidak bertentangan dengan konsep standar nasional.

Keluaran SBI diharapkan dapat melanjutkan pendidikan, bekerja, dan bersaing di dalam negeri atau luar negeri. Berdasarkan tujuan dan manfaatnya, SBI dapat dijadikan proyek percontohan bagi sekolah SBN lainnya. Namun, biaya yang dikeluarkan juga sangat tinggi, sehingga SBI hanya dapat dinikmati oleh pebelajar yang memiliki kecerdasan dan kemampuan finansial yang tinggi.

Penggunaan bahasa pengantar berbahasa Inggris di satu sisi dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 29, ayat 2 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Bab VII, Pasal 33, ayat 3. Pada undang-undang tersebut dikatakan bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah apabila bertujuan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing pebelajar. Aturan tersebut memberi kesempatan seluas-luasnya untuk pengembangan pembelajaran bahasa Inggris. Hakikatnya bahasa merupakan keterampilan sehingga semakin sering dipergunakan semakin terampilah pebelajar menguasai bahasa Inggris.

#### **b. Dampak Penggunaan Bahasa Inggris sebagai Bahasa Pengantar di Sekolah**

Lingkungan bahasa sangat berpengaruh terhadap penguasaan berbahasa, baik pengaruh pada kemampuan berbahasanya maupun merasuknya budaya dari bahasa yang dipelajari. Tanpa disadari budaya asing akan mempengaruhi segala sendi kehidupan pebelajar. Sebagai generasi penerus bangsa akan sangat berbahaya apabila budaya asing sudah merasuki generasi bangsa Indonesia.

Sekarang ini, budaya asing sudah mewabah di Indonesia. hal ini dapat dilihat pada budaya bahasa, makan, pesta, berpakaian, bersikap, pola pikir, dan lain sebagainya. Apabila tidak terbendung, maka budaya Indonesia akan terkikis dan akan semakin jauh dari akar budaya Indonesia.

Kenyataan yang sangat memprihatinkan terlihat pada kepribadian masyarakat yang individual, materialistik, kapitalis, dan bebas. Perilaku yang jauh dari jati diri bangsa Indonesia sudah membudaya. Salah satu faktornya karena masyarakat sudah menganggap budaya asing

lebih baik dibanding budaya Indonesia. Masyarakat menganggap dengan mempelajari bahasa Inggris, masa depan akan menjadi cerah. Dari sinilah dampak pemakaian bahasa Inggris terlihat. Bahasa membentuk cara berpikir penutur dan petuturnya. Dengan bahasa penutur akan terpengaruh dengan pandangan berpikirnya sesuai dengan bahasa yang dipergunakan. Inilah yang dikawatirkan apabila bahasa pengantar berbahasa Inggris akan menyebabkan pola pikir pebelajar juga akan terpola keinggris-inggrisan.

Di sisi lain dengan adanya aturan di atas akan membuat pemakaian bahasa Indonesia secara formal oleh pebelajar akan semakin berkurang. Bahasa Indonesia hanya dipelajari pada mata pelajaran bahasa Indonesia. dalam kehidupan sehari-hari pebelajar akan banyak mempergunakan ragam bahasa informal/santai, slang, dan ragam bahasa gaul. Di lingkungan rumah dan masyarakat, pebelajar akan banyak memakai bahasa daerah masing-masing. Dari sinilah pengembalian bahasa pengantar berbahasa Indonesia akan berdampak lebih baik untuk membendung pengaruh asing dan ikut mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

### **c. Perkembangan Bahasa Indonesia**

Pada ikrar Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia lahir dan menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu identitas bangsa, bahasa Indonesia telah mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang bahasa, suku, dan sosial budaya.

Dari berbagai budaya bangsa di atas, Bahasa Indonesia mempunyai sejarah perkembangan yang panjang. Berdasarkan sejarah perkembangan bahasa Melayu, bahasa penghubung antarsuku bangsa di wilayah nusantara memakai bahasa Melayu. Hal ini dapat dibuktikan dari seorang ahli sejarah Cina I-Tsing, yang belajar agama Budha di Sriwijaya yang mengatakan bahwa bahasa Koen-louen dipakai di Sriwijaya (Pusat Bahasa: 2007:137).

Pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda diikrarkan dengan pernyataan tekad sebagai berikut.

1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pernyataan yang ketiga di atas merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan juga sebagai bahasa nasional. Dalam perjalanan sejarah bahasa Indonesia, pada tahun 1938 di Solo telah terlaksana Kongres Bahasa Indonesia I yang membahas masalah sejarah bahasa Indonesia, bahasa Indonesia di dalam pergaulan, persuratkabaran, penyesuaian kata asing, dsb.. Pada masa penjajahan Jepang, bahasa Belanda dilarang dipakai dan bahasa Indonesia menggantikan bahasa Belanda sebagai alat komunikasi resmi (Efendi, 2007: 68). Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 telah disahkan dan pada Bab XV, Pasal 36 dinyatakan bahwa " Bahasa negara adalah bahasa Indonesia".

Dari peristiwa yang terjadi saat ini, perubahan dalam bahasa Indonesia terletak pada bertambah banyaknya kosakata dan terbukti dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga sudah memuat hampir 100.000 lema. Perubahan ini terjadi karena sifatnya yang terbuka terutama pada peristilahan bahasa Indonesia. Keterbukaan ini merupakan dampak dari globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejak saat itu, perkembangan bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang sebagai sarana komunikasi dalam segala bidang. Bahasa Indonesia memiliki potensi sebagai alat perubahan sosial, yaitu (a) bahasa Indonesia sudah terbukti dapat mempersatukan bangsa yang majemuk; (b) bahasa Indonesia memiliki sifat demokratis; (c) bahasa Indonesia bersifat terbuka; dan (d) bahasa Indonesia sudah mulai mengglobal (Kurniawan, 2011:6).

Sifat inilah yang mampu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Perangkat kaidah yang berupa *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, *Pedoman Pembentukan Istilah*, dan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* telah ada. Peraturan perundang-undangan juga sudah diberlakukan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang



penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya.

Saat ini, bahasa Indonesia sedang diusulkan menjadi bahasa pengantar di ASEAN karena hampir 45% rakyat ASEAN memakai bahasa Melayu dan 40% berbicara memakai bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

Namun, prospek yang cerah untuk menuju sebagai bahasa internasional ini justru tidak didukung sepenuhnya dengan adanya bahasa pengantar berbahasa Inggris di SBI. Padahal, pebelajar mempelajari bahasa Indonesia dalam ragam baku lebih banyak diterapkan dalam proses belajar mengajar. Kenyataan inilah yang perlu diredesain lagi khususnya pada aturan bahasa pengantar.

#### **d. Redesain Pembelajaran pada SBI**

Pendidikan merupakan alat kebangkitan bangsa untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran. Tanpa pendidikan yang baik akan menimbulkan krisis multidemensi, dan jiwa nasionalisme setiap komponen bangsa akan mengalami penurunan.

Salah satu upaya pemerintah untuk membentuk karakter bangsa yang mulai melemah di atas melalui Kementrian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pengembangan kurikulum pendidikan melalui pendidikan karakter. Melalui pendidikan karakter, peserta didik diharapkan mampu meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.

Namun pendidikan karakter ini tidak akan berhasil tanpa perencanaan secara holistik. Karakter ini akan dimiliki pebelajar apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mengubah bahasa pengantar pada SBI harus segera dibenahi agar tujuan bangsa Indonesia membentuk watak bangsa Indonesia dapat terwujud. Pebelajar SBI sebagai generasi

muda yang akan memimpin bangsa Indonesia ini harus benar-benar dipersiapkan sedini mungkin.

Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia akan menumbuhkan jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Kepribadian Indonesia dan jiwa nasionalisme dari pebelajar lebih penting diselamatkan dibandingkan dengan alasan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris pebelajar. Pembenahan ini merupakan salah satu cara yang diharapkan akan dapat mengatasi krisis karakter bangsa Indonesia.

### **3. Kesimpulan**

Sekolah berstandar internasional (SBI) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia setaraf dengan sekolah yang ada di negara maju lainnya. Upaya ini memang baik, namun dengan kebijakan dalam pemakaian bahasa pengantar yang bercirikan bahasa Inggris akan menyebabkan bahasa Indonesia berkurang dalam fungsinya.

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Berdasarkan fungsi tersebut, bahasa Indonesia dapat untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, redesain pembelajaran pada sekolah berstandar Internasional harus dilakukan agar siswa tetap berpegang teguh pada kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. SBI tidak ditekankan pada penguasaan bahasa Inggris saja tetapi harus dilihat pada kurikulum dan kualitas pembelajarannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Kurniawan, Khaerudin. 2011. "Menjadikan Bahasa Indonesia yang Bermartabat dan Jati Diri Bangsa" FPBS Universitas Pendidikan Indonesia.

Pusat Bahasa. 2007. Buku Praktis Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Sutama, I Made. 2008. "Sekolah Bertaraf Internasional(SBI) dalam Konteks Pemertahanan Bahasa Indonesia. PIBSI XXX.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

**EVALUASI INTEGRASI *SOFT SKILLS*  
DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN KEJURUAN:  
Ukuran Hasil Belajar Sebagai Indikator Keberhasilan Pengembangan Profesional**

**Sri Wening  
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta  
e-mail riwening@yahoo.co.id**

**Abstrak**

Berbagai perubahan yang relatif cepat dalam bidang ekonomi, dunia kerja, masyarakat maupun budaya telah mengubah cara pandang tentang ketenagakerjaan. Tenaga kerja perlu menguasai sejumlah kompetensi esensial yang relevan diberbagai tingkat dan kondisi pekerjaan. Muncul adanya perspektif bahwa tenaga kerja muda tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dasar namun penting menguasai *soft skills* untuk membantu beradaptasi pada situasi kerja dan pengembangan diri. Pendidikan kejuruan memiliki peranan strategis dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas, hal ini tentunya perlu diikuti dengan upaya pendidikan kejuruan yang berorientasi pada pasar kerja yang relatif mudah berubah. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus lebih menekankan pada penguasaan *soft skills* yang terintegrasi pada *hard skills*, agar lulusan memiliki kekuatan kepribadian dan bekerja secara efektif dan profesional di tempat kerja.

*Soft skills* yang telah tertuang dalam kurikulum 2010 sebagai pendidikan karakter, mestinya diikuti oleh upaya mendorong pendidik untuk mengintegrasikan *soft skills* ke dalam pembelajaran di sekolah kejuruan. Pembelajaran *soft skills* yang terintegrasi memungkinkan peserta didik melihat keterkaitan *soft skills* dengan mata pelajaran dalam hubungan yang berarti dan kontekstual dengan dunia kerja. Pelajaran menjadi lebih bermakna manakala peserta didik belajar menyatukan antara pengetahuan dan penerapannya diberbagai pengalaman belajar yang dirancang oleh pendidik, sekaligus akan memperoleh nilai lebih selama pembelajaran. Harapannya situasi pembelajaran yang dirancang pendidik mampu menumbuhkan perilaku kerja profesional peserta didik yang selaras dengan tuntutan eksternal.

Dalam rangka mewujudkan lulusan yang memiliki kekuatan kepribadian dan bekerja secara efektif dan profesional di tempat kerja, sebagai indikator keberhasilan belajar, perlu kiranya dilakukan evaluasi pengintegrasian *soft skills* dalam kurikulum sekolah kejuruan melalui mata pelajaran kelompok adaptif, normatif, dan produktif yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan melalui tahapan-tahapan mengkaji *soft skills* yang dianjurkan untuk dimiliki siswa sekolah menengah dalam rencana jangka panjang tahun 2010-2014 dan keterkaitannya dengan *soft skills* yang dominan dibutuhkan di lapangan kerja, menentukan konsep yang akan diintegrasikan, menganalisis *soft skills* yang terkandung dalam materi ajar yang akan dibelajarkan oleh pendidik, mengintegrasikan *soft skills* dalam pembelajaran, mengevaluasi ketercapaian, dan menganalisis faktor penghambat serta pendukung pengintegrasian *soft skills* dalam proses pembelajaran, diharapkan pembelajaran di sekolah kejuruan dapat mencapai keberhasilan untuk pengembangan profesional peserta didik yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Kata kunci: evaluasi, integrasi *soft skills*, pendidikan kejuruan

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat vital dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan khususnya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun kenyataannya dilapangan, menurut Mardan J Ardan (2009), tercatat pengangguran terdidik di Indonesia sekitar 1.146 juta orang yang lemah pada aspek atribut *soft skills*, yaitu bekerja keras, kepercayaan diri, memiliki visi kedepan, bekerja dalam tim, kepercayaan matang, berpikir analitis, mudah beradaptasi, bekerja dalam tekanan, cakap berbahasa Inggris, dan mengorganisasi pekerjaan. Oleh karena itu, perlu evaluasi sistem pendidikan nasional untuk mengejar pendidikan bermutu yang sesuai untuk pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat luas sebagai cerminan ukuran hasil belajar sebagai indikator keberhasilan pengembangan profesional.

Terjadinya perubahan yang relatif cepat dalam bidang ekonomi, dunia kerja, masyarakat maupun budaya telah mengubah cara pandang tentang ketenagakerjaan. Tenaga kerja perlu menguasai sejumlah kompetensi esensial yang relevan diberbagai tingkat dan kondisi pekerjaan. Muncul adanya perspektif bahwa tenaga kerja muda tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dasar namun penting menguasai *soft skills* untuk membantu beradaptasi pada situasi kerja dan pengembangan diri (<http://www.dol.gov/odep>).

Pendidikan kejuruan memiliki peranan strategis dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas, hal ini tentunya perlu diikuti dengan upaya pendidikan kejuruan yang berorientasi pada pasar kerja yang relatif mudah berubah. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus lebih menekankan pada penguasaan *soft skills* yang terintegrasi pada *hard skills*, agar lulusan memiliki kekuatan kepribadian dan bekerja secara efektif dan profesional di tempat kerja. Permasalahannya bahwa penguasaan *soft skills* peserta didik sekolah kejuruan belum menunjukkan sebagai bagian dari kepribadiannya.

Hasil pengamatan awal yang dilakukan pada dunia industri menyatakan bahwa peserta didik lulusan sekolah kejuruan belum mampu secara mandiri melakukan pekerjaan yang diberikan, mereka masih perlu dibawah bimbingan. Pengamatan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan *soft skills* masih terabaikan atau bila dituangkan dalam pembelajaran hasilnya masih jauh dari tujuan pembelajaran. Nampak bahwa, porsi

pembelajaran *soft skills* masih relatif kecil, sementara porsi *hard skills* hampir menguasai kurikulum. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pembelajaran *soft skills* khususnya pada kompetensi kejuruan menjadi kebutuhan dan memerlukan kajian. Dengan menggunakan data sekunder, dapat memberikan gambaran sejauhmana pendidikan kejuruan dalam kurikulumnya/mata pelajaran telah mengintegrasikan *soft skills* yang dilakukan oleh para guru kejuruan pada kelompok bidang mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif. Hasil ini sebagai gambaran pelaksanaan evaluasi sistem pendidikan dalam mengintegrasikan *soft skills* melalui pembelajaran di kelas.

## **B. Integrasi Soft Skills ke dalam Kurikulum/Mata Pelajaran**

Peran strategis pendidikan Kejuruan adalah menyiapkan tenaga kerja/sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti yang terungkap dalam struktur kurikulum pendidikan kejuruan, bahwa peserta didik disiapkan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilannya, harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan mengembangkan diri. Implikasi dari struktur kurikulum tersebut adalah mata pelajaran yang diberikan oleh sekolah kejuruan dibagi ke dalam tiga kelompok bidang yaitu kelompok normatif, adaptif dan produktif.

Keadaan ini hendaknya perlu diikuti dengan upaya program pendidikan yang tidak sekedar pendidikan demi pendidikan namun pendidikan kejuruan yang berorientasi pada pasar kerja yang relatif mudah berubah. Seseorang yang memiliki *hard skill* (*hard competencies*) belum tentu akan sukses dalam kariernya jika tidak ditunjang dengan *soft skills* (*soft competence*). Seseorang yang memiliki *hard skills* atau kecerdasan tanpa sikap mental yang berkembang (*soft skills*) memungkinkan tidak bersemangat dalam berkarya hanya karena menghadapi tantangan. Seseorang yang tidak memiliki rasa bangga pada pekerjaannya juga tidak akan termotivasi untuk berkarya, oleh karena itu sikap mental menentukan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan. *Soft skills* merupakan kesadaran yang membuat seseorang termotivasi dan pantang menyerah sehingga bisa menempatkan diri di tengah orang lain secara proporsional (*interpersonal*) dan

keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (*intra-personal skill*) yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal.

Proses pembelajaran hendaknya menekankan penguasaan *soft skills* yang terintegrasi pada *hard skills* (*skill* dan *knowledge*), agar lulusannya semakin kuat kepribadiaannya dan dapat bekerja secara efektif ditempat kerja. Pembelajaran *soft skills* sebagai bagian dari upaya pembentukan sikap profesional. Aspek *soft skills* merupakan unsur dari pendidikan karakter yang belum diperhatikan secara optimal bahkan cenderung terabaikan. Perlunya kemampuan interpersonal dalam kondisi dunia kerja yang kini banyak mengalami perubahan (Syahniar, 2008; 128). Penilaian dalam dunia kerja sekarang didasarkan pada tolok ukur baru, yakni penilaian yang tidak hanya berdasarkan tingkat kepandaian, pelatihan dan pengalaman kerja, tetapi juga berdasarkan seberapa baik seseorang mengelola diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain, atau disebut dengan kemampuan interpersonal. Tolok ukur ini semakin banyak diterapkan dalam seleksi, penilaian kerja, promosi jabatan, dan pemutusan hubungan kerja, dan untuk menentukan karyawan mana yang paling produktif dan karyawan yang cenderung kurang produktif.

Agar sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan, baik visi maupun misi sekolah kejuruan sangat penting adanya pengintegrasian *soft skills* melalui kurikulum/mata pelajaran yang dibelajarkan. Hal ini menjadi tantangan dunia pendidikan untuk mengintegrasikan *soft skills* secara terpadu dengan *hard skills* agar mampu menyiapkan SDM yang utuh memiliki kemampuan bekerja dan berkembang di masa depan, mampu berpikir, bersikap dan berbuat secara kreatif dalam situasi yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Menanamkan pendidikan *soft skills* melalui pembelajaran merupakan langkah yang tidak mudah, tetapi bukan berarti hal tersebut tidak mungkin. Menurut Herminarto Sofyan (2008) terdapat tiga model pembelajaran dari implementasi *soft skills* antara lain: 1) Model integratif, yaitu implementasi *soft skills* yang melekat dan terpadu dalam program kurikuler, kurikulum, mata pelajaran, proses pembelajaran. Keuntungan model ini biaya relatif murah, beban sekolah tidak bertambah, 2) Model komplementatif, yaitu implementasi *soft skills* ditambahkan ke dalam program pendidikan kurikuler dan struktur kurikulum yang ada, bukan dalam mata pelajaran. Model ini membutuhkan waktu

tersendiri atau waktu tambahan, biaya mahal, dan menambah beban tugas kepala sekolah guru, dan siswa, 3) Model diskrit, yaitu implementasi pendidikan *soft skills* disendirikan, dipisah, dilepas dari program kurikuler/mata pelajaran. Pelaksanaannya dikemas secara khusus pada peserta didik, membutuhkan persiapan yang matang oleh sekolah, dan biaya relatif mahal.

Pemilihan model pembelajaran *soft skills* yang akan digunakan sangat tergantung dari berbagai kesiapan beberapa aspek termasuk karakteristik masing-masing sekolah. Model pembelajaran *soft skills* terintegrasi merupakan model implementasi *soft skills* yang melekat dan terpadu dalam program kurikuler, kurikulum, mata pelajaran, proses pembelajaran dengan biaya yang relatif murah, beban sekolah tidak bertambah. Untuk mengatasi berbagai perubahan-perubahan dalam dunia kerja, institusi formal yaitu sekolah lebih cenderung sebagai media yang paling kondusif untuk mengasah keahlian *soft skill* seseorang. Hal ini dikarenakan *soft skill* dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dan bagaimana seseorang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Penyampaian materi tidak hanya sebatas pemberian teori dan praktek akan tetapi ditambah dengan pengintegrasian *soft skills* sehingga peserta didik akan lebih memahami apa yang menjadi tujuan materi tersebut dan penerapannya di kehidupan nyata.

### **C. Konsep Soft Skills yang Sudah Diintegrasikan**

Menurut Miller, Rankin dan Neathey (Hutapea, 2008: 4) *soft skills* adalah kompetensi yang menggambarkan bagaimana seseorang diharapkan berperilaku agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, pengertian ini dikenal dengan nama kompetensi perilaku (*behavioural competencies*) atau dapat juga disebut dengan istilah kompetensi lunak (*soft skills/soft competency*). Pendapat lain tentang *soft skill* oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jatim (2009) bahwa merupakan kesadaran yang membuat seseorang termotivasi dan pantang menyerah sehingga menempatkan diri di tengah orang lain secara proporsional (*interpersonal*) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (*intra-personal skills*) yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Dari pengertian tersebut di atas, maka *soft skill* dapat disimpulkan sebagai suatu kemampuan seseorang (di luar kemampuan teknis dan akademik) dalam memberdayakan diri untuk mengerti kondisi psikologi diri sendiri, mengatur ucapan,



pikiran dan sikap serta perbuatan yang sesuai dengan norma di masyarakat, berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungannya dalam menyiasati realitas sehingga mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal.

Konsep soft skills yang dituntut dalam dunia kerja menurut Goleman et al (Parulina, 2008; 53) terdiri dari *personal skills (intrapersonal skills)* dan *social skills (interpersonal skills)*. Personal skill adalah kemampuan yang menentukan bagaimana cara mememanajemi diri sendiri. Kemampuan ini mencakup sadar diri (*self awareness*) dan manajemen diri (*self management*). Adapun sosial skills (interpersonal skills) adalah kemampuan tentang bagaimana seseorang mememanajemi relasi. Kemampuan soasial terdiri dari sadar sosial dan manajemen relasi. Berbagai dimensi *soft skills* tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Hal ini yang harus dikembangkan oleh pendidikan kejuruan sebagai penghasil tenaga kerja berkompeten dalam pekerjaannya dan dapat mengembangkan dirinya.

Dalam lampiran peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional tahun 200 – 2014 disebutkan bahwa siswa sekolah menengah harus memiliki *soft skill*: a) kemampuan untuk berpikir analitis/kognitif, b) berkomunikasi, c) bekerjasama dalam tim, d) interaksi sosial, e) pemecahan masalah, f) sikap dan keinginan berkembang, g) saling menghargai, h) sportif, i) kerjasama, j) kepemimpinan, k) kemandirian, l) partisipatif, m) kreatif, n) inovatif, dan o) sikap profesional.

Dari berbagai dimensi *soft skills* di atas, agar pendidikan kejuruan dapat menyelaraskan *soft skills* yang ditanamkan kepada peserta didik dengan *soft skills* yang dibutuhkan oleh dunia kerja, maka sekolah harus mensosialisasikannya kepada para guru terhadap pemilihan *soft skill* yang akan diintegrasikan melalui mata pelajaran yang dibelajarkan. Untuk menghasilkan *soft skill* yang betul-betul dapat membekali peserta didik, hendaknya para guru perlu untuk menggali *soft skill* dengan cara melakukan analisis refleksi *soft skill* yang terkandung dalam struktur kurikulum, visi dan misi sekolah kejuruan disamping soft skill yang harus dimiliki siswa sesuai dengan peraturan jangka panjang. Setelah mendapatkan dimensi *soft skill* yang selaras dengan tujuan pendidikan kejuruan, kemudian para guru melakukan analisis keterkaitan *soft skills* tersebut dengan dimensi *soft skills* yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Hasil adanya

keterkaitan dimensi *soft skills* tersebut, kemudian dipergunakan sebagai dimensi-dimensi *soft skills* yang harus dan wajib diintegrasikan melalui materi ajar yang dibelajarkan di kelas oleh guru. *Soft skills* hasil identifikasi adanya keterkaitan tersebut, digunakan untuk acuan penanaman dimensi-dimensi *soft skills* melalui integrasi dalam materi-materi ajar ketika guru melakukan pembelajaran yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan melakukan evaluasi pembelajaran.

Berdasarkan hasil data sekunder menunjukkan dari hasil FGD (*focused group discussion*) dengan para guru untuk menggali dimensi *soft skills* bahwa ternyata terdapat keterkaitan antara *soft skills* yang harus dimiliki siswa sekolah menengah seperti yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2010 – 2014 dengan *soft skills* yang dibutuhkan oleh dunia industri. Adapun *soft skills* hasil penggalian tersebut adalah: mengelola diri, mengembangkan diri, kemandirian, kemampuan berpikir, disiplin, tanggung jawab, sikap profesional, ulet, adaptif, daya juang, daya saing, kerja sama, kepemimpinan, dan kemampuan berkomunikasi. *Soft skills* tersebut yang digunakan untuk mengevaluasi pengintegrasian melalui pembelajaran di sekolah kejuruan oleh para guru bidang normatif, adaptif, dan produktif.

#### **D. Pelaksanaan Pengintegrasian *Soft Skills***

Pelaksanaan pengintegrasian *soft skills* diterapkan melalui kelompok mata pelajaran yang terdapat di sekolah kejuruan. Kelompok tersebut adalah bidang normatif, adaptif, dan produktif. Pengintegrasian *soft skills* melalui mata pelajaran adalah proses pembauran *soft skill* sehingga menjadi kesatuan yang utuh melalui mata pelajaran. Dakir (2004; 49) mengungkapkan bahwa dalam pembahasan masalah dapat dilakukan pembahasan secara integral atau menyeluruh yang menjadi sasaran *integrated curriculum*. Bahan yang dipelajari dalam *integrated curriculum* diantaranya sebagai berikut: 1) bahan disajikan secara menyeluruh, 2) sumber bahan tidak terbatas pada buku sumber, bahkan mementingkan sumber dari pengalaman guru dan peserta didik, 3) bahan langsung berhubungan dengan masalah yang diperlukan oleh peserta didik di masyarakat, 4) penentuan bahan secara demokratis antara guru dengan peserta didik, dan 5) bahan yang aktual dengan memperhatikan situasi dan kondisi sekitar.

Pelaksanaan pembelajaran *integrated curriculum* bila dipandang dari peran guru dapat sebagai manajer, administrator, supervisor, instruktur, dan sebagai inovator. Apabila guru dapat memainkan peran sesuai dengan fungsinya, maka diharapkan peserta didik dalam belajar memiliki sikap lebih mengetahui sesuatu (*learning to know*) sehingga akan terjadi *how to learn* yang berlangsung terus menerus, belajar untuk berbuat sebagaimana mestinya dalam pemecahan berbagai masalah (*learn to do*), belajar menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan sekitar sehingga dapat bekerja sama (*learn to live together*), dan belajar untuk dapat mengembangkan segala aspek kepribadiannya atau potensi sehingga menjadi manusia yang bulat dan utuh (*learn to be*).

Melalui pengamatan dari hasil data sekunder menunjukkan, faktor pendukung dalam pelaksanaan pengintegrasian *soft skill* yang ditemukan bahwa 1) guru mengetahui dalam setiap materi ajar memiliki kandungan *soft skills* yang harus diintegrasikan melalui pembelajarannya, 2) guru memiliki hubungan emosional dengan peserta didiknya sehingga lebih memudahkan dalam mengintegrasikan *soft skills*, 3) pendapat guru bidang produktif menyatakan *soft skills* harus diintegrasikan melalui pembelajaran karena memang diperlukan oleh dunia industri/kerja, 4) dari sisi peserta didik dalam pembelajaran mata pelajaran produktif selalu aktif sehingga memudahkan pengintegrasian *soft skill* secara optimal, dan 5) dari sisi sekolah mengadakan guru piket pagi dan sore untuk menyapa peserta didik ketika datang dan pulang.

Faktor penghambat pengintegrasian *soft skills* melalui pembelajaran, ditemukannya kurang sosialisasinya cara pengintegrasian *soft skill* oleh pihak sekolah sehingga belum semua guru mengetahui cara mengintegrasikan *soft skills* melalui pembelajaran, hal ini nampak dalam menyusun rancangan pembelajaran yang akan disampaikan dan cara melakukan evaluasinya. Beberapa pendapat guru adaptif mengatakan ada beberapa dimensi *soft skills* yang tidak diintegrasikan karena menurut mereka menyita waktu dalam menyusun skenarionya. Sebagian guru menyatakan mereka tidak mau direpotkan untuk menyusun perencanaan pembelajaran *soft skills*, dan kurang mendalamnya cara melakukan evaluasi oleh guru terhadap peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung, misalnya langsung ditegur bila peserta didik melakukan kesalahan. Dari sisi peserta didik, mereka kurang peka terhadap *soft skills* yang ditanamkan oleh para guru.

## **E. Hasil Integrasi Melalui Mata Pelajaran Kelompok Normatif, Adaptif, Produktif**

Berdasarkan data sekunder menunjukkan bahwa, terdapat keterkaitan antara *soft skills* yang tertuang dalam tujuan sekolah kejuruan dengan *soft skill* yang dibutuhkan oleh dunia industri/kerja. Data sekunder menemukan bahwa dari empat belas dimensi *soft skills* yang diintegrasikan oleh salah satu mata pelajaran normatif yaitu kewarganegaraan hanya 11 dimensi *soft skills*, dimensi yang tidak diintegrasikan adalah mengembangkan diri, adaptif, dan daya juang.

Pengintegrasian *soft skills* pada mata pelajaran kelompok adaptif yaitu kewirausahaan ada 11 dimensi *soft skill*, adapun dimensi yang tidak diintegrasikan adalah mengembangkan diri, adaptif, dan daya juang. Pengintegrasian *soft skills* pada mata pelajaran kelompok produktif yaitu kewirausahaan ada 13 dimensi *soft skill*, adapun dimensi yang tidak diintegrasikan adalah dimensi adaptif.

## **F. Penutup**

Kajian di atas dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam mencari solusi terhadap permasalahan pengintegrasian *soft skills* melalui struktur kurikulum pendidikan kejuruan kelompok bidang mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif, agar pendidikan kejuruan tetap memiliki posisi dan peran yang menentukan dalam pembangunan bangsa secara konsisten dan terus menerus dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kekuatan kepribadian dan bekerja secara efektif dan profesional di tempat kerja. Karena itu kebijaksanaan yang mungkin dapat dipikirkan adalah:

1. Mensosialisasikan kepada guru cara menyusun/mengembangkan perangkat pembelajaran *soft skills* yang terintegrasi melalui pembelajaran pada materi pelajaran yang diampu, mulai dari tahap perancangan yang diawali dengan menggali dimensi *soft skills* dan membuat RPP, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.
2. Bagaimana mengembangkan sistem evaluasi terhadap hasil pengintegrasian *soft skills* melalui pembelajaran di kelas, tentang pengembangan alat ukur penilaian dalam kelas terhadap individual siswa, instrumen penilaian dalam kelompok, instrumen penilaian kerja sama antar group, kekurangan dan kelemahan baik pada proses maupun hasil nyata, keefektifan pencapaian hasil pembelajaran.

## **Kepustakaan**

Anonim. 2011, *Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Globe National Plus*. Tersedia pada: <http://www.sekolahglobe.sch.id/program/smk/kurikulum>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2011

Anonim. *Reposisi Pendidikan Menengah: Perubahan Paradigma Pendidikan Menengah Sebagai Parana Pembanguan*. Tersedia pada: <http://www.scribd.com/doc/18906292/reposisi-pendidikan>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2010.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAD). 2010. Lampiran Krisis Karakter di Indonesia. *Cakrawala Pendidikan Jurnal Ilmiah Pendidikan*. Mei 2010, Th XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY. Hlm 41 – 58

Dakir. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim. 2009. Tersedia pada: [http://www.jatimprov.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=5686&Itemid=2](http://www.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5686&Itemid=2). Diakses pada 21 09 2010

Hutapea, Parulina dan Thoha, Nurianna. 2008. *Kompetensi Plus Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Jakarta: PT Gramedia

Office of Disability Employment Police (ODEP).\_\_\_\_\_. *Essential Skills to Getting A Job, Whot Young People With Disability Need to Know*. Tersedia pada: <http://www.dol.gov/odep>. Diambil pada tanggal 1 Maret 2009

Syahniar. 2008. Tindakan Pembelajaran yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kemampuan Interpersonal Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. ISSN 0215-9643 Jilid 15 Nomor 2 Juni 2008 hlm 69 – 134

## **Biodata Penulis**

Dr. Sri Wening, M.Pd menjadi staf pengajar di jurusan PTBB FT UNY sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang. Bidang keahlian mengajar mata kuliah Pendidikan Konsumen, studi lanjut S2 dan S3 pada bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. No hp 081328859530.

## PEMBANGUNAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN

Oleh Prof. Dr. Belferik Manullang

### Abstract

*The essence of education is character building. The dimensions of character are consists of learning attitude, scientific mindset, and competencies. The establishment of attitude starts from thought, action and habit. The establishment of scientific thinking start from the level of practical, theoretical and the essential scientific (philosophical). Establishment of competency start from the level of knowledge, skills and abilities as a high level (art). The role of learning is to develop attitudes, mindsets and competency in a comprehensive manner into the highest level. The achievements show that character building is the essence of education. So the 'process oriented' in learning (creative learning) more important than 'content oriented'. Because 'process learning oriented' increase the character changing internally.*

*Keywords: Character, Attitude, Mindset, and Competencies, Creative Learning.*

### Abstrak

*Esensi pendidikan adalah pembentukan karakter. Dimensi karakter dalam pembelajaran terdiri dari pembentukan sikap, pola pikir ilmiah, dan kompetensi. Pembentukan sikap terdiri dari pemikiran, tindakan dan pembiasaan. Pembentukan pola pikir ilmiah terdiri dari ilmiah praktis, ilmiah teoretis dan ilmiah esensial (filosofis). Pembentukan kompetensi terdiri pengetahuan, keterampilan dan abiltas (kemampuan tingkat tinggi sebagai sebuah seni). Pembelajaran bertugas membentuk sikap, pola pikir dan kompetensi secara komprehensif yakni sampai ke tingkat yang paling tinggi. Ketercapaian demikian menunjukkan pembelajaran sebagai inti pendidikan yakni pembentukan karakter. Untuk itu pembelajaran "orientasi proses" lebih penting dari pada "orientasi konten". Sebab dalam pembelajaran orientasi proses terjadi proses internalisasi yang membawa perubahan karakter (kepribadian). Kata kunci: Karakter, Sikap, Pola Pikir dan Kompetensi, Pembelajaran Orientasi Proses.*

## 1. PENDAHULUAN

- a. Krisis bangsa adalah krisis sumber daya manusia. Oleh sebab itu jika bangsa ini sedang mengalami krisis dapat diasumsikan bahwa pembangunan (pendidikan) belum berhasil membangun karakter bangsa. Bung Karno mengatakan bahwa bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (*character building*). Karena *character building* inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya serta bermartabat. Kalau *character building* tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Krisis bangsa adalah krisis karakter. Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang kasihan bila karakter bangsa masih belum terbangun dengan baik. Kahlil Gibran mengakatan "kasihan bangsa yang mengenakan pakaian yang tidak ditenunnya, memakan roti dari gandum yang tidak ia panen, dan meminum anggur yang ia tidak memerasnya. Kasihan bangsa yang meremehkan nafsu dalam mimpi ketika tidur, sementara menyerah padanya ketika bangun". Bahkan dalam bentuk yang hampir sama

mengatakan bahwa “Titik sentral krisis bangsa adalah krisis karakter disebut krisis dimensi spiritual dalam kepribadian manusia. Krisis yang hampir merambah seluruh lini kehidupan sebenarnya, berasal dan bermuara pada krisis spiritual”. Hasil studi baru mengindikasikan bahwa sukses abad 21 tergantung optimalisasi dimensi spiritual, (Paul Brunton). Schumacher mengatakan bahwa krisis ekonomi, bahan bakar, makanan, lingkungan, maupun krisis kesehatan, dan yang lainnya, justeru berangkat dari krisis spiritual.

- b. Krisis karakter dari perspektif pendidikan dapat dilihat dari dimensi sikap, pola pikir, kecerdasan dan kompetensi. Sikap adalah habitual manusia atau masyarakat dalam bentuk *thought, action and habit*. Sering juga disebut *think rightly, act rightly and live rightly*. Pola pikir adalah kualitas mindset ilmiah sebagai pengaruh pendidikan untuk memahami dan memecahkan berbagai masalah. Pola pikir bisa dalam bentuk ilmiah praktis, ilmiah teoretis dan ilmiah esensial. Kecerdasan adalah kemampuan diri pribadi secara psikologis menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Kecerdasan ini bisa dalam bentuk cerdas intelektual (IQ), cerdas emosional (EQ) dan cerdas spiritual (SQ). Kompetensi adalah kemampuan profesional dalam bekerja (menjalankan tugas). Kompetensi ini bisa dalam bentuk *knowledge, skill and abilities*.

## 2. ESENSI PENDIDIKAN

- a. Sentra kehidupan menurut Ernesto adalah manusia. Ia mengatakan bahwa “*The human being is the center and yardstick of everything*” Manusia dengan segala sifat-sifatnya adalah pusat dan ukuran segalanya. Selanjutnya dikatakan bahwa “*if you dig very deeply into any problem, you will get people*” - Jika anda menggali secara mendalam setiap persoalan maka anda akan menemukan akar masalahnya adalah orang. Ini berarti bahwa kualitas kehidupan secara universal ditentukan oleh kualitas manusia.
- b. Tugas utama pendidikan adalah membangun manusia berkualitas, yakni menjadi manusia berkarakter. Manusia berkualitas untuk bangsa Indonesia adalah mereka yang terdidik memiliki karakter Pancasila. Pendidikan disebut juga memanusiakan manusia, sebab manusia telah memiliki potensi kemanusiaan. Plato mengatakan bahwa *if you ask what is the good of education, in general, the answer is easy, that education makes good men, and that good men act nobly*, - Jika anda menanyakan pendidikan yang baik, jawabannya sederhana yakni membuat orang menjadi baik, dan orang yang baik cenderung bertindak mulia. Sathya mengatakan bahwa “*the end of education is character*. Harrel mengatakan *attitude. In education character or attitude is everything*. Harrel mengatakan *Your character or attitude today, determine your succes tomorrow*. Kepribadian, karakter, atau sikap memiliki substansi yang sama. Kepribadian menggambarkan apa adanya. Karakter adalah perilaku relatif permanen, yang dimaknai bersifatnya baik atau kurang baik. Sikap adalah perilaku relatif permanen yang dimaknai dengan sikap positif atau sikap negatif. Dalam kehidupan manusia yang utama adalah karakter. Keutamaannya diutarakan seperti berikut. Jika kekayaan sirna, sesungguhnya tidak ada yang hilang, karena karakter mengutamakan kekayaan budi pekerti. Jika kesehatan yang hilang, sesuatu telah hilang, karena karakter memerlukan kesehatan jiwa dan raga. Jika karakter yang hilang, maka segala-galanya telah hilang, karena karakter adalah roh kehidupan. *Education without character, worship without sacrifice, wealth without effort, politic without principles –*

*these sins are the basis for all misery in the world, - pendidikan tanpa karakter, ibadah tanpa pengorbanan, kekayaan tanpa usaha, politik tanpa prinsip, dosa-dosa yang merupakan dasar kesengsaraan di dunia. Education should be the life breath of human beings. By converting education into a means of earning a livelihood, people are forgetting the meaning of life. Character determines life. It is pure and holy. without character how can man lead a worthwhile and sacred life? (Sathya).*

- c. Kehidupan membangun karakter manusia. Itulah alasannya kehidupan disebut juga pendidikan, dan pendidikan disebut kehidupan. Sebab selama masih ada kehidupan, di sana ada pendidikan. Tetapi harus diingat, bahwa kehidupan menjadi pendidikan jika mengandung nilai pedagogis untuk membentuk karakter. Nilai pedagogis membuat dunia (kehidupan) berputar ke arah positif. Dalam pendidikan disebut ada hukum penuaian yakni *law of the harvest in education* "sow a thought, reap an action, sow an action, reap a habit, sow a habit, reap a character, sow a character, reap a dignity." (Bernard Show)
- d. Pendidikan berperan meningkatkan kualitas manusia untuk membangun masa depan, termasuk masa depan bangsa. Ternyata, masa depan bukan sebuah tempat yang akan dituju, melainkan dibangun. Lintasan menuju ke sana belum tersedia melainkan harus dibuat. Pembuatan lintasan itu menghasilkan perubahan, bagi si pembuat dan masa depan. Proses pembuatan lintasan ini membutuhkan karakter sekaligus perubahan karakter. Karakter yang baik membangun masa depan yang lebih baik. Jadi, karakter menentukan kualitas masa depan
- e. Hidup dengan kekuatan hati. Setiap orang membutuhkan kekuatan hati dalam kehidupan, terutama ketika mereka sedang menghadapi tantangan ataupun kekecewaan. Oleh sebab itu, jika ingin mengukur manusia berkualitas, maka pita pengukur mestinya diletakkan di sekeliling hatinya bukan di kepala. Kekuatan hati inilah yang disebut *the spirit of goodness*. *To change the world, we first, have to change ourselves*. Bila ada cahaya di dalam jiwa, ada kecantikan di dalam pribadi. Bila ada kecantikan di dalam pribadi, ada harmoni di dalam rumah. Bila ada harmoni di dalam rumah ada ketertiban di dalam masyarakat dan Negara. Bila ada ketertiban di dalam masyarakat dan negara .ada kedamaian di dunia . *"Your attitude create the world"*
- f. Belajar dari kesuksesan pemimpin top dunia baik dalam pemerintahan, akademisi, pengusaha maupun tokoh-tokoh spiritual. Bukti menunjukkan bahwa spiritual adalah landasan utama kehidupan untuk sukses memajukan lembaga, menciptakan dan mewujudkan visi, misi, dan strategi. Analisis diri dan lingkungan adalah landasan meraih sukses. Itulah rahasia sukses, termasuk cara mengubah kegagalan untuk meraih kesuksesan.
- g. Hati dengan karakter yang baik seharusnya mengendalikan kehidupan. Mata dapat melihat, tetapi tidak bisa mendengar dan berbicara. Telinga dapat mendengar, tetapi tidak bisa berbicara dan melihat mulut dapat berbicara tetapi tidak bisa melihat dan mendengar. Tetapi hati dapat melihat, mendengar, dan berbicara.
- h. Simpulannya ialah dengan karakter (sikap, atau kepribadian) yang baik, kehidupan bergerak ke arah positif. Karakter adalah sifat-sifat yang sesuai dengan norma yang dianut.



Norma yang menjadi acuan karakter bangsa adalah nilai Pancasila. Tugas pendidikan adalah pembentukan karakter sebab obyek utama ilmu pendidikan adalah pembentukan karakter. Jika ada pendidikan yang justru merusak karakter maka pendidikan itu tidak lagi bersifat *pedagogis* melainkan disebut *demagogis*.

### 3. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

- a. Kurikulum dapat dimaknai sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum harus tertuang dalam satu atau beberapa dokumen atau rencana tertulis. Dokumen atau rencana tertulis itu berisikan pernyataan mengenai kualitas yang harus dimiliki seorang peserta didik yang mengikuti kurikulum tersebut. Aspek lain dari makna kurikulum adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sini dimaksudkan adalah pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik seperti telah direncanakan. Pengalaman belajar adalah konsekuensi langsung dari dokumen tertulis yang dikembangkan oleh dosen. Dokumen tertulis yang dikembangkan dosen dinamakan Rencana Perkuliahan. Pengalaman belajar memberikan dampak langsung terhadap hasil belajar mahasiswa. Oleh karena itu jika pengalaman belajar tidak sesuai dengan rencana tertulis maka hasil belajar yang diperoleh peserta didik tidak dapat dikatakan sebagai hasil dari kurikulum. Dalam pemahaman seperti ini, kurikulum mengandung rencana pembelajaran berkarakter supaya proses pembelajaran efektif membangun karakter. Kurikulum bertaraf internasional adalah kurikulum yang merancang pembelajaran untuk sampai kepada pembentukan karakter internasional, yakni sikap habitual positif, pola pikir ilmiah esensial, dan kompetensi abiliti.
- b. Pembelajaran mengemban tugas mendidik, membelajarkan dan melatih. Mendidik membentuk sikap. Membelajarkan membangun pola pikir ilmiah. Dan melatih memberikan kompetensi. Pembelajaran, baik dalam tugas mendidik, membelajarkan dan melatih harus berkarakter. Pembelajaran dengan tugas mendidik membangun sikap pada tahapan *thought, action, habit*. *Thought* adalah sikap dalam bentuk penalaran, atau berupa pendapat tentang sesuatu. *Action* adalah sikap dan karakter dalam bentuk tindakan nyata atas kendali penalaran. *Habit* adalah sikap berupa kebiasaan hidup. Gandhi mengatakan *think rightly, act rightly and live rightly*. Pembelajaran adalah inti pendidikan, artinya dalam pembelajaran selalu harus ada unsur mendidik. *The essence of education is to recognize truth. All branches of learning are like rivers. The spiritual learning is the like ocean. All rivers go and merge into the ocean. When they merge in the ocean, the rivers lose their individually completely.* (Sathya). *Quantum teaching, Quantum learning, Genius learning* adalah model pembelajaran yang berkarakter terutama karena dilakukan dengan melibatkan hati (*teaching with a heart*). Seluruh atmosfer dan aktivitas belajar yang diperuntukan untuk transformasi nilai seharusnya meliputi *thought, action and habit*.
- c. Jika merujuk kepada perubahan-perubahan kurikulum di sekolah-sekolah pada dasarnya hambatan efektivitas pembelajaran ada pada tahap implementasi. Kurikulum 1975 model pembelajaran disebut PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional). Kurikulum 1984 dengan model pembelajaran CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Kurikulum 1994 dengan model pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). Kurikulum 2004 berbasis KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dengan model

pembelajaran CTL (Contextual Teaching and learning). Pada dasarnya semua model itu bisa efektif membangun karakter, tergantung apakah pembelajaran berorientasi proses. Kurikulum manapun yang dipakai semala ini hampir tidak ada perubahan, pembelajaran tetap saja berorientasi konten.

- d. Pembentukan sikap, karakter, atau kepribadian dapat dibangun melalui kecerdasan yakni kecerdasan intelektual (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ). IQ mengacu kepada kecepatan dan ketepatan memahami dan menyelesaikan persoalan. Brunton mengatakan *Intellectual abilities is the capacity to do mental activities, thinking, reasoning, and problem solving. dimensions of intellectual ability; number, aptitude, verbal comprehension, perceptual speed, inductive reasoning, deductive reasoning, spatial visualization, memory*, - Cerdas intelektual berarti memiliki ketepatan dan kecepatan melakukan aktivitas mental, berfikir, penalaran, dan pemecahan masalah. dimensi kemampuan intelektual, numerik, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, memori. EQ mengacu pada kemampuan personal dan interpersonal. Indikator kecerdasan emosional antarlain berempati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat. SQ mengacu pada sifat-sifat mulia dan nilai-nilai kemanusiaan. SQ adalah kecerdasan untuk menyelesaikan masalah makna dan nilai. Kecerdasan untuk memposisikan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menaksir bahwa suatu tindakan atau jalan hidup tertentu lebih bermakna ketimbang yang lain. SQ adalah fondasi yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi kita. Simpulannya ialah pembelajaran berkarakter membangun sikap melalui tahapan *thought, action and habit*, termasuk kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- e. Pembelajaran membangun pola pikir ilmiah, yakni ilmiah praktis, ilmiah teoretis, dan ilmiah filosofis. Ilmiah praktis adalah kebenaran berdasarkan akal sehat (commonsense) dengan koherensi sederhana, korespondensi luas. ilmiah teoretis adalah koherensi komprehensif dengan korespondensi validitas tinggi. Ilmiah filosofis, dengan koherensi mendalam dan menyeluruh dengan korespondensi kontekstual. Pergeseran pola pikir ilmiah filosofis, ilmiah teoretis sehingga mengutamakan pola pikir ilmiah praktis secara fenomenal, mengakibatkan perubahan nilai hidup dari derajat kualitatif spiritual menjadi kuantitatif materialistik. Derajat moralitas manusia menurun karena sikap memberdayakan kemajuan teknologi yang mendorong moral persaingan, kerusakan kerjasama, kembali ke hukum rimba. Lingkungan hidup menjadi disharmonis. Simpulannya ialah pembelajaran berkarakter dalam kelas, di lab, dan seluruh aktivitas belajar yang membangun pola pikir, mencakup pola pikir ilmiah filosofis, ilmiah teoretis dan ilmiah praktis
- f. Fungsi pembelajaran sebagai pelatihan untuk memberi kompetensi. Slocum mengatakan, *"A competency is an interrelated cluster of knowledge, skills and abilities need by individual to be effective"*. Kompetensi *knowledge* adalah penguasaan konsep ilmu dan

teknologi secara benar tentang sesuatu objek. dikategorikan sebagai kemampuan intelektual. Dalam taksonomi Bloom disebut kognitif. Kompetensi *skill* ialah kemampuan melakukan secara benar konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam taksonomi Bloom disebut psikomotor. Kompetensi *abilities* adalah internalisasi kompetensi *skill* secara benar menjadi kebiasaan yang mempribadi. *Abilities* kompetensi paripurna adalah mereka yang menguasai konsep ilmu dan teknologi secara benar, melakukannya dengan benar, dan menjiwainya dengan benar. Simpulannya ialah pembelajaran berkarakter membangun kompetensi secara bertahap, yakni *knowledge, skill and abilities*

- g. Kementerian Pendidikan Nasional mengemukakan ada empat sumber budaya karakter bangsa Indonesia yakni agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan dengan mengidentifikasi sejumlah nilai yang perlu diinternalisasi seperti nilai religious, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli social dan bertanggungjawab. Cara mengidentifikasi seperti ini seolah-olah mengasumsikan kepribadian manusia seperti sebuah tabung. Seluruh sifat-sifat akhirnya menyatu menjadi sebuah profil pribadi yang unik.
- h. Simpulannya ialah pembelajaran harus menjadi inti pendidikan yakni memiliki transformasi nilai pedagogis. Semua tujuan pembelajaran seperti pembentukan sikap, pembentukan pola pikir ilmiah, ataupun pemberian kompetensi harus sampai kepada pembentukan karakter. Sikap yang berkarakter sampai kepada *habit*, pola pikir ilmiah berkarakter sampai ke tingkat ilmiah filosofis, dan kompetensi berkarakter sampai ke tingkat *abilities*. Kurikulum didesain sesuai dengan karakteristik tersebut.

#### 4. PERAN GURU

- a. *Dear, teachers! When you teach the children, you must remember that you are engaged in a noble task for the sake of the children entrusted to your care, (Sathya) –* Guru-guru yang baik! Ketika anda mengajar anak-anak, anda harus ingat bahwa anda terlibat dalam suatu tugas mulia demi anak-anak yang dipercayakan untuk anda urus. Jansen Sinamo mengemukakan 8 etos keguruan 1) Pekerjaan guru adalah suci itu adalah panggilanku, sehingga saya bisa bekerja benar. 2) Pekerjaan guru itu sehat itu adalah aktualisasiku, sehingga saya bisa bekerja keras. 3) Pekerjaan guru itu rahmat dan itu adalah terima kasihku, sehingga saya bisa bekerja dengan tulus, 4) Pekerjaan guru itu amanah dan itu adalah tanggungjawabku, sehingga saya bisa bekerja tuntas, 5) Pekerjaan guru itu seni, itu adalah kesukaanku, sehingga saya bisa bekerja kreatif, 6) Pekerjaan guru itu ibadah, itu adalah pengabdianku, sehingga saya bisa bekerja serius, 7) Pekerjaan guru itu mulia, itu adalah pelayananku, sehingga saya bisa bekerja sempurna, 8) Pekerjaan guru itu kehormatan, itu adalah kewajibanku, sehingga saya bisa bekerja unggul. Guru harus memiliki karakter pedagogis, dengan IESQ yang dikendalikan oleh SQ
- b. Guru efektif menyelenggarakan pembelajaran berkarakter jika guru yang bersangkutan memiliki karakter pedagogis dalam menjalankan tugasnya. Guru tanpa karakteristik pedagogis. 1) Profesi yang dapat hilang dari kepribadian, 2) Pilihan rasional, 3) Orientasi kepuasan material merupakan prioritas, 4) Peran utama pengajar, 5) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, 6) Fokus pada dirinya, keinginan dan kebutuhannya, 7)

Memandang muridnya sebagai “bawahan”, 8) Kemampuan mengajar minimum sampai rata-rata, 9) Mencukupkan lulusan lembaga pendidikan, 10) Gelar akdemis sebagai standar utama. Guru dengan karakteristik pedagogis. 1) Profesi sebagai panggilan jiwa yang tak mungkin “hilang”. 2) Pilihan “moral-spiritual” 3) Orientasi kepuasan batinnya merupakan prioritas, 4) Peran utama interaksi edukatif 5) 6) Sosialisasi nilai-nilai luhur untuk hidup dan kehidupan 7) Fokus pada minat, bakat, talenta murid (altruis) 8) Memandang muridnya sebagai mitra potensial 9) Kemampuan mengajar di atas rata-rata sampai luar biasa, 10) Pebelajar seumur hidup di sekolah besar kehidupan Gelar akademis sebagai prasyarat. Untuk itu diperlukan kepemilikan alat pendidikan seperti, kesabaran, kewibawaan, kasih sayang, keteladanan, penguatan (motivasi), ketegasan yang mendidik, ketulusan.

- c. Kecerdasan manusia dapat diklasifikasi menjadi tiga, intelektual (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ). IQ mengacu kepada kecepatan dan ketepatan memahami dan menyelesaikan persoalan. EQ mengacu pada kemampuan personal dan interpersonal. SQ mengacu pada sifat-sifat mulia dan nilai-nilai kemanusiaan
- d. Cerdas intelektual berarti memiliki ketepatan dan kecepatan melakukan aktivitas mental, berfikir, penalaran, dan pemecahan masalah. Dimensi kemampuan intelektual, numerik, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, memori
- e. Cerdas emosi adalah kemampuan berempati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, keramahan, ketekunan, kesetiakawanan, dan sikap hormat.
- f. SQ adalah kecerdasan untuk menyelesaikan masalah makna dan nilai, kecerdasan untuk memposisikan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menaksir bahwa suatu tindakan atau jalan hidup tertentu lebih bermakna ketimbang yang lain. SQ adalah fondasi yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi kita.
- g. Peran guru sangat strategis untuk pembentukan karakter siswa. Kemandirian guru mengembangkan dirinya sendiri menjadi sesuatu yang penting sebab, *no amount of advice and exhortation can make someone rise to the full stature of his profession. He has to improve himself. He cannot be improved by external pressure or persuasion* (Sathya)
- h. Simpulannya ialah peran guru sangat sentral dalam mewujudkan pembelajaran berkarakter. Karakternya menjamin pembelajaran berkarakter. Kurikulum seharusnya didisain untuk memberi peluang optimal bagi peran guru sebagai pendidik, pengajar dan pelatih.

## 5. PENUTUP

Pembelajaran adalah inti pendidikan. Oleh sebab itu kurikulum merupakan sesuatu yang penting. Sesuai dengan temuan-temuan baru dalam pembentukan karakter maka: Sikap yang telah mencapai tingkat habitual, pola pikir yang telah mencapai ilmiah esensial serta kompetensi yang telah mencapai tingkat abiliti bisa dikatakan sebagai kualitas karakter tinggi. Oleh sebab itu kurikulum dan pembelajaran semestinya ditujukan kepada pembentukan

karakter tersebut. Kurikulum harus dapat memberi kesempatan kepada guru berperan sebagai pendidik, pengajar dan pelatih.

- a. Kurikulum harus dapat memberi peluang pembelajaran membangun sikap mulai dari proses *thought, action* sampai dengan *habit*, atau *think rightly, act rightly and live rightly*. Pengembangan sikap ini didukung oleh IESQ.
- b. Kurikulum harus dapat memberi peluang pembelajaran membangun pola pikir ilmiah mulai dari tingkat ilmiah praktis, ilmiah teoretis sampai dengan ilmiah filosofis.
- c. Kurikulum untuk memberi peluang pembelajaran memberi kompetensi mulai dari tingkat *knowledge, skill* sampai dengan *abilities*.

## 6. DAFTAR BACAAN

- Goleman, Daniel, 2000, *Emotional Intelligence, Kecerdasan Emosional; Mengapa EI lebih Penting dari IQ*, Jakarta: PT Gramedia
- Cooper, Robert K dan Ayman Sawaf, 1998, *Executive EQ, Kecerdasan Emosional dalam Kepemimpinan dan Organisasi*, terjemahan Alex Tri Kantjono Widodo, Jakarta: Gramedia
- Harrel, Keith 2004, *Attitude is Everthyng*. NY: Collins Business
- Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, *Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, Badan penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum.
- Manullang, Belferik, 2006, *Kepemimpinan Pedagogis*, Medan: PPs Unimed.
- Patton, Patricia, 1998 *Emotional Intelligence; Service With A Heart* ,terjemahan Jakarta: Pustaka Delapratasa.
- Peale, Norman Vincent, 1996, *The Power of Positive Thinking*, Jakarta: Bina Aksara
- Saragih, Simon, 2009, *Ketekunan dan hati Putih Barack Obama*, Jakarta: Kompas.
- Sathya Sai Speaks on Education, 2002, *A Compilation of The Teaching of Sathya Sai Baba On Education*. Sathya Sai Book Center of America.
- Sinamo, Jansen, 2008, *8 Etos Kerja Profesioanal, Navigator and Menuju Sukses*, Jakarta: Mahardika.
- Slocum, Jhon W. and Don Hellriegel, 2009. *Principles of Organizational Behavior*, UK: Cengage Learning.
- Soedarsono, Soemarno. 2009, *Karakter Mengantar Bangsa, Dari Gelap Menuju Terang*, Jakarta: Lineasia Adofa Lestari
- Sukidi, 2005, *Kecerdasan Spiritual, Mengapa SQ Lebih Penting dari pada IQ dan SQ*
- Suyanto, 2005, *Smart in Leadership, Belajar dari Kesuksesan Pemimpin Top Dunia*, Yogyakarta: Andi.

Medan, 7 Januari 2012  
Penulis,

Prof. Dr. Belferik Manullang  
Direktur PPs Unimed

## **Redesain Sistem Kurikulum Pembelajaran Bahasa Inggris Calon Guru SD/AUD Berbasis *Communicative Competence***

### **ABSTRAK**

Kebutuhan calon guru Sekolah Dasar (SD) atau Anak Usia Dini (AUD) akan penguasaan bahasa Inggris baik *spoken* maupun *written* dan kecakapan mengajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas sangatlah *urgent* mengingat tuntutan profesi di masa yang akan datang terutama kebutuhan akan tenaga edukatif sebagai guru di SD yang berstandar internasional baik yang RSBI maupun SBI dimana semua guru di sekolah tersebut harus mampu menggunakan *English for Bilingual Instruction* dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas pada semua mata pelajaran yang ditentukan. Selain itu juga tuntutan kebutuhan akan kecakapan mengajarkan mata pelajaran Bahasa Inggris yang efektif dan menyenangkan sejak dini di beberapa satuan pendidikan AUD dan SD di beberapa daerah sangatlah tinggi, sehingga kurikulum Bahasa Inggris pada satuan pendidikan penyedia lulusan calon guru SD/AUD, yang selama ini masih berfokus pada *Knowledge/Passive English* yang menitik-beratkan pada kemampuan *grammar* dan *structure*, harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan mengajarkan dan membelajarkan kompetensi-kompetensi bahasa Inggris yang dibutuhkan baik berupa *knowledge* dan *skill* yang relevan. Secara garis besar, kompetensi yang dimaksud adalah *English knowledge and skills: General English, English for young learners*, dan *English for instruction*.

Mengacu teori *Competency and Task Based Curriculum Design* dalam *English Language Teaching (ELT)*, kurikulum bahasa Inggris perlu dikembangkan dengan berbasis pada teori terkini *Communicative Competence* yang mencakup 4 area, yaitu: *Grammatical Competence, Sociolinguistic Competence, Discourse Competence*, dan *Strategic Competence* melalui 2 strategi implementasi *Competence* dan *Task* di kelas: 1) *Four Teaching-Learning Cycles* yang dipelopori oleh Burns and Joyce 1991 (*adapted from* Callaghan and Rothery, 1988), keempat langkah itu adalah *building knowledge of the field, modeling of text, joint construction, and independent construction*, dan 2) *Three Muranoi's Interaction Enhancements* (*cited in* Doughty & Williams, 1998:241-242), langkah-langkah tersebut adalah *rehearsal phase, performance phase, and debriefing phase* dengan mengintegrasikan keempat *English Basic Skills* yaitu *speaking, listening, reading, dan writing*.

**Kata Kunci:** Desain Kurikulum Bahasa Inggris, Bahasa Inggris bagi Calon Guru SD/AUD, *Communicative Competence*

## PENDAHULUAN

Pembelajaran bahasa Inggris, terutama *English for Young Learners* di Indonesia, telah menjadi perhatian tersendiri bagi para *English educators*. Mereka *concern* terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris, termasuk bahasa Inggris bagi *The Early Childhood* atau *Elementary School Level*. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional, No.0487/14/1992 bab VIII dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, No. 060/U/1993 yang menyatakan bahwa pelajaran bahasa Inggris dapat dimasukkan kedalam muatan lokal kurikulum Sekolah Dasar (SD). Sehingga perlu kiranya penyelenggaraan sistem pembelajaran bahasa Inggris yang tepat, yaitu pembelajaran yang memperhatikan tingkat perkembangan anak baik di tingkat AUD maupun SD, terutama bagaimana mendesain pembelajaran bahasa Inggris yang berkualitas, yang tentunya berbasis pada teori terkini tentang *English Language Teaching (ELT)* terutama *English for Young Learners*. Oleh karena itu, diperlukan tenaga edukatif/pendidik yang tepat pula, yaitu bagaimana mendesain dan melaksanakan pembelajaran Bahasa Inggris yang tepat, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan teori pembelajaran bahasa Inggris terkini dan juga sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.

Satuan pendidikan penyedia tenaga pendidik harus mampu menjawab tantangan tersebut, yaitu mampu menyediakan calon-calon guru bahasa Inggris bagi peserta didik usia dini dan juga di tingkat anak sekolah dasar yang berkualitas. Berdasarkan beberapa penelitian terkait diantaranya yaitu: 1) Sadeghian, J. B. (1981) tentang *Communicative Competence in English Language Teaching*, 2) Astika, G. (2004) tentang *English syllabus design*, 3) Faridi, A. (2008) tentang *The material design of the English course for elementary schools*, 4) Rukmini, D. (2007) tentang *The rhetorical development realization*, dan 5) Mustadi, Ali. (2011) tentang *Communicative Competence based English Design*, dapat disimpulkan bahwa pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggris termasuk didalamnya kurikulum, silabus, materi ajar/kompetensi, media dan strategi, dan assesmen perlu didasarkan atas kajian/temuan ilmiah (*Empirical Findings*).

Calon guru AUD dan SD harus mampu menguasai kompetensi-kompetensi bahasa Inggris baik *spoken* maupun *written*, *knowledge* maupun *skill*, meliputi: general English, English for instruction, and English for the early childhood or elementary school students. Harapannya mereka mampu menguasai *good English* secara aktif, termasuk mampu mengajarkan bahasa Inggris dengan baik dan benar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga mampu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran beberapa mata pelajaran di kelas dengan baik dan benar pula.

Keberhasilan penggunaan bahasa untuk komunikasi tidak bisa dilepaskan dari perkembangan *communicative competence* dari pengguna bahasa itu sendiri, selain itu juga sangat dipengaruhi oleh *the socio-cultural norms of the society* dimana bahasa itu dipakai/digunakan. Hal ini sudah muncul 3 dekade yang lalu sejak pertama kali pendekatan komunikatif atau *communicative approach* dipakai dalam pengajaran bahasa. Dalam beberapa program bahasa, para *language educators* dan peneliti/pengembang kurikulum bahasa telah mengimplementasikan *communication-oriented teaching design* untuk menciptakan dan mengembangkan cara atau metode yang lebih efektif dalam meningkatkan *students' communication skills* sebagai jawaban atas pembelajaran bahasa terdahulu yang berorientasi pada *grammatical knowledge*.

Pengembangan kurikulum bahasa seharusnya bertolak dari *The needs of the learners* sebagai basis desain yang dikembangkan. Hal ini dimaksudkan supaya desain yang dikembangkan sesuai atau relevan dan sejalan dengan tujuan program yang ada. Selain itu desain tersebut juga harus berbasis pada teori terkini atau *The current theory* tentang desain kurikulum bahasa serta merujuk pada temuan ilmiah lainnya yaitu dengan mengidentifikasi kompetensi dan task yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendesain kurikulum yang mana mampu membekali dan menopang profesi peserta didik dimasa yang akan datang yaitu sebagai guru PAUD maupun SD.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di beberapa tempat/institusi pendidikan sebagaimana tersebut diawal, banyak permasalahan menyangkut pembelajaran bahasa Inggris baik di tingkat PAUD, SD, maupun proses



pembelajaran di tingkat *Teacher Training* untuk PGAUD maupun PGSD sebagai penyedia/pencetak calon-calon guru AUD dan SD, diantaranya yaitu: desain kurikulum dan proses pembelajarannya. Berikut ini adalah penjelasan dari kedua permasalahan utama diatas: 1) Desain kurikulum. Kurikulum yang dikembangkan di beberapa satuan pendidikan penyedia calon guru AUD dan SD sebagian besar masih fokus pada *English Knowledge* atau *Grammatical/Structural Skill* sehingga yang terjadi adalah sebagian besar peserta didik menguasai *Passive English* bukan pada *Active English* yaitu bagaimana menggunakan bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan secara aktif. Muatan kurikulum masih bertumpu dan menekankan pada *structural linguistics*, tidak berorientasi pada *English for Specific Purposes (ESP)* dan muatannya sama dengan program-program studi lain diluar *Young Learner Teacher Training*. Ditambah lagi, desain kurikulum tidak mengkaji secara proporsional aspek-aspek *English for the early childhood or elementary school students*. 2) Proses pembelajaran. Selain permasalahan terkait desain kurikulum, terdapat pula permasalahan utama lain yaitu terkait proses pembelajaran bahasa Inggris yang meliputi: strategi/metode pembelajaran, task dan assessmen, media dan sumber belajar, dan aktivitas pembelajaran, dll. Dimana strategi yang diterapkan masih kurang sesuai yaitu masih banyak yang *Teacher Oriented* dan kurang mengaktifkan peserta didik. Selain itu media juga masih ada yang kurang sesuai dan masih kurang melibatkan peserta didik dalam penggunaan media dan ada juga media yang kurang menarik terutama di satuan pendidikan PAUD dan SD. Sehingga aktivitas peserta didik masih terkesan pasif dan kurang menyenangkan.

Beberapa permasalahan utama diatas mengindikasikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran bahasa Inggris di beberapa satuan pendidikan dasar termasuk institusi pencetak calon guru PAUD dan SD masih kurang memuaskan karena desain kurikulum dan proses pembelajarannya tidak memenuhi kebutuhan peserta didik. Kenyataan empirik ini mengaskan bahwa perlu kiranya adanya evaluasi dan review terhadap desain kurikulum yang ada. Desain kurikulum harus di sesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik dan harus di susun berdasarkan *Needs Analysis*, tujuan program, dan tentunya harus berbasis pada teori terkini

tentang *Communicative Competence in English Language Teaching (ELT)* dengan mengidentifikasi *competences* dan *tasks* yang dibutuhkan oleh peserta didik dan sesuai dengan tuntutan profesi yang akan datang atau *the target setting*, yaitu setting dimana peserta didik akan menjadi seorang guru. Sehingga perlu kiranya dalam menentukan *competence* dan *task* terlebih dahulu dilakukan observasi tentang *competence* dan *task* yang dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas dan juga *competence* dan *task* yang ada selama proses pengajaran dan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.

Dari pembahasan di atas menunjukkan akan keharusan me-redesain kurikulum bahasa Inggris terutama bagi *Teacher Training* calon guru PAUD dan SD dengan maksud upaya system pembelajaran bahasa Inggris di tingkat dasar tidak salah arah, karena pendidikan tingkat dasar merupakan pondasi awal yang sangat menentukan proses pendidikan di jenjang lanjut. Sehingga muncul permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana desain kurikulum bahasa Inggris yang tepat yang dapat memenuhi *the learners needs*?

- a. *Competences* apa saja yang dibutuhkan?
- b. *Tasks* apa saja yang sesuai dengan *the learners needs*?
- c. Pengalaman aktivitas belajar apa saja yang dapat memenuhi *the learners needs*?

Desain kurikulum harus berorientasi pada *Speciific Purposes* dan dapat meng-cover beberapa *competences* dan *tasks* yang sesuai dengan *the learners' needs*. Untuk mewujudkan itu maka perlu:

Me-redesign kurikulum bahasa Inggris yang tepat yang dapat memenuhi *the learners needs*.

- a. Mengidentifikasi *Competences* apa saja yang dibutuhkan.
- b. Mengidentifikasi *Tasks* apa saja yang sesuai dengan *the learners needs*.
- c. Men-describe pengalaman aktivitas belajar apa saja yang dapat memenuhi *the learners needs*.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka desain kurikulum bahasa Inggris harus disusun sesuai dengan kebutuhan atau *The Learners' Needs* dan juga harus sejalan dengan tujuan program yang ada yaitu menghasilkan lulusan calon pendidik yang berkualitas dan professional. Desain kurikulum yang dikembangkan harus merujuk teori terkini tentang desain kurikulum, desain silabus, dan juga berdasarkan pada temuan empirik yaitu dengan mengidentifikasi jenis-jenis kompetensi dan task yang dibutuhkan oleh peserta didik. Lebih lanjut, desain tersebut memuat *knowledge* dan *skill* yang penting dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang nantinya menjadi guru pendidikan anak usia dini dan juga menjadi guru sekolah dasar di masa yang akan datang.

Desain kurikulum bahasa Inggris juga seharusnya berbasis pada teori atau terkini atau pendekatan yang relevan tentang *Communicative Competence in English Language Teaching (ELT)* sehingga harapanya kurikulum tersebut mampu menghasilkan lulusan yang menguasai *Communicative English Skill*. Berikut ini merupakan implikasi dari desain kurikulum yang dilakukan secara baik dan benar, diantaranya yaitu: 1) *The theoretical implication*. Desain yang dikembangkan akan berimplikasi pada perhatian para ahli pendidikan bahasa akan pentingnya teori terkini tentang *Communicative Competence in English Language Teaching (ELT)* yang dijadikan sebagai basis pengembangan. Termasuk didalamnya teori *Curriculum and Syllabus Design* berbasis *The Empirical Findings* dengan mengidentifikasi ragam jenis *Competence* dan *Tasks* yang dibutuhkan oleh peserta didik Selain itu, desain tersebut harus mampu mengakomodir *Knowledge* dan *Skill* yang penting dan relevan serta dibutuhkan yaitu sebagai guru anak usia dini atau sekolah dasar di waktu yang akan datang; 2) *Pedagogical Implication*. Desain kurikulum yang baik, akan mampu menjawab atau memenuhi kebutuhan pedagogik peserta didik akan *knowledge and skills* yang sesuai atau relevan terutama pada aspek pedagogik dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas. Jelas kiranya bahwa pendidikan bahasa atau pendidikan literasi harus diarahkan pada *Enabling the learners to have competencies in active communication* baik lisan maupun tulisan. Desain harus

memuat *Competencies of language knowledge and skill of English* yang dibutuhkan peserta didik, terutama menyiapkan peserta didik untuk menjadi pendidik di level pendidikan anak usia dini atau sekolah dasar dengan kemampuan bahasa Inggris. 3) Practical Implication. Secara praktis, desain kurikulum yang baik dapat meng-*change* aspek *pedagogy of information-transmission* kearah *pedagogy of communicative skill*. Pada tataran level program, desain kurikulum yang berbasis *Communicative Competence* ini memuat berbagai alternative wawasan untuk mengembangkan *Professional skills* dalam pengajaran bahasa termasuk *planning, organizing/implementing, dan evaluating the program*. Di tingkat institusi, desain kurikulum ini sangat relevan karena program akan mampu menyediakan dan memberikan *knowledge* dan *skill* yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dalam pengajaran bahasa Inggris.

Banyak teori yang bisa dipakai sebagai dasar dalam mengembangkan desain kurikulum bahasa Inggris terutama untuk *Teacher Training* diantaranya yaitu: *English language syllabus design* oleh Nunan (1988, 1999); Widdowson (1984); Nation and Macalister (2010), dan juga teori desain kurikulum yang menekankan pada *communicative competence* Hymes (1972, 1974); Canale and Swain (1980), Canale (1983), Scarcella, Andersen, and Krasen (1990), Savignon (1997), yang mencakup 4 area *knowledge and skills: grammatical competence, sociolinguistic competence, discourse competence, dan strategic competence*. Keberhasilan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi tidak lepas dari penguasaan *communicative competence* dari pengguna bahasa itu sendiri dan penggunaan bahasa tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh aspek *socio-cultural* pada komunitas dimana bahasa itu dipakai. Desain kurikulum ini dimaksudkan untuk menentukan formula yang tepat dan lebih efektif dalam mengembangkan *students' communication skills* dibandingkan dengan metode lama yaitu *traditional, grammar-oriented approach* yang terbukti kurang efektif.

Pemahaman konsep dan implementasi *communicative competence* dalam pengajaran bahasa di kelas memerlukan perhatian tersendiri, terutama terkait adaptasi dan pengalaman akademik para pendidik dan peserta didik. Mengingat hal tersebut, implementasi teori terkini tentang *communicative competence in*

*English language teaching* perlu adanya tahapan tertentu atau bisa berupa tahapan transisi dalam proses pengembangannya yaitu dari versi lama *traditional, grammar-oriented approach* ke arah formula baru yaitu *communicative competence approach*.

Dalam tahapan transisi, desain kurikulum dapat dikembangkan dengan kombinasi antara *structurally based* dengan perspektif baru yaitu *communicative competence*. Ini berarti, dalam tahapan ini, desain kurikulumnya belum sepenuhnya *communicative competence based* karena masih di kombinasikan dengan perspektif lama yaitu *structural linguistics*.

Proses pengembangan kurikulum bahasa Inggris dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) *exploration*, dimana tahapan ini dilakukan dengan cara menganalisis kelemahan dan kelebihan sistem terdahulu atau kurikulum lama dan juga menganalisis *the students needs* atau kebutuhan riil peserta didik melalui cara-cara yaitu kuisioner, wawancara, dan observasi, (2) *draft development*, dalam tahapan ini, kurikulum di desain dalam *prototype* atau draf awal, (3) *field testing*, kemudian tahapan selanjutnya adalah menguji cobakan desain tersebut di dalam kelas untuk dapat dilihat kekuatan dan kelemahannya serta keefektifan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan desain, dan (4) *finalization*, langkah terakhir adalah finalisasi desain melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dan juga melalui *expert judgment*.

Prosedur dalam menentukan *competencies and tasks* dapat merujuk teorinya Long (1985a). Dia menyatakan bahwa "*the target competencies and tasks should be identified through needs analysis*". Seperti dalam penelitiannya Mustadi (2011), terdapat 8 *competencies* utama dan 10 *tasks* utama yang teridentifikasi selama proses pengajaran dan pembelajaran dan teridentifikasi melalui *needs analysis*. *Competencies* dan *tasks* tersebut adalah: a) *grammatical competence*, b) *sociolinguistic competence*, c) *discourse competence*, dan d) *strategic competence*. Sedangkan ke 10 *tasks* adalah: 1) spelling alphabets/letters and numbers, and pronouncing English sounds (*phonological competence*); 2) understanding main words and functional words (*lexical competence*); 3) understanding the rules of noun phrase & constructing and presenting description

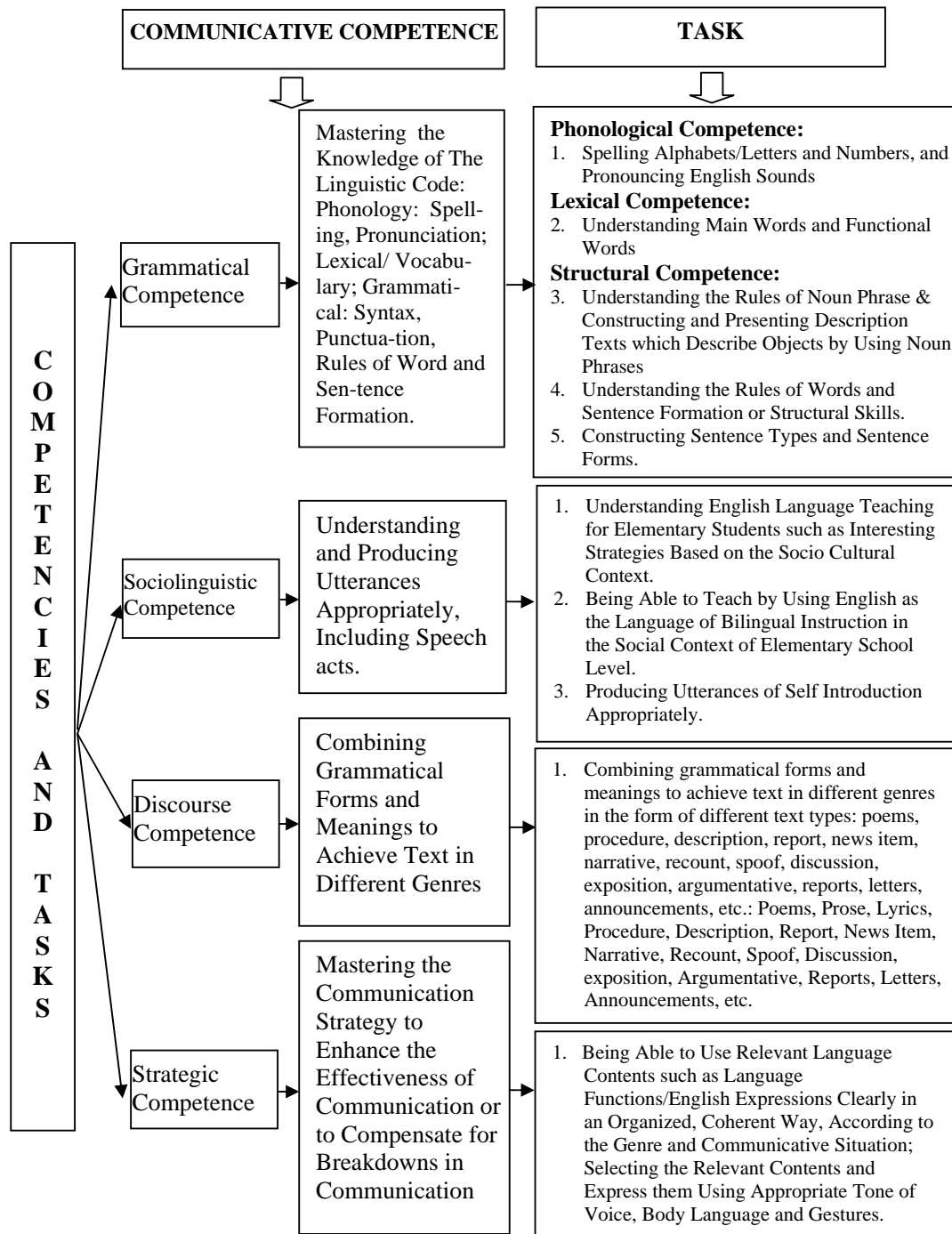
texts which describe objects by using noun phrases; 4) understanding rules of words and sentence formations or structural skills (Singular and plural, Sentence components (*main words, functional words*), Adverbs of frequency (*some, much, a little, many, a lot of, a few, any*), relative clauses (*who, that, which, whom, whose, where*), tenses; active and passive voices, direct and indirect speeches, degrees of comparison, gerunds and to infinitives, affixes and derivatives, conditional sentences, relatives/adjective clauses (*who, which, that, whom, whose*), Causatives (*have, make, get*), use of wish, etc); 5) constructing sentence types: simple, compound, and complex sentences; and constructing sentence forms: statement, interrogative, imperative, request, and exclamation sentences (*structural competence*); 6) understanding English language teaching for elementary schools students such as interesting strategies based on the socio cultural context; 7) being able to teach by using English as the language of bilingual instruction in the social context of elementary school level; 8) producing utterances of self introduction appropriately; dan 9) combining grammatical forms and meanings to achieve text in different genres in the form of different text types; 10) being able to use relevant language contents such as language functions/English expressions clearly in an organized, coherent way, according to the genre and communicative situation; selecting the relevant contents and express them using appropriate tone of voice, body language and gestures.

Kemudian setiap *task* dianalisa masing- *topics* dan *language functions*, selain itu juga diidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi atau berkontribusi pada setiap *task*. Lebih lanjut, dalam rangka analisis, setiap *task* selalu di *refer* pada *competence* tertentu (Long, 1985a) dengan maksud bahwa *task* merupakan bagian dari *competence*. Setiap *task* kemudian dianalisa masing-masing *topics* dan *language functions*, disamping itu pula perlu diidentifikasi masing-masing kesulitan yang mungkin muncul, dalam kata lain perlu adanya pembahasan tentang *tasks difficulties* yang teridentifikasi selama proses *English teaching and learning*, atau factor-faktor yang dapat mempengaruhi atau berkontribusi terhadap *the difficulty of the tasks*.

Implementasi *competence and task* dan analisa tiap-tiap *competency and task* didasarkan pada langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan oleh pendidik dalam sistem dan proses pembelajaran. Sedangkan Mustadi (2011) mengidentifikasi 2 strategi dalam implementasi *Competence* dan *Task* di kelas disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing *competence* dan *task* yaitu 1) *Four Teaching-Learning Cycles* yang dipelopori oleh Burns and Joyce 1991 (*adapted from Callaghan and Rothery, 1988*), keempat langkah itu adalah *building knowledge of the field, modeling of text, joint construction, and independent construction*, dan 2) *Three Muranoi's Interaction Enhancements* (*cited in Doughty & Williams, 1998:241-242*), langkah-langkah tersebut adalah *rehearsal phase, performance phase, and debriefing phase*.

Desain system pembelajaran bahasa Inggris sebagaimana disebut di atas merupakan jawaban dari permasalahan sebagaimana tersebut di awal bahwa system pembelajaran bahasa Inggris khususnya bagi calon guru PAUD dan SD harus di redesain berbasis *communicative competence* sesuai dengan kebutuhan dan profesi peserta didik *need analysis*. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini system pembelajaran bahasa Inggris terutama di tingkat dasar masih menitikberatkan pada *English knowledge* atau *passive English*, sehingga dengan desain ini diharapkan ada perubahan menuju *communicative skill* atau *active English*. Selain itu, desain ini memungkinkan para pendidik untuk dapat meng-*create* system pembelajaran bahasa Inggris terutama di tingkat dasar dan usia dini menjadi efektif dan menyenangkan, karena menurut Mustadi (2011) bahwa *The key word of English language teaching for young learners is fun*".

Perbedaan antara system pembelajaran bahasa Inggris yang lama dengan desain baru ini adalah pada *content* dan *strategy* dalam implementasi. Desain ini pula dapat meng-*match* kan antara tujuan/*goals* yang ada ditawarkan atau yang ada dalam program pengajaran bahasa Inggris dengan kebutuhan peserta didik dimasa yang akan datang. Yaitu bagaimana menyiapkan peserta didik untuk mampu "*to acquire the necessary language skills needed in their future job as the professional elementary school teachers*". Sedangkan *Competency* dan *Task* yang dimaksud yaitu sebagaimana tertera pada figure berikut ini,





## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa desain kurikulum bahasa Inggris yang dimaksud adalah *Competency-Task Based Design*, dimana desain ini dikembangkan berbasis pada *Communicative Competence* yang mencakup 4 area kompetensi: *Grammatical Competence*, *Sociolinguistic Competence*, *Discourse Competence*, dan *Strategic Competence* yang kemudian dalam implementasinya bisa disederhanakan kedalam minimal 10 *Tasks*. Selain itu, *competence* dan *task* tersebut diintegrasikan kedalam keempat *English Basic Skills* yaitu *speaking*, *listening*, *reading*, dan *writing*. Dalam proses pembelajarannya, *competency* dan *tasks* tersebut diimplementasikan dalam 2 strategi, yaitu: 1) *Four Teaching-Learning Cycles* yang dipelopori oleh Burns and Joyce 1991 (*adapted from* Callaghan and Rothery, 1988), dan 2) *Three Muranoi's Interaction Enhancements* (*cited in* Doughty & Williams, 1998:241-242).

Desain system pembelajaran bahasa Inggris ini mengandung implikasi sebagai berikut: 1) Desain ini *recommended* untuk diterapkan pada pembelajaran bahasa Inggris terutama untuk *Earlychildhood or elementary school teacher training program* karena pendidikan ditingkat dasar sangat penting sebagai persiapan proses pembelajaran di tingkat lanjut. Dalam penerapan desain ini, perlu memilah-milah *structural items/grammatical knowledge* yang relevan untuk dapat diintegrasikan secara sinergis dengan tiap *competence and tasks* untuk membangun *communicative skill* untuk diarahkan pada *active communication*; 2) Terdapat 3 hal yang harus dipenuhi. Pertama, penyelenggara program harus menyediakan *physical and academic support* karena implementasi desain ini memerlukan fasilitas dan sarana belajar yang sesuai sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan serta dapat dilaksanakan secara maksimal. Kedua, implementasi desain ini memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang *communicative competence in English language teaching* baik dari pendidik maupun peserta didik dan jika perlu diselenggarakan *course training* terutama tentang *communicative competence in English language teaching*, konsep tentang *competency-task based language teaching*, *task grading and sequencing*, *teaching techniques/strategies*,

*media, and assessment or evaluation.* Ketiga, implementasi desain ini memerlukan alokasi waktu yang memadai baik untuk *competence* dan *task* yang sifatnya teori/*knowledge* maupun yang praktek/*skill* sehingga harapannya isitem pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal; 3) Desain *communicative competence* ini masih dapat dikembangkan baik secara teori maupun praktik melalui penelitian lebih lanjut, terutama pada *material design* dan juga pada *assessment and evaluation design*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, G. (1978). *ELT Documents: Individualization*. London: The British Council.
- Allen, J. P. B. (1984). "General-Purpose Language Teaching: A Variable Focus Approach". In C. J. Brumfit. *General English Syllabus Design* (pp: 61-74). Oxford: Pergamon Press.
- Benesch, S. (1996). "Needs Analysis and Curriculum development in EAP: An Example of a Critical Approach". *TESOL Quarterly*, 30(4), 723-738.
- Berko-Gleason, J. (1985). *The Development of Language*. Columbus, OH: Merrill.
- Berwick, R. (1993). "Towards an Educational Framework for Teacher-led Tasks". In G. Crookes & S. Gass (eds.), *Tasks in a Pedagogical Context: Integrating Theory and Practice* (pp. 97-124). Adelaide: Multilingual Matters.
- Breen, M. P. (1987). "Contemporary Paradigms in Syllabus Design". *Part II. Language Teaching*, 20(3), 157-166.
- Brewer, J. A. (2007). *Introduction to Early Childhood Education: Preschool through Primary Grades*. 6<sup>th</sup> ed. Unites States. Pearson Education, Inc.
- Brindley, G. P. (1984). *Need Analysis and Objective Setting in Adult Migrant Education Program*. Sydney: NSW Adult Migrant Education Service.
- Brown, J. D. (1995). *The Elements of Language Curriculum*. Boston: Heinle & Heinle Publishers.
- Bygate, M; Skehan, P; and Swain, M. (2001). "Introduction". In M. Bygate, P. Skehan, and M. Swain (eds.), *Researching Pedagogic Tasks* (pp.1-20). Harlow: Pearson Education.
- Canale, M. and M. Swain. (1980). "Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing". *Applied Linguistics* 1/1:1.-47.
- Canale, M. (1983). "From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy". In J.C. Richards and R.W. Schmidt, (eds.). *Language and Communication*. New York: Longman.

- Candlin, C. N. (1987). "Towards Task-based Language Learning". In C. N. Candlin & D. F. Murphy (Eds.) *Language Learning Tasks* (pp. 5-22). Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Clark, J. L. (1987). *Curriculum Renewal in Foreign Language Learning*. Oxford: Oxford University Press.
- Crocker, T. (1981). "Scenes of Endless Science: ESP and Education". In J. McDonough and T. French, *ELT Documents 112, The ESP Teacher: The Role, Development and Prospects*. London: The British Council.
- Curtain, H. and Dahlberg, C. A. (2010). *Language and Children, Making the Match; New Language for Young Learners, Grade K-8* (4<sup>th</sup> ed.). Boston, M.A.: Pearson education Inc.
- Dick, W., and Carey, L. (2001). *The Systematic Design of Instruction* (5<sup>th</sup> ed.). New York: Longman
- Dudley-Evans, T. and St John, M. J. (1998). *Developments in ESP: A Multi-Disciplinary Approach*. New York: Cambridge University Press.
- Early, P. B. (1981). *The ESP Teacher's Role: Implications for the Knower-Client Relationship*, pp: 25-46. London: The British Council.
- Ellis, R. (1998). *Classroom Second Language Development*. New York: Prentice Hall.
- \_\_\_\_\_. (2000). *Task-Based Research and Language Pedagogy*. *Language Teaching Research*, 4(3), 193-220.
- Faridi, A. (2008). *Pengembangan Model Materi Ajar Muatan Lokal Bahasa Inggris di Sekolah Dasar Jawa Tengah yang Berwawasan Sosiokultural*. Dissertation, Semarang: State University of Semarang.
- Finney, D. (2002). "The ELT Curriculum: A Flexible Model for a Changing World". In J.C. Richards and W.A Renandya (eds.), *Methodology in Language Teaching: an Anthology of Current Practice* (pp.69-79). New York: Cambridge University Press.
- Gardner, R. (1992). "What Now in English Language Curriculum in Australia?" *Prospect*, 7, 3:67-75.
- Halliday, M. A. K. (1970). "Language Structure and and Language Function". In J. Lyons (ed.) *New Horizons in Linguistics*. Harmondsworth, England: Penguin.
- Hutchinson, T. and Waters, A. (1987). *English for Specific Purposes: A Learning-Centered Approach*. New York: Cambridge University Press.
- Hymes, D. (1971). "Competence and Performance in Linguistic Theory". In R. Huxley and E. Ingram (eds.) *Language Acquisition: Models and Methods*. London: Academic Press.
- \_\_\_\_\_. (1972). "On Communicative Competence", in J.B. Pride and J. Holmes, (eds.): *Sociolinguistics*. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Education, 269-93
- Johnson, R. K. (1989). *The Second Language Curriculum*. Cambridge: Cambridge University Press.
- \_\_\_\_\_. (1992). "TESOL; Teacher-training for Content Subject Teachers in L2 Immersion Programs". In J. Flowerdew, M. Brock, & S. Shia (eds.),

- Perspectives on Second Language Teacher Education* (pp. 167-185). Hong Kong: City Polytechnic of Hong Kong.
- Jordan, R. R. (1997). *English for Academic Purposes: A Guide and Research Book for Teachers*. New York: Cambridge University Press.
- Kelly, A. V. (1989). *The Curriculum: Theory and Practice*. London: Paul Chapman Publishing.
- Kern, R. (1990). "Use of Competency-Based Course Syllabus and Its Effects on Student Performance in Introductory Computer Courses." *Community/Junior College Quarterly of Research and Practice*, 14: 115-122.
- Littlewood, W. (1991). "Curriculum Design". In R. Bowers and C. Brumfit. *Applied linguistics and English Language Teaching*. PP: 11-22. London: MacMillan Publishers.
- Long, M. H. and Crookes, G. (1992). "Three Approaches to Task-Based Syllabus Design". *TESOL Quarterly*, 26 (1), 27-55.
- \_\_\_\_\_. (1993). "Units of Analysis in Syllabus Design – The Case for Task". In G. Crookes and S.M Gass. *Tasks in a Pedagogical Context: Integrating Theory and Practice* (pp: 92-118). Adelaide: Multilingual Matters.
- Lynch, B. K. (1996). *Language Program Evaluation*. New York: Cambridge University Press.
- Mc. Donough, J. (1984). *ESP in Perspective: A Practical Guide*. London: Joe Mc Donough.
- Mustadi, A. (2011). *English Syllabus Design for Elementary School Teacher Education Department, Faculty of Education, State University of Yogyakarta: A Study to Develop an Alternative English Syllabus*. Dissertation, Semarang: State University of Semarang.
- Nation, I. S. P. and Macalister, J. (2010). *Language Curriculum Design*. New York: Taylor & Francis.
- Nelson, Katherine. (1973). "Structure and Strategy in Learning to Talk." *Monographs of the society for Research in Child development*, 38: 149.
- Nunan, D. (1988a). *The Learner-Centered Curriculum*. New York: Cambridge University Press.
- \_\_\_\_\_. (1988b). "Teaching Grammar in Context". *English Language Teaching Journal*, 52(2), 101-109.
- \_\_\_\_\_. (1988c). *Syllabus Design*. New York: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_. (1989). *Designing Tasks for the Communicative Classroom*. New York: Cambridge University Press.
- \_\_\_\_\_. (1999). *Second Language Teaching and Learning*. Boston: Heinle & Heinle Publishers.
- Olive, P. F. (1982). *Developing the Curriculum*. Boston: Little, Brown and Company.
- Paltridge, B. (1994). "Genre Analysis and the Identification of Textual Boundaries". *Applied Linguistics*, 15 (3), 288-299.

- Paulston, C. (1974). "Linguistic and Communicative Competence". *TESOL Quarterly* 8:347-362.
- Prabhu, N. S. (1987). *Second Language Pedagogy*. Oxford: Oxford University Press.
- Richards, J. C. (1984). "Language Curriculum Development". *RELC Journal*, 15(1), 1-29.
- \_\_\_\_\_. (2001). *Curriculum Development in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richards, J. C. and Rodgers, T. S. (1986). *Approaches and Methods in Language Teaching*. New York: Cambridge University Press.
- Robinson, P. (1991). *ESP Today: A Practitioner's Guide*. New York: Prentice Hall.
- \_\_\_\_\_. (1998). *Task-Based Syllabus*. <http://langue.hyper.chubu.ac.jp>
- Rodgers, T. S. (2001). *Language Teaching Methodology*. ERIC Digest ( <http://www.cal.org/erieel/digest/rodgers.html>)
- Rukmini, D. (2007). *The Rhetorical Development Realizations of Reading Texts in the Senior High School English Text Books*. Dissertation, Semarang: State University of Semarang.
- Sadeghian, J. B. (1981). *Syllabus Design and Communicative Language Teaching*. Dissertation. Washington, D.C.: Georgetown University
- Samimy, K. K., & Kobayashi, C. (2004). "Toward the development of intercultural communicative competence: Theoretical and pedagogical implications for Japanese English teachers". *JALT Journal*, 26 (2): 245-261.
- Samuda, V. (2001). "Guiding Relationship between Form and Meaning during Task Performance: The Role of the Teacher". In M. Bygate et.al (eds.), *Researching Pedagogic Tasks: Second Language Learning, Teaching and Testing* (pp. 119-140). Harlow: Pearson Education.
- Savignon, S. J. (1997). *Communicative Competence Theory and Classroom Practice; Texts and Contexts in Second Language Learning*. Second edition. United States of America: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Scarcella, R.C., Andersen, E.S., and Krasen, S.D. (1990). *Developing Communicative Competence in a Second Language*. Boston, Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers.
- Widdowson, H. G. (1978). *Teaching Language as Communication*. Oxford: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_. (1984). "Educational and Pedagogical Factors in Syllabus Design". In C. J. Brumfit (ed.), *General English Syllabus Design* (pp. 23-28). Oxford: Pergamon Press.
- \_\_\_\_\_. (1987). "Aspects of Syllabus Design". In M. Tickoo (ed.), *Language Syllabuses: States of The Art* (pp. 65-89). Singapore: RELC
- \_\_\_\_\_. (1990). *Aspects of Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press.

## BIODATA

- a. Nama lengkap & gelar : Dr. Ali Mustadi, M.Pd
- b. NIP : 19780710 200801 1 012
- c. Tempat / Tanggal Lahir : Kudus, 10 Juli 1978
- d. Jenis Kelamin : Laki-laki
- e. Status Perkawinan : Kawin
- f. Agama : Islam
- g. Unit Kerja : PPSD,FIP,Universitas Negeri Yogyakarta
- h. Alamat PT : Kampus Karangmalang, Jl . Colombo,  
Yogyakarta, 55281
- i. Bidang Keahlian : Pendidikan Bahasa Inggris
- j. Alamat Rumah : Jln. Samas Km. 20 Celep, dk. 3,  
Srigading, Sanden, Kode Pos 55763,  
Bantul, Yogyakarta
- k. Telephone : Hp. 081328089490
- l. e-mail : [aly\\_uny@yahoo.com](mailto:aly_uny@yahoo.com)

# REDESAIN KURIKULUM S<sub>1</sub> PENDIDIKAN IPA MENUJU *STANDARDS FOR SECONDARY SCIENCE TEACHER PREPARATION*

Insih Wilujeng  
Prodi Pendidikan IPA, Jurdik Fisika, FMIPA, UNY  
[insihuny@yahoo.co.id](mailto:insihuny@yahoo.co.id)

## Abstrak

Lulusan Program Studi Pendidikan IPA jenjang S<sub>1</sub> memiliki salah satu kewenangan yaitu menjadi guru IPA SMP/MTs. *National Science Teachers Association* (NSTA) dan Permendiknas No 16 Tahun 2007 merekomendasikan bahwa guru-guru IPA sekolah menengah harus memiliki kecenderungan interdisipliner pada sains (IPA) atau *integrated science*. Kecenderungan interdisipliner pada IPA harus diartikan dalam perspektif yang lebih luas yang mengacu pada *standards of content; nature of science; inquiry; issues; general skills of teaching; curriculum; science in the community; assesment; safety and welfare* serta *professional growth*. Tujuan untuk mengacu pada *standards for secondary science preparation*, maka Program Studi S<sub>1</sub> Pendidikan IPA sangat perlu melakukan peninjauan kembali kurikulum yang telah ada. Salah satu bentuk redesign kurikulum S<sub>1</sub> Pendidikan IPA adalah penghapusan beberapa mata kuliah, menambahkan SKS dan revisi deskripsi mata kuliah yang sudah ada serta pengembangan mata kuliah baru guna membekali *pedagogy content knowledge integrated science* berbasis standar bagi lulusannya..

**Kata-kata kunci:** redesign kurikulum, *integrated science, standards for secondary science teacher preparation*

## Pendahuluan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru menyebutkan bahwa kompetensi guru mata pelajaran IPA SMP/MTs salah satunya adalah memahami hubungan antar berbagai cabang IPA, dan hubungan IPA dengan matematika dan teknologi. Sebagai usaha untuk memenuhi tuntutan tersebut, guru-guru IPA SMP/MTs hendaknya disiapkan untuk memiliki kompetensi dalam biologi, kimia, fisika, bumi dan antariksa serta bidang IPA lainnya, seperti kesehatan, lingkungan, dan astronomi.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 26 menyebutkan, bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi

anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya dalam pasal 28, ayat (1) disebutkan, bahwa pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada ayat (2) disebutkan, bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 tahun 2008 pasal 2 ayat (2) menyebutkan, bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Pada ayat (4) dijelaskan, bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, sedangkan pada ayat (7) dijelaskan, bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya.

Mulai tahun akademik 2007/2008, beberapa universitas yang dulunya IKIP khususnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) telah membuka Program Studi Pendidikan IPA. Kurikulum Program Studi Pendidikan IPA jenjang  $S_1$  di LPTK Yogyakarta (2007: 58) memiliki visi mewujudkan program studi yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di abad 21 (di era global) dalam pendidikan IPA. Apabila dikaitkan dengan pasal 28 PP No. 19 Tahun 2005, khususnya ayat 2 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran ternyata jika ditelaah terdapat kesesuaian dengan rumusan dalam kompetensi lulusan Program Studi Pendidikan IPA di LPTK tersebut.

Program Studi jenjang  $S_1$  Pendidikan IPA bertujuan menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan dengan gelar Sarjana Pendidikan Sains bidang keahlian pendidikan IPA (S.Pd.Si.) yang memiliki kompetensi dasar tenaga



pendidik bidang IPA, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Mahasiswa program studi pendidikan IPA di LPTK Yogyakarta berdasarkan kurikulum 2002 (2007: 59) memiliki beban 136 SKS mata kuliah wajib dan 8 SKS mata kuliah pilihan, sehingga jumlah total 144 SKS. Mata kuliah wajib 136 SKS tersebut memiliki distribusi 9 SKS mata kuliah pengembangan kepribadian; 69 SKS mata kuliah keilmuan dan keterampilan; 51 SKS mata kuliah keterampilan berkarya; 4 SKS mata kuliah perilaku berkarya dan 3 SKS mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Distribusi mata kuliah wajib bertujuan menyiapkan mahasiswa pada 4 kompetensi sebagai calon guru. Selain itu mata kuliah juga dikelompokkan berdasarkan standar kompetensi guru pemula SMP yang meliputi standar penguasaan bidang studi, standar pemahaman tentang peserta didik, standar penguasaan pembelajaran yang mendidik dan standar pengembangan kepribadian dan keprofesionalan (Dirjen DIKTI, 2004: 11).

Lulusan Program Studi Pendidikan IPA memiliki beberapa kewenangan, salah satunya menjadi guru IPA SMP/MTs. Apabila kita kaitkan dengan rekomendasi guru IPA sekolah dasar dan menengah dari NSTA (2003: 8) dan Permendiknas (2007: 26) ternyata juga terdapat kesesuaian, yaitu bahwa guru-guru IPA sekolah menengah harus memiliki kecenderungan interdisipliner pada sains (IPA) atau lebih dikenal dengan istilah *integrated science*.

Persiapan bagi mahasiswa S<sub>1</sub> pendidikan IPA agar memiliki kompetensi *integrated science* di LPTK Yogyakarta belum terlihat secara nyata, karena pada tahun pertama mahasiswa mendapatkan mata kuliah fisika dasar dan praktikumnya pada semester I, biologi dasar dan praktikumnya pada semester II, serta kimia dasar dan praktikumnya pada semester III dengan bobot 3 sks untuk teori dan 1 sks untuk praktikum dan berlaku untuk masing-masing mata kuliah. Pada perkuliahan semester III mahasiswa juga mendapatkan mata kuliah IPA-1 dan Ilmu Kebumihan, semester IV mendapatkan mata kuliah IPA-2 dan Astronomi, dan semester V mendapatkan mata kuliah IPA-3, dimana pada saat sekarang IPA-1 adalah perkuliahan materi IPA (fisika, biologi dan kimia) untuk konsep IPA kelas VII dan IPA-2 adalah perkuliahan materi IPA (fisika,biologi dan kimia)

untuk konsep IPA kelas VIII dan IPA-3 adalah perkuliahan materi IPA (fisika, biologi dan kimia) untuk konsep IPA kelas IX. Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan perkuliahan IPA-1, IPA-2 dan IPA-3 masih belum membekali mahasiswa pada integrasi IPA, karena penyajian perkuliahan masih terpisah serta pedagogisnya juga belum nampak. Mata kuliah praktikum IPA-1, praktikum IPA-2 dan praktikum IPA-3 juga masih belum menunjukkan adanya integrasi IPA, karena ketiga mata kuliah praktikum tersebut hanya penggabungan saja dari mata kuliah-mata kuliah praktikum fisika, biologi dan kimia.

Berdasar pada kondisi nyata tentang implementasi Kurikulum 2007 FMIPA tersebut, maka guna membekali *integrated science* mahasiswa sebagai calon guru IPA SMP/MTS, dilakukan peninjauan terhadap kurikulum 2007 menjadi Kurikulum 2010. Adapun fokus peninjauan adalah menambah SKS, mengganti nama, mengubah deskripsi, dan menghapus mata kuliah prasarat dari aspek materi dan pedagogi yang dirasa tumpang tindih serta mengembangkan mata kuliah baru, yaitu IPA terintegrasi dan pembelajarannya.

### ***Standards for Science Teacher Preparation***

NSTA (2003) menetapkan 10 standar bagi persiapan guru IPA, meliputi standar isi (*content*), hakikat IPA (*nature of science*), inkuiri (*inquiry*), isu-isu IPA (*issues*), keterampilan umum mengajar (*general skills of teaching*), kurikulum (*curriculum*), komunitas IPA (*science in the community*), penilaian (*assessment*), keselamatan dan kesejahteraan (*safety and welfare*), serta pengembangan profesional (*professional growth*).

Standar isi IPA merekomendasikan, bahwa guru IPA harus memahami dan mengemukakan pengetahuan IPA dan praktik IPA secara aktual. Guru IPA dapat menghubungkan dan menginterpretasikan konsep-konsep, ide-ide IPA dan mengaplikasikannya di lapangan. Guru IPA dapat melakukan penyelidikan ilmiah. Parameter persiapan guru IPA yang memiliki standar isi, harus menunjukkan bahwa guru IPA:

- a. Memahami dan berhasil menyampaikan konsep-konsep utama, prinsip-prinsip, teori-teori, hukum-hukum IPA pada siswa serta membuat keterkaitan dalam aplikasi di lapangan.

- b. Memahami dan berhasil menyampaikan kesatuan konsep IPA pada siswa
- c. Memahami dan berhasil menyampaikan aplikasi IPA dalam bidang teknologi dan kepentingan personal siswa
- d. Memahami penelitian dan berhasil merancang, melaksanakan, membuat laporan serta mengevaluasi penyelidikan IPA
- e. Memahami dan berhasil menggunakan matematika dalam proses pelaporan data, memecahkan masalah IPA di lapangan

Guru IPA harus mengajak siswa untuk membedakan IPA dan non IPA, memahami evolusi dan praktik IPA sebagai usaha manusia, serta kritis dalam menganalisis tuntutan dalam IPA. Parameter persiapan guru IPA yang memiliki standar hakikat IPA, harus menunjukkan bahwa guru IPA:

- a. Memahami terhadap sejarah dan perkembangan IPA serta evolusi IPA
- b. Memahami filosofi, asumsi, tujuan dan nilai-nilai yang membedakan IPA dari teknologi
- c. Mengajak siswa berhasil dalam belajar hakikat IPA, kritis dalam menganalisis kesalahan atau ketidakjelasan dalam IPA.

Guru IPA mengajak siswa-siswanya belajar variasi metode inkuiri ilmiah dan aktif belajar melalui inkuiri ilmiah. Parameter persiapan guru IPA yang memiliki standar inkuiri ilmiah, harus menunjukkan bahwa guru IPA:

- a. Memahami proses, prinsip dan asumsi dari metode inkuiri dalam menemukan pengetahuan ilmiah
- b. Mengajak siswa berhasil mengembangkan inkuiri yang tepat dalam mengembangkan konsep dan hubungan pengamatan, data dan kesimpulan secara ilmiah

Guru IPA harus siap untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan berkaitan dengan IPA, teknologi dan isu-isu IPA dalam masyarakat umum. Parameter persiapan guru IPA yang memiliki standar isu-isu IPA, harus menunjukkan bahwa guru IPA:

- a. Memahami pentingnya isu-isu IPA di masyarakat berkaitan dengan teknologi, menggunakan proses ilmiah dalam menganalisis dan membuat keputusan terkait dengan isu-isu IPA tersebut
- b. Mengajak siswa berhasil dalam menganalisis masalah, mempertimbangkan resiko, keuntungan dan pemecahan alternatif, menghubungkan isu-isu dengan pengetahuan, tujuan dan nilai-nilai mulia.

Guru IPA menciptakan komunitas untuk memberi fasilitas pada perbedaan karakteristik siswa dalam belajar. Guru IPA menggunakan dan mempertimbangkan variasi manajemen kelas, pengelompokan, aksi, strategi dan metodologi. Parameter persiapan guru IPA yang memiliki standar keterampilan umum mengajar, harus menunjukkan bahwa guru IPA:

- a. Memvariasikan aksi, strategi dan metode dalam pembelajaran guna mengembangkan keterampilan ganda dan tingkat pemahaman siswa.
- b. Berhasil mengembangkan pembelajaran IPA dengan perbedaan kemampuan, kebutuhan, minat dan latar belakang siswa
- c. Berhasil mengorganisasi dan mengajak siswa dalam pembelajaran kolaborasi menggunakan strategi pembelajaran kelompok siswa.
- d. Berhasil menggunakan piranti teknologi, meliputi teknologi komputer untuk mengakses sumber, mengumpulkan dan memproses data serta memfasilitasi pembelajaran science.
- e. Memahami dan membangun keyakinan awal, pengetahuan, pengalaman dan minat siswa secara efektif.
- f. Menciptakan dan mengatur keselamatan psikologi dan sosial serta lingkungan pembelajaran yang sportif

Guru IPA merencanakan dan menciptakan kurikulum yang aktif, koheren

dan efektif serta konsisten dengan tujuan yang mengacu pada standar. Parameter persiapan guru IPA yang memiliki standar kurikulum, harus menunjukkan bahwa guru IPA:

- a. Memahami standar kurikulum dan dapat mengidentifikasi, mengakses, serta menciptakan sumber dan aktivitas pendidikan IPA yang konsisten dengan standar.
- b. Menencanakan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis standar dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan siswa

Guru IPA menghubungkan bidang ilmu IPA dengan masyarakat lokal dan

regional menyangkut dengan pembuat keputusan serta menggunakan sumber individual, institusional, alam dalam masyarakat untuk kepentingan pembelajaran IPA. Parameter persiapan guru IPA yang memiliki standar masyarakat IPA, harus menunjukkan bahwa guru IPA:

- a. Mengidentifikasi cara-cara untuk menghubungkan IPA dengan masyarakat (pembuat keputusan) dan menggunakan sumber-sumber masyarakat untuk mengembangkan pembelajaran IPA.
- b. Mengajak siswa berhasil dalam aktivitas yang berhubungan dengan sumber-sumber IPA dan pembuat keputusan di masyarakat atau untuk memberikan pemecahan permasalahan-permasalahan penting di masyarakat.

Guru IPA menyusun dan menggunakan strategi penilaian yang efektif untuk menentukan latar belakang dan hasil belajar siswa serta memfasilitasi perkembangan kemampuan intelektual, sosial dan personal siswa. Parameter persiapan guru IPA yang memiliki standar penilaian, harus menunjukkan bahwa guru IPA:

- a. Menggunakan strategi penilaian beragam sesuai tujuan pembelajaran
- b. Menggunakan hasil penilaian untuk memandu dan memodifikasi pembelajaran lingkungan kelas dan proses penilaian.
- c. Menggunakan hasil penilaian untuk menganalisis dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan

Guru IPA mengorganisasikan lingkungan pembelajaran yang aman dan efektif untuk mewujudkan keberhasilan siswa dalam belajar. Parameter persiapan guru IPA yang memiliki standar keselamatan dan kesejahteraan IPA, harus menunjukkan bahwa guru IPA:

- a. Memahami tanggung jawab legal dan etika pembelajaran IPA guna keselamatan siswa, melindungi makhluk hidup dan mengelola bahan-bahan pembelajaran di lingkungan.
- b. Mengetahui dan mempraktikkan keselamatan dan kesejahteraan dalam pembelajaran (keselamatan kerja laboratorium dan penggunaan sumber belajar di lingkungan dengan tetap menjaga kelestariannya),
- c. Mengetahui prosedur keselamatan, mengatur peralatan keselamatan dalam [pembelajaran IPA
- d. Memperlakukan semua makhluk hidup dan sumber belajar alam dengan selalu memikirkan kelestariannya.

Guru IPA secara terus menerus berusaha mengembangkan kemampuan personal, profesional. Parameter persiapan guru IPA yang memiliki standar pertumbuhan profesional, harus menunjukkan bahwa guru IPA:

- a. Aktif dan terus menerus mengambil kesempatan mengembangkan profesional dan kepemimpinan
- b. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran agar semakin berkembang profesionalismenya
- c. Menggunakan informasi dari siswa tentang pembelajaran yang sudah dilakukan untuk terus menumbuhkan profesionalismenya
- d. Berinteraksi secara efektif dengan teman sejawat, orang tua dan siswa serta masyarakat untuk peningkatan profesionalismenya.

### **Redesain Kurikulum S<sub>1</sub> Pendidikan IPA**

Analisis kurikulum S<sub>1</sub> Pendidikan IPA diperoleh daftar mata kuliah prasyarat untuk *integrated science* dari aspek *content* dan aspek *pedagogy* (juga penetapan jenis program *integrated science* sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Mata kuliah prasyarat aspek *content* yang meliputi Biologi Dasar, Fisika Dasar, Kimia Dasar, Ilmu Kebumihan, Ilmu Lingkungan dan Astronomi sudah sesuai dengan rekomendasi standar isi (NSTA, 2003:8-9) meliputi standar Biologi, Kimia dan Fisika. Khusus untuk Ilmu Kebumihan (struktur bumi, karakteristik dan

pentingnya lautan, danau, sungai dan siklus air, karakteristik atmosfer termasuk cuaca, iklim, terjadinya resiko seperti tornado, badai dan gempa bumi); Astronomi (struktur benda dan sistem di ruang angkasa, evolusi, sejarah dan tempat dalam sistem tata surya) masuk dalam standar Fisika. Standar isi khusus untuk Sains-Fisika sekolah menengah juga sudah sesuai dengan hasil penelitian Zajkov, *et al.* (2001: 2)

Mata kuliah prasyarat aspek pedagogik yang meliputi IPA Dasar (metode ilmiah/keterampilan proses); Pendidikan IPA (model, metode, strategi dan pendekatan pembelajaran dan media pembelajaran IPA sudah sesuai dengan standar pedagogik sains SMP yang direkomendasikan oleh *Caribbean Examination* (2007: 2-6) dan *Curriculum Development Center* (2002: 13-15). Khusus untuk *knowledge of assesment* dan *knowledge of curriculum* aspek pedagogik (Osman, 2010: 946) muncul pada mata kuliah Kajian dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan IPA serta Penilaian dan Evaluasi Pendidikan IPA.

Tabel 1. Jenis Program *integrated science* dan Daftar Mata Kuliah Prasyarat

No	Jenis Sub Program	Mata Kuliah Prasarat	
		Content (Materi)	Pedagogy(Pedagogi)
1	Program integrated-1	a. Biologi Dasar I dan II b. Praktikum Biologi Dasar I dan II c. Fisika Dasar I dan II d. Praktikum Fisika Dasar I dan II e. Kimia Dasar I dan II f. Praktikum Kimia Dasar I dan II	a. IPA Dasar b. Praktikum IPA Dasar
2	Program integrated-2	Semua mata kuliah prasyarat materi program <i>integrated science 1</i> a. Ilmu Kebumian b. Praktikum Ilmu Kebumian	Semua mata kuliah prasyarat pedagogi program <i>integrated science 1</i> a. Pendidikan IPA b. Praktikum Pendidikan IPA

Tabel 1. Jenis Program *integrated science* dan Daftar Mata Kuliah Prasyarat

No	Jenis Sub Program	Mata Kuliah Prasarat	
		Content (Materi)	Pedagogy(Pedagogi)
3	Program <i>integrated science 3</i>	Semua mata kuliah prasyarat materi <i>integrated science 1 dan 2</i>  a. Ilmu Lingkungan b. Astronomi c. Praktikum Astronomi	Semua mata kuliah prasyarat pedagogi program <i>integrated science 1 dan 2</i>  a. Pengembangan Media Pembelajaran IPA-1 dan Media Pembelajaran IPA-2 b. Praktikum Pengembangan Media Pembelajaran IPA-1 dan Pengembangan Media Pembelajaran IPA-2 c. Kajian dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan IPA d. Penilaian dan Evaluasi Pendidikan IPA

Berdasarkan analisis standar-standar materi dan pedagogi IPA SMP/MTs dari *Benchmarks for Science Literacy, Standards for Science Teacher Preparation, Carribbean Examination Council* dan *Science For All Americans*, maka diperoleh standar-standar materi dan pedagogi yang sudah mendapat *judgement* di lapangan, dimana standar-standar materi dan pedagogi ini dijadikan acuan mahasiswa dalam mengembangkan IPA terintegrasi. Jabaran topik dan sub topik standar-standar materi disajikan dalam Tabel 2.

Hasil analisis standar-standar pedagogi terdiri dari I: Analisis keterampilan-keterampilan ilmiah (keterampilan proses sains dan keterampilan-keterampilan manipulatif); II: Analisis keterampilan-keterampilan berpikir (keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif; III: Analisis strategi berpikir; IV: Analisis sikap-sikap ilmiah dan nilai-nilai mulia/luhur serta V: Analisis strategi pembelajaran (A. Pendekatan-pendekatan pembelajaran IPA: Inkuiri-Diskoveri, Sains-Teknologi-Masyarakat, Kontekstual, Belajar Tuntas; B. Metode-metode Pembelajaran IPA: Eksperimen, Diskusi, Simulasi, Proyek, Karyawisata serta penggunaan Teknologi).

Mengacu pada standar-standar untuk guru sains SMP (NSTA, 2003: 4-30) terutama standar isi, standar hakikat sains, standar inkuiri, standar keterampilan umum mengajar, standar asesmen, maka hasil jabaran standar *core* materi dan pedagogi sudah mencakup semua standar yang direkomendasikan NSTA, karena untuk setiap topik dan sub topik sudah dijabarkan dalam tujuan pembelajaran, indikator, materi, aktivitas pembelajaran dan asesmen yang disarankan.

Tabel 2. Topik-topik dan sub Topik-sub Topik Standar Materi IPA SMP Hasil Analisis

Topik	Sub Topik	Jumlah Indikator per Sub Topik (*)	Jumlah Indikator per Topik
1	Sains dan Teknologi	3	7
	Keselamatan Kerja	2	
	Tantangan-tantangan Penggunaan Sains dan Teknologi	2	
2	Pengukuran	5	34
	Wujud Zat	6	
	Air	4	
	Logam dan Non Logam	5	
	Asam dan Basa	8	
	Pemisahan Campuran	6	
3	Organisme Hidup	7	31
	Tumbuhan	11	
	Hama dan Pestisida	3	
	Tanah	5	
	Udara	5	
4	Reproduksi	7	31
	Obat-obatan	2	
	Penyebaran Penyakit	3	
	Makanan dan Saya	4	
	Darah dan Manfaatnya	5	
	Indra Manusia	10	
5	Bentuk-bentuk Energi	3	43
	Konversi Energi	2	
	Sumber-sumber Energi	5	
	Kelistrikan	7	
	Kemagnetan	4	
	Kalor	2	
	Dinamika	5	
	Kerja dan Daya	6	
	Getaran dan Gelombang	6	
	Pesawat Sederhana	3	

(\*) Setiap indikator dijabarkan aspek materi, aktivitas pembelajaran dan asesmen yang disarankan

Keterangan : Topik 1: Kerja Ilmiah dalam IPA, Topik 2: Penyelidikan Zat (Materi), Topik 3: Pemahaman Kehidupan, Topik 4: Tubuh Kita, Topik 5: Eksplorasi Energi



Mengacu pada hasil analisis kurikulum dan hasil analisis standar-standar pembelajaran IPA SMP/MTS, maka ditetapkan program mata kuliah IPA terintegrasi yang akan dibelajarkan dalam satu semester, meliputi 3 program *integrated science*. Karakteristik/persamaan dan perbedaan program *integrated science 1*, *integrated science 2* dan *3* dideskripsikan pada Tabel 3

Ketiga program IPA Terintegrasi (*integrated science*) dikemas menjadi mata kuliah “IPA Terintegrasi dan Pembelajarannya” wajib tempuh bagi mahasiswa S<sub>1</sub> Pendidikan IPA pada semester VI, berbobot 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum dan menjadi mata kuliah baru pada Kurikulum 2010.

Tabel 3. Karakteristik atau Persamaan dan Perbedaan Setiap Program IPA Terintegrasi (*integrated science*)

<b>Program dan Tema Program</b>	<b>Karateristik/Persamaan dan perbedaan</b>
I Terapan Pendekatan Keterampilan Proses: Penjernihan Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interdisipliner IPA dengan kompetensi utama bidang Fisika</li> <li>2. Tema utama terkait dengan kehidupan sehari-hari.</li> <li>3. Perangkat meliputi: Silabus Program I; Pemodelan (contoh Analisis Kompetensi Kurikulum dan contoh Silabus Pembelajaran IPA Terintegrasi dengan Terapan PKP, contoh RPP, contoh LKS, contoh Penilaian); Panduan Pengembangan RPP; Panduan <i>Peer Teaching</i>; Penugasan Mahasiswa dan Materi Pengayaan.</li> </ol>
II Terapan Sains Teknologi Masyarakat: Pencemaran Lingkungan dan Cara Mengatasinya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interdisipliner IPA dengan kompetensi utama bidang Kimia</li> <li>2. Tema utama terkait dengan kehidupan sehari-hari.</li> <li>3. Perangkat meliputi: Silabus Program II; Pemodelan (contoh Analisis Kompetensi Kurikulum dan contoh Silabus Pembelajaran IPA Terintegrasi dengan Terapan STM, contoh RPP, contoh LKS, contoh Penilaian); Panduan Pengembangan RPP; Panduan <i>Peer Teaching</i>; Penugasan Mahasiswa; Materi Pengayaan.</li> </ol>
III Terapan Inkuiri: Mengapa Bisa Terjadi Hipertensi?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interdisipliner IPA dengan kompetensi utama bidang Biologi</li> <li>2. Tema utama terkait dengan kehidupan sehari-hari.</li> <li>3. Perangkat meliputi: Silabus Program III; Pemodelan (contoh Analisis Kompetensi Kurikulum dan contoh Silabus Pembelajaran IPA terintegrasi dengan terapan Inkuiri, contoh RPP, contoh LKS, contoh Penilaian); Panduan Pengembangan RPP; Panduan <i>peer teaching</i>; Penugasan Mahasiswa; Materi Pengayaan.</li> </ol>

Perkuliahan *integrated science* bertujuan meningkatkan kompetensi *pedagogical content knowledge* (PCK) bagi mahasiswa calon guru IPA SMP, sehingga berbagai jenis perangkat yang dikembangkan sudah memenuhi tujuan tersebut, seperti contoh analisis kompetensi kurikulum dan pengembangan silabus pembelajaran IPA terintegrasi memberikan pemahaman mahasiswa tentang *knowledge of curriculum* (KC), contoh RPP, contoh LKS dan analisis standar pedagogi memberikan pemahaman mahasiswa tentang *knowledge of student's learning difficulties* (KSLD) serta *knowledge of instructional strategies and activities* (KISA), contoh penilaian memberikan pemahaman mahasiswa tentang *knowledge of assesment* (KA), materi pengayaan aspek *content* dan standar *core* materi memberikan pemahaman mahasiswa tentang *subject matter knowledge* (SMK)(Osman, 2009: 964).

Pelaksanaan perkuliahan IPA terintegrasi dalam bentuk terpadu dari aspek materi dan pedagogi dan perkuliahan teori dan praktikum untuk seluruh program. Masing-masing sub program model perkuliahan memuat tahap aktivitas, yaitu (a) modeling; (b) diskusi (c) penyusunan analisis kompetensi kurikulum dan silabus pembelajaran IPA terintegrasi (d) penyusunan RPP; (e) *Peer Teaching*; dan (f) pengayaan materi aspek *content* dan *pedagogy*. Pembahasan tentang tahap aktivitas perkuliahan sebagai berikut.

- a. Pembekalan melalui pemodelan mengajar dalam perkuliahan bertujuan agar mahasiswa calon guru IPA SMP memiliki kompetensi dalam menggunakan strategi dan metode mengajar secara tepat dan efektif; mampu mengkaji dan berlatih dalam proses pendidikan guru SMP/MTs sesuai standarnya (NSTA, 2003: 8).
- b. Khusus untuk aktivitas perkuliahan pemberian materi pengayaan bagi mahasiswa tidak bersifat wajib, tetapi mengacu pada hasil ketercapaian kompetensi materi mahasiswa sesudah tes akhir dan hasil ketercapaian kompetensi pedagogi mahasiswa sesudah penugasan penyusunan analisis kompetensi kurikulum dan silabus pembelajaran IPA terintegrasi; pengembangan RPP; dan *peer teaching*. Kompetensi materi dan pedagogi yang dikuasai oleh kurang 75% mahasiswa menjadi fokus pengayaan.

- c. Penilaian pada mahasiswa digunakan instrumen-instrumen penilaian meliputi: tes tertulis untuk mengetahui kompetensi mahasiswa terhadap integrasi IPA dengan metode ilmiah; tes tertulis untuk mengetahui kompetensi interdisipliner bidang IPA; tes kinerja untuk mengetahui kompetensi mahasiswa dalam melakukan analisis kompetensi kurikulum dan silabus pembelajaran IPA terintegrasi serta tes kinerja pengembangan RPP; tes praktik untuk mengetahui kompetensi mahasiswa melakukan *peer teaching*.

## **Penutup**

Hasil pengembangan program *integrated science* memberikan masukan dalam revisi Kurikulum S<sub>1</sub> Pendidikan IPA S<sub>1</sub> dalam hal jumlah SKS, kode, menghapus, mengganti nama dan deskripsi mata kuliah untuk beberapa mata kuliah prasyarat dari segi *content* dan segi *pedagogy*. Daftar mata kuliah prasyarat *integrated science* aspek materi dan pedagogi beserta revisinya tersedia di lampiran. Hasil pengembangan program terutama standar *core* materi dan pedagogi sebagai pedoman atau rujukan dalam mengembangkan pembelajaran IPA terintegrasi, meskipun di masa mendatang terjadi perubahan kurikulum di tingkat SMP/MTs. Hal ini bersumber pada rasional, bahwa standar *core* materi memberikan standar isi dan standar *core* pedagogi memberikan standar keterampilan-keterampilan ilmiah dalam IPA, standar keterampilan-keterampilan berpikir dalam IPA, standar strategi-strategi berpikir dalam IPA, standar sikap-sikap ilmiah/nilai-nilai luhur dalam IPA sebagai standar dalam pencapaian *character building* bagi siswa, dan standar strategi-strategi pembelajaran IPA.

Keseluruhan hasil pengembangan program IPA terintegrasi ini sebagai mata kuliah wajib di program studi S<sub>1</sub> Pendidikan IPA, semester VI dan sekaligus sebagai mata kuliah baru dengan bobot 3 SKS teori dengan nama IPA Terintegrasi dan Pembelajarannya serta 1 SKS praktikum dengan nama Praktikum IPA Terintegrasi dan Pembelajarannya.

Program IPA Terintegrasi yang telah dikembangkan melalui *research and development* ini merupakan mata kuliah yang mampu membekali mahasiswa S<sub>1</sub>

pendidikan IPA yang memiliki kewenangan menjadi calon guru IPA SMP. Dengan demikian bagi LPTK yang membuka program studi S<sub>1</sub> pendidikan IPA perlu menerapkan mata kuliah IPA terintegrasi agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai yang direkomendasikan *Standards for Science Teacher Preparation* (NSTA, 2003) dan memenuhi Permendiknas, No. 16 Tahun 2007, yaitu memiliki kompetensi interdisipliner bidang IPA.

### **Daftar Pustaka**

- American Association for the Advancement of Science. 1993. *Benchmarks for Science Literacy*. Project 2061. New York: Oxford University Press.
- Bruce Joyce & Masha Weil. 1996. *Models of Teaching* 5<sup>th</sup> Ed. United States of America: Allyn & Bacon. A Simon & Schuster Company
- BSNP. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: BSNP Depdiknas.
- Caribbean Examination Council. 2007. *Integrated Science*. Caribbean Certificate of Secondary Level Competence
- Curriculum Development Center. 2002, *Integrated Curriculum for Secondary School (Curriculum Specification. Science Form 2*. Ministry of Education Malaysia
- NSTA. 1988. *Standards for Science Teacher Preparation*
- NSTA. 2003. *Standards for Science Teacher Preparation*. Revised 2003
- Osman N. Kaya. 2009. *The Nature of relationship among the Components of pedagogical Content Knowledge of Preservice Science Teachers: 'Ozone layer depletion' as an example*. *Internasional Journal of Science Education* Vol. 31, No. 7, 1 May 2009, pp. 961-988
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 tahun 2008 tentang *Guru*
- Zajkov, O. et. al. 2001. *Secondary School Student's Conceptual and Conventional Knowledge of Mechanics and Some Socioeconomic Parameters*. Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Macedonia, 15 halaman. Tersedia; [zoliver@iunona.ukim.edu.mk](mailto:zoliver@iunona.ukim.edu.mk). [21 Januari 2008]

-----, 2004. *Standar-standar Guru Pemula untuk SMP/MTs*. Jakarta: Dirjen DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional.

-----, 2006. *Pengembangan Kurikulum Program Studi S<sub>1</sub>*. Jakarta: Departemen Pendidikan nasional. Direktorat jenderal pendidikan Tinggi. Direktorat Ketenagaan.

-----, 2007. *Kurikulum 2002 FMIPA* . Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Yogyakarta

-----, 2007. *Panduan Penyusunan KTSP Lengkap*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

## Lampiran

### DAFTAR MATA KULIAH PRASARAT IPA TERINTEGRASI ASPEK MATERI DAN PEDAGOGI BESERTA REVISINYA

No	Semester I			
	Materi		Pedagogi	
	Kurikulum Lama (2007)	Kurikulum Baru (2010)	Kurikulum Lama (2007)	Kurikulum Baru (2010)
1	(IPA 307/IPA 108) Fisika Dasar (3/1)	(SSC 207/SSC 108) Fisika Dasar I (2/1)	(IPA 201/IPA 102) IPA Dasar (2/1)	(SSC 201/SSC 102) IPA Dasar (2/1)
2	(IPA 303/IPA 104) Biologi Dasar (3/1)	(SSC 203/SSC 104) Biologi Dasar I (2/1)		
3	(IPA 311/IPA 112) Kimia Dasar (3/1)	(SSC 211/SSC 112) Kimia Dasar I (2/1)		
Semester II				
1	-----	(SSC 209/SSC 110) Fisika Dasar II (2/1)	-----	-----
2		(SSC 205/SSC 106) Biologi Dasar II (2/1)		
3		(SSC 213/SSC 114) Kimia Dasar II (2/1)		
Semester III				
1	(IPA 321/IPA 122) Ilmu Kebumian (3/1)	(SSC 219/SSC 120) Ilmu Kebumian (2/1)	(PIP 301/PIP 102) Pendidikan IPA (2/1)	(PSC 301/PSC 102) Pendidikan IPA (3/1)
2	(IPA 218/IPA 118) IPA-1 (2/1) Pelaksanaan perkuliahan IPA terpisah per bidang kajian fokus untuk konsep dasar IPA kelas VII SMP/MTs	(SSC 216/SSC 117) IPA-1 (2/1) Pelaksanaan perkuliahan content IPA Terintegrasi fokus untuk kelas VII SMP/MTs	(PIP 206/PIP 107) Strategi dan Manajemen Pendidikan IPA (2/1) dihapus	Mata kuliah diganti nama <b>IPA Terintegrasi dan Pembelajarannya</b> dan masuk Semester VI

3			(PIP 203/PIP 104) Pengelolaan dan Teknik Laboratorium (2/1) Sebelumnya berada di Semester VI	(PSC 203/PSC 104) Pengelolaan dan Teknik Laboratorium (2/1)
<b>Semester IV</b>				
1	(IPA 225) Ilmu Lingkungan (2)	(SSC 223) Ilmu Lingkungan (2)	(PIP 308/PIP 109) Pengembangan Media Pembelajaran IPA (3/1)	(PSC 208/PSC 109) Pengembangan Media Pembelajaran IPA-I (2/1)
2	(IPA 227/IPA 128) Astronomi (2/1)	(SSC 225/SSC 126) Astronomi (2/1)		
3	(IPA 223/IPA 124) IPA-2 (2/1)  Pelaksanaan perkuliahan IPA terpisah per bidang kajian fokus untuk konsep dasar IPA kelas VIII SMP/MTs	(SSC 221/SSC 222) IPA-2 (2/1)  Pelaksanaan perkuliahan content IPA Terintegrasi fokus untuk kelas VIII SMP/MTs		
<b>Semester V</b>				
1	(IPA 229/IPA 230) IPA-3 (2/1)  Pelaksanaan perkuliahan IPA terpisah per bidang kajian fokus untuk konsep dasar IPA kelas IX SMP/MTs	(SSC 227/SSC 228) IPA-3 (2/1)  Pelaksanaan perkuliahan content IPA Terintegrasi fokus untuk kelas VIII SMP/MTs	(PIP 307) Kajian dan Pengembangan Kurikulum Pend. IPA (3)	(PSC 307) Kajian dan Pengembangan Kurikulum Pend. IPA (3)
2			-----	(PSC 210/PSC 111) Pengembangan Media Pembelajaran IPA-II (2/1)
<b>Semester VI</b>				
1	(IPA ) IPA-4 (2/1)	(PSC 305/PSC 106) <b>IPA Terintegrasi dan Pembelajaran nya</b> (3/1)	-----	-----
<b>Semester VII</b>				
1	(IPA ) IPA-5 (2/1)	Dihapus		

# **Urgensi Integrasi Standar Kompetensi Lulusan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**

Anas Arfandi \*)

## **Abstrak**

Pendidikan sebagai bagian penting dalam pengembangan sumber daya manusia menetapkan standar kompetensi bagi lulusannya agar mampu bersaing pada pasar tenaga kerja di masa yang akan datang. Kerangka kualifikasi merupakan acuan dalam menyiapkan tenaga kerja yang profesional dan kompeten untuk memenuhi permintaan tenaga kerja guna mendukung perekonomian dan daya saing bangsa. Integrasi kerangka kualifikasi dan standar kompetensi lulusan memerlukan sinergitas yang tinggi antara bidang pendidikan dengan bidang lainnya. Negara-negara maju telah menyusun kerangka kualifikasi nasional sebagai bahan rujukan standar kompetensi bagi lulusan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dan menjadi acuan dalam mengembangkan kompetensi tenaga kerja secara nasional.

## **A. Pendahuluan**

Mempersiapkan sumber daya manusia yang handal merupakan tanggung jawab Negara dengan menyusun sistem pendidikan yang menyeluruh dan terintegrasi dengan segala kebijakan ekonomi terutama yang terkait dengan ketenagakerjaan. Dengan sistem tersebut, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab sebagaimana yang tertuang di dalam tujuan pendidikan nasional.

Untuk mencapai hal tersebut, masyarakat diberi pilihan untuk mengikuti berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang disediakan sehingga memiliki kompetensi, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat spesifik. Kompetensi merupakan seperangkat kemampuan yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu tugas dengan mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sebagai upaya untuk menyeragamkan kompetensi dari lulusan pendidikan, pemerintah kemudian menyusun standar kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Hanya saja, standar kompetensi lulusan yang disusun saat ini masih bersifat peningkatan *human development index* dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan setinggi-tingginya,

\*) Dosen Fakultas Teknik UNM

namun belum mengarah pada pengembangan sumber daya manusia yang produktif dan berkesinambungan sehingga mampu memenuhi permintaan pasar tenaga kerja yang profesional.

Hal ini berdampak pada kualifikasi tenaga kerja yang tidak jelas dengan kualifikasi lulusan pada level pendidikan yang ada. Lulusan pendidikan Diploma seharusnya berada pada level pekerjaan di atas lulusan SMK, namun pada kenyataannya lulusan SMK memiliki pekerjaan yang sama dengan lulusan Diploma sehingga akan menimbulkan kesan bahwa level pendidikan tidak berpengaruh pada level pekerjaan seseorang. Untuk itu, standar kompetensi lulusan seharusnya mengacu pada level pekerjaan yang ada di dunia kerja.

## **B. Standar kompetensi lulusan (SKL)**

Standar Nasional Pendidikan (SNP) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sementara tujuan dari SNP adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Selain itu, disebutkan pula bahwa SNP tersebut disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global (BSNP, 2011).

Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2005 berkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang didefinisikan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

SKL meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran (Permendiknas No.



23/2006). Lebih jauh dijelaskan bahwa SKL pada jenjang pendidikan dasar dan menengah hanya digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Sementara kompetensi untuk jenjang pendidikan tinggi merupakan kewenangan masing-masing institusi pendidikan tinggi yang diberi kebebasan akademik untuk mengembangkan kualitas dan kompetensi lulusannya.

Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Secara lebih rinci, PP No. 31/2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional menguraikan bahwa kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, mengindikasikan bahwa kompetensi yang dihasilkan oleh bidang pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah hanya berorientasi pada penyelesaian studi peserta didik dan belum mengarah pada pengembangan kompetensi peserta didik terutama setelah mereka lulus untuk menghadapi dunia kerja. Peserta didik yang telah berhasil memenuhi standar kompetensi lulusan akan diberi sertifikat pendidikan (ijazah) yang hanya menjadi bukti bahwa mereka telah menyelesaikan studi tidak menjadi bukti bahwa mereka kompeten pada bidang tertentu. Hal ini dapat jelas terlihat terutama pada jenjang pendidikan SMK, dimana lulusan masih memerlukan adanya sertifikat keterampilan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi keterampilan/keahlian dan diakui oleh dunia industri.

Pada pendidikan tinggi, dapat kita lihat bahwa ketidak sesuaian kompetensi lulusan dengan kualifikasi di dunia kerja masih terjadi. Pada bidang teknik sipil, lulusan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktoral masih belum jelas perbedaan kualifikasi dan kompetensi kerja mereka sehingga level pekerjaan yang mereka miliki juga menjadi sangat beragam. Disatu sisi, lulusan tersebut masih perlu diberikan sertifikasi keterampilan/keahlian pada bidang teknik sipil yang merupakan bentuk formal yang “menjamin” bahwa seseorang telah memiliki kualifikasi dan/atau kompetensi untuk melakukan tugas atau pekerjaan pada

profesi/bidangnya. Bahkan, yang lebih ironis adalah mereka baru bisa mengajukan permohonan mendapatkan sertifikat jika yang bersangkutan telah memiliki pengalaman pekerjaan minimal 2 tahun (Abduh, et al., 2008). Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

### **C. National Qualification Framework (NQF)**

Pada 16 Desember 1983 di Bangkok, Thailand, 12 negara di Kawasan Asia dan Pasifik telah menandatangani *Regional Convention On The Recognition Of Studies, Diplomas Degrees In Higher Education In Asia And The Pacific* (Konvensi Regional Tentang Pengakuan Studi, Ijazah Dan Gelar Pendidikan Tinggi Di Asia Dan Pasifik) yang selanjutnya dikeluarkan peraturan preseiden (perpres) No. 103/2007 tentang pengesahan *Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas, and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific*.

Beberapa negara Asean seperti Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand telah lama memiliki NQF bahkan telah diupayakan akan membuat *Asean Qualification Framework* (AQF). Akan tetapi, pemerintah Indonesia sampai saat ini belum menetapkan *National Qualification Framework* (NQF), walaupun draft NQF yang dalam hal ini disebut sebagai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah disusun oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti), padahal hal tersebut sudah harus dilakukan sejak penandatanganan konvensi pada tahun 1983.

PP No. 31/2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional menjelaskan bahwa KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI yang disusun berdasarkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari yang terendah sampai yang tertinggi.

NQF atau KKNI menjadi perhatian banyak negara karena dorongan dari komunitas pendidikan dan pelatihan dunia seperti *the International Labour*

*Organisation (ILO), the United Nations Education, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) dan the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).* Organisasi-organisasi ini mendukung gagasan integrasi dan keterpaduan sistem kualifikasi antara yang satu dengan yang lain, baik pada level negara itu sendiri maupun pada tingkat regional dan global.

Cedefop (2009) memberikan penjelasan bahwa Qualification Framework (QF) merupakan sebuah instrumen untuk mengembangkan dan mengklasifikasi kualifikasi berdasarkan seperangkat kriteria pada level tertentu dari pencapaian pembelajaran yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan subsistem kualifikasi nasional dan meningkatkan keterbukaan, akses, kemajuan dan kualitas dari kualifikasi dalam hubungannya dengan pasar tenaga kerja dan masyarakat. Coles (2006) menyatakan bahwa seperangkat kriteria tersebut dapat berbentuk implisit dalam deskripsi kualifikasi itu sendiri maupun dibuat eksplisit dalam bentuk serangkaian deskripsi tingkatan kualifikasi.

British Vocational Qualification 2010 (2010) menyebutkan bahwa NQF membantu peserta didik untuk membuat keputusan yang informatif mengenai kualifikasi yang mereka butuhkan dan membawa mereka pada mendapatkan sekilas gambaran dari struktur kualifikasi di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Mereka juga dapat membandingkan tingkat kualifikasi yang berbeda dan mengidentifikasi secara jelas arah kemajuan pilihan karir mereka. Young (2005) menjelaskan bahwa NQFs merupakan inisiatif “top down” yang diprakarsai oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip umum terkait dengan bagaimana kualifikasi tersebut dirancang dan apa yang harus dicapai.

Pengembangan NQF di negara-negara yang telah memilikinya disebabkan karena berbagai hal tergantung situasi pada negara tersebut. Allais, Raffe, & Young (2009) memberikan contoh bahwa pengembangan NQF di Afrika sebagai negara yang sedang berkembang didasari oleh berakhirnya ‘Apartheid’, di United Kingdom karena peningkatan jumlah angka pemuda pengangguran, dan di New Zealand karena kehilangan pasar produksi pertanian dan krisis ekonomi daya saing dari industri mereka. Tantangan NQF pada negara-negara berkembang terutama dalam menghadapi kompetisi kebutuhan ekonomi global. Walaupun

terdapat berbagai macam model NQF yang berbeda-beda dari berbagai negara, namun Indonesia tidak harus mengadopsi salah satu model tersebut karena karakteristik dari setiap negara pasti berbeda-beda.

Di Afrika, bentuk pengembangan NQF dijadikan dasar dalam strategi pengembangan keterampilan dan kebijakan pendidikan yang lebih luas, dengan mengganti seluruh kualifikasi yang ada dengan seperangkat kualifikasi yang baru yang dirancang oleh struktur lembaga yang baru (Allais, 2011). di Australia, lembaga Australian Qualification Framework (AQF) pada tahun 2011 merevisi AQF untuk memastikan bahwa hasil kualifikasi nasional masih tetap relevan dan konsisten, mendukung fleksibilitas keterkaitan dan jalur kualifikasi, dan memungkinkan portabilitas dan perbandingan kualifikasi baik pada level nasional maupun internasional (AQF, 2011).

Pengembangan kualifikasi yang terjadi pada beberapa negara merubah model '*Institutional*' kepada model '*Outcome*'. Pada model '*institutional*', kualifikasi lebih kepada '*knowledge domain-based*' dan menyatu pada lembaga. Kepercayaan masyarakat berada pada pakar pengetahuan, dan asosiasi profesional yang mengkaitkan antara guru dan penghasil ahli pengetahuan dalam domain berbeda dan lembaga yang memberikan kualifikasi tersebut. Sedangkan model '*outcomes*' dirancang jauh dari spesialisasi dan institusi pendidikan dengan memberikan kualifikasi yang bersifat umum dan tingkat pencapaiannya (Allais, Raffe, & Young: 2009).

Namun demikian, sebagian pakar sosial menganggap NQF sebagai konsep Neo-Liberal, karena hal tersebut akan menjadikan adanya keseragaman kualifikasi secara global sehingga dianggap sebagai bagian dari proses globalisasi dimana distribusi barang dan jasa akan terjadi antar negara yang menjadikan suatu negara harus bersaing dengan negara lain. Karena itu, NQF akan menjadi modal bagi negara-negara yang memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk dibekali dengan kompetensi yang harus bisa bersaing dengan negara-negara lain, namun disisi lain negara juga harus memproteksi diri akan serangan tenaga kerja asing yang memiliki kualifikasi lebih tinggi dari tenaga kerja dalam negeri.

#### **D. Urgensi Integrasi SKL dan KKNi**

Dalam draft KKNi yang disusun oleh Dikti jenjang tersebut terdiri dari 9 (sembilan) jenjang yang dimulai dengan kualifikasi sertifikat 1 (satu) sampai dengan sertifikat 9 (sembilan). KKNi seharusnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden (perpres) sebagaimana amanat PP No. 31/2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional dan mengacu pada hasil konvensi Thailand, namun hingga saat ini perpres tentang KKNi belum juga ditandatangani padahal hal tersebut merupakan kunci pokok dalam mengintegrasikan antara level pendidikan seseorang dengan kualifikasi pekerjaan yang seharusnya mereka dapatkan.

Selain KKNi, dalam PP No. 31/2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional juga dijelaskan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SKKNI tersebut dikelompokkan ke dalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada KKNi dan/atau jenjang jabatan. Pengelompokan dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab pekerjaan. SKKNI yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) telah ada sejak beberapa tahun yang lalu, sementara KKNi yang secara konseptual merupakan acuan dalam pembuatan SKKNI belum juga ditetapkan.

Pendahuluan NQF sebaiknya melibatkan dua proses, keseimbangan antar keduanya tergantung pada level kemampuan pada suatu negara dan sistem yang diganti. Proses pertama adalah merancang kembali kualifikasi yang ada dengan mencocokkan kriteria pada kerangka yang akan dikembangkan, dan yang kedua adalah pengembangan kualifikasi baru berdasarkan kriteria kerangka pada sektor pekerjaan dan pada level dimana kualifikasi tersebut belum ada sebelumnya (Young, 2005). Selain itu, proses pengenalan NQF memperhatikan dimensi teknis, sosial, dan politik (Allais, Raffe, & Young: 2009).

Prinsip KKNi dapat seperti membuka pintu gerbang yang mengarah pada kriteria dimana semua penyedia kualifikasi diharapkan dapat mematuhi. Selain

itu, diperlukan adanya kepercayaan antara pihak-pihak yang saling terkait terutama antara dunia pendidikan dan dunia kerja dengan memunculkan sikap terbuka akan kritik dan saran untuk pengembangan kualitas dan kualifikasi tenaga yang dihasilkan. Arti penting dari integrasi antara SKL dan KKNi adalah untuk memperjelas makna kompetensi. Kompetensi yang digambarkan pada SKL berbeda halnya dengan kompetensi yang dijelaskan dalam SKKNI (dunia kerja).

Jika kompetensi telah dipahami secara jelas, maka akan diperoleh standar yang saling berkaitan antara pendidikan dan pekerjaan dengan menjelaskan arti kompetensi dalam suatu pekerjaan yang spesifik. Standar selanjutnya dikembangkan dan dikaitkan dengan kualifikasi vokasional dan menginformasikan program pembelajaran untuk mencapai standar tersebut.

#### **E. Penutup**

Kerangka kualifikasi dapat dijadikan alat untuk mereformasi bidang pendidikan dan pekerjaan. Coles (2006) merangkum beberapa tujuannya, seperti: 1) Menetapkan standar nasional pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang lebih luas, 2) Memperkenalkan kualitas penyedia pendidikan dan pelatihan, 3) menyediakan sistem koordinasi dan untuk membandingkan kualifikasi dengan menghubungkan kualifikasi satu sama lain, 4) Memperkenalkan dan mengelola prosedur akses pembelajaran, transfer pembelajaran, dan kemajuan pembelajaran.

Integrasi KKNi tidak saja dilakukan pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, namun perlu juga dipikirkan integrasi dalam beberapa hal seperti yang disarankan oleh Keevy pada The South Africa NQF (SANQF) (Blom, 2011) yaitu: *a) as the guiding philosophy for the framework; b) as the scope of the framework; c) as policy breadth; d) as a continuum of learning; dan e) as curricular 'integrability'.*

*National qualification framework* (NQF) mungkin tidak terlalu dikenal luas oleh masyarakat baik kalangan akademisi apalagi kalangan non-akademisi. Padahal NQF merupakan suatu hal yang penting dalam hal asumsi perubahan struktur pekerjaan dan berbagai variasi penerimaan dan promosi pekerjaan. Untuk itu, penetapan NQF atau KKNi harus segera dilaksanakan dan disosialisasikan

lebih intens terutama kepada masyarakat pengguna dan kalangan akademisi yang menghasilkan lulusan baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga jenjang pendidikan tinggi. Dengan sosialisasi yang dilakukan terutama memberikan pemahaman mengenai tujuan dari pembuatan KKNI, diharapkan dukungan masyarakat dapat terus berkembang dengan mengawal kebijakan tersebut agar tidak berhenti ditengah jalan seperti halnya kebijakan-kebijakan yang lain yang hanya dikonsepsi oleh para pemimpin dan kalangan pemangku kebijakan pada tingkat pusat sehingga kurang mendapat perhatian dan dukungan masyarakat. Semoga dengan KKNI, kualitas pendidikan dapat segera meningkat dan *human resource* masyarakat Indonesia memiliki daya saing yang tinggi.

#### Daftar pustaka

- Allais, S.M. (2007) Why the South African NQF Failed: lessons for countries wanting to introduce national qualifications frameworks, *European Journal of Education*, 42(4), 523-549. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1465-3435.2007.00320.x>
- Allais, S., Raffe, D., & Young, M. (2009). *Researching NQFs : some conceptual issues*. Geneva: ILO
- Australian Qualification Framework (AQF). 2011. *Australian Qualification Framework 1<sup>st</sup> edition July 2011*. Australia: AQF council.
- Blom, R. (2011). *The concept(s) of an integrated qualifications framework: a conceptual framework of the uses and meanings of integration in the south african education and training system*. Diakses pada tanggal 17 januari 2012 melalui <http://www.sqaq.org.za/docs/events/sqavisit/iqfconcept.pdf>
- British Vocational Qualifications 2010 12<sup>th</sup> Ed. (2010). *A directory of vocational qualifications available in the United Kingdom*. London: Kogan Page
- Cedefop (European Centre for the development of vocational Training. (2009). *The development of national qualifications frameworks in Europe*. Luxembourg: Cedefop
- Coles, M. 2007. A review of international and national developments in the use of qualifications frameworks. Report for the European Training Foundation. Diakses pada tanggal 18 januari 2012 melalui [http://www.etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/\(getAttachment\)/4B4A9080175821D1C12571540054B4AF/\\$File/SCAO6NYL38.pdf](http://www.etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/(getAttachment)/4B4A9080175821D1C12571540054B4AF/$File/SCAO6NYL38.pdf)
- Young, M. (2005). *National qualifications frameworks: Their feasibility for effective implementation in developing countries*. Skills and Employability Department Working Paper No. 22. Geneva: ILO

# REKONSTRUKSI PEMBELAJARAN BERBASIS METODE SOCRATIC : Strategi Efektif untuk Optimalisasi Hasil Belajar Siswa dan Peningkatan Kemampuan Mengajar Guru

Oleh:  
Dr. Nandang Rusmana, M.Pd.<sup>1</sup>

**Abstrak:** Persoalan yang diangkat berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dan kemampuan mengajar guru. Sebagaimana diketahui bahwa, permasalahan umum yang dihadapi yaitu (1) prestasi belajar siswa rendah, (2) kinerja guru kurang menarik, (3) penerapan inovasi dan kreativitas dalam mengajar rendah, (4) guru mengalami kesulitan dalam pembelajaran untuk aspek afektif, konatif dan psikomotor dalam kelas, dan (5) penilaian umumnya masih bersifat kognitif serta terdapat kesalahpahaman dalam melakukan penilaian untuk aspek afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, perlu pengkajian terhadap penyebab munculnya persoalan tersebut serta bagaimana alternatif pemecahannya. Dugaan sementara, salah satu yang menjadi penyebab dari permasalahan di atas adalah orientasi mengajar guru yang keliru. Pada umumnya guru memandang bahwa peristiwa mengajar adalah menyampaikan bahan pelajaran secara langsung kepada siswa dan kemudian guru melakukan penilaian terhadap seberapa siswa mampu memahami dan mengerti terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Di antara penyebab kesalahan mengajar karena RPP yang dibuat oleh guru berbasis pada proses pembelajaran langsung (*direct instruction*). Alternatif untuk pemecahan permasalahan tersebut adalah metode Socratic yang berbasis pada strategi mengajar dengan pola eksperimentasi, identifikasi, analisis dan generalisasi.

**Kata kunci :** Metode socratic, eksperimentasi, identifikasi, analisis dan generalisasi.

## A. Pengantar

Dewasa ini ketika kita berbicara mengenai permasalahan-permasalahan yang sering muncul di dunia pendidikan yaitu kualitas proses belajar mengajar. Salah satu indikator permasalahan kualitas pendidikan yang paling dekat dan diidentikan oleh masyarakat yaitu prestasi belajar siswa. Banyak masyarakat yang memandang bila prestasi belajar siswa baik maka kualitas pendidikan pun baik pula. Hal ini disebabkan bahwa prestasi belajar siswa dituntut untuk dapat memenuhi standar kelulusan. Bila siswa tidak memenuhi batas kelulusan tentu siswa tersebut tidak akan dinyatakan lulus, artinya pendidikan pada sekolah tersebut atau pada daerah tersebut tidak berkualitas. Kondisi ini tentu tidak hanya disebabkan oleh faktor internal siswa

---

<sup>1</sup> Dosen & Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FIP UPI  
e-mail : rusmananandang@ymail.com HP : 08122116766



sendiri, namun bisa saja ada pengaruh dari faktor guru seperti metode pengajaran, cara menyampaikan materi pelajaran, atau kurang sesuainya memilih teknik dalam menyampaikan materi.

Bila kita melakukan telusur langsung kepada siswa mengenai prestasi belajarnya yang rendah, banyak yang mengatakan bahwa prestasi belajar mereka rendah karena guru-guru yang mengajar terasa tidak menarik atau monoton, sehingga siswa memiliki motivasi yang baik dan merasa tidak nyaman untuk mengikuti pembelajaran dari guru tersebut. Kondisi ini senada dengan yang diungkapkan oleh Yusuf et al (2009 & 2010) dalam penelitiannya bahwa performance mengajar guru yang kurang menarik (monoton) membuat siswa tidak memiliki minat terhadap pelajaran. Kemudian Muqodas (2011) mengungkapkan dalam hasil penelitiannya bahwa performance guru yang tidak baik membuat siswa tidak memiliki motivasi belajar dan cenderung melakukan aktivitas lain seperti berada diluar kelas, memainkan handphone, bahkan pergi meninggalkan sekolah.

Ketika siswa mengalami kondisi jenuh terhadap metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru, banyak guru yang tidak menyadari bahwa metode tersebut perlu pembaharuan. Salah satu metode yang paling dijadikan sebagai metode andalan oleh beberapa guru yaitu metode ceramah. Bahkan ada yang berpendapat bahwa metode ceramah adalah metode yang paling tepat untuk mengajar. Namun guru yang menggunakan metode ceramah lupa bahwa siswa perlu adanya pengalaman dari pembelajaran dan refleksi atau proses memaknai materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah diperlukannya inovasi serta kreativitas guru dalam mengembangkan metode dan teknik mengajar yang disesuaikan dengan materi dan karakteristik siswa.

Kelemahan guru dalam menggunakan metode ceramah sebagai metode andalan membuatnya mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran untuk aspek afektif, konatif dan psikomotor dalam kelas. Hal ini dikarenakan metode ceramah lebih menekankan pada pemahaman kognitif sehingga penilaian hasil belajarpun lebih menekankan pada aspek kognitif. Sedangkan aspek afektif, konatif dan psikomotor guru mengalami kesulitan bahkan kesalahan kaprahan dalam melakukan penilaian. Melalui metode sokraritik, guru dapat melakukan pembelajaran multi aspek, baik itu aspek kognitif, afektif, konatif maupun psikomotor.

## **B. Konsep Dasar Metode Socratic**

Metode sokratik (*didactic experiential*) merupakan metode pembelajaran yang mengajak siswa secara langsung untuk dapat merasakan, mengajarkan diri sendiri dan menginternalisasikan pengalaman dari kegiatan belajar yang telah diikutinya melalui interaksi *self-discovery* yang dikemas dengan beberapa pertanyaan refleksi. Dalam metode sokratik, guru bukan mengajarkan materi, namun memfasilitasi siswa melalui pertanyaan yang dipresentasikannya untuk menemukan pengalaman-pengalaman baru yang siswa temukan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut senada dengan pendapat Rusmana (2009b: 66) yang menyatakan “dalam metode sokratis peserta didik dapat secara actual mengajar dirinya sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dipresentasikan oleh guru”.

Aktivitas utama metode socratic bertumpu pada eksperientasi, identifikasi, analisis dan refleksi. Berikut akan dipaparkan penjelasan dari masing-masing aktivitas metode socratic:

### **1. Eksperientasi**

Tahap eksperientasi merupakan tahap di mana guru melaksanakan kegiatan belajar-mengajar berdasarkan skenario atau rancangan pembelajaran yang telah dibuat sesuai dengan metode dan teknik yang dipergunakan. Tema utama dari tahapan ini adalah 'DO' (melaksanakan). Tahap ini disebut juga tahapan operasionalisasi teknik.

### **2. Identifikasi**

Pada tahap ini guru melaksanakan refleksi tahap satu atau tahap eksperientasi dengan cara mengidentifikasi pola-pola respon siswa dalam menerima stimulasi (What Happen?) dari guru. Tema umum pada tahap ini adalah 'LOOK' (melihat).

### **3. Analisis**

Tahap analisis merupakan tahapan guru melaksanakan refleksi tahap dua atau tahap identifikasi dengan cara mengajak siswa untuk menganalisis sebab-sebab mengapa mereka membuat respon seperti yang ditampilkan pada tahap eksperientasi. dan memikirkan makna bagi penyelesaian masalah yang dihadapinya (So What?). Tema umum dari tahap ini adalah 'THINK'.

### **4. Generalisasi (menyimpulkan).**

Tahap generalisasi merupakan tahap dimana guru melaksanakan refleksi tahap akhir dengan cara mengajak siswa membuat rencana perbaikan atas kelemahan-

kelemahan tingkahlaku atau belajarnya (Now What?). Rencana perbaikan ini diwujudkan pada kehidupan sehari-hari. Tema umum dari tahap ini adalah 'PLAN'.

### C. Kerangka Kerja Metode Socratic

Asumsi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan metode sokratik dapat mempertinggi hasil pembelajaran. Asumsi tersebut berangkat dari pernyataan bahwa penggunaan metode sokratik memiliki prinsip *self-discovery* di mana dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siswa secara aktual dapat mengajari dirinya sendiri dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Proses aktual ini membawa siswa pada kondisi belajar dengan sendiri, mencari dengan sendiri dan merefleksikan sendiri makna yang tersirat dari semua pengalaman yang didapat pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan menggunakan metode sokratik dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, posisi guru sebagai fasilitator, stimulator, penuntun serta penunjuk bukan pemberi terhadap apa yang dibutuhkan oleh siswa.

Pemaparan lebih jelas mengenai penggunaan metode sokratik dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta kaitannya dengan aspek kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor akan diawali dengan gambar berikut.

Gambar 1.  
Metode Sokratik

<b>Experience</b>	→	<b>Action</b>	→	<b>Do</b>	→	<b>“&amp;!#?”^#@!</b>
<b>Identity</b>	→	<b>Reflection</b>	→	<b>Look</b>	→	<b>What Happened?</b>
<b>Analyze</b>	→	<b>Reflection</b>	→	<b>Think</b>	→	<b>SO What?</b>
<b>Generalize</b>	→	<b>Reflection</b>	→	<b>Plan</b>	→	<b>Now What?</b>

Rusmana (2009a: 163)

Fase *experience* atau disebut juga fase *action* adalah fase dimana guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang diarahkan pada upaya memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang menjadi beban psikologisnya melalui materi yang disimulasikan pada setiap tahapan. Fase ini memuat aspek afektif dan psikomotor, karena pada fase *experience* melalui materi yang disimulasikan siswa mengekspresikan perasaan yang menjadi beban psikologisnya.

Fase identifikasi ialah fase di mana guru merefleksikan pengalaman selama proses kegiatan belajar mengajar. Pada fase ini siswa diminta untuk melihat nilai-nilai yang terkandung dalam proses kegiatan belajar-mengajar dalam kaitannya dengan

permasalahan yang sedang dihadapinya. Dalam hal ini siswa diajak untuk menyatakan pikiran dan perasaan sehubungan dengan materi yang telah dilakukan. Aspek yang muncul pada fase ini adalah aspek kognitif, afektif, dan konatif. Proses refleksi pengalaman selama kegiatan belajar mengajar merupakan indikator munculnya aspek kognitif dan afektif, kemudian munculnya aspek konatif ditandai dengan melihat nilai yang terkandung dalam proses kegiatan belajar mengajar dalam kaitannya dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Terakhir yaitu aspek kognitif dan afektif yang ditandai dengan kegiatan siswa dalam menyatakan pikiran dan perasaannya sehubungan dengan simulasi materi yang telah dilakukan.

Fase analisis merupakan satu tahap di mana siswa diajak untuk menganalisis dan memikirkan nilai-nilai positif atau manfaat kegiatan belajar mengajar yang dapat digunakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan diri. Aspek yang muncul dalam fase ini yaitu aspek kognitif dan afektif yang ditandai dengan analisis dan proses berfikir akan nilai-nilai positif atau manfaat kegiatan belajar mengajar.

Fase generalisasi merupakan fase yang mengajak siswa menggunakan hasil kegiatan belajar mengajar untuk memperbaiki diri sendiri. Siswa diajak untuk merumuskan dan merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk perbaikan diri. Fase ini meliputi keseluruhan aspek yaitu kognitif, afektif, konatif dan psikomotor.

#### **D. Keunggulan Metode Socratic**

Melihat konsep dasar dan kerangka kerja metode socratic, tentu metode ini memiliki keunggulan tersendiri dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut akan dipaparkan keunggulan-keunggulan metode socratic:

1. Mengoptimalkan kemampuan mengajar guru
2. Menstimulasi guru untuk mengoptimalkan penguasaan substansi dan metodologi
3. Mengoptimalkan pengalaman belajar siswa
4. Mengintegrasikan pencapaian hasil belajar siswa dari aspek kognitif, afektif, konatif dan psikomotor.
5. Menciptakan proses belajar mengajar aktif dan menyenangkan
6. Mereduksi pembelajaran yang terlalu condong ke ceramah dan guru sebagai pusat belajar
7. Mengakomodasi beragam metode mengajar.

## **E. Contoh Format Rancangan Proses Pembelajaran Metode Socratic**

### **FORMAT RANCANGAN PROSES PEMBELAJARAN**

#### **KOMPONEN**

Mata Pelajaran :  
Kelas :  
Semester :  
Standar Kompetensi :  
Kompetensi Dasar :  
Indikator :  
Materi :  
Metode dan Teknik :  
Alat/Bahan :

#### **LANGKAH-LANGKAH**

1. Eksperientasi : \_\_\_\_\_
  - a. Awal : \_\_\_\_\_
  - b. Inti : \_\_\_\_\_
  - c. Akhir: \_\_\_\_\_
2. Identifikasi : \_\_\_\_\_
3. Analisis : \_\_\_\_\_
4. Generalisasi : \_\_\_\_\_

#### **EVALUASI DAN TINDAK LANJUT**

- a. Evaluasi
- b. Tindak Lanjut

**Reverence:**

- Muqodas, Idat. (2011). Efektivitas Model Service Quality untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Bimbingan dan Konseling. *Thesis* Pada Sekolah Pascasarjana UPI Bandung: Tidak diterbitkan.
- Rusmana, Nandang. (2009b). *Konseling Kelompok Bagi Anak Berpengalaman Traumatis*. Bandung: Rizqi Press.
- Yusuf, Syamsu. LN. *et al.* (2009). Model Peningkatan Kualitas Program dan Layanan Bimbingan dan Konseling di Jalur Pendidikan Formal. Laporan Penelitian Hibah Pascasarjana Tahap I. SPs UPI: Tidak diterbitkan
- Yusuf, Syamsu. LN. *et al.* (2010). Model Peningkatan Kualitas Program dan Layanan Bimbingan dan Konseling di Jalur Pendidikan Formal. Laporan Penelitian Hibah Pascasarjana Tahap II. SPs UPI: Tidak diterbitkan

# PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN MELALUI PERAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPETENSI-SCL

R. Mursid\*)

Diajukan pada Seminar Nasional ISPI-UNY Tanggal 21-22 Januari 2012  
Tema: Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan

## ABSTRAK

Pengembangan sistem pendidikan dan pembelajaran dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan proses pembelajaran Perguruan Tinggi dan perlu secara kreatif mengembangkan konsep-konsep pendidikan baru yang lebih komprehensif sekaligus kompetitif. Hal ini dapat dilakukan dengan pembaharuan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dengan berbasiskan kompetensi, dengan menempatkan mahasiswa sebagai subyek (*Student-Centered Learning = SCL*), dibandingkan sebagai obyek pendidikan. Konsep pendidikan juga perlu di desain untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan dan peningkatan *soft skills* serta *success skills*, sehingga lulusan Perguruan Tinggi mempunyai karakter percaya diri yang tinggi, memiliki kearifan terhadap nilai-nilai sosial dan kultural bangsa, kemandirian serta jiwa kepemimpinan yang kuat. Teknologi pendidikan merupakan suatu disiplin terapan, yang berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar –belajar lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat dan sebagainya. Untuk itu ada usaha dan produk yang sengaja dibuat dan ada yang ditemukan dan dimanfaatkan. Namun perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat akhir-akhir ini dan menawarkan sejumlah kemungkinan yang semula tidak terbayangkan, telah membalik cara berpikir kita dengan “*bagaimana mengambil manfaat teknologi tersebut untuk mengatasi masalah belajar*”. Dengan Sumber daya manusia yang ada, sistem mengelola pendidikan dan pembelajaran harus memiliki kemampuan akademis dan profesional yang handal untuk mengembangkan dan/atau menerapkan teknologi pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran menjadi lebih berkualitas, efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan belajar.

\*) Dr. R. Mursid, M.Pd. - Staf Pengajar Pascasarjana Universitas Negeri Medan (Unimed)  
E-mail: [mursid\\_tp@yahoo.com](mailto:mursid_tp@yahoo.com) Hp. 081361618271

## Pendahuluan

Perkembangan dan peningkatan kualitas sistem pendidikan dan pembelajaran di Perguruan Tinggi merupakan tuntutan logis dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sangat pesat dewasa ini. Perkembangan IPTEKS mengisyaratkan penyesuaian dan peningkatan proses pendidikan dan pembelajaran secara terus menerus. Disamping itu, perlu adanya inovasi pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas lulusan yang siap

pakai di dunia kerja, serta meningkatkan daya saing.

Ke depan, arah pembangunan pendidikan nasional (Sisdiknas 2003) didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal, yang mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu: (1) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi, (2) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, kompetensi estetis, dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang terprogram dalam desain FEE (*facilitating, empowering, enabling*), untuk membuat mahasiswa belajar secara aktif, yang menekankan pada sumber belajar. Pembelajaran merupakan proses pengembangan kreativitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir mahasiswa, serta dapat meningkatkan dan mengkonstruksi serta melakukan penjelajahan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan dan pengembangan yang baik terhadap materi perkuliahan. Perubahan yang terjadi dari metode pembelajaran yang baru dengan diterapkannya KBK adalah perubahan dari *Teacher Centered Content - Oriented ke Student Centered Learning*.

Paradigma yang sistemik kecuali bersifat menyeluruh, harus pula memperhatikan bahwa perubahan mendasar pada salah satu aspek pendidikan, akan mempengaruhi perubahan mendasar pada aspek-aspek lain. Perubahan itu dapat dibedakan dalam empat lapis sistem yang saling berkaitan (*nested systems*). Pada lapis pertama adalah perubahan pada pengalaman belajar ; lapis kedua pada sistem belajar-pembelajaran yang memungkinkan terlaksananya pengalaman belajar yang diinginkan seperti misalnya dalam sekolah. Lapis ketiga adalah perubahan pada pengelolaan sistem di wilayah, yang mendukung terselenggaranya sistem pembelajaran, dan lapis keempat adalah perubahan pada sistem perundangan yang mengatur dan menjamin berlangsungnya keseluruhan sistem pendidikan secara nasional. (Banathy,1991; Reigeluth & Garfinkle,1992).

Sistem pendidikan nasional (2003) kita yang lalu pada dasarnya adalah

bertujuan untuk membudayakan peserta didik/warga belajar. Kebijakan ditentukan sangat sentralistis (*etatisme*), sehingga tidak memberi peluang bagi wilayah apalagi sekolah dan guru untuk mengembangkan prakarsa yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungan. Pada hakekatnya anak didik diindoktrinasi untuk menelan pelajaran yang diberikan. Pengajarpun "*diprogram*" untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya secara baku sesuai dengan pedoman tertentu. Kenyataan ini pada dasarnya mengingkari hak seseorang, atau kurang memanusiakan para peserta didik/warga belajar.

Pembelajaran adalah merupakan upaya sengaja dan bertujuan yang berfokus kepada kepentingan, karakteristik dan kondisi orang lain agar ia/mereka dapat belajar dengan efektif dan efisien. Sedangkan konsep pembelajaran didasarkan pada teori psikologi konstruktivistik dan teori komunikasi konvergensi. Konsep pembelajaran ini merupakan inti pada lapis pengalaman belajar, yaitu dimana peserta didik/pemelajar membangun diri sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya melalui interaksi dengan lingkungannya.

Orientasi akademik dalam pendidikan tinggi tidak hanya terpaku pada rutinitas proses pembelajaran yang selama ini mereka lakukan, namun perekayasa teknologi pendidikan harus diwujudkan untuk memperoleh tujuan pendidikan yang diharapkan, hal ini meliputi: (1) pengembangan bidang studi dan kawasan teknologi pendidikan, (2) perancangan sistem pembelajaran, (3) produksi media pendidikan, (4) penyediaan sarana dan prasarana belajar, (5) pemilihan dan penilaian komponen sistem pembelajaran, (6) penerapan/pemanfaatan sumber daya belajar, (7) penyebaran konsep dan temuan teknologi pendidikan, (8) pengelolaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya belajar, dan (9) perumusan



bahan kebijakan teknologi pendidikan. (Miarso, 2005).

Peningkatan kualitas dan proses pembelajaran Perguruan Tinggi perlu secara kreatif mengembangkan konsep-konsep pendidikan baru yang lebih komprehensif sekaligus kompetitif. Hal ini dapat dilakukan dengan pembaharuan metode pembelajaran yang lebih fleksibel, dengan menempatkan mahasiswa sebagai subyek (*Student-Centered Learning = SCL*), dibandingkan sebagai obyek pendidikan. Konsep pendidikan juga perlu di desain untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan dan peningkatan *soft skills* serta *success skills*, sehingga lulusan Perguruan Tinggi mempunyai karakter percaya diri yang tinggi, memiliki kearifan terhadap nilai-nilai sosial dan kultural bangsa, kemandirian serta jiwa kepemimpinan yang kuat

Permasalahan utama dalam sistem pendidikan dan pembelajaran di Perguruan Tinggi, salah satunya adalah bagaimana perencanaan dan kesiapan dosen untuk mengelola pembelajarannya agar tercapai kompetensi yang diinginkan dalam diri mahasiswa. Secara konseptual barangkali pengembangan strategi pembelajaran dapat diakui sebagai salah satu sarana bagi lembaga pendidikan untuk memberikan dan memperluas wawasan mahasiswa tentang pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar lainnya dengan harapan dapat direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

### **Pembelajaran Berbasis Kompetensi**

Pembelajaran yang menitik beratkan pada "*proses belajar*" dipahami bertumpu pada aktifitas belajar mahasiswa SCL, yaitu suatu bentuk pembelajaran yang pada intinya menggerakkan mahasiswa untuk bertumbuh pemikiran, ketrampilan, dan sikapnya menurut kapasitasnya, dan dosen berperan sebagai Fasilitator dan Motivator. Dosen membimbing mahasiswa dengan menyeleksi-menerangkan bahan ajar dan alat-media ajar sehingga mahasiswa itu sendiri dapat mempelajari bahan ajar

dengan menggunakan alat-media tersebut, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara mandiri. Di samping itu, dosen bertanggung-jawab menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran.

Pembelajaran berbasis kompetensi, dan proses pembelajaran yang diharapkan menghasilkan produk yang bernilai, menuntut lingkungan belajar yang kaya dan nyata (*rich and natural environment*), yang dapat memberikan pengalaman belajar dimensi-dimensi kompetensi secara integratif. Lingkungan belajar yang dimaksud ditandai oleh: (1) situasi belajar, lingkungan, isi dan tugas-tugas yang relevan, realistik, otentik, dan menyajikan kompleksitas alami dunia nyata, (2) sumber-sumber data primer digunakan agar menjamin keautentikan dan kompleksitas dunia nyata, (3) mengembangkan kecakapan hidup dan bukan reproduksi pengetahuan, (4) pengembangan kecakapan ini berada di dalam konteks individual dan melalui negosiasi sosial, kolaborasi, dan pengalaman, (5) kompetensi sebelumnya, keyakinan, dan sikap dipertimbangkan sebagai prasyarat, (6) keterampilan pemecahan masalah, berpikir tingkat tinggi, dan pemahaman mendalam ditekankan, (7) mahasiswa diberi peluang untuk belajar secara apprenticeship di mana terdapat penambahan kompleksitas tugas, pemerolehan pengetahuan dan keterampilan, (8) kompleksitas pengetahuan dicerminkan oleh penekanan belajar pada keterhubungan konseptual, dan belajar interdisipliner, (9) belajar kooperatif dan kolaboratif diutamakan agar dapat mengekspos mahasiswa ke dalam pandangan-pandangan alternatif, dan (10) pengukuran adalah autentik dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran (Simons, 1996; Willis, 2000).

Secara spesifik Peter Jarvis (2001), menetapkan tiga elemen dari kompetensi profesional (*Professional Competency*) yakni: (1) *Knowledge and understanding of: academic discipline(s), the psychomotor elements, interpersonal relationship and*

*moral value, (2) skill to: perform psychomotor procedures and interact with others, and (3) professional attitude: knowledge of professionalism, emotive commitment to professionalism and willingness to perform professionally.*

### **Pembelajaran *Student Centre Learning* (SCL)**

SCL adalah pembelajaran yang berpusat pada aktivitas belajar mahasiswa, bukan hanya pada aktivitas dosen mengajar. Situasi pembelajaran dalam SCL di antaranya bercirikan: (1) mahasiswa belajar baik secara individu maupun berkelompok untuk membangun pengetahuan, dengan cara mencari dan menggali sendiri informasi dan teknologi yang dibutuhkannya secara aktif daripada sekedar menjadi penerima pengetahuan secara pasif, (2) dosen lebih berperan sebagai FEE dan *guides on the sides* daripada sebagai *mentor in the center*, yaitu membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan mentransfernya guna menemukan solusi terhadap permasalahan nyata sehari-hari, daripada sekedar sebagai *gatekeeper of information*, (3) mahasiswa tidak sekedar kompeten dalam bidang ilmunya, tetapi juga kompeten dalam belajar. artinya, mahasiswa tidak hanya menguasai isi mata kuliahnya tetapi mereka juga belajar tentang bagaimana belajar (*learn how to learn*), melalui *discovery*, *inquiry*, dan *problem solving*, dan terjadi pengembangan, (4) belajar menjadi kegiatan komunitas yang difasilitasi oleh dosen, yang mampu mengelola pembelajarannya menjadi berorientasi pada mahasiswa, (5) belajar lebih dimaknai sebagai belajar sepanjang hayat (*learning throughout of life*), suatu keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, (6) belajar termasuk memanfaatkan teknologi yang tersedia, baik berfungsi sebagai sumber informasi pembelajaran maupun sebagai alat untuk memberdayakan mahasiswa dalam mencapai keterampilan utuh (intelektual, emosional, dan psikomotor) yang dibutuhkan.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar pembelajaran menjadi aktif, kreatif, dinamis, dialogis dan efektif pada model pembelajaran SCL adalah: (1) Memahami tujuan dan fungsi belajar, di mana seorang dosen perlu memahami konsep-konsep mendasar dan cara belajar sesuai dengan pengalaman mahasiswa serta memusatkan pembelajaran pada mahasiswa, (2) mengenal mahasiswa sebagai individu beserta perbedaan kemampuannya, untuk menentukan berbagai metode dan strategi untuk mendorong kreativitas, (3) menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang serta memanfaatkan organisasi kelas agar mahasiswa dapat saling membantu dalam melakukan tugas belajar tertentu, (4) mengembangkan kreativitas dan kemampuan berfikir kritis dan pemecahan masalah, (5) memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar serta memberikan muatan nilai, etika, estetika, dan logika, (6) memberikan umpan balik yang baik untuk mendorong kegiatan belajar, dan (7) menyediakan pengalaman belajar yang beragam.

Metode pembelajaran berbasis SCL antara lain terdiskripsi, meliputi: (1) mahasiswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya, (2) mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan, (3) tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa (*life-long learning*), (4) memanfaatkan banyak media (*multimedia*), (5) fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa, (6) proses pembelajaran dan penilaian dilakukan saling berkesinambungan dan terintegrasi, (7) penekanan pada proses pengembangan pengetahuan. kesalahan dinilai dapat menjadi salah satu sumber belajar, (8) sesuai untuk pengembangan ilmu dengan cara pendekatan interdisipliner, (9) iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif, (10) mahasiswa dan dosen belajar bersama di dalam mengembangkan pengetahuan,

konsep dan keterampilan, (11) mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja tetapi dapat menggunakan berbagai cara dan kegiatan, (12) penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi, (13) penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan berbagai bahan pelajaran, metode interdisipliner, penekanan pada *problem based learning* dan *skill competency*.

Terdapat beragam metode pembelajaran untuk SCL, di antaranya adalah: (1) *small group discussion*, (2) *role-play & simulation*, (3) *case study*, (4) *discovery learning*, (4) *self-directed learning*, (5) *cooperative learning*, (6) *collaborative learning*, (6) *contextual instruction*, (7) *project based learning*, dan (8) *problem based learning and inquiry*.

Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL yang lain, seperti *Cooperative Learning*, *Collaborative Learning*, *Problem Based Learning and Inquiry*, dan lain-lain. Mahasiswa peserta kuliah diminta membuat kelompok kecil (5 sampai 10 orang) untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa akan belajar: (1) menjadi pendengar yang baik, (2) bekerjasama untuk tugas bersama, (3) memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif, (4) menghormati perbedaan pendapat, (5) mendukung pendapat dengan bukti, dan (6) menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dan lain-lain)

Aktivitas diskusi kelompok kecil dapat berupa: (1) membangkitkan ide, (2) menyimpulkan poin penting, (3) mengases tingkat skill dan pengetahuan, (4) mengkaji kembali topik di kelas sebelumnya, (5) menelaah latihan, quiz, tugas menulis, (6) memproses *outcome* pembelajaran pada akhir kelas, (7) memberi komentar tentang jalannya kelas, (8) membandingkan teori, isu, dan interpretasi,

(9) menyelesaikan masalah, dan (10) *brainstroming*

Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Misalnya untuk mata kuliah Kewirausahaan, mahasiswa diminta membuat perusahaan fiktif yang bergerak di bidang agribisnis, kemudian perusahaan tersebut diminta melakukan hal yang sebagaimana dilakukan oleh perusahaan sesungguhnya dalam memberikan menjual produk kepada perusahaan perhotelan, misalnya melakukan proses bidding, dan sebagainya. Simulasi dapat berbentuk: (1) permainan peran (*role playing*). dalam contoh di atas, setiap mahasiswa dapat diberi peran masing-masing, misalnya sebagai direktur, teknisi, bagian pemasaran dan lain-lain, (2)

*simulation exercises and simulation games*, dan (3) model komputer. simulasi dapat mengubah cara pandang (*mindset*) mahasiswa, dengan jalan: (1) mempraktekkan kemampuan umum (misal komunikasi *verbal & nonverbal*), (2) mempraktekkan kemampuan khusus, (3) mempraktekkan kemampuan tim, (4) mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah (*problem-solving*), (5) menggunakan kemampuan sintesis, dan (6) mengembangkan kemampuan empati.

*Discovery Learning* adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri.

*Self-Directed Learning* adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan. Sementara dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, yang memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa tersebut.

Metode belajar ini bermanfaat untuk menyadarkan dan memberdayakan

mahasiswa, bahwa belajar adalah tanggungjawab mereka sendiri. Dengan kata lain, individu mahasiswa didorong untuk bertanggungjawab terhadap semua pikiran dan tindakan yang dilakukannya. Metode pembelajaran *Self-Directed Learning* dapat diterapkan apabila asumsi berikut sudah terpenuhi. Sebagai orang dewasa, kemampuan mahasiswa semestinya bergeser dari orang yang tergantung pada orang lain menjadi individu yang mampu dalam: (1) belajar mandiri, (2) pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat, (3) kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi pembelajar mandiri, (4) orang dewasa lebih tertarik belajar dari permasalahan daripada dari isi matakuliah, dan (5) pengakuan, penghargaan, dan dukungan terhadap proses belajar orang dewasa perlu diciptakan dalam lingkungan belajar. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa harus memiliki semangat yang saling melengkapi dalam melakukan pencarian pengetahuan.

*Cooperative Learning* adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. Metode ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas, langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan, semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Mahasiswa dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen. Pada dasarnya *Cooperative Learning* seperti ini merupakan perpaduan antara *teacher-centered* dan *student-centered learning*. *Cooperative Learning* bermanfaat untuk membantu menumbuhkan dan mengasah: (1) kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa, (2) rasa tanggungjawab individu dan kelompok mahasiswa, (3) kemampuan dan keterampilan bekerjasama antar mahasiswa, (4) keterampilan sosial mahasiswa.

*Collaborative Learning* adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah/tugas/kasus memang berasal dari dosen dan bersifat open ended, tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil diskusi/kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok.

*Contextual Instruction* adalah konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi matakuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelaku kerja profesional atau manajerial, *entrepreneur*, maupun investor. Sebagai contoh, apabila kompetensi yang dituntut matakuliah adalah mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses transaksi jual beli, maka dalam pembelajarannya, selain konsep transaksi ini dibahas dalam kelas, juga diberikan contoh, dan mendiskusikannya. Mahasiswa juga diberi tugas dan kesempatan untuk terjun langsung di pusat-pusat perdagangan untuk mengamati secara langsung proses transaksi jual beli tersebut, atau bahkan terlibat langsung sebagai salah satu pelakunya, sebagai pembeli, misalnya. Pada saat itu, mahasiswa dapat melakukan pengamatan langsung, mengkajinya dengan berbagai teori yang ada, sampai ia dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya proses transaksi jual beli. Hasil keterlibatan, pengamatan dan kajiannya ini selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas, untuk dibahas dan menampung saran dan masukan lain dari seluruh anggota kelas.

Pada intinya dengan *Cooperative Learning*, dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama, untuk mencapai kompetensi yang

dituntut oleh matakuliah, serta memberikan kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam pembelajaran untuk belajar satu sama lain.

*Project Based Learning* adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian/penggalian (*inquiry*) yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang dirancang dengan sangat hati-hati.

*Problem Based Learning and Inquiry* adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Pada umumnya, terdapat empat langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam PBL/I, yaitu: (1) menerima masalah yang relevan dengan salah satu/beberapa kompetensi yang dituntut matakuliah, dari dosennya, (2) melakukan pencarian data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah, (3) menata data dan mengaitkan data dengan masalah, dan (4) menganalisis strategi pemecahan masalah.

Dosen masih memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan SCL, yaitu: (1) bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, (2) mengkaji kompetensi matakuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir pembelajaran, (3) merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar yang, (4) diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dituntut matakuliah, (5) membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari, (6) mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur.

Peran mahasiswa dalam SCL adalah: (1) mengkaji kompetensi matakuliah yang dipaparkan dosen, (2)

mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen, (3) membuat rencana pembelajaran untuk matakuliah yang diikutinya, dan (4) belajar secara aktif (dengancara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis dan evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok.

Institusi juga memiliki peran dalam implementasi SCL, yaitu: (1) mengkaji kurikulum, program pembelajaran dan sistem penilaian hasil belajar yang mengacu pada SCL, (2) membuat kebijakan tentang sosialisasi dan penerapan SCL di institusinya, (3) menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk terlaksananya SCL dengan menciptakan *networking* dengan dunia kerja, lembaga-lembaga masyarakat, atau instansi lain yang terkait, (4) membenahi pola pikir (*mindset*) para dosen dan pengelola program pendidikan pada umumnya tentang pentingnya mengubah paradigma mengajar yang berorientasi pada dosen semata kepada pola pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa, yang dicirikan dengan adanya interaksi yang positif dan konstruktif antara dosen dan mahasiswa dalam membangun pengetahuan, (5) melatih dan memberikan dukungan yang penuh kepada para dosen dalam menerapkan SCL dalam proses pembelajaran, (6) memanfaatkan perencanaan pembelajaran yang berorientasi SCL, yang dikembangkan para dosen, dalam pengadaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, (7) menciptakan sistem yang memungkinkan dosen dan seluruh civitas academica dapat berkomunikasi dan berkoordinasi serta akses terhadap IT.

Sebuah perencanaan pembelajaran merupakan strategi untuk mencapai tujuan sehingga dengan adanya perencanaan ini makapeluang untuk pencapaian keberhasilan dapat diprediksi dengan baik. Perencanaan ini juga perlu untuk diketahui mahasiswa agar mempermudah dalam

mempersiapkan diri untuk mengikuti proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi bagi dirinya sendiri. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu program bagaimana mengajarkan materi yang sudah dirumuskan dalam kurikulum khususnya Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) atau Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester. Di samping itu, dalam perencanaan pembelajaran berisi proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan atau metode pengajaran, monitoring dan evaluasi dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan setidaknya membuat pernyataan yang mencakup: (1) kemampuan akhir pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik, (2) skenario pembelajaran: alternatif kegiatan yang dapat ditempuh oleh peserta didik tahap demi tahap dalam mencapai kompetensi antara atau kompetensi penyusun kompetensi akhir disertai dengan tugas terstruktur, monitoring dan evaluasi, (3) indikator keberhasilan pembelajaran/kriteria penilaian keberhasilan atau tahapan keberhasilan, (4) cara penilaian antara lain penilaian proses dan kinerja, (5) lingkup materi (dapat diakses dari berbagai sumber belajar), (6) media pembelajaran, (7) rencana waktu

### **Peranan Teknologi Pendidikan**

Azas manfaat atau aksiologi dari teknologi pendidikan dapat dinyatakan dengan kutipan pendapat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daed Joesoef dalam Lokakarya Nasional Teknologi Pendidikan di Yogyakarta pada tahun 1982 sebagai berikut :

*“Teknologi pendidikan perlu dipikirkan dan dibahas terus menerus karena adanya kebutuhan real yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu (i) tekad mengadakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar; (ii)*

*keharusan meningkatkan mutu pendidikan berupa, antara lain, penyempurnaan kurikulum, penyediaan berbagai sarana pendidikan, dan peningkatan kemampuan tenaga pengajar lewat berbagai bentuk pendidikan serta latihan; (iii) penyempurnaan system pendidikan dengan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tantangan jaman dan kebutuhan pembangunan; (iv) peningkatan partisipasi masyarakat dengan pengembangan dan pemanfaatan berbagai wadah dan sumber pendidikan; (v) penyempurnaan pelaksanaan interaksi antara pendidikan dan pembangunan di mana manusia dijadikan pusat perhatian pendidikan.”*

Pernyataan kebijakan tersebut pada saat ini telah terwujud, baik sebagai konsep maupun sebagai bentuk atau pola kelembagaan pendidikan. Konsep tersebut bahkan telah dikukuhkan dengan ketentuan perundangan dan peraturan. Paling tidak ada lima konsep dalam teknologi pendidikan yang telah terintegrasi dalam sistem pendidikan dan tertuang dalam Undang-undang Sisdiknas dan turunannya. Ke lima konsep itu adalah : (1) pembelajaran yang berfokus pada peserta didik; (2) sumber belajar yang beraneka; (3) pendekatan dari bawah (*bottom-up approaches*) dalam mengelola kegiatan belajar dan implikasinya dalam satuan pendidikan; (4) sistem pendidikan terbuka dan multi makna; dan (5) pendidikan jarak jauh.

Semua bentuk teknologi adalah sistem yang diciptakan oleh manusia untuk sesuatu tujuan tertentu, yang pada intinya adalah mempermudah manusia dalam memperingan usahanya, meningkatkan hasilnya, dan menghemat tenaga serta sumber daya yang ada. Teknologi itu pada hakekatnya adalah bebas nilai, namun penggunaannya akan sarat dengan aturan nilai dan estetika. Teknologi merupakan suatu bidang yang tak terpisahkan dengan ilmu pengetahuan, seperti misalnya teknologi pertanian, teknologi kesehatan, teknologi komunikasi, dan tentunya juga teknologi pendidikan. Setiap teknologi, tak

terkecuali teknologi pendidikan, merupakan proses untuk menghasilkan nilai tambah, sebagai produk atau piranti untuk dapat digunakan dalam aneka keperluan, dan sebagai sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan untuk suatu tujuan tertentu.

Teknologi pendidikan sebagai disiplin keilmuan berpegangan pada serangkaian postulat, meliputi: (1) lingkungan kita senantiasa berubah. perubahan itu ada yang direkayasa, ada yang dapat diperkirakan, namun sebagian besar tidak dapat kita ketahui sebelumnya, (2) jumlah penduduk semakin bertambah, meskipun dengan prosentase yang mengecil. mereka semua perlu belajar, dan belajar itu berlangsung seumur hidup, di mana saja, dan dari siapa saja, (3) sumber-sumber tradisional semakin terbatas, karena itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. kecuali itu harus pula diciptakan sumber baru, dan didayagunakan sumber yang masih belum terpakai (*idle*), (4) adalah hak setiap pribadi untuk dapat berkembang semaksimal mungkin, selaras dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan, dan (5) masyarakat berbudaya teknologi, yaitu bahwa teknologi merupakan bagian yang tertanam (*imbedded*) dan tumbuh dalam setiap masyarakat, dengan kadar yang berbeda.

Teknologi pendidikan didefinisikan sebagai teori dan praktek dalam merancang, mengembangkan, mendayagunakan, mengelola, menilai, dan meneliti proses, sumber dan sistem belajar pada manusia. Teknologi pendidikan berpegangan pada enam pendekatan dalam menjalankan fungsinya, yaitu: (1) pendekatan someristik berupa penggabungan berbagai kajian/bidang keilmuan (teori sistem, psikologi, komunikasi, informatika, ekonomi, manajemen, rekayasa teknik dsb.) ke dalam suatu kebulatan tersendiri, (2) pendekatan bersistem dan mensistem, dengan memandang sesuatu secara menyeluruh serta berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan

persoalan, (3) pendekatan sinergistik yang menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibandingkan dengan bila kegiatan itu dijalankan sendiri-sendiri, (4) pendekatan efektivitas dan efisiensi dengan jalan mendayagunakan sumber yang sengaja dikembangkan dan sumber yang tersedia, (5) pendekatan produktivitas dengan memberikan masukan tambahan atau masukan baru menggantikan yang lama dengan hasil yang meningkat, dan (6) pendekatan inovatif dengan mengkaji permasalahan secara holistik dan kemudian mencari jawaban baru yang belum ada sebelumnya.

Berdasarkan pendekatan itu maka teknologi pendidikan tidak hanya membantu memecahkan masalah belajar dalam konteks sekolah, namun dalam dalam seluruh konteks kehidupan masyarakat, dengan mengembangkan dan/atau menggunakan beraneka sumber. Dalam konteks sekolah teknologi pendidikan berkembang dari apa yang semula dikenal dengan istilah didaktik dan metodik. Namun karena belajar tidak hanya dalam konteks sekolah, tetapi dalam seluruh konteks masyarakat, maka teknologi pendidikan beroperasi dimana belajar itu diperlukan, baik oleh perorangan, kelompok maupun organisasi.

Kontribusi teknologi pendidikan dalam pembaharuan sistem pendidikan dan pembelajaran dapat dibedakan dalam lima kategori yaitu: (1) penyediaan tenaga profesi yang kompeten untuk memecahkan masalah belajar, (2) pengintegrasian konsep, prinsip dan prosedur dalam sistem pendidikan, (3) pengembangan sistem belajar-pembelajaran yang inovatif, (4) penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses belajar dan pembelajaran, dan (5) peningkatan kinerja organisasi dan sumber daya manusia agar lebih produktif. kelima kategori ini dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan karena saling berkaitan dan menunjang.

Teknologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu terapan, artinya ia berkembang karena adanya kebutuhan di

lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar – belajar lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat dan sebagainya. Untuk itu ada usaha dan produk yang sengaja dibuat dan ada yang ditemukan dan dimanfaatkan. Namun perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat akhir-akhir ini dan menawarkan sejumlah kemungkinan yang semula tidak terbayangkan, telah membalik cara berpikir kita dengan “bagaimana mengambil manfaat teknologi tersebut untuk mengatasi masalah belajar”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kontribusi teknologi pendidikan dalam pembangunan pendidikan dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu konsep, tenaga profesional dan kegiatan. Dalam pembahasan tentang azas manfaat teknologi pendidikan sebagai disiplin keilmuan telah dikemukakan bahwa teknologi pendidikan telah menyumbangkan sedikitnya lima konsep dalam pembaharuan sistem pendidikan nasional. Istilah dan konsep “pembelajaran” telah diciptakan dan digunakan dalam kalangan teknologi pendidikan sejak tahun 1978. Istilah itu pada awalnya dihiraukan bahkan dicibirkan oleh banyak kalangan pendidikan lain. Namun dalam UU Sisdiknas 2003, istilah dan konsep tersebut dikukuhkan sebagai keharusan dalam proses pendidikan. Pengertian “pembelajaran” dalam UU Sisdiknas adalah “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar”. Sedangkan dalam konsep teknologi pendidikan, saya mendefinisikannya sebagai “proses sistematis dan sistemik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang agar orang lain dapat secara aktif belajar sehingga mencapai kompetensi yang diharapkan.”

Aplikasi atau penerapan teknologi pendidikan dalam upaya pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran dengan cara: (1) memadukan berbagai macam pendekatan dari bidang ekonomi, manajemen, psikologi, rekayasa, dan lain-lain secara bersistem; (2) memecahkan

masalah belajar pada manusia secara menyeluruh dan serempak, dengan memperhatikan dan mengkaji semua kondisi dan saling kaitan di antaranya; (3) menggunakan teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan masalah belajar; (4) timbulnya daya lipat atau efek sinergi, di mana penggabungan pendekatan dan atau unsur-unsur mempunyai nilai lebih dari sekedar penjumlahan. Demikian pula pemecahan secara menyeluruh dan serempak akan mempunyai nilai lebih daripada memecahkan masalah secara terpisah (Miarso, 2007:78).

### **Implikasi Bagi Perguruan Tinggi**

Konsep dan prinsip yang dikembangkan dalam teknologi pendidikan sejak tahun 1974, sekarang ini telah tertampung dalam ketentuan perundangan (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Salah satu konsep tersebut adalah pembelajaran (Pasal 1 butir 20) dan salah satu prinsip adalah penyelenggaraan pendidikan secara sistemik dengan system terbuka dan multimakna (Pasal 4 ayat 2). Ke dua hal tersebut mempunyai implikasi yang banyak, jauh dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Dalam kesempatan ini hanya dibahas salah satu implikasi yang sekarang sedang banyak mendapat sorotan, yaitu belajar berjaringan.

Belajar berjaringan (*online learning*) merupakan suatu konsep yang berkembang dari konsep sebelumnya. Belajar di sekolah dengan tatap muka secara teratur antara pendidik dan peserta didik, dapat dimaknai sebagai belajar tradisional, atau terarah (*directed*) atau terikat (*bounded*). Tradisional karena telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu, dimana selalu dituntut adanya gedung dengan ruang kelas yang dilengkapi dengan bangku dan papan tulis, guru yang bertugas mengajar, dan siswa yang dikelompokkan dalam tiap kelas dan duduk berjajar dengan rapi. Terarah karena segala sesuatu yang diajarkan atau dipelajari telah ditentukan



arahnya, termasuk tujuannya, isinya, jadwalnya bahkan baju seragamnya. Terikat karena adanya aturan tertentu yang harus diikuti seperti lama waktu belajar, peryaratan kenaikan kelas, dan tempat duduk berjajar.

Mengingat makin banyaknya kebutuhan belajar, dan sementara itu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tradisional tidak mampu melayani berbagai kebutuhan tersebut, baik jumlah yang memerlukan serta ragam jenis kebutuhan yang diinginkan, maka berkembanglah sistem alternatif yang dikenal dengan berbagai sebutan seperti belajar sendiri (*autodidact*), bebas bebas (*independent learning*), kursus ekstensi (*extension course*), studi korespondensi, dan belajar jarak jauh (*distance learning*). Belajar sendiri dan bebas, memungkinkan seseorang untuk berkembang sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhanyang dirasakan. Belum tentu apa yang mereka kuasai melalu belajar sendiri dan bebas tersebut mendapat pengakuan atau penghargaan dari masyarakat. Sementara belajar melalui kursus ekstensi, korespondensi dan jarak jauh selalu mengartikan adanya pendidik (guru, instruktur, dosen) yang mengendalikan kegiatan belajar secara fisik terpisah dari peserta didik. Pendidik itu menentukan bahan yang harus dipelajari, serta berbagai persyaratan lain seperti ujian, praktikum dsb.

## **PENUTUP**

Perkembangan terkini sistem pendidikan dan pembelajaran mempunyai implikasi yang banyak, jauh dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Dalam tataran mikro (misalnya pengembangan pengalaman belajar di kelas) perlu dikembangkan berbagai strategi pembelajaran yang menarik, merangsang, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif dan kreatif. Pada tataran meso (pada unit penyelenggara kegiatan pendidikan) perlu dikembangkan kurikulum

dan tenaga pendidik yang kompeten. Sedang pada tataran makro (pada satuan pendidikan) perlu disediakan berbagai aturan, sarana dan anggaran yang diperlukan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) menyediakan banyak cara mendapatkan informasi sumber belajar. Hal ini memberi peluang untuk mengembangkan metode-metode pembelajaran berbasis SCL baru yang secara optimal memanfaatkan teknologi tersebut untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, di antaranya adalah: (1) *small group discussion*, (2) *role-play & simulation*, (3) *case study*, (4) *discovery learning*, (4) *self-directed learning*, (5) *cooperative learning*, (6) *collaborative learning*, (6) *contextual instruction*, (7) *project based learning*, dan (8) *problem based learning and inquiry*.

Teknologi pendidikan sebagai disiplin keilmuan, profesi dan bidang garapan telah memberikan kontribusinya dalam pembangunan pendidikan. Namun kontribusi tersebut hanya akan berkembang dengan adanya komitmen sungguh-sungguh dari para teknolog pendidikan untuk mengatasi masalah belajar dalam berbagai latar dengan berbagai produk.

## **Kepustakaan**

Banathy, Bela H. (1991). *Systems Design of Education. A journey to create the future. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications Dabbagh, Nada & Brenda Bannan-Ritland. Online Learning. Concept, strategies and application. Columbus, OH : Pearson.*

Daoed Joesoef. Pidato Pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada *Rapat Koordinasi Teknologi Komunikasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta. 1981

- Departemen Pendidikan Nasional.2005. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Miarso, Yusufhadi. (2005). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Pustekom-Kencana
- Miarso, Yusuf Hadi. 2007. *Kontribusi Teknologi Pendidikan Dalam Pembangunan Pendidikan* [yusufhadi.net/wp.../kontribusi-teknologi-pendidikan-dalam-2.doc](http://yusufhadi.net/wp.../kontribusi-teknologi-pendidikan-dalam-2.doc).15 September 2010.
- Reigeluth, Charles M. and Robert J. Garfinkle. (eds.)(1994). *Systemic Change in Education*. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications
- Toffler, Alvin. *The Third Wave*. London : Pan Books Ltd.
- Seels, Babara B. and Rita C. Richey. (1994). *Instructional Technology: The Definition and Domains of the Field*. Washington,DC : AECT.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Diperbanyak oleh Penerbit Citra Umbara Bandung.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*. Diperbanyak oleh Penerbit Citra Umbara Bandung.

## **TEKNIK LATIHAN KETERAMPILAN DASAR KONSELING INDIVIDUAL**

**oleh : Dr. Anne Hafina A.,M.Pd Jurusan PPB FIP UPI**

**annehafina@yahoo.com**

### **A. Latar Belakang**

Konseling merupakan instrumen untuk menciptakan situasi yang menimbulkan kemudahan bagi konseli dalam mengklarifikasi harapan dan mengembangkan atau mengubah perilaku. Sifat terpercaya perlu dimiliki oleh konselor sebagai pribadi yang mampu membantu. Sifat terpercaya ini tumbuh apabila konseli menyadari reputasi dan peranan konselor sebagai orang yang memberi bantuan dan tidak berorientasi pada minat dan keuntungan pribadi. Persepsi konseli atau masyarakat terhadap konselor sebagai seorang profesional yang dapat dipercaya akan terbentuk dari sikap terbuka, jujur, tulus, dan keotentikan konselor itu sendiri dalam bertindak.

Konselor diharapkan dapat membantu konseli untuk mencapai tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai memungkinkan tahapan perubahan tingkah laku konseli menjadi lebih terarah sehingga konselor bertindak sebagai fasilitator pemberian bantuan dalam jangka waktu yang singkat. Karakteristik tersebut melekat erat pada diri konselor, namun dalam pengembangan dan penginternalisasiannya diperlukan proses latihan yang panjang. Oleh karena itu, agar memiliki cukup bekal, seorang konselor memerlukan latihan keterampilan konseling sebelum terjun menangani konseli.

Menurut Carkhuff (1983) konselor yang menguasai sejumlah keterampilan konseling akan tiba pada suatu keadaan proses konseling yang berjalan secara efektif. Untuk sampai pada penguasaan keterampilan konseling yang kompeten, mahasiswa (calon konselor) memerlukan materi pembelajaran tentang keterampilan konseling, proses pembelajaran atau latihan yang sistematis, serta kondisi yang memfasilitasi pertumbuhan penguasaan keterampilan konseling. Menurut Borg (Crimmins: 1984) kedudukan dosen dalam mata kuliah

keterampilan konseling tidak sama dengan dosen pada mata kuliah yang lain karena harus berperan sebagai *supervisor*.

Lent (Steven D; 1984: 627) mendeskripsikan pelatihan (*training*) dengan mengutip definisi yang diberikan oleh Loganbill, Hardy, dan Delworth. Ia menjelaskan bahwa latihan merupakan suatu kegiatan yang dikonseptualisasikan dan difokuskan pada pemahaman keterampilan-keterampilan konseling yang khusus dan ditujukan bagi mahasiswa.

Salah satu bentuk materi yang dipandang memiliki langkah-langkah yang jelas untuk dilakukan oleh konselor dalam konseling adalah keterampilan konseling yang disajikan oleh Carkhuff (1984). Keterampilan tersebut didasarkan pada tujuan untuk menumbuhkan suatu kondisi yang harus dilalui oleh konseli dalam proses konseling. Keterampilan konseling ini menyajikan keterampilan yang harus dikuasai oleh konselor meliputi keterampilan *attending*, *responding*, *personalizing*, dan *initiating*. Keterampilan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kondisi *involving*, *exploring*, *understanding* dan *acting* pada konseli. Secara rinci Charkuff (1984) menyusun keterampilan-keterampilan konseling pada setiap tahap konseling yang dimaksud.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui penelitian adalah menguji tiga teknik latihan keterampilan dasar konseling individual (KDKI) yaitu teknik microcounseling, interpersonal process recall (IPR) dan didactic experiential (DE) dalam melatih keterampilan *Attending*, *Responding*, *Personalizing*, dan *Initiating*.

## **C. Metode Penelitian**

Efektivitas teknik latihan keterampilan dasar konseling individual diperoleh melalui penguasaan keterampilan dasar konseling individual (KDKI) pada mahasiswa yaitu keterampilan *attending*, *responding*, *personalizing* dan *initiating*. Berdasarkan pada tiga teknik latihan yang diuji melalui penilaian terhadap empat KDKI pada mahasiswa maka metode yang digunakan adalah

metode eksperimen dengan menggunakan desain *Latin-Square* (Heppner, Wampold, Kivlighan, 2008). Desain ini dipilih untuk menjamin bahwa seluruh teknik latihan konseling dasar (*treatment*) disajikan secara seimbang dalam posisi ordinal yang sama dengan frekuensi yang sama. Desain Latin-Square merupakan cara untuk memperkirakan urutan *treatment*. Karakteristik utama dari desain ini adalah, masing-masing perlakuan muncul dalam tiap posisi ordinal seperti tersusun dalam tabel 1. Menguji perbedaan skor postes antara teknik *microcounseling*, *IPR* dan *DE* dalam pelatihan KDKI dilakukan dengan memperhitungkan pretes sebagai kovariat. Perbedaan tersebut dihitung dengan menggunakan teknik analisis kovarians (ANCOVA).

**TABEL 1**  
**Urutan Teknik Latihan Konseling Pada Setiap Tahap Keterampilan Dasar Konseling Individual**

Kelompok Kelas	Tahapan Keterampilan Dasar			
	<i>Attending</i>	<i>Responding</i>	<i>Personalizing</i>	<i>Initiating</i>
A1	<i>Microcounseling</i> (1)	IPR (2)	<i>Didactic experiential</i> (3)	<i>Microcounseling</i> (1)
A2	IPR (2)	<i>Didactic experiential</i> (3)	<i>Microcounseling</i> (1)	IPR (2)
B1	<i>Didactic experiential</i> (3)	<i>Microcounseling</i> (1)	IPR (2)	<i>Didactic experiential</i> (3)
B2	<i>Microcounseling</i> (1)	IPR (2)	<i>Didactic experiential</i> (3)	<i>Microcounseling</i> (1)

Untuk menguji perbedaan efektivitas antara teknik *microcounseling*, *IPR* dan *DE* pada KDKI, *attending*, *responding*, *personalizing* dan *initiating* dilakukan melalui langkah-langkah yaitu merumuskan hipotesis, menentukan statistik uji, menetapkan kriteria pengujian, dan penarikan kesimpulan. Pengujian dilakukan berdasarkan skor postes yang dihasilkan oleh setiap teknik yang digunakan dengan menempatkan skor pretes sebagai kovariat. Dengan demikian perhitungan terhadap perbedaan skor postes menyesuaikan (*adjustment*) dengan skor pretes. Statistik yang dipakai adalah uji F untuk menguji perbedaan skor rata-rata postes masing-masing teknik. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara tiga teknik dalam empat KDKI ditafsirkan dari tingkat signifikansi yang diperoleh pada setiap nilai F. Oleh karena itu,  $H_0$  ditolak jika F hitung yang diperoleh

menunjukkan signifikansi  $p > 0,05$ . Jika hasil uji F hitung tidak signifikan ( $p > 0,05$ ) selanjutnya dilakukan uji *post hoc* untuk mengetahui perbedaan-perbedaan yang terjadi, yaitu perbedaan antara 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4, dan 3 dengan 4.

#### **D. Hasil Penelitian**

##### **1. Efektivitas Teknik *Microcounseling***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik *microcounseling* menunjukkan efektifitasnya pada beberapa latihan keterampilan konseling. Menurut penilaian dosen, teknik *microcounseling* menunjukkan efektifitas yang lebih besar daripada teknik IPR dan DE pada latihan keterampilan *attending*, *responding*, dan *initiating*. Menurut penilaian mahasiswa, efektifitas teknik *microcounseling* sama dengan teknik IPR, tampak pada latihan keterampilan *responding* saja. Sementara menurut penilaian konseli teknik *microcounseling* memiliki efektifitas yang sama dengan IPR dalam keterampilan *attending*, memiliki efektifitas yang lebih besar daripada DE dalam latihan keterampilan *responding*, dan sama efektifitasnya dengan teknik IPR dan DE dalam latihan keterampilan *initiating*.

Hasil penelitian memberikan informasi yang mengindikasikan bahwa teknik *microcounseling* memiliki efektifitas yang lebih baik daripada teknik IPR dan DE dalam latihan keterampilan *attending*. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu asumsi dalam teknik *microcounseling* adalah "memecah" keterampilan konseling ke dalam keterampilan-keterampilan yang spesifik. Keterampilan *attending* merupakan keterampilan yang terdiri atas sejumlah keterampilan yang spesifik seperti keterampilan *posturing*, *squaring*, *leaning*, *eyeing*, *listening*, *communicating interest*. Langkah-langkah latihan dalam *microcounseling* menjadi sangat cocok untuk melatih keterampilan *attending*, karena setiap keterampilan yang spesifik dilatihkan satu persatu.

Laporan awal tentang keefektifan strategi *microcounseling*, dilakukan oleh Ivey dkk (1978) yang meneliti penerapan strategi pelatihan ini dalam tiga kategori

respons : perilaku *attending*, refleksi perasaan dan merangkumkan perasaan. Sementara studi-studi sebelumnya kurang dalam kontrol metodologis, penemuan Ivey ini setidaknya menyajikan dukungan tentatif bagi efikasi model *microcounseling*.

Authier dan Gustafson (Russel, Crimmings, Lent : 1984) melakukan penelitian tentang efektivitas teknik *microcounseling* yang dibedakan berdasarkan pemberian *supervisi* yang langsung dengan *supervisi* yang menggunakan tulisan. Hasil studi mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan antara kedua kelompok tersebut, dan tidak ada satupun kondisi antara keduanya yang efektif dalam meningkatkan penggunaan keterampilan *microcounseling*. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Thompson dan Blocher tentang efek yang mungkin muncul pada pengembangan *microcounseling* dengan menempatkan *trainer* menjadi mitra *trainee* dalam pertemuan pertama dari tiga kali wawancara. Setelah perlakuan, tidak ada perbedaan antara *trainee* yang mendapat mitra dengan *trainee* kelompok *microcounseling* tradisional. Hasil ini memberikan informasi bahwa penambahan komponen *co-counseling* tidak meningkatkan efikasi teknik *microcounseling*.

Penelitian yang dilakukan Toukmanian dan Rennie (Russel *et al*, 1984: 649) membandingkan antara *microcounseling* dengan model pelatihan *human relationship* dari Truax dan Carkhuff (Carkhuff, 1969) dalam melatih penguasaan keterampilan konseling inti pada konselor. Subjek penelitian adalah mahasiswa yang belum lulus, mereka ditempatkan pada kelompok (1) *microcounseling*, (2) pelatihan *human relationship*, dan (3) kelompok kontrol. Kelompok perlakuan menerima 24 kali sesi pelatihan mingguan. Hasilnya diindikasikan bahwa dua kelompok perlakuan yaitu *microcounseling* dan pelatiha *human relationship* lebih unggul dari kelompok kontrol dalam tingkatan empati dan keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi yang ditunjukkan mahasiswa dalam kelompok *microcounseling* secara signifikan berkembang melampaui subjek dalam kelompok pelatihan *human relationship*.

Penelitian Boyd (Russel *et al*, 1984: 649) membandingkan dua model *microcounseling* yaitu model *behavioral* dan model wawancara dengan kelompok kontrol. Subjek menyelesaikan empat kali wawancara dengan konseli sebenarnya. Hasil studi mengungkap terdapat perbedaan yang signifikan antara *behavioral* dengan model wawancara. Model *behavioral* lebih berhasil dibandingkan dengan model wawancara dalam meningkatkan variabel bebas.

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Stone (Russel, Crimmings, Lent : 1984) terhadap teknik *microcounseling* dilaksanakan dengan menambahkan hubungan *kognitif-behavioral*. Dengan menggunakan 45 orang mahasiswa yang ditempatkan kedalam satu dari tiga program *microcounseling* : (1) *kognitif-behavioral*, (2) *behavioral*, (3) pembelajaran terprogram. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa kelompok *kognitif-behavioral* lebih unggul dari kelompok pembelajaran terprogram dalam latihan emphati.

## 2. Efektivitas Teknik *Interpersonal Process Recall (IPR)*

Menurut penilaian dosen, teknik IPR menunjukkan efektivitas lebih baik dari pada teknik DE dalam latihan KDKI *attending*, sementara dalam latihan KDKI *responding* efektivitasnya sama dengan DE. Menurut penilaian mahasiswa, teknik IPR memiliki efektivitas yang sama dengan teknik *microcounseling* dalam latihan KDKI *attending*, dan *responding*. Sementara dalam latihan KDKI *personalizing*, IPR lebih efektif daripada *microcounseling*. Dalam latihan KDKI *initiating* teknik IPR menunjukkan efektivitas yang sama baik dengan *microcounseling* maupun DE. Penilaian konseli bertolakbelakang dengan penilaian dosen dan mahasiswa, teknik IPR menunjukkan keunggulannya dibanding teknik *microcounseling* dan DE pada latihan KDKI *responding* dan *personalizing*.

Hasil penelitian tersebut di atas, tidak dapat memberikan gambaran yang meyakinkan tentang efektivitas teknik IPR dibandingkan dengan teknik *microcounseling* maupun DE, karena dalam beberapa uji perbedaan menunjukkan efektivitas teknik IPR yang tidak konsisten di antara penilaian yang diberikan



oleh dosen, mahasiswa dan konseli. Kebanyakan hasil uji perbedaan memperlihatkan efektivitas teknik IPR sama dengan *microcounseling*.

*Interpersonal Process Recall* (IPR) menggunakan wawancara konseling yang direkam dengan video, kemudian diikuti oleh sesi *recall* oleh konseli dan dosen. Kagan, Krathwohl dan Farquhar (McCrary, 2008) membandingkan tiga metode pelatihan : (1) IPR yang menggunakan rekaman video, (2) IPR yang menggunakan rekaman audio, sesi *recall* oleh klien-interrogator dilakukan terhadap rekaman suara sesi konseling, dan (3) "supervisi konvensional" yaitu *trainee* mereviu kaset rekaman suara sesi konseling mereka dan kemudian disupervisi. Hasil studinya mengindikasikan bahwa tiga kondisi tersebut tidak menghasilkan perbedaan dalam hal peringkat keefektifan konselor.

Beberapa revisi terhadap teknik IPR telah menghasilkan hasil serupa. Misalnya, Kingdon menemukan bahwa IPR (termasuk didalamnya konseli, konselor sebagai *mutual recall*) tidak lebih efektif dari "*supervisi tradisional*" dalam empati konselor, kepuasan konseli, dan penilaian yang diberikan *supervisor* terhadap penampilan konselor (Russel, Crimmings, Lent : 1984).

Penelitian lain terkait strategi pelatihan IPR dilakukan oleh Spivack (Russel *et al*, 1984: 651) yang meneliti efek dari program IPR dengan menggunakan simulasi afektif, presentasi didaktis, *recall* dari konselor, dan *mutual recall*. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa IPR dengan empat jenis *recall* tidak lebih efektif daripada "*pra-praktikum tradisional*" yang melibatkan kuliah, diskusi, dan demonstrasi sebagai indikator-indikator proses konseling.

### 3. Efektivitas Teknik *Didactic Experiential*

Menurut penilaian dosen teknik DE lebih efektif daripada teknik *microcounseling* dan IPR dalam latihan KDKI *personalizing*, serta lebih efektif daripada teknik IPR dalam latihan KDKI *initiating*. Sementara menurut penilaian mahasiswa, teknik DE lebih efektif daripada teknik *microcounseling* dan IPR dalam latihan KDKI *attending*, serta lebih efektif daripada *microcounseling* dalam

latihan KDKI *personalizing*. Menurut penilaian konseli tidak diperoleh informasi kelebihan efektivitas teknik DE daripada teknik *microcounseling* dan IPR.

Penelitian terdahulu tentang teknik DE, lebih banyak dilakukan dengan membandingkan atau mengeksperimenkan variasi dalam teknik DE itu sendiri tanpa membandingkan dengan teknik yang lainnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Cormier, Hackney, dan Segrist pada tahun 1978 yang meneliti persoalan dalam pelatihan *didactic experiential* dengan cara menempatkan mahasiswa pada salah satu dari tiga kondisi berikut : (1) kelompok eksperensial (T gorups), (2) didaktis (keterampilan *behavioral*) dan (3) kelompok kontrol diskusi. Setelah mengikuti 11 minggu pelatihan, hasilnya mengindikasikan bahwa para konselor dalam kelompok kontrol diskusi dan kelompok didaktis lebih dipercaya oleh konselinya daripada konselor dalam kelompok eksperensial. Goldfar pada tahun 1978 membandingkan *supervisi didaktis versus eksperensial* dengan cara memeriksa lima strategi yang berbeda yaitu, (1) didaktis tinggi-eksperensial tinggi, (2) didaktis tinggi-eksperensial rendah, (3) didaktis rendah-eksperensial tinggi, (4) didaktis rendah-eksperensial rendah, dan (5) kontrol. Melalui penelitian terhadap mahasiswa diperoleh hasil yang secara umum mendukung pada keunggulan kelompok 1, 2 dan 3 daripada kelompok 4 dan 5.

## **E. Kesimpulan**

*Pertama*, untuk memperoleh informasi tentang efektivitas teknik latihan KDKI memerlukan kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan. Penilaian yang diberikan oleh dosen memberikan informasi yang konsisten tentang efektivitas teknik *microcounseling* dalam latihan KDKI. Teknik *microcounseling* menunjukkan lebih efektif daripada teknik IPR dan DE pada latihan keterampilan *attending*, *responding*, dan *initiating*. Penilaian mahasiswa dan konseli hanya memperlihatkan bahwa, teknik *microcounseling* lebih efektif dari teknik DE dalam keterampilan *responding*.

*Kedua*, berdasarkan penilaian dosen, teknik IPR lebih efektif daripada teknik DE pada latihan keterampilan *attending*. Pada latihan keterampilan

*responding* efektivitas teknik IPR sama dengan teknik DE, keduanya lebih kecil daripada teknik *microcounseling*. Pada latihan keterampilan *personalizing* dan *initiating*, efektivitas teknik IPR lebih kecil daripada teknik *microcounseling* dan DE. Menurut penilaian mahasiswa dan konseli, teknik IPR lebih efektif daripada *microcounseling* pada latihan keterampilan *personalizing*.

*Ketiga*, berdasarkan penilaian dosen, teknik DE lebih efektif daripada teknik *microcounseling* dan IPR pada latihan keterampilan *personalizing*, serta lebih efektif dari teknik IPR pada latihan keterampilan *initiating*. Menurut penilaian mahasiswa teknik DE menunjukkan lebih efektif daripada teknik *microcounseling* dan IPR pada latihan keterampilan *attending*, dan lebih efektif daripada teknik *microcounseling* pada latihan keterampilan *personalizing*. Menurut konseli, teknik DE lebih efektif daripada teknik *microcounseling* pada latihan keterampilan *personalizing*.

*Keempat*, memperhatikan teknik *microcounseling* yang menunjukkan efektivitas yang lebih konsisten dibandingkan teknik IPR dan DE, memberikan gambaran bahwa teknik *modeling* yang menjadi salah satu tahap kegiatan dalam teknik *microcounseling* memberikan kekuatan tersendiri dalam melatih KDKI.

*Kelima*, Penggunaan teknik yang sama dengan dosen yang berbeda memberikan informasi tentang efektivitas yang berbeda. Menurut penilaian dosen dan mahasiswa penggunaan teknik *microcounseling* dan DE pada latihan keterampilan yang sama, dan dalam kelompok yang berbeda menunjukkan efektivitas yang tidak sama. Penggunaan IPR dalam kelompok yang berbeda menunjukkan hasil yang sama.

*Keenam*, teknik IPR menunjukkan lebih efektif daripada teknik *microcounseling* dan DE dalam penguasaan konsep *attending*, *responding*, dan *initiating*. Sementara dalam penguasaan konsep *personalizing*, baik teknik *microcounseling*, IPR maupun DE menunjukkan efektivitas yang sama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Blocher, Donald. H. (1987). *The Professional Counselor*. New York : Macmillan Publishing Company.
- Brammer, Lawrence. M. (1979). *The Helping Relationship : Process and Skills (Second Edition)*. New Jersey, USA : Prentice-Hall.
- Brown, Steven. D & Lent, Robert. W. (1984). *Handbook of Counseling Psychology*. Canada : John Wiley and Sons Inc.
- Carkhuff, Robert. R & Anthony, William. A. (1979). *The Skills of Helping*. Massachusetts, USA : Human Resource Development Inc.
- Carkhuff, Robert. R & Pierce, Richard. M. (1977). *The Art of Helping : Trainer's Guide*. Massachusetts, USA : Human Resource Development Inc.
- Carkhuff, Robert. R. (1983). *The Art of Helping : Fifth Edition*. Massachusetts, USA : Human Resource Development Inc.
- Cavanagh, Michael. E. (1982). *The Counseling Experience : A Theoretical and Practical Approach*. Belmont, California : Wadsworth Inc.
- Cohen, Louis & Manion, Lawrence. (1994). *Research Methods In Education (Forth Edition)*. London : Routledge.
- Hackney, Harold. L & Cormier, Sherry. (2009). *The Professional Counselor : A Process guide to helping (sixth edition)*. New Jersey : Pearson Education Inc.
- McLeod, John. (2006). *Pengantar Konseling : Teori dan Studi Kasus (Edisi Ketiga)*. Jakarta : Kencana.
- Nugent, Frank. A. (1990). *An Introduction to the Profession of Counseling*. Columbus, Ohio : Merrill Publishing Company.
- Okun, Barbara. F. (1987). *Effective Helping Interviewing and Counseling Techniques : Third Edition*. Monterey, California : Brooks/Cole Publishing Company.

# **REDESAIN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ( TELAAH TERHADAP MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN )**

**Syukri Fathudin Achmad Widodo**  
**Staf Pengajar FT UNY**  
**Email : [syukri@uny.ac.id](mailto:syukri@uny.ac.id) / CP : 08122898408**

## **ABSTRAK**

*Matakuliah Pengembangan Kepribadian ( MPK) di perguruan tinggi umum ( PTU) adalah matakuliah wajib diikuti oleh semua mahasiswa baik program diploma, maupun sarjana. Mata kuliah ini terdiri Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan. Urgensi MPK relevan dalam pengembangan karakter kedewasaan peserta didik, dan mestinya hasil evaluasi pembelajaran mata kuliah ini bukan satu-satunya indicator, tetapi minimal memberikan input guna tercapainya kesuksesan seorang peserta didik dalam studi dan hidup dimasyarakat,*

*Tantangan terbesar MPK adalah bagaimana menyajikan materi secara dinamis, menarik sehingga peserta didik mampu meninternalisasikan dan meimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.*

*Mata kuliah Pendidikan Agama Islam ( PAI) memiliki visi utama membangun tata nilai kehidupan pemeluknya untuk menjadi manusia yang bertaqwa, berpikir rasional dan dinamis sehingga mampu menjadi insan yang berakarakter ,cerdas, terampil dan berakhlak mulia.*

*Dalam makalah ini akan disajikan 1) rekonstruksi pembelajaran pendidikan agama Islam, 2) pengembangan kompetensi dosen pendidikan agama islam.*

## **Pendahuluan**

Pendidikan adalah usaha sadar yang terus menerus untuk mewujudkan manusia yang dewasa dalam berpikir dan berperilaku. Dalam bait lagu kebangsaan kita yang diciptakan WR.Supratman berbunyi “ bangunlah jiwanya – bangunlah badannya”. Ini menjadi spirit untuk membangun manusia Indonesia yang sehat lahir dan batin.

Pendidikan Agama Islam ( PAI) adalah rumpun mata kuliah pengembangan kepribadian ( MPK) dalam struktur mata kuliah umum (MKU).

Dilihat dari posisinya merupakan mata kuliah yang membekali peserta didik berupa kemampuan dasar tentang pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai dasar kemanusiaan, sebagai makhluk Allah, sebagai pribadi, anggota keluarga, masyarakat, warga negara dan sebagai bagian dari alam.

Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) berguna untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas ikut serta mewujudkan Indonesia yang utuh aman, sejahtera yang diridhoi Allah SWT. Apabila dilihat dari nilai gunanya, nampaknya sungguh sangat indah dan idealis, tetapi jika dilihat dari proses pelaksanaannya, menimbulkan pertanyaan besar? , Mungkinkah merubah karakter kepribadian, watak dan akhlak seseorang hanya dalam waktu satu semester ? *Wallahu’alam bis shoab.*

Sedangkan visi dan misinya sebagai berikut

**Visi :** Menjadikan ajaran Islam sebagai sumber nilai, dan pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam mengembangkan profesi dan kepribadian Islami

**Misi :**

Terbinanya mahasiswa yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlak mulia, serta menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.

Begitu strategisnya mata kuliah ini maka proses pembelajarannya secara formal tidak hanya tanggung jawab dosen PAI semata yang hanya ditempuh pada semester awal serta berbobot hanya 3 sks, melainkan dosen lain dapat pula mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ( religius) dengan mata kuliah yang diampunya. Sungguh pekerjaan yang mulia dan bernilai ibadah tentunya.

## **Rekonstruksi pembelajaran pendidikan agama Islam**

Hasil evaluasi pembelajaran matakuliah pendidikan agama Islam pada akhir semester gasal 2011/2012 sebagai berikut:

1. Hasil belajar mahasiswa secara umum cukup baik. Salah satu aspek yang dapat diamati budi pekerti yang baik (akhlakul karimah)
2. Mahasiswa tidak mengerjakan tugas perkuliahan di rumah dan mereka tidak mempersiapkan diri sebelum mengikuti perkuliahan. Hal ini menyebabkan banyak mahasiswa merasa proses perkuliahan terlalu cepat
3. Tugas kelompok masih belum optimal. Tugas kebanyakan bukan kompilasi dari berbagai sumber dan masih dijumpai copy paste. Tugas kelompok biasanya hanya dikerjakan oleh sebagian anggota kelompok.
4. Media yang digunakan selama proses pembelajaran kadang terbatas hanya dengan power point atau OHP.

Analisis informasi tahap evaluasi ini menghasilkan simpulan sebagai berikut:

1. Diktat atau kumpulan materi perkuliahan yang disiapkan dosen penting sekali artinya bagi proses perkuliahan. Fotokopi slide power point belum mencukupi bagi mahasiswa.
2. Diktat tersedia, strategi perkuliahan dapat diubah misalnya dengan diskusi kelompok ataupun penugasan yang lain
3. Tingkat keagamaan (religious) yang beragam menjadikan saya melakukan pre test diawal kuliah
4. Strategi dan media perkuliahan perlu divariasikan agar lebih menarik dan memotivasi mahasiswa.
5. Mahasiswa perlu dikondisikan untuk aktif dalam perkuliahan dan juga belajar di luar jam kuliah, khususnya mengikuti tutorial Pend.Agama Islam
6. Motivasi mahasiswa rendah mungkin karena beragamnya tingkat keagamaan (religious)
7. Cara evaluasi yang dilakukan hanya berdasarkan nilai kehadiran kuliah (partisipasi kuliah), tugas, ujian midsemester, tutorial PAI dan ujian akhir semester. Cara evaluasi seperti ini menyebabkan nilai akhir mahasiswa kurang memuaskan.

## Tahap rekonstruksi

### Langkah 1: menentukan standar kompetensi

Evaluasi menunjukkan bahwa standar kompetensi matakuliah tidak tercapai secara optimal. Pencapaian kompetensi pada tingkat rendah yaitu mengingat. Kemampuan yang lebih tinggi yaitu penerapan, analisis, dan sintesis perlu dicapai sehingga menunjukkan perkembangan mahasiswa secara utuh.

Berdasarkan hasil evaluasi standar kompetensi ditentukan dan dirumuskan kembali menjadi:

Mahasiswa memahami konsep Pend.Agama Islam ( PAI) serta segala aspek dan aktivitas yang terkait PAI

### Langkah 2: menentukan kompetensi dasar

Selanjutnya standar kompetensi dijabarkan dalam tujuan yang spesifik yaitu 12 kompetensi dasar yang harus dicapai.

Tabel 1. Kompetensi dasar matakuliah pendidikan Agama Islam

No.	Kompetensi Dasar
1.	Mendiskripsikan manusia dan agama
2.	Mendiskripsikan dan memahami addinul Islam
3.	Memahani dan mengamalkan sumber ajaran Islam
4.	Memahami dan mengamalkan kerangka dasar ajaran Islam
5.	Memahami dan menerapkan akhlaq, etika dan moral
6.	Menjelaskan politik Islam dan masyarakat madani
7.	Mendiskripsikan pendidikan Islam
8.	Memahami dan menerapkan kerukunan antarumat beragama
9.	Menjelaskan konsep gender dalam Islam
10.	Memahami pernikahan dalam Islam
11.	Menjelaskan fundamentalisme dalam Islam
12.	Menjelaskan kebudayaan Islam



### **Langkah 3: menyusun materi perkuliahan**

Berdasarkan tujuan khusus yang telah dirumuskan disusun materi perkuliahan. Materi perkuliahan ini dapat menggunakan diktat dosen PAI UNY, buku teks PAI Depag, jurnal penelitian, kumpulan artikel. Materi perkuliahan selama ini disampaikan dalam bentuk *slide power point* sehingga mahasiswa merasa kesulitan memahami materi secara tuntas. Rekonstruksi materi yang dilakukan salah satunya yaitu:

1. Pembuatan modul materi perkuliahan untuk memberi kesempatan mahasiswa maju sesuai dengan kecepatannya masing-masing.
2. Materi perkuliahan diambilkan dari hal-hal yang *up to date* dan *problem based* berkaitan dengan obyek perkuliahan, misalnya nikah sirri, terorisme, cuci otak dll.
3. Materi perkuliahan ada yang perlu dikemas dalam bentuk animasi.
4. Materi tertentu perlu realia dan contoh konkret perkembangan
5. Pelaksanaan ujian tengah semester yang pada awalnya dilaksanakan pada pertemuan ke-10 diubah ke-9.

### **Langkah 4: Strategi Instruksional**

Berdasarkan hasil evaluasi kemudian dilakukan rekonstruksi strategi instruksional yaitu:

1. Mulai awal semester sudah disepakati kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa.
2. Menekankan dan melatih belajar aktif kepada mahasiswa di dalam kelas.
3. Memberikan tugas kepada mahasiswa untuk dikerjakan di luar jam kuliah dan memonitor apakah mahasiswa mengerjakan atau tidak. salah satu cara untuk memonitor siapa mahasiswa yang aktif yaitu dengan presentasi tugas dan dilakukan penilaian antar teman (*peer assesement*)
4. Menggunakan strategi pembelajaran bervariasi yaitu ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab.
5. Metode ceramah masih digunakan untuk proses pemberian motivasi oleh dosen kepada mahasiswa, menyimpulkan konsep-konsep penting yang dipelajari sehingga memungkinkan mahasiswa melihat lebih jelas hubungan antara materi satu dengan yang lain.
6. Metode diskusi diterapkan terutama dengan strategi *group to group*. Dua atau tiga kelompok memperoleh materi diskusi sama. Strategi *Group to group* atau yang dalam bahasa Indonesia bermakna pertukaran kelompok dengan kelompok merupakan salah

satu strategi *active learning* dimana tugas-tugas yang berbeda diberikan pada kelompok mahasiswa yang berbeda. Setiap kelompok mengajarkan kepada mahasiswa lain yang dia pelajari. Setiap kelompok ditugaskan untuk mendiskusikan materi yang diberikan dan berkewajiban mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompoknya.

7. Metode tanya jawab diterapkan agar kelas menjadi lebih hidup dan dan lebih aktif, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya sehingga dosen mengetahui hal-hal yang belum dimengerti oleh mahasiswa, serta komunikasi dan interaksi yang terjadi tidak hanya satu arah.
8. Penggunaan berbagai media sesuai dengan tujuan dan materi perkuliahan.

### **Langkah 5: Penilaian hasil belajar**

Rekonstruksi penilaian hasil belajar yaitu:

1. Soal-soal tes dan ujian disesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan akan dicapai mahasiswa.
2. Menguji kompetensi tingkat yang lebih tinggi yaitu penerapan, analisis, dan sintesis.
3. Komposisi persentase penilaian diubah yaitu keaktifan (25%); tugas (20%); ujian tengah semester (25%) dan ujian akhir semester (30%).
4. Nilai keaktifan diperoleh terutama didasarkan pada *academic record* selama proses perkuliahan berlangsung.
5. Mahasiswa tidak diizinkan mengikuti ujian akhir apabila kehadiran kurang dari 75%.

### **Pengembangan materi PAI dan pengembangan kompetensi dosen**

Pengembangan Pendidikan Agama Islam ini nampaknya menuntut para pengajarnya untuk mampu mengintegrasikan nilai-nilai *ilahiyyah – duniyaiyyah* dalam proses pendidikan dan pengajarannya dalam satu semester itu.

Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) berguna untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepa Allah SWT, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas ikut serta mewujudkan Indonesia yang utuh aman, sejahtera yang diridhoi Allah SWT.

Tujuan pendidikan agama lebih merupakan suatu upaya untuk membangkitkan intuisi agama dan kesiapan rohani dalam mencapai pengalaman transendental. Dengan demikian tujuan

utamanya bukanlah sekedar mengalihkan pengetahuan dan keterampilan (sebagai isi pendidikan), melainkan lebih merupakan suatu ikhtiar untuk menggugah fitroh insaniyah (*to stir up certain innate powers*), sehingga peserta didik bisa menjadi penganut atau pemeluk agama yang taat dan baik (muslim paripurna). Sedangkan pendidikan pada umumnya, bertujuan lebih menitikberatkan pada pemberian pengetahuan dan ketrampilan khusus dan secara ketat berhubungan dengan pertumbuhan serta pemilahan areal kerja yang diperlukan dalam masyarakat. Dalam hal ini hubungan interaksi lebih bersifat kognitif-psikomotorik, dan kurang banyak menyentuh ke alaman rohani serta sifat-sifat watak kepribadian manusia.

Lebih jauh pendidikan agama Islam bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari aspek-aspek kehidupan masyarakat luas yang berlangsung dalam konteks keselarasan maupun keseimbangan dengan kegiatan-kegiatan, baik perorangan maupun kelembagaannya dan dalam posisi yang saling memperkuat atau memperkuat antara yang satu dengan yang lain. Kampus hanya merupakan salah satu kontributor dalam rangka membangun manusia yang dewasa dalam berpikir dan berperilaku.

Di luar kampus banyak pihak yang tidak kalah penting peranannya, yang ikut memberikan kontribusi pelaksanaan pendidikan agama (seperti rumah/keluarga, kawan bermain dan suasana kehidupan beragama di masyarakat/lingkungannya). Dengan demikian keterlibatan pranata sosial kemasyarakatan yang lain ikut memberikan andil bagi keberhasilannya baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pendidikan agama itu sendiri.

Selain itu dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi, juga diperlukan suasana interaksi antara dosen dan peserta didik yang sifatnya lebih mendalam lahir dan batin. Figur dosen agama Islam tidak sekedar sebagai penyampai materi kuliah tetapi lebih dari itu ia adalah sumber inspirasi “spiritual” dan sekaligus sebagai pembimbing sehingga terjalin hubungan pribadi antara dosen dan peserta didik yang cukup dekat dan mampu melahirkan terpaduan bimbingan rohani dan akhlak dengan materi pembelajarannya.

Karena itu fungsi dan peran dosen agama tidak cukup hanya bermodal “profesional” sesuai undang-undang guru dan dosen mencakup, kompetensi kepribadian, pedagogik, social dan professional semata-mata namun perlu didukung oleh kekuatan “moral”.

Demikian pula tentang mutu pendidikan agama Islam dan pencapaian prestasi peserta didiknya tidak dapat begitu saja diukur lewat tabel-tabel statistik. Mutu dan keberhasilan pendidikan agama Islam harus dapat diukur dengan totalitas peserta didik sebagai pribadi.

Perilaku dan kesalehan yang ditampilkan dalam keseharian lebih penting dibandingkan dengan pencapaian nilai A atau 9. dalam hal ini, mutu maupun pencapaian pendidikan agama perlu diorientasikan kepada ( Malik Fadjar, 1998) :

- a. Tercapainya sasaran kualitas pribadi, baik sebagai muslim maupun sebagai manusia Indonesia yang ciri-cirinya dijadikan tujuan pendidikan nasional.
- b. Integrasi pendidikan agama Islam dengan keseluruhan proses maupun institusi pendidikan yang lain
- c. Tercapainya internalisasi nilai-nilai dan norma-norma keagamaan yang fungsional secara moral untuk mengembangkan keseluruhan sistem sosial budaya.
- d. Penyadaran pribadi akan tuntutan hari depannya dan transformasi sosial budaya yang terus berlangsung.
- e. Pembentukan wilayah *ijtihaiyah* (intelektual) disamping penyerapan ajaran secara aktif.

Pelaksanaan pendidikan agama Islam cenderung lebih banyak digarap dari sisi pengajaran atau didaktik metodiknya. Dosen hanya membicarakan persoalan “proses belajar mengajar” sehingga tenggelam dalam persoalan teknis-mekanis. Sementara persoalan yang lebih mendasar yang berhubungan dengan aspek “paedagoginya” kurang banyak disentuh.

Padahal fungsi utama pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) adalah memberikan landasan yang mampu menggugah kesadaran dan mendorong peserta didik melakukan perbuatan yang mendukung pembentukan pribadi muslim yang kuat (pemeluk agama yang taat), landasan itu meliputi:

- a. Landasan motivasional, yaitu pemupukan sifat positif peserta didik untuk menerima ajaran agamanya dan sekaligus bertanggung jawab terhadap pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Landasan etik, yaitu tertanamnya norma-norma keagamaan peserta didik sehingga perbuatannya selalu diacu oleh isi, jiwa dan semangat akhlakul kharimah ( budi pekerti yang baik)
- c. Landasan moral, yaitu tersusunnya tata nilai (*value sistem*) dalam diri peserta didik yang bersumber dari ajaran agamanya sehingga memiliki daya tahan dalam menghadapi setiap tantangan dan perubahan.
- d. Dalam memberikan landasan itu tidak cukup hanya dilihat dari persoalan pengajaran atau didaktik metodiknya melainkan harus masuk ke dalam persoalan paedagogiknya.

- e. Berdasarkan acuan paedagogisnya, penanaman motivasi, etik dan moral itu pada dasarnya adalah menanamkan suatu perangkat nilai, yaitu iman, amal dan taqwa. Melalui materi mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen agama mempunyai tugas pokok untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat disentuh dalam diri peserta didik melalui materi pengajaran yang disajikannya. Dengan demikian dosen pendidikan agama harus mendalami nilai-nilai yang merupakan landasan motivasional, etis, moral dari materi perkuliahannya serta memahami pula konfigurasi nilai-nilai tersebut. Dengan menguasai materi pembelajaran secara mendalam dosen agama dapat meningkatkan kegiatan mengajarnya menjadi kegiatan “mendidik”. Hanya dengan melalui langkah-langkah paedagogis kegiatan pendidikan agama lewat sistem formal (kampus) akan mampu secara sadar dan rencana berbuat sesuatu menuju ke “kesadaran beragama” bagi peserta didiknya.
- f. Kesenambungan pendidikan agama tidak terletak pada banyak ataupun tingginya materi yang disajikan, apalagi alokasinya juga terbatas ( hanya satu semester). Dengan demikian masalah “metodologi” yaitu masalah penguasaan teori dan praktek tentang cara pendekatan yang tepat dan cermat guna mencapai tujuan adalah merupakan faktor yang sangat menentukan. Pembelajaran pendidikan agama merupakan suatu mata kuliah yang bersifat khas, maka diperlukan adanya metodik khusus.

Metodik khusus ini dibangun melalui pemanduan dari berbagai unit metode pengajaran yang ada, yang paling ideal adalah “*metode integratif*” yakni memasukkan metode suatu mata kuliah ke dalam mata kuliah yang lain, hanya saja tidak mudah diterapkan.

## **Penutup**

Redesain pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah sebuah usaha (ikhtiar) yang secara akademik dituntut sebuah keseriusan dan keikhlasan bagi mereka yang terpenggil untuk membangun manusia yang paripurna ( insan kamil). Dosen memberikan wahana berpikir kepada mahasiswa secara dewasa, bijak dan keteladanan. Mahasiswa merespon dengan sadar dan sabar sehingga keduanya saling berinteraksi, komunikasi dalam suasana akademik. Juga masyarakat memberi apresiasi dukungan moral bagi kelangsungan suasana kehidupan yang religius dan bermartabat.

## Daftar Pustaka

Ajat Sudrajat dkk (2008), *Din Al Islam*, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, Yogyakarta, UNY press

A.Malik Fadjar (1998). *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, Jakarta, LP3NI.

Achmadi (2000), *Islam Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, Aditya Media

Blanchard, Allan (2001). *Contextual teaching and learning*. @ B.E.S.T.

Djaelan Husnan (2011), *Standarisasi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, paper pelatihan dosen PAI di PTU, 14-16 Nopember 2011, Dikti Kemendikbud RI

Mulyasa. (2003). *Kurikulum berbasis kompetensi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Syukri Fathudin Achmad Widodo (2004). *Diktat Pendidikan Agama Islam*, FT, UNY

----- (2005) *Peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam (PAI)*

*melalui kurikulum berbasis kompetensi*, Jurnal Humanika- UPT MKU UNY

----- (2006), *Menerapkan metode cooperative learning dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Humanika – UPT MKU UNY

----- (2010) *Pengembangan pendidikan karakter melalui reposisi pembelajaran pendidikan agama Islam*, *proceeding seminar nasional dies natalis UNY ke-46*

# **Sistem Pendanaan Pendidikan di Indonesia<sup>1</sup>**

Oleh: Abbas Ghozali, Ph.D.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Makalah ini disampaikan dalam seminar nasional yang bertema “Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan” yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Januari 2012.

<sup>2</sup> Peneliti dan konsultan ekonomi dan keuangan pendidikan dan Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

## 1. Pendahuluan

Sistem pendanaan pendidikan di Indonesia yang dimaksud di sini mencakup struktur dan karakteristik biaya pendidikan yang mencerminkan kebutuhan sumber daya pendidikan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, anggaran pendidikan dan cara pengalokasian, pendistribusian, dan penggunaan dana pendidikan.

Karenanya, dalam makalah ini akan dibahas terlebih dahulu biaya pendidikan yang mencakup konsep, peraturan perundang-undangan, dan faktanya di lapangan. Dengan demikian diharapkan dapat dipahami struktur, karakteristik, dan fakta biaya pendidikan. Selanjutnya, akan dibahas pendanaan pendidikan menurut peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penganggaran, pengalokasian, pendistribusian dan penggunaan dana pendidikan. Akan dianalisis bagaimana peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penganggaran, pengalokasian, pendistribusian, dan penggunaan dana pendidikan memenuhi biaya pendidikan. Akhirnya akan disampaikan alternatif kebijakan pendanaan pendidikan yang diharapkan lebih optimal dan efisien.

## 2. Biaya Pendidikan

**Biaya pendidikan** merupakan nilai uang dari sumber daya pendidikan yang dibutuhkan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. (Ghozali dkk, 2004). Karenanya, untuk menghitung biaya pendidikan terlebih dahulu perlu diidentifikasi kebutuhan sumber daya pendidikan (termasuk kualifikasi atau spesifikasi dan jumlahnya) untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.

Kebutuhan sumber daya pendidikan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan terjadi di pemerintahan, lembaga penyelenggara pendidikan (satuan pendidikan), dan rumah tangga (orang tua/wali peserta didik). Oleh karena itu, implikasi biaya pendidikan ini terjadi di pemerintahan, lembaga penyelenggara pendidikan dan peserta didik. Sesuai dengan hal tersebut Pasal 3 PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi: a) biaya pengelolaan pendidikan, b) biaya satuan pendidikan, dan c) biaya pribadi peserta didik. Rincian lebih lanjut dijabarkan dalam pasal-pasal berikutnya. Gambar 1 menyajikan struktur biaya pendidikan tersebut.

### 2.1 Biaya Pengelolaan Pendidikan

Biaya pengelolaan pendidikan yang dimaksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pengelolaan pendidikan baik oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah maupun oleh masyarakat atau swasta. (Ghozali dkk, 2004). Biaya pengelolaan pendidikan tersebut meliputi biaya operasi personalia untuk kesejahteraan pegawai, biaya operasi non personalia, biaya investasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan pegawai, dan biaya investasi sarana dan prasana. Dalam makalah ini biaya pengelolaan pendidikan tidak perlu diuraikan lebih lanjut.

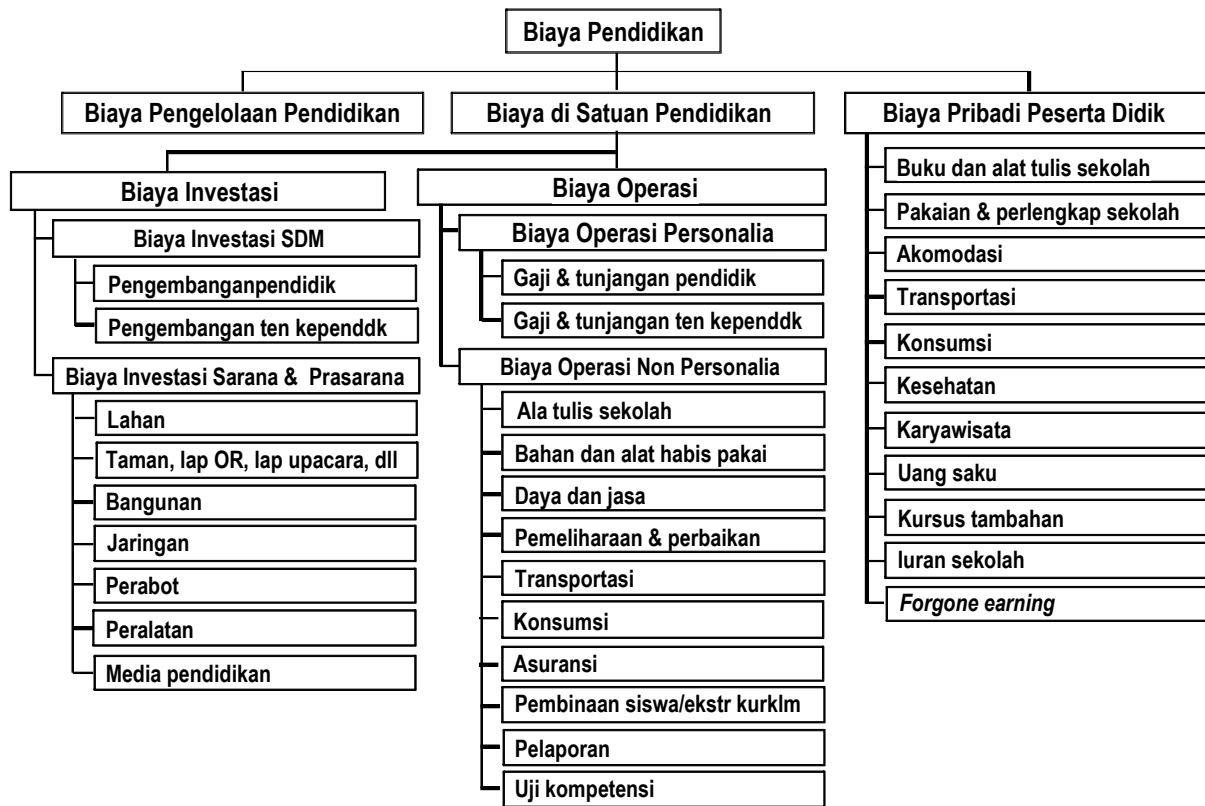
Hasil studi yang dilakukan Ghozali dkk tentang biaya pengelolaan pendidikan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK disajikan dalam Tabel 1. Biaya pengelolaan pendidikan per peserta didik per tahun pada tahun 2011 adalah Rp759 ribu untuk SD/MI, Rp868 ribu untuk SMP/MTs, Rp1,156 juta untuk SMA/MA, dan Rp1,645 juta untuk SMK.

### 2.2 Biaya di Satuan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan membutuhkan sumber daya pendidikan. **Sumber daya pendidikan** adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan meliputi **pendidik dan tenaga kependidikan** dan **sarana dan prasarana pendidikan**. (UU Sisdiknas Pasal 1 ayat 23). Penggunaan sumber daya pendidikan tersebut berimplikasi pada biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu dapat dihitung per satuan



pendidikan per tahun dan per peserta didik per tahun, keduanya dapat disebut **biaya satuan pendidikan** .



**Gambar 1 Struktur Biaya Pendidikan**

**Tabel 1 Biaya Satuan Pendidikan Keseluruhan Faktual Tahun 2011**

Komponen Satuan Biaya Pendidikan	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
<b>Alternatif 1: Biaya pribadi peserta didik mencakup semua komponen biaya pribadi peserta didik</b>								
Biaya Pengelolaan Pendidikan	759.313	5,42	868.033	4,74	1.156.227	5,15	1.644.603	6,53
Biaya di Satuan Pendidikan	3.216.725	22,97	4.781.944	26,09	6.233.267	27,74	8.174.692	32,48
Biaya Pribadi Peserta Didik	10.297.316	73,53	12.991.150	70,88	16.408.058	73,03	16.865.371	67,01
<b>Biaya Satuan Pendidikan Keseluruhan</b>	<b>14.004.142</b>	<b>100,00</b>	<b>18.328.774</b>	<b>100,00</b>	<b>22.467.028</b>	<b>100,00</b>	<b>25.169.491</b>	<b>100,00</b>
<b>Alternatif 2: Biaya pribadi peserta didik tidak mencakup biaya-biaya akomodasi, konsumsi, kesehatan, dan kursus</b>								
Biaya Pengelolaan Pendidikan	759.313	9,34	868.033	7,27	1.156.227	7,28	1.644.603	9,15
Biaya di Satuan Pendidikan	3.216.725	39,56	4.781.944	40,07	6.233.267	39,24	8.174.692	45,48
Biaya Pribadi Peserta Didik	4.424.723	54,41	6.883.860	57,69	9.538.003	60,04	9.670.883	53,8
<b>Biaya Satuan Pendidikan Keseluruhan</b>	<b>8.131.549</b>	<b>100,00</b>	<b>11.933.290</b>	<b>100,00</b>	<b>15.885.168</b>	<b>100,00</b>	<b>17.975.004</b>	<b>100,00</b>
<b>Alternatif 3: Biaya pribadi peserta didik tidak mencakup biaya akomodasi, konsumsi, kesehatan, kursus dan forgone earning</b>								
Biaya Pengelolaan Pendidikan	759.313	12,18	868.033	10,04	1.156.227	9,92	1.644.603	11,97
Biaya di Satuan Pendidikan	3.216.725	51,61	4.781.944	55,3	6.233.267	53,5	8.174.692	59,5
Biaya Pribadi Peserta Didik	2.526.441	40,53	3.598.107	41,61	5.303.109	45,52	5.435.989	39,56
<b>Biaya Satuan Pendidikan Keseluruhan</b>	<b>6.233.267</b>	<b>100,00</b>	<b>8.647.536</b>	<b>100,00</b>	<b>11.650.274</b>	<b>100,00</b>	<b>13.740.110</b>	<b>100,00</b>

**Catatan:** Hasil ini merupakan konversi ke dalam nilai 2011 dari hasil studi Abbas Ghazali, dkk tahun 2004 yang menggunakan data tahun 2003 dengan melakukan penyesuaian inflasi tahun 2004 s.d. 2010.

### 2.2.1 Biaya Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

**Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (UU Sisdiknas Pasal 1 ayat 6). Pada tulisan ini pendidik difokuskan pada guru. Guru berinteraksi langsung dengan warga belajar (peserta didik) dalam proses pembelajaran. Sedangkan, **tenaga kependidikan** adalah anggota yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, seperti kepala sekolah/madrasah, pustakawan, laboran, teknisi, tata usaha, bendahara, juru ketik, penjaga/petugas kebersihan, dll. (UU Sisdiknas Pasal 1 ayat 5).

Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berimplikasi pada biaya. Lembaga pendidikan harus memberikan kompensasi atas keahlian, pikiran, dan waktu yang mereka curahkan dalam proses pendidikan. Ada dua bentuk kompensasi yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu: 1) yang berfungsi untuk menjamin kesejahteraan seperti gaji, tunjangan, dll dan 2) yang berfungsi untuk mengembangkan kualitas, seperti pendidikan, pelatihan, lokakarya, seminar, dll.

Dua macam kompensasi yang diberikan lembaga pendidikan tersebut berimplikasi pada dua macam biaya, yaitu **biaya operasi pendidik dan tenaga kependidikan** dan **biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan**. Biaya operasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah biaya yang timbul sebagai akibat pemberian kompensasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sama dengan frekuensi satu kali atau lebih dalam satu tahun. Kompensasi yang berupa gaji, tunjangan, dll yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan merupakan biaya operasi pendidik dan tenaga kependidikan. Biaya operasi pendidik dan tenaga kependidikan ini disebut **biaya operasi pendidik dan tenaga kependidikan per satuan pendidikan per tahun** atau **biaya satuan operasi pendidik dan tenaga kependidikan per satuan pendidikan**. Apabila biaya operasi pendidik dan tenaga kependidikan ini dibagi dengan jumlah peserta didik maka hal ini disebut **biaya operasi pendidikan dan tenaga kependidikan per peserta didik per tahun** atau **biaya satuan operasi pendidik dan tenaga kependidikan per peserta didik**. (Ghozali dkk, 2004).

Biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah biaya yang timbul sebagai akibat pemberian kompensasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sama dengan frekuensi hanya satu kali untuk selamanya atau berulang tetapi untuk lebih dari satu tahun. Kompensasi yang berupa penyediaan dana untuk pendidikan, pelatihan, lokakarya, seminar, dll bagi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan. Biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah **biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan per satuan pendidikan**. Investasi pendidik dan tenaga kependidikan seperti pelatihan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sama dengan jenis pelatihan yang sama diadakan satu kali tetapi memberikan manfaat yang lebih dari satu tahun. Biaya investasi ini dapat dijadikan per tahun dengan membagi biaya investasi ini dengan lama tahun manfaat investasi itu dan disebut **biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan per satuan pendidikan per tahun** atau **biaya satuan investasi pendidik dan tenaga kependidikan per satuan pendidikan**. Apabila biaya investasi pendidikan dan tenaga kependidikan per tahun per satuan pendidikan ini dibagi dengan jumlah peserta didik maka biaya ini disebut **biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan per peserta didik belajar per tahun** atau disebut juga **biaya satuan investasi pendidikan dan tenaga kependidikan per peserta didik**. (Ghozali dkk, 2004).

### 2.2.2 Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

**Sarana pendidikan** adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah (Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan). Sarana

pendidikan meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan dan alat habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Pasal 42 PP Standar Nasional Pendidikan). **Prasarana pendidikan** adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi lembaga pendidikan (Permen Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan). Prasarana pendidikan meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (Pasal 42 PP Standar Nasional Pendidikan). Sebagian besar prasarana dan sarana pendidikan seperti lahan, bangunan, perabot, peralatan, media pendidikan, buku dan lain-lain memiliki umur pakai lebih dari satu tahun. Sebagian kecil sarana pendidikan seperti bahan habis pakai, alat habis pakai, daya dan jasa, dll memiliki umur pakai kurang dari satu tahun. Sarana dan prasarana pendidikan juga memerlukan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan satu kali atau lebih dalam satu tahun atau sekali untuk beberapa tahun.

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan beserta pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan berimplikasi pada biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang muncul sebagai akibat dari pengadaan sarana pendidikan yang umur pakainya satu tahun atau kurang serta pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana yang dilakukan satu tahun sekali atau lebih disebut **biaya operasi bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan**. Biaya operasi bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan ini adalah **biaya operasi bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan per satuan pendidikan per tahun** atau disebut juga **biaya satuan operasi bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan per satuan pendidikan**. Apabila biaya ini dibagi dengan jumlah peserta didik maka hal ini disebut **biaya operasi bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan per peserta didik per tahun** atau disebut juga **biaya satuan operasi bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan per peserta didik**. (Ghozali dkk, 2004).

Biaya pendidikan yang muncul sebagai akibat dari pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang umur pakainya lebih dari satu tahun disebut **biaya investasi sarana dan prasarana pendidikan**. Biaya investasi sarana dan prasarana ini adalah **biaya investasi sarana dan prasarana pendidikan per lembaga pendidikan**. Investasi sarana dan prasarana seperti perabot, peralatan, lahan, dan bangunan diadakan satu kali tetapi memberikan manfaat yang lebih dari satu tahun. Biaya investasi ini dapat dijadikan per tahun dengan membagi biaya investasi ini dengan lama tahun manfaat atau umur pakai dari sarana dan prasarana pendidikan itu dan disebut **biaya investasi sarana dan prasarana pendidikan per satuan pendidikan per tahun** atau disebut juga **biaya satuan investasi sarana dan prasarana pendidikan kependidikan per satuan pendidikan**. Apabila biaya investasi sarana dan prasarana pendidikan per tahun per satuan pendidikan ini dibagi dengan jumlah peserta didik maka biaya ini disebut **biaya investasi sarana dan prasarana pendidikan per peserta didik per tahun** atau disebut juga **biaya satuan investasi sarana dan prasarana pendidikan kependidikan per peserta didik**. (Ghozali dkk, 2004).

Dengan demikian, biaya pendidikan di satuan pendidikan dapat dibagi ke dalam empat komponen besar, yaitu: 1) biaya operasi pendidik dan tenaga kependidikan per satuan pendidikan, 2) biaya operasi bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan per satuan pendidikan, 3) biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan per satuan pendidikan, dan 4) biaya investasi sarana dan prasarana pendidikan per satuan pendidikan. Gabungan keempat komponen biaya tersebut disebut **biaya pendidikan per satuan**

**pendidikan.** Biaya ini adalah biaya pendidikan keseluruhan yang ditanggung oleh satuan pendidikan untuk menyediakan semua sumber daya pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan, baik yang pengadaannya berulang-ulang dalam satu tahun maupun yang pengadaannya satu kali untuk digunakan lebih dari satu tahun atau baik yang manfaat/usia pakainya kurang dari satu tahun maupun yang manfaat/usia pakainya lebih dari satu tahun.

Apabila biaya pendidikan per satuan pendidikan tersebut dihitung per tahun maka semua biaya pengadaan sumber daya pendidikan yang manfaat/umur pakainya lebih dari satu tahun tersebut dijadikan satu tahun dengan cara membagi biaya sumber daya pendidikan yang manfaat/umur pakainya lebih dari satu tahun tersebut dengan lama tahun manfaat/usia pakai sumber daya tersebut. Biaya ini disebut **biaya pendidikan per satuan pendidikan per tahun** atau disebut juga **biaya satuan pendidikan per satuan pendidikan**. Apabila biaya pendidikan per satuan pendidikan per tahun ini dibagi dengan jumlah peserta didik maka disebut **biaya pendidikan per satuan per tahun** atau disebut juga **biaya satuan pendidikan per peserta didik**.

Besarnya biaya satuan pendidikan di satuan pendidikan untuk nilai tahun 2011 juga dapat dilihat dalam Tabel 1. Biaya satuan pendidikan atau biaya pendidikan per peserta didik per tahun di SD/MI adalah Rp3,217 juta, di SMP/MTs adalah Rp4,781 juta, di SMA/MA adalah Rp6,233 juta, dan di SMK adalah Rp8,175 juta.

Rincian biaya satuan pendidikan di satuan pendidikan disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2 ini juga menyajikan perbandingan antara biaya satuan pendidikan faktual dan biaya satuan pendidikan perkiraan standar pelayanan minimal (SPM). Biaya satuan faktual di SD/MI baru mencapai 79 persen dari biaya satuan SPM di SD/MI, Biaya satuan faktual di SMP/MTs baru mencapai 77 persen dari biaya satuan SPM di SMP/MTs, biaya satuan faktual di SMA/MA baru mencapai 72 persen dari biaya satuan SPM di SMA/MA, dan biaya satuan faktual di SMK baru mencapai 67 persen dari biaya satuan SPM di SMK.

### **2.3 Biaya Pribadi Peserta Didik**

**Biaya pribadi peserta didik** adalah biaya yang ditanggung oleh peserta didik dalam menyediakan sumber daya pendidikan untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan tersebut. (Pasal 3 PP Pendanaan Pendidikan; Ghozali dkk, 2004).

Biaya pribadi pendidikan meliputi biaya-biaya untuk pengadaan/penggunaan buku dan alat tulis, buku-buku teks dan penunjang, transport pergi-pulang dari rumah ke sekolah, perlengkapan sekolah, pakaian seragam sekolah, bahan praktek, kursus tambahan, karya wisata, akomodasi, konsumsi, dan *forgone earning*. (Pasal 3 PP Pendanaan Pendidikan; Ghozali dkk, 2004). Biaya pribadi pendidikan dihitung dalam waktu satu siklus, yaitu periode waktu di mana peserta didik belajar dapat mencapai kompetensi pendidikan yang telah ditentukan.

Besarnya biaya satuan pribadi pendidikan peserta didik dapat dilihat dalam Tabel 1 dan rinciannya disajikan dalam Tabel 3. Biaya satuan pribadi pendidikan tersebut dibuat dalam tiga alternatif. Alternatif 1 mencakup semua komponen biaya satuan pribadi pendidikan; alternatif 2 tidak mencakup biaya-biaya akomodasi, konsumsi, kesehatan, dan kursus; dan alternatif 3 tidak mencakup biaya akomodasi, konsumsi, kesehatan, kursus dan *forgone earning*. Biaya pribadi peserta didik di SD/MI adalah Rp10,2998 juta untuk alternatif 1, Rp4,425 juta untuk alternatif 2, dan Rp2,526 untuk alternatif 3. Biaya pribadi peserta didik di SMP/MTs adalah Rp12,989 juta untuk alternatif 1, Rp6,884 juta untuk alternatif 2, dan Rp3,598 untuk alternatif 3. Biaya pribadi peserta didik di SMA/MA adalah Rp16,408 juta untuk alternatif 1, Rp9,538 juta untuk alternatif 2, dan Rp5,303 untuk alternatif 3. Biaya pribadi peserta didik di SMK adalah Rp16,865 juta untuk alternatif 1, Rp9,671 juta untuk alternatif 2, dan Rp5,436 untuk alternatif 3.

**Tabel 2 Rincian Biaya Satuan Pendidikan di Satuan Pendidikan Faktual dan Perbandingannya dengan yang Standar 2011**

Komponen Biaya Satuan Pendidikan	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK	
	Faktual*	SPM**	Faktual*	SPM**	Faktual*	SPM**	Faktual*	SPM**
<b>1. Biaya Satuan Investasi</b>	<b>808.573</b>	<b>1.019.814</b>	<b>1.636.194</b>	<b>2.138.298</b>	<b>1.950.256</b>	<b>2.725.381</b>	<b>2.721.174</b>	<b>4.079.008</b>
<b>1.1 Sumber Daya Manusia</b>	<b>20.373</b>	<b>25.695</b>	<b>32.924</b>	<b>43.027</b>	<b>46.843</b>	<b>65.460</b>	<b>59.459</b>	<b>89.127</b>
1) Pendidik	18.769	23.672	31.376	41.004	44.978	62.854	58.648	87.913
2) Tenaga Kependidikan	1.604	2.023	1.548	2.023	1.866	2.607	810	1.215
<b>1.2 Sarana dan Prasarana</b>	<b>788.200</b>	<b>994.120</b>	<b>1.603.270</b>	<b>2.095.271</b>	<b>1.903.414</b>	<b>2.659.921</b>	<b>2.661.715</b>	<b>3.989.881</b>
1) Lahan	78.959	99.587	91.556	119.652	108.697	151.897	152.000	227.845
2) Taman, lap OR, lap upcr, dll	52.214	65.855	70.271	91.834	83.425	116.582	116.661	174.874
3) Bangunan	269.197	339.526	500.899	654.611	594.671	831.021	831.582	1.246.531
4) Jaringan	3.391	4.278	5.076	6.633	6.025	8.421	8.426	12.630
5) Perabot	192.983	243.400	467.272	610.666	554.750	775.233	775.757	1.162.851
6) Peralatan	105.572	133.154	335.380	438.298	398.165	556.414	556.790	834.622
7) Media pendidikan	85.886	108.323	132.817	173.575	157.682	220.352	220.500	330.527
<b>2. Biaya Satuan Operasi</b>	<b>2.408.152</b>	<b>3.037.289</b>	<b>3.145.750</b>	<b>4.111.096</b>	<b>4.283.011</b>	<b>5.985.281</b>	<b>5.453.518</b>	<b>8.174.761</b>
<b>2.1 Biaya Operasi Personalia</b>	<b>1.847.422</b>	<b>2.330.067</b>	<b>2.479.112</b>	<b>3.239.885</b>	<b>3.431.196</b>	<b>4.794.915</b>	<b>3.938.895</b>	<b>5.904.358</b>
1) Gaji dan tunjangan pendidik	1.484.509	1.872.341	1.943.021	2.539.281	2.785.379	3.892.421	3.631.951	5.444.253
2) Gaji & tunjangan ten. kepen.	362.914	457.726	536.091	700.603	645.816	902.495	280.548	420.538
<b>2.2 Biaya Operasi Non Personalia</b>	<b>560.730</b>	<b>707.222</b>	<b>666.638</b>	<b>871.211</b>	<b>851.815</b>	<b>1.190.366</b>	<b>1.514.623</b>	<b>2.270.402</b>
1) Alat tulis sekolah	46.395	58.516	67.245	87.881	81.953	114.525	104.756	157.028
2) Bahan dan alat habis pakai	41.659	52.543	59.874	78.247	70.577	98.628	201.620	302.227
3) Daya dan jasa	59.464	75.000	75.322	98.437	87.367	122.092	126.590	189.756
4) Pemelhrn & perbaikan ringan	184.385	232.557	218.473	285.517	259.374	362.461	362.706	543.691
5) Transportasi	46.096	58.139	53.523	69.948	67.801	94.748	40.395	60.551
6) Konsumsi	21.391	26.980	26.762	34.974	31.285	43.718	34.531	51.762
7) Asuransi	23.049	29.070	26.762	34.974	35.038	48.964	128.284	192.296
8) Pembinaan siswa/ekstr kurklr	126.189	159.156	128.457	167.877	208.864	291.877	376.705	564.677
9) Pelaporan	10.588	13.354	10.218	13.354	9.555	13.354	8.908	13.354
10) Uji kompetensi	0	0	0	0	0	0	132.357	198.400
<b>Biaya satuan di satuan pendidikan</b>	<b>3.216.725</b>	<b>4.057.104</b>	<b>4.781.944</b>	<b>6.249.393</b>	<b>6.233.267</b>	<b>8.710.662</b>	<b>8.174.692</b>	<b>12.253.769</b>
<b>Persentase faktual thdp standar</b>	<b>79%</b>		<b>77%</b>		<b>72%</b>		<b>67%</b>	

**Keterangan:**

\* Faktual = berdasarkan data di lapangan

\*\* SPM = berdasarkan perkiraan Standar Pelayanan Minimal.

**Catatan:** Estimasi biaya satuan pendidikan ini merupakan hasil dari mengkombinasikan berbagai hasil studi yang berkaitan yang dikonversika ke dalam nilai 2011 dengan penyesuaian inflasi. (Hasil-hasil studi yang berkaitan tersebut dicantumkan dalam daftar pustaka).

**Tabel 3 Biaya Satuan Pribadi Peserta Didik Faktual Th 2011**

Komponen Biaya	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		SMK	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
<b>Alternatif 1: Seluruh komponen biaya</b>								
Buku dan ATS	390.011	3,79	453.862	3,49	654.045	3,99	500.456	2,97
Pak. & Perl. Sek.	553.953	5,38	622.982	4,8	824.889	5,03	731.702	4,34
Akomodasi	1.235.608	12,00	1.251.140	9,63	1.428.888	8,71	1.309.815	7,77
Transportasi	443.508	4,31	648.867	5	961.221	5,86	961.221	5,7
Konsumsi	3.934.621	38,2	4.074.403	31,37	4.419.545	26,94	4.918.276	29,16
Kesehatan	500.456	4,86	427.977	3,29	497.005	3,03	659.222	3,91
Karyawisata	75.931	0,74	127.703	0,98	195.006	1,19	200.182	1,19
Uang Saku	793.826	7,71	1.144.146	8,81	1.625.619	9,91	1.527.254	9,06
Kursus tambahan	203.634	1,98	352.046	2,71	521.165	3,18	307.176	1,82
Iuran Sekolah	269.211	2,61	600.547	4,62	1.042.329	6,35	1.515.174	8,98
<i>Foregone Earning</i>	1.898.282	18,43	3.285.754	25,3	4.234.894	25,82	4.234.894	25,11
<b>Total</b>	<b>10.299.042</b>	<b>100,00</b>	<b>12.989.424</b>	<b>100,00</b>	<b>16.404.606</b>	<b>100,00</b>	<b>16.865.371</b>	<b>100,00</b>
<b>Alternatif 2: Tanpa komponen biaya akomodasi, konsumsi, kesehatan, dan kursus</b>								
Buku dan ATS	390.011	8,81	453.862	6,59	654.045	6,86	500.456	5,17
Pak. & Perl. Sek.	553.953	12,52	622.982	9,05	824.889	8,65	731.702	7,57
Transportasi	443.508	10,02	648.867	9,43	961.221	10,08	961.221	9,94
Karyawisata	75.931	1,72	127.703	1,86	195.006	2,04	200.182	2,07
Uang Saku	793.826	17,94	1.144.146	16,62	1.625.619	17,04	1.527.254	15,79
Iuran Sekolah	269.211	6,08	600.547	8,72	1.042.329	10,93	1.515.174	15,67
<i>Foregone Earning</i>	1.898.282	42,9	3.285.754	47,73	4.234.894	44,4	4.234.894	43,79
<b>Total</b>	<b>4.424.723</b>	<b>100,00</b>	<b>6.883.860</b>	<b>100,00</b>	<b>9.538.003</b>	<b>100,00</b>	<b>9.670.883</b>	<b>100,00</b>
<b>Alternatif 3: Tanpa komponen biaya akomodasi, konsumsi, kesehatan, kursus, &amp; foregone earning</b>								
Buku dan ATS	390.011	15,44	453.862	12,61	654.045	12,33	500.456	9,21
Pak. & Perl. Sek.	553.953	21,93	622.982	17,31	824.889	15,55	731.702	13,46
Transportasi	443.508	17,55	648.867	18,03	961.221	18,13	961.221	17,68
Karyawisata	75.931	3,01	127.703	3,55	195.006	3,68	200.182	3,68
Uang Saku	793.826	31,42	1.144.146	31,8	1.625.619	30,65	1.527.254	28,1
Iuran Sekolah	269.211	10,66	600.547	16,69	1.042.329	19,66	1.515.174	27,87
<b>Total</b>	<b>2.526.441</b>	<b>100,00</b>	<b>3.598.107</b>	<b>100,00</b>	<b>5.303.109</b>	<b>100,00</b>	<b>5.435.989</b>	<b>100,00</b>

**Catatan:** Hasil ini merupakan konversi ke dalam nilai 2011 dari hasil studi Abbas Ghozali, dkk tahun 2004 yang menggunakan data tahun 2003 dengan melakukan penyesuaian inflasi tahun 2004 sampai dengan 2010.

### 3. Pendanaan Pendidikan

Dalam bagian ini akan direviu pendanaan pendidikan menurut peraturan perundang-undangan, tren anggaran pendidikan dan persentasenya dari APBN, persentase anggaran pendidikan dari PDB dan perbandingannya dengan berbagai negara lain, anggaran pendidikan per peserta didik dan perbandingannya dengan negara-negara lain, dan alokasi anggaran pendidikan untuk menutup biaya-biaya pendidikan.

Secara umum, peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan masyarakat (penyelenggara satuan pendidikan, peserta didik, orang tua/wali, dan pihak lain yang peduli terhadap pendidikan). (Pasal 46 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 2 ayat 1 dan 2 PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan). Lebih spesifik, pernyataan peraturan perundang-undangan tentang pendanaan untuk biaya-biaya pendidikan di pendidikan dapat dirangkum seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 4.

Peraturan perundang-undangan mengelompokkan pendidikan ke dalam pendidikan yang diselenggarakan pemerintah pusat, pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, dan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan sistem pendanaan yang bisa berbeda. Untuk pendidikan program wajib belajar (pendidikan dasar) yang diselenggarakan pemerintah pusat, semua biaya penyelenggaraan pendidikan yang mencakup biaya investasi lahan, biaya investasi bukan lahan, biaya investasi SDM, gaji dan tunjangan-tunjangan serta maslahat tambahan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, dan biaya operasi non personalia menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak asing dapat membantu mendanai biaya-biaya investasi lahan, investasi bukan lahan, investasi SDM, dan operasi non personalia. Biaya pribadi pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik, namun bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu dapat memperoleh bantuan dari pemerintah pusat.

Untuk pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah, hampir semua biaya penyelenggaraan pendidikan yang mencakup biaya investasi lahan, biaya investasi bukan lahan, biaya investasi SDM, gaji dan tunjangan-tunjangan (kecuali tunjangan profesi) serta masalah tambahan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, dan biaya operasi non personalia menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap tunjangan profesi pendidik dan membantu biaya-biaya investasi lahan, investasi bukan lahan, investasi SDM, dan operasi non personalia. Pemangku kepentingan dan pihak asing dapat membantu mendanai biaya-biaya investasi lahan, investasi bukan lahan, investasi SDM, dan operasi non personalia. Biaya pribadi pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik, namun bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu dapat memperoleh bantuan dari pemerintah pusat.

Untuk pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat, biaya-biaya investasi lahan, investasi bukan lahan, investasi SDM, gaji pokok dan tunjangan yang melekat, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan, sedangkan tunjangan profesi pendidik dan biaya operasi non personalia merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak asing dapat membantu mendanai biaya-biaya investasi lahan, investasi bukan lahan, investasi sumber daya manusia, operasi personalia, dan operasi non personalia. Biaya pribadi pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik, namun peserta didik yang orang tuanya tidak mampu dapat memperoleh bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau penyelenggara.

Untuk pendidikan bukan program wajib belajar (pendidikan menengah dan tinggi) yang diselenggarakan pemerintah pusat, biaya investasi lahan serta gaji dan tunjangan-tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,

sedangkan biaya investasi bukan lahan dan biaya operasi non personalia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan masyarakat, khususnya orang tua/wali peserta didik. Pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak asing dapat membantu mendanai biaya-biaya investasi lahan, investasi bukan lahan, dan operasi non personalia. Biaya pribadi pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik, namun bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu dapat memperoleh bantuan dari pemerintah pusat.

Untuk pendidikan menengah dan tinggi yang diselenggarakan pemerintah daerah, biaya-biaya investasi lahan serta gaji dan tunjangan-tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan kecuali tunjangan profesional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan biaya investasi bukan lahan dan biaya operasi non personalia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya orang tua/wali peserta didik. Pemerintah pusat, pemangku kepentingan, dan pihak asing dapat membantu mendanai biaya-biaya investasi lahan, investasi bukan lahan, dan operasi non personalia. Biaya pribadi pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik, namun peserta didik yang orang tuanya tidak mampu dapat memperoleh bantuan dari pemerintah daerah.

Untuk pendidikan menengah dan tinggi yang diselenggarakan masyarakat, biaya investasi lahan menjadi tanggung jawab penyelenggara, sedangkan biaya investasi bukan lahan, gaji dan tunjangan-tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan kecuali tunjangan profesional, dan biaya operasi non personalia merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara dan orang tua/wali peserta didik. Pemerintah pusat memberikan subsidi tunjangan profesional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak asing dapat membantu mendanai biaya-biaya investasi lahan, investasi bukan lahan, investasi sumber daya manusia, operasi personalia, dan operasi non personalia. Biaya pribadi pendidikan menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik, namun peserta didik yang orang tuanya tidak mampu dapat memperoleh bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau penyelenggara.

Adanya penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta pendanaannya tanpa adanya pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara jelas seperti yang dibahas di atas dapat menimbulkan kerancuan dan tumpang tindih serta kevakuman dalam pendanaan sehingga dapat menyebabkan ketidak efisienan dan ketidak efektivitas pendanaan pendidikan. Demikian juga, tidak adanya kepastian porsi tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan masyarakat dengan orang tua/wali peserta didik dapat menimbulkan mahalanya biaya pendidikan bagi orang tua/wali peserta didik.



**Tabel 4 Biaya dan Pendanaan Pendidikan menurut Peraturan Perundang-undangan**

Jenjang, Penyelenggara, dan Sumber Dana	Jenis Biaya Pendidikan									Peraturan Perundang-undangan Rujukan
	Investasi Lahan	Investasi Bukan Lahan	Investasi SDM	Gaji & Tunj Melekat	Tunj Profesi	Tunj Fungsional	Tunj Khusus & Masalah Tambhn	Operasi Non Personl	Pribadi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>I. Pendidikan Dasar</b>										
<b>A. Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat</b>										
Pem Pusat	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	Sis misk	UU 1945 Ps 31(2); UU Sisdiknas Ps 11(2),12 (1), 34(2,3); PP Pendanaan Pendidikan Ps 7(1),10(1),16 (1), 21(1); PP Wajar Ps 9(1,4),10(1,3), 11(1,2)
			TJ	TJ	TJ	TJ	TJ			UU Guru & Dosen Ps 14(1), 15(2),16(1),17(1),18(1); PP Guru Ps 14(1,7),18,19(1,2), 21(1),22,24, 28(1,2),46,47(5)
Peserta Didik									TJ	PP Pendanaan Pendidikan Ps 47
Pem Daerah	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8 (1),12(1),23(1)
Pemangku Kep	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8 (1),12(1),23(1)
Pihak Asing	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(1),12(1),23(1)
<b>B. Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah</b>										
Pem Daerah	TJ	TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ	Sis misk	UU 1945 Ps 31 (2); UU Sisdiknas Ps 11 (2),12(1), 34(2,3); PP Wajar Ps 9(1,4),10(1,3),11(1,2)
			TJ	TJ		TJ	TJ			UU Guru & Dosen Ps 14(1),15(2), 17(1); PP Guru Ps 14 (2,3,8),18,19(1,2), 21(1),22,24,28(1,2),46,47 (5)
	TJ	TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ		PP Pendanaan Pendidikan Ps 7(2),10(2),18(1),21(2)
Peserta Didik									TJ	PP Pendanaan Pendidikan Ps 47
Pem Pusat					TJ					UU Guru & Dosen Ps 16(1),18(1)
	B	B	B		TJ		TJ	B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(2),12(2),16(1),23(2)
Pemangku Kep	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(2),12(2),23(2)
Pihak Asing	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(2),12(2),23(2)
<b>C. Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>										
Penyelenggara		TJ		TJ						UU Guru & Dosen Ps 15(3) PP Wajar Ps 10(2)
	TJ	TJ	TJ	TJ		TJ	TJ		Sis misk	PP Pendanaan Pendidikan Ps 32(2),34(2),38(1),44(1)
Peserta Didik									TJ	PP Pendanaan Pendidikan Ps 47
Pem Pus/Da	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	Sis misk	UU 1945 Ps 31 (2); UU Sisdiknas Ps 11(2),12(1), 34(2,3) PP Wajar Ps 9(1,4),11 (2)
Pem Pusat			TJ		TJ	TJ	TJ			UU Guru & Dosen Ps 14(1),16 (1), 17(2),18 (1); PP Guru Ps 14(4,9),18,19(1,2),21 (2),22,24,28(1,2),46,47(5)
	B	B	B		TJ	TJ	TJ	TJ/B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(3),12(3),17(1),23(3),40(1)
Pem Daerah			TJ			TJ				UU Guru & Dosen Ps 14(1),17(2); PP Guru Ps 14 (3)
	B	B	B			TJ		B/TJ		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(3),12(3),23(3)19(1),40(2)

Jenjang, Penyelenggara, dan Sumber Dana	Jenis Biaya Pendidikan									Peraturan Perundang-undangan Rujukan
	Inves- tasi Lahan	Invest Bukan Lahan	Inves- tasi SDM	Gaji & Tunj Melekat	Tunj Pro- fesi	Tunj Fung- sional	Tunj Khus & Maslahat Tambhn	Opsrnl Non Personl	Pribadi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pemangku Kep	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(3),12(3),23(3)
Pihak Asing	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(3),12(3),23(3)
<b>II. Pendidikan Menengah</b>										
<b>A. Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat</b>										
Pem Pusat			TJ	TJ	TJ	TJ	TJ			UU Guru & Dosen Ps 15(2),16(1), 17(1),18(1); PP Guru Ps 14(1,7),18,19(1,2), 21(1),22,24,28(1,2),46,47(5)
									Sis misk	UU Sisdiknas Ps 12(1)
	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	Sis misk	PP Pendanaan Pendidikan Ps 7(3),11(1),16(1),22(1),27(1)
Peserta Didik		TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ	TJ	PP Pendanaan Pendidikan Ps 11(1),22(1),47
Pem Daerah	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(1),12(1),23(1)
Pemangku Kep	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8 (1),12(1),23(1)
Pihak Asing	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(1),12(1),23(1)
<b>B. Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah</b>										
Pem Daerah			TJ	TJ		TJ	TJ			UU Guru & Dosen Ps 15(2),17(1); PP Guru Ps 14(1,2,3,8),18, 19(1,2),21 (1),22,24,46,47 (5)
									Sis misk	UU Sisdiknas Ps 12(1)
	TJ	TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ	Sis misk	PP Pendanaan Pendidikan Ps 7(4),11(2),18 (1),22(2) ,27(1)
Pem Pusat					TJ		TJ			UU Gr & Dos Ps 16(1),18(1)
	B	B	B		TJ		TJ	B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(2),16(1),12(2),23(2)
Peserta Didik		TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ	TJ	PP Pendanaan Pendidikan Ps 11 (2),22(2),47
Pemangku Kep	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikn Ps 8 (2),12(2),23(2)
Pihak Asing	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(2),12(2),23(2)
<b>C. Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>										
Penyelenggara	TJ	TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ	Sis misk	PP Pendanaan Pendidikan Ps 32(2),34 (4),38(1),40(4),44(1)
Peserta Didik		TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ	TJ	PP Pendanaan Pendidikan Ps 34(4),40(4),41,47,51(6d)
Pem Pusat			B		TJ	TJ	TJ			UU Guru & Dosen Ps 14(1),16(1), 17(2),18(1); PP Guru Ps 14(4,9),18,19(1,2), 21(2),22,24,46,47(5)
	B	B	B	B	TJ	S	TJ	B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 17(1),23(3),32(4),34(5),38(3)
Pem Daerah			B			TJ				UU Gru & Dos Ps 14(1),17(2); PP Guru Ps 14(3)
	B	B	B			S		B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 19(1),23(3),32(4),34(5),38(3)
Pem Pus/Da			B					Sis misk	UU Sisdiknas Ps 12 (1)	
Pemangku Kep	B	B	B	B		B	B			PP Pendanaan Pendidikan Ps 32(4),34(5),38(3),40(5)
Pihak Asing	B	B	B	B		B	B			PP Pendanaan Pendidikan Ps 32(4),34(5),38(3),40(5)

Jenjang, Penyelenggara, dan Sumber Dana	Jenis Biaya Pendidikan									Peraturan Perundang-undangan Rujukan
	Inves- tasi Lahan	Invest Bukan Lahan	Inves- tasi SDM	Gaji & Tunj Melekat	Tunj Pro- fesi	Tunj Fung- sional	Tunj Khus & Maslahat Tambhn	Opsrnl Non Personl	Pribadi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>III. Pendidikan Tinggi</b>										
<b>A. Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat</b>										
Pem Pusat	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	UU Sisdiknas Ps 12(1) PP Pendanaan Pendidikan Ps 7(5),16(1)
Peserta Didik		TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ	TJ	PP Pendanaan Pendidikan Ps 11(1),22(1),47
Pem Daerah	B/TJ	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 7(6),8(1),12(1),23(1)
Pemangku Kep	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(1),12(1),23(1)
Pihak Asing	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(1),12(1),23(1)
<b>B. Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah</b>										
Pem Daerah				TJ		TJ			Mhs misk	UU Sisdiknas Ps 12 (1) UU Guru & Dosen Ps 15(2),17(1)
	TJ	TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ	Mhs misk	PP Pendanaan Pendidikan Ps 7(4),11(2),18(1),22(2),27(1)
Peserta Didik		TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ	TJ	PP Pendanaan Pendidikan Ps 11(2),22(2),47
Pem Pusat	B	B	B		TJ		TJ	B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 7(5),8(2),12(2),16(1),23(2)
Pemangku Kep	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(1),12(2),23(2)
Pihak Asing	B	B	B					B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 8(1),12(1),23(2)
<b>C. Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>										
Penyelenggara	TJ	TJ	TJ	TJ		TJ	TJ	TJ	TJ	PP Pendanaan Pendidikan Ps 32 (2),34(2),36,37,38(1),40(4),44 (1)
Peserta Didik		TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	PP Pendanaan Pendidikan Ps 47
Pem Pusat	B	B	B	B	TJ		TJ/B	B		PP Pendanaan Pendidikan Ps 17 (1);23(3),32(4),34(5),38(3),40(5)
Pem Daerah									Mhs misk	UU Sisdiknas Ps 12 (1) PP Pendanaan Pendidikan Ps 23(3),32(4),34(5),38(3),40(5)
Pemangku Kep	B	B	B	B		B	B			PP Pendanaan Pendidikan Ps 32(4),34(5),38(3),40(5)
Pihak Asing	B	B	B	B		B	B			PP Pendanaan Pendidikan Ps 32(4),34(5),38(3),40(5)

**Keterangan:** TJ = tanggung jawab, S = subsidi, B = bantuan, Sis misk = siswa miskin, dan Mhs misk = mahasiswa miskin.

Undang-undang Dasar 45 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan 20 persen dari APBD. Amanat tersebut direalisasikan mulai tahun 2009 setelah Mahkamah Konstitusi atas tuntutan masyarakat memerintahkan Pemerintah untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Besarnya anggaran pendidikan dan persentasenya dari APBN dan PDB dapat dilihat dalam Tabel 5.

**Tabel 5 PDB, APBN, dan Anggaran Pendidikan Nasional Tahun 2005-2011**

PDB, APBN, dan Anggaran Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Sumber
PDB (Rp Trilyun )	2.774	3.339	3.951	4.951	5.603	6.422	7.007	BPS
APBN (Rp Trilyun )	542	699	764	989	1.037	1.126	1.230	Kemenkeu
% APBN dari PDB	19,6	20,9	19,3	21,0	18,5	17,5	17,6	
Anggaran Pendidikan Nasional (Rp Trilyun)	89	123	135	172	207	225	249	Kemenkeu
% Anggaran Pendidikan Nasional dari PDB	3,2	3,7	3,4	3,5	3,7	3,5	3,4	
% Anggaran Pendidikan Nasional dari APBN	16,5	17,6	17,7	17,4	20,00	20,00	20,25	
Anggaran Pendidikan Pempus (Rp Trilyun)	43	49	53	61	69	97	91	Kemenkeu
% Angg Pend Pempus dr Angg Pend Total (%)	47,9	39,3	39,2	35,8	33,4	43,3	33,3	
Anggaran Pendidikan Pemda (Rp Trilyun)	47	75	82	110	138	128	158	DAU+DAK
% Angg Pend Pemda dr Angg Pend Total (%)	52,1	60,7	60,8	64,2	66,6	56,7	66,7	

Anggaran pendidikan ini dari tahun 2005 sampai dengan 2011 meningkat cukup pesat secara nominal dan sudah mencapai 20 persen dari APBN sejak 2009. Pada tahun 2011 anggaran pendidikan mencapai Rp249 trilyun atau 20,25 persen dari APBN. Namun demikian, apabila anggaran pendidikan ini dibagi dengan jumlah peserta didik maka nilainya menjadi rendah. Bahkan Indonesia termasuk negara yang nilai anggaran pendidikan per peserta didiknya diantara yang terendah di dunia. Sebagai contoh, seperti dapat dilihat dalam Tabel 6, nilai anggaran pendidikan pemerintah untuk sekolah dasar per peserta didik adalah sebesar PPP US\$377, sedangkan nilai anggaran pendidikan pemerintah untuk sekolah dasar per peserta didik di Malaysia adalah PPP US\$1.324 atau 3,5 kalinya Indonesia dan nilai anggaran pendidikan pemerintah untuk sekolah dasar per peserta didik di Luxemburg (yang tertinggi memiliki anggaran pendidikan per peserta didik sekolah dasar tertinggi) adalah PPP US\$9.953 atau 26,4 kalinya Indonesia.

Demikian pula, anggaran pendidikan di Indonesia ini masih rendah apabila dilihat persentasenya dari PDB. Persentase anggaran pendidikan dari PDB dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 berkisar antara 3,2 – 3,7 persen. Meskipun persentase ini sudah jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang kurang dari 2 persen, tetapi lebih rendah dari yang di negara-negara berkembang lainnya apalagi dari yang negara-negara maju dan jauh lebih rendah dari rekomendasi UNESCO yang minimal 6 persen. (Lihat Tabel 7). Akibatnya, anggaran pendidikan per peserta didik termasuk untuk peserta didik pendidikan tergolong yang terendah di dunia.

**Tabel 6 Penduduk, PDB, dan Anggaran Pemerintah untuk Sekolah Dasar di Berbagai Negara di Dunia Tahun 2007**

Ran-king IPM	Negara	Jumlah Penduduk* (Juta)	PDB** (AS\$ Milyar)	PDB** (PPP AS\$ Milyar)	PDB per Kapita** (AS\$)	PDB per Kapita** (PPP AS\$)	% Angg Penddk dr APBN ***	Angg Pem utk Dikdas per Siswa**(PPP AS\$)
1	Norwegia	4,7	388,40	251,60	82.480	53.433	16,7	7.072
2	Australia	20,9	821,00	733,90	39.066	34.923	13,3	5.181
3	Islandia	0,3	20,00	11,10	64.190	35.742	18,0	7.788
4	Kanada	32,9	1.329,90	1.180,90	40.329	35.812	12,5	..
5	Irlandia	4,4	259,00	194,80	59.324	44.613	13,9	5.100
6	Belanda	16,5	765,80	633,90	46.750	38.694	11,5	5.572
7	Swedia	9,2	454,30	335,80	49.662	36.712	12,9	8.415
8	Perancis	61,7	2.589,80	2.078,00	41.970	33.674	10,6	5.224
9	Swiss	7,5	424,40	307,00	56.207	40.658	13,0	7.811
10	Jepang	127,4	4.384,30	4.297,20	34.313	33.632	9,5	..
11	Luxemburg	0,5	49,50	38,20	103.042	79.485	..	9.953
12	Finlandia	5,3	244,70	182,60	46.261	34.526	12,5	5.373
13	Amerika Serikat	308,7	13.751,40	13.751,40	45.592	45.592	13,7	..
14	Austria	8,3	373,20	310,70	44.879	37.370	10,9	7.596
15	Spanyol	44,1	1.436,90	1.416,40	32.017	31.560	11,0	4.800
16	Denmark	5,4	311,60	197,30	57.051	36.130	15,5	7.949
17	Belgia	10,5	452,80	371,20	42.609	34.935	12,1	6.303
18	Italia	59,3	2.101,60	1.802,20	35.396	30.353	9,2	6.347
19	Liechtenstein					85.382		
20	Selandia Baru	4,2	135,70	115,60	32.086	27.336	15,5	4.831
21	Inggris	60,9	2.772,00	2.143,00	45.442	35.130	12,5	5.596
22	Jerman	82,3	3.317,40	2.830,10	40.324	34.401	9,7	4.837
23	Singapura	4,5	161,3	228,10	35.163	49.704	..	..
24	Hong Kong, Cina	6,9	207,2	293,0	29.912	42.306	23,2	..
25	Yunani	11,1	313,4	319,2	27.995	28.517	9,2	3.562
26	Korea Selatan	48,0	969,8	1.201,8	20.014	24.801	15,3	3.379
27	Israel	6,9	164,0	188,9	22.835	26.315	13,7	5.135
28	Andorra	0,1				41.235	..	..
29	Slovenia	2,0	47,2	54,0	23.379	26.753	12,7	5.206
30	Brunei Darussalam	0,4	11,5	19,5	30.032	50.200	9,1	..
31	Kuwait	2,9	112,1	121,1	42.102	47.812	12,9	2.204
32	Cyprus	0,9	21,3	21,2	24.895	24.789	14,5	..
33	Qatar	1,1	52,7	56,3	64.193	74.882	19,6	..
34	Portugal	10,6	222,8	241,5	20.998	22.765	11,3	4.908
35	Uni Emirat Arab	4,4	163,3	226,1	38.436	54.626	28,3	1.636
36	Cekoslovakia	10,3	175	249,5	16.934	24.144	9,5	2.242
37	Barbados	0,3	3,0	5,0	10.427	17.956	16,4	..
38	Malta	0,4	7,4	9,4	18.203	23.080	10,5	2.549
39	Bahrain	0,8	15,8	20,3	21.421	29.723	..	..
40	Estonia	1,3	20,9	27,3	15.578	20.361	14,6	2.511
41	Polandia	38,1	422,1	609,4	11.072	15.987	12,7	3.155
42	Slovakia	5,4	75,0	108,4	13.891	20.076	10,8	2.149
43	Hungaria	10,0	138,4	188,6	13.766	18.755	10,9	4.479
44	Chili	16,6	163,9	230,3	9.878	13.880	16,0	1.287
45	Kroasia	4,4	51,3	71,1	11.559	16.027	10,0	2.197
46	Lithuania	3,4	38,3	59,3	11.356	17.575	14,7	2.166
47	Antigua & Barbuda	0,1	1,0	1,6	11.664	18.691	..	..

Ranking IPM	Negara	Jumlah Penduduk* (Juta)	PDB** (AS\$ Milyar)	PDB** (PPP AS\$ Milyar)	PDB per Kapita** (AS\$)	PDB per Kapita** (PPP AS\$)	% Angg Penddk dr APBN ***	Angg Pem utk Dikdas per Siswa***(PPP AS\$)
48	Latvia	2,3	27,2	37,3	11.930	16.377	14,2	..
49	Argentina	39,5	262,5	522,9	6.644	13.238	13,1	1.703
50	Uruguay	3,3	23,1	37,3	6.960	11.216	11,6	..
51	Kuba	11,2			..	6.876	14,2	..
52	Bahamas	0,3	6,6		19.844	20.253	19,7	..
53	Meksico	107,5	1.022,8	1.484,9	9.715	14.104	25,6	1.604
54	Costa Rica	4,5	26,3	48,4	5.887	10.842	20,6	1.623
55	Libya	6,2	58,3	88,4	9.475	14.364	..	..
56	Oman	2,7	35,7	56,6	14.031	22.816	31,1	..
57	Seychelles	0,1	0,7	1,4	8.560	16.394	12,6	2.399
58	Venezuela	27,7	228,1	334,1	8.299	12.156	..	583
59	Arab Saudi	24,7	381,7	554,1	15.800	22.935	27,6	..
60	Panama	3,3	19,5	38,1	5.833	11.391	8,9	..
61	Bulgaria	7,6	39,5	86,0	5.163	11.222	6,2	2.045
62	Saint Kitts & Nevis	0,1	0,5	0,7	10.795	14.481	12,7	..
63	Rumania	21,5	166,0	266,5	7.703	12.369	8,6	941
64	Trinidad & Tobago	1,3	20,9	31,3	15.668	23.507	13,4	..
65	Montenegro	0,6	3,5	7	5.804	11.699	..	..
66	Malaysia	26,6	186,7	358,9	7.033	13.518	25,2	1.324
67	Serbia	9,8	40,1	75,6	5.435	10.248	..	..
68	Belarus	9,7	44,8	105,2	4.615	10.841	9,3	1.196
69	Saint Lucia	0,2	1,0	1,6	5.834	9.786	19,1	949
70	Albania	3,1	10,8	22,4	3.405	7.041	8,4	..
71	Rusia	141,9	1.290,1	2.087,4	9.079	14.690	12,9	..
72	Masedonia	2,0	7,7	18,5	3.767	9.096	15,6	..
73	Dominika	0,1	0,3	0,6	..	7.893	..	..
74	Grenada	0,1	0,6	0,8	5.724	7.344	12,9	766
75	Brasil	190,1	1.313,40	1.833,0	6.855	9.567	14,5	1.005
76	Bosnia Herzegovina	3,8	15,1	29,3	4.014	7.764	..	..
77	Kolombia	44,4	207,8	377,7	4.724	8.587	14,2	1.257
78	Peru	28,5	107,3	218,6	3.846	7.836	15,4	446
79	Turki	73	655,9	957,2	8.877	12.955	..	1.059
80	Ekuador	13,3	44,5	99,4	3.335	7.449	8,0	..
81	Mauritius	1,3	6,8	14,2	5.383	11.296	12,7	1.205
82	Kazakhstan	15,4	104,9	168,2	6.772	10.863	12,1	..
83	Libanon	4,2	24,4	41,4	5.944	10.109	9,6	402
84	Armenia	3,1	9,2	17,1	3.059	5.693	15,0	..
85	Ukraina	46,3	141,2	321,5	3.035	6.914	19,3	..
86	Azerbaijan	8,6	31,2	67,2	3.652	7.851	17,4	356
87	Thailand	67	245,4	519,2	3.844	8.135	25,0	..
88	Iran	72,4	286,1	778	4.028	10.955	19,5	927
89	Georgia	4,4	10,2	20,5	2.313	4.662	9,3	..
90	Republik Dominika	9,8	36,7	65,2	3.772	6.706	16,8	644
91	Saint Vin't & Grenadin	0,1	0,6	0,9	4.596	7.691	16,1	1.227
92	Cina	1,329,1	3.205,5	7.096,70	2.432	5.383	..	..
93	Belize	0,3	1,3	2	4.200	6.734	18,1	846
94	Samoa	0,2	0,5	0,8	2.894	4.467	13,7	..
95	Maldives	0,3	1,1	1,6	3.456	5.196	15	..
96	Yordania	5,9	15,8	28	2.769	4.901	..	695
97	Suriname	0,5	2,2	3,6	4.896	7.813	..	..

Ran-king IPM	Negara	Jumlah Penduduk* (Juta)	PDB** (AS\$ Milyar)	PDB** (PPP AS\$ Milyar)	PDB per Kapita** (AS\$)	PDB per Kapita** (PPP AS\$)	% Angg Penddk dr APBN ***	Angg Pem utk Dikdas per Siswa***(PPP AS\$)
98	Tunisia	10,1	35	76,9	3.425	7.520	20,8	1.581
99	Tonga	0,1	0,3	0,4	2.474	3.748	13,5	..
100	Jamaika	2,7	11,4	16,3	4.272	6.079	8,8	547
101	Paraguay	6,1	12,2	27,1	1.997	4.433	10	518
102	Sri Lanka	19,9	32,3	84,9	1.616	4.243	..	..
103	Gabon	1,4	11,6	20,2	8.696	15.167	..	..
104	Aljazair	33,9	135,3	262	3.996	7.740	..	692
105	Filipina	88,7	144,1	299,4	1.639	3.406	15,2	418
106	El Salvador	6,1	20,4	39,8	2.973	5.804	20	478
107	Suriah	20,5	37,7	89,7	1.898	4.511	..	611
108	Fiji	0,8	3,4	3,6	4.113	4.304	20	1.143
109	Turkmenistan	5	12,9	22,6	2.606	4.953	..	..
110	Palestina	4	4		1.160	..	..	..
111	Indonesia	224,7	432,8	837,6	1.918	3.712	17,2	377
112	Honduras	7,2	12,2	27	1.722	3.796	..	..
113	Bolivia	9,5	13,1	40	1.379	4.206	18,1	435
114	Guyana	0,8	1,1	2,1	1.462	2.782	15,5	752
115	Mongolia	2,6	3,9	8,4	1.507	3.236	..	261
116	Vetnam	86,1	68,6	221,4	806	2.600	..	..
117	Moldova	3,7	4,4	9,7	1.156	2.551	19,8	..
118	Equatorial Guinea	0,6	9,9	15,5	19.552	30.627	4	..
119	Uzbekistan	26,9	22,3	65,1	830	2.425	..	..
120	Kyrgyzstan	5,3	3,7	10,5	715	2.006	18,6	..
121	Cape Verde	0,5	1,4	1,6	2.705	3.041	16,4	1.052
122	Guatemala	13,4	33,9	60,9	2.536	4.562	..	390
123	Mesir	80,1	130,5	403,7	1.729	5.349	12,6	..
124	Nikaragua	5,6	5,7	14,4	1.022	2.570	15	331
125	Boswana	1,9	12,3	25,6	6.544	13.604	21	1.158
126	Vanuatu	0,2	0,5	0,8	2.001	3.666	26,7	..
127	Tajikistan	6,7	3,7	11,8	551	1.753	18,2	106
128	Namibia	2,1	7	10,7	3.372	5.155	21	944
129	Afrika Selatan	49,2	283	466,9	5.914	9.757	17,4	1.383
130	Maroko	31,2	75,1	126,8	2.434	4.108	26,1	1.005
131	Sao Tome & Principe	0,2	0,1	0,3	916	1.638	..	..
132	Buton	0,7	1,1	3,2	1.668	4.837	17,2	..
133	Laos	6,1	4,1	12,7	701	2.165	14	61
134	India	1,164,70	1.176,90	3.096,90	1.046	2.753	10,7	..
135	Kepulauan Solomon	0,5	0,4	0,9	784	1.725	..	..
136	Kongo	3,6	7,6	13,2	2.030	3.511	8,1	39
137	Kamboja	14,3	8,3	26	578	1.802	12,4	..
138	Mianmar	49,1		41	..	904	18,1	..
139	Komoros	0,6	0,4	0,7	714	1.143	24,1	..
140	Yaman	22,3	22,5	52,3	1.006	2.335	32,8	..
141	Pakistan	173,2	142,9	405,6	879	2.496	11,2	..
142	Swaziland	1,2	2,9	5,5	2.521	4.789	..	484
143	Angola	17,6	61,4	91,3	3.623	5.385	..	..
144	Nepal	28,3	10,3	29,5	367	1.049	14,9	119
145	Madagaskar	18,6	7,4	18,3	375	932	16,4	57
146	Banglades	157,8	68,4	196,7	431	1.241	14,2	115
147	Kenya	37,8	24,2	57,9	645	1.542	17,9	237

Ran-king IPM	Negara	Jumlah Penduduk* (Juta)	PDB** (AS\$ Milyar)	PDB** (PPP AS\$ Milyar)	PDB per Kapita** (AS\$)	PDB per Kapita** (PPP AS\$)	% Angg Penddk dr APBN ***	Angg Pem utk Dikdas per Siswa***(PPP AS\$)
148	Papua Nugini	6,4	6,3	13,2	990	2.084	„	..
149	Haiti	9,7	6,7	11,1	699	1.155	„	..
150	Sudan	40,4	46,2	80,4	1.199	2.086	„	..
151	Tanzania	41,3	16,2	48,8	400	1.208	„	..
152	Ghana	22,9	15,1	31,3	646	1.334	„	300
153	Kamerun	18,7	20,7	39,4	1.116	2.128	17	107
154	Mauritania	3,1	2,6	6	847	1.927	10,1	224
155	Jibouti	0,8	0,8	1,7	997	2.061	22,4	..
156	Lesotho	2	1,6	3,1	798	1.541	29,8	663
157	Uganda	30,6	11,8	32,7	381	1.059	18,3	110
158	Nigeria	147,7	165,5	291,4	1.118	1.969	„	..
159	Togo	6,3	2,5	5,2	380	788	13,6	..
160	Malawi	14,4	3,6	10,6	256	761	„	90
161	Benin	8,4	5,4	11,8	601	1.312	17,1	120
162	Timor-Leste	1,1	0,4	0,8	373	717	„	..
163	Côte d'Ivoire	20,1	19,8	32,6	1.027	1.690	21,5	..
164	Zambia	12,3	11,4	16,2	953	1.358	14,8	55
165	Eritrea	4,8	1,4	3	284	626	„	99
166	Senegal	11,9	11,2	20,7	900	1.666	26,3	299
167	Ruanda	9,5	3,3	8,4	343	866	19	109
168	Gambia	1,6	0,6	2,1	377	1.225	8,9	..
169	Liberia	3,6	0,7	1,3	198	362	„	..
170	Guinea	9,6	4,6	10,7	487	1.140	25,6	..
171	Etiopia	78,6	19,4	61,6	245	779	23,3	130
172	Mozambique	21,9	7,8	17,1	364	802	21	156
173	Guinea-Bissau	1,5	0,4	0,8	211	477	„	..
174	Burundi	7,8	1	2,9	115	341	17,7	132
175	Chad	10,6	7,1	15,9	658	1.477	10,1	54
176	Kongo	62,5	9	18,6	143	298	„	..
177	Burkina Faso	14,7	6,8	16,6	458	1.124	15,4	328
178	Mali	12,4	6,9	13,4	556	1.083	16,8	183
179	Afrika Tengah	4,3	1,7	3,1	394	713	„	88
180	Sierra Leone	5,4	1,7	4	284	679	„	..
181	Afghanistan	26,3	8,4	26,1	..	1.054	„	..
182	Nigeria	14,1	4,2	8,9	294	627	17,6	178

**Sumber:**

\* UN (2009e). "World Population Prospects: The 2008 Revision". New York: Department of Social and Economic Affairs.

\*\* World Bank (2009d). "World Development Indicators". Washington DC: World Bank.

\*\*\* UNESCO Institute for Statistics (2009c). "Data Centre Education Module." UNESCO.



**Tabel 7 Perbandingan Persentase Anggaran Pendidikan dari PDB antar Negara**

Negara	% Angg Pend dari PDB
<b>A. UNESCO Tahun 1990-an</b>	
1. Negara Berkembang	4,2 %
2. Negara Maju	5,2 %
3. America Utara	5,7 %
4. Asia/Oceania	4,8 %
5. Eropa	5,0 %
6. Indonesia	< 2 %
<b>B. UNDP 2002</b>	
1. Indonesia	1,3 %
2. Malaysia	7,9 %
3. Filipina	3,2 %
4. Thailand	5,0 %
<b>C. World Bank 2003</b>	
1. Korea Selatan	5,3 %
2. Vietnam	2,8 %
3. Indonesia	1,4 %
<b>D. Hasil Estimasi dari Sumber Data BPS dan Kemenkeu 2005-2011</b>	
1. Indonesia	3,2-3,7%
<b>E. Rekomendasi UNESCO</b>	
	6%

Jelas acuan APBN untuk menentukan anggaran pendidikan bukan pilihan yang tepat, acuan PDBlah yang mestinya digunakan untuk menentukan anggaran pendidikan. Hal ini demikian karena persentase APBN dari PDB di Indonesia relatif rendah dan terus menurun dibandingkan dengan yang negara-negara lain dikarenakan bagian cukup besar dari PDB adalah bukan milik bangsa Indonesia sendiri dan persentase pajak terhadap PDB, di mana pajak merupakan sumber sangat utama APBN, termasuk yang terendah di dunia yaitu hanya sekitar 13 persen dibandingkan dengan 18,2 persen di rata-rata negara berkembang dan 37,9 persen di rata-rata negara maju. Apalagi UNESCO juga merekomendasikan agar anggaran pendidikan itu minimal 6 persen dari PDB.

Selain anggaran pendidikan yang rendah, alokasi anggaran pendidikan belum optimal yang berdampak pada rendahnya alokasi anggaran pendidikan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakjelasan pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pola pendanaan untuk menutup biaya-biaya pendidikan belum tepat dan efektif. Tabel 8 dapat menunjukkan hal ini.

**Tabel 8 Perbandingan Biaya dan Anggaran Pendidikan Tahun 2011**

Jenjang dan Komponen Biaya Pendidikan	Biaya Satuan (Rp)	Jml Siswa (Orang)	Biaya Total (Rp Trilyn)	Lembaga	Anggaran (Rp Trilyn)
<b>A. SD/MI</b>		29.998.044		<b>I. ALOKASI PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>89,744</b>
1. Investasi Sumber Daya Manusia	20.373		0,611		
2. Investasi Sarana dan Prasarana	788.200		23,644	<b>A. KEMENDIKNAS</b>	<b>55,582</b>
3. Operasional Personalia	1.847.423		55,419	1. PAUD	0,368
4. Operasional Non Personalia	560.730		16,821	2. DIKDAS	5,824
<b>Total</b>	<b>3.216.726</b>		<b>96,495</b>	3. DIKMEN	3,189
				4. PNFI	2,884
<b>B. SMP/MTs</b>		11.534.458		5. DIKTI	20,161
1. Investasi Sumber Daya Manusia	32.924		0,380	6. LAYANAN BANTUAN PENDIDIKAN	12,980
2. Investasi Sarana dan Prasarana	1.603.270		18,493	7. LITBANG	1,260
3. Operasional Personalia	2.479.113		28,595		
4. Operasional Non Personalia	666.638		7,689	<b>B. KEMENAG</b>	<b>27,273</b>
<b>Total</b>	<b>4.781.945</b>		<b>55,157</b>	1. DIKDAS	3,319
				2. DIKMEN	0,533
<b>C. SMA/MA</b>		4.774.472		3. DIKTI	2,084
1. Investasi Sumber Daya Manusia	46.843		0,224	4. LAYANAN BANTUAN PENDIDIKAN	2,725
2. Investasi Sarana dan Prasarana	1.903.414		9,088	5. DIK KEAGAMAAN	3,029
3. Operasional Personalia	3.431.196		16,382	6. LAINNYA	14,584
4. Operasional Non Personalia	851.815		4,067		
<b>Total</b>	<b>6.233.268</b>		<b>29,761</b>	<b>C. 14 K/L LAINNYA</b>	<b>6,899</b>
<b>D. SMK</b>		3.095.704		<b>II. TRANSFER KE DAERAH</b>	<b>159,701</b>
1. Investasi Sumber Daya Manusia	59.459		0,184		
2. Investasi Sarana dan Prasarana	2.661.715		8,240	<b>A. DANA PERIMBANGAN</b>	<b>115,094</b>
3. Operasional Personalia	3.938.895		12,194	1. DBH Pendidikan	0,763
4. Operasional Non Personalia	1.514.623		4,689	2. DAK Pendidikan	10,041
<b>Total</b>	<b>8.174.692</b>		<b>25,306</b>	3. DAU Pendidikan	104,290
<b>Alternatif Alokasi Anggaran Pendidikan 2011</b>				<b>B. DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN</b>	<b>43,607</b>
1. Dikdas (41,5 juta peserta didik)			151,653	1. Dana Otsus Pendidikan	2,706
2. Dikmen (7,9 juta peserta didik)			35,489	2. Tambahan Penghasilan utk Gru PNSD	3,696
3. PT (5 juta peserta didik)			21,000	3. Tambahan DAU utk Tunj Profesi Guru	18,538
4. PAUDNFI			4,475	4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16,812
5. Pendidikan kedinasan			6,899	5. Dana Insentif Daerah	1,388
6. Bantuan pendidikan bagi peserta didik miskin (6,474 jt)			6,828		
<b>Total Penyelenggaraan</b>			<b>226,344</b>	<b>C. DANA PENGEMB PENDDKN NAS'L</b>	<b>1,000</b>
7. Pengelolaan pendidikan di pemerintahan			22,634		
<b>Total Penyelenggaraan dan Pengelolaan</b>			<b>248,978</b>	<b>TOTAL</b>	<b>248,979</b>

Bagian kiri-atas pada Tabel 8 menyajikan estimasi biaya-biaya pendidikan di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK pada tahun 2011, bagian kiri bawah menyajikan alternatif pendanaan yang optimal untuk menutup biaya-biaya pendidikan tersebut, dan bagian kanannya adalah alokasi anggaran pendidikan tahun 2011. Biaya total SD/MI adalah Rp96,495 trilyun (dengan biaya satuan Rp3,217 juta dan jumlah peserta didik 30 juta orang), biaya total SMP/MTs adalah Rp55,157 trilyun (dengan biaya satuan Rp4,782 juta dan jumlah peserta didik 11,53 juta orang), biaya total SMA/MA adalah Rp29,761 trilyun (dengan biaya satuan Rp6,233 juta dan jumlah peserta didik 4,77 juta orang), dan biaya total SMK adalah Rp25,306 trilyun (dengan biaya satuan Rp8,175 juta dan jumlah peserta didik 3,1 juta orang). (Lihat Bagian kiri-atas Tabel 8).

Anggaran pendidikan total tahun 2011 adalah sebesar Rp249 trilyun yang merupakan 20,25 persen dari APBN. (Lihat bagian kanan Tabel 8). Agar penggunaan dana pendidikan yang ada ini optimal, mestinya dana pendidikan ini digunakan untuk mendanai pendidikan sebagai berikut (lihat bagian kiri-bawah Tabel 8):

- 1) Mendanai keseluruhan pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat sebesar Rp151,653 trilyun untuk menutup biaya operasional personalia sebesar Rp84 trilyun, biaya operasional non personalia sebesar Rp24,5 trilyun, biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp1 trilyun, dan biaya investasi sarana dan prasarana sebesar Rp42,137 trilyun. Dengan demikian, pendidikan dasar dapat diseleenggarakan tanpa memungut iuran dari orang tua/wali peserta didik alias gratis. (Lihat juga rinciannya pada Tabel 9). Alokasi dana Pemerintah tersebut dilakukan dengan mekanisme: a) DAK Pendidikan untuk mendanai investasi lahan, investasi sarana dan prasarana non lahan, dan investasi sumber daya pendidikan; b) DAU Pendidikan untuk mendanai operasi personalia (gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan); dan c) BOS yang melalui transfer ke daerah untuk mendanai biaya operasi non personalia. Pengalokasian dana kepada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat untuk investasi non lahan, investasi sumber daya manusia, dan operasi non personalia dilakukan dalam bentuk hibah seperti diamanatkan dalam PP Pendanaan Pendidikan. Penggunaan dana publik ini harus akuntabel, transparan, dan efisien.
- 2) Mendanai pendidikan menengah sebesar Rp35,489 trilyun. Penggunaan dana sebesar Rp35,489 tersebut adalah sebagai berikut. (Lihat Tabel 10 untuk perhitungannya):
  - a) Diberikan kepada SMA Negeri yang memiliki peserta didik sekitar 2,006 juta anak sebanyak Rp10 trilyun untuk menutup 80 persen dari keseluruhan biaya-biaya investasi lahan, investasi sarana dan prasarana non lahan, investasi sumber daya manusia, operasi personalia, dan operasi non personalia yang semuanya berjumlah Rp12,502 trilyun. Sisa biaya sebesar 20 persen atau Rp2,502 trilyun menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik atau masyarakat lain dalam bentuk kontribusinya untuk menanggung biaya-biaya investasi non lahan, investasi sumber daya manusia, dan operasi non personalia yang nilainya sekitar Rp100 ribu per bulan.
  - b) Diberikan kepada SMA Swasta yang memiliki peserta didik sekitar 1,851 juta anak sebanyak Rp5,7 trilyun untuk menutup 50 persen dari keseluruhan biaya-biaya investasi lahan, investasi sarana dan prasarana non lahan, investasi sumber daya manusia, operasi personalia, dan operasi non personalia yang semuanya berjumlah Rp11,540 trilyun. Sisa biaya sebesar 50 persen atau Rp5,770 trilyun menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik dan masyarakat dalam bentuk kontribusinya untuk menanggung biaya-biaya investasi sarana dan prasarana lahan, investasi sumber daya manusia, operasi personalia dan operasi non personalia yang nilainya sekitar Rp260 ribu per bulan.
  - c) Diberikan kepada MA Negeri yang memiliki peserta didik sekitar 138 ribu anak sebanyak Rp0,686 trilyun untuk menutup 80 persen dari keseluruhan biaya-biaya

investasi lahan, investasi sarana dan prasarana non lahan, investasi sumber daya manusia, operasi personalia, dan operasi non personalia yang semuanya berjumlah Rp0,858 trilyun. Sisa biaya sebesar 20 persen atau Rp0,172 trilyun menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik atau masyarakat lain dalam bentuk kontribusinya untuk menanggung biaya-biaya investasi non lahan, investasi sumber daya manusia, dan operasi non personalia yang nilainya sekitar Rp100 ribu per bulan.

- d) Diberikan kepada MA Swasta yang memiliki peserta didik sekitar 780 ribu anak sebanyak Rp2,430 trilyun untuk menutup 50 persen dari keseluruhan biaya-biaya investasi lahan, investasi sarana dan prasarana non lahan, investasi sumber daya manusia, operasi personalia, dan operasi non personalia yang semuanya berjumlah Rp4,860 trilyun. Sisa biaya sebesar 50 persen atau Rp2,430 trilyun menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik dan masyarakat dalam bentuk kontribusinya untuk menanggung biaya-biaya investasi sarana dan prasana lahan, investasi sumber daya manusia, operasi personalia dan operasi non personalia yang nilainya sekitar Rp260 ribu per bulan.
- e) Diberikan kepada SMK Negeri yang memiliki peserta didik sekitar 1,610 juta anak sebanyak Rp10,527 trilyun untuk menutup 80 persen dari keseluruhan biaya-biaya investasi lahan, investasi sarana dan prasarana non lahan, investasi sumber daya manusia, operasi personalia, dan operasi non personalia yang semuanya berjumlah Rp13,159 trilyun. Sisa biaya sebesar 20 persen atau Rp2,632 trilyun menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik atau masyarakat lain dalam bentuk kontribusinya untuk menanggung biaya-biaya investasi non lahan, investasi sumber daya manusia, dan operasi non personalia yang nilainya sekitar Rp136 ribu per bulan.
- f) Diberikan kepada SMK Swasta yang memiliki peserta didik sekitar 1,486 juta anak sebanyak Rp6,074 trilyun untuk menutup 50 persen dari keseluruhan biaya-biaya investasi lahan, investasi sarana dan prasarana non lahan, investasi sumber daya manusia, operasi personalia, dan operasi non personalia yang semuanya berjumlah Rp12,147 trilyun. Sisa biaya sebesar 50 persen atau Rp6,073 trilyun menjadi tanggung jawab orang tua/wali peserta didik dan masyarakat dalam bentuk kontribusinya untuk menanggung biaya-biaya investasi sarana dan prasana lahan, investasi sumber daya manusia, operasi personalia dan operasi non personalia yang nilainya sekitar Rp340 ribu per bulan.

Mekanisme pengalokasian dan pendistribusian dana pendidikan untuk pendidikan menengah ini sama dengan mekanisme pengalokasian dan pendistribusian dana pendidikan untuk pendidikan dasar seperti yang diuraikan di atas.

- 3) Mendanai pendidikan tinggi sebesar Rp21 trilyun. Dana Rp21 trilyun untuk pendidikan tinggi ditambah dengan 10 persennya untuk biaya pengelolaannya adalah sedikit lebih tinggi dari pada dana pendidikan tinggi yang dianggarkan pada tahun 2011.
- 4) Mendanai pendidikan anak usia dini dan non formal dan informal (PAUDFNI) sebesar Rp4,475 trilyun.
- 5) Memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik yang orang tua/walinya kurang mampu sebesar Rp6,899 trilyun. Dana bantuan pendidikan ini dapat digunakan untuk menutup sebagian biaya pribadi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan PT yang orang tuanya kurang mampu yang dapat merupakan 13 persen dari keseluruhan peserta didik. (Lihat Tabel 10 untuk penghitungannya).
- 6) Mendanai biaya pengelolaan pendidikan sebesar Rp22,634 trilyun yang merupakan 10 persen dari total biaya penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Dana Rp21,771 trilyun ini mestinya dapat menutup seluruh biaya pengelolaan pendidikan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dan mencakup biaya-biaya operasi personalia, operasi non

personalia, investasi sumber daya manusia, dan investasi sarana dan prasarana di pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan.

**Tabel 9 Alternatif Pembiayaan dan Pendanaan Pendidikan Dasar Gratis**

Komponen Biaya	Nilai dalam Rp Trilyun			Tanggung Jawab	Mekanisme	Bentuk
	SD/MI	SMP/MTs	Total			
1. Biaya Operasional Personalia	55,419	28,595	84,014	Pem Pusat	Dekonsentrasi	Langsung ke pendidik dan TK
2. Biaya Operasional Non Personalia	16,821	7,689	24,510	Pem Kab/Kota	BOS	Hibah ke sekolah/madrasah
3. Biaya Investasi SDM	0,611	0,380	0,991	Pem Prov	DAK Pendidikan	Hibah ke provinsi
4. Biaya Investasi Sarpras	23,644	18,493	42,137	Pem Kab/Kota	DAK Pendidikan	Hibah ke kab/kota utk lahan Hibah ke sekolah utk non lahan
<b>Sub Total</b>	<b>96,495</b>	<b>55,157</b>	<b>151,652</b>			

**Tabel 10 Alternatif Pembiayaan dan Pendanaan Pendidikan Menengah 2001**

Jenis Dikmen	Jml Peserta Didik	Biaya Satuan (Rp Ribu)					Biaya Total (Rp Trilyun)					Subsidi Pemerintah	
		Invt SDM	Invt SP	Opr Prsn	Opr N Prsn	Selu-ruh	Invt SDM	Invt SP	Opr Prsn	Opr N Prsn	Selu-ruh	%	Rp (Trilyun)
SMAN	2.005.767	47	1.903	3.431	852	6.233	0,094	3,818	6,882	1,709	12,502	80	10,002
SMAS	1.851.478	47	1.903	3.431	852	6.233	0,087	3,524	6,353	1,577	11,541	50	5,770
MAN	137.584	47	1.903	3.431	852	6.233	0,006	0,262	0,472	0,117	0,858	80	0,686
MAS	779.643	47	1.903	3.431	852	6.233	0,037	1,484	2,675	0,664	4,860	50	2,430
SMKN	1.609.766	59	2.662	3.939	1.515	8.175	0,096	4,285	6,341	2,438	13,159	80	10,527
SMKS	1.485.938	59	2.662	3.939	1.515	8.175	0,088	3,955	5,853	2,251	12,147	50	6,074
<b>Total</b>	<b>7.870.176</b>										<b>55,067</b>		<b>35,489</b>

**Tabel 11 Bantuan Pendidikan untuk Peserta Didik Miskin**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Miskin (Orang)*	Nilai Bantuan Pendidikan per Peserta Didik (Rp)	Nilai Total Bantuan Pendidikan (Rp Trilyun)
SD/MI	3.899.746	750.000	2,925
SMP/MTs	1.499.480	1.100.000	1,649
SMA	501.442	1.450.000	0,727
MA	119.240	1.450.000	0,173
SMK	402.442	1.750.000	0,704
PT	325.000	2.000.000	0,650
<b>Total</b>	<b>6.747.348</b>		<b>6,828</b>

**Keterangan:**

\*Jumlah peserta didik miskin diperkirakan adalah 13 persen dari jumlah peserta didik di masing-masing jenjang.

Namun, kemungkinan alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan yang optimal dan efisien tersebut nampaknya tidak terjadi pada pola alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan tahun 2011. Pada bagian kanan Tabel 7 kita dapat melihat pola alokasi anggaran pendidikan 2011. Dari total dana pendidikan sebesar Rp249 trilyun, dialokasikan ke Pemerintah Pusat sebesar Rp89,744 trilyun dan ke Pemerintah Daerah sebesar Rp159,701 trilyun. Dana pendidikan di Pemerintah Pusat tersebut dialokasikan di Kementerian

Pendidikan Nasional sebesar Rp55,582 trilyun, Kementerian Agama sebesar Rp27,273 trilyun, dan kementerian/lembaga lain sebesar Rp6,899 trilyun. Dana pendidikan di Pemerintah Daerah terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp115,094 trilyun, dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp43,607 trilyun, dan dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp1 trilyun. Dengan pola alokasi dana seperti ini dan tidak adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dan pasti antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendanai komponen biaya yang mana, terjadi tumpang tindih dan kevakuman dalam pendidikan pendidikan serta tingginya biaya pengelolaan/birokrasi di pemerintahan yang kesemuanya itu mengakibatkan lebih rendahnya ketersediaan dana pendidikan dan ketidakmerataan distribusi dana pendidikan bagi satuan pendidikan dan peserta didik.

Cara pegalokasian dana seperti ini menyebabkan juga dana yang dialokasikan menjadi lebih rendah daripada potensinya. Hal ini dapat dilihat seperti berikut.

- 1) Untuk pendidikan dasar, dana pendidikan yang terlihat dialokasikan adalah Rp5,824 trilyun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rp3,319 trilyun dari Kementerian Agama, Rp10,041 trilyun dari DAK Pendidikan, sebagian DAU pendidikan (dan tambahannya) untuk gaji dan tunjangan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan dasar yang diangkat pemerintah, dan sumber-sumber lain dari dana pendidikan yang dialokasikan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sangat sulit untuk diketahui. Yang jelas jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk pendidikan dasar pada tahun 2011 tersebut jauh lebih rendah dari pada yang semestinya bisa disediakan seperti yang diuraikan di atas, yaitu sebesar Rp151,653 trilyun ditambah dengan 10 persen untuk pengelolaan pendidikan.
- 2) Untuk pendidikan menengah, dana pendidikan yang terlihat dialokasikan adalah Rp3,189 trilyun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rp0,533 trilyun dari Kementerian Agama, sebagian DAU pendidikan (dan tambahannya) untuk gaji dan tunjangan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan menengah yang diangkat pemerintah, dan sumber-sumber lain dari dana pendidikan yang dialokasikan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sangat sulit untuk diketahui. Yang jelas jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk pendidikan menengah pada tahun 2011 tersebut jauh lebih rendah dari pada yang semestinya bisa disediakan seperti yang diuraikan di atas, yaitu sebesar Rp35,489 trilyun ditambah dengan 10 persen untuk pengelolaan pendidikan.
- 3) Untuk pendidikan anak usia dini dan non formal dan informal, dana pendidikan yang terlihat dialokasikan adalah Rp2,884 trilyun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya dapat disediakan yaitu sebesar Rp4,475 trilyun ditambah dengan 10 persen untuk pengelolaan pendidikan.
- 4) Untuk bantuan pendidikan bagi peserta didik miskin, dana pendidikan yang dialokasikan adalah jauh lebih rendah dari yang seharusnya dapat disediakan seperti yang diuraikan di atas yaitu sebesar Rp6,828 trilyun ditambah dengan 10 persen untuk pengelolaan pendidikan.

Selain alokasi dana yang lebih rendah dari potensinya, pola pengalokasian dana pendidikan yang terjadi sekarang ini di mana semua tingkat pemerintahan mendanai semua komponen biaya pendidikan tanpa adanya kejelasan dan ketegasan pembagian tanggung jawab antar tingkat pemerintahan serta kurang atau tidak adanya koordinasi antar sumber dana juga menyebabkan tumpang tindih dan kevakuman pendanaan pendidikan. Sebagian sekolah tertentu mendapat dana dari berbagai sumber dan sebagian sekolah yang lain kurang atau tidak mendapat alokasi dana. Sebagian komponen biaya tertentu didanai oleh berbagai sumber dan sebagian komponen biaya pendidikan yang lain kurang atau tidak didanai.

Lebih lanjut adalah bahwa pola pendanaan yang terjadi tidak didasarkan pada prioritas kebutuhan dan biaya pendidikan. Sumber daya pendidikan yang kekurangan dan dibutuhkan

tidak dipenuhi, sedangkan sumber daya pendidikan yang tidak kekurangan atau tidak dibutuhkan disediakan.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Peraturan perundang-undangan meskipun sudah memetakan seluruh biaya pendidikan dan menyebutkan penanggung jawab untuk menutup biaya pendidikan tersebut yaitu pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat, tetapi belum cukup jelas dan tegas memberikan pembagian tanggung jawab terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga menimbulkan tumpang tindih dan kevakuman dalam pendanaan pendidikan.
- 2) Meskipun anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen dari APBN sejak tahun 2009 dan secara nominal mengalami kenaikan yang sangat berarti dibanding tahun-tahun sebelumnya namun anggaran pendidikan tersebut masih rendah dan bila anggaran pendidikan tersebut dibagi menjadi per peserta didik per tahun anggaran pendidikan tersebut tergolong yang terendah di dunia. Demikian juga persentasenya yang hanya 3,2-3,7 persen dari PDB adalah lebih rendah dari pada yang di negara berkembang lain apalagi dibandingkan dengan yang di negara-negara maju serta jauh di bawah rekomendasi UNESCO yang minimal 6 persen dari PDB.
- 3) Anggaran pendidikan yang masih rendah itupun belum dialokasikan secara efisien dan optimal. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2011 memperlihatkan ketidakjelasan pembagian tanggung jawab pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dana yang dialokasikan ke satuan pendidikan menjadi lebih rendah lagi serta terjadi tumpang tindih, dan ketidak-merataan.
- 4) Dengan pola alokasi dana yang ada, pendidikan menerima dana yang lebih rendah dari pada yang seharusnya diterima apabila alokasi dana pendidikan itu dilakukan secara optimal dan efisien.
- 5) Penggunaan dana pendidikan yang sudah lebih rendah itupun belum dilakukan menurut kebutuhan dan prioritas pendidikan.

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Agar peraturan perundang-undangan disempurnakan untuk memberikan pembagian tanggung jawab yang jelas dan pasti antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dan kevakuman dalam pendanaan pendidikan.
- 2) Anggaran pendidikan terus ditingkatkan dan mengacu pada rekomendasi UNESCO yaitu minimal 6 persen dari PDB agar memenuhi prinsip kecukupan dan prinsip keberlanjutan seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Perlu dikembangkan formula alokasi anggaran pendidikan yang berkeadilan dan mekanisme alokasi dan distribusi yang efisien.
- 4) Anggaran pendidikan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp249 triliun dialokasikan untuk:
  - a) pendidikan dasar sebesar Rp151,653 triliun sehingga pendidikan dasar dapat diselenggarakan tanpa memungut biaya dari peserta didik atau gratis;
  - b) pendidikan menengah sebesar Rp35,489 triliun sehingga dapat menutup 80 persen biaya pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah (SMA, MA, dan SMK negeri) dan 50 persen biaya pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat (SMA, MA, dan SMK swasta);
  - c) pendidikan tinggi sebesar Rp21 triliun;

- d) pendidikan anak usia dini dan non formal dan informal sebesar Rp4,362 trilyun,
  - e) pendidikan kedinasan sebesar Rp6,899 trilyun;
  - f) bantuan pendidikan bagi peserta didik miskin sebesar Rp6,841 trilyun;
  - g) peneglolaan pendidikan di pemerintahan sebesar Rp22,634 trilyun.
- 5) Dana pendidikan ini harus dialokasikan berdasarkan biaya pendidikan dan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas serta dengan cara pengalokasian yang efisien dan optimal.
  - 6) Penggunaan dana pendidikan publik yang transparan dan akuntabel baik ditingkat pemerintah (pusat dan daerah) maupun di tingkat satuan pendidikan, termasuk dijamin dan dipastikannya adanya akses publik akan anggaran dan penggunaan dan pendidikan publik melalui berbagai media yang layak termasuk internet.

## Daftar Pustaka

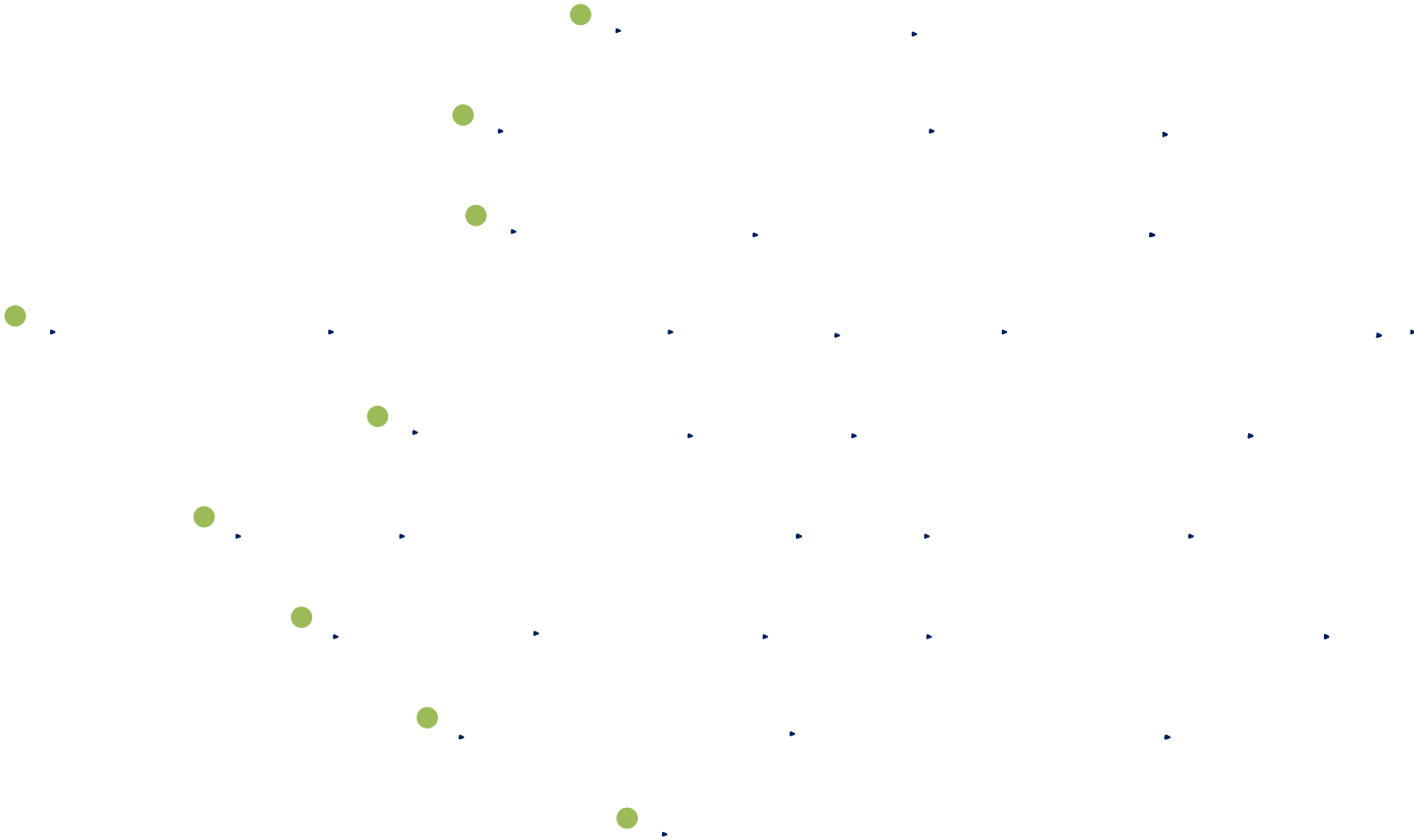
- Ghozali, Abbas; dkk. 2004. *Analisis Biaya Pendidikan Dasar dan* . Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- Ghozali, Abbas; dkk. 2005. *Pendanaan Pendidikan dari APBN dan APBD*. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- Ghozali, Abbas; dkk. 2005. *Model Pendanaan dari Sumber Non APBN dan APBD*. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- Ghozali, Abbas; dkk. 2006. *Biaya Satuan Pendidikan Dasar*. Bank Dunia dan Bapenas.
- Ghozali, Abbas; dkk. 2007. *Inventarisasi Sumber Daya Pendidikan Dasar*. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- Ghozali, Abbas; dkk. 2008. *Biaya Operasi Pendidikan*. Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Ghozali, Abbas. 2009. *Biaya dan Pendanaan Pendidikan*. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

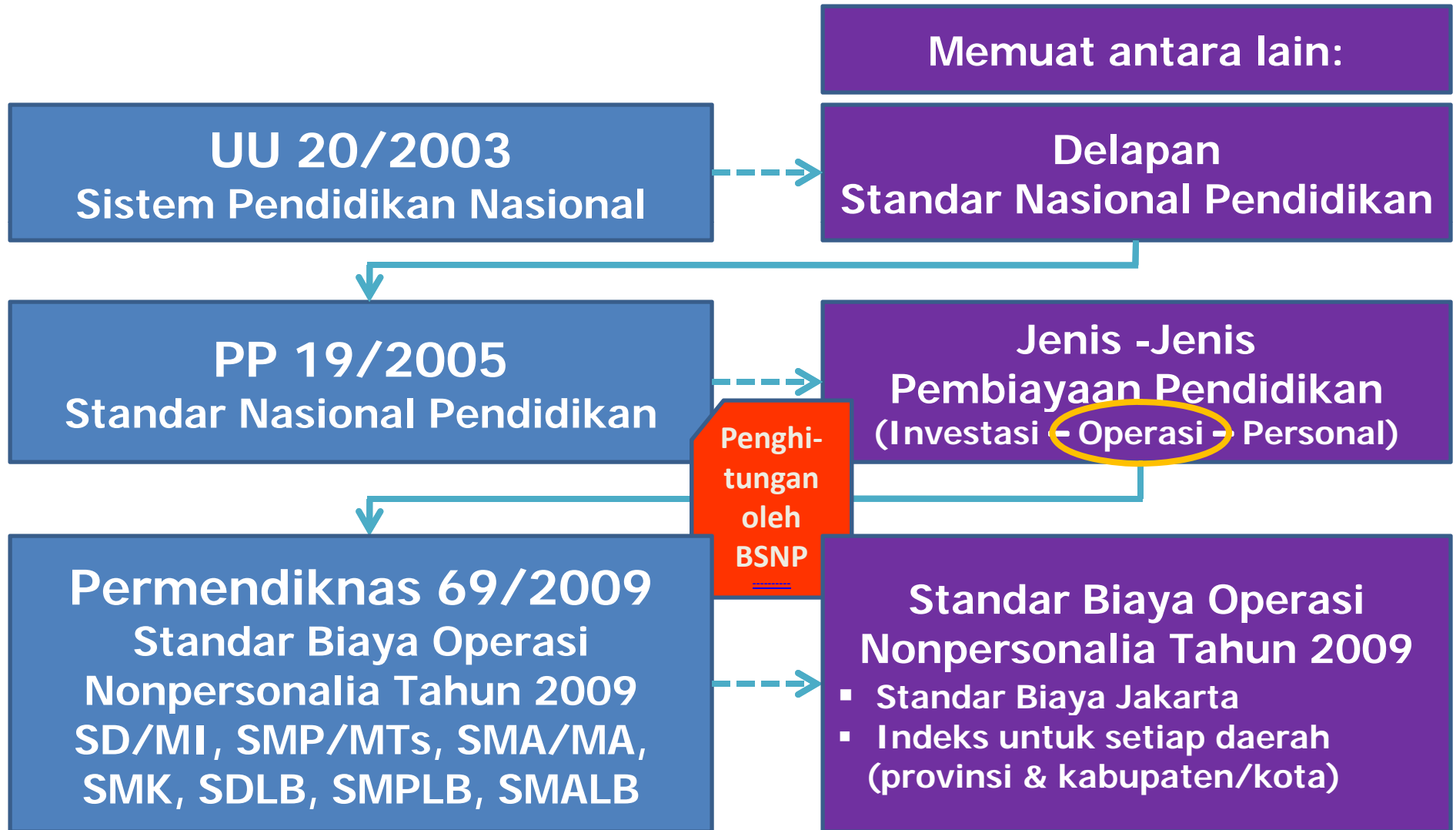


# **Sistem Pendanaan Pendidikan: Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Di Beberapa Propinsi**

**Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd.  
Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM)**

# Materi





## ❖ **Jenjang**

- SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA (3 Jurusan)
- SMK (76 Program Keahlian)
- SDLB (5 Tuna), SMPLB (5 Tuna), SMALB (4 Tuna)

## ❖ **Menggunakan Asumsi Dasar**

- Jumlah Rombel
- Jumlah siswa per Rombel
- Jumlah Kepsek , Wakepsek, dan guru
- Jumlah tenaga kependidikan
- Jumlah mata pelajaran

## ❖ **Menggunakan Standar Biaya Jakarta**

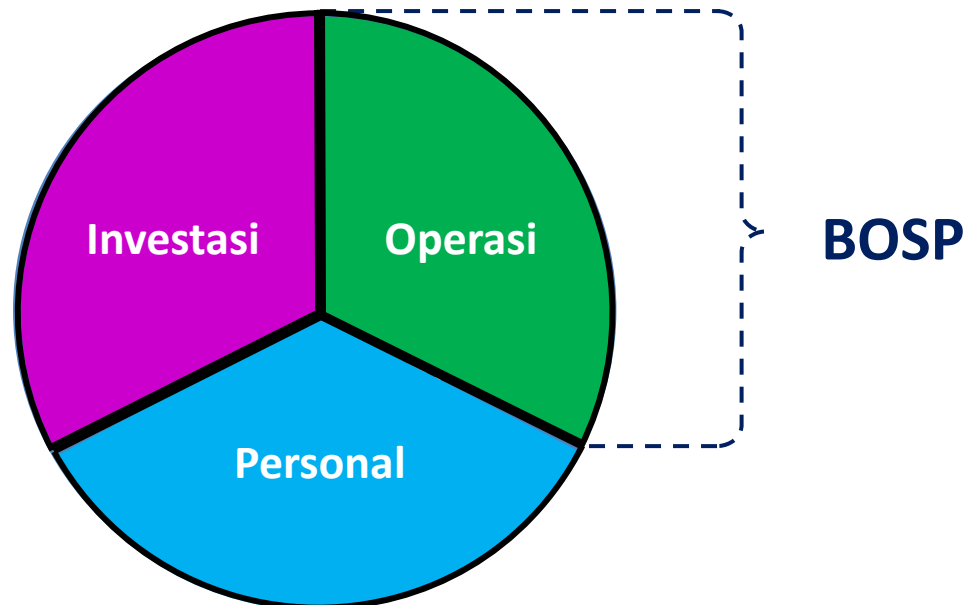
## ❖ **Ada Indeks untuk Setiap Daerah**

- Provinsi
- Kabupaten/kota

## ❖ Definisi

BOSP adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai **kegiatan operasi** satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan yang **sesuai Standar Nasional Pendidikan** dapat berlangsung secara teratur dan berkelanjutan

## ❖ BOSP dalam Pembiayaan Pendidikan (PP 19/2005)



❖ **Didasarkan pada metode BSNP (2006 & 2009)**

- Yang dihitung adalah biaya operasi nonpersonalia minimal
- Dihitung berdasarkan standar-standar dalam PP 19/2005 terutama Standar Jumlah dan Mutu
- Dihitung dengan menggunakan asumsi dasar

❖ **Disesuaikan dengan keadaan daerah**

- Asumsi dasar
- Kegiatan
- Komponen dan subkomponen biaya
- Harga satuan

❖ **BSNP menggunakan Pendekatan Biaya, pada 2011 DBE 1 USAID menggunakan Pendekatan Kegiatan.**

Uraian	BSNP (2006 & 2009)	DBE 1 USAID (2011)
<b>Pendekatan</b>	Pendekatan Biaya	Pendekatan Kegiatan
<b>Penghitungan</b>		
<b>- Biaya Personalia</b>	1. Gaji 2. Tunjangan	<i>(tidak dihitung)</i>
<b>- Biaya Nonpersonalia</b>	1. Komponen Biaya... <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Subkomponen Biaya ...</li> <li>▪ Subkomponen Biaya ...</li> <li>▪ Subkomponen Biaya ...</li> </ul> 2. Komponen Biaya... <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Subkomponen Biaya ...</li> <li>▪ Subkomponen Biaya ...</li> <li>▪ Subkomponen Biaya ...</li> </ul> 3. Komponen Biaya... <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Subkomponen Biaya ...</li> <li>▪ Subkomponen Biaya ...</li> <li>▪ Subkomponen Biaya ...</li> <li>▪ Subkomponen Biaya ...</li> </ul>	<b>1. Standar .....</b> <b>1.1. Kegiatan .....</b> Komponen Biaya ..... a. Subkomponen Biaya... Komponen Biaya... <b>2. Standar .....</b> <b>2.1. Kegiatan .....</b> Komponen Biaya ..... a. Subkomponen Biaya... <b>2.1. Kegiatan .....</b> Komponen Biaya ..... a. Subkomponen Biaya... b. Subkomponen Biaya...

## etode enghitungan

Jenis Biaya	2006*	2009**
<b>1. Biaya Personalia</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gaji</li><li>2. Tunjangan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gaji</li><li>2. Tunjangan</li></ol>
<b>2. Biaya Nonpersonalia</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat tulis sekolah, bahan, dan alat habis pakai</li><li>2. Rapat-rapat</li><li>3. Transpor/perjalanan dinas</li><li>4. Penilaian (penggandaan soal)</li><li>5. Daya dan jasa</li><li>6. Pemeliharaan Sarpras</li><li>7. Pendukung pembinaan siswa</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat tulis sekolah</li><li>2. Daya dan jasa</li><li>3. Pemeliharaan dan perbaikan ringan</li><li>4. Transportasi</li><li>5. Konsumsi</li><li>6. Asuransi</li><li>7. Pembinaan siswa/ekstra kurikuler</li><li>8. Bahan dan alat habis pakai</li><li>9. Pelaporan</li></ol>

\* Hasil penghitungan tidak dipublikasi

\*\* Hasil penghitungan menjadi lampiran Permendiknas 69/2009



# etode enghitungan

Jenis Biaya	2011
1. Biaya Personalia	(Tidak dihitung)
2. Biaya Nonpersonalia	<b>1. Standar Isi</b> <b>1.1. Penyusunan KTSP, Silabus, dan RPP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Konsumsi</li><li>b. Alat tulis kantor (ATK)</li><li>c. Penggandaan</li><li>d. Penjilidan</li></ul> <b>2. Standar Proses</b> <b>2.1. Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b> <b>2.1.1. Pembelajaran PAKEM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Alat tulis kantor (ATK)</li><li>b. Alat dan bahan habis pakai</li><li>c. Alat dan bahan pembelajaran</li><li>d. Alat dan bahan praktikum</li><li>e. Bahan pembelajaran remedial</li><li>f. Bahan pembelajaran pengayaan</li></ul> <b>2.1.2. ....</b>

---

## Jenis Biaya

2011

---

### 2. Biaya Nonpersonalia (lanjutan)

#### 2.1.2. Penyelenggaraan Perpustakaan

- a. Alat tulis kantor (ATK)
- b. Alat dan bahan habis pakai

#### 2.1.3. Kegiatan Ekskul (Olahraga, Seni, Pramuka)

- a. Honorarium (uang lelah) pembimbing/pelatih
- b. Transpor pembimbing/pelatih
- c. Dokumentasi
- d. Konsumsi

#### 2.1.4. Kegiatan Pertandingan dan Perlombaan (Baris-Berbaris, Olahraga, Seni, Mapel Matematika, Mapel IPA, Porseni)

- a. Transpor pembimbing/pelatih
- b. Konsumsi
- c. Sewa kostum (khusus untuk seni)

#### 2.2. Pengawasan Proses Pembelajaran (oleh Kepsek dan Pengawas)

- a. Buku supervisi
- b. Penggandaan format supervisi
- c. Konsumsi (khusus untuk Pengawas)

3. ....

---

## Jenis Biaya

2011

---

### 2. Biaya Nonpersonalia (lanjutan)

### 3. Standar Penilaian

#### 3.1. Tes Formatif (Ulangan Harian)

- a. Penggandaan soal

#### 3.2. Ujian Tengah Semester (Ganjil, Genap)

- a. Penggandaan soal

#### 3.3. Tes Kemampuan Dasar Siswa Kelas III

- a. Penggandaan soal

#### 3.4. Ujian Akhir Semester (Ganjil, Genap)

- a. Penggandaan soal dan lembar jawaban

#### 3.5. Ujian Akhir Sekolah

- a. Penggandaan soal dan lembar jawaban
- b. Honorarium Pemeriksa

#### 3.6. Uji Coba Ujian Nasional

- a. Penggandaan soal
- b. Honorarium Pemeriksa
- c. Transpor Pengawas Ujian

#### 3.7. ...

---

## Jenis Biaya

2011

---

### 2. Biaya Nonpersonalia (lanjutan)

#### 3.7. Ujian Nasional

- a. Foto siswa kelas akhir
- b. Honorarium Penulis STK dan ijazah/STTB
- c. Penggandaan STK dan ijazah/STTB
- d. Map

#### 3.8. Pelaporan Hasil Evaluasi

##### 3.8.1. Rapat Internal

- a. Konsumsi

### 4. Standar Kompetensi Lulusan

#### 4.1. Kegiatan Keagamaan

##### 4.1.1. Peringatan Hari Besar Agama

- a. Honorarium Penceramah
- b. Sewa tenda
- c. Spanduk
- d. Konsumsi
- e. Dokumentasi

##### 4.1.2. Pesantren Kilat

- a. Honorarium Pemateri
- b. Transpor Panitia
- c. Konsumsi

##### 4.2. ...

---

## Jenis Biaya

2011

---

### 2. Biaya Nonpersonalia (lanjutan)

#### 4. 2. Penyuluhan Tentang Hidup Sehat

- a. Honorarium Narasumber
- b. Konsumsi

#### 4.3. UKS

- a. Paket P3K
- b. Konsumsi

### 5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### 5.1. Pelatihan PAKEM

- a. Honorarium Narasumber
- b. Konsumsi
- c. Materi pelatihan

#### 5.2. Peningkatan Kompetensi Guru Melalui KKG

- a. Transpor
- b. Materi pelatihan

#### 5.3. Peningkatan Kompetensi Kepsek Melalui MKKS

- a. Transpor
- b. Materi pelatihan

### 6. ....

---

## Jenis Biaya

---

2011

### 2. Biaya Nonpersonalia (lanjutan)

### 6. Standar Sarana dan Prasarana

- a. Pengecatan ruangan dan pagar sekolah
- b. Perbaikan atap bocor
- c. Perbaikan plafon ruangan sekolah
- d. Perbaikan pintu dan jendela
- e. Perbaikan ubin/keramik
- f. Perbaikan fasilitas WC
- g. Perbaikan meubeler
- h. Perbaikan peralatan kantor
- i. Perbaikan sanitasi sekolah
- j. Pemeliharaan taman sekolah
- k. Pemeliharaan lapangan olahraga
- l. Pemeliharaan fasilitas sekolah lainnya
- m. Pemeliharaan komputer laboratorium

### 7. Standar Pengelolaan

#### 7.1. Penyusunan RKT dan RKAS

- a. Transpor peserta
- b. Konsumsi
- c. Alat tulis kantor (ATK)

#### 7.2. ...

---

## Jenis Biaya

2011

---

### 2. Biaya Nonpersonalia (lanjutan)

#### 7. 2. Pelaksanaan PSB, Penjaringan Siswa Kelas I, dan Siswa Pindahan

- a. Honorarium Panitia
- b. Konsumsi (rapat dan kegiatan)
- c. Spanduk
- d. Buku folio
- e. Map
- f. Penggandaan formulir
- g. Foto siswa baru

#### 7.3. Meningkatkan Hubungan Kerja dengan Komsek

- a. Transpor (untuk Komsek)
- b. Konsumsi

#### 7.4. Meningkatkan dengan Masyarakat/Orang Tua Siswa

##### 7.4.1. Pertemuan dengan Orang Tua Siswa Baru

- a. Konsumsi

##### 7.4.2. Sosialisasi Ujian Nasional

- a. Konsumsi

8. ...

---

## Jenis Biaya

2011

---

### 2. Biaya Nonpersonalia (lanjutan)

### 8. Standar Pembiayaan

#### 8.1. Pelatihan Manajemen Keuangan Sekolah

- a. Transpor
- b. Konsumsi
- c. Alat tulis kantor (ATK)

#### 8.2. Pengelolaan Dana BOS

- a. Honorarium bulanan Bendahara (jika ada)
- b. Buku Kas Umum
- c. Transpor pengambilan dana BOS dari bank
- d. Penggandaan Laporan Pertanggungjawaban
- e. Penjilidan Laporan Pertanggungjawaban
- f. Transpor penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

#### 8.3. Administrasi Umum

- a. Alat tulis kantor (ATK)
  - b. Alat dan bahan habis pakai
  - c. Alat dan bahan kebersihan
  - d. Daya dan jasa
  - e. Konsumsi harian dan tamu
-



- ❖ **Keterbatasan Indeks Permendiknas 69/2009**
  - Mengacu pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
  - IKK dianggap belum mewakili indeks Biaya Operasional Pendidikan
- ❖ **Asumsi, Kegiatan, Komponen dan Subkomponen Biaya, serta Harga Satuan Jakarta belum tentu sesuai dengan keadaan daerah**

•  
•  
•

❖ **Bagi Pemerintah Daerah** (Pemprov, Pemkab/kota)  
menjadi acuan kebijakan pembiayaan pendidikan

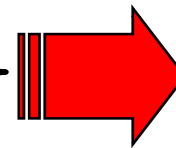
❖ **Bagi Sekolah**

- Acuan penyusunan RKAS dan RKT
- Dasar usulan permintaan tambahan dana (jika kebutuhan lebih besar dari dana yang tersedia) kepada pemerintah, masyarakat, orangtua siswa

❖ **Bagi Masyarakat/Orangtua Siswa**

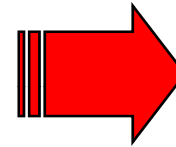
memberikan informasi tentang kebutuhan dana operasional di sekolah

<b>BOSP SD/MI</b> Rp600.000/ siswa/tahun	<b>Kekurangan</b> Rp224.000
	<b>BOS – Buku</b> Rp373.000/ siswa/tahun (397.000-24.000)
<b>Pembiayaan</b>	<b>Sumber Dana</b>



**Siapa yang menanggung?**

<b>BOSP SD/MI</b> <b>Rp600.000/</b> <b>siswa/tahun</b>	<b>Kekurangan</b> <b>Rp.....</b>
	<b>Pemda</b> <b>Rp.....</b>
	<b>BOS – Buku</b> <b>Rp373.000/</b> <b>siswa/tahun</b> <b>(397.000-24.000)</b>
<b>Pembiayaan</b>	<b>Sumber Dana</b>



**Siapa yang menanggung?**

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

<b>PROVINSI</b>	<b>JUMLAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>JENJANG YANG DIHITUNG</b>	<b>TAHUN PENGHITUNGAN</b>	<b>PELAKSANA PENGHITUNGAN</b>
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>10</b>	<b>SD/MI SMP/MTs SMA/MA</b>	<b>2008-2010</b>	<b>DBE 1 USAID</b>
	<b>7</b>		<b>Pemutakhiran 2011</b>	
<b>Aceh</b>	<b>22</b>	<b>SD/MI SMP/MTs SMA/MA</b>	<b>2008-2010</b>	<b>DBE 1 USAID</b>
<b>Papua/Papua Barat</b>	<b>4</b>	<b>SD/MI SMP/MTs SMA/MA</b>	<b>2011</b>	<b>UNICEF</b>
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>1</b>	<b>SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK</b>	<b>2011</b>	<b>UNM</b>

## Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 1.1. Hasil Penghitungan BOSP SD/MI Tahun 2008–2010 oleh **DBE 1 USAID**  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana Hanya dari BOS)

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP (2008-2010)	BOS (2009-2011)	BOS – BOSP
Jeneponto	6R-32SR	498.000	397.000	Kurang
Pangkep	6R-28SR	573.000	397.000	Kurang
Soppeng	6R-28SR	462.400	397.000	Kurang
Enrekang	6R-30SR	474.700	397.000	Kurang
Palopo	6R-30SR	579.200	400.000	Kurang
Makassar	6R-28SR	733.600	400.000	Kurang
Pinrang	6R-28SR	674.100	397.000	Kurang
Sidrap	6R-28SR	533.400	397.000	Kurang
Luwu	6R-28SR	650.500	397.000	Kurang
Barru	6R-28SR	577.000	397.000	Kurang
<b>BSNP*)</b>	<b>6R-28SR</b>	<b>440.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

\*Hasil penghitungan tidak dipublikasi

**Tabel 1.2. Penghitungan BOSP SD/MI Tahun 2008–2010 oleh **DBE 1 USAID**  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana dari BOS dan Pendidikan Gratis)**

<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>ASUMSI DASAR</b>	<b>BOSP (2008-2010)</b>	<b>BOS (2009-2011)</b>	<b>Pendidikan Gratis (PG) (2008-2011)</b>	<b>BOS &amp; PG</b>	<b>BOS &amp; PG – BOSP</b>
Jeneponto	6R-32SR	<b>498.000</b>	397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
Pangkep	6R-28SR	<b>573.000</b>	397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
Soppeng	6R-28SR	<b>462.400</b>	397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
Enrekang	6R-30SR	<b>474.700</b>	397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
Palopo	6R-30SR	<b>579.200</b>	400.000	48.000	<b>448.000</b>	Kurang
Makassar	6R-28SR	<b>733.600</b>	400.000	48.000	<b>448.000</b>	Kurang
Pinrang	6R-28SR	<b>674.100</b>	397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
Sidrap	6R-28SR	<b>533.400</b>	397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
Luwu	6R-28SR	<b>650.500</b>	397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
Barru	6R-28SR	<b>577.000</b>	397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
<b>BSNP*)</b>	<b>6R-28SR</b>	<b>440.000</b>	---	---	---	---

\*Hasil penghitungan tidak dipublikasi



**Tabel 1.3. Hasil Pemutakhiran Penghitungan BOSP SD/MI Tahun 2011  
oleh **DBE 1 USAID**  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana Hanya dari BOS)**

KABUPATEN/ KOTA	2008–2010		2011		BOS (2009-2011)	BOS – BOSP
	ASUMSI DASAR	BOSP	ASUMSI DASAR	BOSP		
Jeneponto	6R-32SR	498.000	---	<b>Tidak di- update</b>	<b>397.000</b>	Kurang
Pangkep	6R-28SR	573.000	6R-25SR	<b>614.300</b>	<b>397.000</b>	Kurang
Soppeng	6R-28SR	462.400	6R-28SR	<b>913.200</b>	<b>397.000</b>	Kurang
Enrekang	6R-30SR	474.700	6R-25SR	<b>693.400</b>	<b>397.000</b>	Kurang
Palopo	6R-30SR	579.200	6R-32SR	<b>734.000</b>	<b>400.000</b>	Kurang
Makassar	6R-28SR	733.600	6R-30SR	<b>649.000</b>	<b>400.000</b>	Kurang
Pinrang	6R-28SR	674.100	---	<b>Tidak di- update</b>	<b>397.000</b>	Kurang
Sidrap	6R-28SR	533.400	6R-32SR	<b>833.100</b>	<b>397.000</b>	Kurang
Luwu	6R-28SR	650.500	---	<b>Tidak di- update</b>	<b>397.000</b>	Kurang
Barru	6R-28SR	577.000	6R-20SR	<b>902.800</b>	<b>397.000</b>	Kurang
<b>Permendiknas 69/2009*</b>	---	---	<b>6R-28SR</b>	<b>580.000</b>	---	---

\*\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

**Tabel 1.4. Hasil Pemutakhiran Penghitungan BOSP SD/MI Tahun 2011  
oleh **DBE 1 USAID**  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana dari BOS dan Pendidikan Gratis)**

KABUPATEN/ KOTA	2008–2010		2011		BOS (2009- 2011)	Pendidik- an Gratis (PG) (2008- 2011)	BOS & PG	BOS & PG – BOSP
	ASUMSI DASAR	BOSP	ASUMSI DASAR	BOSP				
Jeneponto	6R-32SR	498.000	Tidak dilakukan		397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
Pangkep	6R-28SR	573.000	6R-25SR	<b>614.300</b>	397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
Soppeng	6R-28SR	462.400	6R-28SR	<b>913.200</b>	397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
Enrekang	6R-30SR	474.700	6R-25SR	<b>693.400</b>	397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
Palopo	6R-30SR	579.200	6R-32SR	<b>734.000</b>	400.000	48.000	<b>448.000</b>	Kurang
Makassar	6R-28SR	733.600	6R-30SR	<b>649.000</b>	400.000	48.000	<b>448.000</b>	Kurang
Pinrang	6R-28SR	674.100	Tidak dilakukan		397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
Sidrap	6R-28SR	533.400	6R-32SR	<b>833.100</b>	397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
Luwu	6R-28SR	650.500	Tidak dilakukan		397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
Barru	6R-28SR	577.000	6R-20SR	<b>902.800</b>	397.000	48.000	<b>445.000</b>	Kurang
<b>Permendiknas 69/2009*</b>	---	---	<b>6R- 28SR</b>	<b>580.000</b>	---	---	---	---

\*\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

## Provinsi Aceh

Tabel 1.5. Hasil Penghitungan BOSP SD/MI Tahun 2008–2010 oleh **DBE 1 USAID**  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana Hanya dari BOS)

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP (2008-2010)	BOS (2009-2011)	BOS – BOSP
Banda Aceh		584.077	400.000	Kurang
Aceh Besar		563.243	397.000	Kurang
Pidie		573.545	397.000	Kurang
Pidie Jaya		709.679	397.000	Kurang
Bireun		785.155	397.000	Kurang
Lhokseumawe		694.174	400.000	Kurang
Aceh Utara		634.523	397.000	Kurang
Aceh Timur		558.234	397.000	Kurang
Aceh Tamiang		604.831	397.000	Kurang
Kota Langsa		630.531	400.000	Kurang
Aceh Tenggara		482.407	397.000	Kurang
<i>(bersambung ...)</i>				
<b>Permendiknas 69/2009*</b>	<b>6R-28SR</b>	<b>580.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

**Tabel 1.5. Hasil Penghitungan BOSP SD/MI Tahun 2008–2010 oleh DBE 1 USAID (Dengan Perbandingan Sumber Dana Hanya dari BOS)---(lanjutan)**

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP (2008-2010)	BOS (2009-2011)	BOS – BOSP
Gayo Luwes		552.923	397.000	Kurang
Aceh Tengah		610.696	397.000	Kurang
Bener Meriah		600.610	397.000	Kurang
Aceh Singkil		406.517	397.000	Kurang
Subulussalam		530.725	400.000	Kurang
Aceh Selatan		623.838	397.000	Kurang
Aceh Barat Daya		488.189	397.000	Kurang
Nagan Raya		528.369	397.000	Kurang
Aceh Barat		584.437	397.000	Kurang
Aceh Jaya		469.920	397.000	Kurang
Sabang		771.001	400.000	Kurang
<b>Permendiknas 69/2009*</b>	<b>6R-28SR</b>	<b>580.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

## Provinsi Papua/Papua Barat

Tabel 1.6. Hasil Penghitungan BOSP SD/MI Tahun 2011 oleh **UNICEF**  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana Hanya dari BOS)

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP (2011)	BOS (2009-2011)	BOS – BOSP
Jayapura	6R-23SR	1.060.000	397.000	Kurang
Biak	6R-28SR	980.000	397.000	Kurang
Jaya Wijaya	6R-28SR	777.000	397.000	Kurang
Sorong	6R-28SR	851.000	397.000	Kurang
<b>Permendiknas 69/2009*</b>	<b>6R-28SR</b>	<b>580.000</b>	---	---

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

## Provinsi Kalimantan Timur (Kota Balikpapan)

Tabel 1.7. Hasil Penghitungan BOSP SD/MI Tahun 2011 oleh UNM  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana Hanya dari BOS)

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP (2011)	BOS (2009-2011)	BOS – BOSP
Balikpapan	6R-12SR	3.888.200	400.000	Kurang
	6R-32SR	1.950.300	400.000	Kurang
	12R-32SR	1.248.400	400.000	Kurang
	18R-32SR	1.150.100	400.000	Kurang
	27R-32SR	921.700	400.000	Kurang
Permendiknas 69/2009*	6R-28SR	580.000	---	---

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

**Tabel 1.8. Hasil Penghitungan BOSP SD/MI Tahun 2011 oleh UNM  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana dari BOS dan BOSDA)**

<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>ASUMSI DASAR</b>	<b>BOSP (2011)</b>	<b>BOS (2009-2011)</b>	<b>BOSDA (2009-2011)</b>	<b>BOS dan BOSDA</b>	<b>BOS &amp; BOSDA – BOSP</b>
<b>Balikpapan</b>	6R-12SR	<b>3.888.200</b>	400.000	500.000	<b>900.000</b>	Kurang
	6R-32SR	<b>1.950.300</b>	400.000	300.000	<b>700.000</b>	Kurang
	12R-32SR	<b>1.248.400</b>	400.000	252.000	<b>652.000</b>	Kurang
	18R-32SR	<b>1.150.100</b>	400.000	252.000	<b>652.000</b>	Kurang
	27R-32SR	<b>921.700</b>	400.000	252.000	<b>652.000</b>	Kurang
<b>Permendiknas 69/2009*</b>	<b>6R-28SR</b>	<b>580.000</b>	---	---	---	---

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

## Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 2.1. Hasil Penghitungan BOSP SMP/MTs Tahun 2008–2010 oleh **DBE 1 USAID**  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana Hanya dari BOS)

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP (2008-2010)	BOS (2009-2011)	BOS – BOSP
Jeneponto	9R-36S	1.168.000	570.000	Kurang
Pangkep	9R-32S	575.400	570.000	Kurang
Soppeng	9R-32S	806.100	570.000	Kurang
Enrekang	9R-32SR	820.400	570.000	Kurang
Palopo	9R-32SR	833.500	575.000	Kurang
Makassar	18R-32SR	1.051.900	575.000	Kurang
Pinrang	9R-35SR	1.074.000	570.000	Kurang
Sidrap	9R-32SR	744.100	570.000	Kurang
Luwu	9R-32SR	828.200	570.000	Kurang
Barru	18R-32SR	734.400	570.000	Kurang
<b>BSNP*)</b>	<b>3R-32SR</b>	<b>1.533.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

\*Hasil penghitungan tidak dipublikasi



**Tabel 2.2. Hasil Penghitungan BOSP SMP/MTs Tahun 2008–2010 oleh DBE 1 USAID  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana dari BOS dan Pendidikan Gratis)**

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP (2008-2010)	BOS (2009-2011)	Pendidikan Gratis (PG) (2008-2011)	BOS & PG	BOS & PG – BOSP
Jeneponto	9R-36S	<b>1.168.000</b>	570.000	211.200	<b>781.200</b>	Kurang
Pangkep	9R-32S	<b>575.400</b>	570.000	211.200	<b>781.200</b>	<b>Lebih</b>
Soppeng	9R-32S	<b>806.100</b>	570.000	211.200	<b>781.200</b>	Kurang
Enrekang	9R-32SR	<b>820.400</b>	570.000	211.200	<b>781.200</b>	Kurang
Palopo	9R-32SR	<b>833.500</b>	575.000	211.200	<b>786.200</b>	Kurang
Makassar	18R-32SR	<b>1.051.900</b>	575.000	211.200	<b>786.200</b>	Kurang
Pinrang	9R-35SR	<b>1.074.000</b>	570.000	211.200	<b>781.200</b>	Kurang
Sidrap	9R-32SR	<b>744.100</b>	570.000	211.200	<b>781.200</b>	<b>Lebih</b>
Luwu	9R-32SR	<b>828.200</b>	570.000	211.200	<b>781.200</b>	Kurang
Barru	18R-32SR	<b>734.400</b>	570.000	211.200	<b>781.200</b>	<b>Lebih</b>
<b>BSNP*)</b>	<b>3R-32SR</b>	<b>1.533.000</b>	---	---	---	---

\*Hasil penghitungan tidak dipublikasi

**Tabel 2.3. Hasil Pemutakhiran Penghitungan BOSP SMP/MTs Tahun 2011 oleh **DBE 1 USAID** (Dengan Perbandingan Sumber Dana Hanya dari BOS)**

KABUPATEN/ KOTA	2008–2010		2011		BOS (2009-2011)	BOS – BOSP
	ASUMSI DASAR	BOSP	ASUMSI DASAR	BOSP		
Jeneponto	9R-36S	1.168.000	Tidak dilakukan		570.000	Kurang
Pangkep	9R-32S	575.400	9R-30SR	806.400	570.000	Kurang
Soppeng	9R-32S	806.100	9R-30SR	1.001.100	570.000	Kurang
Enrekang	9R-32SR	820.400	12R-30SR	529.000	570.000	Kurang
Palopo	9R-32SR	833.500	9R-34SR	783.000	575.000	Kurang
Makassar	18R-32SR	1.051.900	6R-32SR	973.600	575.000	Kurang
Pinrang	9R-35SR	1.074.000	Tidak dilakukan		570.000	Kurang
Sidrap	9R-32SR	744.100	12R-32SR	747.000	570.000	Kurang
Luwu	9R-32SR	828.200	Tidak dilakukan		570.000	Kurang
Barru	18R-32SR	734.400	18R-32SR	598.200	570.000	Kurang
<b>Permendiknas 69/2009*</b>	---	---	6R-32SR	710.000	---	---

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

**Tabel 2.4. Hasil Pemutakhiran Penghitungan BOSP SMP/MTs Tahun 2011  
oleh **DBE 1 USAID**  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana dari BOS dan Pendidikan Gratis)**

KABUPATEN/ KOTA	2008–2010		2011		BOS (2009- 2011)	Pendidik-an Gratis (PG) (2008- 2011)	BOS & PG	BOS & PG – BOSP
	ASUMSI DASAR	BOSP	ASUMSI DASAR	BOSP				
Jeneponto	9R-36S	1.168.000	Tidak dilakukan		570.000	211.200	781.200	Kurang
Pangkep	9R-32S	575.400	9R-30SR	806.400	570.000	211.200	781.200	Kurang
Soppeng	9R-32S	806.100	9R-30SR	1.001.100	570.000	211.200	781.200	Kurang
Enrekang	9R-32SR	820.400	12R-30SR	529.000	570.000	211.200	781.200	Lebih
Palopo	9R-32SR	833.500	9R-34SR	783.000	575.000	211.200	786.200	Lebih
Makassar	18R-32SR	1.051.900	6R-32SR	973.600	575.000	211.200	786.200	Kurang
Pinrang	9R-35SR	1.074.000	Tidak dilakukan		570.000	211.200	781.200	Kurang
Sidrap	9R-32SR	744.100	12R-32SR	747.000	570.000	211.200	781.200	Lebih
Luwu	9R-32SR	828.200	Tidak dilakukan		570.000	211.200	781.200	Kurang
Barru	18R-32SR	734.400	18R-32SR	598.200	570.000	211.200	781.200	Lebih
Permendiknas 69/2009*	---	---	6R-32SR	710.000	---	---	---	---

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

## Provinsi Aceh

Tabel 2.5. Hasil Penghitungan BOSP SMP/MTs Tahun 2008–2010 oleh **DBE 1 USAID**  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana Hanya dari BOS)

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP (2008-2010)	BOS (2009-2011)	BOS – BOSP
Banda Aceh		740.323	575.000	Kurang
Aceh Besar		636.096	570.000	Kurang
Pidie		709.024	570.000	Kurang
Pidie Jaya		740.803	570.000	Kurang
Bireun		855.224	570.000	Kurang
Lhokseumawe		819.553	575.000	Kurang
Aceh Utara		701.872	570.000	Kurang
Aceh Timur		839.987	570.000	Kurang
Aceh Tamiang		906.898	570.000	Kurang
Kota Langsa		905.097	575.000	Kurang
Aceh Tenggara		821.227	570.000	Kurang
<i>(bersambung ...)</i>				
<b>Permendiknas 69/2009*</b>	<b>6R-32SR</b>	<b>710.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

\*Hasil penghitungan tidak dipublikasi

**Tabel 2.6. Hasil Penghitungan BOSP SMP/MTs Tahun 2008–2010 oleh DBE 1 USAID (Dengan Perbandingan Sumber Dana Hanya dari BOS) --- (lanjutan)**

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP (2008-2010)	BOS (2009-2011)	BOS – BOSP
Gayo Luwes		650.007	570.000	Kurang
Aceh Tengah		779.821	570.000	Kurang
Bener Meriah		651.512	570.000	Kurang
Aceh Singkil		589.473	570.000	Kurang
Subulussalam		662.053	575.000	Kurang
Aceh Selatan		708.772	570.000	Kurang
Aceh Barat Daya		725.504	570.000	Kurang
Nagan Raya		740.637	570.000	Kurang
Aceh Barat		722.505	570.000	Kurang
Aceh Jaya		695.380	570.000	Kurang
Sabang		937.320	575.000	Kurang
<b>Permendiknas 69/2009*</b>	<b>6R-32SR</b>	<b>710.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

\*Hasil penghitungan tidak dipublikasi

## Provinsi Papua/Papua Barat

Tabel 2.7. Hasil Penghitungan BOSP SMP/MTs Tahun 2011 oleh **UNICEF**  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana Hanya dari BOS)

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP (2011)	BOS (2009-2011)	BOS – BOSP
Jayapura	6R-32SR	1.372.000	570.000	Kurang
Biak	6R-32SR	1.229.000	570.000	Kurang
Jaya Wijaya	6R-32SR	1.121.000	570.000	Kurang
Sorong	6R-32SR	1.047.000	570.000	Kurang
<b>Permendiknas 69/2009*</b>	<b>6R-32SR</b>	<b>710.000</b>	---	---

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

## Provinsi Kalimantan Timur (Kota Balikpapan)

Tabel 2.7. Hasil Penghitungan BOSP SMP/MTs Tahun 2011 oleh UNM  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana Hanya dari BOS)

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP	BOS	BOS – BOSP
Balikpapan	3R-22SR	6.531.500	575.000	Kurang
	12R-36SR	1.656.400	575.000	Kurang
	21R-36SR	1.403.300	575.000	Kurang
Permendiknas 69/2009*	6R-32SR	710.000	---	---

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

Tabel 2.8. Hasil Penghitungan BOSP SMP/MTs Tahun 2011 oleh UNM  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana dari BOS dan BOSDA)

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP	BOS	BOSDA	BOS dan BOSDA	BOS & BOSDA – BOSP
Balikpapan	3R-22SR	6.531.500	575.000	960.000	1.535.000	Kurang
	12R-36SR	1.656.400	575.000	786.000	1.361.000	Kurang
	21R-36SR	1.403.300	575.000	786.000	1.361.000	Kurang
Permendiknas 69/2009*	6R-28SR	710.000	---	---	---	---

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

## Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 3.1. Hasil Penghitungan BOSP SMA/MA Tahun 2008–2010 & Pemutakhiran Tahun 2011 oleh **DBE 1 USAID**

KABUPATEN/ KOTA	2008–2010			2011		BOSKAB
	ASUMSI DASAR	BOSP	BOSKAB	ASUMSI DASAR	BOSP	
Jeneponto	9R-40SR	1.068.000	0	Tidak di- <i>update</i>		0
Pangkep	9R-32SR	889.500	0	6R-30SR	943.600	0
Soppeng	9R-35SR	1.012.100	0	18R-32SR	916.200	0
Enrekang	9R-35SR	1.493.500	0	12R-30SR	594.000	0
Palopo	9R-35SR	1.288.000	0	9R-35SR	1.193.000	0
Makassar	18R-32SR	1.324.300	0	27R-32SR	547.000	0
Pinrang	9R-35SR	1.114.400	900.000	Tidak di- <i>update</i>		900.000
Sidrap	9R-32SR	1.541.300	0	12R-32SR	899.800	0
Luwu	9R-35SR	1.240.700	0	Tidak di- <i>update</i>		0
Barru	15R-35SR	892.200	0	15S-32SR	720.400	0
<b>BSNP*</b>	<b>3R-32SR</b>	<b>1.814.000</b>	---	---	---	---
<b>Permendiknas 69/2009**</b>	---	---	---	<b>6R-32SR</b>	<b>IPS/Bhs 960.000 IPA 1.010.000</b>	---

\*Hasil penghitungan tidak dipublikasi

\*\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP



## Provinsi Aceh

Tabel 3.2. Hasil Penghitungan BOSP SMA/MA Tahun 2008–2010 oleh **DBE 1 USAID**

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP (2008-2010)
Banda Aceh		819.198
Aceh Besar		802.258
Pidie		817.504
Pidie Jaya		1.027.570
Bireun		1.154.833
Lhokseumawe		1.050.630
Aceh Utara		1.245.383
Aceh Timur		1.177.537
Aceh Tamiang		1.133.136
Kota Langsa		1.258.308
Aceh Tenggara		975.400
<b>Permendiknas 69/2009*</b>	<b>6R-32SR</b>	<b>IPS/Bhs 960.000 IPA 1.010.000</b>

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP (2008-2010)
Gayo Luwes		952.585
Aceh Tengah		837.884
Bener Meriah		1.109.342
Aceh Singkil		912.991
Subulussalam		1.072.828
Aceh Selatan		838.384
Aceh Barat Daya		785.122
Nagan Raya		845.427
Aceh Barat		731.931
Aceh Jaya		824.989
Sabang		1.220.103
<b>Permendiknas 69/2009*</b>	<b>6R-32SR</b>	<b>IPS/Bhs 960.000 IPA 1.010.000</b>

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

## Provinsi Papua/Papua Barat

Tabel 3.3. Hasil Penghitungan BOSP SMA/MA Tahun 2011 oleh UNICEF

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP (2011)
Jayapura	12R-29SR	1.439.000
Biak	9R-32SR	1.751.000
Jaya Wijaya	9R-35SR	2.299.000
Sorong	6R-32SR	1.409.000
<b>Permendiknas 69/2009*</b>	<b>6R-32SR</b>	<b>IPS/Bhs 960.000</b> <b>IPA 1.010.000</b>

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

## Provinsi Kalimantan Timur (Kota Balikpapan)

Tabel 3.4. Hasil Penghitungan BOSP SMA/MA Tahun 2011 oleh UNM  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana dari BOSDA dan BOSPROV)

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP	BOSDA	BOSPROV	BOS DA & BOSPROV	BOSDA & BOSPROV – BOSP
Balikpapan	6R-24SR	3.619.300	1.000.000	1.000.000	2.000.000	Kurang
	24R-40SR	2.305.200	1.000.000	1.000.000	2.000.000	Kurang
Permendiknas 69/2009*	6R-32SR	IPS/Bhs 960.000 IPA 1.010.000	---	---	---	---

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

## Provinsi Kalimantan Timur (Kota Balikpapan)

Tabel 4.1. Hasil Penghitungan BOSP SMK Tahun 2011 oleh UNM  
(Dengan Perbandingan Sumber Dana dari BOSDA dan BOSPROV )

KABUPATEN/ KOTA	ASUMSI DASAR	BOSP	BOSDA	BOSPROV	BOS DA & BOSPROV	BOSDA & BOSPROV – BOSP
Balikpapan	98R-22SR	2.761.500	1.000.000	1.500.000	2.500.000	Kurang
	45R-35SR	2.059.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	Lebih
	48R-40SR	2.076.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	Lebih
	29R-31SR	2.869.400	1.000.000	1.500.000	2.500.000	Kurang
	25R-32SR	3.037.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	Kurang
Permendiknas 69/2009*	6R-32SR	Sesuai Program Keahlian	---	---	---	---

\*Lampiran nilai BOSP didasarkan pada hasil penghitungan BSNP

• • • • •

## **Hasil Penghitungan BOSP akan bermanfaat hanya jika dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan pendanaan BOSP, antara lain dalam hal:**

- Penetapan nilai dan rambu-rambu penggunaan dana BOSP pada setiap jenjang pendidikan yang BOSP-nya dihitung (dapat diadopsi dari kegiatan, komponen/subkomponen BOSP)
- Sumber dana kesenjangan pendanaan BOSP (APBD kota, APBD Provinsi, orangtua siswa, masyarakat)
- Pengawasan keuangan di sekolah
- Pemutakhiran (*updating*) penghitungan BOSP
- Penghitungan BOSP di setiap satuan pendidikan

## ❖ **UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang **pendidikan dasar tanpa memungut biaya** (Pasal 34 Ayat 2)

## ❖ **PP 47/2008 tentang Wajib Belajar**

Biaya operasi pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing2 (Pasal 10 Ayat 3)

## PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan

### Biaya (operasi) Nonpersonalia:

- Satuan **pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar**, formal maupun nonformal, menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (Pasal 21)
- Satuan pendidikan yang **bukan pelaksana program wajib belajar**, formal maupun nonformal, menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Pasal 22)
- Pendanaan tambahan bagi RSBI/SBI atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari: Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah (Pasal 24)

## **Kesimpulan/Saran:**

- Kebutuhan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai 8 standar pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah
- Terdapat variasi kebutuhan BOSP berdasarkan provinsi/kabupaten/kota yang dipengaruhi oleh tingkat kemahalan, geografis, jumlah rombongan belajar/jumlah siswa menurut rombongan belajar.
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota perlu mempertimbangkan variasi indeks pembiayaan dalam menentukan kebijakan subsidi ke satuan pendidikan.



## FORMULA SISTEM PENDANAAN SEKOLAH YANG BERKEADILAN

Oleh:

**Prof. Muljani A. Nurhadi, M.Ed.,M.S.,Ed.D**  
**Dosen tetap Universitas Indraprasta PGRI Jakarta**

### Abstrak

Otonomi Daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah yang semula menjadi urusan Pemerintah Pusat sekarang menjadi urusan pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk menjamin pelaksanaan urusan tersebut di daerah, UU yang mengatur perimbangan keuangan antara Pusat dan daerah ikut menyertainya. Namun demikian, sistem pendanaan yang demikian belum menjamin diwujudkannya sistem pendanaan yang berkeadilan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 37 UU No. 20/2003. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan pendanaan antara Pemerintah Pusat dan daerah, ketimpangan pendanaan antar sekolah, bervariasinya sistem penyaluran anggaran, dan dominasi biaya manajemen dan personil dalam pendanaan pendidikan. Apabila hal ini tidak diatasi, kesenjangan pendanaan pendidikan di sekolah akan semakin lebar yang akhirnya berdampak kepada kesenjangan mutu pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut, diusulkan formula sistem pendanaan yang lebih berkeadilan dengan menggunakan “*percentage equalized grant system atau variable matching grant*” yang didukung dengan standar nasional total biaya satuan pendidikan yang dilengkapi dengan index daerah yang mengakomodasikan variasi harga antar daerah. Untuk mengoptimalkan sumber dana yang tersedia, rasionalisasi organisasi dan personil pada kantor pendidikan di semua tingkat pemerintahan dan peningkatan kemampuan profesionalisme staf daerah perlu dilakukan.

Kata-kata kunci: pendanaan pendidikan, desentralisasi, *percentage equalizing grant*.

### Pendahuluan

Dalam banyak perbincangan di bidang pendidikan, penggunaan istilah pembiayaan, pendanaan, dan penganggaran sering dipertukarkan satu sama lain. Walaupun ketiganya memang berhubungan erat, tetapi masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri. Pembiayaan (*costing*) lebih menyangkut persoalan estimasi dan perencanaan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan, sedang pendanaan (*funding/financing*), lebih berkaitan dengan persoalan bagaimana, siapa, dan seberapa mendanai pendidikan. Dengan demikian, sistem pendanaan lebih berhubungan dengan siapa bertanggungjawab mendanai pendidikan, seberapa besar dana yang harus disediakan, dan bagaimana dana tersebut

disalurkan kepada pihak yang akan menggunakannya. Sedang penganggaran (*budgeting*) menyangkut penyusunan dokumen keuangan yang merinci perimbangan antara estimasi dana yang masuk dan rencana penggunaan dana tersebut dalam membiayai proses pendidikan. Makalah ini lebih difokuskan kepada yang kedua, untuk menelaah masalah yang dihadapi dengan “sistem” pendanaan pembiayaan pendidikan di Indonesia dengan melihat praktek yang telah dilakukan secara internasional, untuk memberikan rekomendasi dalam upaya memformat formula sistem pendanaan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah dimasa depan.

Pasal 46 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 47, disebutkan bahwa sumber pendanaan tersebut ditentukan dengan prinsip **keadilan**, kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam rangka mencapai kecukupan pemerintah telah berusaha untuk menaikkan porsi anggaran pendidikan guna memenuhi amanat rakyat tersebut dengan mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk pendidikan minimal 20%<sup>1</sup> dari APBN dan APBD dan melengkapinya dengan PP No. 48 tahun 2008 tentang Standar Pendanaan Pendidikan. Namun demikian hasil studi Lembaga Penelitian SMERU menunjukkan bahwa anggaran pendidikan yang meningkat tersebut belum berhasil menegakkan prinsip keadilan dalam pendanaan pendidikan di sekolah. Makalah ini akan membahas masalah apa yang dihadapi dan bagaimanakah memformat formula sistem pendanaan pendidikan di sekolah agar lebih berkeadilan seperti yang diamanatkan oleh pasal 46 tersebut.

## **Pembahasan**

Desentralisasi pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah berdampak kepada perubahan wewenang dalam urusan pengelolaan pendidikan. Apabila dahulu tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dan Kota hanya mengelola Sekolah Dasar, setelah otonomi menjadi seluruh sistem persekolahan dari pra-sekolah sampai dengan sekolah menengah atas, baik yang diselenggarakan melalui jalur formal maupun non-formal. Pemberian mandat urusan wajib ini

---

<sup>1</sup> Yang semula tidak termasuk gaji yang kemudian direvisi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008 termasuk gaji pendidik.

diiringi dengan aturan tentang pendanaannya dalam UU Nomor 25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU ini mengatur sistem pendanaan untuk menopang dilimpahkannya sebagian urusan Pemerintah Pusat ke daerah yang salah satunya dengan prinsip "*money follow function*", artinya karena fungsi dipindahkan ke pemerintah daerah, maka sumber dana untuk mendukungnya juga harus mengikuti pelimpahan tersebut. Namun dalam praktek sampai saat ini, UU dan peraturan pelaksanaan serta implementasi dari undang-undang tersebut justru menimbulkan ketimpangan dalam sistem pendanaan pendidikan yang apabila tidak diatasi akan dapat berdampak kepada semakin tingginya jurang kesenjangan mutu pendidikan di Tanah Air. Ada empat kesenjangan utama yang akhirnya mengakibatkan semakin lebarnya jurang kesenjangan pendanaan di sekolah.

#### 1. Kesenjangan pendanaan antar pemerintah

Desentralisasi pemerintahan telah melimpahkan 15 urusan yang semula ditangani pemerintah Pusat menjadi urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, yaitu Kabupaten/Kota. Sementara itu, Pemerintah Pusat hanya bertanggungjawab penuh dalam 6 kewenangan, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan agama. Dengan menggunakan prinsip "*money follow function*", seharusnya sebagian besar anggaran Negara lebih banyak dilimpahkan ke Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan urusan wajib yang dilimpahkan tersebut. Namun demikian, profil APBN dalam lima tahun terakhir masih didominasi oleh anggaran Pemerintah Pusat. Pada tahun 2011 yang lalu misalnya, dana transfer ke Daerah hanya Rp.392,98 trilyun atau sekitar 32% dari total APBN, sementara rencana belanja Pemerintah Pusat mencapai 836,57 trilyun yang praktis lebih dari dua kali lipat. Sisanya sudah teralokasikan untuk membayar bunga pinjaman, membayar pegawai Pusat, dan subsidi. Dari dana transfer yang 32% tersebut kemudian dibagi ke sekian banyak provinsi dan kabupaten/kota melalui mekanisme dan formula Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Teorinya, pemerintah Kabupaten/Kota menggabungkan ketiga sumber dana tersebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendapatan dalam APBD-nya. Karena sektor pendidikan merupakan urusan yang wajib didanai dengan APBD, maka besaran alokasi sumber dana pendidikan juga sangat tergantung kepada profil APBD. Namun

demikian, karena kontribusi rata-rata PAD terhadap APBD hanya sekitar 7-8%,<sup>2</sup> maka sumber dana dari Pemerintah Pusat-lah tumpuan harapan untuk mendanai pendidikan di daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan rata-rata sekitar 40% untuk belanja pegawai dari APBDnya dan ini sama dengan 90% dari rata-rata belanja Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota.<sup>3</sup> Pemerintah Provinsi melalui formula DAU dan DBH rata-rata memperoleh dana yang jauh lebih besar dari Kabupaten/Kota, sementara mempunyai tanggungjawab urusan pendidikan yang lebih terbatas, yaitu mencakup sekolah luar biasa dan sekolah bertaraf internasional. Di luar itu, tanggungjawabnya lebih bersifat koordinatif, pemberian dukungan, dan alokasi sumber daya potensial.<sup>4</sup>

Hasil studi Lembaga Penelitian SMERU<sup>5</sup> menunjukkan bahwa kemampuan sumber dana APBD masih lebih banyak tergantung dari DAU yang proporsinya mencapai 70%. Hanya di sebagian pemerintahan Kota proporsi itu bisa mencapai di bawah 50%. Dari profil sumber dana yang demikian, alokasi terbesar tersedot untuk biaya pegawai yang rata-rata mencapai sekitar 40% dari total anggaran rutin APBD atau sekitar 90% total anggaran Dinas Pendidikan, karena pegawai terbesar di daerah adalah pegawai dilingkungan ini termasuk guru. Proporsi tersebut akan meningkat lagi dengan beban Daerah untuk memberikan tunjangan dan remunerasi lain kepada pegawai negeri dan guru sebagai implikasi diberlakukannya UU Nomor 48 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen beserta peraturan pelaksanaannya. Untuk menutup kekurangan biaya operasional, Pemerintah Pusat memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara merata untuk setiap sekolah yang dalam system pendanaan pendidikan termasuk kategori "*Flat Grant*"<sup>6</sup> yang dianggap merupakan system pendanaan yang paling konservatif di Amerika Serikat. Sistem ini disatu sisi menjamin biaya pendidikan minimal per siswa dipenuhi oleh Pemerintah, tetapi disisi lain memberikan peluang ketimpangan dalam pendanaan pendidikan karena Kabupaten/Kota yang

---

<sup>2</sup> Tomayah, Nina dan Syaikh Usman (2004). *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, pp. ii; yang juga dikuatkan oleh hasil studi Edy Priyono (tt). *Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Masalah dan Prospek*. pp. 3. <http://www.scribd.com/doc/75922499/Pembiayaan-Pendidikan-Edy-Priyono>

<sup>3</sup> Ibid. pp. iii

<sup>4</sup> Sebagaimana tersirat dari pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Lampiran PP Nomor 38 Tahun 2006.

<sup>5</sup> Ibid, pp. 22.

<sup>6</sup> Sergiovani, Thomas J, Martin Burlingame, Fred S. Coombs, Paul W. Thurston (1980). *Educational Governance and Administration*. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall Inc., pp. 234-235.

lebih kaya dapat mengalokasikan tambahannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Akibatnya, sebagian besar Kota yang proporsi PAD-nya cukup besar, seperti Kota Pekanbaru, dapat memberikan tambahan alokasi pendanaan yang lebih besar. Sebaliknya, sebagian besar Kabupaten/Kota memperoleh PAD yang sangat terbatas, sehingga sumber dana yang dialokasikan untuk pendidikan terserap habis untuk menutup biaya personalia, walaupun alokasi ini berada jauh di atas 20% dari APBD, bahkan di Kabupaten Gowa mencapai 59%.<sup>7</sup> Untuk membiayai biaya operasional pendidikan di daerah menggantungkan sepenuhnya kepada bantuan paket dari pemerintah Pusat.

Sementara itu, walaupun secara rata-rata alokasi dana pendidikan di provinsi sekitar 10 – 17,5% dari APBD<sup>8</sup>, secara absolut nilai rupiahnya cukup tinggi di dibandingkan dengan beban urusan di bidang pendidikan yang dipikulnya sangat terbatas. Urusan yang dimaksud adalah pada dukungan sistem perencanaan dan koordinasi, serta penyelenggaraan sekolah internasional dan sekolah luar biasa seperti yang digariskan dalam PP No 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sumber dana ini akan meningkat lagi apabila ditambah dengan alokasi dana dari Pemerintah Pusat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi. Kelebihan sumber dana pendidikan yang ada di provinsi dapat disalurkan ke pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi karena kewenangan pengelolaan sekolah berada di Kabupaten/Kota, maka hanya ada dua bentuk yang dapat dilakukan yaitu berupa bantuan keuangan untuk program bantuan operasional sekolah dan bantuan sosial yang sifatnya tidak tetap, melalui alokasi kategori anggaran “bantuan tidak langsung (BTL)”.<sup>9</sup> Faktanya, dalam praktek anggaran yang tersedia di kedua jenis bantuan tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, misalnya yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan penyerapan masing-masing hanya 13 dan 34%<sup>10</sup>, seperti yang disampaikan dalam tulisan Andriyans Elqassam. Selain itu, sesuai dengan sifatnya bantuan sosial hanya dapat diberikan sekali dan selektif, maka tambahan sumber dana ini justru menambah kemungkinan semakin lebarnya jurang

---

<sup>7</sup> Data tahun 2002 dikutip dari Tomayah, Nina dan Syaikhul Usman (2004), pp. 25.

<sup>8</sup> Ibid., pp. iii.

<sup>9</sup> Andriyans Elqassam ST (2010). *Kajian Singkat Anggaran Pendidikan Jawa Barat*.

<http://eljundi.wordpress.com/2011/05/29/kajian-singkat-anggaran-pendidikan-jawa-barat/>

<sup>10</sup> Ibid.

ketimpangan kapasitas pendanaan pendidikan antar daerah.

## 2. Ketimpangan pendanaan antar sekolah

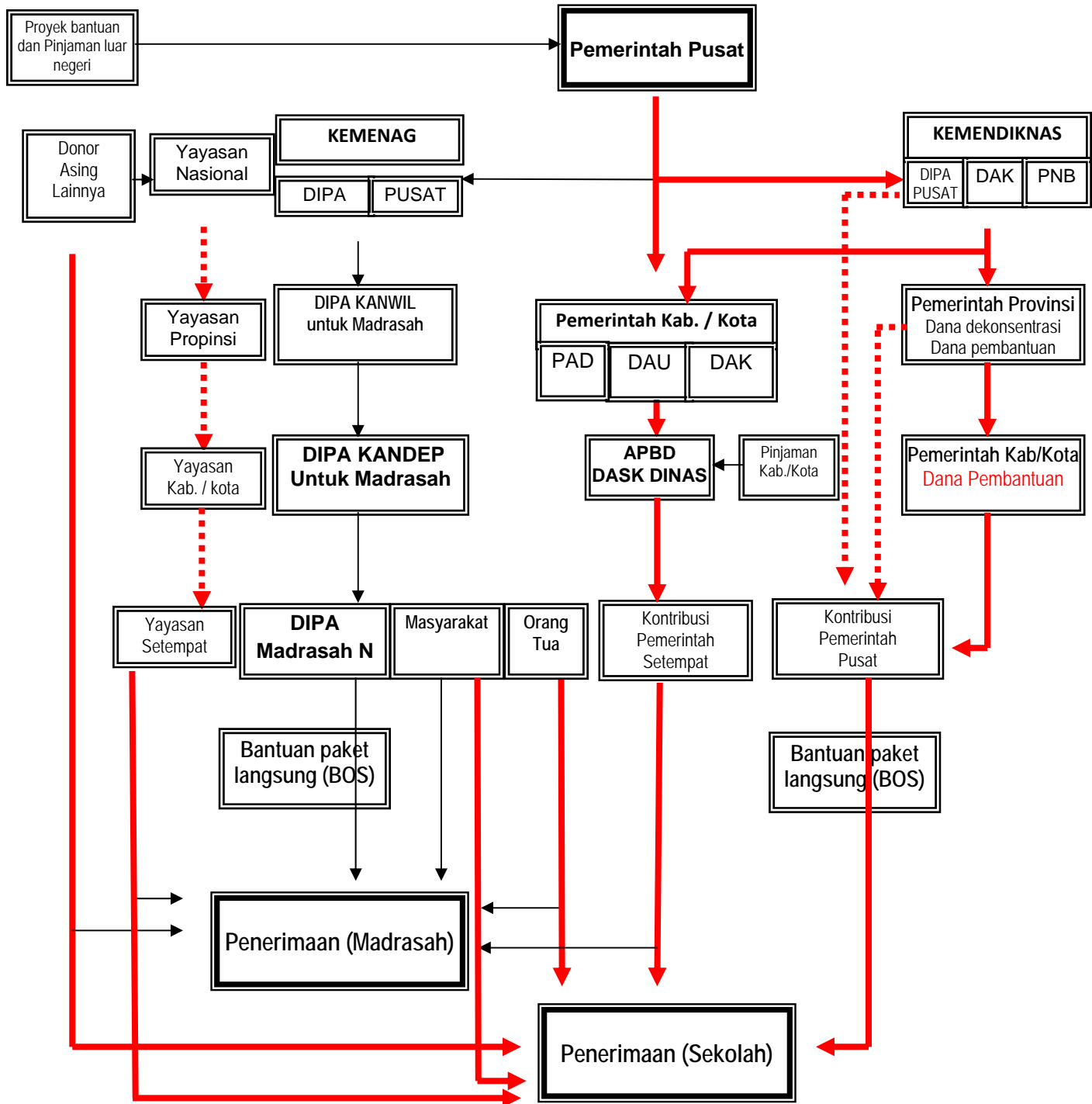
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam era desentralisasi diatas kertas sumber pendanaan pendidikan di sekolah jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan sewaktu sekolah masih dikelola sentralistik. *Pertama*, adalah sumber pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota sebagai sumber utama, yang besarnya sangat tergantung kepada kapasitas fiskal masing-masing yang diperoleh dari DAU sebagai bagian dari dana desentralisasi, DAK, dana perimbangan, dan PAD. Karena sebagian besar Kabupaten/Kota masih mengandalkan APBD-nya dari DAU, maka pada umumnya kapasitas untuk mendanai pendidikan baru terbatas kepada menjamin pemenuhan biaya personil dalam bentuk gaji. *Kedua*, adalah sumber dana dari bantuan biaya operasional sekolah (BOS daerah) yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang besarnya sangat tergantung kepada kapasitas dan komitmen provinsi/kabupaten/kota dalam mendanai pendidikan di Kabupaten/Kota. *Ketiga*, dana bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah provinsi yang sifatnya insidental. *Keempat*, sumber dana dari pemerintah Pusat yang dapat berbentuk dana dekonsentrasi disalurkan melalui pemerintah provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dirancang untuk membiayai kebutuhan khusus, dana perbantuan yang belum efektif dilaksanakan, dana bantuan paket (*block grant*) seperti yang disalurkan dalam bentuk BOS untuk mendanai biaya operasional sekolah, dan dana bantuan sosial yang sifatnya tidak tetap. *Kelima*, adalah sumber dana dalam bentuk *block grant* maupun dalam bentuk barang dari donatur lain baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan visi dan misi pemberi dana. *Keenam*, adalah sumber dana dari orang tua peserta didik yang pada tingkat pendidikan dasar lebih difokuskan untuk membiayai biaya tidak langsung yang disalurkan melalui komite sekolah. PP 48/2008 sudah berusaha memetakan pembagian tugas masing-masing pemerintahan dalam mendanai pendidikan di sekolah, tetapi masih banyak yang tumpang tindih dan tidak memberikan kepastian tentang berapa besar.

Berbeda dengan sekolah, karena dalam peraturan perundangan yang menyangkut desentralisasi pengelolaan pendidikan madrasah tidak termasuk urusan yang didesentralisasikan, maka sumber dana utama diperoleh dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini

Kementerian Agama, dalam bentuk dana untuk biaya investasi dan operasional, baik untuk personil maupun non-personil. Kemungkinan sumber dana dari pemerintah daerah, provinsi dan/atau kabupaten/kota, masih dapat diperoleh dalam bentuk bantuan sosial yang sekali lagi sifatnya tidak tetap dan sangat tergantung kepada keberanian masing-masing daerah, karena berpotensi mengandung resiko bertentangan dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Peta sumber dana pendidikan di sekolah dan madrasah tersebut dapat disarikan dalam bagan 01 berikut.

Dengan kemungkinan sumber dana yang banyak seharusnya sekolah mempunyai elastisitas yang lebih tinggi dalam mendanai pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Ternyata hal ini tidak terjadi, bahkan tidak serta merta menjamin bahwa dana pendidikan yang diperoleh memenuhi prinsip berkeadilan, tetapi justru lebih berpotensi untuk meningkatkan kesenjangan antar sekolah dan meningkatkan probabilitas untuk terjadinya masalah penyimpangan dan inefisiensi. Masalah yang pertama terjadi karena dari sekian sumber pendanaan hanya ada dua sumber dana yang dipastikan diperoleh oleh setiap sekolah, yaitu sumber dana dari APBD yang sebagian besar untuk membayar gaji dan BOS yang diperoleh dari Pusat untuk membiayai biaya operasional sekolah. Inipun baru menjamin setiap siswa memperoleh alokasi dana operasional non-personil yang sama tetapi belum menjamin prinsip berkeadilan karena indeks harga kebutuhan daerah tidak sama. Sedangkan untuk memperoleh sumber dana lainnya sangat tergantung kepada seberapa jauh sekolah dapat mengakses informasi tentang sumber dana tersebut serta penggunaannya dalam tahun yang berjalan, dan mempunyai kegigihan untuk mengajukan usulan dan mengawalinya sampai diperolehnya dana tersebut. Ketimpangan semakin melebar, adanya kecenderungan bahwa sekolah yang sudah pernah memperoleh bantuan dan dapat mempertanggungjawabkan dengan baik mempunyai kesempatan yang lebih tinggi untuk memperoleh bantuan pada tahun-tahun selanjutnya.

Masalah kedua terjadi karena disetiap nomenklatur bantuan selalu diikuti dengan ketentuan batasan item kegunaannya yang dalam banyak hal dapat terjadi tumpang tindih dalam penggunaannya antara satu sumber dengan sumber lain sehingga masih dapat terjadi duplikasi anggaran. Atau kalau tidak tumpang tindih, beberapa item yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dari sekolah yang bersangkutan.



Bagan: 01:

Peta Alur dan Variasi Sumber Dana Pendidikan Untuk Sekolah dan Madrasah



Terlepas dari maksud baik untuk mengejar efektivitas penggunaan anggaran, panduan yang mengikuti setiap jenis bantuan disisi yang lain sebenarnya bertentangan dengan hakekat “*block grant*” yang dimaksudkan dalam UU No. 20/2003 yaitu untuk mengatasi kelemahan sistem penganggaran berdasarkan item (*itemized budgeting system*) dan bertentangan dengan prinsip *performance-based budgeting system* sebagaimana diatur dalam paket peraturan perundangan tentang reformasi system keuangan Negara, yaitu: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara.

### 3. Bervariasinya sistem penyaluran anggaran

Banyak kemungkinan sumber dana yang diperoleh oleh sekolah berdampak kepada bervariasinya sistem penyaluran dan pengadministrasian anggaran yang berbeda satu dengan lainnya, antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan bahkan antar unit di masing-masing tingkat pemerintahan. Seperti dibahas sebelumnya, hampir setiap penyaluran sumber dana diikuti dengan panduan sistem administrasi pengelolaan dan penggunaannya, dan sekolah harus mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya masing-masing. Hal ini telah meningkatkan beban kerja administrasi (*paper work*) dan *beban biaya* baik di tingkat sekolah, pemerintah daerah, maupun Pemerintah Pusat yang luar biasa besarnya. Selain itu, biaya kesempatan yang ditanggung sebagai akibat berkurangnya waktu untuk kegiatan managerial dalam mengambil keputusan strategik juga dapat berpengaruh terhadap kinerja sekolah dan bahkan dapat menurunkannya. Rendahnya penyerapan sumber dana bantuan operasional pendidikan di Provinsi Jawa Barat seperti yang dilaporkan oleh Andriyans di atas merupakan salah satu sebab tingginya beban kerja dan biaya adminisitrasi yang harus dipikul oleh sekolah.<sup>11</sup>

### 4. Dominasi biaya manajemen dan personil

Sebagai dampak berkurangnya urusan yang ditangani karena desentralisasi, beban kerja pengelolaan pendidikan dinas pendidikan di tingkat pemerintah provinsi berkurang jauh sehingga seharusnya membutuhkan organisasi dan dukungan personil yang jauh lebih ramping

---

<sup>11</sup> Biasanya biaya administrasi dan manajemen untuk mengelola bantuan seperti ini dibebankan kepada sekolah yang pada umumnya sekolah tidak menganggarkannya.

daripada organisasi dan jumlah personil sebelum desentralisasi. Namun demikian hal ini tidak terjadi karena walaupun beban kerja di bidang substansinya berkurang, namun beban kerja administrasinya masih besar. Hal ini juga terjadi pada tataran organisasi di tingkat Pusat yang bukannya semakin ramping tetapi malah semakin gemuk. Pada rancangan awal desentralisasi, dengan tugas dan fungsi yang semakin sedikit, diperkirakan urusan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cukup dilaksanakan oleh sepertiga dari jumlah pegawai yang ada.

Keadaan yang demikian, diperparah dengan semakin gemuknya organisasi pengelolaan pendidikan diluar satuan pendidikan,<sup>12</sup> yang antara lain karena penyusunan organisasi pengelola pendidikan di daerah masih dikembangkan dengan pendekatan birokratik pemerintah murni yang kaya struktur tetapi miskin fungsi. Karena pendekatan organisasi di daerah masih menggunakan pendekatan birokrasi yang kurang cocok untuk iklim desentralisasi, maka desentralisasi telah menimbulkan mengguritanya lebih dari 500 sistem birokrasi dengan sentralisasi baru di pemerintah daerah kabupaten/kota yang membawa dampak kepada besarnya biaya manajemen termasuk manajemen pendidikan. Seharusnya, dalam iklim desentralisasi pendekatan organisasi fungsional lebih ditekankan terutama di bidang pendidikan, sehingga layanan profesional pendidikan dapat lebih terjamin, bukannya layanan birokratik. Sebaliknya, personil profesional di tingkat dinas kabupaten/kota seharusnya perlu ditingkatkan jumlah dan kompetensinya untuk menerima estafeta tugas-tugas baru dalam pengelolaan pendidikan. Misalnya, dengan desentralisasi, sekolah harus menyusun sendiri kurikulumnya dengan menggunakan KTSP, dan dinas pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota perlu dilengkapi dengan personil yang ahli dan berkompeten di bidang pengembangan kurikulum agar dapat membimbing dan memfasilitasi penyusunan KTSP tersebut. Dari pengalaman memfasilitasi sekolah dan madrasah dalam menyusun KTSP, sangat langka kapasitas itu dimiliki oleh dinas Kabupaten/Kota.<sup>13</sup> Proses desentralisasi pendidikan di New Zealand memakan waktu 15 tahun yang dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: tahap persiapan untuk menyiapkan sistem dan perangkat peraturan

---

<sup>12</sup> Hasil penelitian Abbas Gozali (2003) dalam *Biaya Satuan Pendidikan*. Jakarta: Balitbang-Dikbud menunjukkan . menunjukkan bahwa pada tahun 2003 saja proporsi biaya manajemen per siswa pada tingkat pendidikan dasar dan menengah berkisar antara 17 sampai dengan 35%.

<sup>13</sup> Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman penulis selama tiga tahun menjadi fasilitator pengembangan KTSP di Madrasah Satu Atap dalam program AIBEP bantuan pemerintah Australia.

perundang-undangan, tahap kedua untuk peningkatan kapasitas daerah, dan tahap terakhir untuk proses implementasi. Proses peningkatan kemampuan profesionalisme staf daerah dilakukan dalam lima tahun kedua proses desentralisasi tersebut.<sup>14</sup>

Besarnya organisasi pengelola pendidikan tidak hanya memperbesar biaya manajemen tetapi juga meningkatkan kebutuhan biaya operasional personil. Kebutuhan biaya operasional personil akan meningkat lagi apabila pemerintah daerah mengalokasikan tambahan anggaran untuk memberikan renumerasi dan tunjangan kepada guru dalam rangka meningkatkan kesejateraan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Guru dan Dosen, dan ini merupakan biaya kesempatan (*opportunity costs*) untuk mendanai biaya operasional non-personil sekolah yang semestinya sangat berarti bagi kabupaten/kota yang miskin untuk mendanai biaya operasional non-personil.

#### **Usulan formula sistem pendanaan**

Berbagai variasi formula pendanaan pendidikan dari berbagai tingkat pemerintahan yang masih tumpang tindih, tidak terstruktur dan sarat dengan ketimpangan, menunjukkan bahwa “sistem” pendanaan pendidikan di Indonesia sedang mencari formula yang lebih tepat agar lebih berkeadilan seperti yang diharapkan oleh pasal 47 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Apabila bersikukuh dengan prinsip desentralisasi bahwa pendidikan menjadi urusan yang didesentralisasikan dan harus didanai sepenuhnya melalui APBD kabupaten/kota, jelas kapasitas fiskal sebagian besar kabupaten/kota tidak mencukupi, bahkan sekedar untuk membiayai kebutuhan biaya operasional personil dan non-personil agar layanan pendidikan minimal dapat diberikan pun belum cukup. Sebaliknya, apabila sumber dana yang relatif besar dari Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi dialokasikan dalam bentuk transfer ke daerah melalui sistem dan mekanisme yang ada guna menutupi kekurangan dana kebutuhan rutin, akan mengurangi kebutuhan proporsi minimal alokasi dana pendidikan di Pusat sebesar 20%, dan ini akan dianggap melanggar konstitusi. Melanjutkan sistem dalam pendanaan dalam bentuk dana BOS termasuk ke dalam kategori formula “*Flat Grant*” dapat sedikit mengurangi kesenjangan pendanaan biaya operasional non-personil, tetapi belum

---

<sup>14</sup> Fiske, Edward B. (1996). *Decentralization of Education: Politic and Consensus*. Washington DC: 1996.

menjamin keadilan pendanaan secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan empat masalah yang dihadapi dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Standar Pendanaan Pendidikan, maka sistem pendanaan pendidikan yang berkeadilan adalah yang memberikan kesempatan memperoleh besaran dana per siswa yang sama setidaknya dari ketiga sumber pemerintahan, yaitu: Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ini berarti perlu dipilih formula yang dapat menampung sistem pendanaan bersama sebagai satu paket (*Joint-financing atau Variable Ratio Matching Grant*) dimana kontribusi pemerintah Pusat dan provinsi terhadap kabupaten/kota diberikan dengan perimbangan prosetase untuk menutup kekurangan (top-up) kapasitas fiskal masing-masing kabupaten/kota dalam mendanai pendidikan secara keseluruhan di tingkat sekolah berbasis biaya satuan per-murid. Formula yang demikian disebut dengan sistem "*Percentage Equalizing Grant*" yang telah diterapkan di beberapa Negara Bagian di Amerika Serikat, seperti di Massachusetts.<sup>15</sup> Sistem formula yang demikian diusulkan atas dasar beberapa pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, sistem formula ini lebih menjamin terselenggaranya sistem pendanaan yang lebih berkeadilan dari pada sistem BOS yang menggunakan formula "*Flat Grant*". *Kedua*, dengan sistem ini semua tingkat pemerintahan terikat untuk menyediakan alokasi dana bagi setiap sekolah sesuai dengan variabel prosentase yang ditetapkan sehingga dana tersebut tidak bisa dipindahkan ke mata anggaran lain karena telah memiliki akun sendiri yang dituangkan ke dalam dokumen anggaran. *Ketiga*, dengan sistem paket yang termasuk seluruh komponen biaya pendidikan di sekolah termasuk biaya operasional personil dan biaya investasi, menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan efisiensi biaya personil yang pada saat ini terlalu mendominasi besaran biaya operasional. *Keempat*, sistem formula yang demikian selaras dengan tujuan reformasi keuangan yang mengintegrasikan biaya investasi dengan biaya operasional dalam satuan dokumen anggaran yang berasal dari berbagai sumber sehingga mengurangi beban kerja administratif. *Kelima*, model formula ini selaras dengan prinsip manajemen berbasis sekolah seperti yang dikehendaki oleh pasal 51 UU Nomor 20/2003. *Keenam*, sistem formula ini merupakan perwujudan dari pengelolaan pendidikan sebagai urusan yang bersifat *concurrent* seperti yang dijelaskan dalam butir 6 penjelasan UU Nomor

---

<sup>15</sup> Formula ini digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem tradisional "flat grant" seperti yang disampaikan oleh Jones, Thomas H. (1985). *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy*. New York: Macmillan Publishing Company, pp. 122-127.

32 Tahun 2004. *Ketujuh*, melalui proyek yang didanai ADB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama telah berpengalaman menerapkan sistem pendanaan seperti ini dalam bentuk “*matching grant*” yang sederhana dan ternyata dampaknya terhadap komitmen daerah dan efisiensi penggunaan anggaran sangat terasa. Persoalannya adalah, baik UU Nomor 32 maupun 33 Tahun 2004, PP No. 38/2006, sistem penganggarannya, belum mengakomodasikan sistem ini. Senyampang ketiga peraturan perundangan masih dalam proses revisi, maka opsi ini dapat dijadikan input agar diperhitungkan untuk diintegrasikan kedalam revisi tersebut.

Agar formula itu dapat diterapkan maka standar biaya satuan pendidikan per-siswa per-jenjang dan jenis pendidikan perlu dihitung dan ditetapkan. Standar inilah yang digunakan sebagai basis perhitungan prosentase kontribusi masing-masing tingkat pemerintahan dalam membiayai pendidikan di sekolah. Karena index harga kebutuhan komponen pendidikan di setiap daerah tidak sama, maka selain standar satuan biaya pendidikan perlu ditetapkan pula indexnya per kabupaten/kota agar besaran standar tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan harga riil di setiap daerah. Upaya BSNP untuk menyusun index satuan biaya pendidikan ini selaras dengan kebutuhan ini dan dapat diarahkan untuk menunjang penyusunan formula pendanaan yang diusulkan.

### **Kesimpulan dan saran**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai formula pendanaan pendidikan yang dilaksanakan selama ini, termasuk bantuan dana BOS yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat, telah membantu daerah dalam menyediakan biaya minimal untuk operasional non-personil per siswa, tetapi belum menjamin terlaksananya sistem pendanaan pendidikan yang berkeadilan. Bahkan apabila formula yang ada dipertahankan terus, dalam jangka panjang justru akan memperlebar jurang kesenjangan antar daerah dan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Hal ini merupakan akibat dari terjadinya ketimpangan pendanaan antara Pusat dan daerah, serta antar sekolah, bervariasinya sistem penyaluran anggaran, dan dominasi biaya manajemen dan personil.

Untuk meningkatkan prinsip keadilan dalam sistem pendanaan pendidikan di Indonesia, sistem formula “*Percentage Equalizing Grant*” diusulkan karena selain selaras dengan prinsip-prinsip urusan *concurrent* menurut UU Nomor 32/2004, *Performance-based Budgeting dan Unified Budgeting* seperti yang dikehendaki dalam reformasi keuangan Negara, formula ini juga meningkatkan keadilan pendanaan pendidikan di sekolah yang menunjang pelaksanaan prinsip manajemen berbasis-sekolah. Sistem formula ini perlu didukung dengan adanya standar biaya satuan pendidikan yang memberikan peluang variatif dengan index untuk disesuaikan dengan harga kebutuhan yang berlaku di daerah masing-masing.

Karena dominasi anggaran pendidikan disekolah masih pada biaya manajemen dan personil, disarankan agar implementasi dari formula ini juga diikuti dengan upaya rasionalisasi organisasi dan profesionalisasi personil daerah. Hasil efisiensi dana yang diperoleh dapat dipergunakan untuk meningkatkan pemerataan memperoleh dana pendidikan antar sekolah.

-----

## BIBLIOGRAFI

- Edy Priyono (tt). *Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Masalah dan Prospek*.  
<http://www.scribd.com/doc/75922499/Pembiayaan-Pendidikan-Edy-Priyono>
- Elqassam, Andriyans (2010). *Kajian Singkat Anggaran Pendidikan Jawa Barat*.  
<http://eljundi.wordpress.com/2011/05/29/kajian-singkat-anggaran-pendidikan-jawa-barat/>
- Fiske, Edward B. (1996). *Decentralization of Education: Politic and Consensus*.  
Washington DC: 1996.
- Gozali, Abbas (2003). *Biaya Satuan Pendidikan*. Jakarta: Balitbang-Dikbud.
- Jones, Thomas H. (1985). *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy*.  
New York: Macmillan Publishing Company, pp. 122-127.
- Monk, David H. (1990). *Educational Finance: An Economic Approach*. New York: Mc Graw-Hill Publishing Company.
- Nurhadi, Muljani A (2010). "Effect of Decentralization on the Quality of Education (Overview of Management of Education)". *Journal of Educational Research and Policy*. Jakarta: National Office of Educational Research and Development, Ministry of National Education.
- Sergiovani, Thomas J, Martin Burlingame, Fred S. Coombs, Paul W. Thurston (1980).  
*Educational Governance and Administration*. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall Inc., pp. 234-235.
- Tomayah, Nina dan Syaikhu Usman (2004). *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Peraturan perundangan:
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004  
Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 33 Tahun 2004  
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi,  
dan Pemerintahan kabupaten/Kota.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara .

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah.

-----



## BIOGRAFI SINGKAT

**Muljani A. Nurhadi** adalah dosen tetap di Program Pasca Sarjana Universitas Indraprasta Jakarta yang lahir di Semarang tanggal 8 Agustus 1948. Sekarang menjadi profesor di bidang **Ekonomi Pendidikan dan Manajemen Pendidikan**. Selain mengajar di Universitas tersebut, ia juga pernah mengajar di program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta, dan Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta.

Ia adalah lulusan S1 IKIP Yogyakarta jurusan Pendidikan Sosial, yang kemudian mengambil program diploma ilmu Perpustakaan di Birmingham Polytechnics Inggris tahun 1975. **Master of Education di bidang Pendidikan Non-formal** diperolehnya di University of Massachusetts Amerika Serikat tahun 1982, sedang **Master of Science in Education** diperoleh di State University of New York at Albany tahun 1986 di bidang **Educational Administration and Policy Studies**, dilanjutkan dengan meraih gelar **Doctor in Education** dengan “distinguished award” di universitas yang sama, pada tahun 1988 dengan spesialisasi **Ekonomi Pendidikan (Economics of Education)**.

Kareir manajerialnya diawali sebagai Pembantu Dekan I FIP IKIP Yogyakarta pada tahun 1989 yang disambung dengan menjadi Pemimpin Proyek Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Proyek Bank Dunia) di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 1993-1994 di Jakarta. Baru pada tahun 1994 memperoleh amanah untuk memimpin **Biro Perencanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan** dan pada tahun 2000-2002 mendapat tugas sebagai **Inspektur Jenderal**.

Selepas dari jabatan birokrasi, selain mengajar dan membimbing disertasi sebagai hobi, Muljani kembali menggeluti karier yang dirintisnya sejak tahun 1976 sebagai **konsultan** untuk melaksanakan berbagai studi yang didanai dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, dan merintis aktivitas yang bersifat sosial. Misalnya, mulai tahun 2002 sampai dengan 2008 mendapat kepercayaan untuk memimpin organisasi profesi Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) Pusat dan menjadi Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta periode 2004-2009. Menjelang masa purna tugas, ia lebih menekuni kegiatan mengajar dan menulis.

Korespondensi sangat terbuka melalui:

e-mail:

[nurhadi@cbn.net.id](mailto:nurhadi@cbn.net.id).

[muljaninurhadi@yahoo.com](mailto:muljaninurhadi@yahoo.com)

Hp. : 0811 949 948

## ABSTRAK

Tadjri, Imam. 2012. Meningkatkan partisipasi Orang Tua dalam pembiayaan pendidikan pada jenjang SMP (Studi di kawasan pedesaan di Kota Semarang). Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

**Kata kunci:** meningkatkan partisipasi orang tua, pembiayaan pendidikan, kawasan pedesaan

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1) Ragam upaya untuk meningkatkan partisipasi, (2) besaran partisipasi, (3) pengaruh terhadap ekonomi keluarga. Penelitian dikenakan kepada orang tua siswa di 5 SMP di wilayah pedesaan Kota Semarang. Data diolah dengan statistik deskriptif dan dianalisis dengan pendekatan *mixed method*. Hasil penelitian menunjukkan: 1) ragam upaya yang untuk meningkatkan partisipasi antara lain meliputi: (a) sosialisasi dalam pertemuan warga, (b) jimpitan panen, (c) pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh, dan (d) kerjasama jasa; (2) besaran partisipasi secara keseluruhan rata-rata mencapai Rp. 1050.00 / bulan/orang tua; 3) pengaruh terhadap ekonomi keluarga rata-rata 2.75 % mengurangi pendapatan keluarga. Rekomendasi yang diajukan adalah: 1) sekolah agar meningkatkan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi, dan 2) memotivasi keluarga untuk meningkatkan besaran partisipasi.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang memerlukan biaya besar. Tidak ada satupun negara di dunia yang menyelenggarakan pendidikan tanpa harus mengeluarkan biaya. Setiap negara mempunyai cara sendiri-sendiri dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 diuraikan dengan jelas bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam kenyataan seluruh pembiayaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Besar biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam membiayai pendidikan sebesar 20 % dari APBN di tingkat nasional atau 20 % di tingkat daerah (PP. No. 48 Tahun 2008/

Besarnya biaya pendidikan yang harus di tanggung pemerintah tentu saja tidak begitu saja dapat terpenuhi karena bagaimanapun kemampuan keuangan pemerintah juga terbatas. Apalagi apabila dikaitkan dengan persoalan politik berkenegaraan persoalan pembiayaan pendidikan menjadi suatu persoalan tarik ulur antara kepentingan politik dengan kepentingan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Lebih dari persoalan politik masyarakatpun ikut memberikan warna pembiayaan pendidikan. Banyak lapisan masyarakat yang menghendaki pendidikan gratis dalam arti masyarakat tidak menanggung barang sepeserpun biaya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Ini merupakan persoalan yang pelik. Karena pendidikan gratis tidak berarti penyelenggaraan pendidikan tidak memerlukan biaya. Dengan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan beban pemerintah semakin berat dalam membiayai

pendidikan. Meski demikian masyarakatpun masih menuntut agar pendidikan mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Sebenarnya tanggung jawab masyarakat dalam pendanaan pendidikan dapat dibagi dalam 2 (dua) katagori, yaitu tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Sedangkan tanggung jawab masyarakat diluar penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat atau dengan kata lain tanggung jawab masyarakat selaku orangtua atau wali peserta didik akan meliputi biaya pribadi peserta didik, biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan, biaya personalia yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan dan pendanaan sebagian dari biaya operasi pendidikan dalam rangka pengembangan sekolah yang biasanya dipungut berdasarkan musyawarah dan mufakat melalui Komite Sekolah.

Pola pendanaan operasi sekolah daslam rangka pengembangan sekolah yang disepakati berdasarkan musyawarah mufakat melalui Komite Sekolah inilah yang memberi peluang kepada sekolah maupun masyarakat untuk mencari sumber-sumber pendanaan di masyarakat. Kekurangan pendanaan operasi sekolah biasanya terjadi pada kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler seperti kegiatan kepramukaan, Palang Merah Remaja (PMR), kesenian, latihan dasar kepemimpinan, Palang Merah Indonesia (PMI), keterlibatan dalam lomba-lomba, *out bond*, bazaar, kegiatan keagamaan, pengembangan karakter bangsa dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut setelah berlakunya pendanaan sekolah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Biaya Operasional Sekolah (BOS), dan Biaya Operasional Manajemen (BOM) menurun drastis volume kegiatannya.

Alasan yang dikemukakan oleh berbagai sumber di kalangan SMP khususnya mengenai kurangnya pendanaan kegiatan ekstra kurikuler adalah: (1) ketersediaan dana kegiatan ekstra kurikuler memang terbatas, (2) pemerintah tidak mengijinkan memungut dari dana dari masyarakat karena sudah ada DAK, BOM, dan BOS, (3) Komite Sekolah kurang member perhatian terhadap program-program kegiatan ekstra kurikuler . Pada SMP-SMP di perkotaan di mana kegiatan ekstra kurikuler mendapat dukungan mantap dari masyarakat sekitar pendanaannya mungkin tidak begitu menjadi persoalan. Berbeda halnya pada SMP-SMP di

pinggiran kota atau di pedesaan mencari sumber-sumber pendanaan bukan pekerjaan yang mudah.

Meningkatkan partisipasi orang-orang tua di wilayah pedesaan dalam pendanaan pendidikan afektif hasilnya apabila menggunakan pendekatan informal yaitu pendekatan yang mengutamakan hubungan kemanusiaan. Melalui pendekatan kemanusiaan masyarakat diajak untuk memikirkan dan mengupayakan bersama tentang persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya sehingga mereka merasa dihargai dan didudukkan pada posisi yang sederajat. Di kalangan masyarakat Jawa suatu kegiatan bersama yang dikemas dalam tema “*sak iyeg sak eko prayu*” (bersama kita bisa) akan lebih mendapat dukungan daripada pendekatan birokrasi atau pendekatan formal. Persoalannya adalah pendekatan informal apakah yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam masyarakat ada komunitas-komunitas sebagai wadah merefleksikan hubungan informal yang sudah terbentuk berpuluh tahun. Begitu kuatnya hubungan emosional dalam komunitas informal sehingga dalam masyarakat Jawa muncul istilah “*paguyuban*” (kerukunan) dan “*patembayan*” (satu wadah). Kedua istilah itu menjadi ciri khas masyarakat Jawa yang dalam kehidupan sehari-hari tampil sebagai masyarakat yang rukun dan dalam satu komunitas, bersikap sama, berperasaan sama (Sumardjan, 1998. 213). Masyarakat yang demikian ikatan kolektif dan kemunalnya sangat kuat.

Dalam masyarakat *paguyuban* dan *patembayan* terbentuk pula komunitas yang lebih kecil bagian dari masyarakat itu sendiri, suatu komunitas yang terbentuk berdasarkan kepada kebutuhan sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama (Abdulah, T. 2001.57) misalnya kelompok arisan, kelompok pengajian, kelompok jasa dan sebagainya. Kelompok-kelompok kecil ini merupakan kendaraan sosial yang efektif sekali untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan informasi lainnya (Kartodihardjo.1998. 79). Kendaraan sosial ini juga berperan dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan nilai, norma dan budaya yang ada di dalamnya bahkan menjadi filter terhadap masuknya budaya asing. Dalam hal pendidikan kendaraan sosial banyak mengambil peran misalnya sebagai media sosialisasi anak, tempat menanamkan nilai budi pekerti, pembentukan karakter bangsa, tempat berlatih memahami persamaan dan perbedaan, pelatihan peran-peran sosial, dan sebagainya. Kendaraan sosial di masyarakat pedesaan masih banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai keperluan dan keberadaannya masih terjaga dengan baik bahkan terkadang kendaraan sosial dijadikan ikon

kemadirian misalnya komunitas usaha bersama, kelompok kegiatan kesenian, komunitas layanan jasa kesehatan, atau majelis taklim, dan sebagainya.

Proses Pendidikan berlangsung sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat. Konsekuensinya orang tua, masyarakat dan pemerintah harus saling bahu membahu mendukung berlangsungnya proses pendidikan agar dapat berjalan dengan sebaik mungkin dan menghasilkan manusia-manusia unggul yang bermanfaat bagi orang tua, masyarakat dan Negara. Dan karena itulah perundang-undangan pendidikan di Indonesia meletakkan tanggung jawab pendanaan pendidikan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah (UU RI No. 20 Th. 2003.Ps 46. a.1) meskipun dalam praktiknya pemerintah yang paling besar bertanggung jawab terhadap jalannya pendidikan. Atas dasar pikiran tersebut sekecil apapun orang tua dan masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pendanaan pendidikan.

Persoalan yang sering muncul di lapangan adalah seringnya terjadi penyimpangan dalam pengelolaan pendanaan pendidikan baik pendanaan yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari swadaya masyarakat. Bahkan pemerintah telah menurunkan perundang-undangan tentang larangan memungut biaya apapun dari masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan (PP 48 Th 2008). Tetapi pada saat bersamaan sekolah dan masyarakat merasakan adanya kendala dalam pelaksanaan program-program sekolah khususnya pada program-program kegiatan ekstra kurikuler seperti perkemahan kepramukaan, eksposisi, lomba seni budaya atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya insidental misalnya mengikuti lomba pada event tertentu, menerima kunjungan, memberi bantuan untuk korban bencana, dan sebagainya.

Kegiatan-kegiatan insidental memang seperti buah simalakama. Dikerjakan dapat meningkatkan perolehan *credit point* akreditasi sekolah dengan konsekuensi menyediakan dana (karena tidak teranggarkan biasanya sekolah melakukan rekayasa (*igah-iguh*) peruntukan anggaran) tetapi kalau tidak diselenggarakan sekolah tidak memperoleh keuntungan apapun bahkan mungkin di cemooh oleh teman seprofesi atau bahkan oleh atasan sebagai sekolah yang tidak partisipatif, kurang kreatif atau tidak gaul. Oleh karena itu sekolah berupaya keras untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan pendidikan dengan tetap mengacu kepada perundangan yang berlaku, tidak memaksa, tidak mengandung konsekuensi yang berkaitan dengan penerimaan atau kelulusan siswa, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada atasan atau kepada masyarakat.

Sekolah-sekolah di wilayah pedesaan Kota Semarang memiliki kiat-kiat tersendiri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut membiayai program sekolah. Inisiatifnya bahkan muncul dari tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Perhatian masyarakat terhadap kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan insidental terutama muncul pada saat libur panjang (liburan semester), bulan puasa dan pada saat banyak terjadi musibah. Pada saat-saat seperti itu banyak orang tua yang berharap anaknya mengikuti kegiatan ekstra kurikuler di sekolah agar anak-anak dapat memanfaatkan waktunya untuk kegiatan yang bermanfaat dari pada melakukan kegiatan sembarang yang tidak produktif, susah diawasi, dan membutuhkan anggaran tambahan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap (1) Ragam upaya untuk meningkatkan partisipasi, (2) besaran partisipasi, (3) pengaruh terhadap ekonomi keluarga. Penelitian ini dikenakan kepada orang tua siswa SMPN di wilayah pedesaan Kota Semarang yang diambil dari Kec. Mijen, Kec. Semarang Utara, Kec. Banyumanik, dan Kec. Pedurungan. Sampel sekolah diambil dari setiap kecamatan satu SMPN yang dianggap mewakili “SMP wilayah pedesaan” atau SMPN yang dalam dalam penilaian peringkat sekolah termasuk dalam kategori sedang. Orang tua sampel setiap sekolah diambil dari tiga kelas yang mewakili Kelas 1, 2 dan 3. Setiap kelasnya diambil 20 orang tua siswa yang diambil secara acak. Jumlah subyek sampel seluruhnya : 4 SMPN X 3 (Kelas) X 20 (orang tua) = 240 orang tua siswa.

Data dikumpulkan dengan instrumen Angket yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan diolah dengan rumus rata-rata hitung serta dianalisis dengan pendekatan *mixed method*. Angket kepada orang tua murid disampaikan melalui masing-masing anaknya yang belajar di sekolah sampel. Tingkat pendapatan keluarga digunakan kriteria Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan keluarga didasarkan kepada pengakuan responden tentang penghasilan yang diperoleh selama satu bulan dengan mengabaikan peruntukan penghasilannya. Sedangkan pengaruh partisipasi pendanaan terhadap pendapatan keluarga dihitung dengan membagi rata-rata nominal partisipasi dengan rata-rata penghasilan keluarga. Cara penghitungan yang demikian dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya bias data yang diperoleh dari pihak sekolah atau Komite Sekolah. Pihak sekolah dan Komite sekolah juga menyepakati cara-cara yang digunakan untuk menghitung besaran partisipasi dan pengaruhnya terhadap pendapatan keluarga.

## Temuan dan pembahasan

Sesuai dengan tujuannya penelitian ini menghasilkan beberapa temuan:

1. Ragam upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan partisipasi meliputi: (a) sosialisasi dalam pertemuan warga, (b) kunjungan rumah, (c) jimpitan panen, (d) nara sumber, (e) pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh, (f) pemasaran produk sekolah, dan (g) kerjasama jasa. Upaya-upaya tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dengan komite sekolah dan warga sekitar. Pihak sekolah dengan pihak Komite Sekolah secara berkala mengunjungi komunitas-komunitas yang ada dalam masyarakat seperti kelompok pengajian, majelis yasinan, tahlilan, manakiban, pertemuan RT/RW untuk menyampaikan program-program sekolah di wilayahnya dan menawarkan produk-produk sekolah seperti grup kesenian, nara sumber. Di samping itu juga menawarkan kerjasama pemasaran produk misalnya kantin sekolah memasarkan produk jajanan hasil ibu-ibu PKK RT/RW/Kelurahan/Kecamatan dan sebaliknya sekolah menitipkan produk hasil kerja siswa misalnya kerajinan tangan (sulaman dan hiasan dinding).
2. Rata-rata besaran partisipasi pendanaan yang diberikan orang tua siswa kepada sekolah setiap bulannya mencapai Rp. 1.050.00/ orang tua siswa. Besaran partisipasi ini meningkat pada saat musim panen atau pada saat musim hajatan. Pada saat musim panen buah orang tua memberikan sebagian hasil panennya ke sekolah yang sebagian diperuntukkan bagi guru dan sebagian lagi disumbangkan ke kantin sekolah. Pada saat panen padi orang tua menyumbangkan sebagian hasilnya ke sekolah lewat Guru Agama di sekolah bersangkutan. Sedangkan pada saat musim hajatan masyarakat mendatangkan grup musik dan tari dari sekolah untuk menghibur tamu-tamunya dengan imbalan yang sangat terjangkau oleh masyarakat. Demikian pula masyarakat dapat memanfaatkan guru di sekolah yang memiliki kemampuan memandu acara hajatan (*pranata cara*) untuk keperluan hajatan dengan imbalan yang sangat terjangkau. Istilah yang digunakan dalam menghargai jasa yang diberikan sekolah harga persaudraan (*rega paseduluran*)
3. Pengaruh partisipasi terhadap ekonomi keluarga sebesar 2.75 % artinya bahwa setiap keluarga rata-rata penghasilannya berkurang 2.75 % karena disumbangkan untuk pendanaan sekolah. Bila diilustrasikan apabila dalam sebulan setiap orang tua siswa berpenghasilan Rp. 150.000.00 penghasilan itu akan berkurang sebesar 2.75 % X Rp. 150.000.00 = Rp. 4.125.00.

Partisipasi orang tua siswa sebagai bagian terdepan dari masyarakat terhadap pendanaan pendidikan merupakan refleksi tanggung jawab masyarakat terhadap pemberian amanat kepada sekolah dalam mendidik generasi muda. Tanpa peran masyarakat sekolah dapat kehilangan akar dan perannya dalam mendidik generasi muda. Ini bukan persoalan yang sederhana karena dengan berperannya masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan mengandung konsekuensi masuknya berbagai peran-peran lain pada masyarakat ke dalam system sekolah. Teori tradisional mengatakan bahwa anak sebagai generasi muda tumbuh dan berkembang melalui pendidikan di sekolah dan kelak apabila anak selesai menerima pendidikan kembali masuk ke masyarakat sebagai individu yang lebih berkualitas untuk meneruskan perannya sebagai bagian dari generasi (Kartodihardjo.1998.46).

Sebaliknya sekolah sebagai pemegang amanat masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan seharusnya mencerminkan keadaan masyarakat sekitarnya agar sekolah tidak kehilangan akarnya dan tidak menjadi istana gading dalam mendewasakan generasi muda sehingga keberlangsungan suatu generasi ke generasi berikutnya akan berlangsung terus sebagaimana untaian tali temali yang tak terputus dan terus berkembang mengikuti perkembangan masa. Terselenggaranya pendidikan yang tidak berdasar kepada pertumbuhan masyarakat merupakan upaya yang sia-sia dan pemborosan terhadap potensi masyarakat dan sekolah kehilangan fungsi dan perannya sebagai pemegang amanat masyarakat (Ilich. 1997). Sekolah modern adalah sekolah yang penyelenggaraan pendidikannya didasarkan kepada konstruksi sosial (Vigotsky dalam Suhaenah. 2006) sehingga terbangun hubungan antara masyarakat dengan sekolah bagaikan hubungan antara orang tua dengan anaknya.

Di berbagai Negara di dunia selalu melindungi partisipasi masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pendidikan seperti halnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan dibakukan dalam produk-produk perundang-undangan sejak perundang-undangan pendidikan no 12 Th. 54 sampai UU RI No. 20 Th. 2003 dan produk-produk perundangan-undangan turunannya. Ini menandakan bahwa peran masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan memang tidak dapat diabaikan meskipun di Indonesia dewasa ini muncul perundang-undangan yang melarang adanya pungutan apapun yang dilakukan sekolah terhadap masyarakat (PP.48.2008). Ini tidak berarti masyarakat tidak mempunyai peran apapun karena sebenarnya partisipasi masyarakat telah disalurkan melalui jalur lain dan dilindungi perundang-undangan yang lain pula.



**Daftar Pustaka**

- Abdulah, T. 2001. Nilai dan Norma Masyarakat. Jakarta. Jasper Press
- Kartodihardjo, K. 1999. Kebudayaan Indonesia. Jogjakarta. Gajahmada Press.
- Suhaenah, A. 2006. Pembelajaran Berwawasan Masyarakat. UT-Dikti. Jakarta
- Sumardjan, S. 1998. Sosiologi Pedesaan. Jakarta. Gramedia
- Illich, Ivan. 1997. Sekolah Masyarakat. Jakarta. Obor Indonesia
- PP. 48 Th. 2008. Jakarta. Sinar Grafika
- UU RI No. 20 Th. 2003. Jakarta. Sinar Grafika

# **Alam dan Masyarakat: Sebagai 'Kurikulum & Sarana Pembelajaran' Terbuka**

*Bedjo Sujanto  
Rektor UMG*

## **Pendahuluan**

Semua pihak menyadari bahwa peranan sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, diharapkan dapat menyediakan/menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Untuk dapat mewujudkan misi lembaga tersebut, setiap institusi pendidikan harus menyediakan berbagai hal yang terkait dengan proses belajar peserta didik yang diasuhnya. Salah satunya adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam tulisan ini meliputi semua hal yang dapat membantu peserta didik dan para pendidiknyanya untuk melakukan proses pembelajaran dengan baik di lembaga pendidikan tersebut. Mungkin saja pengertian ini tidak sama persis dengan definisi di dalam berbagai buku yang telah beredar di masyarakat. Artinya apabila sarana dan prasarana dalam konteks ini keluar dari pedoman formal tentang sarana dan prasarana pendidikan, agar pembaca memakluminya. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan sarana dan prasarana, tidak hanya sarana penunjang yang sengaja dibuat untuk membantu proses pembelajaran, tetapi juga lingkungan alam yang kebetulan dapat dijadikan sebagai sumber belajar atau dapat membantu sumberbelajar yang lainnya, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik, yakni proses yang mampu memberikan pencerahan kepada peserta didik.

Sekolah seringkali terpaku kepada kepada hal-hal yang sangat formal, kurang luwes bahkan kaku, ketika menterjemahkan aturan-aturan formal yang terkait dengan pembelajaran, karena seperti itu pula yang diminta oleh sebagian besar pejabat di lingkungan pendidikan. Setelah tuntutan aturan formal terpenuhi, upaya kreatif yang seharusnya dilakukan yang mampu lebih jauh mencerdaskan peserta didik, sering terabaikan.

Bahkan banyak sekolah yang kemudian hanya mengajarkan secara serius matapelajaran-matapelajaran yang akan di'uji-nasional'kan, dan kemudian tidak sempat menyentuh materi lainnya, padahal materi-materi tersebut sangat berguna bagi kehidupan manusia di masa depan. Apalagi ujian nasional yang hanya menguji pengetahuan saja, maka tampaknya hanya buku yang terkait dengan UN-lah yang selalu dengan siswa dan juga guru.

Namun dibalik kondisi seperti itu, masih ada juga sekolah-sekolah yang mampu membuat terobosan-terobosan, yang kemudian ternyata mampu menghasilkan karya nyata yang mencengangkan, seperti karya anak-anak SMK Solo yang mampu menelorkan mobil Kiat ESEMKA, dan beberapa minggu ini muncullah sekolah-sekolah seperti itu, yang sebelumnya tidak pernah berani mengekspose hasil-hasil gagasan besar, karena mungkin kurikulumnya tidak menuntut seperti itu. Padahal ternyata banyak sekali SMK yang telah menunjukkan kehebatannya, namun tidak pernah terpublikasikan ke masyarakat luas, sehingga prestasi mereka tidak diketahui oleh masyarakat banyak.

### **Masyarakat Dan Alam: Sebagai Kurikulum Terbuka & Selalu Up to date**

Sebagai ilustrasi: SMKN 2 Solo telah memanfaatkan bengkel mobil Kiat, untuk memproduksi mobil Kiat ESEMKA yang tiba-tiba menjadi terkenal berkat keberanian sang Walikota yang keluar dari kebiasaan pejabat pada umumnya. Keberanian Walikota Solo, Pak Jokowi menggunakan mobil Kiat ESEMKA sebagai mobil dinasny, sebuah terobosan yang secara langsung melambungkan nama sekolah yang membuat mobil tersebut. Ini juga berkat keberanian para guru dan pimpinan sekolah SMK tersebut keluar dari 'pakem' birokrasi pendidikan, dengan memanfaatkan 'kurikulum dan sarana pendidikan' yang ada ditengah masyarakat. Kalau nantinya benar-benar dapat menjadi model mobil nasional, pasti akan banyak mobil-mobil nasional lainnya yang saat ini siap diproduksi oleh SMK-SMK lainnya di tanah air, seperti Bandung, Serang, dan masih banyak lagi.

Setelah teridentifikasi berapa jenis mobil yang mampu dibuat oleh sekolah-sekolah tersebut, harus mulai dipikirkan pencarian partner kerja sekolah, agar keberlanjutan

proyek tersebut berjalan baik. Ini artinya sekolah-sekolah dan pemerintah harus memperluas jaringan sebagai bentuk pengembangan kurikulum sekolah sekaligus menjadikan masyarakat sebagai sarpras belajar baru bagi SMK-SMK yang membutuhkan partner. Sejak saat ini perlu diidentifikasi akan menjadi berapa jenis mobil yang siap dan mungkin dilanjutkan ke produksi secara massal. Untuk itu pasti bukan sekolah lagi yang memikirkannya, akan tetapi pengambil kebijakan yang harus menindaklanjuti dengan berbagai kebijakan yang mendukungnya demi kemudahan dan kelancaran proyek tersebut. Masyarakat secara lebih luas diberi porsi untuk mengambil peran yang dapat dilakukannya, dengan tetap saling memberikan benefit bagi semua pihak yang berkontribusi menyukseskan proyek tersebut. Ini adalah bentuk nyata sekolah memperluas kurikulumnya.

Ini baru salah satu contoh keberhasilan proyek yang dilakukan oleh sekolah yang ada dan hidup serta berkembang bersama masyarakat dimana sekolah itu ada. Proyek-proyek berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam di daerah ini yang sangat kaya dengan mineral dan kekayaan alam lainnya, agar dapat mendukung berbagai alat produksi yang dapat memperkuat rintisan industry mobil tersebut. Juga dibutuhkan 'showroom' untuk memajang hasil-hasil produksi mobil dan pendukungnya, sehingga masyarakat yang akan memanfaatkan mobil tersebut merasa terjamin layanan purnajualnya. Disinilah peranserta masyarakat dan alam sekitar yang menjadi penopang pemroduksian karya anak SMK tersebut. Yang penting lainnya, adalah ketersediaan sumber dana dan bahan yang menjadi pendukung proyek mobil nasional rintisan para siswa SMK dan juga produk-produk lainnya, sehingga nantinya semua komponen mobil dapat dibuat atau diassembled di dalam negeri. Jelas disini dibutuhkan sarana dan prasarana ini serta penunjangnya, sehingga gagasan cerdas seperti itu mampu membawa nama harus sekolah dan wilayah, serta bernilai ekonomis yang dapat menyejahterakan banyak orang.

### **Masyarakat Dan Alam: Sebagai Sarpras Pembelajaran yang Tak Pernah Lekang Oleh Zaman**

Alam dan masyarakat yang ada didalamnya, merupakan sumber belajar yang sangat dinamis, karena terus berubah sesuai dengan perkembangannya. Kadang

alam sendiri juga bergolak dalam penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. Perubahan sebagai reaksi atas aksi masyarakat yang memanfaatkan alam sebagai tempat kehidupan mereka. Masyarakat mengeksploitasi alam untuk memenuhi kehidupannya. Semua itu kalau dicermat, dapat dijadikan wahana belajar yang tak pernah habis, karena memang bergerak sangat dinamis, sekaligus adaptif dan juga fleksibel.

Kenapa adaptif dan kenapa fleksibel? Masyarakat adalah sebuah institusi yang berubah secara terus-menerus, menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan, yang tidak dapat dihentikan. **Masyarakat** akan terus berubah dan berkembang, seiring dengan perubahan lingkungan akibat berkembangnya kebutuhan masyarakat itu pula. Masyarakat sebagai kumpulan orang-orang, dengan ide-ide dan gagasan-gagasan, akan terus berkembang sejalan dengan meningkatnya taraf dan cara berpikir, meningkatnya berbagai kebutuhan, hal ini merupakan sarana dan sekaligus obyek belajar bagi semua orang, baik yang di sekolah maupun masyarakat. Di sinilah proses peradaban manusia bergerak dinamis, dengan gagasan baru, tuntutan baru, dan terus akan berproses bersamaan perubahan yang dikehendaki. Masyarakat merupakan tempat pendidikan yang selalu berkembang dan up to date. Ia akan berubah manakala masyarakat menginginkannya.

Oleh karena itu, sekolah-sekolah di tanah air yang saat ini masih belajar dengan cara yang amat konvensional, harus mau membuka diri untuk melihat, mencontoh atau meng-create sumber-sumber belajar baru di masyarakat. Kurikulum dan sarana belajarnya, bukan saja yang tertulis di dalam buku yang cenderung verbalis, namun harus berani keluar dari kebiasaan dengan belajar di luar sekolah secara terjadwal, sehingga berbagai pengalaman baru diperoleh dari masyarakat.

Ilustrasi lainnya, misalnya memanfaatkan gunung merapi pasca letusan sebagai sarana belajar siswa sekolah. Muntahan lahar merapi yang kaya dengan berbagai mineral, merupakan obyek belajar yang baru dan kaya dengan berbagai hal yang mungkin belum dikenal oleh para siswa. Letusan gunung bermakna bukan saja bahaya yang mengancam kehidupan, sehingga manusia harus berhati-hati, namun

sekaligus berbagai potensi sumber penghidupan bagi masyarakat, apabila dikelola secara baik dan benar.

Kondisi alam lainnya seperti pantai yang memanjang di selatan DIY, yang kaya dengan arus dan gelombang laut, serta angin pantai yang tak pernah berhenti. Potensi arus dan gelombang laut serta angin laut, dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini artinya bahwa pantai dengan segala potensinya, merupakan wahana pembelajaran yang sangat luas, dan manfaatnya dapat digunakan sebagai peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan pemerintah untuk melegalisasi berbagai kegiatan ko-kurikuler dengan memanfaatkan alam sekitar termasuk masyarakatnya sebagai sarana pembelajaran bagi lembaga-lembaga pendidikan di tanah air.

Rintisan sekolah-sekolah seperti ini sudah banyak sekali, selain SMK-SMK yang telah disebutkan diatas, juga ada sekolah 'Mangunan' di Jogjakarta ini, juga sekolah-sekolah alam yang sempat ngetrend di tanah air. Dua yang disebutkan terakhir, adalah lembaga pendidikan yang secara total menggunakan alam dan masyarakat sebagai kurikulum dan sarana pembelajarannya.

Kedepan, mudah-mudahan sekolah-sekolah pertanian, sekolah kehutanan dan sekolah perikanan dapat berkembang dengan baik, mengingat potensi pertanian, kehutanan dan perikanan di tanah air sangat besar. Selama ini pertanian, perkebunan, kehutanan serta perikanan, banyak dimanfaatkan oleh pihak asing, karena kita sendiri kurang serius memanfaatkannya, karena lembaga pendidikan kita tidak menjadikan semua kekayaan ini sebagai basis pembelajaran. Kesadaran dan kemauan politik Negara untuk menjadikan kekayaan alam sebagai basis pembelajaran dan sumber kehidupan, masih ditunggu. Pelan tapi pasti, kesadaran ini akan muncul, karena didepan mata, kita melihat pihak asing yang telah menggali dan memanfaatkan berbagai sumber kekayaan kita demi kepentingan mereka.

Mari kita bangkit, bahwa alam kita adalah kurikulum dan sarana pembelajaran riil kita, yang sekaligus sebagai sumber kehidupan yang nyata di depan mata kita.

## **Kesimpulan:**

1. Masyarakat di sekitar (sekolah-sekolah) kita, adalah sumber inspirasi menyusun dan menetapkan kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah yang selalu up to date, terus berkembang, dinamis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
2. Masyarakat dan alam sekitar kita dengan segala potensinya adalah tempat berpraktek belajar, sekaligus sarana belajar konkret bagi siswa, yang selalu berubah menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakatnya.
3. Alam sekitar menyimpan berbagai potensi, yang kalau digali dan dimanfaatkan akan memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat.
4. Alam kita yang sangat kaya dengan berbagai potensinya merupakan tempat belajar yang sangat menarik dan sangat kaya memberikan pengalaman kepada para pembelajar.

## **Peran ICT Sebagai Media Baru Untuk Memenuhi Sarana (Infrastruktur, Platform, Mekanisme) Pendidikan Masa Depan**

**Dr. Ir. Gatot Hari Prowirjanto**

Direktur SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC)

**Hafid Setyo Hadi**

Manajer IT-Network SEAMOLEC

### **Abstrak**

*Information and communication technology* (ICT) telah dan akan terus berkembang (baik *hardware* dan *software*) seiring dukungan teknologi material dan mikroelektronika. Dewasa ini, ICT telah menjadi *new media* (media baru) bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam sektor pendidikan. Media baru tersebut mampu memenuhi kebutuhan sarana akan **infrastruktur, platform, dan mekanisme** pengelolaan informasi. Melihat dunia pendidikan Indonesia saat ini, tiga hal pemikiran penulis tersebut diharapkan menjadi pengingat bersama akan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang kuat antar unit dan fungsi di bawah Kementerian.

Trend infrastruktur dalam media baru adalah internet. Internet menjadi suatu kebutuhan mutlak akan jalan tol informasi pendidikan. Dengan independensi internet, pendidik dan peserta didik, pererta didik dan peserta didik lainnya dengan mudah berinteraksi melalui media ini. Selanjutnya, trend platform saat ini adalah web 2.0. Revolusi web 2.0 memberikan banyak aplikasi yang memudahkan pengguna mendapatkan, mengolah, dan menyebarkan informasi, contohnya e-learning. Sedangkan trend mekanisme dalam media baru adalah *social media* (media sosial). Media sosial memberi warna baru komunikasi yang merevolusi arah *one to many* menjadi *many to many*.

Pengalaman kita membangun jejaring pendidikan sebagai kebijakan pemerintah telah dimulai dengan baik, meski saat ini terpantau seperti jalan tol yang sepi akan lalu lintas konten dan program pembelajaran. Implementasi mengintegrasikan platform dan mekanisme yang setengah hati dan belum didukung kuat oleh pemerintah, membuat konten dan program pembelajaran digital kurang terproduksi. Hal tersebut menjadi tantangan bersama untuk meramaikan kembali jejaring yang telah terbangun dengan membangun program dan konten memanfaatkan dukungan platform yang sesuai dan media sosial yang santun. Kementerian diharapkan menjadi kolaborator tiga sarana tersebut dalam memberikan pendidikan masa depan kepada anak bangsa yang menjunjung tinggi pentingnya konten lokal dan kemandirian sumber daya manusia.

Kata kunci: ICT, *new media*, internet, web 2.0, e-learning, *social media*, dan konten.



## **A. Pendahuluan**

### **A.1. Latar Belakang**

Dalam menghadapi era digitalisasi dan globalisasi, sektor pendidikan harus peka terhadap lingkungan dan mau berubah menuju ke arah yang positif. ICT atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berkembang menjadi *new mediadan* memberikan segala kekuatannya untuk pendidikan agar menjadi lebih baik. Penulis melihat adanya potensi pengembangan pendidikan Indonesia masa depan yang lebih maju. Hal tersebut didorong atas kondisi aktual pemanfaatan TIK baik di Indonesia maupun di dunia saat ini, yaitu:

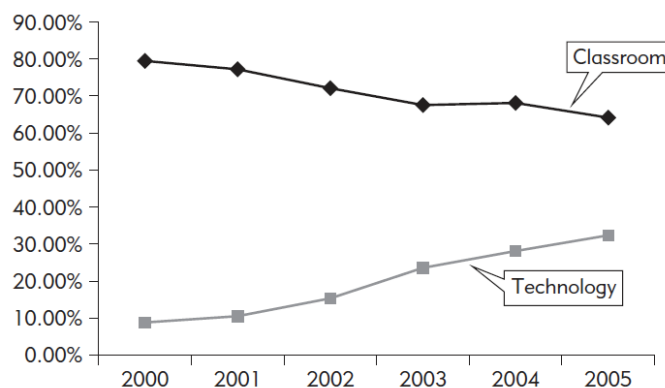
1. Meski telah menerapkan pondasi jejaring internet untuk pendidikan, namun belum secara optimal dimanfaatkan. Saat ini, jejaring tersebut terpantau seperti jalan tol yang sepi akan lalu lintas konten dan program pembelajaran.
2. Meski belum semua wilayah Indonesia terjangkau, internet telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.
3. Revolusi positif platform berbasis internet generasi kedua telah melahirkan beragam aplikasi yang memudahkan dan membantu aktivitas hidup manusia, termasuk pembelajaran.
4. Meski memiliki dampak negatif, peran *sosial media* telah membentuk peradaban baru manusia yang aktif, kolaboratif, dan kritis dalam berkomunikasi. *Sosial media* memberi warna baru komunikasi yang merevolusi arah *one to many* menjadi *many to many*, dan itu diasumsikan sangat penting untuk pendidikan.

### **A.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka perlu adanya penyelesaian masalah dengan menjawab rumusan berikut, “Bagaimana merangkai kekuatan ICT sebagai media baru untuk memenuhi kebutuhan pendidikan akan sarana dalam menghadapi tantangan era baru, *digital age*?”

## B. Pembahasan

Pendidikan yang diterapkan dewasa ini sudah banyak menggunakan dukungan kekuatan *information & communication technology* (ICT) atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Oleh karena itu pendidikan yang mengintegrasikan ICT disebut sebagai pembelajaran secara elektronik atau *electronic-learning* (e-learning). E-learning (Clark & Mayer, 2008) merupakan pembelajaran yang disampaikan melalui sebuah komputer (termasuk CD-ROM, Internet, atau intranet) yang dirancang untuk mendukung pembelajaran secara individu atau tujuan kinerja kelompok. Menurut Clark & Mayer lagi, disajikan dalam Gambar 1 bahwa saat ini pembelajaran dan pelatihan yang menggunakan bantuan teknologi terus meningkat, sedangkan yang menggunakan pola konvensional (kelas tatap muka) semakin menurun. Masih dalam Clark dan Mayer, Bernard *et al.* (2004) juga membandingkan hasil belajar dari *electronic open and distance learning* atau ODL elektronik dan pembelajaran tatap muka, dan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan



**Gambar 1. Persentase jam pelatihan yang disampaikan melalui kelas dan teknologi.**  
(Sumber data dari Sugrue dan Rivera, 2005)

ICT adalah peralatan atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, mengolah, dan saling bertukar informasi dengan individu lain

(Rusman). Internet memenuhi peran sebagai bentuk *new media* (media baru). Adapun karakteristik media baru adalah sebagai berikut (Rogers, 1994): ***Interactive***- Interaktif adalah kemampuan sistem komunikasi baru (yang biasanya salah satu komponennya adalah komputer) yang merespons penggunaannya, hampir sama seperti percakapan individual. Media baru lebih interaktif dibandingkan dengan media konvensional dan dapat dilakukan dengan banyak orang sehingga hampir sama seperti interaksi biasa. Karena itulah media baru merupakan kombinasi antara media massa dan saluran interpersonal. ***De-massification*** - Merupakan sifat media baru yang mampu menghasilkan pesan khusus antar individual. Sifatnya lebih personal dan tidak ditujukan kepada massa. Demasifikasi berarti adanya perubahan dari penghasil pesan menjadi konsumen media. ***Asynchronous*** - Dengan adanya sifat ini, para pengguna dapat menerima atau mengirim informasi atau pesan kapanpun mereka inginkan. Dalam sistem komunikasi baru pengguna tidak harus berkomunikasi dengan waktu yang sama. Seseorang bahkan dapat bekerja di rumah dengan jaringan komputer tanpa harus berada di kantornya.

Rogers juga menyebutkan beberapa contoh yang termasuk dalam media baru adalah jaringan telekonferensi, sistem pesan elektronik, komputer, dan kabel televisi interaktif (Rogers, 1994). Dimensi dari variabel yang relevan dan membantu untuk membedakan antara media baru dan lama dilihat dari perspektif individu sebagai pengguna adalah (McQuail, 2005): *Interactivity, Social presence, Media Richness, Autonomy, Playfulness, Privacy, dan Personalization.*

Melihat arti media baru yang disampaikan oleh Rusman, Rogers, dan McQuail, penulis melihat ada beberapa kesamaan nilai dalam menginterpretasikan peran ICT sebagai media baru. Penulis dapat mengemukakan bahwa ICT merupakan sarana yang memfasilitasi kebutuhan akan **infrastruktur, platform, dan mekanisme**. Tiga pilar nilai pemikiran tersebut menjadi penting untuk

diperhatikan dan dijadikan acuan pembangunan kerangka pengelolaan informasi pendidikan dewasa ini dalam menghadapi tantangan globalisasi.

### **B.1. Jejaring Internet di Lingkungan Kementerian**

Internet secara global adalah sarana bertukar informasi dan berkomunikasi melalui serangkaian komputer yang saling berhubungan (Belch & Belch, 2001). Secara harfiah, internet (kependekan dari “*interconnected-networking*”) ialah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Hubungan melalui suatu sistem antarperangkat komputer untuk lalu lintas data itulah yang dinamakan *network* (Darma, Jarot, dan Shenita, 2009). Saat ini, internet telah berkembang sebagai alat informasi dan komunikasi yang cepat, efektif, dan rendah biaya. Menurut LaQuey, yang membedakan internet dari teknologi komunikasi tradisional adalah tingkat interaksi dan kecepatan yang dapat dinikmati pengguna untuk menyiarkan pesannya.

Berdasarkan sumber dari [internetworldstats.com](http://internetworldstats.com) data update 2009, jumlah pengguna internet di Indonesia menduduki peringkat ke-4 di Asia. Negara yang paling dekat dengan Indonesia (Malaysia) menduduki peringkat 10. Sedangkan peringkat pertama masih diduduki oleh China. Namun nilai pada peringkat tersebut tidak mencerminkan persentase jumlah pengguna dibandingkan jumlah penduduk. Masyarakat di kota-kota besar di Indonesia sudah sangat akrab dengan internet, pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga memiliki pengalaman dalam menyediakan jaringan internet dan intranet di lingkungan kementerian. Jaringan/Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) dibangun pada akhir tahun 2006 sebagai pengembangan lebih lanjut dari Inherent pada segmen yang belum terintegrasi koneksinya, yaitu: kantor Kemendikbud, kantor dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota, dan sekolah-sekolah. Menurut Gatot dkk. (2006), Jardiknas sebagai ikon kebanggaan program TIK pendidikan nasional, dibangun dengan mengacu pada prinsip *universal access and services*

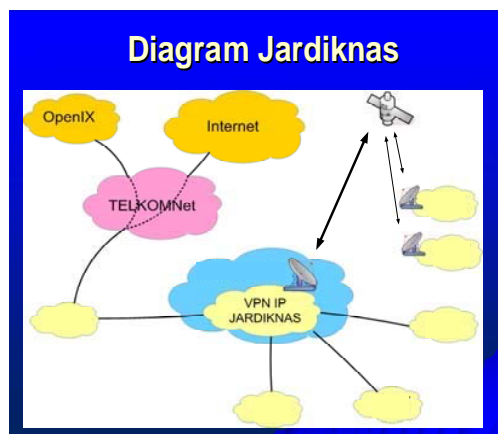
*obligation*, yaitu: (1) *resource sharing*, (2) *local content produk*, (3) *low cost access and services*, (4) *standard integrated system*, (5) *self sustainability*, (6) *transparency and accountable system*. Jardiknas dibagi dalam tiga (3) zona, Zona Kantor, Zona Perguruan Tinggi (PT), dan Zona Sekolah.

Bersumber dari Prakoso (2006) ketiga zona tersebut mengimplementasikan teknologi jaringan yang bermacam-macam dan klasifikasi media akses dan kapasitas yang berbeda (Tabel 1).

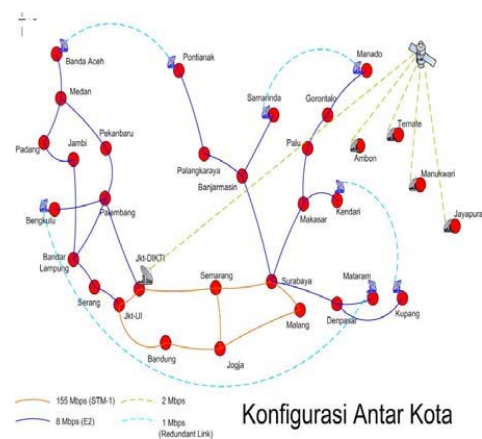
**Tabel 1. Perbandingan teknologi jaringan pada Zona Jardiknas.**

Klasifikasi	Zona PT	Zona Kantor	Zona Sekolah
Media akses	serat optik & satelit	serat optik, wireline, & satelit	wireless & wireline
Kapasitas	2--155 Mbps	256 Kbp--2 Mbps	64 Kbp--1 Mbps
Teknologi jaringan	STM-1, Vsat-IP, & dedicated/leased line	MPLS, VPN-IP, & Vsat	ADSL & wireless 2.4 GHz

Berdasarkan diagram Jardiknas (lihat Gambar 5) yang bersumber dari Gatot, Soekartawi, dan Prakoso (2006), melalui zona PT atau Inherent, membentuk suatu konfigurasi jaringan tulang punggung (*backbone*) Jardiknas yang menyambungkan antar ibukota provinsi di seluruh Indonesia seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.



**Gambar 2. Konfigurasi Diagram Jardiknas.**



**Gambar 3. Konfigurasi Jardiknas antar kota.**

Dalam Nandika dan Soekartawi (2007), Indonesian Higher Education Network (Inherent) yang dimulai sejak tahun 2006 dilahirkan sebagai tindak lanjut program Higher Education Project (HEP) dalam upaya penggalang kekuatan intelektual

dan jaringan kerja antar PT di seluruh Indonesia. Sebanyak 87 PT sudah saling terkoneksi satu sama lain melalui jaringan intranet.

## B.2. Dari Web 1.0, Web 2.0, dan Masa Depan

Generasi kedua aplikasi berbasis internet adalah Web 2.0, di mana pengguna memiliki kontrol pada komunikasi. Web 2.0 adalah istilah yang populer seiring dengan runtuhnya perusahaan dot-com (O'Reilly, 2005). Situs Web internet yang awal (Web 1.0) hanya memperbolehkan komunikasi satu arah melalui halaman web yang statis. Dalam arti, penerbit situs web berkomunikasi dengan pengguna seolah-olah dalam kuliah. Sebaliknya, saat ini Web 2.0 memungkinkan untuk berbagi, menghubungkan, berkolaborasi, dan pencantuman *user-generated content*. Jadi pengguna, tidak seperti menerima kuliah melalui halaman web statis, namun kolektif terlibat dalam percakapan yang mengarah ke generasi pada online konten - intelijen kolektif. Artinya, tidak ada yang tahu segalanya, tapi semua orang tahu sesuatu, dan apa yang dikenal dapat segera dibagi atau didistribusikan melalui Web 2.0 aplikasi media sosial (menjadi *viral*). Aplikasi sosial media Web 2.0 menyediakan teknologi bagi pengguna untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi. Teknologi ini memungkinkan untuk menulis kolaboratif (misalnya wiki), berbagi konten teks, video, dan gambar), jejaring sosial (Facebook), *social bookmark* (penilaian, penandaan), dan sindikasi (RSS feed) (Dawson, 2007; O'Reilly, 2005; Smart, 2006).

Web 1.0	Web 2.0
	DoubleClick --> Google AdSense
	Ofoto --> Flickr
	Akamai --> BitTorrent
	mp3.com --> Napster
	Britannica Online --> Wikipedia
	personal websites --> blogging
	evite --> upcoming.org and EVDB
	domain name speculation --> search engine optimization
	page views --> cost per click
	screen scraping --> web services
	publishing --> participation
	content management systems --> wikis
	directories (taxonomy) --> tagging ("folksonomy")
	stickiness --> syndication

Gambar 4. Migrasi Web 1.0 ke Web 2.0 (Downes, 2010).

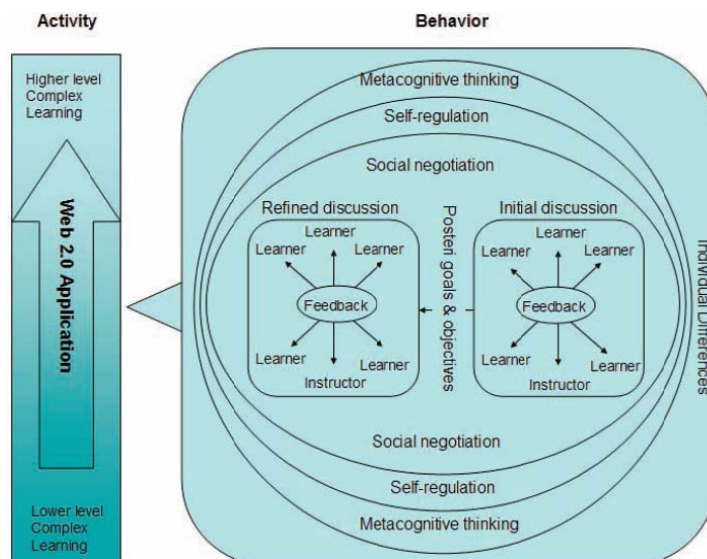
Berdasarkan Downes (2010) dan Solis (2010), dapat diidentifikasi daftar platform aplikasi yang berhasil dijalankan pada web 2.0 yang mendukung percakapan media (Tabel 1).

**Tabel 1. Daftar platform aplikasi (area, jenis, dan brand) yang dijalankan Web 2.0.**

Content Authoring and Delivery	Numerous content authoring systems	
	Weblogs, blog platform	Blogger, Wordpress, LiveJournal, Moveable Type
	Content Management Systems	Drupal, PostNuke, Plone, Scoop
	Learning Management Systems	Moodle, Claroline,
	Audio, Music	Audacity, audioblogs.com, Podcasting, Pandora, Odeo
	Micromedia	Twitter, Tumblr, Utterz
	Lifestreams	Ping, Swurl, Facebook
	Digital imagery, pictures	Flickr, Smugmug, Zoom
	Video	Youtube, Viddler, Metacafe, blip.tv
	Livecasting – Video & Audio	Qik, Ustreams, Kyte, Justin.tv
	Collaborative authoring	Writely, Hula
	Wiki	TWiki, Wetpaint
	Comment & Reputation	Disqus, CoComment, SezWho
	Virtual environment	
Organize, Syndicate Sequence, Deliver	Crowdsourced content	Newsvine, Mixx, Digg, Reddit
	Aggregation of content metadata	RSS and Atom, OPML, FOAF, DC, and LOM
	Aggregators	NewsGator, Bloglines, Edu_RSS
	Aggregation services	Technorati, Blogdex, PubSub
	The Semantic SocialNetwork	Facebook, MySpace, Bebo, Hi5
	Social bookmarks	Diigo, Magnolia
	Niche networks	Ning, LinkedIn, Plaxo
	Blog communities	Bloglines, Blogged, Shyft, MyBloglog
	Events	MadeIt, Zvents, Acteva
	Documents	Scribd, Docstoc, Thinkfree
Identity and Authorization	Location	TripIt, BrightKite, Dopplr
	A raft of centralized approaches	Microsoft Passport
	Locking and encryption systems	
	Distributed DRM	Creative Commons, ODRL
	Distributed Identification management	Sxip, LID
Chatting, Phoning, Conferencing	Single-Sign On	
	Bulletin board systems	
	Chat and chatrooms	ICQ, AIM, YIM, MSN Messenger
	Audio conferencing	Skype, NetworkEducationWare
	Videoconferencing	Skype, AIM
	SMS/Voice	Pinger, Jott, Kwiry

Jika ditinjau dari aspek pendidikan, dalam Robert Zheng (2010), suatu framework desain instruksional diusulkan dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran berbasis Web 2.0. Framework dikarakteristikan dalam bentuk: (a) pendekatan *learner-centered*, (b) komunikasi sosial yang interaktif, dan (c)

pembelajaran dinamis dalam aplikasi Web 2.0. Pendekatan *learner-centered* secara spesifik menggarisbawahi suatu proses desain dalam aplikasi Web 2.0 di mana *learner* mudah mengakses secara simultan ruang-ruang pengetahuan yang banyak tanpa menjadi terbebani secara kognitif. Komunikasi sosial yang interaktif menjadi penting dalam pembelajaran, karena memiliki sisi negosiasi sosial, yaitu: (a) mekanisme umpan balik melalui kritik, dan koreksi, (b) transformasi ide dan konsep dalam norma-norma sosial. Lingkungan pembelajaran dinamis terdiri dari: (a) mengembangkan aktivitas didampingi dengan perilaku yang merefleksikan suatu perubahan proses belajar, (b) *schemas-of-the moment for ill-structured learning*, dan (c) kolaborasi antar *online learner*. Selama berjalannya proses pembelajaran Web 2.0, nilai unggulnya tercipta pada hubungan antara perilaku dan aktivitas. Sebagai bentuk pembelajaran yang dikembangkan secara kompleks dari level bawah hingga level atas, pelajar mengatur peraturan mereka sendiri dan keterampilan berfikir metakognitif untuk perubahan aktivitas dalam pembelajaran online. Lingkungan pembelajaran dinamis untuk aplikasi Web 2.0 ditunjukkan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Instructional design framework for Web 2.0 learning (Downes, 2010).



### **B.3. Social Media**

*Social Media* adalah demokratisasi konten dan pergeseran peran manusia dalam proses membaca dan menyebarkan informasi (Solis & Breakenridge 2009). Sebelum berkembangnya *new media*, yaitu media-media berbasis internet, arus komunikasi lebih banyak terjadi secara satu arah yaitu melalui media-media konvensional seperti koran, televisi, radio, dan lain sebagainya. Namun, sejak berkembangnya *social media*, khalayak tidak hanya berperan pasif sebagai penerima pesan, melainkan juga aktif dalam proses menciptakan dan mendistribusikan pesan melalui *comment*, *share*, dan *like*. Sehingga secara singkat, *social media* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menggunakan internet untuk memfasilitasi suatu percakapan (Solis & Breakenridge, 2009).

Salah satu alasan mengapa *social media* menjadi sangat populer adalah karena hal itu tersedia dengan berbagai macam bentuk. Situs jejaring dengan puluhan juta anggota mungkin menjadi yang paling populer, namun sebenarnya terdapat berbagai cara yang berbeda dalam membuat dan berbagi konten social media (Comm, 2010). Berbagai jenis *social media*, antara lain: **Blog**, *Blog* (atau *web log*) adalah buku harian digital; *posting* penulis (dengan atau tanpa video, foto, ilustrasi, dan *link* ke *blog* lain, situs lain) dimana pembaca dapat mengomentarnya (Weber, 2009). **Membership Sites**, jumlah *membership sites* jauh lebih sedikit daripada *blog*. Seperti *social media* lainnya, *membership sites* bergantung pada anggotanya untuk menghasilkan konten yang menjadi daya tarik situs. **Squidoo**, pada *squidoo* pengguna tidak dapat membuat hubungan atau sekumpulan teman dengan cara yang sama seperti pada situs-situs *social media* lainnya. Situs *directory* ini dimaksudkan untuk menjadi pemberhentian pertama bagi orang yang mencari informasi tentang topik apa saja. Ini adalah tempat dimana para ahli dapat memberikan informasi dasar dan memberitahu orang-orang di mana mereka harus pergi untuk belajar lebih lanjut (Comm, 2010). **Photo Sites** adalah situs yang mengkhususkan diri dalam fotografi. Situs ini bergantung sepenuhnya pada foto yang di-*upload* pengguna untuk di-*share* dengan pengguna lainnya (Comm, 2010). Contoh: Flickr. **Micro Blogs**, *Microblog* adalah format

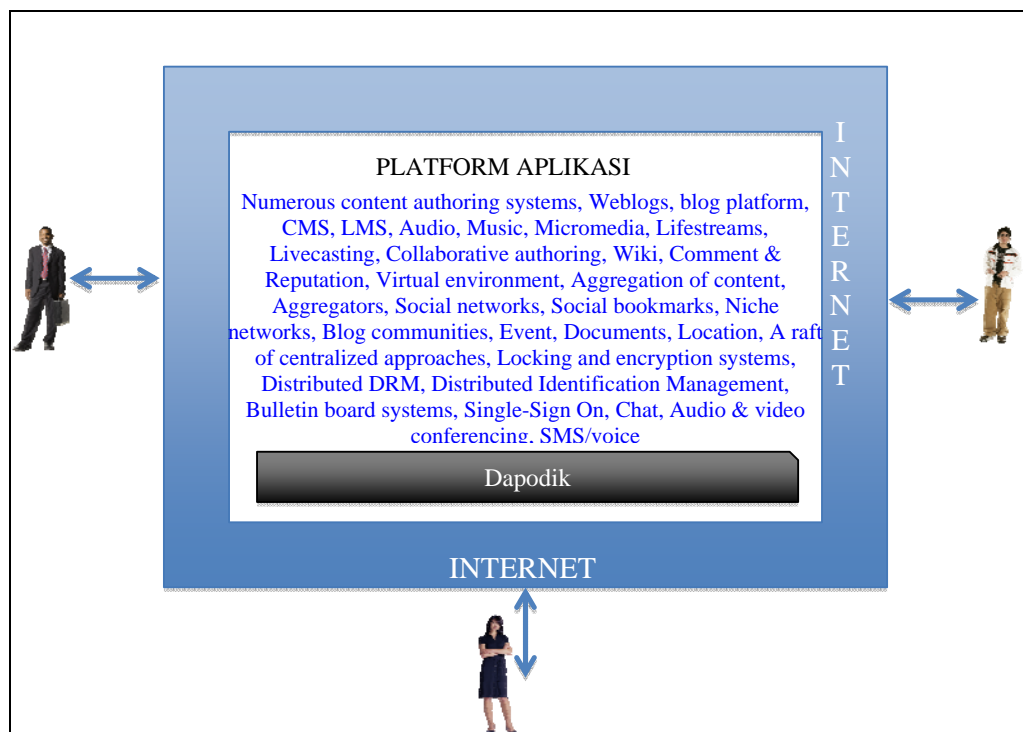
penulisan *blog* dalam batasan jumlah karakter tertentu. Umumnya, dalam setiap penulisan banyaknya karakter yang diizinkan di bawah 200 karakter (Pudyasmoro, 2010). *Blog* menjadi salah satu *social media* yang banyak digunakan. Kata *blog* dipakai sebagai kependekan dari *Weblog*, yaitu istilah yang pertama kali digunakan oleh Jorn Barger pada bulan Desember 1997. Jorn Barger menggunakan istilah *Weblog* untuk menyebut kelompok *website* pribadi yang selalu di-*update* secara kontinyu dan berisi *link* ke *website* lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri.

Penulis mengasumsikan, dengan adanya kedekatan karakter antara *social media* dan pendidikan, mungkin *social media* dan pesannya yang *viral* (menyebarkan cepat seperti virus) memang sarana terbaik bagi promosi dan diseminasi materi pendidikan. Konsep kredibilitas juga didefinisikan dalam tiga cara: (a) pesan (atau cerita), (b) sumber (atau organisasi), dan (c) kredibilitas media (channel) (Sundar, 1999 dalam Metzger, 2001). Untuk itu selain pesan dan sumber, kredibilitas media juga memiliki pengaruh terhadap sikap dari pengguna media. Kredibilitas ini dapat dilihat dari karakteristik *social media* yang digunakan untuk diseminasi atau sosialisasi.

#### **B.4. Tantangan Dalam Pendidikan Era Baru**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, saat ini segala tentang ICT sebagai media baru sudah ada perangkatnya dan sudah mungkin untuk dilaksanakan. Kerangka pemikiran tentang sistem informasi pendidikan Indonesia masa depan disampaikan seperti pada Gambar 6 berikut. Jalan tol internet dan intranet telah terbangun melalui program Jardiknas. Sudah saatnya kita bertindak memperkaya konten pendidikan kita secara mandiri dan memberdayakan kekuatan lokal seperti pesan awal dilahirkannya Jarniknas. Oleh karena itu perlunya adanya aplikasi berbasis platform teknologi yang terintegrasi dan menganut konsep *social media* yang bijak. *Social media* yang fleksibel, tidak kaku, menarik, dan menyenangkan. Harusnya kita membayangkan bagaimana semua insan pendidikan di Indonesia terhubung dalam satu antarmuka dengan menerapkan pengalaman hebat platform

yang melayani: (a) *content authoring and delivery*, (b) *organize and syndicate sequence*, (c) *identity and authorization*, dan (d) *chatting, phoning, and conferencing*.



Gambar 6. Arsitektur dasar sistem informasi pendidikan Indonesia masa depan.

Dengan menyiapkan basis data pokok/induk pendidikan (Dapodik) secara nasional baik dari siswa (Nomor Induk Siswa Nasional - NISN), guru (Nomor Induk Guru Nasional - NIGN), widyaiswara, dosen (Nomor Induk Dosen Nasional - NIDN), sekolah (Nomor Pokok Sekolah Nasional - NPSN), sampai perguruan tinggi oleh Kemdikbud pada antarmuka terintegrasi, semua unsur pendidikan di negeri ini akan saling mengenal, berbagi, berkolaborasi, mengkritisi, dll. selama dalam mekanisme jaringan sosial yang membangun. Alangkah bahagianya jika kerangka ini dapat terbangun. Para profesor/guru besar dapat secara bebas ber-wiki dalam menuangkan pemikiran-pemikiran hebatnya. Siswa setiap hari dapat melakukantweet pada micromedia dalam menyampaikan keluhan dan hambatan belajar kepada guru pembimbingnya. Sekolah juga dengan

mudah meremajakan situs informasi sekolahnya dan mengembangkan LMS yang dikehendaki. Guru dan dosen juga dapat leluasa membuat bahan ajar berbasis video dengan bantuan *livecasting*, serta contoh lain yang sangat banyak sekali jika disampaikan.

Dalam pengembangan ke depan, kita tidak perlu atau harus memakai *facebook*, *twitter* atau *youtube*, namun kita akan membangun sendiri yang semacam itu. Fasilitas dan alat bantu sudah ada dan tidak akan mendapat kesulitan. Generasi muda kita patut diberikan kesempatan membangun kerangka ini. Jika kementerian belum memiliki sumber daya manusia, finansial, dan waktu yang kuat, kita berikan kepercayaan kepada mereka dalam merealisasikan pemikiran ini. Kemdikbud akan baik jika mampu mendorong, menyemangati, dan mensosialisasikan implementasi media baru ini dalam pendidikan.

*Slow but sure*, kita harapkan gagasan penulis semoga dapat dilaksanakan kapan saja, sesegera mungkin, oleh siapa saja asalkan berasal dari kemandirian anak bangsa. Apa yang penulis tulis saat ini perlu dianggap sebagai ajakan untuk membangun kemandirian dalam suatu sistem informasi. Semakin pihak yang mencoba membangun merupakan nilai positif yang perlu dijaga dan digalakkan. Jika sudah mencapai pertumbuhan yang pesat dengan tingkat kematangan yang tinggi, suatu saat nanti, Kementerian lah yang akan mengelaborasi semua *stakeholder* yang berperan dengan diwadahi kebijakan yang seimbang dan komprehensif

### **C. Kesimpulan**

1. ICT sebagai disiplin ilmu sudah mampu membuat kepentingan pendidikan jadi mungkin saat ini. Untuk pendidikan Indonesia, hal ini diperkuat dengan telah dibangunnya Jardiknas sejak 2006.
2. Pengalaman hebat platform-platform aplikasi dalam Web 2.0 sudah banyak memberikan teladan. Paket platform modular maupun terpisah banyak sekali dikembangkan secara *open source*, sehingga membuka peluang generasi

muda Indonesia untuk ambil bagian dalam forum-forum *developer*.

3. Kerangka pemikiran penulis bukan tidak mungkin dilahirkan secara bersama-sama oleh semua *stakeholder* pendidikan dalam suatu sistem informasi pendidikan terintegrasi berbasis Web 2.0 yang memasukkan nilai-nilai *social media* yang baik.
4. Komponen lokal merupakan energi yang harus dimanfaatkan sebanyak mungkin dalam membangun kerangkasisistem informasi pendidikan ini, terutama sumber daya manusia.

#### **D. Daftar Pustaka**

- [1] Belch & Belch. (2001). *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communication Perspective*, 5th Ed. Boston: McGraw-Hill.
- [2] Bondan, S. Prakoso, (2006) *Kebijakan, Perencanaan, dan Program Pembangunan ICT untuk Pendidikan Nasional*. Presentasi disampaikan pada Rakornas Konsolidasi dan Pemantapan Sasaran Program Depdiknas.
- [3] Breakenridge, Deirdre. (2008), *PR 2.0 New Media, New Tools, New Audiences*. New Jersey: FT Press.
- [4] Clack, R., Mayer, R., (2008) *E-Learning and the Science of Instruction*, 2nd Ed. San Francisco, John Wiley & Son Inc.
- [5] Comm, Joel. (2008), *Twitter Power 2.0*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- [6] Darma, Jarot S., Shenita A. (2009), *Buku Pintar Menguasai Internet*. Jakarta: Mediakita.
- [7] Downes, Stephen. (2010), *Learning Networks and Connective Knowledge*.
- [8] Gatot HP, Soekartawi, dan Bondan S. Prakoso, (2006). *Pemanfaatan ICT untuk Membangun Jejaring Pendidikan Nasional*. Makalah disampaikan pada seminar nasional Bersama IT/ICT Membangun Bangsa: Aplikasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Indonesia 2006 yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Usahid di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 30 November 2006.
- [9] McQuail, Denis. (2005), *McQuail's Mass Communication Theory*, 5th Edition. SAGE Publications: London.

- [10] Metzger, Miriam J. et. al., (2001). *Credibility for the 21st Century: Integrating Perspectives on Source, Message, and Media Credibility in the Contemporary Media Environment*. 2001.
- [11] Nandika dan Soekartawi, (2007). *Pengalaman Departemen Pendidikan Nasional dalam Memanfaatkan TIK untuk Pendidikan*. Disampaikan dalam Konferensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia 25-26 April 2007, Jakarta.
- [12] Rogers, Everret M.(1994),*Communication Technology*. New York: The Free Press.
- [13] Rusman. Inisiasi Komputer dan Media Pendidikan. Diktat Kuliah Semester.
- [14] Solis, Brian and Breakenridge, Deirdre.(2009),*Putting the Public Back in Public Relations*. New Jersey: FT Press.
- [15] Solis, Brian. (2010),*Engage*. John Wiley & Sons, Inc: New Jersey.
- [16] Weber, Larry. (2009),*Marketing to the Social Web*, 2nd Edition. New Jersey: Wiley & Sons, Inc.
- [17] Zheng, Robert Z. (2010), *Designing Dynamic Learning Environment for Web 2.0 Application*.
- [18] <http://www.internetworldstats.com>
- [19] <http://www.oreilly.com/lpt/a/6228>
- [20] [http://www.rossdawsonblog.com/weblog/archives/technology\\_trends/](http://www.rossdawsonblog.com/weblog/archives/technology_trends/)
- [21] <http://www.smartinternet.com.au/ArticleDocuments/121/Social-Networks-2010.pdf.aspx>

**Strategi Penyebaran Konten Pendidikan  
Berbasis *Digital Video Broadcasting over Satellite*  
untuk Wilayah Tak Terjangkau Internet**

Drs. Jaslin Ikhsan, M.App.Sc., Ph.D.

Staf Pengajar pada Jurdik. Kimia, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, Karangmalang, Yogyakarta 55281

Hafid Setyo Hadi, S.T.

Manajer IT-Network SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC), Jakarta

**Abstrak**

Keterbatasan akses internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan disparitas jangkauan informasi antar daerah/wilayah. Informasi memiliki cakupan yang sangat luas, dan pendidikan merupakan salah satu di dalamnya. Sejak dulu hingga sekarang, permasalahan kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah selalu mengemuka dan menarik untuk dibahas. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi geografi negara Indonesia menjadi salah satu fakta yang membatasi ruang pergerakan atau distribusi materi dan sumber daya pendidikan melalui internet.

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini, teknologi alternatif atau komplemen perlu dipikirkan guna menyiasati keterbatasan internet. Teknologi *digital video broadcasting over satellite* (DVB-S) ternyata mampu menjawab kelemahan jangkauan internet tersebut. Dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, internet dan DVB-S dapat saling mengisi dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang relevan. Sambil menunggu perluasan jejaring internet oleh pemerintah dalam waktu yang tidak singkat ke depan, DVB-S layak diimplementasikan guna mengisi kekosongan yang ada. Meskipun masih memfasilitasi layanan satu arah saja (*downstream only*), mekanisme *multicast* dari DVB-S mampu menyebarkan data berkapasitas besar ke segala penjuru wilayah, baik di daerah terpencil, perbatasan, maupun terluar. DVB-S diterapkan pada jejaring tertutup sebagai media penyebaran konten/materi pendidikan.

Praktek unggul pemanfaatan teknologi DVB-S sebagai sarana penyebaran materi perkuliahan telah diterapkan pada program peningkatan kualifikasi guru melalui mekanisme pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) di empat (4) kabupaten di Nusa Tenggara Timur, dan terbukti dapat menjadi teknologi alternatif yang sangat membantu untuk menyebarkan materi pembelajaran.

Kata kunci: DVB-S, *multicast*, *downstream only*, PTJJ, TIK.

## **A. Pendahuluan**

### **A.1. Latar Belakang**

Penyetaraan kuantitas dan kualitas pendidikan antar daerah merupakan tuntutan masyarakat belajar dan amanat undang-undang. Materi pembelajaran merupakan salah satu komponen yang harus disebarakan secara sama dan merata ke semua wilayah Indonesia. Maka diperlukan adanya sarana internet yang akan menjadi media lalu lintas agar distribusi materi dan konten pendidikan jadi merata. Namun, sampai dengan saat ini, ternyata masih terdapat beberapa kendala yang menghambat peranan internet dalam memperluas akses dan kualitas pendidikan antar wilayah, yaitu antara lain:

1. Kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menyebabkan jangkauan internet belum mampu melayani seluruh wilayah.
2. Biaya investasi pembangunan infrastruktur internet yang besar, menyebabkan penyediaan internet di semua wilayah Indonesia membutuhkan waktu yang tidak bisa cepat.
3. Masih banyak wilayah terluar, perbatasan, dan terpencil yang belum bisa menikmati informasi melalui internet.
4. Belum semua sekolah, madrasah, dan sanggar belajar tersambung internet.

Kenyataan di atas dapat menyebabkan tingginya disparitas kualitas pendidikan antar daerah.

### **A.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka perlu adanya penyelesaian masalah dengan menjawab beberapa rumusan berikut.

1. Sarana teknologi apa yang dapat menutupi keterbatasan internet menjangkau seluruh wilayah Indonesia untuk menyebarluaskan materi atau konten pendidikan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan teknologi DVB-S dalam menyebarluaskan materi atau konten pendidikan?
3. Bagaimana praktek unggul penerapan teknologi DVB-S dalam pengantaran materi dalam mekanisme pembelajaran?



## **B. Pembahasan**

Menurut laporan ITU (2010), terdapat kurang dari 3 persen kantor pos di seluruh wilayah Indonesia dapat memberikan akses internet kepada masyarakat. Padahal, jika kantor pos yang terletak di seluruh kecamatan memiliki layanan akses internet publik, maka percepatan transformasi pengetahuan, informasi, dan pembelajaran akan sangat terbantu. Di sektor pendidikan, Kemdikbud pada tahun 2011 ini terpantau hanya memfasilitasi koneksi internet dalam layanan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) pada 866 satuan kerja di Zona Kantor, 56 PTN/PTS di Zona Perguruan Tinggi (Inherent), dan 16.678 satuan pendidikan di Zona Sekolah (SchoolNet) saja [1]. Padahal, berdasarkan Ikhtisar Data pendidikan Nasional Tahun 2007/2008 kita memiliki 311.243 sekolah dari jenjang taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah menengah (SM) dan 814 perguruan tinggi (PT). Hal ini menunjukkan masih rendahnya layanan internet untuk pendidikan.

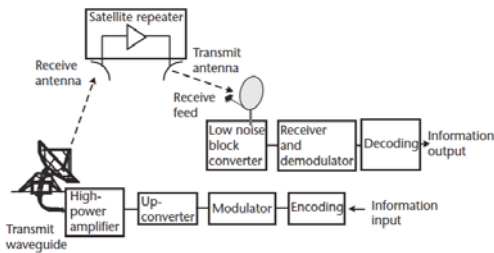
Berdasarkan catatan tersebut, maka perlu dicari solusi penyebaran materi pendidikan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang belum terjangkau oleh internet. Dalam *regional guide* yang dirilis oleh Anderson (2010), disampaikan bahwa TIK memiliki cakupan yang luas (baik perangkat maupun fungsi), termasuk teknologi yang memungkinkan kita untuk dapat bertukar informasi dan berkomunikasi dengan orang lain [2]. Di sisi lain, menurut Clark dan Mayer (2008), saat ini pembelajaran dan pelatihan yang menggunakan bantuan teknologi terus meningkat, sedangkan yang menggunakan pola konvensional (kelas tatap muka) semakin menurun. Masih dalam Clark dan Mayer, Bernard *et al.* juga membandingkan hasil belajar dari PTJJ elektronik (*electronic open and distance learning* atau ODL elektronik) dan pembelajaran tatap muka, dan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan [3].

### **B.1. Penerapan Teknologi DVB-S**

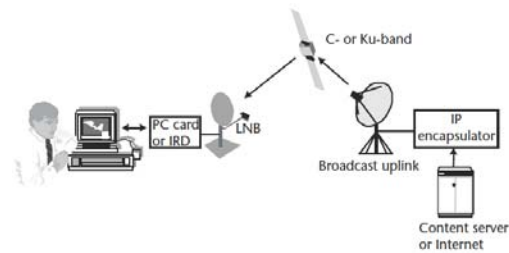
Televisi dan satelit merupakan teknologi yang sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat, baik dunia maupun Indonesia. Siaran televisi melalui satelit

dikategorikan sebagai penerapan teknologi *digital video broadcasting over satellite* (DVB-S). Proyek DVB itu memulai pengembangan sistem untuk siaran TV digital melalui satelit pada 1992 dan diselesaikan spesifikasinya pada 1993.

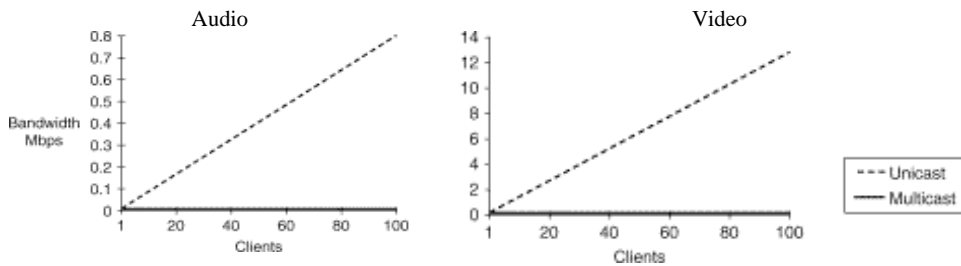
Menurut Sun (2005), teknologi DVB memungkinkan penyiaran dari ‘*data containers*’, di mana semua jenis data digital dapat ditransmisikan, dengan hanya mengirimkan kompresi gambar, suara, atau data ke penerima dalam ‘*containers*’ tersebut. DVB-S menyediakan layanan siaran satu arah (*one way*). Pengguna terminal hanya dapat menerima data dan dikatakan sebagai layanan *downstream only* [4]. Sebagai bentuk komunikasi berbasis satelit, elemen-elemen utama komunikasi DVB-S (Gambar 1) mengacu pada aturan *link* dasar komunikasi satelit pada umumnya (Gambar 2). Komponen utama komunikasi adalah *space segment*(satelit) dan *ground segment* [5].



**Gambar 1. Elemen-elemen utama dari link satelit [5].**



**Gambar 2. Properti-properti DVB-S berbasis IP encapsulation [5].**



**Gambar 3. Bandwidth dari unicast vs multicast [6].**

Dalam DVB, metode pengiriman data secara *multicast* menjadi mungkin untuk dilakukan. Jumlah klien yang menerima siaran ini, baik satu maupun banyak, tidak akan mempengaruhi beban server dan kapasitas *bandwidth* (lebar pita),

karena adanya mekanisme *multicast* yang diterapkannya (lihat pada Gambar 3). Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan mekanisme *unicast* yang diterapkan pada internet.

Dengan pertimbangan dan pengamatan sumber daya yang ada, SEAMOLEC berinisiasi mensinergikan kekuatan finansial, program, dan kebijakan untuk menerapkan teknologi DVB melalui medium satelit untuk penyebaran materi pendidikan. *Space segment*, dengan segala pertimbangan, mutlak difasilitasi oleh Kemdikbud, dalam hal ini adalah sinergi antar unit kerja yang terkait. Sedangkan *ground segment* dapat diberikan kesempatan kepada semua pihak yang berkepentingan memanfaatkan jejaring tersebut dengan sumber investasi infrastruktur beragam, baik perorangan, lembaga, maupun bantuan swasta dan pemerintah.

Konfigurasi jejaring untuk *space segment* secara umum tertera dalam Gambar 4, dan memanfaatkan layanan satelit Telkom 1. Data dan informasi satelit dapat disampaikan Tabel 1 berikut.

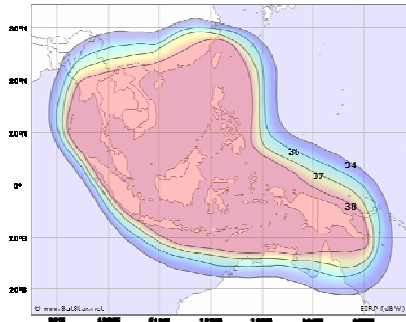


Gambar 4. Konfigurasi jejaring DVB-S untuk pendidikan.

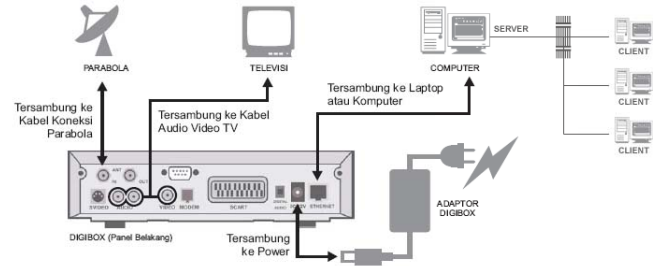
Tabel 1. Satelit Telkom 1 [7].

Satellite Name:	Telkom 1
Channel:	Nr. 3
Frequency:	Rx 3789
Symbolrate:	2300
Service time:	24 hours
Data Center:	Pustekkom Kemdikbud
Position:	108° E
Norad:	25880
Cospar number:	1999-042A
Operator:	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Model (bus):	A2100A
Orbit:	GEO
Details:	24 C-band and 12 extended C-band transponders to provide voice and video communications to Indonesia and other regional countries
Beams:	C-band Indonesia Beam (active)

Area jangkauan satelit Telkom 1 melingkupi semua wilayah Indonesia, dan secara terperinci diberikan dalam Gambar 5 berikut.



**Gambar 5. Area jangkauan satelit Telkom 1. [7]**



**Gambar 6. Konfigurasi perangkat penerima broadcast DVB-S.**

Sedangkan konfigurasi untuk *ground segment* dapat ditunjukkan pada Gambar 6. Komponen *ground segment* dalam penerapan DVB-S satu arah tersebut tidak berbeda dari apa yang disebutkan oleh Sun (2005) yaitu terdiri atas (a) antena (parabola) untuk transmit dan menerima, (b) *low noise amplifier* untuk *receiver*, (c) *high performance amplifier* (HPA) untuk *transmitter*, (d) modulasi, demodulasi, dan *frequency translation*, (e) pemrosesan sinyal, (f) antarmuka kepada jaringan terestrial atau terminal pengguna [4]. Komponen HPA tidak diimplementasikan dalam jejaring tersebut, karena layanan satu arah tidak memerlukannya. Sehingga daftar komponen yang dikonfigurasi untuk klien penerima adalah sebagai berikut: (a) antena parabola, (b) *low-noise block* (LNB), (3) *modem receiver* atau *set-top-box* untuk DVB-S, (4) dua unit *Ethernet card*, (5) komputer server, (5) televisi, (6) komputer klien, (7) *switch*, (8) *wireless access point*, dan (9) *uninterruptible power supply* (UPS).

Jejaring DVB-S mampu memberikan layanan *broadcasting* untuk video dan data dengan penjadwalan bergantian. Sebagai jejaring tertutup, tidak independen, dan satu arah, DVB-S perlu mendapat bantuan dari sisi *brainware*, terutama pada *ground segment*. Teknisi perlu disiapkan untuk mendampingi pemanfaatan teknologi. Teknisi pendamping dibekali pemahaman dan keterampilan dasar tentang jaringan dan satelit guna menjaga dan mengelola pemanfaatan perangkat.

## B.2. Praktek Unggul: Penyebaran Konten Pembelajaran di NTT

Selain sebagai media penyebaran materi buku sekolah elektronik (BSE), salah satu penerapan teknologi DVB-S dilakukan pada program peningkatan kualifikasi guru melalui mekanisme pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ). DVB-S disiapkan sebagai medium untuk distribusi bahan ajar. Dengan bantuan PT. Pertamina (Persero), program pendidikan S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) diselenggarakan oleh Universitas Nusa Cendana (Undana) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program dilaksanakan di empat (4) kabupaten, yaitu: Kupang, Belu, Timor Tengah Utara (TTU) dan Timor Tengah Selatan (TTS) dan dimulai pada pertengahan tahun 2010.

### B.2.1. Instalasi Titik-Titik *Ground Segment*

Selama persiapan pembelajaran dilakukan, penyediaan infrastruktur teknologi juga dilaksanakan. *Ground segment* disiapkan pada empat wilayah kabupaten dimaksud berdasarkan pertimbangan geografis, teknis, dan sebaran calon mahasiswa. Pemasangan perangkat penerima broadcast DVB-S dilakukan pada dua puluh (20) sekolah yang tersebar di empat kabupaten yang menjadi titik instalasi klien. Tiap kabupaten mendapatkan instalasi lima (5) titik. Melalui koordinasi yang digalang antara Yayasan Guru Cerdas (YGC) dengan setiap Dinas Pendidikan di Kabupaten Belu, TTS, TTU, dan Kupang, telah dihasilkan daftar titik-titik klien DVB-S yang telah diinstalasi (Tabel 2) sekaligus menetapkan pendamping teknis dari tiap sekolah.

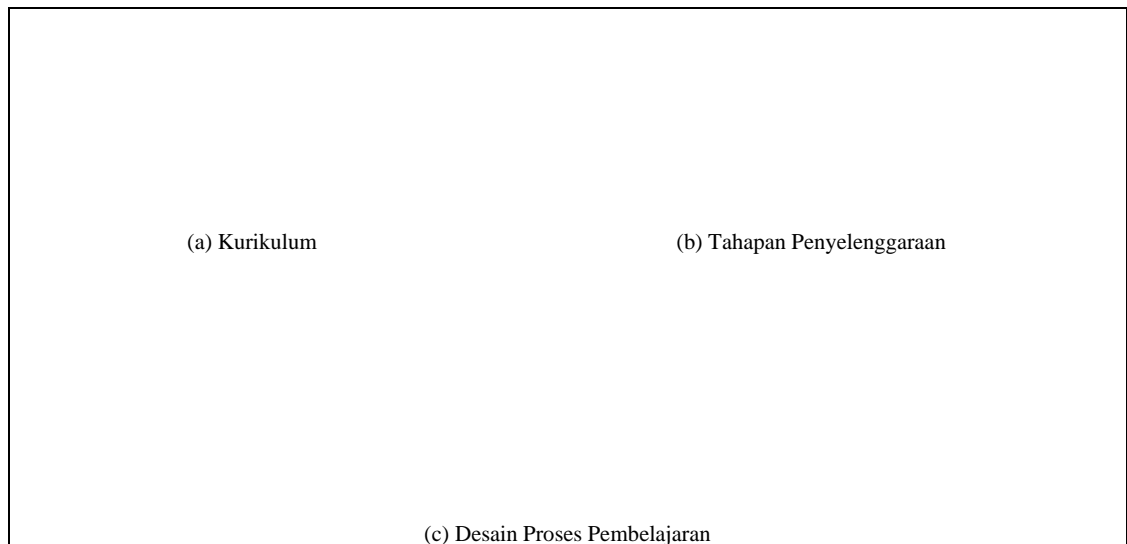
**Tabel 2. Daftar titik klien penerima broadcast DVB-S.**

No.	Titik	Pendamping	Alamat
1.	SMA Negeri 1 Atambua	Solomon	Jl. Adi Sucipto No.38, Atambua
2.	SMP Negeri 1 Lamaknen	Vinsensius	Jl. Liurai, Lamaknen
3.	SMA Negeri 1 Tasifeto Barat	Nikodemus	Kimbana, Kab. Belu
4.	SMP Negeri 1 Malaka Tengah	Untoro	Kab. Belu
5.	SMP Negeri 2 Malaka Tengah	Yohanes Tae	Kab. Belu
6.	SD Inpres Oenali	Yublina	Amanatun Barat, Kab. TTS
7.	SD Gmit Oinlasi	Daniel Telnoni	Amanatun Selatan, Kab. TTS
8.	SD Kesetnana	Ernes	Molo Selatan, Kab. TTS
9.	SD Ajaob Tomas	Isak Belikliu	Jl. Mutis Kepan, Molo Utara, Kab. TTS
10.	SD Inpres Panite 2	Daniel Mailani	Amanuban Selatan, Kab. TTS
11.	SMA Negeri 1 Kefamenanu	Agus Widada	Jl. Sonbay, Kefamenanu, Kab. TTU
12.	SMA Negeri Taekas	Toal Stefanus	Jl. Maria Fatima, Baen, Kab. TTU
13.	SMA Negeri 1 Insana	Trensius Am'isa,	Insana, Oilolok, Kab. TTU
14.	SMA Negeri 1 Oenopu	Maximus	Jl. Pelajar, Oenopu, Kab. TTU

No.	Titik	Pendamping	Alamat
15.	SMK Negeri 1 Kefamenanu	Purwanto Binarjuka	Jl. Eltari km 9, Kefamenannu
16.	SMA Negeri 1 Kupang Tengah	Dedy Yohanis	Jl. Timor Raya, Km.18,3, Tanah Merah
17.	SMA Negeri 2 Kupang Timur	Albert	Jl. Timor Raya, Km.33, Naibonat
18.	SMA Negeri 1 Takari	Donatus Bire	Jl. Timor Raya, Km.68, Takari
19.	SMA Negeri 1 Amarasi	Yulius Wenabu	-
20.	SMA Negeri Kupang Barat	Eliazer Teuf	Jl. Tuapala Km.14, Batakte

### B.2.2. Distribusi Materi Kuliah Program PTJJ S-1 PGSD

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen agar guru memiliki kualifikasi minimal S-1 dan memiliki sertifikat sebagai pendidik, perlu dilaksanakan pengembangan dan peningkatan kualifikasi guru dalam jabatan (*in-service training*) kepada guru yang belum memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan di wilayah NTT, yaitu melalui pendidikan alih jenjang dari D-II ke S-1 bagi guru-guru dalam jabatan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Undana yang menyelenggarakan program S-1 PGSD melalui mekanisme PTJJ.



Gambar 7. Gambaran informasi tentang kurikulum, tahapan penyelenggaraan, dan proses pembelajaran.

Model pembelajaran yang diusulkan adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7 di atas. Pembelajaran di masa residensial ditujukan untuk sosialisasi, pembangunan karakter mahasiswa, penyamaan persepsi pembelajaran dengan PJJ,

persiapan belajar mandiri dengan menggunakan TIK. Materi tersebut mencakup: (a) Belajar Mandiri, (b) Sistem Pendidikan Jarak Jauh, (c) Strategi Belajar Mandiri, (d) Keterampilan Belajar (*Study Skills*), (e) Keterampilan Dasar TIK dan DVB-S, dan (f) praktikum untuk materi-materi kuliah pilihan.

Bahan ajar dirancang agar dapat dipelajari mahasiswa secara mandiri. Bahan ajar pendukung diberikan kepada mahasiswa pada masa residensial dan tutorial *online*. Bahan ajar baik bersifat cetak, dokumen elektronik, audiovisual, dan berbasis web telah dikembangkan pada tahun 2007 dengan pola konsorsium dari 23 PT penyelenggara program PTJJ S-1 PGSD sebagai penyelenggara angkatan pionir. Selain itu tim tutor Undana menambah materi audiovisual melalui perekaman kegiatan perkuliahan program reguler. Pendistribusian bahan ajar dan bahan pendukung merupakan tanggung jawab dan wewenang Undana dalam pengaturan jadwal dan disesuaikan dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Berikut jadwal siaran yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan (Tabel 3).

**Tabel 3. Jadwal siaran materi kuliah program PTJJ S-1 PGSD Undana.**

No.	Bahan Ajar	Semester 1		Semester 2		Semester 3		Semester 4		Semester 5		Semester 6	
		Video	Data	Video	Data	Video	Data	Video	Data	Video	Data	Video	Data
1.	Perkembangan Belajar Peserta Didik	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3.	Bahasa Inggris	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4.	Kapita Selekta	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5.	Pendidikan HAM	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6.	Pendidikan Multikultural	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7.	Pendidikan IPA	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8.	Komputer dan Media Pembelajaran SD	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--
9.	Manajemen Berbasis Sekolah	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--
10.	Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--
11.	Pengembangan Pembelajaran IPA SD	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--
12.	Pengembangan Pembelajaran Matematika SD	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--
13.	Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Bahan Ajar	Semester 1		Semester 2		Semester 3		Semester 4		Semester 5		Semester 6	
		Video	Data	Video	Data	Video	Data	Video	Data	Video	Data	Video	Data
14.	Assessment Pembelajaran	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--
15.	Pengembangan Bahan Pembelajaran	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--
16.	IPS	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--
17.	Kurikulum	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--
18.	Matematika	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--
19.	Belajar dan Pembelajaran	--	--	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--
20.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	--	--	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--
21.	Praktikum IPA	--	--	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--
22.	Statistika	--	--	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--
23.	Strategi Pembelajaran	--	--	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--	--	--
24.	Kajian IPS	--	--	--	--	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--
25.	Penelitian Pendidikan SD	--	--	--	--	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--
26.	Pengembangan Pendidikan IPS	--	--	--	--	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--
27.	Hakikat Pembelajaran Kelas Rangkap	--	--	--	--	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--
28.	Pemantapan Praktik Lapangan	--	--	--	--	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--
29.	Hakikat Profesi Keguruan	--	--	--	--	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00	--	--
30.	Panduan Tugas Akhir	--	13.00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31.	Kajian Bahasa Indonesia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00
32.	Pendidikan Seni	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00
33.	Sosiologi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	08:00 s.d. 10:00	13:00 s.d. 15:00
34.	Panduan PPL	--	13.00 s.d. 15:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35.	Buku Sekolah Elektronik	--	15.00 s.d. 18:00	--	15.00 s.d. 18:00	--	15.00 s.d. 18:00	--	15.00 s.d. 18:00	--	15.00 s.d. 18:00	--	15.00 s.d. 18:00
36.	Video Pembelajaran Pengayaan	10:00 s.d. 13:00	--	10:00 s.d. 13:00	--	10:00 s.d. 13:00	--	10:00 s.d. 13:00	--	10:00 s.d. 13:00	--	10:00 s.d. 13:00	--

Ket: waktu dalam WIB.

Mekanisme distribusi bahan ajar dengan sistem DVB-S, membuat akselerasi pengunduhan (*download*) data (baik file, video, maupun *streaming*/televisi) dapat diterima dengan cepat, di mana saja berada, dan banyak pengakses. Sedangkan jalur pengunggahan (*upload*) data, sebagai media interaksi antara mahasiswa dan tutor, dilakukan secara asinkron pada jaringan/media yang lain semacam layanan



paket data: *high-speed downlink packet access* (HSDPA), *third-generation technology* (3G), *enhanced data rates for GSM Evolution* (EDGE), *general packet radio service* (GPRS), GSM, maupun terestrial (baik interaksi yang bersifat video, audio, voice, maupun text) dengan pembiayaan akses yang dipenuhi secara mandiri oleh mahasiswa. Adapun skema proses pendistribusian bahan ajar dan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran disampaikan berikut.

1. Bahan ajar yang telah disiapkan oleh tim tutor Undana dikirimkan ke server SEAMOLEC berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan melalui media jaringan yang telah didefinisikan.
2. Server melakukan *broadcasting/delivery* bahan ajar ke semua titik penerima siaran DVB-S, sesuai jadwal yang diminta oleh tim tutor.
3. Titik penerima adalah kumpulan perangkat penerima siaran berbasis DVB-S. Titik penerima dapat ditetapkan pada sekolah atau pusat pertemuan mahasiswa yang dipandang strategis merepresentasikan jarak akses mahasiswanya.
4. Penerimaan bahan ajar di komputer server titik penerima difasilitasi oleh pendamping lokal.
5. Pendamping lokal memfasilitasi pendistribusian lebih lanjut kepada mahasiswa baik dalam bentuk cetak dan atau elektronik, misalkan:
  - a. Jika mahasiswa memiliki laptop, pendamping lokal membantu bagaimana mahasiswadapat langsung mengakses ke portal lokal bahan ajar,
  - b. Jika mahasiswa memiliki komputer di rumah, pendamping dapat membantumahasiswa dalam mengagandakan dokumen elektronik melalui media penyimpanan sementara, flash disk maupun hard drive eksternal,
  - c. Jika mahasiswa memiliki video player dan televisi, pendamping dapat membantumenggandakan video pembelajaran ke dalam media yang terbaca oleh video player, misalkan: Compact Disc (CD) atau Digital Video Disc (DVD),
  - d. Mahasiswa yang tidak memiliki fasilitas atau tidak memiliki peralatan media seperti diatas, dibantu oleh pendamping lokal berinisiasi untuk mencetak bahan ajar dokumen elektronik dalam kertas menggunakan

- printer yang mendukung,
- e. Penggandaan dan pencetakan bahan ajar dokumen elektronik dan video dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa baik pribadi maupun kelompok.
  - f. Proses pertanyaan dan pengumpulan tugas kepada tutor/dosen pengajar dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri dengan bantuan teknis pendamping lokal memanfaatkan media komunikasi sinkron lain.

### **C. Kesimpulan**

1. DVB-S merupakan suatu perangkat teknologi yang murah, yang dapat dimanfaatkan sebagai media komplemen dalam pembelajaran di daerah yang tidak terhubung oleh internet, dan sangat cocok sebagai pendukung pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Eksistensi *space segment* yang telah disewa oleh kemdikbud sangat mendukung penyelenggaraan pembelajaran dengan teknologi ini. Oleh karena itu, fungsinya harus dioptimalkan untuk pembelajaran bagi peserta didik yang ada di daerah perbatasan dan tertinggal. Harga infrastruktur DVB-S yang diperlukan oleh *ground segment* tidak mahal dan dapat diupayakan oleh perorangan maupun lembaga, merupakan faktor pendukung yang sangat dominan untuk mensukseskan pemanfaatan teknologi ini dalam pembelajaran. Namun, pembelajaran dengan teknologi DVB-S ini, kurang maksimal dalam memfasilitasi terjalannya interaktivitas karena DVB-S hanya menyediakan pembelajaran secara satu arah dan asinkron.
3. Berdasarkan tanggapan para mahasiswa dan pelaku pembelajaran di Universitas Nusa Cendana NTT, pemanfaatan DVB-S untuk mekanisme pembelajaran dalam program PJJ S-1 PGSD dalam rangka meningkatkan kualifikasi guru SD ke jenjang S-1 dirasakan sangat baik dan berimplikasi pada perkembangan komunitas di sekitar titik-titik (*ground segment*) yang ada.

## Daftar Pustaka

- [1] Anonym, “Pengaktifan Layanan Jardiknas Zona Kantor dan Zona Sekolah”, retrieved: 18 Maret 2011 from <http://jardiknas.depdiknas.go.id/>.
- [2] Anderson, Jonathan, “A Regional Guide of ICT Transforming Education”, Bangkok, UNESCO, 2010.
- [3] Clack, R., Mayer, R., “E-Learning and the Science of Instruction, 2nd Ed.” San Francisco, John Wiley & Son Inc., 2008.
- [4] Sun, Zhili, “Satellite Networking Principles and Protocols”, Chichester, John Wiley & Sons Ltd, 2005.
- [5] Elbert, Bruce R., “The Satellite Communication Application Handbook Second Edition”, London, Artech House, 2004.
- [6] Williamson, B., “Developing IP Multicast Networks”, Cisco Press, 2000.
- [7] <http://www.lyngsat.com/telkom1.html>.
- [8] Anonym, “World Telecommunication/ICT Development Report: A Mid-Term Review of Monitoring The WSIS Targets”, Geneva, ITU, 2010.
- [9] <http://www.pustekkom.kemdiknas.go.id>.

## Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Hafid Setyo Hadi  
Tempat/Tanggal Lahir : Malang/29 Mei 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan Fungsional : -  
Jabatan Struktural : Manajer IT-Network  
Instansi/Unit Kerja : SEAMEO Regional Open Learning Centre  
Alamat Kantor : Kompleks Universitas Terbuka  
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang 15418  
PO Box 59/CPA Ciputat 15401, Jakarta  
Telp. 021-7422184, 7423725  
Faks. 21-7422276; 7423830  
Alamat Rumah : Perum. Taman Pondok Cabe Blok C.1 No. 27  
Pondok Cabe, Pamulang 15418 Tangerang Selatan  
Telepon : +62-21-97628525/081334456943  
Email : hafid\_setyo@seamolec.org

### Riwayat Pendidikan:

No.	Perguruan Tinggi	Kota/Negara	Tahun Lulus	Bidang Studi
1.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Sarjana)	Surabaya/Indonesia	2006	Elektro
2.	Institut Teknologi Bandung (Magister)	Bandung/Indonesia	--	Elektro

## Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Jaslin Ikhsan  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 29 Juni 1968  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 NIP : 196806291993031001  
 Pangkat/Golongan : Penata Tk I/ III-d  
 Jabatan Fungsional : Lektor  
 Jabatan Struktural : Kabid. Ekternal Kantor Internasional UNY  
 Instansi/Unit Kerja : UNY Yogyakarta/ Jurdik. Kimia FMIPA UNY  
 Alamat Kantor : Karangmalang, Yogyakarta  
 Alamat Rumah : Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta  
 Telepon : +6281320608258  
 Email : jikhsan@uny.ac.id

### Riwayat Pendidikan:

No.	Perguruan Tinggi	Kota/Negara	Tahun Lulus	Bidang Studi
1.	Universitas Negeri Yogyakarta (Sarjana)	Yogyakarta/Indonesia	1992	Pend. Kimia
2.	La Trobe University, Australia (Master)	Victoria, Australia	1999	Kimia Permukaan
3.	La Trobe University, Australia (Ph.D.)	Victoria, Australia	2005	Kimia Permukaan

### Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi:

#### (a) Pendidikan dan Pengajaran (satu tahun terakhir)

No.	Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran	Bentuk	Tempat/Instansi	Waktu	Keterangan
1.	KF	Kuliah	UNY		

#### (b) Pengalaman Penelitian

Institusi	Jabatan	Judul Riset	Tahun Sumber Dana
UNY	Ketua	<i>Studi Tentang Mekanisme Reaksi Pada Adsorpsi Molekul Zat Warna oleh Mineral Lempung,</i>	2006, DP2M DIKTI
UNY	Anggota	<i>Model Pembentukan Kompleks Logam dengan Kitosan</i>	2006 – 2007, DP2M DIKTI
UNY	Ketua	<i>Memahami Proses Sorpsi Ion Fosfat oleh Goethite dan Montmorillonite</i>	2007-2008, DP2M DIKTI

## (c) Publikasi Nasional

No.	Karya Ilmiah
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Jaslin Ikhsan</b>, <i>Memahami Proses Adsorpsi Ion Logam oleh Clay Mineral</i>, (makalah kajian), Prosiding Seminar Nasional Kimia, Oktober 2004, Yogyakarta.</li> <li>2. <b>Jaslin Ikhsan</b>, <i>Memahami Proses Adsorpsi Molekul Organik oleh Clay Mineral</i>, (makalah kajian), Prosiding Seminar Nasional Kimia, Oktober 2005, Yogyakarta.</li> <li>3. <b>Jaslin Ikhsan, Endang Widjajanti LFX, Sunarto, Meirna Pramesti A.</b>, <i>Perilaku Sorpsi 9-Aminoakridin oleh Monmorillonit</i>, Prosiding Seminar Nasional Penelitian MIPA, 1 Agustus 2006, FMIPA UNY.</li> <li>4. <b>Jaslin Ikhsan</b>, <i>Penentuan Reaksi Protonasi Dan Deprotonasi Molekul Organik Serta Konstanta Kesetimbangan Reaksinya Dengan Titrasi Potensiometri</i>, Prosiding Seminar Nasional Kimia, Nopember 2006, Yogyakarta.</li> <li>5. <b>Endang Widjajanti LFX, AK Prodjosantoso, Jaslin Ikhsan</b>, <i>Effek pH pada Pembentukan Kompleks Logam dengan Kitosan</i>, Prosiding Seminar Nasional Kimia, Nopember 2006, Yogyakarta</li> <li>6. <i>Endang Widjajanti Laksono, AK Prodjosantoso, Jaslin Ikhsan, Adsorpsi Kompetitif Antara Cr(III), Cu(II) Dan Ni(II) oleh Kitosan</i>, Jurnal Kimia (ISSN 1412-8691), ed. 5, Th. V, Juli 2006, pp 40 – 84</li> <li>7. <i>Endang Widjajanti Laksono, AK Prodjosantoso, Jaslin Ikhsan, Koadsorpsi Cr-Fe Oleh Kitosan</i>, Jurnal Penelitian Sainstek (ISSN 1412-3991), Vol 13, No. 1, 1 April 2008.</li> <li>8. <i>Jaslin Ikhsan, Peningkatan Kualitas Guru MIPA melalui Pendidikan Berbasis Komunitas</i>, Seminar Nasional MIPA, Yogyakarta, 2009.</li> <li>9. <i>Sukamto, Paulina Pannen, Jaslin Ikhsan, Panduan e-Tugas Akhir (e-TA), Konsorsium PJJ S-1 PGSD (Hylite), 2009</i></li> <li>10. <b>Jaslin Ikhsan</b>, <i>Optimalisasi Teknologi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran</i>, Seminar Nasional Teknologi Pendidikan Univeristas Batu Raja, Palembang, 2011</li> </ol>

## (d) Publikasi Internasional

No.	Karya Ilmiah
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Jaslin Ikhsan</b>, Johnson, B.B. and Wells, J.D., (1999), <i>A Comparative Study of the Adsorption of Transition Metals on Kaolinite</i>, <b>Journal of Colloid and Interface Science</b>, 217, 403-410.</li> <li>2. Angove, M.J., Fernandes, M.B. and <b>Jaslin Ikhsan</b>, (2002), <i>The Sorption of Anthracene onto Goethite and Kaolinite in the Presence of Some Benzene Carboxylic Acids</i>, <b>Journal of Colloid and Interface Science</b>, 247, 282-289.</li> <li>3. <b>Jaslin Ikhsan</b>, Johnson, B.B., Wells, J.D. and Angove, M.J., (2004), <i>Adsorption of Aspartic Acid on Kaolinite</i>, <b>Journal of Colloid and Interface Science</b>, 273, 1-5.</li> <li>4. <b>Jaslin Ikhsan</b>, Wells, J.D., Johnson, B.B. and Angove, M.J., (2004), <i>The Effect of Aspartic Acid on the Binding of Transition Metals to Kaolinite</i>, <b>Journal of Colloid and Interface Science</b>, 273, 6-13.</li> <li>5. <b>Jaslin Ikhsan</b>, Wells, J.D., Johnson, B.B. and Angove, M.J., (2005), <i>Surface Complexation Modeling of the Sorption of Zn(II) by Montmorillonite</i>, <b>Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects</b>, 252, 33-41.</li> <li>6. <b>Jaslin Ikhsan</b>, Angove, M.J., Wells, J.D. and Johnson, B.B., (2005), <i>Surface Complexation Modeling of the Sorption of 2-, 3-, and 4-aminopyridine by Montmorillonite</i>, <b>Journal of Colloid and Interface Science</b>, 284(2), 383-389.</li> <li>7. <b>Jaslin Ikhsan</b>, Angove, M.J., Johnson, B.B. and Wells, J.D. (2005), <i>Cosorption of Zn(II) and 2-, 3-, or 4-aminopyridine by Montmorillonite</i>, <b>Journal of Colloid and</b></li> </ol>

- Interface Science**, 284(2), 400-407.
8. **Jaslin Ikhsan**, Wells, J.D. and Johnson, B.B. and Angove, B.B. (2005), *Sorption of 3-amino-1,2,4-triazole and Zn(II) onto Montmorillonite*, **Clays and Clay Minerals**, 53(2), 137 -146
  9. **Jaslin Ikhsan**, Endang Widjajanti LFX, Sunarto, (2007), *Model Pembentukan Kompleks Permukaan pada Adsorpsi 9-Aminoakridin oleh Kaolinit*, **Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains** (ISSN: 1410 1866), edisi 2, Tahun XII, Nopember 2007.
  10. **Jaslin Ikhsan**, The Adsorption of Metal Ions to Kaolinite, 20<sup>th</sup> Australian Surface and Colloid Science Conference, February 1998, South Australia
  11. **Jaslin Ikhsan**, *The Adsorption of Aminopyridines to Clay Minerals*, 23rd Australian Surface and Colloid Science Conference, October 2002, Victoria
  12. **Jaslin Ikhsan**, *The Adsorption of Zinc and 2-Aminopuridine onto Clay Minerals*, 24th Australian Surface and Colloid Science Conference, February 2004, South Australia.
  13. **Jaslin Ikhsan**, *The Adsorption of Aminopyridines onto Clay Minerals*, 24th Australian Surface and Colloid Science Conference, February 2004, South Australia.
  19. **Jaslin Ikhsan, Endang Widjajanti LFX, Sunarto**, *Study of Reaction Mechanisms on the Adsorption of 9-Aminoacridine by Montmorillonite*, Proceeding: International Conference on Mathematics and Natural Sciences, ITB Bandung: Oktober 2006.
  20. **Endang Widjajanti LFX, AK Prodjosantoso, Jaslin Ikhsan**, *Complexation Model of Metal Adsorption by Chitosan*, Proceeding: International Conference on Mathematics and Natural Sciences, ITB Bandung: Oktober 2006.
  21. **SEAMEO Resource Package: Human Values-based Water, Sanitation, and Hygiene Education, (Chapter writer), 2007**
  22. *Harmonization of Higher Education Institution in SEA Countries, country coordinator, conference paper, 2009*
  23. **Jaslin Ikhsan, Herman, Adie Erar Yusuf**, *Students Perception on Written Material (Modules) in PJJ PGSD*, ISODEL 2009
  24. **Jaslin Ikhsan, Herman, Dian Susetyaningtyas**, *Practices and Lessons Learned from Branding of Indonesian Education Institutions through Open and Distance Learning (ODL)*, International Conference on Branding in Higher Education: Practices and Lessons learned form Global Perspectives, Nha Trang University, Vietnam, 2009.

**PROFIL SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN  
JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN PADA SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA (SMP) DI BALI**

**Oleh:**

**Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd  
Dosen Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK)  
Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Singaraja-Bali**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil tentang sarana dan prasarana pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskriptif kuantitatif dengan subyek penelitian adalah guru-guru pengajar Penjasorkes SMP yang ada di Bali, adapun sampel penelitian ditentukan secara *cluster*, masing-masing wilayah diwakili oleh satu Kabupaten/Kota, sehingga dalam penelitian ini digunakan sampel sebanyak 5 kabupaten dan masing-masing kabupaten diambil 4 sekolah dan 1 guru Penjasorkes, maka jumlah sampel keseluruhan adalah 20 guru Penjasorkes SMP yang ada di Bali. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) prasarana lapangan yang dimiliki oleh sekolah adalah lapangan basket dan voli sebesar 13,5%, lapangan sepak bola dan tenis sebesar 10%, lapangan voli saja sebesar 9%, lapangan basket saja 9%, GOR (Gedung Olahraga) sebesar 4,5% dan yang tidak memiliki sarana lapangan adalah 9%, (2) kategori keberadaan sarana olahraga permainan adalah sebesar 40% guru menyatakan kurang lengkap, (3) kategori keberadaan sarana olahraga atletik adalah sebesar 45% guru menyatakan kurang lengkap, (4) kategori keberadaan sarana olahraga senam adalah sebesar 31% guru menyatakan tidak lengkap, (5) kategori keberadaan sarana kebugaran adalah sebesar 64% guru menyatakan tidak ada, dan (6) kategori keberadaan prasarana perpustakaan adalah sebesar 32,5% guru menyatakan kurang lengkap.

Kata Kunci: Sarana dan Prasarana, Pembelajaran Penjasorkes

**A. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar masyarakat Indonesia menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional.



Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik, agar dapat belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, berguna bagi orang lain dan membangun jati diri. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut maka salah satunya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tahun 2003 Pasal 45, Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik (UU Sisdiknas:2003).

Di antara pembelajaran yang ada, pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (penjasorkes) merupakan salah satu bidang pembelajaran yang saat ini perlu mendapatkan perhatian karena pembelajaran penjasorkes dapat memberikan sumbangan terhadap tujuan pendidikan pada umumnya (Lutan: 2004). Penjasorkes juga dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ketangkasan dalam proses dasar untuk berbicara, membaca, menulis dan berhitung, sehingga hal ini bermakna bahwa pembelajaran penjasorkes secara langsung akan berpengaruh terhadap kecakapan dalam pembelajaran yang lainnya (Simanjuntak,dkk:2008).

Pembelajaran penjasorkes merupakan wahana pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mempelajari hal-hal yang penting, oleh karena itu pembelajaran penjasorkes tidak kalah penting dengan pembelajaran lain seperti: matematika, bahasa, IPS dan IPA (Husdarta:2009). Di sisi lain penjasorkes mampu mengembangkan; *organic development, neuromuscular development, intellectual development, social-personal-emotional development* (Melograno, VJ:1996), bahkan menurut Bucher (1960) pembelajaran penjasorkes merupakan bagian integral dari proses pendidikan total. Sehingga dari konteks sarana dan prasarana, untuk pembelajaran penjasorkes menjadi hal yang sangat penting, karena gedung/ruang dan penggunaan alat merupakan sebuah keniscayaan dalam pembelajarannya, disamping itu sarana dan prasarana penjasorkes berfungsi sebagai wadah atau penunjang untuk melakukan kegiatan

pembelajaran sehingga harus dipersiapkan sesuai dengan tuntutan yang ada (Harsuki:2003). Hal tersebut didukung dalam ketentuan umum Peraturan Mendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Pendidikan Umum, bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran haruslah menyediakan tempat berolahraga serta sarana olahraga untuk melakukan pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga (Permendiknas:2004).

Sementara itu, dalam Permendiknas tersebut, juga diatur secara prinsip bahwa untuk sarana dan prasarana pembelajaran penjasorkes harus memenuhi ketentuan seperti tempat bermain/berolahraga kurang lebih memiliki rasio luas minimum 3 meter persegi/peserta didik, di dalam luas tersebut harus terdapat tempat berolahraga minimum 30 meter X 20 meter yang memiliki permukaan datar, drainase yang baik, dan tidak terdapat pohon, serta benda-benda yang lain yang mengganggu kegiatan berolahraga. Di samping itu pula juga harus memenuhi peralatan pendidikan seperti bola voli, basket, senam, atletik, sepak bola dan yang lainnya secara cukup memadai.

Hal tersebut di atas sangat masuk akal, karena khusus pembelajaran penjasorkes sarana dan prasarana mutlak dibutuhkan dalam proses pembelajarannya. Namun apa yang diamanatkan Undang Undang dan Peraturan Menteri dalam hal ini belum tentu dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan/sekolah yang ada di tanah air. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan langsung di daerah tempat penulis melaksanakan aktifitas mengajar dan membimbing bidang penjasorkes, dapat ditemukan berbagai kekurangan-kekurangan terkait dengan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran penjasorkes, seperti kekurangan gedung olahraga, bola basket, bola voli, peralatan senam dan peralatan atletik serta yang lainnya. Dampak dari kekurangan ini adalah tidak efektifnya pembelajaran sehingga pemahaman dan kemampuan peserta didik akan menjadi rendah sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penampilan peserta didik terhadap bidang-bidang lainnya.

Mengingat sangat urgennya keberadaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pembelajaran penjasorkes, maka penelitian yang berjudul Profil Sarana dan Prasarana Pembelajaran Penjasorkes di Sekolah Menengah Pertama di Bali, sangat penting untuk segera dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang profil sarana dan prasarana penjasorkes sehingga ke depannya informasi hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan ataupun pedoman bagi pemegang kebijakan/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasaana penjasorkes di sekolah pada masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah profil sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di Sekolah Menengah Pertama yang ada di Bali?.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka hasil temuan mencakup; (1) Prasarana lapangan yang dimiliki oleh sekolah menengah pertama yang ada di Bali, (2) keberadaan sarana olahraga permainan, (3) keberadaan sarana olahraga atletik, (4) keberadaan sarana olahraga senam, (5) keberadaan sarana kebugaran, (6) keberadaan prasarana perpustakaan yang dimiliki.

Secara lebih jelas dapat dijabarkan dibawah ini:

### **(1) Prasarana lapangan yang dimiliki oleh sekolah SMP di Bali:**

<b>NO</b>	<b>Fasilitas Lapangan Olahraga yang dimiliki</b>	<b>Persentasae</b>
1	Lapangan Sepak bola	4,5%
2	Lapangan basket	9%
3	Lapangan voli	9%
4	GOR (Gedung olahraga)	4,5%
5	Lapangan Tennis	10%
6	Lapangan Sepak bola dan Tennis	9%
7	Lapangan basket dan Voli	13,5%
8	Lapangan Sepak bola, basket dan voli	9%

9	Lapangan Sepak bola, basket, voli dan GOR	4,5%
10	Lapangan basket, voli, GOR dan Lapangan tenis	4,5%
11	Tidak memiliki lapangan	9%
12	Lain-lain	13,5%
JUMLAH		100%

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka secara konseptual dapat dikatakan bahwa hanya 4,5% sekolah yang memiliki lapangan cukup lengkap, yang lainnya hanya memiliki 1 lapangan saja antara lapangan basket, voli, tenis dan GOR. Hal ini akan berdampak pada kurangnya kualitas pembelajaran penjasorkes, sehingga bagi sekolah yang memiliki siswa cukup banyak akan menjadi hambatan dan akan berdampak pada hasil/prestasi belajar siswa.

**(2) Keberadaan sarana olahraga permainan:**

NO	Keberadaan Sarana Olahraga Permainan	Persentasae
1	Sangat Lengkap	0%
2	Cukup lengkap	31%
3	Kurang lengkap	40%
4	Tidak lengkap	29%
5	Tidak ada	0%
JUMLAH		100%

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka secara konseptual dapat dikatakan bahwa hanya 31% sekolah yang memiliki sarana olahraga permainan cukup lengkap, dan sebesar 40% sekolah memiliki sarana olahraga permainan yang kurang lengkap serta sebesar 29% sarana olahraga permainan tidak lengkap. Hal ini berarti bahwa untuk materi permainan dalam pembelajaran penjasorkes maka keberadaan sarana bola seperti misalnya bola basket, bola voli ataupun bola yang lainnya sangat kurang, jika dalam Permendiknas tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, khususnya terhadap keberadaan sarana bola

dalam pembelajaran penjasorkes, minimal memiliki 6 buah bola, dimana 6 bola ini dapat dikategorikan cukup, sehingga jika kategori yang ditemukan kurang ataupun tidak lengkap maka hal ini berarti bahwa pembelajaran penjasorkes pada materi permainan diyakini tidak dapat berjalan efektif karena sarana yang sangat kurang.

**(3) Keberadaan sarana olahraga atletik:**

NO	Keberadaan Sarana Olahraga Atletik	Persentasae
1	Sangat Lengkap	4,5%
2	Cukup lengkap	18%
3	Kurang lengkap	45%
4	Tidak lengkap	27,5%
5	Tidak ada	5%
JUMLAH		100%

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka secara konseptual dapat dikatakan bahwa hanya 4,5% sekolah yang memiliki sarana atletik sangat lengkap, dan sebesar 18% sekolah memiliki sarana atletik yang cukup lengkap serta sebesar 45% sarana atletik yang kurang lengkap serta sebesar 5% yang tidak memiliki sarana apapun. Hal ini berarti bahwa untuk materi atletik dalam pembelajaran penjasorkes, maka keberadaan sarana atletik seperti misalnya lembing, cakram, peluru, tongkat estafet dan bak lompat serta yang lainnya sangatlah kurang, jika dalam Permendiknas tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, khususnya terhadap keberadaan sarana atletik dalam pembelajaran penjasorkes, minimal memiliki lembing, cakram, peluru, tongkat estafet dan bak lompat secara memadai ataupun cukup, sehingga jika kategori yang ditemukan kurang ataupun tidak lengkap maka hal ini berarti bahwa pembelajaran penjasorkes pada materi atletik diyakini tidak dapat berjalan efektif karena sarana yang sangat kurang.

**(4) Keberadaan sarana olahraga senam:**

<b>NO</b>	<b>Keberadaan Sarana Olahraga Senam</b>	<b>Persentasae</b>
1	Sangat Lengkap	0%
2	Cukup lengkap	9%
3	Kurang lengkap	31%
4	Tidak lengkap	31%
5	Tidak ada	29%
JUMLAH		100%

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka secara konseptual dapat dikatakan bahwa hanya 9% sekolah yang memiliki sarana senam cukup lengkap, sebesar 31% sekolah memiliki sarana senam yang kurang lengkap dan sebesar 31% sarana olahraga permainan tidak lengkap serta 29% yang tidak memiliki sarana apapun. Hal ini berarti bahwa untuk materi senam dalam pembelajaran penjasorkes, maka keberadaan sarana senam seperti misalnya matras, peti loncat, tongkat palang tunggal, simpai serta yang lainnya sangatlah kurang bahkan banyak yang tidak memiliki sarana, jika dalam Permendiknas tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, khususnya terhadap keberadaan sarana senam dalam pembelajaran penjasorkes, minimal memiliki matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat palang tunggal dan gelang-gelang secara memadai ataupun cukup, sehingga jika kategori yang ditemukan kurang ataupun tidak lengkap maka hal ini berarti bahwa pembelajaran penjasorkes pada materi senam diyakini tidak dapat berjalan efektif karena sarana yang sangat kurang.

**(5) Keberadaan sarana kebugaran:**

<b>NO</b>	<b>Keberadaan Sarana Kebugaran</b>	<b>Persentasae</b>
1	Sangat Lengkap	0%
2	Cukup lengkap	0%

3	Kurang lengkap	13,5%
4	Tidak lengkap	22,5%
5	Tidak ada	64%
JUMLAH		100%

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka secara konseptual dapat dikatakan bahwa terdapat 64% sekolah yang sama sekali tidak memiliki sarana kebugaran, dan 22,5% keberadaan sarana kebugaran yang tidak lengkap dan hanya 13,5% yang kurang lengkap, tidak ada yang memiliki cukup lengkap dan sangat lengkap. Hal ini berarti bahwa untuk materi kebugaran dalam pembelajaran penjasorkes, maka keberadaan sarana kebugaran seperti misalnya *traidmill*, *ergocycle*, *barbell* dan *dumbbell* serta yang lainnya sangatlah kurang bahkan banyak yang tidak memiliki sarana tersebut, walau belum diatur dalam Permendiknas tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, namun dalam kurikulum terdapat materi kebugaran yang pada dasarnya membutuhkan sarana kebugaran yang memadai, sehingga jika kategori yang ditemukan kurang ataupun tidak lengkap maka hal ini berarti bahwa pembelajaran penjasorkes pada materi kebugaran diyakini tidak dapat berjalan efektif karena sarana yang sangat kurang.

**(6) Prasarana perpustakaan yang dimiliki:**

NO	Keberadaan Prasarana Perpustakaan	Persentasae
1	Sangat Lengkap	0%
2	Cukup lengkap	45%
3	Kurang lengkap	32,5%
4	Tidak lengkap	22,5%
5	Tidak ada	0%
JUMLAH		100%

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka secara konseptual dapat dikatakan bahwa terdapat 45% sekolah yang hanya memiliki prasarana perpustakaan yang

cukup lengkap, dan 32,5% memiliki prasarana yang kurang lengkap serta sebanyak 22,5% sekolah memiliki prasarana yang tidak lengkap. Hal ini berarti bahwa untuk prasarana perpustakaan sangatlah kurang bahkan banyak yang tidak memiliki prasarana tersebut, namun dalam Permendiknas tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, khususnya terhadap keberadaan sarana perpustakaan, guna keperluan menambah pengetahuan melalui pustaka terkait dengan materi penjasorkes, maka keberadaan prasarana perpustakaan dan kelengkapan pustaka menjadi sebuah keharusan bagi sekolah.

### **C. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran penjasorkes di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bali, yang terdiri dari prasarana lapangan, sarana olahraga permainan, sarana olahraga atletik, sarana olahraga senam, sarana kebugaran, prasarana perpustakaan yang dimiliki masih pada kategori kurang dan tidak lengkap. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang telah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah, yang mengamanatkan bahwa untuk sarana dan prasarana pembelajaran penjasorkes di sekolah minimal memiliki sarana dan prasarana yang memadai baik dari prasarana lapangan, sarana olahraga permainan dan yang lainnya. Selanjutnya secara tidak langsung kondisi ini akan berpengaruh buruk terhadap proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik.

Selanjutnya berdasarkan simpulan tersebut dapat disarankan bagi pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan untuk lebih memperhatikan keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran penjasorkes di SMP sehingga tujuan pembelajaran penjasorkes dapat tercapai dengan baik.

### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Bucher, 1960. *Foundations of Physical Education*. ST. Louis: The CV.Mosby Company
- Harsuki. 2003. *Perkembangan Olahraga Terkini: Kajian Para Pakar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada



- Husdarta. 2009. *Manajemen Pendidikan Jasmani*. Bandung: Alfabeta
- Lutan,R. 2004. *Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Penjaskes*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdikbud
- Melograno,VJ.1996. *Designing the Physical Education Curriculum*. United State of America: Human Kinetics
- Simanjuntak,dkk. 2008. *Pendidikan Jamani dan Kesahtan; Buku Ajar Cetak*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas
- 2008. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesi Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2008. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007*. Jakarta: Fokusmedia

## STADION MAGUWO HARJO SEBAGAI SARANA PRASARANA OLAHRAGA, REKREASI, DAN BISNIS DI KABUPATEN SLEMAN

Oleh: Sulistiyono  
Universitas Negeri Yogyakarta

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen perencanaan stadion Maguwoharjo sebagai sarana prasarana yang berfungsi ganda baik sebagai sarana prasarana olahraga, rekreasi, dan bisnis di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan diskriptif kualitatif. Sampel yang dijadikan informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian ini adalah pengelola dan staff stadion Maguwoharjo. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti sendiri. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen perencanaan pengelola untuk mencapai tujuan organisasi telah ada tetapi belum tertulis tersurat dan terdokumentasi dengan baik. Konsep bangunan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengelola telah mengarah pada tujuan pengelola untuk menjadikan kawasan stadion menjadi sarana prasarana olahraga, rekreasi, dan bisnis.

**Kata kunci** : stadion, olahraga, rekreasi, bisnis, Sleman

### PENDAHULUAN

Pembangunan dan pembinaan olahraga baik olahraga prestasi, rekreasi atau pendidikan di suatu daerah dapat berlangsung dengan dinamis karena didukung berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Sarana prasarana olahraga adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam dinamika berlangsungnya kegiatan olahraga. Pertandingan tenis dapat dilaksanakan jika lapangan tenis tersedia, pertandingan bulu tangkis akan dapat dinikmati oleh penonton jika tersedia gedung olahraga dengan segala sarana pendukungnya. Masyarakat bisa melakukan *jogging* atau jalan santai dengan nyaman jika tersedia area yang cukup untuk bergerak. Keamanan sarana prasarana olahraga juga menjadi pertimbangan terlaksananya suatu kegiatan olahraga.

Pengelolaan atau manajemen sarana prasarana olahraga di Indonesia menghadapi permasalahan yang secara umum sama, stadion manahan di kota Surakarta misalnya tanpa bantuan anggaran dari pemerintah menurut pengelola mengalami kesulitan dalam perawatan. Agoes Soedarman, Kepala Unit Pengelola

Stadion Manahan yang dikutip Arif (Suara Merdeka, 2010:1) menyatakan tanpa APBD kelancaran pengelolaan stadion akan terganggu, untuk tahun 2010 dana mungkin masih mencukupi, tetapi untuk tahun 2011 pengelola belum tahu apakah dana yang ada cukup untuk gaji pegawai, dan perawatan stadion. Stadion Jalak Harupat kabupaten Bandung, dilaporkan juga merugi dalam pengelolaannya. Menurut anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Dadang Rusdiana, pemasukan dan pengeluaran dana stadion kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung itu harus diaudit karena hingga kini masih merugi. Jangan sampai akibat pengelolaan yang salah, stadion ini jadi terbengkalai dan malah merugi tiap tahun (Tribun, 2009: 8). Keluhan juga muncul seputar pengelolaan stadion Mandala Krida di Yogyakarta. Terakhir yang mencuat adalah penggunaan stadion untuk konser musik. Padahal lapangan rumput fungsinya untuk olahraga (Kompas, 2008: 1). Manajemen kesulitan dalam melakukan perawatan yang disebabkan keterbatasan dana. Biaya perawatan sarana prasarana olahraga yang tinggi tidak mampu dicukupi oleh pengelola.

Kabupaten Sleman adalah salah satu daerah tingkat II yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sleman memiliki stadion Maguwoharjo yang usianya masih muda dengan arsitektur bangunan yang indah. Stadion adalah prasarana dengan desain untuk pertandingan olahraga menggunakan lapangan seperti sepakbola, baseball, rugby, dan atletik. Stadion umumnya memiliki tempat duduk lebih dari 100 atau lebih dari 100.000. Stadion sepakbola untuk klub profesional memiliki kapasitas antara 50.000-60.000 (Fried, 2005:66).

Sebagai sebuah prasarana, stadion Maguwoharjo memerlukan pengelolaan yang profesional agar dapat bermanfaat optimal. Fungsi perencanaan yang dilakukan pengelola memegang peran kunci agar fungsi dan kualitas stadion dapat bertahan sebagaimana mestinya. Fried (2005: 23) menyatakan manajemen sarana prasarana olahraga memegang peran penting terhadap berlangsungnya dinamika olahraga, manajemen sarana prasarana olahraga berpengaruh secara signifikan pada nilai suatu *event* olahraga. Pertandingan atau *event* olahraga menjadi *atraktif, aman, dan convenient salah satunya faktor* sarana prasarana harus dikelola

dengan profesional. Kesalahan manajemen sarana prasarana olahraga bisa menyebabkan terjadinya bencana.

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa (Handoko, 1984 : 77). Perencanaan merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai manajer sarana prasarana olahraga. Sebuah pengelolaan sarana prasarana olahraga tanpa perencanaan dapat dipastikan tidak bisa menjaga keberadaannya. Perencanaan adalah proses untuk menentukan dan mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk memastikan fasilitas olahraga dalam kondisi yang baik (Fried, 2005: 58).

Perencanaan yang baik dapat dibuat dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dan waktu pada saat rencana dibuat, karena perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi. Suatu rencana yang baik harus memberikan jawaban kepada enam pertanyaan berikut : 1) tindakan apa yang harus dikerjakan, 2) apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan, 3) dimanakah tindakan itu harus dilaksanakan, 4) kapan tindakan itu dilaksanakan, 5) siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu 6) bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?

Stadion modern dalam pengelolaannya berupaya agar seluruh biaya operasional stadion dapat tercukupi dari usaha pengelola stadion mengoptimalkan semua potensi stadion dalam menghasilkan pendapatan. Dalam konteks menghasilkan pendapatan, stadion dapat berfungsi sebagai sarana prasarana olahraga tetapi dapat juga berfungsi sebagai prasarana rekreasi, dan bisnis. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fungsi perencanaan dalam pengelolaan stadion Maguwoharjo sebagai sarana prasarana olahraga, rekreasi dan bisnis di Kabupaten Sleman.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan antara bulan Juni-September 2011 di stadion Maguwoharjo Kabupaten Sleman. Subjek penelitian ini adalah pengelola stadion Maguwoharjo Sleman. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semua data yang diperoleh diadministrasi, diorganisasi, dan dibobot untuk kemudian dilakukan pemilihan atau seleksi data berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

## HASIL PENELITIAN

### A. Stadion Maguwoharjo

Stadion dengan konsep stadion modern telah berdiri di daerah dengan lahan kurang lebih 24,98 Ha, yang terletak di Dusun Jenengan, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Stadion Maguwoharjo dapat diuraikan spesifikasinya sebagai berikut:

- Luas kawasan : 23,5 Ha
- Luas lahan stadion : 6 Ha
- Luas lantai bangunan : 11.000 m<sup>2</sup>
- Bangunan sayap barat : 5 lantai
- Bangunan sayap timur : 4 lantai
- Bangunan sayap utara : 3 lantai
- Bangunan sayap selatan : 3 lantai
- Kapasitas tribun umum : 30.000 orang
- Kapasitas tribun VIP: 1.000 orang
- Area bisnis: sayap timur/utara/selatan (lantai 1 & 2)



Gambar 1. Bangunan Sayap Timur Stadion Maguwoharjo

Stadion Maguwoharjo dikelola oleh pemerintah kabupaten Sleman mulai tahun 2008. Pengelolaan Stadion Maguwoharjo dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Sleman melalui Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Daerah, sub Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Stadion Maguwoharjo. UPT Pengelola Stadion Maguwoharjo dipimpin oleh Bpk. Sarah Waluyo dengan staff sebanyak 7 Orang berstatus PNS, 30 orang karyawan berstatus harian lepas.

### **B. Manajemen Perencanaan Stadion Maguwo**

Sebuah organisasi tidak terkecuali organisasi dibidang olahraga baik yang bersifat profit maupun nonprofit pasti memiliki visi atau misi. Untuk mengetahui bagaimana visi pengelolaan stadion Maguwoharjo peneliti melakukan wawancara dengan Kepala UPT. Pengelola stadion. Berikut petikan wawancara peneliti dengan Bpk. Sarah Waluyo yang diberi amanah pemerintah sebagai Kepala Pengelola UPT. Stadion Maguwoharjo:

“Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berkeinginan stadion Maguwoharjo seperti stadion Gelora Bunga Karno, dimana berbagai aktifitas dapat dilakukan, tidak hanya pertandingan olahraga saja, sehingga bermanfaat optimal bagi masyarakat. Pengelolaan stadion diharapkan juga mampu membiayai dirinya sendiri, tidak tergantung pada bantuan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, atau pusat”.  
Yaa seperti GBK ,,,, stadion GBK pada hari libur ramai didatangi masyarakat, dan terjadi berbagai transaksi sehingga dapat dikatakan GBK sebagai tempat bisnis”.

Dari petikan hasil wawancara diatas pemerintah berharap stadion Muguwoharjo pada masa yang akan datang tidak hanya berfungsi sebagai kawasan atau prasarana olahraga saja, tetapi dapat digunakan untuk rekreasi dan bisnis sehingga dapat memberikan kontribusi pada pemasukan keuangan daerah.

### **C. Perencanaan Stadion Maguwoharjo Sebagai Sarana Prasarana Olahraga**

Fungsi utama dibangunnya stadion Maguwoharjo adalah sebagai sarana prasarana olahraga. Olahraga yang dapat dilakukan di stadion Maguwoharjo adalah sepakbola dengan menggunakan sektor utama yaitu lapangan rumput, olahraga sepatu roda dengan menggunakan area parkir

timur stadion. Olahraga otomotif seperti *dragbike dan dragrace* dilakukan di area parkir barat.

Konsep perencanaan yang formal atau data tertulis dari UPT pengelola stadion bahwa stadion berfungsi sebagai sarana prasarana olahraga belum ditemukan tetapi tersirat dari hasil wawancara peneliti dengan Bpk. Riyanto, Kepala Bid. Teknis Stadion Maguwoharjo sebagai berikut:

Tugas sebagai pengelola stadion yang utama adalah melakukan perawatan terhadap sarana prasarana khususnya perawatan stadion agar berfungsi baik sebagai sarana olahraga. Perawatan yang penting adalah merawat rumput stadion. Rumput stadion Maguwoharjo agar dapat digunakan secara baik, maka direncanakan rumput hanya boleh diinjak untuk kegiatan olahraga. Khususnya agar rumput stadion memenuhi standar pertandingan nasional. Pesta pembukaan Porprov DIY yang baru saja dilaksanakan kru pemain *dumband* hanya ditempatkan di tribun. Bahan sintetis tidak boleh digunakan untuk menutup rumput agar rumput tetap terpelihara.

Pengembangan sarana untuk tahun 2012 akan dipasang lampu agar dapat digunakan untuk pertandingan sepakbola pada malam hari, selain untuk memenuhi standar internasional, pertandingan malam hari diharapkan akan lebih banyak dihadiri oleh penonton. Pengadaan lampu dilakukan seiring perkembangan bahwa siaran langsung pertandingan sepakbola di TV ratingnya semakin tinggi bila dilakukan pada malam hari yang berimbas pada pemasukan untuk kas pengelolaan stadion. Selain stadion sepakbola, di kawasan ini juga direncanakan akan dibangun sirkuit otomotif (*roadrace, gokart, dragrace*) serta fasilitas olahraga lainnya (*indoor dan outdoor*) seperti tennis lapangan dan bowling.

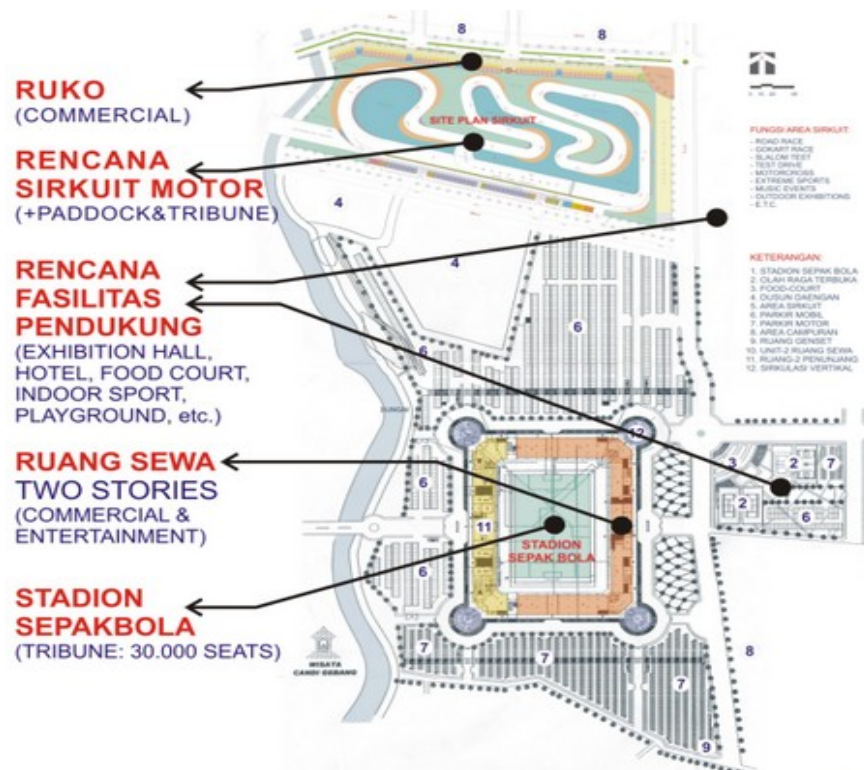
#### **D. Perencanaan Stadion Maguwoharjo Sebagai Sarana Rekreasi**

Pemikiran agar stadion dapat digunakan sebagai sarana prasarana rekreasi adalah ide yang baik seperti yang terjadi diberbagai stadion internasional. UPT Stadion mencoba melakukan beberapa perencanaan. Berikut petikan wawancara dengan Bpk. Sarah Waluyo, Kepala UPT Stadion Maguwoharjo:

“Pada dasarnya stadion Maguwoharjo adalah milik masyarakat Sleman, pemerintah kabupaten dalam hal ini memberikan mandat

kepada UPT untuk mengoptimalkan pemanfaatan stadion, tidak terkecuali untuk kegiatan rekreasi. Pemanfaatan area parkir atau jalan untuk kegiatan *drag race* dan *slalom race* adalah buktinya. Pemanfaatan area parkir stadion untuk kegiatan *race* adalah upaya yang dilakukan pengelola untuk menghidupkan kegiatan rekreasi di kawasan stadion.”

Pengembangan stadion Maguwoharjo sebagai sarana prasarana olahraga yang terpadu dengan rekreasi terlihat dari rencana pengembangan wilayah stadion Maguwoharjo. Rencana pengembangan terkait kegiatan rekreasi dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 8. Master Plan Kawasan Stadion Maguwoharjo

Peneliti pada hari minggu melakukan observasi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi terhadap kegiatan rekreasi yang dilakukan warga masyarakat di sekitar kawasan stadion Maguwoharjo. Rekreasi yang dilakukan diantaranya adalah *jogging*, bersepeda dan kuliner disepul stadion. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan area stadion tampak belum ramai. Masyarakat yang beraktifitas lebih banyak diluar area stadion.



Pengelola berencana melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memanfaatkan area stadion, berikut petikan wawancara peneliti dengan Bpk.

Sarah Waluyo:

“Menciptakan suatu situasi dimana sebuah stadion menjadi kawasan atau tempat yang berfungsi ganda adalah pekerjaan yang berat. Pengelola akan tetap berusaha agar kawasan stadion menjadi kawasan rekreasi warga khususnya pada hari sabtu atau minggu. Suatu program yang akan dilakukan adalah sosialisasi pada bahwa masyarakat hanya dikenakan parkir kendaraan jika ingin sekedar jogging dikawasan stadion.

Pembangunan taman bermain untuk masyarakat menunjukkan bahwa aktifitas rekreasi direncanakan dapat dilakukan di kawasan stadion. Pembangunan akses jalan yang mampu menghubungkan embung Tambakboyo dan candi Gebang diharapkan akan menarik minat masyarakat untuk berekreasi. Kepala UPT Stadion Maguwoharjo sangat mendukung pengembangan kawasan stadion menjadi area rekreasi yang terpadu dengan candi Gebang dan embung Tambakboyo. Berikut petikan wawancara dengan Bpk.Sarah

Waluyo:

“Di seputar kawasan stadion Maguwoharjo ada dua lokasi yang dapat dihubungkan sehingga menjadi lokasi wisata yang terpadu yaitu: embung Tambakboyo dan situs candi Gebang yang dapat dilihat dari stadion lantai 2 sisi barat. Akses jalan yang menghubungkan ketiga lokasi adalah kebutuhan yang sangat penting. Wisata air, candi dan menonton sepakbola atau sekedar untuk jogging atau bersepeda tentu akan menarik masyarakat untuk datang ke sini. Suatu rencana yang ideal, tetapi untuk mewujudkannya dibutuhkan kerjasama yang sinergis dengan instansi yang lain”.

Langkah-langkah yang akan dilakukan atau ditempuh untuk mewujudkan konsep pengelolaan tersebut, adalah: a) melakukan promosi yang berkelanjutan melalui media masa, seperti: televisi, radio, majalah, surat kabar dan melakukan *press release*, b) bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti: hotel, biro travel dan *airline* untuk distribusi promosi (*brochures, flier*), menyelenggarakan acara yang melibatkan masyarakat setempat seperti: *funbike, ten-K run, rally* sepeda sehat, lari keluarga sehat dengan start dan *finish* di kawasan stadion Maguwoharjo Sleman, menjaga atau merawat kebersihan dan kenyamanan *public area*, c) memastikan segala fasilitas telah

tersedia dan bekerja dengan baik, d) membuat *landscaping* yang tertata indah dan terpelihara dengan baik.

#### **E. Perencanaan Stadion Maguwoharjo Sebagai Sarana Prasarana Bisnis**

Melalui proses diskusi dan rapat-rapat antara *eksekutif* dan *legislatif* program kerja UPT pengelola stadion diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan dari kegiatan komersial dengan memanfaatkan aset kawasan stadion. Beban biaya operasional perawatan lapangan utama yaitu rumput stadion dan bangunan belum mampu di cukupi dari biaya pemasukan yang selama ini diperoleh. Pemasukan terbesar diperoleh jika stadion di gunakan untuk pertandingan sepakbola tingkat nasional. PSS Sleman yang menggunakan stadion sebagai *homebase* memberikan kontribusi 20 juta per pertandingan. Petikan wawancara peneliti dengan Bpk.Sarah Waluyo tentang rencana pengembangan kawasan stadion sebagai pusat bisnis, sebagai berikut:

“Sebagai sebuah organ pemerintah kami (UPT) hanyalah pelaksana dari kebijakan pemerintah. Penyusunan rencana kegiatan terutama yang terkait anggaran dilakukan antara *eksekutif* dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Besarnya biaya sewa *space* stadion telah diatur dalam Perda (Peraturan Daerah). Pengelola berusaha mempromosikan *space-space* pada investor yang tertarik.”

Kawasan stadion yang berkembang menjadi kawasan bisnis diharapkan mampu memberikan pemasukan pada kas daerah. Perencanaan bangunan stadion telah disediakan ruang *ekshibisi, foodcourt, cafe, restaurant*, dan ruko yang semuanya itu dapat dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk menjalankan kegiatan usahanya. *One Stop Shopping*, konsep belanja satu tempat merupakan kekuatan atau daya tarik yang banyak dikembangkan oleh pusat-pusat belanja dewasa ini, begitu juga dengan kawasan stadion Maguwoharjo Sleman.

*Event-event* yang dapat dilakukan di kawasan stadion menjadi pemikiran pengelola stadion. *Event* adalah pemacu berputarnya uang di sekitar kawasan, berikut petikan wawancara dengan Bpk. Sarah Waluyo:

“*Event-event* berskala kecil atau besar tetap kami usahakan agar dapat dilakukan di kawasan stadion. Bursa otomotif misalnya adalah sebuah *event* yang mungkin akan dapat dikembangkan. Kendalanya adalah perijinan penggunaan kawasan dari pemerintah desa, karena ijin

penggunaan tanah adalah untuk kegiatan olahraga. Hal ini yang akan coba kami urus agar kawasan lebih semarak dengan kegiatan dan membawa efek pemasukan bagi pengelola.”

Dari petikan wawancara tersebut dapat dimaknai bahwa pengelola stadion Maguwoharjo telah berupaya agar kawasan stadion dapat berfungsi tidak hanya untuk olahraga, dan rekreasi tetapi dapat bermakna sebagai kawasan yang menghidupkan kegiatan bisnis dimana semua yang terlibat memperoleh keuntungan.

## **PEMBAHASAN**

Fungsi sebagai sarana prasarana olahraga adalah fungsi utama dibangunnya stadion berkapasitas 30.000 penonton. Lapangan sepakbola sebagai fasilitas utama digunakan untuk latihan dan pertandingan. Konsep bangunan dan program kerja perawatan stadion sebagai stadion dengan standar nasional dan internasional terlihat dari aktifitas bagaimana para pegawai dari manager sampai staff komitmen untuk mempertahankan kualitas rumput.

Area dan *space* pendukung juga dapat dimanfaatkan untuk olahraga sepatu roda. Olahraga sepatu roda dilaksanakan di parkir timur kawasan stadion. Produk perencanaan dari pemerintah melalui UPT. Pengelola stadion Maguwoharjo secara dokumen ternyata belum dimiliki oleh pengelola. Dokumen perencanaan adalah sesuatu yang penting untuk diketahui oleh seluruh komponen yang terlibat dalam organisasi. Dokumen yang dapat dibaca dan diletakkan ditempat strategis adalah salah satu motivasi dan arah untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu dalam organisasi. Letak stadion Maguwoharjo yang berdekatan dengan embung tambakboyo dan candi gebang terlihat jelas perencanaan bahwa pemerintah telah berpikir untuk mensinkronkan antara kegiatan olahraga dan rekreasi dapat dilakukan satu paket dalam kawasan, sehingga aspek bisnis dapat dicapai sekaligus.

Kebijakan dan program kerja yang dibuat pemerintah kabupaten dan UPT. Pengelola stadion perlu disinergikan. Stadion Maguwoharjo hingga penelitian selesai dilakukan belum secara optimal mampu mencapai salah satu tujuannya yaitu: stadion dapat berfungsi sebagai prasarana rekreasi dan bisnis. Catatan yang

sangat penting adalah hambatan dan kendala pengelola dimana terbentur pada perijinan penggunaan tanah di kawasan stadion. Sebagai kawasan bisnis yang perlu diperjelas adalah ijin bahwa stadion tidak hanya berfungsi sebagai sarana kegiatan olahraga tetapi kegiatan sektor penunjang terciptanya industri dan bisnis olahraga harus diusahakan oleh pemerintah dari mulai pemerintah provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa. Dengan demikian yang menjadi sangat penting adalah dalam *redesain* perencanaan terhadap pengelolaan stadion Maguwoharjo perlu melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat dari pemerintah provinsi sampai pemerintah desa, masyarakat olahraga, pengelola, eksekutif dan legislatif.

Perencanaan untuk menciptakan stadion Maguwoharjo sebagai pusat bisnis adalah kelemahan yang dimiliki UPT. Pengelola stadion, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menuju tujuan tersebut masih bersifat spontan. Pengelola akan semakin optimal jika memiliki sebuah sub unit yang mengelola pemasaran terhadap *space-space* yang dimiliki stadion, kajian terhadap bauran pemasaran tentu akan optimal. *Space-space* stadion masih banyak yang kosong, tidak ada yang memanfaatkan seperti yang terjadi saat ini. Pengusaha belum mau berinvestasi di seputar kawasan yang ditawarkan. Masyarakat belum terlihat antusias untuk hadir di kawasan stadion adalah indikatornya. Perencanaan akan semakin baik jika rencana tersebut terukur, mulai dari waktu atau target selesainya kegiatan, atau kuantitas maupun kualitas suatu program kegiatan yang merupakan buah dari perencanaan yang baik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Stadion Maguwoharjo adalah stadion yang telah direncanakan sebagai sebuah stadion modern dengan konsep sebagai stadion yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana prasarana olahraga, tetapi mempertimbangkan fungsi yang lain yaitu sebagai sarana prasarana rekreasi, dan bisnis. *Site Plann* yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten Sleman adalah buktinya.

Pendekatan perencanaan yang terkait dengan aktifitas atau kegiatan yang menunjang fungsi stadion sebagai kawasan olahraga, rekreasi dan bisnis dapat

dilihat pada tabel 1. Peneliti menyimpulkan fokus perencanaan pengelolaan stadion masih pada aspek perawatan stadion sebagai prasarana olahraga. Lapangan rumput dan bangunan stadion adalah prioritas utama agar stadion dapat digunakan untuk pertandingan nasional dan internasional. Pendekatan perencanaan untuk mencapai tujuan dibidang rekreasi dan bisnis masih belum optimal.

Tabel 1. Analisis Perencanaan Kegiatan yang terkait Fungsi Stadion Sebagai Sarana Prasarana Olahraga, Rekreasi, dan Bisnis

Olahraga	Perawatan Rutin	Perawatan terhadap seluruh bagian stadion
	Pelaksanaan Latihan dan Pertandingan Olahraga	Mempersiapkan seluruh sarana prasarana stadion dalam pelaksanaan latihan dan pertandingan olahraga
	Layanan	Aktivitas pelayanan/service Kegiatan yang turut menunjang, kelancaran aktivitas berolahraga dan menonton
Rekreasi	Sosialisasi pada Masyarakat	Pemasangan Spanduk, dan informasi tata tertib pemanfaatan stadion
	Penyelenggaraan <i>Event</i>	Penyelenggara atau bekerjasama dengan pihak lain membuat <i>event-event</i> rekreasi seperti <i>fun bike</i> , nonton bareng, dll
Bisnis	Penawaran Investasi	Mempromosikan <i>space-space</i> di stadion yang dapat dimanfaatkan untuk usaha

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang manajemen perencanaan pengelolaan stadion Maguwoharjo sebagai sarana prasarana olahraga, rekreasi, dan bisnis di Kabupaten Sleman, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

### 1. UPT. Pengelola stadion Maguwoharjo

Penyusunan perencanaan sebaiknya dibuat dalam dokumen resmi UPT dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertulis. Program kerja yang dilakukan terkait dengan visi, misi, pengelolaan stadion sebaiknya tersusun

dalam program kerja yang lebih jelas siapa penanggung-jawab kegiatan, kapan dilakukan, bagaimana teknis pelaksanaan, sampai bagaimana evaluasi program kerja khususnya terhadap aktifitas pemasaran *space-space* stadion untuk investor, ketentuan harga (*price*) perlu dievaluasi karena masih banyak *space* yang kosong.

## 2. Masyarakat Olahraga

Masyarakat diharapkan dapat membantu program kerja pengelola stadion dengan berbagai alternatif misalnya: ikut merawat aset stadion atau bersikap memiliki, dan tidak merusak fasilitas. Pengusaha merasa ketakutan karena perilaku suporter sepakbola yang masih anarkis. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif berinvestasi dengan memanfaatkan *space*, atau berpartisipasi dalam *event-event* yang diselenggarakan pengelola.

## 3. Pemerintah daerah dan DPRD

Pemerintah kabupaten Sleman dan legislatif (DPRD) dapat mensikapi secara bijaksana terkait PERDA tentang pengelolaan aset daerah dalam pengelolaan stadion. Pemda dan DPRD sebaiknya menetapkan target yang terukur dalam mencapai tujuan pengelolaan stadion, sehingga memacu kinerja pengelola.

### Daftar Pustaka

- Fried, Gil. 2005. *Managing Sport Facility*. United State Of America : Human Kinetic.
- Handoko, Hani. 1984. *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta : BPFE.
- Iqbal, M, Arif. 2010. *Tanpa APBD, Kelangsungan Stadion Manahan Terancam*. <http://m.suaramerdeka.com> diakses 07 Maret 2011.
- Lutan, Rusli. 2001. *Olahraga dan Etika Fair Play*. Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga.
- Meyer and Brightbell (1964). *Community Recreation A Guide to Its Organization*. New Jersey: Prentice-Hall, inc. Englewood Cliff.
- Pengelola Mandala Krida tak Profesional*. Kompas. 16 Februari 2008. [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses 07 Maret 2011.
- . [www.pemkabsleman.co.id](http://www.pemkabsleman.co.id) dikases 15 Juli 2011.
- . 2009. *Stadion Jalak Harupat Merugi*. [www.tribunjabar.com](http://www.tribunjabar.com) dikases 17 Juli 2011

EVALUASI UNTUK  
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN\*

*Furqon*

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

JANUARI 2012

- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.



- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.

## EVALUASI UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN\*

### A. KENISCAYAAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU

Perkembangan mutu kehidupan di suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari mutu pendidikannya. Kemajuan kehidupan suatu bangsa biasanya didukung oleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyatnya. Selain itu, sejumlah studi juga menunjukkan bahwa, dalam jangka panjang, investasi pendidikan memiliki *rate of return* paling tinggi. Sungguh, pendidikan yang bermutu merupakan suatu keniscayaan bagi suatu bangsa dalam mencapai cita-cita luhur mencerdaskan dan menyejahterakan rakyatnya. Tidak ada bangsa yang maju tanpa didukung oleh pendidikan yang bermutu.

Sejalan dengan pemikiran di atas, pertemuan tahunan pimpinan universitas pendidikan se Asia pada tanggal 3 November 2011 melahirkan *Joint Message of The Asian Roundtable of Presidents of Universities of Education* (yang juga dihadiri oleh beberapa pimpinan universitas pendidikan dari Eropa) yang salah satunya menyatakan: “Affirming that education is critical to the moral, social and economic well being of our societies, as it cultivates knowledge, understanding and values among citizens, and enhances human capacity to create a sustainable future.” Mereka juga bersepakat untuk: ”Seeking opportunities and means to enhance educational access and quality for all children in our societies.”

Secara yuridis, pemahaman dan komitmen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dituangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 yang menyatakan: ”Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi .” Pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara sungguh-sungguh dan terencana meningkatkan akses bagi seluruh warganya terhadap pendidikan yang bermutu (*access to quality education*).

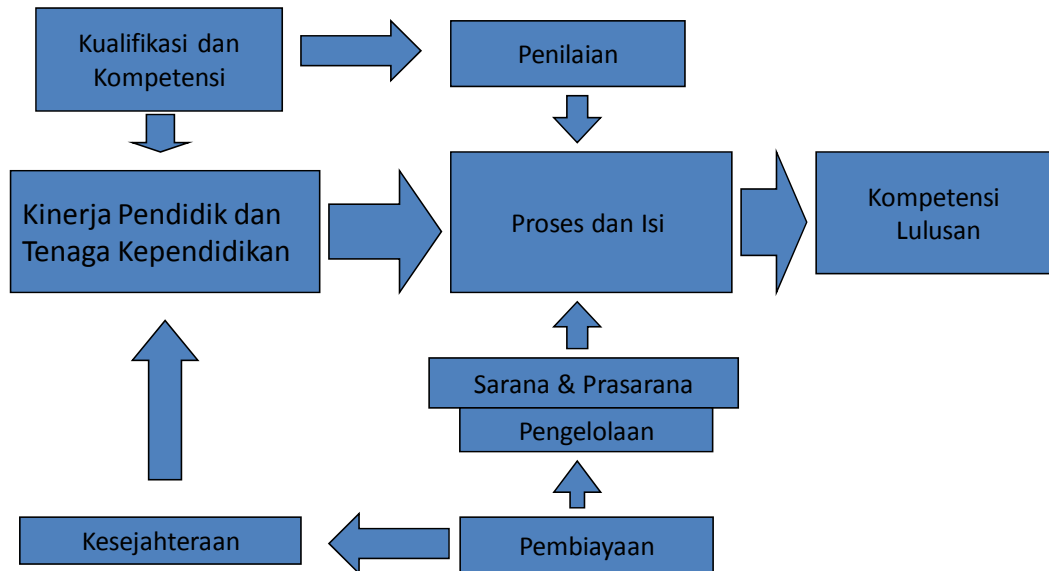
- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.

Mungkin tidak ada seorang pakar atau tokoh pun yang akan membantah pentingnya mutu pendidikan dalam pembangunan suatu bangsa atau masyarakat. Namun, sangat mungkin mereka memerlukan waktu yang panjang untuk memperoleh kesepakatan tentang apa itu pendidikan yang bermutu. Sallis (1993) membagi dua kelompok standar mutu, yaitu: (a) *product & service standards* yang meliputi conformance to specifications, fitness for purpose or use, zero defects, dan right first time, every time, dan (b) *customer standards* yang meliputi consumer satisfaction, exceeding customer expectations, dan delighting the customer. Pendapat tersebut antara lain menggambarkan bahwa mutu terkait dengan spesifikasi (standar) yang disepakati/ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan tujuan atau penggunaan layanan atau produk tertentu, dan sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen. Jones, et al. (n.d.: 5) menjelaskan bahwa: "... quality is a degree of excellence: the extent to which something is fit for its purposes.... product or service quality is defined as conformance with requirement, freedom from defects or contamination, or simply a degree of customer satisfaction."

Dalam konteks Indonesia, Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan rujukan legal tentang mutu pendidikan yang berlaku secara nasional. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan menyatakan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh satuan dan pengelola pendidikan di tanah air, yaitu Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian. Kedelapan SNP tersebut telah dijabarkan dan dirumuskan secara rinci oleh BSNP yang kemudian diundangkan melalui sejumlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Secara skematik, konstelasi SNP dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.

## Konstelasi Komponen Mutu Pendidikan



Badan Standar Nasional Pendidikan

Gambar di atas menjelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan muara yang hendak dituju dengan dukungan seluruh komponen (standar) lainnya. Ketercapaian SKL akan sangat bergantung kepada mutu implementasi Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang diselenggarakan oleh pendidik. Kinerja pendidik dalam mengimplementasikan ketiga standar tersebut dipengaruhi oleh budaya sekolah (*school atmosphere*) yang mencerminkan mutu implementasi Standar Pengelolaan yang didukung oleh pemenuhan standar lainnya.

Diskusi di atas mengarah kepada suatu pemahaman bahwa mutu pendidikan nasional pada akhirnya harus diukur dari tingkat ketercapaian Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tertuang pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (TPN), yaitu:

“mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Pada tataran satuan pendidikan, TPN telah dijabarkan menjadi Standar Kompetensi Lulusan yang telah diundangkan melalui Permendiknas No. 23 Tahun 2006.

- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.

## B. EVALUASI PENDIDIKAN

Di dalam masyarakat moderen, evaluasi diyakini sebagai jantungnya perubahan dan perkembangan suatu organisasi, program, kegiatan, atau institusi dalam menuju mutu yang diharapkan. Grauwe and Naidoo (2004: 15) menyatakan: “Evaluation is at the centre of almost all education quality improvement policies and strategies in most countries today.” Tanpa evaluasi yang baik, suatu institusi, kegiatan, program, atau organisasi sulit diharapkan untuk berkembang dan tampil kompetitif dalam dunia yang terus berubah. Rencana strategis yang baik hanya dapat dihasilkan jika ia didasarkan pada hasil evaluasi yang baik pula.

Chelimsky (1997), berdasarkan berbagai pandangan tentang tujuan dan pendekatan evaluasi yang berkembang pada *International Evaluation Conference* di Vancouver (November 1995), mengemukakan tiga perspektif dalam evaluasi, yaitu *evaluation for accountability*, *evaluation for development*, dan *evaluation for knowledge*. Dari perspektik auditor, penyandang dana, dan pemerintah yang mensponsori kegiatan, evaluasi dilakukan terutama untuk menegakkan akuntabilitas. Evaluasi ditujukan untuk menyediakan informasi tentang (misalnya, hasil dan efisiensi) suatu kegiatan, program, atau proyek kepada pengambil keputusan, baik pemerintah maupun swasta. Bagi manajer dan reformis, evaluasi biasanya lebih diarahkan untuk menyediakan informasi yang diperlukan bagi penyusunan rencana atau program kerja (renstra dan renop) agar terjadi proses peningkatan kinerja program atau lembaga secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perspektif yang ketiga biasanya lebih terlihat pada perguruan tinggi, lembaga akademik, dan ilmuwan. Bagi mereka, evaluasi lebih diarahkan untuk memahami kompleksitas variabel dan hubungannya satu sama lain dalam menghasilkan suatu produk atau kinerja tertentu.

Grauwe dan Naidoo (2004: 16) mengemukakan tiga tujuan evaluasi sekolah, yaitu: “... (a) to comply with administrative demands, (b) to fulfil accountability purposes, and (c) to lead to pedagogical and managerial improvement”. Selain untuk memenuhi tuntutan administratif, evaluasi dilakukan untuk tujuan akuntabilitas (sejauhmana sekolah dan pengelola pendidikan telah menggunakan uang rakyat secara bijaksana) dan untuk peningkatan mutu sekolah (pendidikan) dengan cara mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada serta upaya dan langkah peningkatan yang diperlukan.

Evaluasi pendidikan dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan/atau satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan pemerintah dapat meminta bantuan institusi atau konsultan tertentu (seperti perguruan tinggi, Boston Consulting Group dan Price Water House) untuk melakukan evaluasi pendidikan di wilayah tanggungjawabnya masing-masing. Namun, pemerintah juga dapat membentuk atau menugaskan unit yang relevan untuk melakukan evaluasi tentang penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya.

Evaluasi pendidikan secara nasional oleh pemerintah dapat dilakukan secara periodik (misalnya, dua tahunan) secara sampling. Karena otonomi berada di tingkat kabupaten/kota,

- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.

evaluasi ini sebaiknya memberikan informasi kinerja pendidikan sampai pada setiap kabupaten/kota.

Evaluasi semacam ini dapat dilakukan dengan mengadministrasikan tes prestasi belajar pada mata pelajaran terpilih dan sejumlah kuesioner sehingga diperoleh informasi tentang pencapaian kompetensi (*learning outcomes*) peserta didik dan kaitannya dengan faktor-faktor atau komponen pendidikan (input dan proses) yang terlibat. Dengan demikian, rekomendasi tentang upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat dirumuskan secara lebih spesifik.

### C. AKREDITASI SEKOLAH

Akreditasi lembaga pendidikan memiliki sejarah panjang dan sudah mulai sejak lebih dari 70 tahun yang lalu (Sterian, 1992). Kebutuhan untuk melakukan akreditasi terhadap lembaga pendidikan makin terasa manakala banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang tumbuh dan menghasilkan lulusan dalam jumlah yang masal.

Salah satu tujuan akreditasi adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang sekolah-sekolah mana yang sudah mencapai SNP, dan pada waktu yang sama juga mendorong setiap sekolah untuk senantiasa meningkatkan mutunya. Sehubungan dengan itu, Wellman (1998) menyatakan bahwa: "Accreditation is a .... peer process designed both to assure minimum standards and to help institutions assess and improve themselves."

Tujuan utama akreditasi adalah memperoleh pengakuan, terutama pengakuan dalam aspek akademik (*academic recognition*), baik di tingkat nasional maupun internasional. Sekolah yang terakreditasi secara nasional, misalnya, berarti sekolah tersebut diakui oleh lembaga yang melakukan akreditasi (BAN S/M) telah memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan secara nasional (SNP), sedangkan sekolah yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional berarti lembaga tersebut diakui telah memenuhi standar yang berlaku secara internasional (?). Informasi tentang pengakuan ini digunakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) untuk tujuan penerimaan siswa baru atau transfer (kredit atau perpindahan siswa). Bagi masyarakat, informasi hasil akreditasi ini juga sangat bermanfaat, baik bagi siswa, orang tua, maupun bagi pengguna lulusan.

Secara rinci, Sterian (1992) menjelaskan tujuan akreditasi sebagai berikut:

- Peningkatan mutu dan efisiensi sekolah;
- Memberikan informasi kepada masyarakat (stakeholders) tentang mutu setiap sekolah;
- Membantu sekolah merumuskan tujuan pendidikan dan kondisi yang diperlukan untuk mencapainya;
- Membantu sekolah mengembangkan kemampuan untuk melakukan *self evaluation* menuju *continuous quality improvement*;
- Membantu pengembangan program dan/atau lembaga baru; dan
- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.

- Menentukan secara objektif posisi sekolah dalam suatu norma yang digunakan dalam akreditasi;

Secara nasional, delapan SNP merupakan kriteria yang digunakan untuk melakukan akreditasi sekolah, sedangkan lembaga akreditasi internasional (jika ada) dapat menggunakan kriteria atau standar yang beragam. Salah satu kriteria yang mungkin digunakan adalah karakteristik sekolah efektif yang dikemukakan oleh berbagai pihak, antara lain oleh Sammons, P. (1999) sebagai berikut:

- Professional leadership (firm and purposeful, a participative approach, the leading professional)
- Shared vision and goals (unity of purpose, consistency of practice, collegiality and collaboration)
- A Learning environment (an orderly atmosphere, an attractive working environment, maximization of learning time)
- Learning (academic emphasis & focus on achievement)
- Purposeful teaching (high expectation, communicating expectations, providing intellectual challenge)
- Positive reinforcement (clear & fair discipline, feedback)
- Monitoring progress (monitoring pupil performance, evaluating school performance)
- Pupils right and responsibilities (raising pupil self-esteem, positions of responsibility, control of work)
- Home-school partnership (parental involvement in their children's learning)
- A learning organization (school-based staff development)

Akreditasi sekolah/madrasah dapat dilakukan terhadap institusi sekolah/madrasah secara keseluruhan, dan dapat pula dilakukan terhadap program tertentu pada sekolah itu, seperti program keahlian tertentu di SMK). Terlepas dari level mana (sekolah atau program keahlian) yang akan diakreditasi, kegiatan akreditasi akan menempuh tiga tahap besar berikut (Sterian, 1992): (a) evaluasi diri (institusi atau program tertentu), (b) reviu dan visitasi oleh experts dan/atau peers, dan (c) penentuan status akreditasi institusi.

Evaluasi diri merupakan langkah awal dari suatu proses akreditasi. Ini merupakan langkah penting, karena upaya peningkatan mutu sebagai tindak lanjut akreditasi merupakan tanggung jawab institusi (sekolah), sehingga mereka harus berani melihat dirinya secara objektif dan menyeluruh. Kemampuan penilaian diri seperti inilah yang akan menjadi titik awal perubahan kearah peningkatan mutu. Dalam kaitan ini, Sterian (1992) mengingatkan bahwa penilaian yang didasarkan pada evaluasi diri menuntut:

1. The objectives of the evaluation programme must be clear and familiar to all those concerned;
  2. The evaluation methods must be up-to-date;
  3. The evaluation criteria must be known and agreed upon by all parties concerned;
  4. The evaluation process should involve all those concerned, including the students;
  5. The self evaluation should be constructive and should reflect the level of achievement of the objectives;
- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.

6. The positive feedback for self control and development should be active in the self evaluation process.

Reviu dan visitasi oleh pakar (*expert*) atau sejawat (*peer*) ditujukan untuk memvalidasi hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi. Dalam hal ini, kesungguhan dan integritas pakar atau sejawat yang memvalidasi hasil evaluasi diri memegang peranan sentral. Kedua langkah inilah (evaluasi diri dan reviu dan visitasi) yang akan menentukan validitas data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan status akreditasi institusi.

#### D. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Dalam berbagai literatur (misalnya, Gronlund, 1965 dan Nitko, 1996) menyatakan bahwa penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran secara keseluruhan. Penilaian yang dimaksud pada ungkapan tersebut adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik (guru) dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Penilaian jenis ini dikenal dengan sebutan penilaian kelas (*classroom assessment*) yang spirit utamanya adalah formatif, yaitu untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Mutu hasil kegiatan pembelajaran - yang didalamnya mengandung kegiatan penilaian kelas – perlu dicek oleh penilaian lain secara periodik, yaitu pada akhir setiap tahun pelajaran (penilaian kenaikan kelas) dan pada akhir satuan pendidikan. Kedua jenis penilaian ini dapat dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal, namun penilaian secara eksternal lebih direkomendasikan karena beberapa pertimbangan.

Penilaian hasil belajar secara eksternal diperlukan terutama untuk (a) memperoleh pengakuan (*recognition*) atas mutu keluaran yang dihasilkan (yang sampai batas tertentu juga mencerminkan mutu proses), dan (b) pengendalian agar variasi standar mutu yang diterapkan tidak terlalu besar baik antar guru, antar sekolah, maupun antar daerah. Selain itu, penilaian secara eksternal juga menjadi *pressure to achieve* bagi siswa, guru, dan pengelola pendidikan sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan upayanya masing-masing secara terus menerus. Mengingat pentingnya peranan penilaian eksternal dalam peningkatan mutu pendidikan di negaranya, Menteri Pendidikan Amerika Serikat (*U.S. Secretary of Education*), Rod Paige menyatakan: "Anyone who opposes annual testing of children is an apologist for a broken system of education that dismisses certain children and classes of children as unteachable" (www.ed.gov., n.d.: 3).

Tes merupakan instrumen yang lazim digunakan dalam penilaian yang bersifat eksternal terutama yang berskala besar (*large scale assessment*). Penggunaan tes dalam sistem persekolahan banyak dikecam oleh sebagian praktisi dan ahli pendidikan, hingga muncul suatu mitos *testing promotes "teaching to the test"*. Menanggapi mitos ini, tim peneliti Bank Dunia, setelah melakukan studi komparatif tentang praktek tes dan ujian di berbagai negara maju dan berkembang, menyimpulkan bahwa: "...it may not be a bad thing at all for teachers to 'teach to

- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.

the test' as long as the test is well constructed, covers material relevant to candidates, and provides systematic feedback to the schools and to teachers..." (Noah & Eckstein, 1992).

### *Penilaian Kelas*

Penilaian kelas (*classroom assessment*) yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan, pada gilirannya, mutu pendidikan. Gronlund (1998) mengemukakan bahwa keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh dan bergantung kepada efektivitas penilaian kelas yang dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan penilaian kelas harus dirancang dan dilakukan secara sistematis dan terus menerus sebagai strategi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Secara tegas, Stiggins (1994: 15) mengatakan bahwa: "assessment and teaching can be one and the same".

Penilaian kelas yang baik mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan efektivitas pengajarannya dan bagi peserta didik untuk meningkatkan mutu kegiatan dan hasil belajarnya. Selain itu, penilaian kelas yang baik juga mampu memotivasi dan mengkondisikan peserta didik untuk terus meningkatkan upaya dan prestasi belajarnya. Lebih jauh, penilaian kelas yang baik juga diharapkan dapat mendorong siswa menjadi *independent-learner* yang oleh Zimmerman dan Schunk (Sukadji, 2000) disebut *self-regulated learner*.

Paling tidak, terdapat empat kondisi yang perlu dipenuhi agar penilaian kelas benar-benar efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran. *Pertama*, penilaian kelas menuntut rumusan target perilaku yang jelas dan signifikan. Istilah *jelas* di sini mengandung pengertian bahwa target perilaku itu dapat diukur, sedangkan istilah *signifikan* menunjuk kepada perubahan perilaku yang bermakna dan kompetitif. Apa dan bagaimana kita mengajar serta apa dan bagaimana kita menilai sangat bergantung kepada makna belajar yang kita yakini. Target perubahan perilaku sebagai hasil belajar seyogianya bukan hanya sekedar "berubah". Alih-alih, perubahan perilaku itu diharapkan merupakan bekal bagi peserta didik untuk mampu bersaing dengan teman-teman sebayanya pada bidang tertentu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam kaitan ini, para ahli psikologi kognitif meyakini bahwa belajar yang sesungguhnya (*true learning*) baru terjadi manakala peserta didik mampu membangun struktur kognitif atau *mental scheme*-nya sendiri (Holmes Group, 1994).

*Kedua*, penilaian kelas dirancang dan dilakukan secara terus menerus dan terpadu dengan kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Spirit utama penilaian kelas adalah formatif, yaitu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran secara berkesinambungan. *Ketiga*, penilaian kelas harus dilandasi oleh hati yang tulus dan pikiran yang jernih serta dilaksanakan secara adil, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan penilaian.

*Keempat*, penilaian kelas yang baik menuntut penggunaan berbagai metode dan teknik penilaian secara komplementer sehingga mampu memperoleh informasi yang obyektif dan komprehensif. Tidak ada satu teknik penilaian pun yang secara mandiri mampu mengungkap seluruh perubahan perilaku yang diharapkan. Observasi kelas, tes tindakan, penugasan, proyek, portofolio, tes tertulis, inventori, dan tes lisan semuanya dapat digunakan sesuai dengan jenis

- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.



perilaku yang hendak dinilai dan tujuan penilaian. Hasil penilaian kelas sebagian berupa deskripsi kualitatif dan sebagian lagi berupa skor yang bersifat kuantitatif.

*Kelima*, penilaian kelas yang efektif menuntut pendidik untuk segera memberikan balikan (*feedback*) yang jelas dan spesifik atas hasil kerja peserta didik dan atas kinerja mengajarnya sendiri. Pada setiap tahap pembelajaran, peserta didik seyogianya mengetahui dengan jelas dan segera apa yang sudah dan belum dikuasainya, serta bagaimana mereka dapat memperbaiki kekurangannya. Selain itu, penilaian kelas juga perlu diarahkan untuk menyediakan informasi tentang efektivitas metode pembelajaran yang digunakan.

*Keenam*, tindak lanjut berupa pengayaan bagi peserta didik yang tergolong cepat belajarnya dan pengajaran remedial (*remedial teaching*) bagi mereka yang belum menguasai konsep-konsep kunci merupakan suatu keniscayaan. Membiarkan peserta didik dalam kebingungan dan ketidakpahaman terutama tentang konsep-konsep kunci yang akan mempengaruhi efektivitas pembelajaran selanjutnya akan membuat peserta didik frustrasi yang dapat berkembang menjadi sikap negatif terhadap gurunya dan bahkan terhadap mata pelajaran yang bersangkutan.

## **Penilaian (untuk) Kenaikan Kelas**

Secara teoretik, terdapat tiga alternatif yang dapat dilakukan pada setiap akhir tahun pelajaran. *Pertama*, sekolah dapat menyelenggarakan kenaikan kelas untuk membedakan siswa yang sudah dari mereka yang belum memenuhi standar kemampuan minimal. Peserta didik yang tidak naik kelas harus mengulang seluruh mata pelajaran pada kelas yang sama. *Kedua*, sekolah dapat menerapkan prinsip kenaikan kelas otomatis (*automatic promotion*). Setiap peserta didik secara otomatis naik ke kelas yang lebih tinggi pada akhir tahun pelajaran. *Ketiga*, sekolah dapat menggunakan perpaduan kedua pendekatan tersebut. Setiap peserta didik pada prinsipnya naik ke kelas yang lebih tinggi secara otomatis pada setiap akhir tahun pelajaran, namun harus mengulang sejumlah mata pelajaran yang nilainya belum mencapai standar minimal yang ditetapkan.

Sekolah di Indonesia pada umumnya menyelenggarakan kenaikan kelas pada setiap akhir tahun pelajaran. Dalam praktek sehari-hari di (sebagian) sekolah, penentuan peserta didik yang boleh naik ke kelas yang lebih tinggi didasarkan kepada (a) hasil ulangan kenaikan kelas atau ulangan umum/ulangan akhir semester pada setiap akhir tahun pelajaran, (b) nilai pada semester I, dan (c) hasil ulangan dan penilaian yang dilakukan oleh guru pada kegiatan sehari-hari (termasuk di dalamnya tugas, kuis, dan lain-lain). Berdasarkan hasil penilaian oleh guru, kepala sekolah dan wali kelas kemudian menentukan siswa yang naik dan tidak naik kelas dalam suatu rapat dewan pendidik.

Secara konseptual, tradisi kenaikan kelas seperti ini memegang peranan strategis dalam mengendalikan mutu pendidikan (*quality control*) dan dapat menjadi motivasi (*pressure to achieve*) bagi siswa dan guru agar meningkatkan upaya kegiatan pembelajaran. Melalui mekanisme kenaikan kelas, sekolah dapat membedakan siswa yang sudah menguasai dari mereka yang belum menguasai kemampuan minimal yang ditetapkan (*minimum acceptable*)

- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.

*performance*). Hanya mereka yang telah menunjukkan standar kemampuan minimal yang seyogiannya dapat naik ke kelas yang lebih tinggi.

Selain itu, tradisi kenaikan kelas seperti itu juga diharapkan dapat menghasilkan informasi yang komprehensif tentang kemajuan belajar siswa sebagai dasar pengambilan keputusan. Persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam praktek kenaikan kelas di sekolah terutama adalah:

- a. Standar (ukuran) kemampuan yang digunakan bervariasi antar sekolah dan antar guru. Ini berimplikasi terhadap tingkat kesukaran dan kedalaman soal yang digunakan dalam ulangan, tugas yang diberikan, dan tuntutan belajar secara keseluruhan.
- b. Sekolah cenderung "meminimalkan" jumlah siswa yang tidak naik kelas. Tabel 1 menunjukkan kecenderungan angka mengulang yang mendekati 0% dari tahun ke tahun, kecuali untuk sekolah dasar (SD). Di tahun pelajaran 1999/2000, angka tersebut menjadi 5,90 % untuk SD, 0,32 % untuk SMP, dan 0,01% untuk SMA. Data lain menunjukkan bahwa kecenderungan seperti itu hampir sama di seluruh provinsi dengan variasi yang relatif kecil.

Tabel 1  
Perkembangan Angka Mengulang  
Tahun 1994/1995 – 1998/1999

Tingkatan dan Jenis Sekolah	94/95 – 95/96		95/96 – 96/97		96/97 – 97/98		97/98 – 98/99	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	1.855.308	7,08	1.709.691	6,59	1.578.892	6,13	1.550.539	6,04
SMP	37.469	0,59	35.359	0,51	92.346	0,30	93.354	0,32
SMTA	22.037	0,55	19.701	0,47	12.902	0,45	15.549	0,43
a. SMA	14.440	0,58	13.761	0,53	7.026	0,53	7.058	0,25
b. SMK	7.597	0,46	5.940	0,36	5.876	0,33	8.491	0,46

Data pada Tabel 1 itu sendiri sebenarnya tidak menunjukkan adanya masalah, karena kita memang berharap bahwa seluruh peserta didik dapat naik kelas sebagai indikator bahwa mereka telah menguasai kompetensi minimal yang dipersyaratkan. Namun, manakala data ini dikaitkan dengan daya serap peserta didik atas kurikulum maka akan muncul persoalan, karena ternyata

- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.

tingginya angka kenaikan kelas tidak berkorelasi dengan tingginya daya serap peserta atas kurikulum. Salah satu kemungkinan penjelasan atas masalah ini adalah adanya kecenderungan sejumlah sekolah untuk “menaikkan” sejumlah peserta didik yang sebenarnya belum layak naik kelas, tanpa upaya sistematis untuk memperbaiki kelemahannya terlebih dahulu. Pengajaran remedial disederhanakan pengertiannya menjadi ulangan untuk memperbaiki nilai, tanpa didahului oleh kegiatan pembelajaran yang semestinya.

Persoalan pertama diharapkan dapat dikurangi dengan telah ditetapkannya standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL) melalui Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dan Permendiknas No. 23 tahun 2006. Walaupun demikian, perbedaan ekspektasi guru atas kemampuan peserta didik tidak dapat dihilangkan dan akan tercermin pada rumusan indikator kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang disusunnya. Pemahaman dan keyakinan guru tentang belajar (*true learning*) serta penguasaannya atas substansi materi pelajaran sangat terkait dengan ekspektasinya atas perubahan perilaku peserta didik. Ulangan yang khusus dirancang untuk kenaikan kelas seperti dinyatakan pada Pasal 64 ayat (1) PP No. 19 tahun 2005 diharapkan dapat memperkecil variasi standar antar guru di suatu sekolah.

Persoalan kedua tampaknya lebih kompleks karena menyangkut perubahan sikap mental masyarakat yang selama ini dianggap “benar”. Keinginan pendidik dan orang tua untuk membantu peserta didik dan anaknya naik kelas dan lulus ujian itu bukan hanya merupakan sesuatu yang wajar melainkan suatu keharusan. Namun, “menaikkan” atau “meluluskan” peserta didik yang sebenarnya belum layak naik atau belum layak lulus bukan hanya merupakan perbuatan yang tidak mendidik, melainkan lebih jauh dapat mencemari ke-*fitrah*-an pribadi peserta didik.

### **Ujian Akhir Satuan Pendidikan**

Ujian pada akhir satuan pendidikan merupakan strategi yang digunakan oleh banyak negara baik negara berkembang maupun negara maju untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikannya. Walaupun banyak dikritik dan dikecam, kegiatan ujian pada sistem persekolahan

- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.

bukan hanya terus berlangsung akan tetapi terus berkembang di berbagai negara termasuk di negara-negara Mediterranean and Anglo-Saxon (Olmedilla, 1992; Tindal, 2002) dengan teknologi yang makin maju (Linn, 1989).

Ujian akhir satuan pendidikan umumnya dilakukan oleh lembaga eksternal. Inggris, Perancis, India, Pakistan, Malaysia, dan Singapura adalah beberapa contoh negara yang memiliki tradisi ujian akhir dari satuan pendidikan secara eksternal. Selain itu, ada juga beberapa negara yang pernah meragukan kemampuan ujian akhir satuan pendidikan secara eksternal dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan, seperti RRC, Soviet, dan Indonesia. Namun keraguan mereka ternyata tidak didukung oleh fakta di lapangan, dan ketiga negara itu akhirnya kembali bertumpu kepada tradisi lama – ujian akhir satuan pendidikan secara eksternal, yaitu pada tahun 1976 – setelah berakhirnya dinasti Mao (RRC), awal Pemerintahan Stalin (Soviet), dan pada tahun 1979 (Indonesia).

Studi yang dilakukan oleh tim Bank Dunia menunjukkan bahwa ujian pada akhir satuan pendidikan merupakan strategi peningkatan mutu pendidikan yang banyak dipilih dan digunakan oleh negara-negara berkembang yang sumber dayanya relatif terbatas (Heyneman & Ransom, 1992). Ujian akhir yang dirancang dan dilakukan dengan baik akan mendorong dan memacu terjadinya peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus. Berdasarkan hasil-hasil penelitiannya, Heyneman (Tola, 2006) menyatakan bahwa: "... external examinations had a constructive influence on desire to learn, regardless of a pupil's social background". Dalam pengamatan Noah & Eckstein (1992: 5), data dan bukti yang menunjukkan efektivitas ujian untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak perlu diragukan lagi ketika mereka menulis

The World Bank is not alone in suggesting that examinations can play major role in raising educational standards. Indeed, comparative study on examination systems finds its strongest justification when nations seek way to bring about educational change, especially when the concern focuses on raising the level of school achievement.

## E. PARTISIPASI DALAM STUDI INTERNASIONAL

- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.

Partisipasi dalam studi internasional seperti TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) dan PISA (the Programme for International Student Assessment) dapat memberikan informasi komparatif tentang tingkat penguasaan peserta didik atas kemampuan peserta didik pada bidang yang diujikan beserta sejumlah variabel yang terkait. Walaupun pada kedua studi internasional itu, posisi Indonesia masih di papan bawah, namun informasi komparatif yang diperoleh melalui instrumen tes dan kuesioner baku bermanfaat untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan pendidikan di tanah air serta upaya perbaikan yang perlu segera dilakukan.

#### DAFTAR BACAAN

- Chelimsky, E. (1997). The coming transformations in evaluation. Dalam Chelimsky, E. & Shadish, W.R. (Ed.), *Evaluation for the 21<sup>st</sup> century: A handbook*. Thousand Oaks: Sage.
- Gronlund, Norman E. (1965). *Measurement and evaluation in teaching*. New York: The Macmillan.
- Gronlund, Norman E. (1998). *Assessment of student achievement*. Needham Heights: Allyn and Bacon.
- Grouwe, A.D. & Naidoo, J.P (Eds) (2004). *School Evaluation for Quality Improvement*. UNESCO: International Institute for Educational Planning.
- Heyneman, S. P. (1997). Jim Coleman: A Personal Story. *Educational Researcher*, Vol. 26, No. 1, 28 – 30. AERA.
- Heyneman, S. P. & Ransom, A. W. (1992). Using examination and testing to improve educational quality. In Max A. Eckstein & Harold J. Noah (Eds). *Examinations: Comparative and international studies*. Oxford: Pergamon Press.
- Jaeger, R. M. (1989). Certification of student competence. Dalam Robert L. Linn (Ed.), *Educational measurement*, 3<sup>rd</sup> edition. New York: NCME, Macmillan.
- Jeffries, D.R., Evans, B., & Reynolds, P (1993). *Training for total quality management*. London: Kogan Page.
- Joint Message of The Asian Roundtable of Presidents of Universities of Education. Hong Kong: November 2011
- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.

Jones, M.L. et al. (n.d.). *Quality assurance & Benchmarking: An approach for European dental schools*. Wales

Linn, R. (1989). Current perspectives and future directions. Dalam Robert L. Linn (Ed.), *Educational measurement*, 3<sup>rd</sup> edition. New York: NCME, Macmillan.

Nitko, Anthony J. (1996). *Educational assessment of students*, (2<sup>nd</sup> ed.). Englewood Cliffs, NJ: Merrill.

Noah, H.J. & Eckstein, M.A. (1992). Comparing national systems of secondary school leaving examinations. Dalam Max A. Eckstein & Harold J. Noah (Eds). *Examinations: Comparative and international studies*. Oxford: Pergamon Press.

Olmedilla, Juan M. M. (1992). Tradition and change in national examination systems: A comparison of Mediterranean and Anglo-Saxon countries. Dalam Max A. Eckstein & Harold J. Noah (Eds). *Examinations: Comparative and international studies*. Oxford: Pergamon Press.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sallis, E. (1993). *Total quality management in education*. London: Kogan Page.

Sterian, P.E. (1992). *Accreditation and quality assurance in higher education*. CEPES, UNESCO

Stiggins R. J. (1994). *Students-centered classroom assessment*. New York: Merrill.

Sukadji, Soetarlinah (2000). Sistem penilaian kelas menuju self-regulated learning. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 022(5).

Tindal, Gerald (2002). Large-scale assessments for all students: Issues and options. Dalam Gerald Tindal & Thomas M. Haladyna (Eds.), *Large-scale assessment programs for all students*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Tola, B. (2006). *Sekitar Ujian Nasional*. Jakarta: Puspendik.

Umar, Jahja (2006). *Ujian Nasional dan peningkatan mutu pendidikan*. Bahan Presentasi

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Sebagian isi makalah ini diambil dari makalah penulis yang sudah disajikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar di UPI dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BAN S/M di Jakarta.

# **SISTEM PENILAIAN HASIL BELAJAR ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN SETTING INKLUSI**

**Oleh : Sukinah\*)**

Pendidikan inklusif merupakan sebuah proses dalam upaya merespon kebutuhan semua peserta didik yang beragam. Berbagai upaya dapat dilakukan melalui perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif berawal dari pendidikan untuk semua tidak diskriminatif terhadap siapapun termasuk di dalamnya anak-anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus bersifat temporer (sementara) maupun permanen sehingga membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik termasuk penilaian hasil belajar serta penentuan kenaikan kelas. Implementasi pendidikan setting inklusi tidak semata-mata memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler, tetapi mencakup bagaimana mengkondisikan proses pembelajaran di kelas, sehingga semua peserta didik dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Keberagaman karakteristik peserta didik pada sekolah inklusif tentu membuka peluang adanya sistem penilaian hasil belajar yang sangat variatif dalam menentukan kenaikan kelas. Sistem penilaian hasil belajar bagi anak berkebutuhan khusus selama ini disamakan dengan peserta didik yang lainnya. Ketidapahaman guru terhadap sistem penilaian hasil belajar dan penentuan kenaikan kelas bagi anak berkebutuhan khusus menyebabkan guru memperlakukan penilaian yang sama dengan peserta didik lainnya. Sistem penilaian yang biasa digunakan dalam menentukan kenaikan kelas peserta didik di sekolah inklusif didasarkan pada ketercapaian kecakapan mental. Sebagian besar anak berkebutuhan khusus tidak dapat naik kelas dikarenakan belum memenuhi standar ketuntasan belajar dan kenaikan kelas yang sudah ditentukan. Dalam setting pendidikan inklusif penilaian hasil belajar secara sistematis dan berkelanjutan bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa di sekolah, mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, dan mengetahui mutu pendidikan pada sekolah. Penilaian yang berkelanjutan berarti melakukan pengamatan secara terus menerus tentang sesuatu yang diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Dalam setting pendidikan inklusif sistem penilaian sekolah diharapkan dengan penilaian yang fleksibel. Sistem penilaian disesuaikan dengan kemampuan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Penilaian fleksibel yang dapat diterapkan melalui dua model yaitu tes yang datanya bersifat kuantitatif maupun kualitatif (portofolio). Dalam upaya pelaksanaan pembelajaran yang ramah bagi semua anak penilaian dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan perbedaan-perbedaan individual.

*Kata kunci : Sistem Penilaian Hasil Belajar, Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan Inklusi*

## Pendahuluan

Pemerintah dalam upaya pemerataan layanan pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas bagi semua anak di Indonesia mempunyai makna yang sangat luas dan strategis. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1986 telah dirintis pengembangan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif yang melayani Penuntasan Wajib Belajar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Untuk mencerdaskan bangsa yang selaras dengan adanya pesan dari Pendidikan Untuk Semua (*Educational for All*) sekaligus menjadi salah satu usaha meningkatkan partisipasi anak-anak bersekolah (pemerataan kesempatan pendidikan) termasuk anak berkebutuhan khusus. Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki hambatan, kelainan dan/atau memiliki kemampuan potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam layanan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus dalam konsep pendidikan inklusif dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu temporer (sementara) dan permanen (menetap). Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380 /C.66/MN/2003, 20 Januari 2003 perihal Pendidikan Inklusif bahwa di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sekurang kurangnya harus ada 4 sekolah penyelenggara inklusi yaitu di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK masing-masing minimal satu sekolah.

Staub dan Peck (1995) (dalam Sunardi, 2002) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkebutuhan khusus tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkebutuhan khusus, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. Sapon-Shevin (O'Neil, 1995) (dalam Sunardi, 2002) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai system layanan



pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.

Dasar filosofi yang digunakan dalam implementasi pendidikan inklusif adalah adanya keyakinan bahwa setiap anak, baik karena gangguan perkembangan fisik/mental maupun cerdas/bakat istimewa berhak untuk memperoleh pendidikan seperti layanan anak-anak "normal" lainnya dalam lingkungan yang sama. Secara lebih luas, hal ini dapat diartikan bahwa anak-anak "normal" maupun yang dinilai memiliki kebutuhan khusus sudah selayaknya dididik bersama-sama dalam sebuah keberagaman yang ada di dalamnya, sekolah inklusif memainkan peran. Dalam pendidikan inklusif ini mereka tidak semata-mata mengejar kemampuan akademik, tetapi lebih dari itu, mereka belajar tentang kehidupan itu sendiri.

Keberhasilan atau efektif tidaknya suatu proses pendidikan dapat diketahui melalui penilaian, dalam hal ini penilaian yang dilakukan mengarah kepada program yang valid. Penilaian dalam dunia pendidikan menganut prinsip secara terus menerus (berkelanjutan) dan menyeluruh (komprehensif) guna mendukung upaya memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri. Dalam implementasi pendidikan inklusif belum adanya kesamaan persepsi tentang konsep pendidikan inklusif. Apabila kita lihat dari beberapa standar pendidikan yang dibuat pemerintah melalui BSNP pendidikan inklusif hanya diperuntukkan bagi anak-anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras, yang kemampuan intelektualnya tidak berada di bawah rata-rata. Padahal, kenyataan di lapangan prevalensi anak-anak berkebutuhan khusus yang berkemampuan intelektual di bawah rata-rata paling banyak diantara jenis-jenis kelainan yang lain (data Dit PSLB, 2007). Hasil pemetaan anak berkebutuhan khusus di provinsi DIY tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah yang paling banyak dari masing-masing kabupaten adalah anak dengan hambatan belajar intelektual (tunagrahita). Salah satu kabupaten Sleman Anak Berkebutuhan Khusus yang paling banyak berdasarkan jenis kekhususannya adalah anak tunagrahita sebanyak 1.299 anak terdiri 855 anak yang bersekolah di SLB, 222 anak bersekolah di sekolah inklusif dan 222 anak yang belum bersekolah (Team jurusan PLB FIP UNY, 2011). Berdasarkan hasil diskusi dengan guru-guru dan kepala sekolah penyelenggara

sekolah inklusif peserta pelatihan di Yogyakarta tahun 2009 (Ishartiwi, 2010) teridentifikasi permasalahan-permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusif salah satunya adalah belum adanya sistem evaluasi hasil belajar (baik formatif dan sumatif). Sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki format penilaian terhadap peserta didiknya sendiri sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Beberapa waktu yang lalu penulis mengadakan wawancara berkaitan penilaian hasil belajar di dua sekolah yang mengimplementasikan pendidikan inklusif menunjukkan hasil yang berbeda. Guru sekolah pertama mengatakan bahwa “penilaian belajar disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak, dan tidak ada anak yang tunggak kelas, mereka berkembang sesuai dengan usia teman sebayanya”. Sedangkan pendapat guru sekolah kedua mengemukakan “anak-anak yang memiliki kemampuan mengikuti kurikulum reguler penilaian ikut kelas, sedangkan anak-anak yang kemampuan akademik di bawah, soal dan penilaiannya disesuaikan dengan kemampuan anak dan KKM nya pun berbeda”.

Adanya peraturan-peraturan sistem penilaian hasil belajar yang dibuat pemerintah yang kontradiksi dengan sistem penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif, pelaksanaan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif di sekolah reguler menjadi tantangan (permasalahan). Banyak pihak (siswa, orang tua, dan masyarakat) yang merasa tidak sesuai dan tidak adil bagi anak pada umumnya dengan penilaian yang dilakukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler. Contohnya sewaktu penulis melakukan observasi di salah satu sekolah implementasi pendidikan inklusif diperoleh informasi bahwa penilaian dalam setting pendidikan inklusif belum dipahami oleh para guru seperti apa wujud yang sebenarnya serta diperoleh informasi pula bahwa sistem kenaikan kelas anak berkebutuhan khusus naik terus, tetapi untuk anak pada umumnya ada yang tidak naik kelas. Hal ini menimbulkan kecemburuan anak pada umumnya, orang tua siswa dan masyarakat. Akhirnya anak-anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata kelas sebelum adanya kenaikan kelas diberikan peringatan oleh pihak sekolah akan tetap berlanjut di sekolah dengan tidak naik kelas, atau pindah sekolah dengan diberikan nilai naik kelas.

Masih adanya banyak permasalahan berkaitan dengan implementasi pendidikan setting inklusif menunjukkan perlu penataan yang secara komprehensif terutama dalam sistem penilaian hasil belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Praktek-praktek pendidikan yang terlihat dan masih diterapkan pada sebagian besar sekolah inklusif di Indonesia masih berpihak pada keseragaman yang bertolak belakang dengan prinsip pendidikan inklusif yang menghargai keberagaman peserta didik. Contoh dari praktek tersebut sudah terlihat sejak penerimaan siswa baru dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, menentukan kenaikan kelas, kelulusan sekolah dan melakukan beragam tes-tes kelayakan untuk menjadi siswa pada sekolah tersebut.

### **Implementasi Pendidikan Setting Sekolah Inklusif**

Pendidikan Inklusif merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologis. Pendidikan inklusif didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan dalam layanan pendidikannya. Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusif juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. (Skortjen, 2001)

Menurut Ditpslb (2007) pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik makna yaitu: (1) Pendidikan Inklusif adalah proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak, (2) Pendidikan inklusif berarti memperoleh cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan anak dalam belajar, (3) Pendidikan inklusif membawa makna bahwa anak mendapat kesempatan untuk hadir (di sekolah), berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam

hidupnya, dan (4) Pendidikan inklusif diperuntukkan bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar.

Dalam implementasi pendidikan inklusif memiliki ciri-ciri pokok : Mengakomodasi semua anak (tidak diskriminatif), sistem sekolah disesuaikan dengan kebutuhan anak, anak belajar bersama-sama dengan kelompok umur sebaya, masalah terletak pada sistem bukan pada anak, setiap anak mendapat keuntungan dari sekolah yang sama, dan pembelajaran berlangsung dalam atmosfer yang lebih menyenangkan (UNESCO, 2003) . *Positive attitude* guru dan teman terhadap Anak berkebutuhan khusus dan Guru Pembimbing Khusus dapat Menciptakan atmosfer pembelajaran yang menyenangkan, kooperatif, partisipatif dan kolaboratif; dan mengembangkan perilaku positif siswa melalui *class meeting* dan *action plan* (Loreman, Deppeler & Harvey, 2005)

Implementasi pendidikan inklusif memiliki sisi positif yaitu dapat membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi, semua anak pada setiap sistem dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah, mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran, melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Kegiatan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif harus berpusat kepada anak (*child centered*), anak harus aktif belajar (*active learning*). Untuk itu dalam implementasi pendidikan inklusif seharusnya lebih memfokuskan dalam kegiatan pembelajaran yang secara berkelanjutan selalu ditingkatkan kualitasnya. Menurut Depdiknas, UNESCO, dan UNICEF (2003) bahwa kegiatan pembelajaran harus aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Kegiatan Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) merupakan suatu tuntutan atau keharusan untuk dilaksanakan dan sesuai dengan setting pendidikan inklusif.

Proses layanan pembelajaran dalam pendidikan setting inklusi bukan didasarkan pada bentuk layanan sama rata, sama rasa dan disampaikan secara klasikal, tetapi diarahkan pada pembelajaran yang lebih demokratis dan proporsional sesuai dengan

harapan dan target belajar dari masing-masing kelompok anak tersebut, dan proses belajar anak-anak tersebut tidak dipisahkan berdasarkan kelompok atau dipisahkan dari komunitasnya, melainkan mereka belajar bersama-sama dengan teman sebayanya di dalam kelas reguler (Hidayat,2009). Hal-hal yang harus diperhatikan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah menerima keberagaman serta menghargai adanya perbedaan, sekolah harus siap mengelola kelas yang heteogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual, guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif, guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta guru dituntut melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses pendidikan.

Kehadiran dan inklusifnya anak berkebutuhan khusus di sekolah setting inklusi dalam tatanan proses belajar mengajar akan berdampak pada proses perubahan kelas. Selain dihadapkan pada kelas klasikal guru juga diberikan tanggung jawab baru untuk mendidik, membina dan membimbing dan mengajarkan materi dengan keberagaman kebutuhan siswa (Hidayat : 2009). Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah mereka yang mempunyai kebutuhan, baik permanen maupun sementara, yang disebabkan oleh kondisi sosial-emosi, dan/atau, kondisi ekonomi dan/atau, kondisi politik dan/atau, kelainan bawaan maupun yang didapat kemudian. Dengan kata lain, kita tidak hanya membicarakan kelompok minoritas yang disebabkan oleh kelainan saja, tetapi mencakup sejumlah besar anak yang sekolah.

### **Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik di Sekolah Inklusif**

Pendidikan sebagai upaya inklusif lebih bersifat melihat perkembangan individu secara menyeluruh sambil tetap memperhatikan perkembangan perilaku intelektual dan sosial individu sebagai produk dari belajarnya (*child centered*). Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak lainnya. Pembelajaran secara individual pada dasarnya merupakan pembelajaran untuk semua anak, termasuk program untuk anak berkebutuhan khusus yang mempunyai kelambanan dalam perkembangannya, mengalami gangguan emosional, dan anak yang memiliki

cacat fisik atau mental. Setiap anak diberi kebebasan untuk memilih materi pembelajaran yang diinginkannya dan memperoleh materi yang berbeda-beda.

Setiap kegiatan belajar mengajar harus memiliki tujuan yang perlu dinilai dengan berbagai cara. Penilaian harus menjabarkan hasil belajar, yaitu memberikan gambaran mengenai keberhasilan siswa dalam mengembangkan serangkaian keterampilan (psikomotor), pengetahuan (kognitif), dan perilaku (afektif) selama pembelajaran, topik atau kurikulum yang fleksibel. Untuk mengetahui ketercapaian kompetensi setiap siswa maka peranan penilaian sangat besar artinya. Dalam setting pendidikan inklusif penilaian hasil belajar secara sistematis dan berkelanjutan bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa di sekolah, mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, dan mengetahui mutu pendidikan pada sekolah. Penilaian (Assessment) dapat dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mendapatkan data tentang baseline setiap anak sebelum pembelajaran dilakukan oleh guru. Pada saat pembelajaran berlangsung untuk melihat apakah anak mengalami hambatan, melihat respon anak thd proses, dan melihat atmosfir kelas (LIRP). Pada akhir pembelajaran untuk melihat perkembangan yang terjadi.

Adapun fungsi dari penilaian (Assessment) meliputi *Screening & Identification* (penyaringan dan penjaringan), *Child's Educational Needs exploration* (eksplorasi kebutuhan belajar anak) dan *Instruactional Planning* (perencanaan pembelajaran) serta *Evaluation* (penilaian hasil). Dalam *Screening* dan *identification* dilakukan untuk mendapatkan data siapakah anak yang mengalami hambatan belajar (memiliki kebutuhan khusus) baik yang bersifat internal baik kebutuhan khusus karena factor diri anak itu sendiri (kecacatan atau keberbakatan) maupun bersifat eksternal, kebutuhan khusus akibat sistem/lingkungan. Sedangkan fungsi dalam eksplorasi kebutuhan belajar anak untuk mendapatkan data tentang apa yang sudah dikuasai anak saat ini, apa yang menjadi hambatan bagi anak untuk belajar dan apa yang menjadi kebutuhan belajarnya.

Penilaian yang berkelanjutan berarti melakukan pengamatan secara terus menerus tentang sesuatu yang diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Observasi ini dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun, misalnya awal tahun,

pertengahan tahun dan akhir tahun. Penilaian yang berkelanjutan bisa juga dilakukan melalui: observasi, portofolio, bentuk ceklist (keterampilan, pengetahuan, dan perilaku), tes dan kuis, dan penilaian diri serta jurnal reflektif. (Direktorat PLB, Braillo Norway dan UNESCO: 2003).

Untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan hasil belajar siswa selama program pendidikan maka sistem penilaian yang dilaksanakan harus komprehensif dan fleksibel. Dalam setting pendidikan inklusif, sistem penilaian yang diharapkan di sekolah yaitu sistem penilaian yang fleksibel. Penilaian disesuaikan dengan kompetensi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Penilaian yang fleksibel memiliki dua model, yaitu dengan tes yang datanya bisa kuantitatif dan kualitatif, salah satu contohnya portofolio. Penerimaan siswa tanpa tes serta ujian dilakukan secara lokal bagi tingkat dasar dengan model sistem kenaikan kelas otomatis. Dengan demikian, peluang ini bisa dimanfaatkan untuk menuju cara melaksanakan proses pembelajaran yang ramah bagi semua siswa, karena proses pembelajarannya senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap siswa. (Sunanto *et all.* ,2004:86-87). Hal ini selaras dengan pendapat Budimansyah (2002:114) sebagai berikut "Penilaian yang baik hendaknya memperhatikan kondisi dan perbedaan-perbedaan individual (*individual differences*)."

Penilaian (assessment) merupakan penafsiran hasil pengukuran dan pencapaian hasil belajar. Data hasil belajar diperoleh melalui pengukuran dan penilaian pendidikan merupakan informasi yang sangat berguna sebagai umpan balik bagi pelaksanaan pengajaran dan strategis proses belajar-mengajar. Penilaian dalam proses (*lebih bersifat assessment*), dapat mengungkapkan hambatan belajar yang dialami siswa pada saat pembelajaran berlangsung, sementara penilaian di akhir pelajaran dapat melihat apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai atau tidak. Proses penilaian yang berkelanjutan dimulai sejak keterlibatan anak di kelas secara administrative di sekolah mencerminkan adanya pengakuan terhadap keberagaman karakteristik peserta didik. Hasil proses penilaian tersebut kemudian dijadikan bahan acuan dalam pembuatan dan implementasi kurikulum, sehingga kebutuhan belajar masing-masing peserta didik dapat diakomodasi oleh keberagaman aspek-aspek yang terkandung dalam kurikulum.

Salah satu kunci sukses dalam belajar mengajar adalah kurikulum. Dalam penilaian peserta didik diberi kesempatan untuk berprestasi sesuai kemampuannya sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Hal yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan aktivitas penilaian pembelajaran (Muslich, 2008: 92) adalah:

1. Memandang penilaian sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran.
2. Mengembangkan strategi pembelajaran yang mendorong dan memperkuat proses penilaian sebagai kegiatan refleksi (bercermin diri dan pengalaman belajar).
3. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar siswa.
4. Mengakomodasi kebutuhan khusus siswa.
5. Mengembangkan sistem pencatatan yang menyediakan cara yang bervariasi dalam pengamatan belajar siswa.
6. Menggunakan penilaian dalam rangka mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat pencapaian siswa.

Menurut Thorndike dan Hagen (1977) tujuan dan kegunaan penilaian pendidikan dapat diarahkan kepada keputusan-keputusan yang menyangkut (1) pengajaran (2) hasil belajar (3) Diagnosis dan usaha perbaikan (4) penempatan (5) seleksi (6) bimbingan dan konseling, (7) kurikulum, dan (8) penilaian kelembagaan. Pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran seseorang dengan hasil pengukuran yang diperoleh orang – orang lain dalam kelompoknya, dinamakan Penilaian Acuan Norma (Norm – Referred Evaluation). Dan pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran seseorang dengan patokan “batas lulus” yang telah ditetapkan, dinamakan penilaian Acuan Patokan (Criterion – referred Evaluation).

Penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus sangat beragam. Jenis dan model yang akan dipakai disesuaikan dengan kompetensi dan indikator hasil belajar yang ingin dicapai, tipe materi pembelajaran, dan tujuan penilaian itu sendiri. Ada dua jenis penilaian yaitu tes dan non-tes. Tes meliputi kegiatan tes lisan, tes tulis (uraian dan objektif), dan tes kinerja. Sedangkan non-tes meliputi skala sikap, checklist, kuesioner, studi kasus, dan portofolio. Keragaman penilaian tidak dimaksudkan



memberikan keleluasaan guru untuk menerapkan dengan seandainya jenis penilaian tertentu. Sebaliknya dengan adanya keragaman penilaian tersebut, guru dituntut lebih profesional dan bertanggung jawab ketika menentukan pilihan Penilaian dilakukan secara berkelanjutan (*continuous evaluation*) agar dapat mendorong penelaahan dan perefleksian siswa terhadap kemampuan siswa dalam melakukan pembelajaran dan hasil yang dicapainya. Artinya ini merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan secara terus menerus dan tidak berhenti serta terfokus pada ujian akhir saja, namun semua proses dilihat secara seksama, sehingga guru memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi belajar siswa dari awal sampai akhir. Agar setiap siswa memperoleh perhatian yang sama tetapi diberi yang berbeda sesuai kebutuhannya, maka guru menyusun buku penilaian individu yang berisi rangkuman seluruh hasil belajar siswa (hasil tes, hasil tugas perorangan, hasil praktikum, hasil pekerjaan rumah, dsb.) tercatat dan terorganisir secara sistematis (Sunanto *et all.*, 2004:87).

Penilaian bukan menghakimi siswa, tetapi untuk mengetahui perkembangan pengalaman belajar siswa. Untuk itu kegiatannya dilakukan secara komprehensif dan seimbang antara penilaian proses dan hasil. Posisi guru sebagai *constructive evaluators* yang merefleksikan bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa menghubungkan apa yang mereka ketahui dengan berbagai konteks, dan bagaimana perkembangan belajar siswa dalam berbagai konteks belajar. Melalui penilaian siswa memperoleh kesempatan untuk dapat mengembangkan penilaian diri (*self assessment*) dan penilaian sesama (*peer assessment*). Penilaian mengukur keterampilan dan performansi dengan kriteria yang jelas (*performance-based*) dengan berbagai alat secara berkesinambungan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Siswa, orang tua, dan sekolah memperoleh manfaat dari kegiatan penilaian untuk mendiagnosis kesulitan belajar, umpan balik pembelajaran, dan/atau untuk menentukan prestasi siswa. Penilaian (Assessment) dilakukan sesuai dengan kemampuan anak.

Penggunaan strategi dan instrumen penilaian yang positif yang sesuai dengan konsep penilaian hasil belajar dalam setting inklusif misalnya observasi, portofolio, dan unjuk kerja (*performance*). Penilaian hasil belajar siswa secara berkelanjutan, adil, melakukan penilaian dalam situasi formal dan informal, melaksanakan penilaian terbuka

dan dilakukan secara menyenangkan, mencatat hasil penilaian secara teratur dan menentukan keputusan tentang hasil belajar siswa berdasarkan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan komprehensif. Penilaian hasil belajar atau kemajuan siswa yang memuat rincian hasil belajar berdasarkan kriteria yang ditentukan disesuaikan dengan kebutuhan/kompetensi agar orang tua dalam memahami makna. (Dedi, 2006). Laporan hasil belajar informasinya jelas, menyeluruh dan akurat serta menjamin orang tua untuk segera mengetahui masalah dan perkembangan anaknya memaknai dan melakukan sistem kenaikan kelas secara lebih bijaksana dengan memperhitungkan segala resiko atau sebab akibat dari keputusan naik kelas atau tidak naik kelas hal ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ramah bagi semua siswa.

Penilaian hasil belajar dalam seting pendidikan inklusif harus fleksibel, dilakukan secara berkelanjutan, autentik dan komprehensif. Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kompetensi/kebutuhan khusus setiap individu/anak. Untuk menentukan ketuntasan belajar (*mastery learning*) atau standar kompetensi kelulusan untuk setiap individu/anak maka diperlukan adanya beberapa standar ketuntasan belajar/kelulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap individu.

Perencanaan penilaian hasil belajar dalam seting pendidikan inklusif dibuat perencanaan penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kompetensi atau kebutuhan khusus setiap individu/anak. Penentuan ketuntasan belajar (*mastery learning*) atau standar kompetensi kelulusan untuk setiap individu/anak maka diperlukan adanya beberapa standar ketuntasan belajar/kelulusan. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah serta kesiapan guru dalam penilaian hasil belajar dalam seting pendidikan inklusif, maka standar yang direkomendasikan untuk setiap individu/anak (anak pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus) yaitu adanya standar bagi setiap individu yang sangat cepat, cepat, cukup/sedang, kurang cepat, dan tidak cepat dalam perkembangan individu/anak atau tingkat perolehan hasil belajarnya.

Hasil penelitian (Dedi Kustawan, 2006) cara melaksanakan penilaian hasil belajar dalam seting pendidikan inklusif :

- a. Melakukan asesmen awal, tengah dan akhir,
- b. Melakukan penilaian hasil belajar secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran,
- c. Melakukan penilaian hasil belajar dalam suasana yang menyenangkan,
- d. Berupaya memberikan profil kemampuan siswa secara lengkap/menyeluruh meliputi aspek kognitif, apektif dan psikomotorik,
- e. Melakukan penilaian hasil belajar dengan adil disesuaikan dengan kemampuan /kebutuhan khusus setiap individu/siswa,
- f. Melakukan penilaian hasil belajar berkelanjutan (melakukan pengamatan secara terus menerus),
- g. Menggunakan strategi yang mencerminkan kemampuan siswa secara autentik (hasilnya akurat),
- h. Melakukan penilaian hasil belajar dengan menggunakan tes tertulis, observasi, melalui portifolio (kumpulan kerja siswa), unjuk kerja, produk, penugasan dan lain-lain,
- i. Mengadministrasikan penilaian hasil belajar secara tepat dan efisien, antara lain adanya catatan anekdot, buku nilai yang memuat observasi, unjuk kerja, portofolio (dokumentasi ulangan harian, ulangan blok, dan ulangan umum), dokumentasi penilaian tugas terstruktur, dokumentasi penilaian perilaku harian, dan dokumentasi penilaian laporan aktivitas di luar sekolah, serta jurnal reflektif.
- j. Adanya penyesuaian-penyesuaian dalam teknik/cara/strategi dalam melaksanakan penilaian hasil belajar. Misalnya untuk siswa gangguan penglihatan pada waktu pelaksanaan penilaian hasil belajar perlu menggunakan riglet, pen, tape recorder, mesin tik Braille, dan loop. Jika ada tes lisan, maka untuk siswa dengan gangguan pendengaran perlu adanya keterarah wajahan dan penggunaan membaca ujaran atau membaca bibir (*lip reading*), dan guru kalau berbicara harus jelas dan gerakan mulut pelan-pelan agar dapat dipahami/dimengerti oleh siswa, atau bahkan saat tertentu dengan menggunakan bahasa isyarat.
- k. Adanya penyesuaian-penyesuaian perangkat/instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap individu/anak. Misalnya untuk anak gangguan penglihatan (blind), perangkat/instrumen penilaian hasil belajarnya

dengan menggunakan huruf Braille. Dan bagi yang masih mempunyai sisa penglihatan (low vision), tulisannya dapat diperbesar sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Hidayat (2009) dampak negatif bagi anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan soal yang tidak relevan dengan kompetensinya adalah sebagai berikut:

- a. Motivasi dan semangat mereka untuk mengikuti ujian menjadi menurun karena mendapat soal ujian yang belum dipahami.
- b. Mereka memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan soal-soal yang baru dikenalnya.
- c. Konsentrasi, atensi, dan rasa percaya diri mereka menjadi berkurang, sehingga potensi dan kemampuan belajar yang telah dikuasainya tidak dapat diwujudkan secara optimal.
- d. Peluang anak berkebutuhan khusus untuk mencapai standar kelulusan relatif kecil.

Idealnya bahan ujiannya yang harus menyesuaikan pada kondisi, kompetensi, dan program belajar anak berkebutuhan khusus.

Dalam menyusun laporan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif (Dedi Kustawan, 2006) :

- a. Hasil akhir untuk siswa berhubungan dengan apa yang dapat siswa lakukan sebelumnya dan apa yang dapat dilakukannya sekarang (Mengacu pada perkembangan siswa).
- b. Keputusan tingkat pencapaian hasil belajar berdasarkan berbagai informasi.
- c. Keputusan tentang kemampuan siswa mempertimbangkan hasil kerja atau karya siswa yang dikumpulkan.
- d. Menggunakan sistem pencatatan yang bervariasi.
- e. Adanya penyesuaian sistem laporan penilaian hasil belajar yang memuat rincian hasil belajar berdasarkan standar/kriteria yang telah ditentukan, memberikan informasi yang jelas, menyeluruh dan akurat, dan menjamin orangtua untuk segera mengetahui masalah dan perkembangan anaknya. (Melalui diskusi formal, buku/kartu laporan penilaian hasil belajar atau rapor, pertemuan guru dan orangtua).

Dalam penilaian perlu adanya adaptasi yang meliputi adaptasi dalam cara, adaptasi dalam waktu, adaptasi dalam isi, adaptasi dalam cara waktu dan isi. Penilaian dilakukan oleh pendidik (guru) bahwa setiap anak mendapat penilaian tentang aspek social emosional, fisik motorik dan perilaku adatif dan kompetensi akademik. Dalam adaptasi cara, waktu, isi (salah satu atau semuanya) dapat dilaporkan secara kuantitatif maupun deskriptif kualitatif. Penilaian oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran (naik kelas/pindah kelas) dan setiap akhir program satuan pendidikan (tamat sekolah/lulus).

Ujian nasional wajib diikuti oleh anak-anak regular sedangkan anak berkebutuhan khusus tidak diwajibkan mengikutinya. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kecerdasan berbeda-beda ada yang di bawah rata-rata seperti tunagrahita, slow learners namun ada juga di atas rata-rata. Saat kelulusan sekolah anak berkebutuhan khusus hanya akan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar selama enam tahun untuk melanjutkan ke sekolah inklusif jenjang berikutnya. Anak berkebutuhan khusus tidak ada hubungannya dengan ujian standar kelulusan setiap tahun ajaran. Apabila hasil belajar anak dalam kelompok usia teman sebayanya mungkin akan memiliki setidaknya tiga tahun perbedaan dalam hal kemampuan umum dan kemampuan science bisa sampai enam atau delapan perbedaannya. Apabila kita membandingkan antara kemampuan anak dengan tes yang telah distandardisasi sebenarnya tidak adil untuk semua anak dikarenakan mereka yang kemampuan akademisnya jauh di bawah rata-rata kelasnya dan ada yang kecerdasannya sangat jauh di atas teman-teman sebayanya. Kita tidak boleh menekankan pada kelemahan atau kekurangan anak, namun harus menayakan apa yang telah dicapai anak dan menentukan bagaimana kita dapat membantu mereka untuk belajar lebih banyak lagi. Dengan disertai penilaian autentik dan berkelanjutan, maka guru dapat mengidentifikasi apa yang telah dipelajari dan dikuasai anak didik serta beberapa penyebab mengapa siswa tidak termotivasi belajar dan menyelesaikan soal ujian. Guru mengadaptasi perencanaan dan pengajarannya sesuai fase perkembangan belajar siswa, sehingga semua siswa akan mendapatkan peluang untuk belajar dan sukses.

## **Penutup**

Pendidikan inklusif merupakan salah satu upaya perwujudan penuntasan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Pendidikan inklusif lebih terfokus pada setiap kelebihan yang dibawa peserta didik ke sekolah daripada kekurangan mereka yang nampak dan secara khusus melihat pada bidang spesifik mana anak-anak dapat mengambil bagian untuk berpartisipasi dalam kehidupan normal masyarakat atau sekolah, atau memperhatikan apakah mereka memiliki hambatan fisik dan sosial karena lingkungan yang tidak kondusif. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan terhadap kemampuan siswa itu sendiri berdasarkan hasil observasi kemampuan-kemampuan sebelumnya dan secara berkelanjutan. Penilaian dapat dilaksanakan pada saat awal, tengah dan akhir kegiatan pembelajaran. Idealnya bahan ujiannya yang harus menyesuaikan pada kondisi, kompetensi, dan program belajar anak berkebutuhan khusus.

Penilaian yang berkelanjutan bisa juga dilakukan melalui: observasi, portofolio, bentuk ceklist (keterampilan, pengetahuan, dan perilaku), tes dan kuis, dan penilaian diri serta jurnal reflektif.

Pemahaman guru mengenai sistem penilaian hasil belajar dalam seting pendidikan inklusif maka disarankan agar guru dapat lebih memahami kembali makna konsep penilaian hasil belajar dalam seting pendidikan inklusif. Pemahaman tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca buku referensi yang berhubungan dengan penilaian hasil belajar dalam seting pendidikan inklusif, berdiskusi dengan teman guru di sekolah, konsultasi ke Guru Pembimbing Khusus, dan mengikuti *in house training*, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, workshop atau mengikuti kegiatan lainnya

## **Daftar Pustaka**

Budimansyah D. (2002). *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Genesindo

- Dedi Kustawan, (2006), *Penilaian Hasil Belajar di Sekolah Uji Coba Implementasi Pendidikan Inklusif (Studi kasus tentang penilaian hasil belajar oleh guru di sekolah uji coba implementasi pendidikan inklusif SDN X di kota Sukabumi)*, Thesis, UPI, Bandung
- Direktorat PSLB (2007), *Suplemen Penyelenggaraan Sekolah Inklusif*, Jakarta,
- Direktorat PSLB (2007) *Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (reposisi, redifferensiasi, rebranding)*, materi pengantar, dipresentasikan dalam berbagai program kegiatan Direktorat PSLB
- Hidayat, (2009), *Model dan Strategi Pembelajaran ABK dalam Setting Pendidikan Inklusif*, Makalah Workshop, Balikpapan
- Ishartiwi, (2010), *Implementasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Persekolahan Nasional*, JPK PLB FIP UNY, Yogyakarta
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 002/U/1986, *Wajib Belajar Sembilan tahun*, Jakarta
- Loreman, T., Deppeler, J., & Harvey, D. (2005). *Inclusive education: a practical guide to supporting diversity in the classroom*, NSW: Allen & Unwin
- Muslich, Masnur. (2008). *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Skjorten, MD. (2001). *Towards Inclusion, Education-Special Needs Education An Introduction*. Oslo: Unipub forlag.
- Sunanto Dj. *et all.* (2004). *Pendidikan yang Terbuka bagi Semua*. Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan UNESCO Jakarta Office.
- Sunardi, (2002), *Kecenderungn dalam Pendidikan Luar Biasa*, Dikti, Depdikbud, Jakarta
- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380 /C.66/MN/2003, 20 Januari 2003
- Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- UNESCO, (2003). *Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education*. Paris: UNESCO

## **Perkembangan Kualitas Pendidikan di Indonesia:**

### ***Analisis The Global Competitiveness Report***

**Florentinus Nugro Hardianto**

Harapan Bangsa Business School, Bandung

flnugroho@gmail.com (085868613427)

**Alexander Joseph Ibnu Wibowo**

Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta

aj\_ibnu\_wibowo@yahoo.com (085862666325)

### **Abstrak**

Peningkatan kualitas pendidikan nasional menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembangunan sektor pendidikan di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan pihak swasta untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Semakin tinggi kualitas pendidikan diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dapat berperan lebih besar dalam proses pembangunan nasional. Secara khusus, undang-undang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional diharapkan dapat berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Makalah ini akan membahas tren perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Pembahasan mengarah kepada analisis tren perkembangan ranking kualitas pendidikan di Indonesia secara internasional dari tahun ke tahun berdasarkan laporan *The Global Competitiveness Report*. Secara khusus, hasil analisis akan menunjukkan tren perkembangan ranking kualitas pendidikan di Indonesia secara internasional dari aspek kualitas pendidikan dasar, kualitas sistem pendidikan, kualitas pendidikan sains dan matematika, dan kualitas manajemen sekolah.

**Kata kunci:** kualitas pendidikan, kualitas pendidikan dasar, kualitas sistem pendidikan, kualitas pendidikan sains dan matematika, kualitas manajemen sekolah



## Abstract

Improving the quality of national education is the important aspect in the development process of education sector in Indonesia. Many efforts was taken by the government and the private sector to improve the quality of national education. The higher the quality of education is expected to further improve the quality of Indonesian human resources who can contribute in national development process. In particular, the law of Indonesia's national education system mandates that the national education system of national education are expected to work to develop skills and form the character and civilization of the nation's dignity in the context of the intellectual life of the nation, aimed at developing the potential of learners in order to become a man of faith and piety to God Almighty , noble, healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens of a democratic and responsible. This paper will discuss the development trend of the quality of education in Indonesia. The discussion led to the trend analysis of the ranking of the quality of education in Indonesia internationally from year to year based on The Global Competitiveness Report. In particular, the analysis would indicate the development trend of the ranking of the quality of education in Indonesia internationally from the aspect of quality of primary education, quality of educational system, quality of math and science education, and quality of management schools.

**Key words:** quality education, quality of primary education, quality of educational system, quality of math and science education, quality of management schools

## Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas 2003). Pendidikan diharapkan dapat memberi kontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, perdamaian dan keamanan, nilai-nilai universal, *informed decision-making*, dan kualitas hidup secara individual, keluarga, masyarakat, dan global (Pigozzi, 2006).

Masalah kualitas pendidikan pada kenyataannya menjadi perhatian penting di dunia internasional. *Virtually every country in Asia has identified improving*

*education quality as one of its highest national priorities* (Chapman dan Adams, 2002). Kemudian Leu dan Price-Rom (2005) menyatakan bahwa: “*Educational quality in developing countries has become a topic of intense interest*”. Salah satu persoalan mendasar pendidikan nasional adalah rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia (Toyamah dan Usman, 2004) sehingga Indonesia juga perlu memperhatikan masalah ini. Setidaknya ada empat faktor yang menjadi pertimbangan mengapa isu kualitas pendidikan menjadi perhatian penting (Pigozzi, 2006). Pertama, adanya keterkaitan yang luas antara kualitas pendidikan dan kinerja perekonomian nasional. Kedua, adanya kesenjangan kualitas pendidikan dalam berbagai level atau kelompok masyarakat menjadi masalah sensitif secara politik. Ketiga, adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya sistem pendidikan termasuk kualitas pendidikan yang mengakomodasi semua kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat. Keempat, pendidikan diharapkan mampu menjadi alat untuk membangun masyarakat yang didasarkan pada demokrasi, keadilan, dan perdamaian sehingga aspek kualitas pendidikan penting untuk diperhatikan. Meningkatnya kepedulian terhadap perihal kualitas pendidikan menurut Chapman dan Adams (2002) didorong oleh faktor-faktor berikut: (i) *inability to adequately staff and finance rapidly expanding education systems*; (ii) *research-based evidence of low levels of learning in basic skills*; (iii) *new demands for advanced language, mathematics, and, increasingly, computer skills, stemming from industrialization*; and (iv) *financial crises that have had an adverse effect on education budgets—in some cases reducing internal efficiencies and eliminating plans for qualitative improvement*.

### **Pengertian dan Karakteristik Kualitas Pendidikan**

Konsep tentang kualitas pendidikan mengandung banyak pengertian sehingga kesulitan jika dilakukan suatu generalisasi. Chapman dan Adams (2002) mengemukakan bahwa: “*Education quality apparently may refer to inputs (numbers of teachers, amount of teacher training, number of textbooks), processes (amount of direct instructional time, extent of active learning), outputs (test scores, graduation rates), and outcomes (performance in subsequent*

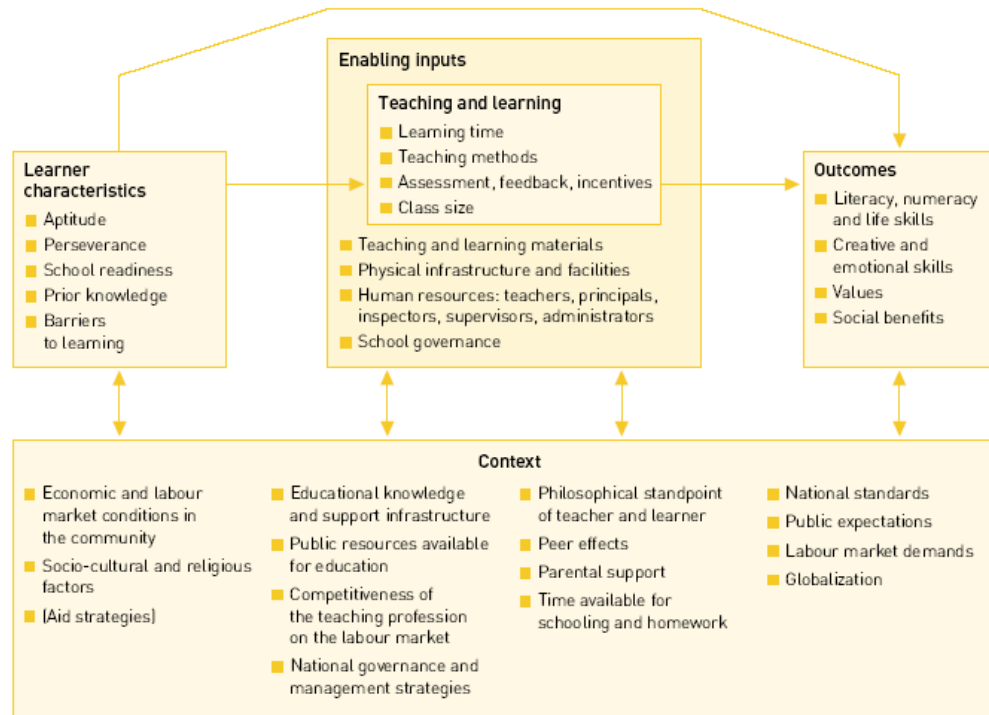
*employment). Additionally, quality education may imply simply the attaining of specified targets and objectives.” Adams (1993) mengemukakan bahwa kualitas pendidikan hendaknya ditinjau dari perspektif input, proses, output, outcome, value added, dan kombinasi di antaranya.*

Selanjutnya, Harvey (dalam Leu dan Price-Rom, 2005) menyatakan bahwa kualitas pendidikan terkait dengan lima hal berikut: (1) *Education quality as exceptionalism: excellence is the vision that drives education, quality education is education that is exemplary, schools should maximize the pursuit of the highest potential in individual students.* (2) *Education quality as consistency: equality is the vision that drives education, quality requires equitable experiences, schools and classrooms should provide students with consistent experiences across the system.* (3) *Education quality as fitness-for-purpose: refinement and perfection in specific subject areas is the vision that shapes the system, quality is seen as preparing students for specific roles, instructional specialization is emphasized.* (4) *Education quality as value for money: education reflects reasonable correspondence to individual and societal investments, quality is interpreted as the extent to which the system delivers value for money.* (5) *Education quality as transformative potential: social or personal change is the vision that drives education, quality education is a catalyst for positive changes in individuals and society, education promotes social change.*

Sementara itu, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004) mengemukakan suatu kerangka yang menggambarkan keterkaitan sejumlah faktor dalam memahami kualitas pendidikan. UNESCO menekankan pentingnya hubungan erat antara faktor learner characteristics, enabling inputs/process, content, benefit and outcome, dan context/environment dalam memahami konsep kualitas pendidikan. Keterkaitan faktor kualitas pendidikan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.*

Gambar 1

A Framework for Understanding Education Quality



(Sumber: UNESCO, 2004)

Berdasarkan sejumlah pengertian tentang kualitas pendidikan, Adams (1993) menyatakan bahwa konsep kualitas pendidikan sebenarnya mengandung sejumlah karakteristik. Pertama, kualitas pendidikan memiliki makna ganda. Kedua, kualitas pendidikan merefleksikan interpretasi dan nilai-nilai individual. Ketiga, kualitas pendidikan bersifat multidimensi. Keempat, kualitas pendidikan bersifat dinamis. Kelima, kualitas pendidikan dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Keenam, kualitas pendidikan terkait erat dengan konsep efisiensi, dan keadilan. Ketujuh, kualitas pendidikan erat kaitannya dengan latar belakang tradisi, budaya, dan nilai-nilai. Kedelapan, definisi kualitas pendidikan dapat berbeda-beda antar-kelompok pemangku kepentingan yang berbeda (*different stakeholder groups*).

## **Peringkat Daya Saing Kualitas Pendidikan di Indonesia**

Peringkat daya saing global suatu negara dapat dilihat pada *The Global Competitiveness Report* yang dipublikasikan secara rutin setiap tahun oleh *The World Economic Forum* (WEF). WEF merupakan organisasi internasional independen yang berdiri sejak tahun 1971, berpusat di Genewa, Swiss, dan berkomitmen untuk memperbaiki situasi dunia melalui berbagai agenda industri, regional, dan global dengan melibatkan para pemimpin bisnis, politik, akademisi, dan pemimpin masyarakat lainnya ([www.weforum.org](http://www.weforum.org)). Di dalam *The Global Competitiveness Report* disajikan 12 pilar yang terkait dengan peringkat daya saing suatu negara secara internasional. Keduabelas pilar ini terdiri dari pilar *institutions, infrastructure, macroeconomic environment, health and primary education, higher education and training, goods market efficiency, labor market efficiency, financial market development, technological readiness, market size, business sophistication*, dan pilar *innovation*.

Secara khusus, komponen peringkat daya saing kualitas pendidikan terdapat pada pilar *health and primary education*, dan pilar *higher education and training*. Pada pilar *health and primary education* dapat diperoleh peringkat daya saing kualitas pendidikan dasar (*quality of primary education*). Pada pilar *higher education and training* dapat ditemukan peringkat daya saing kualitas sistem pendidikan (*quality of the educational system*), kualitas pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan (*quality of math and science education*), dan kualitas manajemen sekolah (*quality of management schools*). Dari kedua pilar tersebut dapat diperoleh 4 informasi yang bisa menunjukkan peringkat daya saing kualitas pendidikan suatu negara termasuk peringkat Indonesia secara internasional.

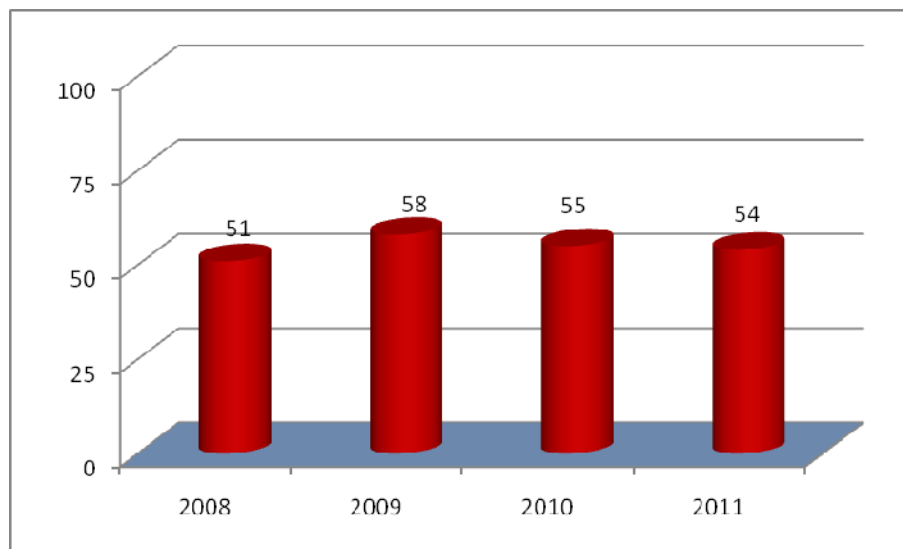
Berdasarkan informasi di atas, peringkat daya saing kualitas pendidikan di Indonesia secara internasional bisa dilihat dari 4 (empat) komponen, yakni peringkat kualitas pendidikan dasar (*quality of primary education*), peringkat kualitas sistem pendidikan (*quality of the educational system*), peringkat kualitas pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan (*quality of math and science*

*education*), dan peringkat kualitas manajemen sekolah (*quality of management schools*). Perkembangan peringkat daya saing kualitas pendidikan di Indonesia secara internasional dapat dicermati seperti berikut ini.

Perkembangan kualitas pendidikan dasar di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain menunjukkan kecenderungan yang menurun, khususnya sejak tahun 2009 hingga 2011. Selengkapnya bisa dilihat dalam Gambar 2.

**Gambar 2**

**Indeks Kualitas Pendidikan Dasar Indonesia**

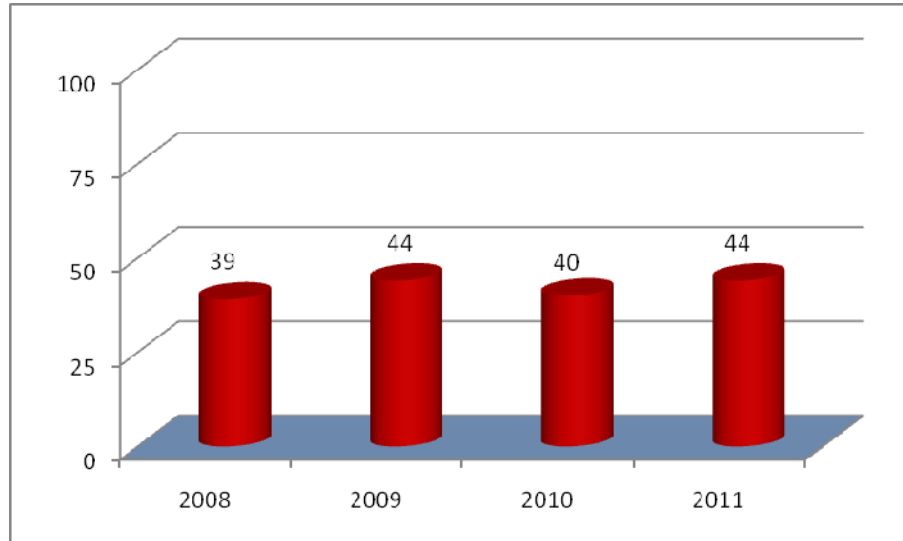


(Sumber: The Global Competitiveness Report, Beberapa Edisi)

Berbeda dengan kualitas pendidikan dasar, kualitas sistem pendidikan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif sejak tahun 2008 hingga 2011. Selengkapnya bisa dilihat dalam Gambar 3. Senada dengan kualitas sistem pendidikan, kualitas pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain juga menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif sejak tahun 2008 hingga 2011. Selengkapnya bisa dilihat dalam Gambar 4 di bawah ini.

**Gambar 3**

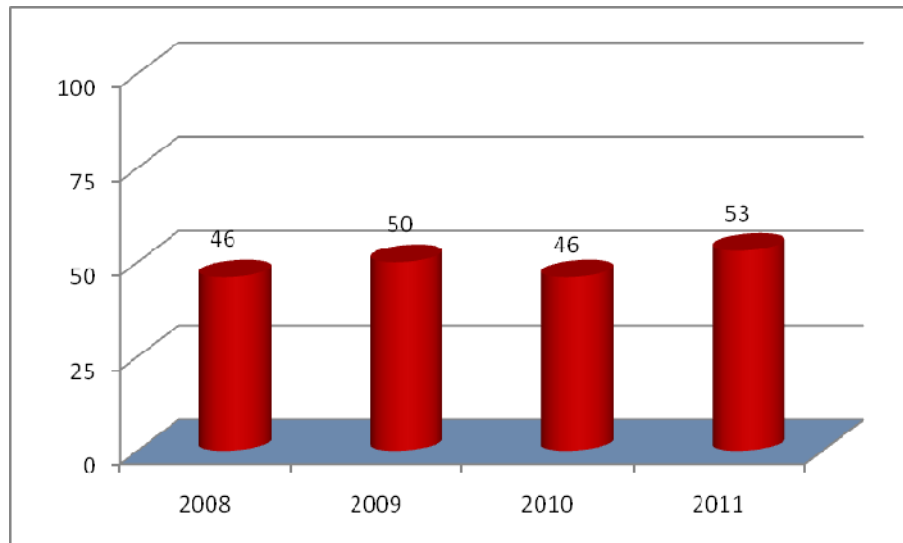
**Indeks Kualitas Sistem Pendidikan Indonesia**



(Sumber: The Global Competitiveness Report, Beberapa Edisi)

**Gambar 4**

**Indeks Kualitas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Indonesia**



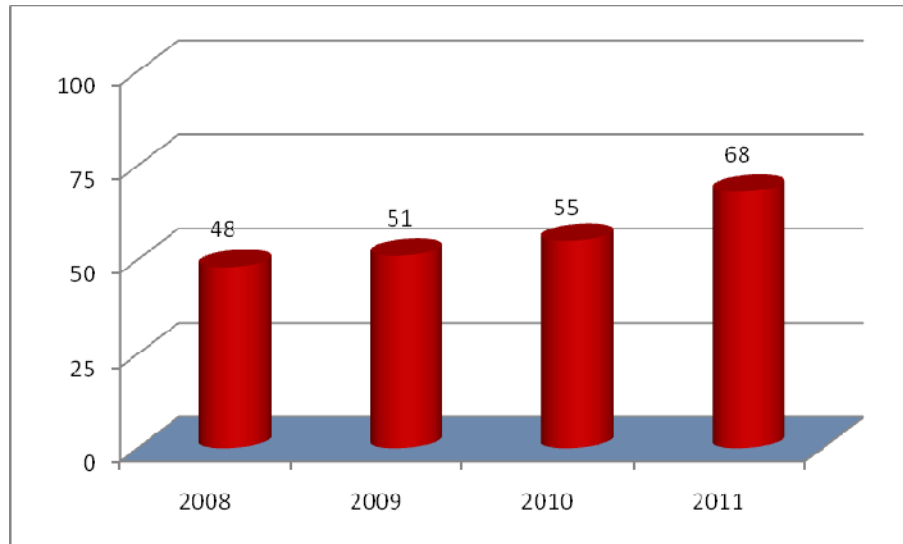
(Sumber: The Global Competitiveness Report, Beberapa Edisi)

Sebaliknya, prestasi signifikan daya saing pendidikan Indonesia terlihat dari aspek manajemen (pengelolaan) sekolah. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya

angka indeks manajemen sekolah di Indonesia sejak tahun 2008 hingga 2011. Tren yang positif ini perlu terus dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Selengkapnya bisa dilihat dalam Gambar 5. di bawah ini.

**Gambar 5**

**Indeks Kualitas Manajemen Sekolah Indonesia**

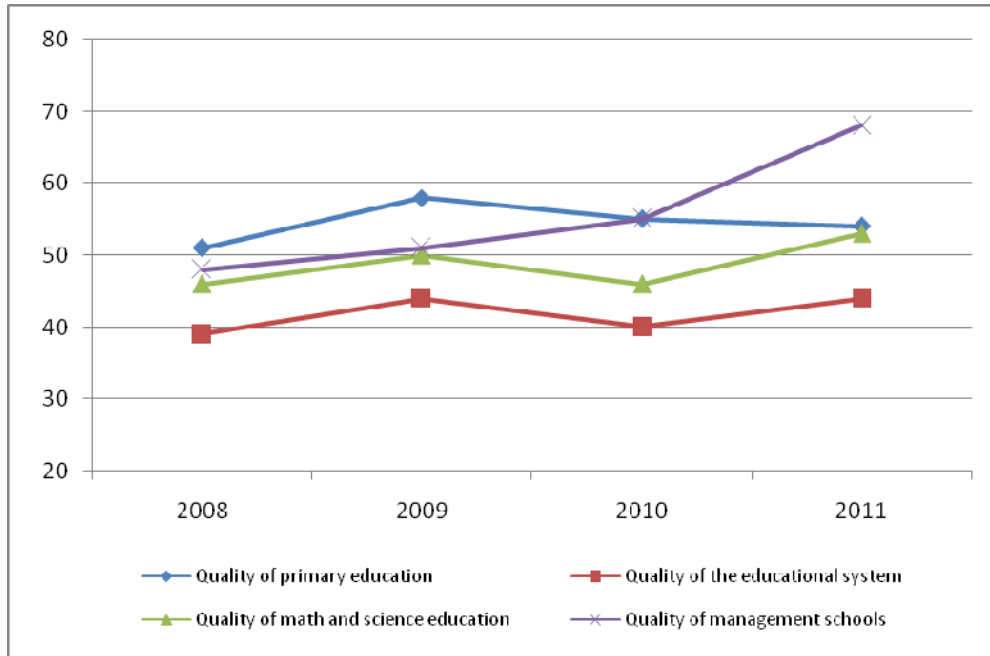


(Sumber: The Global Competitiveness Report, Beberapa Edisi)

Berdasarkan uraian di atas, secara umum bisa disimpulkan bahwa kualitas pendidikan dasar perlu menjadi perhatian pemerintah dan swasta karena menunjukkan tren penurunan. Meskipun demikian, angka indeks kualitas pendidikan dasar Indonesia sebenarnya masih tetap berada di atas dari angka indeks dari tiga aspek yang lain. Oleh karena itu, kualitas sistem pendidikan, kualitas pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan, dan juga kualitas manajemen sekolah juga perlu memperoleh perhatian khusus pemerintah dan swasta untuk terus dikembangkan di tahun-tahun mendatang.



**Gambar 6**  
**Perbandingan Indeks Kualitas Pendidikan Indonesia**  
**secara Keseluruhan**



(Sumber: The Global Competitiveness Report, Beberapa Edisi)

## Penutup

Perkembangan kualitas pendidikan masih menjadi masalah penting yang perlu mendapat perhatian serius. Perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia telah berlangsung sepanjang empat era (Era kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi) (Sudaryono, 2008). Namun demikian, kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara sedang berkembang lainnya seperti diungkapkan oleh Chapman dan Adams (2002) berikut: *“All developing member countries of the Asian Development Bank (ADB) have reported dissatisfaction with the quality of their education systems.”*

Oleh karena itu perlu adanya upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. World Bank (2012) antara lain merekomendasikan bahwa perlu ada upaya peningkatan kapasitas manajemen dan akuntabilitas di setiap tingkat pemerintahan, pemberdayaan sekolah dalam membuat perencanaan dan melaksanakan strategi mereka sendiri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi ketimpangan sumber daya fiskal daerah dalam pendidikan, menciptakan mekanisme pertukaran dan penggunaan informasi dalam suatu sistem yang menyeluruh, dan membangun kemampuan pengajaran yang lebih baik. Upaya tersebut hendaknya juga mencakup berbagai upaya untuk semakin meningkatkan kualitas input, proses, dan output pendidikan. Secara khusus, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara lebih terarah dan berkelanjutan, baik melalui jalur formal, nonformal, dan informal (BSNP 2009). Lembaga-lembaga yang terkait erat dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia seperti Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Badan Akreditasi Nasional (BAN), dan lembaga-lembaga terkait lainnya hendaknya juga saling membantu secara aktif dalam mensukseskan upaya tersebut. Kerja sama internasional juga perlu semakin diintensifkan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara menyeluruh.

Pendidikan yang berkualitas di Indonesia pada gilirannya dapat mendorong terwujudnya fungsi pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat undang-undang sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut menghendaki bahwa sistem pendidikan nasional dapat berhasil menjalankan fungsinya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Don (1993), Defining Educational Quality, Institute for International Research, [http://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PNACA245.pdf](http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACA245.pdf).
- Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). [http://bsnp-indonesia.org/id/?page\\_id=61](http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=61).
- Chapman, David dan Don Adams (2002). The Quality of Education: Dimensions and Strategies. Asian Development Bank (ADB).
- Leu, Elizabeth dan Alison Price-Rom (2005). Quality of Education and Teacher Learning: A Review of The Literature. American Institutes for Research under the EQUIP1 LWA and Academy for Educational Development. [www.google.com](http://www.google.com).
- Pigozzi, Mary Joy (2006). What is the 'quality of education'? (A UNESCO Perspective) dalam Cross-National Studies of The Quality of Education; Planning Their Design and Managing Their Impact. Edited Kenneth N. Ross and Illona Jurgens Genevois. UNESCO, [www.google.com](http://www.google.com).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. [www.google.com](http://www.google.com).
- Sudaryono, Yohanes (2008). Kualitas Pendidikan Indonesia Suatu Refleksi. <http://enewletterdisdik.wordpress.com/2008/05/01/kualitas-pendidikan-indonesia-suatu-refleksi>.
- Toyamah, Nina dan Syaikhu Usman (2004). Laporan Penelitian Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar. Lembaga Penelitian SMERU, [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).
- The Global Competitiveness Report. Beberapa Edisi. The World Economic Forum. [www.weforum.org](http://www.weforum.org).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. [www.google.com](http://www.google.com).
- World Bank (2012). Improving Education Quality: Indonesia: Ideas for the Future. <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources>.

### **BIODATA PENULIS**

**Nama** : **Florentinus Nugro Hardianto, S.E., M.Sc.**

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/23 Oktober 1975

Pekerjaan : Dosen (Harapan Bangsa Business School, Bandung)

Pendidikan : Alumnus Pascasarjana Ilmu Ekonomi (S2) Universitas  
Gadjah Mada, Yogyakarta

Alamat Kampus : Jln. Dipatiukur No. 80-84, Bandung

Email : flnugroho@gmail.com

Phone : 0858-6861-3427

**Nama** : **Alexander Joseph Ibnu Wibowo, S.E., M.S.M.**

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/4 September 1974

Pekerjaan : Dosen (Fakultas Ekonomi, Universitas Atmajaya Jakarta)

Pendidikan : Alumnus Pascasarjana Ilmu Manajemen (S2) Universitas  
Indonesia, Jakarta

Alamat Kampus : Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta

Email : aj\_ibnu\_wibowo@yahoo.com

Phone : 0858-62666-325

# UJI KOMPETENSI SELEKSI GURU BERBASIS BIDANG STUDI SEBAGAI INSTRUMEN GANDA DALAM PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU

Oleh:  
Udi Utomo<sup>1</sup>

## ABSTRAK

Pelaksanaan uji kompetensi seleksi guru selama ini belum didasarkan pada materi yang relevan dengan kebutuhan bidang studi di sekolah. Materi seleksi masih bersifat umum dan diperuntukan bagi seluruh peserta uji dari beragam latar belakang bidang studi yang dibutuhkan. Model ini tentu saja praktis, namun demikian apabila dikaitkan dengan upaya pengembangan profesionalitas guru tentu saja tidak dapat digunakan secara maksimal. Model uji kompetensi tersebut hanya berguna sebagai alat uji untuk menentukan calon guru yang memenuhi kriteria tertentu, meskipun bukan kriteria yang merujuk kepada kompetensi guru yang terkait dengan bidang studinya.

Pengembangan profesi guru dapat dilakukan melalui kegiatan asesmen yang berkesinambungan. Kegiatan ini dimulai sejak para calon guru menempuh pendidikan profesi, pada saat seleksi perekrutan tenaga guru, dan berlanjut pada saat masa jabatan guru seperti penilaian portofolio atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang sedang berlangsung pada program sertifikasi saat ini. Pelaksanaan uji kompetensi seleksi guru apabila direncanakan dengan baik akan menjadi instrumen yang berfungsi ganda. Kedudukannya selain sebagai alat uji yang secara spesifik dan otentik dapat memberikan informasi kualifikasi tenaga guru yang dibutuhkan, sekaligus akan memiliki dua fungsi lain yakni: (1) memberikan informasi kepada lembaga penghasil tenaga guru (LPTK) terhadap kualitas *output*, efektivitas kurikulum dan praktik pembelajaran yang dilakukan; dan (2) memberikan informasi kepada lembaga-lembaga terkait yang secara langsung berperan dalam pengembangan profesionalitas guru selanjutnya.

Berkaitan dengan masalah tersebut makalah ini memaparkan satu model pengembangan uji kompetensi guru berbasis bidang studi yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam pelaksanaan uji kompetensi seleksi guru seni musik di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Materi uji bersifat aplikatif, dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan kurikulum dan karakteristik bidang studi. Dalam aplikasinya model ini dapat diadaptasi dan dipadukan dengan materi umum lain berdasarkan perkembangan kebutuhan pembelajaran di sekolah.

## 1. Pendahuluan

Sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kualitas bangsa kemajuan di bidang pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu parameternya. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Dosen pada Jurusan Pendidikan Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang (Kandidat Doktor pada Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta).

itu peningkatan mutu pendidikan sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan dan menghadapi persaingan dunia yang semakin global pada saat ini menjadi tuntutan yang tak terelakkan bagi bangsa kita.

Peningkatan mutu pendidikan menurut Zamroni (2000:127) dapat dilakukan melalui tiga pilar pendidikan, yakni melalui aspek regulatori (kurikulum), aspek profesi (guru), dan aspek manajemen pendidikan. Melalui aspek regulatori, peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menekankan aspek perbaikan kurikulum, sedangkan melalui aspek profesi dilakukan melalui pengembangan profesi guru. Selanjutnya melalui aspek manajemen pendidikan, upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan cara mengembangkan peranan pusat-pusat pengambil keputusan dan kendali pendidikan pada level yang lebih dekat dengan proses belajar-mengajar.

Pengembangan profesi guru sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan kita telah dimulai pada saat para calon guru menempuh pendidikan (*pre-service*) dan berlanjut pada saat para guru menduduki jabatan tersebut (*in-service*). Meskipun demikian apabila upaya pengembangan profesionalitas yang dilakukan pada kedua jenjang tersebut tidak dilakukan secara berkesinambungan tentu saja tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

Salah satu upaya untuk mengembangkan profesi guru antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan asesmen yang berkesinambungan. Kegiatan ini dapat dimulai sejak para calon guru menempuh pendidikan profesi, pada saat seleksi perekrutan tenaga guru, dan berlanjut pada saat masa jabatan guru seperti penilaian melalui portofolio atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang sedang berlangsung pada program sertifikasi saat ini.

Kegiatan asesmen yang secara spesifik dilakukan untuk mengetahui tingkat profesionalitas setiap calon guru pada akhir masa studi di lembaga-lembaga pendidikan profesi guru sampai saat ini belum dilakukan. Bahkan pada saat pemerintah melakukan seleksi penerimaan tenaga guru pun, model asesmen yang digunakan belum sepenuhnya relevan dengan tuntutan kompetensi yang dipersyaratkan oleh setiap mata pelajaran di sekolah. Model dan materi asesmen

pada pelaksanaan seleksi guru yang selama ini diterapkan di berbagai wilayah dan daerah masih sama untuk semua mata pelajaran. Model asesmen berbentuk tes obyektif berupa materi pengetahuan umum yang terdiri dari Ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Politik (Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah, Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri), Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hankam dan Hukum, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Tes Psikologi, Tes Potensi Akademik, Tes Skala Kematangan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas dan inisiatif, dan atau Tes Bakat Skolastik yang bertujuan untuk mengukur kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, dan kemampuan penalaran. Untuk formasi guru dibawah naungan kementerian agama diantaranya ada yang memasukan materi pengetahuan agama.

Model ini tentu saja praktis, namun demikian apabila dikaitkan dengan upaya pengembangan profesionalitas guru tidak dapat digunakan secara maksimal. Model uji kompetensi tersebut hanya berguna sebagai alat uji untuk menentukan calon guru yang memenuhi kriteria tertentu, meskipun bukan kriteria yang merujuk kepada kompetensi guru yang terkait dengan bidang studinya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut makalah ini akan membahas tentang: (1) uji kompetensi dalam pengembangan profesionalitas guru; (2) model uji kompetensi seleksi guru berbasis bidang studi sebagai instrumen ganda dalam pengembangan profesionalitas guru; dan (3) model asesmen kompetensi guru seni musik dalam perspektif pelaksanaan pembelajaran berbasis *action learning* sebagai salah satu alternatif dalam uji kompetensi seleksi guru seni musik di SMP.

## **2. Uji Kompetensi dalam Pengembangan Profesionalitas Guru**

Ada beberapa istilah yang menjelaskan makna kompetensi, antara lain: (1) *competence (n) is being competent, ability (to do the work)*; (2) *competent (adj.) refer to (persons) having ability, power, authority, skill, knowledge, etc (to do what is needed)*; dan (3) *competency is rational performance which satisfactorily meets the objectives for a desired condition*. Istilah yang pertama menunjukkan bahwa pada dasarnya kompetensi merupakan kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Definisi yang kedua menunjukkan bahwa kompetensi

merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang yang memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas (kewenangan, kemahiran (ketrampilan), pengetahuan, dan lain-lain untuk mengerjakan apa yang diperlukan. Sedangkan definisi yang ketiga lebih lanjut mengungkapkan bahwa kompetensi menunjukkan kepada tindakan (kinerja) rasional yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan secara memuaskan berdasarkan kondisi (prasarat) yang diharapkan (Udin, 2009:44-45).

Menurut Brenda, Neil, Tony Kruger dan Rose (1997:21) kompetensi adalah suatu kinerja yang tidak hanya didukung oleh keterampilan, tetapi juga oleh pengetahuan dan pemahaman. Kompetensi mencakup berbagai kemampuan untuk tampil dalam suatu konteks dan kapasitas untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilannya untuk tugas-tugas dan situasi baru. Dalam pandangan yang terintegrasi Brenda tidak sekedar menguraikan daftar tugas (pekerjaan yang dilakukan), namun dengan menambahkan dua dimensi secara holistik yakni atribut praktisi (prasarat untuk melakukan pekerjaan) dan karakteristik dari konteks (di mana pekerjaan dilakukan). Dia juga menyimpulkan bahwa ada tiga dimensi untuk pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang meliputi: (1) praktek pembelajaran; (2) diskursif - pemikiran dan penteorian tentang praktik, dan koneksi konsepsi yang lebih luas tentang pengajaran dan pembelajaran; dan (3) penjelasan umum dan kritik praktik serta hubungannya dengan teori, melalui suatu contoh kasus.

Menurut Broke dan Stone dalam Moh. Uzer (1995:14) istilah kompetensi dalam konteks profesi guru dikatakan sebagai ” *Descriptive of qualitative nature or teacher behavior appears to be entirely meaningful*”. Istilah tersebut mengandung arti bahwa kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif perilaku guru yang tampak sangat berarti. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Udin (2009:54) untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, kompetensi kinerja profesi keguruan (*generic teaching competencies*) dalam penampilan aktual proses belajar mengajar minimal ditandai empat kemampuan yakni: (1) kemampuan merencanakan proses pembelajaran; (2) kemampuan melaksanakan dan mengelola proses pembelajaran; (3) kemampuan menilai proses pembelajaran; dan (4) kemampuan menguasai bahan pelajaran.



Masalah pengembangan kompetensi guru sebagai jaminan dihasilkannya tenaga guru yang profesional menuntut adanya kerja sama antar lembaga yang terkait dengan profesi guru. Bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), pengembangan kurikulum yang berbasis kebutuhan yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat lokal maupun global dan pengembangan strategi-strategi pembelajaran yang inovatif merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan profesionalitas guru dalam jabatan dapat dilakukan melalui bentuk-bentuk kegiatan seperti seminar, pelatihan, sertifikasi, dan lain-lain.

### **3. Model Uji Kompetensi Seleksi Guru berbasis Bidang Studi sebagai Instrumen Ganda dalam Pengembangan Profesionalitas Guru**

Pelaksanaan uji kompetensi seleksi guru sebagai salah satu bentuk kegiatan asesmen apabila direncanakan dengan baik akan menjadi instrumen yang berfungsi ganda. Kedudukannya selain sebagai alat uji yang secara spesifik dan otentik dapat memberikan informasi kualifikasi tenaga guru yang dibutuhkan, sekaligus akan memiliki dua fungsi lain yakni: (1) memberikan informasi kepada lembaga penghasil tenaga guru (LPTK) terhadap kualitas *output*, efektivitas kurikulum dan praktik pembelajaran yang dilakukan; dan (2) memberikan informasi kepada lembaga-lembaga terkait yang secara langsung berperan dalam pengembangan profesionalitas guru selanjutnya.

Hasil uji kompetensi guru berbasis bidang studi sebagai bukti otentik kualitas *output* suatu lembaga karena secara otomatis mampu memberikan informasi tentang efektivitas kurikulum dan praktek pembelajaran pada suatu bidang studi di lembaga pendidikan profesi guru. Oleh karena itu maknanya akan berguna bagi lembaga pendidikan profesi guru yang ada dalam merencanakan dan melakukan perbaikan struktur program kurikulum dan praktek pembelajarannya. Karena melalui hasil uji tersebut informasi tentang kesesuaian-kesesuaian dan kesenjangan kompetensi para calon guru berdasarkan suatu standar yang ditetapkan dapat diketahui.

Bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan pembinaan tenaga guru seperti Dinas Pendidikan dan lembaga-lembaga penyelenggara program pendidikan dan

latihan guru (LPMP dan P4TK Seni Budaya) hasil uji kompetensi pada saat seleksi guru dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan program-program pengembangan profesionalitas guru. Oleh karena itu apabila model uji kompetensi berbasis bidang studi diterapkan dalam pelaksanaan uji kompetensi seleksi guru, maka akan berpotensi terhadap kesinambungan penangan pengembangan profesi guru. Kesinambungan tersebut secara harmonis melibatkan dua kekuatan yang ada yakni kekuatan lembaga penyelenggara pendidikan profesi guru (*pre-service*) dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab kepada para guru selama menduduki jabatan (*in-service*).

Selaras dengan uraian di atas, Brenda (1997:20) menyatakan bahwa penyesuaian model dan isi asesmen standar kompetensi guru sebagai konsekuensi terhadap suatu hasil yang diharapkan perlu dilakukan. Sebagai contoh di Amerika Serikat untuk kepentingan akreditasi pendidikan NCATE (*National Council for Accreditation of Teacher Education*) baru-baru ini telah merevisi standar yang ada menjadi suatu standar baru yang menekankan pada aspek pengetahuan dan praktik, kinerja, bentuk-bentuk baru penilaian, kerjasama antar sekolah, teknologi, dan keragaman evaluasi program dalam berbagai konteks secara berkesinambungan.

#### **4. Model Asesmen Kompetensi Guru Seni Musik dalam Perspektif Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis *Action Learning* sebagai Salah Satu Alternatif Model Uji Kompetensi Seleksi Guru Seni Musik di SMP.**

Pembelajaran seni musik berbasis *action learning* merupakan bentuk pembelajaran yang merujuk pada suatu aktivitas (*learning by doing*). Dalam konteks ini siswa belajar melalui keterlibatan secara aktif dalam menyerap informasi yang disampaikan oleh guru. Keterlibatan siswa dengan musik bisa saja hanya secara mental atau bahkan secara fisik. Melalui pendekatan ini siswa secara induktif akan memandu siswa dalam memahami konsep secara luas tentang berbagai unsur musik seperti irama, *pitch*, bentuk, dan lain-lain yang akan memberikan dasar bagi perbaikan dan pengembangan keterampilan selanjutnya (Regelski, 1981:11).

Pembelajaran seni musik berbasis *action learning* dilakukan dengan cara guru memberikan pengalaman musikal secara langsung kepada siswa dengan tujuan agar para siswa dapat membangun konsep-konsep musik dalam dirinya. Oleh karena itu wujudnya bukan seperangkat aturan verbal, pernyataan atau definisi yang dicontohkan, gambar/symbol-simbol musik yang diajarkan melalui pengalaman, namun demikian pengalaman itu sendiri yang akan secara aktif berinteraksi, mengatur, dan bertindak atas realitas. Konsep-konsep musik tidak diajarkan secara langsung tapi merupakan formulasi unik yang dipelajari oleh siswa berdasarkan tindakan langsung dengan atau pada bahan musik (Regelski, 1981:12-13).

Terkait dengan pembelajaran seni musik yang berbasis *action learning* tersebut, Jamalus (1988:43) menyatakan bahwa pembelajaran seni musik di sekolah harus dilakukan melalui pengalaman musik. Maksudnya, setiap bentuk pembelajaran musik sebagai upaya untuk mencapai kompetensi dasar yang ditentukan baik dalam kompetensi berapresiasi, berekspresi, dan berkreasi harus dilakukan melalui kegiatan terpadu dengan memasukkan kegiatan musik sebagai salah satu komponennya. Aktivitas musikal tersebut dapat berupa kegiatan mendengarkan musik (*listening*), merespon musik dengan gerak berirama (*responding*), merekam musik (*recording*), bernyanyi (*singing*), membaca notasi musik (*reading*), bermain alat musik (*playing*), mencipta musik (*creating*), menganalisis dan mengapresiasi musik (*analyzing and appreciating*). Melalui aktivitas musikal tersebut siswa akan memperoleh kesempatan mengalami dan menghayati fungsi unsur-unsur musik dalam lagu atau musik yang dipelajari sehingga memberikan pemahaman dan pengalaman yang bermakna.

Pembelajaran seni musik di sekolah menengah pertama (SMP) sebagai bagian dari mata pelajaran seni budaya dilaksanakan dengan mengkaitkan aspek budaya sebagai konteksnya. Oleh karena itu, pembelajaran seni musik yang dirancang dengan mengacu pada pembelajaran yang berbasis *action learning* sangatlah relevan. Menurut Regelski (1981:18), pembelajaran berbasis *action learning* harus dilakukan dengan cara mencari koneksi sedekat mungkin atau

relevansi antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa dalam berbagai situasi.

Berkaitan dengan karakteristik pembelajaran seni musik tersebut, maka model asesmen yang dikembangkan sebagai instrumen uji kompetensi seleksi guru seni musik ini adalah model asesmen yang berbasis pada kinerja (*performance assessment*). Objek amatannya berupa proses dan produk kinerja (lihat Reynold, 2010: 246-249). Untuk memberikan gambaran tentang model asesmen kompetensi guru seni musik dalam perspektif pelaksanaan pembelajaran berbasis *action learning* tersebut, berikut ini akan diuraikan tentang tujuan asesmen dan materi asesmen.

#### **a. Tujuan Asesmen**

Model asesmen yang dikembangkan bertujuan untuk mengases kompetensi calon guru seni musik di SMP dalam perspektif pelaksanaan pembelajaran yang berbasis *action learning*. Berdasarkan tujuan tersebut, secara spesifik model ini bertujuan untuk mengases tiga kompetensi guru yang meliputi: (1) kompetensi guru dalam mendesain dan melaksanakan pembelajaran seni musik; (2) kompetensi guru dalam mengembangkan materi musik; dan (3) kompetensi guru dalam bernyanyi dan memainkan alat musik.

#### **b. Materi Asesmen**

Materi asesmen kompetensi guru seni musik dalam perspektif pelaksanaan pembelajaran berbasis *action learning* ini mencakupi materi asesmen kompetensi guru dalam: (1) mendesain dan melaksanakan praktik pembelajaran seni musik; (2) mengembangkan materi musik melalui komposisi dan aransemen musik; dan (3) bernyanyi dan memainkan alat musik.

##### **1) Kompetensi guru dalam mendesain dan melaksanakan pembelajaran seni musik**

Dalam kompetensi mendesain pelaksanaan pembelajaran seni musik, materi asesmen mencakupi kompetensi calon guru dalam merencanakan dan menentukan: (1) indikator hasil belajar; (2) materi pembelajaran; (3) lagu model; (4) strategi kegiatan pembelajaran; (5) media pembelajaran (pemanfaatan media audio, visual, audio visual dan atau alat musik); dan (6) teknik penilaian. Materi kompetensi asesmen calon guru dalam melaksanakan pembelajaran seni musik

berupa kegiatan praktik mengajar yang dilakukan dalam bentuk simulasi pembelajaran seni musik.

## **2) Kompetensi guru dalam mengembangkan materi musik**

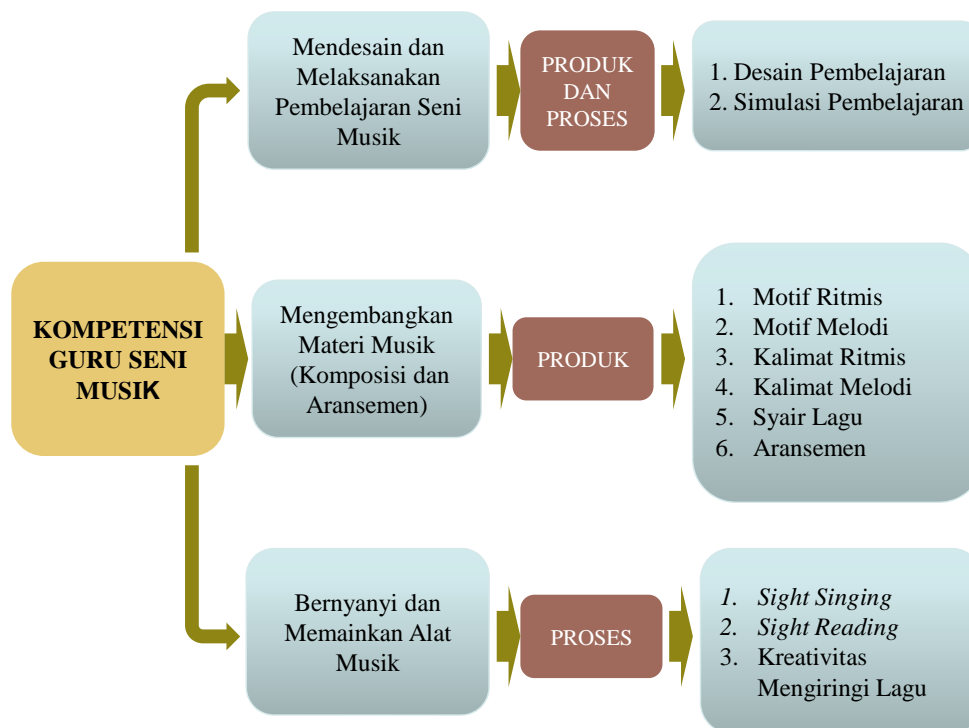
Dalam kompetensi ini materi asesmen kompetensi calon guru meliputi kompetensi dalam mengkomposisi dan mengaransemen musik. Materi komposisi musik mencakupi: (1) pengembangan motif ritmis; (2) pengembangan motif melodi; (3) pengembangan kalimat ritmis; (4) pengembangan kalimat melodis; dan (5) pengembangan syair lagu. Materi aransemen musik mencakupi: (1) penentuan *chord* lagu; (2) penentuan pola iringan alat musik harmoni; dan (3) penentuan pola iringan alat musik ritmis.

## **3) Kompetensi guru dalam bernyanyi dan memainkan alat musik**

Dalam kompetensi ini materi asesmen kompetensi calon guru mencakupi: (1) keterampilan membaca notasi lagu dengan vokal (*sight singing*); (2) keterampilan membaca notasi lagu dengan alat musik melodi sesuai pilihan (*sight reading*); (3) keterampilan membaca notasi ritmis dengan menggunakan alat musik *drum set* (*sight reading*); (4) kreativitas mengiringi lagu dengan alat musik harmoni (*keyboard* atau gitar); dan (5) kreativitas mengiringi lagu dengan alat musik ritmis (drum dan kendang).

Pada model asesmen kompetensi guru dalam mendesaian pembelajaran seni musik objek asesmennya adalah produk yang berupa desain pembelajaran. Pada asesmen kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran seni musik objek asesmennya adalah proses, yakni *performance* guru dalam mengajar. Pada kompetensi guru dalam mengembangkan materi musik objek amatannya adalah produk yang berupa pengembangan motif dan kalimat ritmis, pengembangan motif dan kalimat melodis, syair lagu, dan aransemen musik. Adapun pada model asesmen kompetensi guru dalam bernyanyi dan memainkan musik objek asesmennya adalah proses berupa *performance* guru dalam membaca notasi lagu dengan vokal, dengan alat musik, dan kreativitas mengiringi lagu. Apabila digambarkan dengan bagan, model asesmen kompetensi guru seni musik tersebut sebagai berikut.

## Model Asesmen Kompetensi Guru Seni Musik dalam Perspektif Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis *Action Learning*



Dalam aplikasinya model asesmen kompetensi guru tersebut dapat diadaptasi. Bahkan apabila diperlukan dapat pula dipadukan dengan materi umum lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembelajaran di sekolah.

### 5. Kesimpulan

Pengembangan profesi guru sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan kita telah dimulai pada saat para calon guru menempuh pendidikan (*pre-service*) dan berlanjut pada saat para guru menduduki jabatan (*in-service*). Salah satu upaya pengembangan profesi guru antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan asesmen yang berkesinambungan. Kegiatan ini dimulai sejak para calon guru menempuh pendidikan profesi, pada saat seleksi perekrutan tenaga guru, dan berlanjut pada saat masa jabatan.

Pelaksanaan uji kompetensi seleksi guru berbasis bidang studi sebagai salah satu alternatif model asesmen kompetensi guru merupakan instrumen uji yang berfungsi ganda. Kedudukannya selain sebagai alat uji yang secara spesifik dan otentik dapat memberikan informasi kualifikasi tenaga guru yang dibutuhkan, sekaligus akan memiliki dua fungsi lain yakni: (1) memberikan informasi kepada lembaga penghasil tenaga guru (LPTK) terhadap kualitas *output*, efektivitas kurikulum dan praktik pembelajaran yang dilakukan; dan (2) memberikan informasi kepada lembaga-lembaga terkait yang secara langsung berperan dalam pengembangan profesionalitas guru selanjutnya.

Model uji kompetensi guru berbasis bidang studi dalam pengembangannya harus berdasarkan pada karakteristik setiap bidang studi yang ada di sekolah. Sebagai salah satu contoh dalam makalah ini telah dipaparkan model asesmen kompetensi guru seni musik dalam perspektif pelaksanaan pembelajaran berbasis *action learning*. Model uji kompetensi tersebut menekankan pada kinerja (*performance assessment*) dengan materi uji yang bersifat aplikatif. Pengembangannya dilakukan dengan berdasarkan pada kebutuhan kurikulum dan karakteristik bidang studi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brenda, C., Hooley, N., Kruger, T. & Mulraney, R. (1997). The Practice of Beginning Teachers : Identifying Competence through Case Writing in Teacher Education [versi elektronik]. *Australian Journal of Teacher Education* Vol. 22, No.2, 1997. Diunduh 15 Oktober 2009 dari <http://ajte.education.ecu.edu.au/ISSUES/PDF/222/Cherid.pdf>
- Jamalus. (1988). Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik. Debdikbud. Jakarta.
- Moh. Uzer, U. (1995). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Regelski, T.A. (1981). *Teaching General Music: Action Learning for Middle and Secondary Schools*. New York: Schirmer Books.
- Reynolds, C.R, Livingston, R.B, and Wilson, V. (2010). *Measurement and Assessment in Education*. New Jersey: Pearson

Udin, S.S. (2009). *Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: CV Alfabeta.

Zamroni. (2000). *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Bigraf Publising



### **BIODATA PENULIS**

1. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Udi Utomo, M.Si.
2. Golongan, Pangkat dan NIP : IVa, Pembina, 1967 0831 1993 011001
3. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
4. Jabatan Struktural : -
5. Fakultas/Program Studi : FBS / Pendidikan Seni Musik
6. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang
7. Bidang Keahlian : Pendidikan Seni Musik
8. Tempat /Tanggal Lahir : Wonosobo 31 Agustus 1967
9. Jenis Kelamin : Laki-laki
10. Alamat Kantor : Gedung B Kampus Sekaran Gunungpati  
Semarang 50229 Telepon: (024) 8508010
12. Alamat Rumah : Perum. Sekar Gading C 15, Kalisegoro,  
gunungpati, Semarang 50221
13. Telepon/HP : (024) 8507865/081575128488
14. Judul Makalah : Uji Kompetensi Seleksi Guru Berbasis  
Bidang Studi sebagai Instrumen Ganda  
dalam Pengembangan Profesionalitas Guru

# **PENILAIAN KINERJA GURU DAN UJI KONSISTENSI ANTAR PENILAI**

Oleh: Faridl Musyadad

## **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kinerja guru R-SMA-BI (Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional) bersertifikat di Provinsi DIY berdasarkan empat kompetensi guru yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional serta mengetahui konsistensi antar penilai yaitu; Kepala Sekolah, diri sendiri, rekan sejawat, dan siswa terhadap kinerja guru R-SMA-BI bersertifikat di provinsi DIY.

Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan survey deskripsi kuantitatif. Populasi penelitian adalah semua guru R-SMA-BI di provinsi DIY yang telah lulus sertifikasi sampai dengan tahun 2010. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan dua cara yaitu *proportional random sampling* untuk menentukan sampel guru berjumlah 90 orang dan *proportional cluster sampling* untuk menentukan sampel sekolah yaitu di Kota Yogyakarta diwakili oleh SMA N 1, SMA N 3, SMA Muhammadiyah 1 dan SMA Stella Duce 1. Kabupaten Sleman diwakili oleh SMA N 1 Kalasan dan SMA Kolese Debritto sedangkan Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul masing-masing oleh SMA N 1 Bantul, SMA N 2 Wates, dan SMA N 1 Wonosari. Informasi penelitian berasal dari Kepala sekolah 9 orang, guru 90 orang, rekan sejawat 27 orang dimana setiap guru sampel dinilai oleh 3 orang rekan sejawat, serta siswa 2735 orang yang pernah atau sedang diajar oleh guru sampel penelitian dan setiap guru dinilai oleh siswa antara 19–44 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan angket sedangkan analisis data dengan deskripsi kuantitatif yang kemudian diinterpretasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi.16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja guru bersertifikat di Provinsi DIY termasuk kategori baik. Hasil ini berdasarkan kompetensi pedagogik yang termasuk kategori sangat baik, penilaian kinerja guru berdasarkan kompetensi kepribadian termasuk ketegori sangat baik, penilaian kinerja guru berdasarkan kompetensi sosial termasuk ketegori baik, dan penilaian kinerja guru berdasarkan kompetensi profesional termasuk ketegori baik. Hasil analisis konsistensi jawaban dengan interkorelasi antar penilai menunjukkan bahwa *pertama* ada konsistensi penilaian antara Kepala Sekolah dengan diri sendiri, penilaian Kepala Sekolah dengan rekan sejawat, dan penilaian rekan sejawat dengan siswa. *Kedua*, tidak ada konsistensi jawaban antara penilaian diri sendiri dengan rekan sejawat, penilaian diri sendiri dengan siswa dan penilaian Kepala Sekolah dengan siswa.

**Kata kunci: penilaian, kinerja guru, sertifikasi.**

## A. PENDAHULUAN

Era globalisasi ditandai dengan terjadinya persaingan yang ketat dalam bidang manajemen, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). Terbukti tiga hal tersebut selalu masuk dalam indikator berbagai survey internasional tentang pembangunan suatu bangsa. Siapa yang unggul dalam ketiga bidang tersebut maka akan tetap *survive* dan *exist* dalam menjalani kehidupan dan dipandang berhasil dalam membangun suatu bangsa (Lilik Gani, 2007:8). Keunggulan SDM salah satunya dapat dilihat dari kualitas pendidikan asumsinya jika sistem pendidikan yang baik akan melahirkan SDM yang berkualitas.

Untuk menjawab tantangan globalisasi pendidikan tersebut salah satunya pemerintah menyelenggarakan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang menurut buku panduan penyelenggaraan program RSBI (Depdiknas, 2008:1) menerangkan bahwa RSBI adalah Sekolah Standar Nasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan bertaraf Internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Penyelenggaraan RSBI dimaksudkan sebagai salah satu strategi menyiapkan sekolah yang berstandar internasional (SBI) di Indonesia. SBI adalah sekolah nasional yang telah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan dan mengembangkan keunggulan yang mengacu pada peningkatan daya saing yang setara dengan mutu sekolah-sekolah unggul tingkat internasional.

RSBI merupakan level tertinggi atau status sekolah terbaik di Indonesia, oleh karenanya layanan pendidikan di RSBI haruslah yang terbaik pula. Salah satu layanan pendidikan ialah guru, maka standar guru dalam pengelolaan sistem pembelajaran ditingkatkan untuk menuju pada proses pembelajaran yang setara dengan proses pembelajaran pada sekolah unggul bertaraf internasional. Standar guru RSBI adalah sebagai berikut.

1. Semua guru mempunyai kualifikasi akademik S-1 minimal 30% berkualifikasi S-2/S-3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A.
2. Memiliki latar belakang keilmuan sesuai dengan mata pelajaran yang dibina.
3. Memiliki sertifikat profesi pendidik sesuai jenjang satuan pendidikan tempat tugas (nasional dan internasional).

4. Memiliki kesanggupan untuk mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan.
5. Memiliki kinerja tinggi baik secara individu maupun dalam kelompok.
6. Mampu menggunakan media/sumber belajar berbasis TIK dalam pembelajaran.
7. Mampu melaksanakan pembelajaran dalam bahasa Inggris
8. Bahasa Inggris secara efektif dibuktikan dengan skor TOEFL >500 (Depdiknas, 2008:57).

Penelitian World Bank (2009:9) menunjukkan bahwa lebih dari 90% anggaran pendidikan yang ada di kabupaten/kota adalah untuk gaji pegawai yang kebanyakan adalah untuk guru. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh World Bank tersebut (2009:10) merekomendasikan adanya kontrol terhadap performa guru terutama yang telah bersertifikat. Hal senada diungkapkan Goldhaber, Perry, & Anthony (2004:259) bahwa sertifikasi guru di Amerika menelan biaya yang sangat besar, lebih dari \$300 juta dolar sejak program sertifikasi pertamakali digulirkan tahun 1995 oleh *National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS)*.

Hal ini berarti, betapa berat beban dan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satunya ialah program sertifikasi guru. Usaha Pemerintah itu akan sia-sia manakala kinerja guru yang telah disertifikasi (guru profesional) tidak menjadi lebih baik apabila dibandingkan dengan kinerja guru pra sertifikasi. Terlebih lagi guru pada RSBI yang notabene merupakan level tertinggi lembaga pendidikan di Indonesia.

Anton Eknathon menulis (SKH Kedaulatan Rakyat edisi, 8 Juli 2011) ada 25 penyakit yang mengendap dalam diri guru diantaranya *hipertensi* (hiruk pikuk persoalan tentang sertifikasi), *asma* (asal masuk), *asam urat* (asal mengajar kurang akurat), *salesma* (sangat lemah sekali membaca), *stroke* (sering terlambat roepanya kebiasaan), *mual* (mutu amat lemah), *TBC* (Tidak Bisa Computer), *lesu* (lemah sumber), *letih* (lemah teknologi informasi handal) dan banyak lagi. Plesetan-plesetan penyakit di atas dapat dimaknai sebagai kritik terhadap kinerja guru yang tidak menutup kemungkinan memang banyak dijumpai di sekolah dalam menjalankan aktivitas sebagai guru.

Hal ini dapat terjadi apabila pasca sertifikasi, kinerja guru menurun karena merasa tidak dinilai, dan tidak ada sanksi. Oleh karena itulah perlu adanya penilaian kinerja guru yang dalam hal ini dibatasi guru pada sekolah menengah terutama yang telah disertifikasi agar dapat dijadikan sebagai kontrol kinerja guru tersebut yang pada ujungnya peningkatan mutu pendidikan nasional. Dari permasalahan tersebut muncul beberapa pertanyaan; bagaimana kinerja guru profesional selama ini? Bagaimana dan siapa yang menilai kinerja guru? Bagaimana hubungan antara kompetensi dan kinerja guru? Bagaimana menyikapi perbedaan penilaian antar penilai?

## **B. PEMBAHASAN**

Kinerja yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *performance* memiliki berbagai pengertian diantaranya menurut Amstrong (2000:3) “... *it is a record of a person’s accomplishments*”. Kemudian menurut Bernadin (1995:2) “... *the outcomes of work because they provide the strongest linkage to the strategic goals of the organisation and customer satisfaction,*”. Sementara dalam *Oxford Education Dictionary* (2003:317) mendefinisikan “(1) *performance is the accomplishment, execution, carrying out, working out of anything ordered or undertaken. (2) how well or badly you do something or something works*”

Selanjutnya Jones., & Jenkin., & Lord. (2006:3) dalam buku mereka *Developing Teacher Effective Performance* menuliskan bahwa:

*“Performance means both behaviours and result. Behaviours emanate from the performer and transform performance from abstraction to action. Not just the instruments for result, behaviours are also outcomes in their own right – the product of mental and physical effort applied to task – and can be judged apart from result”.*

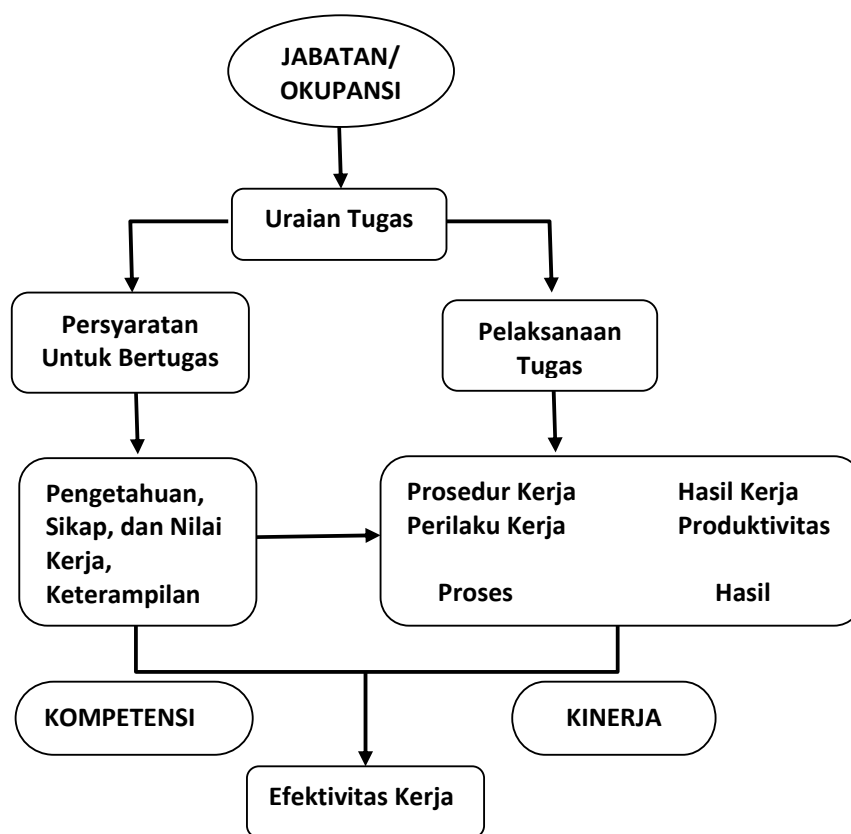
Dalam pengertian ini Jones., & Jenkin., & Lord. (2006:4) mengatakan “*performance leads to the conclusion that an individual’s performance needs to be gauged with both behaviours and outcomes in mind*”. Dalam arti unjuk kerja, kinerja merupakan kumpulan total dari perilaku yang ditunjukkan seorang pekerja, dengan demikian kinerja guru adalah hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dan menjadi tanggung

jawab guru didasarkan kepada kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan dalam rentang waktu tertentu.

Menurut Kane (dalam Berk. ed. 1986: 237) berpendapat bahwa *performance is not a characteristic of a person, like a trait or an ability, but is instead a phenomenon unto it self*, yang artinya bahwa kinerja bukan merupakan karakteristik seseorang, seperti bakat atau kemampuan, tetapi merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kinerja merupakan perwujudan dari kemampuan atau kompetensi dalam bentuk karya nyata. "*Performance on a job function is the record of outcomes achieved in carrying out the job function during aspecified period*". Kinerja dalam kaitannya dengan pekerjaan diartikan sebagai rekaman hasil yang dicapai fungsi jabatan dalam periode waktu tertentu.

Asesmen unjuk kerja banyak digunakan pada dunia usaha dan dunia industri untuk menentukan kecakapan atau ketrampilan seseorang. Assesmen ini digunakan untuk seleksi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, sertifikasi, promosi, dan sebagainya. Pada bidang pendidikan penilaian unjuk kerja juga sudah banyak digunakan terutama untuk bidang studi teknologi, ilmu-ilmu alam, matematika, ekonomi, dan bahasa. Melalui tes ini akan diperoleh informasi tentang apa yang sudah dicapai dan yang belum dicapai. Informasi ini merupakan umpan balik untuk perbaikan strategi pembelajaran. (Djemari Mardapi, 2008: 75-77)

Kinerja tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi, kompetensi merupakan syarat terejawantahkannya kinerja. Kompetensi bersifat kompleks dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan menggambarkan potensi, pengetahuan, dan keterampilan, sikap dan nilai yang dimiliki seseorang yang terkait dengan profesi tertentu terutama berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dalam bentuk kinerja untuk menjalankan profesi tersebut. Potensi kompetensi belum ditunjukkan dalam perilaku nyata tetapi merupakan persyaratan yang diyakini memberi jaminan bahwa individu yang memiliki kompetensi tersebut dapat menunjukkan kinerja yang unggul (Soeprijanto, 2010:22). Hubungan antara kompetensi dan kinerja dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



**Gambar 1.**  
**Hubungan Kompetensi dengan Kinerja**

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat dipahami bahwa pencapaian kinerja itu erat kaitannya dengan kompetensi seseorang. Kinerja merupakan suatu wujud perilaku dari kompetensi seseorang atau organisasi dengan orientasi prestasi. Kinerja merupakan prestasi atau perolehan hasil kerja berdasarkan kriteria dan alat ukur tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria dan alat ukur tersebut merupakan indikator untuk menentukan apakah seseorang memiliki kinerja tinggi, sedang atau rendah yang pada gilirannya berpengaruh terhadap efektivitas kerja.

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. (Kemendiknas, 2010:6)

Penilaian kinerja guru dalam penelitian Faridl Musyadad (2011:45) dinilai oleh empat kelompok yaitu Kepala Sekolah (penilaian dari atasan), diri sendiri (*self assessment*), rekan sejawat (*peer assessment*), dan siswa (*student teaching assessment*) yang dibandingkan dengan kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dengan menyelaraskan indikator dari program sertifikasi baik yang melalui uji portofolio maupun PLPG. Oleh karena penilaian bersumber dari berbagai persepsi maka penilaian kinerja guru ini bersifat interpersepsional antar penilai. Inilah salah satu alasan untuk mengkorelasikan antar penilai dengan menganalisis konsistensi jawaban terhadap item pertanyaan yang sama.

Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan survey deskripsi kuantitatif. Populasi penelitian adalah semua guru R-SMA-BI di provinsi DIY yang telah lulus sertifikasi sampai dengan tahun 2010. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan dua cara yaitu *proportional random sampling* untuk menentukan sampel guru berjumlah 90 orang dan *proportional cluster sampling* untuk menentukan sampel sekolah yaitu di Kota Yogyakarta diwakili oleh SMA N 1, SMA N 3, SMA Muhammadiyah 1 dan SMA Stella Duce 1. Kabupaten Sleman diwakili oleh SMA N 1 Kalasan dan SMA Kolese Debritto sedangkan Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul masing-masing oleh SMA N 1 Bantul, SMA N 2 Wates, dan SMA N 1 Wonosari. Informasi penelitian berasal dari Kepala sekolah 9 orang, guru 90 orang, rekan sejawat 27 orang dimana setiap guru sampel dinilai oleh 3 orang rekan sejawat, serta siswa 2735 orang yang pernah atau sedang diajar oleh guru sampel penelitian dan setiap guru dinilai oleh siswa antara 19–44 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan angket sedangkan analisis data dengan deskripsi kuantitatif yang kemudian diinterpretasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi.16 (Faridl Musyadad, 2011:69).

Penilaian menurut Kepala Sekolah dapat dijadikan sumber informasi kinerja guru sebagai atasan dari guru tersebut seperti yang ditulis oleh Jacob & Lefgren (2008:101) “*that principals can generally identify teachers who produce the largest and smallest standardized achievement gains*”. Sehingga



dalam konteks penelitian ini asumsinya kepala sekolah dapat menilai empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) yang ada pada guru.

Informasi kinerja selanjutnya dari guru bersertifikat itu sendiri sebagai penilaian diri dan refleksi diri. Oleh karenanya penilaian menurut diri sendiri (*self-evaluation*) menjadi penting, sebagaimana ditulis oleh Airasian & Gullickson (dalam Stronge, ed. 2006:186) “*teacher self-evaluation is a process in which teachers make judgements about the adequacy and effectiveness of their own knowledge, performance, beliefs, and effect for the purpose of self-improvement*”. Dalam pendekatan kualitatif Vasconcelos (2011:415) menulis bahwa dengan *autoethnography* dirinya lebih dapat mengenali jati diri sebagai guru dan dapat dijadikan tolok ukur untuk mengembangkan kemampuan terutama kompetensi pedagogik.

Di sekolah guru tidak hanya bertemu dengan kepala sekolah tetapi juga dengan rekan sejawat sesama guru. Untuk lebih detil dan akurat informasi kinerja dalam penelitian ini bersumber dari rekan sejawat guru bersertifikat terutama pada kompetensi kepribadian dan sosial dimana mereka sering bergaul satu dengan lainnya di sekolah dalam melakukan tugas sehari-hari. Oleh karenanya informasi dari rekan sejawat patut dipertimbangkan seperti yang diungkapkan Stronge (2006:141) “*feedback from peers can offer valuable and valid insight into teacher performance*”.

Terakhir informasi kinerja dalam penelitian ini bersumber pada siswa yang sedang atau pernah diajar oleh guru bersertifikat. Penilaian menurut siswa ini sangat penting seperti yang ditulis oleh Gallagher (2000:140) “*student evaluations of teaching are central in the teaching evaluation process*”. Bahkan Nugroho Widiyanto (dalam Kompas edisi 7 Mei 2011) mengungkapkan bahwa satu-satunya “pengawas setia” kinerja guru adalah siswa yang setiap hari merasakan bagaimana guru tumbuh dalam kemampuan mengajar.

Dalam penelitian menggunakan empat skala penilaian dengan skor minimum 1 dan maksimum 4, kemudian skor perolehan sesuai dengan butir indikator dibagi skor harapan selanjutnya dikalikan 100% didapat kriteria

pencapaian 0 – 43,75% = belum baik, 43,76 – 62,50% = kurang baik, 62,51 – 81,25% = baik, dan 81,26 – 100% sangat baik. Berikut hasil penelitian di lapangan penilaian kinerja guru menurut masing-masing penilai yakni Kepala Sekolah, diri sendiri, rekan sejawat, dan siswa.

**Tabel 1.**  
**Rekapitulasi Penilaian Menurut Masing-masing Penilai**

Aspek	Penilai	Skor Observasi	Skor Harapan	%	Kategori
Pedagogik	Kasek	5064	5760	87.92	<b>Sangat Baik</b>
	Diri Sendiri	4904	5760	85.14	<b>Sangat Baik</b>
	Sejawat	4772	5760	82.85	<b>Sangat Baik</b>
	Siswa	5246	7200	72.86	<b>Baik</b>
	<b>Gabungan</b>	<b>19986</b>	<b>24480</b>	<b>81.64</b>	<b>Sangat Baik</b>
Kepribadian	Kasek	5445	6120	88.97	<b>Sangat Baik</b>
	Diri Sendiri	5466	6120	89.31	<b>Sangat Baik</b>
	Sejawat	5025	6120	82.11	<b>Sangat Baik</b>
	Siswa	1083	1440	75.21	<b>Baik</b>
	<b>Gabungan</b>	<b>17019</b>	<b>19800</b>	<b>85.95</b>	<b>Sangat Baik</b>
Sosial	Kasek	3969	5040	78.75	<b>Baik</b>
	Diri Sendiri	4167	5040	82.68	<b>Sangat Baik</b>
	Sejawat	3875	5040	76.88	<b>Baik</b>
	Siswa	531	720	73.75	<b>Baik</b>
	<b>Gabungan</b>	<b>12542</b>	<b>15840</b>	<b>79.18</b>	<b>Baik</b>
Profesional	Kasek	4222	5760	73.30	<b>Baik</b>
	Diri Sendiri	4289	5760	74.46	<b>Baik</b>
	Sejawat	4126	5760	71.63	<b>Baik</b>
	Siswa	822	1080	76.11	<b>Baik</b>
	<b>Gabungan</b>	<b>13459</b>	<b>18360</b>	<b>73.31</b>	<b>Baik</b>
Kinerja Guru	Kasek	18700	22680	82.45	<b>Sangat Baik</b>
	Diri Sendiri	18826	22680	83.01	<b>Sangat Baik</b>
	Sejawat	17798	22680	78.47	<b>Baik</b>
	Siswa	7682	10440	73.58	<b>Baik</b>
	<b>Gabungan</b>	<b>63006</b>	<b>78480</b>	<b>80.28</b>	<b>Baik</b>

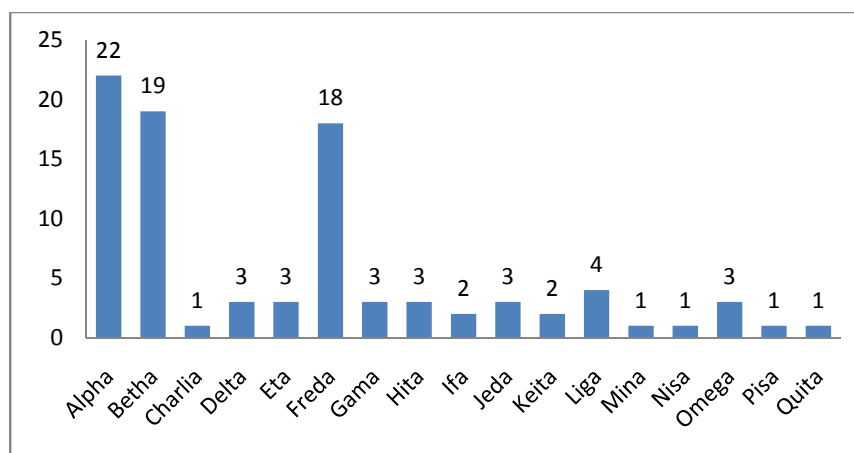
Temuan menarik ialah ada tiga penilaian yang sama yaitu *pertama*, pada indikator kompetensi sosial mengkomunikasikan hasil inovasi pembelajaran dimana menurut Kepala Sekolah 45,83%; menurut diri sendiri 64,72%; menurut rekan sejawat 59,17%; yang bermakna semuanya berada pada kategori **kurang baik**. *Kedua*, pada indikator kompetensi profesional penguasaan langkah penelitian yang diwujudkan minimal dalam penelitian

tindakan kelas dimana menurut Kepala Sekolah 42,50%; menurut diri sendiri 41,94%; menurut rekan sejawat 43,72%; yang bermakna semuanya berada pada kategori terendah yaitu **belum baik**. *Ketiga*, pada indikator kompetensi profesional mengikuti forum ilmiah dimana menurut Kepala Sekolah 40,28%; menurut diri sendiri; 43,89%; menurut rekan sejawat 43,61%; yang bermakna semuanya berada pada kategori **belum baik**.

Sementara itu terjadinya perbedaan penilaian antar penilai terhadap tingkat kinerja guru menuntut interpretasi lebih lanjut. Dalam menyikapi perbedaan penilaian ini ditempuh dua cara yaitu; *pertama*, menganalisis kemungkinan kombinasi yang terjadi dari hasil penilaian antar penilai terhadap tingkat kinerja guru. Hasil analisis penilaian empat kelompok Kepala Sekolah (Kasek), Penilaian Diri Sendiri (PDS), penilaian rekan (Sejawat), dan Siswa dicari kemungkinan kombinasinya kemudian dihitung frekuensinya untuk melihat berapa banyak yang memiliki kombinasi sama dan selanjutnya dipersentasekan. Berdasarkan pengolahan data diperoleh 17 kemungkinan kombinasi yang disajikan dalam Tabel 1. dan Gambar 2. berikut.

**Tabel 2.**  
**Kombinasi Penilaian Kinerja oleh masing-masing Penilai**

NO.	Kinerja Guru					Frekuensi	Persen (%)
	Kombinasi	Kasek	PDS	Sejawat	Siswa		
1	Alpha (A)	SB	SB	SB	SB	22	24.44
2	Betha (B)	SB	SB	SB	B	19	21.11
3	Charlia (C)	B	SB	SB	SB	1	1.11
4	Delta (D)	SB	SB	B	SB	3	3.33
5	Etha (E)	SB	B	SB	SB	3	3.33
6	Freda (F)	SB	SB	B	B	18	20.00
7	Gama (G)	B	SB	SB	B	3	3.33
8	Hita (H)	SB	B	SB	B	3	3.33
9	Ifa (I)	B	B	SB	SB	2	2.22
10	Jeda (J)	B	SB	B	SB	3	3.33
11	Keita (K)	B	B	SB	B	2	2.22
12	Liga (L)	B	B	B	B	4	4.44
13	Mina (M)	B	B	B	SB	1	1.11
14	Nisa (N)	B	SB	B	B	1	1.11
15	Omega (O)	SB	SB	B	KB	3	3.33
16	Pisa (P)	B	B	B	KB	1	1.11
17	Quita (Q)	SB	B	B	KB	1	1.11
Keterangan: SB=Sangat Baik, B=Baik, KB=Kurang Baik.						90	100%



**Gambar 2.**  
**Kombinasi Penilaian Kinerja oleh masing-masing Penilai**

Berdasarkan Tabel 2 dan gambar 2 di atas terlihat bahwa kombinasi *alpha* merupakan kombinasi terbanyak diikuti oleh kombinasi *betha* dan *freda* masing-masing sebesar 24,44%; 21,11%; dan 20,00%.

*Kedua*, menganalisis konsistensi jawaban item yang sama antar penilai terhadap tingkat kinerja guru dengan menggunakan analisis interkorelasi. Konsistensi antar penilai dalam menilai kinerja guru dapat diketahui dengan mengkorelasikan antar penilai. Koefisien korelasi akan menghasilkan koefisien determinasi bila dikuadratkan. Persentase kesesuaian antar penilai dapat diperoleh dengan merubah koefisien determinasi dalam bentuk persen, berikut hasil interkorelasi antar penilai yakni Kepala Sekolah (Kasek), Penilaian Diri Sendiri (PDS), Rekan Sejawat (Sejawat) dan siswa pada item yang sama disajikan dalam Tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Konsistensi jawaban antar penilai**

No.	Penilai	Korelasi (r)	P-value	Determinasi (r <sup>2</sup> )	Kesesuaian antar Penilai
1	Kasek – PDS	0.471	0.000	0.222	22.2%
2	Kasek – Sejawat	0.253	0.008	0.064	6.4%
3	Kasek – Siswa	-0.005	0.480	0.000	0.0%
4	PDS – Sejawat	0.153	0.075	0.023	2.3%
5	PDS – Siswa	0.039	0.356	0.002	0.2%
6	Sejawat – Siswa	0.359	0.000	0.129	12.9%

Berdasarkan tabel 3. di atas, dari empat penilai yang menilai kinerja guru menghasilkan enam hubungan antar penilai sehingga diperoleh enam koefisien

korelasi. Hasil yang diperoleh adalah tiga hubungan konsisten dan tiga hubungan tidak konsisten. Tiga hubungan yang **ada konsistensi** hasil penilaian kinerja guru ialah penilai Kepala Sekolah dengan penilaian diri sendiri sebesar 22.2% dan Kepala Sekolah dengan Rekan Sejawat sebesar 6.4% serta penilaian kinerja guru oleh rekan sejawat dengan Siswa sebesar 12.9%. Konsistensi dalam hal ini berarti ada kesamaan sudut pandang atau persepsi dalam menentukan tingkat baik tidaknya kinerja guru yang mereka nilai. Sedangkan tiga hubungan yang **tidak ada konsistensi** ialah penilaian diri sendiri dengan rekan sejawat sebesar 2,3% dan penilaian diri sendiri dengan penilaian siswa sebesar 0,2% serta penilaian oleh Kepala Sekolah dengan penilaian Siswa sebesar 0,0%. Hasil penilaian tidak ada konsistensi ini karena memiliki persentase kesesuaian antar penilai pada tingkat yang lemah sekali yaitu kurang dari 5% (0,05).

### C. KESIMPULAN

Penilaian kinerja guru tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi guru yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dari hasil pembahasan penilaian kinerja guru tingkat menengah dapat diperoleh melalui interpersepsional civitas akademik sekolah yaitu Kepala Sekolah, Guru (diri sendiri), Rekan Sejawat, dan siswa. Guru yang dinilai adalah guru RSBI yang merupakan level tertinggi di Indonesia ditemukan tiga indikator yang perlu diperhatikan untuk kemudian ditingkatkan yaitu; mengkomunikasikan hasil inovasi pembelajaran, penguasaan langkah penelitian, dan partisipasi dalam forum ilmiah. Selanjutnya dari hasil uji konsistensi penilaian menurut Kepala sekolah dan diri sendiri dapat dijadikan sebagai evaluator internal sedangkan rekan sejawat dan siswa dapat dijadikan sebagai evaluator eksternal. Dengan adanya penggabungan evaluator ini diharapkan dapat menyerap informasi yang lebih komprehensif dan pada gilirannya dapat mengambil keputusan yang tepat bagi *stakeholder* pendidikan itu sendiri dalam perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, M. (2000). *Performance Management*. London: Kogan Page.
- Anton Eknathon. (8 Juli 2011). Sistem PLPG, peningkatan mutu pendidikan. Kedaulatan Rakyat. Hlm. 6.
- Berk, Ronald A. (1986). *Performance assessment*. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press.
- Bernadin, H. K., Kane, J. S., Ross, S., Spina, J.D. and Johnson, D. L. (1995) 'Performance appraisal design, development and implementation', in G. R. Ferris, S. D. Rosen and D. J. Barnum (eds), *Handbook of Human Resource Management*. Cambridge, MA: Blackwell
- Depdiknas. *Ditjen Dikti. (2008). Teacher Certification in Indonesia: A Strategy for Teacher Quality Improvement.*
- Depdiknas. *Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. (2008) Panduan Penyelenggaraan Program Rintisan SMA Bertaraf Internasional (R-SMA-BI).*
- Djemari Mardapi, (2008). *Teknik penyusunan instrumen tes dan non tes*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Offset.
- Faridl Musyadad. (2011). *Penilaian kinerja guru R-SMA-BI Pasca sertifikasi di provinsi DIY*. Tesis tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gallagher, Timothy J. (2000). Embracing student evaluations of teaching: a case study. *Teaching Sociology. Proquest Sociology Journals*. 8, 140-151.
- Goldhaber, Dan., Perry, David., & Anthony, Emily. (2004). The National Board for Profesional Teaching Standard (NBPTS) process: Who applies and what factors are associated. *Journal Educational Evaluation and Policy Analysis*, 26, 259-280
- Jacob, Brian A., & Lefgren, Lars. (2008). Can principals identify effective teachers? evidence on subjective performance evaluation in education. *Journal of Labor Economics*, 26, 1-13.
- Jones, Jeff., Jenkin, Mazda., & Lord, Sue. (2006). *Developing effective teacher performance*. California: SAGE Publishing Company.
- Kemdiknas. *Dirjend Dikti. (2010). Buku 2. Petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan..*
- Lilik Gani. (2007). Paradigma pendidikan di era global. *Jurnal Teknodik Depdiknas*, 9, 2-22.
- Nugroho Widiyanto. (7 Mei 2011). Guru bersertifikasi, di mana dikau? *Kompas*, hlm, 6.
- Soeprijanto. (2010). *Pengukuran kinerja guru praktik kejuruan. konsep dan teknik pengembangan instrumen*. Jakarta: Penerbit CV Tursina.
- Stronge, James H (2006). *Evaluation teaching. a guide to current thinking and best practice. (2<sup>nd</sup> edition)*. California: Corwin Press.
- Vasconcelos, Erika França de Souza. (2011). "I can see you": an autoethnography of my teacher-student self. *Proquest. The Qualitative Report* 16, 415-440. diunduh pada tanggal 6 Juni 2011 dari <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR16-2/vasconcelos.pdf>.

World Bank. (2009). *Investing in Indonesia's education at the district level*. Kerjasama Depdiknas Indonesia, Euro Foundations, Kedutaan Belanda, dan The World Bank.

## BIODATA

---

Nama : FARIDL MUSYADAD  
Tempat & Tgl. Lahir : Bandung, 31 Juli 1981  
Mahasiswa Jurusan : S2 PEP Program Pascasarjana UNY  
Pekerjaan : Dosen  
Instansi : STAI Fatahillah  
Alamat Rumah : Komp. BBVET Jl. Raya Jogja–Wates Km. 27 Giripeni  
Wates Kulon Progo Yogyakarta  
Alamat Kantor : Kampus STAI Fatahillah Jl. Raya Puspiptek No.315  
(Samping Masjid Agung al-Mujahidin) Serpong  
Tangerang Selatan Banten  
Telepon : 081 579 35617  
E-mail : faridl.musyadad@gmail.com

**Model Butir Bersama pada Ujian Akhir Daerah  
untuk Memantau Kualitas Pendidikan di Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi  
Oleh: Heri Retnawati**

**Pendidikan Matematika FMIPA UNY**  
[retnawati\\_heriuny@yahoo.co.id](mailto:retnawati_heriuny@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi, tiap daerah melaksanakan ujian akhir sendiri. Hal ini mengakibatkan pemerintah sulit memantau keberhasilan pendidikan tiap sekolah dan tiap daerah, karena perangkat tes yang digunakan untuk ujian akhir berbeda-beda, meskipun mengukur Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sama. Perangkat tes yang berbeda-beda ini belum tentu mempunyai tingkat kesulitan yang hampir sama dan cara penskorannya yang sama, yang menyebabkan interpretasi yang keliru tentang kualitas keberhasilan pendidikan, terlebih lagi jika dibandingkan antar daerah. Untuk memantau keberhasilan pendidikan, dengan tetap memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur pelaksanaan ujiannya sendiri dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki daerah, dapat digunakan suatu model ujian dengan menggunakan butir bersama (*common item*). Pada tulisan ini disajikan hasil penelitian terkait dengan mengembangkan model ujian akhir daerah, dengan butir bersama untuk ujian akhir daerah di era otonomi daerah dan desentralisasi.

Kata Kunci: model ujian akhir, model tanpa butir bersama (*equating*)

**Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah dan desentralisasi yang diterapkan di daerah-daerah membuka babak baru dalam sistem pemerintahan di wilayah-wilayah di Indonesia. Sistem ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan adanya otonomi dan desentralisasi ini, daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua hal ini memberikan pengaruh yang besar di berbagai bidang, termasuk diantaranya bidang pendidikan.

Ujian Nasional (UN) yang merupakan kebijakan nasional, baik sebelumnya bernama EBTANAS, UAN selama ini digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan, baik pada level siswa, sekolah, ataupun daerah. UN ini dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar, sampai Sekolah Menengah Umum. Ujian ini memiliki peran sentral yang dilaksanakan di akhir pembelajaran di suatu jenjang pendidikan.

Untuk memantau kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di tiap sekolah di suatu daerah di akhir semester, untuk setiap tingkat, akan terlalu lama menunggu hasil



UN di akhir tahun. Lagipula, dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi, tiap daerah melaksanakan ujian akhir sendiri. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah sulit memantau hasil pembelajaran tiap sekolah dan tiap daerah. Hal ini disebabkan karena dengan otonomi daerah, perangkat tes yang digunakan untuk ujian akhir berbeda-beda, meskipun mengukur Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sama. Perangkat tes yang berbeda-beda ini belum tentu mempunyai tingkat kesulitan yang hampir sama dan cara penskorannya yang sama. Cara penskoran antar sekolah atau antar daerah seperti ini akan menyebabkan interpretasi yang keliru tentang kualitas hasil proses pendidikan, terlebih lagi jika dibandingkan. Terkait dengan hal ini, diperlukan suatu pengembangan model ujian akhir dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan, dengan tetap memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur pelaksanaan ujiannya sendiri dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. Pada tulisan ini disajikan hasil penelitian mengenai pengembangan model ujian akhir di era otonomi dan desentralisasi.

### **Kajian Pustaka**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah daerah telah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu di daerahnya masing-masing di seluruh Indonesia. Hal ini tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999. Kewenangan penuh tersebut dirumuskan dalam pasal 7 ayat 1; "Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, keadilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain." Keseluruhan bidang yang dicakup dalam otonomi daerah diantaranya bidang pendidikan.

Pemberian dan berlakunya otonomi pendidikan di daerah memiliki nilai strategis bagi daerah untuk berkompetisi dalam upaya membangun dan memajukan daerah-daerah di seluruh Indonesia, terutama yang berkaitan langsung dengan sumber daya manusia dan alamnya dalam mendobrak kebekuan dan stagnasi yang dialami dan melingkupi masyarakat selama ini. Begitu juga dengan adanya desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah baik tingkat kabupaten atau pun kotamadya dapat memulai peranannya sebagai basis pengelolaan pendidikan dasar. Di tingkat propinsi dan kabupaten perlu diadakan lembaga nonstruktural yang melibatkan masyarakat luas untuk memberikan pertimbangan pendidikan dan kebudayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerahny.

Otonomi dalam bidang pendidikan ini berimbas pada pelaksanaan evaluasi dalam rangka memantau kualitas pendidikan di daerah-daerah. Meskipun dilaksanakan oleh daerah, evaluasi dalam pendidikan dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Menurut Gronlund (1990: 8), evaluasi dalam pendidikan memiliki tujuan : a) untuk memberikan klarifikasi tentang sifat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, b) memberikan informasi tentang ketercapaian tujuan jangka pendek yang telah dilaksanakan, c) memberikan masukan untuk kemajuan pembelajaran, d) memberikan informasi tentang kesulitan dalam pembelajaran dan untuk memilih pengalaman pembelajaran di masa yang akan datang. Informasi evaluasi dapat digunakan untuk membantu memutuskan a) kesesuaian dan keberlangsungan dari tujuan pembelajaran, b) kegunaan materi pembelajaran, dan c) untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas dari strategi pengajaran (metode dan teknik belajar-mengajar) yang digunakan.

Evaluasi memiliki fungsi untuk membantu guru dalam hal-hal : a) penempatan siswa dalam kelompok-kelompok tertentu, b) perbaikan metode mengajar, c) mengetahui kesiapan siswa (sikap, mental, material), d) memberikan bimbingan dan seleksi dalam rangka menentukan jenis jurusan maupun kenaikan tingkat (Gronlund, 1990: 16).

Dalam evaluasi pendidikan, diperlukan alat (instrumen). Alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi, salah satunya adalah tes. Tes ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang aspek psikologis tertentu. Menurut Cronbach, tes merupakan suatu prosedur sistematis untuk mengamati dan menggambarkan satu atau lebih karakteristik seseorang dengan suatu skala numerik atau sistem kategorik. Berdasarkan hal ini, tes memberikan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Untuk mengetahui kualitas tes yang digunakan, dapat digunakan dua pendekatan teori, yakni teori tes klasik dan teori respons butir. Teori tes klasik atau disebut teori tes skor murni klasik (Allen & Yen, 1979: 57) didasarkan pada suatu model aditif, yakni skor amatan merupakan penjumlahan dari skor sebenarnya dan skor kesalahan pengukuran. Parameter yang digunakan untuk mengetahui kualitas tes yakni indeks kesukaran butir, daya pembeda, reliabilitas, dan kesalahan pengukuran. **Kriteria lain yang digunakan yaitu validitas**, yang dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu: (1) validitas kriteria (*criterion-related*), (2) validitas isi, dan (3) validitas konstruk (Nunnally, 1978, Allen & Yen, 1979, Fernandes, 1984, Woolfolk & McCane, 1984, Kerlinger, 1986, dan Lawrence, 1994). Keberadaan validitas dari suatu perangkat tes ini dapat diketahui melalui analisis isi tes dan analisis empiris dari skor tes data respons butir (Lissitz & Samuelsen, 2007).

Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menganalisis tes selain menggunakan teori tes klasik yakni pendekatan teori respons butir. Pendekatan ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan pendekatan klasik. Pendekatan teori tes klasik memiliki beberapa kelemahan. Keterbatasan pada teori tes klasik yakni adanya sifat *group dependent* dan *item dependent* (Hambleton, Swaminathan, & Rogers, 1991: 2-5), juga indeks daya pembeda, koefisien validitas, koefisien reliabilitas skor tes juga tergantung kepada peserta tes yang mengerjakan tes tersebut.

Menurut Hambleton, Swaminathan, & Rogers (1991: 2-5), pemikiran teori respons butir (*Item Response Theory*) didasarkan pada dua buah postulat, yaitu : (a) prestasi subjek pada suatu butir soal dapat diprediksikan dengan seperangkat faktor yang disebut kemampuan laten (*latent traits*), dan (b) hubungan antara prestasi subjek pada suatu butir dan perangkat kemampuan yang mendasarinya sesuai dengan grafik fungsi naik monoton tertentu, yang disebut kurva karakteristik butir (*item characteristic curve, ICC*). Kurva karakteristik butir ini menggambarkan bahwa semakin tinggi level kemampuan peserta tes, semakin meningkat pula peluang menjawab benar suatu butir.

Pada teori respons butir, digunakan pendekatan probabilistik untuk menyatakan hubungan antara kemampuan peserta dengan harapan menjawab benar. Pada teori ini, model distribusi yang digunakan yakni distribusi logistik, bukan distribusi normal. Hal ini disebabkan karena kurva normal berbentuk lonceng (Walpole, et al., 2002), sehingga kurva tidak monoton naik. Hal ini menyebabkan untuk suatu kemampuan yang lebih tinggi dari rerata, nilai probabilitasnya justru lebih rendah dibandingkan nilai probabilitas rerata kemampuan. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip pengukuran, bahwa peserta dengan kemampuan tinggi mempunyai peluang yang tinggi pula untuk menjawab benar suatu instrumen. Pada penghitungan luas daerah di bawah kurva, dapat dilakukan dengan integrasi, karena merupakan fungsi kerapatan peluang yang kontinu. Dengan adanya variabel kemampuan yang dikuadratkan pada fungsi kerapatan peluang normal, menyebabkan integrasi menjadi lebih rumit. Hal inilah yang menyebabkan digunakannya model logistik pada teori respons butir.

Ada tiga model logistik dalam teori respons butir, yaitu model logistik satu parameter, model logistik dua parameter, dan model logistik tiga parameter. Perbedaan dari ketiga model tersebut terletak pada banyaknya parameter yang digunakan dalam menggambarkan karakteristik butir dalam model yang digunakan. Parameter-parameter yang digunakan tersebut adalah indeks kesukaran, indeks daya beda butir dan indeks tebakan semu (*pseudoguessing*).

Pada pelaksanaan tes, bisa terjadi di suatu wilayah menggunakan perangkat tes yang berbeda dan skornya juga berbeda. Skor-skor pada asesmen pendidikan tersebut

dapat disetarakan secara statistik, dari satu unit asesmen ke unit asesmen yang lain, atau keduanya dapat dinyatakan dalam sebuah skala skor yang biasa. Cara ini disebut dengan menghubungkan dua tes (*linking*). Pada artikel ini, istilah *linking* merujuk pada sebuah hubungan antar skor dari dua tes. Seringkali dua tes yang dikaitkan ini mengukur konstruk yang sama, namun untuk kepentingan tertentu, mengaitkan dua tes yang berbeda konstruksinya.

Istilah *concordance* merujuk pada mengaitkan skor-skor pada asesmen yang mengukur konstruk yang sama dan skor-skor ini dihubungkan untuk suatu kepentingan. Sebagai contoh, calon mahasiswa dapat menempuh tes SAT I atau tes ACT. Sebuah perguruan tinggi mewajibkan siswa memiliki skor komposit 1200 untuk Verbal dan Matematika (Kim, 2000). Jika perguruan tinggi menerima siswa yang menempuh ACT, perguruan tinggi perlu mengetahui skor komposit ACT yang sebanding dengan skor minimum SAT I.

Flanagan (1971) menggunakan istilah *comparability* untuk menunjukkan tes-tes yang terskalakan yang memiliki distribusi skor yang sama dalam populasi nyata peserta-peserta tes. Lebih jauh, tes-tes yang skor-skornya dapat dibandingkan jika dalam pemakaian, tes-tes tersebut dapat secara komplet saling dipertukarkan (*interchangeable*) dalam penggunaannya. Keadaan saling dipertukarkan ini terjadi jika tes-tes tersebut memiliki akurasi yang sama dan didesain sebagai bentuk-bentuk yang ekuivalen (*equivalent forms*). Dia menekankan pada skor bentuk multipel, tes yang dapat saling dipertukarkan jika terkonstruksi sama dan skala skor harus digunakan untuk menyatakan skor-skornya. Mengenai hubungan *comparability* dengan reliabilitas, Flanagan menyatakan bahwa untuk menetapkan skor-skor yang dapat dibandingkan, distribusi skor sebenarnya (*true score*) seharusnya sama pada pengukuran-pengukuran dari tes-tes tersebut. Jika reliabilitas pengukuran sama untuk kedua tes, hasil yang sama akan diperoleh jika distribusi dari nilai yang ada diperbandingkan. Pada tes yang berbeda, tidak perlu memberikan skor-skor yang terbandingkan. Hal ini disebabkan karena regresi pada kedua tes tidak simetri, dan ini mengakibatkan kekurangcukupan pada interpretasi.

Untuk menghubungkan skor-skor tes bentuk multiple yang memiliki bentuk-bentuk lain yang dibangun dengan spesifikasi yang sama, Angoff (1971) menggunakan istilah penyetaraan (*equiting*). Sedangkan istilah yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara dua tes yang memiliki konstruk yang sama tetapi berbeda dalam tingkat kesulitan dan reliabilitas, digunakan istilah kalibrasi (*calibration*) dan *comparability* digunakan untuk menyatakan hubungan tes-tes yang secara konstruk berbeda. *Comparability* merupakan keadaan ketika skor dari tes-tes yang berbeda diskalakan to memiliki sebuah distribusi biasa untuk menilai kekuatan dan kelemahan peserta tes

terhadap suatu grup yang dijadikan acuan. Ketika peserta tes memilih untuk menempuh suatu tes, tingkat kemampuannya akan berbeda jika menempuh tes yang lain. Skor-skor tes yang dibandingkan menjadi tidak unik lagi. Ketidak unikan ini disebabkan oleh karena pada kenyataannya alat-alat ukur memiliki fungsi yang berbeda, sehingga tidak ada konversi tabel tunggal yang dapat diterapkan untuk semua grup. Menurut Angoff, kegunaan tabel skor yang dapat dibandingkan tergantung jawaban dari dua pertanyaan bagaimanakah kesamaan dari tes-tes untuk yang skornya dapat diperbandingkan dikembangkan dan bagaimanakah kesesuaian dari grup pada tabel skor yang dapat diperbandingkan didasarkan pada satu pertimbangan person atau grup tujuan tabel tersebut digunakan.

Mislevy (1992) dan Linn (1993) mengembangkan kerangka kerja untuk menghubungkan skor tes-tes meliputi empat tipe hubungan statistik, yakni penyetaraan (*equiting*), kaliberasi (*calibration*), moderasi statistik (*statistical moderation*) dan prediksi (*projection/prediction*). Seperti halnya Angoff, Mislevy/Linn menggunakan istilah *equiting* untuk menghubungkan skor-skor yang bentuk-bentuknya berbeda pada asesmen-asesmen. Kaliberasi digunakan untuk menghubungkan skor-skor tes yang mengukur konstruk yang sama tetapi berbeda dalam reliabilitas atau tingkat kesulitannya. Proyeksi dan moderasi statistik digunakan untuk menghubungkan tes-tes yang mengukur konstruk yang berbeda, menggunakan metode regresi. Pada istilah moderasi statistika, yang istilah ini juga digunakan oleh Kevees (1988), skor setiap tes dihubungkan dengan variabel ketiga yang disebut sebagai moderator. Grup-grup yang tesnya akan dihubungkan menempuh tes lain, yang merupakan variabel moderator. Mislevy dan Linn tidak membahas lebih lanjut hal-hal yang membedakan situasi yang mana yang mengukur konstruk yang sama dari situasi yang mengukur konstruk yang berbeda.

Freuer (Kolen, 2004) menggunakan istilah dan definisi yang sama dari istilahnya dan konsisten, seperti halnya yang dinyatakan oleh Mislevy dan Linn, yakni penyetaraan, kaliberasi, moderasi dan proyeksi. Freuer menambahkan, ada 5 faktor-faktor untuk dipertimbangkan tentang skor-skor yang akan dihubungkan, yakni :

- a. kesamaan isi, tingkat kesulitan dan format butir.
- b. dapat diperbandingkannya kesalahan pengukuran yang terkait dengan skor-skor,
- c. kondisi administrasi tes,
- d. kegunaan dibuatnya tes dan konsekuensinya,
- e. akurasi dan stabilitas dari penyetaraan, termasuk stabilitas atas subgrup dan peserta ujian-ujianya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Borg, W.R., 1981). Pada tulisan ini disajikan hasil *base line study*, untuk memotret *need assesment* terkait dengan ujian akhir daerah dan merumuskan model ujiannya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Data yang terkumpul secara serempak dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam ujian yang dilaksanakan di daerah otonomi dan pelaksanaan ujiannya digunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Demikian pula halnya untuk *need assesment*, digunakan analisis data secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Model awal dikembangkan setelah dilakukan studi pustaka.

## **HASIL PENELITIAN**

### ***Need Assesment yang telah dilakukan***

Untuk menjangring pendapat mengenai model ujian akhir yang ada sekarang ini khususnya di DI Yogyakarta, selain menelaah pustaka yang terkait, dilaksanakan pula melalui wawancara. Wawancara dilaksanakan mulai bulan Agustus 2010 sampai Oktober 2010. Responden dari wawancara penelitian ini yaitu:

- a. Dinas pendidikan provinsi DI Yogyakarta
- b. Bagian SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul
- c. Ketua MKKS Sleman
- d. Anggota MKKS Gunungkidul
- e. Pengurus MGMP Gunungkidul
- f. Guru Matematika SMP di Sleman
- g. Guru Matematika SMP di Gunungkidul
- h. Guru IPA di Gunungkidul
- i. Guru Matematika di Bantul

Pada wawancara ini dijangring pendapat peserta mengenai model ujian akhir semester yang ada di DI Yogyakarta, tim pengembang tes untuk ujian akhir di masing-masing kabupaten, pengembangan bank soal di tiap kabupaten, masalah penskoran, analisis hasil ujian, dan pemanfaatan hasil ujian. Hasil wawancara disajikan sebagai berikut.

Ujian akhir semester di DI Yogyakarta dilaksanakan di setiap sekolah dengan dikoordinir oleh MKKS di tiap kabupaten . Pengembangan perangkat di masing-masing kabupaten merupakan tanggungjawab MKKS. Pada pengembangan tesnya, telah dilakukan melalui telaah standar kompetensi dan kompetensi dasar, pengembangan kisi-kisi, pengembangan butir berdasarkan kisi-kisi, dan telah dilakukan validasi teman

sejawat (*sanctioning*) termasuk validasi kunci jawaban. Namun soal-soal yang digunakan di sini belum melalui ujicoba, baik keterbacaan maupun empiris, sehingga otomatis butir-butir soal yang digunakan tanpa melalui pengembangan bank soal terlebih dahulu. Pengembangan bank soal ini merupakan permasalahan juga di berbagai kabupaten. Selama ini, belum ada bank soal yang menyimpan soal-soal yang siap pakai untuk dimanfaatkan oleh MKKS di DI Yogyakarta, baik di kota Yogyakarta maupun di 4 kabupaten lainnya. Selama ini belum ada usaha untuk mengembangkan bank soal. Permasalahan karakteristik perangkat tes juga menjadi kendala. Selama ini MKKS tiap kabupaten/kota menyusun kisi-kisi berdasarkan standar isi yang sama. Namun karena tingkat kesulitan tiap perangkat lain, pemerintah daerah tidak bisa menyamaratakan ataupun hasil kualitas antar kabupaten/kota dan juga antar sekolah untuk melakukan evaluasi. Hasil evaluasi pembelajaran ini akan menjadi berkurang kebermanfaatannya.

Butir-butir bersama antar perangkat ini belum ada pada pelaksanaan ujian di DI Yogyakarta, meskipun wakil dari dinas pendidikan provinsi mengakui kebermanfaatannya, namun belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya fasilitas untuk membuat butir bersama tersebut, yang utama dari sisi dukungan dana dan kebijakan dari dinas. Hasil ujian ini juga belum dimanfaatkan secara optimal, misalnya untuk menentukan kesulitan yang dialami dalam pembelajaran untuk masukan dan perbaikan pembelajaran. Terkait dengan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa standar isi (bahan yang dipelajari) yang diujikan tiap daerah sama, namun belum ada model ujian yang mengukur kemampuan siswa pada skala yang sama sehingga hasilnya bisa dibandingkan dalam rangka pemetaan pendidikan.

### **Perumusan Model**

Dengan memperhatikan kajian pustaka dan hasil wawancara pada *need assessment*, salah satu model ujian yang dapat dilaksanakan yaitu model ujian dengan butir bersama (*equating*). Pada model ini dinas pendidikan tiap provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan ujian pada tahap pengembangan kisi-kisi dan memfasilitasi pembuatan butir bersama. Meskipun pada pengembangan tes dinas pendidikan di tiap kabupaten mengembangkan butir perangkat tes dengan memberdayakan MKKS/MGMP di daerahnya, namun antar kabupaten bekerjasama mengembangkan butir bersama. Butir bersama ini ketika ujian masuk pada perangkat tes di tiap kabupaten. Selanjutnya dapat dilakukan kaliberasi bersama maupun kaliberasi sendiri-sendiri dengan melakukan penyetaraan (*equating*). Hasil selengkapnya disajikan pada Gambar 1.

Model butir bersama ini juga memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Pertama, dinas pendidikan tiap provinsi belum tentu dapat memiliki anggaran untuk memfasilitasi dinas pendidikan kabupaten untuk bekerjasama dalam menyusun kisi-kisi dan butir bersama. Kedua, tidak setiap daerah mempunyai anggaran dana yang cukup untuk memberdayakan guru pada MKKS/MGMP. Di berbagai kabupaten, pengembangan instrumen tes untuk ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas dilakukan dengan inisiatif MKKS sendiri, dan pendanaan pelaksanaan ujian dilakukan secara patungan. Ketiga, fasilitas untuk melaksanakan koreksi bersama belum memadai, sehingga respons siswa dari berbagai kabupaten tidak bisa dipindai untuk kemudian dianalisis secara bersamaan. Biasanya sekolah melakukan pemindaian jawaban siswa dengan meminta tolong pihak ketiga. Keempat, untuk dapat melakukan *concurrent calibration* ataupun penyetaraan (*equating*) tiap daerah belum mempunyai pakar pengukuran, ataupun jika telah memiliki pakar, belum diberdayakan untuk pengujian di tiap daerah.

## **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini sebagai berikut.

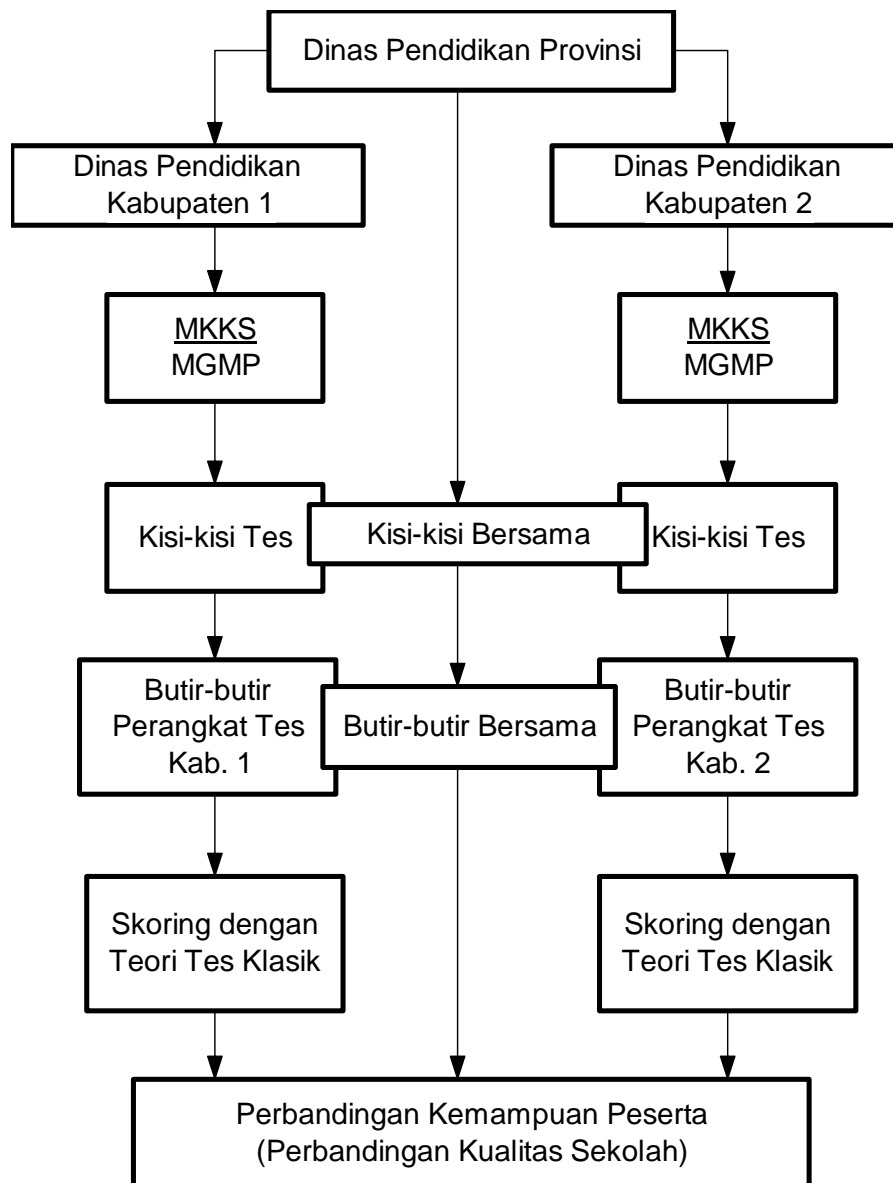
1. Telah dilakukan identifikasi permasalahan pendidikan terkait dengan pelaksanaan ujian akhir sekolah (*need assesment*), yang diperoleh hasil bahwa pelaksanaan ujian akhir semester tiap kabupaten berbeda-beda meskipun mengukur standar kompetensi dasar yang sama, dan belum adanya koordinasi antar daerah kabupaten untuk mendesain ujian bersama, sehingga terjadi kesamaan skala untuk memantau kualitas pendidikan antar daerah, antar sekolah, dan antar waktu.
2. Telah disusun model hipotetik berupa model ujian dengan butir bersama (*equating*).

## **Saran**

Dalam pelaksanaan ujian akhir, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten perlu berperan lebih banyak lagi, terutama memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antar daerah kabupaten dalam menyusun kisi-kisi. Dengan adanya koordinasi, dapat pula dilakukan validasi isi pada pengembangan butir-butir soalnya sehingga kualitasnya lebih baik dan terjadinya kesamaan materi sehingga mengukur kemampuan yang sama.

Karena ujian akhir semester melibatkan banyak peserta, pendekatan teori yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa yakni teori respons butir. Namun penskoran dengan pendekatan ini perlu keterampilan khusus, sehingga perlunya peran perguruan tinggi sebagai fasilitator baik melalui penataran, pelatihan, maupun pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas guru dan kualitas pendidikan.





Gambar 1. Model Butir Bersama

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, M. J. & Yen, W. M. (1979). *Introduction to measurement theory*. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
- Borg, W.R (1981). *Applying Educational Research*, New York: Longman.
- Brennan, R.L., dan Kolen, M.J. (2004). *Concordance Between ACT and ITED Scores From Different Population*. *Jurnal Applied Psychological Measurement*, Vol 28. No. 4, July 2004, p. 219-226
- Fernandes, H. J. X. (1984). *Evaluation of educational program*. Jakarta: National Education Planning, Evaluating and Curriculum Development.

- Frisbie, D. A. (2005). Measurement 101: Some fundamentals revisited. *Educational Measurement: Issues and Practice*, Vol. 24(3), 21-28.
- Gronlund, N.E. & Linn, R.L. (1990). *Measurement and evaluation in teaching (6th ed)*. New York : Collier Macmillan Publishers
- Hambleton, R.K., Swaminathan, H., & Rogers, H.J. (1991). *Fundamental of item response theory*. Newbury Park, CA: Sage Publication Inc.
- Hambleton, R.K. & Swaminathan, H. (1985). *Item response theory*. Boston, MA: Kluwer Inc.
- Kerlinger, F.N. (1986). *Asas-asas penelitian behavioral (Terjemahan L.R. Simatupang)*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Kim, J.S. (2000). Tes Equating under the multiple choice model. *Paper* presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.
- Kolen, M.J. (2004). Linking Assesment : Concept and History. *Jurnal Applied Psychological Measurement*, Vol 28. No. 4, July 2004, p. 219-226.
- Kolen, M.J. dan Brennan, R.L. (2004). *Test Equating : Methods and Practices*. New York : Springer.
- Lawrence, M.R. (1994). Question to ask when evaluating test. *Eric Digest. Artikel*. Diambil dari: <http://www.ericfacility.net/ericdigest/ed.385607.html> tanggal 6 Januari 2007.
- Lissitz, W. & Samuelsen, K. (2007). Further clarification regarding validity and education. *Journal of Educational Researcher*, Vol. 36, No. 8, pp. 482-484.
- Walpole, R.E., Mers, R.H., Myers, S.L. et al. 2002. *Probability and statistics for engineers and scientists*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Woolfolk, A. E. & McCune, L. N. (1984). *Educational psychology for teachers*. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall, In.

## PENGEMBANGAN MODEL ASESMEN HOLISTIK STANDAR KARIR BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Wahid Munawar<sup>1</sup>

### Abstrak:

Permasalahan yang dihadapi pendidikan kejuruan adalah rendahnya relevansi hasil pendidikan kejuruan dengan tuntutan dunia kerja, yaitu ketidaksesuaian antara program pendidikan dengan tuntutan lapangan kerja. Satu penyebabnya adalah sistem penilaian (*assessment*) yang lebih menekankan pada pengukuran pengetahuan untuk keterampilan (*knowledge of performance*). Satu cara untuk mengatasi rendahnya kompetensi kejuruan adalah pengembangan *assessment* standar karir yang bersifat holistik.

*Assessment holistic* standar karir adalah penilaian hasil belajar yang mengharuskan siswa mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dalam praktek kehidupan nyata/dunia kerja.

Pengembangan asesmen holistik standar karir di sekolah menengah kejuruan merupakan modifikasi asesmen yang telah ada di SMK yaitu asesmen bentuk segmental dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor dimodifikasi menjadi asesmen bentuk terintegrasi dan holistik, meliputi pengetahuan keterampilan (*knowledge of performance*), sikap pekerjaan, dan kemampuan keterampilan (*performance skill*).

*Kata-kata kunci* : asesmen standar karir (*assessment based on career*)

---

<sup>1</sup>Wahid Munawar adalah dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FPTK Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Latar Pendidikan; pernah kuliah S1 di IKIP Bandung, S2 di UNY dan ITB, S3 di Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UNJ tahun 2001, :e-mail: awar@ bdg.centrin.net.id; No. HP: 081 221 220 58

## A. PENDAHULUAN

Arah pengembangan pendidikan kejuruan di level pendidikan menengah dan pendidikan tinggi terkait dengan perkembangan teknologi dan struktur pekerjaan di masyarakat.

Perkembangan teknologi dan struktur pekerjaan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pendidikan kejuruan. Isu yang muncul adalah bagaimana posisi pendidikan kejuruan dan bagaimana mereposisi sistem pendidikan kejuruan untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul menghadapi perubahan ?

Posisi dan reposisi pendidikan kejuruan, mencakup aspek relevansi, yaitu relevansi proses dan hasil pendidikan dengan kebutuhan *stake holder*. Keberhasilan relevansi dari lembaga pendidikan diukur dari kinerja lulusannya dalam melaksanakan profesinya di dunia kerja dengan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang diperoleh di lembaga pendidikan.

Permasalahan mendasar saat ini, bagaimana mungkin menghasilkan lulusan dengan kualitas terbaik dan relevan dengan dunia kerja apabila -di sekolah menengah kejuruan- asesmen hasil belajar lebih menekankan pada penggunaan instrumen asesmen tertulis (*paper and pencil test*) dan penilaian pengetahuan keterampilan (*knowledge of performance*) dalam bentuk uji kompetensi, sedangkan asesmen untuk *skill performance* dilaksanakan di sekolah dan diuji oleh asesor berdasarkan petunjuk sekolah. Hal ini menjadi satu faktor rendahnya tingkat relevansi hasil pendidikan kejuruan, yaitu ketidaksesuaian antara program pendidikan dengan tuntutan lapangan kerja

Masalah lain yang lebih spesifik, asesmen (penilaian) menjadi titik lemah dalam pembelajaran. Guru lebih sering menekankan aspek isi (materi) pembelajaran, sedangkan penilaian menjadi aspek yang kurang diperhatikan dalam siklus pembelajaran. Ketidaktahuan guru pada pentingnya asesmen, cenderung menghasilkan proses pembelajaran yang “kering” makna bagi siswa. Guru hanya menyampaikan materi, siswa belajar tentang materi pelajaran dari guru, tetapi tidak tahu untuk apa materi pelajaran tersebut. Hal ini menjadi faktor lain rendahnya kualitas kompetensi lulusan dan rendahnya relevansi hasil pendidikan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan relevansi hasil pendidikan kejuruan dengan tuntutan dunia kerja pada aspek *learning outcomes* adalah pengembangan model asesmen holistik berbasis karir.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pendidikan Kejuruan dan Pendekatan Asesmen**

Pendidikan kejuruan menurut Wardiman (1998: 37) adalah : (1) pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja; (2) pendidikan kejuruan didasarkan atas “*demand-driven*” (kebutuhan dunia kerja); (3) pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “*learning by doing*” dan “*hand-on experience*”; (4) fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja; (5) penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan peserta didik harus pada “*hands-on*” atau performa di dunia kerja. Sedangkan inti dari pendidikan kejuruan (menurut *web dikmenjur*) adalah kepemilikan kompetensi pada peserta didik yang relevan dengan dunia kerja, sehingga dapat bekerja secara profesional.

Profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai “*he does his job well*”, yaitu individu (dalam hal ini siswa) memperoleh pengakuan telah memiliki kompetensi jenis dan tingkat suatu keahlian pada bidang profesi sesuai dengan persyaratan yang berlaku pada bidang profesinya. Dasar profesionalisme adalah kompetensi. Arti kompetensi menurut Spencer (1993) adalah: “karakter mendasar dari seseorang yang menyebabkannya sanggup menunjukkan kinerja efektif atau superior di dalam suatu pekerjaan”. Ini berarti kompetensi merupakan faktor utama yang dimiliki individu *the best performer* (berprestasi unggul) yang membuatnya berbeda dengan *average-performer* (berprestasi biasa atau rata-rata).

Ada dua pendekatan para asesor dalam menelaah kompetensi, yaitu pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif dalam *assessment*, berawal dari proses *job evaluation* (identifikasi tugas pekerjaan), yang menghasilkan suatu asumsi tentang profil keterampilan dan kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan dari jabatan (pekerjaan) secara sukses.

Sedangkan pendekatan induktif, mengacu pada kegiatan *assessment* berbentuk identifikasi personel tertentu yang telah diakui sebagai “*best/superior performer in the job*”.

Asesmen di bidang pendidikan teknologi dan kejuruan dapat ditelaah melalui “*job evaluation*” (pendekatan deduktif), yang dapat menghasilkan suatu asumsi tentang profil keterampilan dan kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan bidang teknologi secara sukses. Sebagai contoh, untuk dapat menjadi teknisi bubut tingkat Mula, diperlukan kompetensi teknologi bubut, diantaranya kemampuan pengetahuan membubut, keterampilan membubut, dan sikap dalam pekerjaan membubut. Kemampuan pengetahuan membubut harus ditampakkan dalam hal tahu: alat bubut, pencekaman pahat bubut, pengesetan mesin bubut, dan teknik bubut. Keterampilan membubut ditampakkan melalui terampil: penggunaan alat bantu, pencekaman pahat bubut, pengesetan mesin bubut, dan teknik membubut, karena pekerjaan membubut memerlukan keterampilan tersebut. Sikap kerja, ditampakkan melalui sikap dalam pekerjaan membubut dan aspek non teknis yang terkait dengan bidang pekerjaan, seperti keselamatan dan kesehatan kerja. (Wahid, 2010: 4)

Dengan demikian standar kompetensi teknisi bidang teknologi dan kejuruan, dalam perspektif asesmen deduktif, lebih mengutamakan aspek kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap terhadap bidang pekerjaan, artinya asesmen dilakukan secara holistik pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan berdasarkan kompetensi pekerjaan.

## **2. Asesmen Vokasional Standar Karir Bagi Sekolah Menengah Kejuruan**

Permasalahan asesmen di sekolah menengah kejuruan saat ini adalah (1) asesmen yang lebih menekankan pada penggunaan instrumen asesmen tertulis (*paper and pencil test*) dan penilaian pengetahuan keterampilan (*knowledge of performance*) sehingga dihasilkan lulusan yang kurang kompeten; (2) guru lebih sering menekankan aspek isi (materi) pembelajaran tetapi kurang memperhatikan asesmen dalam siklus pembelajaran; (3) asesmen kompetensi dilakukan secara parsial untuk aspek psikomotor, afektif dan kognitif. Sehingga tidak diperoleh

ketuntasan kompetensi. Ketiga masalah yang terkait asesmen tersebut harus segera diperoleh jawabannya, karena menjadi faktor penentu kualitas kompetensi lulusan dan tingkat relevansi hasil pendidikan di sekolah menengah kejuruan dengan dunia kerja. Oleh karena itu menjadi keharusan untuk mengembangkan asesmen vokasional standar karir.

Program pendidikan di sekolah menengah kejuruan pada dasarnya merupakan pendidikan yang berorientasi pada jabatan (*occupational education*). Butler (1972:3) mengemukakan bahwa tamatan sekolah menengah kejuruan yang berorientasi jabatan harus dapat mendemonstrasikan kemampuannya, dengan karakteristik sebagai berikut: (1) mampu menunjukkan penguasaan kemampuan dan pengetahuan khusus yang minimum untuk dapat memasuki bidang kerja tertentu; (2) mampu menunjukkan kemampuan dasar akademik dan pengetahuan penunjang yang memenuhi persyaratan untuk awal karirnya; (3) mampu menunjukkan kemampuan akademik, sosial, dan kejuruan yang dapat direalisasikan secara maksimum yang diperlukan untuk mengembangkan karir dan potensi di masa yang akan datang

Banyak cara untuk mengukur keberhasilan belajar di sekolah menengah kejuruan, namun yang umum digunakan adalah "*occupational competency testing*" yang dirancang untuk mengukur penguasaan keterampilan (*mastery of skills*) dan pengetahuan yang ditemukan dalam pekerjaan.

Merujuk pada pengertian kompetensi sebagai karakteristik atau kemampuan atas pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan sesuai dengan tugas jabatannya (LAN, 2001), maka SMK harus menggunakan asesmen vokasional standar karir, karena asesmen vokasional standar karir di sekolah menengah kejuruan, hakikatnya adalah pengukuran ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang terintegrasi dan holistik dalam satu kompetensi.

Asesmen standar karir dalam konteks pengetahuan keterampilan (ranah kognitif) menurut Anderson (2001: 46) dapat dikembangkan menjadi empat pilar kompetensi yaitu: (1) pengetahuan faktual; (2) pengetahuan konseptual; (3) pengetahuan prosedural; dan (4) pengetahuan metakognitif.

Asesmen standar karir, dalam konteks keterampilan *skill* (ranah psikomotor) meliputi: observasi, imitasi, praktek, adaptasi (Bott, 1996: 15). Kompetensi observasi, contohnya: pada kompetensi servis kendaraan bermotor, siswa harus melakukan observasi, yaitu: mencari sumber gangguan pada motor, menemukan penyebab gangguan, mengamati mesin/komponen mesin. Kompetensi imitasi atau peniruan, contohnya: siswa menggambar benda kerja, mendemonstrasikan operasional mesin. Kompetensi mempraktekkan, contohnya: memperbaiki kerusakan mesin, menempatkan kembali komponen yang diperbaiki, mengoperasikan komputer. Kompetensi adaptasi, contohnya: menciptakan desain dan manipulasi prosedur kerja.

*Performance skill* merupakan gabungan antara *speed* (kecepatan: waktu) dengan *accuracy* (ketepatan, presisi). Pada umumnya keterampilan kejuruan atau teknologi haruslah mampu menjawab pertanyaan identifikasi (*identify*), konstruksi (*construct*), dan demonstrasi (*demonstrate*). Bentuk tes keterampilan menurut Gronlund (1982:84) dikutip (Balitbang Diknas, 2003) adalah; (1) *paper and pencil test* untuk mengungkap pengetahuan keterampilan (*knowledge of performance*), misalnya; bagaimana membaca jangka sorong atau bagaimana mengukur daya listrik; (2) *identification*, tes identifikasi, misalnya: mengidentifikasi alat/bahan yang diperlukan untuk membuat produk teknologi atau melakukan pekerjaan servis mobil; (3) *simulated performance*, tes simulasi merupakan tiruan gerakan yang harus dilakukan seperti pada pekerjaan di laboratorium atau bengkel maupun lapangan kerja sesungguhnya; (4) *work sample* atau uji petik, melakukan sampel pekerjaan sebenarnya atau mengukur kinerja yang sebenarnya, misalnya stir mobil yang sesungguhnya di jalan raya.

Tes keterampilan meliputi dua arahan yaitu: proses kerja (prosedur) dan hasil kerja (produk). Tes keterampilan haruslah berbasis kompetensi keahlian dunia kerja, artinya tes keterampilan harus mengukur kemampuan prosedural pada pencapaian kompetensi dan menghasilkan benda kerja dengan spesifikasi tertentu.

Jenis strategi pengamatan yang digunakan dalam tes keterampilan meliputi: *checklist* (memberi tanda cek) atau *rating scale* (memilih tingkatan keterampilan yang dicapai) atau jenjang.




Contoh skor amatan pada check list adalah 1 untuk ya/kompeten/sukses dan 0 untuk tidak kompeten/gagal. Sedangkan skor amatan pada rating scale misalnya 2 untuk sukses terbaik (*excellent*); 1 untuk sukses rata-rata (*good*) dan 0 untuk gagal (*fail*).

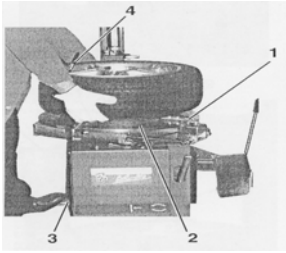
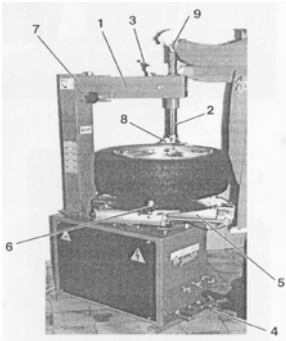
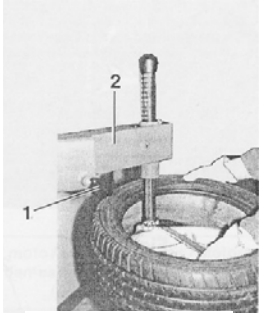
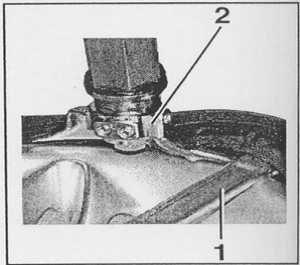
Kriteria kelulusan hanyalah dua kriteria yaitu: lulus-tidak lulus, berhasil/sukses-gagal. Ini berarti bahwa asesmen vokasional standar kompetensi menggunakan pengukuran acuan kriteria (PAK), artinya pengukuran berhasil/kompeten/sukses didasarkan pada ketuntasan kompetensi (*mastery*).

Berikut ini (tabel 1), merupakan contoh asesmen standar karir bentuk *performance assessment*. Tes disusun mengacu pada standar pekerjaan yang dilakukan di industri, pabrik atau bengkel. Pada contoh, tes kinerja dibuat mengacu pada standar pekerjaan di industri atau bengkel otomotif. Kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta tes adalah kompetensi membongkar dan memasang ban dalam dan luar. Pada kompetensi membongkar dan memasang ban dalam dan luar terdapat beberapa sub pekerjaan, yang di sekolah dimaknai sebagai kompetensi, yaitu: (1) pekerjaan membongkar ban dalam dan luar; (2) pekerjaan memasang ban dalam dan luar.

Penilaian (asesmen) dilakukan oleh asesor (dari lembaga pendidikan dan institusi kerja di industri) dengan cara mencocokkan langkah pekerjaan yang dilakukan peserta tes apakah sesuai atau tidak sesuai dengan standar pekerjaan yang dilaksanakan di dunia kerja. Pertimbangan penilaian dapat dilakukan melalui cara: (1) apabila peserta tes mampu mengerjakan seluruh standar pekerjaan yang diujikan, maka peserta tes dinyatakan telah memenuhi syarat keberhasilan belajar (atau telah memiliki kompetensi).

**Tabel 1. ASESMEN TES KINERJA (MENGUNAKAN CHECK LIST)**

Nama Peserta Tes : .....				
Nomor Tes : .....				
<b>Petunjuk:</b> Tuliskan centang (V) untuk kemampuan peserta tes yang teramati pada waktu tes kinerja				
MATERI UJI KETERAMPILAN : Membongkar, Memasang ban dalam dan luar				
SUB KOMPETENSI : Membongkar				
Tujuan : Mampu mengerjakan/membongkar ban dalam dan luar				
NO	INDIKATOR	VISUALISASI KINERJA STANDAR KARIR	PENSKORAN	
			YA (1)	TIDAK (0)
	<b>A. RANCANGAN KERJA:</b> 1. Persiapan Kerja: a. Pakaian Kerja b. Kesehatan Fisik c. Identitas Kerja 1. Persiapan alat kerja a) Mesin Pelepas Ban (Tire changer) b) Sendok ban c) Sabun colek d) Ban mobil luar ring 13" e) Ban dalam ring 13" f) Pelek mobil ring 13" g) Paselin h) Lap / majun		....	....
	<b>B. PROSES KERJA</b> 1. Pasang ban pada sisi mesin. 2. Posisikanlah bilah penekan (3) dengan menggeser handle (4) pada sisi samping ban berjarak 5 mm dari rim		.... ....	.... ....

	<p>3. Selama proses pengepresan, tangan tidak berada di posisi samping ban karena berbahaya.</p> <p>4. Tekan pedal (2), maka bilah nekan (3) akan menekan sidewall dengan tekanan yang cukup kuat sampai kedua bead lepas dari rim.</p>		<p>.....</p>	<p>.....</p>
	<p>5. Tempatkan roda di atas mesin, tekan pedal (3) sampai posisi pelek terjepit dengan kuat, posisikan pengait pelepas ban (2) 2 mm di atas rim.</p> <p>6. Gunakan sendok ban (1) untuk mencongkel sisi samping ban dan menepatkan dengan pengait sampai pengait masuk ke dalam bead.</p>		<p>.....</p>	<p>.....</p>
	<p>7. Tekan pedal pemutar maka mesin akan memutar ban arah berlawanan jarum jam, maka bead akan terlepas dari rim dan untuk melepas sisi bead bawah tempatkan pengait pada rim sisi bawah.</p> <p>Keluarkan ban dalam pelek dengan menarik secara perlahan.</p>		<p>.....</p>	<p>.....</p>
	<p>8. Untuk melepas bead sisi bawah, tempatkan pengait pada rim sisi bawah.</p> <p>9. Tekan pedal, maka mesin akan berputar berlawanan arah jarum jam dan ban akan terlepas.</p>		<p>.....</p>	<p>.....</p>

	<b>C. HASIL/ PRODUK KERJA</b> 1. Ban sudah terlepas dari Pelek dengan baik. 2. Pengerjaan sesuai dengan waktu yang di tetapkan (lebih cepat dari 30 menit atau tepat waktu 30 menit)		.....          .....	.....          .....
	<b>D. SIKAP KERJA</b> 1. Menggunakan alat dan bahan sesuai aturan K3 2. Membersihkan alat dan bahan sesuai prosedur K3		.....  .....	.....  .....

(Sumber : Gambar dirujuk dari Pedoman Reparasi Mesin, Toyota Astra Motor)

Keterangan Tabel 1:

Skoring: Ya = 1, apabila kompetensi/kinerja dilakukan dengan benar

Tidak = 0, apabila kinerja tidak dilakukan atau salah melakukannya

Peserta tes (siswa) dinyatakan tidak berhasil atau gagal atau tidak lulus, bila siswa tidak mampu melakukan pekerjaan sesuai standar karir (Asesor industri dan asesor sekolah langsung menghentikan proses asesmen, bila peserta tes terlihat tidak mampu melaksanakan *item* pekerjaan).

Untuk asesor sekolah ketidakmampuan siswa menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan tepat waktu, diidentifikasi sebagai kompetensi yang harus diremediasi pada siswa yang gagal).

Penggunaan asesmen standar karir akan meningkatkan relevansi hasil pendidikan kejuruan dengan dunia usaha/dunia industri, karena mengukur pengetahuan untuk keterampilan (*knowledge of performance*), dan mengukur keterampilan itu sendiri (*performance skill*). Penggunaan asesmen standar karir dalam asesmen pendidikan kejuruan akan meningkatkan keunggulan hasil belajar siswa SMK, karena siswa menjadi terampil melakukan suatu pekerjaan yang mirip dengan dunia usaha/dunia industri.

Pelaporan asesmen kinerja standar karir dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) sertifikat kompetensi dan/atau (2) buku lapor pembelajaran.

Asesmen kinerja standar karir dengan bentuk pelaporan sertifikat kompetensi diusulkan menggunakan penskoran ya-tidak atau kompeten/tidak kompeten menggunakan cek list tanpa pembobotan. Artinya peserta tes dinyatakan: (a) berhasil/kompeten: bila seluruh aspek kinerja dilakukan dengan benar sesuai standar karir dan (b) gagal/tidak kompeten: bila satu atau beberapa aspek tidak dilakukan atau salah melakukannya. Sedangkan asesmen kinerja standar karir dengan bentuk buku lapor pembelajaran diusulkan menggunakan penskoran ya-tidak atau kompeten/tidak kompeten menggunakan skor 1- 0 dengan pembobotan.

Pada asesmen kinerja standar karir dengan menggunakan penskoran ya-tidak (skor 1- 0) dan diberi pembobotan. Metode pembobotannya adalah:

$$\text{Skor akhir (SA)} = (\text{skor yang diperoleh dibagi skor total per indikator}) \times \text{bobot}$$

Peserta tes dinyatakan berhasil atau gagal berdasarkan skor akhir (SA) dalam bentuk *grade* atau level. Misal: skor 0 – 80 dinyatakan Gagal (G), skor 81- 90 dinyatakan lulus level B (Standar), dan skor 91 – 100 dinyatakan lulus level A (Unggul).

### **C. KESIMPULAN**

Asesmen holistik standar karir adalah penilaian komprehensif dan terpadu aspek pengetahuan keterampilan (*knowledge of performance*), sikap pekerjaan, dan kemampuan keterampilan (*performance skill*).

Pengembangan asesmen holistik standar karir di sekolah menengah kejuruan merupakan modifikasi asesmen yang telah ada di SMK yaitu asesmen bentuk segmental dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor dimodifikasi menjadi asesmen bentuk terintegrasi dan holistik, meliputi pengetahuan keterampilan (*knowledge of performance*), sikap pekerjaan, dan kemampuan keterampilan (*performance skill*).

Asesmen holistik standar karir (pekerjaan di industri/pabrik atau bengkel) menjadikan siswa terampil melakukan suatu pekerjaan yang mirip dengan dunia kerja.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, J.R. and Krathwohl, D.R. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Addison Wiley. 2001.
- Balitbang Depdiknas. *Penilaian Kelas*. 2003.
- Butler, F. Coit. *Instructional Systems Development for Vocational and Technical Training* Englewood Cliffs: Educational Technology Publishers Inc. 1972.
- Bott, Paul A. *Testing and Assessment in Occupational and Technical Education*. Boston: Allyn and Bacon. 1996.
- Calhoun, C.C., and Finch A.V. *Vocational Education: Concept and Operations*. Belmont California: Wadsworth Publishing Company. 1982.
- Spencer, L.M., dan Spencer, S.M. *Competence at work: Models for superior performance*. 1993.
- Toyota astra Motor, *Pedoman Reparasi Mesin*. Jakarta
- Wahid Munawar, Pengembangan asesmen Vokasional di SMK, *Jurnal Puspendik*, Desember 2009. Vol 6/No.3.
- Wardiman Djojonegoro. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. Jakarta: Gunung Agung. 1995.

## **KEDUDUKAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM REDESAIN SISTEM PENDIDIKAN GURU**

Eka Wahyuni, S. Pd., MAAPD

Dra. Gantina Komalasari, M. Psi

Dra. Louise Siwabessy, M.Pd

### **Abstrak**

Makalah ini memaparkan argumentasi bahwa bimbingan dan konseling merupakan salah satu cabang ilmu pendidikan yang berperan penting dalam redesign sistem pendidikan guru. pembahasan dimulai dengan menjelaskan tentang landasan historis profesi konselor atau guru bimbingan dan konseling telah mengakar dalam system persekolahan di Indonesia, dilanjutkan dengan argumentasi yuridis profesi konselor atau guru bimbingan dan konseling yang telah diakui oleh pemerintah sebagai salah satu bidang ilmu pendidikan. Makalah ini diakhiri dengan pemaparan tentang bidang bimbingan dan konseling merupakan cabang ilmu pendidikan yang memiliki posisi yang jelas dalam kontalasi ilmu lain.

### **Pendahuluan**

Bimbingan dan konseling merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada siswa dalam rangka mengembangkan kemampuannya dalam rangka pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas no 20 2003).

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dibutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan yang professional yang dapat membantu siswa untuk mencapai berbagai kompetensi yang diharapkan diperoleh pada jenjang pendidikan tertentu.

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan,....

yang salah satunya dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling (UU No. 20/2003, pasal 1 ayat 6).

Dalam paper ini penulis berargumen bahwa bimbingan dan konseling merupakan salah satu cabang ilmu pendidikan yang berperan penting dalam redesign sistem pendidikan guru. Hal ini karena secara historis profesi konselor atau guru bimbingan dan konseling telah mengakar dalam system persekolahan di Indonesia, profesi konselor atau guru bimbingan dan konseling secara yuridis telah diakui oleh pemerintah sebagai salah satu bidang ilmu pendidikan, dan bidang bimbingan dan konseling merupakan cabang ilmu pendidikan yang memiliki posisi yang jelas dalam kontalasi ilmu lain.

## **Pembahasan**

### **Landasan historis bimbingan dan konseling**

Perkembangan bimbingan dan konseling (BK) di Indonesia dimulai dari dunia pendidikan yaitu sejak tahun 1960 dengan diadakannya Konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (disingkat FKIP, yang kemudian menjadi IKIP) di Malang tanggal 20 – 24 Agustus 1960. Pada tahun 1962 dengan adanya perubahan sistem pendidikan di tingkat SMA, yaitu perubahan nama menjadi SMA Gaya Baru. Sistem SMA Gaya Baru merupakan perubahan sistem penjurusan yaitu pada awalnya dilakukan pada kelas 1 diubah menjadi kelas 2. Perkembangan berikutnya pada tahun 1964 IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan Bimbingan dan Penyuluhan. Pada tahun periode tahun 1970 dan 1971 digagas Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) pada delapan IKIP yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado dengan program Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) yang menyertakan layanan bimbingan dan penyuluhan pada program yang dinyatakan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0199/0/1973 tentang “Pola Dasar



Rencana dan Pengembangan Bimbingan dan Penyuluhan. Kemudian pada kurikulum 1975 untuk Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas, diintegrasikan layanan bimbingan dan penyuluhan untuk siswa. Seiring dengan ini, dibentuknya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) (Dahlani, 2009; Noorholic, 2008; Yusuf & Nurihsan, 2005, p. 97-98).

Kemudian, pada tahun 1978 diselenggarakan program PGSLP dan PGSLA Bimbingan dan Penyuluhan di IKIP yang setara dengan tingkat D2 atau D3. Program ini bertujuan untuk mengisi jabatan Guru Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah. Keberadaan Bimbingan dan Penyuluhan secara legal formal diakui tahun 1989 dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 026/Menpan/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Keputusan Menteri tersebut ditetapkan secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Selanjutnya pada tahun 1993 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang di dalamnya memuat aturan tentang Bimbingan dan Konseling di sekolah yang tertuang pada pasal 3 ayat 2 (Dahlani, 2009; Noorholic, 2008).

Pada dekade 1990 hingga 2000, kata penyuluhan secara resmi diganti menjadi konseling, sehingga istilah yang digunakan sekarang adalah bimbingan dan konseling. Kemudian, melalui kongres yang dilaksanakan pada tahun 2005, penyebutan nama organisasi profesi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) diganti menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Dalam ABKIN terdapat beberapa divisi di antaranya Ikatan Bimbingan dan Konseling Indonesia (IBKS), Ikatan Konseling Industri dan Organisasi (IKIO), Ikatan Pendidik dan Supervisi Konseling (IPSIKON), Ikatan Bimbingan dan Konseling Perguruan Tinggi (IBKPT), Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (IIBKIN).

Perkembangan selanjutnya makin memperkuat posisi guru bimbingan dan konseling, melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana untuk pertama kalinya dinyatakan bahwa

konselor sebagai salah satu tenaga kependidikan, seperti tertuang pada Pasal 1 Ayat 6, berbunyi Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pada Undang-Undang inilah, guru bimbingan dan konseling pertama kali diakui dan masuk dalam sistem kepegawaian negara. Pada persiapan peluncuran undang-undang ini, IPBI berusaha memasukkan profesi konselor sekolah sebagai salah satu tenaga pendidik di sekolah, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat pengelompokan dalam sistem administrasi kepegawaian negara sehingga konselor sekolah dinamakan sebagai guru bimbingan dan konseling yang memiliki posisi yang sama dengan tenaga pendidik lainnya. Selanjutnya, undang-undang ini ditindak lanjuti dengan disusunnya rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling di jalur pendidikan formal atas kerja sama antara Direktorat Jenderal PMPTK dengan ABKIN di dalam upaya penataan dan pengembangan profesi serta pelayanan bimbingan dan konseling (ABKIN 2009).

Memerlukan waktu cukup panjang sampai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, maka profesi konselor secara legal formal telah diakui merupakan profesi yang keberadaannya di sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat pada pasal 15 yang menyatakan bahwa guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru pemegang sertifikat pendidikan, dengan beban kerja tertuang pada pasal 54 ayat 6 dimana guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.

Perkembangan profesi pada bidang bimbingan dan konseling ditandai pula dengan adanya standarisasi profesi konselor yang disepakati oleh ABKIN bersama dengan jurusan Bimbingan dan Konseling seluruh Indonesia. (Yusuf & Nurihsan, 2005, p. 98-99). Kemudian posisi profesi guru bimbingan dan konseling

atau konselor sebagai tenaga profesional dalam jalur pendidikan formal dan non formal semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 27 tahun 2008, tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor.

### **Landasan yuridis bimbingan dan konseling dalam system Pendidikan tenaga pendidik**

Pada saat ini, profesi konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling secara yuridis telah diakui oleh pemerintah sebagai salah satu bidang ilmu pendidikan. Hal ini tertuang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2006 Pasal 1 yang tertulis bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru dijelaskan tentang beban kerja konselor atau guru bimbingan dan konseling. Dikuatkan pula dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Serta diterbitkannya rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, maka guru sebagai jabatan profesional dituntut memiliki kualifikasi akademik, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu maka pemerintah menerbitkan Permendiknas No 8 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, dan Permendiknas No 9 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Bagi Guru Dalam Jabatan. Kebijakan ini mendorong tanggung jawab Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

sebagai penyelenggara pendidikan profesi bagi calon tenaga kependidikan, termasuk calon guru bimbingan dan konseling atau konselor.

Dasar-dasar yuridis formal di atas menunjukkan bahwa bidang bimbingan dan konseling telah diakui keberadaannya secara legal oleh pemerintah dan merupakan bidang yang dikategorikan sebagai cabang ilmu pendidikan. Dalam redesign sistem pendidikan guru, bidang bimbingan dan konseling merupakan salah satu bidang yang selalu ditempatkan sejajar dengan bidang studi lain seperti dalam penempatan bimbingan dan konseling sebagai salah satu program studi di LPTK. Dengan demikian, program studi yang berada di LPTK merupakan program studi yang diakui oleh pemerintah sebagai penghasil tenaga pendidik dan kependidikan.

Selanjutnya, dalam desain sistem pendidikan guru profesional bidang bimbingan konseling termasuk salah satu bidang yang mendapatkan tunjangan profesi melalui jalur sertifikasi dan jalur Pendidikan Profesi Guru. pada saat ini bidang bimbingan dan konseling telah memiliki pedoman Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor (PPG BK/K) yang memiliki kekhasan layanan dalam rangka membantu peserta didik dalam mengembangkan kompetensi dalam pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Hal ini didukung pula dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 126/P/2010 tentang penetapan LPTK penyelenggara PPG dalam jabatan.

Landasan yuridis di atas diperkuat dengan dipenuhinya syarat-syarat bimbingan dan konseling sebagai sebuah profesi. Seperti yang dikemukakan oleh Rochman Natawidjaja (2000) tentang ciri-ciri suatu profesi. Pertama, profesi konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling memiliki standar unjuk kerja yang baku dan jelas. Konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas yang dikembangkan oleh ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia), pedoman pengembangan diri oleh Pusat Kurikulum dan standar kompetensi yang telah disepakati secara nasional.

Kedua, memiliki lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan program dan jenjang pendidikan yang baku serta memiliki standar akademik yang memadai dan yang bertanggung jawab tentang

pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu. Lulusan bimbingan dan konseling dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan menggunakan kurikulum nasional yang telah disepakati oleh Forum Jurusan Bimbingan dan Konseling secara nasional dengan mengacu kepada standar kompetensi konselor yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik konselor sekolah. Pada saat ini bidang bimbingan dan konseling memiliki program Strata 1, 2 dan 3 di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pasca sarjana.

Ketiga, memiliki organisasi profesi yang mewadahi konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Keempat, memiliki etika dan kode etik yang dikembangkan oleh ABKIN dalam rangka mengatur perilaku etik para pelakunya dalam memperlakukan konseli. Kelima, konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling yang telah bekerja secara profesional di sekolah memiliki sistem penggajian yang disesuaikan dengan sistem sekolah. Selain itu, sejak tahun 2007, konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling telah mendapatkan kesempatan untuk mendapat tunjangan profesi melalui program sertifikasi guru. Terakhir, profesi konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling telah dikenal di lingkungan stakeholder sekolah bahkan ABKIN telah melakukan nota kesepahaman dengan HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) tentang wilayah kerja. Hal ini menunjukkan bahwa profesi konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling telah diakui bukan hanya seputar lingkungan sekolah tetapi oleh profesi lain yang relevan dengan bimbingan dan konseling.

### **Posisi Bimbingan dan konseling dalam Rumpun ilmu pendidikan dan kontalesi ilmu lain**

Ilmu Pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang dikembangkan melalui perenungan dan penelitian dengan menggunakan metode *verstehen* yang bersifat kualitatif dan metode ilmiah lainnya yang bersifat kuantitatif untuk melahirkan ilmu pendidikan sistematis, teoretis dan historis, serta menjadikan hakekat dan aktivitas manusia yang berdimensi nilai filosofis, psikologis, sosiologis,

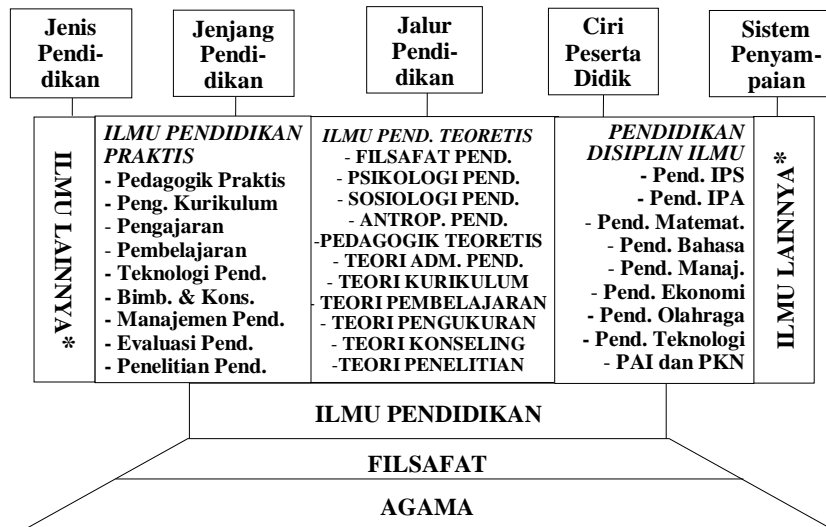
anthropologis, yang religius, sebagai subyek kajian utamanya (Rochman Natawijaya, 2006, h. 1).

Ilmu Pendidikan merupakan ilmu yang mandiri (otonom) yang memiliki akar kuat dalam Agama dan Filsafat. Inti dari ilmu pendidikan adalah Paedagogik (*Paedagogy*) atau Ilmu Mendidik. Ilmu Pendidikan berkembang bersama-sama dengan Filsafat dan ilmu-ilmu dasar, yaitu Psikologi, Sosiologi, Antropologi. Integrasi dan saling menguatkan antara Disiplin Ilmu Pendidikan dengan filsafat dan disiplin ilmu dasar itu melahirkan Ilmu Pendidikan Teoretis, termasuk Filsafat Pendidikan, Sejarah Pendidikan, Psikologi Pendidikan, Sosiologi Pendidikan, Antropologi Pendidikan, Ilmu Mendidik (Paedagogik-Andragogik), Teori dan Pengembangan Kurikulum, Teori Pembelajaran, Teori Bimbingan dan Konseling, Teori Manajemen Pendidikan, Teori dan Prinsip-prinsip Evaluasi Pendidikan, Teori dan Landasan Penelitian Pendidikan. Ilmu Pendidikan Teoretis dijadikan landasan bagi praksis pendidikan yang berkembang menjadi Ilmu Pendidikan Praktis (Rochman Natawijaya, 2006, h. 1).

Ilmu Pendidikan Praktis mengkaji dan mengembangkan penerapan atau aplikasi dari ilmu-ilmu pendidikan teoretis. Penerapan teori-teori pendidikan dapat dilihat dari beberapa segi. Dari segi bidang kajian pendidikan, penerapan teori pendidikan ini meliputi: Seni Mendidik (Paedagogi, Andragogi), Pengembangan Kurikulum, Pengajaran/Pembelajaran, Teknologi Pendidikan, **Bimbingan dan Konseling**, Administrasi/Manajemen Pendidikan, Evaluasi Pendidikan, dan Penelitian Pendidikan (Rochman Natawijaya, 2006, h. 2)

Pohon Ilmu Pendidikan yang dideskripsikan pada bagian terdahulu digambarkan dalam suatu bagan seperti berikut.

**Berbagai Cabang Ilmu Pendidikan Diterapkan Menurut:**



**Bagan 1.1. Pohon Ilmu Pendidikan**

Terdapat wacana bahwa profesi konselor merupakan bagian dari ilmu psikologi, Namun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi program studi bimbingan dan konseling ditempatkan rumpun ilmu pendidikan dengan kode S-2 86-101 untuk program studi bimbingan dan konseling jenjang S2 dan S-1 dengan kode 86-201 untuk jenjang S1, sementara untuk ilmu psikologi program studi ilmu psikologi pada jenjang S3 memiliki kode 73-001, program studi psikologi dengan kode 73-101 untuk jenjang S2, dan 73-201 untuk jenjang S1. Selanjutnya, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 1030/D/T/2010 tentang penataan nomenklatur program studi Psikologi, Komunikasi, Komputer dan lanskap dinyatakan bahwa bidang ilmu psikologi memiliki program studi psikologi untuk jenjang S1, S2, dan S3, psikologi profesi dan psikologi terapan untuk jenjang S2.

Ilmu-ilmu lain memiliki kontribusi secara teoritis dan praksis kepada bidang ilmu bimbingan dan konseling karena bimbingan dan konseling merupakan ilmu terapan dari ilmu pendidikan dan psikologi yang mempunyai

obyek material *perilaku manusia* seperti juga ilmu psikologi, sosiologi dan antropologi. Oleh karena itu, banyak sisi yang hampir sama antara ilmu bimbingan dan konseling dengan ilmu sosial dasar lainnya itu. Secara khusus, psikologi memberikan kontribusi yang besar dalam ilmu bimbingan dan konseling yaitu dalam mengumpulkan data, menganalisis dan memahami kondisi psikologis individu serta mendiagnosis dan melakukan treatment dalam rangka pemecahan masalah pribadi, sosial, belajar dan karir.

Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa program studi bimbingan dan konseling merupakan bidang ilmu terapan ilmu pendidikan yang secara jelas dan sah berada di bawah rumpun ilmu pendidikan yang dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial lainnya seperti psikologi.

Dalam rangka redesain sistem pendidikan guru, dapat terlihat jelas bahwa bimbingan dan konseling memiliki peran dalam mengembangkan secara khusus sisi afektif peserta didik melalui layanan bimbingan dan konseling yang mendukung pencapaian kompetensi keilmuan yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Hal ini berimplikasi bahwa bidang bimbingan dan konseling memiliki peran yang beriringan dengan bidang studi lainnya. Seperti dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22/2006 tentang Standar isi, pelayanan bimbingan dan konseling diletakkan sebagai bagian dari kurikulum yang isinya dipilah menjadi (a) kelompok mata pelajaran, (b) muatan lokal, dan (c) materi pengembangan diri, yang harus “disiapkan“ oleh konselor. Pada kebijakan ini terlihat bahwa konselor disejajarkan dengan wilayah mata pelajaran. Dalam prakteknya, guru mata pelajaran dengan konselor atau guru bimbingan dan konseling saling bahu membahu dalam membantu peserta didik yang banyak juga disebut sebagai wilayah kerja komplementer. Dengan demikian, system pendidikan guru mempersiapkan calon-calon pendidik yang dapat bekerja secara kolaboratif antara guru mata pelajaran dengan konselor atau guru bimbingan dan konseling (ABKIN 2009).



## **Kesimpulan**

Bidang bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam system persekolahan di Indonesia. Secara historis, bimbingan dan konseling pertama kali terbentuk dalam dunia pendidikan. Hal ini didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang menegaskan fakta-fakta yuridis tentang bimbingan dan konseling sebagai bagian ilmu pendidikan. Selanjutnya, secara konseptual bimbingan dan konseling merupakan ilmu terapan dari cabang ilmu pendidikan yang dipengaruhi oleh filsafat, ilmu psikologi, sosiologi dan antropologi.

## Daftar Pustaka

- Asosiasi Bimbingan dan Konseling. (2008). *Penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, *Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*, Jakarta: Depdiknas, 2007.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. (2008). *Rambu-Rambu Program Pengembangan Diri Untuk SMA*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, (2010). *Panduan Pendidikan Profesi Guru*. Kementerian Pendidikan Nasional
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 163/Dikti/Kep/2007 Tentang Penataan Dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi
- Natawidjaja, Rochman (1988). Ilmu Pendidikan Sebagai Ilmu Pengetahuan. Artikel dalam Jurnal *Atma nan Jaya*, No. 1, Tahun I. Universitas Katolik Indonesia, Jakarta, Juni 1988
- Natawidjaja, Rochman (2006). *Pohon Ilmu Pendidikan*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Peraturan Pemerintah RI No 74 tahun 2008 Tentang Guru
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22/2006 tentang Standar Isi  
Keputusan Bersama Menti Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kepala Administrasi Kepegawaian Negara No 0433/P/1993 Dan Nomor 25 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya.
- Undang-undang Sistem pendidikan Nasional No 20 tahun 2003
- Undang-undang Guru dan Dosen No 14 tahun 2005
- Yusuf, S & Nurihsan, J. (2003). "Panduan Penyusunan Program Bimbingan Dan Konseling Berbasis Perkembangan", *Makalah disampaikan pada Konvensi Nasional ABKIN XIII*. Bandung, 10 Desember 2003.

## **Biodata Penulis**

1. Eka Wahyuni, S. Pd., MAAPD  
No. HP: 087880957779  
Email: [wahyuni.eka@gmail.com](mailto:wahyuni.eka@gmail.com) atau [ekanni@yahoo.com](mailto:ekanni@yahoo.com)
2. Dra. Gantina Komalasari, M. Psi  
No. HP:08158967464  
Email: [gantina\\_komalasari@yahoo.com](mailto:gantina_komalasari@yahoo.com)
3. Dra. Louise Siwabessy  
No. HP: 081310402650  
Email: [louis\\_bessy@yahoo.co.id](mailto:louis_bessy@yahoo.co.id)

# **IMPLEMENTASI KOMPETENSI KOMPUTER GRAFIS DAN SURVEYING PADA TUGAS JALAN RAYA I UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA JPTS**

**Iskandar Muda Purwaamijaya<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan  
Universitas Pendidikan Indonesia Bandung  
email : ais\_imp@yahoo.com

## **Abstract :**

Computer technology is also widely used by academics for both in terms of learning or as a support for all academic activities. Included in the field of Civil Engineering and ability in computerization. Utilization of computer knowledge one can assist in the completion of structured tasks, whether for work or analysis report estimates obtained for attending students. This study carried out by the analytic method of correlative measures of development, namely the research conducted to determine the conditions on the ground through the analytical approach by looking at relationships before and after the action in the development of specific methods.

Key words: technological, computerized, structured tasks

## **Abstrak**

Teknologi komputer banyak digunakan juga oleh akademisi baik untuk segi pembelajaran atau sebagai penunjang semua kegiatan akademik. Termasuk di bidang Teknik Sipil dan kemampuan dalam komputerisasi. Pemanfaatan pengetahuan komputer salah satunya dapat membantu dalam penyelesaian tugas-tugas terstruktur, baik untuk pengerjaan laporan atau analisis perhitungan yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. penelitian ini dilakukan dengan metode analitik korelatif tindakan pengembangan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan melalui pendekatan analitik dengan melihat hubungan sebelum dan setelah dilakukan tindakan dalam pengembangan metode tertentu.

Kata-kata kunci : teknologi, komputerisasi, tugas terstruktur

## **LATAR BELAKANG**

Program komputer merupakan bagian dari teknologi komputer yang telah banyak mengalami peningkatan yang signifikan, terbukti banyak terciptanya program yang lebih aplikatif dengan tingkat kompleksitas tinggi. Hampir disemua bidang teknologi ini sangat diperlukan untuk menunjang dalam

penyelesaian masalah dengan hasil tepat dan cepat. Sehingga dalam waktu singkat program komputer telah menjadi suatu teknologi yang populer dan banyak digunakan oleh banyak orang. Terbukti dengan hampir setiap lembaga pendidikan di Indonesia melengkapi mata pelajarannya dengan pengetahuan komputer. Selain itu banyak juga berdirinya lembaga-lembaga pendidikan khusus memberikan materi tentang program komputer. Teknologi komputer banyak digunakan juga oleh akademisi baik untuk segi pembelajaran atau sebagai penunjang semua kegiatan akademik. Termasuk di bidang Teknik Sipil dan kemampuan dalam komputerasi. Pemanfaatan pengetahuan komputer salah satunya dapat membantu dalam penyelesaian tugas-tugas terstruktur, baik untuk pengerjaan laporan atau analisis perhitungan yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.

Fenomena yang terlihat adalah masih banyak mahasiswa yang cenderung belum menguasai program komputer secara maksimal untuk penyelesaian tugas, mungkin karena kurangnya pemahaman tentang program komputer atau faktor-faktor lainnya. Salah satu fakta dilapangan yaitu masih adanya

kendala dalam penyelesaian tugas mata kuliah, terutama dalam hal penggambaran dengan memanfaatkan program komputer. Program komputer grafis yang biasa digunakan dalam pengerjaan tugas mata kuliah yaitu program *Computer Aided Design (CAD)*, karena bisa dikerjakan dengan waktu yang cepat dan hasil yang akurat. Sehingga dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas mata kuliah.

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup Ilmu Ukur Tanah, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada Ilmu Ukur Tanah untuk kepentingan studi kelayakan, perencanaan, konstruksi dan operasional pekerjaan teknik sipil, setelah mengikuti perkuliahan Ilmu Ukur Tanah. Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman konsep teoritis terhadap elemen-elemen disain geometrik jalan raya seperti: mampu membuat rencana garis sumbu jalan/trase jalan raya berdasarkan gambar situasi topografi, merencana/menghitung elemen-elemen tikungan/ belokan jalan raya dan membuat gambar rencana alinyemen horizontal, vertikal. Selain itu mahasiswa juga diharapkan mampu memahami konsep teoritis terhadap bidang surveying yang meliputi: mencari panjang trase

rencana, mencari sudut jurusan, merencanakan dan menghitung staking out, menghitung volume galian dan timbunan tanah rencana geometrik jalan yang direncanakan setelah mengikuti perkuliahan Teknik Jalan Raya I. Program komputer grafis akan mempermudah dalam pengerjaan tugas yang harus di selesaikan dengan cepat dan tepat sehingga implementasi kompetensi bidang komputer grafis dan surveying diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, serta keterampilan mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dalam menyelesaikan tugas pada mata kuliah Teknik Jalan Raya I.

## **METODE**

Suatu penelitian diperlukan suatu metode atau cara penelitian guna pendekatan yang nantinya akan digunakan untuk memecahkan masalah. Adapun penelitian dilakukan dengan metode analitik korelatif tindakan pengembangan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan melalui pendekatan analitik dengan melihat hubungan sebelum dan setelah dilakukan tindakan dalam

pengembangan metode tertentu. Pengertian metode analitik korelatif tindakan pengembangan cocok digunakan dalam penelitian ini, karena sejalan dengan maksud dan tujuan penelitian, yaitu untuk memecahkan dan mengungkapkan permasalahan pada saat penelitian dilakukan, yaitu mengenai peningkatan pemahaman mahasiswa pada tugas terstruktur Teknik Jalan Raya I dengan implementasi kompetensi bidang komputer grafis dan surveying di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil FPTK-UPI. Teknik analisis data menggunakan analisis prosentase. Data yang ada dihitung frekuensinya kemudian diprosentasekan. Rumus prosentase yang digunakan :

$$P = \frac{f_0}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Prosentase

fo = frekuensi jawaban

N = jumlah responden

Setelah data diproses, maka data tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria pemahaman oleh Arikunto, (1997:354) :

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Pemahaman

PAP	Index	Kriteria
$0\% < X < 45\%$	0 % - 20 %	Tidak paham = E
$45\% < X < 55\%$	21 % - 40 %	Kurang paham = D
$55\% < X < 75\%$	41 % - 60 %	Cukup paham = C
$75\% < X < 85\%$	61 % - 80 %	paham = B
$> 85\%$	81 % - 100%	Sangat paham = A

Paired sample t-test digunakan untuk:

1. Membandingkan mean dari suatu sampel yang berpasangan (*paired*).
2. Sampel berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda.

Rumus paired sample t-test :

$$t = \frac{Md}{\sqrt{\frac{\sum x^2 d}{N(N-1)}}}$$

Ketentuan:

Md = mean dari perbesaan tes 1 dengan tes 2 (tes 2 – tes 1)

xd = deviasi masing-masing subjek (d - Md)

$\sum x^2 d$  = jumlah kuadrat deviasi

N = subjek pada sample

d.b. = ditentukan dengan N-1

Untuk menginterpretasi tingkat signifikansi, t hitung dibandingkan terhadap t tabel. Sebagai pembanding uji t-test *paired sample*, yaitu digunakan

perhitungan dengan menggunakan software SPSS 15.0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini pembelajaran berlangsung selama 8 kali pertemuan masing-masing 2 x 50 menit. Pembelajaran dilakukan diruangan kelas dengan pengajar peneliti sendiri. Pertemuan pertama, peneliti menjelaskan mengenai standar operasional prosedur dan diagram alir mengenai materi Jalan Raya I. Peneliti mencoba mengingatkan kembali mengenai materi pada Mata Kuliah Jalan Raya I mengenai Perencanaan dan Perhitungan Geometri Jalan Raya selama 4 x pertemuan. Pertemuan 5, 6, 7 dan 8 peneliti menjelaskan analisis pengembangan Grafis dan Surveying pada Tugas Jalan Raya I dengan menggunakan diagram alir, SOP, dan analisis berbantuan komputer dengan menggunakan program AutoCad (*audio visual*).

Hasil analisis terhadap hasil belajar mahasiswa menunjukkan adanya

peningkatan hasil belajar. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari perolehan nilai data dari pre-test, post-test dan post post-test. Adanya peningkatan pemahaman mahasiswa pada Mata Kuliah Jalan Raya I khususnya perencanaan dan perhitungan Jalan Raya I menunjukkan bahwa model pembelajaran SOP, diagram alir dan audio visual dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa. Dengan model pembelajaran tersebut mahasiswa lebih mudah mengingat serta kreativitas mahasiswa dapat berkembang.

#### **Tingkat Kesulitan Butir Soal**

Tingkat Kesulitan adalah tes tersebut dalam menjangkau banyaknya subjek peserta tes yang dapat mengerjakan dengan benar. Hasil perhitungan tingkat kesulitan (P) terdiri dari 120 butir soal obyektif.

#### **Tingkat Kesulitan Butir Soal Soal Pre Test**

Analisis tingkat kesulitan soal pre-test menggambarkan tingkat kesulitan soal yang bervariasi, masing-masing soal nomor 1 sampai dengan 120 memiliki tingkat soal sangat sulit (indeks kesulitan mulai dari 0%-20%) sebanyak 8 butir soal, soal sulit (indeks kesulitan mulai dari 21%-40%) sebanyak 17 butir soal, soal cukup sulit (indeks kesulitan mulai

dari 41%-60%) sebanyak 36 butir soal, soal mudah (indeks kesulitan mulai dari 61%-80%) sebanyak 18 butir soal dan soal sangat mudah (indeks kesulitan mulai dari 81%-100%) sebanyak 41 butir soal.

#### **Tingkat Kesulitan Butir Soal Post Test**

Analisis tingkat kesulitan soal post-test menggambarkan tingkat kesulitan soal yang bervariasi, masing-masing soal nomor 1 sampai dengan 120 memiliki tingkat soal sangat sulit (indeks kesulitan mulai dari 0%-20%) sebanyak 1 butir soal, soal sulit (indeks kesulitan mulai dari 21%-40%) sebanyak 16 butir soal, soal cukup sulit (indeks kesulitan mulai dari 41%-60%) sebanyak 38 butir soal, soal mudah (indeks kesulitan mulai dari 61%-80%) sebanyak 23 butir soal dan soal sangat mudah (indeks kesulitan mulai dari 81%-100%) sebanyak 42 butir soal.

#### **Tingkat Kesulitan Butir Soal Post Post Test**

Analisis tingkat kesulitan soal post post-test menggambarkan tingkat kesulitan soal yang bervariasi, masing-masing soal nomor 1 sampai dengan 120 memiliki tingkat soal sangat sulit (indeks kesulitan mulai dari 0%-20%) 1 butir



soal, soal sulit (kesulitan mulai dari 21%-40%) 10 butir soal, soal cukup sulit (kesulitan mulai dari 41%-60%) 33 butir soal, soal mudah (indeks kesulitan mulai dari 61%-80%) 33 butir soal dan soal sangat mudah (indeks kesulitan mulai dari 81%-100%) 43 butir soal.

### **Uji Daya Pembeda**

Uji daya pembeda tes adalah tes tersebut dalam memisahkan antara subjek yang pandai dengan subjek yang kurang pandai. Hasil perhitungan uji daya pembeda (DP) terdiri dari 120 butir soal obyektif.

### **Uji Daya Pembeda Butir Soal Pre Test**

Hasil analisis daya pembeda pre-test menggambarkan uji daya pembeda butir soal yang bervariasi, masing-masing soal nomor 1 sampai dengan 120 memiliki daya pembeda jelek (indeks daya pembeda mulai dari 0%-20%) 82 butir soal, cukup (daya pembeda mulai dari 21%-40%) 26 butir soal, baik (daya pembeda mulai dari 41%-70%) 11 butir soal dan baik sekali (daya pembeda mulai dari 71%-100%) 1 butir soal.

### **Uji Daya Pembeda Soal Post Test**

Hasil analisis daya pembeda post-test menggambarkan uji daya pembeda butir soal yang bervariasi, masing-masing soal nomor 1 sampai dengan 120 memiliki

daya pembeda jelek (indeks daya pembeda mulai dari 0%-20%) 83 butir soal, cukup (daya pembeda mulai dari 21%-40%) 29 butir soal dan baik (daya pembeda mulai dari 41%-70%) 8 butir.

### **Uji Daya Pembeda Soal Post Post Test**

Hasil analisis daya pembeda post post-test menggambarkan uji daya pembeda butir soal yang bervariasi, masing-masing soal nomor 1 sampai dengan 120 memiliki daya pembeda jelek (indeks daya pembeda mulai dari 0%-20%) 84 butir soal, cukup (daya pembeda mulai dari 21%-40%) 30 butir soal dan baik (daya pembeda mulai dari 41%-70%) 6 butir.

### **Tingkat Pemahaman pada Pre Test**

Nilai pre-test dan tingkat pemahaman menggambarkan tingkat pemahaman mahasiswa yang bervariasi, ada responden yang kurang paham = D (indeks pemahaman mulai dari 21%-40%) sebanyak 2 responden, cukup paham = C (indeks pemahaman mulai dari 41%-60%) sebanyak 22 responden, paham = B (indeks pemahaman mulai dari 61%-80%) sebanyak 38 responden dan sangat paham = A (indeks pemahaman mulai dari 81%-100%) sebanyak 4 responden.

### **Tingkat Pemahaman pada Post Test**

Nilai post-test dan tingkat pemahaman menggambarkan tingkat pemahaman mahasiswa yang bervariasi, ada responden yang kurang paham = D (indeks pemahaman mulai dari 21%-40%) sebanyak 1 responden, cukup paham = C (indeks pemahaman mulai dari 41%-60%) sebanyak 21 responden, paham = B (indeks pemahaman mulai dari 61%-80%) sebanyak 40 responden dan sangat paham = A (indeks pemahaman mulai dari 81%-100%) sebanyak 4 responden.

### **Tingkat Pemahaman pada Post Post Test**

Nilai post post-test dan tingkat pemahaman menggambarkan tingkat pemahaman mahasiswa yang bervariasi, ada responden yang cukup paham = C (indeks pemahaman mulai dari 41%-60%) sebanyak 7 responden, paham = B (indeks pemahaman mulai dari 61%-80%) sebanyak 52 responden dan sangat paham = A (indeks pemahaman mulai dari 81%-100%) sebanyak 7 responden.

### **Pembahasan**

Maksud dari pembahasan hasil penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam hasil dari perhitungan

yang berdasarkan pada teori maupun konsep yang relevan. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

### **Observasi**

Hasil pengamatan observasi selama delapan pertemuan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Teknik Jalan Raya I pada perencanaan dan perhitungan geometri jalan raya dengan model SOP (*Standard Operasional Prosedur*), diagram alir dan audio visual dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditinjau dari tingkat pemahaman, dengan model tersebut materi dapat lebih dipahami, lebih menarik, menyenangkan serta tidak membosankan karena analisis perencanaan dan perhitungan geometri jalan raya tidak terlalu sulit.

Aspek keterampilan dalam mengoperasikan *software* AutoCad pada umumnya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pre-tes, post-tes dan post post-tes, menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar mahasiswa mengenai perencanaan dan perhitungan geometri jalan raya.

### **Nilai Pre-Test Mahasiswa JPTS FPTK UPI Serta Tingkat Kesulitan Butir Soal Pre-Test Teknik Jalan Raya I**

Nilai pre-test Mahasiswa JPTS FPTK UPI sebanyak 66 mahasiswa pada

Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I sebelum diberi treatment adalah :

1. Mahasiswa yang sangat memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I dengan kriteria tingkat penguasaan  $\geq 85\%$  sebanyak 4 mahasiswa atau 6,06 %.
2. Mahasiswa yang memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I dengan kriteria tingkat penguasaan  $75 \leq x < 85\%$  sebanyak 38 mahasiswa atau 57,58%.
3. Mahasiswa yang cukup memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I dengan kriteria tingkat penguasaan  $55\% \leq x < 75\%$  sebanyak 22 mahasiswa atau 33,33 %.
4. Mahasiswa yang kurang memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I dengan kriteria tingkat penguasaan  $45\% \leq x < 55\%$  sebanyak 2 mahasiswa atau 3,03%.
5. Mahasiswa yang tidak memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I dengan kriteria tingkat penguasaan  $< 45\%$  sebanyak 0 mahasiswa atau 0 %.

Tingkat kesulitan soal pre-test Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I adalah :

1. Soal sangat sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab

benar  $0\% \leq x < 20\%$  sebanyak 8 soal atau 6,67 %.

2. Soal sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $20\% \leq x < 40\%$  sebanyak 17 soal atau 14,17 %.
3. Soal cukup sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $40\% \leq x < 60\%$  sebanyak 36 soal atau 30 %.
4. Soal mudah dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $60\% \leq x < 80\%$  sebanyak 18 soal atau 15 %.
5. Soal sangat mudah dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $80\% \leq x \leq 100\%$  sebanyak 41 soal atau 34,17 %.

#### **Nilai Post-Test Mahasiswa JPTS FPTK UPI Serta Tingkat Kesulitan Butir Soal Post-Test Teknik Jalan Raya I**

Nilai post-test mahasiswa JPTS FPTK UPI sebanyak 66 mahasiswa pada Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I setelah diberi treatment adalah :

1. Mahasiswa yang sangat memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I dengan kriteria tingkat penguasaan  $\geq 85\%$  sebanyak 4 mahasiswa atau 6,06 %.

2. Mahasiswa yang memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I dengan kriteria tingkat penguasaan  $75 \leq x < 85$  % sebanyak 40 mahasiswa atau 60,61 %.
3. Mahasiswa yang cukup memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I dengan kriteria tingkat penguasaan  $55 \% \leq x < 75$  % sebanyak 21 mahasiswa atau 31,82 %.
4. Mahasiswa yang kurang memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I dengan kriteria tingkat penguasaan  $45 \% \leq x < 55$  % sebanyak 1 mahasiswa atau 1,52%.
5. Mahasiswa yang tidak memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I dengan kriteria tingkat penguasaan  $< 45$  % sebanyak 0 mahasiswa atau 0 %.

Tingkat kesulitan soal post-test Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I adalah:

1. Soal sangat sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $0 \% \leq x < 20$  % sebanyak 1 soal atau 0,83 %.
2. Soal sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $20 \% \leq x < 40$  % sebanyak 16 soal atau 13,33 %.
3. Soal cukup sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $40 \% \leq x < 60$  % sebanyak 38 soal atau 31,67 %.
4. Soal mudah dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $60 \% \leq x < 80$  % sebanyak 16 soal atau 13,33 %.
5. Soal sangat mudah dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $80 \% \leq x \leq 100$  % sebanyak 1 soal atau 0,83 %.

#### **Nilai Post Post-Test Mahasiswa JPTS FPTK UPI Serta Tingkat Kesulitan Butir Soal Post Post-Test Teknik Jalan Raya I**

Nilai post post-test mahasiswa JPTS FPTK UPI sebanyak 66 mahasiswa pada Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I setelah diberi model diagram alir adalah:

1. Mahasiswa yang sangat memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I dengan kriteria tingkat penguasaan  $\geq 85$  % sebanyak 7 mahasiswa atau 10,61 %.
2. Mahasiswa yang memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I dengan kriteria tingkat penguasaan  $75 \leq x < 85$  % sebanyak 52 mahasiswa atau 78,79 %.
3. Mahasiswa yang cukup memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I

dengan kriteria tingkat penguasaan  $55\% \leq x < 75\%$  sebanyak 7 mahasiswa atau 10,61%.

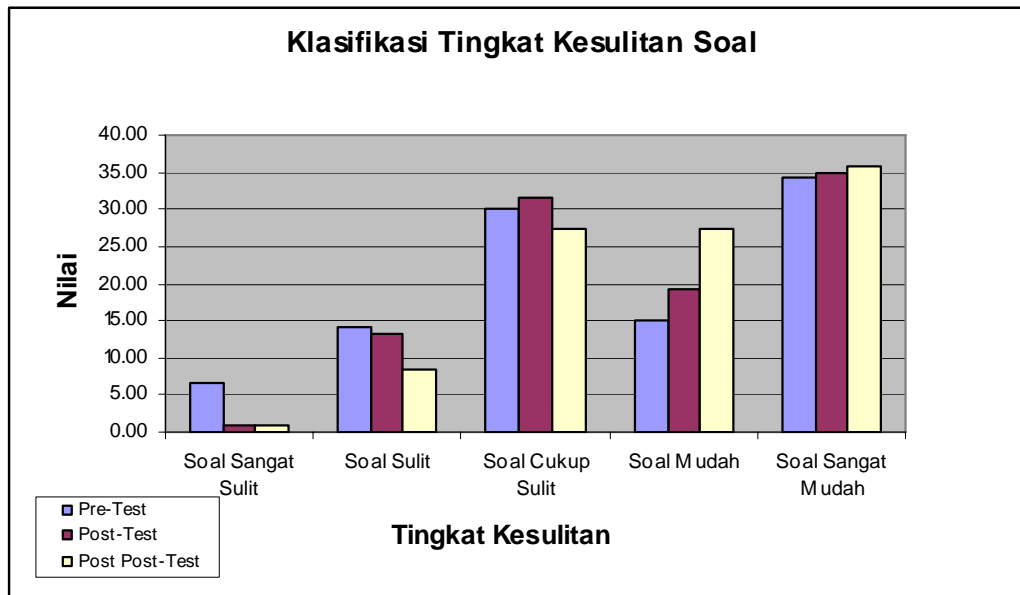
4. Mahasiswa yang kurang memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I dengan kriteria tingkat penguasaan  $45\% \leq x < 55\%$  sebanyak 0 mahasiswa atau 0%.
5. Mahasiswa yang tidak memahami Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I dengan kriteria tingkat penguasaan  $< 45\%$  sebanyak 0 mahasiswa atau 0%.

Tingkat kesulitan soal post post-test Mata Kuliah Teknik Jalan Raya I adalah :

1. Soal sangat sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab

benar  $0\% \leq x < 20\%$  sebanyak 1 soal atau 0,83%.

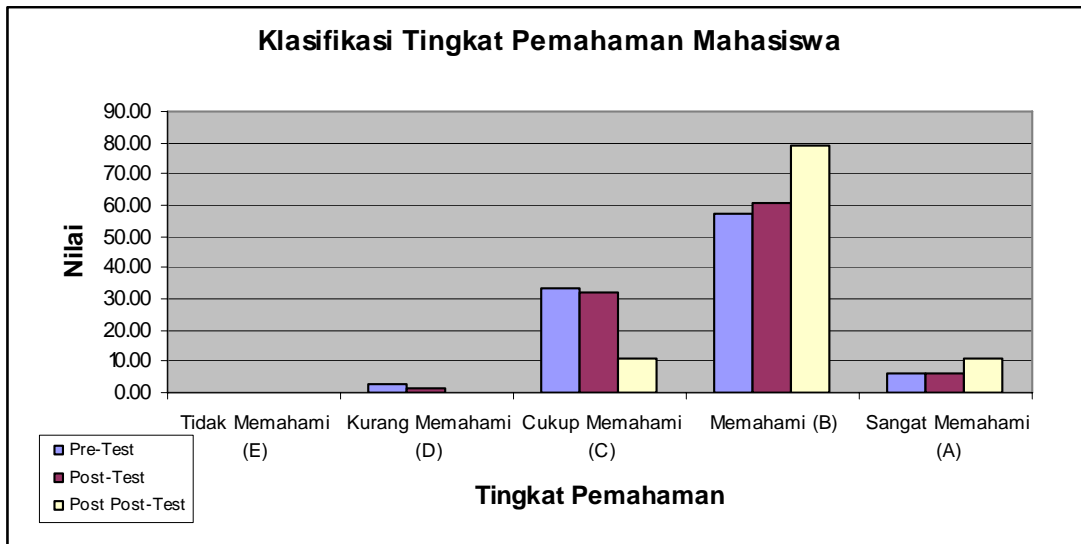
2. Soal sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $20\% \leq x < 40\%$  sebanyak 10 soal atau 8,33%.
3. Soal cukup sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $40\% \leq x < 60\%$  sebanyak 33 soal atau 27,50%.
4. Soal mudah dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $60\% \leq x < 80\%$  sebanyak 33 soal atau 27,50%.
5. Soal sangat mudah dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $80\% \leq x \leq 100\%$  sebanyak 43 soal atau 35,83%.



Gambar 1  
Grafik Tingkat Kesulitan Soal Pre-Test, Post- Tes dan Post Post-Test

Berdasarkan grafik di atas tingkat kesulitan soal pre-test untuk kategori sangat sulit 6,67 %, sulit 14,17 %, cukup sulit 30 %, mudah 15 % dan sangat mudah 34,17 %. Post-tes untuk kategori sangat sulit 0,83 %, sulit 13,33 %, cukup sulit 31,67 %, mudah 19,17 % dan sangat

mudah 35 %. Post post-tes untuk kategori sangat sulit 0,83 %, sulit 8,33 %, cukup sulit 27,50 %, mudah 27,50 %, dan sangat mudah 35,83 %. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesulitan soal mengalami peningkatan



Gambar 2  
Grafik Tingkat Pemahaman Mahasiswa Pre-Test, Post-Tes dan Post Post-Test

Berdasarkan grafik di atas tingkat pemahaman mahasiswa pada saat pre-test untuk kategori tidak memahami 0 %, kurang memahami 3,03 %, cukup memahami 33,33 %, memahami 57,58 % dan sangat memahami 6,06 %. Post-tes untuk kategori tidak memahami 0 %, kurang memahami 1,52 %, cukup memahami 31,82 %, memahami 60,61 % dan sangat memahami 6,06 %. Post post-tes untuk kategori tidak memahami 0 %,

kurang memahami 0 %, cukup memahami 10,61 %, memahami 78,79 % dan sangat memahami 10,61 %. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa pada pembelajaran teknik Jalan Raya I mengalami peningkatan.

Hasil dari pengolahan data dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 66 responden. Perhitungan hasil belajar mahasiswa terdapat perbedaan

yang sangat signifikan antara pre-test, post-test, dan post post-test. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari hasil belajar mahasiswa.

Untuk pembuktian hipotesis ini, peneliti menentukan dari peningkatan pemahaman yang diperoleh mahasiswa dari hasil pre-test, post-test, dan post post-test pada pembelajaran analisis pengembangan evaluasi lahan. Hasil pre-test mahasiswa pada pembelajaran Teknik Jalan Raya I yang mendapatkan nilai A berjumlah 4 responden atau 6,06 %, nilai B berjumlah 38 responden atau 57,58%, nilai C berjumlah 22 responden atau 33,33 % dan nilai D berjumlah 2 responden atau 3,03 %. Hasil belajar mahasiswa pada saat post-test yang mendapatkan nilai A berjumlah 4 responden atau 6,06 %, nilai B berjumlah 40 responden atau 60,61%, nilai C berjumlah 21 responden atau 31,82 % dan nilai D berjumlah 1 responden atau 1,52 %. Sedangkan hasil belajar mahasiswa pada saat post post-test yang mendapatkan nilai A berjumlah 7 responden atau 10,61 %, nilai B berjumlah 52 responden atau 78,79% dan nilai C berjumlah 7 responden atau 10,61 %.

Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman mahasiswa pada

tugas Jalan Raya I, setelah diberikan implementasi kompetensi komputer grafis dan surveying.

Dari hasil analisis tabel uji t-test terhadap hasil pre-test dan post-test maka dapat diambil kesimpulan bahwa, rata-rata hasil pre-test yaitu sebelum diberikan treatment pertama adalah 75,56, sedangkan rata-rata post-test yaitu setelah diberikan treatment pembelajaran model diagram alir dan SOP adalah 79,41, hasil dari kedua pembelajaran tersebut berbeda cukup jauh (signifikan). Sedangkan dari tabel uji t-test terhadap hasil post-test dan post post-test rata-rata hasil post-test yaitu sebelum diberikan treatment pertama adalah 79,41, sedangkan rata-rata post post-test yaitu setelah diberikan treatment pembelajaran model audio visual adalah 84,80, hasil dari kedua pembelajaran tersebut berbeda cukup jauh (signifikan).

Hasil analisis selain dapat diperoleh dari nilai rata-rata sampel, juga dapat diperoleh dari nilai t pada tabel paired sample t-test dengan perbandingan terhadap t tabel. Dari tabel uji t-test terhadap hasil pre-test dan post-test diperoleh nilai t hitung 29,207 sedangkan t tabel 1,995, karena t hitung > t tabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan karena  $t_{hitung}=29,207 > t$

tabel=1,995, maka hipotesis dapat diterima. Sedangkan tabel uji t-test terhadap hasil post-test dan post post-test diperoleh nilai t hitung 17,895 sedangkan t tabel 1,995, karena  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , maka terdapat perbedaan yang signifikan karena  $t \text{ hitung}=17,895 > t \text{ tabel}=1,995$ , maka hipotesis dapat diterima.

Dari hasil uji t-test bahwa nilai rata-rata hasil pre-test dan post-test berbeda cukup jauh, ini menandakan adanya peningkatan pemahaman pada mahasiswa, dilihat dari t hitung lebih besar dari t tabel artinya perbedaan antara pre-test dan post-test signifikan. Begitupun dengan hasil uji t-test pada perbandingan post-test dan post post-test, hasilnya mengalami peningkatan, baik dilihat dari rata-rata test maupun dilihat dari perbandingan hasil t hitung dan t tabel.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, beberapa temuan penelitian yang dapat disimpulkan berkenaan dengan tingkat pemahaman mahasiswa dalam menganalisis perencanaan dan perhitungan geometri jalan raya I, adalah sebagai berikut :

1. Implementasi standar operasi prosedur kompetensi komputer grafis dan surveying dapat mengakomodasi analisis pada perencanaan dan perhitungan geometri jalan raya I, serta dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa JPTS.
2. Implementasi model diagram alir menggunakan kompetensi komputer grafis dan surveying dapat mengakomodasi pada analisis perencanaan dan perhitungan geometri jalan raya I dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa JPTS secara praktis, sederhana, cepat dan tepat.
3. Implementasi model audio visual menggunakan kompetensi komputer grafis dan surveying dapat mengakomodasi pada analisis menganalisis perencanaan dan perhitungan geometri jalan raya I yang prosedural, praktis, cepat dan tepat dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa mahasiswa JPTS.
4. Kriteria keberhasilan yang dicapai dalam penelitian, yaitu :
  - a. Pemahaman mahasiswa terendah meningkat dari 25 % menjadi 45 % tercapai karena prestasi belajar mahasiswa terendah (pre-test) 30,83% menjadi 34,17 % (post-test) dan 50,83 % (post post-test).



- b. Pemahaman belajar mahasiswa tertinggi meningkat dari 70 % menjadi 80% tercapai karena prestasi belajar mahasiswa tertinggi (pre-test) 86,67 % menjadi 90 % (post-test) dan 93,33 % (post post-test).
  - c. Penilaian acuan patokan dapat berhasil diimplementasikan pada hasil belajar mahasiswa.
  - d. Jumlah mahasiswa yang diremedial kurang dari 15 % (< 23 orang) dengan tingkat penguasaan antara 45 % sampai dengan 55 % tercapai dalam jumlah mahasiswa yang diremedial yaitu dari 2 orang (pre-test) menjadi 2 orang (post-test) dan 0 orang (post post-test).
5. Uji hipotesis yang signifikan, hal ini dilihat dari hasil uji t-test bahwa nilai rata-rata hasil pre-test dan post-test berbeda cukup jauh, juga hasil uji t-test post-test dan post post-test berbeda cukup jauh, ini menandakan adanya peningkatan pemahaman pada mahasiswa, dilihat juga dari t hitung lebih besar dari t tabel artinya perbedaan antara pre-test dan post-test signifikan. Begitupun dengan hasil uji t-test pada perbandingan post-test dan post post-test, hasilnya mengalami peningkatan, baik dilihat dari rata-rata

test maupun dilihat dari perbandingan hasil t hitung dan t tabel.

### **Saran**

Mengacu pada temuan dan kesimpulan penelitian yang dijelaskan diatas, maka beberapa saran perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi standar operasi prosedur untuk menganalisis perencanaan dan perhitungan geometri jalan raya I, telah berhasil dan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam menganalisis pengembangan evaluasi lahan . Perlu dilakukan di masa yang akan datang agar beberapa kriteria keberhasilan penelitian pengembangan kegiatan pembelajaran Teknik Penyehatan dapat tercapai sepenuhnya.
2. Implementasi model diagram alir menggunakan kompetensi komputer grafis dan surveying dapat mengakomodasi pada analisis perencanaan dan perhitungan geometri jalan raya I, telah berhasil dan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam perencanaan geometrik jalan raya I. Perlu dilakukan di masa yang akan datang agar beberapa kriteria keberhasilan penelitian pengembangan kegiatan pembelajaran Jalan Raya I.

3. Implementasi audio visual menggunakan kompetensi komputer grafis dan surveying dapat mengakomodasi pada analisis perencanaan dan perhitungan geometri jalan raya I, telah berhasil dan dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa merencanakan geometrik jalan raya I. Perlu dilakukan di masa yang akan datang agar beberapa kriteria keberhasilan penelitian pengembangan kegiatan pembelajaran Jalan Taya I dapat tercapai sepenuhnya.

4. Kriteria keberhasilan yang dicapai dalam penelitian, yaitu :

a. Penilaian acuan patokan setelah implementasi model diagram alir pembelajaran menganalisis perencanaan dan perhitungan geometri jalan raya I selayaknya tetap digunakan agar kualitas tingkat pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah Jalan Raya I tetap dapat dipertahankan untuk masa-masa yang akan datang dengan kelompok mahasiswa pendidikan teknik sipil yang berbeda.

b. Kuantitas perbaikan tingkat pemahaman jumlah mahasiswa dalam mata kuliah Jalan Raya I

selayaknya jangan hanya dijadikan satu-satunya indikator tingkat keberhasilan pengembangan model diagram alir pembelajaran menganalisis perencanaan dan perhitungan geometri jalan raya I, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas perbaikan tingkat pemahaman para mahasiswa pendidikan teknik sipil dalam mata kuliah Jalan Raya I.

## DAFTAR RUJUKAN

Agus, S. (2002). *Geometrik Jalan Raya*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurusan Pendidikan Teknik Sipil FPTK UPI Bandung. (2007). *Kurikulum Jurusan Pendidikan Teknik Sipil FPTK UPI Bandung*. Bandung : UPI Bandung.

Hamalik, O. (1983). *Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar*. Bandung: Tarsito.

Kartawijaya E. S. (1987). *Pengukuran dan Hasil Evaluasi Belajar*. Bandung : CV Sinar Baru

Kartono, Kartini, (1990). *Psikologi Umum*, Jakarta : Mandar Maju.

Subana, M. dan Sudrajat. (2001). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Pustaka Setia.

Sudjana. (2002). *Metode Statistika*. Bandung : Penerbit Tarsito.

Sukardi. (2003). *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Bumi Aksara.

Surakhmad, W. (1998). *Interaksi Belajar Mengajar*. Jakarta: Badan Penerbit Prapantha.

Syamsudin Abin. (2002). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Tim Penyusun UPI, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2008.

<http://www.wikipedia.com>

*Abstrak*

**MEMBUMIKAN AYAT-AYAT MANAJEMEN  
MENUJU KEMANDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN**

**Disajikan dalam Seminar Nasional, Yogyakarta, Januari, 2012**

**Oleh: Nur Aedi, Dr, M.PD**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU  
2012**

## Abstrak

Nur Aedi, *Membumikan Ayat-Ayat Manajemen Menuju Kemandirian Satuan Pendidikan*. Perubahan paradigma sentralisasi menuju desentralisasi pendidikan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap satuan pendidikan, hal ini dirasakan oleh segenap civitas satuan pendidikan yang diarahkan pada pemenuhan berbagai standar, kompetensi serta penilaian kinerja berkelanjutan, dan atas desakan tersebut, maka lajimmya sebuah system yang terikat dengan berbagai kedinasan, maka para pembuat kebijakan pun serta merta mengikuti irama perubahan paradigma tersebut, walaupun dalam beberapa sisi terkesan dipaksakan. Tuntutan lain yang tidak kalah pentingnya adalah tuntutan kemandirian satuan pendidikan, dan jika dimaknai secara mikro kemandirian merupakan suatu system penyelenggaraan persekolahan dengan melibatkan pendidik, peserta didik, dan sarana pembelajaran yang sederhana sekalipun, namun dalam tatanan makro kemandirian harus dimaknai secara komprehensif. Artinya, keterlibatan internal dan eksternal sekolah sebagai suatu kemutlakan. Internal sekolah dihadapkan pada keterkaitan antara lain, kepemimpinan pendidikan, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan peserta didik, penataan sarana dan prasarana sekolah, system evaluasi yang profesional, serta pengambilan keputusan bersama warga sekolah. Adapun keterlibatan eksternal sekolah itu sendiri adalah bagaimana sekolah berkomunikasi dengan *stakeholders*, menemukan formula guna menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat, sehingga pada gilirannya sekolah mampu menjadi *centre of excellent* yang senantiasa diharapkan kehadirannya oleh masyarakat yang mampu mengarahkan peserta didik menjadi insan kamil sesuai dengan cita-cita dari kebanyakan elemen. Ketika dihadapkan pada pertanyaan yang sederhana, apa yang dimaksud dengan kemandirian, mengapa satuan pendidikan diarahkan pada kemandirian, apa saja elemen kemandirian tersebut, kapan kemandirian mampu diciptakan serta bagaimana praktek satuan pendidikan yang benar-benar mandiri?. Pertanyaan tersebut secara otomatis mengarah pada bidikan ilmu manajemen yang didalamnya terdiri dari sebuah system melekat yang sekaligus tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan secara parsial. Kenyataan yang terjadi dilapangan, secara konseptual manajemen tidak dihadapkan pada persoalan serius, hal ini salah satunya terlihat dari keminatan kepemimpinan satuan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni strata dua (S2) bahkan strata tiga (S3) dan terlepas dari sebuah tuntutan undang-undang yang mengatur atau sebuah tuntutan atau bahkan sebuah gengsi untuk menumuhkan rasa percaya diri, namun hal ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi satuan pendidikan. Namun permasalahan yang serius juga dihadapi setelah terpenuhinya sebuah strata pendidikan tertentu, dan terbukti tuntutan pun berubah dengan dalih melakukan perubahan jenjang karir sehingga memungkinkan untuk melakukan mutasi secara besar-besaran dan pada gilirannya satuan pendidikan pun tetap kehilangan sosok figur kepemimpinan yang mampu mengarahkan berbagai potensi yang dimilikinya. Ketika hal ini terjadi, maka suatu keniscayaan pengelolaan satuan pendidikan akan mengarah pada terciptanya kemandirian, dan solusi dari sebagian permasalahan diatas, maka jati diri pendidikan harus menjadi usungan pertama oleh berbagai kalangan dan jika hal ini mampu dimaknai secara utuh, maka rasanya kemandirian bukan sesuatu yang sulit bagi satuan pendidikan yang ditandai oleh penguasaan bidang manajemen oleh kepemimpinan, terselenggaranya system pendidikan yang profesional, dukungan keseriusan masyarakat sebagai *stakeholders* pendidikan, pengambilan kebijakan yang mampu mengakomodir warga sekolah, memiliki visi kepemimpinan yang jelas, penguatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta mampu mengkomunikasikan berbagai persoalan yang berkembang dalam satuan pendidikan sebagai sebuah peluang menciptakan kemandirian satuan pendidikan yang sesungguhnya.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Bidang Garapan Manajemen Pendidikan**

Bidang garapan manajerial satuan pendidikan sedikitnya menyentuh wilayah pengembangan kurikulum, kepemimpinan pendidikan, pemetaan sarana dan prasarana, pembenahan sumber daya, pembiayaan pendidikan serta pembenahan satuan pendidikan itu sendiri dari sisi konsep mutu. Kurikulum dapat diklasifikasikan atas dua jenis, yaitu kurikulum nasional sebagai standar pelayanan pembelajaran nasional, dan kurikulum lokal yaitu arah pemberian pembelajaran yang berlaku di lingkungan sekolah atas dasar kebutuhan wilayah. Berkaitan dengan kurikulum sebagai acuan, memuat sekurang-kurangnya mencakup: (1) susunan program, (2) materi pelajaran, (3) strategi belajar mengajar, (4) bahasa pengantar, (5) penilaian dan (6) bimbingan belajar dan bimbingan karir.

### **2. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Melihat isu untuk mengembangkan kemampuan sekolah dalam penyediaan fasilitas belajar siswa merupakan masalah yang kompleks karena sekolah dan daerah harus dapat memenuhi kebutuhan untuk siswa belajar, guru dan juga memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu konteks masalahnya juga terletak pada masyarakat secara keseluruhan, sekolah, dan pemerintah mengadakan itu semua. Isu berikutnya adalah bagaimana siswa dapat berprestasi baik dengan dukungan sarana yang ada merupakan masalah utama yang dihadapi sekolah. Menyangkut ini Oswal (1995) menyatakan ada dua hal utama yang menjadi focus dalam hal ini. Pertama bagaimana sekolah mendistribusikan sumber daya yang ada dan yang kedua bagaimana semua itu dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa.

Dari pemikiran tersebut, jelas bahwa dalam sistem pengelolaan sarana pendidikan terletak pada dua itu utama yakni bagaimana semua fasilitas itu diadakan dan hal ini sangat erat dengan kaidah-kaidah ekonomi. Dijelaskan Elhanan (1978) dalam sistem pengelolaan sumber daya tuntut pada dua kaidah dalam ilmu ekonomi yaitu (1) keterbatasan dan (2) keinginan. Di mana ekonomi hanya memusatkan perhatian pada sumber daya yang tersedia dalam jumlah yang terbatas dan jasa yang diinginkan. Ekonomi berhubungan dengan alokasi sumber daya di antara banyak pengguna. Hal berikut adalah bagaimana sumber daya sarana itu dapat dioptimalkan untuk kepentingan belajar siswa. Ini menyangkut efektifitas dan efisiensi dalam mendukung optimalisasi kegiatan pembelajaran. Namun demikian pemahaman kepala sekolah terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya tidak selalu relevan dalam tindakannya dalam pelaksanaan

tugas. Hatzel (2002) memberi contoh dari hasil penelitiannya tentang perhatian yang utama dari kepala sekolah adalah pencapaian hasil belajar siswa. Namun demikian menurut hasil penelitiannya begitu banyak pula kepala sekolah yang tidak memberdayakan potensi kepustakaan dalam mendukung keberhasilan itu. Meskipun mereka menyadari bahwa hal itu seharusnya menjadi perhatian utama.

Dewees (1999) menjelaskan bahwa reformasi pendidikan mempersyaratkan adanya pembaharuan pada akomodasi pola belajar dan mengajar seperti bertambahnya lapangan bermain siswa, ruang kelas, laboratorium, ruang serbaguna yang dapat memfasilitasi kegiatan kelompok kecil dan besar, sarana penunjang belajar seperti alat peraga, pusat multimedia dan berbagai variasi teknologi sebagai sumber daya. Salah satu bentuk reformasi yang paling memungkinkan sekolah lakukan adalah pembaharuan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemberdayaan multimedia dalam kegiatan belajar menjadi salah satunya. Proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi dikenal dengan istilah yang sangat populer yaitu “*e-learning*”. Istilah ini kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN atau Internet) untuk menyampaikan isi kandungan, interaksi ataupun pemudahcaraan. Internet, intranet, satelit, tape audio/video, TV interaktif dan CD ROM adalah sebahagian dari media elektronik yang dimaksudkan di dalam kategori ini. Pengajaran disampaikan secara “*synchronously*” (pada waktu yang sama) ataupun “*asynchronously*” (pada waktu yang berbeda). Bahkan pembelajaran disampaikan dalam bentuk teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video. Ia juga harus menyediakan kemudahan untuk “*discussion group*” dan bantuan profesional isi pelajaran yang berkaitan secara *online*.

Pemikiran tersebut, menegaskan ulang bahwa efektivitas pengadaan dan pemberdayaan pada akhirnya akan menekan dan meningkatkan kebutuhan anggaran. Dalam penyelenggaraan model MBS akan berakibat pada meningkatnya beban publik untuk menanggung biaya pendidikan. Persoalan ini idealnya sekoalh dapat menganekaragamkan sumber keuangan agar tidak hanya dibebankan pada orang tua siswa, namun berbagi dengan para pengusaha yang dapat menyumbang langsung dalam bentuk dana atau bantuan penyediaan fasilitas, serta dengan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 529/C/Kep/1993 tanggal 31 Desember 1993

Tentang Pembakuan Tipe Sekolah Menengah Umum yang bertujuan untuk memberikan arah pada pengembangan sekolah secara efisien dan efektif.

Pada bagian ini perlu diperhatikan pula petunjuk teknis administrasi Sekolah Menengah Umum yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995) yang masih relevan dengan sistem pengelolaan administrasi saat ini. Pemberdayaan seluruh perlengkapan yang ada di sekolah agar sesuai dengan fungsinya diperlukan pengamanan melalui sistem pengelolaan administrasi perlengkapan. Perlengkapan yang diadministrasikan mencakup semua barang yang diperlukan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku administrasi pengelolaan meliputi (1) perencanaan meliputi kebutuhan dan biaya (2) pengadaan (3) penyimpanan dan penyaluran (4) pengaturan tata letak dan pemberdayaan (5) pemeliharaan (6) inventarisasi atau pencatatan dan penghapusan.

### **3. Manajemen Sumber Daya**

Guna melakukan penataan sumber daya dimaknai sebagai pengembangan profesi dapat didefinisikan umum yakni pekerjaan yang berbasiskan pendidikan dan pengetahuan intelektual khusus tentang bagaimana mempersiapkan siswa belajar dengan menetapkan tujuan dan bagaimana dapat dicapai.

Khusus menyangkut guru, secara detail Undang-Undang Guru dan Dosen (2005) menjelaskan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kehidupan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Bab 3 pasal 7 menyatakan bahwa prinsip profesionalitas profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut.

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;



- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pada pasal 10 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah diperlukan inovasi juga penguatan harapan untuk dapat mencapai tujuan dibangun melalui fokus peningkatan efektifitas proses pembelajaran. Hal ini menjadi fokus utama pembahasan bersama dari kepala sekolah, staf, orang tua, dan komite sekolah. Dalam hal ini kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepiawaian seluruh *stake holders* merupakan kebutuhan yang sangat strategis. *North Central Regional Educational Laboratory* (1993) menyatakan beberapa penentu keberhasilan dari hasil studinya adalah semua unsur itu idealnya menjadi satu kesatuan tim pengembang, pengembang consensus, pengelola data, mengkreasi visi dan mengembangkan pedoman tim. Mereka semua membangun informasi yang lengkap tentang siswa, staf, fasilitas, pencapaian, dan data yang sistematis tentang pencapaian program pada tahun sebelumnya.

Pengembangan kemampuan profesi di sekolah menurutnya sangat terkait erat dengan kebutuhan pengembangan kebijakan yang berkenan dengan kebutuhan untuk (1) pengembangan visi, (2) kebutuhan siswa, (3) mewujudkan tujuan dan merealisasikan rencana kegiatan, (4) pengembangan rencana pembaharuan sekolah agar dapat diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan.

Lembaga itu pun menegaskan bahwa peran pengembangan profesi harus mengintegrasikan pengaturan waktu dengan inisiatif yang diprakarsai pemerintah pusat, lokal dan sekolah sebagai mini distrik. Semua pengaturan itu berimplikasi pada kepemimpinan kepala sekolah. Keseluruhan daya yang dikembangkan pada dasarnya untuk mendukung pembelajaran, menjadi dirijen dalam mengatur irama komunikasi organisasi, mempertajam proses pengelolaan manajemen, meningkatkan keterampilan, menjadi fasilitator, serta dapat meningkatkan pencapaian visi melalui penajaman pemahaman kultur sekolah.

Kemampuan profesional guru yang pekerjaannya berhadapan langsung dengan siswa merupakan unsur yang sangat strategis. Hal itu merupakan salah satu penentu keberhasilan.

Namun demikian, terdapat hal lain yang juga sama-sama menentukan, kemampuan profesional itu tidak ditetakkan sebagai kemampuan masing-masing individu, melainkan bagaimana dapat mendukung fungsi kepemimpinan sekolah yang efektif dalam bersinergi dalam bentuk tim.

Dinyatakan Oswal (1996) bahwa kerja sama tim memiliki banyak efek. Pertama dengan semakin banyak orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan maka peluang keputusan untuk mendapat dukungan dalam pelaksanaannya makin kuat. Kedua, dalam kerja sama tim proses belajar antar sesama anggota tim berproses, ketiga, sumber daya informasi yang menjadi bahan pertimbangan semakin bervariasi, dan keempat jika terjadi kekeliruan akan sesegera mungkin terkoreksi. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang dapat mendukung terselenggara organisasi secara profesional sekolah secara bertahap perlu memperhatikan sistem rekrutmen yang baik. Randall (1987) tujuan umum rekrutmen adalah untuk menyediakan orang-orang yang memiliki potensi sesuai dengan yang dibutuhkan dengan tujuan khususnya ialah (1) memenuhi kebutuhan organisasi pada masa sekarang dan akan datang dalam hubungannya dengan perencanaan sumber daya manusia dan analisis pekerjaan, (2) meningkatkan mutu orang berkualifikasi dengan biaya minimal, (3) meningkatkan rasio sukses dari proses seleksi dengan mengurangi jumlah orang yang tidak berkualitas atau terlalu berkualitas, (4) untuk membantu mengurangi kemungkinan pekerja setelah terseleksi akan meninggalkan organisasi hanya dalam waktu yang singkat, (5) untuk menemukan tanggung jawab organisasi dalam pelaksanaan program dan kewajiban legal dan sosial, (6) memulai mengidentifikasi dan menyiapkan calon pekerja potensial yang tepat untuk mendapatkan pekerjaan, (7) untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan individu untuk jangka pendek dan jangka panjang, (8) mengevaluasi efektivitas berbagai teknis dan lokasi tempat rekrutmen dari semua calon pekerja.

Dengan demikian rekrutmen berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, dan pendidikan-pelatihan. Sumber daya manusia dapat diperoleh melalui sumber daya internal dan eksternal. Sumber daya eksternal dapat diperoleh melalui iklan surat kabar, radio, televisi, penampung pelamar yang datang dengan sendirinya, melalui sekolah atau perguruan tinggi dan banyak cara lain seperti melalui bursa kerja. Selanjutnya potensi yang diperoleh melalui rekrutmen perlu mendapat perhatian lebih lanjut melalui penempatan pada tugas yang tepat, pembinaan yang berkelanjutan serta mendapat penghargaan melalui jenjang karir sesuai dengan prestasi yang dimilikinya.

#### 4. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Dalam sistem pengelolaan keuangan memiliki sifat yang sama dengan sistem pengelolaan keuangan dalam berbagai lembaga bisnis yang lain. Secara nyata dipastikan bahwa kendali yang efektif terhadap urusan finansial sekolah akan memberikan dampak pada perkembangan sekolah yang baik pula. Hal yang dikemukakan divisi Microsoft Business Solutions For Financial Management (2005) manajemen keuangan merupakan proses kendali terhadap pembiayaan, kendali dinamika tugas dan keterampilan, meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan sebagai balikan dari investasi. Secara empirik manajemen keuangan institusi pendidikan memerlukan infrastruktur yang cocok dengan keperluan administrasi, memonitor budget, jalur alokasi pembiayaan, dan laporan pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaan keuangan, terdapat istilah *bebefit cost* dan *cost effectiveness*. *Bebefit cost analysis* digunakan untuk membandingkan alternatif keuntungan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan nilai efisiensi relatif dalam menggunakan sumber daya pada beberapa program. Menurut Nanang Fatah (2000) anggaran pendidikan terdiri atas dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran dan penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan. Sementara untuk menganalisis pemanfaatan sumber keuangan sekolah dan hasil (*output*) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisis biaya satuan persiswa. Sebelumnya Crampton (1990) menyatakan bahwa sekolah akan berhasil mengendalikan manajemen jika sukses dalam menerapkan dua strategi besar. Pertama mempraktikkan manajemen keuangan secara efektif dan kedua mengendalikan keuangan secara efisien dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas anggaran, Klauke (1998) mencatat bahwa audit manajemen yang merupakan evaluasi secara menyeluruh terhadap efisiensi sumber daya dan efektivitas program harus dilakukan. Audit merupakan bentuk partisipasi secara tertutup dan praktis untuk melihat bagaimana lembaga dapat memenuhi standar. Audit dapat dilakukan terhadap stuktur organisasi, kurikulum, finansial, manajemen secara umum baik dala arti luas maupun dalam arti sempit. Seperti yang diungkapkan Klauke Menyitir catatan Tobyann Boonin and Paul Neuwirth (1983) menyatakan bahwa audit manajemen selalu diikuti dengan aksi-aksi berikut: Identifikasi tujuan manajemen, identifikasi fakta mutahir dan kondisi yang dapat merepleksikan tujuan, pendefinisian masalah dan identifikasi pengembangan peluang serta merefleksikan keberadaan komite.

Semua hasil itu pada akhirnya digunakan sebagai informasi berharga untuk mengembangkan anggaran tahun berikutnya. Lebih khusus Nanang (2000) menyatakan bahwa pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Melalui pengawasan diharapkan dapat diketahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber dana yang tersedia. Masalah pokoknya adalah sampai di mana tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan dengan realiasi anggaran. Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa administrasi keuangan sekolah pada meliputi penganggaran atau perencanaan bidang keuangan, accounting yang meliputi implementasi anggaran, dan auditing yang menjadi bagian dari evaluasi. Itu berarti bahwa perencanaan, pengalokasian dan evaluasi bidang keuangan harus tertuang dalam kebijakan khusus pada pengelolaan kebijakan lokal sekolah.

### **5. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah**

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesankeluwesannya kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Ada dua unsur utama dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai partisipan dan pelaku utama dalam upaya sekolah meningkatkan mutu, warga sekolah memperoleh kesempatan yang luas dan luwes untuk mengembangkan berbagai program sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan potensi yang dimilikinya, sedangkan masyarakat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati bersama antara warga sekolah dan masyarakat.

MPMBS merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah (MBS). Jika MBS bertujuan meningkatkan semua kinerja sekolah (efektivitas, kualitas/mutu, efisiensi, inovasi, relevansi, dan pemerataan serta akses pendidikan), maka MPMBS lebih difokuskan pada peningkatan mutu. MPMBS = otonomi sekolah + fasilitas+partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi mengandung pengertian; kewenangan/ kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka/ tidak bergantung. Fleksibilitas adalah keluwesankeluwesannya yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan menberdayakan

sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Peningkatan partisipasi adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dsb) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

## **B. PEMBAHASAN**

Peningkatan mutu sekolah melalui penerapan model MPMBS dalam pengelolaan bukan hanya sekedar sesuatu yang dicobakan karena kebetulan, akan tetapi ada sejumlah alasan yang memungkinkan model tersebut ditetapkan di sekolah-sekolah di Indonesia, alasan-alasan tersebut dapat diperinci diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia, alasan-alasan tersebut dapat diperinci sebagai berikut.

- a. Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah maka sekolah akan lebih inisiatif/kreatif dalam meningkatkan mutu sekolah;
- b. Dengan pemberian fleksibilitas/keluasan-keluasan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya, maka sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah;
- c. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya untuk memajukan sekolahnya;
- d. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik;
- e. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya;
- f. Penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat;
- g. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat;

- h. Sekolah dapat bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan;
- i. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat, dan;
- j. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

MPMBS bertujuan untuk mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepala sekolah, memberikan hak secara otonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, hal lainnya yang termasuk dalam tujuan MPMBS adalah :

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, kererbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia;
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengembalian keputusan bersama;
- c. Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; dan,
- d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah memiliki sejumlah karakteristik dalam implementasinya di sekolah, yaitu sebagai berikut. *Output* yang diharapkan *output* berupa prestasi akademik (*academic achievement*) dan *output* berupa prestasi non-akademik (*non-academic achievement*). Sedangkan dalam proses ditandai dari adanya PBM yang efektivitasnya tinggi; kepemimpinan sekolah yang kuat; lingkungan sekolah yang aman dan tertib; pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif; sekolah memiliki budaya mutu; sekolah memiliki *team work* yang kompak, cerdas, dan dinamis; sekolah memiliki kewenangan; partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat; sekolah memiliki ketebukaan (transparansi) manajemen; sekolah

memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan fisik); sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan; sekolah responsif dan inisiatif terhadap kebutuhan; Memiliki komunikasi yang baik; sekolah memiliki akutabilitas; sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas.

Sedangkan dilihat dari sisi input adalah sekolah mandiri ditandai dengan memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas; sumber daya tersedia dan siap; staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi; memiliki harapan prestasi yang tinggi; fokus pada pelanggan (khususnya siswa); dan input manajemen yang handal.

### **C. Kesimpulan**

Salah satu model pengembangan satuan pendidikan yang dianggap efektif terutama dalam bidang pendidikan dan pelatihan adalah pendekatan *critical event model*, pendekatan siklus, pendekatan sistem (Atmodiwirio, 2002: 65). Pendekatan *critical event model* ini diketengahkan oleh Leonard Nadler, terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut: mengidentifikasi kebutuhan organisasi, spesifikasi pelaksanaan pekerjaan, mengidentifikasi kebutuhan peserta, menentukan tujuan, memilih kurikulum, memilih strategi pembelajaran, mendapatkan sumber pembelajaran, melaksanakan diklat. Pendekatan siklus, tidak berbeda dengan pendekatan lainnya, hanya titik berat pada siklus yang diatur dari setiap kegiatan. Pendekatan sistem, suatu pendekatan analisis organisasi yang dipergunakan ciri-ciri sistem sebagai titik tolak analisis. Pendekatan sistem dilihat dari sudut pembelajaran cara yang sistematis mengidentifikasi, mengembangkan dan mengevaluasi dan mengevaluasi sekumpulan bahan dan strategi, bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang khusus. Akan tetapi menurut pendapat Flippo (1984: 220), “pengembangan eksekutif memerlukan kombinasi pengalaman, pelatihan dan pendidikan, dengan demikian memerlukan kerjasama antara organisasi-organisasi yang menempatkan tenaga dan berbagai macam usaha pendidikan swasta dan negeri”. Sehingga sebagus apapun model yang diterapkan akan menjadi sia-sia belaka

apabila tidak ada kerjasama didalamnya untuk mengimplementasikan model-model tersebut. Selain itu yang harus diperhatikan satuan pendidikan adalah setiap model memang secara sistemik sangat bermanfaat dalam mengenali adanya saling berhubungan antara bagian-bagian, akan tetapi model-model yang ada memerlukan pengenalan atas batas-batas dari sistem lembaga bersangkutan. Faktor lingkungan perlu menjadi bahan pertimbangan karena sistem itu kebanyakan bersifat terbuka, dalam arti dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Organisasi dan manusia merupakan sistem terbuka karena dipengaruhi oleh lingkungannya, demikian juga dengan manajemen sumber daya manusia. Akan tetapi pada intinya model apapun yang diterapkan oleh satuan pendidikan yang mengarah pada kemandirian adalah bagaimana membumikan ayat-ayat manajemen pendidikan menjadi suatu kebutuhan mendasar yang dapat diperhatikan serta dipraktikkan secara komprehensif dan diharapkan mengarah pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu membawa satuan pendidikan pada barisan terdepan persaingan global.



## Daftar Pustaka

- Ahmady, Abu. (1990). *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Sekolah*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ahmady, Zainal Arifin, 1993. *Kependidikan Akan Gagal Tanpa Guru yang Berkualitas*. Jakarta, Republika, h3
- Achmady, Zainal Arifin, 1995, "*Reformasi Administrasi Dalam Pendidikan : Beberapa Pelajaran Tentang Implementasi Kebijakan*", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Administrasi, Malang, Universitas Brawidjaja.
- Adair, John, 1984. *Menjadi Pemimpin Efektif*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Akbar, Purnomo Setiady, 1998, "*Alternatif Perubahan Pengembangan Guru di Indonesia*", dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan dan Kebudayaan*, Nomor 014/IV/September 1998, Jakarta : Balitbang Dikbud.
- Amir, YH, 2005, "*Kepemimpinan Pendidikan di Sekolah Swasta Berciri Khas Islam*", Disertasi, PPs-UPI.
- Anwar, Idochi, 1991, *Teori dan Ketrampilan Pengambilan Keputusan*. Bandung : Dananjaya Group.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Atmodiwirio, Soebagio, 2000, *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Ardadizya Jaya.
- Baker, A. P. & Xu, D, 1995, *The Measure of Education : A Review of The Tennessee Value Added Assesment System*. Nashville : Comptroller of The Treasure, Office of Education Accountability.
- Bart, Roland S., 1990, *Improving School From Withim Teachers, Parents, and Principals, Can Make the Difference*. San Francisco : Jossy – Bass, Inc. Publisher.
- Bernadin, H. J. & Russel, J. A. (1998). *Human Resources Management: An Experiential Approach*. New York: MacGraw-Hill Book Company.
- Blake, Robert R. dan Mouton, JS. 1978, *The New Managerial Grid*. Houston: Gulf.
- Blanchard, Paul dan Kenneth, (1994). *Manajemen Prilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia*. Edisi keempat (terjemahan Agus Darma) Jakrta: Erlangga.
- Brookover, W. B., Schweitzer, J. H., Schneider, J. M., Beady, C. H., Flood, P. K., & Weisenbaker, J. M., 1978, Elementary school social climate and school achievement. *American Educational Research Journal* (15), 301 – 318.

Burhanuddin, 1994, *Analisis Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan*, Jakarta : Bumi Aksara.

Castetter, William B. 1988, *The Personel Function in Educational Administration*. New York: Mc. Graw-H:II Book Company.

Castetter, William B. 1996. *The Humman Resourse Function in Ean Resourse Function in Educational Administration*. New Jersey: Merrill an imprint of Prentice Hall.

Davis, Gary A. & Thomas, Margaret A., 1989, *Effective Schools and Effective Teachers*. Massachusetts: Ally and Bacon



Name : Nur Aedi  
 Place, Date of Birth : Brebes, May 28<sup>th</sup>, 1972  
 Bidang Keahlian : Administrasi Pendidikan  
 Ressidance : Kompleks Pesona Cigugur No 2  
 Parongpong Bandung  
 e-mail : nurrohmatul@yahoo.com  
 HP 081572069472. 081573060691

#### EDUCATION

EDUCATION BACKGROUND&PLACE	TITLE	GRADUATED	BIDANG STUDI
SD		1984	
SLTP AL-ADHAR		1987	
PGAN SUKAMANAH		1990	IPA
SI KEPENDIDIKAN	DRS	1996	KEPENDIDIKAN
S2 ADM PENDIDIKAN	MPD	1999	KEBIJAKAN PENDIDIKAN
S3 ADM PENDIDIKAN	DR	2003	KEBIJAKAN PENDIDIKAN

#### ORGANIZATION EXPERIENCES

ORGANIZATION	JABATAN	YEARS
Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia	Anggota	1999
Kontak Tani Nelayan Unggul (KTNU)	Wakil Ketua	1999
Sentra Pemberdayaan Masyarakat Pantai	Ketua	1999
Yayasan Swadaya Masyarakat (Berintan)	Wakil Ketua	2000
Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (PMPP) Cirebon	Ketua	2000
Pusat Pemberdayaan Masyarakat (PENDAMAS)	Penggagas	2000
Pusat Pengembangan Pendamping Usaha Kecil Menengah (P3UKM)	Sekbid	2004
Koperasi Pasar (KOPAS)	Pendiri	2006
Rumah Singgah Anak Terlantar (RUSA)	Pendiri	2007

#### WORK EXPERIENCES

1. *Name of Job:* Studi Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan; *Lokasi:* Sumatra, *Duration:* September- Nopember 2005; *Name of Company:* Balitbang Depdiknas Jakarta dengan USU; *Position:* **Asisten Peneliti Ahli.**
2. *Name of Job:* **Tim Perumus Promosi Doktor Asia Tenggara**, *Location :* Jakarta; *Duration:* Tahun 2005
3. *Name of Job:* Pengembangan Sekolah Unggul di Lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah; *Lokasi:* Wilayah III Cirebon; *Duration:* Januari-Februari 2005, *Name of Company:* Perhimpunan Sekolah Swasta; *Position:* **Tim Ahli.**
4. *Name of Job:* Pengembangan Model SMK Salafiyah Berbasis ICT; *Location:* Brebes; *Duration:* Maret-Juli 2006; *Position:* **Tim Ahli**
5. *Name of Job:* Pembinaan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah dalam Wacana Desentralisasi Pendidikan; *Location* Wilayah III Cirebon; *Duration:* Mei-Juni 2006; *Position:* **Ahli Pelatihan**
6. *Name of Job:* Revitalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kemajemukan Standar Keberhasilan Belajar Siswa,Suatu Upaya Mengarahkan

# **PENGEMBANGAN EVALUASI LAHAN MENGGUNAKAN AUTODESKMAP UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA JPTS FPTK UPI PADA TEKNIK PENYEHATAN**

**Rina Marina Masri<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Pendidikan Teknologi dan kejuruan  
Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

## **Abstract :**

Learning the characteristics of the existing sanitation techniques, particularly regarding the land of individual tasks and group assignments predicted students still confusing because the presentation is complicated, long to be understood and still cause a variety of meanings. Data storage on land manually is very ineffective in today's modern era, it is necessary to process the practical work, quickly and carefully. Research evaluasi development land use to enhance students' understanding Autodeskmap JPTS FPTK UPI on restructuring techniques analytical methods performed by the correlative act of development, namely the research conducted to determine the conditions on the ground through the analytical approach by looking at relationships before and after the action in the development of specific methods.

*Key words: restructuring techniques, Autodeskmap, correlative analytics, research development.*

## **Abstrak**

Karakteristik pembelajaran teknik penyehatan yang telah ada, terutama mengenai lahan berupa tugas individual dan tugas kelompok diprediksi masih membingungkan para mahasiswa karena penyajiannya yang rumit, lama untuk dipahami dan masih menimbulkan berbagai macam makna. Penyimpanan data mengenai lahan secara manual sangatlah tidak efektif pada era modern saat ini, maka dibutuhkan proses kerja yang praktis, cepat dan cermat. Penelitian pengembangan evaluasi lahan menggunakan Autodeskmap untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa JPTS FPTK UPI pada teknik penyehatan dilakukan dengan metode analitik korelatif tindakan pengembangan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan melalui pendekatan analitik dengan melihat hubungan sebelum dan setelah dilakukan tindakan dalam pengembangan metode tertentu.

Kata-kata kunci : teknik penyehatan, Autodeskmap, analitik korelatif, penelitian pengembangan.

## LATAR BELAKANG

Pemberian tugas dalam perkuliahan adalah salah satu proses pembelajaran yang merupakan syarat dari kelulusan suatu mata kuliah. Pada proses pembelajaran dosen memberikan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan diharapkan mahasiswa mempunyai hasil belajar atau perubahan tingkah laku yang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap setelah melalui proses belajar, sebagai hasil pengalaman individu sesudah mengikuti proses perkuliahan.

Pada pemberian tugas perkuliahan, dosen memberikan instruksi untuk pengerjaan tugas dengan metode dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah yang diajarkan. Metode pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu proses pembelajaran.

Materi teknik penyehatan meliputi bahasan sanitasi dan hygiene; pencemaran udara, pencemaran air, aspek radiologi terhadap kesehatan, dan pemberantasan vektor penyakit; sumber-sumber air minum; sistem pengaliran air; sumber-sumber air limbah; pengolahan air limbah; teknis administrasi, teknis operasional, prasyarat dan prinsip kerja

pipa penyaluran, sumur resapan pusat pemompaan, dan peralatan pemeliharaan, penampungan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah; *sanitary land fill* dan *open dumping*; pemusnahan sampah dengan cara pengomposan dan incinerator; prasyarat merencanakan rumah sehat; sistem informasi geografis untuk kemampuan dan kesesuaian lahan bangunan-bangunan teknik sipil.

Tingkat kemandirian mahasiswa dibangun dengan sistem pembuatan makalah dari setiap materi yang akan dipelajari di setiap minggunya, yang diperiksa oleh 1 orang dosen pengampu bagi seluruh mahasiswa peserta mata kuliah Teknik Penyehatan. Bahan-bahan ajar berupa *handout*, diadakan oleh dosen pengajar agar mahasiswa memiliki acuan yang jelas.

Karakteristik pembelajaran teknik penyehatan yang telah ada, terutama mengenai lahan berupa tugas individual dan tugas kelompok diprediksi masih membingungkan para mahasiswa karena penyajiannya yang rumit, lama untuk dipahami dan masih menimbulkan berbagai macam makna. Penyimpanan data mengenai lahan secara manual sangatlah tidak efektif pada era modern

saat ini, maka dibutuhkan proses kerja yang praktis, cepat dan cermat.

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang ingin diperoleh atau ingin dicapai setelah proses penelitian atau sama dengan jawaban yang dikehendaki dalam problematika penelitian (Arikunto, 1996 : 49).

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan gambaran mengenai deskripsi standar operasi prosedur yang tepat untuk menjelaskan mengenai pengembangan evaluasi lahan sehingga dapat meningkatkan pemahaman, sikap dan keterampilan para mahasiswa teknik sipil.
2. Mendapatkan gambaran mengenai bentuk model diagram alir yang tepat untuk menjelaskan pengembangan evaluasi lahan sehingga dapat meningkatkan pemahaman, sikap dan keterampilan para mahasiswa teknik sipil secara praktis, sederhana, cepat dan tepat.
3. Mendapatkan bentuk pembelajaran audio visual yang tepat untuk menjelaskan mengenai pengembangan evaluasi lahan sehingga dapat meningkatkan pemahaman, sikap dan keterampilan

para mahasiswa Teknik Sipil secara praktis, sederhana, cepat dan tepat.

4. Mendapatkan gambaran hasil dari metode pembelajaran Teknik Penyehatan terhadap peningkatan keterampilan mahasiswa dalam pengembangan evaluasi lahan.

## **METODE**

Metode penelitian merupakan cara berfikir dan berbuat yang harus dipersiapkan dengan baik untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Surachman (1982 : 134), mengemukakan bahwa “metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan”. Berdasarkan batasan tersebut, jelaslah bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memahami suatu objek dalam suatu kegiatan penelitian. Penelitian pengembangan evaluasi lahan menggunakan Autodeskmep untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa JPTS FPTK UPI pada teknik penyehatan dilakukan dengan metode analitik korelatif tindakan pengembangan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan melalui pendekatan analitik dengan melihat hubungan sebelum dan setelah dilakukan tindakan dalam pengembangan metode tertentu.

Di dalam penelitian ini penulis mendapat data yang bersumber dari mahasiswa angkatan 2007 sebanyak 73 mahasiswa, di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil FPTK UPI dan observasi melalui survei lapangan dan data test sebelum, sesudah dan pengulangan tindakan dalam pengembangan metode tertentu.

Penelitian dilakukan di kampus Universitas Pendidikan Indonesia yang berlokasi di Jl. Setiabudhi Bandung. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil FPTK UPI yang mengikuti kuliah Teknik Penyehatan tahun 2008/2009 sebanyak 73 orang.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan teknik tes tertulis.

Instrumen penelitian untuk variabel model analisis evaluasi lahan berbantuan komputer dengan menggunakan teknik tes dan dokumentasi. Untuk melengkapi variabel digunakan teknik wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah. Kebenaran dan ketepatan data akan sangat

tergantung pada baik atau tidaknya instrumen pengumpulan data.

Paired sample t-test digunakan untuk:

1. Membandingkan mean dari suatu sampel yang berpasangan (*paired*).
2. Sampel berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda.

Rumus paired sample t-test :

$$t = \frac{Md}{\sqrt{\frac{\sum x^2 d}{N(N-1)}}}$$

Ketentuan:

- Md = mean dari perbesaan tes 1  
dengan tes 2 (tes 2 – tes 1)
- xd = deviasi masing-masing subjek  
(d – Md)
- $\sum x^2 d$  = jumlah kuadrat deviasi
- N = subjek pada sample
- d.b. = ditentukan dengan N-1

Untuk menginterpretasi tingkat signifikansi, t hitung dibandingkan terhadap t tabel. Sebagai pembanding uji t-test *paired sample*, yaitu digunakan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 15.0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan observasi selama delapan pertemuan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Teknik Penyehatan pada materi analisis pengembangan evaluasi lahan dengan model SOP (*Standard Operasional Prosedur*), diagram alir dan audio visual dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditinjau dari tingkat pemahaman, dengan model tersebut materi dapat lebih dipahami, lebih menarik, menyenangkan serta tidak membosankan karena analisis pengembangan evaluasi lahan tidak terlalu sulit.

Aspek keterampilan dalam mengoperasikan *software* AotudeskMap pada umumnya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pre-tes, post-tes dan post-post-tes, menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar mahasiswa mengenai analisis pengembangan evaluasi lahan.

### **Nilai Pre-Test Mahasiswa JPTS FPTK UPI Serta Tingkat Kesulitan Butir Soal Pre-Test Teknik penyehatan**

Nilai pre-test Mahasiswa JPTS FPTK UPI sebanyak 68 mahasiswa pada Mata Kuliah Teknik Penyehatan sebelum diberi treatment adalah :

1. Mahasiswa yang sangat memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $\geq 85\%$  sebanyak 0 mahasiswa atau 0 %.
2. Mahasiswa yang memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $75 \leq x < 85\%$  sebanyak 0 mahasiswa atau 0%.
3. Mahasiswa yang cukup memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $55\% \leq x < 75\%$  sebanyak 11 mahasiswa atau 16,8 %.
4. Mahasiswa yang kurang memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $45\% \leq x < 55\%$  sebanyak 33 mahasiswa atau 48,53 %.
5. Mahasiswa yang tidak memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $< 45\%$  sebanyak 24 mahasiswa atau 35,29 %.

Tingkat kesulitan soal pre-test Mata Kuliah Teknik Penyehatan adalah :

1. Soal sangat sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $0\% \leq x < 20\%$  sebanyak 16 soal atau 26,67 %.
2. Soal sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar 20



- $0\% \leq x < 40\%$  sebanyak 9 soal atau 15 %.
3. Soal cukup sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $40\% \leq x < 60\%$  sebanyak 12 soal atau 20 %.
  4. Soal mudah dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $60\% \leq x < 80\%$  sebanyak 16 soal atau 26,67 %.
  5. Soal sangat mudah dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $80\% \leq x \leq 100\%$  sebanyak 7 soal atau 11,67 %.
- 85 % sebanyak 0 mahasiswa atau 0 %.
3. Mahasiswa yang cukup memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $55\% \leq x < 75\%$  sebanyak 43 mahasiswa atau 63,24 %.
  4. Mahasiswa yang kurang memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $45\% \leq x < 55\%$  sebanyak 15 mahasiswa atau 22,06 %.
  5. Mahasiswa yang tidak memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $< 45\%$  sebanyak 10 mahasiswa atau 14,71 %.

**Nilai Post-Test Mahasiswa JPTS FPTK UPI Serta Tingkat Kesulitan Butir Soal Post-Test Teknik Penyehatan**

Nilai post-test mahasiswa JPTS FPTK UPI sebanyak 68 mahasiswa pada Mata Kuliah Teknik Penyehatan setelah diberi treatment adalah :

1. Mahasiswa yang sangat memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $\geq 85\%$  sebanyak 0 mahasiswa atau 0 %.
2. Mahasiswa yang memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $75\% \leq x <$

Tingkat kesulitan soal post-test Mata Kuliah Teknik Penyehatan adalah:

1. Soal sangat sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $0\% \leq x < 20\%$  sebanyak 5 soal atau 8,33 %.
2. Soal sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $20\% \leq x < 40\%$  sebanyak 10 soal atau 16,67 %.
3. Soal cukup sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $40\% \leq x < 60\%$  sebanyak 16 soal atau 26,67 %.

4. Soal mudah dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $60\% \leq x < 80\%$  sebanyak 16 soal atau 26,67 %.
5. Soal sangat mudah dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $80\% \leq x \leq 100\%$  sebanyak 13 soal atau 21,67 %.

**Nilai Post Post-Test Mahasiswa JPTS FPTK UPI Serta Tingkat Kesulitan Butir Soal Post Post-Test Teknik Penyehatan**

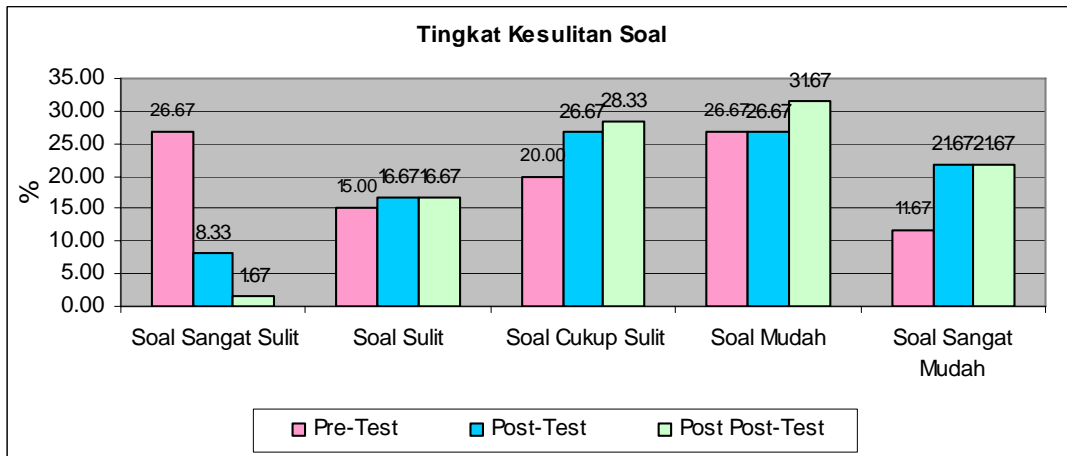
Nilai post post-test mahasiswa JPTS FPTK UPI sebanyak 68 mahasiswa pada Mata Kuliah Teknik Penyehatan setelah diberi model diagram alir adalah:

1. Mahasiswa yang sangat memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $\geq 85\%$  sebanyak 0 mahasiswa atau 0 %.
2. Mahasiswa yang memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $75 \leq x < 85\%$  sebanyak 2 mahasiswa atau 2,94 %.
3. Mahasiswa yang cukup memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $55\% \leq x < 75\%$  sebanyak 58 mahasiswa atau 85,29 %.

4. Mahasiswa yang kurang memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $45\% \leq x < 55\%$  sebanyak 8 mahasiswa atau 11,76%.
5. Mahasiswa yang tidak memahami Mata Kuliah Teknik Penyehatan dengan kriteria tingkat penguasaan  $< 45\%$  sebanyak 0 mahasiswa atau 0 %.

Tingkat kesulitan soal post post-test Mata Kuliah Teknik Penyehatan adalah :

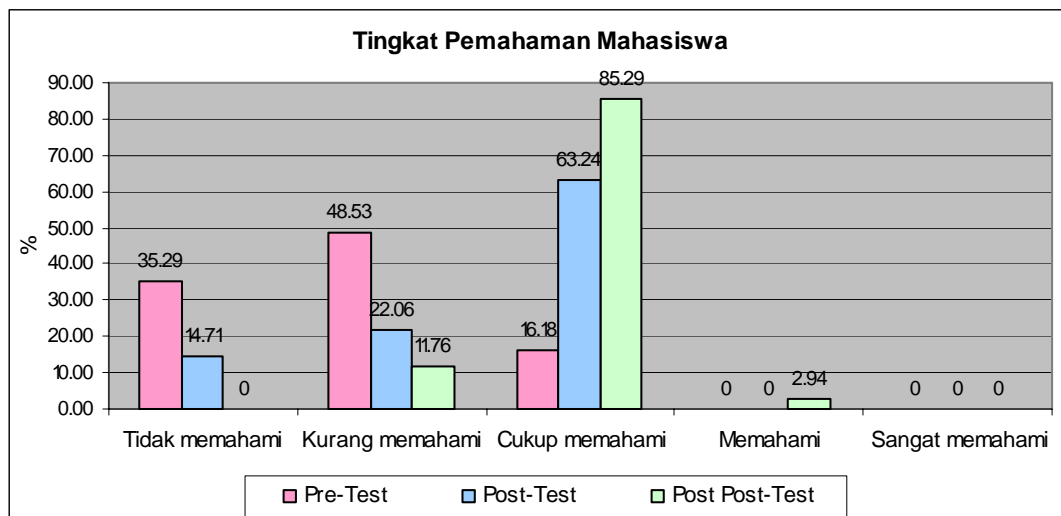
1. Soal sangat sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $0\% \leq x < 20\%$  sebanyak 1 soal atau 1,67 %.
2. Soal sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $20\% \leq x < 40\%$  sebanyak 10 soal atau 16,67 %.
3. Soal cukup sulit dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $40\% \leq x < 60\%$  sebanyak 17 soal atau 28,33 %.
4. Soal mudah dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $60\% \leq x < 80\%$  sebanyak 19 soal atau 31,67 %.
5. Soal sangat mudah dengan kriteria jumlah mahasiswa yang menjawab benar  $80\% \leq x \leq 100\%$  sebanyak 13 soal atau 21,67 %.



Gambar 1

Tingkat Kesulitan Soal Pre-Test, Post- Tes dan Post Post-Tes

Berdasarkan gambar di atas tingkat kesulitan soal pre-test untuk kategori sangat sulit 26,67 %, sulit 15 %, cukup sulit 20 %, mudah 26,67 % dan sangat mudah 11,67 %. Post-tes untuk kategori sangat sulit 8,33 %, sulit 16,67 %, cukup sulit 26,67 %, mudah 26,67 % dan sangat mudah 21,67 %. Post post-tes untuk kategori sangat sulit 1,07 %, sulit 16,67 %, cukup sulit 28,33 %, mudah 31,07 %, dan sangat mudah 21,67 %. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesulitan soal mengalami peningkatan.



Gambar 2

Tingkat Pemahaman Mahasiswa Pre-Test, Post-Tes dan Post Post-Test

Berdasarkan grafik di atas tingkat pemahaman mahasiswa pada saat pre-test untuk kategori tidak memahami 35,20 %, kurang memahami 48,53 %, cukup memahami 16,18 %, memahami 0 % dan sangat memahami 0 %. Post-tes untuk kategori tidak memahami 14,71 %, kurang memahami 22,06 %, cukup memahami 63,24 %, memahami 0 % dan sangat memahami 0 %. Post post-tes untuk kategori tidak memahami 0 %, kurang memahami 11,76 %, cukup memahami 85,29 %, memahami 2,94 % dan sangat memahami 0 %. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa pada pembelajaran analisis pengembangan evaluasi lahan mengalami peningkatan.

#### **Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test dengan Uji Paired Sample T-Test**

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rata-rata hasil pre-test yaitu sebelum diberikan treatment pertama adalah 28,18, sedangkan rata-rata post-test yaitu setelah diberikan treatment pembelajaran model diagram alir dan SOP adalah 33,43, dari hasil kedua pembelajaran tersebut berbeda cukup jauh (signifikan).

Hasil analisis selain dapat diperoleh dari nilai rata-rata sampel, juga dapat diperoleh dari nilai t pada tabel Paired Sample T test dengan perbandingan terhadap t tabel. Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung 8,781 sedangkan t tabel 1,998, karena t hitung > t tabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan karena  $8,781 > 1,998$ , maka hipotesis dapat diterima.

#### **Perbandingan Hasil Post-Test dan Post-Test dengan Uji Paired Sample T Test**

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik suatu kesimpulan. Rata-rata hasil post-test yaitu sebelum diberikan treatment pertama adalah 33,43, sedangkan rata-rata post post-test yaitu setelah diberikan treatment pembelajaran model audio visual adalah 36,93. hasil dari kedua pembelajaran tersebut berbeda cukup jauh (signifikan).

Hasil analisis selain dapat diperoleh dari nilai rata-rata sampel, juga

dapat diperoleh dari nilai  $t$  pada tabel Paired Sample T-test dengan perbandingan terhadap  $t$  tabel. Dari tabel di atas diperoleh nilai  $t$  hitung 12,831 sedangkan  $t$  tabel 1,998, karena  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan karena  $12,831 > 1,998$ , maka hipotesis dapat diterima.

Hasil dari pengolahan data dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 68 orang. Perhitungan hasil belajar mahasiswa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pre-test, post-test, dan post post-test. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari hasil belajar mahasiswa.

Untuk pembuktian hipotesis ini, yang peneliti menentukan dari peningkatan pemahaman yang diperoleh mahasiswa dari hasil pre-test, post-test, dan post post-test pada pembelajaran analisis pengembangan evaluasi lahan. Hasil pre-test mahasiswa pada pembelajaran analisis pengembangan

evaluasi lahan yang mendapatkan nilai C berjumlah 11 orang, nilai D berjumlah 33 orang dan nilai E yaitu 24 orang. Hasil belajar mahasiswa pada saat post-test yang mendapatkan nilai C yaitu 43 orang, nilai D yaitu 15 orang dan nilai E yaitu 10 orang. Sedangkan hasil belajar mahasiswa pada saat post post-test yang mendapatkan nilai B yaitu 2 orang dan nilai C yaitu 58 orang dan nilai D yaitu 8 orang. Sedangkan dari hasil uji T-test bahwa nilai rata-rata hasil pre-test dan post-test berbeda cukup jauh, ini menandakan adanya peningkatan pemahaman pada mahasiswa, dilihat dari  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel artinya perbedaan antara pre-test dan post-test signifikan. Begitupun dengan hasil uji T-test pada perbandingan post-test dan post post-test, hasilnya mengalami peningkatan, baik dilihat dari rata-rata test maupun dilihat dari perbandingan hasil  $t$  hitung dan  $t$  tabel.

Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman mahasiswa sebelum diberikan pembelajaran dengan model analisis struktur berbantuan komputer dan setelah diberikan pembelajaran model tersebut. Maka hipotesis dapat diterima.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, beberapa temuan penelitian yang dapat disimpulkan berkenaan dengan tingkat pemahaman mahasiswa dalam menganalisis pengembangan evaluasi lahan pada mata kuliah Teknik Penyehatan, adalah sebagai berikut :

1. Implementasi standar operasi prosedur yang tepat untuk menjelaskan analisis pengembangan evaluasi lahan pada pembelajaran Teknik Penyehatan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa JPTS.
2. Implementasi model diagram alir yang tepat untuk menjelaskan analisis pengembangan evaluasi lahan pada pembelajaran Teknik Penyehatan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa JPTS secara praktis, sederhana, cepat dan tepat.
3. Implementasi model audio visual yang tepat untuk menjelaskan analisis pengembangan evaluasi lahan pada pembelajaran Teknik Penyehatan yang prosedural, praktis, cepat dan tepat dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa mahasiswa JPTS dalam mata kuliah Teknik Penyehatan.
4. Kriteria keberhasilan yang dicapai dalam penelitian, yaitu :
  - a. Pemahaman mahasiswa terendah meningkat dari 25 % menjadi 45 % tercapai karena prestasi belajar mahasiswa terendah (pre-test) 18,33% menjadi 36,67 % (post-test) dan 50 % (post post-test). 132
  - b. Pemahaman belajar mahasiswa tertinggi meningkat dari 80 % menjadi 90% tercapai karena prestasi belajar mahasiswa tertinggi (pre-test) 66,67 % menjadi 70 % (post-test) dan 78,33 % (post post-test).
  - c. Penilaian acuan patokan dapat berhasil diimplementasikan pada hasil belajar mahasiswa.
  - d. Jumlah mahasiswa yang diremedial kurang dari 15 % (< 5 orang) dengan tingkat penguasaan antara 45 % sampai dengan 55 % tercapai dalam jumlah mahasiswa

yang diremedial yaitu dari 24 orang (pre-test) menjadi 10 orang (post-test) dan 0 orang (post post-test).

## **Saran**

Mengacu pada temuan dan kesimpulan penelitian yang dijelaskan diatas, maka beberapa saran perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi standar operasi prosedur untuk menjelaskan analisis pengembangan evaluasi lahan pada mata kuliah Teknik Penyehatan, telah berhasil dan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam menganalisis pengembangan evaluasi lahan . Perlu dilakukan di masa yang akan datang agar beberapa kriteria keberhasilan penelitian pengembangan kegiatan pembelajaran Teknik Penyehatan dapat tercapai sepenuhnya.
2. Implementasi model diagram alir yang tepat untuk menjelaskan analisis pengembangan evaluasi lahan pada mata kuliah Teknik Penyehatan, telah berhasil dan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam menganalisis pengembangan evaluasi lahan. Perlu dilakukan di masa yang akan datang agar beberapa kriteria keberhasilan penelitian pengembangan kegiatan pembelajaran Teknik Penyehatan dapat tercapai sepenuhnya.
3. Implementasi audio visual yang tepat untuk menjelaskan analisis pengembangan evaluasi lahan pada mata kuliah Teknik Penyehatan, telah berhasil dan dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa menganalisis pengembangan evaluasi lahan. Perlu dilakukan di masa yang akan datang agar beberapa kriteria keberhasilan penelitian pengembangan kegiatan pembelajaran Teknik Penyehatan dapat tercapai sepenuhnya.
4. Kriteria keberhasilan yang dicapai dalam penelitian, yaitu :
  - a. Penilaian acuan patokan setelah implementasi model diagram alir pembelajaran analisis pengembangan evaluasi lahan selayaknya tetap digunakan agar kualitas tingkat pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah Teknik Penyehatan tetap dapat dipertahankan untuk masa-masa yang akan datang dengan kelompok mahasiswa pendidikan teknik sipil yang berbeda.
  - b. Kuantitas perbaikan tingkat pemahaman jumlah mahasiswa dalam mata kuliah Teknik

Penyehatan selayaknya jangan hanya dijadikan satu-satunya indikator tingkat keberhasilan pengembangan model diagram alir pembelajaran analisis pengembangan evaluasi lahan, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas perbaikan tingkat pemahaman para mahasiswa pendidikan teknik sipil dalam mata kuliah Teknik Penyehatan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Hardjowigwno, Sarwono. (2007). *Ilmu Tanah*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Mardiyannah. (2005). *Evaluasi Kemampuan Lahan di Wilayah Kecamatan Karang AnyarKabupaten Pekalongan*. Semarang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. [Online].
- Masri, R. (2008). *Kajian Perubahan Lingkungan di Zona Buruk untuk Perumahan*. Disertasi Doktor pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor: tidak diterbitkan.
- Munir, Moch. (2006). *Geologi Lingkungan*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Notohadiprawiro Tejoyuwono. (1991) . *Kemampuan dan Kesesuaian Lahan: Pengertian dan Penetapannya*. Yogyakarta : Ilmu Tanah Universitas Gajah Mada. [Online].
- Sudjana, Nana. (1989). *Metode Statistika*. Bandung : Penerbit Tarsito.
- Suharsimi, Arikunto. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi. (2003). *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Bumi Aksara.
- Tim Penyusun UPI, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2008.